



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan disusun untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang memenuhi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (LKPJ Gubernur DIY) sebagai komitmen melaporkan akuntabilitas atas hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan tema pembangunan serta prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Substansi LKPJ merekam hasil pengukuran obyektif atas keberhasilan pembangunan dan mendokumentasikan kendala serta hambatan sebagai bahan evaluasi bagi penyusunan perencanaan strategis selanjutnya.

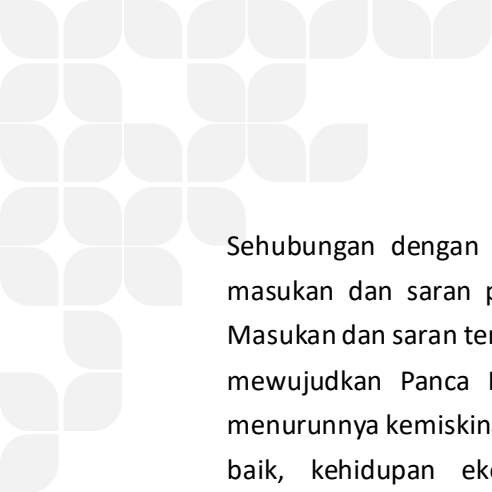
LKPJ Gubernur DIY Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan pembangunan daerah di DIY selama tahun 2022. Dokumen ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY) yang sesuai Undang-Undang memiliki tugas dan wewenang untuk meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. Dalam memenuhi ketentuan perundangan-undangan, penyusunan LKPJ Gubernur DIY Tahun 2022 ini menaati Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan

PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Permendagri tersebut, LKPJ Gubernur DIY Tahun 2022 akan berisi 1) hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; 2) hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Substansi LKPJ Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam bab-bab sebagai berikut: (1) Pendahuluan; (2) Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan dalam perubahan APBD; (3) Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah; (4) Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan; (5) Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY; (6) Program Strategis DIY; (7) Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah; dan (8) Penutup.

LKPJ Gubernur DIY Tahun 2022 menggambarkan hasil kinerja pelaksanaan APBD DIY pada Tahun Anggaran 2022 yang merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dan memperbaiki substansi pelaporan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur DIY Tahun 2017-2022 (LKPJ AMJ Gubernur DIY Tahun 2017-2022) yang telah disusun pada Semester I Tahun 2022. Penyusunan LKPJ AMJ tersebut disusun untuk memenuhi kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada Akhir Masa Jabatan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Patut disyukuri bersama bahwa sampai dengan akhir tahun 2022, Visi-Misi-Tujuan dari pembangunan RPJMD DIY 2017-2022 telah tercapai sesuai target. Namun demikian, masih terdapat tantangan/kendala yang harus dihadapi dan diperbaiki secara berkelanjutan atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda pada level sasaran, indikator Program Pemda, dan terhadap pelaksanaan urusan yang dilaksanakan Pemda DIY. Tidak dipungkiri, kendala atas pemenuhan target kinerja pembangunan daerah berasal dari dampak pandemi global Covid-19 yang menyeluruh di semua sendi kehidupan masyarakat sejak tahun 2020-2022. Pulihnya kondisi sosial ekonomi DIY dari dampak pandemi menuju transisi endemi pada akhir tahun 2022 diharapkan dapat menjadi optimisme Pemda DIY untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan DIY ke depan.



Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan laporan ini mendapatkan masukan dan saran perbaikan untuk rekomendasi pembangunan ke depan. Masukan dan saran tersebut diharapkan menjadi bagian upaya kolaboratif untuk mewujudkan Panca Mulia pada periode pembangunan berikutnya dengan menurunnya kemiskinan, SDM DIY yang berkualitas, lingkungan hidup yang lebih baik, kehidupan ekonomi yang layak, menurunnya ketimpangan, dan terwujudnya *good governance* di semua tingkatan termasuk pada Kalurahan.

Sekian, Terima Kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yogyakarta, Maret 2023

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL.....	XXIX
DAFTAR GAMBAR.....	LV
BAB 1. PENDAHULUAN	1-1
A. DASAR HUKUM	1-1
B. VISI DAN MISI JANGKA PANJANG.....	1-7
1. Visi Jangka Panjang.....	1-7
2. Misi Jangka Panjang	1-8
C. FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	1-9
1. Dasar Filosofi	1-9
2. Visi.....	1-11
3. Misi.....	1-14
4. Tujuan	1-16
5. Sasaran.....	1-17
D. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMD 2017-2022.....	1-18
1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017-2022	1-18
2. Program Pembangunan Pemerintah Daerah	1-23
3. Target Kinerja Program Pemda Tahun 2017-2022.....	1-26

E.	TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022	1-28
1.	Tema Pembangunan Tahun 2022	1-28
2.	Prioritas Pembangunan Tahun 2022	1-29
F.	Gambaran Umum Daerah	1-34
1.	Kondisi Geografis Daerah.....	1-34
a.	Batas Administrasi.....	1-34
b.	Luas Wilayah.....	1-35
c.	Topografi.....	1-35
2.	Gambaran Umum Demografi	1-37
a.	Jumlah Penduduk.....	1-37
b.	Pertumbuhan Penduduk.....	1-39
c.	Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan	1-40
1)	Penduduk Usia Kerja	1-40
2)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	1-41
3)	Angkatan Kerja.....	1-42
4)	Penduduk yang Bekerja	1-42
5)	Pengangguran Terbuka.....	1-43
d.	Pendidikan.....	1-45
e.	Kondisi Ekonomi Daerah.....	1-50
1)	Sektor Unggulan	1-50
2)	Pertumbuhan Ekonomi.....	1-63
3)	Inflasi	1-66
3.	Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan	1-67
a.	Gambaran Umum Birokrasi Pemda DIY.....	1-67
b.	Gambaran Kondisi ASN yang Dimiliki	1-70
c.	Ringkasan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Dalam APBD P 2022	1-72
1)	Penerimaan Pembiayaan	1-74
2)	Pengeluaran Pembiayaan	1-75

BAB 2. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PERUBAHAN APBD.....	2-1
A. PERUBAHAN TERHADAP KEGIATAN	2-1
B. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2-3
1. Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah	2-3
2. Target dan Realisasi Pendapatan.....	2-6
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2-7
1) Pajak Daerah.....	2-8
2) Hasil Retribusi Daerah	2-9
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	2-12
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	2-14
d. Pendapatan Transfer	2-15
e. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....	2-16
f. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH).....	2-17
g. Dana Alokasi Umum (DAU)	2-18
h. Dana Alokasi Khusus (DAK)	2-18
i. Dana Insentif Daerah (DID)	2-21
j. Dana Keistimewaan (DAIS).....	2-21
k. Pendapatan Transfer Antar Daerah	2-21
l. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2-22
1) Pendapatan Hibah.....	2-23
2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2-23
3. Permasalahan dan Solusi Terkait Pengelolaan Pendapatan	2-25
a. Permasalahan	2-25
b. Solusi	2-25

C.	PENGELOLAAN BELANJA DAERAH.....	2-26
1.	Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah	2-26
2.	Target dan Realisasi Belanja.....	2-30
	a. Belanja Operasi.....	2-33
	b. Belanja Modal.....	2-40
	c. Belanja Dana Keistimewaan.....	2-42
	d. Belanja Tak terduga.....	2-46
	e. Belanja Transfer.....	2-49
3.	Permasalahan dan Solusi	2-53
	a. Permasalahan	2-53
	b. Solusi	2-53
D.	PEMBIAYAAN DAERAH.....	2-53
1.	Kebijakan Pembiayaan Daerah	2-53
2.	Target dan Realisasi Pembiayaan.....	2-55
	a. Penerimaan Pembiayaan	2-55
	b. Pengeluaran Pembiayaan	2-55
E.	PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN	2-56
1.	Kinerja BUMD	2-56
	a. PT Bank BPD DIY	2-56
	b. PT Anindya Mitra Internasional (AMI).....	2-57
	c. PT Taru Martani.....	2-58
	d. Perumda Air Bersih Tirtatama DIY	2-60
	e. Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)	2-60
F.	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.....	2-62
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	2-62
	a. Dasar Hukum Pelaksanaan.....	2-62
	b. Tantangan dan Permasalahan.....	2-63
	c. Upaya-upaya yang Dilaksanakan	2-63
	d. Capaian	2-64

2.	Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemda DIY	2-65
3.	Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2-68
a.	Dasar dan Tujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	2-69
b.	Penghapusan Aset Tidak Bergerak.....	2-70
c.	Penghapusan Aset Bergerak	2-70
d.	Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah melalui Penjualan dan Lelang.....	2-71
e.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.....	2-74
f.	Pemusnahan Barang Milik Daerah.....	2-76
4.	Pendayagunaan Barang Daerah.....	2-77
a.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2-77
b.	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah.....	2-86
	1) Rehabilitasi Rumah Daerah.....	2-86
	2) Rehabilitasi Gedung Kantor.....	2-86
	3) Pembersihan Lahan.....	2-86
	4) Penjaminan Barang Milik Daerah	2-87

**BAB 3. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH..... 3-1**

A.	TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN PEMDA	3-1
1.	Angka <i>Inclusive Growth Index</i> (IGI)	3-1
2.	Indeks Reformasi Birokrasi.....	3-2
B.	TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMDA	3-4
1.	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM – Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	3-5
2.	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM – Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	3-10

3. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat – Indeks Gini	3-12
4. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat – Persentase Angka Kemiskinan.....	3-16
5. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan – Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi.....	3-18
6. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Pertumbuhan Ekonomi.....	3-20
7. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan – Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	3-22
8. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	3-25
9. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Capaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	3-30
10. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah – Indeks Williamson	3-34
11. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan – Opini BPK.....	3-36
12. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan – Nilai AKIP.....	3-38
13. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan – Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	3-40
14. Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa – Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan	3-44

C. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMDA	3-46
1. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan.....	3-48
a. Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	3-48
b. Harapan Lama Sekolah	3-49
c. Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif.....	3-51
d. Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju.....	3-53
2. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup, dengan indikator Angka Harapan Hidup.....	3-55
3. Program Pembangunan Sosial Masyarakat.....	3-58
a. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas.....	3-58
b. Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif	3-59
c. <i>Total Fertility Rate</i>	3-60
d. Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	3-61
e. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (<i>Crime Rate</i>)	3-62
4. Program Penanggulangan Kemiskinan	3-66
a. Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru	3-66
b. Jumlah Penduduk Miskin (Jumlah Penduduk Miskin (Pada Tahun n).....	3-67
c. Pengeluaran per Kapita Masyarakat.....	3-69

5.	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	3-70
a.	Persentase Peningkatan Budaya Benda yang Dilestarikan	3-70
b.	Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	3-72
6.	Program Pengembangan Sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan, Jasa)	3-73
a.	Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Perdagangan dalam PDRB DIY.....	3-73
1)	Sektor Pertanian	3-75
2)	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3-77
3)	Industri Pengolahan dan Perdagangan	3-81
b.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3-82
c.	Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima)	3-84
7.	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	3-90
a.	Indeks Kualitas Air (IKA).....	3-90
b.	Indeks Kualitas Udara (IKU).....	3-94
c.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).....	3-98
d.	Indeks Risiko Bencana	3-101
8.	Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang, dengan indikator Persentase Dukungan Program Pemda terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang	3-107

9.	Program Pengembangan Pusat Petumbuhan	3-113
a.	Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang Belum Maju (GK, KP, Bantul).....	3-113
b.	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi.....	3-114
10.	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah.....	3-118
a.	Kemampuan Keuangan Daerah	3-118
b.	Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY.....	3-121
c.	Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, Nilai Eksternal Persepsi Korupsi.....	3-123
11.	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah, dengan indikator Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan	3-126
12.	Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa, dengan indikator Persentase Fasilitasi Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	3-132
D.	PENGHARGAAN.....	3-135
E.	KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN	3-140
1.	Urusan Pemerintahan Wajib	3-140
a.	Urusan Terkait Dengan Pelayanan Dasar	3-140
1)	Urusan Pendidikan	3-140
2)	Urusan Kesehatan.....	3-174
3)	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	3-200
4)	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3-239

5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	3-248
6) Urusan Sosial.....	3-319
b. Urusan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	3-359
1) Urusan Tenaga Kerja	3-359
2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	3-380
3) Urusan Pangan.....	3-390
4) Urusan Pertanahan	3-400
5) Urusan Lingkungan Hidup.....	3-412
6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	3-427
7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	3-438
8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3-448
9) Urusan Perhubungan.....	3-455
10) Urusan Komunikasi dan Informatika.....	3-473
11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3-487
12) Urusan Penanaman Modal	3-515
13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga	3-531
14) Urusan Statistik.....	3-545
15) Urusan Persandian	3-556
16) Urusan Kebudayaan	3-566
17) Urusan Perpustakaan	3-595
18) Urusan Kearsipan.....	3-601
2. Urusan Pemerintahan Pilihan.....	3-606
a. Urusan Kelautan dan Perikanan	3-606
1) Kondisi Umum	3-606
2) Permasalahan dan Solusi.....	3-608
3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022.....	3-609

b.	Urusan Pariwisata	3-625
	1) Kondisi Umum	3-625
	2) Permasalahan dan Solusi	3-626
	3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022.....	3-628
c.	Urusan Pertanian	3-652
	1) Kondisi Umum	3-652
	2) Permasalahan dan Solusi	3-660
	3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022.....	3-660
d.	Urusan Kehutanan	3-670
	1) Kondisi Umum	3-670
	2) Permasalahan dan Solusi	3-672
	3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022.....	3-672
e.	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	3-677
	1) Kondisi Umum	3-677
	2) Permasalahan dan Solusi	3-680
	3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022.....	3-683
f.	Urusan Perdagangan	3-688
	1) Kondisi Umum	3-688
	2) Permasalahan dan Solusi	3-689
	3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022.....	3-690
g.	Urusan Perindustrian	3-694
	1) Kondisi Umum	3-694
	2) Permasalahan dan Solusi	3-695
	3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022.....	3-696

h.	Urusan Ketransmigrasian.....	3-711
	1) Kondisi Umum	3-711
	2) Permasalahan dan Solusi.....	3-713
	3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022.....	3-713
3.	Penunjang Urusan.....	3-716
a.	Perencanaan Pembangunan	3-716
	1) Kondisi Umum	3-716
	2) Permasalahan dan Solusi.....	3-717
	3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022.....	3-717
b.	Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan	3-738
	1) Kondisi Umum	3-738
	2) Permasalahan dan Solusi.....	3-744
	3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022.....	3-745
c.	Administrasi Keuangan Daerah	3-754
	1) Kondisi Umum	3-754
	2) Permasalahan dan Solusi.....	3-755
	3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022.....	3-757
d.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	3-773
	1) Kepegawaian	3-773
	2) Pendidikan dan Pelatihan	3-793
e.	Sekretariat Daerah	3-804
	1) Tata Pemerintahan.....	3-804
	2) Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum	3-819
	3) Fasilitasi Perekonomian dan SDA.....	3-837
	4) Fasilitasi Kesra	3-848
	5) Kelembagaan dan Tata Laksana	3-856

6)	Fasilitasi Administrasi Pembangunan.....	3-872
7)	Fasilitasi Umum, Kehumasan dan Protokol	3-885
8)	Fasilitasi Pemerintahan	3-895
f.	Pengawasan	3-905
1)	Kondisi Umum	3-905
2)	Permasalahan dan Solusi.....	3-910
3)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022.....	3-911
g.	Penelitian dan Pengembangan.....	3-917
1)	Kondisi Umum	3-917
2)	Permasalahan dan Solusi.....	3-919
3)	Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022.....	3-920
h.	Sekretaris Dewan.....	3-922
1)	Kondisi Umum	3-922
2)	Permasalahan dan Solusi.....	3-925
F.	KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	3-938
G.	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2021	3-964
1.	Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Dalam Perubahan APBD.....	3-964
2.	Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	3-966
3.	Kinerja Badan Usaha Milik Daerah.....	3-967
4.	Hasil Penyelenggaraan Urusan Menjadi Kewenangan Daerah	3-968
a.	Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah	3-968
b.	Kinerja Urusan Pemerintahan	3-971
1)	Urusan Wajib.....	3-971
2)	Urusan Pemerintah Pilihan	3-1008
3)	Penunjang Urusan.....	3-1025

4)	Capaian Kinerja Urusan Tugas Pembantuan ...	3-1027
5)	Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY ..	3-1028
5.	Program Strategis DIY.....	3-1031
a.	Penanggulangan Kemiskinan.....	3-1031
b.	Penanganan Covid-19.....	3-1032
c.	Kekerasan Remaja/Kejahatan di Jalan	3-1034
d.	Jogja Smart Province	3-1035
e.	Reformasi Birokrasi	3-1036
f.	Pelabuhan Tanjung Adikarta	3-1037
g.	Jogja Argo Park	3-1038
h.	Yogyakarta International Airport.....	3-1038
i.	Penataan Kawasan Sumbu Filosofi	3-1040
j.	Pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan	3-1041
k.	Pembangunan Taman Budaya Se-DIY	3-1042
l.	Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional RSUD Wates	3-1043
m.	Revitalisasi TPA Piyungan.....	3-1043
6.	Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	3-1045
a.	Kerja Sama Antar Daerah.....	3-1045
b.	Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah	3-1045
c.	Pembinaan Batas Daerah.....	3-1046
d.	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.....	3-1047
e.	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	3-1048
f.	Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya Yang Dilaksanakan Oleh Daerah	3-1049
1)	Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) DIY.....	3-1049
2)	PMI DIY	3-1049
3)	Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) DIY	3-1050
4)	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY.....	3-1050

5) Komisi Informasi DIY	3-1051
6) Trans Jogja.....	3-1051
7) Lembaga Ombudsman Daerah (LOD).....	3-1052
8) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) ..	3-1053
9) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY	3-1053
10) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).....	3-1054
11) Badan Pengawas Pemilihan Umum DIY.....	3-1054
H. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI.....	3-1055

BAB 4. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 4-1

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA	4-1
B. DASAR HUKUM	4-2
C. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	4-3
D. OPD YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN.....	4-3
1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	4-3
a. Satker Tanaman Pangan (049087)	4-4
b. Satker Hortikultura (049088)	4-4
c. Satker Perkebunan (049089).....	4-5
d. Satker Peternakan dan Kesehatan Hewan (049090).....	4-5
e. Satker Sarana dan Sarana Pertanian (049094).....	4-6
f. Permasalahan dan Solusi	4-6
1) Pemasalahan	4-6
2) Solusi	4-7
2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY.....	4-8
a. Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PUP-ESDM DIY	4-9
b. Pengelolaan Sumber Daya Air	4-11
c. Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan	4-14
d. Permasalahan dan Solusi.....	4-18
1) Permasalahan:.....	4-18
2) Solusi:	4-19

BAB 5. PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN DIY..... 5-1

- A. URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR. URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR..... 5-1
 - 1. Kondisi Umum 5-1
 - 2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022..... 5-2
 - 3. Permasalahan dan Solusi 5-3
 - a. Permasalahan 5-3
 - b. Solusi 5-4
- B. URUSAN KELEMBAGAAN..... 5-4
 - 1. Kondisi Umum 5-4
 - 2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022..... 5-5
 - 3. Permasalahan dan Solusi 5-10
 - a. Permasalahan:..... 5-10
 - b. Solusi: 5-11
- C. URUSAN KEBUDAYAAN..... 5-11
 - 1. Kondisi Umum 5-11
 - 2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022..... 5-12
 - a. BKK Kalurahan 5-18
 - 3. Permasalahan dan Solusi 5-28
 - a. Permasalahan:..... 5-28
 - b. Solusi: 5-28
- D. URUSAN PERTANAHAN..... 5-29
 - 1. Kondisi Umum 5-29
 - 2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022..... 5-29
 - a. BKK Pertanahan 5-30

3.	Permasalahan dan Solusi	5-31
a.	Permasalahan:.....	5-31
b.	Solusi:	5-31
E.	URUSAN TATA RUANG.....	5-32
1.	Kondisi Umum	5-32
2.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022.....	5-33
3.	Permasalahan dan Solusi	5-35
a.	Permasalahan:.....	5-35
b.	Solusi:	5-36
BAB 6.	PROGRAM STRATEGIS.....	6-1
A.	Penanganan Covid-19.....	6-1
1.	Latar Belakang	6-1
2.	Upaya Penanganan Covid-19.....	6-3
a.	Layanan <i>Hotline</i>	6-3
b.	Penanganan Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang terkonfirmasi positif Covid-19.....	6-3
c.	Layanan Permohonan rekomendasi kegiatan.....	6-4
d.	Pemberian Bantuan Sosial bagi Masyarakat terdampak pandemi Covid-19.....	6-4
e.	Pos Kesehatan	6-4
3.	Permasalahan dan Solusi	6-5
a.	Permasalahan	6-5
b.	Solusi	6-5
4.	Dinamika Kebijakan Penyelenggara Vaksinasi.....	6-6
B.	JOGJA SMART PROVINCE	6-6
1.	Latar Belakang	6-6
2.	Progres sampai dengan Akhir Tahun 2022	6-7

3.	Permasalahan dan Solusi	6-10
a.	Permasalahan	6-10
b.	Solusi	6-10
C.	REFORMASI BIROKRASI	6-11
1.	Latar Belakang	6-11
2.	Progres sampai dengan Akhir Tahun 2022	6-11
3.	Permasalahan dan Solusi	6-18
a.	Permasalahan	6-18
b.	Solusi:	6-18
D.	PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA.....	6-19
1.	Latar Belakang	6-19
2.	Progres sampai dengan Akhir Tahun 2022	6-20
3.	Permasalahan dan Solusi	6-20
a.	Permasalahan	6-20
b.	Solusi	6-20
E.	JOGJA AGRO PARK.....	6-21
1.	Latar Belakang	6-21
2.	Progress Sampai dengan Tahun 2022	6-22
3.	Permasalahan dan Solusi	6-22
a.	Permasalahan	6-22
b.	Solusi	6-22
F.	BANDARA YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT	6-23
1.	Latar Belakang	6-23
2.	Progres sampai dengan Tahun 2022	6-23
a.	Aerotropolis.....	6-24
b.	Akses Jalan	6-25
c.	Layanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Menuju Bandara	6-25
d.	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan.....	6-26

e.	VVIP Room	6-27
f.	SPAM Regional Kamijoro	6-27
3.	Permasalahan dan Solusi	6-28
a.	Permasalahan	6-28
b.	Solusi	6-29
G.	PENATAAN KAWASAN SUMBU FILOSOFI	6-29
1.	Latar Belakang	6-29
2.	Progres Sampai Dengan Tahun 2022	6-30
a.	Perencanaan Jogja <i>Planning Gallery</i>	6-30
b.	Pengelolaan Toilet Titik Nol	6-31
c.	Pemeliharaan Berkala Pedestrian Malioboro	6-32
d.	Pengadaan Tanah Akses Penghubung Tempat Parkiran Beskalan - Teras Malioboro 1.....	6-32
e.	Penataan dan Pengendalian Lalu Lintas di Kawasan Semi Pedestrian Malioboro.....	6-33
1)	Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas	6-33
2)	Pelestarian Moda Angkutan Tradisional.....	6-34
3)	Penyediaan Lahan Parkir	6-35
4)	Pengukuran Emisi Gas Buang Sektor Transportasi.....	6-35
3.	Permasalahan dan Solusi	6-36
a.	Permasalahan	6-36
b.	Solusi	6-36
H.	PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN	6-36
1.	Latar Belakang	6-36
2.	Progress Sampai dengan Tahun 2022	6-38
a.	Pembebasan Lahan untuk Segmen Garongan - Congot (Lanjutan; 8,89 km).....	6-39
b.	Pembebasan Lahan untuk Segmen Ngremang- Garongan	6-40

c.	Pembebasan Lahan Tambahan untuk Segmen Kretek - Girijati.....	6-40
d.	Pembebasan Lahan untuk Simpang Bundaran Planjan	6-40
3.	Permasalahan dan Solusi	6-41
a.	Permasalahan	6-41
b.	Solusi	6-42
I.	PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA SE DIY.....	6-42
1.	Latar Belakang	6-42
2.	Progres sampai dengan Tahun 2022	6-44
a.	Taman Budaya Yogyakarta.....	6-44
b.	Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo.....	6-45
c.	Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul	6-46
d.	Taman Budaya Kabupaten Sleman	6-47
e.	Taman Budaya Kabupaten Bantul.....	6-48
f.	Taman Budaya Kota Yogyakarta	6-51
3.	Permasalahan dan Solusi	6-51
a.	Permasalahan	6-51
b.	Solusi	6-52
J.	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT RSUD WATES DAN RSUD SAPTOSARI.....	6-52
1.	RSUD Wates.....	6-52
2.	RSUD Saptosari	6-53
K.	REVITALISASI TPA PIYUNGAN	6-56
1.	Latar Belakang	6-56
2.	Progress Sampai dengan Tahun 2022	6-57
3.	Permasalahan dan Solusi	6-59
a.	Permasalahan	6-59
b.	Solusi	6-60

L.	PENANGGULANGAN KEMISKINAN	6-61
1.	Latar Belakang	6-61
2.	Progres Sampai Dengan Tahun 2022	6-62
	a. Ulasan kegiatan penanggulangan kemiskinan di DIY	6-62
	b. Capaian Angka Kemiskinan pada tahun 2022	6-68
3.	Permasalahan dan Solusi	6-75
	a. Permasalahan	6-75
	b. Solusi	6-76

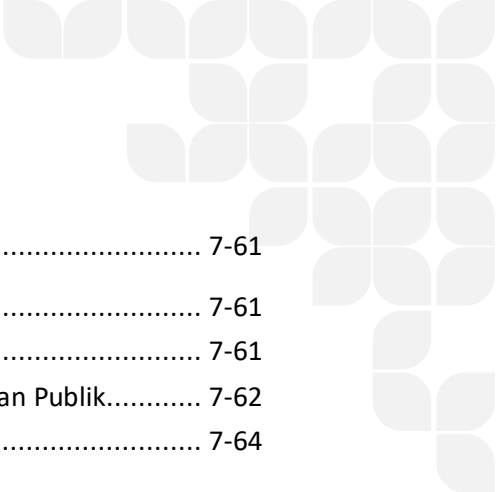
BAB 7. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH 7-1

A.	KERJA SAMA ANTAR DAERAH.....	7-1
1.	Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Pusat	7-1
	a. Sinergi Dengan Pemerintah Pusat	7-1
2.	Kerja Sama Antar-Daerah.....	7-3
	a. Daerah yang Melakukan Kerja Sama.....	7-3
	b. Bidang Kerja sama.....	7-5
	c. Mitra Praja Utama (MPU)	7-6
3.	Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	7-8
	a. Pihak Ketiga/Badan/Swasta yang telah bekerjasama	7-8
	b. Bidang Kerja Sama	7-10
4.	Permasalahan dan Solusi	7-10
	a. Permasalahan	7-10
	b. Solusi	7-11
B.	KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH	7-12
1.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	7-12
2.	Komite Intelijen Daerah (Kominda).....	7-13
3.	Permasalahan dan Solusi	7-15

a.	Forkopimda	7-15
1)	Permasalahan	7-15
2)	Solusi	7-15
b.	Kominda.....	7-15
1)	Permasalahan	7-15
2)	Solusi	7-16
C.	PEMBINAAN BATAS DAERAH.....	7-16
1.	Gambaran Umum.....	7-16
2.	Program dan Kegiatan Pembinaan Batas Wilayah.....	7-18
3.	Permasalahan dan Solusi	7-19
a.	Permasalahan	7-19
b.	Solusi	7-19
D.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	7-19
1.	Gambaran Umum.....	7-19
2.	Potensi Bencana.....	7-24
a.	Banjir	7-24
b.	Epidemi dan Wabah Penyakit	7-25
c.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	7-25
d.	Gempa Bumi.....	7-25
e.	Tsunami	7-25
f.	Kegagalan Teknologi.....	7-26
g.	Kekeringan	7-26
h.	Letusan Gunung Api.....	7-26
i.	Cuaca ekstrim	7-26
j.	Tanah Longsor	7-27
k.	Kebakaran Gedung dan Permukiman.....	7-27
l.	Konflik Sosial.....	7-27
3.	Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2018-2022	7-27

4.	Permasalahan dan Solusi	7-28
a.	Permasalahan	7-28
b.	Solusi	7-29
E.	PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7-30
1.	Gambaran Umum.....	7-30
2.	Permasalahan dan Solusi	7-32
a.	Permasalahan	7-32
b.	Solusi	7-33
F.	TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH.....	7-35
1.	Lembaga Ombudsman DAERAH DAERAH Istimewa Yogyakarta (LOD DIY).....	7-35
a.	Permasalahan dan Solusi pelayanan publik pada bidang pemerintahan dan badan usaha di DIY:	7-38
1)	Jasa.....	7-38
2)	Pendidikan.....	7-38
3)	Kesejahteraan.....	7-39
4)	Kuangan	7-39
5)	Ketenagakerjaan	7-40
b.	Rekomendasi.....	7-40
2.	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).....	7-41
a.	Narasi Umum.....	7-41
b.	Permasalahan dan Solusi	7-42
3.	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY.....	7-43
a.	Narasi Umum.....	7-43
b.	Permasalahan dan Solusi	7-44

4.	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).....	7-45
	a. Narasi Umum.....	7-45
	b. Permasalahan dan Solusi.....	7-48
5.	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).....	7-49
	a. Narasi Umum.....	7-49
	b. Permasalahan dan Solusi.....	7-51
6.	Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)	7-52
	a. Narasi Umum.....	7-52
	b. Permasalahan dan Solusi.....	7-53
	1) Permasalahan:.....	7-53
	2) Solusi:	7-53
7.	Palang Merah Indonesia (PMI)	7-53
	a. Narasi Umum.....	7-53
	b. Permasalahan dan Solusi.....	7-54
	1) Permasalahan.....	7-54
	2) Solusi	7-54
8.	Kinerja Tim Penggerak PKK	7-55
9.	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY.....	7-56
10.	Pemantauan Isi Siaran Televisi dan Radio.....	7-57
11.	Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).....	7-58
12.	DIY Pasca <i>Analog Switch Off</i> (ASO)	7-58
	a. Permasalahan dan Solusi:.....	7-60
	1) Permasalahan	7-60
	2) Solusi:	7-60



13. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).....	7-61
a. Narasi Umum.....	7-61
b. Penyelesaian Sengketa Informasi	7-61
c. Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik.....	7-62
d. Permasalahan dan Solusi	7-64
BAB 8. PENUTUP.....	8-1

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Tujuan yang Hendak Dicapai.....	1-17
Tabel 1.2.	Sasaran Pembangunan DIY	1-17
Tabel 1.3.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2017-2022	1-19
Tabel 1.4.	Rumusan Prioritas Daerah DIY Tahun 2022 pada Sasaran Pembangunan Daerah DIY 2017-2022	1-30
Tabel 1.5.	Interkoneksi Prioritas Daerah DIY Tahun 2022 dengan Prioritas Nasional Tahun 2022	1-32
Tabel 1.6.	Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota.....	1-34
Tabel 1.7.	Jumlah Penduduk DIY Semester II Tahun 2022 Menurut Wilayah Administrasi Pemerintahan.....	1-38
Tabel 1.8.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2022.....	1-39
Tabel 1.9.	Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan DIY Tahun 2018-2022	1-40
Tabel 1.10.	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY Tahun 2022	1-45
Tabel 1.11.	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal di DIY Tahun 2022.....	1-47
Tabel 1.12.	Jumlah Guru di DIY Tahun 2022	1-47
Tabel 1.13.	Angka Putus Sekolah Tahun 2022.....	1-49
Tabel 1.14.	Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan di DIY Tahun 2018-2022.....	1-50
Tabel 1.15.	Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang dan Non Bintang di DIY Tahun 2018-2022.....	1-52

Tabel 1.16.	PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2022	1-54
Tabel 1.17.	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan Tahun 2021-2022**	1-55
Tabel 1.18.	Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2021-2022	1-59
Tabel 1.19.	Produksi Komoditas Perkebunan Unggulan DIY Tahun 2021-2022**	1-59
Tabel 1.20.	Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2021-2022*	1-60
Tabel 1.21.	Target dan Realisasi Produksi Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2018-2022.....	1-61
Tabel 1.22.	Realisasi Kunjungan Wisata Oleh Koperasi Notowono Tahun 2020-2022.....	1-63
Tabel 1.23.	Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)	1-64
Tabel 1.24.	Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022	1-65
Tabel 1.25.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2018-2022.....	1-65
Tabel 1.26.	Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2022.....	1-66
Tabel 1.27.	Data Pilah Pegawai Pemda DIY Tahun 2017-2022 (Berdasarkan Golongan).....	1-71
Tabel 1.28.	Data Pilah Pegawai Pemda DIY Tahun 2017-2022 (Berdasarkan Pendidikan).....	1-71
Tabel 1.29.	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 (<i>Unaudited</i>).....	1-72
Tabel 1.30.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (<i>Unaudited</i>)	1-73

Tabel 1.31.	Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 (<i>Unaudited</i>).....	1-75
Tabel 2.1.	Komposisi Pendapatan Pemda DIY Tahun 2022 (<i>Unaudited</i>)	2-6
Tabel 2.2.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2022 (<i>Unaudited</i>)	2-7
Tabel 2.3.	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah DIY Tahun 2022 (<i>Unaudited</i>)	2-8
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun 2022 (<i>Unaudited</i>)	2-10
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan DIY Tahun 2022 (<i>Unaudited</i>)	2-13
Tabel 2.6.	Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah DIY Tahun 2022 (<i>Unaudited</i>).....	2-15
Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer DIY Tahun Anggaran 2022 (<i>Unaudited</i>).....	2-16
Tabel 2.8.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat DIY Tahun 2022 (<i>Unaudited</i>)	2-17
Tabel 2.9.	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil tahun anggaran 2022 (<i>Unaudited</i>).....	2-18
Tabel 2.10.	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik DIY Tahun 2022 (<i>Unaudited</i>).....	2-19
Tabel 2.11.	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik DIY tahun anggaran 2022 (<i>Unaudited</i>)	2-20
Tabel 2.12.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022 (<i>Unaudited</i>)	2-22
Tabel 2.13.	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah DIY tahun anggaran 2022 (<i>Unaudited</i>).....	2-22

Tabel 2.14.	Data Likuidasi Yayasan KP3 DIY Februari-Desember Tahun 2022	2-24
Tabel 2.15.	Anggaran dan Realisasi Belanja menurut OPD DIY tahun anggaran 2022 (<i>Unaudited</i>)	2-31
Tabel 2.16.	Realisasi Belanja DIY Tahun 2022 (<i>Unaudited</i>).....	2-32
Tabel 2.17.	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi DIY Tahun Anggaran 2022 (<i>Unaudited</i>).....	2-33
Tabel 2.18.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai DIY Tahun 2022 (<i>Unaudited</i>)	2-34
Tabel 2.19.	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa DIY Tahun 2022 (<i>Unaudited</i>).....	2-35
Tabel 2.20.	Realisasi Belanja Hibah dalam Bentuk Uang Tahun Anggaran 2022 (<i>Unaudited</i>).....	2-38
Tabel 2.21.	Realisasi Belanja Hibah dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran 2022 (<i>Unaudited</i>).....	2-38
Tabel 2.22.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang Tahun 2022 (<i>Unaudited</i>).....	2-40
Tabel 2.23.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang Tahun 2022 (<i>Unaudited</i>)	2-40
Tabel 2.24.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal DIY Tahun 2022 (<i>Unaudited</i>)	2-41
Tabel 2.25.	Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2022 (<i>Unaudited</i>).....	2-43
Tabel 2.26.	Rincian SP2D Belanja Tak Terduga 2022 Penanganan Covid-19 (<i>Unaudited</i>)	2-48
Tabel 2.27.	Rincian SP2D dan SPJ Belanja Tak Terduga 2022 (<i>Unaudited</i>)	2-49

Tabel 2.28.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota DIY Tahun 2022 (<i>Audited</i>).....	2-50
Tabel 2.29.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota DIY Tahun 2022 (<i>Unaudited</i>)	2-51
Tabel 2.30.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa DIY Tahun 2022 (<i>Unaudited</i>).....	2-52
Tabel 2.31.	Realisasi Dividen PT Bank BPD DIY TA 2018-2022	2-56
Tabel 2.32.	Realisasi Pembagian Dividen kepada Pemda DIY oleh PT Anindya Mitra Internasional (AMI) TA 2018-2022	2-58
Tabel 2.33.	Realisasi PT Taru Martani TA 2018-2022.....	2-59
Tabel 2.34.	Realisasi Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) TA 2018-2022	2-61
Tabel 2.35.	Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Tahun 2022 (<i>Unaudited</i>)	2-64
Tabel 2.36.	Daftar Obyek Tanah yang disertifikatkan	2-65
Tabel 2.37.	Warkah Tanah Pemda DIY Pada Tahun 2022.....	2-66
Tabel 2.38.	Hasil Penjualan dan Lelang BMD Tahun Anggaran 2022.....	2-74
Tabel 2.39.	Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa	2-78
Tabel 2.40.	Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah yang Dimanfaatkan Melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.....	2-81
Tabel 2.41.	Barang Milik Daerah yang Dipotimalkan Melalui Pinjam Pakai.....	2-82

Tabel 3.1.	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun 2020-2022	3-3
Tabel 3.2.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda DIY Tahun 2022	3-4
Tabel 3.3.	IPM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022	3-8
Tabel 3.4.	IPM Kabupaten/ Kota di DIY menurut Komponen Tahun 2022	3-10
Tabel 3.5.	IDG Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2021	3-11
Tabel 3.6.	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, dan Sumbangan Pendapatan Perempuan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2021	3-12
Tabel 3.7.	Distribusi Pengeluaran Penduduk dan Rasio Gini DIY, September 2021 – September 2022	3-15
Tabel 3.8.	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022 (%).....	3-17
Tabel 3.9.	Warisan Budaya Benda Kekayaan DIY yang ditetapkan di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2007 - 2022.....	3-18
Tabel 3.10.	Penetapan Warisan Budaya Tak benda Kekayaan DIY tingkat Nasional dan Internasional Pada Tahun 2013 – 2022.....	3-19
Tabel 3.11.	Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)	3-21
Tabel 3.12.	Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022	3-21
Tabel 3.13.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2018-2022.....	3-22
Tabel 3.14.	Kategori Nilai IKLH secara Nasional	3-24

Tabel 3.15.	Target dan Realisasi IKLH DIY 2018 - 2022.....	3-24
Tabel 3.16.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Eksisting dengan Rencana Pola Ruang RTRW DIY	3-26
Tabel 3.17.	Daftar Dokumen Perencanaan Tata Ruang di 18 Satuan Ruang Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta	3-33
Tabel 3.18.	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Opini BPK Tahun 2018-2022.....	3-37
Tabel 3.19.	Nilai Per Komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2021-2022	3-39
Tabel 3.20.	Realisasi Fisik Kegiatan Urusan Keistimewaan Tahun 2022	3-42
Tabel 3.21.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Keistimewaan Tahun 2022	3-43
Tabel 3.22.	Capaian Data Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.....	3-45
Tabel 3.23.	Capaian Pendaftaran Tanah Desa Sampai dengan Tahun 2022	3-45
Tabel 3.24.	Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Tahun 2022	3-46
Tabel 3.25.	Rincian Jumlah Sekolah yang Memenuhi SNP>90	3-48
Tabel 3.26.	Target dan Capaian Indikator Program Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Tahun 2022	3-49
Tabel 3.27.	Target dan Capaian Indikator Program Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2022	3-50
Tabel 3.28.	Jumlah Pemuda Kader Aktif 2021-2022 di DIY.....	3-52
Tabel 3.29.	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif Tahun 2022.....	3-52

Tabel 3.30.	Target dan Capaian Indikator Program Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju Tahun 2022.....	3-55
Tabel 3.31.	Target dan Capaian Indikator Program Angka Harapan Hidup Tahun 2022.....	3-56
Tabel 3.32.	Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas Tahun 2022	3-58
Tabel 3.33.	Target dan Capaian Indikator Program Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Tahun 2022	3-60
Tabel 3.34.	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR) di DIY pada Tahun 2018-2021	3-60
Tabel 3.35.	Target dan Capaian Indikator Program <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) Tahun 2022.....	3-60
Tabel 3.36.	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang Tahun 2022	3-61
Tabel 3.37.	Jumlah Tindak Kejahatan Terlaporkan dan Angka Kejahatan per 10.000 Penduduk Tahun 2018-2022	3-63
Tabel 3.38.	Target dan Capaian Indikator Program Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (<i>Crime Rate</i>) Tahun 2022	3-64
Tabel 3.39.	Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru Tahun 2022.....	3-67
Tabel 3.40.	Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2022.....	3-68
Tabel 3.41.	Jumlah Pengeluaran Per Kapita DIY Tahun 2018-2022	3-69
Tabel 3.42.	Target dan Capaian Indikator Program Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Tahun 2022.....	3-70

Tabel 3.43.	Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan Budaya Benda Yang Dilestarikan Tahun 2022	3-71
Tabel 3.44.	Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan Tahun 2022	3-73
Tabel 3.45.	Target dan Capaian Indikator Program Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Serta Perdagangan Dalam PDRB DIY Tahun 2022	3-75
Tabel 3.46.	Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2018-2022	3-77
Tabel 3.47.	Target dan Capaian Indikator Program Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2022.....	3-82
Tabel 3.48.	Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang Ditetapkan Pada Tahun 2022	3-87
Tabel 3.49.	Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima) Tahun 2022	3-87
Tabel 3.50.	Hasil Perhitungan Agregasi IKA DIY tahun 2018 – 2022.....	3-91
Tabel 3.51.	Data Indeks Kualitas Udara DIY tahun 2022	3-95
Tabel 3.52.	Kategori Indeks Kualitas Udara	3-96
Tabel 3.53.	Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2022	3-96
Tabel 3.54.	Nilai IKU DIY Tahun 2018 - 2022.....	3-97
Tabel 3.55.	Data Luas dan Hasil Konversi Penggunaan Lahan Tahun 2022	3-99
Tabel 3.56.	Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2022	3-100

Tabel 3.57.	Nilai IKTL tahun 2018 – 2022.....	3-101
Tabel 3.58.	Target dan Capaian Indikator Program Indeks Risiko Bencana Tahun 2022.....	3-102
Tabel 3.59.	Klasifikasi Indeks Risiko Bencana.....	3-103
Tabel 3.60.	Kecenderungan Kejadian Bencana di DIY Tahun 2017- 2021	3-104
Tabel 3.61.	Hasil IKD DIY	3-105
Tabel 3.62.	Target dan Capaian Indikator Program Persentase Dukungan Program Pemerintah Daerah Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang Tahun 2022.....	3-108
Tabel 3.63.	Hasil Penilaian Keterpaduan Program Tahun 2022	3-110
Tabel 3.64.	Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) Tahun 2022	3-114
Tabel 3.65.	PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota DIY 2022.....	3-114
Tabel 3.66.	Target dan Capaian Indikator Program Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi Tahun 2022	3-115
Tabel 3.67.	Kondisi Jalan Provinsi Per Kabupaten /Kota di Wilayah DIY pada Tahun 2022	3-118
Tabel 3.68.	Target dan Capaian Indikator Program Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022	3-120
Tabel 3.69.	Target dan Capaian Indikator Program Optimalisasi Aset- aset Pemda DIY Tahun 2022	3-122
Tabel 3.70.	Rincian Penerimaan Pendapatan dari Optimalisasi Aset 2022	3-122

Tabel 3.71.	Target dan Capaian Indikator Program Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, dan Nilai Eksternal Persepsi Korupsi Tahun 2022	3-123
Tabel 3.72.	Target dan Capaian Indikator Program Terwujudnya Penetapan Kepala Daerah Sesuai UU Keistimewaan dan Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai Dengan Perdais Kelembagaan Tahun 2022	3-127
Tabel 3.73.	Target dan Capaian Indikator Program Persentase Fasilitas Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa Tahun 2022.....	3-133
Tabel 3.74.	Capaian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.....	3-134
Tabel 3.75.	Capaian Pendaftaran Tanah Desa.....	3-134
Tabel 3.76.	Capaian Penetapan Peraturan Desa/Kalurahan.....	3-134
Tabel 3.77.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-141
Tabel 3.78.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2022	3-146
Tabel 3.79.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-175
Tabel 3.80.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2022.....	3-182
Tabel 3.81.	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-203
Tabel 3.82.	Data Kependudukan DIY Terlayani Air Minum Tahun 2022	3-205

Tabel 3.83.	Jumlah SR Air Limbah Rumah Tangga	3-207
Tabel 3.84.	Realisasi Pelayanan Air Limbah	3-207
Tabel 3.85.	Jumlah SR Air Limbah Rumah Tangga	3-209
Tabel 3.86.	Realisasi Pelayanan Air Limbah	3-209
Tabel 3.87.	Jumlah IPAL Komunal sampai dengan Tahun 2022	3-209
Tabel 3.88.	Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten/Kota Tahun 2022 (ton/hari)	3-211
Tabel 3.89.	Infrastruktur Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di DIY	3-212
Tabel 3.90.	Rincian hitungan capaian kinerja tahun 2022	3-216
Tabel 3.91.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022	3-221
Tabel 3.92.	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-229
Tabel 3.93.	Penilaian Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang DIY Berdasarkan Laporan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang DIY Kementerian ATR/BPN RI Tahun 2022	3-230
Tabel 3.94.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2022	3-235
Tabel 3.95.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-240
Tabel 3.96.	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dari tahun 2017-2022	3-240

Tabel 3.97.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2022	3-244
Tabel 3.98.	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-250
Tabel 3.99.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Linmas Tahun 2022	3-255
Tabel 3.100.	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-282
Tabel 3.101.	Detail Indeks Ketahanan Nasional DIY	3-283
Tabel 3.102.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022	2-286
Tabel 3.103.	Jumlah Kejadian Bencana di DIY Tahun 2018-2022	3-303
Tabel 3.104.	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-305
Tabel 3.105.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2022	3-310
Tabel 3.106.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-320
Tabel 3.107.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2022	3-324
Tabel 3.108.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-360

Tabel 3.109.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2022	3-364
Tabel 3.110.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)....	3-381
Tabel 3.111.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022	3-384
Tabel 3.112.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-390
Tabel 3.113.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pangan Tahun 2022.....	3-396
Tabel 3.114.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-401
Tabel 3.115.	Rincian Permohonan Ijin Penetapan Lokasi.....	3-402
Tabel 3.116.	Capaian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.....	3-403
Tabel 3.117.	Capaian Pendaftaran Tanah Desa.....	3-403
Tabel 3.118.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun 2022	3-406
Tabel 3.119.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-413
Tabel 3.120.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2022.....	3-415

Tabel 3.121.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-431
Tabel 3.122.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022	3-434
Tabel 3.123.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-439
Tabel 3.124.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022	3-443
Tabel 3.125.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)....	3-448
Tabel 3.126.	Data Rata-Rata Usia Menikah Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	3-449
Tabel 3.127.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022	3-452
Tabel 3.128.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-456
Tabel 3.129.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2022	3-462
Tabel 3.130.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-478
Tabel 3.131.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.....	3-482

Tabel 3.132.	Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2018-2022	3-488
Tabel 3.133.	Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2018-2022.....	3-489
Tabel 3.134.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-491
Tabel 3.135.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022.....	3-495
Tabel 3.136.	Perkembangan Investasi di DIY 2018 – 2022	3-517
Tabel 3.137.	Perkembangan Investasi (PMA + PMDN) Kabupaten/Kota di DIY 2018 - 2022 (dalam rupiah).....	3-518
Tabel 3.138.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-522
Tabel 3.139.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022	3-528
Tabel 3.140.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-531
Tabel 3.141.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022.....	3-534
Tabel 3.142.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-546
Tabel 3.143.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Statistik Tahun 2022.....	3-551
Tabel 3.144.	Nilai <i>assessment</i> keamanan informasi dan persandian oleh BSSN tahun 2018-2022	3-557

Tabel 3.145.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Persandian Tahun 2022	3-565
Tabel 3.146.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-566
Tabel 3.147.	Budaya Benda yang Dikelola dan Dilestarikan pada Tahun 2022	3-568
Tabel 3.148.	Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya, dan Museum pada Tahun 2022	3-570
Tabel 3.149.	Penyelenggaraan <i>Event</i> Taman Budaya DIY pada Tahun 2022	3-571
Tabel 3.150.	Pengembangan Kinerja Seni di DIY pada Tahun 2022	3-572
Tabel 3.151.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2022	3-575
Tabel 3.152.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-595
Tabel 3.153.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2022	3-599
Tabel 3.154.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-601
Tabel 3.155.	Jumlah Pemanfaatan Arsip Tahun 2022	3-602
Tabel 3.156.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2022	3-604
Tabel 3.157.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-607

Tabel 3.158.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022	3-610
Tabel 3.159.	Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kab/Kota di DIY Tahun 2021-2022	3-625
Tabel 3.160.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-626
Tabel 3.161.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2022	3-629
Tabel 3.162.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-652
Tabel 3.163.	PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahunan Berdasarkan Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah) series 2018-2022**	3-653
Tabel 3.164.	Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2021-2022	3-654
Tabel 3.165.	Produksi Hortikultura di DIY Tahun 2021-2022	3-656
Tabel 3.166.	Populasi Ternak di DIY Tahun 2021-2022	3-658
Tabel 3.167.	Produksi Komoditas Perkebunan DIY Tahun 2021-2022** ...	3-659
Tabel 3.168.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Tahun 2022	3-662
Tabel 3.169.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-671
Tabel 3.170.	Angka Produksi Kehutanan 2022	3-671
Tabel 3.171.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun 2022	3-673

Tabel 3.172.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-678
Tabel 3.173.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022.....	3-684
Tabel 3.174.	Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2018-2022.....	3-688
Tabel 3.175.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-688
Tabel 3.176.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2022.....	3-691
Tabel 3.177.	Perkembangan PDRB Industri Pengolahan 2018 – 2022.....	3-694
Tabel 3.178.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-695
Tabel 3.179.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian Tahun 2022	697
Tabel 3.180.	Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY tahun 2018-2022.....	3-711
Tabel 3.181.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-712
Tabel 3.182.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun 2022.....	3-715
Tabel 3.183.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-716
Tabel 3.184.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2022	3-718

Tabel 3.185.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-739
Tabel 3.186.	Pengukuran Capaian Fisik dan Keuangan Dana Keistimewaan Tahun 2022.....	3-740
Tabel 3.187.	Pengukuran Capaian Sasaran.....	3-742
Tabel 3.188.	Pengukuran Capaian Sasaran.....	3-743
Tabel 3.189.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan Tahun 2022.....	3-746
Tabel 3.190.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-754
Tabel 3.191.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2022	3-758
Tabel 3.192.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sub Urusan Kepegawaian Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-781
Tabel 3.193.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Kepegawaian Tahun 2022	3-784
Tabel 3.194.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-794
Tabel 3.195.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022	3-797
Tabel 3.196.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-810

Tabel 3.197.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Tata Pemerintahan Tahun 2022.....	3-813
Tabel 3.198.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-820
Tabel 3.199.	Kegiatan pembahasan Raperda menjadi Perda oleh Pemda DIY pada Tahun 2022	3-821
Tabel 3.200.	Rekapitulasi Jumlah Penyelesaian Perkara Pemda DIY TA 2022	3-823
Tabel 3.201.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum Tahun 2022	3-830
Tabel 3.202.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perekonomian dan SDA Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-838
Tabel 3.203.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Fasilitasi Perekonomian dan SDA Tahun 2022	3-844
Tabel 3.204.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Kesra Tahun 2021-2022 serta capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD (2022)	3-850
Tabel 3.205.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Kesra Tahun 2022	852
Tabel 3.206.	Budaya Pemerintahan SATRIYA dengan <i>Core Value</i> BerAKHLAK.....	3-858
Tabel 3.207.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)....	3-861

Tabel 3.208.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2022.....	3-866
Tabel 3.209.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2022 serta capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD (2022)	3-872
Tabel 3.210.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Administrasi Pembangunan Tahun 2022	3-878
Tabel 3.211.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Umum, Kehumasan dan Protokol Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)	3-886
Tabel 3.212.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Administrasi Umum, Kehumasan dan Protokol Tahun 2022	3-888
Tabel 3.213.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Pemerintahan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-896
Tabel 3.214.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Pemerintahan Tahun 2022	3-899
Tabel 3.215.	Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK RI Tahun 2022 sampai dengan Semester II Tahun 2022 pada Pemda DIY	3-906
Tabel 3.216.	Risalah Hasil Pemeriksaan Inspektorat DIY.....	3-907
Tabel 3.217.	Pengukuran Capaian Sasaran.....	3-908
Tabel 3.218.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-909

Tabel 3.219.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2022	3-912
Tabel 3.220.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-918
Tabel 3.221.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022.....	3-921
Tabel 3.222.	Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretaris Dewan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022).....	3-923
Tabel 3.223.	Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretaris Dewan Tahun 2022.....	3-927
Tabel 4.1.	Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2022	4-3
Tabel 4.2.	Pagu Anggaran Tugas Pembantuan di Dinas PUPESDM DIY Tahun 2022	4-9
Tabel 4.3.	Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2022	4-13
Tabel 4.4.	Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Minor Jalan di DIY Tahun 2022	4-14
Tabel 4.5.	Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2022	4-14
Tabel 4.6.	Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kondisi di DIY Tahun 2022	4-14
Tabel 4.7.	Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Penanganan Penunjang di DIY Tahun 2022.....	4-15

Tabel 4.8.	Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Pemeliharaan Berkala Jembatan di DIY Tahun 2022.....	4-15
Tabel 4.9.	Target dan Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Jalan di DIY TA 2022.....	4-15
Tabel 4.10.	Target dan Realisasi Kegiatan Padat Karya di DIY TA 2022.....	4-16
Tabel 4.11.	Cakupan Perjanjian Kinerja TP Kegiatan Penyelenggaraan Jalan TA 2022	4-16
Tabel 4.12.	Pengukuran Kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2022	4-17
Tabel 5.1.	Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Tata Cara Tahun Anggaran 2022	5-2
Tabel 5.2.	Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Kelembagaan Tahun Anggaran 2022	5-5
Tabel 5.3.	Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Kebudayaan TA 2022.....	5-12
Tabel 5.4.	Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Pertanahan Tahun Anggaran.....	5-29
Tabel 5.5.	Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Tata Ruang TA 2022.....	5-33
Tabel 6.1.	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pada Tahun 2021-2022.....	6-11
Tabel 6.2.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Birokrasi Tahun 2022	6-12
Tabel 6.3.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Birokrasi Tahun 2021-2022.....	6-13
Tabel 6.4.	Capaian 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi DIY	6-14
Tabel 6.5.	Usulan Unit Kerja Pelayanan Predikat WBK/WBBM Tahun 2022	6-16
Tabel 6.6.	Unit Kerja Pelayanan Predikat WBK/WBBM.....	6-17
Tabel 6.7.	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.....	6-18

Tabel 6.8.	Data Perbandingan Lalu Lintas Penerbangan Bandara YIA Tahun 2021 - 2022	6-26
Tabel 6.9.	Progress Pembebasan Lahan JJLS pada Sepanjang Wilayah Selatan DIY	6-41
Tabel 6.10.	Pembangunan Taman Budaya Yogyakarta	6-44
Tabel 6.11.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo.....	6-45
Tabel 6.12.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul.....	6-46
Tabel 6.13.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Sleman.....	6-47
Tabel 6.14.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Bantul	6-48
Tabel 6.15.	Taman Budaya Kota Yogyakarta	6-51
Tabel 6.16.	Kondisi Pelayanan RSUD Saptosari	6-54
Tabel 6.17.	Rincian Realisasi Program/Kegiatan Yang Dilakukan OPD DIY Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022.....	6-63
Tabel 6.18.	Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan di DIY Tahun 2022	6-65
Tabel 6.19.	Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di 4 Kabupaten Prioritas DIY dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.....	6-65
Tabel 6.20.	Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2022	6-70
Tabel 6.21.	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di DIY Periode September 2021 s.d. September 2022	6-71
Tabel 6.22.	Estimasi Kemiskinan Ekstrem Provinsi DIY, Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2022.....	6-74
Tabel 6.23.	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem, Miskin dan Rentan Miskin (Desil 1 –4) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2022	6-74

Tabel 7.1.	Sinergi Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Pusat Tahun 2022	7-1
Tabel 7.2.	Daftar Rencana Kerja Tindak Lanjut Nota Kesepakatan Pemda DIY Dengan Pemerintah Pusat Tahun 2022	7-2
Tabel 7.3.	Kerja sama Pemda DIY dengan Daerah Lain Tahun 2022.....	7-4
Tabel 7.4.	Rincian Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.....	7-9
Tabel 7.5.	Progres Pembahasan dan Penelaahan Segmen Batas Wilayah DIY dan Jateng	7-17
Tabel 7.6.	Segmen Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di DIY.....	7-17
Tabel 7.7.	Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana Tahun 2022	7-22
Tabel 7.8.	Rentang Nilai dan Klasifikasi Tingkat DRI.....	7-24
Tabel 7.9.	Data Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2018 - 2022	7-28
Tabel 7.10.	Tabel penerimaan dan konsultasi di LOD DIY.	7-37
Tabel 7.11.	Data Lembaga Penyiaran yang Menerima Teguran Tahun 2022	7-57
Tabel 7.12.	Perizinan Lembaga Penyiaran Komunitas di DIY	7-58
Tabel 7.13.	Televisi Digital Yang Muncul di Alat Pemantauan KPID DIY	7-59
Tabel 7.14.	Sengketa Informasi Tahun 2022.....	7-62
Tabel 7.15.	Klasifikasi Berdasarkan <i>Cluster</i> Badan Publik DIY	7-63

Daftar Gambar

Gambar 1. 1.	Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY.....	1-35
Gambar 1.2.	Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa/km ²) Tahun 2021 dan 2022.....	1-38
Gambar 1.3.	Pengangguran Terbuka dan TPT Tahun 2018-2022.....	1-44
Gambar 1.4.	TPT Nasional dan DIY Tahun 2018-2022.....	1-44
Gambar 1.5.	Capaian APK dan APM DIY Tahun 2022.....	1-46
Gambar 1.6.	Jumlah Guru Berkualifikasi di DIY Tahun 2022.....	1-48
Gambar 1.7.	Capaian Akreditasi Sekolah/Madrasah DIY Tahun 2022	1-49
Gambar 1.8.	Perkembangan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara 2018-2022.....	1-52
Gambar 1.9.	Tingkat Penghunian Kamar di Hotel Bintang & Non Bintang Tahun 2022	1-53
Gambar 1.10.	PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2018- 2022	1-53
Gambar 1.11.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2018- 2022 (%)......	1-64
Gambar 3.1	Indeks Pertumbuhan Inklusif (IGI) Tahun 2018-2022	3-2
Gambar 3.2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2018-2022	3-6
Gambar 3.3.	Perkembangan Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) DIY Tahun 2018-2022.....	3-7
Gambar 3.4.	Perkembangan HLS dan RLS DIY Tahun 2018-2022.....	3-8

Gambar 3.5. Tren Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di DIY Tahun 2016-2021	3-11
Gambar 3.6. Perkembangan Indeks Gini Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY Bulan Maret 2018 – September 2022	3-13
Gambar 3.7. Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2018-2022	3-17
Gambar 3.8. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2018-2022 (%).....	3-20
Gambar 3.9. Peta Kesesuaian pemanfaatan Ruang RTRW DIY Tahun 2022	3-29
Gambar 3.10. Peta Lokasi 18 Satuan Ruang Strategis.....	3-31
Gambar 3.11. Indeks Williamson DIY Tahun 2018-2022	3-35
Gambar 3.12. Perkembangan Nilai AKIP Pemda DIY Tahun 2011-2022	3-39
Gambar 3.13. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2022	3-50
Gambar 3.14. Capaian Angka HLS Kabupaten/Kota dan DIY Tahun 2022 (Tahun)	3-51
Gambar 3.15. Capaian Evaluasi Pendidikan Berbasis Budaya.....	3-54
Gambar 3.16. Capaian Evaluasi Pendidikan Berbasis Budaya Per Jenjang Sekolah	3-54
Gambar 3.17. Perbandingan AHH DIY dan AHH Nasional 2018-2022 (Tahun)	3-56
Gambar 3.18. Perkembangan Jumlah Laporan Kasus Tahun 2018-2022 (kasus)	3-63
Gambar 3.19. <i>Crime Rate</i> Tahun 2018-2022.....	3-64
Gambar 3.20. Jumlah Laporan Kasus per Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2021	3-65
Gambar 3.21. Perkembangan WUB Tahun 2017-2022	3-66

Gambar 3.22. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin DIY Tahun 2018 – 2022 (Ribu Orang).....	3-68
Gambar 3.23. Kontribusi 4 Lapangan Usaha terhadap PDRB DIY tahun 2018 - 2022	3-74
Gambar 3.24. Rincian Perkembangan Kontribusi Masing-Masing Sektor 2018 - 2022	3-74
Gambar 3.25. Kontribusi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan) terhadap PDRB DIY dan PDB Indonesia Tahun 2018-2022	3-76
Gambar 3.26. Data Wisatawan Nusantara di DIY yang menginap di Hotel Bintang & Non Bintang Tahun 2022	3-78
Gambar 3.27. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara yang menginap di Hotel Bintang & Non Bintang Tahun 2022.....	3-79
Gambar 3.28. Data Wisatawan Mancanegara di DIY yang menginap di Hotel Bintang & Non Bintang Tahun 2022.....	3-80
Gambar 3.29. Data Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara yang menginap di Hotel Bintang & Non Bintang Tahun 2022	3-81
Gambar 3.30. Perkembangan TPT DIY dan Indonesia tahun 2018 - 2022.....	3-83
Gambar 3.31. Target dan Realisasi IKA di DIY tahun 2018 – 2022	3-92
Gambar 3.32. Grafik Nilai Keterpaduan Program Tahun 2022	3-109
Gambar 3.33. Peta Lokasi Sebaran Genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (BBWS SO, 2016)	3-213
Gambar 3.34. Profil Sebaran Genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (BBWS SO, 2016)	3-213
Gambar 3.35. Progres Penangan Genangan di KPY sampai dengan 2022 ...	3-214
Gambar 3.36. Perkembangan Kasus Covid-19 di DIY Tahun 2020-2022.....	3-304
Gambar 3.37. Desa Rawan Pangan di DIY Tahun 2018-2022.....	3-393

Gambar 3.38. Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Untuk Makanan di DIY tahun 2018-2022	3-394
Gambar 3.39. Kegiatan pelayanan terpadu perekaman biometrik siswa di SMKN 2 Wonosari	3-428
Gambar 3.40. Pemberian dokumen kependudukan (KTP-el dan KIA) bagi penyandang disabilitas pada Peluncuran Gerakan Bersama Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas.....	3-429
Gambar 3.41. Integrasi WBS E-Lapor DIY dengan sistem WBS KPK	3-475
Gambar 3.42. Grafik Pertumbuhan Realisasi Investasi DIY Tahun 2018 – 2022	3-517
Gambar 3.43. Grafik Realisasi Investasi Tahun 2022 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp)	3-520
Gambar 3.44. Sebaran Presentase Realisasi Investasi Tahun 2022 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota	3-521
Gambar 3.45. Penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	3-557
Gambar 3.46. Upgrade dan Relokasi PABX.....	3-563
Gambar 3.47. Dokumentasi kegiatan yang mendukung Capaian Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan Tahun 2022 ...	3-568
Gambar 3.48. Dokumentasi kegiatan yang mendukung Capaian Meningkatnya Kinerja Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya dan Museum	3-570
Gambar 3.49. Dokumentasi kegiatan yang mendukung Capaian Penyelenggaraan Event Taman Budaya DIY pada Tahun 2022	3-571
Gambar 3.50. Dokumentasi kegiatan yang mendukung Capaian Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY	3-572
Gambar 3.51. Produksi Perikanan di DIY Tahun 2018-2022	3-606

Gambar 3.52. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahunan (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).....	3-653
Gambar 3.53. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2018–2022**	3-654
Gambar 3.54. Pelantikan Penjabat Bupati Kulon Progo dan Penjabat Walikota Yogyakarta pada 22 Mei 2022.....	3-807
Gambar 3.55. Plafon Penyaluran KUR di DIY Tahun 2022	3-840
Gambar 3.56. Grand Design Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA.....	3-859
Gambar 4.1. Operasi Jaringan Irigasi.....	4-12
Gambar 4.2. Perbaikan Jaringan Irigasi di Kalurahan Sukoreno.....	4-12
Gambar 4.3. Pemeliharaan Berkala DI Van Der Wijk	4-12
Gambar 4.4. Pelaksanaan Pekerjaan Ruas Yogyakarta-Bts Kota Bantul	4-17
Gambar 4.5. Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Bedog	4-18
Gambar 4.6. Pelaksanaan Pekerjaan Ruas Arteri Selatan (Yogyakarta).....	4-18
Gambar 4.7. Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Minor Ruas Jalan Arteri Selatan (Yogyakarta).....	4-18
Gambar 5.1. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	5-3
Gambar 5.2. Sosialisasi Kelembagaan Asli.....	5-10
Gambar 5.3. Gerbang Pleret Kalurahan Pleret, Pleret, Bantul.....	5-20
Gambar 5.4. Pembangunan Rumah Layak Huni Arsitektur Khas Yogyakarta Kalurahan Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo	5-20
Gambar 5.5. Pelatihan Membatik Kalurahan Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul.....	5-21
Gambar 5.6. Pembangunan RMU dan Lumbung Tradisional Kalurahan Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo	5-22

Gambar 5.7. Pembangunan Balai Budaya Kalurahan Putat, Patuk, Gunungkidul.....	5-22
Gambar 5.8. Papan Penanda Keistimewaan Kalurahan Donokerto, Turi, Sleman.....	5-23
Gambar 5.9. Kegiatan BKK Desa Prima (Pelatihan Kelompok Ekonomi Perempuan Kalurahan Banyurejo, Tempel, Sleman)	5-24
Gambar 5.10. Kegiatan BKK Desa Maritim/Bahari (Budidaya Kepiting (<i>Crab House</i>) Kalurahan Tirtohargo, Kretek, Bantul)	5-24
Gambar 5.11. Kegiatan BKK Padat Karya Jogja Istimewa (Pelaksanaan Pekerjaan Padat Karya Kalurahan Sabdodadi, Bantul, Bantul).....	5-25
Gambar 5.12. Kegiatan BKK Desa Mandiri Budaya Pembangunan Taman Bermain Anak Kalurahan Tanjungharjo, Nanggulan, Kulon Progo	5-26
Gambar 5.13. Kegiatan BKK Desa Preneur (Kerajinan Tangan Cover Pot Bunga Kalurahan Kemiri, Tangungsari, Gunungkidul)	5-27
Gambar 5.14. Kegiatan BKK Desa Wisata (Desa Wisata Ngestirejo).....	5-28
Gambar 5.15. Kegiatan BKK Pertanian (Pemasangan Patok Batas Bidang).....	5-31
Gambar 5.16. Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen IV: 3,4 km	5-35
Gambar 5.17. Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen IV: 3,4 km	5-35
Gambar 6.1. Pencapaian Dimensi <i>Jogja Smart Province</i>	6-10
Gambar 6.2. Tampak Atas Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta	6-19
Gambar 6.3. Rencana Trase Jalan Tol Pada Kawasan Sekitar Bandara YIA.....	6-24
Gambar 6.4. Peta JJLS di Pulau Jawa.....	6-37

Gambar 6.5. Progres Pembangunan JJLS pada Sepanjang Wilayah Selatan DIY	6-38
Gambar 6.6. Taman Budaya Gunungkidul dan Taman Budaya Kulon Progo	6-43
Gambar 6.7. Event Kulon Progo Manekawarna	6-46
Gambar 6.8. Leong Barongsai Naga Jati, Semanu	6-47
Gambar 6.9. Penataan Lahan Taman Budaya Sleman Tahun 2022	6-48
Gambar 6.10. Alat Medis RSUD Saptosari	6-54
Gambar 6.11. Kondisi TPA pada akhir tahun 2022	6-58
Gambar 6.12. Penampungan sampah di zona transisi.....	6-58
Gambar 6.13. Zona A, B, dan Zona Transisi	6-60
Gambar 6.14. Pelaksanaan Operasi Gabungan.....	6-60
Gambar 6.15. Upaya Penanganan Lindi (pencampuran bahan kimia).....	6-61
Gambar 6.16. Grafik Persentase Tujuan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di DIY	6-66
Gambar 6.17. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2015–September 2022.....	6-69
Gambar 6.18. Estimasi Kemiskinan Ekstrem Provinsi DIY, Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2022.....	6-74
Gambar 7.1. Persentase Peringkat Tiap Klaster Monev Badan Publik Tahun 2022	7-63



Pendahuluan

A. DASAR HUKUM

Kedudukan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua, Pasal 18B ayat (1) dan (2), yaitu: 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY menandai bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Berdasarkan UU ini, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan NKRI.

Pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin *ke-bhinneka-tunggal-ika-an* dalam kerangka NKRI, menciptakan pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memiliki 2 (dua) kewenangan yaitu kewenangan keistimewaan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Urusan keistimewaan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemda DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan tersebut didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja terhadap kewenangan yang diberikan, Gubernur menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022. Dasar hukum penyusunan LKPJ Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

- 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta

- Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
 28. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 8);
 29. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 9);
 30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 38);
 31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 66).

B. VISI DAN MISI JANGKA PANJANG

1. Visi Jangka Panjang

Visi untuk mewujudkan “Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” merupakan visi pembangunan yang ingin dicapai dalam periode 20 tahun dan tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJPD DIY) tahun 2005-2025.

Sebagai pusat pendidikan terkemuka dimaknai bahwa pada tahun 2025 DIY menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia yang dilandasi pengamalan agama dan didukung oleh lembaga pendidikan yang kredibel, berstandar nasional ataupun internasional. di samping itu, DIY beserta lingkungan sosial masyarakatnya memiliki lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar dan menuntut ilmu.

DIY sebagai pusat budaya terkemuka diharapkan menjadi tempat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai budaya. Hal tersebut didukung dengan pengesahan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya UU tersebut, DIY memperoleh dukungan dalam mengimplementasikan kewenangan Urusan Kebudayaan secara lebih luas untuk mewujudkan visi sebagai pusat budaya terkemuka.

Sebagai daerah tujuan wisata terkemuka, DIY diharapkan menjadi daerah tujuan wisata yang diminati baik oleh wisatawan nasional maupun internasional karena memiliki daya tarik tersendiri dengan tetap menjunjung nilai-nilai moralitas.

Masyarakat yang maju dimaknai sebagai suatu kondisi masyarakat yang makmur secara ekonomi, mempunyai tingkat pengetahuan tinggi, pendidikan baik, derajat kesehatan tinggi, serta memiliki sistem dan

kelembagaan politik dan hukum yang baik, terjamin hak-haknya, serta kehidupannya didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap, dan memadai.

Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat dan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Tingkat kemandirian masyarakat tercermin antara lain pada ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan dan kemajuan pembangunan. Sedangkan masyarakat yang sejahtera berarti dapat terpenuhi semua kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual secara layak dan adil.

Tahun 2022 merupakan tahapan lima tahun ke-empat (2020-2025) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005-2025. Penekanan tahapan lima tahun ke-empat (2020-2025) adalah untuk “penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.”

2. Misi Jangka Panjang

Upaya mencapai visi jangka panjang tersebut dilakukan dengan mengarusutamakan pendekatan pembangunan yang memiliki fokus untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup warga DIY (*people-centered development*) melalui empat misi pembangunan yaitu:

- a. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;
- b. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
- c. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;

- d. Mewujudkan sosio-kultural dan sosio-ekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

C. FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

1. Dasar Filosofi

Paradigma pembangunan DIY "Renaisans Yogyakarta" atau "Jogja Renaisans" mengandung maksud bahwa sebagai pangkal berpikir perubahan ke depan harus berlandaskan pada nilai-nilai lama yang unggul atau nilai-nilai yang pernah menjadi rujukan bagi praktik kehidupan Yogyakarta dan telah membawa Yogyakarta pada posisi keistimewaannya dalam perjalanan sejarah Indonesia. di bawah payung paradigma "Renaisans Yogyakarta", DIY akan bergerak menuju kondisi DIY yang maju, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai keutamaan, dan nilai-nilai yang mencerminkan ke-Yogyakarta-an, sehingga memiliki martabat yang istimewa dalam sejarah Indonesia.

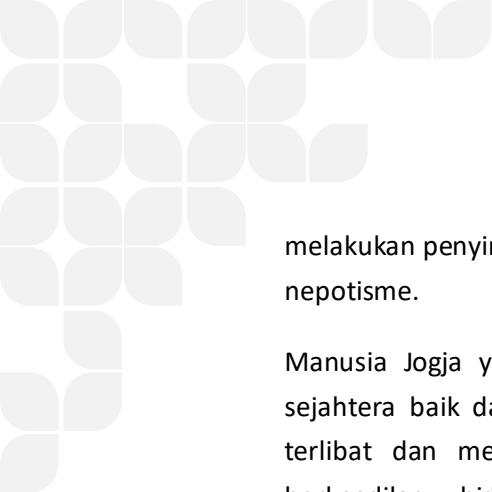
Konsep tersebut merupakan sintesa dari trilogi filosofi Keistimewaan Yogyakarta (*Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti*), ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia: Pancasila, dan etos asli (*Golong-Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh*) dalam melahirkan kembali masa keemasan budaya klasik Yogyakarta. "Renaisans Yogyakarta" diwujudkan dengan semangat kolektif *Jogja Gumregah* untuk bergerak bersama membawa kebudayaan Yogyakarta ke tingkat yang lebih unggul. Semangat *Jogja Gumregah* dapat menjadi wahana penggerak masyarakat menuju ke peningkatan dimensi nilai yang mencakup pencarian nilai-nilai kebenaran, dimensi ekonomi terkait nilai kegunaan, dimensi estetis pada keindahan, dimensi sosial pada nilai "trust", dimensi politik pada nilai kuasa, dimensi keagamaan, dan nilai ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam pelaksanaannya, spirit dari konsep "Renaisans Yogyakarta" secara konsisten tetap dipelihara, namun

substansinya disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kondisi yang terjadi dalam periode lima tahun sehingga kepentingan-kepentingan bersama serta nilai-nilai kebersamaan yang lebih luas dapat terakomodir.

Konsep tersebut mendasari tema visi pembangunan DIY tahun 2017- 2022 yaitu “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. Penekanan abad Samudera Hindia sebagai momentum yang perlu dimanfaatkan oleh segenap pemangku kepentingan DIY untuk mengoptimalkan potensi kelautan di kawasan selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warganya serta mengurangi angka kemiskinan. Menyongsong Abad Samudera Hindia yang dimaksud dalam tema visi dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena *Indian Ocean Rim Association (IORA)*, *Kra-Canal/ Thai Canal Project* serta kemiskinan di kawasan selatan DIY. Harapan akan potensi Abad Samudera Hindia pada masa depan tentunya berada di wilayah selatan DIY. Hal ini disebabkan kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah selatan memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi dibanding wilayah utara DIY.

Kemuliaan martabat manusia Jogja yang ingin dicapai tersebut dapat digambarkan dalam “Lima Kemuliaan” atau “Panca Mulia” yakni:

- a) Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing;
- b) Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;
- c) Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan;
- d) Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
- e) Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila



melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Manusia Jogja yang bermartabat mulia digambarkan sebagai manusia sejahtera baik dari segi hidup-kehidupan-penghidupan sebagai individu, terlibat dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan, hidup dalam harmoni kolektif dan terlindungi oleh penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dijalankan oleh aparatur yang berintegritas. Manusia Jogja yang bermartabat mulia merupakan substansi penting yang menggambarkan adanya tujuan peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja. Hal ini mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab. Untuk itu strategi kebudayaan untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat DIY serta mengatasi kesenjangan dan kemiskinan dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja perlu diutamakan. Pembangunan ekonomi DIY yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakatnya, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Visi

Dokumen RPJMD DIY 2017-2022 sendiri memiliki peran kritical dan penting karena berada menjelang berakhirnya tahapan RPJPD DIY 2005-2025. Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, tahun 2022 merupakan tahun kelima dari periode RPJMD DIY 2017-2022 yang mempunyai fokus pelaksanaan pembangunan yaitu “Internalisasi Nilai-nilai Budaya dalam Masyarakat yang Bermartabat” dengan kata kunci: Mengembangkan (inovasi) SDM Unggul dan Infrastruktur untuk Pengurangan Ketimpangan Wilayah dan Kemiskinan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2022 disusun sebagai penjabaran dan pewujudan visi pembangunan jangka menengah DIY tahun 2017-2022 yaitu: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. Visi tersebut berangkat dari tema pidato Visi Misi Gubernur DIY

2017-2022 “Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” dengan misi *Panca Mulia* untuk mewujudkan kemuliaan martabat tersebut. Dari aspek kewilayahan, tema Menyongsong Abad Samudera Hindia tersebut mengindikasikan upaya DIY untuk lebih memperhatikan pengembangan wilayah selatan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, sehingga dapat pemeratakan kesejahteraan masyarakat DIY pada umumnya dan kawasan selatan khususnya.

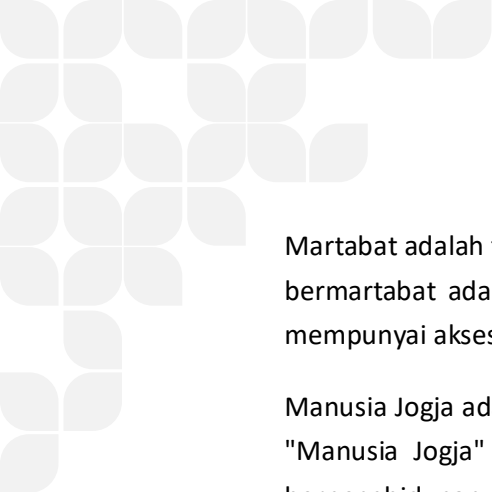
Berangkat dari tinjauan filosofis, dengan berpijak pada RPJPD DIY, memperhatikan perkembangan dan kondisi terkini masyarakat di DIY, serta selaras dengan uraian tema Visi “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”, visi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJMD DIY) tahun 2017-2022 adalah:

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

Terwujudnya dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang diharapkan pada terlaksananya atau terbukti dalam lima tahun ke depan; melalui peningkatan proses, cara, perbuatan guna meningkatkan suatu kondisi yang telah ada menuju kondisi yang lebih baik.

Kemuliaan dimaknai paripurna dalam memenuhi *Panca Mulia* yakni dengan terpenuhinya:

- a. Peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban;
- b. Peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh, dan berkeadilan;
- c. Terwujudnya kondisi hidup dalam harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi;
- d. Pelayanan publik dengan tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
- e. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas.



Martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang berumur panjang dan hidup bahagia, mempunyai akses yang luas terhadap pengetahuan, dan dapat hidup layak.

Manusia Jogja adalah masyarakat DIY yang menjadi subyek pembangunan. "Manusia Jogja" adalah semua individu yang hidup, berkehidupan dan berpenghidupan di wilayah DIY. Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan manusia Jogja adalah:

- a. Semua individu yang telah menggantungkan hidupnya pada sumber daya yang berada di wilayah DIY;
- b. Semua individu yang telah membangun jaringan dan juga telah dikuatkan serta dimuliakan oleh jaringan kehidupan sosial budaya masyarakat di wilayah DIY;
- c. Semua individu yang telah membangun serta menggantungkan penghidupannya pada sumber daya dan jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di wilayah DIY.

Ciri khas manusia Jogja dalam perumusan visi tersebut mencakup pengertian mulia martabat hidupnya, mulia martabat kehidupannya, dan mulia martabat penghidupannya. Ciri khas tersebut secara lebih rinci dapat digambarkan sebagai berikut: Manusia Jogja yang memiliki hidup biologis yang mulia karena didukung oleh kualitas dan kuantitas asupan makanan yang baik, memiliki tingkat kesehatan yang baik, dan hidup dalam kualitas lingkungan fisik yang baik.

Manusia Jogja yang memiliki kehidupan bermasyarakat yang mulia, termasuk: a) mulia dalam berlalu lintas (sopan santun, tenggang rasa serta taat disiplin pada peraturan lalu lintas); b) mulia dalam perilaku berkehidupan bersama di ruang publik (perilaku memarkir kendaraan yang tidak menzalimi orang lain sehubungan ukuran lebar jalan-jalan di Jogja relatif kecil, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai atau jalan atau ruang publik, tidak membuat atau memancing rasa permusuhan terhadap kelompok masyarakat lain); dan c) mulia dalam berkehidupan menjalankan agama (saling menghormati kehidupan beragama kelompok agama lain).

Manusia Jogja yang memiliki penghidupan yang mulia, mencakup: a) cara-cara menjalankan kegiatan penghidupan yang mulia untuk memenuhi kebutuhan hidup (tidak merendahkan martabat diri, tidak melanggar hukum atau melakukan tindak pidana kriminal, tidak mengganggu kesehatan diri maupun orang lain), b) tempat menjalankan penghidupan yang mulia (tidak menjalankan usahanya pada tempat-tempat yang mengganggu atau menzolimi atau merugikan hak orang lain, dan c) sistem kerja yang mulia (tidak mengeksploitasi anak-anak dan perempuan, memberi atau mendapat imbalan sesuai ketentuan yang berlaku, tidak merusak dan mencemari alam serta warisan budaya).

3. Misi

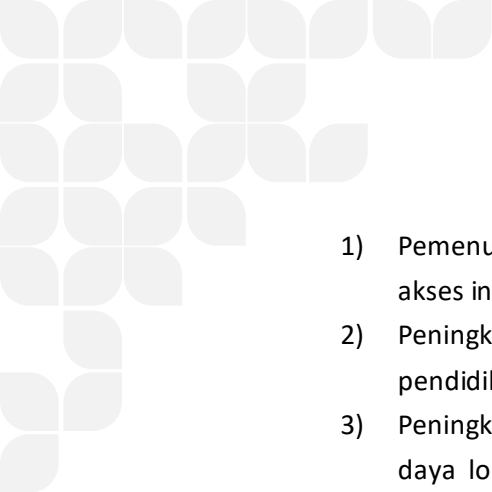
Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Rumusan misi Gubernur DIY dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di DIY.

Oleh karena itu, perwujudan visi tersebut dapat dirumuskan kedalam dua misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

a. **Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban**

Rumusan misi pertama ini menjabarkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang tertuang dalam rumusan Panca Mulia 1, 2 dan 3. Segenap pemangku kepentingan dan masyarakat melalui misi pertama ini hendak mewujudkan peningkatan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan dari aspek-aspek sebagai berikut:

- 
- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar;
 - 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan;
 - 3) Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumber daya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Indeks Gini), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (Indeks Williamson);
 - 4) Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.

b. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis

Misi kedua ini menjelaskan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termuat pada *Panca Mulia* ke-4 dan ke-5. Misi kedua hendak mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Hal ini antara lain dilakukan melalui:

- 1) Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal OPD), "strategi silang horizontal" (keterbukaan antar OPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horizontal antar-OPD).
- 2) Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA,

dan KUALITAS. Etos dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyanggah pesan perubahan persepsi (*mindset*) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantor, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang menyanggah arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyanggah pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Adapun kualitas dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyanggah pesan adanya pergeseran *mindset*, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi".

4. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi. Tujuan pembangunan DIY dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022 adalah:

Tabel 1.1. Tujuan yang Hendak Dicapai

Misi	Tujuan
i. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke- <i>bhinneka-tunggal-ika</i> -an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta
ii. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)

5. Sasaran

Sasaran sebagai penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continuously improve (SMART-C)*. Sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Sasaran pembangunan DIY dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022 adalah:

Tabel 1.2. Sasaran Pembangunan DIY

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke- <i>bhinneka-tunggal-ika</i> -an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat.	a. Indeks Gini b. Persentase Angka Kemiskinan
		3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	a. Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda yang Diapresiasi

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
		4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	a. Pertumbuhan Ekonomi b. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) c. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang d. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan
		5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	a. Indeks Williamson
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	a. Opini BPK b. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)
		2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	a. Persentase Capaian Sasaran Pelaksanaan Keistimewaan.
		3. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	a. Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi Untuk Dikelola serta Dimanfaatkan

D. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMD 2017-2022

1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017-2022

Strategi dan arah kebijakan pembangunan dirumuskan untuk mencapai Visi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan jangka menengah. Perumusan strategi dan arah kebijakan memperhatikan capaian kinerja pembangunan periode

sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah sebagaimana tercantum dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke- <i>bhinneka-tunggal-ika-an</i> dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	1. Meningkatkan derajat Kualitas SDM	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender. Mengendalikan pertumbuhan penduduk. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum. 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan. Peningkatan layanan pendidikan di DIY Memperkuat dan mengembangkan pendidikan karakter. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan (termasuk olahan). Peningkatan pelayanan medis, rehab medis, rehab sosial, dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas Perencanaan dan penganggaran responsif gender. Pengendalian usia perkawinan pertama penduduk. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan ketertiban masyarakat dan ketaatan pada hukum. Peningkatan akses dan kualitas Keluarga Berencana.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. 2. Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin. 3. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. 4. Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penumbuhan wirausaha baru yang mandiri. 2. Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat. 3. Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin. 4. Peningkatan penduduk berakses air bersih layak. 5. Peningkatan penduduk berakses energi. 6. Penyediaan tempat tinggal yang layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah. 7. Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin. 8. Meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, serta pengawasan dan hubungan industrial
	3. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemeliharaan (perlindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkembangkan kesadaran multi-stakeholder pembangunan budaya benda dan takbenda. 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan pengelolaan fasilitas kebudayaan. 3. Memperkuat lembaga pelestari budaya dan mengembangkan budaya di Kawasan Cagar Budaya, Saujana Budaya, Desa, dan Kelurahan Budaya
	4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kinerja sektor dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi, kualitas, inovasi dan nilai tambah produk-produk unggulan terutama pada sektor pertanian, perikanan, kehutanan, industri, perdagangan,

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh. 3. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 4. Pengurangan risiko bencana. 5. Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerja sama dengan badan usaha/swasta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pariwisata, dan ekonomi kreatif. 2. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian (PLP2B) 3. Penyediaan ruang dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 4. Memperkuat daya saing dan perlindungan tenaga kerja. 5. Penyiapan regulasi yang kondusif untuk perekonomian. 6. Mengembangkan sosial-ekonomi masyarakat dengan memberdayakan lembaga-lembaga organik lokal, mendayagunakan potensi wisata, budaya, dan kearifan lokal untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. 7. Memperkuat partisipasi warga dan kelembagaan lokal dalam industri wisata. 8. Memperkuat peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dalam kegiatan perekonomian daerah. 9. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 10. Pengurangan risiko bencana secara komprehensif. 11. Menyediakan regulasi yang memperkuat kerja sama antara Pemda dengan badan usaha/swasta. 12. Pembentukan lembaga yang khusus menangani KPBU dan investasi masyarakat lainnya. 13. Melakukan <i>capacity building</i> terkait pembiayaan non APBD dengan intensif
	5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	1. Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru.	1. Pengembangan transportasi dan infrastruktur pendukung Bandara

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	<p><i>Yogyakarta International Airport (YIA).</i></p> 2. Pengembangan Kawasan Selatan sebagai pusat pertumbuhan. 3. Pengembangan sektor pariwisata di kawasan prioritas yang terintegrasi dengan sektor lainnya. 4. Penyiapan potensi dan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong realisasi dan pemerataan investasi.
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>good governance</i>)	1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif. 2. Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah 3. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik.	1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah 2. Menyusun regulasi pengelolaan keuangan 3. Membuat/mengembangkan sistem keuangan daerah yang terintegrasi 4. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerja sama pihak ketiga.
	2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan	1. Mewujudkan sinergitas kelembagaan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, sampai dengan Desa. 2. Penguatan keistimewaan dalam Perangkat Daerah, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, dan Desa	1. Perumusan regulasi sebagai acuan pelaksanaan urusan keistimewaan di tingkat Kabupaten /Kota s.d. Desa 2. Internalisasi budaya pemerintahan pada Pemda dan Kab/Kota
	1. Meningkatkan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah	1. Peningkatan kapasitas badan hukum (Kasultanan dan Kadipaten) dalam melakukan	1. Melakukan fasilitasi Penatausahaan, pemeliharaan dokumen dan pengawasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	<p>pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Desa.</p> <p>2. Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten</p>	2. Melakukan fasilitasi perlindungan, pemanfaatan dan pelepasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa

2. Program Pembangunan Pemerintah Daerah

Program Pembangunan Pemerintah Daerah (Program Pemda) adalah wujud konkret dari upaya yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Dari strategi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Program Pemda yang merupakan Program Lintas Sektor yang menaungi program-program perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Berikut ini Program Pemda untuk masing-masing tujuan dan sasaran:

- 1) Tujuan 1: Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin *kebhinneka-tunggal-ika*-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta.

Sasaran	Program Pemda	Indikator Kinerja	Penanggungjawab
1. Meningkatnya derajat Kualitas SDM	1. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	<p>1. Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);</p> <p>2. Harapan Lama Sekolah</p> <p>3. Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif</p> <p>4. Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju</p>	<p>- Sekretaris Daerah</p> <p>- Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat</p>

Sasaran	Program Pemda	Indikator Kinerja	Penanggungjawab
	2. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	1. Angka Harapan Hidup	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
	2. Program Pembangunan Sosial Masyarakat	1. Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas 2. Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif 3. <i>Total Fertility Rate</i> 4. Perkembangan Desa/Kelurahan Kategori Cepat Berkembang 5. Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (<i>crime rate</i>)	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	1. Program Penanggulangan Kemiskinan	1. Persentase peningkatan penumbuhan wira usaha baru 2. Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n) 3. Pengeluaran per kapita masyarakat	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
3. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	1. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak benda	1. Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan 2. Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan
4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	1. Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	1. Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3. Jumlah Desa Mandiri Budaya (desa/kampung wisata, desa/ kelurahan budaya, Desa <i>Preneur</i> , Desa Prima): Target 2022: 1 Desa Mandiri Budaya	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Sasaran	Program Pemda	Indikator Kinerja	Penanggungjawab
	2. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks kualitas Udara 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 4. Indeks Risiko Bencana	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	3. Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	1. Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan
5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	1. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	1. Persentase peningkatan PDRB pada kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) 2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

2) Tujuan 2: Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*)

Sasaran	Program Pemda	Indikator Kinerja	Penanggungjawab
1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Kemapanan keuangan daerah 2. Optimalisasi aset-aset Pemda DIY (satuan Rp) 3. Nilai eksternal pelayanan publik 4. Nilai internal integritas organisasi 5. Nilai eksternal persepsi korupsi	- Sekretaris Daerah - Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
2. Meningkatnya kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan	1. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	1. Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan 2. Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdis kelembagaan	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan
1. Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	1. Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	1. Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa. 2. Capaian pengelolaan (persen) ditambah capaian pemanfaatan (persen)	- Sekretaris Daerah - Paniradya Keistimewaan

3. Target Kinerja Program Pemda Tahun 2017-2022

No	Program Pemda	Indikator Program Pemda	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Target Kinerja Program Tahun 2022
1	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);	N/A	13,20
		2. Harapan Lama Sekolah	15,23	16,12
		3. Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif	N/A	220
		4. Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	N/A	8,98
2	Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	74,71	75,49
3	Program Pembangunan Sosial Masyarakat	1. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas	N/A	5
		2. Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	N/A	21,62
		3. <i>Total Fertility Rate</i>	N/A	2,1
		4. Perkembangan Desa/ Kelurahan Kategori Cepat Berkembang	24	60
		5. Angka Kejahatan per 100.000 penduduk (<i>crime rate</i>)	N/A	7,33
4	Program Penanggulangan Kemiskinan	1. Persentase peningkatan penumbuhan wira usaha baru	0,2	0,4
		2. Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n)	466.330	278.509
		3. Pengeluaran per kapita masyarakat	13.229	14.593
5	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak benda	1. Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	10,23	15,17%
		2. Persentase peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan	N/A	20,00
6	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian,	1. Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan	42,32	46,00

No	Program Pemda	Indikator Program Pemda	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Target Kinerja Program Tahun 2022
	Industri Pengolahan; Jasa)	akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY		
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,72	2,07
		3. Jumlah Desa Mandiri Budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, Desa <i>Preneur</i> , Desa Prima): Target 2022: 1 Desa Mandiri Budaya	N/A	20
7	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	1. Indeks Kualitas Air	29,17	42,50
		2. Indeks Kualitas Udara	86,39	89,74
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,84	66,20
		4. Indeks Risiko Bencana	165 (tinggi)	125 (sedang)
8	Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	1. Persentase dukungan Program Pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	N/A	78,7
9	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	1. Persentase peningkatan PDRB pada kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	40,15	40,26
		2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi	N/A	83
10	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Kemamanan keuangan daerah.	Sedang	sedang
		2. Optimalisasi aset-aset pemda DIY (satuan Rp)	N/A	9.626.994.395,-
		3. Nilai eksternal pelayanan publik	N/A	8,80
		4. Nilai internal integritas organisasi	4,16	4,60
		5. Nilai eksternal persepsi korupsi	5,21	6
11	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	1. Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan	100	100
		2. Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdis kelembagaan	N/A	100

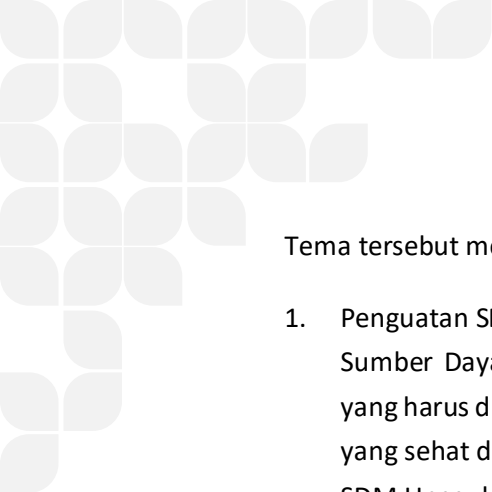
No	Program Pemda	Indikator Program Pemda	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2017)	Target Kinerja Program Tahun 2022
12	Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	1. Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa.	19,83	N/A
		2. Capaian pengelolaan (persen) ditambah capaian pemanfaatan (persen)	N/A	88,67%

E. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

1. Tema Pembangunan Tahun 2022

Penyusunan Tema Pembangunan RKPDIY 2022 berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD DIY 2017-2022 pada tahun perencanaan bersangkutan, mempertimbangkan aspek tema indikatif yang telah dirumuskan RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta arah kebijakan umum pembangunan sebagai referensi tema indikatif. Pilihan Tema Pembangunan RKPDIY 2022 juga memperhatikan aspek keistimewaan, mempedomani RKP 2022 beserta Tema Pembangunan Nasional yang termuat, memperhatikan fokus tematik, serta identifikasi masalah yang dihadapi. Belum selesainya Pandemi Covid-19 pada tahun 2021 juga melandasi penentuan Tema Pembangunan RKPDIY Tahun 2022. Tema pembangunan tahun 2022 juga didasarkan pada asumsi bahwa pasca-pandemi Covid-19 berkurang, dilakukan pemantapan pemulihan kondisi sosial ekonomi di tahun 2022 dan proyek Infrastruktur Nasional tetap masuk di tahun 2022. Dengan berdasarkan hal-hal tersebut, tema RKPDIY Tahun 2022 yaitu:

“Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta”



Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. **Penguatan SDM Unggul**
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subyek dari pembangunan yang harus ditingkatkan terus menerus dengan penguatan SDM Unggul yang sehat dan berpendidikan, SDM Unggul yang berkebudayaan, dan SDM Unggul secara Ekonomi.
2. **Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat**
Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat merupakan obyek atau aktifitas pembangunan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak Covid-19 dengan fokus pada sektor jasa, pertanian, pariwisata dan industri kreatif.
3. **Kualitas Infrastruktur Dasar**
Menjaga kualitas infrastruktur dasar yang ada, agar tetap dapat berfungsi dengan baik dan mantap.

2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Berdasarkan tema RKPD DIY 2022 yakni *Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di DIY* dirumuskan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah di DIY sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan SDM yang berkualitas (sehat, berpendidikan, dan mampu secara ekonomi);
- 2) Peningkatan Infrastruktur layanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
- 3) Peningkatan sektor-sektor unggulan dan potensial;
- 4) Mewujudkan Pembangunan yang merata, selaras dan lestari;
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Prioritas Pembangunan DIY tahun 2022 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan DIY yang tertuang dalam RPJMD DIY 2017-2022, yaitu:

Tabel 1.4. Rumusan Prioritas Daerah DIY Tahun 2022 pada Sasaran Pembangunan Daerah DIY 2017-2022

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Prioritas
1	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Target : 80,29 (2018) s.d. 81,68 (2022)	a. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan b. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Prioritas 1 Pemberdayaan SDM yang berkualitas (sehat, berpendidikan dan mampu secara ekonomi)
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Target : 69,91 (2018) s.d. 70,32 (2022)	Program Pembangunan Sosial Masyarakat	
		2. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	1. Indeks Gini Target : 0,3917 (2018) s.d. 0,3635 (2022) 2. Persentase Angka Kemiskinan Target : 11,23 (2018) s.d. 7,00 (2022)	Program Penanggulangan Kemiskinan	Prioritas 1 Pemberdayaan SDM yang berkualitas (sehat, berpendidikan dan mampu secara ekonomi)
		3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi Target : 11,46 (2018) s.d. 12,04 (2022)	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Prioritas 1 Pemberdayaan SDM yang berkualitas (sehat, berpendidikan, dan mampu secara ekonomi)
	4. Meningkatkan aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi Target : 5,24 (2018) s.d. 5,34 (2022) 2. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Target : 76,5 (2018) s.d. 82,5 (2022) 3. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang	a. Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri, Pengolahan, Jasa) b. Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang c. Program Tata Kelola	Prioritas 2 Peningkatan Infrastruktur layanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi Prioritas 3 Peningkatan sektor-sektor unggulan dan potensial Prioritas 4 Mewujudkan Pembangunan	

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Prioritas
			Strategis Keistimewaan Target : 21,11 (2018) s.d. 54,44 (2022) 4. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Target : 58,58 (2018) s.d. 66,15 (2022)	Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	yang merata, selaras dan lestari
		5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Indeks Williamson Target : 0,4559 (2018) s.d. 0,4489 (2022)	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Prioritas 2 Peningkatan Infrastruktur layanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi
2	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;	1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Opini BPK Target : WTP (2018 s.d. 2022) 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP) Target : A (2018 s.d. 2022)	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Prioritas 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
		2. Meningkatkan kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan. Target : 65,22 (2019) s.d 91,30 (2022)	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	Prioritas 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
		3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan. Target : 7.919 (2018) s.d 21.877 (2022)	Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Prioritas 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sumber: Bappeda DIY, 2023

Prioritas Daerah tersebut juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional yang tertuang di dalam RKP 2022 yaitu:

Tabel 1.5. Interkoneksi Prioritas Daerah DIY Tahun 2022 dengan Prioritas Nasional Tahun 2022

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran	Program Pembangunan Daerah
1	PN-1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 3 Peningkatan sektor-sektor unggulan dan potensial	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	a. Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa) b. Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang c. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan-an Bencana
2	PN-2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas 2 Peningkatan Infrastruktur layanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi Prioritas 3 Peningkatan sektor-sektor unggulan dan potensial	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	a. Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa) b. Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang c. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan-an Bencana
3	PN-3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas 1 Pemberdayaan SDM yang berkualitas (sehat, berpendidikan, dan mampu secara ekonomi)	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	a. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan b. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup Program Pembangunan Sosial Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda
4	PN-4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas 1 Pemberdayaan SDM yang berkualitas (sehat, berpendidikan, dan	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	a. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan b. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran	Program Pembangunan Daerah
		mampu secara ekonomi)		Program Pembangunan Sosial Masyarakat
			Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.	Program Penanggulangan Kemiskinan
			Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda
5	PN-5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas 2 Peningkatan Infrastruktur layanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan
6	PN-6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Prioritas 4 Mewujudkan Pembangunan yang merata, selaras dan lestari	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	a. Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa) b. Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang c. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
7	PN-7: Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
			Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah
			Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa

Sumber: Bappeda DIY, 2023

F. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

a. Batas Administrasi

Secara astronomis, DIY terletak di antara 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur. Sedangkan secara geografis, DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa bagian selatan yang dikelilingi dan berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara, DIY berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali. Sebelah barat, DIY berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, dan sebelah selatan, DIY berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah timur, DIY berbatasan dengan 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021, luas seluruh wilayah DIY adalah 3.173,87 km² atau 0,17% dari total luas Indonesia (1.892.555,47 km²). DIY merupakan provinsi dengan luas terkecil kedua di Indonesia setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Secara administratif, wilayah pemerintahan di DIY terdiri atas 5 (lima) kabupaten/kota, 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, di DIY terdapat sejumlah 4.673 pedukuhan/kampung, 6.905 RW, dan 27.290 RT.

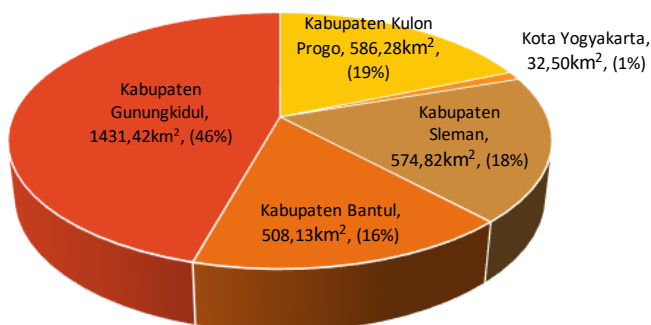
Tabel 1.6. Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Padukuhan/ Kampung	RW	RT
Kulon Progo	Wates	12	88	930	1.862	4.472
Bantul	Bantul	17	75	933	-	5.905
Gunungkidul	Wonosari	18	144	1.429	1.492	6.822
Sleman	Sleman	17	86	1.212	2.934	7.556
Kota Yogyakarta	Yogyakarta	14	45	169	617	2.535
DI Yogyakarta		78	438	4.673	6.905	27.290

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2022 (data diolah)

b. Luas Wilayah

Kabupaten/Kota dengan wilayah paling luas di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul yaitu 1.31,42 km² atau 46% dari luas DIY. Sedangkan Kota Yogyakarta merupakan wilayah paling kecil yaitu 32,50 km² atau 1% dari luas DIY. Proporsi luas masing-masing wilayah kabupaten/kota di DIY terhadap luas DIY secara keseluruhan berdasarkan Permendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1. 1. Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2022 (data diolah)

c. Topografi

Bentang alam DIY secara topografi dibagi menjadi kemiringan lahan dan ketinggian lahan dengan penjabaran sebagai berikut:

1) Kemiringan Lahan

Berdasarkan data Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY hasil analisis tahun 2022, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi enam kategori, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.126,48 km², lahan dengan kemiringan 2-8 % seluas 522,73 km², lahan dengan kemiringan 8-15% seluas 302,80 km², lahan dengan kemiringan 15-25% seluas 516,52 km², lahan dengan kemiringan 25-40 % seluas 332,83 km², lahan dengan kemiringan lebih dari 40 % seluas 367,03 km².

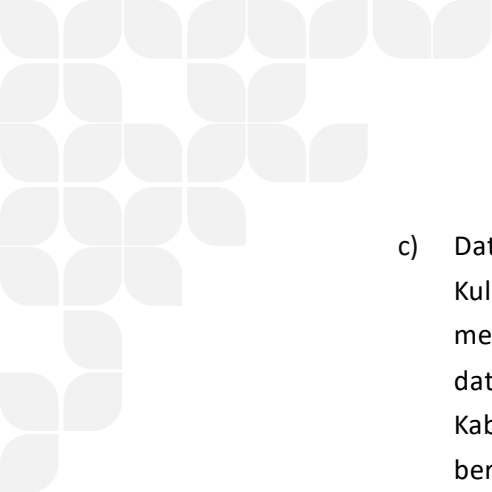
2) *Ketinggian Lahan*

Wilayah DIY dibagi menjadi empat kategori menurut ketinggian lahan yaitu wilayah yang memiliki ketinggian lahan kurang dari 100 meter di atas permukaan laut (mdpl) sebesar 28,84%, wilayah dengan ketinggian lahan 100-499 mdpl sebesar 65,65%, dan wilayah dengan ketinggian lahan 500-999 mdpl sebesar 5,04%, serta wilayah dengan ketinggian lahan di atas 1000 mdpl sebesar 0,47%.

3) *Satuan Fisiografis*

Wilayah DIY terdiri dari satuan fisiografis pegunungan selatan karst, fisiografis gunung api, fisiografis dataran aluvial (dataran rendah graben Bantul), dan perbukitan denudasional Kulon Progo berikut dataran aluvial pantai di sisi selatan wilayah Kulon Progo. di selatan DIY terletak Samudera Hindia yang kaya potensi sumber daya alam. Penjelasan tentang satuan fisiografis di DIY sebagai berikut:

- a) Satuan Pegunungan Selatan, seluas $\pm 1.656,25$ km², ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran basin Wonosari. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang.
- b) Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas $\pm 582,81$ km², ketinggian 80-2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air.

- 
- c) Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas $\pm 215,62$ km², ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu, daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam *marine* dan *aeolin* yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir.
 - d) Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas $\pm 706,25$ km², ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

2. Gambaran Umum Demografi

a. Jumlah Penduduk

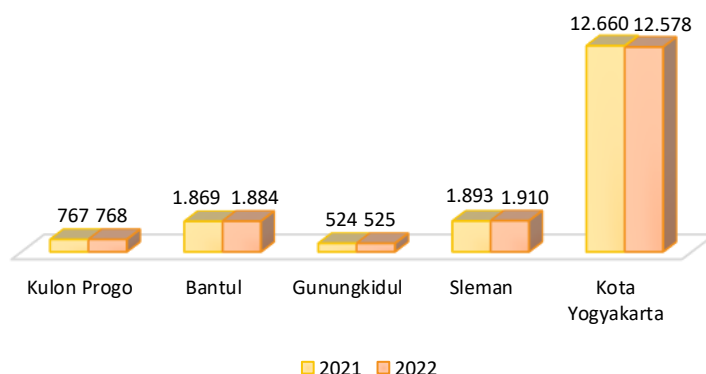
Jumlah penduduk DIY pada akhir semester II tahun 2022 menurut data Biro Tata Pemerintahan Setda DIY rilis tahun 2023 tercatat sebanyak 3.693.834 jiwa yang tersebar di lima kabupaten/kota. Kabupaten Sleman sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 1.097.955 jiwa atau 29,72% dari seluruh penduduk DIY. Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kota Yogyakarta yakni sebanyak 412.797 jiwa atau 11,18% dari seluruh penduduk DIY. Lebih lanjut mengenai jumlah penduduk di DIY pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.7. Jumlah Penduduk DIY Semester II Tahun 2022 Menurut Wilayah Administrasi Pemerintahan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase
1.	Kulon Progo	443.591	12,01%
2.	Bantul	964.245	26,10%
3.	Gunungkidul	775.246	20,99%
4.	Sleman	1.097.955	29,72%
5.	Yogyakarta	412.797	11,18%
	Jumlah	3.693.834	100,00%

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

Jumlah penduduk dan luas wilayah tiap kabupaten menjadi sebab kepadatan penduduk di tiap kabupaten di DIY berbeda-beda. DIY dengan luas wilayah 3.173,87 km², secara umum kepadatan penduduk DIY pada tahun 2022 adalah 1.164 jiwa/km² meningkat dari 1.159 jiwa/km² pada tahun 2021. Wilayah paling padat penduduknya yaitu Kota Yogyakarta, karena meskipun jumlah penduduknya paling sedikit namun luas wilayahnya juga sangat kecil. Kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 tercatat sebesar 12.578 jiwa/km². Wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk paling rendah di DIY pada tahun 2022 adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu 525 jiwa/km². Grafik di bawah ini memberikan gambaran mengenai perbandingan kepadatan penduduk di wilayah administratif DIY pada tahun 2021 dan 2022.



Gambar 1.2. Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa/km²) Tahun 2021 dan 2022

Sumber: Luas wilayah menurut Keputusan Kemendagri 050-145 tahun 2022

b. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu dalam satuan persen. Pertambahan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Menurut disiplin ilmu demografi, dikenal dua istilah umum yaitu pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Pertambahan penduduk alami hanya dipengaruhi oleh kejadian alami, yaitu kelahiran dan kematian. Pertambahan penduduk total dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi). Pertumbuhan penduduk total dihitung dengan rumus berikut: $P = (L-M) + (I-E)$

Menurut *data series* kependudukan yang dirilis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY beberapa kabupaten menunjukkan tingkat pertumbuhan negatif pada rentang tahun 2020-2021-2022. Kabupaten tersebut adalah Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Pertumbuhan negatif ini ditunjukkan cukup signifikan pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2022. Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman menunjukkan pertumbuhan positif secara konsisten sejak 2018 hingga 2022, bahkan cenderung meningkat. Secara total di wilayah DIY pertumbuhan penduduk juga konsisten menunjukkan angka positif dari tahun 2018-2022.

Tabel 1.8. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2022

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk DIY					
		2.017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kulon Progo	0,17%	0,47%	-0,19%	-0,95%	-0,03%	0,16%
2	Bantul	-0,16%	1,35%	1,02%	0,57%	0,19%	0,81%
3	Gunungkidul	-0,69%	1,07%	0,60%	0,61%	-0,02%	0,10%
4	Sleman	-3,02%	1,65%	1,09%	0,67%	0,49%	0,90%
5	Yogyakarta	-0,34%	0,74%	0,02%	0,50%	-0,15%	-0,65%
	DIY	-1,10%	1,20%	0,69%	0,41%	0,17%	0,45%

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023 (Data Diolah)

c. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Pandemi Covid-19 berdampak pada kondisi ketenagakerjaan DIY. Berdasarkan data Sakernas BPS Bulan Agustus 2022, masih terdapat pengangguran sebesar 102.740 penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19. Meskipun demikian angka tersebut sudah jauh menurun dibandingkan data tahun 2021 sebesar 355.310 orang. Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak angkatan kerja yang kehilangan pekerjaan dan masuk dalam kelompok Bukan Angkatan Kerja.

Bukan Angkatan Kerja (BAK) adalah penduduk usia 15 tahun dan lebih yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Jumlah BAK dalam kurun lima tahun (2018-2022) fluktuatif dan mengalami kondisi tertinggi pada tahun 2020 sebesar 904.592 orang.

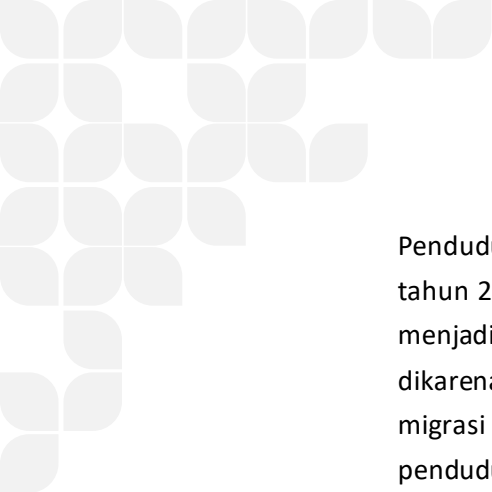
1) Penduduk Usia Kerja

Yang masuk dalam golongan Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, terbagi ke dalam Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Perbandingan rata-rata selama 5 tahun (2018-2022) menunjukkan porsi Angkatan Kerja 72,62% dan Bukan Angkatan Kerja 27,38%.

Tabel 1.9. Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan DIY Tahun 2018-2022

Kegiatan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan kerja	2.226.284	2.246.194	2.228.162	2.334.955	2.336.076
Bekerja	2.151.252	2.174.712	2.126.316	2.228.523	2.241.131
Penganggur	75.032	71.482	101.846	106.432	94.945
Bukan angkatan kerja	818.302	842.635	904.592	840.832	881.798
Sekolah	259.491	278.350	277.808	253.480	263.289
Mengurus rumah tangga	461.036	463.355	526.850	472.342	499.163
Lainnya	97.775	100.930	99.934	115.012	119.346
Penduduk usia kerja	3.044.586	3.088.829	3.132.754	3.175.787	3.217.874
TPAK (%)	73,12	72,72	71,12	73,52	72,60
TPT (%)	3,37	3,18	4,57	4,56	4,06
TKK (%)	96,63	96,82	95,43	95,44	95,94

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022



Penduduk Usia Kerja dalam lima tahun terakhir terus bertambah, tahun 2018 sebanyak 3.044.586 orang bertambah 173.288 orang menjadi 3.217.874 orang pada tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan karena adanya laju pertumbuhan penduduk dan migrasi Angkatan Kerja ke DIY. Sehingga perlu disiapkan agar penduduk usia kerja tersebut memiliki kualitas unggul sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja yang berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan ketenagakerjaan DIY.

2) *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara Angkatan Kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja, yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. BPS mencatat bahwa TPAK DIY tahun 2018-2022 fluktuatif, mencapai angka terendah tahun 2020 sebesar 71,12% dan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 73,52%. TPAK tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 72,60%, Hal ini disebabkan karena perpindahan penduduk ke DIY terutama pada usia angkatan kerja, seperti pelajar/mahasiswa.

Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu rantai perekonomian. TPAK DIY didominasi oleh angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah dan tinggi, sehingga DIY mempunyai pasokan SDM berkualitas yang dapat difungsikan sebagai subyek pembangunan. Pada tahun 2022 masih terdapat kesenjangan antara TPAK laki-laki dan perempuan dengan perbandingan TPAK laki-laki 82,22% dan TPAK perempuan 63,38%. Pemberian keterampilan bagi perempuan akan mendorong mereka untuk masuk ke pasar kerja dan melakukan kegiatan ekonomi.

3) Angkatan Kerja


Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja selama tahun 2018-2022 memiliki tren meningkat, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2020 karena dampak dari pandemi Covid-19.

Tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap kualitas angkatan kerja. Angkatan kerja DIY kurun waktu 2018-2022 didominasi dengan tingkat pendidikan menengah ke atas. Pada tahun 2018 berjumlah 1.223.665 orang. Angkatan kerja di DIY bertambah 105.142 orang menjadi 1.328.807 orang pada tahun 2022. Sedangkan jumlah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan rendah (SD dan SLTP) pada tahun 2022 sebanyak 1.007.269 orang mengalami kenaikan sebesar 4.650 orang dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 1.002.619 orang. Kelompok ini perlu diintervensi melalui pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sehingga siap masuk ke pasar kerja.

4) Penduduk yang Bekerja

Angkatan kerja DIY yang terus meningkat harus diimbangi dengan strategi pertumbuhan kesempatan kerja untuk perluasan cakupan penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja jumlahnya fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi mendorong pertambahan penduduk yang bekerja, naik menjadi 2.228.523 orang pada tahun 2021 dan bertambah menjadi 2.241.131 orang pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 sektor-sektor penggerak pariwisata mulai tumbuh dan berpengaruh langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Tiga sektor dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi adalah sektor akomodasi dan makan minum naik 1,61%, sektor pengangkutan dan pergudangan naik 1,31% dan sektor jasa lainnya naik 0,75%. Sementara sektor yang mengalami penurunan

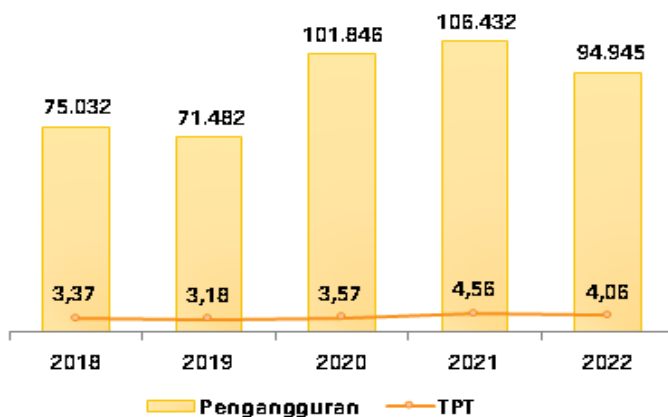


paling besar adalah sektor perdagangan dengan capaian tahun 2022 sebesar 19,84%. Penduduk yang bekerja di sektor perdagangan mengalami penurunan sebanyak 44.758 orang apabila dibandingkan tahun 2021. Sektor yang mengalami penurunan selanjutnya adalah sektor pertanian dan industri pengolahan. Hal ini disebabkan mulai beralihnya tenaga kerja ke sektor formal seperti masa sebelum pandemi atau beralih ke sektor lain.

Pada tahun 2022 penduduk bekerja di sektor formal sebesar 1.044.856 orang naik sebesar 49.940 orang dibanding tahun 2021. Kondisi ini disumbang oleh penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan/pegawai yang meningkat 45.886 orang menjadi 962.181 orang pada tahun 2022. Kenaikan penduduk bekerja di sektor formal disebabkan adanya penyerapan tenaga kerja baru dan peralihan pekerja informal kembali bekerja menjadi buruh/karyawan/pegawai. di sisi lain terjadi penurunan pekerja informal dari 1.233.607 orang tahun 2021 menjadi 1.196.275 orang di tahun 2022.

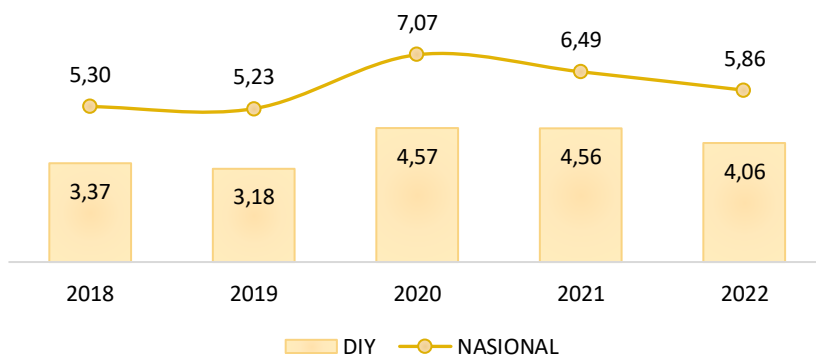
5) *Pengangguran Terbuka*

Jumlah pengangguran terbuka di DIY sempat meningkat tajam pada tahun 2020 dan 2021, terdapat penambahan 34.950 orang menjadi 106.432 orang dibanding tahun 2019 sebanyak 71.482 orang. Lonjakan jumlah pengangguran ini dipicu adanya pandemi Covid-19, sehingga banyak tenaga kerja formal dan informal kehilangan pekerjaan.



Gambar 1.3. Pengangguran Terbuka dan TPT Tahun 2018-2022
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Dalam dua tahun terakhir penganggur jumlahnya terus menurun dan pada tahun 2022 menjadi 94.945 orang, dengan komposisi 38,66% penganggur berpendidikan SMP ke bawah, 48,60% penganggur berpendidikan menengah (SMA dan SMK) dan 12,74% penganggur berpendidikan tinggi (diploma dan sarjana). Tingginya penganggur dengan tingkat pendidikan SMA dan SMK disebabkan karena jumlah penambahan angkatan kerja pada jenjang pendidikan tersebut juga tertinggi, serta kesiapan dalam memasuki pasar kerja perlu didukung keterampilan dan karakter yang baik.



Gambar 1.4. TPT Nasional dan DIY Tahun 2018-2022
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Selama lima tahun terakhir TPT DIY masih di bawah rata-rata TPT nasional, dengan capaian fluktuatif dan tertinggi 4,57% terjadi pada tahun 2020 dan ditahun yang sama capaian TPT nasional sebesar 7,07%. Selanjutnya capaian TPT terus menurun menjadi 4,06% di tahun 2022, tetapi capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan TPT sebelum pandemi Covid-19. Capaian TPT digunakan sebagai acuan untuk perluasan kesempatan kerja dan perkembangan TPT ini dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan. Secara lebih luas indikator TPT digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Sehingga untuk menekan dan menurunkan jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan multi sektor.

d. Pendidikan

Pemda DIY berupaya untuk memenuhi hak dasar tiap warga negara berupa pendidikan yang layak, melalui pemberian layanan kepada penduduk usia sekolah. Pada tahun 2022 terdapat 628.145 orang berada pada rentang usia sekolah (usia 7 - 18 tahun) atau setara 17,08%. Dari angka tersebut, sebanyak 619.414 orang atau 98,61%, merupakan peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berikut rincian jumlah penduduk menurut usia sekolah di DIY.

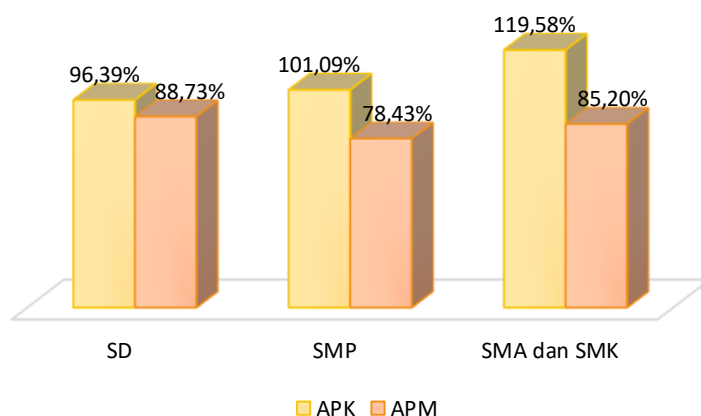
Tabel 1.10. Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk*	Penduduk Menurut Usia Sekolah									Total Penduduk Usia Sekolah
			7 - 12			13 - 15			16 - 18			
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Bantul	956	43	41	84	22	21	44	18	18	37	166
		.513	.444	.129	.573	.856	.530	.386	.847	.228	.075	.034
2	Gunungkidul	774	31	29	60	16	15	31	15	14	29	121
		.441	.344	.192	.536	.530	.261	.791	.176	.243	.419	.746
3	Kulon Progo	442	19	17	37	10	9	19	9	8	18	75
		.874	.244	.931	.175	.115	.404	.519	.409	.935	.344	.038
4	Sleman	1.088	50	47	98	26	24	50	21	20	41	190
		.109	.286	.954	.240	.076	.834	.910	.295	.510	.805	.955
5	Yogyakarta	415	18	17	35	10	9	19	9	9	18	74
		.509	.095	.627	.722	.008	.657	.665	.652	.333	.985	.372
	DIY	3.677	162	153	316	85	80	166	74	71	145	628
		.446	.413	.833	.246	.585	.686	.271	.379	.249	.628	.145

Catatan: *) data jumlah penduduk merupakan data semester 1 tahun 2022

Sumber: Disdikpora, 2022

Partisipasi penduduk usia sekolah di DIY digambarkan dalam capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APM adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang sesuai dengan kelompok usianya. Capaian APK dan APM DIY tahun 2022 digambarkan pada grafik berikut.



Gambar 1.5. Capaian APK dan APM DIY Tahun 2022

Sumber: Dikpora DIY, 2022

Terlihat bahwa tingginya capaian APK tahun 2022 menunjukkan tingginya tingkat partisipasi penduduk DIY dalam menuntaskan pendidikan sampai jenjang menengah. Sedangkan capaian APM berdasarkan grafik menunjukkan bahwa masih ada siswa yang usianya di luar kategori jenjang pendidikan.

Tingginya tingkat partisipasi pendidikan penduduk DIY perlu didukung sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang kompeten. Selain itu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, keberadaan lembaga pendidikan formal dan non-formal juga menjadi faktor penting. Berikut data jumlah lembaga pendidikan formal di DIY tahun 2022.

Tabel 1.11. Jumlah Lembaga Pendidikan Formal di DIY Tahun 2022

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Lembaga	
		Negeri	Swasta
1	SD/ MI	1.445	598
2	SMP/ MTs	249	335
3	SMA/ MA	86	156
4	SMK	50	162
5	SLB	9	70

Sumber: Disdikpora DIY, 2022

Adapun lembaga pendidikan nonformal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) juga berperan penting. Berdasarkan pendataan terdapat 5 SKB dan 99 PKBM di seluruh DIY. Untuk lembaga pendidikan usia dini tercatat sebanyak 2.145 Taman Kanak-Kanak dan 248 *Raudhatul Athfal* yang menjadi penyelenggara pendidikan sebelum anak memasuki pendidikan formal SD sederajat.

Pembelajaran di lembaga pendidikan perlu pula didukung dengan fasilitas seperti ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, ruang praktik siswa, laboratorium, UKS, dan toilet. Secara umum kondisi fasilitas pembelajaran di DIY berada dalam kondisi baik dan hanya memerlukan pemeliharaan rutin berkala. Pemda DIY juga memastikan ketersediaan jaringan listrik dan koneksi internet yang memadai untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi di sekolah.

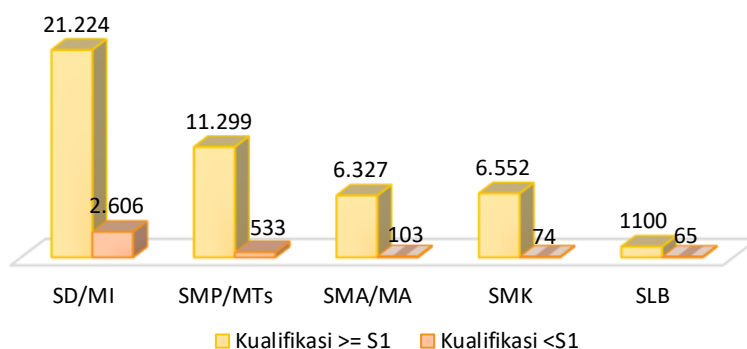
Sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), pendidik yang kompeten merupakan salah satu syarat mutlak pengelolaan pendidikan yang berkualitas. Berikut adalah jumlah tenaga pendidik di DIY pada tahun 2022.

Tabel 1.12. Jumlah Guru di DIY Tahun 2022

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Guru		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	SD/ MI	6.811	15.699	22.510
2	SMP/ MTs	4.626	7.206	11.832
3	SMA/ MA	2.781	3.703	6.484
4	SMK	3.070	3.624	6.694
5	SLB	331	834	1.165

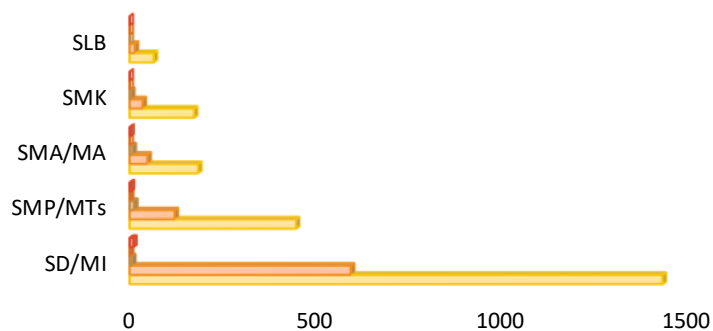
Sumber: Disdikpora DIY, 2023

Kualifikasi akademik minimal bagi para pendidik telah ditentukan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program Sarjana atau program Diploma IV. Berikut adalah gambaran kualifikasi pendidikan guru jenjang pendidikan dasar, menengah, dan khusus di DIY tahun 2022.



Gambar 1.6. Jumlah Guru Berkualifikasi di DIY Tahun 2022
 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2023

Berdasarkan grafik, masih terdapat pendidik di DIY yang memiliki kualifikasi akademik belum sesuai SNP, terutama untuk jenjang SD/MI. Dukungan yang telah diberikan Pemda DIY bagi kemajuan pendidikan salah satunya diukur melalui pencapaian predikat akreditasi satuan pendidikan, dengan komponen penilaian utama yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah/madrasah. Berikut adalah data akreditasi satuan pendidikan tahun 2022.



	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	SLB
Belum Terakreditasi	10	3	2	0	0
Tidak Terakreditasi	1	1	0	0	0
Akreditasi C	7	12	8	4	0
Akreditasi B	594	121	48	35	14
Akreditasi A	1431	447	184	173	65

Gambar 1.7. Capaian Akreditasi Sekolah/Madrasah DIY Tahun 2022
 Sumber: BAN Provinsi DIY, 2023

Diperlukan pendampingan intensif terhadap satuan Pendidikan yang memiliki predikat C maupun Tidak Terakreditasi. Sembari mempertahankan capaian kualitas satuan pendidikan terakreditasi A dan B. Melalui dukungan pencapaian kualitas satuan pendidikan oleh Pemda DIY, diharapkan kualitas pelayanan satuan pendidikan dapat meningkat sehingga dapat menurunkan angka putus sekolah.

Proporsi anak yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan jenjang pendidikan tertentu diukur melalui angka putus sekolah. Berikut gambaran angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah di DIY tahun 2022.

Tabel 1.13. Angka Putus Sekolah Tahun 2022

No	Satuan Pendidikan	Angka Putus Sekolah (%)
1	SD/MI	0,08
2	SMP/MTs	0,15
3	SMA/MA /SMK	0,73

Sumber: Disdikpora DIY, 2023

Berdasarkan data di atas, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah lebih tinggi daripada jenjang pendidikan dasar. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti permasalahan sosial, ekonomi keluarga, maupun psikologis siswa yang menghambat penuntasan pendidikan siswa.

Guna menekan bertambah besarnya angka putus sekolah, Pemda DIY berupaya memberikan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu sehingga dapat mengurangi hambatan ekonomi siswa dalam menuntaskan pendidikan. Selain itu Pemda DIY juga mendorong pihak sekolah untuk selalu melakukan pendekatan terhadap siswa yang rawan putus sekolah, baik melalui konseling khusus dan kunjungan rumah, sebagai upaya mendorong siswa menyelesaikan pendidikan sampai jenjang sekolah menengah.

e. **Kondisi Ekonomi Daerah**

1) *Sektor Unggulan*

a) *Sektor Industri Pengolahan*

Pada tahun 2022 sektor Industri pengolahan berkontribusi 11,93% pada PDRB DIY atau sebesar Rp12.893.390 Juta dan tumbuh sebesar 1,76% dari tahun sebelumnya. Sebagai Kontributor utama pada PDRB DIY, sektor ini didukung sub sektor utama yaitu Industri Makanan dan Minuman dengan PDRB sebesar Rp7.088.645 Juta, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi dengan PDRB sebesar Rp1.520.698 Juta, serta Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik dengan PDRB sebesar Rp820.379 Juta.

Tabel 1.14. Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan di DIY Tahun 2018-2022

Sub Sektor	2018 (Rp Juta)	2019 (Rp Juta)	2020 (Rp Juta)	2021 (Rp Juta)	2022 *) (Rp Juta)
Industri Makanan dan Minuman	6.954.983	7.508.502	7.163.559	6.966.042	7.088.645
Industri Pengolahan Tembakau	514.937	523.805	567.979	631.429	642.542
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.348.911	1.439.853	1.372.243	1.494.396	1.520.698
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	307.907	305.131	251.674	256.988	261.511

Sub Sektor	2018 (Rp Juta)	2019 (Rp Juta)	2020 (Rp Juta)	2021 (Rp Juta)	2022 *) (Rp Juta)
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	209.432	209.621	198.958	187.174	190.468
Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	287.372	307.556	296.475	283.779	288.773
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	154.826	157.738	174.644	175.133	178.216
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	253.462	256.768	249.831	268.043	272.761
Industri Barang Galian bukan Logam	373.124	369.065	318.837	332.928	338.788
Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik	770.481	785.492	792.350	806.191	820.379
Industri Mesin dan Perlengkapan	476.243	471.570	417.446	411.897	419.147
Industri Alat Angkutan	2.703	2.771	2.787	2.428	2.471
Industri Furnitur	545.915	566.496	542.972	584.491	594.778
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	286.561	296.360	274.361	269.437	274.179
Jumlah	12.486.855	13.200.727	12.624.114	12.670.357	12.893.355

Ket.: *) Angka Proyeksi

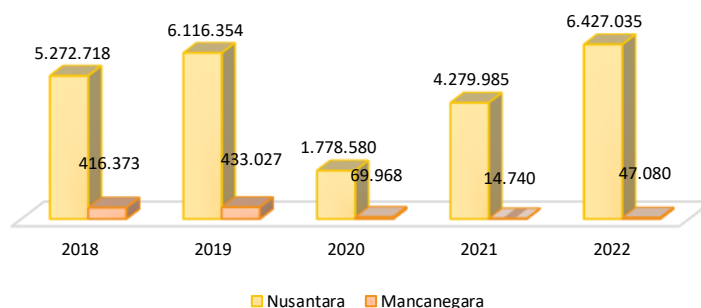
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

b) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Tahun 2022 sektor pariwisata DIY mengalami pemulihan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2021. Beberapa indikator sektor pariwisata dapat menunjukkan pemulihan kondisi bila dibandingkan dengan tahun 2021.

Kunjungan wisatawan nusantara tahun 2022 mencapai 6.427.035 wisatawan. Bila dibandingkan tahun 2021 dengan capaian 4.279.985 wisatawan terdapat peningkatan sebesar 50,16%. Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara lebih dipengaruhi dari pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas bagi masyarakat.

Kunjungan wisatawan mancanegara di DIY pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2021. Namun inflasi global masih berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan mancanegara, sehingga perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara ke DIY belum dapat pulih seperti pada saat sebelum masa pandemi COVID-19.



Gambar 1.8. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Nusanantara dan Mancanegara 2018-2022

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

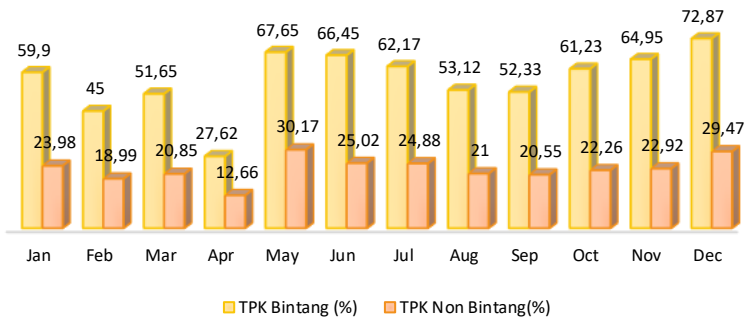
Peningkatan aktivitas pariwisata mendorong peningkatan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang dan hotel non bintang di DIY. Pada tahun 2022 TPK hotel bintang mencapai 57,08% dan mengalami pertumbuhan positif bila dibandingkan dengan tahun 2021. TPK hotel di DIY pada tahun 2022 didominasi oleh wisatawan nusantara.

Tabel 1.15. Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang dan Non Bintang di DIY Tahun 2018-2022

Tingkat Penghunian Kamar (%)	2018	2019	2020	2021	2022
Hotel Bintang	57.24	58.91	35.96	40.26	57.08
Hotel Non Bintang	28.25	35.61	15.86	15.05	22.73

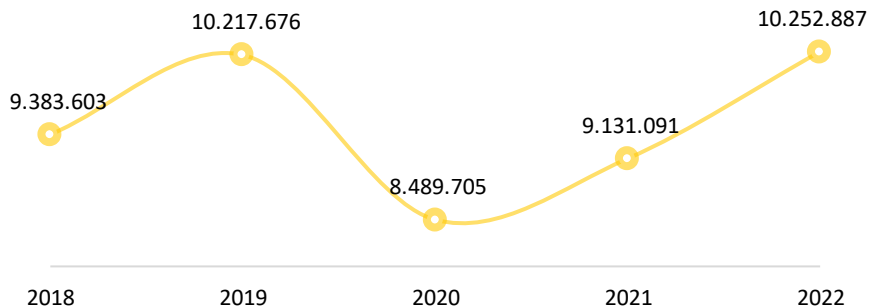
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023 (data diolah)

Capaian tertinggi TPK hotel bintang di tahun 2022 terjadi pada bulan Desember mencapai 72,87%, sedangkan TPK hotel non bintang titik tertinggi dicapai pada bulan Mei yang mencapai 30,17%.



Gambar 1.9. Tingkat Penghunian Kamar di Hotel Bintang & Non Bintang Tahun 2022
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2022 memberikan dampak yang cukup signifikan. PDRB sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2022 (harga konstan) mencapai Rp 10.252.887 (juta rupiah), meningkat dari tahun 2021 yang mencapai Rp 9.131.091 (juta rupiah) atau meningkat sebesar Rp 1.121.796 (juta rupiah). Capaian PDRB sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2022 adalah capaian tertinggi dalam kurun waktu 2018-2022.



Gambar 1.10. PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2018-2022
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Titik tertinggi pada capaian PDRB sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum pada tahun 2022, dicapai pada triwulan IV yang mencapai Rp2.776.217 (juta rupiah). di triwulan IV terjadi kunjungan wisatawan yang cukup tinggi khususnya pada pada bulan Oktober hingga Desember.

Tabel 1.16. PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2022

Lapangan Usaha	Harga Konstan				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.425.532	2.608.664	2.442.474	2.776.217	10.252.887

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

c) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan karena sektor ini memiliki kontribusi dalam berbagai aspek, salah satunya perekonomian.

Pertanian memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Sektor ini menjadi penyerap tenaga kerja dan sarana dalam mengatasi kemiskinan karena sebagian besar penduduk miskin tinggal di pedesaan dan bernaung sebagai petani. Majunya sektor pertanian akan mendorong pertumbuhan agroindustri di hilir yang mampu meningkatkan nilai tambah dan ekspor untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Kinerja sektor pertanian pasca-pandemi berkontribusi sebesar 6,76% terhadap PDRB DIY di tahun 2022. Hal ini memperlihatkan bahwa sektor pertanian telah terbukti tangguh baik saat kondisi ekonomi normal maupun saat menghadapi krisis.

Subsektor pertanian yang mendukung kinerja adalah sebagai berikut:

(1) Tanaman Pangan

Subsektor tanaman pangan merupakan subsektor yang strategis karena menghasilkan produk yang menjadi bahan pangan pokok bagi mayoritas penduduk. Beberapa komoditas pangan penting adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Kurangnya suplai dari salah satu atau lebih komoditas pangan tersebut berdampak pada berbagai permasalahan seperti inflasi dan kekurangan pangan. Oleh karena itu, Pemda DIY selalu berusaha menjaga kecukupan pangan melalui berbagai upaya, di antaranya kegiatan yang mengarah pada peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai serta pengembangan beberapa komoditas lain meliputi tanaman sereal, tanaman aneka kacang dan umbi. Upaya peningkatan produksi dan pengembangan komoditas tanaman pangan di DIY antara lain dilakukan dengan penyediaan benih unggul bersertifikat, penyediaan sarana produksi berupa pupuk dan pestisida, perlindungan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berupa penyediaan alat mesin pertanian dan unit pengolahan hasil pertanian.

Tabel 1.17. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan Tahun 2021-2022**

No	Komoditas	Luas Panen (ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (ton)	
		2021	2022**	2021	2022**	2021	2022**
1	Padi	146.925	150.480	59,56	58,56	875.041	881.199
2	Jagung	67.036	65.391	53,41	48,57	358.022	317.612
3	Ubi Kayu	46.678	45.373	188,97	231,22	882.073	1.049.156


Keterangan: **) Angka sangat sementara

Sumber: DPKP DIY, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa komoditas yang mengalami peningkatan produksi pada tahun 2022 adalah padi dan ubi kayu. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan produksi pada tahun 2022 adalah jagung. Peningkatan produksi didukung curah hujan optimal dan program pemerintah dalam pengembangan kawasan untuk meningkatkan luas panen dan produktivitas. Di sisi lain, kondisi iklim menurunkan produksi jagung.

(2) *Kelautan dan Perikanan*

Pasca-pandemi Covid-19 tahun 2022, geliat perekonomian mulai tumbuh ditandai dengan meningkatnya berbagai aktivitas masyarakat, utamanya di sektor pekerja, sektor pendidikan, sektor pariwisata. Hal ini merupakan faktor utama dalam mendukung peningkatan permintaan terhadap produk perikanan. Produksi perikanan budidaya dari sebesar 96.401 Ton pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1.239 Ton atau 1,28% menjadi 97.640 Ton di tahun 2022 (Sumber: Data Produksi DKP DIY 2022). Peningkatan jumlah produksi perikanan di DIY didukung dengan pengembangan usaha perikanan budidaya di kolam air tenang, tambak, sawah (mina padi dan ugadi), serta karamba. Komoditas unggulan perikanan budidaya di DIY yaitu ikan Lele 46.715,78 ton (47,93%), Nila 31.028,37 ton (31,84%), Gurami 4.582,73 ton (4,70%), dan udang Vanamei 4.937,69 ton (5,07%). Sedangkan komoditas unggulan perikanan budidaya adalah ikan Nila Merah Nilasa, Mas Najawa, dan Tawes Jois, dan pada tahun 2022 telah merilis Undang Galah Sijawa dengan nomor SK 23/KEPMEN-KP/2022.



Produksi perikanan tangkap dari sekitar 7.122 ton pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan sekitar 50,43 ton atau 0,01% menjadi 7.072 ton di tahun 2022. Komoditas unggulan perikanan tangkap laut di DIY diantaranya Cakalang 856,30 ton (12,11%), Manyung 603,60 ton (8,54%), Layang 422,35 ton (5,97%), Kembung 396,29 ton (5,60%), Tuna 371,35 ton (5,25%), dan Layur 282,11 ton (3,99 %). Total produksi ikan yang bersumber dari perairan laut sebesar 4.903,55 ton (69,34%). Produksi perikanan tangkap juga didukung oleh komoditas perikanan tangkap yang berasal dari perairan daratan seperti sungai, embung, waduk maupun genangan air lainnya. Komoditas unggulan perairan daratan di DIY antara lain Nila 352,25 ton (5,00%), Tawes 243,09 ton (3,44%), Lele 172,20 ton (2,43%), Gabus 149,12 ton (2,11%), Mas 137,73 ton (1,95%), Keting 130,13 ton (1,84%), Mujair 104,15 ton (1,47%), dan Sidat 93,32 ton (1,32%). Total produksi ikan yang bersumber dari perairan darat sebesar 2.168,31 ton (30,66%). Adanya sedikit penurunan produksi perikanan tangkap laut disebabkan oleh tidak adanya produksi Ubur-Ubur, gelombang pasang yang besar dan cuaca kurang mendukung aktivitas penangkapan ikan.

Produksi olahan perikanan pada tahun 2022 sebesar 786,7 ton (data sementara) atau naik 133,5 ton dari tahun 2021. Produksi olahan yang dihasilkan berupa Bandeng Presto, Nugget, Bakso, Otak-Otak, Sosis Ikan, Kerupuk Ikan, dan Crispy Ikan. Harapannya dengan tingginya produksi olahan mampu meningkatkan angka konsumsi ikan yang ada di DIY.

(3) Hortikultura

Komoditas hortikultura yang menjadi unggulan di DIY adalah Cabai, Bawang Merah, Durian dan Salak. Pada tahun 2022 komoditas Bawang Merah, Cabai Besar, dan Cabai Rawit yang juga masuk dalam kelompok komoditas pangan utama mengalami penurunan produksi disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan serangan OPT sehingga menyebabkan gagal panen. Penurunan produksi Bawang Merah juga disebabkan tingginya harga benih.

Komoditas buah unggulan DIY yaitu Durian mengalami peningkatan sebesar 3,62% atau mengalami kenaikan produksi sebanyak 335 ton dari semula 9.258 ton di tahun 2021 menjadi 9.593 ton di tahun 2022. Hal ini didukung oleh adanya pengembangan kawasan buah dengan model pengembangan kampung buah berupa bantuan intensifikasi maupun ekstensifikasi. di sisi lain, komoditas Salak mengalami penurunan produksi sebesar 9,54% atau sebesar 5.464 ton disebabkan harga Salak yang cenderung rendah sehingga petani beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan. Selain itu usia tanaman Salak yang sebagian besar sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun menyebabkan penurunan produksi. Rendahnya harga Salak disebabkan karena kualitas buah yang menurun. Hal ini terjadi karena petani tidak melakukan pemeliharaan tanaman secara intensif, sehingga mempengaruhi kualitas buah. Hal ini terjadi sebagai salah satu dampak Covid-19 yang mengakibatkan terhentinya ekspor Salak hingga pertengahan tahun 2022.

Tabel 1.18. Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2021-2022

No	Komoditas	Satuan	Produksi	
			2021	2022*
1	Cabai besar	Ton	38.378	35.384
2	Cabai rawit	Ton	15.933	15.198
3	Bawang merah	Ton	29.809	21.911
4	Durian	Ton	9.258	9.593
5	Salak	Ton	57.296	51.832

Keterangan: *) Angka sementara

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2023

(4) Perkebunan

Pengembangan sub sektor perkebunan di DIY diarahkan pada *specialty product* berbasis *cluster/kawasan* serta integrasi perkebunan dengan wisata (agrowisata). Pemberdayaan kelembagaan petani pekebun saat ini tidak hanya mengupayakan peningkatan produksi, kualitas, maupun penganekaragaman produk olahan, namun juga mengedepankan agrowisata yang sesuai dengan potensi wilayah setempat, antara lain: perkebunan teh di Kecamatan Samigaluh Kulon Progo, kopi di Kecamatan Samigaluh dan Girimulyo Kulon Progo, serta kakao di Kecamatan Patuk dan Ponjong Gunungkidul.

Tabel 1.19. Produksi Komoditas Perkebunan Unggulan DIY Tahun 2021-2022**

No	Komoditas	Produksi (Ton)			Wujud Produksi
		2021	2022**	% Pertumbuhan	
1	Kelapa	50.488,34	50.243,61	-0,49	Kopra
2	Tebu	8.336,28	8.240,12	-1,15	gula hablur
3	Kakao	1.759,70	1.850,39	5,15	biji kering

Keterangan: ** Angka Sangat Sementara

Sumber: DPKP DIY, 2023

Tahun 2022, produksi komoditas Kakao mengalami kenaikan produksi sebesar 5,15%. Peningkatan produksi antara lain disebabkan adanya jaminan harga dan kepastian pasar sehingga mendorong petani memelihara tanamannya dengan baik. Beberapa upaya yang

dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi Kakao diantaranya penggunaan bibit/benih varietas unggul, peremajaan tanaman, perluasan areal, pemberdayaan petani, penanganan pascapanen, dan penguatan kelembagaan.

Komoditas Kelapa mengalami penurunan produksi sebesar 0,49% dikarenakan tingginya curah hujan di tahun 2022 menyebabkan serangan OPT yang cukup luas di wilayah DIY. Sedangkan curah hujan tinggi saat musim panen tebu berdampak pada penurunan rendemen saat penggilingan tebu yang menyebabkan gula hablurnya menurun.

(5) *Peternakan*

Peningkatan populasi ternak didukung oleh: ketersediaan dan mutu bibit ternak; hijauan pakan ternak dan bahan pakan; peningkatan kapasitas SDM peternak melalui bimbingan teknis budidaya peternakan dan pengembangan pakan; optimalisasi reproduksi; pengawasan pemotongan betina produktif; serta pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan.

Tabel 1.20. Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2021-2022*

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	
		2021	2022*
1	Sapi Potong	323.308	303.191
2	Sapi Perah	3.500	3.371
3	Kambing	417.386	428.157
4	Ayam Buras	3.463.921	3.506.066
5	Ayam Pedaging	6.841.974	7.156.738
6	Ayam Petelur	4.712.467	4.835.021

Keterangan: *) Angka sementara

Sumber: DPKP DIY, 2023

Namun demikian pada tahun 2022 terjadi penurunan populasi ternak sapi potong disebabkan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Wabah PMK juga mengakibatkan penurunan produksi susu dari 5.355.000 kg pada tahun 2021 menjadi 4.871.717 kg pada tahun 2022. Namun sebaliknya komoditas ternak kambing pada tahun 2022 justru mengalami peningkatan meskipun terjadi wabah PMK. Komoditas strategis peternakan lainnya yang mengalami peningkatan populasi pada tahun 2022 yaitu Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, dan Itik dipengaruhi adanya potensi pasar yang cukup menguntungkan.

(6) Kehutanan

Terdapat 3 (tiga) skema pengelolaan hutan di DIY yaitu (1) Swakelola, (2) Perijinan, dan (3) Kerja sama Kemitraan. Skema swakelola merupakan pengelolaan hutan yang dilakukan sendiri oleh Pemda DIY. Beberapa hal yang dilakukan melalui skema ini adalah pengelolaan hutan produksi jati, pengelolaan hutan produksi akasia, dan pengelolaan kayu putih.

Tabel 1.21. Target dan Realisasi Produksi Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2018-2022

Tahun	Target Produksi (liter)	Realisasi Produksi (liter)	PAD (Rp)
2018	44.285	44.296	10.458.285.600
2019	39.316	39.323	9.887.974.000
2020	41.610	40.353	9.748.035.000
2021	40.353	42.317	12.170.672.000
2022	44.285	40.160	10.550.032.000

Sumber: DLHK DIY, 2023

Dibandingkan dengan tahun 2021, pada tahun 2022 mengalami penurunan produksi minyak kayu putih. Hal ini disebabkan karena adanya kerusakan pada mesin di pabrik Sendangmole yang berdampak pada penurunan jumlah produksi minyak kayu putih akibat pabrik tidak

dapat beroperasi selama 12 hari. Realisasi minyak kayu putih sebesar 40.160 liter berasal dari 415,5 ton daun kayu putih yang dipanen di 11 RPH.

Skema yang kedua adalah perijinan. Skema perijinan dilakukan dengan Pola Perhutanan Sosial yaitu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama. di DIY, total luasan hutan yang pengelolaannya dilakukan dengan skema perijinan adalah 1601,58 ha. Terdapat 45 pemegang ijin yang terdiri dari terdapat 42 kelompok dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan, dan 3 kelompok tani dalam bentuk Hutan Tanaman Rakyat. Beberapa usaha yang dilakukan dengan skema ini antara lain usaha madu, pemanenan kayu, usaha jasa lingkungan obyek wisata kalibiru, dan usaha jasa lingkungan obyek wisata Watupayung.

Skema kerja sama kemitraan merupakan kerja sama dengan kelompok masyarakat dengan memberikan izin pemanfaatan sebidang kawasan hutan untuk diambil manfaat jasa lingkungan. Sampai dengan tahun 2022, jumlah pemegang ijin kerja sama kemitraan adalah sebanyak 6 pemegang ijin yaitu (1) Koperasi Notowono, (2) BUMDes Murakabi, (3) BUMDes Jati Lestari, (4) BUMDes Bangun Kencana, (5) BUMDes Bangkit, dan (6) Koperasi Wana Arta Barokah. Salah satu keberhasilan pengelolaan hutan dengan skema ini adalah Koperasi Notowono sebagai operator Wana Wisata Budaya Mataram di Hutan Lindung Mangunan, BDH Bantul. di dalam pemanfaatannya terdapat skema bagi hasil dengan proporsi 75 % untuk koperasi dan 25 % sebagai PAD untuk pemda.

Tabel 1.22. Realisasi Kunjungan Wisata Oleh Koperasi Notowono Tahun 2020-2022

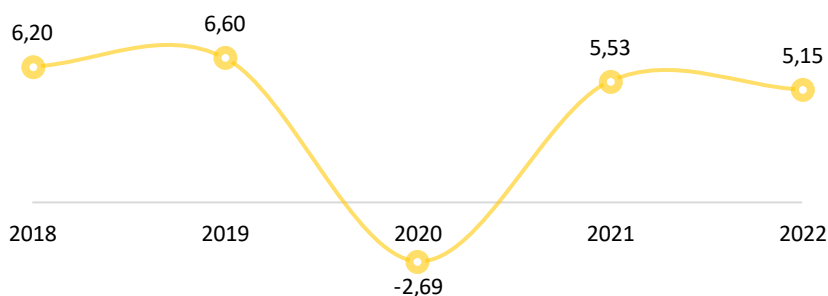
No	Lokasi	Jumlah Pengunjung (Orang)		
		2020	2021	2022
1	Gn Pengger	317.128	236.362	467.361
2	Puncak Becici	235.383	147.082	277.584
3	Lintang 1000	17.718	14.855	13.676
4	Pinus Asri	25.192	15.106	14.141
5	Pinussari	226.375	222.755	339.069
6	1000 Batu	133.253	87.763	94.822
7	Bukit Panguk	31.569	15.446	16.079
8	Bukit Mojo	417	-	-
9	Pintoe Langit	1.198	-	-
		988.233	739.369	1.222.732

Sumber: DLHK DIY, 2023

Dengan membaiknya kondisi pasca-pandemi Covid-19 berdampak juga pada pemulihan aktivitas wisata, termasuk di Hutan Pinus Mangunan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah kunjungan wisata pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021. Peningkatan jumlah kunjungan ini berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh dari Rp4.151.164.000,00 pada tahun 2021 menjadi Rp7.988.896.500,00 pada tahun 2022.

2) *Pertumbuhan Ekonomi*

Selama beberapa tahun terakhir kapasitas perekonomian DIY senantiasa mengalami peningkatan, namun sempat berkontraksi di tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Meskipun sempat mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2020, perekonomian DIY kembali menunjukkan kinerja yang membaik dengan pertumbuhan positif selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, ekonomi DIY tumbuh sebesar 5,53% setelah tumbuh negatif sebesar -2,69% di tahun sebelumnya. Kemudian perekonomian tetap mengalami peningkatan kapasitas di tahun 2022 dengan tumbuh sebesar 5,15%. Berikut ini gambar pertumbuhan ekonomi DIY selama lima tahun terakhir.



Gambar 1.11. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2018-2022 (%)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Pada tahun 2022, semua lapangan usaha tumbuh positif dengan tiga lapangan usaha tumbuh sebesar dua digit. Pertumbuhan paling tinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 18,26% dan diikuti pertumbuhan lapangan usaha Jasa Lainnya 15,04% dan Penyediaan Makan dan Minum 12,40%. Kondisi ekspansif di tahun 2022 mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Tingkat capaian pertumbuhan tahun 2022 sebesar 5,15% adalah 96,44%. Adapun target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2017 - 2022 adalah 5,34%.

Tabel 1.23. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,16	1,03	4,19	0,61	5,12
Pertambangan dan Penggalian	10,59	3,04	-9,22	-3,11	1,72
Industri Pengolahan	5,12	5,73	-4,38	0,37	1,76
Pengadaan Listrik, Gas	3,31	5,43	-0,10	2,40	6,82
Pengadaan Air	5,13	8,90	0,51	6,82	3,29
Konstruksi	13,1	14,39	-15,64	10,82	4,81
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,54	5,16	-4,52	1,51	4,82
Transportasi dan Pergudangan	6,6	3,55	-20,21	1,93	18,26
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,77	8,89	-16,91	7,55	12,40
Informasi dan Komunikasi	6,48	7,45	19,70	16,69	3,54
Jasa Keuangan	6,14	8,62	-1,09	1,45	5,24
Real Estate	5,54	5,93	1,27	0,57	2,82
Jasa Perusahaan	5,51	6,75	-14,89	8,09	7,16
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,06	3,30	-2,22	-0,39	2,95

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Jasa Pendidikan	6,01	6,57	4,47	5,00	0,98
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,05	6,61	19,18	4,47	3,99
Jasa lainnya	6,06	6,25	-15,74	21,53	15,04
PDRB	6,2	6,60	-2,69	5,53	5,15

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Menurut PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran, jenis pengeluaran yang tumbuh tertinggi pada tahun 2022 adalah Ekspor Luar Negeri yaitu sebesar 21,68% yang pada tahun 2020, sempat tumbuh negatif sebesar 12,90%. Net Ekspor antar-daerah mengalami kontraksi sebesar 148,78%. Pengeluaran lain yang dapat tumbuh tinggi adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh 8,20% dan Perubahan Inventori tumbuh 8,63%.

Tabel 1.24. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022

Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	3.95	3.81	-2.75	1.77	2.64
Konsumsi LNPR	2.63	9.58	-6.56	0.39	5.58
Konsumsi Pemerintah	3.47	3.12	-0.93	0.26	0.52
Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.17	9.74	-13.41	8.2	5.86
Perubahan Inventori	3.54	3.04	6.24	8.63	-
Ekspor Luar Negeri	12.82	-0.07	-12.88	21.68	8.33
Impor Luar Negeri	6.22	-9.01	-14.87	7.3	0.19
Net Ekspor Antar Daerah	-3.15	-9.95	-74.71	-148.78	-
PDRB	6.2	6.6	-2.69	5.53	5.15

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Selama dua tahun terakhir, semua kabupaten dan kota se-DY tumbuh positif setelah mengalami kontraksi dengan pertumbuhan negatif di tahun 2020. Pada periode tersebut, Kabupaten Sleman mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu masing-masing 5,56% (2021) dan 5,7% (2022). Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang tumbuh terendah yaitu 4,33% (2021) dan 4,67% (2022).

Tabel 1.25. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022*
Kulonprogo	10.84	13.49	-4.06	4.33	4.67
Bantul	5.47	5.53	-1.66	4.97	5.08
Gunungkidul	5.16	5.33	-0.68	5.22	5.15

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022*
Sleman	6.42	6.48	-3.91	5.56	5.7
Yogyakarta	5.49	5.96	-2.42	5.09	5.2

Keterangan: *) Angka Proyeksi

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Dari capaian indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2021 yang sebesar 5,53%, jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2021 persentasenya sebesar 135,54%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang ada di RPJMD persentase capaian sebesar 104,14%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2021 maupun RPJMD di tahun 2021.

3) Inflasi

Tingkat Inflasi DIY diwakili oleh tingkat inflasi Kota Yogyakarta. Pada tahun 2022, tingkat inflasi adalah 6,59% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,57%. Kenaikan harga selama tahun 2022 didominasi oleh naiknya indeks harga konsumen kelompok transportasi sebesar 13,75% dengan andil sebesar 1,94% dan Kelompok Makan, Minuman dan Tembakau dengan naik indeks harga konsumen sebesar 6,85% dengan andil sebesar 1,55%. Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan merupakan pengeluaran yang justru mengalami penurunan indeks harga konsumen yaitu sebesar -0,03%.

Tabel 1.26. Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2022

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2021	IHK Desember 2022	Inflasi Tahun Kalender 2022 * (%)	Andil Inflasi Desember (y o y) 2021 (%)
Umum	108,53	115,57	6,49	6,49
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	111,81	119,47	6,85	1,55
2. Pakaian dan Alas Kaki	109,89	113,10	2,92	0,16
3. Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,92	110,28	5,11	0,93
4. Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	109,15	114,72	5,10	0,27

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2021	IHK Desember 2022	Inflasi Tahun Kalender 2022 * (%)	Andil Inflasi Desember (y o y) 2021 (%)
5. Kesehatan	111,4	115,73	3,89	0,10
6. Transportasi	104,7	119,10	13,75	1,94
7. Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	99,96	99,66	-0,30	-0,02
8. Rekreasi, Olahraga dan Budaya	109,12	112,15	2,78	0,06
9. Pendidikan	112,07	116,44	3,90	0,26
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	108,42	114,96	6,03	073
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	120	130,66	8,88	0,50

* Persentase perubahan IHK Desember 2022 terhadap bulan Desember 2021

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

3. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Gambaran Umum Birokrasi Pemda DIY

Kelembagaan Pemda DIY diatur berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur asas, pembentukan, dan susunan kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan. Peraturan Daerah Istimewa DIY tersebut memuat tentang:

- 1) Penyesuaian Nomenklatur Dinas Perizinan dan Penanaman Modal menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) Kelembagaan Paniradya Kaistimewan
- 3) Kelembagaan Rumah Sakit Daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

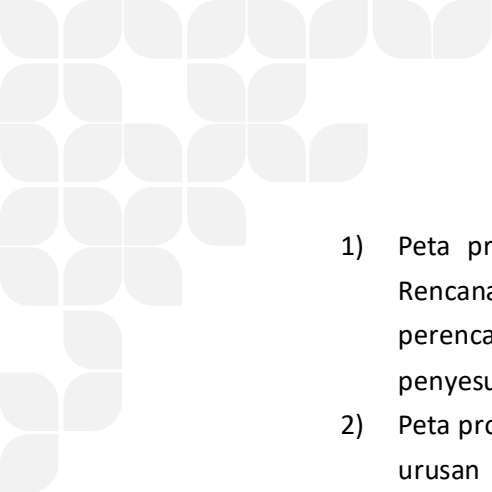
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 terkait kebijakan kelembagaan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Peraturan Daerah Istimewa DIY tentang Perubahan Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- 2) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 3) Penyusunan Proses Bisnis Pemerintah Daerah
- 4) Penyusunan Evaluasi Lembaga Non Struktural (LNS).

Menindaklanjuti PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, dilakukan Evaluasi Kelembagaan dengan merubah struktur organisasi Perangkat Daerah menyesuaikan kebijakan penyederhanaan birokrasi serta sinkronisasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru. Selain itu pada tahun 2022 juga dilaksanakan penyusunan peta proses bisnis yang diharapkan mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi agar setiap instansi pemerintah:

- 1) Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- 2) Mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; serta
- 3) Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

Beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam dokumen proses bisnis yang disusun adalah:

- 
- 1) Peta proses bisnis Pemda DIY disusun berdasarkan dokumen Rencana Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan transisi sehingga kedepan perlu dilakukan penyesuaian dengan dokumen RPJMD yang baru.
 - 2) Peta proses bisnis Pemda DIY adalah peta besar penyelenggaraan urusan pemerintah level provinsi sesuai dengan dokumen perencanaan. Sehingga perlu operasionalisasinya pada level perangkat daerah.
 - 3) Perangkat daerah pengampu urusan ketatalaksanaan dan perangkat daerah pemangku urusan perencanaan memiliki peran penting dalam membina dan mengendalikan pengembangan peta proses bisnis.

Sebagaimana amanat PermenPAN dan RB RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 bahwa kajian Lembaga Non Struktural (LNS) diperlukan untuk menelaah keberadaannya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam norma, tugas fungsi, serta praktik kerja di lapangan baik antar sesama LNS maupun dengan Perangkat Daerah. Penyusunan kajian LNS pada tahun 2022 dilaksanakan melalui Evaluasi secara komprehensif untuk:

- 1) Mengidentifikasi LNS eksisting di Pemda DIY;
- 2) Mengevaluasi kelembagaan LNS Pemda DIY, dengan menggunakan analisis dimensi deskriptif organisasi; dimensi struktur organisasi; dan dimensi proses organisasi; dan
- 3) Merumuskan rekomendasi kebijakan hasil analisis evaluasi kelembagaan LNS, yang berupa:
 - a) Penghapusan LNS;
 - b) Integrasi atau penggabungan LNS yang memiliki tugas fungsi serupa;
 - c) Dilikuidasi (atau integrasi) dan fungsi-fungsinya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah induk; dan
 - d) *Status quo* dengan peningkatan dan penguatan tugas dan fungsi

Pelayan publik menjadi salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Era Revolusi Industri 4.0 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pemda DIY untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien, didukung kemudahan teknologi informasi yang tersedia. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan sebagaimana diatur dalam PermenPAN dan RB RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Pergub DIY Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh 95 unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemda DIY dengan jumlah responden sebanyak 25.394 responden yang dilaksanakan sampai dengan bulan Oktober 2022. Hasilnya, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata sebesar 85,36 (mutu pelayanan B atau pada kategori Baik) meningkat 0,63 dari nilai IKM tahun sebelumnya atau tahun 2021 (84,73).

Sampai dengan tahun 2022, terdapat 1 unit kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan 9 unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Capaian Zona Integritas di lingkungan Pemda DIY tersebut masih membutuhkan upaya Peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja yang strategis.

b. Gambaran Kondisi ASN yang Dimiliki

Dalam meningkatkan kualitas manajemen sumber daya aparatur, Pemda DIY mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sumber daya aparatur yang berkualitas merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan negara serta pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Selain itu juga menjawab tuntutan reformasi pada pencapaian standar kompetensi baik bagi aparatur pemangku jabatan struktural, fungsional maupun pelaksana.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda DIY adalah dengan penerapan sistem merit. Sistem ini bertujuan untuk memastikan jabatan yang ada di Pemda DIY diduduki pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Selain itu, formasi ASN yang berdasarkan pada sistem merit akan menjadi mesin penggerak untuk mencapai visi dan misi Gubernur DIY yang tertuang dalam RPJMD DIY 2017-2022.

Tabel 1.27. Data Pilah Pegawai Pemda DIY Tahun 2017-2022 (Berdasarkan Golongan)

No	Elemen	Tahun												Satuan
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	12.231		11.387		11.347		10.558		10.504		9.896		Orang
1	Golongan I	152	10	125	9	113	8	106	8	86	8	61	6	Orang
2	Golongan II	975	243	877	217	782	215	706	193	748	434	669	449	Orang
3	Golongan III	3.237	3.526	3.004	3.423	3.114	3.755	2.879	3.601	2809	3661	2.709	3.520	Orang
4	Golongan IV	2.146	1.942	1.942	1.790	1.715	1.645	1.532	1.533	1347	1411	1.163	1.319	Orang

Sumber: BKD DIY, 2023

Jumlah ASN Pemda DIY sampai dengan akhir tahun 2022, terdiri dari 9.896 orang, terdiri dari 4.602 laki-laki, dan 5.294 perempuan. Dari tahun ke tahun ASN Pemda DIY didominasi oleh Golongan III. Pada Tahun 2022, jumlah PNS Golongan III sebesar 62,94% dari keseluruhan ASN Pemda DIY. Banyaknya PNS Golongan III ini salah satunya dipengaruhi karena Pemda DIY sudah tidak membuka formasi untuk tingkat Pendidikan SMA atau sederajat, sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.28. Data Pilah Pegawai Pemda DIY Tahun 2017-2022 (Berdasarkan Pendidikan)

No	Elemen	Tahun												Satuan
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan	12.231		11.387		11.347		10.558		10.504		9.896		Orang
1	SD	146	12	110	12	117	39	62	6	53	6	47	6	Orang
2	SMP	247	21	201	14	203	58	138	6	114	4	108	5	Orang
3	SMA	1	693	1	618	1	615	1	444	867	357	760	301	Orang
		.515		.310		.208		.007						
4	DIPLOMA	434	564	374	498	277	403	224	357	295	592	268	603	Orang
5	S1	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	Orang
		.625	.006	.368	.801	.207	.871	.064	.834	.919	.806	.634	.549	

No	Elemen	Tahun												Satuan
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
6	S2	538	424	582	494	704	630	723	686	736	745	761	825	Orang
7	S3	3	1	3	2	3	3	4	2	6	4	6	5	Orang

Sumber : BKD DIY, 2023

c. Ringkasan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Dalam APBD P 2022

Ringkasan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp5.489.017.061.741,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp5.531.096.036.622,30 atau 100,77% dari target yang ditetapkan. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.29. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	5.489.017.061.741,00	5.531.096.036.622,30	42.078.881,30	100,77
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.194.876.474.399,00	2.263.332.501.889,58	68.456.027.490,58	103,12
Pendapatan Pajak Daerah	1.924.613.524.517,00	1.951.267.446.232,85	26.652.911.702,31	101,38
Pendapatan Retribusi Daerah	36.120.490.654,00	38.249.563.473,00	2.129.072.819,00	105,89
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	106.108.775.113,00	108.239.513.315,87	2.130.738.202,87	102,01
Lain-lain PAD yang Sah	128.033.684.115,00	165.575.978.867,86	37.543.304.766,40	129,32
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2.194.876.474.399,00	2.263.332.501.889,58	68.456.027.490,58	103,12
PENDAPATAN TRANSFER	3.286.900.087.342,00	3.257.721.489.974,00	- 29.178.597.368,00	99,11
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.286.028.793.852,00	3.256.850.196.484,00	- 29.178.597.368,00	99,11
Pendapatan Transfer Antar Daerah	871.293.490,00	871.293.490,00	-	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer	3.286.900.087.342,00	3.257.721.489.974,00	- 29.178.597.368,00	99,11

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.240.500.000,00	10.042.044.758,72	2.801.544.758,72	138,69
Pendapatan Hibah	7.240.500.000,00	7.484.595.000,00	244.095.000,00	103,37
Pendapatan Lainnya	-	2.557.449.758,72	2.557.449.758,72	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.240.500.000,00	10.042.044.758,72	2.801.544.758,72	138,69
JUMLAH PENDAPATAN	5.489.017.061.741,00	5.531.096.036.622,30	42.078.974.881,30	100,77

Sumber: BPKA DIY, 2023

Ringkasan Realisasi Belanja

Pada Tahun Anggaran 2022, Pemda DIY menetapkan Belanja sebesar Rp5.879.828.899.155,00 Realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp5.453.089.556.149,68 atau 92,74%. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.30. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
BELANJA DAERAH	5.879.828.899.155,00	5.453.089.556.149,68	(426.739.343.005,32)	92,74
BELANJA OPERASI	3.758.580.237.442,00	3.448.622.637.192,31	(309.957.600.249,69)	91,75
Belanja Pegawai	1.673.619.630.998,00	1.604.728.143.644,64	(68.891.487.353,36)	95,88
Belanja Barang dan Jasa	1.469.555.928.220,00	1.265.473.453.438,94	(204.082.474.781,06)	86,11
Belanja Subsidi	78.451.861.160,00	72.548.542.632,00	(5.903.318.528,00)	92,48
Belanja Hibah	502.164.697.064,00	474.277.634.446,73	(27.887.062.617,27)	94,45
Belanja Bantuan Sosial	34.788.120.000,00	31.594.863.030,00	(3.193.256.970,00)	90,82
Jumlah Belanja Operasi	3.758.580.237.442,00	3.448.622.637.192,31	(309.957.600.249,69)	91,75
BELANJA MODAL	742.798.152.703,00	704.891.827.579,74	(37.906.325.123,26)	94,90
Belanja Modal Tanah	160.094.957.821,00	152.180.270.772,00	(7.914.687.049,00)	95,06

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	182.732.772.410,00	174.541.239.354,74	(8.191.533.055,26)	95,52
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	220.101.185.387,00	210.446.091.623,00	(9.655.093.764,00)	95,61
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	165.392.750.723,00	153.970.963.843,00	(11.421.786.880,00)	93,09
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.476.486.362,00	13.753.261.987,00	(723.224.375,00)	95,00
Jumlah Belanja Modal	742.798.152.703,00	704.891.827.579,74	(37.906.325.123,26)	94,90
BELANJA TIDAK TERDUGA	62.545.932.869,00	5.735.041.553,00	(56.810.891.316,00)	9,17
Belanja Tidak Terduga	62.545.932.869,00	5.735.041.553,00	(56.810.891.316,00)	9,17
Jumlah Belanja Tidak Terduga	62.545.932.869,00	5.735.041.553,00	(56.810.891.316,00)	9,17
BELANJA TRANSFER	1.315.904.576.141,00	1.293.840.049.824,63	(22.064.526.316,37)	98,32
Belanja Bagi Hasil	839.016.298.042,00	839.016.298.042,00	-	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	476.888.278.099,00	454.823.751.782,63	(22.064.526.316,37)	95,37
Jumlah Belanja Transfer	1.315.904.576.141,00	1.293.840.049.824,63	(22.064.526.316,37)	98,32
JUMLAH BELANJA	5.879.828.899.155,00	5.453.089.556.149,68	(426.739.343.005,32)	92,74

Sumber: BPKA DIY, 2023

Realisasi Pembiayaan

1) Penerimaan Pembiayaan

Tahun Anggaran 2022 penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp564.487.394.414,00 dengan realisasi Rp554.687.337.214,50 atau 98,26%. Realisasi Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp554.487.394.414,50 dan Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp199.942.800,00. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.31. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 (*Unaudited*)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
PEMBIAYAAN DAERAH	390,812	381,012	(9,800	97.49
	,394,414.00	,337,214.50	,057,199.50)	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	564,487	554,687	- 9,800	98.26
	,394,414.00	,337,214.50	,057,199.50	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	554,487	554,487	0.50	100.00
	,394,414.00	,394,414.50		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	10,000	199	- 9,800	2.00
	,000,000.00	,942,800.00	,057,200.00	
Jumlah Penerimaan	564,487	554,687	- 9,800	98.26
	,394,414.00	,337,214.50	,057,199.50	

Sumber: BPKA DIY, 2023

2) *Pengeluaran Pembiayaan*

Tahun Anggaran 2022 Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp173.675.557.000,00 dengan realisasi Rp173.675.000.000,00 atau 99,9997%. Pengeluaran pembiayaan tahun 2022 untuk penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank BPD DIY.



Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Dalam Perubahan APBD

A. PERUBAHAN TERHADAP KEGIATAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RKPD DIY) Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJMD DIY) Tahun 2017-2022. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD dijadikan dasar bagi penyusunan RKPD sebagai program pembangunan tahunan.

Perencanaan pembangunan Tahun 2022 telah disusun pada Tahun Anggaran 2021 melalui Pergub Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan telah menjadi pedoman di dalam menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2021. Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2022, Pemda DIY memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2022. Hal tersebut sejalan dengan mandat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 343 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada Ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Perubahan RKPD Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah akan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2022 yang akan akan disepakati bersama antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2022 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2022.

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, meliputi:

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2021 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2022 dari masing-masing kegiatan;
2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2022 terhadap kemampuan fiskal daerah;
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
5. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

Perubahan terhadap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2022 non keistimewaan disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut :

1. Penyesuaian klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur terhadap DAK Tahun Anggaran 2022 maupun DBH CHT Tahun Anggaran 2022;
2. Penyesuaian terhadap pergeseran baik antar obyek belanja, rincian obyek sampai dengan sub rincian obyek;
3. Penyesuaian terhadap Belanja Pegawai;
4. Penambahan anggaran terhadap kegiatan yang bersifat wajib mengikat dan mendesak;
5. Penyesuaian volume terkait kenaikan BBM;
6. Efisiensi karena penyesuaian dengan indikator kinerja dan standar belanja, serta kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Untuk kegiatan keistimewaan, pelaksanaan perubahan dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana harus diikuti dengan momentum pengajuan perubahan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini diajukan dan dibahas oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, serta Kementerian/Lembaga Negara terkait. Berkaitan dengan hal tersebut kegiatan keistimewaan tidak dilakukan pada momentum Perubahan RKPD Tahun 2022.

B. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dalam melaksanakan pengelolaan Pendapatan Daerah yang harus dilakukan secara optimal dan akuntabel sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu modal peningkatan pembangunan daerah adalah dengan peningkatan pendapatan daerah. Citra keuangan Pemerintah Daerah akan tercermin dari PAD yang

diperoleh, semakin besar persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Daerah terdiri atas PAD, dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerimaan Pemerintah Daerah tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Untuk meningkatkan pendapatan daerah diperlukan upaya-upaya inovasi.

Upaya-upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah yang telah dilakukan dan terus menerus akan dilakukan antara lain dengan:

- a. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitas kepada masyarakat;
- b. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- c. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar retribusi melalui kanal-kanal pembayaran digital;
- d. Memberikan inisiasi kepada OPD agar mengelola dan mengoptimalkan barang milik daerah yang menjadi kewenangannya;
- e. Mendorong peningkatan kinerja BUMD agar mampu memberikan sumbangan pada PAD;
- f. Koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat agar porsi dana transfer pusat ke daerah meningkat dari tahun ke tahun;
- g. Mendorong OPD di lingkup Pemerintah Daerah DIY agar ikut serta melakukan optimalisasi pendapatan daerah sesuai kewenangan;
- h. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:

- 1) Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
- 2) Optimalisasi penggunaan layanan pembayaran pajak secara online, *one-stop service*, peningkatan efektivitas *drive thru*, Gerai Samsat, Bus Samsat Keliling (Satling), pengembangan Samsat *Payment Point* (Samsat Desa, Temaram, Gojak, Bajak sawah, SiJebol) dan E-Posti; serta penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
- 3) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
- 4) Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment* (*e-payment*) dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*;
- 5) Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.

Selain upaya-upaya tersebut, juga dilakukan peningkatan koordinasi dengan semua OPD berpendapatan untuk selalu melakukan perbaikan manajemen pengelolaan penerimaan pendapatan daerah baik meliputi rehabilitasi/pemeliharaan obyek pendapatan daerah, mekanisme pemungutan dan penyetoran pendapatan daerah, pembinaan sumber daya manusia maupun *software* pengelolaan pendapatan daerah. Bagi OPD berpendapatan, juga didorong untuk mendukung program pemerintah dalam upaya memberikan iklim yang kondusif untuk investasi dan perkembangan dunia usaha.

Selain itu juga dalam rangka pemulihan ekonomi paska pandemi dan juga dalam rangka mengurangi beban masyarakat, di tahun 2022 Pemda DIY membuat kebijakan penghapusan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Respon positif dari masyarakat luas yang memanfaatkan adanya kebijakan tersebut dapat terlihat dari animo masyarakat yang melakukan pembayaran pajak sebelum berakhirnya kebijakan, oleh karena itu kebijakan bebas denda ini juga dapat dinilai berhasil dan menjadi salah satu faktor tercapainya target penerimaan pajak daerah di tahun 2022.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pada APBD 2022, target pendapatan Pemda DIY ditetapkan sebesar Rp5.489.017.061.741,00 realisasi sebesar Rp5.531.096.036.622,30 sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp42.078.974.881,30 atau 100,77%. Realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp172.004.272.719,93 atau 3,02% dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp5.703.100.309.342,23.

Tabel 2.1. Komposisi Pendapatan Pemda DIY Tahun 2022 (*Unaudited*)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	5.489.017.061.741,00	5.531.096.036.622,30	42.078.974.881,30	100,77
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.194.876.474.399,00	2.263.332.501.889,58	68.456.027.490,58	103,12
Pendapatan Pajak Daerah	1.924.613.524.517,00	1.951.267.446.232,85	26.653.921.715,85	101,38
Pendapatan Retribusi Daerah	36.120.490.654,00	38.249.563.473,00	2.129.072.819,00	105,89
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	106.108.775.113,00	108.239.513.315,87	2.130.738.202,87	102,01
Lain-lain PAD yang Sah	128.033.684.115,00	165.575.978.867,86	37.542.294.752,86	129,32
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2.194.876.474.399,00	2.263.332.501.889,58	68.456.027.490,58	103,12
PENDAPATAN TRANSFER	3.286.900.087.342,00	3.257.721.489.974,00	- 29.178.597.368,00	99,11
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.286.028.793.852,00	3.256.850.196.484,00	- 29.178.597.368,00	99,11
Pendapatan Transfer Antar Daerah	871.293.490,00	871.293.490,00	-	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer	3.286.900.087.342,00	3.257.721.489.974,00	- 29.178.597.368,00	99,11
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.240.500.000,00	10.042.044.758,72	2.801.544.758,72	138,69
Pendapatan Hibah	7.240.500.000,00	7.484.595.000,00	244.095.000,00	103,37
Pendapatan Lainnya	-	2.557.449.758,72	2.557.449.758,72	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.240.500.000,00	10.042.044.758,72	2.801.544.758,72	138,69
JUMLAH PENDAPATAN	5.489.017.061.741,00	5.531.096.036.622,30	42.078.974.881,30	100,77

Sumber: BPKA DIY, 2023

Pendapatan transfer menjadi komponen pendapatan tertinggi dari total pendapatan daerah yaitu sebesar 59,88%, Pendapatan Asli Daerah sebesar 39,99% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,13%.

Penjelasan dari anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang berasal dari: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. PAD merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kemandirian daerah, kemampuan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer dan Transfer Pusat ke Daerah.

Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.194.876.474.399,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diakui secara kas sebesar Rp2.263.332.501.889,58 atau 103,12%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp362.409.427.008,12 atau 19,06% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp1.900.923.074.881,46. PAD Tahun 2022 masih didominasi penerimaan Pajak Daerah (86,21%), Retribusi Daerah (1,69%), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah (4,78%), dan Lain-Lain PAD yang Sah (7,32%).

Tabel 2.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2022 (*Unaudited*)

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pendapatan Pajak Daerah	1.924.613.524.517,00	1.951.267.446.232,85	26.653.921.715,85	101,38
Pendapatan Retribusi Daerah	36.120.490.654,00	38.249.563.473,00	2.129.072.819,00	105,89
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	106.108.775.113,00	108.239.513.315,87	2.130.738.202,87	102,01

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
Lain-lain PAD yang Sah	128.033	165.575	37.542	129,32
	.684.115,00	.978.867,86	.294.752,86	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2.194.876	2.263.332	68.456	103,12
	.474.399,00	.501.889,58	.027.490,58	

Sumber: BPKA DIY, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan target PAD tercapai, bahkan lebih dari target yang ditetapkan sebesar 103,12%. Adapun rincian anggaran dan realisasi per jenis pendapatan adalah sebagai berikut.

1) Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, pajak daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.

Pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.924.613.524.517,00 dan realisasi sebesar Rp1.951.267.446.232,85 atau 101,38%. Realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp262.823.602.309,85 atau 15,57% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp1.688.443.843.923,00.

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah DIY Tahun 2022 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran	Realisasi	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
1	Pajak Daerah				
a	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	933.917	953.422	19.504	102,09
		.926.448,00	.127.400,00	.200.952,00	
b	Bea Baliknama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	397.829	404.968	7.139	101,79
		.181.500,00	.406.500,00	.225.000,00	
c	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	302.160	302.161	1.010	100,00
		.938.052,00	.948.065,85	.013,85	

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran	Realisasi	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
d	Pajak Air Permukaan	1.113 .998.226,00	1.123 .483.976,00	9 .485.750,00	100,85
e	Pajak rokok	289.591 .480.291,00	289.591 .480.291,00	-	100,00
Jumlah		1.924.613 .524.517,00	1.951.267 .446.232,85	26.653 .921.715,85	101,38

Sumber: BPKA DIY, 2023

2) Hasil Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah didefinisikan sebagai pungutan yang dilakukan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Obyek Retribusi Daerah yang dikelola oleh Pemda DIY terdiri dari: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.


Pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp36.120.490.654,00 dan realisasi sebesar Rp38.249.563.473,00 atau 105,89%. Realisasi Retribusi Daerah tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp263.386.422,00 atau 0,68% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp38.512.949.895,00. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun 2022 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2022			%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	
a	Retribusi Jasa Umum	12.657.228	13.073.617	416.388	103,29
		.459,00	.018,00	.559,00	
a	Retribusi Pelayanan Kesehatan	44.500	116.301	71.801	261,35
		.000,00	.000,00	.000,00	
b	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	6.259.415	6.550.337	290.921	104,65
		.459,00	.018,00	.559,00	
c	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	835.200	874.466	39.266	104,70
		.000,00	.000,00	.000,00	
d	Retribusi Pelayanan Pendidikan	5.518.113	5.532.513	14.400	100,26
		.000,00	.000,00	.000,00	
b	Retribusi Jasa Usaha	23.375.842	25.156.186	1.780.344	107,62
		.195,00	.455,00	.260,00	
a	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.752.358	8.330.645	1.578.287	123,37
		.195,00	.905,00	.710,00	
b	Retribusi Terminal	384.980	423.996	39.016	110,13
		.000,00	.000,00	.000,00	
c	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.268.580	1.537.264	268.684	121,18
		.000,00	.000,00	.000,00	
d	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	416.580	572.105	155.525	137,33
		.000,00	.000,00	.000,00	
e	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	96.590	120.232	23.642	124,48
		.000,00	.350,00	.350,00	
f	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	412.392	957.759	545.367	232,24
		.000,00	.500,00	.500,00	
d	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	14.044.362	13.214.183	(830.178)	94,09
		.000,00	.700,00	.300,00)	
c	Retribusi Perijinan Tertentu	87.420	19.760	(67.660)	22,60
		.000,00	.000,00	.000,00)	
a	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	84.720	16.860	(67.860)	19,90
		.000,00	.000,00	.000,00)	
b	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	2.700	2.900	200	107,41
		.000,00	.000,00	.000,00	
	Jumlah	36.120.490	38.249.563	2.129.072	105,90
		.654,00	.473,00	.819,00	

Sumber: BPKA DIY, 2023

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah secara umum telah melampaui target anggaran yang ditetapkan, namun terdapat beberapa retribusi yang tidak mencapai target yaitu Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah dari anggaran Rp14.044.362.000,00 hanya terealisasi Rp13.214.183.700,00 atau 94,09%, Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan



angkutan umum dari anggaran Rp84.720.000,00 hanya terealisasi Rp16.860.000,00 atau 19,90%. Tidak tercapainya retribusi ini disebabkan karena retribusi penjualan produksi usaha daerah yang dianggarkan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp11.834.369.500,00, realisasi sebesar Rp10.866.906.950,00 atau 91,82%. Tidak tercapainya retribusi penjualan produksi usaha daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebabkan adanya kerusakan mesin produksi, pengaruh alam, dan keterbatasan sumber daya manusia. Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum dari anggaran Rp84.720.000,00 hanya terealisasi Rp16.860.000,00 atau 19,90%. Hal ini disebabkan banyaknya armada yang tidak mengajukan ijin trayek baru karena sudah tidak menjadi kepemilikan dan beralih fungsi.

Pada tahun anggaran 2022, terdapat beberapa penerimaan yang melampaui target hingga lebih dari 50% dari target yang ditetapkan. Penerimaan tersebut antara lain:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan ditargetkan sebesar Rp44.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp116.301.000,00 atau sebesar 261,35% dari target. Retribusi pelayanan Kesehatan merupakan pendapatan dari pelayanan cek laboratorium untuk tenaga kerja perusahaan yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja (Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Realisasi retribusi pelayanan kesehatan tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp90.588.000,00 atau 352,30% dibanding tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp25.713.000,00. Hal ini disebabkan permohonan melakukan uji meningkat karena angka covid-19 menurun.

- b) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang ditargetkan sebesar Rp412.392.000,00, terealisasi Rp957.759.500,00 atau sebesar 232,24% dari target. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilaksanakan pada:
- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggarkan sebesar Rp21.982.000,00, realisasi sebesar Rp27.012.000,00 atau 122,88%. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp13.915.000,00 atau 106,25% dibanding realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp13.097.000,00.
 - (2) Dinas Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp390.410.000,00, realisasi sebesar Rp930.747.500,00 atau 238,40%. Realisasi tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp869.714.000,00 atau 1.424,98% dibanding realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp61.033.000,00. Hal ini disebabkan karena sudah tidak ada pembatasan kegiatan sehingga banyak pengunjung yang datang untuk menyaksikan acara pertunjukan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Klasifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dilakukan oleh Pemda DIY dilakukan dalam bentuk Penyertaan Modal. Sampai dengan Tahun 2022, Pemda DIY telah melakukan penyertaan modal pada beberapa badan usaha yaitu pada PT Taru Martani, PT Anindya Mitra Internasional (AMI), PT Bank BPD DIY, PT Asuransi Bangun Askrida, dan Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP). Atas penyertaan modal tersebut pada tahun anggaran

2022 Pemda DIY memperoleh Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan target sebesar Rp106.108.775.113,00 dan direalisasikan sebesar Rp108.239.513.315,87 atau 102,01% dari target anggaran yang ditetapkan.

Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp11.900.996.402,33 atau 12,35% dari realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp96.338.516.913,32. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan DIY Tahun 2022 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran	Realisasi	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
a	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	179.079.443,00	179.079.443,00	-	100,00
	- PT Asuransi Bangun Askrida	179.079.443,00	179.079.443,00	-	100,00
b	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	105.929.695.670,00	108.060.433.872,87	2.130.738.202,87	102,01
	- BUKP	3.500.000.000,00	5.630.738.202,58	2.130.738.202,58	160,88
	- PT Bank BPD DIY	95.761.065.417,00	95.761.065.417,29	0,29	100,00
	- PT AMI	1.229.058.069,00	1.229.058.069,00	-	100,00
	- PT Tarumartani	5.439.572.184,00	5.439.572.184,00	-	100,00
	Jumlah	106.108.775.113,00	108.239.513.315,87	2.130.738.202,87	102,01

Sumber: BPKA DIY, 2023

4) *Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah*

Pemungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berdasarkan pada Perda DIY Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai mandat Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Lain-lain PAD Yang Sah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp128.033.684.115,00 dan realisasi sebesar Rp165.575.978.867,86 atau 129,32%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp87.948.214.717,94 atau 113,29% dibandingkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran 2021 sebesar Rp77.627.764.149,92. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 Pemda DIY sudah tidak menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sampai dengan bulan September tahun 2022. Kemudian ditetapkan kembali Pergub Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan November tahun 2022, sehingga terdapat realisasi dari pendapatan denda pajak daerah sampai dengan bulan September 2022. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah DIY Tahun 2022 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
a	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	1.103.286.899,00	2.090.399.509,00	987.112.610,00	189,47
b	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	8.426.254.913,00	18.655.194.886,00	10.228.939.973,00	221,39
c	Jasa Giro	9.467.350.348,00	10.360.056.324,00	892.705.976,00	109,43
d	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	335.793.183,00	7.750.000,00	(328.043.183,00)	2,31
e	Pendapatan Bunga	13.250.000.000,00	14.749.999.992,00	1.499.999.992,00	111,32
f	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.317.264,00	9.250.000,00	4.932.736,00	214,26
g	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	18.497.245,00	310.727.434,00	292.230.189,00	1.679,86
h	Pendapatan Denda Pajak Daerah	52.467.122.896,00	64.068.059.100,00	11.600.936.204,00	122,11
i	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	33.349.130,00	38.245.553,00	4.896.423,00	114,68
j	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	46.210.000,00	61.721.413,00	15.511.413,00	133,57
k	Pendapatan dari Pengembalian	471.104.937,00	861.803.128,47	390.698.191,47	182,93
l	Pendapatan BLUD	42.400.157.300,00	54.333.917.528,39	11.933.760.228,39	128,15
m	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	10.240.000,00	28.854.000,00	18.614.000,00	281,78
	Jumlah	128.033.684.115,00	165.575.978.867,86	37.542.294.752,86	129,32

Sumber: BPKA DIY, 2023

d. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri atas: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Transfer pemerintah pusat ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antardaerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.

Anggaran Pendapatan Transfer tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.286.900.087.342,00 dan realisasi sebesar Rp3.257.721.489.974,00 atau 99,11%. Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer DIY Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
a	Dana Perimbangan	1.962.429.140.369,00	1.933.250.543.001,00	(29.178.597.368,00)	98,51
b	Dana Insentif Daerah (DID)	64.312.676.000,00	64.312.676.000,00	-	100,00
c	Dana Keistimewaan	1.259.286.977.483,00	1.259.286.977.483,00	-	100,00
	Jumlah	3.286.028.793.852,00	3.256.850.196.484,00	(29.178.597.368,00)	99,11
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
a	Bantuan Keuangan	871.293.490,00	871.293.490,00	-	100,00
	Jumlah	871.293.490,00	871.293.490,00	-	100,00
	Jumlah	3.286.900.087.342,00	3.257.721.489.974,00	(29.178.597.368,00)	99,11

Sumber: BPKA DIY, 2023

e. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pos penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemda DIY terdiri dari: Dana Perimbangan; Dana Insentif Daerah (DID); dan Dana Keistimewaan. Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp3.286.028.793.852,00 dengan realisasi Rp3.256.850.196.484,00 atau sebesar 99,11%.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat DIY Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat DIY Tahun 2022 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
a	Dana Bagihasil	94.793 .652.000,00	107.696 .079.891,00	12.902 .427.891,00	113,61
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.218.923 .700.185,00	1.218.923 .700.185,00	-	100,00
c	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)	140.379 .049.000,00	137.529 .856.469,00	(2.849 .192.531,00)	97,97
d	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	508.332 .739.184,00	469.100 .906.456,00	(39.231 .832.728,00)	92,28
2	Dana Insentif Daerah (DID)	64.312 .676.000,00	64.312 .676.000,00	-	100,00
3	Dana Keistimewaan	1.259.286 .977.483,00	1.259.286 .977.483,00	-	100,00
	Jumlah	3.286.028 .793.852,00	3.256.850 .196.484,00	(29.178 .597.368,00)	99,11

Sumber: BPKA DIY, 2023

f. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Alokasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp 94.793.652.000,00 dengan realisasi Rp 107.696.079.891,00 atau 113,61%. Rincian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil tahun anggaran 2022 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
a	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.584.098 .000,00	1.598.273 .053,00	14.175 .053,00	100,89
b	DBH PPh Pasal 21	79.718.878 .000,00	89.564.604 .474,00	9.845.726 .474,00	112,35
c	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	9.813.440 .000,00	12.941.735 .130,00	3.128.295 .130,00	131,88
d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.595.623 .000,00	3.491.522 .040,00	(104.100 .960,00)	97,10
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	21.209 .000,00	33.043 .585,00	11.834 .585,00	155,80
f	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	20.719 .000,00	27.216 .609,00	6.497 .609,00	131,36
g	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	39.685 .000,00	39.685 .000,00	-	100,00
Jumlah		94.793.652 .000,00	107.696.079 .891,00	12.902.427 .891,00	113,61

Sumber: BPKA DIY, 2023

g. Dana Alokasi Umum (DAU)

Penerimaan Dana Perimbangan terbesar pada Pemda DIY berasal dari DAU. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp1.218.923.700.185,00 dengan realisasi sebesar Rp1.218.923.700.185,00 atau 100,00%.

h. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK meliputi DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Alokasi DAK pada Pemda DIY Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp648.711.788.184,00 terdiri dari DAK Fisik

Rp140.379.049.000,00 dan DAK Non Fisik 508.332.739.184,00. Sedangkan realisasi DAK sebesar Rp606.630.762.925,00 terdiri DAK Fisik Rp137.529.856.469,00 dan DAK Non Fisik Rp469.100.906.456,00. Realisasi penerimaan DAK Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp472.785.682.479,00 atau 43,80% dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu Rp1.079.416.445.404,00.

Rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik DIY Tahun 2022 (Unaudited)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/ lebih Anggaran (Rp)	%
1	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	24.811.863.000,00	24.597.385.500,00	(214.477.500,00)	99,14
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	2.411.212.000,00	2.408.323.830,00	(2.888.170,00)	99,88
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	516.480.000,00	417.903.000,00	(98.577.000,00)	80,91
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.275.231.000,00	2.275.088.041,00	(142.959,00)	99,99
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	5.355.438.000,00	4.718.691.650,00	(636.746.350,00)	88,11
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	8.161.203.000,00	7.941.574.500,00	(219.628.500,00)	97,31
	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.077.173.000,00	4.180.340.288,00	(896.832.712,00)	82,34
	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	824.253.000,00	630.751.750,00	(193.501.250,00)	76,52
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	90.946.196.000,00	90.359.797.910,00	(586.398.090,00)	99,36
	Jumlah	140.379.049.000,00	137.529.856.469,00	(2.849.192.531,00)	97,97

Sumber: BPKA DIY, 2023

Dana Alokasi Khusus Fisik tidak terealisasi sesuai target yang direncanakan dikarenakan dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat adalah dana yang sesuai dengan nilai kontrak hasil pengadaan barang dan jasa.

Rincian anggaran dan realisasi DAK Non Fisik pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik DIY tahun anggaran 2022 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/ lebih Anggaran (Rp)	%
1	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)				
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	254.336.475 .199,00	247.147.428 .275,00	(7.189.046 .924,00)	97,17
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.595.000 .000,00	3.595.000 .000,00	-	100,00
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	242.743.045 .000,00	210.804.036 .196,00	(31.939.008 .804,00)	86,84
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.377.000 .000,00	1.273.223 .000,00	(103.777 .000,00)	92,46
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.584.485 .830,00	1.584.485 .830,00	-	100,00
	DAK Non Fisik-PK2UKM	3.615.800 .715,00	3.615.800 .715,00	-	100,00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal	799.012 .440,00	799.012 .440,00	-	100,00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	281.920 .000,00	281.920 .000,00	-	100,00
	Jumlah	508.332.739 .184,00	469.100.906 .456,00	(39.231.832 .728,00)	92,28

Sumber: BPKA DIY, 2023

Tidak tercapainya realisasi DAK Non Fisik untuk Bantuan Operasional Sekolah, TPG PNSD, dan Tamsil guru PNSD dikarenakan realisasi Penyaluran dana transfer dari pusat disesuaikan dengan data real yang dibuat oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan pada tahun berkenaan.

i. **Dana Insentif Daerah (DID)**

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu. Alokasi DID Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp64.312.676.000,00 dengan realisasi Rp64.312.676.000,00 atau 100,00%. Realisasi penerimaan DID Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp13.280.831.000,00 atau 17,12% dibandingkan realisasi penerimaan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp77.593.507.000,00

j. **Dana Keistimewaan (DAIS)**

Dana Kesitimewaan (DAIS) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Alokasi DAIS Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp1.259.286.977.483,00 dengan realisasi Rp1.259.286.977.483,00 atau 100,00%. Realisasi penerimaan DAIS Tahun 2022 mengalami sedikit penurunan sebesar Rp20.285.677.596,00 atau 1,59% dibandingkan realisasi penerimaan DAIS Tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.279.572.655.079,00

k. **Pendapatan Transfer Antar Daerah**

Pos penerimaan dari Pendapatan Transfer Antar Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota ini merupakan sharing pembiayaan atas instalasi pengelolaan air limbah terpusat dimana pendapatan yang kita peroleh diperuntukan sepenuhnya untuk pengelolaan instalasi air limbah terpusat pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Target Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp871.293.490,00 dengan realisasi Rp871.293.490,00 atau sebesar 100,00%

Tabel 2.12. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022 (Unaudited)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
1	Kabupaten Bantul	99.707.090,00	99.707.090,00	-	100,00
2	Kabupaten Sleman	133.034.510,00	133.034.510,00	-	100,00
3	Kota Yogyakarta	638.551.890,00	638.551.890,00	-	100,00
	Jumlah	871.293.490,00	871.293.490,00	-	100,00

Sumber: BPKA DIY, 2023

I. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah; dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp7.240.500.000,00 dengan realisasi Rp10.042.044.758,72 atau 138,69% dari target yang ditetapkan.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.720.470.828,95 atau 37,16% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 yaitu Rp7.321.573.929,77.

Tabel 2.13. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah DIY tahun anggaran 2022 (Unaudited)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	7.240.500.000,00	7.484.595.000,00	244.095.000,00	103,37
a	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	7.240.500.000,00	7.484.595.000,00	244.095.000,00	103,37
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		2.557.449.758,72	2.557.449.758,72	
a	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia		2.557.449.758,72	2.557.449.758,72	
	Jumlah	7.240.500.000,00	10.042.044.758,72	2.801.544.758,72	138,69

Sumber: BPKA DIY, 2023

Rincian realisasi penerimaan dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1) *Pendapatan Hibah*

Pendapatan hibah tahun anggaran 2022 terdiri Pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi dalam negeri dianggarkan sebesar Rp7.240.500.000,00, realisasi sebesar Rp7.484.595.000,00 atau 103,37%. Pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam negeri tahun anggaran 2022 terdiri dari Dealer Otomotif dianggarkan sebesar Rp3.300.000.000,00, realisasi sebesar Rp3.542.595.000,00 atau 107,35%, Main Dealer dianggarkan sebesar Rp25.500.000,00, realisasi sebesar Rp27.000.000,00 atau 105,88%, dan Jasa raharja dianggarkan sebesar Rp3.915.000.000,00 realisasi sebesar 100%.

Capaian realisasi pendapatan paling berpengaruh terhadap Pendapatan Hibah adalah penerimaan dari Hibah Dealer Otomotif dan dari PT Jasa Raharja. hal ini disebabkan karena meningkatnya daya beli masyarakat sehingga berdampak pada penjualan kendaraan bermotor baru dan hal itu menyebabkan kontribusi dari Dealer Otomotif ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengalami kenaikan.

2) *Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah berupa Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp2.557.449.758,72. Pendapatan sebesar Rp2.557.449.758,72 berasal dari setoran oleh Yayasan kesejahteraan pekerja dan pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang semula Bernama Yayasan Dana Jaminan hari tua bagi pegawai Pemda DIY yang didirikan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 1971 Jis Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

192/1971 Jo Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 181/1973 tentang Perubahan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 192/1971 tentang Pendirian Yayasan Dana Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja Harian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan maksud dan tujuan membantu Pemda DIY di bidang sosial kemasyarakatan. Pada tahun 2007 yayasan mendirikan usaha perkreditan. Yayasan telah menerima hibah dari pemda DIY tahun 2003 sebesar Rp471.000.000,00 dan pada tahun 2008 sebesar Rp1.850.000.000,00, dan terakhir pada tahun 2009 sebesar Rp500.000.000,00. Pada tahun 2020 usaha perkreditan diberhentikan, dan pada tahun 2022 semua kekayaan Yayasan dan pendapatan Yayasan setelah dikurangi biaya operasional Yayasan disetorkan ke kas daerah dan Yayasan dilikuidasi. Total setoran yang telah disetorkan ke kas daerah adalah sebesar Rp2.557.449.758,72 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.14. Data Likuidasi Yayasan KP3 DIY Februari-Desember Tahun 2022

No	Uraian	Nominal
1	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - FEB 2022	1,063,207,200.00
2	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - MAR 2022	537,518,585.00
3	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - APR 2022	34,493,687.50
4	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - MEI 2022	527,092,425.00
5	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - JUN 2022	27,016,938.00
6	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - JUL 2022	34,725,000.00
7	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - AGS 2022	15,055,438.00
8	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - SEP 2022	24,513,425.00
9	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - OKT 2022	56,294,187.50
10	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - NOV 2022	37,814,085.00
11	LIKUIDASI YAYASAN KP3 DIY - DES 2022	199,718,787.72
JUMLAH		2,557,449,758.72

Sumber:BPKA DIY, 2023

3. Permasalahan dan Solusi Terkait Pengelolaan Pendapatan

a. Permasalahan

Target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD secara umum telah mencapai target yang ditetapkan. Dalam rangka memacu peningkatan pendapatan dilakukan identifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh Perangkat Daerah berpendapatan. Kendala tersebut antara lain:

- 1) Kurangnya *channel* pembayaran pajak online dalam pembayaran pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 2) Pandemi Covid-19 berdampak di semua sektor baik itu di bidang Ekonomi, Pariwisata dan Transportasi sehingga menyebabkan penurunan kemampuan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaran Bermotor serta menurunnya penerimaan dari pendapatan Retribusi.
- 3) Penerimaan Bagi Hasil dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berkurang karena *refocusing* Anggaran akibat dari adanya Pandemi Covid-19.

b. Solusi

Berdasarkan kendala tersebut di atas, secara bertahap telah dilakukan upaya perbaikan antara lain:

- 1) Menambah kanal pembayaran pajak *online* dengan cara bekerjasama dengan beberapa bank dan layanan pembayaran *online*.
- 2) Membebaskan denda pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, untuk meringankan beban masyarakat.
- 3) Memberi keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi dalam periode tertentu.

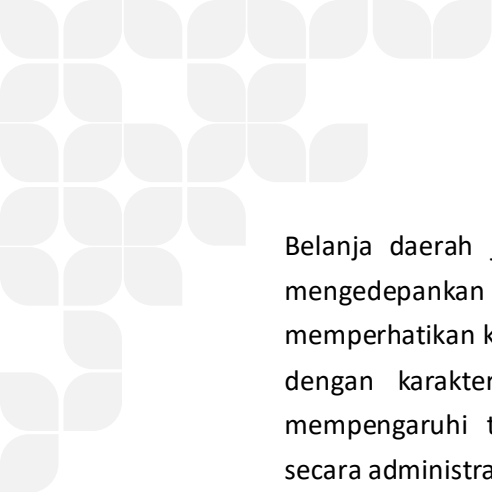
- 4) Melakukan penataan Anggaran terkait pengeluaran Belanja yang bersumber dari dana Bagi Hasil dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.
- 5) Memberi keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan cara diangsur bagi perusahaan-perusahaan persewaan kendaraan ataupun perusahaan pariwisata.
- 6) Melakukan kegiatan sosialisasi melalui media sosial, radio serta iklan tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- 7) Melakukan pemberitahuan jatuh tempo pajak melalui WA ataupun SMS *reminder* untuk mengingatkan wajib pajak agar segera membayar pajak Kendaraan Bermotor.

C. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah yang berkualitas merupakan upaya yang dilakukan pemerintah agar belanja daerah dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, yang digunakan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Prioritas pembangunan daerah ditetapkan dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan bersifat mengikat dan wajib, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, dan program/kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik, yaitu: (1) Mengatasi Ketimpangan Wilayah; (2) Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan; dan (3) Tindak Lanjut dan Antisipasi Pembangunan Kesehatan dan Sosial Masyarakat Dampak Pandemi Covid-19. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.



Belanja daerah juga diarahkan pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik dan kebutuhan suatu wilayah, sehingga akan mempengaruhi tematik pembangunan masing-masing Kabupaten/Kota secara administratif.

Selain itu belanja daerah diutamakan untuk memenuhi *mandatory spending* yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Dana pendidikan minimal sebesar 20% dari APBD sesuai amanat Pasal 49 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji sesuai amanat Pasal 171 Ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% dari APBD untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah atau sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah.


Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari APBD, namun juga memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerja sama pemerintah dan swasta, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Sesuai dinamika yang terjadi, pada Tahun 2022, Pemda DIY memandang perlu melakukan Perubahan RKPD Tahun 2022. Hal tersebut sejalan dengan mandat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 343 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Selanjutnya dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Beberapa penyesuaian alokasi dan penggunaan belanja yang dilakukan Pemda DIY, yaitu:

- a. Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, subkegiatan yang bersumber dari DAK sebagai tindak lanjut peraturan dari Pusat, yaitu:
 - 1) Perpres RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022;
 - 2) Permendikbudristek RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;

- 
- 3) PermenPPPA RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022;
 - 4) Permen Investasi/Kepala BKPM RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022; dan
 - 5) Permenkop UKM RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
 - 6) Kepmendikbudristek RI Nomor 27/P/2022 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Masing-masing Daerah;
 - 7) Kepmenkop UKM RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
 - 8) Kepmendikbudristek RI Nomor 165/P/2022 tentang Besaran Alokasi dan Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2022; dan
 - 9) Berita Acara Pembahasan Pemetaan DAK Non Fisik Jenis Kesehatan Tahun 2022 tanggal 15 November Tahun 2021.
- b. Adanya penyesuaian belanja terkait penanganan Covid-19 di DIY sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/18/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 Varian *Omicron* (B.1.1.529).
 - c. Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, subkegiatan yang bersumber dari DBH CHT sebagai tindak lanjut atas kebijakan dari Pusat, yaitu:
 - 1) Berita Acara Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pemda DIY Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 Februari 2022; dan
 - 2) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.

- d. Adanya penyesuaian belanja terkait penanganan masalah persampahan pada Tempat Pemrosesan Akhir Regional Piyungan.
- e. Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, subkegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY sebagai tindak lanjut atas Berita Acara Penilaian Perubahan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 dan 26 April 2022 pada Urusan/Kewenangan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Urusan/Kewenangan Kelembagaan, Urusan/Kewenangan Kebudayaan, Urusan/Kewenangan Pertanahan, dan Urusan/Kewenangan Tata Ruang serta dapat dilaksanakannya optimalisasi anggaran Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2022.
- f. Penyesuaian belanja gaji dan tunjangan pegawai.

2. Target dan Realisasi Belanja

Tahun anggaran 2022, Pemda DIY menetapkan Belanja sebesar Rp5.879.828.899.155,00, realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp5.453.089.556.149,68 atau 92,74%. Realisasi Belanja pada tahun 2022 mengalami penurunan secara nominal dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021, realisasi belanja sebesar Rp5.530.173.461.667,19. Penurunan realisasi belanja disebabkan adanya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya program dan kegiatan yang dilaksanakan diprioritaskan untuk urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur, penanganan Covid-19, serta penanganan dampak inflasi daerah. Belanja tahun 2022 dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran, dengan rincian anggaran dan belanja sebagai berikut:

Tabel 2.15. Anggaran dan Realisasi Belanja menurut OPD DIY tahun anggaran 2022
(Unaudited)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Rencana	Realisasi	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga	1.617.640 .471.426,00	1.532.455 .293.763,00	85.185.177 .663,00	94,73
2	Dinas Kesehatan	327.362 .270.188,00	230.392 .828.846,91	96.969 .441.341,09	70,38
3	Dinas Pekerjaan Umum. Perumahan dan Energi Sumber daya Mineral	506.903 .316.891,00	467.062 .295.933,00	39.841 .020.958,00	92,14
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	26.450 .154.467,00	25.479 .188.215,00	970 .966.252,00	96,33
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.764 .723.454,00	20.838 .358.882,00	926 .364.572,00	95,74
6	Satuan Polisi Pamong Praja	33.497 .419.640,00	32.548 .782.839,00	948 .636.801,00	97,17
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.306 .663.572,00	24.921 .956.599,00	1.384 .706.973,00	94,74
8	Dinas Sosial	128.135 .177.242,00	114.920 .064.002,00	13.215 .113.240,00	89,69
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	18.333 .667.152,00	17.618 .113.095,20	715 .554.056,80	96,10
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	96.440 .771.956,00	89.747 .845.786,83	6.692 .926.169,17	93,06
11	Dinas Perhubungan	123.773 .493.768,00	115.577 .531.387,90	8.195 .962.380,10	93,38
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	35.227 .685.684,00	34.737 .762.538,00	489 .923.146,00	98,61
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	120.936 .389.406,00	118.628 .351.853,00	2.308 .037.553,00	98,09
14	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	13.618 .565.258,00	13.068 .850.067,00	549 .715.191,00	95,96
15	Dinas Kebudayaan	363.829 .414.728,00	350.629 .728.128,95	13.199 .686.599,05	96,37
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	47.416 .886.994,00	45.533 .279.282,00	1.883 .607.712,00	96,03
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	149.418 .425.684,00	148.015 .313.910,00	1.403 .111.774,00	99,06
18	Dinas Pariwisata	39.336 .350.770,00	37.886 .286.085,00	1.450 .064.685,00	96,31
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	104.367 .380.364,00	98.944 .713.222,00	5.422 .667.142,00	94,80
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	57.782 .850.716,00	52.140 .845.170,00	5.642 .005.546,00	90,24
21	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	61.437 .385.586,00	58.707 .731.684,00	2.729 .653.902,00	95,56

No	Uraian	Tahun 2022			
		Rencana	Realisasi	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
22	Sekretariat Daerah	163.555 .879.472,00	148.903 .597.875,00	14.652 .281.597,00	91,04
23	Sekretariat DPRD	138.178 .307.336,00	113.411 .141.815,00	24.767 .165.521,00	82,08
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28.464 .020.472,00	26.943 .899.300,00	1.520 .121.172,00	94,66
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.500.550 .634.235,00	1.414.595 .231.421,63	85.955 .402.813,37	94,27
26	Badan Kepegawaian Daerah	31.713 .477.434,00	29.582 .124.701,00	2.131 .352.733,00	93,28
27	Badan Pendidikan dan Pelatihan	29.468 .038.717,00	25.028 .676.778,26	4.439 .361.938,74	84,93
28	Badan Penghubung Daerah	11.486 .856.663,00	11.199 .383.125,00	287 .473.538,00	97,50
29	Inspektorat	29.011 .657.600,00	26.807 .728.357,00	2.203 .929.243,00	92,40
30	Paniradya Kaistimewan	27.420 .562.280,00	26.762 .651.487,00	657 .910.793,00	97,60
Jumlah		5.879.828 .899.155,00	5.453.089 .556.149,68	426.739 .343.005,32	92,74

Sumber: BPKA DIY, 2023

Belanja Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp5.879.828.899.155,00. realisasi sebesar Rp5.453.089.556.149,68 atau 92,74%. Belanja tahun anggaran 2022 dapat dirinci sesuai dengan kelompok belanja sebagai berikut:

Tabel 2.16. Realisasi Belanja DIY Tahun 2022 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Rencana	Realisasi	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Operasi	3.758.580.237 .442,00	3.448.622.637 .192,31	309.957.600 .249,69	91,75
2	Belanja Modal	742.798.152 .703,00	704.891.827 .579,74	37.906.325 .123,26	94,90
3	Belanja Tak Terduga	62.545.932 .869,00	5.735.041 .553,00	56.810.891 .316,00	9,17
4	Belanja Transfer	1.315.904.576 .141,00	1.293.840.049 .824,63	22.064.526 .316,37	98,32
Jumlah		5.879.828.899 .155,00	5.453.089.556 .149,68	426.739.343 .005,32	92,74

Sumber: BPKA DIY, 2023

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dianggarkan pada semua OPD yang terdiri dari jenis belanja: (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Barang Jasa; (3) Belanja Subsidi; (4) Belanja Hibah; (5) Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.758.580.237.442,00 realisasi sebesar Rp3.448.622.637.192,31 atau 91,75%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi sesuai dengan jenis belanja tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi DIY Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Rencana	Realisasi	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.673.619.630.998,00	1.604.728.143.644,64	68.891.487.353,36	95,88
2	Belanja Barang dan Jasa	1.469.555.928.220,00	1.265.473.453.438,94	204.082.474.781,06	86,11
3	Belanja subsidi	78.451.861.160,00	72.548.542.632,00	5.903.318.528,00	92,48
4	Belanja Hibah	502.164.697.064,00	474.277.634.446,73	27.887.062.617,27	94,45
5	Belanja Bantuan Sosial	34.788.120.000,00	31.594.863.030,00	3.193.256.970,00	90,82
	Jumlah	3.758.580.237.442,00	3.448.622.637.192,31	309.957.600.249,69	91,75

Sumber: BPKA DIY, 2023

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Selain itu, Belanja Pegawai juga menampung uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya, belanja pegawai BLUD, dan honorarium yang ditetapkan sesuai dengan peraturan

perundangan. Anggaran Belanja Pegawai tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.673.619.630.998,00. Realisasi sebesar Rp1.604.728.143.644,64 atau 95,88%. Anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.18. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai DIY Tahun 2022 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Rencana	Realisasi	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	851.382 .330.637,00	824.077 .145.482,00	(27.305 .185.155,00)	96,79
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	444.880 .456.230,00	439.571 .058.542,00	(5.309 .397.688,00)	98,81
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	316.548 .013.251,00	283.055 .809.549,00	(33.492 .203.702,00)	89,42
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	40.607 .225.340,00	39.669 .080.939,00	(938 .144.401,00)	97,69
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	237 .359.104,00	235 .925.116,00	(1 .433.988,00)	99,40
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.548 .504.450,00	3.159 .125.000,00	(389 .379.450,00)	89,03
7	Belanja Pegawai BLUD	16.415 .741.986,00	14.959 .999.016,64	(1.455 .742.969,36)	91,13
	Jumlah	1.673.619 .630.998,00	1.604.728 .143.644,64	(68.891 .487.353,36)	95,88

Sumber: BPKA DIY, 2023

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain yang meliputi belanja barang berupa barang pakai habis, dan barang tak habis pakai. Belanja Jasa berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan, bea siswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi.

Belanja pemeliharaan berupa belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor. Belanja Perjalanan Dinas berupa perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri serta belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Anggaran Belanja barang dan Jasa tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.469.555.928.220,00 realisasi sebesar Rp1.265.473.453.438,94 atau 86,11%.

Tabel 2.19. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa DIY Tahun 2022 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	334.016.206	266.739.456	67.276.749	79,86
		.128,00	.357,50	.770,50	
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	363.511	356.391	7.119	98,04
		.000,00	.900,00	.100,00	
3	Belanja Jasa Kantor	480.306.771	449.421.446	30.885.325	93,57
		.952,00	.437,80	.514,20	
4	Belanja luran Jaminan/Asuransi	44.538.768	30.114.772	14.423.996	67,61
		.045,00	.021,00	.024,00	
5	Belanja Sewa Tanah	1.567.735	1.402.073	165.661	89,43
		.162,00	.640,00	.522,00	
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	32.325.884	27.674.123	4.651.760	85,61
		.100,00	.992,00	.108,00	
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	34.467.127	31.042.570	3.424.557	90,06
		.529,00	.436,00	.093,00	
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.817.465	3.499.195	318.269	91,66
		.000,00	.600,00	.400,00	
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	19.878.035	17.727.699	2.150.336	89,18
		.347,00	.166,00	.181,00	
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	37.700.584	35.376.127	2.324.456	93,83
		.052,00	.493,00	.559,00	
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3.526.231	3.466.431	59.799	98,30
		.000,00	.200,00	.800,00	
12	Belanja Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.142.301	5.430.066	712.235	88,40
		.750,00	.454,00	.296,00	
13	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.866.791	1.493.193	373.597	79,99
		.000,00	.268,00	.732,00	
14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.043.917	18.044.202	999.715	94,75
		.687,00	.190,00	.497,00	

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47.043.615 .232,00	42.937.451 .649,37	4.106.163 .582,63	91,27
16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.294.212 .817,00	32.994.176 .689,00	3.300.036 .128,00	90,91
17	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.089.920 .000,00	1.949.615 .111,00	140.304 .889,00	93,29
18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	111.914.596 .966,00	88.594.632 .737,00	23.319.964 .229,00	79,16
19	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	16.401.590 .650,00	8.089.496 .532,00	8.312.094 .118,00	49,32
20	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	63.901.494 .551,00	63.003.695 .051,00	897.799 .500,00	98,60
21	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	88.000 .000,00	18.000 .000,00	70.000 .000,00	20,45
22	Belanja Barang dan Jasa BOS	112.946.559 .495,00	110.754.251 .012,00	2.192.308 .483,00	98,06
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	59.314.608 .757,00	25.344.384 .502,27	33.970.224 .254,73	42,73
Jumlah		1.469.555.928 .220,00	1.265.473.453 .438,94	204.082.474 .781,06	86,11

Sumber: BPKA DIY, 2023

3) *Belanja Subsidi*

Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp78.451.861.160,00 dan realisasi sebesar Rp72.548.542.632,00 atau sebesar 92,48%. Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).

Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi. Belanja Subsidi pada Pemda DIY merupakan bantuan biaya produksi yang diberikan kepada PT. Anindya Mitra Internasional yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja PT. AMI berhak atas subsidi, pendapatan, dan mengusulkan tarif layanan angkutan. Secara rinci ketentuan tentang Subsidi diatur dalam Pergub Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service*.

4) **Belanja Hibah**

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang. Belanja hibah uang diberikan kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang di bentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Hibah Dana BOS, dan Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Belanja Hibah barang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang di bentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar, kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, dan Koperasi. Pemberian hibah dilakukan secara selektif disesuaikan dengan kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah agar tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib. Alokasi Anggaran Belanja Hibah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp502.164.697.064,00 dengan realisasi sebesar Rp474.277.634.446,73 atau 94,45%. Hibah dalam

bentuk uang dianggarkan sebesar Rp343.430.558.000,00 dan realisasinya sebesar Rp328.772.971.686,00 atau 95,73%. Hibah dalam bentuk barang dianggarkan sebesar Rp158.734.139.064,00 dan realisasinya sebesar Rp145.504.662.760,73 atau 91,67%. Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20. Realisasi Belanja Hibah dalam Bentuk Uang Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	51.271.620.000,00	44.908.616.168,00	(6.363.003.832,00)	87,59
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	147.916.250.000,00	147.916.250.000,00	-	100,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	33.728.000.000,00	33.553.000.000,00	(175.000.000,00)	99,48
4	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	90.340.370.000,00	83.305.289.642,00	(7.035.080.358,00)	92,21
5	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	17.693.780.000,00	16.609.277.876,00	(1.084.502.124,00)	93,87
6	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.480.538.000,00	2.480.538.000,00	-	100,00
Jumlah		343.430.558.000,00	328.772.971.686,00	(14.657.586.314,00)	95,73

Sumber: BPKA DIY, 2023

Tabel 2.21. Realisasi Belanja Hibah dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.513.700.000,00	1.177.062.650,00	(336.637.350,00)	77,76

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/lebih Anggaran (Rp)	%
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20.861.394.000,00	20.710.280.900,00	(151.113.100,00)	99,28
3	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	136.359.045.064,00	123.617.319.210,73	(12.741.725.853,27)	90,66
Jumlah		158.734.139.064,00	145.504.662.760,73	(13.229.476.303,27)	91,67

Sumber: BPKA DIY, 2023

5) *Belanja Bantuan Sosial*

Belanja bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang tahun anggaran 2022 berupa Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya). Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang tahun anggaran 2022 berupa Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu. Anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp34.788.120.000,00 dengan realisasi sebesar Rp31.594.863.030,00 atau 90,82%. Secara rinci realisasi Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang Tahun 2022 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.554.400.000,00	3.039.000.000,00	(515.400.000,00)	85,50
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.586.400.000,00	3.586.400.000,00	-	100,00
Jumlah Bansos uang		7.140.800.000,00	6.625.400.000,00	(515.400.000,00)	92,78

Sumber: BPKA DIY, 2023

Tabel 2.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang Tahun 2022 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	27.647.320.000,00	24.969.463.030,00	(2.677.856.970,00)	90,31
Jumlah		27.647.320.000,00	24.969.463.030,00	(2.677.856.970,00)	90,31

Sumber: BPKA DIY, 2023

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Anggaran Belanja Modal Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp742.798.152.703,00 dengan realisasi Rp704.891.827.579,74 atau 94,90%.

Tabel 2.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal DIY Tahun 2022 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/ Lebih Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	160.094.957 .821,00	152.180.270 .772,00	7.914.687 .049,00	95,06
2	Belanja Modal Alat Besar	13.173.831 .720,00	12.659.466 .155,00	514.365 .565,00	96,10
3	Belanja Modal Alat Angkutan	8.485.647 .000,00	6.562.460 .580,00	1.923.186 .420,00	77,34
4	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.035.728 .140,00	2.925.580 .074,00	110.148 .066,00	96,37
5	Belanja Modal Alat Pertanian	813.899 .950,00	754.982 .935,00	58.917 .015,00	92,76
6	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	29.288.356 .655,00	27.945.521 .437,74	1.342.835 .217,26	95,42
7	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.816.095 .255,00	8.144.133 .192,00	671.962 .063,00	92,38
8	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.106.416 .640,00	1.873.099 .068,00	233.317 .572,00	88,92
9	Belanja Modal Alat Laboratorium	48.012.339 .837,00	46.510.211 .416,00	1.502.128 .421,00	96,87
10	Belanja Modal Komputer	29.718.762 .825,00	28.702 .683.592,00	1.016.079 .233,00	96,58
11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	375.303 .000,00	266.490 .900,00	108.812 .100,00	71,01
12	Belanja Modal Alat Pengeboran	2.896 .000,00	2.700 .000,00	196 .000,00	93,23
13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	85.000 .000,00	84.892 .000,00	108 .000,00	99,87
14	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.599.810 .000,00	1.388.222 .830,00	211.587 .170,00	86,77
15	Belanja Modal Alat Peraga	26.369 .000,00	26.069 .000,00	300 .000,00	98,86
16	Belanja Modal Rambu-Rambu	3.239.534 .154,00	3.151.263 .207,00	88.270 .947,00	97,28
17	Belanja Modal Peralatan Olahraga	67.638 .000,00	65.812 .000,00	1.826 .000,00	97,30
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	32.659.649 .734,00	32.657.738 .798,00	1.910 .936,00	99,99
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.225.494 .500,00	819.912 .170,00	405.582 .330,00	66,90
20	Belanja Modal Bangunan Gedung	217.501.962 .589,00	208.158.569 .671,00	9.343.392 .918,00	95,70
21	Belanja Modal Monumen	120.160 .000,00	119.761 .285,00	398 .715,00	99,67
22	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.171.062 .798,00	1.965.842 .459,00	205.220 .339,00	90,55
23	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	308.000 .000,00	201.918 .208,00	106.081 .792,00	65,56

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/ Lebih Anggaran (Rp)	%
24	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	113.414.729 .741,00	110.036.315 .688,00	3.378.414 .053,00	97,02
25	Belanja Modal Bangunan Air	19.184.508 .833,00	15.566.555 .242,00	3.617.953 .591,00	81,14
26	Belanja Modal Instalasi	28.133.462 .149,00	24.054.728 .239,00	4.078.733 .910,00	85,50
27	Belanja Modal Jaringan	4.660.050 .000,00	4.313.364 .674,00	346.685 .326,00	92,56
28	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.349.581 .591,00	1.316.063 .927,00	33.517 .664,00	97,52
29	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	1.750.669 .000,00	1.725.987 .912,00	24.681 .088,00	98,59
30	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	195.000 .000,00	102.306 .480,00	92.693 .520,00	52,46
31	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	775.000 .000,00	744.604 .750,00	30.395 .250,00	96,08
32	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	10.403.610 .771,00	9.864.158 .668,00	539.452 .103,00	94,81
33	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	2.625 .000,00	140 .250,00	2.484 .750,00	5,34
Jumlah		742.798.152 .703,00	704.891.827 .579,74	37.906.325 .123,26	94,90

Sumber: BPKA DIY, 2023

c. Belanja Dana Keistimewaan

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.879.828.899.155,00 dan realisasi sebesar Rp5.453.095.966.684,68 di dalamnya termasuk anggaran dan realisasi belanja yang sumber dananya dari DAIS sesuai dengan amanat UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah ditetapkan dengan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Alokasi DAIS tahun anggaran 2022 sesuai dengan Perpres Nomor 104 Tahun 2021 (Lampiran V) tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp1.320.000.000.000,00 Penyaluran DAIS Tahun 2022 sebesar Rp1.259.286.977.483,00 berasal dari nilai alokasi sebesar Rp1.320.000.000.000,00 dikurangi dengan sisa DAIS tahun anggaran 2021 sebesar Rp60.713.022.516,00.

Belanja DAIS tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh OPD dilingkungan Pemda DIY, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kalurahan. Untuk DAIS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dilakukan dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus DAIS. DAIS ditransfer dari rekening Kas Daerah Pemda DIY ke rekening Pemda Kabupaten/Kota dan rekening Pemerintah Kalurahan untuk pembiayaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Urusan Keistimewaan. Sisa DAIS pada Pemda Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan pada akhir tahun anggaran disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah Pemda DIY.

Anggaran Belanja DAIS sebesar Rp1.320.000.000.000,00 sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 telah terserap sebesar Rp1.272.725.809.223,58 atau 96,42%. Rincian anggaran dan realisasi kegiatan yang didanai dari DAIS tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.25. Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2022 (Unaudited)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
I	Kelembagaan Pemerintah Daerah				
1	Kota Yogyakarta	212.786 .250,00	195.623 .689,00	17.162 .561,00	91,93
2	Kabupaten Bantul	4.142.999 .000,00	4.008.605 .496,00	134.393 .504,00	96,76
3	Kabupaten Kulon Progo	3.438.368 .500,00	3.202.274 .033,00	236.094 .467,00	93,13
4	Kabupaten Gunungkidul	2.602.953 .600,00	2.523.924 .574,00	79.029 .026,00	96,96
5	Kabupaten Sleman	1.795.195 .700,00	1.728.733 .587,00	66.462 .113,00	96,30
6	Biro Organisasi Setda DIY	3.162.212 .000,00	2.873.181 .947,00	289.030 .053,00	90,86
7	Biro Hukum	846.250 .000,00	835.406 .779,00	10.843 .221,00	98,72
8	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1.853.478 .000,00	1.688.446 .442,00	165.031 .558,00	91,10
9	Badan Kepegawaian Daerah	1.082.710 .000,00	1.054.648 .200,00	28.061 .800,00	97,41
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.980.245 .000,00	1.699.935 .136,00	280.309 .864,00	85,84
11	Paniradya Kaistimewan	20.464.031 .474,00	19.874.373 .201,00	589.658 .273,00	97,12
II	Kebudayaan				

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
1	Kota Yogyakarta	34.618.248 .279,00	33.819.808 .016,00	798.440 .263,00	97,69
2	Kabupaten Bantul	20.143.302 .000,00	19.338.815 .699,00	804.486 .301,00	96,01
3	Kabupaten Kulon Progo	53.537.121 .889,00	51.088.239 .503,00	2.448.882 .386,00	95,43
4	Kabupaten Gunungkidul	22.874.962 .340,00	22.326.302 .961,00	548.659 .379,00	97,60
5	Kabupaten Sleman	18.604.900 .669,00	18.285.442 .139,44	319.458 .529,56	98,28
6	Dinas Kebudayaan DIY	302.789.217 .025,00	289.588.791 .950,00	13.200.425 .075,00	95,64
7	Taman Budaya Yogyakarta	15.677.465 .000,00	15.546.758 .352,95	130.706 .647,05	99,17
8	Museum Sonobudoyo Yogyakarta	13.574.821 .067,00	13.171.185 .704,00	403.635 .363,00	97,03
9	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	38.943.638 .400,00	37.004.623 .605,00	1.939.014 .795,00	95,02
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.084.576 .713,00	21.000.513 .368,00	84.063 .345,00	99,60
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.067.629 .500,00	15.478.358 .183,00	1.589.271 .317,00	90,69
12	Badan Penghubung Daerah	4.117.563 .800,00	3.703.024 .338,00	414.539 .462,00	89,93
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.237.089 .000,00	3.008.408 .200,00	228.680 .800,00	92,94
14	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.771.902 .011,00	5.481.426 .474,00	290.475 .537,00	94,97
15	Dinas Pariwisata DIY	18.635.779 .750,00	17.799.327 .487,00	836.452 .263,00	95,51
16	Dinas Kesehatan	532.366 .000,00	508.639 .953,00	23.726 .047,00	95,54
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	3.916.697 .500,00	3.768.866 .845,00	147.830 .655,00	96,23
19	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	93.847.240 .102,00	91.503.660 .796,00	2.343.579 .306,00	97,50
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.894.144 .200,00	4.266.622 .110,00	627.522 .090,00	87,18
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	116.450.680 .790,00	116.152.552 .222,00	298.128 .568,00	99,74
22	Dinas Sosial	6.184.871 .500,00	5.554.958 .110,00	629.913 .390,00	89,82
23	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	747.000 .000,00	723.649 .717,00	23.350 .283,00	96,87
24	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.303.424 .750,00	3.047.055 .372,00	256.369 .378,00	92,24
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	971.968 .800,00	692.632 .000,00	279.336 .800,00	71,26
26	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	848.108 .000,00	805.488 .076,00	42.619 .924,00	94,97
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.372.225 .000,00	6.321.121 .493,00	51.103 .507,00	99,20

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
28	Satuan Polisi Pamong Praja	12.048.826 .391,00	11.737.739 .622,00	311.086 .769,00	97,42
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral	5.578.362 .000,00	5.513.970 .610,00	64.391 .390,00	98,85
30	Dinas Perhubungan	98.000 .000,00	97.733 .280,00	266 .720,00	99,73
31	Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY	580.265 .838,00	565.559 .437,00	14.706 .401,00	97,47
32	Biro Adm Perekonomian dan SDA Setda DIY	163.658 .750,00	159.408 .750,00	4.250 .000,00	97,40
33	Biro Tata Pemerintahan	1.790.492 .800,00	1.396.515 .831,00	393.976 .969,00	78,00
32	BKK Kalurahan				
	BKK Kalurahan - Desa Balai Budaya	6.880.800 .000,00	6.879.148 .614,00	1.651 .386,00	99,98
	BKK Kalurahan - Desa Mandiri Budaya	19.400.000 .000,00	19.264.227 .619,00	135.772 .381,00	99,30
	BKK Kalurahan - Arsitektur	5.940.000 .000,00	5.913.548 .163,00	26.451 .837,00	99,55
	BKK Kalurahan - Desa Bahari	4.740.294 .000,00	4.543.605 .729,00	196.688 .271,00	95,85
	BKK Kalurahan - Desa Budaya	8.750.000 .000,00	8.656.244 .646,00	93.755 .354,00	98,93
	BKK Kalurahan - Desa Mandiri Pangan	1.500.000 .000,00	1.498.951 .000,00	1.049 .000,00	99,93
	BKK Kalurahan - Desa Prima	1.250.000 .000,00	1.249.027 .410,19	972 .589,81	99,92
	BKK Kalurahan - Desa Preneur	4.000.000 .000,00	3.987.418 .500,00	12.581 .500,00	99,69
	BKK Kalurahan - Desa Wisata	7.000.000 .000,00	6.994.068 .644,00	5.931 .356,00	99,92
	BKK Kalurahan-Padat Karya	19.075.000 .000,00	19.001.072 .765,00	73.927 .235,00	99,61
	BKK Kalurahan - Papan Penanda Keistimewaan	18.963.000 .000,00	18.953.271 .960,00	9.728 .040,00	99,95
III	Pertanahan				
1	Kota Yogyakarta	1.408.780 .000,00	1.338.570 .480,00	70.209 .520,00	95,02
2	Kabupaten Bantul	5.767.883 .000,00	4.473.355 .750,00	1.294.527 .250,00	77,56
3	Kabupaten Kulon Progo	3.071.831 .000,00	2.604.926 .148,00	466.904 .852,00	84,80
4	Kabupaten Gunungkidul	5.014.385 .000,00	4.884.199 .720,00	130.185 .280,00	97,40
5	Kabupaten Sleman	2.813.796 .096,00	2.681.584 .302,00	132.211 .794,00	95,30
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	7.378.140 .785,00	7.094.175 .199,00	283.965 .586,00	96,15
7	Biro Hukum Setda DIY	452.472 .000,00	441.286 .650,00	11.185 .350,00	97,53
8	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	285.000 .000,00	269.732 .927,00	15.267 .073,00	94,64
9	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	540.000 .000,00	369.947 .630,00	170.052 .370,00	68,51

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
10	BKK Kalurahan - Urusan Pertanahan	291.072 .000,00	291.072 .000,00	-	100,00
IV Tata Ruang					
1	Kota Yogyakarta	14.650.850 .000,00	14.208.856 .408,00	441.993 .592,00	96,98
2	Kabupaten Bantul	406.646 .650,00	406.646 .650,00	-	100,00
3	Kabupaten Kulon Progo	2.572.796 .375,00	2.505.949 .649,00	66.846 .726,00	97,40
4	Kabupaten Gunungkidul	9.932.662 .350,00	9.922.858 .702,00	9.803 .648,00	99,90
5	Kabupaten Sleman	84.430.125 .630,00	79.748.707 .630,00	4.681.418 .000,00	94,46
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	7.249.316 .500,00	6.993.109 .427,00	256.207 .073,00	96,47
7	Dinas Pertanian	859.704 .000,00	569.150 .372,00	290.553 .628,00	66,20
8	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	133.160 .800,00	133.131 .800,00	29 .000,00	99,98
9	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	170.623.365 .061,00	164.724.632 .967,00	5.898.732 .094,00	96,54
10	Dinas Perhubungan DIY	6.213.932 .565,00	6.067.085 .608,00	146.846 .957,00	97,64
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	125.000 .000,00	122.567 .285,00	2.432 .715,00	98,05
12	Biro Umum, Humas dan Protokol	144.952 .600,00	144.355 .260,00	597 .340,00	99,59
13	BPTTG (Disperindag)	218.220 .000,00	217.286 .000,00	934 .000,00	99,57
14	BLPT (Dikpora)	190.000 .000,00	182.217 .250,00	7.782 .750,00	95,90
V Tata Cara					
1	Sekretariat DPRD	2.679.743 .000,00	2.147.899 .773,00	531.843 .227,00	80,15
2	Biro Umum Humas dan Protokol	3.358.301 .000,00	3.174.049 .562,00	184.251 .438,00	94,51
3	Biro Tata Pemerintahan	399.160 .000,00	236.637 .536,00	162.522 .464,00	59,28
4	Bappeda	701.830 .200,00	688.878 .200,00	12.952 .000,00	98,15
Jumlah		1.320.000.000 .000,00	1.272.725.809 .223,58	47.274.190 .776,42	96,42

Sumber: BPKA DIY, 2023

d. Belanja Tak terduga

Anggaran Belanja Tak Terduga tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp62.545.932.869,00 dengan realisasi sebesar Rp5.735.041.553,00 atau 9,17%. Realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2022 dijelaskan sebagai berikut:

1) Penanganan pandemi Covid-19 melalui Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* DIY sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur DIY dengan KepGub Nomor 3/KEP/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* DIY dan terakhir dirubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 32/KEP/2021. Selanjutnya mekanisme kerja Satuan Tugas mengacu pada Pergub Nomor 20 Tahun 2021 tentang Mekanisme Kerja Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* DIY. Dasar pengeluaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 dalam rangka penanganan Covid-19 adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan KepGub DIY sebagai berikut:

- a) KepGub Nomor 29/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Satu Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta, berlaku mulai tanggal 1 Februari 2022 - 28 Februari 2022.
- b) KepGub Nomor 55/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Dua Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta, berlaku mulai tanggal 1 Maret 2022-31 Maret 2022.
- c) KepGub Nomor 76/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Tiga Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta, berlaku mulai tanggal 1 April 2022-30 April 2022.

Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 Tahun 2022 di terbitkan SP2D LS fase 1 (satu) sampai dengan fase 4 (empat) sebesar Rp5.871.069.000,00 dan realisasi sebesar

Rp5.495.361.462,00 sehingga terdapat sisa SP2D sebesar Rp375.707.538,00. Sisa SP2D sebesar Rp375.707.538,00 telah disetorkan ke rekening kas umum daerah. Rincian SP2D LS dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.26. Rincian SP2D Belanja Tak Terduga 2022 Penanganan Covid-19 (*Unaudited*)

No	Nomor SP2D	Jumlah SP2D	Realisasi SPJ	Sisa SP2D
1	04.00/04.0/000015/LS/5.02.9.02.0.00.04.0000/P.01/2/2 022 Tanggal 21 Februari 2022	476.584 .000,00	363.014 .300,00	113.569 .700,00
2	04.00/04.0/000040/LS/5.02.9.02.0.00.04.0000/P.01/2/2 022 Tanggal 21 Februari 2022	387.135 .000,00	376.203 .571,00	10.931 .429,00
3	04.00/04.0/000041/LS/5.02.9.02.0.00.04.0000/P.01/3/2 022 Tanggal 1 Maret 2022	17.850 .000,00	6.236 .834,00	11.613 .166,00
4	04.00/04.0/000539/LS/5.02.9.02.0.00.04.0000/P.02/4/2 022 Tanggal 25 April 2022	4.989.500 .000,00	4.749.906 .757,00	239.593 .243,00
	Jumlah	5.871.069 .000,00	5.495.361 .462,00	375.707 .538,00

Sumber: BPKA DIY, 2023

- 2) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku sesuai dengan Inmendagri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah. Pemda DIY menetapkan KepGub DIY Nomor 198/KEP/2022 tentang penetapan status siaga darurat penyakit mulut dan kuku di DIY yang ditindak lanjuti dengan KepGub DIY Nomor 199/KEP/2022 tentang pembentukan satuan tugas penanganan penyakit mulut dan kuku di DIY. Dalam rangka penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tahun 2022 di terbitkan SP2D LS sebesar Rp236.589.000,00 dan realisasi sebesar Rp231.305.560,00 sehingga terdapat sisa SP2D sebesar Rp5.283.440,00. Sisa SP2D sebesar Rp5.283.440,00 telah disetorkan di rekening kas umum daerah.
- 3) Pengembalian Kelebihan Pendapatan setoran Laba BUKP tahun 2021 Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul karena terdapat kesalahan transfer ke rekening Kas umum Daerah Pemda DIY. Dalam rangka pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan setoran laba BUKP tahun 2021 diterbitkan SP2D LS sebesar Rp8.374.531,00.

Rincian SP2D dan SPJ Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.27. Rincian SP2D dan SPJ Belanja Tak Terduga 2022 (*Unaudited*)

No	Nomor SP2D	Jumlah SP2D	Realisasi SPJ	Sisa SP2D
1	04.00/04.0/000015/LS/5.02.9.02.0.00.04.0000/P.01/2/2022 Tanggal 21 Februari 2022	476.584 .000,00	363.014 .300,00	113.569 .700,00
2	04.00/04.0/000040/LS/5.02.9.02.0.00.04.0000/P.01/2/2022 Tanggal 21 Februari 2022	387.135 .000,00	376.203 .571,00	10.931 .429,00
3	04.00/04.0/000041/LS/5.02.9.02.0.00.04.0000/P.01/3/2022 Tanggal 1 Maret 2022	17.850 .000,00	6.236 .834,00	11.613 .166,00
4	04.00/04.0/000539/LS/5.02.9.02.0.00.04.0000/P.02/4/2022 Tanggal 25 April 2022	4.989.500 .000,00	4.749.906 .757,00	239.593 .243,00
5	04.00/04.0/000736/LS/5.02.9.02.0.00.04.0000/P.02/7/2022 Tanggal 8 Juli 2022	236.589 .000,00	231.305 .560,00	5.283 .440,00
6	04.00/08.0/000870/LS/5.02.9.02.0.00.04.0000/P.02/8/2022 Tanggal 30 Agustus 2022	8.374 .531,00	8.374 .531,00	-
	Jumlah	6.116.032 .531,00	5.735.041 .553,00	380.990 .978,00

Sumber: BPKA DIY, 2023

e. Belanja Transfer

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.315.904.576.141,00 dan realisasi sebesar Rp1.293.846.460.359,63 atau 98,32% dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota. Belanja Bagi Hasil ini merupakan pembagian hasil/realisasi pendapatan dari pajak daerah. Alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp839.016.298.042,00 dan realisasi sebesar Rp839.016.298.042,00 atau 100%. Secara rinci, realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota DIY Tahun 2022 (Audited)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/ Lebih Anggaran (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta	145.324 .342.606	145.324 .342.606	-	100
2	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul	192.023 .344.227	192.023 .344.227	-	100
3	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	104.771 .836.581	104.771 .836.581	-	100
4	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	123.106 .178.070	123.106 .178.070	-	100
5	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Sleman	273.790 .596.558	273.790 .596.558	-	100
	Jumlah	839.016 .298.042	839.016 .298.042	-	100

Sumber: BPKA DIY, 2023

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerja sama antardaerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan keuangan tersebut bersifat khusus yaitu khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp476.888.278.099,00 dan realisasi sebesar Rp454.823.751.782,63 atau 95,37%. Belanja tersebut meliputi Belanja Bantuan Keuangan daerah Provinsi Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp370.669.592.099,00 dan realisasi sebesar Rp354.260.646.707,44 atau 95,57%, dan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dianggarkan

sebesar Rp106.218.686.000,00 dan realisasi sebesar Rp100.563.105.075,19 atau 94,68% dengan rincian sebagai berikut:

a) **Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota**

Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp370.669.592.099,00 dan realisasi sebesar Rp354.260.646.707,44 atau 95,57%. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota tersebut merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus. Bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada kabupaten kota dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100% digunakan untuk pemberian bantuan terkait musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur berdasarkan surat Bupati Cianjur Nomor 900/8896/BKAD tanggal 28 November tahun 2022.

Tabel 2.29. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota DIY Tahun 2022 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih Anggaran (Rp)	%
1	Bantuan Keuangan Ke Kota Yogyakarta	52.643.664.529,00	50.815.562.393,00	(1.828.102.136,00)	96,53
2	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Bantul	53.290.830.650,00	50.367.423.595,00	(2.923.407.055,00)	94,51
3	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Kulon Progo	69.135.117.764,00	65.416.389.333,00	(3.718.728.431,00)	94,62
4	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Gunungkidul	74.213.586.061,00	72.072.803.728,00	(2.140.782.333,00)	97,12
5	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Sleman	120.386.393.095,00	114.588.467.658,44	(5.797.925.436,56)	95,18
7	Bantuan Keuangan Umum DIY Ke Kab Cianjur	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00
Jumlah		370.669.592.099,00	354.260.646.707,44	(16.408.945.391,56)	95,57

Sumber: BPKA DIY, 2023

b) Belanja Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa tahun anggaran 2022 merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dianggarkan sebesar Rp106.218.686.000,00 dengan realisasi sebesar Rp100.563.105.075,19 atau 94,68%.

Tabel 2.30. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa DIY Tahun 2022 (*Unaudited*)

No	Uraian	Tahun 2022			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
1	Arsitektur Gaya Yogya	5.940.000 .000,00	5.913.548 .163,00	26.451 .837,00	99,55
2	Balai Budaya	6.880.800 .000,00	6.879.148 .614,00	1.651 .386,00	99,98
3	Kunjungan Gub /Sleman/GK/KP	6.528.520 .000,00	1.431.448 .025,00	5.097.071 .975,00	21,93
4	BKK Desa Budaya	8.750.000 .000,00	8.656.244 .646,00	93.755 .354,00	98,93
5	Desa Mandiri Pangan	1.500.000 .000,00	1.498.951 .000,00	1.049 .000,00	99,93
6	Desa Mandiri Budaya	19.400.000 .000,00	19.264.227 .619,00	135.772 .381,00	99,30
7	Desa Maritim	4.740.294 .000,00	4.543.605 .729,00	196.688 .271,00	95,85
8	Desa Peneur	4.000.000 .000,00	3.987.418 .500,00	12.581 .500,00	99,69
9	Desa Prima	1.250.000 .000,00	1.249.027 .410,19	972 .589,81	99,92
10	Desa Wisata	7.000.000 .000,00	6.994.068 .644,00	5.931 .356,00	99,92
11	Optimalisasi Tanah Kalurahan	291.072 .000,00	291.072 .000,00	-	100,00
12	Padat Karya Jogja Istimewa	19.075.000 .000,00	19.001.072 .765,00	73.927 .235,00	99,61
13	Penanda Keistimewaan	18.963.000 .000,00	18.953.271 .960,00	9.728 .040,00	99,95
14	BKK REGULER Desa	1.900.000 .000,00	1.900.000 .000,00	-	100,00
	Jumlah	106.218.686 .000,00	100.563.105 .075,19	5.655.580 .924,81	94,68

Sumber: BPKA DIY, 2023

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Adanya kebijakan Pemerintah berkaitan dengan penggunaan dana transfer yang pemanfaatannya sudah diarahkan, serta dikeluarkan dalam masa pelaksanaan APBD mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian belanja dalam proses pelaksanaan anggaran. Serta adanya keperluan mendesak dalam masa pelaksanaan APBD yang belum dapat diantisipasi dalam proses perencanaan berakibat perlu dilakukan penyesuaian belanja dalam proses pelaksanaan anggaran.

b. Solusi

Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan sehingga dapat menghasilkan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang terintergrasi dengan baik.

D. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan DIY menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Penganggaran SiLPA tahun 2022 mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021, serta perkiraan realisasi pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, hasil dari penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan

sisa dana pengeluaran pembiayaan. Penganggaran penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah memperhatikan besarnya Pemberian Pinjaman Pemda DIY berupa dana bergulir kepada masyarakat melalui BUKP pada tahun 2020.

Pada APBD Tahun Anggaran 2022 penerimaan pembiayaan sebesar Rp564.487.394.414,00 berasal dari SiLPA sebesar Rp554.487.394.414,00 dan penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada tahun 2022 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMD diprioritaskan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

Pada APBD Tahun Anggaran 2022, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp173.675.000.000,00 berasal dari Penyertaan Modal Daerah yang diberikan kepada PT Bank BPD DIY dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/Pojk.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum mengatur bahwa modal inti Bank Umum milik pemerintah daerah sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) pada akhir Desember tahun 2024. Pada Desember tahun 2022, modal inti PT Bank BPD DIY telah mencapai Rp3.112.936.000.000,00 (tiga triliun seratus dua belas milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) (*Unaudited*). Kemudian penambahan setoran modal pada PT. Bank BPD DIY tersebut juga didasarkan atas Perda DIY Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida. Dalam peraturan daerah tersebut, disebutkan bahwa untuk dapat memenuhi kepemilikan modal dasar 51% dari modal dasar PT Bank BPD DIY sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah), maka Pemda DIY mempunyai kewajiban penyertaan modal ke PT Bank BPD DIY sebesar

Rp2.040.000.000.000,00 (dua triliun empat puluh miliar rupiah). Sampai dengan Tahun Anggaran 2022, Pemda DIY telah menyertakan modal ke PT Bank BPD DIY sebesar Rp1.081.175.000.000,00 (satu triliun delapan puluh satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

2. Target dan Realisasi Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp564.487.394.414,00 dengan realisasi Rp554.687.337.214,50 atau 98,26%. Realisasi Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari SiLPA dianggarkan sebesar Rp554.487.394.414,50, realisasi sebesar Rp554.487.394.414,50 atau 100%, dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00, realisasi sebesar Rp199.942.800,00 atau 2,00%. Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp10.000.000.000,00 merupakan target penerimaan pembiayaan dari pemberian dana bergulir kepada BUKP tahun 2019 melalui pengeluaran pembiayaan berupa investasi non permanen lainnya yang sudah direalisasikan tahun anggaran 2021 dan sisa akan direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp173.675.575.000,00 dengan realisasi Rp173.675.000.000,00 atau 100,00% dengan peruntukan penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank BPD DIY dalam rangka memenuhi modal dasar yang dimiliki oleh Pemda DIY dan untuk menjaga proporsi kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 51%.

E. PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN

1. Kinerja BUMD

a. PT Bank BPD DIY

Berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, modal dasar BPD DIY ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000.000,00, dengan komposisi modal yang dimiliki oleh Pemda DIY sebesar 51% atau Rp2.040.000.000.000,00. Berdasarkan Perda dimaksud, modal dasar PT Bank BPD DIY harus dipenuhi mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 penambahan total modal yang telah disetorkan Pemda DIY pada PT Bank BPD DIY sebesar Rp907.500.000.000,00. Tahun 2022 per bulan Mei terdapat penambahan setoran modal sebesar Rp173.675.000.000,00 sehingga total modal yang telah disetorkan sebesar Rp1.081.175.000.000,00. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada Perda tentang penyertaan modal kepada PT. Bank BPD DIY, yaitu sampai dengan tahun 2025, kekurangan modal dasar dari Pemda DIY yang harus disetorkan pada PT. Bank BPD DIY adalah sebesar Rp958.825.000.000,00.

Dalam hal kinerja keuangan, PT Bank BPD DIY telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk Tahun Buku 2021 dan Tahun Buku 2022 yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan kondisi total pendapatan dibandingkan total beban maka terjadi kenaikan Laba Tahun Berjalan Sebelum Pajak dari sebesar Rp346.000.000.000,00 pada Tahun Buku 2021 menjadi sebesar Rp363.701.000.000,00 pada Tahun Buku 2022 (*Unaudited*).

Tabel 2.31. Realisasi Deviden PT Bank BPD DIY TA 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	79.201.315.077,80	79.201.315.077,80
2	2019	92.139.904.506,03	78.265.128.516,59
3	2020	49.462.265.608,35	94.001.713.614,26

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
4	2021	78.756.000.000,00	84.955.839.874,22
5	2022	94.001.713.614,00	95.761.065.417,29
Jumlah		378.760.800.269,98	432.185.062.500,16

Sumber: BPKA DIY, 2023

Bagian Laba tahun 2021 sebesar Rp84.955.839.874,22 menurun sebesar Rp9.045.873.740,04 atau 9,62% dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan laba yang disetorkan pada tahun 2021 merupakan hasil kinerja pada tahun 2020 atau tahun awal mula pandemi Covid-19 dan adanya pembatasan kegiatan ekonomi secara umum serta kebijakan perbankan yang membatasi dalam pencapaian target. Pada tahun 2022, PT Bank BPD DIY menyetorkan bagian laba kepada Pemda DIY sebesar Rp95.761.065.417,29. Bagian laba tahun 2022 meningkat sebesar Rp10.805.225.543,07 atau 11,28% dikarenakan kebijakan pemerintah terkait kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2021 sudah mulai stabil dan perekonomian mulai membaik.

b. PT Anindya Mitra Internasional (AMI)

PT Anindya Mitra Internasional (AMI) merupakan BUMD Pemda DIY didirikan dengan Perda Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “Anindya” Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang lingkup usahanya terdiri dari Unit Percetakan, Unit Pertambangan, Unit Pariwisata, Unit *Realty*, Unit Air Minum dan Unit Transportasi. Modal dasar PT AMI sesuai Perda DIY Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional adalah sebesar Rp50.000.000.000,00. Nilai penyertaan modal Pemda DIY pada PT Anindya Mitra Internasional sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp31.144.910.000,00, sehingga masih terdapat kekurangan penyertaan modal sebesar Rp18.854.090.000,00.

Dalam hal kinerja keuangan, PT Anindya Mitra Internasional telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk Tahun Buku 2021 dan Tahun Buku 2022 yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris. Total pendapatan PT Anindya Mitra Internasional dibandingkan total beban maka terjadi penurunan Laba Bersih Sebelum Pajak dari Rp3.626.475.336,00 pada Tahun Buku 2021 menjadi Rp1.879.030.712,22 pada Tahun Buku 2022 (*Unaudited*).

Kinerja PT AMI tahun 2018-2022 yang ditunjukkan dengan pembagian deviden kepada Pemda DIY diinformasikan berikut:

Tabel 2.32. Realisasi Pembagian Deviden kepada Pemda DIY oleh PT Anindya Mitra Internasional (AMI) TA 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	1.089.717.200,00	1.089.717.200,00
2	2019	1.378.492.258,00	1.218.478.750,00
3	2020	878.615.584,00	1.185.651.326,00
4	2021	878.615.584,00	1.044.717.700,00
5	2022	1.044.000.000,00	1.229.058.000,00
Jumlah			5.767.622.976,00

Sumber: BPKA DIY, 2023

Tahun 2021 PT AMI memperoleh laba sebesar Rp3.626.475.336,00 (Tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah). Sesuai dengan hasil RUPS deviden yang dihasilkan untuk Pemda DIY pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.229.058.000,00 (Satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu rupiah).

c. PT Taru Martani

Berdasarkan Perda DIY Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang penyertaan modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida ditetapkan modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah).

Kinerja dari PT Taru Martani yang ditunjukkan dengan pembagian deviden kepada Pemda DIY tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.33. Realisasi PT Taru Martani TA 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	760.000.000,00	-
2	2019	772.650.000,00	925.083.150,00
3	2020	846.000.000,00	148.697.000,00
4	2021	2.700.000.000,00	3.837.562.289,00
5	2022	3.800.000.000,00	5.439.572.184,00
Jumlah			10.350.914.623,00

Sumber: BPKA DIY, 2023

Pada tahun 2021, Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY mengalami peningkatan sebesar Rp3.688.865.289,00 atau meningkat sebesar 24,79% menjadi Rp3.837.562.289,00 dibandingkan pada tahun 2020.

Pada tahun 2022, PT Taru Martani memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp5.439.572.184,00. Penerimaan tersebut meningkat sebesar Rp1.602.009.895,00 atau 41,75% dibandingkan dengan penerimaan bagian laba tahun 2021. Peningkatan tersebut disebabkan karena:

- 1) Perubahan sistem produksi. PT Taru Martani yaitu merubah sistem produksi yang semula produksi dilakukan berdasarkan pesanan, saat ini produksi dilakukan setiap hari;
- 2) PT Taru Martani memiliki cadangan bahan baku sesuai standar mutu untuk proses produksi;
- 3) Berkurangnya retur produk dan peningkatan penjualan karena stok bahan yang berkualitas;
- 4) Meningkatnya hasil usaha lain-lain yang terdiri dari usaha pertanian dan restoran. Dalam menjalankan usaha pertanian dan restoran tersebut, PT Taru Martani bekerjasama dengan pihak lain dengan sistem bagi hasil.

d. **Perumda Air Bersih Tirtatama DIY**

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Bersih Tirtatama merupakan BUMD Pemda DIY yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyediaan air bersih dan didirikan dengan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama DIY. Modal dasar sebesar Rp469.028.716.201,00 (empat ratus enam puluh sembilan milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus satu rupiah) terdiri dari uang dan barang. Modal dasar yang telah disetorkan oleh Pemda DIY adalah berupa uang sebesar Rp12.500.000.000,00 dan barang/aset sebesar Rp163.896.691.000,00.

Perumda Air Bersih Tirtatama beroperasi sejak Januari 2021 dan sampai dengan Tahun 2022 masih mengalami defisit operasional. Defisit operasional Perumda Air Bersih Tirtatama disebabkan antara lain:

- 1) Tahun 2021 merupakan tahun pertama peralihan pengelolaan SPAM dari UPT Balai Pialam ke Perumda Air Bersih Tirtatama. Pada saat dikelola oleh UPT, SPAM Kartamantul merupakan unit *cost center*. Selanjutnya, ketika beralih menjadi BUMD, perlu adanya pengembangan agar dapat menjadi *profit center*.
- 2) Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, target penyerapan produksi air curah oleh PDAM Kota Yogyakarta, PDAM Kabupaten Sleman, dan PDAM Bantul masih belum optimal.

Defisit tersebut didanai dari setoran modal dan mengakibatkan Perumda Air Bersih Tirtatama belum dapat melakukan pengembangan bisnis. Untuk itu masih diperlukan dukungan dari Pemda DIY dalam bentuk tambahan penyertaan modal atau subsidi.

e. **Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)**

BUKP didirikan dengan Perda Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan dengan entitas sebanyak 75 BUKP yang berkedudukan di Kapanewon se-DIY. Modal dasar BUKP dari Pemda DIY adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar

rupiah). Badan usaha ini bertujuan untuk mengembangkan perekonomian perdesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat perdesaan, dengan menyediakan dana pembangunan melalui prosedur sederhana, cepat, dan murah. Kinerja BUKP yang ditunjukkan dengan deviden mulai tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.34. Realisasi Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) TA 2018-2022

No	Tahun Anggaran	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	4.591.887.256,86	5.340.468.682,00
2	2019	5.340.468.682,72	6.032.373.104,80
3	2020	4.000.000.000,00	6.025.001.568,23
4	2021	3.975.033.928,00	6.385.055.910,53
5	2022	5.795.329.564,00	5.164.189.937,35

Sumber: BPKA DIY, 2023

Pada tahun 2021, BUKP DIY memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp6.385.055.910,53. Penerimaan tersebut meningkat sebesar Rp360.054.342,30 atau 5,98% dibandingkan dengan penerimaan bagian laba tahun 2020.

Pada tahun 2022, BUKP DIY memberikan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp5.164.189.937,35 Penerimaan tersebut menurun sebesar Rp1.220.865.973,18 atau 19,12% dibandingkan dengan penerimaan bagian laba tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan penyesuaian beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam rangka mempersiapkan untuk proses transformasi BUKP menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sesuai ketentuan peraturan perundangan, sejak tahun 2022 telah dilaksanakan audit terhadap laporan keuangan BUKP tahun buku 2021. Pada tahun 2022, Pemda DIY telah melaksanakan kajian terhadap transformasi BUKP yang kemudian dapat menjadi dasar perubahan kelembagaan BUKP.

F. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH


1. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Sebagai alat bantu dalam Penatausahaan barang milik daerah, Aplikasi SIM Aset digunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset lainnya, sedangkan aplikasi e-Persediaan digunakan untuk penatausahaan persediaan. Pengkodefikasian barang pada kedua aplikasi tersebut telah mengadopsi pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Pergub DIY Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah, dan Pergub Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, maka pada implementasi penatausahaan barang milik daerah yang saat ini dilaksanakan pada Pemda DIY juga harus menyesuaikan dengan aturan tersebut.

a. Dasar Hukum Pelaksanaan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 3) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

- 
- 6) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 7) Peraturan Gubernur DIY Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah;
 - 8) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan;
 - 9) Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - 10) Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemda;
 - 11) Peraturan Gubernur DIY Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah;
 - 12) Peraturan Gubernur DIY Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah.

b. Tantangan dan Permasalahan

Pemahaman sumber daya manusia mengenai penatausahaan barang milik daerah masih menjadi tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam penatausahaan barang milik daerah, di samping itu pentingnya dukungan sistem informasi manajemen aset yang handal. Dengan aplikasi yang handal akan sangat membantu sumber daya manusia dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah, sehingga proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan dapat dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel.

c. Upaya-upaya yang Dilaksanakan

Bimbingan Teknis dan pelatihan telah dilaksanakan dalam rangka pengoperasian aplikasi, dengan kegiatan ini dapat membantu peningkatan pemahaman sumber daya manusia dalam penatausahaan barang milik daerah. Aplikasi SIM Aset sudah terintegrasi dengan Aplikasi Keuangan dalam data pencairan keuangan sehingga pencapaian ini sangat membantu dalam pengendalian pengentrian data barang milik daerah.

d. Capaian

Pada tahun 2022 Pemda DIY telah mencatat BMD, baik berupa aset tetap maupun aset lainnya sebanyak 4.128.285 unit senilai Rp14.872.379.927.674,00. Aset tersebut berada di seluruh OPD di lingkungan Pemda DIY. BMD tertuang dalam Rekapitulasi Buku Inventaris Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.35. Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Tahun 2022 (*Unaudited*)

No	Instansi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga	3.334.742	2.378.911.107.788,95
2	Dinas Kesehatan	24.764	311.492.578.360,36
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	12.650	6.791.031.020.806,65
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1.421	131.888.395.554,48
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.541	6.066.908.980,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.546	20.280.290.002,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.329	63.321.369.257,69
8	Dinas Sosial	19.979	165.184.933.896,94
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14.415	93.701.578.901,98
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2.295	34.083.085.002,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.763	196.773.038.667,92
12	Dinas Perhubungan	19.894	284.219.000.093,14
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	16.721	129.244.568.308,77
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.945	200.233.562.709,30
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	1.407	11.426.562.192,91
16	Dinas Kebudayaan	91.994	599.999.603.112,76
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	435.687	233.431.588.190,11
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.939	370.056.844.388,30
19	Dinas Pariwisata	6.509	155.094.667.328,02
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	15.343	292.336.214.993,49
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.696	100.376.560.757,00
22	Biro Tata Pemerintahan	1.751	6.912.176.511,25
23	Biro Hukum	6.999	6.009.297.681,00
24	Biro Bina Mental Spiritual	573	2.542.345.965,00
25	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	783	2.449.646.733,00
26	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1.140	3.901.276.669,99
27	Biro Organisasi	772	4.017.541.225,03
28	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	9.823	288.814.413.586,85
29	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	282	1.548.662.668,00
30	Badan Penghubung Daerah	4.439	33.165.284.503,00

No	Instansi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
31	Sekretariat DPRD	4.586	604.958.373.771,10
32	Inspektorat	2.782	42.171.489.902,28
33	Paniradya Kaistimewan	2.108	16.000.381.454,96
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.570	26.615.127.832,96
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	28.757	1.189.280.168.605,50
36	Badan Kepegawaian Daerah	5.332	31.144.167.656,00
37	Badan Pendidikan dan Pelatihan	17.008	43.696.093.615,00
	Jumlah	4.128.285	14.872.379.927.673,70

Sumber: BPKA DIY, 2023

2. Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemda DIY

Pemda DIY dalam rangka pengamanan hukum aset tanah, telah melaksanakan kegiatan pensertifikatan tanah dan balik nama sertifikat tanah atas nama Pemda DIY. Untuk pengadaan tanah yang dilakukan oleh OPD teknis, proses pengadaan tanah sampai dengan pensertifikatannya dilakukan oleh OPD yang bersangkutan. Untuk aset tanah yang sudah tercatat dalam buku inventaris Pemda DIY namun belum ada dokumen sertifikat dan sudah bersertifikat tetapi belum atas nama Pemda DIY maka proses pensertifikatan dan baliknama sertifikat dilakukan oleh pengelola barang.

Pada Tahun Anggaran 2022, dilakukan pensertifikatan dan balik nama sertifikat menjadi atas nama Pemda DIY, dengan obyek sebagai berikut:

Tabel 2.36. Daftar Obyek Tanah yang disertifikatkan

No	Lokasi	Luas (m ²)	Keterangan
1	SMK N 1 Samigaluh, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo	3.100	Hak Pakai 00100 tanggal 07-02-2022 seri AAQ639127
1	SMK N 1 Samigaluh, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo	661	Hak Pakai 00101 tanggal 07-02-2022 seri AAQ639128
3	SMA N 2 Yogyakarta, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta	468	Hak Pakai 00069 tanggal 01-08-2022 seri ABF026947
4	Tepus, Tepus Gunungkidul (Jalan Jalur Lintas Selatan)	64.431	Hak Pakai 00014 tanggal 19-01-2022 seri AA0350957 (Diampui oleh Dinas PUP dan ESDM)
5.	Kranggan, Galur, Kulon Progo (Jalan Jalur Lintas Selatan)	11	Hak Pakai 00039 tanggal 30-08-2022 seri AAW763795 (Diampui oleh Dinas PUP dan ESDM)

No	Lokasi	Luas (m ²)	Keterangan
6	Girikarto, Panggang , Gunungkidul (TPI Karanggesing)	46.445	Hak Pakai 00049 tanggal 27-01-2022 seri AAV342999 (Diampui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan)
7	Tanah SMA N 1 Pleret	2.481	Belum terbit sertifikat
8	Tanah SMA N 1 Pleret	7.392	Belum terbit sertifikat
9	Tanah SMA N 1 Banguntapan	13.615	Belum terbit sertifikat
10	Tanah SMA N 2 Banguntapan	935	Belum terbit sertifikat
11	Tanah SMA N 1 Cangkringan	2.553	Belum terbit sertifikat
12	Tanah SMA N 1 Pajangan	10.128	Belum terbit sertifikat
13	Tanah Pertanian, Sebokarang, Wates, Wates, Kulon Progo	2.012	Belum terbit sertifikat

Sumber: BPKA DIY, 2023

Pengamanan hukum atas aset tanah juga dilakukan dengan kegiatan pengumpulan dokumen warkah melalui permohonan salinan/*fotocopy* warkah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Pengamanan dokumen warkah dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada pihak lain yang mengajukan gugatan terhadap tanah Pemda DIY.

Kegiatan pendokumentasian warkah sertifikat pada tahun 2022 dapat terealisasi sejumlah 30 warkah sertifikat tanah, sebagaimana tersaji pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.37. Warkah Tanah Pemda DIY Pada Tahun 2022

No.	Kab/Kota	Jumlah	Warkah dari Sertifikat
1	Kota Yogyakarta	10 bidang	1. Hak Pakai 00006 tanggal 20-04-1994 seluas 9.471m ² Tanah SMA N 1 Yogyakarta di Jl HOS Cokroaminoto 10 Yogyakarta
			2. Hak Pakai 00053 26-01-2006 seluas 9.097 m ² Tanah SMA N 2 Yogyakarta di Jl Bener 30 Yogyakarta
			3. Hak Pakai 00053 tanggal 26-01-2006 seluas 18.449 m ² SMK N 4 Yogyakarta di Jl Sidikan 60 Yogyakarta
			4. Hak Pakai 00054 tanggal 21-04-2006 seluas 280 m ² SMK N 4 Yogyakarta di Jl Sidikan 60 Yogyakarta
			5. Hak Pakai 00072 tanggal 16-03-2007seluas 15.850 m ² SMK N 5 Yogyakarta di Jl Kenari 71 Yogyakarta
			6. Hak Pakai 00043 tanggal 26-01- 2006 seluas 245 m ² SMA N 4 Yogyakarta di Magelang, Karangwaru Yogyakarta
			7. Hak Milik 01399 tanggal 07-10-1993 seluas 247 m ² SMA N 5 Yogyakarta di Nyi Pembayun No. 39 Yogyakarta
			8. Hak Milik 01397 tanggal 07-10-1993 seluas 255 m ² SMA N 5 Yogyakarta di Nyi Pembayun No. 39 Yogyakarta

No.	Kab/Kota	Jumlah	Warkah dari Sertifikat
			9. Hak Milik 01400 tanggal 07-10-1993 seluas 237 m ² SMA N 5 Yogyakarta di Nyi Pembayun No. 39 Yogyakarta
			10. Hak Pakai 00064 tanggal 26-01-2006 seluas 10.083 m ² SMA N 8 Yogyakarta, di Jl Sidobali No.1 Yogyakarta
2	Kabupaten Bantul	6 bidang	1. Hak Pakai 00003 tanggal 25-1-2001 seluas 4.020 m ² Tanah SMA N 1 Kretek, di Denting Tirtomulyo Bantul
			2. Hak Pakai 00002 tanggal 15-10-1999 seluas 9.000 m ² Tanah SMAN 1 Dlingo, di Dlingo Bantul
			3. Hak Pakai 00016 tanggal 23-07-2005 seluas 4.020 m ² Tanah SMKN 1 Sedayu, di Argamulyo Sedayu Bantul
			4. Hak Pakai 00003 tanggal 11-04-1998 seluas 83.247 m ² Tanah SMKN 1 Kasihan, di Jl. Madukismo Bugisan
			5. Hak Pakai 00041 tanggal 11-01-2006 seluas 7.220 m ² Tanah SMAN 1 Bantul, di Jl. Wakhid Hasim Bantul
			6. Hak Pakai 00003 tanggal 18-01-1995 seluas 9.715 m ² Tanah SMKN 1 Bantul, di Sabdodadi Bantul
3	Kabupaten Sleman	8 bidang	1. Hak Pakai 00138 tanggal 21-01-2008 seluas 7.061 m ² Tanah SMK 2 Godean, di Sidoagung Sleman
			2. Hak Pakai 00236 tanggal 30-12-1999 seluas 42.077 m ² Tanah SMA 2 Depok, di Caturtunggal Sleman
			3. Hak Pakai 00141 tanggal 29-01-2009 seluas 5.797 m ² Tanah SMK 1 Godean, di Sidoagung Sleman
			4. Hak Pakai 00139 tanggal 09-12-2008 seluas 794 m ² Tanah SMK 1 Godean, di Sidoagung Sleman
			5. Hak Pakai 00133 tanggal 29-01-2009 seluas 9.865 m ² Tanah SMA 1 Godean, di Sidokarto Sleman
			6. Hak Pakai 00137 tanggal 17-12-2008 seluas 16.695 m ² Tanah SMK 1 Seyegan di, Margomulyo, Sleman
			7. Hak Pakai 00136 tanggal 17-12-2008 seluas 4.180 m ² Tanah SMK 1 Seyegan, di Margomulyo, Sleman
			8. Hak Pakai 00137 tanggal 17-12-2008 seluas 5.995 m ² Tanah SMK 1 Seyegan, di Margomulyo, Sleman
4	Kabupaten Kulon Progo	6 bidang	1. Hak Pakai 00012 tanggal 20-05-1991 seluas 4.105 m ² SMK N 1 Pengasih di Jl. Kawijo 11 Pengasih
			2. Hak Pakai 00002 tanggal 14-05-1991 seluas 25.400 m ² Tanah SMA N 1 Samigaluh di Tanjung Ngargosari
			3. Hak Pakai 00020 tanggal 27-01-1998 seluas 760 m ² Tanah SMK N 1 Pengasih di Jl. Kawijo 11 Pengasih
			4. Hak Pakai 00003 tanggal 09-06-1999 seluas 24.200 m ² Tanah SMA N Kalibawang di Ngipikrejo II Banjaararum
			5. Hak Pakai 00002 tanggal 09-06-1999 seluas 4.640 m ² Tanah SMA N 1 Kokap di Ngasem Hargorejo
			6. Hak Pakai 00006 tanggal 24-07-1998 seluas 9.930 m ² Tanah SMA N 1 Lendah di Banguncipto Sentolo
5	Kabupaten Gunungkidul	-	
	Jumlah	30 bidang	

Sumber: BPKA DIY, 2023

3. Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mempertegas siklus pengelolaan BMD dalam bentuk pemindahtanganan yang terpisah dari penghapusan. Pemusnahan dan pemindahtanganan merupakan kegiatan sebelum proses penghapusan. Dengan demikian, penghapusan merupakan *ending point* dari semua siklus pengelolaan BMD yang membebaskan Pengguna Barang dan Pengelola Barang dari kewajiban untuk mengadministrasikan dan mengelola BMD. Artinya proses pemindahtanganan dan penghapusan ini memberikan dukungan terhadap proses pengelolaan BMD secara keseluruhan.

Dengan melaksanakan pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah, harapannya dapat terwujud pengelolaan barang milik daerah pada OPD Pengguna Barang maupun Pengelola Barang secara optimal, khususnya terhadap barang milik daerah yang dalam kondisi rusak berat, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, serta tidak lagi digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Sehingga secara ekonomis akan lebih menguntungkan bagi Daerah, serta lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran/biaya pemeliharaan.

Secara definisi, pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Barang milik daerah yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtanganan. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: penjualan; tukar menukar; hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah. Untuk menjamin bahwa proses pemindahtanganan BMD di Pemda DIY dapat berjalan sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan, telah disusun Pergub DIY Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

a. **Dasar dan Tujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah**

Barang milik daerah yang sudah lama dibeli dan tidak dapat digunakan secara optimal lagi dalam penyelenggaraan tugas fungsi pemerintah daerah, maka dapat dilakukan penghapusan. Sebab, secara ekonomis lebih menguntungkan apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah.

Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi:

- 1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna;
- 2) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara/Daerah.

Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan. Adapun pelaksanaan penghapusan wajib dilaporkan kepada Pengelola Barang.

Pada prinsipnya semua Barang Milik Daerah dapat dihapuskan. Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

b. Penghapusan Aset Tidak Bergerak

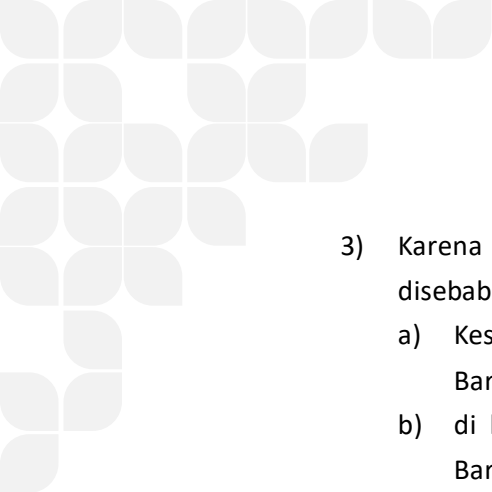
Penghapusan aset tidak bergerak dilakukan atas dasar pertimbangan/alasan sebagai berikut:

- 1) Rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*;
- 2) Tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*);
- 3) Terkena planologi kota.;
- 4) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
- 5) Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi; dan
- 6) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

c. Penghapusan Aset Bergerak

Penghapusan aset bergerak dilakukan atas dasar pertimbangan/alasan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan Teknis, antara lain:
 - a) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki.
 - b) Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.
 - c) Telah melampaui batas waktu kegunaannya/ kedaluwarsa.
 - d) Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya.
 - e) Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/ pengangkutan.
- 2) Pertimbangan Ekonomis, antara lain :
 - a) Untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau *idle*.
 - b) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

- 
- 3) Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan:
 - a) Kesalahan atau kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus Barang.
 - b) di luar kesalahan/kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus Barang.
 - c) Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak.
 - d) Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (*force majeure*)

d. **Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah melalui Penjualan dan Lelang**

Pemindahtanganan BMD merupakan kegiatan pengalihan kepemilikan BMD, sesuai ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Proses pemindahtanganan barang milik daerah melalui tahapan penting yaitu penilaian. Sesuai amanat Pasal 325 Ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemda, pemanfaatan atau pemindahtanganan. Penilaian dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah (dalam hal ini lelang/penjualan) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, sebagai dasar penetapan harga limit penjualan.

Penilaian barang milik daerah berupa bangunan gedung dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. Syarat Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah. Adapun penilaian barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat melibatkan penilai atau penaksir dari instansi teknis. Pada Tahun Anggaran 2022, Pemda DIY membentuk Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah sub kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan KepGub Nomor 22/TIM/2022 tanggal 22 Februari 2022.

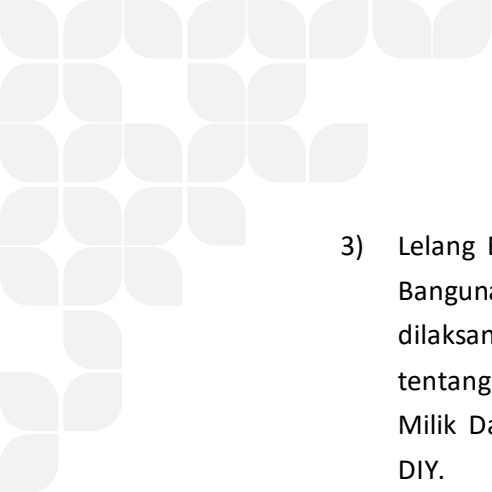
Sebelum masuk pada tahap pelaksanaan, proses pemindahtanganan barang milik daerah pada Pemda DIY melalui beberapa tahapan persiapan, sebagai berikut:

- 1) Verifikasi Usulan BMD yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi atau Berita Acara Pengecekan dan Penelitian;
- 2) Penilaian BMD yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian atau Penaksiran Harga; dan
- 3) Persetujuan Pemindahtanganan BMD oleh Gubernur.

Setelah mendapatkan persetujuan pemindahtanganan oleh Gubernur, Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah sub kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah melaksanakan proses pemindahtanganan dengan cara lelang maupun penjualan.

Pada Tahun Anggaran 2022, Pemda DIY melaksanakan proses pemindahtanganan dengan cara penjualan dan lelang sebanyak 9 (sembilan) kali, sebagai berikut:

- 1) Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada SMA, SMK, dan Balai Dikmen di Lingkungan Pemda DIY, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 1/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada SMA, SMK, dan Balai Dikmen di Lingkungan Pemda DIY .
- 2) Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial DIY, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 73/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Dinas Sosial DIY.

- 
- 3) Lelang BMD berupa Bangunan Gedung Instalasi Permanen dan Bangunan Rumah Sakit Jiwa pada RS Jiwa Grhasia, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 90/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY.
 - 4) Penjualan BMD berupa Rumah Peninggalan Sejarah Lainnya di Jl. Panembahan No. 20 Panembahan Kraton Yogyakarta, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 127/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Rumah Peninggalan Sejarah Lainnya pada Dinas Kebudayaan DIY.
 - 5) Penjualan BMD berupa Hewan Ternak Domba sejumlah 11 ekor, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 110/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Hewan Ternak pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun Anggaran 2022.
 - 6) Penjualan BMD berupa Hewan Ternak Sapi sejumlah 4 ekor, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 110/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Hewan Ternak pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun Anggaran 2022.
 - 7) Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen pada SMAN 1 Dlingo, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 91/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen pada SMAN 1 Dlingo.
 - 8) Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 329/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang

Milik Daerah berupa Bangunan dan Sisa Bongkaran Material Bangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

- 9) Lelang BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda Empat sebanyak 22 unit dan Roda Dua sebanyak 70 unit, yang dilaksanakan berdasarkan KepGub DIY Nomor 287/KEP/2022 tentang Persetujuan Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional dari Daftar Barang Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2022.

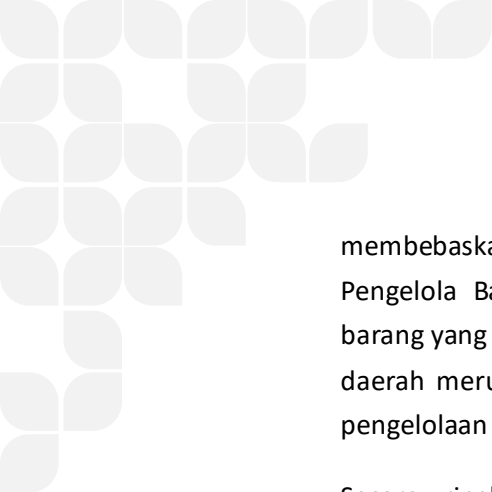
Tabel 2.38. Hasil Penjualan dan Lelang BMD Tahun Anggaran 2022

No	Uraian Kegiatan Penjualan	Tanggal Pelaksanaan Lelang/Penjualan	Hasil Penjualan (Rp)
1.	Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada SMA, SMK, dan Balai Dikmen di Lingkungan Pemda DIY	21 Februari 2022	466.666.000
2.	Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada BPRSW Dinas Sosial DIY	20 April 2022	35.199.999
3.	Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Instalasi Permanen dan Bangunan Rumah Sakit Jiwa pada RS Jiwa Grhasia	27 Mei 2022	32.500.000
4.	Penjualan BMD berupa Rumah Peninggalan Sejarah Lainnya di Jl. Panembahan No. 20 Panembahan Kraton Yogyakarta	13 Juni 2022	127.777.000
5.	Penjualan BMD berupa Hewan Ternak Domba (11 ekor)	04 Juli 2022	12.750.000
6.	Penjualan BMD berupa Hewan Ternak Sapi (4 ekor)	06 Juli 2022	82.775.500
7.	Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen pada SMAN 1 Dlingo	25 Juli 2022	12.100.000
8.	Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan	07 November 2022	329.709.000
9.	Penjualan BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional	21 Desember 2022	683.413.126

Sumber: BPKA DIY, 2023

e. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Sebagaimana telah disampaikan di atas, penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk



membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan barang milik daerah merupakan proses terakhir yang dilaksanakan dalam sistem pengelolaan barang milik daerah.

Secara ringkas, pelaksanaan penatausahaan penghapusan BMD meliputi:

- 1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- 2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- 3) Penghapusan dari Daftar BMD.

Adapun proses penghapusan BMD yang telah dilaksanakan Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2022 dengan diterbitkannya Surat Keputusan, adalah sebagai berikut:

- 1) KepGub DIY Nomor 284/KEP/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat yang Dihilangkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dari Daftar Barang Milik Daerah.
- 2) KepGub DIY Nomor 320/KEP/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah yang Dihilangkan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman.
- 3) KepSekda DIY Nomor 26/SEKDA/V/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada SMA, SMK dan Balai Dikmen di Lingkungan Pemda DIY.
- 4) KepSekda DIY Nomor 31/SEKDA/V/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Dinas Sosial DIY.

- 5) KepSekda DIY Nomor 38/SEKDA/VIII/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen pada SMAN 1 Dlingo.
- 6) KepSekda DIY Nomor 39/SEKDA/VIII/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Rumah Peninggalan Sejarah Lainnya pada Dinas Kebudayaan DIY.
- 7) KepSekda DIY Nomor 40/SEKDA/VIII/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY.
- 8) KepSekda DIY Nomor 41/SEKDA/VIII/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya terdiri dari Buku Perpustakaan, Buku Pelajaran dan Barang Persediaan Berbahan Kertas.
- 9) KepSekda DIY Nomor 42/SEKDA/VIII/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Hewan Ternak pada Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY TA 2022.

f. Pemusnahan Barang Milik Daerah

Pada prinsipnya, pemusnahan BMD dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan;
- 2) Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2022, Pemda DIY melaksanakan kegiatan pemindahtanganan BMD berupa pemusnahan, sebagai berikut:

- 1) Pemusnahan BMD berupa Aset Tetap Lainnya (Buku Perpustakaan, Buku Pelajaran, dan Barang Persediaan Berbahan Kertas), yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 101/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya

terdiri dari Buku Perpustakaan, Buku Pelajaran, dan Barang Persediaan Berbahan Kertas.

- 2) Pemusnahan Obat Kedaluwarsa pada Dinas Kesehatan DIY, yang dilaksanakan berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan Gubernur DIY Nomor 933/19770.

4. Pendayagunaan Barang Daerah

a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan BMD merupakan bagian dari sebelas siklus pengelolaan barang milik daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) didefinisikan sebagai pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Pemanfaatan barang milik daerah dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Pelaksanaan pemanfaatan BMD berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Serta ditindak lanjuti dengan Pergub DIY Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pemanfaatan barang milik daerah dilakukan melalui 5 (lima) bentuk pemanfaatan, yakni: 1) Sewa; 2) Pinjam Pakai; 3) Kerja sama Pemanfaatan; 4) Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG); dan 5) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Pemda DIY pada tahun 2022 telah melaksanakan 3 (tiga) bentuk pemanfaatan barang milik daerah, yakni sewa, pinjam pakai dan bangun guna serah. Selain menjadi obyek pemanfaatan, barang milik daerah juga dioptimalkan melalui mekanisme retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Rincian pemanfaatan BMD yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, meliputi:

- 1) BMD berupa Tanah dan/atau Bangunan yang dimanfaatkan melalui sewa sebanyak 30 obyek sebagaimana tersaji pada berikut

Tabel 2.39. Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2022 (Rp)	Keterangan
1	Tanah Eks Pabrik sabut Pengasih Kulonprogo	PT. Formula Land	116.000.000	-
2	Bangunan Eks DIPARDA Lantai I Bagian Selatan	BPD	990.000.000	Pembayaran dilakukan utk 5 th sekaligus (2022-2027)
3	Tanah di Desa Sentolo Kulon Progo	PT. Selo Adi Karto	233.400.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2022-2024)
4	Tanah dan Bangunan Eks Rumah Dinas Jl. AM Sangaji	Suprihanto, B.Sc	191.250.000	-
5	Tanah dan Bangunan eks Rumah Dinas Jl. Munggur No.32 Yogyakarta	BUKP Gondokusuman	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2019 utk 3 th sekaligus (2019-2022)
6	Tanah di Jl. Wisata, Babarsari, Sleman	Yayasan Dharmapala	45.200.000	Pembayaran dilakukan utk 5 th sekaligus (2021-2026)
7	Tanah Srimulyo, Piyungan, Bantul	Pemkab Bantul	16.000.000	-
8	Tanah di Jl. D I Panjaitan 66 Yogyakarta	dr. Soedarman	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2018 utk 5 th sekaligus (2018-2023)
9	Tanah di Jl. Perwakilan, Wates, Kulon Progo	KPRI Sumber Rejeki	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2021 utk 2 tahun sekaligus (2021-2023)
10	Tanah di Hargotirto, Kokap, Kulon Progo	Kelompok Tani Tirta Manunggal	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2019 utk 5 tahun sekaligus (2019 - 2024)
11	Gedung Jogja Expo Center	PT. Surya Abhinaya Sentosa	2.100.000.000	-
12	Tanah, Bangunan dan Fasilitas di Jalan Malioboro Nomor 52 - 58 Yogyakarta	PT. Setia Mataram Tritunggal	7.650.000.000	-

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2022 (Rp)	Keterangan
13	Tanah di Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman	Pemerintah Kalurahan Widodomartani	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2021 utk 5 th sekaligus (2021-2026)
14	Tanah di Jl. Kenari Yogyakarta (Eks Gudang BLPT)	PT. Daya Armada Nusantara	143.500.000	Pembayaran dilakukan utk 5 tahun sekaligus (2022-2027)
15	Tanah di Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yogyakarta	Tien Setiantoro	10.500.000	-
		Aris Purnomo	6.300.000	Pembayaran dilakukan utk 3 tahun sekaligus (2022-2025)
		Sumartiningsih	12.600.000	Pembayaran dilakukan utk 3 tahun sekaligus (2022-2025)
		Roos Ani	8.190.000	Pembayaran dilakukan utk 3 tahun sekaligus (2022-2025)
		Suka Astuti	3.150.000	-
16	Sebagian tanah dan bangunan di Karangjati, Mlati, Sleman	Badan Anti Korupsi	10.000.000	Pembayaran untuk 2021 - 2022
			11.500.000	Pembayaran untuk 2022 - 2023
		PT. Avo Innovation Technology	-	Pembayaran dilakukan utk 2 tahun sekaligus (2021-2023)
17	Tanah dan bangunan di Mrican Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman	Ir. Bambang Priambodo	72.000.000	Pembayaran dilakukan utk 2 tahun sekaligus (2022&2023)
18	Lahan Tambak Udang di Gadingsari, Sanden, Bantul	YB. Pratomo	115.0000.000	Pembayaran dilakukan utk 5 th sekaligus (2022-2027)
19	Tanah dan bangunan di Komplek Colombo No.56 Caturtunggal, Depok, Sleman	Aswin Kumala DS.	19.500.000	-
20	Tanah dan bangunan di Jl. Janti (Eks Dinas Gedung Pertambangan)	PT. Anindya Mitra Internasional	328.440.000	-
21	Tanah di Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Muhyudi Prabowo	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2021 utk 3 th sekaligus (2021 - 2023)
		Widodo Mulyo	4.800.000	Pembayaran dilakukan utk 3 th sekaligus (2022 - 2025)

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2022 (Rp)	Keterangan
22	Tanah dan bangunan di Jl. DI. Panjaitan No. 70 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	<i>Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD-RC)</i>		- Pembayaran dilakukan pada tahun 2021 utk 5 th sekaligus (2021-2026)
23	Tanah dan bangunan di Komplek Griya Permata Hijau Nomor D.1 Purwomartani, Kalasan, Sleman	CV. Plainthing Group		- Pembayaran dilakukan pada tahun 2021 utk 2 th sekaligus (2021-2023)
24	Tanah dan bangunan di Jl. Sriti No. 20 G Caturtunggal, Depok, Sleman	Lembaga Konsumen Yogyakarta		- Pembayaran dilakukan pada tahun 2021 utk 3 th sekaligus (2021-2024)
25	Tanah dan bangunan di Jl. Kusumanegara No. 168E Yogyakarta	LP2Desaku		- Pembayaran dilakukan pada tahun 2021 utk 2 th sekaligus (2021-2023)
26	Tanah eks Tanah Kas Desa Wates (67 Bidang Tanah)	103 Penyewa	263.973.976	Pembayaran untuk retribusi eks TKD Wates 2022-2023
27	Tanah dan Bangunan Esk Diklat Perindustrian, Malangan, Ringroad Selatan	Yayasan Yogyakarta Angga Binangun	64.480.000	Pembayaran untuk 2021 - 2022
			67.704.000	Pembayaran untuk 2022 - 2023
28	Tanah dan Bangunan EKS PPK Kulon Progo Jalan Wates-Purworejo Km.10 Seworan, Triharjo, Wates	Koperasi Angkasa Pura I Avia	23.200.000	-
29	Tanah di Jalan Kenari, Semaki, Yogyakarta	Abung Hidayat	39.500.000	Pembayaran dilakukan untuk 5 th sekaligus (2022-2027)
		Uep Sumiarsah	3.550.000	-
		Juju	5.225.000	-
		Zuljasrifon		- Pembayaran dilakukan pada tahun 2021 untuk 5 th sekaligus (2021-2026)
30	Tanah di Sumberagung, Moyudan, Sleman	Pemerintah Kalurahan Sumberagung	31.725.000	Pembayaran dilakukan untuk 5 th sekaligus (2022-2027)

Sumber: BPKA DIY, 2023

2) BMD berupa Rumah Daerah yang dimanfaatkan melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Tabel 2.40. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah yang Dimanfaatkan Melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2021 (Rp)	Ket
1	Jl. Colombo Nomor 59 Yogyakarta	Mrabawanati / Asep S	4.060.000	-
2	Jl. Colombo Nomor 60 Yogyakarta	Ir. Syahbenol Hasibuan	7.521.600	-
3	Jl. Colombo Nomor 61 Yogyakarta	Sugistiati	2.459.460	-
4	Jl. Janturan Nomor 29 Yogyakarta	Iwan Kurniawan, S.STPar	2.792.400	-
5	Jl. Janturan Nomor 29 A Yogyakarta	Asmita	698.100	-
6	Jl. Sriti Nomor 20 B Demangan, Yogyakarta	Ny. Dra. Sulistyaningsih	3.396.000	-
7	Jl. Sriti Nomor 20 C Demangan, Yogyakarta	Bambang Hermanto, SH, M.Hum	5.494.000	-
8	Jl. Sriti Nomor 20 E Demangan, Yogyakarta	Niken Styawati	1.464.000	-
9	Jl. Bima Nomor 25 Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Eko Fajar Laksana	3.142.930	-
10	Jl. Bima Nomor 25 A Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Maria Kristina Budi	2.904.820	-
11	Jl. Bima Nomor 25 B Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Adjie Mardana	780.000	-
12	Jl. Bima Nomor 25 C Jurugentong, Banguntapan, Bantul	M. Ridwan S	1.878.000	-
13	Jl. D.I. Panjaitan No. 74 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	Ny. Djaenab Murniati	8.797.600	-
14	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (1)	Monika Irene Donatirin	4.148.790	-
15	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (2)	Jaka Surana, SE	2.023.800	-
16	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Siti Mukaronah	2.286.000	-
17	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Arum Iswandari	630.000	-
18	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Rini Setraparwati	3.505.200	-
19	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Dwi Nugroho	2.367.600	-
20	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Eko Supriyanto, SH	2.340.000	-
21	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Tri Mulyadi, S.Hut, MP	2.286.000	-
22	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Nitis Mito	2.286.000	-

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2021 (Rp)	Ket
23	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Hasan Khoiri, A.Md	3.103.200	-
24	Panggungharjo, Sewon, Bantul (1)	Suhartati	2.994.000	-
25	Panggungharjo, Sewon, Bantul (3)	Mashudi	1.497.000	-
26	Panggungharjo, Sewon, Bantul (4)	Gutik Lestarna, SPT	2.994.000	-
27	Panggungharjo, Sewon, Bantul (5)	Wahyuningsih	3.493.000	-
28	Jalan Manukan, Condongcatur, Depok, Sleman	Yasrizal, S.Sos, M.Si	2.292.010	-
29	Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman	Purwiyani Dewi Admadja	3.160.800	-
30	Jl. Panembahan Romo Nomor 65 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta	Dra. Rahayu Endang Pujiati	6.306.600	-
31	Jl. Podang No. 4 Caturtunggal, Depok, Sleman	Anastasia Sri Winarsi	2.415.600	-

Sumber: BPKA DIY, 2022

- 3) BMD yang dioptimalkan melalui pinjam pakai tertuang dalam 31 perjanjian pinjam pakai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.41. Barang Milik Daerah yang Dipotimalkan Melalui Pinjam Pakai

No	Obyek Pinjam Pakai	Berdasarkan		Peminjam
		SK Gubernur	Perjanjian	
1	Barang Milik daerah Pemda DIY berupa 13 bidang tanah dan 2 bangunan gedung yang terletak di Kabupaten Kulon Progo	357/KEP/2020	43/PERJ/SEKDA/XII/2020	Pemkab Kulon Progo
2	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 10 bidang tanah yang terletak di Kabupaten Kulon Progo	39/KEP/2020	11/PERJ/SEKDA/III/2020	Pemkab Kulon Progo
3	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu bidang tanah yang terletak di Kabupaten Kulon Progo	228/KEP/2022	29/PERJ/SEKDA/VIII/2022	Pemkab Kulon Progo
4	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian bidang tanah di Kota Yogyakarta. dan satu unit kendaraan dinas operasional roda empat.	125/KEP/2021	16/PERJ/GUB/V/2021	Kanwil BPN DIY
5	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sepuluh bidang tanah dan tiga unit bangunan yang terletak di Kabupaten Bantul	328/KEP/2020	41/PERJ/SEKDA/XI/2020	Pemkab Bantul
6	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian bidang tanah yang terletak di Kota Yogyakarta.	79/KEP/2020	15/PERJ/SEKDA/V/2020	BPS Kota Yogyakarta

No	Obyek Pinjam Pakai	Berdasarkan		Peminjam
		SK Gubernur	Perjanjian	
7	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu bidang tanah di Kabupaten Gunungkidul	291/KEP/2019	5/PERJ/SEKDA/II/2020	Pemkab Gunungkidul
8	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa delapan belas bidang tanah yang terletak di Kabupaten Gunungkidul	40/KEP/2021	5/PERJ/SEKDA/III/2021	Pemkab Gunungkidul
9	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tiga bidang tanah dan satu unit bangunan yang terletak di Kota Yogyakarta	143/KEP/2020	24/PERJ/SEKDA/VII/2020	Pemkot Yogyakarta
10	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Sebagian bangunan/gedung di Kota Yogyakarta	308/KEP/2020	37/PERJ/SEKDA/X/2020	Sekber Kartamantul
11	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu bidang tanah yang terletak di Jalan Kota Yogyakarta	89/KEP/2020	18/PERJ/SEKDA/V/2020	ISI Yogyakarta
12	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sembilan bidang tanah yang terletak di Kabupaten Sleman	351/KEP/2020	46/PERJ/SEKDA/XII/2020	Pemkab Sleman
13	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tiga bidang tanah di kota Yogyakarta dan peralatan dan mesin	309/KEP/2020	39PERJ/SEKDA/X/2020	KPU DIY
14	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa lima kendaraan dinas operasional roda empat dan dua kendaraan dinas operasional roda dua.	31/KEP/2020	9/PERJ/SEKDA/III/2020	KPU DIY
15	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian bidang tanah di Kota Yogyakarta dan satu unit kendaraan dinas operasional roda empat.	253/KEP/2020	29/PERJ/SEKDA/VIII/2020	BNNP DIY
16	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu unit kendaraan dinas operasional roda empat.	326/KEP/2018	56/PERJ/SEKDA/XII/2018	Pangkalan TNI AL Yogyakarta
17	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian tanah di Kabupaten Bantul dan di Kabupaten Sleman	430/KEP/2020	1/PERJ/SEKDA/I/2021	Detasemen Zeni Bangunan 2/IV Yogyakarta
18	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Yogyakarta.	86/KEP/2020	16/PERJ/SEKDA/V/2020	BSSN RI
19	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu bidang tanah yang terletak di Kabupaten Sleman	209/KEP/2022	31/PERJ/SEKDA/IX/2022	BPS RI

No	Obyek Pinjam Pakai	Berdasarkan		Peminjam
		SK Gubernur	Perjanjian	
20	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian bidang tanah dan sebagian bangunan yang terletak di Kota Yogyakarta.	176/KEP/2018	1/PERJ/SEKDA/I/2019	Bawaslu DIY
21	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa kendaraan dinas operasional sebanyak tiga unit kendaraan roda empat	256/KEP/2022	32/PERJ/SEKDA/IX/2022	Korem 072/Pamungkas
22	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa kendaraan dinas operasional roda empat.	97/KEP/2020	19/PERJ/SEKDA/V/2020	Pangkalan TNI AU Adi Sutjpto
23	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa kendaraan dinas operasional roda empat.	60/KEP/2019	8/PERJ/SEKDA/V/2019	Pangkalan TNI AU Adi Sutjpto
24	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu unit kendaraan operasional dinas roda empat.	269/KEP/2020	49/PERJ/SEKDA/X/2022	Kejaksanaan Tinggi DIY
25	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu unit kendaraan operasional dinas roda empat.	268/KEP/2022	50/PERJ/SEKDA/X/2022	Polda DIY
26	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian bidang tanah yang terletak di Kabupaten Sleman.	31/KEP/2021	3/PERJ/SEKDA/II/2021	Kalurahan Bokoharjo
27	Barang Milik Daerah DIY berupa tiga bidang tanah dan satu unit bangunan yang berlokasi di Kota Yogyakarta.	347/KEP/2021	34/PERJ/SEKDA/XI/2021	Pemkot Yogyakarta
28	Barang Milik Daerah DIY berupa satu bidang tanah yang terletak di Kota Yogyakarta.	368/KEP/2021	35/PERJ/SEKDA/XI/2021	Pemkot Yogyakarta
29	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu bidang tanah dan satu unit bangunan yang terletak di Kabupaten Sleman.	257/KEP/2022	1/PERJ/SEKDA/I/2023	BAIS TNI
30	Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa satu bidang tanah dan dua unit bangunan yang terletak di Kota Yogyakarta	72/KEP/2021	9/PERJ/SEKDA/IV/2021	KPPU RI
31	Barang milik daerah Pemda DIY berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Sleman	265/KEP/2022	66/PERJ/SEKDA/XII/2022	Polda DIY

Sumber: BPKA DIY, 2023

- 4) Pemda DIY telah melaksanakan pemanfaatan BMD melalui mekanisme pemanfaatan sejenis Bangun Serah Guna terhadap BMD Pemda DIY di Jalan Malioboro 52-28 Yogyakarta.

Pemda DIY melaksanakan Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan Nomor 53, beserta seluruh Adendumnya Antara Pemda DIY dengan PT Yogya Indah Sejahtera Dalam Pembangunan dan Pengelolaan “Malioboro Hotel” di Jalan Malioboro 52-28 Yogyakarta dengan Jangka waktu selama 30 Tahun yaitu dari 12 September 1992 s.d. 12 September 2022.

Pada Tahun 2022 sebagai tahun terakhir pelaksanaan perjanjian tersebut, Pemda DIY memperoleh hasil dari pembayaran kontribusi tetap sebesar Rp833.000.000,00.

Selanjutnya di tahun 2022, pada 12 September 2022 dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan Nomor 53, beserta seluruh Adendumnya Antara Pemda DIY dengan PT. Yogya Indah Sejahtera Dalam Pembangunan dan Pengelolaan “Malioboro Hotel”.

Sesuai Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan Nomor 53, beserta seluruh Adendumnya maka Setelah jangka waktu kerja sama habis maka seluruh tanah Hak Guna Bangunan (HGB) dan bangunan “Malioboro Hotel” beserta fasilitasnya menjadi milik Pemda DIY.

Pada tanggal 12 September 2022 dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Hasil Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan Pemda DIY dengan PT. Yogya Indah Sejahtera dalam pembangunan dan Pengelolaan “Malioboro Hotel” oleh Gubernur DIY selaku Wakil Pemda DIY dan Direktur Utama PT Yogya Indah Sejahtera (Liang Margaret) dengan total nilai mencapai Rp64.341.109.000,00

Sejak tanggal 13 September 2022, BMD milik Pemda DIY berupa hotel dan mall di Jalan Malioboro 52-58 Yogyakarta dilakukan sewa oleh PT. SETIA MATARAM TRITUNGGAL dengan nilai sewa Rp7.650.000.000,00 untuk jangka waktu sewa 13 September 2022 sampai dengan 12 September 2023.

b. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah

1) Rehabilitasi Rumah Daerah

Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas digunakan untuk Rumah Dinas yang terletak di Jalan Sriti Nomor 20 D Caturtunggal, Depok, Sleman dan Rumah Dinas yang terletak di Komplek Colombo Nomor 58 Caturtunggal, Depok, Sleman dengan Pagu Anggaran Rp200.000.000,00 serta realisasi anggaran sebesar Rp199.820.000,00.

2) Rehabilitasi Gedung Kantor

Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor digunakan untuk Gedung Kantor yang terletak di Jalan Jenggotan, Bumijo, Jetis, Yogyakarta dan Gedung Kantor yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 Yogyakarta dengan Pagu Anggaran Rp200.000.000,00 serta realisasi anggaran sebesar Rp199.587.000,00.

3) Pembersihan Lahan

Kegiatan Pembersihan Lahan dilakukan untuk Barang Milik Daerah yang terletak di Jalan Tunjung Nomor 2 Yogyakarta dan Jalan Cik di Tiro Nomor 8 Yogyakarta dengan Pagu Anggaran Rp25.000.000,00 serta realisasi anggaran sebesar Rp24.574.000,00. Selanjutnya Kegiatan Pembersihan Lahan II dilakukan untuk Barang Milik Daerah yang terletak di Jalan Tamansiswa Nomor 103 Yogyakarta dengan Pagu Anggaran Rp25.000.000,00 serta realisasi anggaran sebesar Rp24.574.000,00.

4) *Penjaminan Barang Milik Daerah*

Dalam rangka pengamanan BMD, Pemda DIY menyelenggarakan asuransi barang milik daerah. Pada APBD tahun 2022 tersedia anggaran sebesar Rp1.300.000.000,00. Asuransi barang milik daerah dilaksanakan untuk kendaraan operasional dinas roda empat ke atas dan untuk bangunan gedung. Pemilihan penyedia asuransi dilaksanakan dengan dengan cara tender oleh Balai Layanan Pengadaan (BLP). Masa pertanggungan asuransi adalah 21 Juli 2022 sampai dengan 21 Juli 2023. Pelaksanaan asuransi barang milik daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a) Asuransi Kendaraan dinas operasional roda empat ke atas milik Pemda DIY, dimenangkan oleh PT Asuransi Sinar Mas. Nilai kontrak asuransi kendaraan adalah Rp622.726.815,00. Total kendaraan yang disuransikan sebanyak 336 unit kendaraan, dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Pertanggungan komprehensif dengan perluasan Banjir, Gempa Bumi, huru-hara Kerusakan, terorisme dan sabotase, TJH pihak ketiga dan kecelakaan diri (pengemudi dan penumpang) sebanyak 11 unit kendaraan;
 - (2) Pertanggungan komprehensif dengan perluasan huru-hara Kerusakan, terorisme dan sabotase, TJH pihak ketiga dan kecelakaan diri (pengemudi dan penumpang) sebanyak 46 unit kendaraan;
 - (3) Pertanggungan komprehensif tanpa perluasan sebanyak 220 unit kendaraan; dan
 - (4) Pertanggungan *total loss only* (TLO) sebanyak 59 unit kendaraan.
- b) Asuransi bangunan dilaksanakan dalam bentuk asuransi Kebakaran (Flexas) dan asuransi Gempa Bumi. Tender dimenangkan oleh PT Asuransi Sinar Mas, dengan nilai

kontrak sebesar Rp618.897.806,00. Terdapat 149 unit bangunan yang di asuransikan terbagi menjadi tiga kombinasi asuransi. Adapun rincian asuransi bangunan adalah sebagai berikut:

- (1) Asuransi kebakaran (Flexas) dan asuransi gempa bumi dengan perluasan RSMDCC (*Riot, Strike, Malicious Damage, and Civil Commotions*) sebanyak 24 unit bangunan;
- (2) Asuransi Kebakaran (Flexas) dengan perluasan RSMDCC (*Riot, Strike, Malicious Damage, and Civil Commotions*) sebanyak 6 unit bangunan; dan
- (3) Asuransi kebakaran (Flexas) sebanyak 119 unit bangunan.

Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah

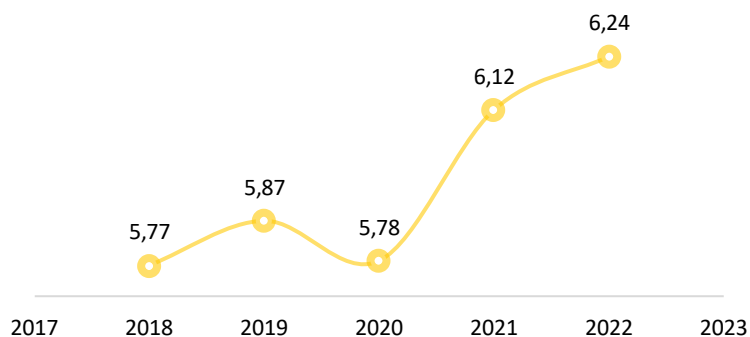
A. TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN PEMDA

RPJMD DIY pada periode 2018-2022 menetapkan dua Tujuan. Tujuan pertama adalah Meningkatnya Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat dengan Tatahan Sosial yang Menjamin Ke-*bhinneka-tunggal-ika*-an dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Mampu Menjaga dan Mengembangkan Budaya Yogyakarta. Tujuan pertama ini diukur dengan Indikator Angka *Inclusive Growth Index* (IGI) 5,59 (2016) menjadi 6,2 (2022). Tujuan kedua adalah Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*) yang diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dari 73,07 (BB) (2016) menjadi 76 (A) (2022).

1. Angka *Inclusive Growth Index* (IGI)

Pertumbuhan yang inklusif merupakan konsep pertumbuhan yang berkelanjutan dan dapat menjamin kesetaraan partisipasi untuk seluruh segmen sosial dalam mengakses peluang-peluang ekonomi yang tersedia tanpa membedakan kondisi masing-masing individu. Pada prinsipnya, terdapat dua dimensi mendasar dari prinsip pertumbuhan yang inklusif. Dimensi pertama adalah mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan/ memperluas peluang ekonomi. Dimensi yang kedua adalah memastikan akses yang lebih luas terhadap peluang, sehingga setiap anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan yang dicapai.

Untuk mengukur capaian kinerja tingkat pembangunan inklusif, digunakan indikator *Inclusive Growth Index* (Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif). Capaian angka IGI DIY selama periode 2018-2022 dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Indeks Pertumbuhan Inklusif (IGI) Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Perkembangan secara umum menunjukkan peningkatan kualitas pertumbuhan yang ditunjukkan dengan tren IGI yang meningkat dari tahun 2018 sampai 2022. Meskipun demikian nilai IGI sempat menurun di tahun 2020 akibat dampak pandemi. Peningkatan nilai IGI menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi DIY dibarengi dengan pengurangan kemiskinan serta perluasan akses dan kesempatan terutama dalam mendapatkan pekerjaan. Selama tahun 2020 sampai 2022, nilai IGI meningkat sekitar 0,46 poin.

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Salah satu tujuan prioritas RPJMD DIY Tahun 2017-2022 adalah terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini selaras dengan amanat Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Sesuai dengan target akhir periode RPJMD 2017-2022, capaian tata kelola pemerintahan yang baik ditargetkan mencapai Indeks Reformasi Birokrasi A (Memuaskan). Target ini diharapkan mencerminkan perwujudan birokrasi DIY yang sesuai dengan karakteristik

organisasi berbasis kinerja bersih dan bebas dari KKN, akuntabel, serta profesional melayani.

Sesuai dengan Indeks Reformasi Birokrasi yang diterbitkan Kemenpan RB pada tahun 2022, untuk Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemda DIY terdapat peningkatan dari capaian pada 2021 sebesar 81,27; pada kategori “A”, menjadi 81,62; pada kategori “A”. Capaian tahun 2022 ini sekaligus telah memenuhi target akhir RPJMD.

Tabel 3.1. Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun 2020-2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai				
			2018	2019	2020	2021	2022
I	Komponen Pengungkit	60,00	44,55	45,09	45,10	47,69	48,28
II	Komponen Hasil	40,00	33,74	34,93	35,98	33,58	33,34
	Indeks Reformasi Birokrasi (I+II)	100,00	78,29	80,02	81,08	81,27	81,62
	Predikat		BB	A	A	A	A

Sumber: Kemenpan RB, 2023

Implementasi Reformasi Birokrasi di Pemda DIY pada tahun 2022 diatur melalui kebijakan berupa Pergub DIY Nomor 94 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021-2024. Kebijakan ini menjadi dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di DIY yang bersifat adaptif, kolaboratif, sistemik dan partisipatif.

Pemda DIY dalam melaksanakan reformasi birokrasi menggunakan skema bertahap, terukur, lintas sektor serta melibatkan peran aktif OPD *leading sector* area perubahan secara berkelanjutan. Upaya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemda DIY terhadap 37 OPD tetap intensif dilakukan meskipun pada masa pandemi. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain; pendampingan penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi, pendampingan pengusulan Unit Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta layanan konsultasi dan pendampingan reformasi birokrasi. Pada akhir tahun 2022 telah dilaksanakan evaluasi capaian Indeks Reformasi Birokrasi OPD dengan metode Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (bobot 20%) dan Evaluasi Aspek *Reform* Perangkat Daerah (bobot 80%). Hasil evaluasi Tahun 2022 terdapat

35 Perangkat Daerah berkategori A (Sangat Baik), dan 2 Perangkat Daerah berkategori BB (Baik).

B. TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMDA

Sesuai dokumen RPJMD DIY Tahun 2017-2022 terdapat 8 sasaran dengan 14 indikator kinerja sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda DIY. Capaian indikator tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda DIY Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	Target Kinerja		Capaian 2022	Capaian (%) terhadap		Keterangan RKPDP / RPJMD
					RKPD 2022	RPJMD 2017-2022		RKPD 2022	RPJMD 2017-2022	
1	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Indeks	80,22	81,30	81,68	80,64	99,19	98,73	Tidak Tercapai /Tidak Tercapai
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka Indeks	74,73	70,32	70,32	76,57	108,89	108,89	Tercapai /Tercapai
2	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Indeks Gini	Angka Indeks	0,4360	0,4382	0,3635	0,459	95,25	73,73	Tidak Tercapai /Tidak Tercapai
		Persentase Angka Kemiskinan	Persen	11,91	11,00	7,00	11,49	95,55	35,86	Tidak Tercapai /Tidak Tercapai
3	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda yang diapresiasi	Persen	12,22	12,04	12,04	12,67	105,23	105,23	Tercapai /Tercapai
4	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,58	5,40	5,34	5,15	95,37	96,44	Tidak Tercapai /Tidak Tercapai
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka indeks	60,53	66,15	66,15	59,92	90,58	90,58	Tidak Tercapai /Tidak Tercapai
		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	81,02	82,5	82,5	82,62	100,15	100,15	Tercapai /Tercapai
		Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	Persen	51,81	54,44	54,44	55,29	101,56	101,56	Tercapai /Tercapai
5	Menu runnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Indeks Williamson	Angka Indeks	0,4498	0,4575	0,4489	0,4504	101,55	99,67	Tercapai /Tidak Tercapai
6	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	Tercapai /Tercapai
		Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP) 1=AA;2=A;3=BB;4=B; 5=CC;6=C;7=D	Nilai	AA	A	A	AA	150	150	Tercapai /Tercapai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	Target Kinerja		Capaian 2022	Capaian (%) terhadap		Keterangan RKPDP / RPJMD
					RKPD 2022	RPJMD 2017-2022		RKPD 2022	RPJMD 2017-2022	
7	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase capaian program urusan keistimewaan	Persen	84,62	91,30	91,30	96,30	105,48	105,48	Tercapai /Tercapai
8	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	Bidang	15.335	21.877	21.877	22.661	103,58	103,58	Tercapai / Tercapai

Sumber: BAPPEDA DIY, 2023 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IKU Pemda DIY Tahun 2022 jika dibandingkan dengan target RKPD dan RPJMD dari total 14 indikator, persentase capaian yang telah $\geq 100\%$ terdapat 9 indikator yang dibandingkan dengan target RKPD dan 8 indikator dibandingkan dengan target RPJMD. Selanjutnya, persentase capaian $< 100\%$ terdapat 6 indikator jika dibandingkan target RPJMD dan 5 indikator dengan dibandingkan target RKPD. Indikator yang memiliki persentase capaian $< 100\%$ yang ditetapkan dalam RPJMD, diantaranya: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Persentase Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Indeks Williamson.

Sementara, indikator yang belum memenuhi target dalam RKPD, yaitu: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Persentase Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

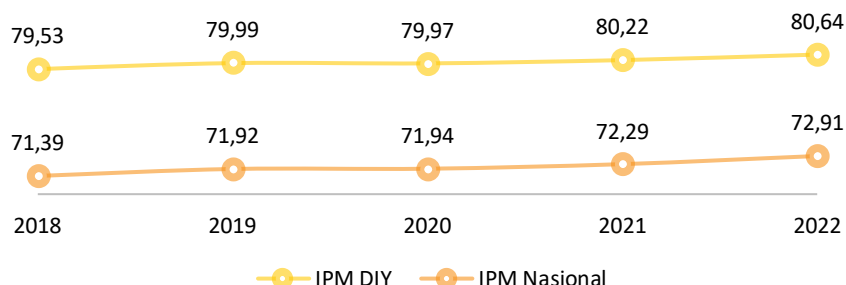
Terdapat indikator yang capaiannya masih menggunakan tahun 2021 yang disebabkan angka belum rilis di tahun 2022, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Williamson. Berikut uraian pencapaian dari masing-masing indikator kinerja sasaran Pemda yang merupakan IKU Pemda DIY.

1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM – Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia (SDM). IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga

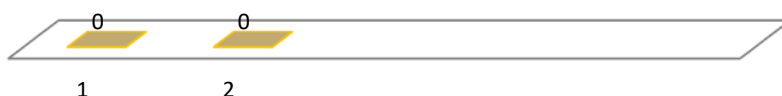
dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan kehidupan yang layak (*decent standard of living*). Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Pengukuran dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

Angka IPM DIY mengalami tren yang meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Capaian IPM sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 dari 79,99 menjadi 79,97. Penurunan ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19. Namun angka IPM meningkat kembali di tahun 2021 setelah pandemi Covid-19 mulai mereda, yaitu mencapai angka 80,22. Posisi IPM DIY pada tahun 2022 mencapai 80,64 (kategori sangat tinggi), tumbuh 0,52% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan nilai IPM terjadi pada semua komponen penghitungan IPM.



Gambar 3.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2018-2022
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Perkembangan IPM di DIY menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin baik. Level IPM DIY selama periode 2017-2020 selalu berada dalam kategori IPM tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$), sedangkan mulai tahun 2021 meningkat menjadi kategori sangat tinggi ($\text{IPM} > 80$). Dibandingkan dengan IPM nasional, perkembangan IPM DIY dari tahun 2018 – 2022 selalu berada di atas IPM nasional. Pada tahun 2018 IPM nasional 71,39 sedangkan IPM DIY telah mencapai 79,53. Sedangkan pada tahun 2022, IPM Nasional menunjukkan angka 72,91 dan untuk DIY mencapai 80,64. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia DIY lebih berkualitas dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional. Tingginya IPM DIY didorong oleh semua indikator penyusun yang memiliki capaian cukup tinggi. Angka harapan hidup dan harapan lama sekolah memberi sumbangan terbesar terhadap capaian IPM DIY. AHH DIY cukup tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik. RLS juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal ini menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian daerah tersebut.

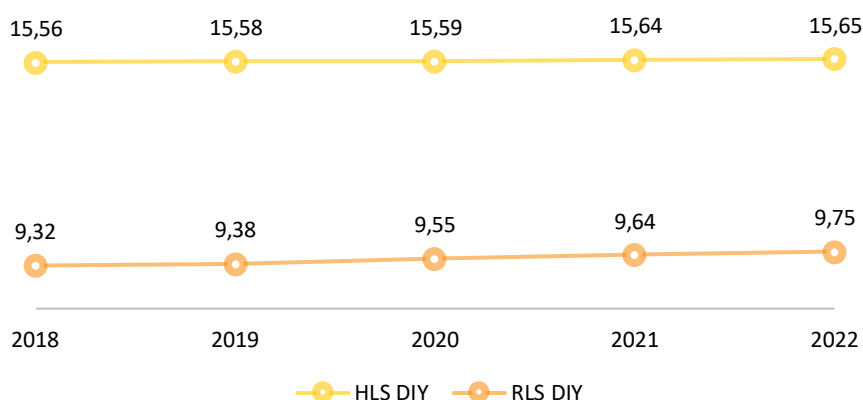


Gambar 3.3. Perkembangan Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) DIY Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Angka harapan hidup (AHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. AHH di DIY dalam kurun waktu selama tahun 2018-2022 terus menunjukkan peningkatan, dari awalnya 74,82 tahun pada tahun 2018 meningkat menjadi 75,08 tahun pada

tahun 2022. Dibanding tahun 2021 yang tumbuh 0,07%, capaian tahun 2022 ini mengalami perlambatan karena hanya bertambah 0,04 tahun atau tumbuh 0,05%. Meski demikian, AHH saat lahir di DIY masih merupakan yang tertinggi di Indonesia.



Gambar 3.4. Perkembangan HLS dan RLS DIY Tahun 2018-2022

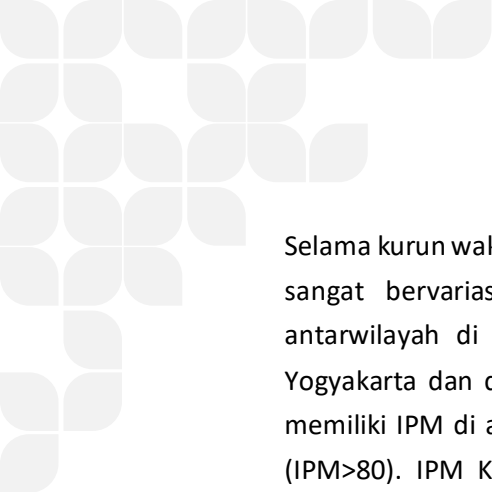
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Selama kurun waktu 2018-2022 terjadi tren peningkatan capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di DIY. HLS DIY pada tahun 2018 tercatat sebesar 15,56 tahun dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 tercapai sebesar 15,65 tahun. RLS di DIY pada tahun 2018 tercapai sebesar 9,32 tahun dan mengalami peningkatan hingga tahun 2022 tercapai sebesar 9,75 tahun.

Tabel 3.3. IPM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	IPM				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Bantul	79,45	80,01	80,01	80,28	80,69
Kabupaten Sleman	83,42	83,85	83,84	84,00	84,31
Kabupaten Gunungkidul	69,24	69,96	69,98	70,16	70,96
Kabupaten Kulon Progo	73,76	74,44	74,46	74,71	75,46
Kota Yogyakarta	86,11	86,65	86,61	87,18	87,69
DIY	79,53	79,99	79,97	80,22	80,64

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023



Selama kurun waktu lima tahun terakhir, capaian IPM kabupaten/kota di DIY sangat bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa pola pembangunan antarwilayah di DIY masih timpang. Level IPM tertinggi dicapai Kota Yogyakarta dan diikuti oleh Sleman serta Bantul. Ketiga daerah tersebut memiliki IPM di atas DIY dan sudah berada pada kategori “sangat tinggi” (IPM>80). IPM Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul berada dalam kategori “tinggi” (IPM antara 70-80). IPM Gunungkidul tercatat paling rendah namun terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2020 capaian IPM Gunungkidul pada kategori “sedang”, namun mulai tahun 2021 telah meningkat pada kategori “Tinggi”.

Pencapaian pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota di DIY selama tahun 2022 mengindikasikan perkembangan pembangunan manusia yang sangat baik karena kabupaten/kota di DIY kini sudah berstatus sangat tinggi dan tinggi. Capaian IPM Kota Yogyakarta mencapai 87,69 dan tercatat paling tinggi di antara kabupaten/kota di DIY, bahkan di Indonesia. Capaian IPM tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Sleman dan Bantul masing-masing sebesar 84,31 dan 80,69. IPM ketiga daerah ini termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi” (IPM≥80). Capaian IPM Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat masing-masing sebesar 75,46 dan 70,96. Masih adanya perbedaan nilai (*gap*) antara IPM Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul yang cukup besar, yakni 16,73 poin, menunjukkan masih adanya ketimpangan yang cukup besar pada pembangunan manusia di DIY. Kendati demikian, ketimpangan ini sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 17,02 poin.

Perkembangan indikator penyusun IPM menurut kabupaten/kota di DIY cukup bervariasi. Pada tahun 2022, dimensi umur yang panjang dan sehat (indikator AHH) tertinggi di Kulon Progo (75,28 tahun) dan terendah di Bantul (73,90 tahun). Pada dimensi pengetahuan, capaian Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih cukup tertinggal dibanding Sleman dan Kota Yogyakarta. Pada indikator HLS penduduk usia 7 tahun ke atas Gunungkidul sebesar 13,33 tahun, Kulon Progo sebesar 14,38 tahun, dan Bantul sebesar 15,48 tahun. Ketiga kabupaten tersebut berada di bawah rata-rata HLS

provinsi. HLS Sleman (16,76 tahun) dan Kota Yogyakarta (17,61 tahun) tercapai di atas rata-rata provinsi sekaligus tertinggi. Begitu juga, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas terendah sebesar 7,31 tahun berada di Gunungkidul, Kulon Progo beserta Bantul juga tergolong rendah di bawah rata-rata provinsi. RLS tertinggi di Kota Yogyakarta hingga mencapai 11,89 tahun. Sementara, capaian komponen pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan terendah sebesar Rp9,874 juta per tahun di Gunungkidul.

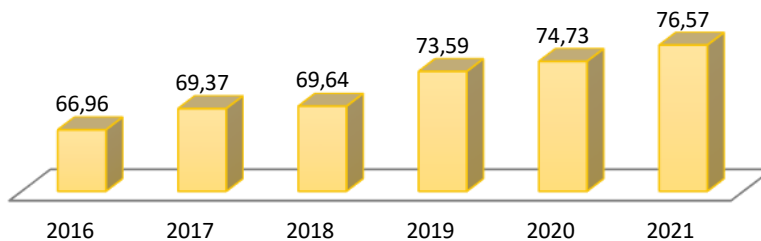
Tabel 3.4. IPM Kabupaten/ Kota di DIY menurut Komponen Tahun 2022

Komponen	AHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu rupiah)
Kabupaten Kulon Progo	75,28	14,38	9,17	10.511
Kabupaten Bantul	73,90	15,48	9,59	16.002
Kabupaten Gunungkidul	74,23	13,33	7,31	9.874
Kabupaten Sleman	75,00	16,76	10,94	16.638
Kota Yogyakarta	74,83	17,61	11,89	19.319
DIY	75,08	15,65	9,75	14.482

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

2. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM – Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Kesetaraan gender menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan sumber daya manusia di DIY. Berdayanya seluruh masyarakat DIY, baik perempuan maupun laki-laki, akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan karena seluruh pihak berperan aktif. Oleh karena itu, Indeks Pemberdayaan Gender menjadi salah satu indikator peningkatan derajat kualitas sumber daya manusia. Indikator ini dibentuk dari pengukuran 3 komponen, yaitu: keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Data menunjukkan adanya peningkatan IDG secara kontinyu. Berangkat dari angka 66,96 pada tahun 2016, IDG DIY terus naik tiap tahun sehingga pada tahun 2021 mencapai angka 76,57.



Gambar 3.5. Tren Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di DIY Tahun 2016-2021

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Secara nasional, IDG DIY sebesar 76,57 telah berada di atas rata rata nasional yang berada pada angka 76,26. Jika dilihat dari sebarannya pada seluruh kabupaten/kota di DIY, Kabupaten Sleman memperoleh nilai IDG tertinggi yaitu sebesar 81,31 dan Kabupaten Bantul meraih angka IDG terendah yaitu sebesar 65,27. Selain itu, dapat pula dilihat bahwa ada dua Kabupaten di DIY dengan nilai IDG di atas angka nasional yakni Kabupaten Gunungkidul sebesar 76,70 dan Kabupaten Sleman sebesar 81,31.

Tabel 3.5. IDG Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2021

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	63,36	71,68	71,74	71,41
Bantul	61,01	65,29	64,78	65,27
Gunungkidul	67,45	75,34	75,53	76,70
Sleman	78,47	80,40	81,25	81,31
Kota Yogyakarta	80,65	71,06	71,05	73,18
DIY	69,64	73,59	74,73	76,57
Nasional	72,10	75,24	75,57	76,26

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Dari Indikator pembentuk IDG dapat disampaikan data Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai Tenaga Profesional, dan Sumbangan Pendapatan Perempuan, terlihat bahwa di 5 Kabupaten/Kota di DIY terjadi perbaikan kondisi dari ketiga indikator tersebut sejak 2018 sampai 2021. Kondisi DIY di atas angka rata rata nasional dalam hal Perempuan sebagai Tenaga Profesional, dan Sumbangan Pendapatan Perempuan, serta di bawah rata rata nasional pada Keterlibatan Perempuan

di Parlemen. Keterlibatan perempuan di parlemen dengan persentase terendah adalah Kabupaten Bantul sebesar 8,89% dan tertinggi adalah Kabupaten Sleman 28%. Dua Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Gunungkidul sebesar 24,44% dan Kabupaten Sleman 28% berada di atas rata-rata Nasional sebesar 21,89%.

Tabel 3.6. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, dan Sumbangan Pendapatan Perempuan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2021

Kab/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)				Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)				Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	17,50	20,00	20,00	20,00	56,95	51,28	52,13	52,57	33,91	34,15	34,09	34,27
Bantul	6,67	8,89	8,89	8,89	40,46	51,39	55,37	56,03	38,75	38,76	38,75	39,28
Gunungkidul	13,33	22,22	22,22	24,44	55,74	44,52	46,13	44,59	39,66	39,74	39,90	39,52
Sleman	24,00	26,00	28,00	28,00	45,51	48,41	52,12	51,66	38,44	38,52	38,46	38,92
Kota Yogyakarta	25,00	12,50	12,82	15,00	55,79	52,34	53,67	52,51	44,19	44,65	44,63	44,72
DI. Yogyakarta	12,73	16,36	18,18	20,00	47,70	49,65	53,69	52,18	40,78	40,85	40,82	41,26
Nasional	17,32	20,52	20,52	21,89	47,02	47,46	48,76	49,99	36,70	37,10	37,26	37,22

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

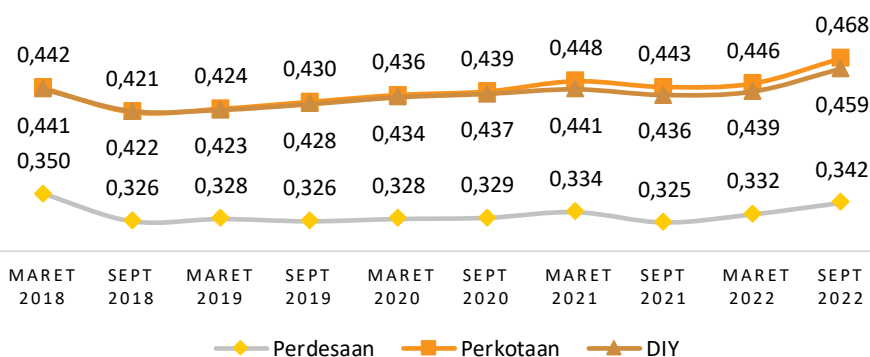
Berbagai kendala dalam keterlibatan perempuan di parlemen berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat, pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya dan kemampuan pribadi perempuan. Banyak perempuan yang mempunyai kemampuan untuk terlibat di parlemen, dan hal tersebut terus ditingkatkan melalui sekolah politik perempuan, penyadaran pemilih melalui berbagai saluran komunikasi informasi dan edukasi serta tentunya kebijakan publik yang berpihak pada perempuan.

3. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat – Indeks Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini (*Gini Ratio*) merupakan salah satu pengukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah yaitu menggunakan. Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh, angkanya berkisar antara 0 hingga 1. Indeks Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin

tinggi. Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Indeks Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang lainnya tidak memiliki. Indeks Gini diupayakan agar mendekati 0 yang menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY yang diukur dengan menggunakan indikator Indeks Gini sebesar 0,459. Angka ini meningkat 0,020 poin jika dibandingkan dengan Indeks Gini Maret 2022 yang tercatat besarnya 0,439 dan meningkat 0,023 poin dibandingkan dengan Indeks Gini September 2021 yang tercatat sebesar 0,436. Lebih lanjut perkembangan Indeks Gini menurut daerah tempat tinggal di DIY bulan Maret 2018 – September 2022 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3.6. Perkembangan Indeks Gini Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY Bulan Maret 2018 – September 2022

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa selama periode Maret 2018 sampai dengan September 2022, angka Indeks Gini DIY berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut pemerataan pengeluaran di DIY masih belum menunjukkan perbaikan. Meskipun sempat mengalami penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran pada September 2018, namun tingkat ketimpangan wilayah ini terus menunjukkan adanya peningkatan sejak

Maret 2019. Bahkan sejak berjangkitnya wabah Covid 19, angka Indeks Gini DIY menunjukkan adanya peningkatan rata-rata sebesar 0,005 poin per semester. Ketimpangan pengeluaran penduduk di DIY pada September 2022 sebesar 0,459 merupakan yang tertinggi sejak Maret 2018. Sebelumnya, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk tertinggi di DIY tercatat pada Maret 2018 dan Maret 2021, masing-masing tercatat sebesar 0,441.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Indeks Gini di daerah perkotaan pada September 2022 adalah 0,468. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan angka Indeks Gini sebesar 0,022 poin dibanding Maret 2022 yang angkanya sebesar 0,446. Selain itu, jika dibandingkan dengan angka Indeks Gini September 2021 yang sebesar 0,436 terlihat adanya peningkatan sebesar 0,023 poin. Peningkatan angka Indeks Gini juga terjadi di daerah perdesaan. Indeks Gini pada September 2022 tercatat sebesar 0,342 yang menunjukkan adanya kenaikan angka Indeks Gini jika dibandingkan dengan Maret 2022 yang besarnya 0,332 dan September 2021 yang besarnya 0,325. Peningkatan angka Indeks Gini baik di perkotaan maupun perdesaan menunjukkan semakin melebarnya tingkat ketimpangan di kedua daerah tersebut.

Jika dilihat perkembangan secara nasional (pada September 2022), DIY merupakan provinsi dengan Indeks Gini tertinggi yaitu sebesar 0,459. Sementara itu, provinsi dengan Indeks Gini terendah tercatat di Bangka Belitung, yaitu sebesar 0,255. Jika dibandingkan dengan Indeks Gini nasional yang sebesar 0,381; terdapat enam provinsi dengan angka Indeks Gini lebih tinggi, yaitu DIY (0,459), Gorontalo (0,423), DKI Jakarta (0,412), Jawa Barat (0,412), Papua (0,393), dan Papua Barat (0,384).

Masih tingginya angka Indeks Gini di DIY terutama dipengaruhi oleh belum meratanya distribusi pendapatan antar kelompok. Golongan ekonomi atas, saat ini masih mendominasi total pengeluaran masyarakat di DIY. Pada September 2022, tingkat pengeluaran dari kelompok “40,00% penduduk pengeluaran terendah” di perkotaan tercatat sebanyak 14,91% dari total konsumsi yang dilakukan oleh seluruh penduduk perkotaan DIY. Kondisi

tersebut menunjukkan adanya penurunan konsumsi pada kelompok penduduk ini dibandingkan kondisi pada Maret 2022 yang besarnya 15,53%. Kondisi yang sama juga terjadi di perdesaan dimana terlihat adanya penurunan konsumsi pada kelompok penduduk 40,00% terbawah. Pada September 2022, kelompok “40,00% pengeluaran terbawah” perdesaan melakukan konsumsi sebesar 20,42% dari total pengeluaran. Hal ini menunjukkan adanya penurunan konsumsi jika dibandingkan kondisi Maret 2022, dimana konsumsi kelompok ini sebesar 20,88%.

Secara keseluruhan terjadi penurunan konsumsi pada kelompok penduduk 40,00% terbawah selama satu semester terakhir di DIY. Pada September 2022, kelompok penduduk ini melakukan konsumsi sebanyak 15,54% dari total konsumsi penduduk di provinsi ini. Adapun pada Maret 2022 konsumsi kelompok ini tercatat sebesar 16,07% dari total konsumsi penduduk DIY. Kondisi yang sama juga ditemui pada kelompok penduduk 40,00% menengah yang juga menunjukkan adanya penurunan tingkat konsumsi. Pada Maret 2022, konsumsi kelompok penduduk menengah tercatat sebesar 36,34%. Adapun pada September 2022, konsumsi kelompok ini sebesar 35,58%. Sementara itu, pada kelompok penduduk 20,00% teratas justru terjadi peningkatan proporsi konsumsi. Pada kelompok ini, persentase konsumsi meningkat sebesar 2,16% poin dari Maret 2022 (51,61%) terhadap September 2022 (53,77%).

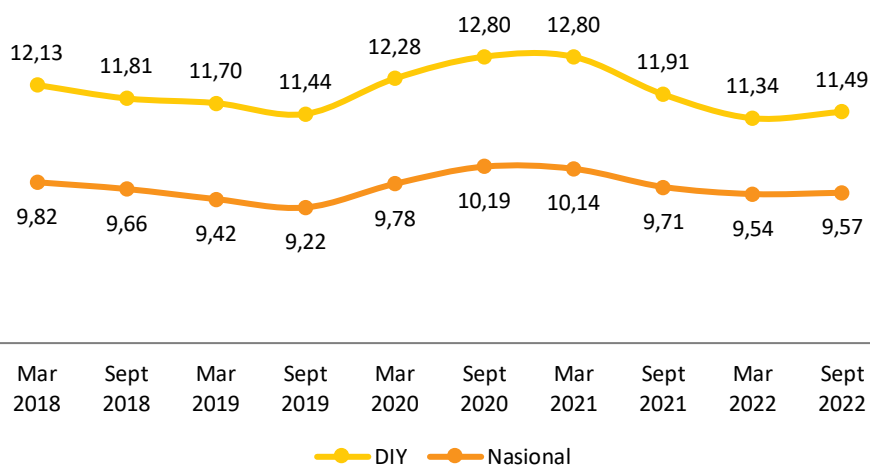
Tabel 3.7. Distribusi Pengeluaran Penduduk dan Rasio Gini DIY, September 2021 – September 2022

Daerah	Periode	Kriteria Bank Dunia		
		Penduduk 40% Terbawah	Penduduk 40% Menengah	Penduduk 20% Teratas
Perkotaan	September 2021	15,41	33,16	51,42
	Maret 2022	15,53	32,11	52,36
	September 2022	14,91	30,40	54,69
Perdesaan	September 2021	21,00	37,38	41,62
	Maret 2022	20,88	36,34	42,78
	September 2022	20,42	35,58	44,00
Perkotaan dan Perdesaan	September 2021	15,98	32,53	51,49
	Maret 2022	16,07	32,32	51,61
	September 2022	15,54	30,69	53,77

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

4. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat – Persentase Angka Kemiskinan

Salah satu masalah kesejahteraan masyarakat DIY adalah kemiskinan yang merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi salah satu prioritas pembangunan. Tingkat kemiskinan di DIY cenderung menurun dan penurunan rata-rata DIY lebih tinggi dibandingkan nasional, namun tingkat kemiskinan DIY selalu di atas rata-rata nasional. Selama periode Maret 2018 sampai dengan September 2022, persentase penduduk miskin di DIY berkurang 0,64 poin dari 12,13% menjadi 11,49%. Meskipun demikian di periode 2020 sampai awal 2021 terjadi kenaikan angka kemiskinan akibat dampak pandemi Covid-19, yaitu dari 11,44% (September 2019) menjadi 12,80% (Maret 2021). Kenaikan persentase penduduk miskin disebabkan oleh menurunnya kapasitas perekonomian DIY yang tumbuh negatif sebesar -2,69%. Kondisi ini menyebabkan pendapatan penduduk mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin selanjutnya menurun pada September 2021. Penurunan tersebut didukung oleh membaiknya kondisi perekonomian yang mendorong ekonomi DIY tumbuh positif yang berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk. Pada September 2022, persentase penduduk miskin meningkat dari periode sebelumnya sebesar 0,15 poin. Kenaikan persentase penduduk miskin disebabkan oleh tingkat inflasi yang lebih tinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya, penurunan nilai tukar petani, kenaikan harga bahan bakar minyak pada awal September 2022, dan peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Angka Kemiskinan pada tahun 2022 adalah 35,86% dengan capaian Persentase angka kemiskinan sebesar 11,49% sementara itu target di RPJMD adalah 7,00%.



Gambar 3.7. Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2018-2022
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Persentase penduduk miskin di tingkat Kabupaten/Kota menunjukkan variasi dan cenderung menurun selama periode 2018-2019, dan meningkat pada periode 2020 - 2021. Peningkatan di semua wilayah di tahun 2020 dan 2021 diakibatkan dampak pandemi. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin di semua kabupaten dan kota mengalami penurunan karena perekonomian telah menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Kulon Progo yang diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 adalah 16,39% dan Gunungkidul 15,86%. Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah selama periode 2018 - 2022. Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta adalah 6,62% di tahun 2022.

Tabel 3.8. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022 (%)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	18,3	17,39	18,01	18,38	16,39
Bantul	13,43	12,92	13,5	14,04	12,27
Gunungkidul	17,12	16,61	17,07	17,69	15,86
Sleman	7,65	7,41	8,12	8,64	7,74
Kota Yogyakarta	6,98	6,84	7,27	7,69	6,62

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

5. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan – Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi

Objek budaya Benda dan Tak Benda merupakan komponen dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Pemda DIY dalam mengimplementasikan kebijakan untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan. Representasi dari keberhasilan pemeliharaan dan pengembangan budaya benda dan budaya tak benda adalah bila budaya benda dan tak benda tersebut mendapatkan apresiasi melalui penetapan sebagai budaya benda dan tak benda di level nasional atau internasional.

Untuk menghitung tingkat keberhasilan upaya memelihara dan mengembangkan kebudayaan maka indikator sasaran yang digunakan adalah Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi.

Tabel 3.9. Warisan Budaya Benda Kekayaan DIY yang ditetapkan di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2007 - 2022

No	Tahun	Penetapan Nasional	Penetapan Internasional	Jumlah
1	2007	28	-	28
2	2010	16	-	16
3	2011	95	-	95
4	2013	1	-	1
5	2014	1	-	1
7	2016	1	-	1
8	2018	2	-	2
9	2019	6	-	6
10	2020	16	-	16
11	2021	-	-	-
12	2022	16	-	16
Jumlah		182		182

Sumber: Disbud DIY, 2023

Budaya benda kekayaan DIY yang diapresiasi di tingkat nasional dan internasional sampai dengan tahun 2022 mencapai 182 buah budaya benda. Tambahan budaya benda yang diapresiasi sampai dengan tahun 2022 adalah Rumah Indis Jl. Serma Taruna Ramli, Kotabaru, Yogyakarta; Rumah Tradisional Sendangsari, Bantul; Rumah Tradisional Sidomoyo, Sleman; Rumah Indis Selomartani, Sleman; Rumah Tradisional Bejiharjo,

Gunungkidul; Rumah Tradisional Karangnom, Gunungkidul; Rumah Arsip eks tambang mangaan Kliripan, Kulon Progo; Kantor Kapanewon Galur; Kantor Kapanewon Tempel; Wisma RRI; Rumah Indis Nogosari, Bantul; Rumah Tradisional Bangunharjo, Bantul; Rumah Tradisional Ngawis, Gunungkidul; Rumah Tradisional Karangduwet, Gunungkidul; Kantor Kapanewon Temon; dan Rumah Tradisional Gulurejo, Kulon Progo.

Tabel 3.10. Penetapan Warisan Budaya Tak benda Kekayaan DIY tingkat Nasional dan Internasional Pada Tahun 2013 – 2022

No	Tahun	Penetapan Nasional	Penetapan Internasional	Jumlah
1	2013	1	-	1
2	2014	5	-	5
3	2015	4	-	4
4	2016	9	-	9
5	2017	18	-	18
6	2018	27	-	27
7	2019	30	-	30
8	2020	14	-	14
9	2021	26	-	26
10	2022	21	-	
	Jumlah	155	-	155

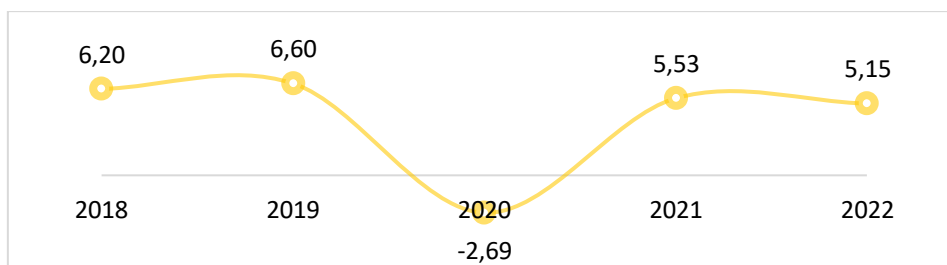
Sumber: Kemendikbud RI, 2023

Sejak tahun 2013 s.d. 2022 Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) DIY di tingkat Nasional telah mencapai 155 buah. Pada tahun 2022 sebanyak 21 buah WBTB DIY berhasil ditetapkan sebagai WBTB Nasional. WBTB DIY yang ditetapkan tersebut terdiri dari lima domain yang berbeda. Domain pertama adalah Domain Kemahiran dan Kerajinan Tradisional yang terdiri dari: Sayur Lodeh, Jadah Manten, Legomoro, Jamu Yogyakarta, Bir Jawa, Sangga Buwana, Kembang Waru, dan Yangko Yogyakarta. Domain kedua adalah Domain Seni Pertunjukan yang terdiri dari Kesenian Antup, Bedhaya Sapta, Beksan Sekar Madura, Srimpi Muncar, Beksan Panji Sekar, dan Tari Wayang Topeng Duwet. Domain ketiga adalah domain Tradisi dan Ekspresi Lisan yang terdiri dari Babad Pakualaman, Gerit-Gerit Lancung, Gobak Sodor Yogyakarta, dan Aksara Jawa Yogyakarta. Kemudian domain yang ke empat adalah Upacara Adat, Ritus, Upacara Tradisional yang terdiri dari Pisungsung Jaladri, dan Upacara Adat Pager Bumi Rebo Pungkasan. Terakhir adalah domain Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam Semesta yaitu Karangnom.

Realisasi Kinerja Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan berdasarkan Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda yang Diapresiasi pada tahun 2022 tercapai sebesar 12,67% dari target sebesar 12,04% dengan prosentase capaian sebesar 105,23%. Melihat data tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2022 telah melampaui dari target akhir pencapaian RPJMD.

6. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Pertumbuhan Ekonomi

Selama beberapa tahun terakhir kapasitas perekonomian DIY senantiasa mengalami peningkatan, namun sempat berkontraksi di tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Meskipun sempat mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2020, perekonomian DIY kembali menunjukkan kinerja yang membaik dengan pertumbuhan positif selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, ekonomi DIY tumbuh sebesar 5,53% setelah tumbuh negatif sebesar -2,69% di tahun sebelumnya. Kemudian perekonomian tetap mengalami peningkatan kapasitas di tahun 2022 dengan tumbuh sebesar 5,15%. Berikut ini gambar pertumbuhan ekonomi DIY selama lima tahun terakhir.



Gambar 3.8. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2018-2022 (%)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Pada tahun 2022, semua lapangan usaha tumbuh positif dengan tiga lapangan usaha tumbuh sebesar dua digit. Pertumbuhan paling tinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 18,26% dan diikuti pertumbuhan lapangan usaha Jasa Lainnya 15,04% dan Penyediaan Makan dan Minum 12,40%. Kondisi ekspansif di tahun 2022 mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Tingkat capaian pertumbuhan tahun 2022 sebesar 5,15% adalah 96,44%. Adapun target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2017-2022 adalah 5,34%. Kemudian, jika dibandingkan dengan target RKPd 2022 yang sebesar 5,40%, persentase capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 95,37%.

Tabel 3.11. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,16	1,03	4,19	0,61	5,12
Pertambangan dan Penggalian	10,59	3,04	-9,22	-3,11	1,72
Industri Pengolahan	5,12	5,73	-4,38	0,37	1,76
Pengadaan Listrik, Gas	3,31	5,43	-0,10	2,40	6,82
Pengadaan Air	5,13	8,90	0,51	6,82	3,29
Konstruksi	13,1	14,39	-15,64	10,82	4,81
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,54	5,16	-4,52	1,51	4,82
Transportasi dan Pergudangan	6,6	3,55	-20,21	1,93	18,26
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,77	8,89	-16,91	7,55	12,40
Informasi dan Komunikasi	6,48	7,45	19,70	16,69	3,54
Jasa Keuangan	6,14	8,62	-1,09	1,45	5,24
Real Estate	5,54	5,93	1,27	0,57	2,82
Jasa Perusahaan	5,51	6,75	-14,89	8,09	7,16
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,06	3,30	-2,22	-0,39	2,95
Jasa Pendidikan	6,01	6,57	4,47	5,00	0,98
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,05	6,61	19,18	4,47	3,99
Jasa lainnya	6,06	6,25	-15,74	21,53	15,04
PDRB	6,2	6,60	-2,69	5,53	5,15

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Menurut PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran, jenis pengeluaran yang tumbuh terbesar pada tahun 2022 adalah Ekspor Luar Negeri yaitu sebesar 21,68%. Pada tahun 2020, jenis pengeluaran ini tumbuh negatif sebesar 12,90%. Net Ekspor antar daerah mengalami kontraksi yaitu sebesar 148,78%. Pengeluaran lain yang dapat tumbuh cukup tinggi adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh 8,20% dan Perubahan Inventori tumbuh 8,63%.

Tabel 3.12. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022

Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi Rumah Tangga	3,95	3,81	-2,75	1,77	2,64
Konsumsi LNPRT	2,63	9,58	-6,56	0,39	5,58
Konsumsi Pemerintah	3,47	3,12	-0,93	0,26	0,52
Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,17	9,74	-13,41	8,2	5,86

Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Perubahan Inventori	3,54	3,04	6,24	8,63	-
Ekspor Luar Negeri	12,82	-0,07	-12,88	21,68	8,33
Impor Luar Negeri	6,22	-9,01	-14,87	7,3	0,19
Net Ekspor Antar Daerah	-3,15	-9,95	-74,71	-148,78	-
P D R B	6,2	6,6	-2,69	5,53	5,15

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Selama dua tahun terakhir, semua kabupaten/kota se-DY tumbuh positif setelah mengalami kontraksi di tahun 2020. Pada periode tersebut, Kabupaten Sleman mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu masing-masing 5,56% (2021) dan 5,7% (2022). Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang tumbuh terendah yaitu 4,33% (2021) dan 4,67% (2022).

Tabel 3.13. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022*
Kulonprogo	10,84	13,49	-4,06	4,33	4,67
Bantul	5,47	5,53	-1,66	4,97	5,08
Gunungkidul	5,16	5,33	-0,68	5,22	5,15
Sleman	6,42	6,48	-3,91	5,56	5,7
Yogyakarta	5,49	5,96	-2,42	5,09	5,2

Ket.: *) Angka Proyeksi

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

7. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan – Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Pembangunan berkelanjutan menjadi paradigma masyarakat modern, karena dengan pembangunan berkelanjutan akan menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Konsep ekonomi lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan dapat diartikan bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pencapaian pertumbuhan ekonomi dan mengembalikan fungsi lingkungan. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan hanya akan menjadi cita-cita apabila tidak ada komitmen dari para pemangku kepentingan. Namun kondisi eksisting menunjukkan bahwa masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran lingkungan dalam aktivitas perekonomian dan pembangunan, sehingga pencemaran tidak terelakkan.

Dengan bertambahnya wawasan masyarakat terhadap fenomena lingkungan, maka dibutuhkan suatu instrumen yang dapat memberikan informasi kondisi lingkungan secara terukur. Pemerintah menetapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk mengukur dan memberikan informasi secara cepat kondisi lingkungan di suatu daerah. Dengan adanya IKLH ini juga diharapkan dapat digunakan untuk dasar pengambilan kebijakan terhadap upaya pengelolaan lingkungan, sehingga Pemerintah menetapkan IKLH untuk mengukur status lingkungan hidup secara nasional.

IKLH terdiri dari 3 unsur yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), yang diagregasi dengan bobot tertentu. Adapun rumus IKLH sebagai berikut:

$$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$$

Nilai IKA direpresentasikan dengan pengukuran kualitas air sungai terhadap tujuh parameter kualitas air sungai, yaitu parameter BOD, DO, TSS, COD, *Fosfat*, bakteri Coli Tinja, dan bakteri Coli Total. Pengambilan sampel air sungai pada 10 sungai yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu, sungai Code, Winongo, Gajahwong, Bedog, Tambakbayan, Kuning, Konteng, Belik, Bulus, Oyo. Sedangkan nilai IKU mencerminkan kondisi kualitas udara ambien yang diwakili 4 jenis kawasan, yaitu kawasan transportasi, permukiman, perdagangan, dan industri. Parameter pengukuran IKU adalah parameter SO₂ dan NO₂ dengan metode *passive sampler*. Sedangkan nilai IKTL menunjukkan kualitas tutupan lahan sesuai dengan fungsinya sebagai penyangga ekosistem. Pengukuran IKTL dilakukan dengan cara menghitung tutupan lahan di DIY berdasarkan interpretasi citra satelit dan penetapan kawasan hutan berdasarkan SK.

Realisasi IKA DIY adalah sebesar 32,14, nilai IKU sebesar 89,16, dan nilai IKTL adalah sebesar 58,82. Berdasarkan rumus perhitungan IKLH diperoleh nilai IKLH DIY tahun 2022 sebesar 59,92 yang termasuk dalam kategori **cukup baik**, walaupun tidak mencapai target RPJMD (66,15). Adapun kategori predikatnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14. Kategori Nilai IKLH secara Nasional

No	Predikat	Kisaran Nilai IKLH
1	Sangat baik	IKLH > 80
2	Baik	70 < IKLH ≤ 80
3	Cukup Baik	60 < IKLH ≤ 70
4	Kurang Baik	50 ≤ IKLH ≤ 60
5	Sangat kurang baik	40 ≤ IKLH > 50
6	Waspada	30 ≤ IKLH > 40

Sumber: Kemen LHK RI, 2017

Tabel 3.15. Target dan Realisasi IKLH DIY 2018 - 2022

Indikator Sasaran Pemda DIY	Satuan	2018		2019		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKLH	Angka Indeks	58,58	61,69	60,51	61,05	62,44	61,60	64,18	60,53	66,15	59,92

Sumber: DLHK DIY, 2023

Berdasarkan tabel dan grafik memperlihatkan bahwa tren capaian IKLH sangat fluktuatif, mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2020, kemudian terus menurun sampai tahun 2022. Penurunan angka IKLH ini disebabkan karena penurunan angka IKA dan capaian IKTL yang stagnan. Angka IKA yang rendah disebabkan karena kualitas sungai di DIY, sedangkan angka IKTL tidak mengalami kenaikan signifikan.

Strategi peningkatan IKLH dapat dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan koordinasi dan pembagian peran multisektor sampai dengan pelaksanaan kegiatan.
- b. Untuk peningkatan kualitas air sungai, diperlukan pengendalian pencemaran air sungai dengan melakukan pemetaan terhadap sungai-sungai yang mengalami cemar berat untuk diketahui faktor penyebabnya dan sektor-sektor yang terkait, kemudian menetapkan langkah-langkah pengendaliannya.

Permasalahan :

- a. Kondisi sungai di DIY tercemar ringan sampai berat.
- b. Penambahan tutupan vegetasi di DIY rendah.

Solusi :

- a. Perlu penanganan pencemaran yang lebih komprehensif yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait.
- b. Perlu penyediaan anggaran yang cukup untuk melakukan penambahan tutupan vegetasi.

8. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang bahwa penilaian keterwujudan rencana tata ruang salah satunya dengan penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang untuk perwujudan kawasan peruntukan lindung dan perwujudan kawasan peruntukan budidaya. Penilaian kesesuaian pola ruang menjadi penting dilakukan untuk melihat kecenderungan penggunaan lahan di DIY dan kaitannya dengan perwujudan rencana pola ruang RTRW. Penilaian kesesuaian pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting dibagi menjadi dua fungsi pola yaitu Pola Ruang Kawasan Lindung dan Pola Ruang Kawasan Budidaya. Selain kedua fungsi dalam rencana pola ruang tersebut juga ditampilkan data tubuh air berupa sungai dan danau/waduk.

Berdasarkan hasil *overlay* antara peta penggunaan lahan eksisting dengan peta pola ruang yang mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY Tahun 2019-2013, identifikasi kesesuaian pola ruang dilakukan dengan melihat besaran perbedaan antara kondisi aktual dengan arahan tata ruang. Kesesuaian pola ruang terdiri dari penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang antara lain: (1) Pola Ruang Sesuai; (2) Pola Ruang Belum Terwujud; dan (3) Pola Ruang Tidak Sesuai. Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil kesesuaian pemanfaatan ruang secara keseluruhan sebesar 82,62% sesuai dengan luasan 262.176,63 ha dari total keseluruhan sebesar 317.344,98 ha.

Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang yang belum terwujud sebesar 12,18% dengan luasan 38.647,07 ha. Perwujudan kawasan peruntukan industri menempati persentase paling tinggi sebesar 63,47%. Aspek lainnya yaitu berupa nilai kesesuaian pemanfaatan ruang yang tidak sesuai sebesar 5,21% dengan luasan 16.521,28 ha. Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang keseluruhan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,58% dibandingkan dengan nilai kesesuaian tahun 2021 yang memiliki nilai kesesuaian sebesar 81,04%.

Perolehan hasil persentase tersebut berdasarkan hasil perbandingan luas kesesuaian dengan luas keseluruhan, luas belum terwujud dengan luas keseluruhan dan luas lahan yang tidak sesuai dengan luas keseluruhan. Sehingga semakin besar luasan penggunaan lahan eksisting yang sesuai dengan rencana pola ruang RTRW maka persentase yang sesuai akan semakin tinggi pula.

Tabel 3.16. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Eksisting dengan Rencana Pola Ruang RTRW DIY

No	Perwujudan Pola Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang						Total Luas
		Sesuai (ha)		Belum Terwujud		Tidak Sesuai		
		ha	%	ha	%	ha	%	
A Perwujudan Kawasan Lindung								
1	Kawasan Hutan Lindung	2294,93	100,00	0	0,00	0,00	0,00%	2294,93
2	Kawasan Sempadan Pantai	1063,64	81,13	0	0,00	247,47	18,87%	1311,11
3	Kawasan Sempadan Sungai	4172,14	76,49	0	0,00	1282,65	23,51%	5454,79
4	Kawasan Sempadan Waduk	72,20	100,00	0	0,00	0,00	0,00%	72,20
5	Kawasan Cagar Alam	11,88	100,00	0	0,00	0,00	0,00%	11,88
6	Kawasan Suaka Margasatwa	619,59	100,00	0	0,00	0,00	0,00%	619,59
7	Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi	1865,45	100,00	0	0,00	0,00	0,00%	1865,45
8	Kawasan Taman Wisata Alam	1,03	100,00	0	0,00	0,00	0,00%	1,03
9	Kawasan Taman Hutan Raya	615,19	100,00	0	0,00	0,00	0,00%	615,19
10	Kawasan Hutan Penelitian	101,64	100,00	0	0,00	0,00	0,00%	101,64
11	Kawasan Cagar Alam Geologi	118,90	81,90	0	0,00	26,28	18,10%	145,18
12	Kawasan Rawan Bencana Geologi	2817,62	83,96	0	0,00	538,24	16,04%	3355,86
Total		13754,20	86,78%	0	0,00	2094,63	13,22	15848,84
B Tubuh Air								
1	Sungai	151,19	100,00	0	0,00	0,00	0,00%	151,19

No	Perwujudan Pola Ruang	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang						Total Luas
		Sesuai (ha)		Belum Terwujud		Tidak Sesuai		
		ha	%	ha	%	ha	%	
2	Danau/Waduk	2301,92	100,00	0	0,00	0,00	0,00%	2301,92
	Total	2453,11	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	2453,11
C Perwujudan Kawasan Budidaya								
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	12328,77	91,74	1063,90	7,92	46,61	0,35%	13439,28
2	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	16417,31	85,77	905,21	4,73	1818,27	9,50%	19140,79
3	Kawasan Peruntukan Lahan pangan Beririgasi	42108,62	82,86	5209,66	10,25	3502,85	6,89%	50821,12
4	Kawasan Peruntukan Lahan Pangan Tidak Beririgasi	84869,39	84,52	10957,28	10,91	4588,22	4,57%	100414,88
5	Kawasan Peruntukan Perkebunan	15412,48	71,80	3546,23	16,52	2508,38	11,68%	21467,09
6	Kawasan Peruntukan Industri	95,18	1,70	3562,71	63,74	1931,91	34,56%	5589,79
7	Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	16581,20	78,79	4462,55	21,21	0,00	0,00%	21043,75
8	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	57289,88	86,56	8887,08	13,43	6,93	0,01%	66183,89
9	Kawasan Peruntukan Riset dan Pendidikan Tinggi	22,20	85,53	0,00	0,00	3,76	14,47%	25,95
10	Kawasan Peruntukan Pelabuhan	14,33	62,12	8,74	37,88	0,00	0,00%	23,07
11	Kawasan Bandar Udara	829,97	92,90	43,71	4,89	19,73	2,21%	893,41
	Total	245969,32	82,25%	38647,07	12,92	14426,64	4,82	299043,04
Rekap Kesesuaian Keseluruhan		262176,63	82,62%	38647,07	12,18	16521,28	5,21	317344,98

Sumber: DPTR DIY, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa kawasan lindung yang memiliki kesesuaian pemanfaatan ruang sudah 100% antara lain kawasan hutan lindung, kawasan sempadan waduk, kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, kawasan wisata alam, kawasan hutan raya, dan kawasan hutan penelitian. Sedangkan kawasan yang nilai kesesuaiannya < 100% yaitu kawasan sempadan pantai (81,13%), Kawasan Sempadan Sungai (76,49%), Kawasan cagar alam geologi (81,90%), dan kawasan rawan bencana geologi (83,96%).

Luasan dengan klasifikasi tidak sesuai, tertinggi pada kawasan lindung berada di kawasan sempadan sungai dengan luasan 1.282,65 ha dengan persentase berdasarkan luasan kawasan sempadan pantai sebesar 23,51%. Penggunaan lahan yang tidak sesuai pada kawasan sempadan sungai terdiri

dari bangunan permukiman, bangunan non permukiman, dan kolam air asin. Permasalahan bangunan di sempadan sungai juga banyak terjadi di banyak wilayah. Hal ini karena harga lahan di sempadan sungai lebih terjangkau terlebih di wilayah perkotaan padat penduduk, sehingga lebih banyak yang membangun permukiman di kawasan sempadan sungai.

Luasan dengan klasifikasi tidak sesuai kedua berada di kawasan rawan bencana geologi yang berada di Kabupaten Sleman dengan luasan 538,24 ha. Penggunaan lahan yang tidak sesuai pada kawasan tersebut berupa bangunan permukiman. Pada kawasan rawan bencana merupakan kawasan pariwisata Gunung Merapi yang saat ini sedang berkembang sehingga banyak bangunan baik permukiman maupun perdagangan jasa yang bermunculan pada kawasan tersebut, Luasan klasifikasi tidak sesuai pada kawasan sempadan pantai memiliki luasan 247,47 ha.

Kawasan budidaya yang memiliki persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan klasifikasi sesuai > 80% antara lain kawasan peruntukan hutan produksi (91,74%), kawasan peruntukan hutan rakyat (85,77%), kawasan peruntukan lahan pangan beririgasi (82,86%), kawasan peruntukan lahan pangan tidak beririgasi (84,52%), kawasan peruntukan permukiman perdesaan (86,56%), kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi (85,53%), dan kawasan bandar udara (92,90%). Sedangkan yang memiliki nilai kesesuaian dengan klasifikasi sesuai < 80% yaitu kawasan permukiman perkotaan (71,80%) dan kawasan peruntukan pelabuhan (62,12%). Sementara kawasan budidaya yang memiliki nilai kesesuaian dengan klasifikasi sesuai terendah berada di kawasan peruntukan industri dengan persentase 1,7% dengan luasan 95,18 ha. Hal ini dikarenakan jumlah investor yang masuk masih terbatas sehingga belum banyak industri yang beroperasi di kawasan peruntukan industri. Luasan Kawasan Industri yang belum terwujud sebesar 3,562,71 ha dengan persentase 63,74% dan tidak sesuai seluas 1.931,91 ha dengan persentase 34,56% dan ini merupakan yang paling tinggi diantara unsur perwujudan pola ruang lainnya. Penggunaan lahan yang tidak sesuai di kawasan peruntukan industri terdiri dari bangunan permukiman dengan luas 1.931,91. Berdasarkan lampiran

Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY 2019-2039 terkait indikasi arahan peraturan zonasi, permukiman yang diperbolehkan pada kawasan peruntukan industri berupa permukiman pekerja. Sedangkan hasil survei yang dilakukan permukiman yang ada pada kawasan tersebut merupakan permukiman penduduk yang sudah lama terbangun dan bukan merupakan pekerja di industri yang beroperasi pada kawasan tersebut. Perwujudan kawasan peruntukan industri tentu perlu untuk diprioritaskan karena luasan sesuai yang masih rendah dan luasan yang belum terwujud masih tinggi.

Sementara apabila dilihat dari luas lahannya, bahwa berturut-turut antara lain: (1) Kawasan peruntukan lahan pangan tidak beririgasi dengan luasan 10.957,28 ha yang penggunaan lahannya didominasi oleh semak dan belukar termasuk yang paling besar luasannya; (2) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dengan luasan 8.887,08 ha. Penggunaan lahan yang mendominasi yaitu tanaman semusim lahan basah. Sehingga pembangunan permukiman perlu untuk diarahkan pada kawasan peruntukan permukiman baik perkotaan maupun perdesaan; (3) Luasan belum terwujud pada kawasan peruntukan lahan pangan beririgasi dengan luasan 5.209,66 ha yang penggunaan lahannya didominasi oleh semak belukar dan lahan terbuka. Sehingga perlu adanya program yang mendorong lahan yang masih berupa semak belukar atau lahan terbuka diolah menjadi lahan pangan sesuai dengan kawasan peruntukannya; (4) kawasan peruntukan permukiman perkotaan dengan luasan 4.462,55 ha.



Gambar 3.9. Peta Kesesuaian pemanfaatan Ruang RTRW DIY Tahun 2022
Sumber: DPTR DIY, 2023

Kawasan budidaya yang memiliki luasan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan klasifikasi tidak sesuai tertinggi berada di kawasan peruntukan lahan pangan tidak beririgasi dengan luasan 4.588,22 ha, Penggunaan lahan yang tidak sesuai didominasi oleh bangunan permukiman. Luasan penggunaan lahan tersebut tiap tahunnya mengalami peningkatan, terlebih dengan rencana dibangunnya Jalan Bebas Hambatan Jogja – Bawen dan jalan bebas hambatan Solo - Jogja - Kulon Progo. Pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Bebas Hambatan Jogja – Bawen dan jalan bebas hambatan Solo - Jogja - Kulon Progo saat ini sudah dilakukan secara bertahap di Kab. Sleman. Kegiatan sosialisasi sudah dilakukan di Kab. Sleman, Kab. Bantul dan Kab. Kulon Progo. Lahan permukiman yang tergusur memiliki kecenderungan membangun permukiman baru pada kawasan peruntukan lahan pertanian.

Melandasi dari kondisi di atas dapat ditunjukkan bahwa belum sepenuhnya pola ruang terwujud. Hal ini disebabkan karena dokumen rencana tata ruang belum sepenuhnya menjadi acuan bagi sektor dalam proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut tentunya perlu untuk dilakukan peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang supaya dapat sesuai dengan peruntukan kawasannya.

9. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan – Capaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa Tata Ruang merupakan salah satu dari lima pilar yang diatur di dalamnya. Dalam proses pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Perdas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Bahwa Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten merupakan satuan ruang Kasultanan dan Kadipaten yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana dan/atau cagar budaya serta mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan/atau kelestarian lingkungan.

Pengembangan Struktur Ruang dan Pola Ruang pada Satuan Ruang Tanah Kasultanan, Satuan Ruang Tanah Kadipaten dan Satuan Ruang lainnya terintegrasi dalam Tata Ruang DIY, menuju harmoni Ruang untuk seluruh Wilayah. Kebijakan mewujudkan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten berpedoman pada Kerangka Umum Kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten. Pada Kawasan inti kota mengikuti filosofi Catur Gatra Tunggal. Filosofi Catur Gatra Tunggal meliputi:

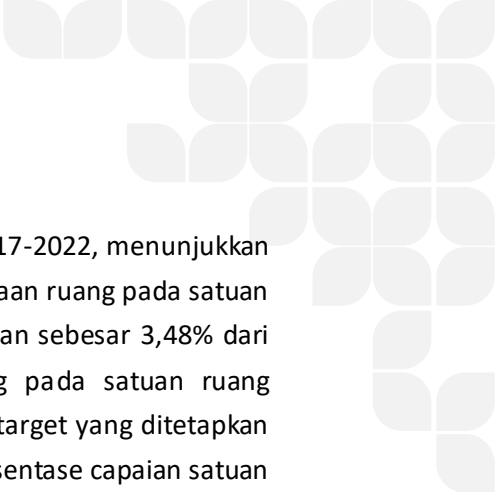
- a. Empat elemen pembentuk identitas kota, terdiri atas:
 - 1) Kraton sebagai pusat pemerintahan;
 - 2) Alun-alun sebagai pusat kegiatan sosial budaya;
 - 3) Masjid Gede sebagai pusat kegiatan spiritual; dan
 - 4) Pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi.
- b. Adanya bagian inti kota yaitu Kutha Gara.

Dalam RPJMD 2017-2022 Capaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis merupakan salah satu Sasaran Kinerja Pemda DIY dengan indikator sasaran berupa persentase penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan. Dalam proses perhitungan realisasinya memperhatikan 3 (tiga) aspek antara lain: (1) Perencanaan Ruang SRS; (2) Pemanfaatan Ruang SRS; (3) Pengendalian Ruang SRS.



Gambar 3.10. Peta Lokasi 18 Satuan Ruang Strategis

Sumber: SK Gubernur Nomor 10/KEP/2022 tentang Penetapan Delineasi Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, 2023



Tahun 2022 yang merupakan tahun akhir RPJMD 2017-2022, menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk sasaran Capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan mengalami peningkatan sebesar 3,48% dari tahun 2021. Capaian persentase penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan adalah sebesar 55,29% dari target yang ditetapkan sebesar 54,44%. Indikator ini diukur dari jumlah persentase capaian satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana rinci tata ruang, rencana induk dan RTBL, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis.

Realisasi capaian kinerja tersebut merupakan penjumlahan dari capaian beberapa aspek diantaranya jumlah Satuan Ruang Strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana Rinci (20%), Rencana Induk (1,94%) dan RTBL (2,22%) sehingga secara keseluruhan persentasenya sebesar 24,17%. Aspek selanjutnya yaitu keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan sebesar 15,56% yang terdiri dari jumlah penyusunan DED di kawasan SRS (2,78%) dan jumlah pembangunan konstruksi di kawasan SRS (12,78%). Selanjutnya aspek yang terakhir adalah pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis sebesar 15,56%.

Apabila dibandingkan dengan capaian sebelumnya, capaian tahun 2022 mengalami peningkatan pada satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa rencana rinci, rencana induk dan RTBL meningkat sebesar 0,7%, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan meningkat sebesar 1,67%, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis meningkat sebesar 1,12%. Berikut ini daftar satuan ruang strategis yang sudah mempunyai dokumen perencanaan, didorong untuk melakukan perwujudan ruang sesuai dokumen rencana dan satuan ruang strategis yang dilakukan upaya peningkatan kesesuaian sebagai berikut:

Tabel 3.17. Daftar Dokumen Perencanaan Tata Ruang di 18 Satuan Ruang Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Satuan Ruang Strategis	RTBL	Rencana Induk	RRTR
1	Karaton	2015	2014	2018
2	Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	2014 2015 2020	2015	2021
3	Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak	2014	2015	2018
4	Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	2015 2019		2018
5	Masjid Pathok Nagoro	2015	2018	2018 2019
6	Gunung Merapi		2015 2018 2022	2021
7	Pantai Samas – Parangtritis	2015 2019 2021	2014 2022	2019
8	Kerto – Pleret	2015 2020		2021
9	Kotabaru	2015	2015	2018
10	Candi Prambanan - Candi Ijo		2016	2020
11	Sokoliman	2016	2018	2021
12	Perbukitan Menoreh	2015 2018	2015 2020	2018 2019
13	Karst Gunungsewu	2014 2022	2015 2018	2019
14	Pantai Selatan Gunungkidul	2016	2019	2018
15	Puro Pakualaman	2015	2014	2018
16	Makam Girigondo	2015		2021
17	Pusat Kota Wates			2020
18	Pantai Selatan Kulon Progo		2022	2021

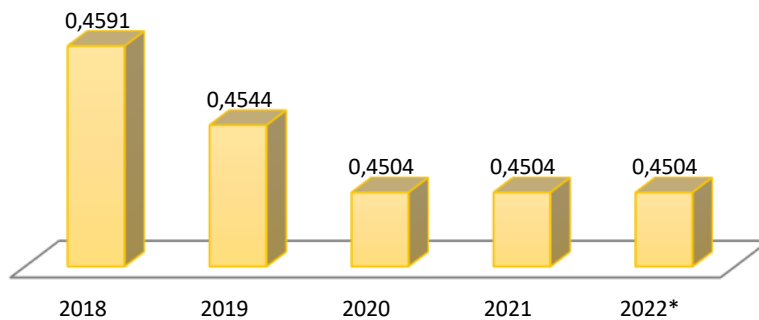
Sumber: DPTR DIY, 2023

Permasalahan yang dihadapi pada Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan, yaitu: 1) Dokumen Perencanaan Tata Ruang pada satuan ruang strategis berupa Rencana induk masih belum ditetapkan menjadi peraturan Gubernur; 2) Rencana detail Tata Ruang yang ditetapkan sampai dengan tahun 2022 berjumlah 4 (empat) dokumen dari target sebanyak 25 RDTR; 3) Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang perlu ditingkatkan.

Sementara itu, upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu: 1) Penyusunan Pergub DIY tentang Strategi Pengembangan Wilayah dan Peraturan Gubernur Rencana Induk pada Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tata ruang serta pemanfaatan ruangnya; 2) Mendorong percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang melalui pendampingan yang ditargetkan akan diselesaikan pada tahun 2025; 3) Upaya meningkatkan peran masyarakat untuk menjamin hak dan kewajiban masyarakat terutama dalam hal Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang agar terwujud pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

10. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah – Indeks Williamson

Kesenjangan merupakan permasalahan pembangunan yang kerap terjadi di suatu daerah. Secara umum kesenjangan diakibatkan oleh kepemilikan sumber daya yang berbeda maupun kondisi geografis yang bervariasi antar wilayah. Berbagai macam pendekatan digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di DIY, salah satunya adalah Indeks Williamson. Indeks Williamson dihitung dengan menggunakan PDRB per kapita yang berkaitan dengan jumlah penduduk per daerah. Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Perkembangan nilai Indeks Williamson di DIY dari tahun ke tahun dapat disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 3.11. Indeks Williamson DIY Tahun 2018-2022
*Ket.: Jumlah penduduk tahun 2018 : Proyeksi SP2010
 Jumlah penduduk 2019-2021 : Proyeksi Supas2015
 Tahun 2022 data sementara
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023*

Berdasarkan gambar di atas, nampak bahwa kesenjangan ekonomi antar wilayah di DIY berada di antara 0,35 dan 0,5. Artinya, kesenjangan ekonomi antar wilayah di DIY dapat dikategorikan dalam ketimpangan sedang. Ketimpangan menurun pada periode 2018 sampai 2022 yaitu dari Indeks Williamson 0,4591 (2018) turun menjadi 0,4544 (2019). Pada periode selanjutnya, Indeks Williamson DIY tercatat sebesar 0,4504 di tahun 2020 dan tidak mengalami perubahan hingga tahun 2022.

Capaian indikator kinerja Indeks Williamson pada tahun 2022 sebesar 0,4504, jika dibandingkan dengan target pada RKPDP 2022 sebesar 0,4575 akan diperoleh persentase capaian sebesar 101,55%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2022 yang ada di RPJMD yaitu 0,4489, tercatat persentase capaian sebesar 99,67%. Artinya capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen RKPDP 2022, namun belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2022 pada dokumen RPJMD.

11. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan – Opini BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan keyakinan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Laporan keuangan Pemda meliputi tujuh laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan Pemda disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan di dalamnya memuat Opini BPK atas laporan keuangan yang diperiksa. Opini BPK terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), Tidak Wajar (*adversed opinion*) dan Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*). Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini terbaik dan opini Tidak Menyatakan Pendapat merupakan opini terburuk yang diberikan BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada tahun 2022 BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemda DIY tahun anggaran 2021. Opini ini merupakan cerminan komitmen Pemda DIY untuk menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Opini tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk **ke dua belas** kalinya.

Meskipun demikian laporan keuangan tahun anggaran 2021 masih terdapat kelemahan terkait dengan pengendalian intern dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mempengaruhi secara material kewajaran laporan keuangan tahun anggaran 2021. Temuan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sejumlah 7 (tujuh) temuan dan 17 (tujuhbelas) rekomendasi telah ditindak lanjuti.

Keberhasilan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang saling mendukung untuk mencapai kinerja keuangan Pemerintah terbaik.
- b. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan review pada setiap proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan.
- c. Peningkatan infrastruktur yang mendukung implementasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan regulasi maupun berupa fisik sarana prasarana.

Tabel 3.18. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Opini BPK Tahun 2018-2022

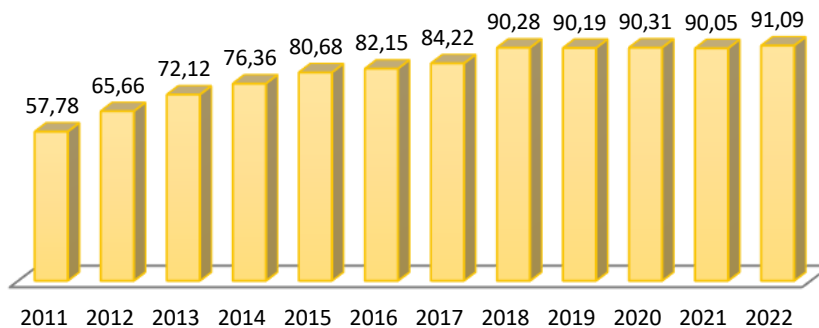
Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun									
			2018		2019		2020		2021		2022	
			Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKA DIY, 2023

12. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan – Nilai AKIP

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai *good governance*. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah agar lebih efektif dan efisien. Area akuntabilitas sebagai salah satu penguat reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai alat maupun cara untuk mempercepat reformasi birokrasi karena di dalam sistem akuntabilitas, definisi kinerja harus jelas termasuk didalamnya ukuran kinerja. Kinerja yang jelas dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun bisnis proses yang kemudian dapat disusun struktur organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Pada area penguatan akuntabilitas, kondisi yang diharapkan adalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat ditandai antara lain dengan perencanaan pembangunan yang semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, partisipatif, tepat waktu dan akuntabel; penggunaan anggaran semakin akuntabel dan transparan; serta perumusan kebijakan publik semakin responsif sesuai kebutuhan, transparan, dan partisipatif. Perbaikan terhadap akuntabilitas di Pemda DIY secara nyata telah menghasilkan peningkatan efisiensi melalui perumusan sasaran yang lebih berorientasi hasil, upaya *crosscutting* program kegiatan sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.

Predikat Nilai AKIP Pemda DIY pada tahun 2022 telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN dan RB RI Nomor B/788/AA.05/2022), yaitu pada **Predikat AA**, dengan nilai **91,09**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “sangat memuaskan”, yaitu telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, juga telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (*reform*). Sampai dengan Penilaian terakhir yang dikeluarkan KemenPAN dan RB, Pemda DIY merupakan satu-satunya institusi yang memperoleh Predikat AA yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian AKIP.



Gambar 3.12. Perkembangan Nilai AKIP Pemda DIY Tahun 2011-2022

Sumber: Bappeda DIY, 2023

Tabel 3.19. Nilai Per Komponen dalam Penilaian AKIP Tahun 2021-2022

Komponen yang Dinilai	Bobot 2021	2021	Bobot 2022	2022
a. Perencanaan Kinerja	30	27,72	30	27,95
b. Pengukuran Kinerja	25	21,95	30	26,69
c. Pelaporan Kinerja	15	13,67	15	13,94
d. Evaluasi Internal	10	9,85	-	-
e. Capaian Kinerja	20	16,85	-	-
f. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	-	-	25	22,51
Nilai Hasil Evaluasi	100	90,05	100	91,09
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		AA		AA


Sumber: KemenPAN RB RI, 2023

Nilai AKIP Pemda DIY sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, masuk dalam predikat AA, yang berarti sepanjang periode RPJMD 2017-2022 dari tahun pertama (tahun 2018) sampai tahun kelima (2022), melebihi dari yang ditargetkan dalam RPJMD, yaitu dengan target predikat A. Dari Hasil Nilai terakhir Evaluasi AKIP yang dikeluarkan KemenPAN dan RB RI pada tahun 2022, Pemda DIY memperoleh nilai 91,09. Hasil evaluasi tahun 2022 **"tidak diperbandingkan"** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kinerja penilaiannya. Evaluasi ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemda DIY tahun 2022 dari sisi perencanaan kinerja menunjukkan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) telah memperhatikan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja periode sebelumnya yang belum tercapai. Dari sisi pengukuran kinerja, telah berbasis *Balance Scorecard* (BSC) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan didukung dengan data yang andal yang dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*. Kemudian, dari sisi pelaporan kinerja tingkat Pemda dan Perangkat Daerah sudah cukup baik. Selanjutnya, dari sisi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Pemda DIY dilakukan tidak hanya untuk mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi, namun juga berdampak pada perbaikan dalam pemilihan program sampai dengan penentuan struktur organisasi yang tepat dalam mendukung kinerja. Selain itu, juga dilakukan pendampingan untuk beberapa perangkat daerah dengan pencapaian kinerja terendah sehingga terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus yang berdampak pada kinerja di level pemda.

13. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan – Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. DIY melaksanakan pemerintahan daerah diantaranya dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Selain kewenangan Pemerintahan Umum, Pemerintah juga mengamanatkan tambahan kewenangan dalam urusan keistimewaan. Status istimewa diperoleh berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD NKRI 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY memberikan amanat bahwa kewenangan dalam urusan Keistimewaan mencakup: (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan. Kewenangan dalam 5 (lima) urusan Keistimewaan tersebut diwujudkan melalui 27 (dua puluh tujuh) kegiatan.

Berdasarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dilaksanakan pembaruan pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan. 27 (dua puluh tujuh) kegiatan keistimewaan masuk ke dalam 5 program yaitu 1) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY; 2) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; 3) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan; 4) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan; 5) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang.

Sasaran “Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan” mendukung tujuan Pemda DIY kedua “Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)”. Sasaran Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan diukur dengan indikator “persentase capaian program urusan keistimewaan”. Berikut tabel realisasi fisik kegiatan pada Urusan Tata Cara, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang:

Tabel 3.20. Realisasi Fisik Kegiatan Urusan Keistimewaan Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	99,32	TERCAPAI
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	100	TERCAPAI
		Peningkatan Budaya Pemerintahan	100	TERCAPAI
		Sarana dan Prasarana Keistimewaan	100	TERCAPAI
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	100	TERCAPAI
		Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	100	TERCAPAI
		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	100	TERCAPAI
		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	100	TERCAPAI
		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	100	TERCAPAI
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	100	TERCAPAI
		3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	98,18			TERCAPAI
Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan	100			TERCAPAI
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100	TERCAPAI
		Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	100	TERCAPAI
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	97,84	TERCAPAI
		Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	100	TERCAPAI
5	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Penguatan Museum Sonobudoyo	100	TERCAPAI
		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	100	TERCAPAI
		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	100	TERCAPAI
		Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	100	TERCAPAI
		Pengembangan kearifan lokal dan potensi Budaya	99,96	TERCAPAI
		Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	100	TERCAPAI

No	Program	Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
		Pengelolaan Taman Budaya	100	TERCAPAI
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100	TERCAPAI
		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	100	TERCAPAI
		Pendidikan Berbasis Budaya	99,63	TERCAPAI

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2023

Kegiatan dapat dikatakan mencapai target jika realisasi fisik sama dengan atau lebih dari 95,00%. Dari total 27 kegiatan, terdapat 1 kegiatan yang tidak tercapai yaitu Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan realisasi fisik sebesar 92,76%. Maka realisasi sasaran “Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan” tahun 2022 sebesar 96,30% atau tercapai 105,48% dari target. Adapun target dan capaian sasaran pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.21. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Keistimewaan Tahun 2022

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Realisasi 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	%	92,31	91,30	96,30	105,48	91,30	105,48

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2023

Selama periode RPJMD 2018-2022 terjadi dinamika dalam proses pencapaian indikator kinerja sasaran “Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan”. Pandemi Covid-19 sempat menjadi faktor penghambat terbesar dalam pelaksanaan program Urusan Keistimewaan. Sinergitas antar pemangku kepentingan dari proses perencanaan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan, dan pengendalian keistimewaan merupakan faktor penting yang mendorong capaian indikator tiap tahunnya. Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan memiliki realisasi fisik terendah karena tidak tercapainya target pada pelaksanaan pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa, pendaftaran tanah desa, pendaftaran tanah kasultanan dan kadipaten, dan pengukuran tanah desa pada wilayah Kabupaten Bantul.

14. Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa – Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan

Pada RPJMD 2017-2022 salah satu Program Pemda DIY adalah Meningkatkan Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa. Dalam upaya untuk pencapaian target Program Desa tersebut tentunya melandasi pada Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten mengatur. Ruang lingkup Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Sementara untuk aspek pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi (1) perlindungan; (2) penggunaan; dan (3) pelepasan.

Berdasarkan data inventarisasi tahun 2015 bahwa bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang difasilitasi dan dikelola sejumlah 14.044 bidang, sedangkan jumlah bidang tanah desa sesuai dengan hasil inventarisasi sejumlah 50.279 bidang. Sesuai dengan Pasal 9 Perdais Nomor 1 Tahun 2017 bahwa dalam penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten perlu untuk dilakukan pentahapan antara lain (1) inventarisasi, (2) identifikasi, (3) verifikasi, (4) pemetaan, dan (5) pendaftaran. Tahapan pendaftaran sertipikat terhadap bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan. Pada tahun 2022 ditargetkan bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan sebanyak 21.877 bidang.

Pada tahun 2022 capaian bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan telah melampaui target yaitu sejumlah 22.661 bidang (103,58%) dari target sejumlah 21.877. Sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah pendaftaran bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebanyak 13.837 bidang dari target 13.877 bidang pada akhir RPJMD tahun 2022. Sedangkan untuk pendaftaran Tanah Desa telah direalisasikan sebanyak 8.824 bidang dari target 8.000 bidang pada akhir RPJMD tahun 2022.

Tabel 3.22. Capaian Data Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

No	Kabupaten /Kota	Pendaftaran										JML
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Yogyakarta	45	166	75	50	70	50	75	100	42	75	748
2	Bantul	0	171	1367	300	350	359	500	395	230	0	3672
3	Kulon Progo	0	216	176	240	350	400	400	402	151	25	2360
4	Gunungkidul	0	54	300	300	250	750	785	500	1000	0	3939
5	Sleman	0	137	252	250	250	1000	1000	202	27	0	3118
	Jumlah	45	744	2170	1140	1270	2559	2760	1599	1450	100	13837

Sumber : DPTR DIY, 2023

Berikut disajikan data capaian pendaftaran Tanah Desa pada masing-masing kabupaten/kota sampai dengan tahun 2022 antara lain:

Tabel 3.23. Capaian Pendaftaran Tanah Desa Sampai dengan Tahun 2022

No	Kabupaten	Jumlah Bidang	Bidang Sudah Sertifikat	Bidang Belum Sertifikat	Realisasi Pendaftaran Tanah Kalurahan Belum Bersertifikat (Daftar Pertama Kali)	Realisasi Tanah Kalurahan Sudah Sertifikat (Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikat / Penyesuaian Tanah Desa/Kalurahan)	Total Realisasi Pendaftaran Tanah Desa
1	Bantul	15.743	2.117	13.626	287	1.654	1.941
2	Kulon Progo	4.156	3.649	507	166	1.409	1.575
3	Gunungkidul	10.882	3.295	7.587	364	2.578	2.942
4	Sleman	19.498	7.007	12.491	324	2.042	2.366
	Jumlah	50.279	16.068	34.211	1.141	7.683	8.824

Sumber : DPTR DIY, 2023

Kendala yang dihadapi pada capaian kinerja tersebut, yaitu: 1) Terdapat bidang Tanah Desa yang masih bermasalah. Masalah tersebut antara lain belum selesainya proses administrasi tukar menukar Tanah Desa dengan tanah warga, sehingga belum dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan; dan 2) Pendaftaran pencatatan perubahan data sertifikat Tanah Desa yang berupa tanah pengganti hasil dari pelepasan Tanah Desa belum dapat diproses.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah: 1) Perlu dilakukan koordinasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa/Kalurahan dalam rangka pengumpulan bukti-bukti pelaksanaan tukar menukar Tanah Desa dengan tanah warga yang dilaksanakan sebelum tahun 1985 dan perlu diusulkan pengaturan lebih lanjut dalam revisi Pergub

Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa; dan 2) Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kantor Pertanahan terkait pelaksanaan pendaftaran pencatatan perubahan data sertifikat Tanah Desa yang berupa tanah pengganti hasil dari pelepasan Tanah Desa yang digunakan untuk kepentingan umum.

C. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMDA

Dalam pencapaian IKU Pemda DIY didukung pula dengan beberapa Program Pemda sesuai dengan *cascading* RPJMD 2017-2022. Evaluasi pencapaian indikator kinerja Program Pemda sampai dengan tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.24. Capaian Indikator Kinerja Program Pemda DIY Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Keterangan
1	Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen	14,35	13,20	19,83	150,23	Tercapai
2	Harapan Lama Sekolah	tahun	15,64	16,12	15,65	97,08	Tidak Tercapai
3	Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif	Orang	257	220	284	129,09	Tercapai
4	Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju	persen	48,83	8,98	66,79	743,76	Tercapai
5	Angka Harapan Hidup	tahun	75,04	75,49	75,08	99,45	Tidak Tercapai
6	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas	Kab /Kota	2	5	3	60	Tidak Tercapai
7	Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif	persen	30,16	21,62	32,39	149,79	Tercapai
8	<i>Total Fertility Rate</i>	Angka	1,9	2,1	1,93	108,10	Tercapai
9	Peningkatan Jumlah Desa/ Kelurahan cepat berkembang	Desa/ Kelurahan	54	60	60	100	Tercapai
10	Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (<i>Crime Rate</i>)	persen	13,73	7,33	13,31	18,42	Tidak Tercapai
11	Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru	persen	0,49	0,4	0,47	117,50	Tercapai
12	Jumlah Penduduk Miskin	Angka	474.490	278.509	463.630	33,53	Tidak Tercapai
13	Pengeluaran Per Kapita Masyarakat	Angka	17.014	14.593	17.764	121,73	Tercapai

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Keterangan
14	Persentase Peningkatan Budaya Benda yang dilestarikan	persen	14,22	15,17	15,18	100,1	Tercapai
15	Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	persen	16,89	20	20	100	Tercapai
16	Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Perdagangan	persen	39,39	46,00	40,05	87,53	Tidak Tercapai
17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	4,56	2,07	4,06	50,99	Tidak Tercapai
18	Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/ Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima)	desa	18	20	25	125	Tercapai
19	Indeks Kualitas Air	Angka Indeks	35,42	42,50	32,14	75,62	Tidak Tercapai
20	Indeks Kualitas Udara	Angka Indeks	88,57	89,74	89,16	99,35	Tidak Tercapai
21	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka Indeks	58,34	66,2	58,82	88,85	Tidak Tercapai
22	Indeks Risiko Bencana	Angka Indeks	126,34	125	119,56	104,35	Tercapai
23	Persentase Dukungan Program Pemda Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang	persen	78,66	78,70	80,26	101,98	Tercapai
24	Persentase Peningkatan PDRB Pada Kabupaten yang Belum Maju (GK, KP, Bantul)	persen	40,08	40,26	39,94	99,58	Tidak Tercapai
25	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi Pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi	persen	81,45	83	81,28	97,93	Tidak Tercapai
26	Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	100	Tercapai
27	Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY	Rupiah	13.406.469.567	9.626.994.395	28.102.350.141	292	Tercapai
28	Nilai Eksternal Pelayanan Publik	persen	84,73/ 8,473	8,8	84,30/ 8,43	95,79	Tidak Tercapai
29	Nilai internal integritas organisasi	persen	86,92/ 8,692	4,60	84,00*/ 8,4	182,61	Tercapai
30	Nilai eksternal persepsi korupsi	persen	81,8/ 8,18	6	84,3*/ 8,43	140,5	Tercapai
31	Terwujudnya Penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan	persen	N/A	100	100	100	Tercapai
32	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai dengan Perdas Kelembagaan	persen	100	100	100	100	Tercapai
33	Presentase Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	persen	74,11	88,67	98,12	110,67	Tercapai

Ket.: *) Angka sementara

Sumber: Bappeda DIY, 2023 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dari 33 indikator kinerja Program Pemda DIY, tingkat ketercapaian sampai dengan tahun 2022 terdapat 13 indikator yang belum memenuhi target atau masih di bawah 100%. Sementara indikator yang telah memenuhi target 100% terdapat 20 indikator kinerja Program Pemda. Berikut uraian pencapaian masing-masing indikator kinerja Program Pemda.

1. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, dengan indikator:

a. Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan, pendidikan nasional memerlukan pedoman penyelenggaraan pendidikan. Pedoman penyelenggaraan pendidikan tersebut mencakup delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. Capaian delapan standar SNP tersebut merupakan tolok ukur terhadap kualitas satuan pendidikan yang diwujudkan dalam rapor mutu pendidikan. Perhitungan untuk indikator capaian Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) diperoleh dari persentase jumlah SMA, SMK, dan SLB dengan nilai SNP lebih dari 90 pada tahun n-1 sampai dengan tahun n dibagi jumlah seluruh SMA, SMK dan SLB (Negeri dan Swasta) dikali 100%. Capaian pada tahun 2022 adalah sebesar 19,83%.

Tabel 3.25. Rincian Jumlah Sekolah yang Memenuhi SNP>90

Sekolah	Sekolah dengan pencapaian SNP >90		Jumlah Sekolah Total di DIY
	2021	2022	
SMA	26	8	171
SMK	21	24	209
SLB	12	0	79
Jumlah	59	32	459
Persentase:	$(59+32)/459 \times 100\% = 19,83\%$		

Sumber: BAN-P DIY, 2023

Berikut adalah perbandingan capaian Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) tahun 2022 dengan target tahun 2022.

Tabel 3.26. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	%	14,35	13,20	19,83	150,23	13,20	150,23

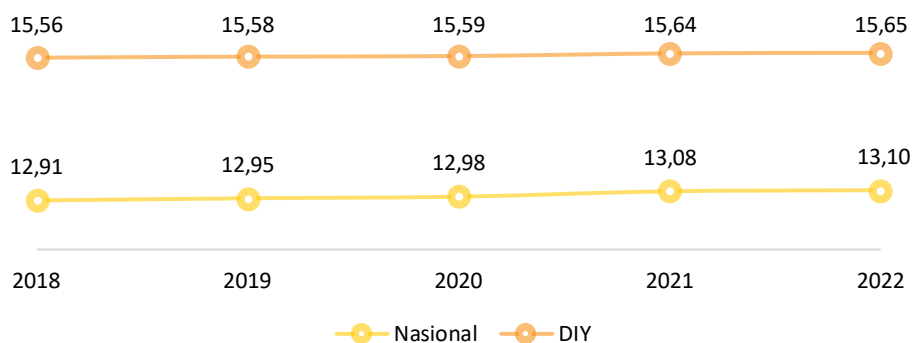
Sumber: *Disdikpora DIY, 2023*

Capaian Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Memenuhi SNP tahun 2022 telah melampaui target tahun 2022 maupun capaian tahun sebelumnya. Dukungan Pemda DIY terhadap pemenuhan ketercapaian standar-standar nasional pendidikan diwujudkan melalui penyaluran bantuan operasional bagi satuan pendidikan negeri maupun swasta, pemberian fasilitasi dalam pemenuhan sarana prasarana satuan pendidikan, pendampingan dalam manajemen operasional satuan pendidikan, serta pendampingan dan supervisi pendidik di satuan pendidikan. Diharapkan dukungan-dukungan ini dapat meningkatkan capaian pemenuhan SNP dan menjadikan seluruh satuan pendidikan di DIY memiliki kualitas tinggi.

b. Harapan Lama Sekolah

Salah satu komponen untuk mengukur kualitas sumber daya manusia pada aspek pendidikan yang dikenyam oleh seseorang yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan indeks yang digunakan BPS sebagai pengukuran lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dalam satuan tahun. Sasaran perhitungan Angka HLS adalah penduduk berusia 7 tahun ke atas. Berdasarkan data BPS, capaian angka HLS DIY tahun 2022 adalah 15,65 tahun, meningkat 0,01 poin dari capaian tahun 2021 yaitu 15,64 tahun.

Capaian Angka HLS DIY mengalami peningkatan pada periode 2018 sampai dengan 2022. Capaian ini juga melampaui capaian nasional. Berikut adalah gambaran capaian Angka HLS DIY dibandingkan dengan capaian nasional.



Gambar 3.13. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

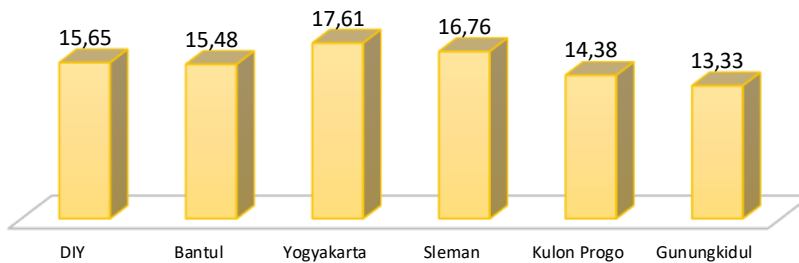
Realisasi Angka HLS DIY dan perbandingannya dengan target tahun 2022 dijabakan pada tabel berikut.

Tabel 3.27. Target dan Capaian Indikator Program Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	15,64	16,12	15,65	97,08	16,12	97,08

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Dibandingkan dengan target tahun 2022, capaian Angka HLS DIY masih sebesar 97,08% atau belum mencapai target yang ditetapkan. Salah satu penyebabnya adalah adanya ketimpangan capaian Angka HLS antar kabupaten/kota di DIY. Berikut adalah grafik capaian Angka HLS tiap kabupaten/kota dibandingkan dengan capaian Angka HLS DIY.



Gambar 3.14. Capaian Angka HLS Kabupaten/Kota dan DIY Tahun 2022 (Tahun)
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Berdasarkan grafik di atas, terdapat 3 kabupaten dengan capaian Angka HLS lebih rendah daripada capaian Angka HLS DIY yaitu kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Capaian per kabupaten/kota ini tentunya mempengaruhi capaian Angka HLS DIY sehingga belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Upaya untuk peningkatan Angka HLS yang telah dilakukan oleh Pemda DIY meliputi pemberian bantuan operasional sekolah bagi satuan pendidikan negeri maupun swasta guna mendukung penyelenggaraan pendidikan berkualitas. di samping itu, beasiswa juga telah disalurkan oleh Pemda DIY guna mendukung partisipasi penduduk usia sekolah yang kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan pendidikan jenjang sekolah menengah. Selain itu, intervensi melalui peningkatan sarana prasarana seperti transportasi, jaringan listrik dan internet khususnya di kawasan DIY bagian selatan diharapkan juga berdampak pada peningkatan akses terhadap layanan pendidikan.

c. Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif

Pembangunan kepemudaan memiliki peran penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju, berkualitas, dan berdaya saing. Pembangunan kepemudaan dilakukan Pemerintah daerah DIY melalui intervensi pada beberapa aspek pendidikan kepemudaan yang mencakup pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan. Peran pemerintah daerah sebagai

pendukung penyelenggaraan pendidikan kepemudaan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pemuda sebagai kader aktif yang mandiri dan mampu berinovasi. Besarnya jumlah pemuda di DIY tentunya membuka peluang lebih besar bagi peran serta aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan.

Indikator Peningkatan jumlah pemuda kader aktif merupakan selisih jumlah pemuda kader aktif pada tahun n dengan jumlah pemuda kader aktif pada tahun n-1.

Tabel 3.28. Jumlah Pemuda Kader Aktif 2021-2022 di DIY

Kategori	Tahun 2021	Tahun 2022
Pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan (Kwarda) dan pelatihan yang diselenggarakan organisasi kepemudaan	1.295	1.302
Pemuda yang berpartisipasi dalam pelatihan kewirausahaan (alumni pelatihan pemasaran online dan pelatihan kewirausahaan tahun sebelumnya, pelatihan pemasaran online, pelatihan kewirausahaan pemuda di kantong kemiskinan, sosialisasi kewirausahaan; partisipan Sentra Kewirausahaan Pemuda 2022)	3.014	3.229
Pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan (alumni Paskibraka, seleksi dan pembinaan Paskibraka, seleksi dan pembinaan PPAN, sosialisasi P4GN dan pelatihan pemuda kader antinarkoba)	3.215	3.277
Jumlah	7.524	7.808
Selisih jumlah pemuda kader aktif tahun 2021 dan 2022:	7.808-7.524 = 284	

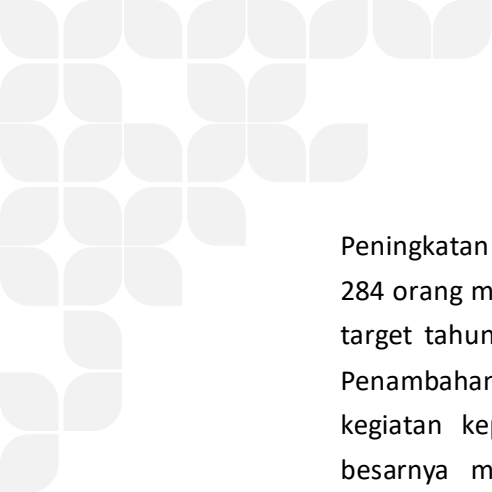
Sumber: BPO DIY, 2023

Realisasi indikator peningkatan jumlah pemuda kader aktif tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.29. Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	orang	257	220	284	129,09	220	129,09

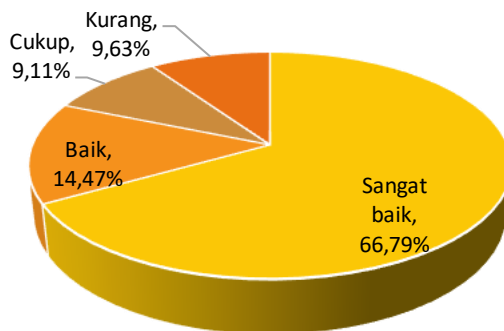
Sumber: Disdikpora DIY, 2023



Peningkatan capaian di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 sebesar 284 orang menunjukkan bahwa capaian tahun 2022 telah melampaui target tahun 2022 yang juga merupakan target akhir RPJMD 2022. Penambahan jumlah kader aktif didorong oleh semakin banyaknya kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan di tahun 2022 dan besarnya minat pemuda untuk berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan. Pelatihan kewirausahaan sebagai salah satu fokus utama pendidikan kepemudaan juga makin didorong pelaksanaannya seiring tuntutan untuk pengentasan kemiskinan. Para pemuda diharapkan dapat menjadi pelopor inovasi pengembangan potensi daerah masing-masing guna mendongkrak pembukaan lapangan kerja baru yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

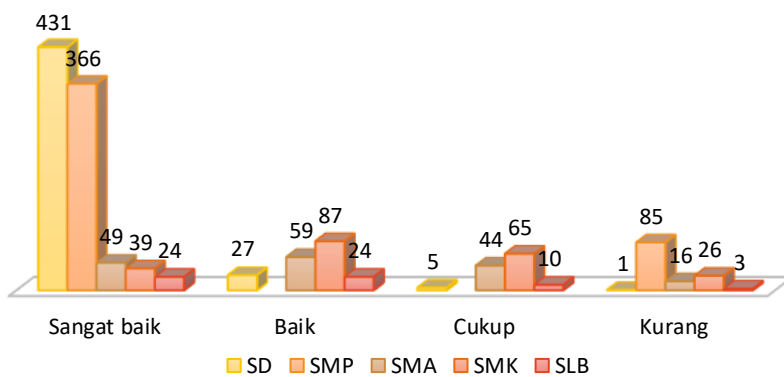
d. **Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju**

Pendidikan berbasis budaya di sekolah menjadi salah satu tolok ukur implementasi nilai-nilai budaya lokal dalam proses belajar mengajar. Segenap elemen sekolah memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam implementasi pendidikan berbasis budaya. Sekolah diklasifikasikan sebagai sekolah yang melaksanakan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju manakala telah melakukan 3 aspek yaitu mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan berbasis budaya dalam kurikulum, menyediakan sarana prasarana penunjang pembelajaran berbasis budaya, serta memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten dalam mendampingi penerapan pendidikan berbasis budaya oleh siswa. Sekolah yang telah menjalankan 3 aspek tersebut secara optimal mendapat predikat sangat baik. Berikut adalah hasil pencapaian implementasi pendidikan berbasis budaya pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan khusus di DIY sesuai hasil evaluasi tahun 2022.



Gambar 3.15. Capaian Evaluasi Pendidikan Berbasis Budaya
 Sumber: Disdikpora DIY, 2023

Sesuai dengan grafik di atas, terdapat 66,79% sekolah jenjang pendidikan dasar, menengah, dan khusus di DIY masuk ke dalam kategori sangat baik untuk pencapaian implementasi pendidikan berbasis budaya. Rincian jumlah sekolah sesuai predikat yang diraih digambarkan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 3.16. Capaian Evaluasi Pendidikan Berbasis Budaya Per Jenjang Sekolah
 Sumber: Disdikpora DIY, 2023

Tabel 3.30. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	%	48,83	8,98	66,79	743,76	8,98	743,76

Sumber: Disdikpora DIY, 2023

Capaian tahun 2022 sekaligus capaian akhir periode RPJMD sebesar 66,79% telah melampaui target tahun 2022 sebesar 8,98% dan juga telah melampaui capaian tahun 2021 sebesar 48,83%. Tingginya capaian ini dipengaruhi oleh banyaknya sekolah yang telah memenuhi standar paripurna penilaian untuk kategori tata kelola manajemen sekolah berbasis budaya, yaitu adanya personil yang kompeten dan sarana prasarana yang mendukung, maupun implementasi pendidikan berbasis budaya dalam pembelajaran baik melalui integrasi dengan mata pelajaran maupun pelaksanaan ekstrakurikuler. Dukungan yang dilakukan Pemda DIY terhadap penerapan pendidikan berbasis budaya di sekolah antara lain melalui *workshop* internalisasi nilai-nilai budaya Jawa dan *workshop* pendidikan khas Kejojjaan dengan sasaran para pendidik, penyempurnaan kurikulum bahasa Jawa di sekolah, penyelenggaraan pentas seni tradisional oleh siswa, serta pendalaman nilai-nilai tradisional Jawa oleh siswa melalui penyelenggaraan *Gladhi Kawruh* dan *Ngudhar Kawruh Tembang*.

2. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup, dengan indikator Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) adalah salah satu indikator untuk menilai derajat kesehatan masyarakat sekaligus sebagai perangkat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. AHH menjadi tolak ukur bagi pembangunan kesehatan yang dilaksanakan di DIY. Beberapa faktor yang berpengaruh diantaranya adalah pendidikan, inflasi, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan, dan sosial ekonomi.

Tabel 3.31. Target dan Capaian Indikator Program Angka Harapan Hidup Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Angka Harapan Hidup	Tahun	75,04	75,49	75,08	99,45	75,49	99,45%

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

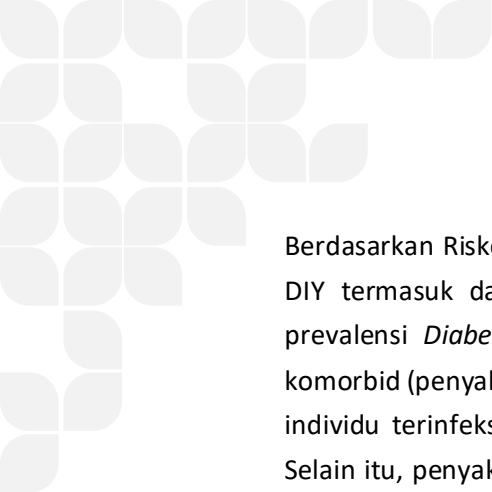
Tingginya AHH DIY ditunjang oleh perbaikan kualitas kesehatan penduduk, terutama pada kelompok bayi, balita, dan wanita berusia subur. Kualitas kesehatan Pada masa pandemi ditandai dengan kemudahan penduduk dalam mengakses sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas asupan gizi, serta berkurangnya angka kesakitan (morbiditas).



Gambar 3.17. Perbandingan AHH DIY dan AHH Nasional 2018-2022 (Tahun)

Sumber: BPS Indonesia, 2023

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk DIY konsisten mengalami peningkatan dan berada di atas capaian nasional dan masih menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya dengan capaian sebesar 75,08. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 75,49 maka tingkat ketercapaiannya sebesar 99,45%. Pemda DIY akan terus berupaya untuk meningkatkan AHH dengan berbagai upaya antara lain: menekan angka kematian (ibu, bayi, balita), perbaikan gizi masyarakat, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, serta pengendalian penyakit.



Berdasarkan Riskesdas (2018), jumlah penderita penyakit tidak menular di DIY termasuk dalam kategori tinggi di atas angka nasional, terutama prevalensi *Diabetes Mellitus*, *Hipertensi*, Kanker, Jantung yang menjadi komorbid (penyakit penyerta) yang berisiko mengalami kondisi berat ketika individu terinfeksi Covid-19 serta Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Selain itu, penyakit menular seperti HIV dan belum optimalnya penemuan kasus *Tuberculosis* masih menjadi perhatian. Kasus kematian ibu di DIY pada tahun 2022 sebanyak 43 kasus, turun dari 131 kasus pada tahun 2021. Penurunan kasus kematian Ibu seiring dengan menurunnya kasus Covid-19. Penyebab tertinggi kematian ibu pada tahun 2022 adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, serangan jantung dan penyakit tidak menular lainnya serta diperparah oleh adanya kondisi 3T (terlambat merujuk, terlambat sampai, dan terlambat mendapat pertolongan), juga kualitas kesehatan ibu hamil.

Upaya untuk menekan angka Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah dengan meningkatkan program promotif preventif terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Germas merupakan sebuah Gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat yang merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya angka PTM seperti *Hipertensi* dan *Diabetes Mellitus*.

Beberapa inovasi dalam rangka meningkatkan upaya promotif preventif, kuratif dan rehabilitatif juga dilakukan dengan tujuan untuk melakukan kontrol terhadap PTM antara lain : 1) Gendhis Manis (Gerakan Hidup Sehat Melawan *Diabetes Mellitus*) mulai dari deteksi dini sampai rehabilitatif pada penderita *Diabetes Mellitus* yang dilaksanakan di 15 puskesmas pada tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul; 2) Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM dengan melakukan deteksi dini untuk usia 15 tahun ke atas melalui pelayanan terpadu (pandu) pada penyakit tidak menular di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau rujukan dari Posbindu PTM sebagai salah satu UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat), kegiatan ini dilaksanakan di 15 puskesmas pada tiga

kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul; 3) Pelayanan terpadu terkait gangguan mental emosional dan depresi untuk melakukan deteksi dini kesehatan jiwa di 5 kabupaten/kota.

Pos Binaan Terpadu (Posbindu) juga ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas terutama posbindu institusi di lingkungan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Data Desa di DIY yang telah memiliki Posbindu sebanyak 96% dan akan ditingkatkan kualitasnya dengan berbagai upaya peningkatan kapasitas petugas dan penyediaan alat yang dibutuhkan. Upaya memperbanyak kawasan tanpa rokok juga akan terus dilanjutkan.

3. Program Pembangunan Sosial Masyarakat, dengan indikator:

a. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas

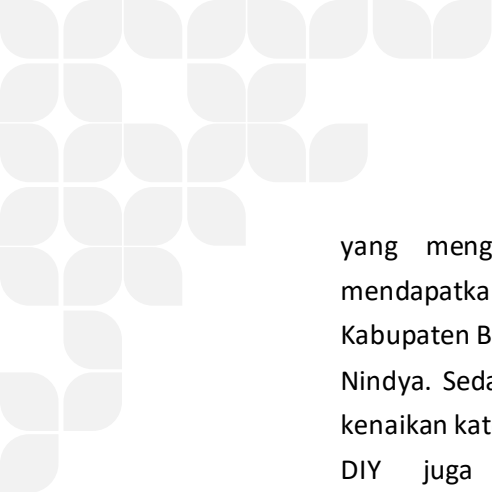
Pada Tahun 2021 Presiden Republik Indonesia menetapkan Perpres RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA, serta mengawal agar pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak menjadi pengarusutamaan dalam pembangunan. Pada tingkat Provinsi juga dikembangkan PROVILA atau Provinsi Layak Anak.

Tabel 3.32. Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas.	Kab/ Kota	2	5	3	60	5	60

Sumber: DP3AP2 DIY, 2023

Pada tahun 2022, target 5 kab/kota layak anak berkategori Nindya ke atas belum tercapai. Realisasi tahun 2022 baru mencapai 3 kab/kota layak anak berkategori Nindya ke atas. Namun, terdapat 2 Kabupaten



yang mengalami kenaikan kategori yakni Kabupaten Sleman mendapatkan kenaikan dari kategori Nindya menjadi Utama dan Kabupaten Bantul mendapatkan kenaikan kategori dari Madya menjadi Nindya. Sedangkan pada tahun 2021, Kota Yogyakarta mendapatkan kenaikan kategori dari Nindya menjadi Utama. Pada tahun 2018 Pemda DIY juga mendapatkan penghargaan sebagai Pendorong Kabupaten/Kota Layak Anak. Pada Tahun 2019 mengalami kenaikan kategori menjadi Pelopor Provinsi Layak Anak. Selanjutnya, pada tahun 2022 DIY mengalami kenaikan kategori menjadi Provinsi Layak Anak yang merupakan kategori tertinggi.

Pencapaian ini didorong oleh berbagai aktivitas yang diselenggarakan Pemda DIY, antara lain : 1) Penyusunan Data Profil Anak, 2) Pembuatan Aplikasi Data Profil Anak, 3) Advokasi KLA, 4) Pembinaan SRA, 5) Anugerah Anak Jogja, 6) Pengelolaan telekonseling TESAGA melalui wa, telepon, medsos, Surat Kabar, dan Radio, 7) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi melalui medsos, 8) Pelatihan Perlindungan Anak baik luring dan daring, 9) Penerbitan Suplemen surat kabar, 10) Temu Hati FAD, 11) Perwira Ksatriya *School of Leadership*.

b. Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

Pembangunan gender di DIY terlihat dari terjaminnya partisipasi penuh, efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin disemua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat. Hal ini di ukur dengan besaran persentase perempuan yang terlibat di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pembangunan gender di DIY dalam kondisi maju, di ukur dari capaian DIY yang selalu meningkat setiap tahun dan di atas target yang ditetapkan. Capaian Indikator Perempuan pengambilan keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada tahun 2022 sebesar 32,39% meningkat dari tahun 2021 sebesar 30,16%, dan melampaui dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 21,62%.

Tabel 3.33. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.	%	30,16	21,62	32,39	149,79	21,62	149,79

Sumber: DP3AP2 DIY, 2023

c. Total Fertility Rate

Total Fertility Rate (TFR) dihitung dari rata-rata jumlah bayi yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama usia reproduksinya, yaitu umur 15 – 49 tahun. Semakin mendekati angka TFR 2,00 memperlihatkan bahwa penduduk tumbuh seimbang, atau mendekati ideal.

Tabel 3.34. *Total Fertility Rate* (TFR) di DIY pada Tahun 2018-2021

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	2,35	2,28	n/a	1,53
Bantul	1,90	1,93	n/a	1,80
Gunungkidul	2,31	2,30	n/a	1,93
Sleman	1,85	1,82	n/a	2,06
Kota Yogyakarta	1,58	1,50	n/a	2,17
DIY	1,90	1,88	n/a	1,91

Sumber : BKKBN, 2023

Data TFR memperlihatkan bahwa, TFR DIY berada pada rentang angka 1,90-1,88 dan stabil di angka 1,91 pada tahun 2021. Angka TFR paling ideal pada tahun 2021 ditunjukkan oleh TFR Kabupaten Sleman sebesar 2,06. Untuk data TFR kabupaten/kota tahun 2022 sampai saat ini belum dirilis.

Tabel 3.35. Target dan Capaian Indikator Program *Total Fertility Rate* (TFR) Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
<i>Total Fertility Rate</i>	angka	1,9	2,1	1,93	108,10	2,1	108,10

Sumber: BKKBN, 2023

TFR menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan kependudukan DIY yang tercantum pada RPJMD DIY 2017-2022. Pada Tahun 2022 dari target 2,1 tercapai 1,93 atau terealisasi 108,10%.

d. Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dilaksanakan berdasarkan Permendagri RI Nomor 81 Tahun 2015, yaitu suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. Kinerja peningkatan Jumlah desa/Kelurahan cepat berkembang dari tahun 2022 dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 6 desa /kelurahan cepat berkembang, sehingga sampai dengan tahun 2022 terdapat sebanyak 60 Desa/Kelurahan seperti tabel berikut:

Tabel 3.36. Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Peningkatan Jumlah Desa/ Kelurahan Cepat Berkembang	Desa/ Kelurahan	54	60	60	100	60	100

Sumber: Biro Bermas Setda DIY, 2022

Tahun 2022 Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kalurahan yang terdiri dari berbagai pihak lintas sektor yang meliputi Organisasi Perangkat Daerah Pemda DIY, praktisi, dan akademisi melakukan analisis dan validasi secara berjenjang terhadap hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kalurahan. Proses ini akan menghasilkan pemeringkatan desa dan kalurahan pada kategori cepat berkembang, berkembang maupun kurang berkembang. Desa /kelurahan cepat berkembang di DIY pada tahun 2022 antara lain :

- 1) Desa/Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul;
- 2) Desa/Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;
- 3) Desa/Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman;
- 4) Desa/Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul;
- 5) Kelurahan Suryatmajan, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta;
- 6) Kelurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;

Dengan demikian secara kumulatif sampai dengan tahun 2022 terdapat 60 desa/kelurahan cepat berkembang di DIY, memenuhi target tahun 2022 yang tercantum dalam RPJMD sebanyak 60 desa, atau dengan capaian kinerja sebesar 100%.

e. **Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*)**

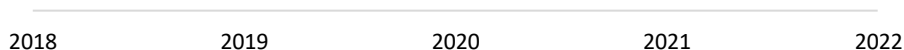
Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), dan jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan.

Angka *crime rate* menggambarkan jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan setiap 100.000 penduduk di wilayah tertentu pada satuan waktu tertentu. Penghitungan angka ini setidaknya mengacu pada angka kriminalitas yang tercatat di Kepolisian Daerah DIY dan jumlah penduduk DIY.

Secara umum situasi Kamtibmas sepanjang tahun 2020-2021 di wilayah hukum Polda DIY mengalami tren kenaikan kasus pada beberapa jenis tindak pidana dan penurunan kasus pada jenis jenis tindak pidana yang lain. Kasus tindak kriminal tahun 2020 dan 2021 didominasi tindak pidana Narkoba, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, tindak pidana KDRT, dan pencurian dengan kekerasan. Jenis kasus lain yang tetap eksis dalam jumlah kecil antara lain tindakan kekerasan seperti pengancaman, pemerasan, penganiayaan,

pemerksaan, dan pembunuhan. Jenis tindak kriminal terhadap kekayaan negara meliputi *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*, dan uang palsu terlapor sangat minim terjadi.

Jumlah kejahatan terlapor atau *crime total* yang diterima oleh Polda DIY tahun 2020 yang merupakan gabungan jumlah kejahatan terlapor dari Polres kabupaten/kota dan Polda DIY adalah 4.533 kasus. Data berkenaan pada tahun 2021 adalah 5.331 kasus dan data tahun 2022 adalah 5.166 kasus untuk angka gabungan jumlah kejahatan terlapor dari Polres kabupaten/kota dan Polda DIY.



Gambar 3.18. Perkembangan Jumlah Laporan Kasus Tahun 2018-2022 (kasus)

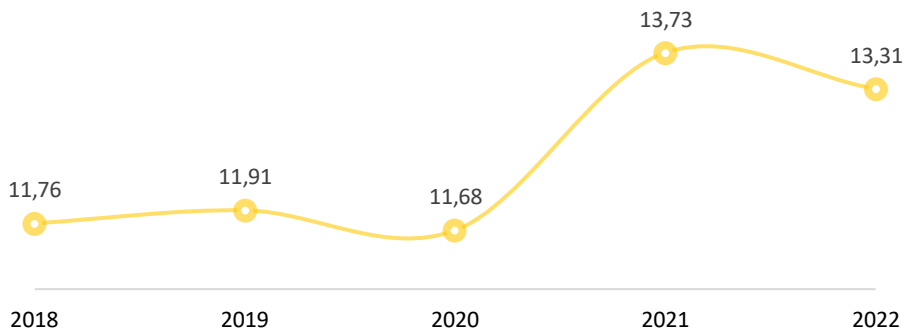
Sumber: Polda DIY dan Dataku BPPSD DIY, 2023 (data diolah)

Pada penyajian data *Crime rate* rumus yang digunakan menggunakan perhitungan angka kejahatan per 10.000 penduduk. Sehingga data *crime rate* secara series tahun 2020-2022 yang tersaji pada aplikasi Dataku adalah sebesar 13,31.

Tabel 3.37. Jumlah Tindak Kejahatan Terlaporkan dan Angka Kejahatan per 10.000 Penduduk Tahun 2018-2022

Elemen Data Kriminal	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Tindak Kejahatan Terlapor dari Polres kabupaten/ Kota dan Polda DIY (gabungan)	4.471	4.576	4.533	5.331	5.166
Angka Kejahatan per 10.000 penduduk	11,76	11,91	11,68	13,73	13,31

Sumber: Aplikasi Jogjadataku 2023



Gambar 3.19. *Crime Rate* Tahun 2018-2022
 Sumber: Aplikasi Jogjadataku 2023

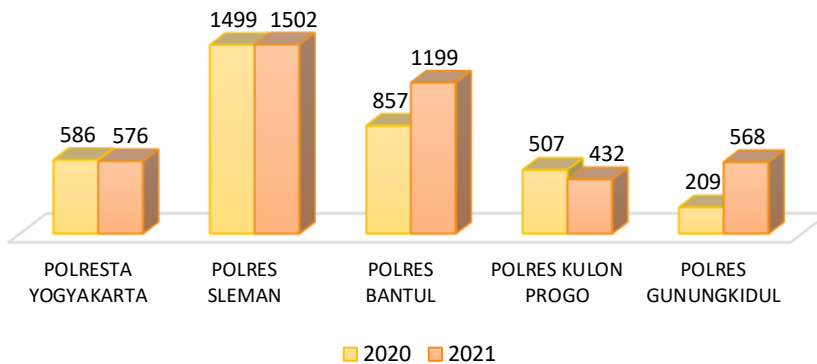
Berdasarkan data tersebut, target dan capaian indikator angka *crime rate* DIY (kejahatan per 10.000 penduduk) sesuai data *crime rate* di Aplikasi Jogjadataku yang diakses bulan Februari 2023.

Tabel 3.38. Target dan Capaian Indikator Program Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*) Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap Target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Angka Kejahatan per 10.000 penduduk (<i>crime rate</i>)	angka	13,73	7,33	13,31	18,42	7,33	18,42

Sumber: BPPSD DIY, 2023 (data diolah)

Memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Aktivitas usaha ekonomi produktif akan tumbuh pada wilayah yang memiliki iklim investasi yang ramah. Salah satu faktor dominan pembentuk iklim investasi yang ramah adalah rasa aman dan suasana kondusif.



Gambar 3.20. Jumlah Laporan Kasus per Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2021
 Sumber: Polda DIY, 2023

Wilayah Kabupaten Sleman memiliki kerawanan tindak kejahatan tertinggi dengan angka laporan kasus tahun 2020 sebanyak 1.449 kasus dan meningkat menjadi 1.502 kasus di tahun 2021 atau meningkat 3,65%. Kabupaten Bantul menempati peringkat 2 dengan angka laporan kasus tahun 2020 sebanyak 857 kasus meningkat menjadi 1.199 kasus di tahun 2021 atau meningkat 39,9%. Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan tertinggi diantara kabupaten yang lain, yaitu dari 209 di tahun 2020 menjadi 568 kasus di tahun 2021 atau meningkat 171%. Sementara di Kota Yogyakarta angka laporan kasus justru mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 586 kasus menjadi 576 kasus di tahun 2021 atau menurun 1,7%. Kabupaten Kulon Progo juga mengalami penurunan kasus, dari 507 kasus di tahun 2020 menjadi 432 kasus di tahun 2021 atau menurun 14,79%. Pada sumber data yang diakses tidak disebutkan tentang jenis kejahatan yang mengalami peningkatan dan penurunan.

4. Program Penanggulangan Kemiskinan, dengan indikator:

a. Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, Pemda DIY terus mendorong semangat kewirausahaan melalui program Desa Preneur, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi usaha, peningkatan kapasitas kewirausahaan dan kualitas SDM serta akses pemasaran produk bagi pelaku UMKM di desa. Agar wirausaha baru khususnya di wilayah pedesaan dapat terus berkelanjutan perlu adanya pembinaan dan pendampingan dari pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kapasitas, produktifitas dan daya saing sehingga bisa mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan. Selain itu, peningkatan pertumbuhan jumlah wirausaha baru juga disebabkan karena banyaknya wirausaha baru dari tenaga kerja yang mengalami putus hubungan kerja dan membuka usaha baru. Peningkatan jumlah wirausaha baru selama lima tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gambar 3.21. Perkembangan WUB Tahun 2017-2022

Sumber: Diskop dan UKM DIY, 2023

Tabel 3.39. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru	%	0,49	0,4	0,47	117,50	0,4	117,50

Sumber: *Diskop dan UKM DIY, 2023*

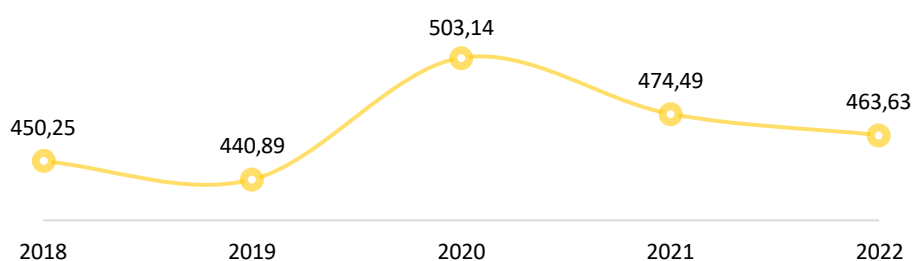
Ketercapaian Persentase Peningkatan Penumbuhan WUB tahun 2022 atas dukungan dan fasilitasi yang dilaksanakan dengan pendampingan dan pembinaan lintas sektoral, pendamping oleh PLUT dan kolaborasi *Pentahelix*. Untuk perluasan pasar juga dilaksanakan subsidi bebas ongkos kirim melalui *markethub* SiBakul yang terbukti bisa meningkatkan omset penjualan bagi pelaku KUMKM di DIY dan mampu meningkatkan jumlah anggota SiBakul; promosi dan pemasaran melalui Galeri Pasar Kota Gede YIA dan SMESCO, pameran-pameran produk UKM seperti Jendela SiBakul, Pameran Produk UMKM di destinasi wisata, Gelaran Produk UMKM SiBakul. Untuk legalitas produk UKM juga telah dilaksanakan sertifikasi produk seperti halal, PIRT, MD dan Kandungan nilai gizi.

Desa Preneur sudah dijalankan Pemda DIY dengan berbagai model seperti Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur, K45PAK (*Kiblat Papat Lima Pancer Adiluhung Kawentar*) *Giriloji* (*Gemah Ripah Loh Jinawi*) dan juga Blangkon (Bermuatan Lokal, Bersaing Global, dan Berbasis Komunal) yang dijalankan oleh Satoeasa Untuk Indonesia.

b. Jumlah Penduduk Miskin (Jumlah Penduduk Miskin (Pada Tahun n)

Kemiskinan merupakan permasalahan nasional yang saat ini penanganannya sedang menjadi fokus pemerintah baik pusat maupun daerah. Diperlukan sinergitas lintas sektor serta berbagai upaya pendekatan untuk dapat menyusun strategi intervensi yang tepat.

Berdasarkan hasil pendataan SUSENAS September 2022 diperoleh angka Garis Kemiskinan (GK) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp551.342 per kapita per bulan. Angka ini 4,98% lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2022 yaitu sebesar Rp521.673 per kapita per bulan. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebanyak 463.630 orang (11,49%), atau mengalami penurunan sebesar 10.860 orang (0,42%) dibandingkan dengan periode September 2021. Gambar berikut menunjukkan data perkembangan jumlah penduduk miskin dalam lima tahun terakhir.



Gambar 3.22. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin DIY Tahun 2018 – 2022 (Ribuan Orang)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Tabel 3.40. Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu jiwa	474.490	278.509	463.630	33,53	278.509	33,53

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Pada tahun 2022 Pemda DIY mengupayakan berbagai intervensi untuk menurunkan angka kemiskinan. Selain program-program rehabilitasi, perlindungan dan pemberdayaan sosial, di saat yang bersamaan Pemda DIY juga meningkatkan upaya perbaikan pengelolaan basis data sasaran penanganan kemiskinan. Terlebih setelah terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan

Ekstrem. Diperlukan upaya ekstra untuk menjaga ketepatan sasaran serta mencegah terjadinya maladministrasi dalam penentuan sasaran dan pelaksanaan intervensi. Selain itu Pemda DIY juga melaksanakan upaya-upaya untuk mengantisipasi dampak inflasi sebagai akibat dari kenaikan harga BBM tahun 2022.

c. **Pengeluaran per Kapita Masyarakat**

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran per kapita per tahun yang tercatat pada tahun 2022 adalah Rp17.764.488,00 lebih besar daripada target yang telah ditentukan sebesar Rp14.593.000,00 atau tingkat pencapaian targetnya adalah 121,73%. Pengeluaran per kapita per tahun mengalami peningkatan sebesar 4,41% dibandingkan tahun 2021. Kemampuan ekonomi rumah tangga di DIY cenderung mengalami penguatan jika dilihat dari perkembangan pengeluaran rumah tangga. Jumlah pengeluaran per kapita DIY Tahun 2018 hingga 2022 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.41. Jumlah Pengeluaran Per Kapita DIY Tahun 2018-2022

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran per kapita per bulan	1.302.661	1.339.726	1.411.972	1.417.870	1.480.374*
Pengeluaran Per Kapita per tahun	15.631.932	16.076.712	16.943.664	17.014.440	17.764.488

Ket.: *) Data sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Untuk target dan capaian angka pengeluaran per kapita masyarakat secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.42. Target dan Capaian Indikator Program Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Pengeluaran Per Kapita Masyarakat	Ribu Rp /tahun	17.014	14.593	17.764	121,73	14.593	121,73

Sumber: BPPSD DIY, 2023

Pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk komoditas non makanan selalu lebih besar dari komoditas makanan. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk DIY pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp1.480.374,00 per kapita per bulan (data sementara dari BPS Provinsi DIY) yang terdiri dari pengeluaran non makanan sebesar Rp851.530,00 (57,52%) dan makanan sebesar Rp628.845,00 (42,48%). Proporsi rata-rata pengeluaran non makanan tahun 2021 yaitu Rp823.248,00 per kapita per bulan. Dapat disimpulkan bahwa tahun 2022 rata-rata pengeluaran non makanan mengalami peningkatan sebesar 3,44% dibanding tahun sebelumnya. Proporsi rata-rata pengeluaran makanan tahun 2021 yaitu Rp594.622,00 per kapita per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran makanan pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 5,76% dibanding tahun sebelumnya.

5. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda, dengan indikator:

a. Persentase Peningkatan Budaya Benda yang Dilestarikan

Pelestarian Budaya Benda Pada Tahun 2022 dilaksanakan melalui beberapa aktivitas diantaranya Inventarisasi dan Dokumentasi Warisan Budaya Cagar Budaya (WBCB), Pemberian Legalitas WBCB, Rehabilitasi WBCB, Perawatan WBCB, dan Revitalisasi Situs dan Kawasan WBCB. Rehabilitasi WBCB yang dilaksanakan antara lain adalah Rehabilitasi Joglo Panembahan. Adapun perawatan WBCB dilaksanakan di Jagang

Benteng Vredeburg, Situs Kauman Pleret, Situs Sumur Gumuling, Situs Kedaton Pleret (Klaster 3), Dalem Langenastran, Tugu Pal Putih dan Panggung Krapyak, Rumah Suryoputran, Dalem Gamelan, Ketandan 9, dan Ketandan 17. Revitalisasi Situs dan Kawasan WBCB dilaksanakan di Situs Cagar Budaya Kerta, Situs Kalasan, Situs Ketandan, dan Fasad Malioboro. Upaya peningkatan pelestarian budaya benda didukung juga dengan kegiatan pembinaan dan pengelolaan serta pengembangan museum di DIY.

Tabel 3.43. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan Budaya Benda Yang Dilestarikan Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	%	14,22	15,17	15,18	100,1	15,17	100,1

Sumber: Disbud DIY, 2023

Pada tahun 2022, budaya benda yang dilestarikan meningkat sebanyak 109 (dari 718 pada tahun 2021 menjadi 827 pada tahun 2022) sehingga persentase kenaikannya adalah sebesar 15,18% atau melebihi target yang telah ditetapkan di tahun 2022 (15,17%). Bila diukur dari target capaian akhir RPJMD sebesar 15,17%, maka persentase capaian pada tahun 2022 adalah sebesar 100,1%. Kolaborasi yang baik antara Pemda dan masyarakat serta kolaborasi antara Provinsi dengan Kab/Kota yang ada di DIY merupakan faktor pendukung dalam upaya pencapaian kinerja ini.

Realisasi budaya benda yang dilestarikan pada tahun 2022 terdiri dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain Kegiatan Inventarisasi dan Dokumentasi WBCB sebanyak 50 buah, Kegiatan Pemberian Legalitas WBCB sebanyak 169 buah, Kegiatan Konservasi Benda Budaya sebanyak 240 buah, Kegiatan Perawatan WBCB sebanyak 18 buah, Kegiatan Penetapan Cagar Budaya oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kab/Kota sebanyak 105 buah, kegiatan

Pemasangan Plakat di BCB sebanyak 25 buah, Kegiatan pemberian Rekomendasi/Telaah Teknis Bentuk Arsitektur Bangunan oleh TP2WB (Kota Yogyakarta) sebanyak 140 buah, Kegiatan Registrasi Nasional (Kab. Sleman) sebanyak 60 buah, dan yang terakhir adalah kegiatan Apresiasi kelestarian dan keterawatan WBCB (Kota Yogyakarta) sebanyak 20 Bangunan dengan total keseluruhan sebanyak 827 buah budaya benda yang dilestarikan pada Tahun 2022.

b. Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan

Pelestarian budaya tak benda sebagaimana tersebut dalam Perdais Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan dilaksanakan pada obyek-obyek kebudayaan yaitu bahasa, adat istiadat, tradisi luhur dan pengetahuan dan teknologi tradisional dan nilai-nilai budaya yang telah diterapkan dalam kehidupan secara turun menurun. Pada tahun 2022 peningkatan Pelestarian Budaya Tak Benda diimplementasikan melalui pengusulan Budaya Tak Benda DIY di tingkat nasional. Sebanyak 21 buah budaya tak benda DIY telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di tingkat nasional pada tahun 2022. Selain pengusulan WBTB DIY ke tingkat nasional, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelestarian budaya tak benda diimplementasikan melalui berbagai kegiatan seperti fasilitasi terhadap upacara adat yang ada pada Desa Budaya, digitalisasi terhadap aksara Jawa agar dapat semakin mudah diakses oleh generasi milenial yang merupakan target utama dalam pengembangan tersebut, fasilitasi *event* seni terhadap kelompok seni budaya yang di bentuk oleh masyarakat, serta pemberian hibah berupa sarana dan prasarana seni budaya untuk meningkatkan kualitas kelompok seni masyarakat.

Tabel 3.44. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan	%	16,89	20	20	100	20,00	100

Sumber: *Disbud DIY, 2023*

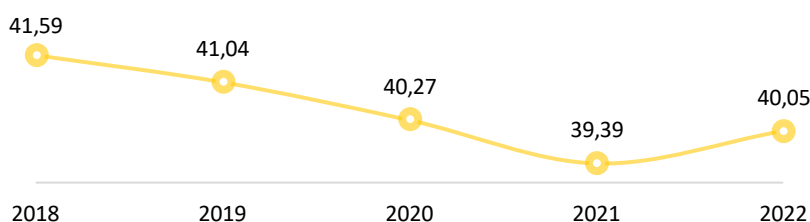
Berdasarkan tabel di atas, berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan mampu mendukung terhadap pencapaian kinerja program Pemda DIY. Pada tahun 2022, budaya tak benda yang dilestarikan meningkat sebanyak 64 (dari 313 pada tahun 2021 menjadi 377 pada tahun 2022) sehingga persentase kenaikannya adalah 20% dengan persentase capaian sebesar 100%. Realisasi budaya tak benda yang dikelola dan dilestarikan pada tahun 2022 diperoleh melalui pemberdayaan organisasi seni budaya melalui hibah sarana dan prasarana lembaga budaya sebanyak 75 organisasi seni budaya, pemberdayaan organisasi seni budaya melalui kemitraan sebanyak 17 organisasi pelestari budaya, pemberdayaan organisasi penghayat kepercayaan, adat dan tradisi sebanyak 39 organisasi, dan yang terakhir adalah pemberdayaan organisasi seni budaya melalui penyelenggaraan *event* penggiat seni sebanyak 246 organisasi.

6. Program Pengembangan Sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan, Jasa), dengan indikator:

a. Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Perdagangan dalam PDRB DIY

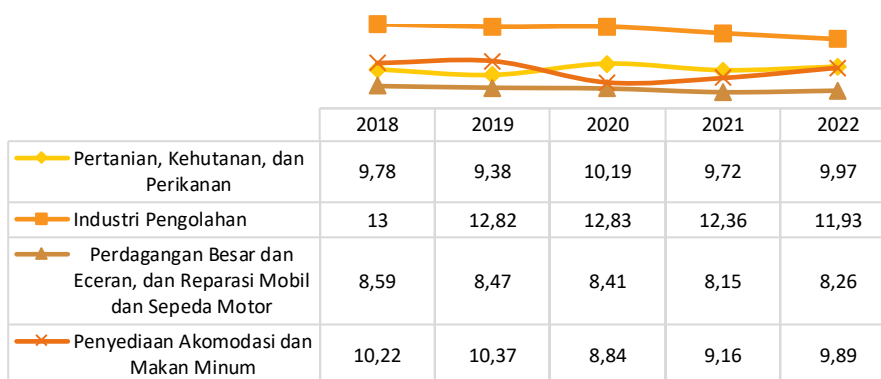
Empat sektor atau lapangan usaha yang relatif menyumbang pangsa terbesar dalam PDRB DIY selama beberapa tahun terakhir adalah Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Perdagangan. Kontribusi empat sektor atau lapangan usaha tersebut secara rerata pada periode 2018-2021 mengalami penurunan dari 41,59% (2018) menjadi 39,39% (2021), namun

kemudian meningkat di tahun 2022 menjadi 40,05%. Pada tahun 2022, sumbangan lapangan industri pengolahan yang merupakan lapangan usaha paling dominan di kelompok empat lapangan usaha tersebut yaitu 11,93%. Sementara itu kontribusi lapangan usaha lainnya secara berturut-turut adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah 9,97%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,89% dan Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah 8,26%.



Gambar 3.23. Kontribusi 4 Lapangan Usaha terhadap PDRB DIY tahun 2018 - 2022
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023 (data diolah)

Perkembangan kontribusi masing-masing sektor dominan disajikan pada grafik di atas. Perkembangan kontribusi tiap sektor atau lapangan usaha menunjukkan dinamika. Secara umum, tren sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan menunjukkan penurunan, sedangkan sektor Akomodasi dan Makan Minum serta Pertanian menunjukkan peningkatan.



Gambar 3.24. Rincian Perkembangan Kontribusi Masing-Masing Sektor 2018 - 2022
 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Tabel 3.45. Target dan Capaian Indikator Program Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Serta Perdagangan Dalam PDRB DIY Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Realisasi	% Realisasi		
Kontribusi Sektor Pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	%	39,39	46,00	40,05	87,53	46,00	87,06

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023 (data diolah)

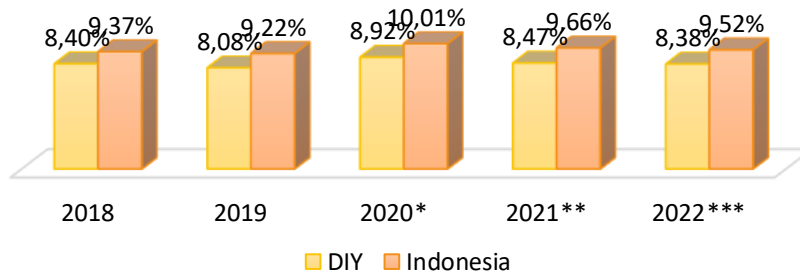
Capaian kontribusi empat sektor dominan di tahun 2022 adalah 40,05% yang mencapai sekitar 87,06% dari target sebesar 46,00%. Penurunan kontribusi empat lapangan usaha tersebut dipengaruhi oleh tren penurunan sumbangan Industri Pengolahan dari waktu ke waktu sejak tahun 2020 dan kontribusi lapangan usaha Perdagangan sejak tahun 2018.

1) Sektor Pertanian

Sektor pertanian dalam struktur PDRB DIY masuk ke dalam lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tersusun atas kategori (1) Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; (2) Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan (3) Perikanan. Kategori pertama terdiri dari sub kategori Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, serta Jasa Pertanian dan Perburuan. Sektor pertanian yang akan disampaikan adalah sub kategori Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan.

Dinamika kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB DIY sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini kecenderungannya menurun dari tahun ke tahun. Saat pandemi Covid-19 tahun 2020, kontribusinya justru mengalami peningkatan. Hal ini dapat membuktikan bahwa sektor ini resilien terhadap dampak krisis termasuk pandemi Covid-19. Sektor

pertanian selain mampu meningkatkan produksi dalam rangka menyediakan pangan yang cukup untuk masyarakat juga mampu menjadi penyerap tenaga kerja yang banyak mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).



Gambar 3.25. Kontribusi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan) terhadap PDRB DIY dan PDB Indonesia Tahun 2018-2022
 Ket.: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara ***) Angka Sangat Sangat Sementara/Angka Prediksi
 Sumber: BPS dan BPS Provinsi DIY, 2023

Pada tahun 2022 kontribusi sektor pertanian kembali menurun karena para pekerja mulai meninggalkan sektor pertanian, kembali ke pekerjaan lama atau beralih ke lapangan usaha lainnya yang mulai bangkit pasca pandemi Covid-19. Namun demikian, pertanian masih menjadi penyumbang terbesar keempat dalam PDRB DIY. Berdasarkan kondisi tersebut, sektor pertanian masih merupakan bagian dari sumber daya pembangunan yang potensial untuk dijadikan sebagai sektor strategis dalam perencanaan pembangunan daerah saat ini dan ke depan.

Kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami dinamika yang sejalan dengan kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY. Capaian DIY masih di bawah capaian Nasional, salah satunya dipengaruhi terbatasnya lahan pertanian sebagai input utama produksi.

2) *Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum*

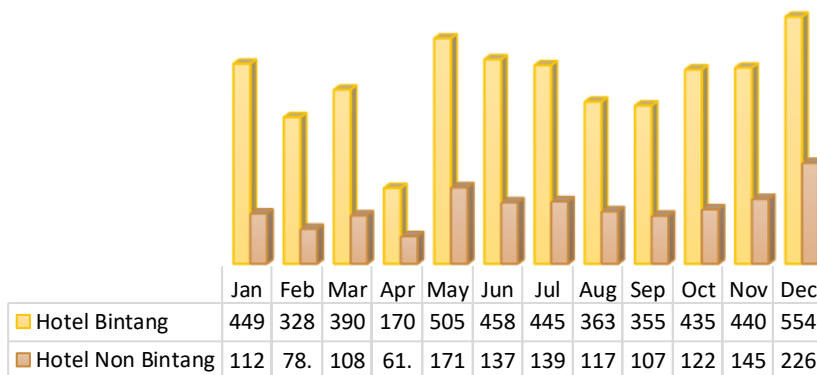
Pemulihan sektor pariwisata di DIY sejalan dengan kebijakan Pemerintah, yaitu menargetkan pasar wisatawan nusantara atau domestik menjadi fokus utama di dalam pemulihan kepariwisataan. Pemasaran pariwisata melalui media-media digital dan konvensional terus dilakukan serta beradaptasi sesuai dengan jenis pengguna informasi, agar terus dapat diakses dan diminati oleh wisatawan. Penyelenggaraan *event* kepariwisataan pada tahun 2022, dengan didukung oleh pemangku kepentingan yang terkait lainnya turut memberikan dampak kenaikan kunjungan wisatawan di tahun 2022. Kesiapan pelaku industri dan SDM pariwisata dalam menerima wisatawan juga menjadi salah satu faktor utama didalam pemulihan sektor pariwisata DIY.

Tabel 3.46. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Jumlah MICE (Kali)	Lama Tinggal/LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus			Wisman	Wisnus
2018	416.374	5.272.719	5.689.093	17.814	2,15	1,99
2019	433.027	6.116.354	6.549.381	19.370	2,31	1,99
2020	69.968	1.778.580	1.848.548	1.568	1,95	1,65
2021	14.740	4.279.985	4.294.725	6.427	2,24	1,41
2022	47.080	6.427.035	6.474.115	6.689	2,40	1,44

Sumber: BPS Provinsi DIY dan Dispar DIY, 2023 (data diolah)

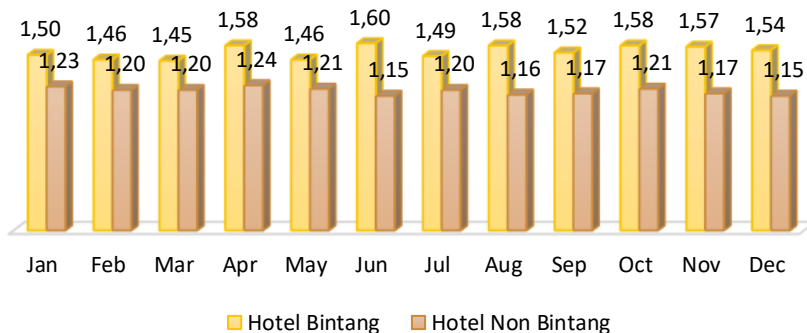
Jumlah wisatawan nusantara yang menginap di akomodasi tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 jumlah wisatawan nusantara yang menginap di akomodasi pada tahun 2022 meningkat sebesar 50,16% atau sebanyak 2.147.050 wisatawan. Wisatawan nusantara yang menginap di hotel bintang tahun 2022 mencapai 76,2% atau sebanyak 4.897.970 wisatawan, sedangkan yang menggunakan jasa hotel non bintang mencapai 23,8% atau sebanyak 1.529.065 wisatawan.



Gambar 3.26. Data Wisatawan Nusantara di DIY yang menginap di Hotel Bintang & Non Bintang Tahun 2022

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi DIY, 2023

Kunjungan Wisatawan nusantara pada tahun 2022 tertinggi terjadi pada bulan Desember, yaitu mencapai 780.525 wisatawan, sedangkan kunjungan wisatawan nusantara yang terendah terjadi pada bulan April yang mencapai 231.089 wisatawan. Grafik di atas dapat dilihat bahwa pola wisawatan nusantara datang ke DIY di titik tertinggi terjadi pada masa-masa liburan panjang, seperti liburan Idul Fitri di bulan Mei serta liburan Natal dan libur akhir tahun. Pada semester pertama (Januari-Juni) tahun 2022, kunjungan wisatawan nusantara mencapai 2.973.604 wisatawan, sedangkan pada semester kedua (Juli-Desember) kunjungan wisatawan nusantara mengalami peningkatan, sebesar 3.453.431 wisatawan.



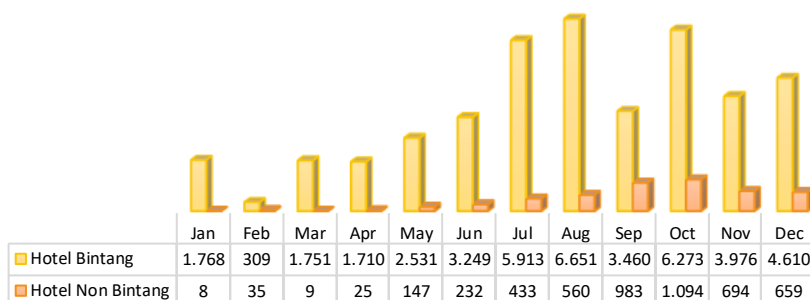
Gambar 3.27. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara yang menginap di Hotel Bintang & Non Bintang Tahun 2022

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi DIY, 2023

Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara pada tahun 2022 mencapai 1,44 hari, dengan komposisi rata-rata lama tinggal di hotel bintang 1,53 hari dan hotel non bintang mencapai 1,19 hari, sedangkan capaian rata-rata lama tinggal pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 1,41 hari. Pada semester pertama (Januari-Juni) tahun 2022, lama tinggal wisatawan nusantara mencapai 1,43 hari, yang terdiri dari rata-rata lama tinggal yang menginap di hotel bintang 1,50 hari dan hotel non bintang 1,20 hari. Pada semester kedua (Juli-Desember) lama tinggal wisatawan nusantara mengalami peningkatan, yaitu 1,45 hari, yang terdiri dari rata-rata lama tinggal yang menginap di hotel bintang 1,55 hari dan hotel non bintang 1,17 hari.

Wisatawan mancanegara yang berkunjung (menggunakan jasa akomodasi) di DIY pada tahun 2022 memperlihatkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2021. Tahun 2022 bandara YIA mulai menerima penerbangan langsung (*direct flight*) dengan rute Kuala Lumpur-YIA. Ketersediaan penerbangan langsung tersebut sangat berperan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2022 yang mencapai 47.080

wisatawan, meningkat sebesar 219% atau sebanyak 32.340 wisatawan bila dibandingkan dari tahun 2021 sebesar 14.740 wisatawan.



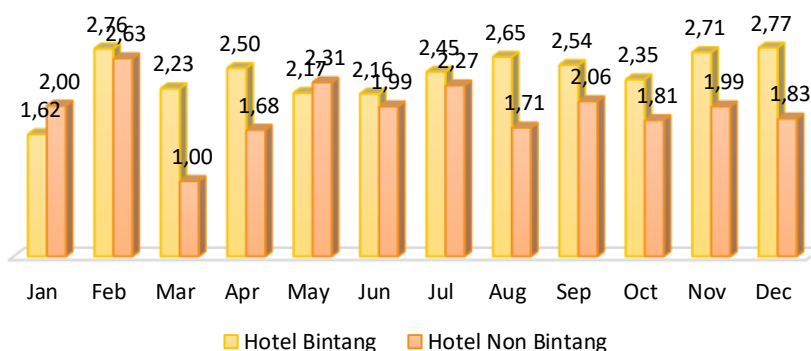
Gambar 3.28. Data Wisatawan Mancanegara di DIY yang menginap di Hotel Bintang & Non Bintang Tahun 2022

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi DIY, 2023

Dari grafik data wisatawan mancanegara (menggunakan jasa akomodasi) di atas dapat dilihat bahwa pembukaan penerbangan langsung dapat memberikan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke DIY. Pola kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat setelah bulan April. Kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi terjadi pada saat liburan musim panas (Juli-September), serta memasuki masa musim dingin (Oktober-Desember). Pada semester pertama (Januari-Juni) tahun 2022, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 11.774 wisatawan, sedangkan pada semester kedua (Juli-Desember) kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan, yaitu mencapai 35.306 wisatawan.

Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara tahun 2022 mencapai 2,40 hari. Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara di tahun 2022 telah melampaui capaian rata-rata lama tinggal di tahun 2021 yaitu 2,24 hari. Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara yang menginap di hotel bintang mencapai 2,45 hari sedangkan di hotel non bintang mencapai 1,95 hari.

Pada semester pertama (Januari-Juni) tahun 2022, lama tinggal wisatawan mancanegara mencapai 2,15 hari, yang terdiri dari rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara yang menginap di hotel Bintang 2,16 hari dan hotel non bintang 2,10. di semester kedua (Juli-Desember) rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara mengalami peningkatan, yaitu mencapai 2,48 hari yang terdiri dari rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara yang menginap di hotel bintang 2,56 hari dan hotel non bintang 1,92. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa lama tinggal wisatawan mancanegara lebih lama menginap di hotel bintang dibandingkan dengan yang menginap di hotel non bintang.



Gambar 3.29. Data Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara yang menginap di Hotel Bintang & Non Bintang Tahun 2022
 Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi DIY, 2023

3) Industri Pengolahan dan Perdagangan

Industri pengolahan merupakan Kontributor tertinggi pada PDRB DIY di tahun 2022 dengan kontribusi 11,93% atau sebesar 12,89 Triliyun Rupiah. PDRB sektor ini meningkat 1,76% dari tahun 2021. Pada tahun yang sama, sektor perdagangan juga berkontribusi cukup besar pada struktur PDRB DIY, yaitu sebesar 8,26% atau sebesar 8,78 Triliyun Rupiah dan meningkat sebesar 4,82% dari tahun sebelumnya. Sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan mampu mencapai target kinerja sebesar 90,70% dan 88,96% di tahun 2022.

Berbagai program pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka pemulihan ekonomi tentu berkontribusi pada pertumbuhan PDRB sektor industri dan perdagangan. Namun demikian pertumbuhan PDRB sektor ini terhambat karena aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan menyebabkan kurangnya permintaan produk DIY. Eropa dan Amerika yang merupakan negara tujuan ekspor utama DIY mengalami resesi, sehingga ekspor DIY ke negara-negara tersebut terkendala. Kelangkaan dan mahalnnya logistik, meningkatnya harga komoditas dunia juga menghambat ekspor DIY.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

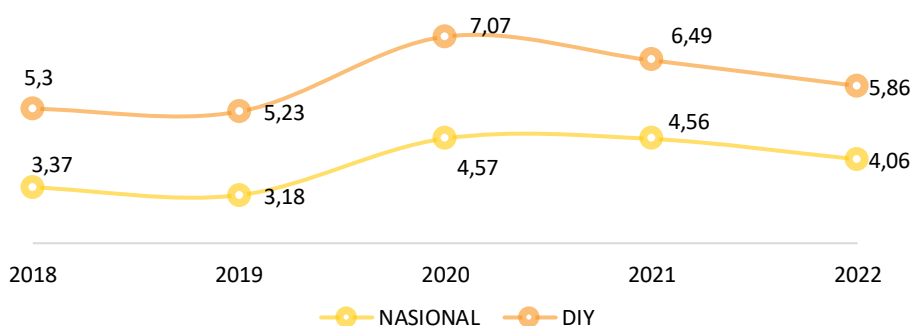
Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kerja akan berdampak pada besaran capaian TPT. Data Sakernas Agustus 2022 BPS menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan sebesar 1.121 orang menjadi 2.336.076 orang dari tahun 2021 sebesar 2.334.955 orang, sedangkan jumlah kesempatan kerja mampu tumbuh sebesar 12.608 menjadi 2.241.131 dibanding tahun 2021 yang jumlahnya 2.228.523. Kondisi ini berdampak pada turunnya jumlah pengangguran dari 106.432 orang pada tahun 2021 menjadi 94.945 orang pada tahun 2022 atau turun sebesar 11.487 orang. Meskipun jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan dan jumlah pengangguran mengalami penurunan namun posisinya masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi Covid-19, sehingga tetap diperlukan kebijakan perluasan kesempatan kerja untuk mengimbangi laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja.

Tabel 3.47. Target dan Capaian Indikator Program Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,56	2,07	4,06	50,99	2,07	50,99

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

TPT DIY cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan ekonomi yang berdampak pada terbukanya kesempatan kerja dan juga kualitas pencari kerja. Dalam kurun 2018-2022, TPT tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 4,57% naik 1,39% dari pra pandemi Covid-19 yaitu tahun 2019. Kemudian terus menurun dan mencapai angka 4,06% pada tahun 2022, turun 0,5% dibanding tahun 2021 yang capaiannya sebesar 4,65%. Namun demikian capaian TPT DIY selama lima tahun terakhir masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada periode yang sama tahun 2020 TPT nasional tertinggi 7,07% dan TPT DIY 4,57%. Pada tahun 2022 capaian TPT DIY sebesar 4,06% lebih rendah dibanding TPT nasional 5,86%, perkembangan TPT Nasional dan DIY Tahun 2018–2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.30. Perkembangan TPT DIY dan Indonesia tahun 2018 - 2022

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Target TPT yang ditetapkan dalam RPJMD pada tahun 2022 sebesar 2,07%, realisasi sebesar 4,06% atau capaian realisasi sebesar 50,99%. Tidak tercapainya target TPT ini disebabkan karena kegiatan ekonomi belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Mulai pulihnya sektor pariwisata dan dimulainya pembelajaran tatap muka/mulai masuknya mahasiswa ke DIY diharapkan secara bertahap mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. di samping itu, semua sektor perlu melakukan optimalisasi perluasan kesempatan kerja dan menjaga kondusifitas iklim ketenagakerjaan di DIY.

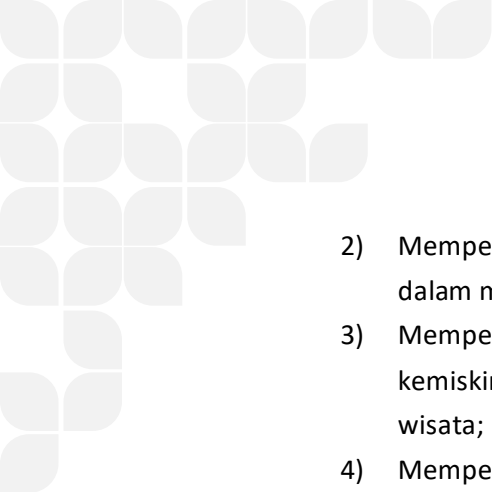
c. **Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima)**

Pemda DIY dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022 menyadari urgensi pembangunan wilayah pedesaan sehingga kemudian merumuskan strategi pembangunan pengembangan desa mandiri yang berketahanan budaya secara berkelanjutan yang dipotret melalui Desa Mandiri Budaya. Dinamika pembangunan desa memerlukan keterlibatan banyak pihak yang perlu disinergikan dan diselaraskan dalam setiap aktivitasnya. Salah satu upaya mensinergikan dan menyelaraskan aktivitas pembangunan di desa dilakukan melalui pembentukan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

Keberadaan Desa Mandiri Budaya telah diatur melalui Pergub Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Dimana Visi sekaligus menjadi definisi konseptual Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yaitu “Desa mahardika, berdaulat, berintegritas dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai keistimewaan, melalui pendayagunaan segenap kekayaan, sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warganya dalam *ke-bhinneka-tunggal-ika-an*.” Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dibentuk dari Desa/Kalurahan Budaya yang di dalamnya terdapat aktivitas pariwisata, pemberdayaan usaha kecil menengah, dan pemberdayaan perempuan, sehingga Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/kegiatan Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa Prima dan Desa *Preneur*.

Dalam upaya pencapaian visi dari Desa/Kalurahan Mandiri Budaya tersebut, terdapat enam misi yang akan dilakukan untuk mencapai Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, yaitu:

- 1) Mewujudkan kemandirian desa dalam mensejahterakan masyarakat desa melalui pengembangan budaya, wisata, partisipasi secara inklusif terhadap perempuan, pengembangan wirausaha desa, dan ketahanan pangan;

- 
- 2) Memperkuat potensi desa sebagai benteng pelestarian budaya dalam menghadapi arus global;
 - 3) Memperkuat sistem kelembagaan desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui ketahanan pangan, kewirausahaan, dan wisata;
 - 4) Memperkuat sistem informasi desa sebagai ruang sosialisasi, promosi, dan pemasaran desa;
 - 5) Memperkuat kapasitas pengelola desa dan organisasi-organisasi di tingkat desa dari sisi intelektual maupun keterampilan dalam pengelolaan desa; dan
 - 6) Memperkuat tata nilai dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketenteraman.

Desa/Kalurahan Mandiri Budaya sebagai integrasi dari empat pilar yaitu desa budaya, desa wisata, desa prima, dan desa preneur. Pembentukan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya ini merupakan salah satu wujud kolaborasi lintas sektor dengan fokus dan lokus yang jelas, sehingga diharapkan desa bisa menjadi lebih berdaya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Hal ini juga terkait dengan keberadaan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang diharapkan dapat menjadi desa otonom yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri melalui pendayagunaan dan pemanfaatan segenap sumber daya internal desa dan eksternal (supra-desa) untuk mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya (benda dan/atau takbenda) yang dimilikinya melalui pelibatan partisipasi aktif warga dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemda DIY berupaya terus mendorong tumbuhnya Desa/Kalurahan Mandiri Budaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketenteraman warga masyarakat DIY. Harapannya dengan kemunculan desa/kalurahan Mandiri Budaya ini, masyarakat bisa secara otonom mengembangkan potensi dan kekayaan desanya untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan warga. Pertumbuhan ekonomi masyarakat

desa berada di tangan masyarakat, sehingga masyarakat harus berperan dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berbudaya serta berdaya guna sehingga mampu menghidupi masyarakatnya tanpa merasa berat. Kesadaran untuk menumbuhkan ekonomi inilah yang harus dipupuk oleh masyarakat.

Pada tahun 2020, Pemda DIY melalui KepGub DIY Nomor 364/KEP/2020 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020 telah menetapkan 10 Desa/Kalurahan sebagai Desa/kalurahan Mandiri Budaya. Sedangkan untuk tahun 2021, Pemda DIY telah menetapkan 8 Desa/Kalurahan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 383/KEP/2021 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021.

Dalam rangka mewujudkan sistem penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang mengutamakan akuntabilitas dan kredibilitas, maka pada tahun 2022 Tim Penilaian dan Monitoring Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang terbentuk melalui KepGub Nomor 28/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Monitoring Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun Anggaran 2022 telah menyusun mekanisme dan tata cara penilaian menggunakan sistem borang dimana Desa/Kalurahan diwakili perangkat desa melakukan penilaian secara mandiri/ *self assesment*. Sistem penilaian yang disusun harapannya mampu mengkombinasikan penilaian secara *top down* dan *bottom up*. Selain itu, mekanisme penilaian yang dilakukan bersifat *evidence based* dimana penilaian didasarkan pada bukti dokumen yang disampaikan oleh Desa/Kalurahan. Sebagai pedoman sekaligus dasar pelaksanaan penilaian dan pemeringkatan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya tahun 2022, maka Tim Penilaian dan Monitoring Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya menyusun kriteria penilaian yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 30/SEKDA/VI/2022 tentang Penetapan Kriteria Penilaian Sebagai Dasar Pemberian Perangkat Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Penyusunan kriteria dimaksudkan agar pemeringkatan sebagai

salah satu pertimbangan penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel.

Berdasarkan koordinasi dan sinkronisasi Tim Penilaian dan Monitoring Evaluasi Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya Tahun Anggaran 2022 serta OPD terkait melalui KepGub Nomor 234/KEP/2022 tentang Penetapan Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022 tanggal 15 Agustus 2022, telah ditetapkan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022 dengan daftar berikut:

Tabel 3.48. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang Ditetapkan Pada Tahun 2022

No	Desa/Kalurahan	Kabupaten	Peringkat
1	Panggunharjo	Bantul	Utama
2	Gilangharjo	Bantul	Utama
3	Kemadang	Gunungkidul	Utama
4	Sinduharjo	Sleman	Utama
5	Sendangmulyo	Sleman	Utama
6	Semanu	Gunungkidul	Utama
7	Trimurti	Bantul	Utama

Sumber: Biro Adm. Perekonomian dan SDA Setda DIY, 2023

Tabel 3.49. Target dan Capaian Indikator Program Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima) Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemd	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Desa mandiri budaya	Desa/ Kelurahan	18	20	25	125	20	125

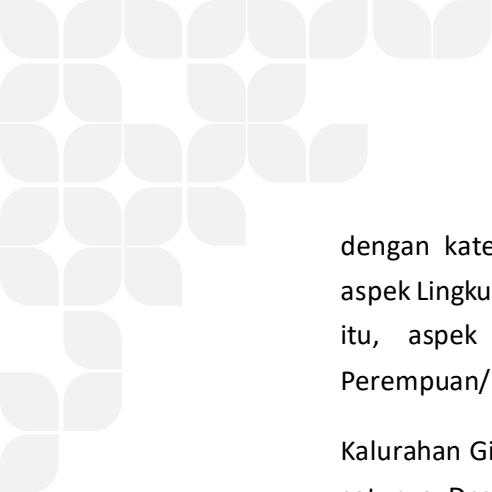
Sumber: Disbud DIY, 2023

Jumlah Desa Mandiri Budaya yang telah ditetapkan dengan KepGub sampai dengan tahun 2022 adalah 25 desa/kalurahan. Dari jumlah tersebut, terdapat 15 Desa Mandiri Budaya dengan klasifikasi Utama yaitu Bejiharjo Gunungkidul, Pagerharjo Kulon Progo, Putat Gunungkidul, Pandowoharjo Sleman, Girikerto Sleman, Wedomartani Sleman, Sabdodadi Bantul, Tuksono Kulon Progo, Panggunharjo Bantul, Gilangharjo Bantul, Kemadang Gunungkidul, Sinduharjo Sleman, Sendangmulyo Sleman, Semanu Gunungkidul dan Trimurti

Bantul. di samping itu, terdapat 10 Desa Mandiri Budaya dengan peringkat Madya yaitu Jatimulyo Kulon Progo, Margodadi Sleman, Bangunkerto Sleman, Banjarharjo Kulon Progo, Jerukwudel Gunungkidul, Tanjungharjo Kulon Progo, Hargomulyo Kulon Progo, Bangunjiwo Bantul, Giring Gunungkidul, Glagah Kulon Progo.

Untuk mengetahui sejauh mana dampak dari penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, maka telah dilakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Pada tahun 2022, pelaksanaan pemantauan evaluasi dilaksanakan melalui 4 metode, yaitu penilaian terhadap paparan perangkat desa/kalurahan terkait penyelenggaraan kebijakan, metode dokumentasi, metode survey, serta metode wawancara dengan instrumen serta metode diskusi dengan perangkat desa/kalurahan. Rekomendasi kebijakan penyelenggaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim. Selain itu, hasil evaluasi juga akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan berkaitan dengan kelanjutan program Desa/Kalurahan Mandiri Budaya di masing-masing Desa/Kalurahan.

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi tersebut, Tim berpedoman pada instrumen yang telah disusun dan ditetapkan dalam KepSekda DIY Nomor 44/SEKDA/VIII/2022 tentang Instrumen Monitoring dan Evaluasi Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya pada tanggal 23 Agustus 2022. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dilakukan terhadap 18 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Desa/Kalurahan Desa Mandiri Budaya terhadap 18 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dan 2021, terdapat 1 desa dengan kategori "Sangat Baik", 11 desa dengan kategori "Baik", 5 desa dengan kategori "Cukup" serta 1 desa



dengan kategori “Kurang”. Adapun berdasar pada nilai per aspek, aspek Lingkungan dan Mitigasi Bencana masih tergolong rendah. Selain itu, aspek Pengembangan Kewirausahaan dan Pemberdayaan Perempuan/Masyarakat Miskin juga relatif masih lemah.

Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman menjadi satu-satunya Desa/Kalurahan yang mendapatkan kategori “Sangat Baik” dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya tahun 2022. Proses pemantauan dan evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang dilakukan menekankan pada aspek hasil/outcome maupun dampak yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan. Selain itu, upaya menuju kemandirian yang dilakukan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya tanpa dukungan pendanaan dari pemerintah juga menjadi poin penting dalam proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan.

Dalam upaya menuju kemandirian Desa/Kalurahan Mandiri Budaya tanpa dukungan pendanaan dari pemerintah, perlu merumuskan skenario desain pengelolaan program pada Desa/Kalurahan terkait, antara lain: bagaimana mengelola aset fisik, bagaimana mengelola aset non fisik, bagaimana memandirikan kelompok budaya, bagaimana memandirikan kelompok usaha, dan bagaimana pengguliran dan pengembangan. Selain itu keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas. Kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci mencapai target pembangunan. Sehingga perlunya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

7. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Sungai mempunyai fungsi dan peran penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan makhluk hidup. Namun sungai bersifat rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya sehingga pencemaran sungai sering terjadi terutama untuk sungai-sungai yang melintasi daerah perkotaan. Pencemaran air sungai terjadi ketika bahan pencemar sudah melampaui daya dukung dan daya tampung sungai, sehingga kemampuan netralisasi sungai tidak bisa optimal. Bahan pencemar air sungai antara lain berasal dari limbah domestik (rumah tangga), limbah industri, dan limbah pertanian yang tidak dikelola dengan baik. Disamping itu, eksploitasi sumber daya alam di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kurang bijaksana juga menjadi pendorong degradasi sungai. Untuk mengetahui adanya pencemaran sungai maka dibutuhkan suatu instrumen yang dapat memberikan deskripsi dan informasi tentang kualitas air. Indeks Kualitas Air merupakan salah satu metode yang ditetapkan untuk menilai kualitas air secara kuantitatif. Rumus IKA adalah sebagai berikut :

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

Ket :

Lij : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)

Ci : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)

IPj : Pencemaran bagi peruntukan (j)

IPJ : (Ci/Lij, C2/L2j,...)

(Ci/Lij)Maksimum : Nilai maksimum dari Ci/Lij

(Ci/Lij)Rata-rata : nilai rata-rata dari Cij/Lij

Nilai IKA diperoleh dari perhitungan nilai Indeks Pencemar (IP) dengan konsep semakin rendah nilai IP maka akan semakin baik kualitas airnya. Perhitungan IP diperoleh berdasarkan analisis 7 parameter kualitas air sungai, yaitu *Disolved Oxygen* (DO), *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Total Suspended Solid* (TSS), *Phosphat* (PO₄), *Fecal Coli*, dan *Total Coliform*. Baku mutu yang

digunakan dalam perhitungan Indeks Pencemaran adalah Baku Mutu Air berdasarkan Pergub DIY Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

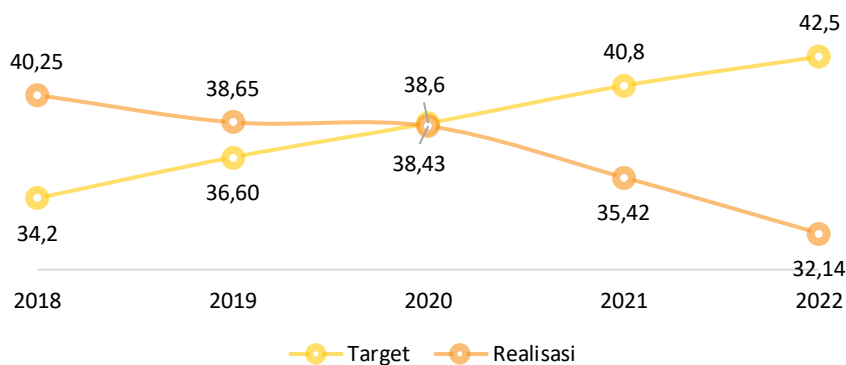
Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada 10 sungai yang menjadi kewenangan DIY yang terbagi menjadi 50 titik dengan segmen hulu, tengah dan hilir. Titik pantau ditetapkan berdasarkan pada wilayah administratif, letak geografis, sumber pencemar, *outlet* DAS, titik intake pengelolaan air minum, dan hulu sungai yang dianggap tidak banyak aktivitas manusia. Adapun 10 sungai yang menjadi kewenangan DIY adalah Sungai Winongo, Gajahwong, Code, Bedog, Konteng, Kuning, Tambakbayan, Oyo, Belik, dan Bulus. Periode pemantauan pada tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) periode yaitu bulan Juni, Agustus dan Oktober yang mewakili musim hujan, kemarau dan peralihan kedua musim. Nilai IKA DIY dari tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.50. Hasil Perhitungan Agregasi IKA DIY tahun 2018 – 2022

No	Sungai	Nilai IKA				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Winongo	37,50	43,33	43,09	35,9	22,39
2	Code	41,67	42,5	39,30	32,07	28,57
3	Gajahwong	38,33	30	37,89	29,64	27,73
4	Kuning	35,00	38,33	40,77	40,93	49,17
5	Konteng	36,67	30	25,71	27,67	32,00
6	Bedog	43,33	40,67	45	42,36	38,00
7	Belik	43,33	36,67	40	33,33	20,95
8	Bulus	43,33	40	40	33,33	40,00
9	Oyo	50,00	41,67	35	47,96	32,88
10	Tambakbayan	33,33	43,33	37,5	33,33	27,50
	Rata-Rata IKA	40,25	38,65	38,43	35,42	32,14

Sumber: DLHK DIY, 2023 (data diolah)

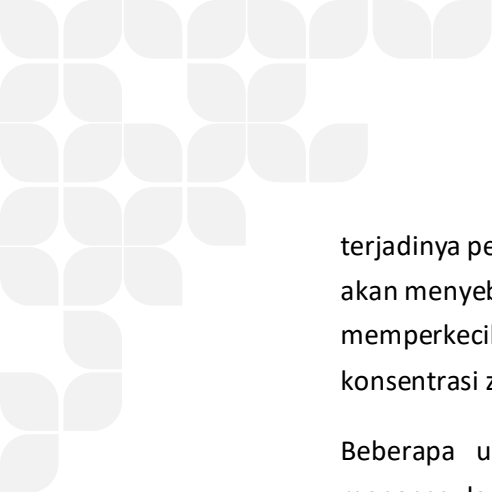
Realisasi nilai IKA DIY sebesar 32,14 tidak memenuhi target tahun 2022 sebesar 42,50. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai IKA mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tren penurunan nilai IKA dapat dilihat dalam grafik gambar di bawah.



Gambar 3.31. Target dan Realisasi IKA di DIY tahun 2018 – 2022
 Sumber: DLHK DIY, 2023

Nilai IKA cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 - 2022. Hal ini disebabkan karena kualitas air yang tercemar, dengan status ringan sampai berat, dengan parameter yang mendominasi kondisi tercemar tersebut adalah fosfat, *fecal coli form*, dan bakteri total coli yang berasal dari limbah domestik. Berdasarkan data pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan terhadap 271 titik, terdapat 50 titik pantau yang berstatus cemar berat. Dari 50 titik tersebut, terdapat 16 titik pantau di sungai winongo, dan menjadi sungai dengan jumlah titik pantau dengan status cemar berat yang terbanyak. Selain itu, beroperasionalnya industri yang ijin pembuangan limbah cairnya belum berlaku secara efektif juga berpotensi menjadi sumber pencemaran.

Seperti diketahui bahwa sungai-sungai di DIY terutama di daerah perkotaan banyak yang menjadi daerah pemukiman bantaran sungai sehingga dampak aktivitasnya berpengaruh secara langsung terhadap kondisi sungai. Kondisi sungai bergantung pada kondisi pengelolaan Daerah aliran Sungai (DAS). Namun demikian, limbah domestik tidak hanya berasal dari permukiman tetapi dapat bersumber dari kegiatan industri. Berdasarkan hasil kajian inventarisasi sumber pencemar, sumber pencemar sungai yang dominan berasal dari jasa pariwisata, diantaranya hotel dan restoran yang sebagian besar limbahnya berupa limbah domestik. Penanganan DAS yang tidak baik juga menyebabkan



terjadinya pencemaran sungai. Akibat penanganan DAS yang tidak baik akan menyebabkan berkurangnya mata air dan sedimentasi yang akan memperkecil debit air sungai. Semakin kecil debit air sungai maka konsentrasi zat pencemar akan semakin tinggi.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemda DIY dalam menanggulangi pencemaran air sungai namun demikian belum seimbang dengan laju pertambahan pencemaran yang semakin tinggi setiap tahunnya. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah:

- 1) Mengidentifikasi sumber pencemar dan melakukan pembinaan pengelolaan IPAL Komunal dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan IPAL komunal. Hal ini dilakukan terutama untuk menanggulangi pencemaran *Bakteri Coli*.
- 2) Melakukan bersih sungai bersama-sama dengan masyarakat sekitar sungai dan komunitas pemerhati sungai.
- 3) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan sampah mandiri, sehingga masyarakat dapat mengolah sampahnya dan tidak membuang ke sungai.
- 4) Melakukan Pembinaan terhadap usaha/kegiatan dalam pengelolaan air limbah, sehingga memenuhi bakumutu sebelum dibuang ke lingkungan.
- 5) Melakukan pengawasan terhadap usaha/kegiatan terhadap ketertiban dalam pemenuhan persyaratan pengelolaan air limbah sesuai dengan peraturan yang berlaku. dan memberikan sanksi jika terdapat pelanggaran.
- 6) Upaya pencegahan pencemaran juga dilakukan melalui proses pemberian rekomendasi terhadap ijin lingkungan yang akan diberikan terhadap usaha/kegiatan.
- 7) Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi lintas sektor serta dengan para pemangku kepentingan sejak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga ke monitoring dan evaluasi.

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Udara merupakan salah satu unsur penting yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya, terutama udara yang baik kualitasnya. Dari tahun ke tahun kondisi udara semakin menurun kualitasnya yang disebabkan adanya pencemaran. Udara yang tercemar memicu timbulnya penyakit dan menurunkan produktivitas manusia. Dalam udara tercemar mengandung bahan-bahan kimia yang bersifat toksik dan berpotensi menurunkan fungsi organ tubuh, sehingga menyebabkan penyakit, cacat atau dapat menurun secara genetis. Sumber pencemar yang umum terjadi di daerah perkotaan adalah dari aktivitas transportasi. Sedangkan sumber pencemar dari aktivitas industri, tambang dan alam hanya terjadi pada kondisi daerah tertentu. Pencemar udara yang bersumber dari transportasi mengandung unsur kimia CO, NO, SO, SPM (*suspended particulate matter*) dan berbagai logam berat yang dapat tersuspensi dalam udara, seperti timbal. Yogyakarta sebagai kota pelajar mengalami penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya, menyebabkan mobilitas transportasi menjadi tinggi. Di samping itu, DIY menjadi destinasi wisata budaya sehingga meningkatkan mobilitas kendaraan bermotor wisatawan di daerah perkotaan dan kawasan wisata. Dengan semakin bertambahnya sarana infrastruktur sebagai tuntutan pelayanan bagi masyarakat menyebabkan ruang terbuka hijau di perkotaan menjadi terbatas. Hal ini menambah buruk kualitas udara perkotaan karena pepohonan sebagai penetralisir udara tidak memenuhi kuantitasnya.

Untuk mengatasi pencemaran udara maka perlu intervensi agar kualitas udara tidak semakin buruk, oleh karenanya diperlukan suatu instrumen untuk mengukur kualitas udara ambien. KLHK RI telah menetapkan suatu metode untuk mengukur kualitas udara di dalam PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKU). IKU memberikan informasi secara kuantitatif yang mudah dipahami. Metode pengukuran ini diimplementasikan secara Nasional, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Indeks Kualitas Udara, terdiri dari 2 parameter, yaitu *Nitrogen dioksida*

(NO₂) dan *Sulfur dioksida* (SO₂). Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

DIY telah mengimplementasikan metode IKU untuk pengukuran kualitas udara sejak tahun 2018. Data IKU diperoleh dari agregasi data pemantauan kualitas udara secara *passive sampler* DIY dan Kabupaten/Kota. Jumlah titik pantau di DIY sebanyak 20 lokasi mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan. Adapun kriteria lokasi pemantauan kualitas udara ambien adalah: a. daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat; b. daerah atau kawasan industri; c. pemukiman padat penduduk; dan d. kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi.

Metode pengukuran kualitas udara ambien dengan IKU ada berbagai versi, dan IKU yang digunakan di Indonesia mengadopsi metode dari EU (*European Union*) yang merupakan metode pengukuran kualitas udara di Eropa. Rumus tersebut digunakan dengan asumsi bahwa data kualitas udara yang diukur merupakan data konsentrasi pencemar, sehingga harus dilakukan konversi ke dalam konsentrasi kualitas udara, dengan melakukan pengurangan dari 100%. Adapun rumus perhitungan IKU adalah:

$$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$$

Berdasarkan perhitungan Indeks kualitas udara di DIY dan Kabupaten/Kota pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.51. Data Indeks Kualitas Udara DIY tahun 2022

No	Lokasi	Rerata NO ₂	Rerata SO ₂	I _{eu}	IKU
		µg/Nm ³	µg/Nm ³	Indeks	Indeks
1	Kulonprogo	9,35	5,43	0,25	91,32
2	Bantul	14,35	6,66	0,35	86,34
3	Gunungkidul	10,26	3,74	0,22	93,23
4	Sleman	12,91	9,07	0,39	83,99

No	Lokasi	Rerata NO ₂	Rerata SO ₂	Ieu	IKU
		µg/Nm ³	µg/Nm ³	Indeks	Indeks
5	Kota Yogyakarta	12,79	4,27	0,27	90,74
IKU Rata-rata					89,16

Sumber : Analisis data kualitas udara DLHK DIY, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan rerata IKU Kabupaten/Kota diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara DIY sebesar 89,16, belum memenuhi target RPJMD (89,74). Walaupun belum memenuhi target IKU RPJMD tahun 2022, tetapi berdasarkan kriteria kualitas udara nasional, nilai IKU 89,16 masih tergolong Baik.

Tabel 3.52. Kategori Indeks Kualitas Udara

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber: PermenLHK No. 27 Tahun 2021 tentang IKLH

Jika dibandingkan dengan nilai IKU tahun 2021, maka pada tahun 2022 nilai IKU mengalami peningkatan sebesar 0,59 poin sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 3.53. Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka Indeks	88,57	89,74	89,16	99,35	89,74	99,35

Sumber: DLHK DIY, 2023

Nilai IKU tahun 2018 – 2021 fluktuatif, mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai tahun 2020, kemudian turun pada tahun 2021. Tren nilai IKU dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 3.54. Nilai IKU DIY Tahun 2018 - 2022

No	Lokasi	Nilai IKU				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kulonprogo	85,54	93,26	92,91	92,08	91,32
2	Bantul	80,51	90,90	85,18	83,28	86,34
3	Gunungkidul	94,01	79,46	93,96	93,15	93,23
4	Sleman	78,74	78,63	86,66	83,77	83,99
5	Kota Yogyakarta	82,40	84,02	86,97	90,57	90,74
Rerata IKU DIY		84,24	85,25	89,14	88,57	89,16

Nilai IKU tahun 2022 merupakan capaian tertinggi IKU selama kurun waktu 5 tahun. Kenaikan nilai IKU DIY didukung oleh kenaikan IKU dari 4 kab/Kota, sementara nilai IKU Kab. Kulon Progo mengalami sedikit penurunan. Walaupun nilai IKU mengalami kenaikan, upaya pengendalian pencemaran udara masih tetap dilakukan untuk mempertahankan kualitas udara yang baik karena kondisi udara sangat dinamis dan potensial mengalami penurunan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Nilai IKU dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait, seperti transportasi, emisi industri, ruang terbuka hijau, tata kelola perkotaan dan faktor alam meteorologi dan bencana, seperti letusan gunung berapi dan kebakaran hutan.

Upaya peningkatan kualitas udara dapat dilakukan melalui kebijakan pengendalian pencemaran udara, penerapan teknologi bersih, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, pengelolaan tata kota, penghargaan dan sanksi. Dalam upaya pelaksanaan pengendalian pencemaran udara, Pemda DIY telah melakukan pembinaan, pengawasan dan pencegahan. Pembinaan dilakukan secara rutin terhadap usaha/kegiatan dan pembinaan tindaklanjut hasil pengawasan sektor industri, pariwisata dan pelayanan kesehatan. Upaya pencegahan dilakukan melalui penerbitan rekomendasi persetujuan lingkungan usaha/kegiatan untuk mencegah munculnya usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Pemda DIY juga mendorong Kabupaten/Kota untuk membangun dan mengoptimalkan RTH perkotaan, yang berperan penting dalam netralisasi pencemaran udara.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Tutupan hutan dan lahan merupakan salah satu ekosistem yang produktif dan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Produktivitas tutupan hutan dan lahan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hasil hutan kayu maupun non kayu. Selain itu, tutupan hutan dan lahan yang berkualitas akan menjamin ketersediaan jasa lingkungan seperti sumber daya air, udara dan tempat hidup serta berkembangbiaknya flora dan fauna. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan, alih fungsi lahan potensial terjadi pada tutupan lahan bervegetasi. Untuk mengetahui eksistensi tutupan lahan bervegetasi masih berfungsi secara ekologi, maka pemerintah menetapkan suatu instrumen yang dapat mendeskripsikan secara terukur, yaitu IKTL. Berdasarkan PermenLHK Nomor 27 tahun 2021, IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.

Metode perhitungan IKTL yang disempurnakan pada tahun 2021 mempertimbangkan 3 aspek, yaitu aspek konservasi, rehabilitasi, dan karakteristik wilayah secara spasial. Untuk mengakomodir aspek-aspek tersebut maka dilakukan penyempurnaan metode IKTL dengan menambahkan beberapa parameter, yaitu tutupan vegetasi yang terdiri dari tutupan hutan, tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan, tutupan belukar dan belukar rawa pada penggunaan lain yang berfungsi lindung (sempadan sungai, danau dan pantai), tutupan vegetasi berupa RTH (hutan kota dan taman kota), kebun raya dan taman keanekaragaman hayati. Adapun rumus IKTL adalah :

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$$

Keterangan :

- 84,3 : Persentase tutupan hutan tertinggi di Papua
TH : Tutupan Hutan (tutupan vegetasi dan konversinya dibagi luas wilayah administratif)
50 dan 54,3 : Konstanta

Penjelasan rumus perhitungan IKTL ini adalah, asumsi daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 (84,23% dari luas wilayah administrasinya), sehingga nilai tutupan tertinggi diberikan kepada Papua dengan nilai 100, sedangkan daerah-daerah yang mempunyai tutupan 30% dari wilayah administrasinya diberi nilai 50.

Data IKTL pada tahun 2022 masih menggunakan data campuran sesuai dengan ketentuan RPJMD 2017 - 2022, yaitu berdasarkan SK penetapan lahan tutupan hutan negara dan data *shapefile* penggunaan lahan yang berasal dari olah data Citra satelit KLHK. Berikut luas Kawasan yang telah ditetapkan dalam SK dimaksud:

No.	SK	Luas
1.	SK Nomor 122/MENLHK/Setjen/PLA.073/2018 Tanggal 5 Maret 2018	16,787,15
2.	KPHK Tahura Bunder SK Nomor 351/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 Tanggal 21 Mei 2019	771,32
3.	SM Paliyan Gunungkidul SK 1870/Menhut-VII/KUH/2014 Tgl 25 Maret 2014	434,834
4.	CA Imogiri Bantul SK.1869/Menhut-VII/KUH/2014 Tgl 25 Maret 2014	0,01
5.	TWA Gunung Gamping SK.758/Kpts-II/1989 Tgl 16 Desember 1989	1,084
6.	TN Merapi SK.3627/Menhut-VII/KUH/2014 Tgl 6 Mei 2014	2063,18
7.	SM Sermo SK. 3112/Menhut-VII/KUH/2014 Tgl 25 April 2014	184,99

Hasil perhitungan luas dan konversi penggunaan lahan tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.55. Data Luas dan Hasil Konversi Penggunaan Lahan Tahun 2022

No	Penggunaan Lahan	Luasan (ha)	Faktor Konversi	Hasil Konversi
1	Hutan Produksi	13.421,000	1	13.421,000
2	Hutan Lindung	2.160,000	1	2.160,000
3	Hutan Rakyat	79.249,990	1	79.249,990
4	Cagar Alam Geologi	145,179	1	145,179
5	Cagar Alam	11,820	1	11,820
6	Taman Wisata Alam	1,080	1	1,080
7	Taman Hutan Raya	771,320	1	771,320
8	Taman Nasional	2.050,040	1	2.050,040
9	Hutan Penelitian	101,645	1	101,645
10	Suaka Marga Satwa	619,820	1	619,820
11	Rehabilitasi dan Konservasi lahan (data KLHK)	3081,476	1	3081,476
12	Hutan Adat	22,30	1	22,30

No	Penggunaan Lahan	Luasan (ha)	Faktor Konversi	Hasil Konversi
13	Taman Kehati	47,8	1	47,8
14	Perkebunan	73777,935	0,4	29511,174
15	Lahan Pangan Tidak Beririgasi	4296,275	0,1	429,6275
16	Sempadan Pantai	1691,622	0,6	1014,973
17	Sempadan Sungai	4503,196	0,6	2701,918
18	RTH	4613,319	0,6	2767,991
	TOTAL			125.962,489

Ket.: *) Data RTH merupakan data Kajian Feasibility Study RTH di DIY Tahun 2018 oleh BLH DIY

Sumber: Olah data citra satelit KLHK yang dioverlaykan terhadap shapefile kemiringan lahan DLHK DIY tahun 2022

Berdasarkan rumus IKTL, maka hasil perhitungan berdasarkan data tutupan lahan tahun 2022 sebagai berikut :

$$IKTL = 100 - [(84,3 - (0,395 \times 100)) \times 50 / 54,3]$$

$$IKTL = 58,82$$

Capaian IKTL tahun 2022 sebesar 58,82 yang termasuk dalam kategori sedang. Adapun target IKTL dalam RPJMD tahun 2022 adalah 66,2 sehingga realisasi IKTL belum mencapai target. Salah satu faktornya adalah metode penghitungan IKTL di DIY disempurnakan sejak tahun 2021 dengan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu aspek konservasi, rehabilitasi, dan karakteristik wilayah secara spasial. Apabila dibandingkan dengan realisasi IKTL tahun 2021 sebesar 58,34, realisasi IKTL tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,48 poin. Kenaikan berasal dari penambahan data jenis tutupan lahan dan data *shapefile* olahan citra tahun 2022 yang terupdate dari tahun sebelumnya. Penambahan jenis tutupan lahan tahun 2022 adalah Rehabilitasi Hutan dan Lahan hasil perhitungan KLHK dan Hutan Adat. Kenaikkan data IKTL dari tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.56. Target dan Capaian Indikator Program Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kualitas tutupan Lahan (IKTL)	Angka Indeks	58,34	66,2	58,82	88,85	66,20	88,85

Sumber: DLHK DIY, 2023

Nilai IKTL cenderung tetap dari tahun ke tahun, jika ada kenaikan atau penurunan perbedaannya tidak signifikan. Permasalahan rendahnya penambahan luas tutupan vegetasi antara lain adalah kurangnya anggaran untuk penyediaan lahan RTH di Kabupaten/Kota. Alternatif penyelesaiannya adalah mengusulkan *kekancingan* tanah SG untuk lahan RTH. Nilai IKTL tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 3.57. Nilai IKTL tahun 2018 – 2022

IKTL	2018	2019	2020	2021	2022
Target	55,5	58,18	60,86	63,05	66,2
Realisasi	60,86	59,7	58,32	58,34	58,82

Sumber: DLHK DIY, 2023 (data diolah)

Jenis tutupan lahan di DIY beragam dengan luas total 125.962,489 hektar atau sebesar 39,5% setelah dikonversi dalam *performance* hutan. Berdasarkan luas kecukupan hutan di suatu daerah, maka tutupan lahan dan hutan di DIY sudah mencukupi. Namun demikian, luasan tutupan ini bersifat dinamis dan potensial mengalami penurunan karena luas tutupan terbesar adalah hutan rakyat. Seperti diketahui bahwa hutan rakyat merupakan hutan hak, sehingga dapat beralih fungsi sewaktu-waktu karena kewenangan penggunaannya menjadi hak pemilik lahan. Untuk mempertahankan fungsi tutupan pada hak milik masyarakat ini, upaya yang telah dilakukan Pemerintah antara lain dengan memberikan bantuan bibit tanaman. Selain itu juga dilakukan pembinaan, sosialisasi serta pelatihan-pelatihan dengan tujuan untuk menambah wawasan dan keterampilan masyarakat dalam pelestarian hutan, pemanfaatan bawah tegakkan, dan pengolahan hasil hutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

d. Indeks Risiko Bencana

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah bagian dari pemenuhan hak warga. Oleh karena itu, Penanggulangan Bencana bencana bagian dari Sub Urusan Trantibunlinmas yang merupakan 1

dari 6 urusan wajib pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan menghadirkan ketangguhan daerah, mengelola, dan meminimalisir risiko bencana. Ukuran atau indikator yang disepakati untuk menilai kemajuan dari pencapaian tujuan itu adalah Indeks Risiko Bencana. Indeks Risiko Bencana (atau dikenal dengan IRBI = Indeks Risiko Bencana Indonesia) dihitung berdasar rumus dasar Risiko = (ancaman x kerentanan) : kapasitas.

Pada perhitungan IRBI selama ini yang dikoordinasi oleh BNPB, faktor/variabel ancaman dan kerentanan dianggap konstan, yang dinilai dinamis adalah faktor/variabel kapasitas.

Penilaian IKD untuk Kabupaten/Kota se-DIY ini merupakan upaya bersama untuk menilai kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh DIY, yang secara agregat nantinya akan dinilai seberapa laju kinerja pengurangan risiko bencana di DIY dari tahun ke tahun. Hal ini sekaligus sebagai wujud akuntabilitas kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tabel 3.58. Target dan Capaian Indikator Program Indeks Risiko Bencana Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemd	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2022 terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Risiko Bencana	Angka Indeks	126,34	125	119,56	104,35	125	104,35

Sumber: Penilaian IRBI tahun 2022 (Surat BNPB Nomor: B-002/BNPB/PERB/SS.01.02/01/2023)

1) Analisis capaian

Data untuk perhitungan IRBI sejak Tahun 2018 berbasis data Kabupaten dengan 7 (tujuh) ancaman bencana. Nilai IRBI pada dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan. Hal tersebut mengkonfirmasi keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY yang mampu menurunkan nilai risiko bencana. Pada tahun 2021 nilai IRBI DIY sebesar 126,34 dan membaik pada tahun 2022 dengan nilai IRBI sebesar 119,56.

Faktor/variabel kapasitas dalam IRBI didapat dari nilai IKD (Indeks Ketahanan Daerah) yang terdiri dari 7 prioritas dan 71 indikator. Dalam hal untuk menghitung IRBI DIY adalah dengan merangkum dan mereview nilai IKD kab/kota se DIY. Indeks risiko bencana (IRBI) di DIY pada tahun 2021 berdasarkan rilis BNPB nilainya sebesar 126,36. Skor IRBI 126,36 menunjukkan bahwa risiko bencana di DIY pada kategori sedang. Kabupaten Kulon Progo dan Bantul memiliki indeks risiko bencana kategori tinggi (masing-masing dengan skor 180,80 dan 157,30 pada tahun 2021). Sedangkan Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta indeks risiko bencananya masuk dalam kategori sedang.

Klasifikasi tingkat indeks risiko bencana ini menggunakan klasifikasi indeks nasional sebagai berikut:

Tabel 3.59. Klasifikasi Indeks Risiko Bencana

Total Skoring	Klasifikasi Tingkat Risiko	Warna (di Peta)
< 130	Tingkat Risiko Rendah	Hijau
130 – 144	Tingkat Risiko Sedang	Kuning
> 144	Tingkat Risiko Tinggi	Merah

Sumber: Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012

Ke depannya sampai tahun 2027 target penurunan indeks risiko bencana 1,5% - 2% setiap tahunnya. Tercatat ada 9 ancaman bencana prioritas dari total 14 ancaman bencana yang terdapat di DIY, diantaranya adalah gunung berapi, banjir, tanah longsor, gempa bumi, cuaca ekstrim, kekeringan dan tsunami. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 juga berpengaruh terhadap risiko bencana di DIY. Kerentanan bencana di DIY meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan. Kapasitas dalam menghadapi bencana di DIY belum merata dan belum semua aspek peningkatan kapasitas terpenuhi. Efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, serta kolaborasi multi-aktor (*pentaheliks*) masih belum optimal.

2) Analisis Tingkat Risiko (R)

DIY memiliki indeks risiko bencana dan jumlah jiwa terpapar yang cukup tinggi. Salah satu dasar diperlukannya upaya penanggulangan bencana adalah dengan melihat kejadian bencana yang pernah terjadi di DIY. Berdasarkan data kejadian bencana dari DIBI terdapat 16 jenis bencana alam pernah terjadi di wilayah DIY dalam kurun waktu tahun 2017-2021. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat.

Tabel 3.60. Kecenderungan Kejadian Bencana di DIY Tahun 2017-2021

No	Kejadian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tanah Longsor	1.097	216	506	436	351
2	Tsunami	0	0	0	0	0
3	Gelombang Pasang dan Abrasi	4	1	2	1	0
4	Banjir	14	12	12	13	12
5	Gempa Bumi	89	124	122	135	245
6	Kekeringan	1	1	1	1	0
7	Erupsi Gunung Api	0	12	4	9	2
8	Banjir Bandang	0	0	0	0	0
9	Angin Kencang	89	147	168	162	156
10	Kegagalan Teknologi	0	0	0	0	0
11	Epidemi & Wabah Penyakit	0	0	0	0	0
12	Pandemi Covid-19	0	0	1	1	1
13	Likuifaksi	0	0	0	0	0
14	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	50	199	35	18
15	Kebakaran Gedung dan Permukiman	343	217	343	205	169
16	Konflik Sosial	0	1	1	0	0
	Total	1.637	781	1358	998	954

Sumber: Hasil Analisis 2021

Dari catatan kejadian bencana DIBI, diketahui bahwa wilayah DIY memiliki potensi terjadi 9 jenis bencana, yang tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi lagi. Sedangkan dari hasil analisis menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG) teridentifikasi adanya potensi jenis bencana lainnya.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana juga diukur dari perhitungan kapasitas dengan menggunakan penilaian Indeks Ketahanan Daerah yang proses penilaiannya dengan proses mengisi kuisioner 7 Parameter Indeks Ketahanan Daerah. Penilaian Ketanggahan Daerah (IKD) terdiri dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Fokus prioritas dalam IKD merupakan analisis terhadap kapasitas penanggulangan bencana daerah; terdiri dari:

- a) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan,
- b) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu,
- c) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik,
- d) Penanganan tematik kawasan rawan bencana,
- e) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana,
- f) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan
- g) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah. Hasil dari penilaian terhadap 7 fokus prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.61. Hasil IKD DIY

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,96	0,63	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,90		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,55		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,70		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,53		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,61		

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,55		

Keterangan: Nilai: 0,0-0,40: rendah; 0,41-0,80: sedang; 0,81-1: tinggi

Sumber: BPBD DIY, 2023

3) **Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian**

a) **Ancaman kawasan**

DIY merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi ancaman bencana paling kompleks. Tercatat ada 7 ancaman bencana alam yang terdapat di DIY, diantaranya adalah gunung berapi, banjir, tanah longsor, gempa bumi, cuaca ekstrim, kekeringan dan tsunami. Ancaman bencana yang terdapat di Kawasan ini membuat DIY harus berbenah agar untuk meningkatkan mitigasi struktural dan non struktural dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana akan mengurangi dampak dan korban akibat bencana baik material maupun non material.

b) **Kerentanan kawasan yang terancam**

Suatu Kawasan memiliki nilai ancaman terhadap bencana yang besar apabila Kawasan tersebut memiliki potensi bencana yang tinggi (parameter fisik seperti kemiringan lereng, jenis tanah, ketersediaan air tanah, jarak terhadap sesar aktif, dll) dan memiliki tingkat kapasitas atau ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana yang rendah. Kondisi demografis masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk yang merupakan suatu keniscayaan, kecepatan perubahan lahan serta degradasi lahan harus menjadi perhatian bahwa indeks risiko merupakan angka yang bukan bersifat linier, tapi dapat berpotensi berubah tergantung pada upaya mitigasi struktural dan non struktural yang dilakukan untuk pengurangan resiko bencana.

c) Kapasitas kawasan yang terancam

Kapasitas Kawasan merupakan salah satu faktor penting dalam pengurangan resiko bencana. Dengan peningkatan kapasitas suatu wilayah di daerah rawan bencana, maka akan mengurangi dampak terhadap bencana tersebut.

8. Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang, dengan indikator Persentase Dukungan Program Pemda terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang

Pemda DIY mempunyai kewenangan melakukan upaya pembinaan dan upaya pengawasan pemanfaatan ruang, baik terhadap pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota maupun terhadap pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh Pemda DIY sendiri. Peran pembinaan Pemda DIY adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kab/kota dan instansi terkait yang memanfaatkan ruang dalam pembangunannya, sehingga dapat terwujud suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang terpadu dan sinkron antara daerah satu dengan daerah lainnya maupun antara sektor yang satu dengan sektor lainnya berdasarkan Rencana Struktur Ruang maupun Rencana Pola Ruang yang telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dengan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah, diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah, dengan upaya penyusunan indikasi program beserta pembiayaannya, namun pada pelaksanaannya seringkali tidak sejalan dengan indikasi program yang telah ditetapkan dalam RTRW. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disusun akan tetap menjadi suatu dokumen sedangkan pelaksanaan pembangunan tetap berjalan berdasarkan permintaan pasar. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang berupa monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang melalui kegiatan Keterpaduan Pelaksanaan Indikasi Program Pada RTRW.

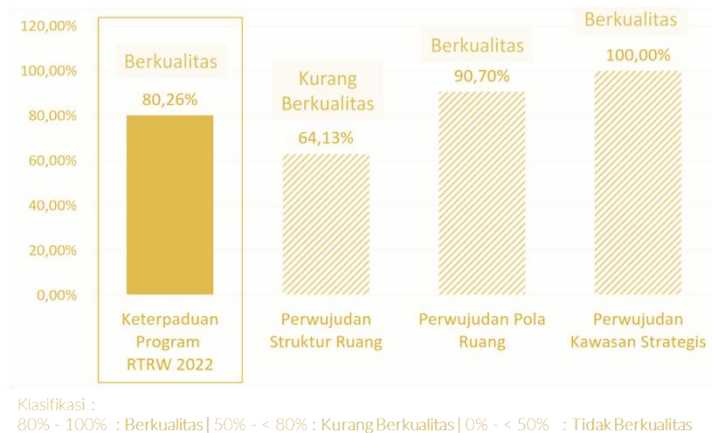
Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang merupakan salah satu Program Pemerintah Daerah dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Indikator pada program ini yaitu Persentase dukungan program pemerintah daerah terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang. Upaya untuk pencapaian realisasi terhadap program ini dilakukan melalui perhitungan persentase jumlah program pemda yang sesuai dengan RTRW DIY dibagi keseluruhan jumlah indikasi program dalam RTRW.

Tabel 3.62. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Dukungan Program Pemerintah Daerah Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Capaian 2021	2022			Target akhir RPJMD (2022)	Capaian 2022 terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase dukungan program pemerintah daerah terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	78,66	78,70	80,26	101,98	78,70	101,98

Sumber: DPTR DIY, 2023

Pada tahun 2022 penilaian indikator persentase dukungan program pemerintah daerah terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang sebesar 80,26% mengalami kenaikan dari tahun 2021 sejumlah 78,70%. Penilaian matriks persandingan program/kegiatan dilakukan pada indikasi program tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan program/kegiatan OPD/instansi di DIY selama tahun 2022. Adapun hasil akhir matriks evaluasi persandingan program dan lokasi program Pemda DIY di tahun 2022 dengan Program Instansi/OPD yang terlaksana di tahun 2022 sebagai berikut:



Gambar 3.32. Grafik Nilai Keterpaduan Program Tahun 2022

Sumber : DPTR DIY, 2023

Gambar di atas menunjukkan hasil penilaian keterpaduan program RTRW DIY tahun 2022 sebesar 80,26% dengan klasifikasi berkualitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi aktual program/kegiatan OPD/Instansi di DIY pada tahun 2022 sudah selaras dan mengacu pada program RTRW DIY. Penilaian keterpaduan program RTRW DIY terdiri dari perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang dan perwujudan Kawasan strategis. Dari ketiga komponen tersebut nilai terendah ada pada perwujudan struktur ruang yang bernilai 64,13% dengan klasifikasi kurang berkualitas. Sedangkan untuk perwujudan pola ruang dan perwujudan kawasan strategis menunjukkan hasil klasifikasi berkualitas dengan nilai 90,70% dan 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa beberapa program pada indikasi program struktur ruang RTRW DIY masih banyak yang belum terlaksana pada tahun 2022. Sehingga kedepanya sinkronisasi antara program pemerintah daerah dan RTRW masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan keterpaduan dan keterwujudan rencana struktur ruang DIY. selain perwujudan pola ruang, hasil penilaian keterpaduan program pola ruang menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah cukup baik untuk mendukung perwujudan pola ruang dan Kawasan strategis sesuai dengan RTRW.

Tabel 3.63. Hasil Penilaian Keterpaduan Program Tahun 2022

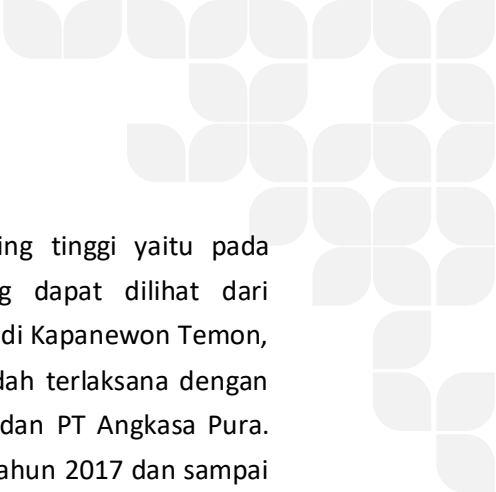
No	Program RTRW DIY	Nilai Keterpaduan	Klasifikasi
NILAI PERSENTASE TOTAL		80,26%	Berkualitas
A	PERWUJUDAN PENGEMBANGAN PUSAT KEGIATAN	57,89%	Kurang Berkualitas
1	Pemantapan dan Penataan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	100,00%	Berkualitas
2	Pemantapan dan penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	100,00%	Berkualitas
3	Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal	42,86%	Kurang Berkualitas
B	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG	64,13%	Kurang Berkualitas
1	Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah	65,75%	Kurang Berkualitas
2	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi	48,28%	Kurang Berkualitas
3	Perwujudan Sistem Jaringan Energi	50,00%	Kurang Berkualitas
4	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi	100,00%	Berkualitas
5	Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air	70,00%	Kurang Berkualitas
6	Perwujudan Jaringan Irigasi	100,00%	Berkualitas
7	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum	75,00%	Kurang Berkualitas
8	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Limbah	72,73%	Kurang Berkualitas
9	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan	100,00%	Berkualitas
10	Perwujudan Sistem Jaringan Drainase	100,00%	Berkualitas
11	Perwujudan Sistem Jalur Evakuasi Bencana	100,00%	Berkualitas
C	Perwujudan Kawasan Lindung	91,07%	Berkualitas
1	Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	85,71%	Berkualitas
2	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat	81,82%	Berkualitas
3	Perwujudan Kawasan Konservasi	80,00%	Berkualitas
4	Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi	100,00%	Berkualitas
5	Perwujudan Pengelolaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau	100,00%	Berkualitas
6	Perwujudan Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Alam	95,24%	Berkualitas
7	Perwujudan Kawasan Cagar Budaya	100,00%	Berkualitas
D	Perwujudan Kawasan Budidaya	90,41%	Berkualitas
1	Program Perwujudan Kawasan Hutan Produksi	100	Berkualitas
2	Program Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat	100	Berkualitas
3	Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian	100	Berkualitas
4	Program Perwujudan Kawasan Perikanan	42.86	Tidak Berkualitas
5	Program Perwujudan Kawasan Pertambangan	66.67	Kurang Berkualitas
6	Program Perwujudan Kawasan Industri	100	Berkualitas
7	Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata	95.65	Berkualitas

No	Program RTRW DIY	Nilai Keterpaduan	Klasifikasi
8	Program Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman	100	Berkualitas
9	Program Perwujudan Kawasan Hankam	100	Berkualitas
10	Program Perwujudan Kawasan Budidaya Lainnya	87.05	Berkualitas
E	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	100%	Berkualitas
1	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya	100%	Berkualitas
2	Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi	100%	Berkualitas
3	Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	100%	Berkualitas
4	Kawasan strategis kepentingan pendaya gunaan sumber daya alam dan teknologi	100%	Berkualitas

Sumber: DPTR DIY, 2023

Nilai keterwujudan indikasi program RTRW DIY pada tahun 2022 secara keseluruhan 80,26% dengan klasifikasi Berkualitas. Arahkan RTRW 2022 dalam keterwujudan struktur ruang dengan nilai terendah yaitu perwujudan sistem jaringan transportasi dengan nilai kesesuaian 48,28%. Berdasar pada penilaian keterpaduan program perwujudan sistem jaringan transportasi, berikut hasil yang didapat:

- a. Perwujudan sistem jaringan transportasi darat memperoleh nilai keterpaduan program sebesar 68,42% dengan kualifikasi keterpaduan program kurang berkualitas. Unsur yang mempengaruhi terhadap keterwujudan system jaringan transportasi darat antara lain: (a) Keterpaduan perwujudan sistem lalu lintas dan angkutan jalan sebesar 83,33%, dan (b) nilai keterpaduan sistem dan prasarana jalan sebesar 61,54%. Pada perwujudan sistem lalu lintas dan angkutan jalan, program yang diamanatkan ditujukan untuk pengembangan jaringan angkutan utama bus jalur khusus, angkutan bus besar, dan jaringan angkutan pengumpul serta pengembangan sistem angkutan masal dengan pengembangan terminal angkutan antar kota dan terminal angkutan multimoda dalam kota.
- b. Perwujudan sistem jaringan transportasi laut dengan nilai keterpaduan 0% dan berkualifikasi tidak berkualitas.
- c. Perwujudan sistem transportasi udara berkualifikasi berkualitas dengan persentase nilai keterpaduan 100%. Nilai keterpaduan pada



perwujudan sistem jaringan transportasi paling tinggi yaitu pada perwujudan sistem transportasi udara yang dapat dilihat dari terwujudnya bandar udara baru yang berlokasi di Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo. Program tersebut sudah terlaksana dengan instansi pelaksana Kementerian Perhubungan dan PT Angkasa Pura. Pelaksanaan program ini sudah berjalan sejak tahun 2017 dan sampai sekarang terus dilakukan pengembangan pembangunan bandar udara guna untuk memantapkan sebagai pengumpul primer transportasi.

Pada arahan keterwujudan pola ruang, program dengan nilai terendah yaitu Program Perwujudan Kawasan perikanan dengan nilai kesesuaian 42,86%. Penilaian ini berdasarkan pada program perwujudan kawasan perikanan terdiri dari tujuh indikasi program utama dengan rincian tiga indikasi program sudah selaras dengan program yang dilaksanakan OPD dan empat program lainnya tidak selaras. Indikasi program pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap selaras dengan program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan dan program pengelolaan perikanan tangkap.

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan dukungan program pemerintah daerah terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang di DIY adalah: (1) Keselarasan dalam mewujudkan Indikasi Program Utama dalam Program Perencanaan Pembangunan terhadap aspek fungsi, lokasi, waktu dan pendanaan perlu ditingkatkan; dan (2) Masih terdapatnya keterpaduan program yang mendapatkan nilai kurang berkualitas sehingga perlu untuk ditingkatkan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu: (1) Penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Jangka Menengah 5 Tahunan dengan menyelaraskan indikasi program utama Rencana Tata Ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan; dan (2) Melakukan pendampingan terhadap perangkat daerah terkait penyusunan program dan kegiatan. Hal ini dimaksudkan supaya keterpaduan program yang dilakukan lebih terpadu dan selaras dengan dokumen perencanaan tata ruang.

9. Program Pengembangan Pusat Petumbuhan, dengan indikator:

a. Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang Belum Maju (GK, KP, Bantul)

DIY masih menghadapi masalah ketimpangan kesejahteraan baik antara kelompok masyarakat dan wilayah. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten dan kota masih terjadi yang menjadi salah satu tantangan karena penurunan ketimpangan wilayah menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pemda DIY menjadikan ketimpangan wilayah menjadi salah satu isu strategis dan harus ditangani dengan intervensi melalui pemerataan pembangunan antar kabupaten dan kota. Upaya intervensi pemerataan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan wilayah diamanatkan di dalam RPJMD DIY 2017 – 2022. Kebijakan pembangunan dalam rangka melaksanakan intervensi tersebut adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif bagi semua orang serta mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah yang masih relatif tertinggal.

Terkonsentrasi aktivitas ekonomi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman selama ini menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah di DIY. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh struktur ekonomi tiap kabupaten/kota yang mencerminkan kesenjangan kemampuan daya saing ekonomi dan kapasitas pertumbuhan ekonomi lokal antar kabupaten dan kota. Akibat kesenjangan kapasitas perekonomian, kontribusi PDRB ADHK di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menyumbang lebih 50% dari total PDRB DIY. Sementara itu, dua kabupaten yaitu Kulon Progo dan Gunungkidul yang luas wilayahnya 65% dari luas wilayah DIY hanya menyumbang sekitar 21,4% dari keseluruhan *output* DIY selama periode 2018-2022.

Tabel 3.64. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul) Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	%	40,08	40,26	39,94	99,58	40,26	99,20

Sumber: BPS Provinsi DIY dan BPPSD DIY (angka proyeksi), 2023

Pasca tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan 2022 menunjukkan peningkatan kapasitas perekonomian menjadi 5,53% (2021) dan 5,15% (2022) *c-to-c*. Pertumbuhan di tingkat DIY didukung oleh pertumbuhan ekonomi positif di tingkat kabupaten dan kota di tahun 2021 dan 2022. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta di tahun 2022 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tiga wilayah lainnya. Perkembangan kinerja ekonomi tersebut menunjukkan bahwa gabungan kontribusi Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masih di atas gabungan kontribusi PDRB ADHK dari Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul. Pangsa dua wilayah yang lebih maju adalah 60,06%, sementara itu pangsa PDRB ADHK tiga wilayah yang belum maju hanya berkisar 39,94%, sedangkan nilai Perkembangan PDRB ADHK menurut wilayah pada tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.65. PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota DIY 2022

Kab/Kota	PDRB ADHK (JutaRp)	Pangsa PDRB ADHK (%)
Kulon Progo	9.188.770,26	8,17
Bantul	20.777.817,13	18,48
Gunungkidul	14.948.505,11	13,29
Sleman	37.831.683,33	33,64
Yogyakarta	29.866.369,23	26,56

Sumber: BPPSD DIY dan angka proyeksi, 2023

b. **Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi**

Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi merupakan salah satu indikator program pemda yakni program pengembangan pusat pertumbuhan.

Dukungan ketersediaan sistem lalu lintas dan angkutan jalan serta sistem jaringan perkeretaapian merupakan bagian dari penyediaan sarana dan prasarana transportasi selain adanya sistem jaringan jalan baik itu jalan Nasional, Jalan Provinsi, maupun Jalan Kabupaten/kota serta Jalan Lingkungan di wilayah DIY.

Faktor kunci dalam peningkatan aksesibilitas dan mobilitas transportasi darat di wilayah DIY diwujudkan dalam penyediaan sistem jaringan jalan dan Sistem lalu lintas dan angkutan jalan. Sistem jaringan jalan di wilayah DIY didukung oleh penyediaan prasarana Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/kota serta Jalan Lingkungan. Total Panjang jalan Provinsi di DIY adalah 760,45 km. Panjang Jalan Provinsi di Kabupaten Sleman sepanjang 116,32 km, Kabupaten Bantul sepanjang 162,15 km, Kabupaten Kulon Progo sepanjang 175,14 km, Kabupaten Gunungkidul sepanjang 306,84 km, sedangkan untuk wilayah Kota Yogyakarta tidak dilalui Jalan Provinsi.

Terkait dengan penyediaan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di DIY diwujudkan melalui penyediaan simpul transportasi berupa terminal, *park and ride*, tempat khusus parkir serta penyediaan sarana angkutan umum.

Berikut capaian Indikator program Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi Tahun 2022.

Tabel 3.66. Target dan Capaian Indikator Program Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi	%	81,45	83	81,28	97,93	83	97,93

Sumber: Dishub DIY dan DPUPESDM DIY, 2023 (data diolah)

Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi terdiri atas dua bagian perhitungan. Pertama adalah Presentase cakupan pelayanan angkutan di DIY yang merupakan nilai rata-rata dari penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek dan angkutan umum tidak dalam trayek. Kedua adalah Presentase aksesibilitas jalan provinsi dan Nasional di DIY yaitu presentase kondisi jalan provinsi dalam kondisi mantap.

Pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0,17% dari tahun 2021 untuk indikator Penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi dari semula 81,45% menjadi 81,28%, hal ini disebabkan oleh adanya penurunan persentase kondisi jalan mantap di jalan provinsi. Adapun variabel perhitungan indikatornya adalah sebagai berikut:

1) Persentase cakupan pelayanan angkutan di DIY sebesar 92,38% dari target 91,21% pada tahun 2022 yang diperoleh dari rata-rata penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek dan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek sebagai berikut :

a) Penyediaan Layanan Angkutan Umum Dalam Trayek

Target layanan angkutan perkotaan yang merupakan bagian perhitungan cakupan layanan dalam trayek, sejak tahun 2020 telah melayani 25 kecamatan di kawasan Perkotaan Yogyakarta yang berarti telah tercapai target yang diharapkan. Pada tahun 2022 Pemda DIY menambah rute layanan dengan trayek Yogyakarta- Palbapang sehingga secara keseluruhan melayani 26 kecamatan atau melebihi target yang sudah ditetapkan sebesar 100%.

Sedangkan Angkutan AKDP yang juga merupakan bagian perhitungan cakupan layanan dalam trayek pada tahun 2022 telah tersedia 14 trayek layanan AKDP di mana ada kenaikan sebanyak 5 trayek layanan dari tahun 2021 (9 trayek). Tersusunnya kajian angkutan AKDP ke Bandara YIA,

berfungsinya terminal Pakem dan optimalisasi pemanfaatan lahan Pasar Belut Godean sebagai Park and Ride mampu meningkatkan layanan angkutan AKDP menjadi 69,52%.

Dari capaian layanan angkutan perkotaan dan AKDP, maka capaian layanan angkutan dalam trayek yang merupakan rerata adalah sebesar 84,76%.

b) Tertib Perijinan Angkutan Tidak Dalam Trayek

Layanan angkutan tidak dalam trayek yang menjadi bagian perhitungan indikator cakupan pelayanan angkutan di DIY meliputi angkutan sewa khusus, angkutan taksi dan angkutan pariwisata.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus yang memberikan kemudahan kepada operator dalam hal perijinan, maka terjadi peningkatan yang signifikan terhadap operator yang mengurus ijin penyelenggaraan angkutan sewa khusus. Pada tahun 2022 angkutan sewa khusus yang mengurus perijinan sebanyak 236 armada dari 100 armada yang ditargetkan atau sebesar 236%.

Untuk angkutan taksi pada tahun 2022 terdapat 167 armada taksi yang mengurus ijin dari target 1.025 armada taksi atau sebesar 16,3%, sedangkan angkutan pariwisata yang tertib ijin sebanyak 593 armada dari target 805 armada angkutan pariwisata atau sebesar 73,7%.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka nilai capaian terhadap indicator cakupan pelayanan angkutan tidak dalam trayek pada tahun 2022 adalah 108,6% atau melebihi 100%.

- 2) Persentase kondisi jalan mantap di jalan provinsi sebesar 70,18%, yang dihitung berdasarkan data kondisi jalan berkategori baik dan sedang, sepanjang 533,685 km terhadap total panjang jalan

provinsi sepanjang 760,45 km. Pada tahun 2022 ditarget sepanjang 572,32 km atau sebesar 75,26% jalan provinsi pada kondisi jalan mantap, sehingga tingkat capaiannya adalah sebesar 93,3%.

Secara rinci kondisi jalan provinsi di DIY sebagaimana pada tabel di bawah.

Tabel 3.67. Kondisi Jalan Provinsi Per Kabupaten /Kota di Wilayah DIY pada Tahun 2022

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		Km	%		Km	%
1	Mantap	533,685	70,18	Baik	301,205	39,609
				Sedang	232,480	30,571
2	Tidak Mantap	226,765	29,82	Rusak Ringan	171,615	22,568
				Rusak Berat	55,150	7,252
Jumlah		760,450	100	Jumlah	760,450	100

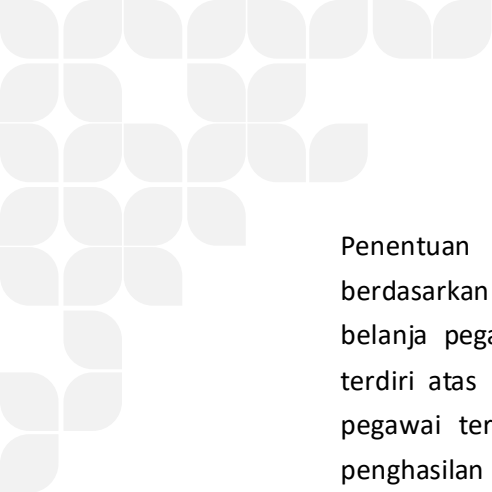
Sumber: DPUPESDM DIY, 2023

Dengan demikian, variabel perhitungan indikator Penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi adalah: hasil dari rerata persentase cakupan pelayanan angkutan di DIY (92,38%) dan persentase kondisi jalan mantap di jalan provinsi (70,18%). Sehingga perhitungannya rerata dua variabel tersebut adalah sebesar 81,28% atau tingkat ketercapaian terhadap target tahun 2022 adalah sebesar 97,93%.

10. Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

a. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah diatur dalam Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan menjadi tinggi, sedang, dan rendah.



Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pendapatan umum daerah terdiri atas PAD, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022 merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

Terdapat tiga kelompok kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan keuangan daerah tinggi, kemampuan keuangan daerah sedang dan kemampuan keuangan daerah rendah. Dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Tingkat kemampuan keuangan di atas Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- 2) Tingkat kemampuan keuangan di angka Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- 3) Tingkat kemampuan keuangan di bawah Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap laporan realisasi anggaran tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah berada pada posisi sedang dengan nilai sebesar Rp1.753.302.688.296,46.

Tabel 3.68. Target dan Capaian Indikator Program Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022

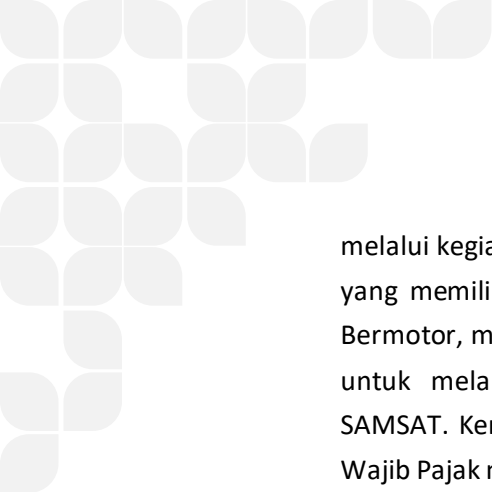
Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	100	Sedang	100

Sumber: BPKA DIY, 2023

Tingkat kemampuan keuangan daerah tetap pada posisi sedang dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini didukung karena adanya peningkatan penerimaan PAD pada tahun 2021 yaitu sebesar 1,29% atau sebesar Rp24.216.245.526,75 dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2020.

Dari segi pelayanan publik, dari tahun ke tahun transformasi pelayanan selalu dilakukan, salah satu diantaranya adalah modernisasi administrasi sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit. Penambahan metode dan kanal-kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah, penambahan kanal pembayaran digital dirasa mampu memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan kewajibannya. Transformasi pelayanan publik ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang mempengaruhi tingkat kemampuan keuangan daerah.

Penyediaan kanal-kanal pembayaran digital baru sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk mendorong adanya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Dari sisi pengelolaan pajak dan retribusi, Pemda DIY bekerjasama dengan PT Bank BPD DIY untuk menyediakan layanan pembayaran pajak melalui *e-commerce* dan QRIS BPD DIY yang tersedia di hampir seluruh layanan pemungutan pajak dan sebagian besar layanan retribusi daerah. Selain itu, dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, intensifikasi pajak daerah juga dilakukan dengan cara melakukan pendataan dan penagihan Wajib Pajak secara *door to door*, mengirimkan surat kepada Wajib Pajak



melalui kegiatan pengiriman surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang memiliki kendaraan yang sudah jatuh tempo Pajak Kendaraan Bermotor, melakukan sosialisasi kepada Kelurahan di wilayah SAMSAT untuk melakukan pendataan kepemilikan kendaraan di wilayah SAMSAT. Kemudian terdapat layanan *Drive Thru* untuk memudahkan Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak tanpa turun dari kendaraan, adanya fasilitas E-Posti dimana Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak cukup melalui mesin ATM. Perluasan jangkauan layanan dengan mendirikan SAMSAT Desa dirasakan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di sekitar SAMSAT Desa.

b. Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY

Barang Milik Daerah (BMD) atau aset daerah pada dasarnya dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. BMD yang tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi pemerintahan dapat didayagunakan atau dioptimalkan dengan tidak mengubah status kepemilikan. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, optimalisasi dapat dilakukan dengan mekanisme pemanfaatan BMD.

Pemanfaatan BMD mendukung pengelolaan keuangan Daerah dengan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pemanfaatan BMD telah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset selaku Pejabat Penatusahaan Barang Milik Daerah bersama sama dengan OPD Pemda DIY selaku Pengguna Barang Milik Daerah.

Selain berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, optimalisasi BMD di Pemda DIY dilaksanakan dengan berpedoman pada Perda DIY Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Perda DIY Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda DIY Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Seiring dengan meredanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2022. Pelaksanaan optimalisasi barang milik daerah menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian target RPJMD 2022 yang mencapai 292% dari target yang ditetapkan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.69. Target dan Capaian Indikator Program Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Optimalisasi aset-aset pemda DIY	Rupiah	13.406.469.567	9.626.994.395	28.102.350.141	292	9.626.994.395	292

Sumber: BPKA DIY, 2023

Pendapatan Pemda DIY dari kegiatan pemanfaatan barang milik daerah terdiri dari penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah (Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah) dengan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp28.102.350.141,00.

Tabel 3.70. Rincian Penerimaan Pendapatan dari Optimalisasi Aset 2022

No	Uraian			Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
1.	Retribusi Daerah	Pemakaian Kekayaan		6.752.358.195,00	8.330.645.905,00	123%
2.	Retribusi Pesanggrahan/Vila	Tempat Penginapan/		416.580.000,00	572.105.000,00	137%
3.	Retribusi Pelayanan	Kepelabuhanan		96.590.000,00	120.232.350,00	124%
4.	Retribusi Terminal			384.980.000,00	424.172.000,00	110%
5.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan			8.426.254.913,00	18.655.194.886,00	221%
Jumlah				16.076.763.108,00	28.102.350.141,00	175%

Sumber: BPKA DIY, 2023

Dalam melaksanakan optimalisasi barang milik daerah, Pemda DIY secara terus menerus melakukan koordinasi dengan OPD atau Pengguna untuk melakukan identifikasi terhadap potensi-potensi optimalisasi atas barang milik daerah yang berada di OPD atau Pengguna.

Pendekatan pengelolaan BMD *idle* Pemda DIY dalam rangka optimalisasi BMD pada tahun 2022 dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Pendampingan penyelesaian permasalahan BMD *idle* bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi DIY; (2) Melaksanakan *appraisal* atau penilaian dalam rangka pemanfaatan sewa BMD; (3) Pendampingan pelaksanaan pemanfaatan BMD yang dilakukan oleh pengguna barang; (4) Penilaian *High Best Use* (HBU) untuk melihat potensi dan peruntukan yang dapat dioptimalkan atas aset-aset Pemda DIY; (5) Penawaran kerja sama sewa/pemanfaatan kepada pihak ketiga; dan (6) identifikasi BMD *Idle* yang berada di pengguna barang (OPD).

c. Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, Nilai Eksternal Persepsi Korupsi

Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah merupakan program strategis Pemda DIY yang mendukung sasaran pemda meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Terdapat lima indikator kinerja program, yaitu kemampuan keuangan daerah, optimalisasi aset-aset pemda DIY, nilai eksternal pelayanan publik, nilai internal integritas organisasi dan nilai eksternal persepsi korupsi. Capaian tiga indikator terakhir yaitu nilai eksternal pelayanan publik, nilai internal integritas organisasi dan nilai eksternal persepsi korupsi termasuk komponen penghitungan Indeks Reformasi Birokrasi yang dievaluasi dan dipublikasikan oleh KemenPAN-RB.

Tabel 3.71. Target dan Capaian Indikator Program Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai Internal Integritas Organisasi, dan Nilai Eksternal Persepsi Korupsi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Eksternal Pelayanan Publik/ Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	Nilai	84,73/8,473	8,8	84,30/8,43	95,79	8,80	95,79
2.	Nilai internal	Nilai	86,92/8,692	4,60	84,00*/8,4	182,61	4,60	182,61

No	Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	Integritas organisasi/ Survey Internal Organisasi							
3.	Nilai eksternal persepsi korupsi/ Indeks Persepsi Anti korupsi (IPAK)	Nilai	81,8/ 8,18	6	84,3*/ 8,43	140,5	6,00	140,5

Ket.: *) Angka tahun 2022 berdasarkan LHE Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2023

Keterangan :

1. Target Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai internal Integritas dan Nilai eksternal persepsi Korupsi berdasarkan skala 1-10
2. Realisasi Tahun 2022 berdasarkan LHE RB Tahun 2022 dengan skala 1-100

Secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai internal Integritas dan Nilai eksternal persepsi Korupsi merupakan Nilai Komponen Hasil dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Ketiga nilai tersebut termuat dalam Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LHE RB) Nomor B/718/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang diterbitkan Kementerian PAN dan RB.
- 2) Sejak Tahun 2020, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) mengacu pada Permen PAN dan RB RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat perubahan bobot dan skala penilaian Nilai Eksternal Pelayanan Publik, Nilai internal Integritas dan Nilai eksternal persepsi Korupsi yang semula 0-10 menjadi 0-100. Sejak Tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Korupsi (IPAK) dan Survei Internal Organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- 3) Nilai Eksternal Pelayanan Publik mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dan belum mencapai target Tahun 2022 (capaian 95,79). Nilai internal Integritas dan Nilai Eksternal Persepsi Korupsi mengalami peningkatan signifikan. Meskipun demikian, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY mengalami kenaikan dari 81,27 (Tahun 2021) menjadi 81,62 (Tahun 2022). Berbagai capaian prestasi nasional Pemda DIY selama Tahun 2022 sebagai berikut:
- a) Gubernur DIY mendapat penghargaan sebagai Pembina Pelayanan Publik Prima oleh Kemenpan RB.
 - b) Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) dari Ombudsman Republik Indonesia.
 - c) Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri menempatkan Pemda DIY pada Predikat “Inovatif” dengan indeks 50,34.
 - d) Berdasarkan Pengumuman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/273/PP.00.05/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2022, Pemda DIY berhasil lolos masuk TOP 99 inovasi pelayanan publik kelompok umum dengan inovasi Difagana Pioner Penanggulangan Bencana Berbasis Inklusi– Dinas Sosial DIY.
 - e) Terdapat satu inovasi pelayanan publik Pemda DIY yang berhasil masuk TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 289 Tahun 2022 tentang Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/

Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021 yaitu Difagana Pioner Penanggulangan Bencana Berbasis Inklusi–Dinas Sosial DIY.

- f) SAKIP dengan Predikat AA (tertinggi) di Indonesia.
- g) Reformasi Birokrasi dengan Predikat A.

11. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah, dengan indikator Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan

Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah merupakan program strategis Pemda DIY dalam rangka pelaksanaan kewenangan urusan keistimewaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan urusan keistimewaan bidang kelembagaan diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Ketercapaian pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kelembagaan diukur dari indikator terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur asas, pembentukan, dan susunan kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan.

Pelaksanaan urusan kelembagaan istimewa sesuai dengan Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY telah ditindaklanjuti dengan (1) Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dan (2) Peraturan Gubernur

tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, Sehingga semua urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan telah terwadahi dalam Perangkat Daerah dan dilaksanakan sesuai kewenangan dalam perundang-undangan. Dengan demikian capaian kesesuaian pelaksanaan urusan kelembagaan pada tahun 2022 telah mencapai 100%.

Tabel 3.72. Target dan Capaian Indikator Program Terwujudnya Penetapan Kepala Daerah Sesuai UU Keistimewaan dan Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai Dengan Perdais Kelembagaan Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
Terwujudnya Penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan	%	N/A	100	100	100	100	100
Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2023

Capaian pada indikator Terwujudnya Penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan pada tahun 2022 tercapai 100% sesuai target. Ketercapaian ini ditunjukkan dengan telah dilaksanakan penetapan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan rangkaian proses sesuai ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, penyelenggaraan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2022 di Istana Negara.


Capaian pada indikator Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan, ditandai dengan telah ditetapkannya Pergub yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang telah diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

Pada Tahun 2022 dilakukan evaluasi kelembagaan dengan melaksanakan review terhadap Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang ditetapkan dengan Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, yang memuat tentang:

- a. Penyesuaian Nomenklatur Dinas Perizinan dan Penanaman Modal menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Kelembagaan Paniradya Kaistimewan;
- c. Kelembagaan Rumah Sakit Daerah sebagai tindak lanjut PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

di samping itu, dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Penyederhanaan Birokrasi serta penajaman tugas dan fungsi Perangkat Daerah dilakukan review terhadap Pergub DIY tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah untuk meminimalisir terjadinya potensi duplikasi tugas fungsi serta menyesuaikan kebijakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru. Telah ditetapkan 30 Pergub DIY yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pergub DIY Nomor 90 Tahun 2022)
- b. Inspektorat (Pergub DIY Nomor 91 Tahun 2022)
- c. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Pergub DIY Nomor 92 Tahun 2022)
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Pergub DIY Nomor 93 Tahun 2022)
- e. Dinas Kelautan dan Perikanan (Pergub DIY Nomor 94 Tahun 2022)

- 
- f. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Pergub DIY Nomor 95 Tahun 2022)
 - g. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Pergub DIY Nomor 96 Tahun 2022)
 - h. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Pergub DIY Nomor 97 Tahun 2022)
 - i. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (Pergub DIY Nomor 98 Tahun 2022)
 - j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Pergub DIY Nomor 99 Tahun 2022)
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja (Pergub DIY Nomor 100 Tahun 2022)
 - l. Badan Kepegawaian Daerah (Pergub DIY Nomor 101 Tahun 2022)
 - m. Badan Pendidikan dan Pelatihan (Pergub DIY Nomor 102 Tahun 2022)
 - n. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Pergub DIY Nomor 103 Tahun 2022)
 - o. Badan Penghubung Daerah (Pergub DIY Nomor 104 Tahun 2022)
 - p. Sekretariat Daerah DIY (Pergub DIY Nomor 105 Tahun 2022)
 - q. Dinas Sosial (Pergub DIY Nomor 106 Tahun 2022)
 - r. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) (Pergub DIY Nomor 107 Tahun 2022)
 - s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Pergub DIY Nomor 108 Tahun 2022)
 - t. Dinas Kesehatan (Pergub DIY Nomor 109 Tahun 2022)
 - u. UPT Dinas Kesehatan (Pergub DIY Nomor 110 Tahun 2022)
 - v. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pergub DIY Nomor 111 Tahun 2022)
 - w. Dinas Pariwisata (Pergub DIY Nomor 112 Tahun 2022)
 - x. Dinas Komunikasi dan Informatika (Pergub DIY Nomor 113 Tahun 2022)
 - y. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Pergub DIY Nomor 114 Tahun 2022)
 - z. Dinas Perhubungan (Pergub DIY Nomor 115 Tahun 2022)
 - aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Pergub DIY Nomor 116 Tahun 2022)
 - bb. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pergub DIY Nomor 117 Tahun 2022)
 - cc. UPT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Pergub DIY Nomor 118 Tahun 2022)

dd. UPT Balai Perlindungan Perempuan dan Anak (Pergub DIY Nomor 11 Tahun 2022)

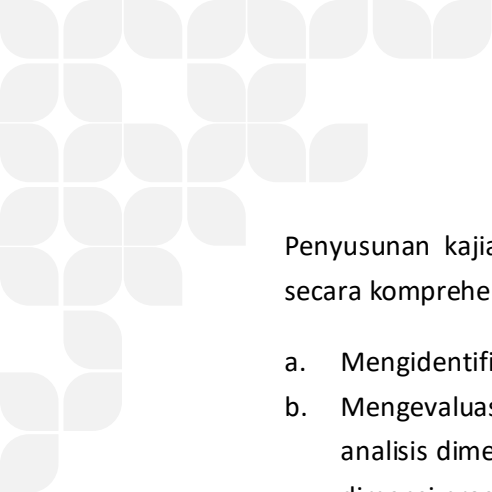
Pada Tahun 2022 dilaksanakan juga penyusunan peta proses bisnis yang diharapkan mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi agar setiap instansi pemerintah:

- a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. Mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
- c. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

Beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam dokumen proses bisnis yang disusun adalah:

- a. Peta proses bisnis Pemda DIY disusun berdasarkan dokumen Rencana Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan transisi sehingga kedepan perlu dilakukan penyesuaian dengan dokumen RPJMD yang baru.
- b. Peta proses bisnis Pemda DIY adalah peta besar penyelenggaraan urusan pemerintah level provinsi sesuai dengan dokumen perencanaan. Sehingga perlu operasionalisasinya pada level perangkat daerah.
- c. Perangkat daerah pengampu urusan ketatalaksanaan dan perangkat daerah pemangku urusan perencanaan memiliki peran penting dalam membina dan mengendalikan pengembangan peta proses bisnis.

Sebagaimana amanat PermenPAN RB RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 bahwa kajian Lembaga Non Struktural (LNS) diperlukan untuk menelaah keberadaannya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam norma, tugas fungsi, serta praktik kerja di lapangan baik antar sesama LNS maupun dengan Perangkat Daerah.



Penyusunan kajian LNS pada tahun 2022 dilaksanakan melalui Evaluasi secara komprehensif untuk:

- a. Mengidentifikasi LNS eksisting di Pemda DIY;
- b. Mengevaluasi kelembagaan LNS Pemda DIY, dengan menggunakan analisis dimensi deskriptif organisasi; dimensi struktur organisasi; dan dimensi proses organisasi; dan
- c. Merumuskan rekomendasi kebijakan hasil analisis evaluasi kelembagaan LNS, yang berupa:
 - 1) Penghapusan LNS;
 - 2) Integrasi atau penggabungan LNS yang memiliki tugas fungsi serupa;
 - 3) Dilikuidasi (atau integrasi) dan fungsi-fungsinya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah induk; dan
 - 4) Status *quo* dengan peningkatan dan penguatan tugas dan fungsi.

Untuk menjalankan pembinaan dan pengawasan, salah satu ketugasan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat adalah melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya, serta ketugasan dalam memberdayakan dan memfasilitasi kabupaten/kota di wilayahnya.

Pada tahun 2022 Pembinaan dan Pengendalian Kabupaten Kota dilaksanakan untuk memfasilitasi sehubungan adanya perubahan Perda sebagaimana hasil dari monitoring evaluasi pelaksanaan kelembagaan pasca penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan sebagaimana amanat dalam Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 24 bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Pemda dan terselenggaranya urusan keistimewaan DIY, maka kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota harus selaras dengan Perangkat Daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Evaluasi dilakukan terhadap struktur organisasi maupun tugas fungsi pada Perangkat Daerah sesuai Perda yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di masing-masing Kabupaten/kota. Hal tersebut dilakukan agar selaras dengan dengan kelembagaan Pemda DIY, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kabupaten/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa, dengan indikator Persentase Fasilitasi Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa

Dalam Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Bahwa dalam hal pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Sementara untuk Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari perlindungan, penggunaan, dan pelepasan.

Salah satu target dari program Pemda DIY berdasarkan RPJMD DIY Tahun 2017-2022 yaitu Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa. Indikator dari program ini adalah persenrase tertib administrasi Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten di urusan pertanahan dapat diukur melalui : (1) Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten dengan formulasi perhitungan capaian kinerja berupa persentase jumlah bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan, perawatan dokumen tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, serta pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa; (2) Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan formulasi perhitungan capaian kinerja berupa Pendaftaran Tanah Desa, jumlah desa yang mempunyai perdes, dan pengajuan permohonan

kekancingan yang diajukan dan ditindaklanjuti. Data capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.73. Target dan Capaian Indikator Program Persentase Fasilitasi Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa Tahun 2022

Indikator Kinerja Program Pemda	Satuan	Capaian 2021	2022			Target akhir RPJMD (2022)	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Tar-get	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Fasilitasi Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	%	74,11	88,67	98,12	110,67	88,67	110,67

Sumber: DPTR DIY, 2023

Perhitungan capaian Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa untuk tahun 2022 melampaui target. Dari target 88,67% realisasi capaian program 98,12% atau terealisasi sebesar 110,67%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 meningkat sebesar 24,01%. Formulasi indikatornya meliputi persentase jumlah bidang yang sudah didaftarkan, perawatan dokumen Tanah kasultanan dan Tanah Kadipaten, pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa serta fasilitasi Tanah Desa yang meliputi pendaftaran Tanah Desa, permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa, dan jumlah desa yang sudah difasilitasi dalam penyusunan draft raperdes. Meta indikator dan pembobotannya adalah Capaian pengelolaan (60%) ditambah capaian pemanfaatan (40%).

Angka capaian bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan telah melampaui target yaitu sejumlah 22.661 bidang (103,58%) dari target sejumlah 21.877. Sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah pendaftaran bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebanyak 13.837 bidang dari target 13.877 bidang pada akhir RPJMD tahun 2022. Sedangkan untuk pendaftaran Tanah Desa telah direalisasikan sebanyak 8.824 bidang dari target 8.000 bidang pada akhir RPJMD tahun 2022. Berikut ini disampaikan data pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sampai dengan tahun 2022 pada masing-masing kabupaten/kota:

Tabel 3.74. Capaian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

No	Kabupaten/Kota	Pendaftaran										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	JML
1	Yogyakarta	45	166	75	50	70	50	75	100	42	75	748
2	Bantul	0	171	1367	300	350	359	500	395	230	0	3672
3	Kulon Progo	0	216	176	240	350	400	400	402	151	25	2360
4	Gunungkidul	0	54	300	300	250	750	785	500	1000	0	3939
5	Sleman	0	137	252	250	250	1000	1000	202	27	0	3118
	Jumlah	45	744	2170	1140	1270	2559	2760	1599	1450	100	13837

Sumber: DPTR DIY, 2023

Hasil capaian pendaftaran Tanah Desa sampai dengan tahun 2022 pada masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel 3.75. Capaian Pendaftaran Tanah Desa

No	Kabupaten	Jumlah Bidang	Bidang Sudah Sertipikat	Bidang Belum Sertipikat	Realisasi Pendaftaran Tanah Kalurahan Belum Bersertipikat (Daftar Pertama Kali)	Realisasi Tanah Kalurahan Sudah Sertipikat (Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertipikat / Penyesuaian Tanah Desa/Kalurahan)	Total Realisasi Pendaftaran Tanah Desa
1	Bantul	15,743	2,117	13,626	287	1,654	1.941
2	Kulon Progo	4,156	3,649	507	166	1.409	1.575
3	Gunungkidul	10,882	3,295	7,587	364	2.578	2.942
4	Sleman	19,498	7,007	12,491	324	2.042	2.366
	Jumlah	50,279	16,068	34,211	1.141	7.683	8.824

Sumber: DPTR DIY, 2023

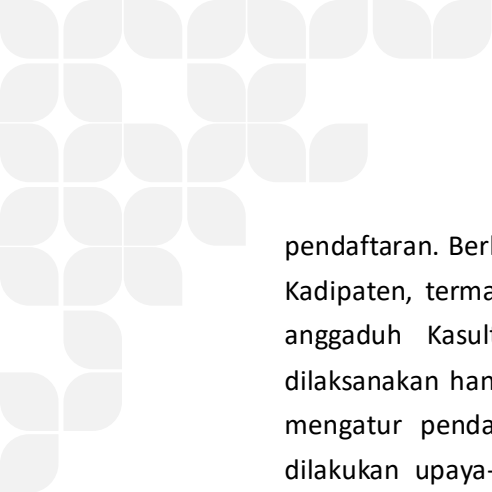
Penetapan Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa sampai dengan tahun 2022 pada masing-masing kabupaten sebagai berikut:

Tabel 3.76. Capaian Penetapan Peraturan Desa/Kalurahan

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Sudah Disahkan
1	Bantul	75	75
2	Gunungkidul	144	144
3	Kulon Progo	87	87
4	Sleman	86	86
	JUMLAH	392	392

Sumber: DPTR DIY, 2023

Berdasarkan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2017, terhadap Tanah Kasultanan maupun Tanah Kadipaten perlu dilakukan penatausahaan pertanahan yang meliputi aspek inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan



pendaftaran. Berkenaan dengan Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, termasuk didalamnya Tanah Desa yang asal-usulnya dari hak anggadah Kasultanan/Kadipaten, dalam implementasinya tidak bisa dilaksanakan hanya dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur pendaftaran tanah secara umum. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dengan Badan Pertanahan Nasional serta mendorong percepatan penyelesaian penyusunan regulasi khusus yang mengatur pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Selain itu, perlu adanya pemahaman mengenai urgensi memelihara dokumen pertanahan agar sejarah asal-usul tanah di desa/kalurahan tetap terjaga guna mendukung terwujudnya tertib administrasi pertanahan.

Pemerintah Desa/Kalurahan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dokumen pertanahan melalui pelaksanaan inventarisasi terhadap seluruh dokumen pertanahan yang dimiliki. Harapannya dalam satu tahun anggaran dapat diselesaikan pemeliharaan seluruh dokumen pertanahan di tiap desa. Jika tidak dimungkinkan, maka Pemerintah Desa/Kalurahan dapat mengidentifikasi dokumen yang akan diprioritaskan untuk dilakukan perawatan dokumen terlebih dahulu. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi keterbatasan kuota layanan pemeliharaan dokumen dari ANRI.

D. PENGHARGAAN

1. Anugerah Media Humas 2022 pada kategori Kampanye Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi, Juara Terbaik II tingkat Nasional, yang diperoleh dari Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat.
2. Anugerah Media Humas 2022 pada kategori Siaran Pers (Media Online) Pemerintah Daerah Provinsi, Juara Terbaik II tingkat Nasional, yang diperoleh dari Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat.
3. Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2022, yang diperoleh dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

4. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, sebagai Provinsi Terbaik III Wilayah Jawa-Bali tahun 2022, yang diperoleh dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
5. Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Peringkat II, Lingkup BAPPEDA & SAMSAT 2022, diperoleh dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
6. Pelaporan Dana BOS SMA Tahun 2022 Peringkat II, atas keberhasilan melakukan koordinasi terhadap sekolah untuk dapat melaporkan realisasi BOSNAS tepat waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan dari Kemendikbudristek, diperoleh dari Direktorat Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
7. Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” 2021 dengan nilai A, yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
8. Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Prima Tingkat DPMPTSP Provinsi 2022 Peringkat ke-3, yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
9. Penghargaan atas terbentuknya Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum 2022, yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri.
10. Penghargaan Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terbesar dengan Peringkat Pertama, yang diperoleh dari Menteri Dalam Negeri.
11. Penghargaan Kepada Balai Kesehatan Dinas Kesehatan DIY sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi Terbaik Kategori Pemerintah Daerah, yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan.
12. Penghargaan Dinas Kesehatan Provinsi dengan Pembinaan Puskesmas Baik (90 - 100% Puskesmas telah Menjadi BLUD), yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan.
13. Tanda Pemingkatan Profil Kesehatan Tingkat Provinsi di Indonesia Tahun 2022, Peringkat ke-II, yang diperoleh dari Menteri Kesehatan.

14. Penghargaan Provinsi dengan Kinerja Baik dalam Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) di Peringkat III, yang diperoleh dari Direktur Surveilans dan Kekarantinaa Kesehatan Kementerian Kesehatan.
15. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2022, Urusan Ketenagakerjaan Sedang Peringkat Terbaik Kedua, Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja peringkat terbaik dan Indikator Utama Penduduk dan Tenaga Kerja peringkat terbaik, yang diperoleh dari Menteri Ketenagakerjaan.
16. Penghargaan Atas upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Bidang Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Dunia Kerja Inklusif, yang diperoleh dari Menteri Ketenagakerjaan.
17. Penghargaan Indeks Maturitas Penerapan Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku ASN (IM-NKK), yang diperoleh dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
18. BKN Awards 2022 Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, peringkat ke-2, yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara.
19. BKN Awards 2022 Kategori Penilaian Kompetensi, Peringkat Pertama, yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara.
20. BKN Awards 2022 Kategori Implementasi Manajemen ASN Terbaik, Peringkat ke-2, yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara.
21. *Surveillance* Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dari *Worldwide Quality Assurance* (WQA) Indonesia, dengan predikat Sangat Baik, yang diperoleh dari *Worldwide Quality Assurance* (WQA) Indonesia.
22. Anugerah Meritokrasi dengan predikat Sangat Baik, yang diperoleh dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
23. Penghargaan kepada Pemerintah Daerah DIY sebagai Pelopor Provinsi Layak Anak tahun 2022, yang diperoleh dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
24. Penghargaan kepada Provinsi DIY sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) Tahun 2022, yang diperoleh dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

25. Penghargaan kepada Provinsi DIY sebagai daerah yang menerapkan pengarusutamaan gender melalui penempatan ASN perempuan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, yang diperoleh dari Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia.
26. Top 45 Inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik terkait Difabel Siaga Bencana (Difagana), yang diperoleh dari Kementerian PAN RB.
27. Pembinaan Terbaik Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat Tahun 2022, yang diperoleh dari Menteri Dalam Negeri.
28. Pembinaan Terbaik Dalam Penyelenggaraan Penegakan Perda Tahun 2022, yang diperoleh dari Menteri Dalam Negeri.
29. Penghargaan atas Komitmen dan kerja keras dalam percepatan pembangunan desa sehingga Seluruh Desa di DIY telah mencapai satus Berkembang, Maju dan Mandiri di peringkat pertama, yang diperoleh dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
30. Penghargaan atas Komitmen dan kerja keras dalam mendorong Transformasi Pengelolaan dana bergulir masyarakat eks-PNPM –MPD menjadi BUM Desa Bersama LKD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diperoleh dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
31. Penghargaan Subroto 2022, Penghargaan di Bidang Geologi Kategori Mitigasi Bencana Geologi Peringkat Pertama, yang diperoleh dari Menteri Energi dan SDM.
32. Penghargaan Pembangunan Daerah daerah kategori Perencanaan dan Pencapaian Daerah Tingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022, peringkat 10 besar, yang diperoleh dari Kepala Bappenas.
33. Penghargaan Bumandala Rajata, Simpul Jaringan Informasi Geospasial Terbaik Kategori Provinsi, yang diperoleh dari Kepala Badan Informasi Geospasial.
34. Anugerah Media Humas 2022 pada kategori Penerbitan Media Internal Pemerintah Daerah Provinsi, Terbaik ke II, yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

35. Anugerah Media Humas 2022 pada kategori Media Sosial, Terbaik ke III, yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
36. Indeks *Computer Security Maturity* Pemda, terbaik di Indonesia, yang diperoleh dari Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.
37. Penghargaan Halal Indonesia Award, Fasilitator Pembiayaan Sertifikasi Halal Terbanyak, Peringkat ke III, yang diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI.
38. Lomba Wana Lestari 2022 Kategori Penyuluh Kehutanan PNS Peringkat ke III, yang diperoleh dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
39. Penghargaan Program Kampung Iklim, Mengembangkan Program Kampung Iklim di Padukuhan Priyan, Tliringgo, Bantul; di Padukuhan Glagahmalang, Cangkringan, Sleman; di Padukuhan Jaranan, Panggungharjo, Bantul; di Padukuhan Cibuk Kidul, Seyegan, Sleman, peringkat Utama, yang diperoleh dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
40. Penghargaan Sekolah Adiwiyata, peringkat Mandiri dan Nasional, yang diperoleh dari Menteri LHK RI dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.
41. Penghargaan Peran dan Kontribusi terhadap Program Sejuta Rumah melalui APBD, yang diperoleh dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Kementerian PUPR.
42. Simpul Jaringan Terbaik Nasional Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), yang diperoleh dari Badan Arsip Nasional RI.
43. Pencapaian Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang dan Pelaksanaan Penataan Ruang (TURBINLAK) Daerah Provinsi Tahun 2022, Peringkat Terbaik ke-4, yang diperoleh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI.
44. Penghargaan kepada PMT/TTIC Provinsi DIY untuk Kategori Omzet Penjualan Online Terbanyak, yang diperoleh dari Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.
45. Anugrah Desa Wisata Indonesia 2022 (Desa Wisata Tepus, Gunungkidul), Juara II Kategori Suvenir Adwi, Yang diperoleh dari Kemenparekraf.

46. Anugrah Desa Wisata Indonesia 2022 (Desa Wisata Widosari, Kulon Progo), Juara III Kategori Desa Wisata Berkembang Adwi, Yang diperoleh dari Kemenparekraf.
47. *Event* Jakarta Fair Kemayoran 2022, Juara III Stand Terbaik Kategori Pemda/BUMN, diperoleh dari PT Jakarta Internasional Expo.

E. KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN

1. Urusan Pemerintahan Wajib

a. Urusan Terkait Dengan Pelayanan Dasar

1) *Urusan Pendidikan*

a) *Kondisi Umum*

Fokus Pemda DIY pada sektor pendidikan di tahun 2022 adalah mengejar ketertinggalan pembelajaran selama masa pandemi melalui pemerataan akses pendidikan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan operasional kepada seluruh sekolah jenjang pendidikan menengah dan khusus, serta kepada para peserta didik yang memiliki keterbatasan ekonomi. Layanan edukasi yang layak bagi para anak berkebutuhan khusus terus dioptimalkan melalui ajang sosialisasi, hal ini guna mendorong kemandirian bagi para siswa yang berkebutuhan khusus agar mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat dalam mengaktualisasi diri.

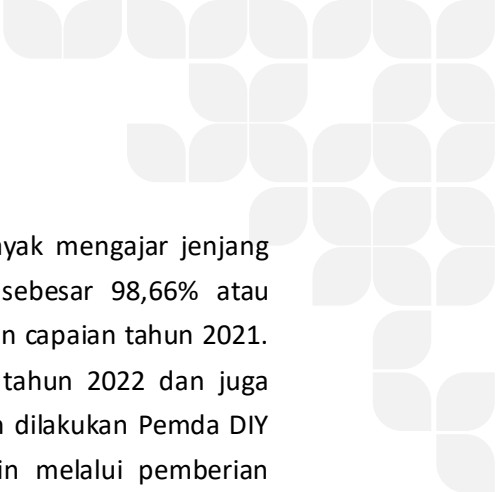
Pemda DIY terus mendorong ketuntasan sarana prasarana di sekolah dan peningkatan kompetensi para pendidik yang merupakan salah satu komponen utama mutu pendidikan dengan tetap mendorong untuk anak usia sekolah tetap bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan dan kelompok umurnya. Gambaran target dan realisasi kinerja Pemda DIY Urusan Pendidikan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.77. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	rerata nilai ujian SMA	N/A	58,41	N/A	N/A	58,41	N/A
2	Rata-rata hasil ujian nasional SMK	rerata nilai ujian SMA	N/A	58,29	N/A	N/A	58,29	N/A
3	Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	persen	98,41	98,63	98,66	100,03	98,63	100,03
4	Capaian APK pendidikan Menengah	persen	108,22	99,74	119,58	119,89	99,74	119,89
5	Capaian APK pendidikan khusus	persen	84,97	86,50	91,84	106,17	86,50	106,17

Sumber: *Disdikpora DIY, 2023*

Pelaksanaan Ujian Nasional SMA dan SMK telah ditiadakan sesuai Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tanggal 1 Februari 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Terkait dengan upaya evaluasi kualitas pendidikan secara nasional, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional, evaluasi pendidikan dibedakan menjadi evaluasi hasil belajar dan evaluasi sistem pendidikan. Evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilakukan oleh pendidik untuk (a) memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan dan (b) menilai pencapaian hasil belajar Peserta Didik dengan mengacu kepada Standar Penilaian Pendidikan dan Standar Kompetensi Lulusan. Sedangkan evaluasi sistem pendidikan dilakukan melalui asesmen nasional dan analisis data satuan pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Pemerintah Daerah.



Capaian indikator Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah tahun 2022 sebesar 98,66% atau meningkat 0,25% dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Capaian ini telah melampaui target tahun 2022 dan juga target akhir RPJMD. Upaya yang telah dilakukan Pemda DIY dalam pencapaian target, antara lain melalui pemberian pendampingan kepada satuan pendidikan agar para pendidik dapat memenuhi kualifikasi minimal yang dipersyaratkan dan mendukung upaya perekrutan calon guru dengan kualifikasi minimal S1.

Capaian APK Pendidikan Menengah tahun 2022 sebesar 119,58% menunjukkan besarnya partisipasi penduduk usia 16-18 tahun di DIY untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Capaian APK lebih dari 100% dimungkinkan karena adanya penduduk yang berusia kurang dari 16 tahun atau lebih dari 18 tahun di jenjang pendidikan menengah serta adanya penduduk luar DIY yang menempuh pendidikan di DIY.

Capaian APK Pendidikan Khusus tahun 2022 adalah 91,84%, meningkat 6,87% dibanding capaian tahun 2021 sebesar 84,97%. Upaya Pemda DIY mendorong pemerataan layanan pendidikan khusus dan memastikan pendidikan yang layak dilakukan melalui penyaluran bantuan operasional, beasiswa pendidikan khusus, fasilitasi persiapan dan pendampingan anak berkebutuhan khusus melalui keberadaan Pusat Layanan Autis di Sentolo Kulon Progo, serta memberikan advokasi kepada masyarakat guna mengurangi stigma negatif terhadap anak-anak berkebutuhan khusus.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Pencapaian target predikat akreditasi belum maksimal untuk jenjang pendidikan menengah dan masih ada sekolah terakreditasi C.
- (b) Masih adanya anak putus sekolah di DIY, baik di jenjang pendidikan menengah maupun khusus.
- (c) Masih terjadinya Kejahatan jalanan yang melibatkan anak usia sekolah

(2) Solusi

- (a) Dalam rangka meningkatkan capaian akreditasi, pendampingan kepada satuan pendidikan telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi akreditasi. Diharapkan melalui pendampingan, kelemahan satuan akreditasi dapat diidentifikasi secara tepat dan dapat dicari solusi terbaik bagi pembenahan capaian standar pendidikan di satuan pendidikan tersebut.
- (b) Dukungan Pemda DIY terhadap penurunan angka putus sekolah diwujudkan antara lain melalui:
 - Pemberian dukungan operasional bagi SMA, SMK, dan SLB negeri dan swasta di DIY melalui BOSDA.
 - Pemberian beasiswa Kartu Cerdas bagi siswa SMA dan SMK serta beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus untuk mencegah peningkatan angka putus sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
 - Perluasan akses bagi pembukaan sekolah baru oleh masyarakat sehingga dapat menjangkau siswa dari lingkungan terdekat.

- Pemberian dukungan kelengkapan sarana prasarana sekolah melalui penyaluran DAK Fisik.
 - Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui *workshop* peningkatan kompetensi, forum guru mata pelajaran, dan penyesuaian kurikulum sekolah.
- (c) Dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan jalanan, sektor pendidikan memiliki kontribusi khususnya dalam pencegahannya. Pendidikan selain diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, juga untuk pembentukan karakter siswa. Diharapkan siswa memiliki karakter beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Pembentukan karakter siswa melalui pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selain itu dilakukan intervensi untuk mengarahkan siswa pada hal yang positif berupa pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa, penyelenggaraan *event-event* bidang kesenian kebudayaan, kompetisi olahraga, sains dan festival serta pembinaan kelompok usaha siswa. Dalam pembinaan terhadap siswa juga menggandeng TNI serta OPD terkait dalam pembinaan wawasan kebangsaan. Upaya lain dilakukan satuan pendidikan dengan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kerawanan seperti kelulusan dengan bekerjasama dengan POLRI. Selain itu, sosialisasi kepada orang tua atau wali murid juga terus dilakukan dengan harapan adanya pengawasan terhadap anak-anaknya agar tidak terjerumus kepada perilaku dan tindakan yang melanggar norma/aturan.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Alokasi anggaran Urusan Pendidikan tahun 2022 sebesar Rp1.536.162.574.526,00 yang dibagi dalam 5 program, 15 kegiatan, dan 256 subkegiatan. Realisasi belanja tahun 2022 adalah Rp1.456.516.510.336,00 atau 94,82% dan realisasi fisik sebesar 99,96%. Deviasi fisik berasal dari penyesuaian pada capaian subkegiatan pemberian beasiswa jaminan pendidikan khusus karena menyesuaikan jumlah siswa lolos validasi, pemberian beasiswa uji kompetensi menyesuaikan jumlah siswa yang lolos seleksi pembiayaan uji kompetensi dan jumlah lembaga yang bekerja sama untuk melaksanakan uji kompetensi, serta penilaian angka kredit menyesuaikan jumlah pendidik jenjang pendidikan menengah dan khusus yang ada di DIY. Deviasi keuangan berasal dari efisiensi pengadaan barang/jasa, pelaksanaan kompetisi siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menyesuaikan dengan petunjuk teknis Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kemendikbudristek mengenai jumlah cabang lomba dan penyelenggaraan seleksi.

Tabel 3.78. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Pemberian beasiswa untuk ABK yang belum bersekolah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Advokasi orang tua dengan anak difabel mengenai pentingnya tetap bersekolah (advokasi pendidikan inklusi)	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100
			Penyediaan transportasi bagi ABK yang rumahnya jauh dari SLB	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100
			Pemberian beasiswa untuk anak usia 15-18 th yang belum bersekolah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100
			Penyediaan akses/bantuan transportasi bagi siswa yang jauh dari sekolah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100
			Pemberian BOSDA kepada sekolah meningkatkan jumlah anak usia sekolah yang belum bersekolah yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah	Angka Putus Sekolah	Persen	0.17	0.11
			Pemberian beasiswa miskin untuk anak usia 15-18th yang belum bersekolah	Angka Putus Sekolah	Persen	0.17	0.11
			Penyediaan sarana prasarana baik yang bersifat fisik bangunan maupun fisik bahan ajar/percontohan	Angka Putus Sekolah	Persen	0.17	0.11
			Peningkatan kualitas PTK dengan mengirim untuk mengikuti diklat yang bersifat daerah, nasional dan internasional	Angka Putus Sekolah	Persen	0.17	0.11
			Penyelenggaraan program magang dengan DUDI bagi peserta didik untuk meningkatkan kompetensi dan life skill lulusan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100
			Sertifikasi keahlian baik bagi PTK dan lulusan program keahlian	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan fasilitas berupa sarana prasarana fisik bangunan berupa panggung, teater maupun fasilitas fisik pendukung berupa alat musik, gamelan, busana tari dll	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100
			Pengiriman PTK untuk mengikuti diklat seni dan budaya baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100
			Pengiriman/pertukaran pelajar di bidang seni dan budaya baik tingkat nasional maupun internasional	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100
			Peningkatan kerja sama dengan dunia pariwisata khususnya perhotelan melalui program magang bagi peserta didik	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100
			Peningkatan kualitas dan mutu PTK untuk memperoleh sertifikasi yang menunjang di bidang pariwisata	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	Persen	99.62	99.96
			Peningkatan program keahlian melalui kegiatan dan pengadaan unit usaha di bidang perhotelan dan pariwisata	Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	Persen	99.62	99.96
			Penyediaan sarana prasarana fasilitas penunjang untuk meningkatkan keterampilan di dunia kreatif, baik yang berupa alat perlengkapan maupun bahan percontohan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	5.75	5.75
			Peningkatan kerja sama antara dunia pariwisata dengan membuka pangsa pasar untuk memasarkan hasil kreasi industri kreatif sebagai cinderamata atau souvenir	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	5.75	5.75
			Peningkatan kemampuan dan keterampilan PTK melalui diklat tingkat daerah, nasional maupun internasional	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sertifikasi bagi PTK agar mampu menciptakan lulusan yang berkemampuan dan terampil	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100
			Penyediaan sarana prasarana berupa fasilitas tempat dan peralatan dan bahan praktek	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100
			Standar keahlian bagi PTK melalui sertifikasi sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan tersandar	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100
			Peningkatan keterampilan dan kemampuan melalui diklat tingkat daerah, nasional maupun internasional bagi PTK	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100
			Kerja sama dengan DUDI melalui program magang bagi peserta didik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100
			Penyiapan PTK yang professional melalui sertifikasi sebagai bentuk pengakuan akan kualitas kemampuan dan kompetensi PTK	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100
			Penyediaan PTK dengan melakukan mapping kebutuhan PTK di SLB dan SM	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100
			Penyediaan PTK sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi dengan BKD	Terwujudnya penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	94.25	94.25
			Peningkatan mutu dan kapasitas melalui pengiriman PTK mengikuti diklat tingkat daerah, nasional maupun internasional	Terwujudnya penata usahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	94.25	94.25
			Penekanan akan tanggung jawab, kewajiban dan hak yang diperoleh sebagai PTK melalui tupoksi yang jelas dan tertata, sebagai tolak ukur pegawai	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	73.75	73.75

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			Perbaikan ruangan baik kelas maupun non kelas yang mengalami kerusakan ringan maupun berat	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	73.75	73.75
			Peningkatan keamanan dan kenyamanan ruang dengan penambahan CCTV, dan meja kursi yang nyaman	Terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100
			Penyediaan peralatan maupun perlengkapan ruang pendukung pendidikan	Terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100
			Penyediaan ruang simpan bagi semua peralatan dan perlengkapan penunjang pendidikan sehingga terdata dengan jelas baik jumlah dan penggunaannya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100
			Penguatan standar kompetensi siswa untuk memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui pemberian sertifikasi peserta didik program keahlian bagi sekolah kejuruan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100
			Pendampingan oleh PTK terhadap bidang minat baik di bidang sains maupun social bagi siswa untuk menerbitkan karya ilmiah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100
			Pembinaan dan pengiriman siswa untuk mengikuti kompetensi keilmuan baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100
			Pembinaan dan pendampingan oleh PTK untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan yang bersifat sederhana namun dibutuhkan dalam menghadapi kehidupan	Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar	peserta didik	2148	3548
				Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar	peserta didik	2148	3548

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.17	0.11
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.17	0.11
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100
				Jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional	Medali	65	20
				Jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional	Medali	65	20
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	83	82.37
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	83	82.37
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	83	82.37
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	83	82.37
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	83	82.37
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	83	82.37
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	45	88
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	45	88
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	45	88

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	45	88
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	45	88
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	45	88
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Penyusunan dokumen perencanaan	dokumen	3	3
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0.1	0.1
				Perencanaan dan Monitoring DAK	jenjang	3	3
				Forum OPD	orang	70	70
				Perencanaan dan Pendampingan SMK BLUD	dokumen	4	4
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0.1	0.1
				Penyusunan DPA dan DPPA	dokumen	2	2
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Assesment Standarisasi Pendidikan Daerah	jenjang	1	1
				Laporan Kinerja Bulanan OPD	bulan	12	12
				Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2022	dokumen	1	1
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	0.1	0.1
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				TPG	tahun	1	1
				Tamsil	tahun	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	40	40
				Gaji dan tunjangan	tahun	1	1
				TPP	tahun	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	40	40
				Bimtek Pengelolaan Keuangan	orang	784	784
				Honor Pengelola Keuangan	orang	13	13
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	40	40
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan laporan keuangan	sekolah dan KPA	138	138
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				Penyusunan pelaporan keuangan bulanan	dokumen	10	10
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	40	40
				Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	dokumen	1	1
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Rekonsiliasi barang aset dan persediaan SMA/SMK/SLB dan UPT	oh	652	652

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0.01	0.01
				Pengelola barang	orang	14	14
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0.02	0.02
				Pengembangan aplikasi dan bimtek pengelolaan administrasi kepegawaian	aplikasi	1	1
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
				Bimtek Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru	orang	40	40
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0.02	0.02
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0.06	0.06
				Alat/Bahan Komponen Listrik/penerangan bangunan	jenis	8	8
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0.06	0.06
				Perlengkapan dan sarana kearsipan	jenis	5	5
				Alat Tulis Kantor	jenis	36	36
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0.06	0.06

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	8	8
				pembelian bendera	buah	2	2
				pembelian umbul-umbul	buah	2	2
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				penggandaan	lembar	400000	400106
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0.06	0.06
				Barang cetakan	jenis	9	9
				jilid	eksemplar	200	184
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0.06	0.06
				langganan surat kabar/majalah	surat kabar	5	5
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah	tahun	1	1
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0.06	0.06
				makan minum rapat	orang/kali	10500	10413
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0.01	0.01
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai RKBMD	jenis	5	5
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				perangko	buah	1725	1704

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0.2	0.2
				materai	buah	330	332
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0.2	0.2
				Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan kawat/faksimil/internet	tahun	1	1
				Jasa Pengolahan Sampah	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				instruktur senam	tahun	1	1
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0.2	0.2
				jasa kebersihan	tahun	1	1
				jasa keamanan	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 6	unit	1	1
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0.06	0.06
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2	unit	12	12
				KIR kendaraan	unit	1	1
				Bahan Bakar Kendaraan	liter	13300	13180
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4	unit	11	11
				Pajak kendaraan dinas roda 6	unit	1	1
				Pajak kendaraan dinas roda 2	unit	12	12
				Pajak kendaraan dinas roda 4	unit	24	24

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor sesuai RKPBMMD	jenis	6	6
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0.06	0.06
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0.06	0.06
				Pemeliharaan Gedung dan Aset	unit	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	tahun	1	1
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0.06	0.06
				Pemeliharaan Instalasi Listrik	tahun	1	1
				Pemeliharaan Jaringan Internet	tahun	1	1
				Pemeliharaan Jaringan Pos dan telekomunikasi	tahun	1	1
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
				Presentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	83	82.37
				Presentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	83	82.37
				Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	Persen	99.62	99.96
				Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB	Persen	99.62	99.96
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Kulon Progo	Persen	81.67	84

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Kulon Progo	Persen	81.67	84
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	Persen	87.68	88.99
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	Persen	87.68	88.99
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.17	0.11
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.17	0.11
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Gunungkidul	Persen	87.41	85.71
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Gunungkidul	Persen	87.41	85.71
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.17	0.11
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.17	0.11
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	83	82.37
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	83	82.37
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota Yogyakarta	Persen	91.03	90.28
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kota Yogyakarta	Persen	91.03	90.28
				Jumlah SLB dengan Akreditasi A	Persen	65.38	82.28
				Jumlah SLB dengan Akreditasi A	Persen	65.38	82.28
				Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar	peserta didik	2148	3548
				Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar	peserta didik	2148	3548
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Bantul	Persen	84.97	83.53

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Bantul	Persen	84.97	83.53
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	Persen	87.68	88.99
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	Persen	87.68	88.99
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.17	0.11
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.17	0.11
				Jumlah SLB dengan Akreditasi A	Persen	65.38	82.28
				Jumlah SLB dengan Akreditasi A	Persen	65.38	82.28
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Sleman	Persen	88.33	86.36
				Persentase sekolah dan program keahlian yang memenuhi SNP di Kabupaten Sleman	Persen	88.33	86.36
				Jumlah medali pada kompetisi nasional dan Internasional jenjang pendidikan khusus	Medali	13	9
				Jumlah medali pada kompetisi nasional dan Internasional jenjang pendidikan khusus	Medali	13	9
				Jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional	Medali	65	20
				Jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional	Medali	65	20
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	83	82.37
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	83	82.37
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	83	82.37
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	83	82.37
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	83	82.37
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	83	82.37
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	45	88

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	45	88
				Jumlah medali pada kompetisi nasional dan Internasional jenjang pendidikan khusus	Medali	13	9
				Jumlah medali pada kompetisi nasional dan Internasional jenjang pendidikan khusus	Medali	13	9
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	45	88
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	45	88
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	45	88
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	45	88
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	45	88
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.17	0.11
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.17	0.11
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	45	88
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	45	88
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.17	0.11
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.17	0.11
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun	ruang	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi			
				Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang telah dibangun	ruang	1	1
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer			
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang telah dibangun	ruang	1	1
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	ruang	2	2
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah			
				Jumlah Perpustakaan sekolah yang telah dibangun	ruang	1	1
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	unit	1	1
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	92	92
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Jumlah Ruang Guru/Kepala sekolah/TU yang telah direhabilitasi Sedang/ Berat	ruang	8	8
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika			
				Jumlah Laboratorium Fisika yang telah direhabilitasi Sedang/ Berat	ruang	8	8
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia			
				Jumlah Laboratorium Kimia yang telah direhabilitasi Sedang/ Berat	ruang	6	6
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer			
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Jumlah Laboratorium Komputer yang telah direhabilitasi Sedang/ Berat	ruang	4	4
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa			
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Jumlah Laboratorium Bahasa yang telah direhabilitasi Sedang/ Berat	ruang	1	1
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah direhabilitasi Sedang/ Berat	ruang	1	1
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhabilitasi Sedang/ Berat	ruang	4	4
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi	unit	14	14
				Pengadaan Mebel Sekolah			
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia	paket	7	7
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang tersedia	paket	10	10
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Basiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan BOSDA Swasta Sekolah Menengah	siswa tahun	1146 1	1146 1
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			
				PPDB Online	sekolah	118	118
				Talkshow siaran pendidikan	tayang	5	5
				Pendataan Dapodik	jenjang	3	3
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pembinaan Karakter Siswa Jenjang Pendidikan Menengah tingkat Provinsi	orang	150	150
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Pembinaan dan seleksi minat, bakat dan kreativitas siswa SMA jenjang Provinsi	bidang	6	6
				Anugerah Prestasi Bidang Dikpora	orang	225	225
				Forum Guru pembina penelitian tingkat provinsi	kali	2	2
				Forum Waka Kesiswaan Tingkat Provinsi	kali	2	2
				Apresiasi Prestasi SEA GAMES dan ASEAN ParaGames	orang	35	35
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
				Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Penelitian Tindakan Kelas	guru	80	80
				Bimtek Penulisan Jurnal	guru	40	40
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Bimtek Penyegaran Angka Kredit Guru	guru	30	30
				Penyediaan Biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dikmensus Kerja sama dengan LPTK	guru	100	100
				Penilaian Angka Kredit Guru	dokumen	5000	4649
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			
				Forum MKKS tingkat Provinsi	kali	2	2
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Tes Penjajagan Hasil Belajar Siswa (TPHBS)	kegiatan	1	1
				Forum Pengawas tingkat Provinsi	kali	2	2
				Forum Tim Pengembang Kurikulum	kali	3	3
				Penguatan kelembagaan bidang pendidikan	lembaga	4	4

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pendampingan sekolah penggerak Tingkat Provinsi	kegiatan	1	1
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			
				Jumlah Sekolah Menengah Atas yang mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	169	169
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	44	44
				Sosialisasi, verifikasi, dan pendampingan	jenjang	1	1
				Pembangunan Ruang Praktik Siswa			
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	11	11
				Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah Dibangun	ruang	22	22
				Pembangunan Ruang Laboratorium			
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	11	11
				Jumlah Ruang Laboratorium yang telah Dibangun	ruang	3	3
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah Dibangun	ruang	2	2
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	11	11
				Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah			
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah Direhabilitasi	ruang	29	29
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	11	11

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala sekolah/TU yang telah Direhabilitasi	ruang	2	2
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	11	11
				Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa			
				Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah Direhabilitasi	ruang	6	6
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	11	11
				Rehabilitasi Ruang Laboratorium			
				Jumlah Ruang Laboratorium yang telah Direhabilitasi	ruang	3	3
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	11	11
				Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	11	11
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah Direhabilitasi	ruang	1	1
				Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	11	11
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah Direhabilitasi	unit	2	2
				Pengadaan Mebel Sekolah			
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	11	11
				Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	paket	22	22
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	11	11
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	paket	41	41
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	11	11
				Pengiriman Uji Kompetensi Siswa SMK	siswa	300	240
				Pemetaan Tamatan Siswa SMK tingkat DIY	sekolah	219	219
				Forum BKK tingkat DIY	sekolah	219	219
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
				Pembinaan dan seleksi minat, bakat dan kreativitas siswa SMK tingkat Provinsi	bidang	3	3
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	11	11
				FKPO SMA SMK tingkat DIY	siswa	80	80
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	11	11
				Forum MKKS SMK DIY tingkat Provinsi	sekolah	219	219
				Publikasi Bidang Pendidikan	kali	25	25
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			
				Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	219	219
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	11	11
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			
				Sosialisasi, verifikasi, dan pendampingan	jenjang	1	1
				Dukungan terhadap capaian Prosentase Sekolah Menengah dengan Akreditasi A	%	11	11
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	2	2
				Dukungan terhadap capaian prosentase SLB yang ter akreditasi A	%	4	4
				Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah			
				Dukungan terhadap capaian prosentase SLB yang ter akreditasi A	%	4	4
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	ruang	3	3
				Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
				Dukungan terhadap capaian prosentase SLB yang ter akreditasi A	%	4	4
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU yang telah direhabilitasi	ruang	2	2
				Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah			
				Dukungan terhadap capaian prosentase SLB yang ter akreditasi A	%	4	4
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhabilitasi	ruang	1	1
				Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah Direhabilitasi	unit	3	3
				Dukungan terhadap capaian prosentase SLB yang ter akreditasi A	%	4	4
				Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas			
				Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang telah Direhabilitasi	ruang	2	2
				Dukungan terhadap capaian prosentase SLB yang ter akreditasi A	%	4	4
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	paket	6	6
				Dukungan terhadap capaian prosentase SLB yang ter akreditasi A	%	4	4
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			
				Dukungan terhadap capaian prosentase SLB yang ter akreditasi A	%	4	4
				Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus	siswa	4683	4675
				BOSDA SLB Swasta	sekolah	70	70
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			
				Dukungan terhadap capaian prosentase SLB yang ter akreditasi A	%	4	4
				Biaya Operasional SLB Negeri	sekolah	9	9
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
				Pembinaan dan seleksi minat, bakat dan kreativitas siswa SMP	bidang	1	1
				Pembinaan Pusat Layanan Keberbakatan	bidang minat/bakat	4	4
				Dukungan terhadap capaian prosentase SLB yang ter akreditasi A	%	4	4
				Pembinaan dan seleksi minat, bakat dan kreativitas siswa SD	bidang	1	1
				Pembinaan dan seleksi minat, bakat dan kreativitas pendidikan khusus	bidang	4	4
				Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	jenjang	4	4
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus			
				Pemberian insentif guru inklusi	orang	115	115
				Pemberian insentif bagi GTY, PTY SLB, SMA, SMK	orang	1160	1143
				Penilaian kinerja kepala sekolah	sekolah	127	127
				Dukungan terhadap capaian prosentase SLB yang ter akreditasi A	%	4	4

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus			
				Advokasi Pendidikan Khusus	kali	25	25
				Dukungan terhadap capaian prosentase SLB yang ter akreditasi A	%	4	4
				Pendampingan Satuan Pendidikan Aman Bencana	sekolah	35	35
				Forum MKKS dan TPK SLB: kurikulum dan penyamaan persepsi	sekolah	79	79
				Layanan Terapi, Klas Transisi dan Assesment	anak	100	132
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			
				Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	79	79
				Dukungan terhadap capaian prosentase SLB yang ter akreditasi A	%	4	4
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			
				Dukungan terhadap capaian prosentase SLB yang ter akreditasi A	%	4	4
				Sosialisasi, verifikasi, dan pendampingan	jenjang	1	1
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	Persen	87.68	88.99
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten	Persen	87.68	88.99
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			
				Dukungan terhadap capaian prosentase peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan khusus	%	0.1	0.1
				Pengelolaan Pemetaan Data Kebutuhan Guru	sekolah	127	127

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			
				Identifikasi, verifikasi dan sinkronisasi NUPTK dan NRG	sekolah	50	50
				Identifikasi, Verivikasi dan sinkronisasi data usulan Tamsil SMA, SMK dan SLB	sekolah	75	75
				Identifikasi, Verivikasi dan sinkronisasi data usulan TPG SMA, SMK dan SLB	sekolah	230	230
				Sosialisasi dan sinkronisasi kebijakan peraturan TPG dan Tamsil SMA, SMK dan SLB	sekolah	228	228
				Sosialisasi Regulasi Perlindungan PTK	sekolah	150	150
				Dukungan terhadap capaian prosentase peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan khusus	%	0.1	0.1
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.17	0.11
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.17	0.11
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.17	0.11
				Angka Putus Sekolah	Persen	0.17	0.11
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	45	88
				Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah	Medali	45	88
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	83	82.37
				Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A	Persen	83	82.37
				Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
				Perijinan satuan Pendidikan Menengah	tahun	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap capaian persentase ketersediaan layanan pengendalian perizinan pendidikan	%	0.003	0.003
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
				Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter	Persen	48.42	0
				Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter	Persen	48.42	81.26
				Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter	Persen	48.42	0
				Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter	Persen	48.42	81.26
				Pembinaan Muatan Lokal			
				Festival Budaya Pendidikan Khusus	SLB	79	79
				Pendataan anak berkebutuhan khusus	kelurahan/kelurahan guru	438	438
				Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Berbasis Budaya		520	520
				Olimpiade Bahasa dan Aksara Jawa	Event	1	1
				Integrasi nilai-nilai karakter lokal dalam pendidikan PAUD HI	Orang	500	500
				Penyelenggaraan Operasional TPA Amongputra Kepatihan	Tahun	1	1
				Ngudar Kawruh Tembang	episode	10	10
				Pemberian makanan tambahan dan susu bagi SLB Negeri	siswa	1435	1393
				Biaya Asrama SLB Negeri	siswa	90	89
				Kartu Cerdas	siswa	15000	15000
				Satu Abad Taman Siswa	event	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Evaluasi dan monitoring pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di sekolah/madrasah	SMP Negeri/Swasta	534	534
				Gerakan Seniman Masuk Sekolah	sekolah	20	20
				Beasiswa inklusi jenjang SD	Siswa	470	470
				Yogyakarta Young Leader (Pertukaran pelajar ke Victoria Melbourne)	Technical meeting	1	1
				Beasiswa inklusi jenjang SMA/SMK	siswa	100	84
				Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan	%	100	100
				Penyelarasan Kurikulum Bahasa Jawa	guru	400	400
				Beasiswa inklusi jenjang SMP	Siswa	150	150
				Gladi Kawruh	episode	8	8
				Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jenis kegiatan	5	5
				Model Manajemen Kelompok Usaha Siswa Memberantas Kemiskinan (DELMANKU SIBERKIN)	SMK	9	9
				Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan			
				Penyediaan Peralatan Penunjang Pendopo SMKN 1 Kasihan	paket Soundsystem	1	1
				Laboratorium Seni dan Budaya	sekolah	2	2
				Penyediaan Peralatan Penunjang Auditorium SMKN 2 Kasihan	paket Soundsystem	1	1
				Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan	%	100	100
				Penyediaan Peralatan Penunjang Auditorium SMKN 2 Kasihan	Paket Trap Kursi	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Peralatan Penunjang Auditorium SMKN 2 Kasihan	unit AC	1	1
				Penyediaan Peralatan Penunjang Auditorium SMKN 2 Kasihan	paket Lighting	1	1
				Penyediaan Peralatan Penunjang Pendopo SMKN 1 Kasihan	paket Lighting	1	1
				Penyediaan Peralatan Penunjang Auditorium SMKN 2 Kasihan	buah Tabung Pemadam	6	6
				Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta			
				Penyelenggaraan operasional akademi komunitas seni dan budaya Yogyakarta	prodi	3	3
				Dukungan terhadap capaian peningkatan budaya takbenda yang dilestarikan	%	100	100

2) *Urusan Kesehatan*

a) *Kondisi Umum*

Program kegiatan Urusan Kesehatan masih ditujukan pada upaya penanganan pandemi Covid-19 dengan fokus menerapkan strategi antisipasi dampak kesehatan. Program kegiatan juga ditujukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan lainnya sesuai amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti permasalahan kedaruratan dan potensi bencana lainnya, *multiple burden disease* dari penyakit tidak menular degeneratif, penyakit menular infeksi dan infeksi baru (*re-emerging and new emerging disease*) serta potensi kejadian luar biasa, permasalahan gizi dan kesehatan ibu dan anak, serta permasalahan dalam pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan.

Kasus kematian ibu pada tahun 2022 sebanyak 43 kasus, menurun dibanding tahun 2021 yaitu 131 kasus. Penurunan ini seiring dengan menurunnya kasus Covid-19. Penyebab tertinggi kematian ibu pada tahun 2022 adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, serangan jantung dan penyakit tidak menular lainnya serta diperparah oleh adanya kondisi 3T (terlambat merujuk, terlambat sampai, dan terlambat mendapat pertolongan), juga kualitas kesehatan ibu hamil.

Upaya Pemda DIY dalam menurunkan angka kematian ibu pada masa pandemi Covid-19 dengan diterbitkan Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Nomor 441/04561 tentang Percepatan Penanganan Rujukan Maternal Dengan Covid-19 di Masa Pandemi Covid-19, mengoptimalkan vaksinasi Covid-19 bagi ibu hamil, melakukan pemantauan kesehatan ibu hamil melalui Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak (SIMKIA), meningkatkan status gizi selama kehamilan, dan perbaikan gizi pada ibu hamil dilakukan guna menekan angka kematian ibu.

Angka *stunting* DIY terus dikendalikan dan ditekan antara lain dengan mengoptimalkan pelayanan melalui posyandu, pemberian makanan pada ibu hamil, ibu hamil wajib mengonsumsi tablet tambah darah, inisiasi Menyusui Dini (IMD), pemberian ASI eksklusif, pemberian Makanan Pendamping ASI bagi anak usia 6-24 bulan, dan pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak.

Tabel 3.79. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	75,19	73,28	76,33	104,16	73,28	104,16
3	Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa	%	81,39	75	84,34	112,45	75	112,45
4	Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan (paru)	%	78,9	81,3	81,3	100	81,3	100

Sumber: Dinkes DIY, 2023

Indikator Persentase Puskesmas Melaksanakan Program Jogja Sehat Dengan Pendekatan Keluarga tahun 2022 tercapai 100%. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran didukung oleh pembinaan, pendampingan dan pengawasan secara intensif hasil kolaborasi antara Dinas Kesehatan DIY dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota, serta adanya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Indikator Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi tahun 2022 tercapai 104,16%, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sasaran ini berhasil dicapai, bahkan

melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12/2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit, dicapai melalui sosialisasi, bimbingan teknis akreditasi, dan pendampingan oleh Dinas Kesehatan DIY, kabupaten/kota, dan Lembaga terkait. Penguatan komitmen seluruh tenaga puskesmas, pemenuhan anggaran pendampingan dan akreditasi puskesmas yang berasal dari DAK non fisik, validasi data sarana prasarana dan alat, serta munculnya beragam inovasi dari puskesmas juga turut andil dalam pencapaian target indikator tersebut.

Puskesmas di DIY berjumlah 121, semua telah terakreditasi dengan status: 14 Puskemas terakreditasi paripurna, 65 Puskesmas terakreditasi utama, dan 42 Puskesmas terakreditasi madya. Adapun 79 rumah sakit di DIY, telah melakukan re-rakreditasi (akreditasi ulang) sebanyak 49 rumah sakit (62%) dengan capaian 47 rumah sakit terakreditasi paripurna dan 2 rumah sakit terakreditasi utama.

Indikator Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa yang tertuang dalam Pergub Nomor 18 Tahun 2021 dengan target tercapai 112,45%. Faktor pencapaian target diantaranya adanya komitmen seluruh komponen yang ada di Rumah Sakit Jiwa Grhasia, terpenuhinya standar sarana, sumber daya manusia (SDM) dan sistem kerja yang ditetapkan di Rumah Sakit Jiwa Grhasia.

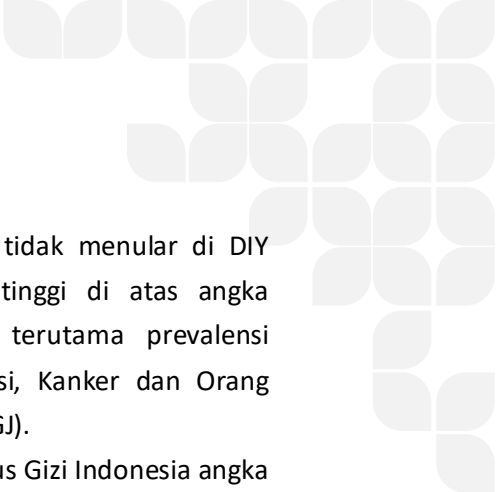
Indikator Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan target tercapai 100%. Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran didukung oleh komitmen seluruh komponen dan

dipenuhinya standar sarana, SDM dan sistem kerja di Rumah Sakit Khusus Paru Respira sehingga mutu pelayanan di Rumah Sakit Khusus Paru Respira meningkat.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Pandemi Covid-19 masih menjadi permasalahan urusan kesehatan. Pada tahun 2022 tercatat temuan kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 230.078 orang terdiri dari pasien sembuh sebanyak 223.599, masih dalam perawatan sebanyak 406 orang dan yang meninggal sebanyak 6.073 orang.
- (b) Masih ditemukan kasus kematian ibu di DIY pada tahun 2022 sebanyak 43 kasus. Jumlah tersebut turun dari jumlah kasus tahun 2021 sebanyak 131 kasus seiring dengan menurunnya kasus Covid-19. Penyebab tertinggi kematian ibu pada tahun 2022 adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, serangan jantung dan penyakit tidak menular lainnya serta diperparah oleh adanya kondisi 3T (terlambat merujuk, terlambat sampai, dan terlambat mendapat pertolongan), juga kualitas kesehatan ibu hamil.
- (c) Kasus kematian bayi di DIY tercatat fluktuatif. Berdasarkan data, pada tahun 2019 tercatat 233 kasus, tahun 2020 naik menjadi 282 kasus, tahun 2021 turun menjadi 259 kasus, dan di tahun 2022 mengalami kenaikan lagi sehingga mencapai 300 kasus. Faktor penyebab kematian bayi terbesar diantaranya: Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), adanya kelainan kongenital dan terjadinya asfiksia.


- 
- (d) Jumlah penderita penyakit tidak menular di DIY termasuk dalam kategori tinggi di atas angka nasional (Riskesmas 2018) terutama prevalensi Diabetes Melitus, Hipertensi, Kanker dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
- (e) Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia angka *stunting* DIY pada tahun 2022 sebesar 16,4 %, angka tersebut turun dari kondisi tahun 2021 sebesar 17,3%. Prevalensi *stunting* tertinggi di DIY berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul dengan angka prevalensi sebesar 23,6% dan terendah di Kota Yogyakarta dengan angka prevalensi sebesar 13,8%. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.
- (f) Prevalensi KEP berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2021 sebesar 8,55%, dan tahun 2022 naik menjadi sebesar 10,55%. Faktor penyebab kekurangan Energi Protein pada usia balita antara lain disebabkan kurangnya asupan makanan dengan gizi seimbang, dan atau pola asuh yang kurang optimal, disamping adanya penyakit penyerta serta lingkungan yang kurang sehat. Kekurangan Energi Protein (KEP) merupakan masalah gizi utama pada usia balita karena dapat menjadi faktor penyebab *underweight* atau berat badan kurang menurut umur.

(2) Solusi

- (a) Penanganan pandemi *Covid-19* melanjutkan strategi penguatan 5M, pencegahan penularan *Covid-19* di masyarakat, dan penguatan 3T (*tracing, testing, dan treatment*). Dalam rangka mempercepat pemulihan, Pemda DIY telah meningkatkan cakupan vaksinasi *Covid-19* dengan dukungan Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 42/SE/XII/2021 tentang Percepatan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Tahun 2022 cakupan vaksinasi dosis primer (dosis 1 dan 2) di DIY mencapai 104,16%. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemda DIY antara lain percepatan vaksinasi *booster*, penyediaan logistik vaksin, intensifikasi komunikasi informasi serta melakukan kolaborasi *antihoax* dan penyediaan layanan *hotline*.
- (b) Upaya untuk menurunkan angka kematian ibu antara lain dengan mengoptimalkan pemeriksaan ibu hamil untuk mendeteksi dini resiko komplikasi pada kehamilan maupun persalinan, pelaksanaan Sistem Rujukan, penguatan peran lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat, meningkatkan cakupan vaksinasi ibu hamil dan penguatan pada konseling *online* sehingga kesehatan ibu hamil bisa tetap terpantau. Selain itu dilakukan upaya perbaikan gizi pada ibu hamil untuk menekan angka kematian ibu dengan pemberian tablet penambah darah pada semua ibu hamil dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK).
- (c) Upaya untuk menekan angka kematian bayi antara lain dengan mendorong ibu hamil untuk melakukan persalinan ke fasilitas kesehatan, pemantauan

standar mutu fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kapasitas petugas kegawatdaruratan *maternal neonatal*, melakukan *review* sistem rujukan yang memiliki dampak pada kebutuhan kegawatdaruratan *maternal neonatal* serta dengan kepastian penjaminan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Ibu dan bayinya secara komprehensif.

- (d) Upaya Pemda DIY untuk menekan angka Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan meningkatkan program promotif preventif terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dengan beberapa inovasi. Inovasi tersebut antara lain untuk meningkatkan upaya promotif preventif, kuratif dan rehabilitatif juga dilakukan dengan tujuan untuk melakukan kontrol terhadap PTM antara lain : 1) Gendhis Manis (Gerakan Hidup Sehat Melawan Diabetes Mellitus); 2) Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM dengan melakukan deteksi dini untuk usia 15 tahun ke atas melalui pelayanan terpadu (pandu) pada penyakit tidak menular di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau rujukan dari Posbindu PTM sebagai salah satu UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat). Pos Binaan Terpadu (Posbindu) terus ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Peningkatan kualitas dan kuantitas Posbindu di lingkungan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Posbindu Desa di DIY yang telah mencapai 96%.
- (e) Angka *stunting* DIY terus dikendalikan dan ditekan dengan mengoptimalkan pelayanan melalui posyandu, pemberian makanan pada ibu hamil, ibu hamil wajib mengonsumsi tablet tambah darah,



Inisiasi Menyusui Dini (IMD), pemberian ASI eksklusif, pemberian Makanan Pendamping ASI bagi anak usia 6-24 bulan, dan pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak. Cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) pada anak usia 12-23 bulan di Daerah Istimewa Yogyakarta menempati urutan tertinggi dibanding angka nasional (Risikesdas 2018).

- (f) Upaya Pemda DIY untuk meningkatkan gizi anak dan untuk menekan angka Kurang Energi Protein (KEP) serta *stunting* diantaranya dengan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin, sosialisasi dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan konsumsi makanan bergizi seimbang dan kaya akan protein hewani untuk anak usia 6-23 bulan. Selain itu telah dilakukan advokasi lintas sektor, pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK) jambanisasi juga merupakan upaya untuk menekan angka KEP dan *stunting*. Upaya lain yang dilakukan antara lain dengan percepatan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas data skrining anak sekolah yang didukung inovasi aplikasi *MobScreen (Mobile Screening)* Penjaringan Kesehatan anak sekolah.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Pada tahun 2022 Urusan Kesehatan dilaksanakan melalui 5 Program dan 49 subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp98.225.293.955,00. Secara keseluruhan realisasi keuangan sebesar Rp55.092.986.938,00 (56,09%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.80. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	1. Peningkatan cakupan, mutu, akses dan keberlangsungan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
			2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat serta intervensi masalah gizi di masyarakat seperti stunting	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	0	
			3. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta penggalangan kerja sama melalui Corporate Social Responsibility dengan pihak swasta	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	
			4. Peningkatan Penyehatan Lingkungan serta implementasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) melalui pembinaan dan pengawasan bersama dengan puskesmas	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	0	
			5. Peningkatan Pencegahan serta Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	
			6. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pengendalian penyakit menular seperti tenaga epidemiologi, sanitasi dan laboratorium terutama mengantisipasi jika terjadi wabah	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	%	100	0	
			7. Deteksi dini secara pro-aktif untuk penyakit menular	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	%	100	100	
			8. Peningkatan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	0	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			9. Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan	Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100	
			10. Penguatan tenaga SDM Kesehatan melalui pelatihan dan perijinan	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	0	
			11. Penguatan mutu advokasi, pembinaan dan pengawasan	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	
			12. Pengembangan pembiayaan jaminan kesehatan penyangga sebagai komplemen dan suplemen	Persentase pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, dan pelayanan Kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan	%	46.52.00	0	
			13. Penguatan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi	Persentase pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, dan pelayanan Kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan	%	46.52.00	46.52.00	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
			1. Tersusunnya dokumen perencanaan dokumen sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. Renstra			1	1	
			3. ROPK 2022		dokumen	1	1	
			4. perubahan renja 2022		dokumen	1	1	
			Dukungan terhadap % peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan		Persen	100	100	
			2. Renja 2023		dokumen	1	1	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD					
			DPA perubahan		dokumen	1	1	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. DPA	dokumen	1	1
				Dukungan terhadap % peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	100
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Dukungan terhadap % peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	100
				01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	dokumen	1	1
				02. Rekomendasi pelaksanaan kegiatan OPD	dokumen	1	1
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				Dukungan terhadap % peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	100
				Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	tahun	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Dukungan terhadap % peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	100
				Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	bulan	12	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Dukungan terhadap % peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	100
				Laporan Tahunan OPD	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				Laporan Bulanan/Fungsional	dokumen	24	24
				Dukungan terhadap % peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	100
				Laporan Semester/Prognosis	dokumen	1	1
				Pengamanan Barang Milik Daerah OPD			
				Dukungan terhadap % pemenuhan pelayanan administrasi daerah	Persen	100	100
				Pembayaran PBB Dinkes DIY	Tahun	1	1
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Pembayaran Honor pengurus barang	OB	36	36
				Dukungan terhadap % pemenuhan pelayanan administrasi daerah	Persen	100	100
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
				Dukungan terhadap % peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas SD aparatur	Persen	100	100
				meningkatnya kompetensi SDM	%	100	100
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Dukungan terhadap % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100
				Pembelian alat listrik dinkes diy	paket	1	1
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Pembelian ATK	Jenis	17	17
				Pembelian laptop	Unit	2	2
				Pembelian PC	Unit	2	2
				Dukungan terhadap % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100
				Pembelian alat kebersihan	paket	1	1
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
				Pengisian tabung pemadam kebakaran	paket	1	1
				Logistik coldroom	liter	270	270
				Dukungan terhadap % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Dukungan terhadap % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100
				Barang cetakan dan penggandaan	paket	1	1
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Dukungan terhadap % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100
				Bahan bacaan surat kabar	bulan	12	12
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Penyediaan makan minum rapat dan perjalanan dinas	Tahun	1	1
				Dukungan terhadap % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD			
				pengembangan aplikasi/ website	paket	1	1
				Dukungan terhadap % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Pembelian komputer	unit	1	1
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah	Persen	100	100
				AC PSC	unit	1	1
				Pembelian laptop	unit	2	2
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah	Persen	100	100
				Pembelian tangga	unit	2	2
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	Persen	100	100
				Surat menyurat terproses dengan baik	paket	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Pembayaran tagihan air, listrik, telepon, fax dan zoom	tahun	1	1
				Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	Persen	100	100
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	Persen	100	100
				Pembayaran honor pengelola keuangan dan pengurus barang, honor tenaga non PNS, cleaning servis dan satpam	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Terpelihara kendaraan dinas 27 roda 2 dan 23 roda 4	paket	1	1
				Pembayaran STNK 27 roda 2 dan 23 roda 4	tahun	1	1
				Dukungan terhadap % pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100
				Kir Pick up	kali	2	2
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Terpelihara perlengkapan dan peralatan kantor	Tahun	1	1
				Dukungan terhadap % pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Terpelihara lift	kali	4	4
				Dukungan terhadap % pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100
				Terpelihara gedung kantor	Tahun	1	1
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
				Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	%	62.84	0
				Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	%	62.84	80.44.00
				Persentase Balita Sehat	%	41.22.00	0
				Persentase Balita Sehat	%	41.22.00	41.25.00
				Persentase Desa Sehat Mandiri	%	76.92	0
				Persentase Desa Sehat Mandiri	%	76.92	79.44.00
				Persentase Kefarmasian, Perbekkes dan Makanan sesuai Standar	%	86.48.00	0
				Persentase Kefarmasian, Perbekkes dan Makanan sesuai Standar	%	86.48.00	87.09.00
				Jumlah Layanan Pengembangan Laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat	Layanan	15	0
				Jumlah Layanan Pengembangan Laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat	Layanan	15	15
				Persentase pasien yang mampu ADL (activity daily living)	%	90	0

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase pasien yang mampu ADL (activity daily living)	%	90	100
				Persentase Angka pasien cedera karena fiksasi	%	1	0
				Persentase Angka pasien cedera karena fiksasi	%	1	0
				Persentase waktu tunggu pelayanan rawat jalan jiwa ≤ 60 menit	%	75	0
				Persentase waktu tunggu pelayanan rawat jalan jiwa ≤ 60 menit	%	75	96.62
				Persentase tingkat penggunaan tempat tidur (Bed occupancy rate/BOR)	%	65	0
				Persentase tingkat penggunaan tempat tidur (Bed occupancy rate/BOR)	%	65	51.29.00
				Persentase waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 30 menit	%	90	0
				Persentase waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 30 menit	%	90	89.17.00
				Rata-rata jam pelatihan karyawan dalam setahun	%	80	0
				Rata-rata jam pelatihan karyawan dalam setahun	%	80	90
				Penyelesaian berkas klaim pasien jaminan kesehatan	%	80	0
				Penyelesaian berkas klaim pasien jaminan kesehatan	%	80	89.47.00
				Penyusunan laporan tahunan RS	%	83	0
				Penyusunan laporan tahunan RS	%	83	85
				Pemenuhan SDM sesuai ABK	%	90	0
				Pemenuhan SDM sesuai ABK	%	90	89
				Kesesuaian inventarisasi barang RS	%	100	0

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kesesuaian inventarisasi barang RS	%	100	100
				Persentase Penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	%	100	0
				Persentase Penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	%	100	100
				Jenis layanan jaminan kesehatan Komplemen dan Suplemen kesehatan	jenis	27	0
				Jenis layanan jaminan kesehatan Komplemen dan Suplemen kesehatan	jenis	27	27
				Angka keberhasilan pengobatan (sucess rate) TB	%	86	0
				Angka keberhasilan pengobatan (sucess rate) TB	%	86	88
				Angka kematian Pasien > 48 Jam	%	1	0
				Angka kematian Pasien > 48 Jam	%	1	01.03
				Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari	%	80	0
				Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari	%	80	121.06.00
				Bed Occupancy Rate (BOR)	%	60	0
				Bed Occupancy Rate (BOR)	%	60	26.53.00
				Length of stay (LOS)	hr	5	0
				Length of stay (LOS)	hr	5	03.21
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				Sarana Produksi dan Distribusi Makanan yang di bina sesuai standar	sarana	30	30
				Obat, Vaksin dan Alat kesehatan terdistribusi ke Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	5	5

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terwujudnya distribusi alat kesehatan, obat, vaksin dan sarana distribusi makanan yang di bina sesuai kebutuhan	Kab/Kota	5	5
				Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			
				Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	1	1
				Terwujudnya distribusi alat kesehatan, obat, vaksin dan sarana distribusi makanan yang di bina sesuai kebutuhan	Kab/Kota	5	5
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			
				Sasaran yang mendapat Imunisasi Covid-19	%	80	100.47.00
				penyediaan peralatan Covid-19	macam	9	9
				reagen pemeriksaan Covid-19	paket	1	1
				Dukungan terhadap presentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian PMPTM	Persen	100	100
				hibah PMI	tahun	1	1
				penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	%	100	100
				Obat Bufferstock dan Perbekes Tersedia	paket	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
				Dukungan terhadap presentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian PMPTM	Persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyelidikan Epidemiologi	%	100	100
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			
				Persentase KN1	%	86	86.33.00
				Persentase K4	%	74	78.68
				Dukungan terhadap presentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian PMPTM	Persen	100	100
				Anak baduta mendapat imunisasi lanjutan/booster	%	90	88.01.00
				Anak kurang 1th mendapat imunisasi lengkap	%	95	98.01.00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif			
				Persentase Puskesmas PKPR	%	73	85.09.00
				Dukungan terhadap presentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian PMPTM	Persen	100	100
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut			
				Persentase Puskesmas Santun Lansia	%	94	95
				Dukungan terhadap presentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian PMPTM	Persen	100	100
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
				Persentase Penurunan Ibu Hamil KEK	%	00.05	1
				Persentase Penurunan Balita Kurus	%	00.02	00.04
				Dukungan terhadap presentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian PMPTM	Persen	100	0
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
				Dukungan terhadap presentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian PMPTM	Persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Puskesmas melaksanakan prgoram POS UKK	Puskesmas	121	121
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
				Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	100	63.93
				Dukungan terhadap presentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian PMPTM	Persen	100	100
				BKK jambanisasi	kab/kota	4	4
				Tempat-tempat umum dilakukan IKL	kab / kota	5	5
				Penilaian Kab/Kota Sehat	kab / kota	5	5
				Kesepakatan pengelolaan limbah medis di fasyankes	dokumen	1	1
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
				Kabupaten /kota melaksanakan program Desa Siaga	kab / kota	5	5
				Dukungan terhadap presentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian PMPTM	Persen	100	100
				Kampanye kesehatan melalui media	jenis	2	2
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
				Kab/Kota yang melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Program PISP/Diare	kab/kota	5	5
				Kab/Kota yang melakukan gerakan rumah 1 jumantik	kab/kota	5	5
				Kab/Kota yang melaksanakan PANDU PTM	kab/kota	5	5
				Kab/Kota yang melaksanakan posbindu sesuai standar	kab/kota	5	5

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kab/Kota yang melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Program Hepatitis	kab/kota	5	5
				Kab/kota yang melakukan "pemahaman stigma dan diskriminasi" HIV AIDS	kab/kota	5	5
				Kab/Kota yang melaksanakan skrining jiwa	kab/kota	5	5
				DPS yang tersosialisasikan ISTC (International Standart For Tuberculosis Care)	DPS	125	125
				Klinik yang melaksanakan strategi DOTS	klirik	100	100
				Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian kasus malaria	kab/kota	5	5
				Sosialisasi Eliminasi Kesehatan Jiwa hibah KPAD	kali tahun	15 1	15 1
				Dukungan terhadap presentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian PMPTM	Persen	100	100
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
				Dukungan terhadap presentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian PMPTM	Persen	100	100
				FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana dan jaminan kesehatan	RS/ FKTL	10	10
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
				Kab/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert system) minimal 95%	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap presentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian PMPTM	Persen	100	100
				Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			
				Fasyankes yang dibina dalam memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar	fasyankes	45	45
				RS mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan	rs	80	80
				Puskesmas mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan dasar	puskesmas	121	121
				Klinik mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan	klirik	40	40
				BKK pengadaan Alat Kesehatan RSUD Saptosari	paket	1	1
				Dukungan terhadap presentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian PMPTM	Persen	100	100
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
				Pengembangan pelayanan SPGDT	%	100	100
				Dukungan terhadap presentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian PMPTM	Persen	100	100
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			
				Dukungan terhadap presentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian PMPTM	Persen	100	100
				a Jumlah Keluarga yang Sudah dikunjungi dan Diintervensi Masalah	Keluarga	809313	812945

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			
				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			
				Jumlah materi tentang informasi kesehatan yang lengkap	materi	180	248
				Terwujudnya Pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan	Persen	100	100
				Buku Data Kesehatan Tahun 2021	dokumen	1	1
				Buku Profil Kesehatan Tahun 2021	dokumen	1	1
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
				Jumlah pengelolaan sistem informasi kesehatan	sistem informasi	6	6
				Terwujudnya pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan	Persen	100	100
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			
				Terwujudnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mendapatkan Pembinaan Mutu	Persen	100	100
				laboratorium yang mendapatkan pembinaan mutu	laboratorium	5	5
				Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu	Puskesmas	121	121
				Klinik Pratama yang mendapatkan pembinaan mutu	Klinik Pratama	30	30
				Rumah Sakit Yang mendapatkan pembinaan mutu	Rumah Sakit	80	80
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Fasyankes Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan SDM dan Pembiayaan	%	80.19.00	0
				Persentase Fasyankes Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan SDM dan Pembiayaan	%	80.19.00	81.34.00
				Persentase Mantan linatih yang meningkat kompetensinya	%	68	0
				Persentase Mantan linatih yang meningkat kompetensinya	%	68	87.72
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
				Dukungan terhadap presentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian PMPTM 1	Persen	100	100
				FKTP dan FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana	bulan	12	12
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
				Persentase Kefarmasian, Perbekkes dan Makanan sesuai Standar	%	86.48.00	0
				Persentase Kefarmasian, Perbekkes dan Makanan sesuai Standar	%	86.48.00	87.09.00
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional			
				Terwujudnya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan izin usaha kecil obat tradisional	Persen	100	100
				Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional yang mendapatkan pembinaan	Sarana	35	35

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan cakupan, mutu, akses dan keberlangsungan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat serta intervensi masalah gizi di masyarakat seperti stunting Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta penggalangan kerja sama melalui Corporate Social Responsibility dengan pihak swasta Peningkatan Penyehatan Lingkungan serta implementasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) melalui pembinaan dan pengawasan bersama dengan puskesmas Peningkatan Pencegahan serta Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pengendalian penyakit menular seperti tenaga epidemiologi, sanitasi dan laboratorium terutama mengantisipasi jika terjadi wabah Deteksi dini secara pro-aktif untuk penyakit menular Peningkatan Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan Penguatan tenaga SDM Kesehatan melalui pelatihan dan perijinan Penguatan mutu advokasi, pembinaan dan pengawasan 	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA KEBUDAYAAN Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional		0	0
				3 Revitalisasi Penyehat Tradisional di Area Wisata	orang	20	20
				11 Konsultasi Teknis Kesehatan Tradisional	event	1	1
				Dukungan terhadap % peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	Persen	100	100
				7 Pameran Jamu Herbal dan Kestrad DIY	event	1	1
				1 Kajian Pengembangan Kesehatan Tradisional	dokumen	2	2
				2 Pelatihan Kestrad Nakes di RS	orang	20	20
				5 Workshop Saintifikasi Jamu	orang	30	30

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			12. Pengembangan pembiayaan jaminan kesehatan penyangga sebagai komplemen dan suplemen	4 Penyehat Tradisional mendapatkan pembinaan legalitas pelayanan	orang	30	30
			13. Penguatan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi	8 lomba Film, Vlog dan iputan Kestrad	event	3	3
				6 Terkoordinasinya (Asosiasi Hatra, SP3T, Sainifikasi Jamu dan layanan Kestrad)	Dokumen	1	1

3) *Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

a) *Sub Urusan Pekerjaan Umum*

(1) *Kondisi Umum*

Pelaksanaan Sub Urusan Pekerjaan Umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar. Pelayanan dasar tersebut meliputi pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Drainase, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciptakaryaan (Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya) dan Sub Urusan Jasa Konstruksi.

Untuk pelaksanaan Sub Urusan Sumber Daya Air dan Sub Urusan Drainase mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta turunan peraturan undang-undang lainnya yang terkait dan relevan dengan pengelolaan sumber daya air.

(a) Pelaksanaan penyelenggaraan sub urusan sumber daya air sebagai berikut :

- Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan pada 41 Daerah Irigasi Kewenangan DIY berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, dengan total luas baku sawah sebesar 13.987 ha, yang terdiri dari 35 daerah irigasi lintas kabupaten/kota dan 6 daerah irigasi utuh dengan luasan (1000 – 3000 ha) yang berada di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo.
- Melaksanakan penyediaan air baku dari air permukaan melalui pengembangan dan pengelolaan embung yang berjumlah 25

embung dan tersebar di DIY dengan rincian: (1) Kabupaten Sleman 8 unit; (2) Kabupaten Bantul 3 unit; (3) Kabupaten Kulon Progo 4 unit; (4) Kabupaten Gunungkidul 9 unit; dan (5) Kota Yogyakarta 1 unit.

- Melaksanakan penyediaan air baku domestik dari air tanah dalam melalui pembangunan sumur bor air tanah dalam sebanyak 18 unit dan tersebar di DIY dengan rincian: (1) Kabupaten Bantul 4 unit; (2) Kabupaten Gunungkidul 8 unit; (3) Kabupaten Kulon Progo 6 unit.

(b) Pelaksanaan penyelenggaraan sub urusan drainase sebagai berikut :

- Pemeliharaan jaringan drainase di 2 lokasi: (1) Kawasan MM UGM, Sleman; (2) Kawasan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.
- Pembangunan jaringan drainase di Kawasan Bodon, Jagalan, Banguntapan, Bantul.

Sedangkan untuk pengelolaan wilayah sungai di DIY menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Permen PUPR Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

Pada Sub Urusan Jalan, di DIY terdapat jaringan jalan provinsi sepanjang 760,45 km (SK Gubernur Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi). Dari kondisi jalan yang ada tersebut, perlu dilakukan peningkatan kapasitas, menjaga fungsi jalan dan selalu mempertahankan jalan provinsi dalam kondisi mantap. Pengembangan jaringan jalan antara lain Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Prambanan-Gading, serta rintisan Bedah Menoreh dengan berbagai sumber pembiayaan. Pengembangan fungsi jalan guna

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, mobilitas dan aksesibilitas masyarakat di wilayah provinsi DIY.

Sub Urusan Keciptakarya dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi yang layak. Pembangunan infrastruktur keciptakarya juga diharapkan mampu menunjang pencapaian target SDGs seperti pengurangan jumlah rumah tangga tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi dasar. Selain itu juga dilaksanakan pelayanan terhadap Bangunan Gedung, Penataan Bangunan, dan Lingkungannya serta pembinaan jasa konstruksi.

Wujud pembinaan jasa konstruksi adalah pelaksanaan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi. Hal ini merupakan amanat pada UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 yang tertuang dalam Perda DIY Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan sasaran Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum meliputi: 1) Penduduk Berakses Sanitasi; 2) Penduduk Berakses Air Minum; 3) Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi; 4) Meningkatnya aksesibilitas wilayah; dan 5) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan jasa Konstruksi yang diukur menggunakan lima indikator kinerja sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.81. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 Terhadap Target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Peningkatan Aksesibilitas Jalan	%	98,87	100	100,66	100,66	100,00	100,66
2	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum	%	92,92	94,14	94,77	100,67	94,14	100,67
3	Peningkatan Luas Fungsional Daerah Irigasi Yang Terlayani Air Irigasi	%	85,74	86,25	86,77	100,60	86,25	100,60
4	Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi	%	96,18	94,25	96,45	102,33	94,25	102,33
5	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	%	98,82	99,57	108,28	108,75	99,57	108,75

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023

(a) *Peningkatan Aksesibilitas Jalan*

Upaya Peningkatan aksesibilitas Jalan Provinsi di DIY berupa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan baru memegang satu peranan penting dalam rangka mendukung aksesibilitas, mobilitas dan konektivitas antar wilayah yang berdampak pada pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi kesenjangan wilayah serta menurunkan garis kemiskinan.

Pada tahun 2022 terdapat penambahan panjang jalan nasional dan jalan provinsi sepanjang 37,85 km atau 99,21% dari target 100%. Jadi sampai tahun 2022 total panjang jalan yang terbangun mencapai 1002,71 km dari total kebutuhan panjang jalan yang direncanakan sepanjang 996,16 km. Formulasi perhitungannya adalah jumlah panjang jalan nasional dan jalan provinsi yang tersedia dibagi dengan kebutuhan panjang jalan yang direncanakan x 100% = $(1002,71 \text{ km} / 996,16 \text{ km}) \times 100\% = 100,66\%$.

(b) Jumlah Penduduk Berakses Air Minum

Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum layak. Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan total penduduk DIY.

Melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta dukungan dari APBN Ditjend Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui kegiatan pembangunan SPAM Regional, SPAM IKK, Optimalisasi SPAM IKK dan swadaya masyarakat, hingga tahun 2022 jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif mencapai 94,77% dari jumlah penduduk DIY atau setara dengan 3.811.438 jiwa. Sampai dengan akhir tahun 2022 capaian penduduk berakses air minum telah mencapai 100,67% dari target sebesar 94,14%.

Sebagai wujud keterpaduan program penyediaan air minum layak, melalui dana APBN, dilakukan Pembangunan–pembangunan infrastruktur air minum sebagai berikut:

- Pembangunan SPAM Regional Kartamantul Tahap II Kapasitas 300 l/det, Prov. DI. Yogyakarta. SPAM Regional Kartamantul yang dilaksanakan merupakan Sistem Kebon Agung yang akan melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.
- Program Pamsimas.

Tabel 3.82. Data Kependudukan DIY Terlayani Air Minum Tahun 2022

No	Kabupaten	Perpipaan	Non Perpipaan	Belum Ada Akses
1	Kulon Progo	264.230	158.134	25.768
2	Bantul	350.851	587.977	125.458
3	Gunungkidul	519.493	198.060	59.152
4	Sleman	376.384	906.420	-
5	Yogyakarta	154.877	295.013	-
Jumlah		1.665.834	2.145.604	210.378
Total Akses Air Minum		3.811.438		5,23%
Capaian Akses		94,77%		

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023

(c) *Peningkatan Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi*

Meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi telah mencapai 100,60% dari target sebesar 86,25%, dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017-2022 telah mencapai sebesar 100,60%.

Sampai dengan tahun 2022 luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi sebesar 86,77% atau seluas 12.136,85 ha dari luas total areal Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan DIY sebesar 13.987 ha.

Pekerjaan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

- Peningkatan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi Tanjung, Daerah Irigasi Sapon dan Peningkatan jaringan irigasi tersier pada 57 (lima puluh tujuh) lokasi di daerah irigasi kewenangan DIY (DAIS) yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi.

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi Blawong (DAK) yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan kondisi jaringan irigasi.
- Pengelolaan Jaringan Irigasi berupa kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang mencakup 41 daerah irigasi kewenangan DIY.

(d) *Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi*

Program Pengembangan Sistem/Pengelolaan Persampahan Regional dan Program Pengelolaan/Pengembangan Sistem Air Limbah yang ada sebagai upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY. Melalui dukungan APBN dan APBD Kabupaten serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, ketiga program tersebut bertujuan untuk mencapai Akses Sanitasi. Sampai dengan tahun 2022, jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak sejumlah 3.878.930 jiwa atau setara dengan 96,45% dari jumlah penduduk DIY sejumlah 4.021.816 jiwa. Jumlah tersebut telah melampaui target akhir RPJMD 2017-2022 sebesar 102,33%.

Pekerjaan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

- *Penanganan air limbah terpusat*

Mulai awal tahun 2022 IPAL Sewon mengoperasikan pertama kali pengelolaan air limbah dengan metode *Squencing Batch Reactor* (SBR) sebagai tindak lanjut dari Penambahan kapasitas IPAL Sewon di tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Balai Prasarana

Permukiman Wilayah (BPPW) DIY dengan mengubah sistem dari fakultatif menjadi *Aerobic Activated Sludge*.

Pengoperasian sistem SBR dilaksanakan dengan pendampingan dari BPPW berupa bimbingan teknis dan rapat koordinasi selama tahun 2022 dalam rangka mendukung optimalisasi teknis operasional instalasi pengolahan air limbah IPAL Sewon.

Optimalisasi operasional pengelolaan air limbah IPAL Sewon dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pelayanan Sambungan Rumah (SR) yang terhubung ke instalasi IPAL Sewon.

Jumlah SR Air Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Terpusat Sewon pada tahun 2021 adalah 26.050 SR dan pada tahun 2022 hanya terbangun sambungan rumah sebanyak 189 SR sehingga sampai dengan tahun 2022 terbangun 26.239 SR.

Tabel 3.83. Jumlah SR Air Limbah Rumah Tangga

No	Wilayah KPY	Jumlah SR		
		2021	2022	s.d 2022
1	Kota Yogyakarta	19.097	148	19.245
2	Kabupaten Bantul	3.124	-	3.124
3	Kabupaten Sleman	3.829	41	3.870
Jumlah Total		26.050	189	26.239

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

Tabel 3.84. Realisasi Pelayanan Air Limbah

Kegiatan	Realisasi Pelayanan (jiwa)	Target (jiwa)	Realisasi (%)
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Balai PIALAM	26.239	75.000	34,96%

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

Adanya target baru menjadi 75.000 SR akibat peningkatan kapasitas, Balai PIALAM sebagai balai pengelola IPAL Sewon melaksanakan Sosialisasi maupun FGD dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan air limbah.

Tahun 2022 peningkatan capaian SR IPAL Sewon tidak signifikan karena Pemerintah Kabupaten/Kota memprioritaskan penyambungan SR untuk IPAL Skala Kawasan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat.

Guna mendukung kelancaran operasional jaringan pipa IPAL Sewon, Balai PIALAM juga melakukan beberapa pemeliharaan jaringan pipa air limbah baik secara berkala maupun rutin. Pemeliharaan jaringan air limbah di Balai PIALAM berupa pembersihan *syphon* air limbah; pembersihan sampah dan lumpur yang ada pada pipa induk, lateral, gelontor; pemeliharaan berkala jaringan air limbah; pemeliharaan tutup *manhole* jaringan air limbah; dan *updating* data profil jaringan air limbah. Tahun 2022 ini, Balai PIALAM melaksanakan rehabilitasi jaringan pipa air limbah di kawasan UGM untuk memfasilitasi penambahan SR di lingkungan kampus UGM.

Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Terpusat Sewon pada tahun 2021 adalah 26.050 SR dan pada tahun 2022 hanya terbangun sambungan rumah sebanyak 189 SR sehingga sd. Tahun 2022 terbangun 26.239 SR.

Tabel 3.85. Jumlah SR Air Limbah Rumah Tangga

No	Wilayah KPY	Jumlah SR		
		2021	2022	s.d 2022
1	Kota Yogyakarta	19.097	148	19.245
2	Kabupaten Bantul	3.124	-	3.124
3	Kabupaten Sleman	3.829	41	3.870
Jumlah Total		26.050	189	26.239

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

Tabel 3.86. Realisasi Pelayanan Air Limbah

Kegiatan	Realisasi Pelayanan (jiwa)	Target (jiwa)	Realisasi (%)
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Balai PIALAM	26.239	75.000	34,96%

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

- *Penanganan air limbah berbasis masyarakat*

Program Sanimas merupakan program pemerintah dalam meningkatkan akses sanitasi di suatu daerah yang berbasis masyarakat. Balai PPW juga melaksanakan program pembangunan sanitasi perdesaan padat karya dengan membangun tangki septik dan bilik toilet di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Jumlah IPAL Komunal yang sudah terbangun sampai di tahun 2022 sejumlah sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.87. Jumlah IPAL Komunal sampai dengan Tahun 2022

No	Wilayah	Jumlah IPAL Komunal
1	Kota Yogyakarta	58
2	Kabupaten Bantul	145
3	Kabupaten Sleman	147
4	Kabupaten Gunungkidul	72
5	Kabupaten Kulon Progo	39
Jumlah Total		461

Sumber: Data Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, 2022

- *Sampah*

Masalah persampahan menjadi masalah klasik di setiap wilayah, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Volume sampah akan selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Untuk itu diperlukan suatu pengelolaan sampah supaya tidak menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat, baik itu sampah di tingkat rumah tangga, tingkat RT, RW, ataupun tingkat perkotaan. Sebagai upaya mendukung peningkatan program pengelolaan persampahan yang didanai APBD DIY, Dinas PUPESDM DIY melakukan kegiatan berupa:

- DED Penanganan Drainase Kawasan Permukiman Tahap II dan Penanganan Lindi di TPA Piyungan
- DED Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II
- Evaluasi Teknis Pelaksanaan Penataan Sel TPA Piyungan
- Kajian sistem penyediaan air minum kawasan permukiman TPA Piyungan
- Kajian Uji Tanah di TPA Transisi Regional Piyungan Tahap II
- Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan
- Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap II
- Penanganan drainase kawasan permukiman di TPA Piyungan

Selain itu, dengan dana APBN melalui BPPW DIY di tahun 2020-2022 melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas TPA Piyungan yaitu melakukan penataan sel sampah untuk membantu meningkatkan kapasitas TPA Piyungan dan persiapan penutupan sel sampah di TPA Piyungan. Selain pekerjaan di TPA Piyungan, BPPW DIY melaksanakan program TPS 3R di 2 lokasi yaitu Nogotirto dan Sendangtirto Kabupaten Sleman. Neraca Pengelolaan Sampah Perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 (*Ton/hari*), sebagai berikut:

Tabel 3.88. Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten/Kota Tahun 2022 (ton/hari)

NO	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	PENANGANAN (DIANGKUT KE TPA)	PENGURANGAN (TPS3R, BANK SAMPAH DLL)	SAMPAH TERKELOLA	SAMPAH BELUM TERKELOLA
1	YOGYAKARTA	Ton /Hari	301,06	261,50	38,87	300,37	0,69
		%		86,86%	12,91%	99,77%	0,23%
2	BANTUL	Ton /Hari	183,68	110,39	36,03	146,41	37,27
		%		60,10%	19,61%	79,71%	20,29%
3	KULONPROGO	Ton /Hari	54,73	26,75	12,83	39,58	15,15
		%		48,87%	23,45%	72,31%	27,69%
4	GUNUNGGIDUL	Ton /Hari	80,79	51,99	20,30	72,29	8,50
		%		64,35%	25,13%	89,48%	10,52%
5	SLEMAN	Ton /Hari	611,28	307,10	164,33	471,44	139,85
		%		50,24%	26,88%	77,12%	22,88%
	JUMLAH	Ton /Hari	1.231,55	757,72	272,37	1.030,09	201,46
		%		61,53%	22,12%	83,64%	16,36%

Sumber: Data Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, 2023

Terdapat 3 (tiga) unit TPA di DIY yaitu 1) TPA regional (TPA Piyungan) yang melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, 2) TPA Baleharjo (Kabupaten Gunungkidul) dan, 3) TPA Banyuroto (Kabupaten Kulon Progo).

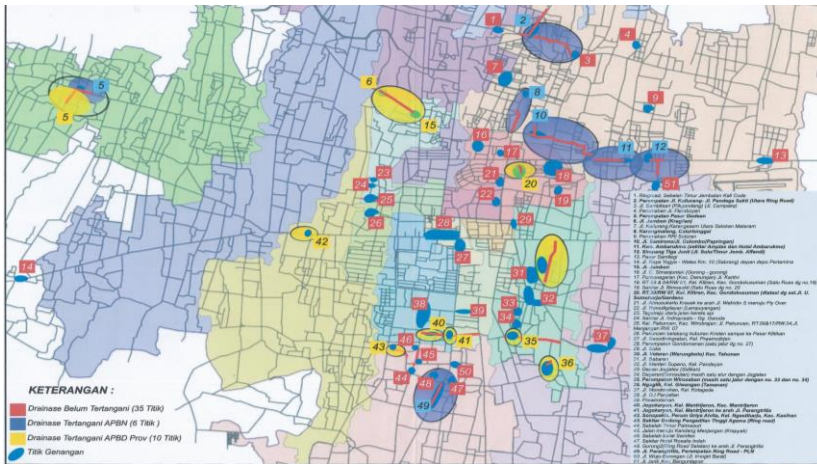
Tabel 3.89. Infrastruktur Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di DIY

No	Wilayah KPY	Jumlah TPA (unit)	Bank Sampah (unit)	TPS3R/TPST (unit)	Rumah Kompos (unit)
1	Kota Yogyakarta	1	365	2	
2	Kabupaten Bantul		227	19	5
3	Kabupaten Sleman		303	28	164
4	Kabupaten Gunungkidul	1	100	11	
5	Kabupaten Kulon Progo	1	83	9	
Jumlah Total		3	3	1.078	69

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023

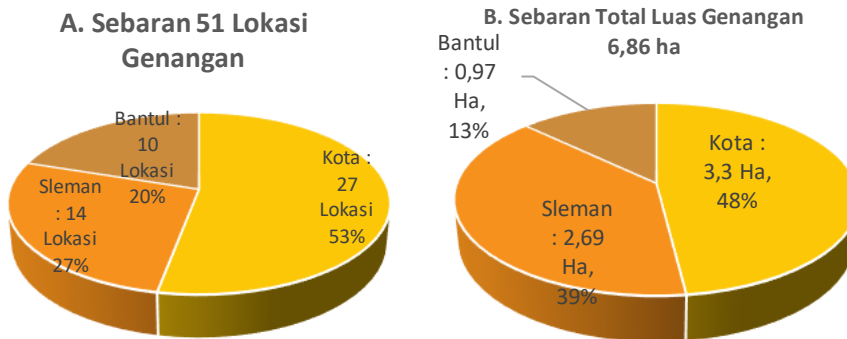
- *Drainase*

Sebagai upaya mengurangi titik genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) dilakukan kegiatan pada tahun anggaran 2022 yaitu : (1). Pemeliharaan Saluran Drainase di Kawasan MM UGM, Sleman dan di Kawasan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul; (2). Pembangunan jaringan drainase Kawasan Bodon, Jagalan, Banguntapan, Bantul.



Gambar 3.33. Peta Lokasi Sebaran Genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (BBWS SO, 2016)

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023



Gambar 3.34. Profil Sebaran Genangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (BBWS SO, 2016)

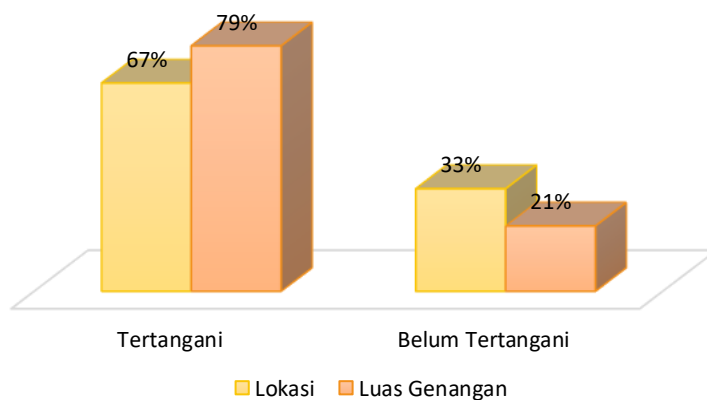
Sumber: DPUPESDM DIY, 2023

Dalam studi tersebut disampaikan rekomendasi pembagian tugas penangan genangan di KPY pada 51 titik lokasi sebagai berikut :

- Tugas penanganan genangan oleh instansi pemerintah pusat sebanyak 12 lokasi;
- Tugas penanganan genangan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebanyak 20 lokasi;
- Tugas penanganan genangan oleh Pemda DIY sebanyak 9 lokasi; serta
- Terdapat 11 lokasi penanganan genangan yang belum terdelegasi.


Sampai dengan tahun 2022, progres penanganan genangan yang dilaksanakan oleh instansi pusat (Satker PSPLP Ditjen CK, dan BBWS SO Ditjen SDA, Kemen PUPR), pemerintah daerah (Pemda Kabupaten Sleman, Bantul dan Pemkot Yogyakarta serta Pemda DIY) adalah sebagai berikut :

- Genangan tertangani : 34 lokasi yang setara genangan seluas 5,44 ha;
- Genangan belum tertangani : 17 lokasi yang setara genangan seluas 1,42 ha.



Gambar 3.35. Progres Penangan Genangan di KPY sampai dengan 2022

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023



Pada tahun anggaran 2022, sebagai bagian dari upaya mengurangi titik genangan di KPY maka dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- Pemeliharaan Saluran Drainase di Kawasan MM UGM, Sleman dan di Kawasan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
- Pembangunan jaringan drainase Kawasan Bodon, Jagalan, Banguntapan, Bantul.

(e) Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditegaskan kembali dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

- Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
- Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

Pembinaan Jasa Konstruksi di DIY dilaksanakan melalui program Pengembangan Jasa Konstruksi. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa layanan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi baik di sisi pengelolaan informasi, penyediaan data, hingga penyebarluasan informasi bagi masyarakat.

Pada tahun 2022 telah diberikan pelatihan kepada 100 orang dan jumlah tenaga ahli konstruksi yang tersertifikasi hingga akhir tahun 2022 juga sebanyak 100 orang. Terhambatnya proses sertifikasi karena regulasi pusat yang sering berubah yang berdampak pada proses sertifikasi dan lembaga sertifikasi profesi yang memiliki izin/lisensi melaksanakan sertifikasi di bidang jasa konstruksi masih terbatas. Adapun layanan sistem informasi jasa konstruksi telah diakses sejumlah 644.220 orang dari target 440.750 orang melalui website Klinik Konstruksi berikut media sosial terkait lainnya; serta melalui penyediaan data informasi di aplikasi SIPJAKI cakupan DIY yang mencapai 83%.

Layanan Jasa Pengujian dilakukan melalui layanan penerbitan sertifikat/Laporan Hasil Uji (LHU) sejumlah 944 dokumen LHU. Data tersebut diperoleh dari laporan hasil pengujian pada Laboratorium Jasa Konstruksi Balai Pengembangan Jasa Konstruksi (BPJK) DIY.

Tabel 3.90. Rincian hitungan capaian kinerja tahun 2022

No	Komponen Kegiatan	Bobot	Target s/d 2022 (RPJMD)	Target s/d 2022 (RPJMD)	Capaian s/d akhir 2022 (realisasi)	Target s/d 2022	Capaian akhir 2022
		<i>X</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	$(b/a)*x$	$(c/a)*x$
Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi (bobot 50 persen)							
1	Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi Jasa Konstruksi	25%	440.750	440.750	644.220	36,54%	36,54%
2	Persentase layanan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	25%	100%	100,00%	83,00%	20,75%	20,75%
3	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi bersertifikat	50%	2.406	2.406	2.123	44,12%	44,12%
Sub Jumlah						101,41%	101,41%

No	Komponen Kegiatan	Bobot	Target s/d 2022 (RPJMD)	Target s/d 2022 (RPJMD)	Capaian s/d akhir 2022 (realisasi)	Target s/d 2022	Capaian akhir 2022
		<i>X</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>C</i>	$(b/a)*x$	$(c/a)*x$
Kegiatan Pelayanan Jasa Pengujian Konstruksi (bobot 50 persen)							
1	Sertifikat/Laporan Hasil Uji (LHU) yang diterbitkan	100%	5.544	5.440	6.384	115,15%	115,15%
Sub Jumlah						104,41%	104,41%
Jumlah						108,28%	108,28%

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023

(2) Permasalahan dan Solusi


(a) Permasalahan

- Kurang optimalnya kelembagaan pengelolaan irigasi dan terbatasnya rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jaringan irigasi.
- Makin meningkatnya jumlah kendaraan - kendaraan *Over Dimension Over Loading* mengakibatkan kondisi jalan menjadi turun.
- Kondisi Tanah yang ada Yogyakarta khususnya pada daerah pegunungan dan perbukitan seperti Kab. Kulonprogo dan kab. Gunungkidul merupakan tanah bergerak, sehingga kondisi jalan khususnya di 2 Kabupaten tersebut menjadi menurun.
- Cuaca pada tahun 2022 yang mengakibatkan beberapa pekerjaan peningkatan dan pembangunan jalan menjadi terhambat.
- Masih tingginya kebocoran di masing-masing PDAM.
- pengelolaan SPAMDES akibat Sistem yang tidak berjalan akibat sistem yang rusak, tidak adanya pengelola, atau keterbatasan air baku akibat musim kemarau.

- penyerapan untuk SPAM Regional Kartamantul oleh PDAM masing-masing kabupaten/kota masih kecil.
- Pemahaman masyarakat yang masih belum menyadari untuk membangun tangki septik yang sesuai dengan standar teknis.
- Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul belum mempunyai IPLT serta IPLT Banyuroto Kulon Progo belum optimal.
- terbatasnya anggaran kabupaten kota dalam pembiayaan penambahan sambungan rumah IPAL Sewon.
- Peningkatan kapasitas IPAL Sewon belum dapat terlaksana sesuai yang diharapkan, Kabupaten/Kota di tahun 2022 memprioritaskan penyambungan SR untuk IPAL Skala Kawasan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, Tidak semua wilayah KPY bisa terlayani dengan jaringan IPAL Terpusat skala Regional karena perbedaan kontur.
- Lembaga sertifikasi profesi yang memiliki izin/lisensi melaksanakan sertifikasi di bidang jasa konstruksi masih terbatas.
- Keterbatasan alat dimana dalam beberapa kesempatan alat uji mengalami masalah teknis sehingga proses pengujian terhambat/tidak berjalan *continue*.

(b) *Solusi*

- Meningkatkan pengelolaan irigasi dengan melibatkan GP3A/P3A, terutama terkait pembagian/distribusi air.
- Perlunya koordinasi dan sinergi antar OPD serta pihak - pihak yang berwenang terkait kendaraan



Over Dimension Over Loading sehingga pengendalian berupa rambu - rambu, penindakan, regulasi dapat diterapkan dengan baik.

- Teknologi dan rekayasa teknis untuk mengatasi Kondisi Tanah Ekspansif perlu diterapkan dalam kegiatan peningkatan dan pembangunan Jalan yang ada di Yogyakarta.
- Antisipasi dan mitigasi terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu dalam pekerjaan konstruksi jalan harus dilakukan, seperti pengendalian jadwal pekerjaan.
- PDAM menindaklanjuti dengan memasang target untuk pengurangan kebocoran di setiap wilayahnya.
- Diperlukan pembinaan kepada kelompok masyarakat pengelola SPAMDES oleh masing-masing Kabupaten.
- Koordinasi yang lebih matang dengan masing-masing pengguna air curah SPAM Regional Kartamantul serta Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk melakukan penyerapan sesuai dengan PKS yang telah ditandatangani.
- Peningkatan sosialisasi ke masyarakat untuk pemasangan tangki septik yang memenuhi standar teknis dan ketentuan untuk tangki septik selalu dikuras.
- Diperlukan koordinasi yang lebih intens lagi untuk peningkatan infrastruktur sanitasi di masing-masing kabupaten/kota agar tujuan dari RPJMN yang bergeser menjadi akses aman bisa menjadi tujuan pembangunan Bersama.

- Koordinasi dalam menentukan target SR untuk setiap kabupaten/kota.
- Optimalisasi pelayanan pengolahan air limbah domestik terpusat maupun SPALD-T.
- Melakukan identifikasi potensi kerja sama dengan perguruan tinggi, sekolah menengah atas, asosiasi, lembaga sertifikasi profesi dan lembaga jasa konstruksi serta masyarakat jasa konstruksi lainnya untuk mempersiapkan kegiatan fasilitasi pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli.
- Menganggarkan penambahan alat laboratorium.

(3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Pada tahun 2022 jumlah alokasi dana untuk pelaksanaan Sub Urusan Pekerjaan Umum sebesar Rp212.863.670.230,00 yang dilaksanakan melalui 8 program dengan 10 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi keuangan sebesar Rp190.545.425.209,00 atau 89,52% dan realisasi fisik sebesar 98,84%. Berikut tabel capaian program dan kegiatan.

Tabel 3.91. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah permukiman skala regional pada kawasan permukiman padat penduduk yang tidak memungkinkan dengan skala kawasan atupun individual Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem distribusi air minum Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air irigasi Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan Provinsi Dukungan penguasaan teknologi dan penyebarluasan informasi bidang ke PU an dan pelayanan jasa pengujian Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pada kawasan permukiman di kecamatan miskin serta pemanfaatan sumber daya mineral dan air tanah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Jaringan Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Penambahan Jaringan Jalan Baru Pelebaran Jalan Menuju Standar Rehabilitasi Ruas Jalan Karangmojo -Semin Rehabilitasi Ruas Jalan Dekso- Samigaluh- Pagerharjo Rehabilitasi Ruas Jalan Nglipar - Semin Rehabilitasi Ruas Jalan Nagung - Cicikan Rehabilitasi Ruas Jalan Sentolo - Pengasih Rehabilitasi Ruas Jalan Wonosari - Karangmojo Rehabilitasi Ruas Jalan Yogyakarta - Kebonagung 1 Rehabilitasi Ruas Jalan Karangmojo -Semin Rehabilitasi Ruas Jalan Dekso- Samigaluh- Pagerharjo Rehabilitasi Ruas Jalan Nglipar - Semin Rehabilitasi Ruas Jalan Nagung - Cicikan Peningkatan Ruas jalan Pandanan Candirejo Rekonstruksi Jalan Survei Kondisi Jalan Survei Kondisi Jembatan Peningkatan Ruas Jalan Deggung Wonorejo (DAK) Peningkatan Ruas Jalan Klangan - Tempel (DAK) Pemeliharaan Rutin Jalan Dipertahankannya kondisi mantap jalan provinsi di Kabupaten Gunungkidul: 36 ruas sepanjang 197,125KM dari 292,615KM (67,37%)	% % meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter km km Paket Paket km km Persen	75,26 100 150 150 150 150 200 500 150 150 150 0,2 1,76 1 1 1 1 65.35	70.18 79,31 150 150 150 150 200 500 150 150 0,2 1,76 1 1 1 1 65.35

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dipertahankannya kondisi mantap jalan provinsi di Kabupaten Kulon Progo: 23 ruas sepanjang 141,8KM dari 175,14KM (80,96%)	Persen	78.53	78.53
				Dipertahankannya kondisi mantap jalan provinsi di Kabupaten Bantul: 19 ruas sepanjang 130,375KM dari 156,525KM (83,29%)	Persen	80.79	80.79
				Operasional Underpass Kulur dan YIA	Liter	5400	3600
				Dipertahankannya kondisi mantap jalan provinsi di Kabupaten Sleman: 15 ruas sepanjang 94,51KM dari 116,32KM (81,25%)	Persen	78.81	78.81
				Pemeliharaan Rutin Jembatan			
				Dipertahankannya kondisi mantap jembatan provinsi di Kabupaten Bantul: 61 buah sepanjang 1307,61M dari 1674,81KM (78,08%)	Persen	78.08	78.08
				Dipertahankannya kondisi mantap jembatan provinsi di Kabupaten Sleman: 56 buah sepanjang 670,7M dari 919,5M (72,94%)	Persen	72.94	72.94
				Dipertahankannya kondisi mantap jembatan provinsi di Kabupaten Gunungkidul: 55 buah sepanjang 574,10M dari 833,30M (68,89%)	Persen	68.89	68.89
				Dipertahankannya kondisi mantap jembatan provinsi di Kabupaten Kulon Progo: 77 buah sepanjang 1613,65M dari 2330,5M (69,24%)	Persen	69.24	69.24
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
				Panjang jaringan distribusi SPAM regional	meter	110074	102998
				Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional	liter/ detik	1150	1050
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan			
				Pembinaan kelembagaan penyelenggara spam perdesaan di DIY	Pammaskarta DIY	1	1
				Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota			
				Apraisal tanah untuk sub sistem kebon agung	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pembebasan lahan di SPAM Regional Kamijoro tahap II Kab. Bantul	M2	648	648
				Penyusunan review RISPAM DIY	Dokumen	1	1
				Pembebasan lahan di SPAM Regional Kamijoro tahap II Kab. Kulon Progo	M2	3.079	3.079
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
				Penanganan sampah sistem regional	Ton/hari	780	740.68
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan			
				Kajian Uji Tanah di TPA Transisi Regional Piyungan Tahap II	Dokumen	1	1
				DED Penanganan drainase kawasan permukiman di TPA Piyungan Tahap II	Dokumen	1	1
				Penanganan drainase kawasan permukiman di TPA Piyungan	Paket	1	1
				Kajian sistem penyediaan air minum kawasan permukiman TPA Piyungan	Dokumen	1	1
				Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan	Paket	1	1
				DED Pekerjaan konstruksi sel baru di TPA Transisi Piyungan Tahap II	Dokumen	1	1
				Pembebasan lahan di TPA Piyungan tahap II	ha	2,3	2,3
				Evaluasi Teknis Pelaksanaan Penataan Sel TPA Piyungan	Dokumen	1	1
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
				Layanan Sistem air limbah terpusat	SR	27400	26239
				Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional			
				Review Masterplan Air Limbah Kawasan Perkotaan Yogyakarta	Paket	1	1
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
				Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	2 Lokasi	2	2
				Roadmap Penanganan Drainase	1 dokumen	1	1
				Penanganan Lokasi genangan	1 Lokasi	1	1
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
				Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY	%	77,20	77,27
				Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY	%	87	87,17
				Penyediaan Air Baku	liter/ detik	19,50	21,00
				Pengelolaan Air Baku	liter/ detik	84,00	187,02
				Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku			
				Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul	1 Sumur Bor 10 Resapan	1	1
				Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan pada Daerah Sulit Air di Kabupaten Kulonprogo	1 Sumur Bor 10 Resapan	1	1
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya			
				Rehabilitasi Embung Bimomartani	embung	1	1
				FS Embung Banjeng Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman	dokumen	1	1
				FS Embung Ringin Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.	dokumen	1	1
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku			
				Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga	Embung	9	9
				Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga	Embung	25	25

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Padat Karya Pemeliharaan Berkala Embung Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul Cs.	Kabupaten	1	1
				Sub Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi			
				Operasi & Pemeliharaan Pos Hidrologi	pos	64	64
				Pengelolaan Data Sumber Daya Air	Kegiatan SISDA	1	1
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi			
				Rekomendasi kebijakan pengelolaan irigasi di DIY melalui Komisi Irigasi	dokumen	1	1
				Rekomendasi kebijakan sumber daya air melalui Dewan SDA	dokumen	1	1
				Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA DIY	dokumen	50	70
				Kampanye Pengelolaan Sumber Daya Air	kegiatan	1	1
				Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 ha - 3000 ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			
				Operasi Jaringan Irigasi	Daerah Irigasi	41	41
				Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	Daerah Irigasi	13	13
				Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	Daerah Irigasi	41	41
				Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi	Daerah Irigasi	41	41
				Kesepakatan Tata Pengaturan SDA	Daerah Irigasi	41	41
				Padat Karya Pemeliharaan Berkala Saluran Irigasi (DBH)	Daerah Irigasi	5	5
				Padat Karya Pemeliharaan Berkala Saluran Irigasi (DAU)	Daerah Irigasi	5	5
				Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			
				Penyusunan Database e-PAKSI dan AKNPI Daerah Irigasi	41 Dokumen	1	1
				Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sapon	m	1000	1000

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Tanjung	m	400	400
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Blawong (DAK)	meter	1.300	1.300
				Pra Konsultansi Regional, Sinkronisasi dan Harmonisasi Pemantapan Rencana Kerja DAK	Dokumen	1	1
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
				Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi	%	99,14	101,41
				Sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan	LHU	800	944
				Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
				Pelatihan dan sertifikasi Tenaga Ahli konstruksi	Orang	100	100
				Dukungan penambahan tenaga ahli konstruksi dan peningkatan kinerja jasa konstruksi melalui pelatihan, sosialisasi dan akreditasi laboratorium untuk mendukung Peningkatan kinerja jasa konstruksi	%	100	100
				Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
				Kajian Training Need Assessment (TNA) DPelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 2023 - 2027	Dokumen	1	1
				Dukungan penambahan tenaga ahli konstruksi dan peningkatan kinerja jasa konstruksi melalui penyiapan TNA, pelatihan, sertifikasi, dan pelayanan laboratorium konstruksi untuk mendukung Peningkatan kinerja jasa konstruksi	%	100	100
				Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi			
				Sertifikasi Tenaga Ahli konstruksi	Orang	100	100
				Dukungan penambahan tenaga ahli konstruksi dan peningkatan kinerja jasa konstruksi melalui penyiapan TNA, pelatihan, sertifikasi, dan pelayanan laboratorium konstruksi untuk mendukung Peningkatan kinerja jasa konstruksi	%	100	100
				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan penambahan tenaga ahli konstruksi dan peningkatan kinerja jasa konstruksi melalui pelatihan, sosialisasi dan akreditasi laboratorium untuk mendukung peningkatan kinerja jasa konstruksi	%	100	100
				Kalibrasi Alat Laboratorium Konstruksi	Jenis	24	24
				Pemeliharaan Alat Laboratorium Konstruksi	Jenis	15	15
				Pengadaan Alat dan Perlengkapan	Jenis	75	75
				Akreditasi Laboratorium Konstruksi	Akreditasi	1	1
				Laporan Hasil Uji yang diterbitkan sebanyak	LHU	800	944
				Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi			
				Penyusunan informasi teknis bahan bangunan	SK	12	12
				Penyebaran informasi dan pameran teknologi ke-PUan melalui Klinik Konstruksi	Laporan	2	2
				Inventarisasi data penyelenggaraan konstruksi	Dokumen	1	1
				Penyusunan Rekomendasi analisis biaya bangunan gedung negara	Tahun	1	1
				Dukungan penyediaan informasi jasa konstruksi melalui SIPJAKI untuk mendukung Peningkatan pelayanan jasa laboratorium pengujian	%	100	100

b) Sub Urusan Penataan Ruang

(1) Kondisi Umum

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam penyelenggaraannya meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan kondisi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek-aspek penyelenggaraan penataan ruang tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam mewujudkan ruang wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota dan kawasan lainnya sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan dan dilakukan secara berjenjang/ komplementer.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY merupakan daerah setingkat provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Istimewa disini meliputi wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah meliputi: a) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b) Kelembagaan Pemda DIY; c) Kebudayaan; d) Pertanahan; dan e) Tata ruang.

Kinerja sasaran pada tahun 2022 diukur menggunakan dua indikator, yaitu indikator Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang dan Peningkatan

kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan. Target dan realisasi kinerja untuk tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.92. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	89,17	87,81	92,76	105,64	87,81	105,64
2	Peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan	%	43,64	44,49	45,86	103,08	44,49	103,08

Sumber: DPTR DIY, 2022

(a) *Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang*

Perhitungan indikator kinerja sasaran peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ATR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Adapun aspek yang dilakukan penilaian kinerja yaitu pada (1) pengaturan penataan ruang; (2) pembinaan penataan ruang; (3) perencanaan tata ruang; (4) pemanfaatan ruang; (5) pengendalian dan pemanfaatan ruang

Realisasi indikator sasaran Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2022 sebesar 92,76% atau dengan persentase capaian 105,64% melampaui dari target akhir RPJMD 2022 sebesar 87,81%. Berikut rincian perhitungan capaian indikator kinerja penyelenggaraan penataan ruang.

Tabel 3.93. Penilaian Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang DIY Berdasarkan Laporan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang DIY Kementerian ATR/BPN RI Tahun 2022

No	KINERJA	HASIL PENILAIAN	NILAI	PREDIKAT KINERJA
I	ASPEK PENGATURAN PENATAAN RUANG		100	BAIK
A	Penetapan Perda RTRW	Peraturan Daerah tentang RTRW sudah tersedia	100	
B	Penetapan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemanfaatan Ruang Provinsi	Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Peraturan Gubernur tentang RKPD sudah tersedia	100	
C	Penetapan Peraturan perundang-undangan tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi	Peraturan terkait perangkat pengendalian pemanfaatan ruang daerah sudah tersedia Peraturan terkait pemberian insentif dan disinsentif sudah tersedia Peraturan terkait pengenaan sanksi administrasi sudah tersedia	100	
D	Penetapan Peraturan Perundang-undangan tentang Pembinaan Penataan Ruang	Surat Keputusan tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sudah tersedia	100	
II	ASPEK PEMBINAAN PENATAAN RUANG		100	BAIK
A	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang telah dilaksanakan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali	100	
B	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang sudah dilaksanakan kepada perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/ kota, dan masyarakat	100	
C	Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang telah dilaksanakan kepada perangkat daerah kabupaten/ kota dan masyarakat	100	
D	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang telah dilaksanakan melalui pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan	100	
E	Penelitian, Kajian, dan pengembangan	Penelitian, kajian dan pengembangan bidang penataan ruang sudah dilaksanakan dan menghasilkan inovasi untuk peningkatan kualitas penataan ruang	100	
F	Pengembangan Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang sudah dilaksanakan, dan pemutakhiran dilakukan secara berkala	100	
G	Penyebarluasan Informasi Berbagai Aspek Penataan Ruang	Penyebarluasan informasi perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat	100	

No	KINERJA	HASIL PENILAIAN	NILAI	PREDIKAT KINERJA
		sudah dilaksanakan antara lain melalui pajangan cetakan, tampilan video, iklan, TV/ radio/ Koran, situs web, spanduk, dan media lainnya		
H	Peningkatan pemahaman dan tanggung Jawab Masyarakat	Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat sudah dilaksanakan melalui penyediaan unit pengaduan, penyediaan media informasi, pemberian diskusi umum, sayembara, dan debat publik, dan pembentukan kelompok masyarakat bidang penataan ruang	100	
III	ASPEK PERENCANAAN TATA RUANG		100	BAIK
A	Kelengkapan Muatan Rencana Tata Ruang	Kelengkapan muatan RTRW sudah sesuai	100	
IV	ASPEK PEMANFAATAN RUANG		100	BAIK
A	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Kesesuaian Program Dalam Rencana Pembangunan Daerah dengan Indikasi Program dalam RTR)	Terdapat kesesuaian rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang	100	
V	ASPEK PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		64	SEDANG
A	Pemberian insentif dan disinsentif	Pemberian insentif an disinsentif sudah pernah dilaksanakan	100	
B	Pengenaan Sanksi	Pengenaan sanksi sudah dilaksanakan, namun belum menyeluruh terhadap seluruh pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi	28	
Penilaian Kinerja			92,76	BAIK

Sumber: Kementerian ATR/BPN RI, 2023

Rincian kinerja penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana tercantum pada tabel di atas menunjukkan bahwa di DIY tergolong baik dengan nilai sebesar 92,76%.

Penilaian lainnya berdasarkan pada kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang menunjukkan pada predikat **efektif dan efisien**. Artinya, terdapat tiga komponen yang memiliki kinerja baik.

(b) Peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan

Pencapaian indikator sasaran peningkatan kinerja penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan tahun 2022 telah melampaui target yaitu sebesar 45,86% dari target yang ditetapkan sebesar 44,49%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 44,49%, capaiannya adalah 103,08%. Pencapaian kinerja diukur melalui indikator: 1) jumlah persentase capaian satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa Rencana Rinci, Rencana Induk, dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang mencapai 32,11%; serta 2) Keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan mencapai 13,75%.

(2) *Permasalahan dan Solusi*

(a) Permasalahan

Menggambarkan permasalahan dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2022, maupun permasalahan pelaksanaan urusan.

- Masih banyaknya Rencana Detail Tata Ruang yang belum ditetapkan.
- Belum terintegrasinya data dan informasi pertanahan dan tata ruang.
- Dokumen Perencanaan Tata Ruang pada satuan ruang strategis berupa Rencana induk dan dokumen strategi pengembangan wilayah belum ditetapkan menjadi peraturan Gubernur.
- Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya menjadi acuan bagi sektor dalam proses perencanaan,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

(b) Solusi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas (**point a**).

- Mendorong percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang melalui pendampingan.
- Mengintegrasikan data dan informasi pertanahan melalui sistem informasi data spasial.
- Penyusunan Peraturan Gubernur DIY tentang Strategi Pengembangan Wilayah dan Peraturan Gubernur Rencana Induk pada Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tata ruang serta pemanfaatan ruangnya.
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

(3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan penataan ruang tahun 2022 telah berjalan dengan baik pada semua aspek antara lain: aspek pengaturan tata ruang, aspek pembinaan tata ruang, aspek perencanaan tata ruang, aspek pemanfaatan tata ruang, dan aspek pengendalian pemanfaatan tata ruang. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk ditindaklanjuti. Pada aspek pengaturan penataan ruang, perlu melengkapi produk hukum penataan ruang,

khhususnya pada komponen produk hukum pengendalian pemanfaatan ruang, antara lain :

- (a) Peraturan terkait pemberian insentif dan disinsentif sebagai dasar pemberian insentif dan disinsentif;
- (b) Peraturan khusus terkait tata cara pengenaan sanksi administratif, sebagai dasar pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan

Pada tahun 2022 program, kegiatan dan sub kegiatan Sub Urusan Penataan Ruang didukung dengan anggaran sejumlah Rp8.237.440.550,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 2 program, 6 kegiatan dan 8 subkegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp7.977.726.487,00 atau 96,85%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan sub kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.94. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Penataan Ruang Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1. Sinkronisasi regulasi penataan ruang (vertikal dan horisontal)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
			2. Menyebarluaskan informasi penataan ruang	Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan	%	98,99	99,00	
			3. Meningkatkan peran serta aparatur dan masyarakat dalam penataan ruang	Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan	%	89,98	92,29	
			4. Mewujudkan pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan penataan ruang antar wilayah dan sektoral	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				
			5. Mengefektifkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Publikasi penataan ruang melalui media elektronik, media massa dan sosialisasi dokumen penataan ruang	kali	34	34	
			6. Mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan fungsi satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten					
			7. Meningkatkan kualitas penataan administrasi pertanahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				
			8. Mewujudkan penataan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa sesuai peruntukan	Dokumen Kesesuaian Pemanfaatan ruang pada RTRW	Dokumen	1	1	
			9. Persentase peningkatan Budaya tak benda yang dilestarikan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang startegis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	%	40	68,33	
				Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	%	65	70,14	

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			
				Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Dokumen	1	1
				Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Gunung Merapi	Dokumen	1	1
				Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang			
				Hasil pembahasan usulan perubahan tahun n, rencana n+1 dan rencana n+2 urusan tata ruang			
				Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang Tahap I,II,III	Dokumen	3	3
				Updating dan Pengembangan database sistem informasi database dana keistimewaan urusan tata ruang	aplikasi	1	1
				Dokumen Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang 2018-2021			
				Dokumen Rekomendasi Hasil Peninjauan Kembali Dokumen Perda RTRW	Dokumen	1	1
				Dokumen hasil integrasi muatan rencana di Kawasan Satuan Ruang Strategis kedalam dokumen RTRW	Dokumen	1	1
				Tersusnya dokumen Rapergub tentang pemanfaatan ruang	Dokumen	1	1
				Tersusnya dokumen Rapergub tentang strategi pengembangan wilayah satuan ruang strategis	Dokumen	1	1
				Pendampingan percepatan penetapan RDTR Kabupaten / Kota	Dokumen	6	6
				Tersusnya dokumen koordinasi penataan ruang di DIY	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pendampingan penyusunan program / kegiatan dana keistimewaan bagi seluruh OPD mitra tata ruang	Dokumen	1	1
				Dokumen integrasi RZWP3K dan revisi RTRW DIY			
				Tersusunnya dokumen hasil identifikasi dan verifikasi lahan sawah dilindungi yang terkoreksi	dokumen	1	1
				Terusunnya dokumen KLHS RTRW DIY	Dokumen	1	1
				Tervalidasinya Dokumen Validasi KLHS RTRW DIY	Dokumen	1	1
				Identifikasi program kegiatan Kalurahan pemenang penilaian tertib pertanahan dan tata ruang			
				Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	%	40	68,33
				Penyebarluasan informasi urusan tata ruang keistemewaan	Kali	6	14
				Publikasi urusan tata ruang keistemewaan			
				Sosialisasi Tata Ruang di tingkat pendidikan SMA	Kali	12	12
				Lomba poster dan artikel terkait keistemewaan DIY	Kali	1	1
				ILM Intantaru Berinfo			
				Podcast Tata Ruang Keistemewaan	Kali	2	2
				Penilaian Kalurahan Tertib Pertanahan dan Tata Ruang	Dokumen	1	1
				Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	aplikasi	1	1
				Penyusunan dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap arahan tata ruang pada satuan ruang kawasan strategis	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyusunan Dokumen Keterpaduan Program pada Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Dokumen	1	1
				Penyusunan Dokumen Identifikasi dan Inventarisasi Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif Keistimewaan Urusan Tata Ruang			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen	1	1
				Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa Laptop dan All in one PC	Unit	2 unit Laptop 5 unit All in one PC	2 unit Laptop 5 unit All in one PC

4) *Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*

a) *Kondisi Umum*

Pembangunan perumahan memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam kerangka pembangunan manusia dan merupakan kegiatan yang bersifat multisektor dimana hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1) menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Memastikan bahwa setiap warga negara mampu menjangkau dan menghuni rumah yang layak merupakan tanggung jawab negara, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam bertempat tinggal. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sehingga harus terpenuhi yang kemudian urusan tersebut dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan pembangunan multi sektoral yang penyelenggaraannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan berbagai sumber pendanaan. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang (*adequate shelter for all*), Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjangkau, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya. Salah satu upaya dalam memberikan fasilitasi tersebut adalah melalui bantuan sosial untuk penanganan

rumah tidak layak huni (RTLH) dengan mekanisme peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan pembangunan baru rumah layak huni.

Sasaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah Penduduk dengan hunian yang layak, dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.95. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	%	97,75	97,50	98,12	100,64	97,50	100,64

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023

Pada tahun 2022 capaian indikator Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak sudah tercapai melebihi target sebesar 98,12% atau dengan persentase 100,64%. Ketercapaian tersebut didapat dengan dilaksanakannya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui berbagai sumber pendanaan yaitu dari anggaran DAK, BSPS, APBD Kab/Kota, CSR, dan APBD Provinsi. Penanganan RTLH sampai dengan tahun 2022 berjumlah 41.740 unit terdiri dari 40 unit rumah bergaya arsitektur Yogyakarta, Peningkatan Kualitas sejumlah 41.374 unit, Pembangunan Baru sejumlah 326 unit. Dengan demikian, jumlah rumah layak huni di DIY sebanyak 1.246.019 unit dari total rumah tangga di DIY sejumlah 1.269.857 unit atau sebesar 98,12%.

Tabel 3.96. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dari tahun 2017- 2022

Lokasi	Database kab	Tertangani Th 2017	Tertangani Th 2018	Tertangani Th 2019	Tertangani Th 2020	Tertangani Th 2021	Tertangani Th 2022
Kota Yogyakarta	2.797	227	488	552	345	655	270
Kab. Kulon Progo	14.891	2.106	2.005	2.400	1.093	427	1.350
Kab. Bantul	5.703	2.101	1.848	2.361	1.722	1.415	950

Lokasi	Database kab	Tertangani Th 2017	Tertangani Th 2018	Tertangani Th 2019	Tertangani Th 2020	Tertangani Th 2021	Tertangani Th 2022
Kab. Sleman	16.347	1.863	1.447	2.130	1.536	921	1.538
Kab. Gunungkidul	25.840	912	1.934	3.112	1.861	1.340	2.044
JUMLAH	65.578	7.209	7.722	10.555	6.557	4.758	4.939

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan


- (a) Belum adanya insentif/skema untuk mengembangkan hunian Vertikal di perkotaan vertikal untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun masyarakat miskin.
- (b) Harga lahan yang mahal untuk pembangunan perumahan MBR dan masyarakat miskin.
- (c) Data penerima bantuan sosial yang merupakan baseline RTLH tahun 2016 setelah diverifikasi sebagian besar rumahnya sudah layak huni.
- (d) Pendataan RTLH yang kurang terpadu, terintegrasi, dan tersinergi antara Pusat (Balai), Provinsi, Kabupaten/Kota, serta swasta yang menyebabkan sulitnya dilakukan pendataan yang akurat dan valid. Hingga akhir tahun 2022, telah dilaksanakan pemutakhiran data dan masih terdapat data RTLH yang belum lengkap dikarenakan berbagai faktor, antara lain:
 - Masih terdapat BNBA yang terduplikasi, baik nama, NIK, maupun tahun dan jenis penanganannya.
 - Terdapat Kabupaten yang *baseline* penanganannya berbeda dari *baseline* yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur 2016, dikarenakan adanya peningkatan jumlah RTLH di Kabupaten terkait dalam kurun beberapa tahun namun pada saat

penanganan dilaksanakan, tidak dilakukan pemutakhiran data.

- (e) Peningkatan kualitas pada setiap kriteria kawasan kumuh di Kab/Kota tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tidak tuntasnya penanganan di suatu lokasi.
- (f) Pengukuran keberhasilan pembangunan PSU Permukiman di desa belum dapat diukur dengan baik.

(2) Solusi

- (a) Mendorong Kab/Kota untuk segera membuat dan mengesahkan RP3KP Kab/Kota dengan memprioritaskan pada pengembangan perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- (b) Mendorong Kab/Kota untuk membuat skema insentif/disinsentif untuk memprioritaskan pengembangan perumahan vertikal untuk MBR.
- (c) Mendorong Kab/Kota untuk membuat skema dan menegakkan peraturan tentang hunian berimbang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (d) Strategi Penanganan RTLH:
 - Pelaksanaan verifikasi dan perencanaan kebutuhan penanganan RTLH dengan mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi data penanganan RTLH di Kab/Kota.
 - Perlu dilakukan pendataan kembali data kemiskinan di Kabupaten/Kota.
 - Perlu adanya sistem informasi pendataan terpadu yang tersinergi antara Pusat (Balai), Provinsi, Kabupaten/Kota, untuk memudahkan dalam pendataan RTLH beserta pemutakhiran datanya. Saat ini Bidang Perumahan sedang



dalam proses pembuatan sistem informasi perumahan yang terpadu dan terintegrasi yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam pendataan dan penanganan RTLH di masa mendatang.

(e) Perlu adanya integrasi dengan Kab/Kota untuk penanganan permukiman di kawasan kumuh. Strategi Penanganan Kawasan Kumuh:

- Mengintegrasikan program/kegiatan dalam satu program/ kegiatan dan ditangani oleh satu unit kerja.

(f) Perlu adanya pengukuran keberhasilan pembangunan untuk PSU Permukiman.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2022 dalam APBD DIY sebesar Rp112.558.793.600,00 yang terealisasi sebesar Rp102.527.427.629,00 atau 91,09% melalui 3 program dengan 4 kegiatan dan 6 subkegiatan. Realisasi fisik yang dicapai sebesar 99,89%. Berikut capaian kinerja program dan subkegiatan telah disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.97. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pada kawasan permukiman di kecamatan miskin serta pemanfaatan sumber daya mineral dan air tanah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani Pemutakhiran Data Penataan Bantaran Sungai Code Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Cakupan penanganan kawasan kumuh Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) ha Penyusunan Review Data Dasar Bidang PKP Rekomendasi POKJA PKP/FORUM PKP Identifikasi kesesuaian pembangunan perumahan dalam kawasan peruntukan permukiman (RTRW DIY) Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) HA sampai dengan dibawah 15(lima belas) ha Terlaksananya Penanganan RTLH (Peningkatan Kualitas) di Kab.Gunungkidul: 144 unit	% Laporan Laporan Laporan Laporan % % laporan laporan laporan Unit	20 1 1 1 1 100 53,78 1 1 1 144	54,71 1 1 1 1 70,06 63,65 1 1 1 143

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penanganan RTLH (Peningkatan Kualitas) di Kab.kulonprogo: 149 unit	Unit	149	148
				Terlaksananya Penanganan RTLH (Peningkatan Kualitas) di Kab Sleman: 110 unit	Unit	110	110
				Terlaksananya Penanganan RTLH (Peningkatan Kualitas) di Kab. Bantul: 203 unit	Unit	203	203
				Terlaksananya Penanganan RTLH (Peningkatan Kualitas) di Kota Yogyakarta 96 unit	Unit	96	89
				Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Kab Gunungkidul: 23 unit	Unit	23	23
				Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Kab Kulonprogo: 53 unit	Unit	53	53
				Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Kab Sleman: 22 unit	Unit	22	22
				Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Kab Bantul: 94 unit	Unit	94	94
				Terlaksananya Pembangunan Baru Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta: 8 unit	Unit	8	8
				Identifikasi Kebutuhan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Peningkatan Kualitas: 1500 unit	unit	1500	1500
				Identifikasi Kebutuhan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni: 500 unit	Unit	500	500
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas RTLH di Kab Gunungkidul: 41 unit (APBD-P)	Unit	41	41
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas RTLH di Kab Kulon Progo: 39 unit (APBD-P)	Unit	39	39

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas RTLH di Sleman: 19 Unit (APBD-P)	Unit	19	18
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas RTLH di Kab Bantul: 6 Unit (APBD-P)	Unit	6	6
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas RTLH di Kota Yogyakarta: 20 Unit (APBD-P)	Unit	20	20
				Terlaksananya Pembangunan Baru RLH di Kab Gunungkidul: 4 unit (APBD-P)	Unit	4	4
				Terlaksananya Pembangunan Baru RLH di Kab Kulon Progo: 4 unit (APBD-P)	Unit	4	4
				Terlaksananya Pembangunan Baru RLH di Kab Sleman: 14 unit (APBD-P)	Unit	14	14
				Terlaksananya Pembangunan Baru RLH di Kab Bantul: 3 unit (APBD-P)	Unit	3	3
				Terlaksananya Pembangunan Baru RLH di Kota Yogyakarta: 1 unit (APBD-P)	Unit	1	1
				Terlaksananya penanganan PK RTLH dalam rangka perlindungan sosial di Kab Gunungkidul : 114 unit (DID)	Unit	114	113
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
				Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	titik	48	594
				Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			
				DED Penyediaan PSU di Permukiman (300 titik)	Laporan	1	1
				Kajian Dampak Penyediaan PSU terhadap Ketimpangan Wilayah	laporan	1	1
				Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman Kab. Bantul 100 titik	titik	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman Kab. Gunungkidul 152 titik	titik	152	152
				Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman Kab. Kulon Progo 26 titik	titik	26	26
				Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman Kab. Sleman 136 titik	titik	136	136
				Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman Kota. Yogyakarta 14 titik	titik	14	14
				Bantuan Penerangan Jalan Umum Kab. Bantul 118 unit	unit	118	118
				Bantuan Penerangan Jalan Umum Kab. Gunungkidul 4 unit	unit	4	4
				Bantuan Penerangan Jalan Umum Kab. Kulon Progo 6 unit	unit	6	6
				Bantuan Penerangan Jalan Umum Kab. Sleman 1 unit	unit	1	1
				Bantuan Penerangan Jalan Umum Kab. Yogyakarta 1 unit	unit	1	1
				Bantuan Rambu Lalu Lintas Kab. Gunungkidul 1 unit	unit	1	1
				Bantuan Cermin Tikungan Kab. Sleman 39 unit	unit	39	39

5) *Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*


a) *Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*

(1) *Kondisi Umum*

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 Ayat (1) dan Ayat (2) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Kondisi yang kondusif yang menjadi modal utama bagi bagi Pemda DIY dalam melaksanakan pembangunan.

DIY merupakan daerah yang menjadi magnet bagi warga daerah lain untuk berkunjung, bahkan kemudian menjadi warga yang menetap. Kondisi ini yang menjadikan DIY sebagai daerah multietnis dan multikultur serta berimplikasi pada perkembangan kehidupan perkotaan dengan segala aspek yang berpengaruh didalamnya. Perkembangan kehidupan tersebut akan cenderung menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya :

- (a) Aksi klithih atau kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang mengancam keselamatan masyarakat masih marak terjadi dan semakin meningkat setiap tahun. Data Polda DIY menyebutkan bahwa jumlah kasus klithih / kejahatan jalanan yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 30 kasus, tahun 2021 sebanyak 39 kasus dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 60 kasus.

- 
- (b) Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau tanpa berijin.
 - (c) Pelanggaran Perda dan Perkada yang makin marak dilakukan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke DIY, sebagai contoh masih banyaknya wisatawan yang melanggar SE Gubernur DIY Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya. Contoh lainnya adalah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh pelaku usaha di wilayah DIY berupa pemasangan spanduk / reklame tanpa berijin dan melintang di atas jalan sehingga membahayakan pengguna jalan serta menjadikan Yogyakarta sebagai kota sejuta reklame.
 - (d) Kondisi DIY sebagai destinasi wisata dan kota ramah wisata menyebabkan banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang suka memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan atau pengemis seperti manusia silver dan pengamen akustik di setiap perempatan lampu merah di wilayah DIY.
 - (e) Maraknya aktivitas penambangan liar di sungai, pesisir pantai, bukit, dan gunung / lereng gunung yang dilakukan tanpa berijin dan merusak lingkungan.


Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka penegakan Perda, Perdais, dan Perkada perlu dilakukan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Berikut ini adalah target dan realisasi kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022 :

Tabel 3.98. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Rerata Desa/ Kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan	Desa / Kelurahan	350	360	360	100	360	100

Sumber: Satpol PP DIY, 2023

Indikator kinerja sasaran Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2022 adalah “Rerata Desa / Kelurahan yang melakukan upaya menjaga keamanan lingkungan”. Dari target yang sudah ditetapkan yaitu 360 Desa / Kelurahan terealisasi sebanyak 360 Desa / Kelurahan, sehingga capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 sudah tercapai dengan persentase 100%. Capaian kinerja sasaran tersebut sudah memenuhi target karena parameter yang digunakan dalam perhitungan indikator sudah terpenuhi. Parameter tersebut berdasarkan data statistik Potensi Desa (Podes) BPS Provinsi DIY tahun 2021.



BPS melakukan pendataan setiap tiga tahun sekali. Hasil pendataan di tahun 2021 relatif turun dibandingkan hasil pendataan di tahun 2018, dikarenakan efek pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 berdasarkan data yang dihimpun Satpol PP DIY, banyaknya Desa / Kelurahan yang melaksanakan upaya menjaga keamanan lingkungan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat dibandingkan tahun 2021, dengan capaian sebagai berikut :

- (a) Pembangunan / Pemeliharaan Pos Kamling se-Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 450 Pos.
- (b) Pembentukan Regu Keamanan se-Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah 610 regu.
- (c) Penambahan Jumlah Anggota Hansip/Linmas se-Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah 305 Anggota.
- (d) Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam se-Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 405 tamu.

Realisasi target kinerja sasaran pada tahun 2022 mencapai 100%, atau jika dibandingkan target akhir RPJMD 2022 telah tercapai sebesar 100%.

(2) *Permasalahan dan Solusi*

(a) *Permasalahan*

- Aksi *klithih* atau kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang mengancam keselamatan masyarakat masih marak terjadi dan semakin meningkat setiap tahun. Berdasarkan data Polda DIY jumlah kasus *klithih*/kejahatan jalanan yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 30 kasus, tahun

2021 sebanyak 39 kasus dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 60 kasus.

- Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau tanpa berijin.
- Pelanggaran Perda dan Perkada yang makin marak dilakukan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke DIY, seperti masih banyaknya wisatawan yang melanggar SE Gubernur DIY Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya; Pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh pelaku usaha di wilayah DIY berupa pemasangan spanduk/reklame tanpa berijin dan melintang di atas jalan sehingga membahayakan pengguna jalan dan menjadikan Yogya sebagai kota sejuta reklame.
- Kondisi DIY sebagai destinasi wisata dan kota ramah wisata menyebabkan banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang suka memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan atau pengemis seperti manusia silver dan pengamen akustik di setiap perempatan lampu merah di wilayah DIY.
- Maraknya aktivitas penambangan liar di sungai, pesisir pantai, bukit, dan gunung/lereng gunung yang dilakukan tanpa berijin dan merusak lingkungan.

(b) *Solusi*

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas (**poin a**).

- Guna mengantisipasi dan menanggulangi aksi klithih atau kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, Satpol PP DIY melakukan patroli rutin Bersama dengan Polda DIY, Satpol PP Kabupaten/Kota dan Polres Kabupaten/Kota, serta melibatkan Satlinmas dan kelompok Jaga Warga. Patroli ini dilakukan setiap hari Jumat hingga Senin, pada jam 23.30 WIB sampai 05.00 WIB. Selain patroli, Satpol PP DIY juga melaksanakan kegiatan Satpol PP *Go To School*, yakni mendatangi sekolah-sekolah di wilayah DIY untuk melakukan sosialisasi/pembinaan kepada siswa sekolah dan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bawaan siswa serta kendaraan yang digunakan siswa.
- Satpol PP DIY melakukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa, bersama sama dengan OPD terkait.
- Guna mengatasi pelanggaran Perda dan Perkada yang makin marak, gencar dilakukan berbagai operasi penertiban, baik yustisi maupun non yustisi. Selain operasi terhadap pelanggaran Perda dan Perkada, dilakukan juga sosialisasi kepada masyarakat tentang pelanggaran Perda/Perkada, baik melalui metode konvensional maupun melalui media

sosial serta pembuatan film pendek. Patroli juga dilakukan, serta ditambah adanya layanan aduan masyarakat yang selalu ditindaklanjuti.

- Penertiban terhadap anak jalanan, gelandangan atau pengemis seperti manusia silver dan pengamen akustik. Bagi mereka yang terjaring operasi diserahkan kepada Dinas Sosial DIY untuk dilakukan pembinaan/rehabilitasi di *Camp Assesment*. Selain itu, juga menjaring dan menyidangkan pihak yang memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan atau pengemis.
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan secara non yustisial terhadap pelanggar Perda penambangan liar yang terjaring melalui operasi penertiban perijinan.

(3) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022*

Pada tahun anggaran 2022 di Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Linmas terdapat 3 Program, 11 Kegiatan, dan 34 Subkegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp33.497.419.640,00, dengan realisasi sebesar Rp32.548.782.839,00 atau 97,17%. Selanjutnya untuk kinerja fisik sudah terealisasi 100% sesuai dengan target.

Rincian capaian kinerja program dan kegiatan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.99. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Linmas Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJAG	<p>1. Melakukan peningkatan kemampuan SDM Satpol PP secara gradual</p> <p>2. Melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi/ OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait penegakan Perda/Perkada</p> <p>3. Melakukan peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p> <p>4. Melakukan peningkatan koordinasi dengan Provinsi lain di daerah perbatasan</p> <p>5. Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya</p>	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</p> <p>Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD</p> <p>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku</p> <p>Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.</p> <p>Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD</p> <p>Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai kaidah yang berlaku</p>	%	100	100
					Jenis	5	5
					%	100	100
					Jenis	4	4

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	2,34% %	100	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	2,34% %	100	100
				Konsep/Bahan LKPJ	Dokumen	1	1
				Komsep/Bahan LPPD	Dokumen	1	1
				Dokumen LKjIP	80 Nilai AKIP	80	80
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
				Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan	Tahun	1	1
				Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan	97,66% %	100	100

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			
				Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	Penatausahaan		dan
				Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	Tahun	1	1
				Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	97,66% %	100	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung	97,66% %	100	100

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				kelancaran tugas dan fungsi OPD			
				Laporan Keuangan Semester	Dokumen	2	2
				Laporan Keuangan zbulanan	Dokumen	12	12
				Laporan Keuangan Triwulan	Dokumen	4	4
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	97,66% %	100	100
				Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tahun	1	1
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
				Tersedianya pakaian dinas perangkat daerah	Stel	120	120
				Dukungan terhadap	97,66% %	100	100

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			
				Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			
				Terfasilitasinya penilaian angka kredit JFT	Tahun	1	1
				Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	97,66% %	100	100
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
				Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya	Orang	28	28
				Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan	97,66% %	100	100

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
				Berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Penvermatan RKPA OPD Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Mei 2022 sub kegiatan ini di-0-kan karena aktivitas kegiatan yang dibiayai DBH-CHT dipindah ke sub kegiatan lainnya pada bidang teknis			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	19,53% %	100	100
				komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis	5	5
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung	19,53% %	100	100

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				kelancaran tugas dan fungsi OPD			
				Alat tulis kantor	Jenis	21	21
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Penggandaan	Lembar	20.446	20.446
				Barang cetakan	Jenis	12	12
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	19,53% %	100	100
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	19,53% %	100	100
				Tersedianya surat kabar dan majalah	Jenis	1	1
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang	19,53% %	100	100

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				<p>mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD</p> <p>Tersedianya makanan dan minuman rapat</p> <p>Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi</p> <p>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD</p> <p>Terpeliharanya Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada OPD</p> <p>Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.</p> <p>Pengadaan Mebel</p> <p>Pengadaan Mebeuler</p> <p>Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung</p>	<p>Tahun</p> <p>Tahun</p> <p>Paket</p> <p>%</p> <p>Jenis</p> <p>%</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>100</p> <p>3</p> <p>100</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>100</p> <p>3</p> <p>100</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				kelancaran tugas dan fungsi OPD.			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	7,83% %	100	100
				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya sesuai RKPBM	Jenis Jenis	3	3
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	80,47% %	100	100
				Tersedianya sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jenis	2	2
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Bukti pembayaran jasa surat menyurat	Bulan	12	12

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan 80,47% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Dukungan 80,47% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Bukti pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12
				Bukti pemeliharaan jaringan internet	Paket	1	1
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Dukungan 80,47% terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Gedung kantor seluas 34.200 m2 yang terpelihara kebersihannya	m2	34200	34200
				Keamanan Kantor Terjaga Dengan Baik	Bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	%	100	100
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	12
				Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai RKPBM	Unit	38	38
				Pemeliharaan Mebel			
				Terpeliharanya mebel sesuai RKPBM	Jenis	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	%	100	100
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Terpeliharanya peralatan dan mesin sesuai RKPBMMD	Jenis	12	12
				Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	%	100	100
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Pos Pemantauan SRI (Satlinmas Rescue Istimewa) wilayah V Glagah terbangun	Unit	3	3
				Dukungan terhadap sarana dan prasarana aparatur yang mendukung	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				kelancaran tugas dan fungsi OPD.			
				Pos Satpam kantor Satpol PP diperluas	Unit	1	1
				Kamar mandi SRI (Satlinmas Rescue Istimewa) wilayah VI waduk sermo terbangun	Unit	1	1
				Pos Pantau SRI (Satlinmas Rescue Istimewa) Lt. 3 korwil III Parangtritis yang terbangun	Unit	1	1
				Gedung kantor Satpol PP DIY yang terrehabilitasi	Unit	1	1
				Gudang Satpol PP yang terehabilitasi	Unit	1	1
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
				Presentase gangguan tibumtranmas yang tertangani	%	55	55
				Presentase pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang tertangani	%	78	78

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Presentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif	%	40	40
				Presentase gangguan tibumtranmas yang tertangani	%	70	70
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			
				Laporan Pengamanan dan Pengendalian Masa Unjuk Rasa berlangsung dengan kondusif di 5 Kab/Kota	Laporan	72	72
				Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kondisi aman	Tahun	1	1
				Kunjungan Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah dalam kondisi aman	Laporan	68	68
				Deteksi dini gejala permasalahan masyarakat untuk penyajian data tentang situasi	Laporan	60	60

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				daerah dalam pelaksanaan penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Permendagri No.54 Tahun 2011)			
				Aset Pemda DIY yang terjaga dari kerawanan penyimpangan penggunaan	Titik	75	75
				Data lokasi rawan gangguan tibumtranmas perbatasan	Laporan	2	2
				Laporan operasi pengawasan kejahatan jalanan / klitih	Laporan	25	25
				Event Pemda DIY dan sosial kemasyarakatan dalam kondisi aman	Kali	48	48
				Dukungan 75 % terhadap Persentase gangguan tibum	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				tranmas yang tertangani				
				Data lokasi rawan gangguan tibumtranmas di 5 Kab/Kota DIY	Laporan	60	60	
				Laporan pengendalian tibumtranmas di 5 Kab/Kota DIY	Laporan	50	50	
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
				Anggota Satlinmas yang meningkat kapasitasnya dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat	Orang	3300	3300	
				Dukungan terhadap Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	75 %	%	100	100
				Peningkatan Kapasitas SDM Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia				
				Dukungan terhadap	75 %	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani			
				Kebugaran, jiwa koorps, keterampilan, kemampuan dan kapasitas anggota Sat Pol.PP DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional	Orang	110	110
				Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			
				Rekomendasi penanganan kerja sama antara Satpol PP DIY dengan Polda	Rekomendas	1	1
				Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur-Anggota FKD-MPU	Dokumen	2	2
				Dukungan terhadap Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani	75 %	100	100

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Laporan hasil penanganan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap gangguan tibumtranmas dan linmas	Dokumen	1	1
				Rumusan Kerja sama tibumtranmas Satpol PP DIY	Rekomendasi	1	1
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
				Publikasi media cetak	Kali	6	6
				Tokoh masyarakat dan perangkat desa yang memahami perda/ perkada DIY	Orang	800 ¹	800
				Dukungan 80 % terhadap Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang tertangani	%	100	100
				Anggota Satpol PP, Aparat Kelurahan dan Aparat Kapanewon yang memahami tentang Kepemiluan	Orang	1200	1200

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Masyarakat rentan pelanggar rokok memahami peraturan perundang-undangan cukai rokok	Orang	280	280
				Informasi yang tersampaikan kepada masyarakat melalui media elektronik	Kali	2	2
				Informasi terkait peraturan perundang-undangan cukai tersampaikan melalui media elektronik dan jejaring	Kali	3	3
				Masyarakat memahami peraturan perundang-undangan bidang cukai	Orang	140	140
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
				Pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tertangani	Laporan	2	2

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				secara Yustisi dengan mekanisme Acara Pemeriksaan Singkat			
				Pelanggaran Perda dan atau Perkada yang tertangani secara non yustisi	Laporan	88	88
				Monev pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai tembakau	Rekomendasi	1	1
				Dukungan 80 % terhadap Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang tertangani	%	100	100
				Operasi Cukai Rokok Illegal Bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Kali	1	1
				Pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang tertangani secara Yustisi dengan mekanisme Acara Pemeriksaan Cepat	Laporan	40	40

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Melakukan peningkatan kemampuan SDM Satpol PP secara Gradual	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			2. Melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi/ OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait				
			3. Melakukan Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Pembinaan Jagawarga			
			4. Melakukan peningkatan koordinasi dengan Provinsi lain di daerah perbatasan	Rekomendasi terhadap permasalahan yang ditangani jagawarga di masyarakat	Dokumen	1	1
			5. Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya	Mangayubagyo Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	event	1	1
				Anggota jaga warga yang meningkat kapasitasnya dalam rangka penanganan permasalahan masyarakat	Angkatan	15	15
				Anggota Satlinmas Rescue Istimewa yang berkompeten dalam pencarian	Pelatihan	2	2

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				dan pertolongan korban laka laut, gunung waduk (pelatihan) (Pelatihan)			
				Sarana operasional Satlinmas Rescue Istimewa	jenis	13	13
				Rekomendasi terhadap permasalahan yang ditangani warga di masyarakat	Dokumen	1	1
				Tradisi larung laut dan budaya masyarakat pantai, waduk dan gunung terselenggara dengan aman (Pengamanan Event)	Event	2	2
				Jumlah kelompok jaga warga terbina dan mampu menjalankan tugasnya	Kelompok	800	800
				Gebyar Dasawarsa Undang Undang Keistimewaan	Event	4	4
				Posko SRI (Pantai Baru)	Unit	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				DED Pembangunan Posko Satlinmas Rescue Istimewa	Dokumen	2	2
				Patroli Kawasan Sumbu Filosofis	bulan	6	6

b) Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

(1) Kondisi Umum

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, Pemda DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY memiliki ketugasan untuk menyelenggarakan pemantauan perkembangan politik di daerah guna mewujudkan situasi kondusif di wilayah.

Secara umum, situasi politik di DIY sepanjang tahun 2022 cenderung kondusif dan terkendali. Namun demikian, terdapat beberapa catatan yang perlu diantisipasi menjelang Pemilu 2024, di antaranya yakni potensi konflik internal partai politik; konflik antarpolitical politik, baik parpol lama maupun baru; serta konflik horizontal antarsimpatisan partai politik. Beberapa potensi konflik tersebut harus menjadi perhatian bersama dengan mengikutsertakan unsur-unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemantauan perkembangan politik di wilayah DIY.

Ibarat miniatur suku bangsa Indonesia, kemajemukan di DIY merupakan suatu realita yang tidak dapat dipungkiri terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan keanekaragaman etnik, suku, budaya, agama, bahasa dan budaya, Yogyakarta menjadi wadah bagi beragam kelompok kepentingan untuk menciptakan kultur toleran dengan berbagai ruang dan dimensi. Hal tersebut membuat situasi toleransi di Yogyakarta menuai beragam tantangan. Benturan budaya antara kelompok agama puritan dan sinkretis telah mempertegas batas-batas sosial dan menimbulkan



ketegangan sosial yang pada tingkat ekstrem dapat berakhir pada perpecahan serta konflik sosial di masyarakat. di sisi lain, aspek-aspek simbolik pun menjadi penambah faktor disintegrasi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam rangka cegah dini dan deteksi dini potensi konflik di DIY menyelenggarakan kegiatan untuk memfasilitasi forum-forum kemitraan yang dibentuk dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY.

Selain bekerja sama dengan lembaga mitra, Pemda DIY juga melaksanakan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Penanganan Konflik Sosial; Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik; Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang dimanifestasikan melalui kegiatan Sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu wujud dan sarana untuk menguatkan kapasitas masyarakat dalam menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat serta mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa.

Penguatan Koordinasi dengan Forum-forum Kemitraan antara lain:

(a) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)


Sebagai salah satu forum yang ikut berperan dalam menciptakan situasi kondusif wilayah DIY, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) bekerja sama dengan Pusat Studi Pancasila UGM telah membantu proses percepatan pembauran kebangsaan dengan ikut serta menginisiasi lahirnya kegiatan pembekalan pembauran kebangsaan bagi mahasiswa baru dari luar DIY serta membantu menginisiasi ide kegiatan konsolidasi antarpemda dalam rangka pengelolaan asrama mahasiswa di DIY.

(b) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Sebagai upaya deteksi dini dan meredam potensi konflik di tengah masyarakat, Pemda DIY secara intensif melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di wilayah DIY. Hal tersebut ditujukan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyikapi beberapa permasalahan keagamaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertarikan masyarakat.

(c) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Guna mendeteksi secara dini potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat serta untuk menghasilkan rekomendasi pengambilan kebijakan dalam menghadapi potensi ancaman keamanan sesuai dengan skalanya, Pemda DIY berupaya mengoptimalkan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di DIY. Forum tersebut memiliki tugas dan fungsi untuk menjangkau, menampung, mengkoordinasikan, serta



mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat terkait potensi ancaman keamanan, gejala, atau peristiwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; serta memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

(d) *Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS)*

Guna melaksanakan penanganan konflik sosial di DIY, Pemda DIY telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang bertujuan untuk mengefektifkan keterpaduan dan koordinasi antar aparat pemerintah daerah dengan instansi vertikal terkait di daerah. Penanganan Konflik Sosial (PKS) merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Pelaksanaan rangkaian kegiatan dilakukan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara terkoordinasi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan serta penyusunan Rencana Aksi Terpadu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Capaian DIY dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.

IDI DIY pada 2021 tercatat sebesar 81,21 dengan kategori tinggi. Angka tersebut secara nasional mendapat peringkat ke-3 dari 34 provinsi, berada di bawah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Capaian tersebut

telah diukur dengan menggunakan metode baru, dimana aspek kapasitas lembaga demokrasi tercapai sebesar 80,74 (lebih rendah dibandingkan capaian nasional di aspek yang sama). Aspek kesetaraan memperoleh nilai 87,29 (lebih tinggi dibandingkan agregasi dari nilai 34 provinsi). Adapun aspek kebebasan tercapai sebesar 74,32 (lebih rendah dibandingkan capaian nasional di aspek yang sama).

Capaian Indeks Ketahanan Nasional

Indeks Ketahanan Nasional merupakan suatu tolok ukur bagi ketangguhan dan kemampuan wilayah dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi segala macam bentuk ancaman yang membahayakan integritas, identitas, serta perjuangan mewujudkan tujuan nasional. Pada tahun 2022, menggunakan empat gatra yang ada dalam Indeks Ketahanan Nasional sebagai indikator dalam pengukuran kualitas keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun target dan realisasi capaian kinerja Badan Kesbangpol DIY tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.100. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Skor Indeks Ketahanan Nasional DIY di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya	Angka	2,48	3,06	3,19	104,25	3,06	104,25

Sumber: Lemhannas RI, 2023

Capaian kinerja Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY dengan indikator skor indeks ketahanan nasional di DIY pada tahun 2022 terealisasi sebesar 3,19 dari target 3,06 atau setara dengan 104,25%, yang termasuk dalam predikat “sangat baik”. Capaian tersebut merupakan formulasi perhitungan rerata capaian skor indeks ketahanan nasional DIY pada gatra ideologi, politik, sosial budaya dan ekonomi. Adapun hasil capaian dari masing–masing gatra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.101. Detail Indeks Ketahanan Nasional DIY

No.	Gatra	Capaian Skor (DIY)
1.	Ideologi	3,13
2.	Politik	3,37
3.	Sosial Budaya	3,25
4.	Ekonomi	2,94
Rerata		3,19

Sumber: Skor Ketahanan Wilayah DIY per Desember 2022 dari laman <https://siskurtannas.lemhannas.go.id/>, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 capaian kinerja melebihi target yang telah ditentukan. Berbeda dengan tahun 2021, capaian kinerja di akhir tahun tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan karena adanya perubahan model pengukuran yang diterapkan oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI. Model pengukuran ketahanan nasional yang digunakan pada tahun 2022 merupakan "Model Tannas T3L 2010", sedangkan model pengukuran pada tahun 2021 merupakan "Model Tannas 2020" yang baru pertama kali dikembangkan dan diterapkan, yakni pada tahun bersangkutan. Perbedaan model pengukuran inilah yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan hasil capaian kinerja di kedua tahun anggaran.

(2) *Permasalahan dan Solusi*

(a) *Permasalahan*

- Belum sinergisnya penetapan sasaran kegiatan *Sinau* Pancasila.
- Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022.
- Perlunya penguatan fungsi koordinasi antar-unsur Forkopimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di daerah, mengingat masih belum rutusnya penyelenggaraan rapat koordinasi Forkopimda.
- Masih adanya potensi instabilitas keamanan dan ketertiban umum.

(b) *Solusi*

- Terbitnya Perda DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang secara jelas mengatur sasaran kegiatan *Sinau* Pancasila.
- Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai tingkat kepentingan yang dilaksanakan oleh pelaksana teknis kegiatan.
- Optimalisasi fungsi koordinasi antar unsur forkopimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di daerah dengan menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin. Hal tersebut juga didukung dengan adanya sistem pelaporan ke forkopimda kabupaten/kota maupun provinsi secara berjenjang.

- Pencegahan dan penanganan secara intensif dilakukan dengan menggandeng seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban.

(3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Pada tahun 2022, Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan melalui 7 program, 13 kegiatan dan 34 subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.764.723.454,00. Capaian kinerja fisik sub kegiatan sebesar 100% sesuai target, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp20.840.966.696,00 atau 95,75%. Selanjutnya, rincian capaian kinerja program dan kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.102. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. Pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN KEBUDAYAAN			
			2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan pemberdayaan kelembagaan	Terselenggaranya pembangunan ketahanan sosial budaya di DIY	Persen	100	85.14
			3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pencegahan dan penanganan potensi konflik dan atau konflik	Terselenggaranya pembangunan ketahanan sosial budaya di DIY Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Persen	100	100
				Terlaksananya Sinau kali Bhinneka Tunggal Ika		60	60
				Terbentuknya kader pembauran budaya di DIY	orang	70	70
				Terlaksanakannya Sinau Pancasila	kelompok	142	142
				Dukungan terhadap peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	%	100	100
2	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. Pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi dan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			kewaspadaan nasional, pembauran kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan				
			2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan pemberdayaan kelembagaan	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	73.63
			3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pencegahan dan penanganan potensi konflik dan atau konflik	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	100
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	71.48
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100
				Terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	100	85.31
				Terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persen	100	100
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap Presentase peningkatan pengembangan sistem lapran capaian kinerja dan keuangan	%	1.6	1.6
				Tersusunnya dokumen PK sesuai kaidah yang berlaku	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen Renja Perubahan sesuai kaidah yang berlaku	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen Renja sesuai kaidah yang berlaku	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen ROPK sesuai kaidah yang berlaku	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen Renstra sesuai kaidah yang berlaku	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
				Tersusunnya RKAP-SKPD sesuai kaidah yang berlaku	dokumen	1	1
				Tersusunnya RKA-SKPD sesuai kaidah yang berlaku	dokumen	1	1
				Dukungan terhadap Presentase peningkatan pengembangan sistem lapran capaian kinerja dan keuangan	%	1.6	1.6
				Tersusunnya DPA-SKPD sesuai kaidah yang berlaku	dokumen	1	1
				Tersusunnya DPPA-SKPD sesuai kaidah yang berlaku	dokumen	1	1
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap Presentase peningkatan pengembangan sistem lapran capaian kinerja dan keuangan	%	1.6	1.6
				Tersusunnya Dokumen LKJIP	Nilai AKIP	80	80
				Tersusunnya Konsep/Bahan LPPD	dokumen	1	1
				Tersusunnya Konsep/Bahan LKPJ	dokumen	1	1
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				Dukungan terhadap Presentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	98.4	98.4
				Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	12
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
				Dukungan terhadap Presentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	98.4	98.4
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	bulan	12	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
				Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				anggaran. DPA, dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi (laporan keuangan tahunan)			
				Dukungan terhadap Presentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	98.4	98.4
				Koordinasi dan Penyusunan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	Keuangan
				Laporan prognosis	dokumen	1	1
				Dukungan terhadap Presentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	98.4	98.4
				Laporan keuangan triwulanan	dokumen	4	4
				Laporan keuangan bulanan	dokumen	12	12
				Laporan keuangan semesteran	dokumen	2	2
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
				Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	bulan	12	12
				Dukungan terhadap Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang	%	0.7	0.7

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	9	9
				Dukungan terhadap Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	42.4	42.4
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	25	25
				Dukungan terhadap Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	42.4	42.4
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Dukungan terhadap Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	42.4	42.4
				Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis	8	8
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah lembar hasil cetak dan penggandaan	lembar	17000	17000
				Dukungan terhadap Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	42.4	42.4
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Tersedianya surat kabar dan majalah	jenis	4	4
				Dukungan terhadap Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	42.4	42.4
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
				Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi	bulan	12	12
				Tersedianya makanan dan minuman rapat	bulan	12	12
				Dukungan terhadap Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	42.4	42.4
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	jenis	6	6

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	28	28
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Bukti Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, Telepon, Internet dan PDAM	bulan	12	12
				Dukungan terhadap Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	57.6	57.6
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Dukungan terhadap Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	57.6	57.6
				Gedung kantor seluas 1.392 m2 yang terpelihara kebersihannya	bulan	12	12
				Keamanan kantor yang terjaga dengan baik	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan	bulan	12	12

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				perorangan dinas atau jabatan			
				Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBM	unit	16	16
				Dukungan terhadap Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	71.3	71.3
				Pemeliharaan Mebel			
				Dukungan terhadap Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	71.3	71.3
				Terpeliharanya mebeleur sesuai RKPBM	jenis	4	4
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	jenis	22	22
				Dukungan terhadap Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	71.3	71.3
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	71.3	71.3
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Dukungan terhadap Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	28	28
				Terlaksanakannya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	1
				PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
				Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Angka	2.9	2.85
				Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Angka	2.9	3.13
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan			
				Laporan Hasil Pelaksanaan FGD Sinau Pancasila	dokumen	1	1
				Rekomendasi dalam Kerukunan Umat Beragama Melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	rekomendasi	3	3

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rekomendasi dalam Pembauran Kebangsaan Melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	rekomendasi	3	3
				Dukungan terhadap Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Skor / %	8.7	8.7
				Rekomendasi dalam Kerukunan Umat Beragama melalui Rapat Kerja Pemuda Lintas Agama	rekomendasi	1	1
				Laporan Hasil Pelaksanaan FGD Sinau Bhinneka	dokumen	1	1
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
				Skor /Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Politik	Angka	3.35	1.82
				Skor /Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Politik	Angka	3.35	3.37
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
				Laporan FGD Forum Komunikasi Partai Politik	dokumen	1	1
				Informasi yang tersampaikan kepada masyarakat melalui media cetak	kali	6	6
				Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD	partai politik	10	10

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				DIY mendapat bantuan keuangan parpol sesuai peraturan perundangan yang berlaku			
				Perwakilan kelompok masyarakat (tokoh masyarakat, difabel, pemilih pemula, kelompok perempuan) yang mendapat pendidikan politik dan kewargaan	kelompok	3	3
				Dukungan terhadap Skor /Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Politik	%	86.2	86.2
				Partai politik yang memperoleh pemahaman mengenai tata cara penyusunan laporan bantuan keuangan partai politik sesuai dengan peraturan yang berlaku	partai politik	10	10
				Kelompok masyarakat (Parpol, FKDM dan Perangkat Kalurahan) yang mendapat pendidikan politik dan wawasan kebangsaan	orang	1200	1200
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap Skor /Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	%	86.2	86.2
				Laporan dan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil IDI DIY	dokumen	1	1
				Laporan Pemantauan Perkembangan Politik di DIY	dokumen	1	1
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
				Skor /Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	Angka	3.35	1.82
				Skor /Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	Angka	3.35	3.37
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
				Dukungan terhadap Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	%	13.8	13.8
				Rekomendasi terhadap bahan rumusan kebijakan organisasi kemasyarakatan.	Dokumen	1	1
				Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
				Organisasi masyarakat yang mendapatkan Dana Hibah Ormas.	ormas	6	7
				Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi tentang Kebijakan dibidang ormas	peserta	200	200

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	%	13.8	13.8
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibandng Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
				Laporan hasil kegiatan Kegiatan Monitoring dan evaluasi di DIY	dokumen	1	1
				Update Data Ormas Teregistrasi dan Terdata	dokumen	1	1
				Laporan Hasil Pengawasan Tim Pengawasan Terpadu Ormas DIY	dokumen	1	1
				Dukungan terhadap Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	%	13.8	13.8
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
				Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	Angka	2.89	2.62
				Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	Angka	2.89	3.09
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
				Dokumen Rencana Aksi Peningkatan Ketahanan Ekonomi	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dokumen Panduan Tata Kelola Kolaborasi Pariwisata Istimewa DIY sebagai upaya Pemulihan Ketangguhan Ekonomi dan Sosial DIY	dokumen	1	1
				Dukungan terhadap Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	%	100	100
				Dokumen Desa Percontohan yang menerapkan tata kelola kolaborasi Pariwisata Istimewa DIY sebagai upaya Pemulihan Ketangguhan Ekonomi dan Sosial DIY	dokumen	1	1
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
				Dukungan terhadap Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	%	100	100
				Kelompok masyarakat (Perwakilan Pelajar, Mahasiswa dan Organisasi Pemuda) yang mendapat sosialisasi terkait pencegahan narkoba	kelompok	3	3
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rekomendasi Ketahanan Ekonomi	Rekomendasi	1	1
				Rekomendasi GNRM	Rekomendasi	1	1
				Rekomendasi P4GN	Rekomendasi	1	1
				Dukungan terhadap Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	%	100	100
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
				Skor/Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Angka	2.9	2.85
				Skor/Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Angka	2.9	3.13
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
				Laporan hasil koordinasi dan upaya tindak lanjut Forkopimda DIY	Dokumen	1	1
				Dukungan terhadap Skor / Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	%	91.3	91.3
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap Skor / Nilai Indek Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	%	91.3	91.3
				Laporan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pusat Komunikasi dan Informasi	Dokumen	1	1
				Rekomendasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) tentang peningkatan kewaspadaan dini masyarakat DIY	Rekomendasi	3	3
				Laporan Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik	Dokumen	2	2
				Laporan Hasil Pelaksanaan FGD Anti Terorisme	dokumen	1	1
				Laporan Pemantauan Orang Asing (POA) di DIY	Dokumen	1	1
				Laporan Pemantapan Fungsi FKDM	Dokumen	1	1
				Laporan Penanganan Konflik Sosial (PKS) di DIY	Dokumen	1	1

c) *Sub Urusan Penanggulangan Bencana*

(1) *Kondisi Umum*

Kejadian Bencana selama tahun 2022 bervariasi dari kejadian kecil, sedang hingga besar. Kenaikan jumlah kejadian tahun 2022 terlihat drastis dipengaruhi oleh jumlah data gempa bumi baik terasa maupun tidak terasa dan jumlah tanah longsor yang meningkat. Seismograf yang di pasang di beberapa wilayah DIY menjadikan banyaknya gempa yang sebelumnya tidak terpantau menjadi terpantau. Kejadian hidrometeorologi termasuk tanah longsor dapat dipengaruhi oleh kondisi kemarau basah. Kejadian longsor besar seperti di Semin Gunungkidul dan Kulon Progo. Kekeringan yang biasanya massif, pada tahun 2022 lebih dapat dikendalikan. Angka kebakaran turun pada tahun 2022 dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun pada tahun 2022 banyak kebakaran area kerja seperti pabrik dan Gudang Cat. Penanganan cepat diperlukan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait pengurangan risiko terhadap dampak terjadinya bencana maupun terhadap potensi kejadian setiap bencana.

Jumlah Kejadian Bencana di DIY Tahun 2018-2022, dapat dilihat pada tabel berikut.

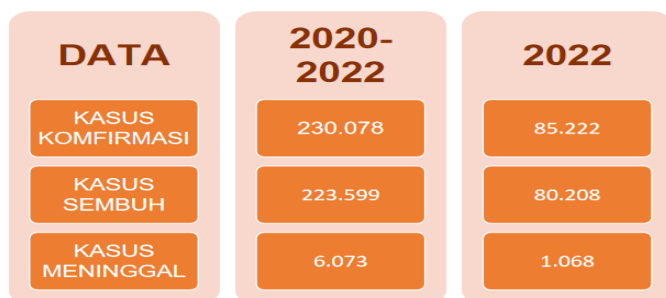
Tabel 3.103. Jumlah Kejadian Bencana di DIY Tahun 2018-2022

Kejadian	2018						2019						2020						2021						2022					
	B	G	K	S	Y	DIY	B	G	K	S	Y	DIY	B	G	K	S	Y	DIY	B	G	K	S	Y	DIY	B	G	K	S	Y	DIY
Angin Kencang	34	49	25	62	43	14	54	51	35	85	25	16	44	59	39	81	16	16	33	29	62	43	19	15	17	49	81	14	17	14
Longsor	36	33	90	29	28	21	22	96	14	32	13	50	99	62	22	61	24	47	10	51	15	20	27	35	30	14	45	52	24	70
Banjir	2	2	2	6	3	12	6	3	6	6	1	12	2	7	5	6	3	15	4	3	3	4	3	16	5	18	31	16	6	74
Keke- ringan	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gempa	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	24	24	24	24	24	24	77	77	77	77	77	77
Gunung Api	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
Epidemi				12		12				4		4				9		9				2		2				2		2
													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2

Kejadian	2018						2019						2020						2021						2022					
	B	G	K	S	Y	DIY	B	G	K	S	Y	DIY	B	G	K	S	Y	DIY	B	G	K	S	Y	DIY	B	G	K	S	Y	DIY
Kebakaran	41	36	49	10	43	27	22	56	65	14	56	54	12	28	25	53	24	25	92	30	32	15	18	18	20	23	25	28	18	11
TOTAL	11	12	16	21	11	78	50	20	25	26	95	13	27	15	30	21	68	10	23	11	24	85	68	95	84	10	13	10	83	18
	4	1	7	1	7	2	6	7	2	8	55	2	8	0	1	58	3	4	8	8	8	8	8	5	10	64	12	8	17	

Ket.: B: Bantul; G: Gunungkidul; K: Kulon Progo; S: Sleman; Y: Yogyakarta
 Sumber: BPBD DIY, 2023 (data diolah)

Selain kejadian bencana yang tercatat sebagaimana diuraikan di atas, semenjak Bulan Maret Tahun 2020 sampai Tahun 2022, masih menghadapi bencana Pandemi Covid-19, meskipun kondisi pandemi yang terjadi pada Tahun 2022 lebih dapat terkendali. Upaya vaksinasi terus dilakukan, meliputi vaksin 1, vaksin 2, booster 1 dan booster 2. Berikut data terakhir perkembangan Covid-19 di DIY.



Gambar 3.36. Perkembangan Kasus Covid-19 di DIY Tahun 2020-2022
 Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2023

Pada Tahun 2022, juga terdapat penyakit mulut dan kuku (PMK), sehingga ditetapkan status siaga darurat hingga akhir tahun dan masih harus ditangani. Dilihat dari prosentasenya, DIY termasuk wilayah terdampak yang tinggi karena hanya memiliki 4 kabupaten dan 1 kota. Lebih dari 113.000 ternak yang telah divaksin dosis 1 dan separuhnya telah divaksin kedua. Masih menyisakan pekerjaan untuk vaksin kedua, namun penularan juga sudah dapat terkendali dengan baik.

Pandemi Covid-19 dan Penyakit Mulut dan Kuku pada tahun 2022 dikategorikan sebagai bencana tingkat provinsi. Selanjutnya kejadian bencana di tingkat Kabupaten/Kota berupa bencana cuaca ekstrim ditetapkan sebagai siaga darurat. Total nilai kerusakan dampak bencana pada tahun 2022 cukup besar yaitu Rp266.735.898.000,00. Data tersebut berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Pusdalops BPBD DIY dari BPBD Kab/Kota.

Kinerja Sub Urusan Penanggulangan Bencana tahun 2021-2022 serta capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD (2022).

Tabel 3.104. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Ketahanan Daerah	Angka	79	80	80	100	80	100

Sumber: BPBD DIY, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa untuk sasaran Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah dari target 80, tercapai 80, yang berarti prosentase realisasi terhadap target tahun 2022 sebesar 100%. Selanjutnya, dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian tahun 2022 mencapai 100%. Keberhasilan atas pencapaian target kinerja Indeks ketahanan daerah dapat diwujudkan karena peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur serta masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Selanjutnya terkait capaian kinerja, masih terdapat beberapa tantangan yang menjadi perhatian ke depan, yaitu: 1) Pencegahan dan pemulihan Pandemi Covid-19 tetap melakukan Kerja sama lintas sektor agar tetap terkendali; 2) Penyakit Mulut dan Kuku masih belum usai; 3) Kejadian bencana yang dipicu oleh cuaca ekstrem diantaranya Tanah longsor perlu menjadi prioritas dalam hal mitigasinya karena frekuensi kejadiannya yang cukup tinggi di wilayah DIY; 4) Pengelolaan EWS terintegrasi akan lebih dioptimalkan; 5) Semua pihak, termasuk masyarakat tetap siap siaga akan Status Merapi; 6) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan tingkat Provinsi menyesuaikan arahan dari Pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2020; serta 7) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi.

(2) *Permasalahan dan Solusi*

(a) Permasalahan

- Belum ada regulasi yang mengatur penggunaan dana kebutuhan mendesak untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hal ini agar segera tertangani agar dampaknya tidak semakin besar.
- Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) membutuhkan strategi untuk mempercepat capaian mengingat kesenjangan antara capaian program dengan jumlah sekolah yang ada.
- Perlunya peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana/Destana dalam rangka pengurangan risiko bencana.

- Banyaknya kawasan rawan bencana di DIY yang membutuhkan sistem peringatan dini bencana.
- Belum semua ancaman bencana telah disusun rencana kontijensinya.
- Belum optimalnya pengelolaan pengurangan risiko bencana pada kawasan strategis keistimewaan di DIY.
- Belum tersedianya informasi lahan untuk relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana.
- Belum tersedianya Sistem Data dan informasi manajemen kebencanaan yang terintegrasi/terpadu.
- Masih kurangnya kapasitas dan pengelolaan SDM PB (Aparat dan masyarakat serta relawan).
- Sarana dan prasarana PB belum semua memenuhi standar.
- Logistik bencana belum memenuhi kebutuhan PB sesuai standar.
- Penanganan kedaruratan kebencanaan di kawasan perbatasan perlu disinergikan.
- Belum adanya Peta Kawasan rawan kebakaran dan rencana induk sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan.
- Belum adanya SDM dan Sarana Prasarana Penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.

(b) Solusi

- Dibuat regulasi berupa Peraturan Gubernur untuk penggunaan dana kebutuhan mendesak untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

- Dibuat *roadmap* pembentukan dan pengembangan SPAB serta memastikan implementasinya dengan melibatkan seluruh *stakeholder*.
- Mengembangkan kapasitas Desa Tangguh Bencana yang telah dibentuk sebelumnya.
- Pengelolaan Sistem Peringatan Dini yang komprehensif baik yang dimiliki instansi, lembaga maupun masyarakat, serta pemetaan kebutuhan sistem peringatan dini bencana.
- Melengkapi rencana kontijensi sesuai dengan ancaman bencana di DIY.
- Meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan strategis keistimewaan dari potensi bencana.
- Mendorong warga dan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY untuk menyediakan lahan relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana.
- Menyediakan Sistem Data dan Informasi manajemen kebencanaan yang terintegrasi.
- Melakukan peningkatan kapasitas dan pengelolaan SDM PB (aparatur dan masyarakat serta relawan).
- Memastikan Sarana Prasarana PB memenuhi standar.
- Memastikan logistik bencana memenuhi kebutuhan PB dan sesuai standar.
- Melakukan pelatihan dan latihan penanganan kedaruratan kebencanaan di kawasan perbatasan.
- Membuat Pemetaan Kawasan rawan kebakaran dan rencana induk sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan.

- Memenuhi SDM dan sarana prasarana penanganan bahaya kebakaran dan penyelamatan.

(3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Pada tahun 2022 Sub Urusan Penanggulangan Bencana mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari pendanaan APBD sebesar Rp26.306.663.572,00 dengan mengampu 3 program dan 36 subkegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp24.391.977.565,00 atau 92,72%, serta realisasi fisik mencapai 100%.

Tabel 3.105. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Sub Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat akan risiko bencana dengan penguatan kebijakan dan implementasi didasarkan pada pemahaman kerentanan, keterpaparan, kapasitas, karakteristik bahaya dan lingkungan Penguatan tata kelola risiko untuk mendorong kerja sama kemitraan, perbaikan/pengembangan mekanisme, penguatan kelembagaan pada pelaksanaan pengurangan risiko bencana & pengelolaan sumber daya Peningkatan investasi PRB untuk ketangguhan/resiliensi dengan meningkatkan investasi publik dan swasta dalam mitigasi struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja Peningkatan manajemen risiko dan manajemen krisis dengan memperkuat kesiapsiagaan, respon kedaruratan, dan pemulihan pasca-bencana di semua tingkatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD Terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				05. PK	Dokumen	1	1
				03. Renja Perubahan	Dokumen	1	1
				04. ROPK	Dokumen	1	1
				02. Renja	Dokumen	1	1
				01. Renstra	Dokumen	1	1
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				3. Konsep/Bahan LPPD	Dokumen	1	1
				2. Konsep/Bahan LKPJ	Dokumen	1	1
				1. Dokumen LKjIP	Nilai AKIP A (80)	1	1
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				Terbayarnya gaji dan tunjangan tahun pegawai		1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Administrasi Keuangan yang bulan terselesaikan dengan baik dan benar		12	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Dokumen laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				1) dokumen laporan bulanan	dokumen	12	12
				2) dokumen laporan semesteran	dokumen	2	2
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
				2. Dokumen laporan prognosis	Dokumen	1	1
				1. Tersusunnya prognosis	Dokumen	1	1
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Laporan pengelolaan barang milik daerah pada BPBD DIY		12	12
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Alat listrik dan elektronik	jenis	15	15
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				1) Alat tulis kantor	Jenis	60	60
				2) Alat-alat/ Perlengkapan Kantor	Jenis	15	15
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				2. Hasil penggandaan	lembar	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				1. Barang hasil cetak	Jenis	15	15
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Bukti pembayaran surat kabar harian	Bulan	12	12
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Laporan dan rencana tindak lanjut hasil konsultasi dan koordinasi	Bulan	12	12
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				2. Perlengkapan kantor sesuai RKBMD	Jenis	15	15
				1. Peralatan kantor sesuai RKBMD	Jenis	20	20
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Pengiriman paket	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				2. Bukti pembayaran rekening listrik (pelanggan PLN premium)	Bulan	12	12
				5. Penambahan rekening telepon	Rekening	2	2
				3. Bukti pembayaran rekening telepon	Bulan	12	12
				4. Bukti pembayaran tagihan internet/ TV berlangganan	Bulan	12	12
				1. Bukti pembayaran rekening air PDAM	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				5. Repeater kantor terjaga dengan baik	Bulan	12	12
				4. Repeater kantor terjaga dengan baik	Bulan	12	12
				1. Kebersihan kantor terjaga dengan baik	Bulan	12	12
				2. Keamanan kantor terjaga dengan baik	Bulan	12	12

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				3. Mobilitas pimpinan terlayani dengan baik	Bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				4. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 2	Unit	20	20
				9. Kendaraan dinas operasional roda 4 solar yang terpelihara sesuai RKPBMMD	Unit	2	2
				5. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 4	Unit	18	18
				2. Bukti KIR Kendaraan dinas operasional roda 6	unit	9	9
				7. Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKPBMMD	Unit	8	8
				6. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 6	Unit	10	10
				1. Bukti KIR Kendaraan dinas operasional roda 4	unit	5	5
				3. Bukti mutasi balik nama kendaraan dinas operasional	unit	1	1
				8. Kendaraan dinas operasional roda 4 bensin yang terpelihara sesuai RKPBMMD	Unit	6	6
				Pemeliharaan Mebel			
				Mebeleur kantor terpelihara/ terawat	Jenis	10	10
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				2. Perlengkapan kantor terpelihara sesuai RKPBM	jenis	23	23
				1. Peralatan kantor terpelihara sesuai RKPBM	jenis	38	38
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				1. Penataan ruang dan lingkungan BPBD DIY	Jenis	4	4
				2. Revitalisasi pos piket jaga dan gedung gudang logistik	Paket	1	1
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
				Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	Desa/Kelurahan	13	13
				Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	Desa/Kelurahan	25	25
				Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana	sekolah	55	55
				Peningkatan Sekolah Aman (SSB) di Kawasan Rawan Bencana	sekolah	55	55
				Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana	menit	10	10
				Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana	menit	10	10
				Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana	menit	10	10
				Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana	menit	10	10
				Indeks pemulihan pasca-bencana	skor/nilai	85	85
				Indeks pemulihan pasca-bencana	skor/nilai	85	85
				Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				2) Hasil Kajian Indeks Ketahanan Daerah DIY	Dokumen	1	1
				1) Hasil Kajian IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia)	Dokumen	1	1
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)			
				3) Tersebarluaskannya Informasi jenis kebencanaan melalui berbagai media		3	3
				1) Bantuan Alat Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa	Paket	30	30
				2) Pelatihan masyarakat tanggap bencana khususnya di daerah rawan bencana	kali	15	15
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana			
				2) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1
				1) Hasil Rekomendasi Forum PRB untuk Pengurangan Risiko Bencana	Rekomendasi	6	6
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			
				1) Rapat Koordinasi Komponen Damkar	kali	1	1
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
				1. Laporan Operasional Pusdalops PB DIY beroperasi selama 12 bulan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	laporan	12	12
				2. Pemasangan Internet (WIFI) berbasis Padukuhan Untuk Daerah KRB (Kawasan Rawan Bencana)	Paket	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana			
				Pembuatan Alat Tangguh Bencana	Paket	6	6
				Peralatan dan Kendaraan operasional PB siap pakai	jenis	80	80
				Radio Komunikasi dalam PB yang terkelola dengan baik	paket	1	1
				Peralatan Penanggulangan Bencana sesuai rencana kebutuhan	jenis	17	17
				Alat Keselamatan Penanggulangan Bencana	Paket	7	7
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			
				1. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan rawan bencana baru yang terbentuk dan berkembang di DIY	desa/ kalurahan	25	25
				1.Satuan Pendidikan yang melaksanakan simulasi dan launching	Sekolah	35	35
				1. Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	sekolah	20	20
				Penanganan Pascabencana Provinsi			
				2. Laporan Monev Kegiatan RR	Dokumen	1	1
				3. Kajian DRI	Dokumen	1	1
				1, Inventarisasi kerusakan pasca bencana;	Dokumen	1	1
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana			
				Tim Reaksi Cepat yang siap siaga orang dalam penanganan darurat bencana		32	32
				Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8			
				1. Laporan kejadian/kedaruratan yang ditangani Petugas/Relawan	laporan kejadian	360	360			
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
				Logistik penanggulangan bencana kekeringan berupa bantuan Air bersih	tangki	60	60			
				Paket bantuan Logistik dalam rangka Penanggulangan Bencana	paket	600	600			
				Logistik posko pendukung penanggulangan bencana	paket	30	30			
				Paket bantuan perlengkapan untuk penanggulangan bencana (peralatan dan material bahan bangunan seng, bronjong dll)	jenis	6	6			
				Laporan Semesteran Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik	Laporan	2	2			
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah						
				Tersusunnya Panduan RSAB	dokumen	1	1			
				Kerja sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana						
Laporan Koordinasi Klaster PB	laporan	24	24							
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat akan risiko bencana dengan penguatan kebijakan dan implementasi didasarkan pada pemahaman kerentanan, keterpaparan, kapasitas, karakteristik bahaya dan lingkungan Penguatan tata kelola risiko untuk mendorong kerja sama kemitraan, perbaikan/ pengembangan mekanisme, penguatan kelembagaan pada pelaksanaan pengurangan risiko bencana & pengelolaan sumber daya	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						
				Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	%	30,86	30,86			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			Peningkatan investasi PRB untuk ketangguhan/resiliensi dengan meningkatkan investasi publik dan swasta dalam mitigasi struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja	Persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	%	30.86	30.86
			Peningkatan manajemen risiko dan manajemen krisis dengan memperkuat kesiapsiagaan, respon kedaruratan, dan pemulihan pasca-bencana di semua tingkatan	Persentase peningkatan Budaya tak benda yang dilestarikan	%	20	20
				Persentase peningkatan Budaya tak benda yang dilestarikan	%	20	20
				Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia			
				2. Kajian Mitigasi Bencana pada Bangunan Cagar Budaya tahap II sumbu filosofi	Dokumen	1	1
				1. Kajian Dampak Bencana terhadap Perekonomian Kawasan Tahap II	Dokumen	1	1
				Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya			
				Guide Visual Mitigasi Bencana Berbasis Lokalitas (Alam dan Non-Alam)	Video	1	1
				Pengembangan kapasitas relawan damkar	Kabupaten/ Kota	5	5
				Virtual Tours Kebencanaan ; Jelajah Kebencanaan Virtual dan Proses Mitigasinya Khas Keistimewaan Yogyakarta	Video	1	1

6) *Urusan Sosial*

a) *Kondisi Umum*

Urusan Sosial dalam pembagian kewenangannya merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus ditangani bersama terkait hak dan pelayanan dasar bidang sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PPKS merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Permasalahan sosial tersebut membutuhkan penanganan yang sinergi dalam lintas sektor. Solusi penanganan permasalahan sosial bukan hanya terhadap PPKS secara langsung, tetapi juga mendorong berkembangnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Terkait pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar tersebut telah diatur dalam Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Gambaran kinerja Urusan Sosial pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.106. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	%	40,91	44,28	47,27	106,75	44,28	106,75
2.	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	69,64	51,60	65,34	126,63	51,60	126,63


Sumber: *Dinsos DIY, 2023*

Seluruh indikator sasaran target Urusan Sosial di tahun 2022 tercapai melebihi target. Keberhasilan ketercapaian indikator kinerja Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial dan indikator kinerja Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial tidak lepas dari intervensi berupa program/subkegiatan yang telah dilaksanakan serta adanya kerja sama lintas sektor yang baik.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Inflasi DIY pada 2022 secara keseluruhan berada pada level 6,49% (yoy). Inflasi yang tinggi ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan



oleh naiknya sebagai besar indeks kelompok pengeluaran. Secara tidak langsung hal ini berdampak pada keluarga miskin/PMKS. Salah satunya ditunjukkan dengan menurunnya daya beli bagi keluarga miskin/PMKS.

- (b) Berdasarkan Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Dinas Sosial DIY tahun 2022 jumlah lanjut usia DIY sebanyak 26.525. Walaupun saat ini sudah ada Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lanjut Usia yang hadir sebagai payung hukum dan berfungsi sebagai pedoman serta arahan bagi semua pihak dalam mengimplementasikan kesejahteraan lanjut usia, namun DIY belum memiliki agenda Rencana Aksi Daerah dalam memberikan pelayanan kepada lanjut usia guna menjamin keberlangsungan hidup lanjut usia.
- (c) Memperhatikan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, bahwa pelaksana rehabilitasi sosial dilaksanakan di dalam panti. Dalam pelaporannya, mengikuti Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terdapat form urusan pemerintahan bidang sosial yang membutuhkan kesepakatan terkait data dan sumbernya agar menghasilkan *output* laporan yang sesuai dan maksimal.
- (d) Kasus anak terlantar tahun 2022 sebanyak 5.200 kasus. Tingginya kasus berdampak pada bertambahnya jumlah pengemis dan anak-anak jalanan serta kasus anak yang berhadapan dengan

hukum. Sementara itu sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus kurang memadai baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

(2) Solusi

- (a) Mengacu pada Permenkeu RI Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, maka diberikan bantuan sosial program penanganan dampak inflasi berupa uang tunai kepada 2.314 orang dengan sasaran buruh harian lepas, nelayan, dan pelaku UMKM. Besaran bantuan langsung tunai sebesar Rp900.000,00 yang diberikan dalam dua termin. Termin 1 sebesar Rp600.000,00 di bulan Oktober sampai dengan November, dan termin kedua sebesar Rp300.000,00 di bulan Desember. Bantuan langsung tunai ini diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat miskin/ PMKS.
- (b) Optimalisasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang menjadi urusan wajib dasar bidang sosial yakni rehabilitasi sosial dasar dalam pantu kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis serta perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang berpedoman kepada Renstra

(Rencana Strategis) Dinas Sosial DIY Tahun 2017-2022;

- (c) Penyusunan Aplikasi SiPersis (Sistem Informasi Perlindungan, *Assessment* dan Rehabilitasi Sosial) untuk menguatkan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial sesuai Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, serta penguatan integrasi satu data agar dalam pelaporannya dapat maksimal mengikuti arahan Permendagri Nomor 59 Tahun 202 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- (d) Langkah-langkah yang dilakukan Pemda DIY terkait perlindungan khusus anak diantaranya Tetirahan/Bimbingan Remaja Rentan Bermasalah Sosial, Pelayanan Kesehatan, Pembinaan sosial, Sosialisasi, Edukasi dan penyuluhan sosial Pencegahan kenakalan remaja di lingkungan sekolah dan Organisasi remaja desa/Kalurahan/Kelurahan serta ke masyarakat secara umum, Penguatan Nilai-nilai kepahlawanan, Penguatan Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial, Intensifikasi layanan Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Rehabilitasi Sosial, keagamaan, keterampilan, dan kedisiplinan, dan Penguatan kerja sama lintas sektor dengan OPD dan stakeholder terkait.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Pada tahun 2022, Urusan Sosial dilaksanakan melalui 6 program, 16 kegiatan dan 56 subkegiatan. Anggaran program dan subkegiatan sebesar Rp128.135.177.242,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp114.920.064.002,00 atau sebesar 89,69%.

Tabel 3.107. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				02. Pengelolaan Media Informasi	kegiatan	1	1
				03. Evaluasi/ Penyusunan Renstra	kegiatan	1	1
				01. Evaluasi dan Pencapaian SPM	kegiatan	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
				01. Dokumen Perencanaan RKA-DPA, RKAP-DPPA	kegiatan	1	1
				02. Forum OPD	kegiatan	1	1
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				02. Rekomendasi pelaksanaan kegiatan OPD	dokumen	1	1
				01. Tersusunnya laporan evaluasi kinerja (LKJIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	dokumen	1	1
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	tahun	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				01. Laporan Keuangan Tahunan tersedia	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				01. Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	tahun	1	1
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
				Pembinaan Pekerja Sosial dan Penilaian Angka Kredit	orang	31	31
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Penyediaan Alat Listrik dan elektronik Bangunan	jenis	12	12
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				02. Belanja Kertas dan Cover untuk kegiatan kantor	jenis	4	4
				01. Penyediaan Alat Tulis Kantor	jenis	30	30
				03. Kearsipan	jenis	11	11
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				03. Tanaman Hias dan Media	jenis	7	7
				02. Peralatan dan Bahan Kebersihan Kendaraan	jenis	4	4
				01. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	tabung	5	5

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				02. Penggandaan	lembar	75180	75180
				01. Penyediaan Barang Cetak	jenis	4	4
				03. Penjilidan	buku	45	45
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Penyediaan surat kabar lokal, regional, nasional dan majalah	bulan	12	12
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				01. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	tahun	1	1
				02. Konsultasi dan koordinasi luar daerah	tahun	1	1
				03. Makanan dan Minuman rapat/sidang/tamu	orang	4100	4100
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				06. Karpet Ruang Kepala Dinas Sosial DIY	paket	1	1
				04. Kursi Tamu Sice	set	8	8
				02. Komputer	unit	10	10
				03. Printer	unit	5	5
				05. Scanner	unit	1	1
				01. Rak Arsip	buah	21	21
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				02. Penyediaan Meterai	lembar	220	220
				01. Ijin Frekwensi	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				04. Langganan Zoom Meeting	tahun	1	1
				01. Tagihan Air	bulan	12	12
				02. Tagihan Telepon	bulan	12	12
				03. Tagihan Listrik	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	bulan	12	12
				02. Retribusi Sampah	bulan	12	12
				03. Tertib administrasi Keuangan dan Barang	bulan	12	12
				04. Pengelola Kearsipan	tahun	1	1
				05. Penyediaan Jasa Keamanan	bulan	12	12

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				03. Penggantian suku cadang kendaraan roda 2,3,4 dan 6	tahun	1	1
				04. Pembayaran pajak STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6	tahun	1	1
				01. BBM / Gas dan pelumas kendaraan roda 2,3,4 dan 6	tahun	1	1
				02. Jasa service kendaraan roda 2,3,4 dan 6	tahun	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				01. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bangunan (Pemasangan Panel Interior Ruang Kepala Dinas; Penggantian Plafon; Pengecatan Gedung Barat Dinas; Atap Gudang Logistik Dinas ; Gudang Camp Assesment Karanganyar; Atap Bangunan Gudang Camp Assesment Sewon; Tempat Parkir Mobil Dinas Ka Dinas ; Ruang Assesment Camp Assesment Karanganyar; Kamar Mandi Dinas dan Camp Assesment ; Ruang Makan Camp Assesment;)	paket	10	10
				02. Pembangunan (DED Pekerjaan Pembangunan Gedung Bertingkat Posko TAGANA dan Gudang di Pengok; Pembangunan Bangunan Camp Assesment Karanganyar; Perluasan Gudang di Pengok; Gardu Pandang Camp Assesment Karanganyar; Pagar Utama Dinas Sosial; Kamar Mandi/WC Wanita Camp Assesment Karanganyar; Bak Kontrol Camp Assesment)	paket	7	7
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				01. BBM Genset (356 lt), Pemeliharaan Genset (3 unit)	kegiatan	2	2
				09. Pemeliharaan Jaringan Internet DInas	paket	1	1
				03. Pemeliharaan Pompa Air (4 bh), Filter Pengolahan Air Minum Camp (10 bh), Kran Air (75 bh)	kegiatan	3	3
				02. Pemeliharaan Komputer (39 unit), Printer (25 unit), Laptop (10 unit)	kegiatan	3	3
				08. Pengurusan WC	unit	15	15
				04. Service AC (54 unit), Isi Freon (42 unit)	kegiatan	2	2
				06. Pemeliharaan Mesin Pemetong Rumput	buah	1	1
				07. Pemeliharaan Lift	unit	1	1
				05. Pemeliharaan Faximili	unit	2	2
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
				Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	%	51.6	58.67

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	%	51.6	65.34
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi			
				02. Seleksi TKSK Prestasi	kab kota	5	5
				01. Rapat Pembinaan dan Koordinasi TKSK	orang	78	78
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi			
				03. Hibah bantuan operasional untuk LKS anak dan LKS Penyandang Disabilitas	lembaga	13	12
				02. Hibah Bantuan Operasional Komite Disabilitas DIY	lembaga	1	1
				06. Dialog Interaktif PUB dan UGB melalui pertemuan	kegiatan	1	1
				04. Hibah Bantuan Operasional Komda Lanjut Usia DIY	lembaga	1	1
				07. Fasilitas Kegiatan LKS : Pembinaan dan Koordinasi LKS, Bimtek Dasar Pekerja Sosial Bagi Pengurus Panti dan Seleksi Prestasi	kegiatan	3	3
				08. Fasilitas Karang Taruna: Pembinaan dan Penguatan Jejaring Kerja Karang Taruna DIY dan Seleksi Prestasi	kegiatan	2	2
				05. Pembinaan dan Rakor LK3	kegiatan	1	1
				12. Fasilitas Pengembangan SLRT : Rapat Koordinasi Pengembangan SLRT	kegiatan	1	1
				01. Hibah Bantuan Operasional Karang Taruna DIY, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial, dan LK3 Teratai	lembaga	3	3
				11. Fasilitas Kegiatan CSR : Rapat Kerja Forum CSR	kegiatan	1	1
				13. Fasilitas PSKS DIY : Pembinaan dan Koordinasi FK PSKS DIY	kegiatan	1	1
				15. Bantuan Operasional LKS Lanjut Usia DIY	lembaga	5	5
				09. Fasilitas WKSBM: Pembinaan dan Koordinasi WKSBM, dan Seleksi Prestasi WKSBM	kegiatan	2	2
				14. FGD LKS melalui forkom LKS LU DIY	kegiatan	5	5
				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
				Persentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitas, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Orang Dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh bimbingan keterampilan, mandiri dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat	%	6.7	8.07
				Persentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitas, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Orang Dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang	%	6.7	9.07

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				terpenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh bimbingan keterampilan, mandiri dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat			
				Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			
				Warga negara Migran korban tindak kekerasan/Korban perdagangan orang kembali ke Kab./Kota Asal	kegiatan	1	1
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
				Persentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitas, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Orang Dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh bimbingan keterampilan, mandiri dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat	%	6.7	8.07
				Persentase Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitas, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Orang Dengan HIV AIDS dan Korban Tindak Kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh bimbingan keterampilan, mandiri dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat	%	6.7	9.07
				Persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya, mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial	%	27.65	17.65
				Persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya, mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial	%	27.65	27.65
				Persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial	%	48.33	48.33
				Persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial	%	48.33	48.33
				Persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga / masyarakat	%	14.8	27.6
				Persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga / masyarakat	%	14.8	34.8
				Persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga	%	85	86.25
				Persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga	%	85	115
				Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga	%	47.33	22.87

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga	%	47.33	27.82
				Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya	%	100	79.905
				Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya	%	100	106.54
				Penyediaan Permakanan			
				01. Penyediaan permakanan bagi klien SLB	orang	50	50
				02. Penyediaan permakanan bagi klien disabilitas melalui LKS	orang	70	70
				Penyediaan Sandang			
				01. Penyediaan sandang bagi klien SLB	orang	50	50
				02. Penyediaan sandang bagi klien disabilitas melalui LKS	orang	70	70
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			
				01. Penyediaan Perbekalan Kesehatan bagi klien SLB	orang	50	50
				02. Penyediaan Perbekalan Kesehatan bagi klien disabilitas melalui LKS	orang	70	70
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			
				01. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi klien SLB	orang	50	50
				03. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi klien disabilitas melalui LKS	orang	70	70
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
				02. Penyediaan akses pendidikan bagi klien disabilitas melalui LKS	orang	70	70
				01. Penyediaan akses pendidikan bagi klien SLB	orang	50	50
				Penyediaan Makanan			
				05. Penyediaan kebutuhan permakanan bagi AMPK	anak	15	15
				01. Penyediaan kebutuhan permakanan klien RPS	anak	13	13
				03. Penyediaan kebutuhan permakanan bagi ABH melalui LKSA	anak	30	30
				04. Penyediaan kebutuhan permakanan bagi ABT	anak	100	100
				02. Penyediaan kebutuhan permakanan bagi Anak Terlantar melalui LKSA	anak	455	455
				Penyediaan Sandang			
				04. Penyediaan sandang bagi ABT	anak	100	100
				05. Penyediaan sandang bagi AMPK	anak	15	15
				02. Penyediaan sandang bagi Anak Terlantar melalui LKSA	anak	455	455
				01. Penyediaan sandang bagi klien RPS	anak	40	40
				03. Penyediaan sandang bagi ABH melalui LKSA	anak	30	30

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			
				01. Pelayanan kesehatan klien RPS	anak	13	13
				02. Pelayanan kesehatan Anak Terlantar melalui LKSA	anak	455	455
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			
				5. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi AMPK melalui LKSA	Anak	15	15
				4. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi ABT melalui LKSA	Anak	100	100
				3. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi ABH melalui LKSA	Anak	30	30
				1. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi klien RPS	Anak	13	13
				2. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial bagi anak terlantar melalui LKSA	Anak	400	400
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
				02. Penyediaan akses pendidikan bagi ABH melalui LKSA	anak	30	30
				04. Penyediaan akses pendidikan bagi AMPK melalui LKSA	anak	15	15
				01. Penyediaan akses pendidikan bagi anak terlantar melalui LKSA	anak	455	455
				03. Penyediaan akses pendidikan bagi ABT melalui LKSA	anak	100	100
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
				01. Pelayanan penelusuran keluarga	orang	20	30
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
				01. Pelayanan reunifikasi ke keluarga klien RPS	orang	15	18
				Penyediaan Permakanan			
				01. Pemberian Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) di Dinas Sosial DIY	orang	1000	1000
				02. Bantuan Permakanan Lanjut Usia dalam panti melalui Dinas Sosial DIY	orang	100	100
				03. Fasilitas Lanjut Usia melalui Home Care oleh Dinas Sosial DIY	orang	700	700
				Penyediaan Sandang			
				01. Bantuan sandang bagi LUT	orang	100	100
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial			
				Fasilitas Bantuan Perlengkapan Kamar Lansia oleh Dinas Sosial DIY	orang	50	50
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
				03. Fasilitas Lanjut Usia Melalui Homecare oleh Dinas Sosial DIY	orang	700	700
				01. Peringatan HLUN dan Bhakti Sosial di Dinas Sosial DIY	orang	500	500
				02. Pelayanan Taman Werdha oleh Dinas Sosial DIY	orang	125	125
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				01. Fasilitasi Pelayanan Lanjut Usia Terlantar (LUT) melalui Family Support oleh Dinas Sosial DIY	orang	50	50
				02. Bantuan Perorangan peserta family support	orang	50	50
				Penyediaan Permakanan			
				02. Kebutuhan dasar permakanan klien dalam shelter terpenuhi	orang	5	5
				01. Kebutuhan dasar permakanan klien di camp assessment terpenuhi klien	orang	190	190
				Penyediaan Sandang			
				02. Kebutuhan dasar sandang klien dalam shelter terpenuhi	orang	5	5
				01. Kebutuhan dasar sandang klien di camp assessment terpenuhi	orang	190	190
				Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses			
				02. Penyediaan tempat tinggal yang layak bagi klien dalam shelter terpenuhi	lokasi	1	1
				01. Penyediaan tempat tinggal yang layak bagi klien di camp assessment terpenuhi	lokasi	2	2
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			
				02. Penyediaan pembekalan kesehatan bagi klien dalam shelter terpenuhi	orang	5	5
				01. Penyediaan pembekalan kesehatan bagi klien di camp assessment terpenuhi	orang	190	190
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
				02. Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi klien dalam shelter terpenuhi	orang	5	5
				01. Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi klien di camp assessment terpenuhi	orang	190	190
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
				02. Bimbingan psikososial bagi klien dalam shelter terpenuhi	orang	5	5
				01. Bimbingan kewarganegaraan dan psikososial bagi klien di camp assessment terpenuhi	orang	190	190
				Pemulangan ke Daerah Asal			
				01. Pemulangan ke daerah asal dan/rujukan ke panti/ balai sosial	orang	195	235
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
				Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga pendapatan dan asetnya meningkat	%	1.01	0.83
				Persentase fakir miskin yang memperoleh bimbingan dan keterampilan berusaha sehingga pendapatan dan asetnya meningkat	%	1.01	0.83
				Pengangkatan Anak antar WNI			
				01. Rekomendasi pengangkatan anak antar WNI	anak	30	101

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			
				01. Rekomendasi pengangkatan anak oleh orang tua tunggal	anak	1	1
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
				Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	4482	3908
				Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
				10. Pengelolaan Website sekretariat PKH	kegiatan	1	1
				06. KUBE Pengembangan	KUBE	214	214
				04. Seleksi prestasi pendamping dan pengurus KUBE	kab kota	5	5
				04. Peningkatan kapasitas pengurus KUBE, LKM, USEP KM, FGD KUBE-LKM	kab kota	5	5
				07. Fasilitasi pendamping BPNT/program Sembako	orang	78	78
				03. Pendampingan UEP PKH Graduasi tahun 2021	orang	825	825
				09. Bimtap Graduasi Mandiri bagi KPM PKH	orang	500	500
				08. Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS	dokumen	1	1
				02. BKK UEP PKH Graduasi lanjutan tahun 2019	orang	540	540
				01. BKK UEP PKH Graduasi tahun 2022	orang	825	825
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
				Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	67.68	37.97
				Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	67.68	55.34
				Penyediaan Permakanan			
				01. Bufferstok tanggap darurat korban bencana alam dan bencana sosial	paket	500	500
				02. Bantuan Air Bersih	tanki	750	108
				Penyediaan Sandang			
				01. Belanja Keperluan Sandang untuk kelompok rentan	paket	50	50
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			
				01. Penyediaan tempat penampungan pengungsi/ KSB	lokasi	6	6
				02. Penyediaan Shelter ISOTER COVID-19	bulan	9	9
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			
				02. Fasilitasi perawatan jenazah terlantar	orang	35	9

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				01. Fasilitasi Orang Terlantar kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan	tahun	1	1
				Pelayanan Dukungan Psikososial			
				04. Tagana Masuk Sekolah	lokasi	25	25
				06. Fasilitasi dan Peningkatan kapasitas Sahabat Tagana	orang	125	125
				05. Verifikasi dan Peningkatan kapasitas anggota Tagana	orang	50	50
				01. Fasilitasi TAGANA dalam rangka penanggulangan bencana	orang	300	300
				02. Verifikasi dan Fasilitasi Tenaga Pelopor Perdamian	orang	104	104
				03. Tagana Masuk Komunitas	lokasi	25	25
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS SOSIAL		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
				Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	%	51.6	58.67
				Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	%	51.6	65.34
				Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan			
				06. Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat/ Pendampingan Sosial/ Penyuluh Sosial	kegiatan	6	6
				03. Rehab/ Pemeliharaan TMPN, MPP, Tetenger/ Monumen	lokasi	7	7
				07. Pengembangan Aplikasi DTKS Daerah	kegiatan	1	1
				08. Penyuluhan Sosial Tingkat Desa/Kalurahan	Lokasi	20	20
				05. Peringatan Hari Besar	orang	2009	2009
				04. Penguatan Nilai-Nilai Kepahlawanan	orang	7260	9520
				02. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lestari Budaya	KUBE	15	15
				09. Penyuluhan Sosial Melalui Media Peragaan	Lokasi	1	1
				01. Penguatan Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial	lokasi	60	60
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Bangunan	jenis	30	30
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Penyediaan Alat/Bahan Alat Tulis Kantor	jenis	35	35
				Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	jenis	5	5
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor	jenis	5	5
				Perlengkapan Kantor Lainnya	jenis	21	21
				Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	jenis	9	9
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
				Obat obatan Multivitamin	paket	1	1
				Pengisian Tabung pemadam kebakaran	tabung	20	20
				Bahan bahan lainnya / Alat perlengkapan kantor	jenis	4	4
				Pengisian Tabung Gas	tabung	414	414
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
				Alat/Bahan bahan Cetak	jenis	11	11
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	jenis	4	4
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	bulan	12	12
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kegiatan	7	7
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Tersedianya Jasa surat menyurat	lbr	260	260
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Pembayaran Tagihan Internet	bulan	12	12
				Pembayaran Tagihan Air	bulan	12	12
				Pembayaran TagihanTelepon	bulan	12	12
				Pembayaran Tagihan Listrik	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Tertib Administrasi Keuangan dan Barang	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	bulan	12	12
				Retribusi Sampah	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas	bulan	12	12

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	unit	10	10
				Pemeliharaan Peralatan Mesin	bulan	12	12
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Pemeliharaan ringan / sedang dan berat bangunan gedung tempat kerja	kegiatan	4	4
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	12
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
				Persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya, mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial	%	27.65	17.65
				Persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya, mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial	%	27.65	27.65
				Penyediaan Permakanan			
				Permakanan klien/PPKS	orang	185	185
				Penyediaan Sandang			
				Penyediaan Sandang PPKS Balai RTPD	orang	185	185
				Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			
				Pemeliharaan Bangunan Gedung-Sarana Prasarana Asrama	jenis	3	3
				Penyediaan Alat Bantu			
				Bahan bahan Lainnya Alat Bantu Netra	jenis	5	5
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant			
				Pelayanan Kesehatan PPKS Balai RTPD	bulan	12	12
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial PPKS Balai RTPD	orang	185	185
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
				Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari PPKS Balai RTPD	orang	185	185
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas			
				Fasilitasi Pembuatan NIK	orang	3	3
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
				Penjajakan Lokasi Calon PPKS	kali	25	25
				Rujukan Kesehatan PPKS	kali	12	12

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Motivasi dan Seleksi Calon PPKS	kali	36	36
				Penjemputan Calon PPKS	kali	30	30
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
				Penelusuran Keluarga PPKS	orang	3	3
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
				Assesmen Keluarga	orang	3	3
				Reunifikasi Keluarga	orang	3	3
				Bimbingan Lanjut	orang	3	3
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		0	0
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Penyediaan alat listrik dan elektronik	jenis	14	14
				Dukungan 100% terhadap administrasi umum perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Penyediaan alat tulis kantor administrasi umum	jenis	37	37
				Dukungan 100% terhadap administrasi umum perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100
				Penyediaan alat tulis kantor pengelolaan arsip	jenis	11	11
				Penyediaan perlengkapan kantor	jenis	7	7
				Penyediaan perlengkapan kebersihan pengelolaan arsip	jenis	8	8
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Pengisian tabung pemadam kebakaran	tabung	7	7
				Penyediaan bibit, rumput, pupuk dan pot	jenis	6	6
				Penyediaan peralatan kebersihan kantor	jenis	12	12
				Penyediaan peralatan kebersihan kendaraan	jenis	4	4
				Dukungan 100% terhadap administrasi umum perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
				Multivitamin / suplemen	set	66	66

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan 100% terhadap administrasi umum perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100
				Pengisian tabung gas dapur	tabung	180	180
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jenis	5	5
				Penyediaan barang cetakan pengelolaan arsip	jenis	5	5
				Publikasi	jenis	2	2
				Dukungan 100% terhadap administrasi umum perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Dukungan 100% terhadap administrasi umum perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100
				Penyediaan surat kabar dan majalah	bulan	12	12
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Dukungan 100% terhadap administrasi umum perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100
				Konsumsi rapat	os	756	756
				Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	op	72	72
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Pembangunan gedung keterampilan	paket	1	1
				Dukungan 100% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100
				Pembangunan jembatan	paket	1	1
				Pembangunan pagar	paket	1	1
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Pengadaan amplifier	buah	1	1
				Pengadaan gordyn	m2	180	180
				Pengadaan kipas angin	buah	9	9
				Pengadaan komputer PC	unit	2	2
				Pengadaan kursi	buah	3	3
				Pengadaan kursi taman	buah	4	4
				Pengadaan layar proyektor	unit	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengadaan LCD	buah	1	1
				Pengadaan lemari penyimpan	unit	1	1
				Pengadaan meja	buah	3	3
				Pengadaan peralatan jahit	jenis	2	2
				Pengadaan peralatan olahan pangan	jenis	6	6
				Pengadaan peralatan salon	jenis	7	7
				Pengadaan pompa air	buah	2	2
				Pengadaan printer	unit	3	3
				Pengadaan rak jemuran	buah	1	1
				Pengadaan scanner F4	buah	2	2
				Pengadaan stabilizer/ UPS	unit	2	2
				Pengadaan televisi	buah	2	2
				Dukungan 100% terhadap sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100
				Pengadaan vacum cleaner	unit	1	1
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Materai buku cek	buku	1	1
				Penyediaan Materai	buah	77	77
				Dukungan 100% terhadap penyediaan jasa penunjang yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Pembayaran tagihan listrik	titik	4	4
				Pembayaran tagihan telepon	titik	1	1
				Dukungan 100% terhadap penyediaan jasa penunjang yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Pembayaran retribusi sampah	bulan	12	12
				Dukungan 100% terhadap penyediaan jasa penunjang yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100
				Pengelolaan keuangan dan barang	bulan	12	12
				Penyediaan jasa keamanan kantor	lokasi	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan jasa kebersihan	lokasi	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Bahan bakar minyak/gas dan pelumas kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	bulan	12	12
				Dukungan 100% terhadap pemeliharaan sarana prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100
				Pembayaran pajak STNK roda 2 dan roda 4	unit	4	4
				Service/ penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	unit	4	4
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Pemeliharaan gedung kantor	paket	1	1
				Dukungan 100% terhadap pemeliharaan sarana prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100
				Pemeliharaan instalasi air limbah/kotor	kali	10	10
				Perbaikan gedung dapur	paket	1	1
				Rehab / Pemeliharaan Talud dan Pagar	paket	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Dukungan 100% terhadap pemeliharaan sarana prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100
				Pemeliharaan alat bermesin	jenis	3	3
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	23	23
				Penyediaan BBM genset dan pemotong rumput	liter	265	265
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
				Persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial	%	48.33	48.33
				Persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial	%	48.33	48.33
				Penyediaan Permakanan			
				Penyediaan permakanan bagi warga Balai/PPKS	orang	70	70
				Kontribusi 48,3% Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (Perempuan PPKS) terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 29 orang Perempuan PPKS yang Tersertifikasi (klien reguler)	%	100	100
				Penyediaan Sandang			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kontribusi 48,3% Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (Perempuan PPKS) terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 29 orang Perempuan PPKS yang Tersertifikasi (klien reguler)	%	100	100
				Penyediaan sandang bagi warga Balai/PPKS	orang	70	70
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			
				Penyediaan obat-obatan bagi warga Balai/PPKS	jenis	27	27
				Penyediaan pengobatan bagi warga Balai/PPKS	bulan	12	12
				Kontribusi 48,3% Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (Perempuan PPKS) terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 29 orang Perempuan PPKS yang Tersertifikasi (klien reguler)	%	100	100
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
				Bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial bagi warga Balai/PPKS	orang	70	70
				Kontribusi 48,3% Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (Perempuan PPKS) terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 29 orang Perempuan PPKS yang Tersertifikasi (klien reguler)	%	100	100
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
				Kontribusi 48,3% Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (Perempuan PPKS) terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 29 orang Perempuan PPKS yang Tersertifikasi (klien reguler)	%	100	100
				Bimbingan aktivitas hidup sehari-hari bagi warga Balai/PPKS	orang	10	10
				Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			
				Kontribusi 48,3% Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (Perempuan PPKS) terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 29 orang Perempuan PPKS yang Tersertifikasi (klien reguler)	%	100	100
				Bimbingan keterampilan dasar bagi warga Balai/PPKS	orang	60	60
				Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
				Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi warga Balai/PPKS	orang	70	70

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kontribusi 48,3% Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (Perempuan PPKS) terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 29 orang Perempuan PPKS yang Tersertifikasi (klien reguler)	%	100	100
				Pemulangan ke Daerah Asal			
				Kontribusi 48,3% Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (Perempuan PPKS) terhadap Program Rehabilitasi Sosial sebanyak 29 orang Perempuan PPKS yang Tersertifikasi (klien reguler)	%	100	100
				Pemulangan ke daerah asal bagi warga Balai/PPKS	orang	20	20
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	Jenis	9	9
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Penyediaan Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Jenis	3	3
				Penyediaan Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Jenis	2	2
				Penyediaan Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Jenis	2	2
				Penyediaan Perlengkapan Keamanan	Jenis	4	4
				Penyediaan Alat Tulis Kantor dan bahan lainnya	Jenis	37	37
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Pengisian Tabung Gas Pemadam Kebakaran	tabung	15	15
				Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih kendaraan	Jenis	4	4
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
				Penyediaan Bahan-Bahan Lainnya	Jenis	1	1
				Penyediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Jenis	10	10
				Penyediaan Pegisian Tabung Gas	tabung	720	589
				Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor kegiatan kantor lainnya	Jenis	13	13
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Penjilidan	Jenis	35	35
				Penggandaan	lembar	46379.8	46379.8
				Penyediaan Barang Cetak	Jenis	3	3
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Surat kabar Lokal	bulan	12	12
				Surat kabar Nasional	bulan	12	12
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Makan minum rapat dan koordinasi konsultasi di Balai RSBKL	Tahun	1	1
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Pembangunan Asrama Bersama	Unit	3	3
				Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Asrama (Review DED)	paket	1	1
				Pembangunan Dapur	Unit	1	1
				Pembangunan Tower Air	Unit	1	1
				Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Asrama	paket	1	1
				Pembangunan Poliklinik dan Jaga	Unit	1	1
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Camera DSLR	Unit	2	2
				PABX	Unit	1	1
				Printer	Unit	3	3
				Pengering Pakaian	Unit	1	1
				Komputer unit lainnya	Jenis	2	2
				CCTV	paket	2	2
				Mesin Cuci	Unit	2	2
				AC	Unit	2	2
				Alat Rumah Tangga Laninya	Jenis	2	2
				Scanner F4	Unit	2	2
				Mebel	Jenis	2	2
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Penyediaan Meterai 10000	lembar	236	236
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Pembayaran Tagihan Listrik	titik	16	16
				Pembayaran Tagihan Air	titik	2	2
				Pembayaran Tagihan Telepon	titik	2	2
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	lokasi	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	lokasi	2	2
				Tertib Administrasi Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	bulan	12	12
				Restribusi sampah	bulan	12	12
				Tertib Administrasi Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Penyediaan Bahan Bakar minyak/Gas dan pelumas	bulan	12	12
				Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Unit	13	13
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jenis	3	3
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Pemeliharaan Gedung tidak bertingkat	paket	1	1
				Perawatan CPU	Unit	21	21
				Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air	Jenis	1	1
				Perawatan alat komunikasi Sound System dan wireless	Unit	2	2
				Perawatan AIR CONDITIONER Split	Unit	16	16
				Biaya Penyedotan Air Limbah	kali	27	27
				Perawatan Laptop/notebook/sejenis	Unit	4	4
				Pemeliharaan CCTV	kali	2	2
				Bahan Bakar Minyak Solar/ Generator 2 unit	liter	480	480
				Perawatan genset lebih kecil dari 50 KVA 2 unit	tahun	1	1
				Pemeliharaan Blender	buah	6	6
				Perawatan Pompa Air (jet pump)	buah	4	4
				Pemeliharaan Pompa Air	Unit	4	4
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
				Persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga / masyarakat	%	14.8	27.6
				Persentase warga binaan balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga / masyarakat	%	14.8	34.8
				Penyediaan Permakanan			
				Permakanan PPKS Balai RSBKL (Bina Laras)	orang	250	250
				Penyediaan Sandang			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sandang PPKS Balai RSBKL (Bina Laras)	orang	250	250
				Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			
				Perlengkapan Asrama dan Peralatan Kebersihan Asrama untuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras	Asrama	7	7
				Penyediaan Alat Bantu			
				Alat Bantu untuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras	Jenis	1	1
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			
				Pelayanan Kesehatan untuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras	Bulan	12	12
				Obat-obatan untuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras	Jenis	23	23
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			
				Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial untuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras	orang	250	250
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
				Bimbingan aktifitas hidup sehari-hari untuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras	orang	250	250
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas			
				Fasilitasi Administrasi Kependudukan untuk PPKS Bina Laras	orang	25	25
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
				Akses Kelayanan Kesehatan Dasar untuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras	orang	250	250
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
				Penelusuran Keluarga untuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras	orang	94	94
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
				Reunifikasi Keluarga untuk PPKS Balai RSBKL Bina Laras	orang	26	26
				Penyediaan Permakanan			
				Permakanan PPKS Balai RSBKL (Bina Karya)	orang	50	50
				Penyediaan Sandang			
				Sandang PPKS Balai RSBKL (Bina Karya)	orang	50	50
				Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses			
				Perlengkapan Asrama & Peralatan Kebersihan Asrama	Asrama	8	8
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			
				Obat-obatan	Jenis	24	24
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
				Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial PPKS Balai RSBKL (Bina Karya)	orang	50	50

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
				Bimbingan aktivitas hidup sehari-hari PPKS	orang	50	50
				Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			
				Bimbingan Keterampilan Dasar PPKS Balai RSBKL (Bina Karya)	orang	50	50
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak			
				Fasilitasi Administrasi Kependudukan PPKS Balai RSBKL (Bina Karya)	orang	5	5
				Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
				Akses kelayakan kesehatan dasar PPKS	orang	50	50
				Pemulangan ke Daerah Asal			
				Pemulangan PPKS Balai RSBKL (Bina Karya)	orang	10	10
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		0	0
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
				Pakaian Kerja Naban	buah	57	57
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Komponen Instalasi Listrik	jenis	23	23
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
				Isi Tabung Gas 12 Kg	tabung	170	170
				Isi Tabung Pemadam Kebakaran	tabung	7	7
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Belanja Penggandaan	lembar	34998	34998
				Penjilidan	buah	70	70
				Belanja Cetak	jenis	3	3
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Bahan Bacaan Surat Kabar	jenis	2	2
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	orang	108	108
				Makanan dan Minuman Rapat	orang	1032	1032
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Tripod Camera	buah	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				CCTV	paket	1	1
				Mesin Jahit	buah	2	2
				Set Meja Belajar	set	12	12
				Vacuum Cleaner	unit	2	2
				Blender + Grinder	buah	2	2
				Mesin Jahit Kaos	buah	3	3
				Air Conditioner	unit	2	2
				Notebook	unit	5	5
				papan tulis custom	unit	9	9
				Scanner F4	buah	2	2
				Kamera	buah	2	2
				Printer Inkjet	unit	4	4
				Kursi Makan	buah	80	80
				UPS	unit	20	20
				Meja Makan	buah	20	20
				Mesin Air Minum	set	1	1
				pompa air	buah	5	5
				Meja Sablon	unit	2	2
				Genset	unit	1	1
				LCD Proyektor	unit	2	2
				Komputer	unit	8	8
				Thermogun	buah	1	1
				Mesin Cuci	buah	1	1
				Filling kabinet 4 laci	unit	5	5
				Kipas Angin	unit	5	5
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Materai	buah	125	125
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Tagihan Listrik	bulan	12	12
				Tagihan Telepon	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kertas dan Cover	jenis	7	7
				Perabot Kantor	jenis	27	27
				Bahan Komputer	jenis	5	5
				Alat Tulis Kantor	jenis	25	25
				Bendera Merah Putih	buah	5	5
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Pembayaran Jasa Tenaga Keamanan	orang	12	12
				Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan	orang	8	8
				Honorarium Pengurus Barang	orang	2	2
				Honorarium Pengelola Keuangan	orang	5	5
				Pembayaran Jasa Retribusi Sampah	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Pajak Kendaraan Bermotor	unit	5	5
				Servis dan Suku Cadang Kendaraan	unit	5	5
				BBM/Gas dan Pelumas	jenis	3	3
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Rehab / Pemeliharaan Talud dan Pagar (Belakang Asrama Asoka)	paket	1	1
				DED Gedung	paket	1	1
				Rehab Talud dan Pagar	paket	1	1
				Rehab 4 Asrama	paket	1	1
				Rehab Gedung Seksi PRS	paket	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Pemeliharaan Mesin Profil Kayu	tahun	1	1
				Belanja Pemeliharaan Komputer PC Monitor CPU dan Printer	kali	30	30
				Pemeliharaan CCTV	kali	7	7
				Perawatan LCD Proyektor	unit	4	4
				Pemeliharaan Gerenda Tangan	tahun	1	1
				BBM dan Pelumas Mesin	jenis	2	2
				Pemeliharaan Mesin Pasah Listrik	tahun	1	1
				Perawatan mesin jahit	kali	30	30

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemeliharaan Sound System	kali	1	1
				Perawatan Pompa Air	unit	6	6
				Pemeliharaan AC	kali	5	5
				Perawatan Kulkas	kali	4	4
				Pemeliharaan Mesin ketik manual	unit	4	4
				Servis Mesin Genset	tahun	1	1
				Pemeliharaan Kompresor	tahun	1	1
				Belanja Pemeliharaan Potong Rumput	kali	5	5
				Belanja pemeliharaan TV LCD	kali	3	3
				Pemeliharaan Laptop	kali	15	15
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
				Persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga	%	85	86.25
				Persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga	%	85	115
				Penyediaan Permakanan			
				Permakanan PPKS Balai PRSR	orang	80	80
				Penyediaan Sandang			
				Sandang PPKS Balai PRSR	orang	80	80
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant			
				Pelayanan Kesehatan	bulan	12	12
				Obat-Obatan	jenis	28	28
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			
				Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial PPKS	orang	80	80
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
				Perlengkapan Asrama & Peralatan Kebersihan Asrama	asrama	5	5
				Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			
				Bimbingan Keterampilan Dasar PPKS	orang	80	80
				Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
				Akses Kelayanan Pendidikan Dasar PPKS	orang	40	40
				Akses Kelayanan Kesehatan Dasar PPKS	orang	80	80
7		BALAI REHABILITASI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		0	0

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Penyediaan alat listrik dan elektronik	jenis	15	15
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	jenis	10	10
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Penyediaan ATK KANTOR	jenis	22	22
				Penyediaan kertas dan cover	jenis	7	7
				Penyediaan bendera	buah	4	4
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	jenis	7	7
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				penyediaan regulator plus selang gas	buah	6	6
				penyediaan Perlengkapan Kantor Lainnya	jenis	22	22
				pengisian tabung pemadam kebakaran	tabung	5	5
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
				penyediaan vitamin+ madu untuk pegawai	lokasi	2	2
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD : 100 %	%	100	100
				pengisian tabung gas LPG	Bulan	12	12
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jenis	10	10
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD : 100 %	%	100	100
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD : 100 %	%	100	100
				penyediaan Surat Kabar dan Majalah	jenis	3	3
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan	12	12
				konsumsi rapat	bulan	12	12
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				pengadaan lcd	buah	1	1
				pengadaan cctv dan instalasi	paket	1	1
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				pengadaan pasah listrik	buah	2	2
				pengadaan hand sprayer otomatis	buah	6	6
				alat musik keyboard	buah	2	2
				genset	paket	1	1
				pengadaan washtafel dan instalasi	paket	1	1
				pengadaan kasur	buah	117	117
				pengadaan hardisk external	unit	2	2
				pengadaan ups	buah	8	8
				pengadaan kompor gas 1 tungku	buah	6	6
				pengadaan layar screenview tripod	buah	2	2
				pengadaan scanner f4	buah	2	2
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				pembayaran tagihan telepon	Bulan	12	12
				pembayaran tagihan listrik	bulan	12	12
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				pembayaran tagihan air	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				honorarium pengelola BMD tidak menghasilkan pendapatan	orang	2	2
				honorarium pengelola keuangan	orang	6	6
				pembayaran jasa restribusi sampah	bulan	12	12
				penyediaan jasa keamanan	lokasi	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				penyediaan jasa kebersihan	lokasi	2	2
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				penyediaan suku cadang kendaraan dinas kendaraan dinas	unit	11	11
				pemeliharaan kendaraan dinas	unit	11	11
				penyediaan bahan bakar dan pelumas kendaraan dinas	unit	11	11
				pembayaran pajak kendaraan dinas	unit	11	11
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				rehab wisma brspa bimomartani	paket	1	1
				Pemeliharaan ruang perpustakaan, ruang makan, pagar samping gedung dan pekerjaan pasang gril pengaman BRSPA Gunung kidul	paket	1	1
				rehab ruang makan bimomartani	paket	1	1
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Pemeliharaan pompa air	unit	4	4
				Pemeliharaan Genset	unit	3	3
				Penyediaan alat/bahan pemeliharaan sarana prasarana gedung bangunan	jenis	30	30
				Pemeliharaan tv	unit	5	5
				Pemeliharaan komputer-unit komputer	jenis	3	3
				Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	unit	2	2
				Dukungan terhadap administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Pemeliharaan Alat Rumah Tangga-alat pendingin	jenis	2	2
				Pemeliharaan Almari Kayu	unit	10	10
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
				Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga	%	47.33	22.87

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga	%	47.33	27.82
				Pengasuhan			
				Pembinaan koordinasi dan jejaring	kegiatan	7	7
				Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan dan terpenuhinya hak-haknya dan mampu berfungsi sosial	%	100	100
				Penyediaan Makanan			
				Permakanan PPKS Balai RSPA	orang	125	125
				Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan dan terpenuhinya hak-haknya dan mampu berfungsi sosial	%	100	100
				Penyediaan Sandang			
				Sandang PPKS Balai RSPA	orang	125	125
				Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan dan terpenuhinya hak-haknya dan mampu berfungsi sosial	%	100	100
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant			
				Obat-obatan	jenis	44	44
				Pelayanan kesehatan	bulan	12	12
				Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan dan terpenuhinya hak-haknya dan mampu berfungsi sosial	%	100	100
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			
				Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial PPKS	anak	125	125
				Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan dan terpenuhinya hak-haknya dan mampu berfungsi sosial	%	100	100
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari			
				Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan dan terpenuhinya hak-haknya dan mampu berfungsi sosial	%	100	100
				Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari PPKS	orang	125	125
				Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak			
				Fasilitasi administrasi kependudukan PPKS	kali	11	11
				Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan dan terpenuhinya hak-haknya dan mampu berfungsi sosial	%	100	100
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Akses kelayakan kesehatan dasar PPKS	orang	125	125
				Akses kelayakan pendidikan dasar PPKS	orang	125	125
				Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan dan terpenuhinya hak-haknya dan mampu berfungsi sosial	%	100	100
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
				Penelusuran keluarga PPKS	orang	7	7
				Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan dan terpenuhinya hak-haknya dan mampu berfungsi sosial	%	100	100
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
				Reunifikasi Keluarga PPKS	orang	12	12
				Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan dan terpenuhinya hak-haknya dan mampu berfungsi sosial	%	100	100
				Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti			
				kunjungan keluarga PPKS	orang	10	10
				Terpenuhinya kebutuhan dasar warga binaan dan terpenuhinya hak-haknya dan mampu berfungsi sosial	%	100	100
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Dukungan 100 % terhadap prosentase terwujudnya adminstrasi umum perangkat daerah dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Penyediaan Alat listrik dan elektronik bangunan kantor	jenis	17	17
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Penyediaan alat tulis kantor	jenis	30	30
				Penyediaan perabot kantor	jenis	5	5
				Dukungan 100 % terhadap prosentase terwujudnya adminstrasi umum perangkat daerah dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Penyediaan bahan komputer	jenis	5	5
				Penyediaan kertas cover	jenis	6	6
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan 100 % terhadap prosentase terwujudnya adminstrasi umum perangkat daerah dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Penyediaan perabot kantor	jenis	5	5
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
				Penyediaan multivitamin/ suplemen	lokasi	2	2
				Pengisian tabung gas 12 kg	tabung	678	678
				Dukungan 100 % terhadap prosentase terwujudnya adminstrasi umum perangkat daerah dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
				Penjilidan	buku	50	50
				Penggandaan	lembar	36.192	36192
				Dukungan 100 % terhadap prosentase terwujudnya adminstrasi umum perangkat daerah dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Penyediaan barang cetakan	jenis	2	2
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Dukungan 100 % terhadap prosentase terwujudnya adminstrasi umum perangkat daerah dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Penyediaan Surat Kabar Lokal	eksemplar	24	24
				Penyediaan majalah	eksemplar	12	12
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Dukungan 100 % terhadap prosentase terwujudnya adminstrasi umum perangkat daerah dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	orang	48	48
				Konsumsi rapat/ sidang/ tamu	orang	490	490
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Stertcher Ambulan	set	2	2
				Scanner F4	buah	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lemari Es	buah	2	2
				Filling Cabinet	buah	2	2
				Water Heater	buah	6	6
				Mesin cuci	buah	2	2
				Kipas angin	buah	6	6
				Dispenser	buah	16	16
				Freezer	buah	2	2
				Komputer PC	set	1	1
				Walker	buah	2	2
				Genzet (rumah dan instalasi)	set	1	1
				Kompur Gas	buah	2	2
				Penyediaan perabot kantor	jenis	22	22
				Alat Penanak Nasi	buah	1	1
				Printer	buah	3	3
				Dukungan 100 % terhadap prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Kursi Roda	buah	4	4
				Alat air minum isi ulang	set	1	1
				AC Split	buah	1	1
				UPS	buah	2	2
				Televisi	buah	4	4
				Notebook/ Laptop	buah	1	1
				Sound System Aula	set	1	1
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Penyediaan Materai	lembar	230	230
				Dukungan 100 % terhadap prosentase persentase terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Belanja Listrik	bulan	12	12

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Belanja Air	bulan	12	12
				Dukungan 100 % terhadap prosentase persentase terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Belanja Telepon	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Honorarium pengelola barang	bulan	12	12
				Penyediaan jasa kebersihan kantor (2 unit)	bulan	12	12
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100
				Retribusi sampah	bulan	12	12
				Honorarium pengelola keuangan	bulan	12	12
				Penyediaan jasa keamanan kantor (2 unit)	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Jasa service rutin kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	unit	12	12
				Pembayaran pajak, bea dan perijinan kendaraan roda 2 dan roda 4	unit	12	12
				Penyediaan BBM dan pelumas kendaraan roda 2 dan roda 4	unit	12	12
				Penyediaan suku cadang kendaraan dinas	unit	10	10
				Dukungan 100 % terhadap prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Pemeliharaan ruang isolasi	paket	1	1
				Pemeliharaan pagar	paket	1	1
				Dukungan 100 % terhadap prosentase terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Penyediaan jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan	paket	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Pemeliharaan Televisi	kali	10	10
				BBM Genzet dan Potong rumput	liter	480	480
				Pemeliharaan AC Split	kali	10	10

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemeliharaan mebelair	unit	22	22
				Sedot WC	kali	12	12
				Pemeliharaan laptop	kali	8	8
				Pemeliharaan komputer dan printer	kali	15	15
				Pemeliharaan CCTV	kali	2	2
				Pemeliharaan LCD/Proyektor	kali	2	2
				Pemeliharaan pompa air	kali	12	12
				Dukungan 100 % terhadap prosentase terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
				Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya	%	100	79.905
				Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya	%	100	106.54
				Penyediaan Permakanan			
				Dukungan 100 % terhadap persentase terwujudnya rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam Panti	%	100	100
				Penyediaan permakanan bagi warga Balai/ PPKS	orang	228	228
				Penyediaan Sandang			
				Dukungan 100 % terhadap persentase terwujudnya rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam Panti	%	100	100
				Penyediaan sandang bagi warga Balai/ PPKS	orang	228	228
				Penyediaan Asrama yang mudah Diakses			
				Dukungan 100 % terhadap persentase terwujudnya rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam Panti	%	100	100
				Penyediaan perlengkapan asrama bagi warga Balai/ PPKS	orang	228	228
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial			
				Penyediaan perbekalan kesehatan bagi warga Balai/ PPKS	jenis	33	33
				Dukungan 100 % terhadap persentase terwujudnya rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam Panti	%	100	100
				Pengisian Oksigen	unit	7	7
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan 100 % terhadap persentase terwujudnya rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam Panti	%	100	100
				Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bagi warga Balai/PPKS	orang	228	228
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
				Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari bagi warga Balai/PPKS	orang	228	228
				Dukungan 100 % terhadap persentase terwujudnya rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam Panti	%	100	100
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
				Dukungan 100 % terhadap persentase terwujudnya rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam Panti	%	100	100
				Penelusuran warga Balai/ PPKS	orang	216	216
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
				Dukungan 100 % terhadap persentase terwujudnya rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam Panti	%	100	100
				Reunifikasi Keluarga bagi warga Balai/PPKS	ok	144	144
				Pemulasaraan			
				Dukungan 100 % terhadap persentase terwujudnya rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam Panti	%	100	100
				Penyediaan Pemulasaraan Jenazah bagi warga Balai/PPKS	orang	35	28

b. Urusan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Tenaga Kerja

a) Kondisi Umum

Kondisi ketenagakerjaan DIY tahun 2022 berangsur membaik setelah mengalami dampak pandemi yang cukup parah di tahun 2020 dan 2021. Terjadi perbaikan di berbagai indikator ketenagakerjaan diantaranya Penganggur Terbuka dan setengah penganggur akibat bertambahnya jam kerja. Berdasarkan Survey Angkatan Kerja Nasional bulan Agustus 2022 yang dirilis BPS, jumlah penganggur terbuka sebesar 94.945 orang mengalami penurunan sebanyak 10.79% dibanding tahun 2021 sebesar 106.432 orang. Jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan sebesar 12.608 orang dibanding tahun 2021 sebesar 2.228.523 orang menjadi 2.241.131 orang pada tahun 2022. Penduduk bekerja dengan dominasi tiga lapangan pekerjaan utama yaitu sektor Perdagangan sebanyak 444.740 orang diikuti sektor pertanahan dan sektor industri pengolahan masing-masing sebanyak 402.040 dan 387.210 orang. Kenaikan jumlah penduduk yang bekerja didorong dengan mulai pulihnya aktivitas pariwisata di DIY yang berpengaruh langsung terhadap penyerapan tenaga kerja sektor akomodasi, makan minum yang mengalami kenaikan 1,61% dan sektor transportasi pergudangan naik 1,31% dibanding tahun 2021. Sementara sektor Pertanian, Perdagangan dan Industri pengolahan sedikit mengalami penurunan yang disebabkan mulai beralihnya tenaga kerja ke sektor formal seperti masa sebelum pandemi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan 0,5 point, tahun 2021 sebesar 4,56% menjadi 4,06% pada tahun 2022. Meskipun TPT tahun 2022 masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 yaitu 3,18% pada

tahun 2019 tetapi jumlah pengangguran dan TPT semakin menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.


Dampak pandemi Covid-19 terhadap ketenagakerjaan di tahun 2022 sudah menurun. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah indikator ketenagakerjaan: 1) pengangguran karena Covid-19, 2) Bukan Angkatan Kerja karena Covid-19, 3) Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19 dan 4) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19, pada tahun 2020 sebanyak 540.120 orang turun menjadi 458.040 orang di tahun 2021 dan Kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 102,74 ribu orang.

Capaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) DIY pada tahun 2022 mengalami kenaikan 3,26 point, tahun 2021 sebesar 67,21 menjadi 70,47 pada tahun 2022. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan apresiasi melalui penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) untuk 3 (tiga) kategori: IPK Terbaik Peringkat kedua berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Sedang, IPK Terbaik pada Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja, serta IPK Terbaik pada Indikator Utama Penduduk dan Tenaga Kerja.

Tabel 3.108. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	Orang	2.136	2.625	2.670	101,71	2.625	101,71
2	Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial	Kasus	51	50	62	124,00	50	124,00

Sumber: Disnakertrans DIY, 2023



Indikator jumlah lulusan yang di tempatkan menunjukkan kinerja dalam hal peningkatan kualitas daya saing tenaga kerja. Sebanyak 2.670 orang menjadi realisasi capaian indikator jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan atau 101,71% dari target 2.625 orang. Capaian ini menggambarkan target akhir RPJMD 2022 tercapai. Dalam kurun 1 (satu) tahun sebanyak 534 orang yang dapat ditempatkan baik di sektor formal maupun informal. Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi dengan dibukanya jejaring pasar kerja melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Capaian indikator jumlah kasus yang diselesaikan di luar hubungan industrial pada tahun 2022 sebesar 124%. Kasus yang dapat diselesaikan bertambah 11 kasus, sehingga capaian pada tahun 2022 menjadi 62 kasus dari target 50 kasus. Dengan kondisi ini maka target akhir RPJMD dapat tercapai. Selama pandemi Covid-19 terjadi fluktuasi kasus hubungan industrial yang diselesaikan, tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 21 kasus turun menjadi 8 kasus pada tahun 2021 dan kembali naik pada tahun 2022 sebanyak 11 kasus, hal ini disebabkan karena sektor ketenagakerjaan belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi Covid-19 sehingga terjadi peningkatan kasus hubungan industrial yang diselesaikan secara tripartit (Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja/Tenaga Kerja). Ketercapaian indikator ini didukung upaya pembinaan dan pemantauan hubungan industrial serta pembinaan dan pengawasan perusahaan terhadap kepatuhan norma kerja.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

Menggambarkan permasalahan dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2022, maupun permasalahan pelaksanaan urusan.

- (a) Masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang ditandai dengan kurangnya keterampilan, kurangnya kompetensi dan kurangnya daya juang/karakter.
- (b) Tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat pendidikan menengah dan tinggi masih mendominasi.
- (c) Terbatasnya kesempatan kerja.
- (d) Kurang memadainya perlindungan norma kerja dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta penyelesaian Hubungan Industrial.

(2) Solusi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas (**point a**).

- (a) Meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas serta pembangunan karakter.
- (b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Informasi Pasar Kerja, Penyuluhan Bimbingan dan Jabatan (PBJ) serta perantaraan kerja.
- (c) Perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja seperti melalui pengembangan kewirausahaan.
- (d) Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui pembinaan dan deteksi dini Hubungan Industrial, Implementasi Struktur Upah dan Skala Upah serta pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan norma kerja dan norma K3.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Pada Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari pendanaan APBD dan dana keistimewaan sebesar Rp59.603.575.186,00 dengan mengampu 6 program dan 41 sub kegiatan untuk Urusan Ketenagakerjaan. Realisasi keuangan sebesar Rp56.916.395.127,00 atau 95,49% dikarenakan adanya efisiensi dan sisa pengadaan, sedangkan realisasi fisiknya 99,83%. Hal ini disebabkan karena 2 sub kegiatan yaitu Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja realisasi fisiknya 97% dan Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan realisasi fisiknya 98,96%. Rusunawa Gemawang sampai dengan 31 Desember 2022 masih digunakan sebagai shelter Covid-19, sehingga belum dapat difungsikan. Terdapat pengadaan barang dengan anggaran DID tahap II yang tidak terealisasi (alat tes kelelahan kerja) karena barang yang dibutuhkan belum tersedia.

Tabel 3.109. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. Terwujudnya Kesempatan Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			2. Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100
			3. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100
				Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100
				Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100
				Prosentase Peningkatan Kualitas Pegawai dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100
				Prosentase Peningkatan Kualitas Pegawai dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100
				Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100
				Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100
				Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100
				Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100
				Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100
				Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPT	%	100	100
				Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPT	%	100	100
				Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100
				Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				4.ROPK	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku:1.Renstra	dokumen	1	1
				Dukungan terhadap capaian indikator persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	persen	100	100
				3.Renja Perubahan	dokumen	1	1
				2.Renja	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
				2.DPA Tahun 2023	dokumen	1	1
				3.RKA Perubahan Tahun 2022	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen penganggaran sesuai dengan kaidah yang berlaku:1. RKA Tahun 2023	dokumen	1	1
				4.DPPA Tahun 2022	dokumen	1	1
				Dukungan terhadap capaian indikator persentase peningkatan	persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Tersusunnya laporan evaluasi kinerja:1.Dokumen LKJIP dengan nilai AKIP 85.00	dokumen	1	1
				Dukungan terhadap capaian indikator persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	persen	100	100
				3.Konsep/Bahan LPPD	dokumen	1	1
				2.Konsep/Bahan LKPJ	dokumen	1	1
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				Dukungan terhadap capaian indikator persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	persen	100	100
				Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN	Tahun	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	Tahun	1	1
				Dukungan terhadap capaian indikator persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	persen	100	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Laporan Keuangan sesuai dengan relaisasi penggunaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi (Laporan Keuangan Tahunan)	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap capaian indikator persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	persen	100	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				Laporan Keuangan Bulanan	dokumen	12	12
				Dukungan terhadap capaian indikator persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	persen	100	100
				Laporan Keuangan Semesteran	dokumen	2	2
				Laporan Keuangan Triwulanan	dokumen	4	4
				Pengamanan Barang Milik Daerah OPD			
				Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100
				Terbayarkan PBB Gedung Rusunawa Ledok Code,Rusunawa Gemawang,BIK dan BIP	unit	4	4
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai ketentuan yang berlaku	tahun	1	1
				Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
				Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100
				Terfasilitasinya penilaian Angka Kredit bagi JFT (Pengawas Ketenagakerjaan,Mediator,Pengantar Kerja,Instruktur dan Penguji K3)	Tahun	1	1
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100
				2.Penerangan Fasum Rusunawa (Lampu)	buah	50	50
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik:1.Tersedianya Komponen Instalasi listrik	jenis	9	9
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: 1.Alat Tulis Kantor	jenis	26	26
				2.Perengkapan arsip	jenis	5	5
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100
				Tersedianya peralatan rumah tangga	jenis	10	10
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
				5.Bendera	buah	3	3
				3.Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	tabung	5	5
				2.Pengisian Tabung GasLPG	tabung	6	6
				Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100
				4.BBM Operasional genset	liter	181	181
				Tersedianya logistik kantor:1.Makan dan Minum Pelayanan Publik	jenis	2	2
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				3.Penjilidan	buah	60	60
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan :1.Barang cetak	jenis	3	3

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				2.Penggandaan	lembar	28656	28656
				Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100
				Langganan surat kabar	jenis	2	2
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				1.Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi	tahun	1	1
				3.Terkelolanya arsip dinas	tahun	1	1
				2.Tersedianya makanan dan minuman rapat	tahun	1	1
				Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya:1.Genset., 2. Pompa Air dan instalasi	paket	2	2
				Dukungan terhadap capaian program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	persen	100	100
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				2.Surat Keluar	Tahun	1	1
				Tersedianya Jasa Surat Menyurat: 1.Surat Masuk	Tahun	1	1
				3.Pengiriman Dokumen	Tahun	1	1
				Dukungan terhadap capaian program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	persen	100	100
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap capaian program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	persen	100	100
				3.Pembayaran tagihan rekening telepon	Tahun	1	1
				Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik: 1.Pembayaran Langganan virtual meeting	tahun	1	1
				2.Pembayaran tagihan rekening listrik	Tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				4.Surveillance ISO	sertifikat	3	3
				3.Pembayaran Keamanan Kantor	orang	18	18
				Dukungan terhadap capaian program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	persen	100	100
				2.Pembayaran jasa kebersihan	Tahun	1	1
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor: 1.Pembayaran jasa retribusi sampah	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Dukungan terhadap capaian program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	persen	100	100
				1.Terpeliharanya kendaraan kepala dinas roda 4	unit	1	1
				2.Terbayarkannya pajak kendaraan kepala dinas roda 4	unit	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				4.Terbayarkannya biaya perizinan (KIR) kendaraan dinas operasional/lapangan	unit	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				1.Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 operasional atau lapangan	unit	30	30
				Dukungan terhadap capaian program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	persen	100	100
				3.Terbayarkannya pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	41	41
				2.Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 operasional atau lapangan	unit	11	11
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				5.Kamera	unit	6	6
				2.LCD Proyektor	unit	11	11
				8.Printer	unit	20	20
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya: 1.Mesin Ketik	unit	15	15
				3.Kulkas	unit	5	5
				7.Komputer	set	35	35
				6.Laptop	unit	20	20
				4.Alat Audio	unit	30	30
				Dukungan terhadap capaian program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	persen	100	100
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				.Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya:1.Pemeliharaan gedung disnakertrans	jenis	2	2
				5.Pemeliharaan perpustakaan	jenis	1	1
				Dukungan terhadap capaian program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	persen	100	100
				3.Pemeliharaan rusunawa ledok code	jenis	5	5

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				3.Pemeliharaan AC	unit	42	42
				2.Pemeliharaan CCTV	unit	16	16
				4.Pemeliharaan Wireless/Microphone/Soundsystem	unit	9	9
				Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya:1.Perawatan Pompa air	kali	12	12
				Dukungan terhadap capaian program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	persen	100	100
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			
				Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, dan penempatan transmigran	persen	100	100
				Penyusunan dokumen Perencanaan Tenaga Kerja DAerah	dokumen	1	1
				Penyusunan dokumen data ketenagakerjaan	dokumen	1	1
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
				Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	orang	450	335
				Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	orang	450	458
				Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	lembaga	90	91
				Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	lembaga	90	91

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang terampil	%	9.52	9.49
				Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan yang terampil	%	9.52	10.37
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi			
				Sosialisasi Magang Jepang	orang	100	100
				Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi	orang	300	174
				Sertifikasi Uji Kompetensi (DID:40 org)	orang	180	180
				Pelatihan Keterampilan (DID)	orang	100	100
				Sosialisasi Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja	orang	210	210
				Pemagangan perusahaan bagi pencari kerja	orang	30	30
				Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja			
				Bimtek Akreditasi LPK	lembaga	20	20
				Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah lembaga pelatihan kerja yang terstandarisasi	lembaga	77	77
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
				Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigrasi	orang	11040	11718
				Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigrasi	orang	11040	11718
				Pelayanan Antar Kerja			
				Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja,	persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				perluasan kerja, dan penempatan transmigran			
				Sosialisasi bagi perusahaan pengguna TKA dan penyandang disabilitas	perusahaan	100	100
				Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan	laporan	1	1
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			
				Penyuluhan Penempatan Tenaga Kerja	orang	100	100
				Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, dan penempatan transmigran	persen	100	100
				Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	orang	300	300
				Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)			
				Bimtek Petugas Bursa Kerja	orang	30	30
				Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, dan penempatan transmigran	persen	100	100
				Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan	lembaga	220	220
				Perluasan Kesempatan Kerja			
				Padat karya infrastruktur melalui BKK	lokasi	222	222
				Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, dan penempatan transmigran	persen	100	100
				Padat Karya Infrastruktur	lokasi	4	4
				Pembekalan kewirausahaan bagi angkatan kerja khusus	orang	20	20
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemutakhiran (Updating) Informasi Pasar Kerja	bulan	12	12
				Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, dan penempatan transmigran	persen	100	100
				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			
				Pembinaan Pencegahan PMI Unprosedural	lembaga	10	10
				Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, dan penempatan transmigran	persen	100	100
				Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan			
				Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, dan penempatan transmigran	persen	100	100
				Pembekalan Kewirausahaan Purna PMI	orang	25	25
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
				Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	orang	1688	1703
				Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	orang	1688	1703
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			
				Verifikasi Serikat Pekerja/Buruh	PUK	200	200
				Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah perusahaan yang melaksanakan	persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				sarana hubungan industrial dan jaminan sosial			
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			
				Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Syarat Kerja Bagi Pelaku HI	akt	7	7
				Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama	orang	120	120
				Bimtek Pembinaan Hubungan Industrial (HI) Bagi Siswa SMK	siswa	540	540
				Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan	orang	120	120
				Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial	persen	100	100
				Bimtek Teknik Negosiasi	orang	120	120
				Peningkatan pemahaman penyelesaian perselisihan HI	orang	30	30
				Peningkatan Pelayanan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Anjuran	5	5
				Pemantauan perusahaan yang melaksanakan sarana HI	perusahaan	400	400
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja sama Tripartit Daerah Provinsi			
				Sidang lembaga kerja sama tripartit	sidang/kesepakatan	3	3
				Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial	persen	100	100
				Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi			
				Bimtek Struktur Skala Upah	orang	30	30

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial	persen	100	100
				Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)			
				Pemantauan THR dan Penangguhan Upah	kab kota	5	5
				Sosialisasi THR	akt	3	3
				Koordinasi dewan Pengupahan	kab kota	5	5
				Sosialisasi UMP	akt	3	3
				Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten Kota (UMP dan UMK)	SK	2	2
				Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial	persen	100	100
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			
				Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial	persen	100	100
				Pembinaan Kesejahteraan pekerja/buruh	orang	199	182
				PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
				Persentase Perusahaan Kecelakaan Kerja	Nihil %	64	65.01
				Persentase Perusahaan Kecelakaan Kerja	Nihil %	64	65.05
				Jumlah perusahaan yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar	perusahaan	533	533

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah perusahaan yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar	perusahaan	533	533
				Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan			
				Bimtek Petugas Peran Kebakaran	akt	1	1
				Dukungan terhadap capaian kinerja persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja	persen	100	100
				Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja	perusahaan	250	250
				Bimtek Norma Kerja Perempuan Anak	akt	1	1
				Bimtek HIV/AIDS/NAPZA	akt	1	1
				Sosialisasi Norma K3	akt	6	6
				Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3	perusahaan	350	350
				Pengadaan Alat Pemeriksaan dan Pengujian K3 (DID)	unit	26	26
				Pembinaan dan Pemeriksaan Obyek K3 (DID)	UMKM	10	10
				Sosialisasi Norma Kerja	akt	6	6
				Bimtek P3K	akt	1	1
				Bimtek Norma Kerja	akt	1	1
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. Terwujudnya Kesempatan Kerja 2. Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja 3. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya Video profil purna PMI DIY	Paket	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sosialisasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa	kali	80	80
				Pendampingan Peningkatan Produktivitas melalui budaya kerja istimewa	perusahaan	10	10
				Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Maritim	orang	200	200
				Film ILM Ojo Gelem Nganggur	Film	1	1
				Pengembangan potensi seni budaya bagi pekerja	kelompok	4	4
				Dukungan terhadap capaian program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan	persen	100	100
				Pelatihan kewirausahaan bagi angkatan kerja baru di desa mandiri budaya	orang	200	200
				Pembentukan Skill Development Center	Laporan	1	1
				Padat Karya Pengembangan Potensi Desa	lokasi	60	60
				Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan	desa	104	104

2) *Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

a) *Kondisi Umum*

Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan mengembangkan kemandirian ekonomi perempuan, meningkatkan keterlibatan perempuan dalam jabatan publik serta melindungi perempuan dari kekerasan. Adapun perlindungan anak dilakukan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan.

Kinerja pemberdayaan perempuan di DIY tercermin dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IDG DIY berada pada rangking 4 nasional dan IPG berada pada rangking 1 nasional pada tahun 2021. Kondisi Perlindungan Anak juga menunjukkan pencapaian yang luar biasa, Indeks Perlindungan Anak berada pada rangking 1 nasional, Indeks Pemenuhan Hak Anak berada pada rangking 1 nasional, dan Indeks Perlindungan Khusus Anak Berada pada rangking 12 nasional pada tahun 2021. Selain itu, pada tahun 2022, DIY diberikan penghargaan sebagai satu-satunya daerah ramah perempuan dan layak anak di Indonesia.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak” diukur dengan indikator Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Capaian sasaran tersebut pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.110. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio	0,52	0,45	0,49*	91,11*	0,45	91,11*

Ket.: *) Data Sementara

Sumber: DP3AP2 DIY, 2023 (data diolah)

Pada tahun 2022 Capaian Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 0,49% lebih tinggi dari target sebesar 0,45%.

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak didukung oleh 7 program dan 19 kegiatan dengan berbagai aktivitas, antara lain:

- (1) Pemenuhan hak anak melalui pelembagaan di lembaga layanan.
- (2) Perlindungan khusus anak melalui penyediaan layanan CEKATAN.
- (3) Peningkatan kualitas hidup melalui penguatan ketahanan keluarga.
- (4) Pencegahan kekerasan melalui berbagai advokasi, komunikasi, edukasi, dan informasi.
- (5) Penanganan korban kekerasan bagi perempuan dan anak melalui berbagai lembaga layanan yang berjejaring dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA).
- (6) Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui Kelompok Ekonomi Produktif (KEP) Prima.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Menggambarkan permasalahan dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2022, maupun permasalahan pelaksanaan urusan.

- (a) Pemenuhan hak anak belum terlembagakan dengan baik di berbagai lembaga layanan anak.
- (b) Perkawinan usia anak masih terus meningkat setiap tahun dan menjadi penyebab utama anak putus Sekolah.
- (c) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat baik jumlah dan ragam bentuknya.
- (d) Belum adanya kebijakan spesifik yang mengatur upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif kasus kejahatan jalanan.

(2) Solusi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas (**point a**).

- (a) Melembagakan pemenuhan hak anak di seluruh lembaga layanan anak.
- (b) Pendampingan anak dan keluarga melalui Telekonsultasi Sahabat Anak dan Keluarga (TeSAGa) serta Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
- (c) Mendorong pembentukan UPT PPA dan PUSPAGA di seluruh kabupaten/kota.
- (d) Perumusan kajian kejahatan jalanan oleh penduduk usia anak yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh seluruh *stakeholders*.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Pada tahun 2022 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui 7 Program dan 19 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.759.470.652,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp13.218.985.465,00 atau 96,29%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya, rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.111. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	85	87.44
			1. Peningkatan kualitas pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan terutama di P2TPAKK "RDU" 2. Percepatan penurunan prevalensi pada perempuan dan anak diprioritaskan untuk memperkuat jejaring antar lembaga	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi Terlaksananya aktivitas pencegahan kekerasan terhadap perempuan Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Pelaksanaan Kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan Penyusunan regulasi terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi terlayannya perempuan korban kekerasan yang dirujuk ke P2TPAKK Rekso Dyah Utami 1 tahun Subkegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
					orang	250	250
					Dokumen	1	1
					Tahun	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				<p>Fasilitasi Pelayanan Korban Lembaga 1 1</p> <p>Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA)/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)</p> <p>Hibah Kepada P2TPAKK Rekso Dyah Utami lembaga 1 1</p> <p>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</p> <p>Subkegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan Forum 1 1</p> <p>Fasilitasi Gugus tugas TPPO Forum 1 1</p> <p>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</p> <p>Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</p> <p>Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</p> <p>Penyelenggaraan Hari Anak Nasional DIY Kali 1 1</p> <p>Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi</p> <p>Penyusunan Peraturan / Kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak Dokumen 1 1</p> <p>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</p> <p>Subkegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</p> <p>Fasilitasi Forum Anak Daerah Forum 1 1</p>			
			Peningkatan level capaian KLA di DIY melalui peningkatan kapasitas gugus tugas KLA.				

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			
				Monev Pelaksanaan KLA di Kab/Kota	Dokumen	5	5
				Pembinaan KLA	Gugus tugas	6	6
				Sub kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
				Pelatihan Perlindungan Anak	Orang	30	30
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
				Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
				Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi			
				Terlaksananya aktivitas pencegahan kekerasan terhadap anak	Tahun	1	1
				Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi			
				Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi			
				Terlayannya anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dirujuk ke P2TPAKK Rekso Dyah Utami	Tahun	1	1
				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Tahun	1	1
			1. Pengembangan Sistem, kelembagaan dan pemanfaatan data gender dan anak untuk menunjang pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender	Persentase perempuan pengambil keputusan di ranah publik	%	34.45	37.97
			2. Peningkatan perempuan pengambil keputusan di ranah publik diprioritaskan pada penguatan kapasitas perempuan potensial dan penguatan jejaring kemitraan/kerja sama dengan OPD, Lembaga masyarakat, media serta partai politik.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi			
			3. Pembentukan Desa Prima Sejahtera baru di fokuskan di daerah tertinggal/miskin dan pendampingan secara berkelanjutan untuk menuju klasifikasi Desa Prima Sejahtera maju	Evaluasi implementasi PUG di OPD Pemda DIY	OPD	37	37
			4. Penguatan Sistem Data Gender diprioritaskan dengan penguatan system dan penguatan kelembagaan tim data gender dan anak.	Evaluasi PUG PP PA oleh Pusat / Mentor Anugerah Parahita Ekapraya Subkegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi TOT PPRG di OPD Pemda DIY		1	1
				Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi Subkegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			
				Sosialisasi pemahaman gender	kali	32	32
				Pendidikan Politik perempuan	Angkatan	1	1
				Peningkatan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan	Angkatan	1	1
				Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Subkegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			
				Hibah desa prima	Desa	8	8
				Inisiasi desa prima	Desa	5	5
				Monitoring dan Evaluasi Desa Prima Mandiri	Kali	115	115
				Advokasi peningkatan kapasitas perempuan partai politik	Kali	1	1
				Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Potensial dalam Bidang Politik	Kali	1	1
				Pendampingan desa prima	Desa	5	5
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			
				Subkegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			
				Fasilitasi Organisasi Perempuan	Organisasi	3	3
				Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			
				Fasilitasi Forum pendukung PUG, PP dan PA	Forum	4	4
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
				Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			
				Subkegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi			
				Update Data Gender dan Anak serta data perlindungan Perempuan dan Anak	Dokumen	2	2

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / subkegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengembangan dan pemeliharaan sistem data dan Informasi Gender dan Anak dan Sistem Data Perlindungan Perempuan dan Anak	Paket	1	1
				Subkegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi			
				Penyusunan Profil Gender dan Profil Pemenuhan Hak Anak (Profil KLA)	Buku	1	1
				Analisis dan Kajian Data Terkait dengan Isu Gender dan anak	Dokumen	1	1
				Advokasi Penyediaan serta pemanfaatan Data Gender dan anak di OPD dan Kab/Kota	Kab/Kota	5	5

3) *Urusan Pangan*

a) *Kondisi Umum*

Urusan pangan memiliki dua indikator kinerja sasaran yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan.

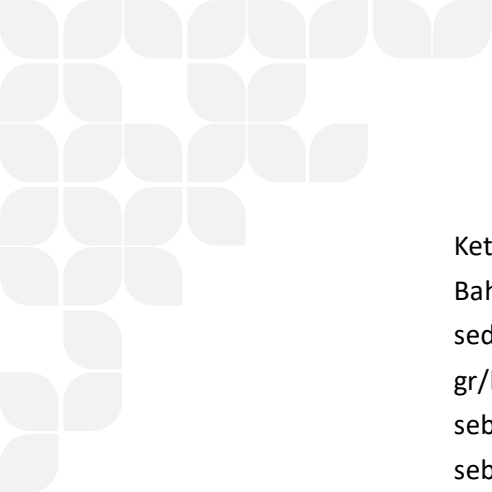
Tabel 3.112. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 Terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	94,7	91,12	96,8	106,23	91,12	106,23
2	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	%	40,83	38,65	41,39	92,91	38,65	92,91

Sumber: DPKP DIY, 2023

Capaian skor PPH pada tahun 2022 sebesar 96,8 dihitung menggunakan data Susenas BPS tahun 2022. Skor PPH mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Hal ini didukung dengan adanya berbagai program atau kegiatan penganeekaragaman konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui kampanye, gerakan, edukasi, promosi dan sosialisasi. Selain itu penganeekaragaman konsumsi pangan juga didukung pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga sebagai sumber pemenuhan gizi keluarga sehingga pola konsumsi B2SA dapat tercapai melalui Kegiatan Lumbung Mataraman. Capaian skor PPH di DIY jauh lebih tinggi dari angka nasional (92,9) maupun angka target akhir RPJMD 2022. Skor PPH tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022 telah tercapai sebesar 106,23%.

Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi dengan baik dengan adanya koordinasi intensif dengan para pihak terkait untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang mencukupi.



Ketersediaan energi tahun 2022 yang dihitung dengan Neraca Bahan Makanan (NBM) tercapai 3.732 kkal/kapita/hari sedangkan ketersediaan protein sebesar 103,72 gr/kapita/hari. Standar nasional untuk ketersediaan energi sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein sebesar 63 gr/kapita/hari (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2018). Ketersediaan protein di DIY didukung oleh pasokan sumber makanan protein hewani terutama ikan dan telur yang diperoleh dari produksi dalam DIY maupun pemasukan dari luar DIY.

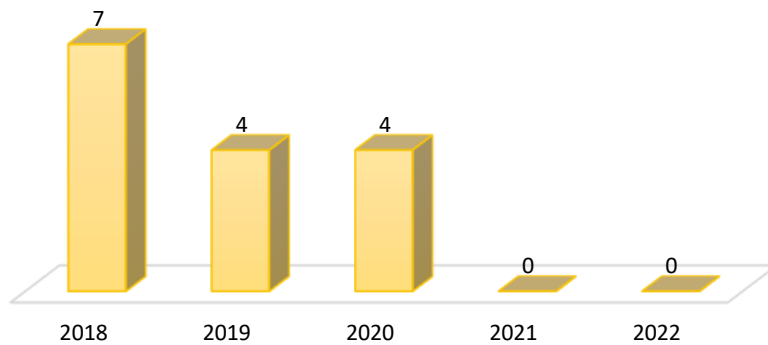
Ketersediaan pangan DIY juga didukung adanya cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) DIY yang diatur melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah DIY memiliki stok cadangan pangan berupa beras sebanyak 280,884 ton (per 31 Desember 2022). Selama ini, pengelolaan dan penitipan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dikerjasamakan dengan Perum BULOG Kanwil Yogyakarta dan PT Taru Martani. Beras CPPD DIY yang dititipkan di Perum BULOG Kanwil Yogyakarta sebanyak 31,875 ton dan di PT Taru Martani sebanyak 249,009 ton. Pada tahun 2022, Pemerintah Daerah DIY telah menyalurkan bantuan cadangan pangan sebanyak 11.657,5 kg beras yang ditujukan untuk warga yang terdampak bencana alam.

Aspek distribusi pangan juga terus ditingkatkan dan dikembangkan. Salah satu upaya dalam mengatasi stabilisasi pasokan dan harga pangan dilakukan melalui kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI) atau Pasar Mitra Tani (PMT). Untuk saat ini, terdapat 1 (satu) unit Pasar Mitra Tani Yogyakarta yang

berlokasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Adanya PMT dapat mendorong stabilisasi harga di tingkat konsumen sehingga masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. PMT juga melaksanakan bazar di pasar tradisional dan gelar pangan murah.

Kegiatan penanganan keamanan pangan dilakukan dalam bentuk pengawasan *pre-market* maupun *post-market* dengan tujuan meningkatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) aman yang beredar untuk mendukung kesehatan masyarakat, meningkatnya daya saing PSAT baik di pasar domestik maupun ekspor, dan meningkatnya ketertelusuran PSAT (*traceability*). Pada tahun 2022 telah dilakukan pengawasan keamanan pangan dan pengujian *post-market* terhadap 234 produk PSAT (buah, sayur, dan beras curah) yang beredar di 5 kabupaten/kota di DIY. Hasil pengawasan ini menunjukkan bahwa sebesar 99,9% PSAT di 5 kabupaten/kota di DIY aman untuk dikonsumsi.

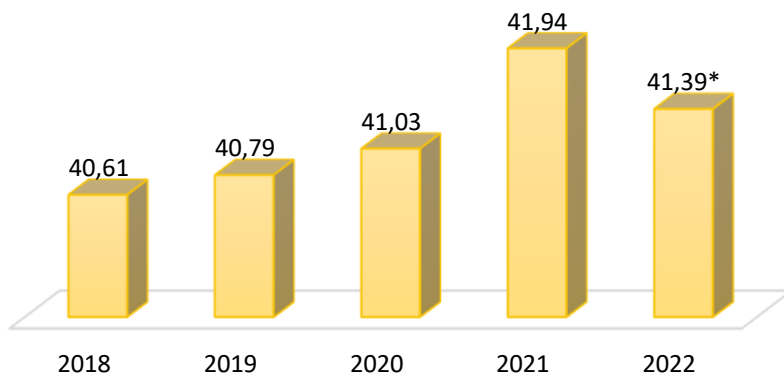
Khusus untuk pengawasan *pre-market* berupa penjaminan keamanan pangan dan dukungan peningkatan ekspor PSAT, OKKP-D DIY telah menerbitkan 35 ijin edar Produk Domestik (PD) PSAT, 11 Sertifikat Penerapan Penanganan yang baik (SPPB) PSAT untuk 11 unit penanganan PSAT, Perpanjangan Registrasi 1 *Packing House* (PH) dan *Surveillance* ke 15 pelaku PSAT tersertifikasi dan teregistrasi dengan hasil semua pelaku dinyatakan masih konsisten dalam pemenuhan standar keamanan pangan. Hingga saat ini telah terbit 108 Nomor Registrasi Pangan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK) oleh OKKP-D Kabupaten/kota.



Gambar 3.37. Desa Rawan Pangan di DIY Tahun 2018-2022
 Sumber: DPKP DIY, 2023

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sudah tidak terdapat desa rawan pangan di DIY, namun masih ada 11 desa yang masuk kriteria waspada di DIY. Ke depan diperlukan upaya yang lebih baik lagi untuk mengentaskan desa-desa waspada menjadi desa aman pangan serta mempertahankan agar desa-desa yang sudah masuk kriteria aman maupun yang masih waspada pangan tidak turun statusnya menjadi rawan pangan. Harapannya kelak semua desa di DIY berstatus aman pangan.

Capaian indikator pengeluaran rata-rata per kapita untuk makanan tahun 2022 diprediksi lebih baik dibanding tahun 2021 karena kondisi perekonomian yang sudah membaik. Capaiannya diprediksi sebesar 41,39%. Angka ini lebih rendah dari tahun 2021, yakni sebesar 41.94%. Menurut teori yang ada, hal ini cukup baik karena semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan mengindikasikan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.



Gambar 3.38. Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan Untuk Makanan di DIY tahun 2018-2022

*Ket.: *) Angka prediksi, data belum dirilis oleh BPS*

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Pengeluaran rata-rata per kapita untuk makanan tahun 2022 sebesar 41,39%, turun 0,55% dibandingkan tahun 2021. Kondisi perekonomian di pasca pandemi Covid-19 ini sudah mulai pulih sehingga diprediksi pengeluaran masyarakat untuk belanja makanan sudah sedikit menurun proporsinya dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 41,94% menjadi 41,39%.

Selain meningkatkan perekonomian masyarakat, edukasi tentang pola konsumsi yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan mengoptimalkan diversifikasi pangan utamanya pangan lokal menjadi cara menurunkan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk belanja bahan makanan. Hal ini perlu didukung dengan berbagai upaya lintas sektor dalam rangka mengurangi konsumsi rokok, utamanya yang menyasar pada generasi muda.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) DIY telah menunjukkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat DIY saat ini sudah baik, namun konsumsi energi belum seimbang antar 9 (sembilan) kelompok bahan pangan.

(2) *Solusi*

Mendorong konsumsi yang seimbang antar kelompok bahan pangan dengan cara menurunkan konsumsi padi-padian, protein hewani, minyak dan lemak, maupun gula serta meningkatkan konsumsi umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan. Selain itu juga diperlukan promosi dan kampanye intensif pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Urusan Pangan terdiri dari 3 Program Reguler dengan pagu Rp1.669.974.750,00 dan 1 Program Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan dengan pagu anggaran Rp4.894.144.200,00. Total pagu anggaran Urusan Pangan adalah Rp6.564.118.950,00 dan terealisasi Rp6.401.531.483,00 atau 97,52%. Realisasi kinerja fisik tercapai 100%, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 2,48%. Rincian capaian kinerja program dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.113. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pangan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	<p>1. Peningkatan produksi tanaman dan populasi ternak yang berdampak bagi peningkatan pendapatan petani.</p> <p>2. Peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan</p> <p>3. Pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana)</p> <p>4. Pengembangan kawasan yang berdampak terhadap pendapatan petani.</p> <p>5. Menumbuhkan sentra-sentra pembibitan ternak lokal</p> <p>6. Pendampingan dan pengawalan kelompok.</p> <p>7. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh, pemantapan kelembagaan penyuluhan, dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan</p> <p>8. Pemantapan ketersediaan dan kewaspadaan pangan melalui koordinasi lintas sektor</p> <p>9. Peningkatan cadangan pangan daerah (masyarakat dan pemerintah)</p> <p>10. Peningkatan diversifikasi/penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal</p> <p>11. Penanganan keamanan pangan, pengawasan pangan beredar, dan sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan</p> <p>12. Pengembangan distribusi pangan yang merata dan terjangkau, stabilisasi harga pangan strategis, dan pemantauan distribusi, harga, akses pangan.</p> <p>13. Penurunan jumlah Desa Rawan Pangan</p> <p>14. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pusat</p>	<p>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</p> <p>Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi %</p> <p>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</p> <p>Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan</p> <p>Informasi harga komoditas pertanian dan pangan (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan pangan)</p> <p>Penyusunan dokumen ketersediaan pangan</p> <p>Informasi data cadangan pangan</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</p> <p>Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (DID)</p> <p>Operasional Toko Tani Indonesia Center (TTIC)/Pasar Mitra Tani (PMT)</p> <p>Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)</p> <p>Fasilitas Distribusi Komoditas Pangan (Beras, Cabe, Bawang Merah, dan Telur)</p> <p>Gelar Pangan Murah Pasar Mitra Tani Yogyakarta</p> <p>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Promosi</p> <p>Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</p> <p>Kajian Optimalisasi peran KWT untuk ketahanan pangan masyarakat di DIY</p>	%	0,08	-2,84
				Data	4	4	
				Dokumen	4	4	
				Bulan	12	12	
				Ton	17,5	17,5	
				Tahun	1	1	
				Tahun	1	1	
				Komoditas	4	4	
				Kali	1	1	
				Dokumen	1	1	

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			Perbenihan	Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Lokasi	16	16
			15. Peningkatan aksesibilitas pangan masyarakat	Gerakan Penganeekaragaman Pangan	Lokasi	76	76
			16. Pemenuhan kecukupan pangan masyarakat	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
				Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	0	0
				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi			
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota			
				Laporan analisis situasi pangan dan gizi	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi			
				Publikasi Media Cetak	kali	1	1
				Peningkatan kapasitas Desa Mandiri Pangan	kali	6	6
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
				Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	Persentase	0,08	-2,84
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
				Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi			
				Operasional Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) DIY	tahun	1	1
				Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Kabupaten/Kota	LintasDaerah		
				Sertifikat dan Register PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan)	dokumen	5	12
				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
				Publikasi media cetak	kali	1	1
				Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	persen	81	81
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota			
				Laporan ketahanan dan kerentanan pangan	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi			
				Publikasi Media Cetak	kali	1	1
				Peningkatan kapasitas Desa Mandiri Pangan	kali	6	6
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA			URUSAN
				KEBUDAYAAN			
				Masterplan Rintisan Desa Mandiri Budaya Lumbung Mataraman	dokumen	1	1
				Bangunan Lumbung Pangan Tradisional	unit	2	2
				Lumbung Mataraman Tahap Pengembangan	desa	16	16
				Bimtek Penumbuhan Kelompok Olahan Pangan Lokal	kali	1	1
				Sekolah Lapang Penerapan Good Agriculture Practices (GAP) di lahan pantai	kelompok	3	3
				Budidaya tanaman jagung sistem sabuk gunung	kelompok	2	2
				Sarana penunjang Lumbung Pangan Tradisiona	unit	2	2
				Peningkatan cadangan pangan masyarakat	kelompok	5	5
				Pengembangan pertanian di lahan sempit perkotaan	kelompok	5	5
				Gerakan Stop Boros Pangan	event	4	4
				Pengamatan dan pengendalian hama secara alami pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	ha	723	723
				Penyediaan Agenia Pengendali Hayati (APH) dan bahan pestisida nabati	jenis	10	10
				Fasilitasi Model Integrasi Pengembangan Vanili di Kulon Progo	kelompok	1	1
				BKK Lumbung Mataraman di Rintisan Desa Mandiri Budaya	desa	2	2
				Promosi video produk tanaman pangan inovasi khas Keistimewaan Yogyakarta	video	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Direktori Petani Milenial Istimewa Jogja	database	1	1
				Unit Pengolahan Hasil (UPH) Tanaman Pangan (Ubi Kayu/Umbi Lainnya, Kedelai, dan Jagung)	kelompok	3	3
				Budidaya tanaman hortikultura di lahan surjan	kelompok	4	4
				Lumbung Mataraman Tahap Kemandirian	desa	21	21
				Video edukasi pranoto mongso tani	video	1	1
				Surveilen sertifikasi organik	kelompok	3	3
				Bimtek pengolahan pangan lokal	lokasi	60	60
				Pengembangan Budidaya Tanaman Garut	gapoktan	2	2

4) *Urusan Pertanahan*

a) *Kondisi Umum*

Urusan Pertanahan merupakan salah satu urusan yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penyelenggaraannya urusan Pertanahan mendasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan pada rakyat. Kasultanan dan Kadipaten dinyatakan sebagai badan hukum yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hak milik atas tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten bahwa kedua lembaga tersebut berwenang mengelola dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Aspek Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, terdiri dari penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Sementara aspek Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, terdiri dari perlindungan, penggunaan, dan pelepasan.

Penatausahaan Tanah Kasultanan merupakan kewenangan Kasultanan dan penatausahaan Tanah Kadipaten merupakan kewenangan Kadipaten. Penatausahaan pertanahan ini meliputi aspek inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran. Fasilitas yang di berikan: 1) Kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah. 2) Pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen. 3)

Penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan. 4) Penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten. 5) Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, realisasi kinerja urusan pertanahan dalam RPJMD 2017-2022 ditentukan dengan dua indikator kinerja sasaran: (1) persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi; dan (2) Persentase fasilitasi tertib administrasi Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa.

Tabel 3.114. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa	%	74,11	88,67	103,58	116,82	88,67	116,82

Sumber: DPTR DIY, 2023

(1) Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi

Pada tahun 2022 kinerja urusan pertanahan dengan indikator kinerja sasaran berupa persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi pada tahun telah sesuai target. Hal ini dapat diukur dari pelayanan terhadap permohonan pengajuan ijin penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Terdapat enam permohonan

yang masuk dan telah ditindaklanjuti dimana seluruhnya telah terbit ijin penetapan lokasinya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.115. Rincian Permohonan Ijin Penetapan Lokasi

No	Uraian	Nomor SK
1	Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di DIY	Nomor SK Nomor: 69/Kep/2022 tanggal 17 Maret 2022
2	Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta	Nomor SK : 200/Kep./2022 tanggal 5 Juli 2022
3	Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Prambanan –Lemah Abang Segmen A di Kalurahan Bokoharjo dan Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kab. Sleman)	Nomor 211/Kep/2022 tanggal 13 Juli 2022
4	Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Pengembangan Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Regional Piyungan Kabupaten Bantul	Nomor SK : 243/Kep/2022 tanggal 29 Agustus 2022
5	Penetapan Lokasi Pengembangan Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan DIY di Kalurahan Palbapang, Kapanewon Bantul, Bantul saat ini sedang proses tanda tangan Bapak Gubernur DIY	Nomor 392/KEP/2022 Tanggal 27 Desember 2022
6	Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 385/KEP/2020 tentang penetapan lokasi pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta	Nomor 405/KEP/2022 Tanggal 29 Desember 2022

Sumber: DPTR DIY, 2023

(2) *Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa*

Capaian indikator Persentase fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa tahun 2022 melebihi target. Realisasi capaian indikator sebesar 103,58% dari target 88,67%. Dibandingkan dengan tahun 2021, capaian tersebut meningkat 27,56%. Rincian capaian pada tahun 2022 yaitu persentase jumlah Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang didaftarkan untuk dapat dikelola serta dapat dimanfaatkan sebesar 103,58% didukung paling besar dari capaian persentase bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang didaftarkan sebanyak 13.837 bidang dan tanah desa 8.824 bidang. Realisasi tersebut dari

target keseluruhan 21.877 bidang yang meliputi 13.877 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan 8.000 bidang tanah desa. Pendaftaran tersebut bertujuan agar memiliki kepastian hukum. Untuk rincian capaian pendaftaran tanah pada masing-masing Kabupaten/ Kota

Tabel 3.116. Capaian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

No	Kabupaten/ Kota	Pendaftaran										JML
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Yogyakarta	45	166	75	50	70	50	75	100	42	75	748
2	Bantul	0	171	1367	300	350	359	500	395	230	0	3672
3	Kulon Progo	0	216	176	240	350	400	400	402	151	25	2360
4	Gunungkidul	0	54	300	300	250	750	785	500	1000	0	3939
5	Sleman	0	137	252	250	250	1000	1000	202	27	0	3118
	Jumlah	45	744	2170	1140	1270	2559	2760	1599	1450	100	13837

Sumber: DPTR DIY, 2023

Tabel 3.117. Capaian Pendaftaran Tanah Desa

No	Kabupaten	Jumlah Bidang	Bidang Sudah Sertipikat	Bidang Belum Sertipikat	Realisasi Pendaftaran Tanah Kalurahan Belum Bersertipikat (Daftar Pertama Kali)	Realisasi Tanah Kalurahan Sudah Sertipikat (Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertipikat / Penyesuaian Tanah Desa/Kalurahan)	Total Realisasi Pendaftaran Tanah Desa
1	Bantul	15,743	2,117	13,626	287	1,654	1.941
2	Kulon Progo	4,156	3,649	507	166	1.409	1.575
3	Gunungkidul	10,882	3,295	7,587	364	2.578	2.942
4	Sleman	19,498	7,007	12,491	324	2.042	2.366
	Jumlah	50,279	16,068	34,211	1.141	7.683	8.824

Sumber : DPTR DIY, 2023

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Menggambarkan permasalahan dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2022, maupun permasalahan pelaksanaan urusan.

- (a) Pendaftaran pencatatan perubahan data sertifikat Tanah Desa yang berupa tanah pengganti hasil dari pelepasan Tanah Desa belum dapat diproses.

- (b) Terdapat bidang Tanah Desa yang masih bermasalah. Masalah tersebut antara lain belum selesainya proses administrasi tukar menukar Tanah Desa dengan tanah warga serta, sehingga belum dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan.

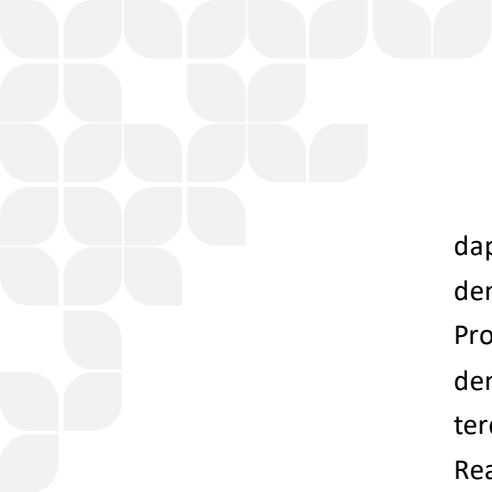
(2) Solusi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas (poin a) antara lain :

- (a) Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kantor Pertanahan terkait pelaksanaan pendaftaran pencatatan perubahan data sertifikat Tanah Desa yang berupa tanah pengganti hasil dari pelepasan Tanah Desa yang digunakan untuk kepentingan umum.
- (b) Perlu dilakukan koordinasi dengan kasultanan dan kadipaten terkait dengan proses izin tukar menukar dan pendampingan kepada Pemerintah Kalurahan dalam rangka pengumpulan bukti-bukti pelaksanaan tukar menukar Tanah Desa dengan tanah warga yang dilaksanakan sebelum tahun 1985.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Pada tahun 2022 kegiatan Urusan Pertanahan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.412.540.785,00 yang dibagi ke dalam 2 Program, 2 kegiatan, dan 10 sub kegiatan. Pertama, Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang mencakup sub kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Kedua, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan yang meliputi dua kegiatan dan 9 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja



dapat direalisasi sebanyak Rp7.128.332.199,00 (96,17%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Sementara untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp10.800.173.182,00 yang terdiri dari 1 Program, 7 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp10.381.363.465,00 (96,12%) dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.118. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1. Sinkronisasi regulasi penataan ruang (vertikal dan horisontal)	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			
			2. Menyebarluaskan informasi penataan ruang	Persentase pengajuan permohonan yang ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan	%	100	100
			3. Meningkatkan peran serta aparatur dan masyarakat dalam penataan ruang	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			
			4. Mewujudkan pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan penataan ruang antar wilayah dan sektoral	Bahan Penerbitan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	dokumen	1	1
			5. Mengefektifkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN			
			6. Mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan fungsi satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Bidang tanah kasultanan, tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	bidang	13877	13837
			7. Meningkatkan kualitas penataan administrasi pertanahan	Dokumen tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang dipelihara	Dokumen	66	109
			8. Mewujudkan penataan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa sesuai peruntukan	Penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	bidang	40	40
				Bidang tanah desa yang didaftarkan di BPN	bidang	8.000	8.824

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			9. Persentase peningkatan Budaya tak benda yang dilestarikan	persentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa	%	20.41	489,95
				Persentase pengajuan permohonan serat kekancingan yang ditindaklanjuti	%	100	100
				persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan	%	100	100
				Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
				Dokumen evaluasi pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Dokumen	1	1
				Identifikasi dokumen Keputusan Kepala Daerah DIY tentang pemberian Hak Atas Tanah	keputusan	500	500
				Dokumen Evaluasi Pendaftaran tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	dokumen	1	1
				Rekomendasi Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertipikat Tanah Desa	sertipikat	6734	6616
				Dokumen Verifikasi Tanah Enclave di DIY	Dokumen	1 (berita acara hasil verifikasi tanah enclave)	1 (berita acara hasil verifikasi tanah enclave)
				Survei bidang tanah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	Bidang	3367 bidang (4 kabupaten dan 1 kota)	3367 bidang (4 kabupaten dan 1 kota)
				Pemeliharaan Dokumen Pertanahan			
				Dokumen Administrasi Pertanahan yang Terawat dan Terpelihara	lembar	15000	15000
				Inventarisasi Dokumen Pertanahan di Desa	dokumen	1	1
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten			
				Pendampingan Pelayanan Operasional Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	persen	100	100
				Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di DIY	Dokumen	1	1
				Rekomendasi Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah	Dokumen	1	1
				Dukungan 100 % terhadap 1. Bidang tanah desa yang telah didaftarkan di BPN (5000 bidang); 2. Tersedianya perdes pemanfaatan tanah desa (15,31%); 3. Penerbitan rekomendasi permohonan serat kekancingan yang ditindaklanjuti (100%) 4. Penerbitan rekomendasi dokumen pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten (100%)	%	100	100
				Rekomendasi Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan tanah	Dokumen	1	1
				Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan			
				Hasil pembahasan usulan perubahan tahun n, rencana n+1 dan rencana n+2 urusan pertanahan	Dokumen	4	4
				Review Grand Desain Pertanahan	Dokumen	1	1
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan			
				Dokumen Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Pertanahan Tahap I, II dan III	Dokumen	3	3
				Dokumentasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Pertanahan 2018-2021	Dokumen	1	1
				Updating Database Sistem Informasi Database Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Dokumen	1	1
				Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan			
				Pengembangan aplikasi keistimewaan penatusahaan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	aplikasi	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Data Spasial Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah bersertifikat	bidang	2000	2000
				Dokumen Sinkronisasi Data Pertanahan	dokumen	1	1
				Pengembangan Sistem Otomasi Pengajuan Rekomendasi Kekancingan	aplikasi	1	1
				Dokumen Penelusuran data pertanahan	dokumen	1	1
				Dokumen Profil Penatagunaan Pertanahan di DIY	dokumen	1	1
				Cetak buku profil penatagunaan pertanahan di DIY	buku	300	300
				Updating Data Spasial Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang telah bersertifikat dalam sistem informasi pertanahan	sistem	1	1
				Dokumen Penelusuran Data Pertanahan	dokumen	1	1
				Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan INTANTARU BERINFO	aplikasi	1	1
				Masterplan pembangunan arsitektur data ousat data informasi pertanahan terpusat (<i>command center</i>)	dokumen	1	1
				Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten			
				Rekomendasi Kepala DPTR tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persen	100 (300 rekomendasi)	100 (300 rekomendasi)
				Penyebarluasan informasi urusan pertanahan keistemewaaan	paket	2 paket podcast 250 eks 2500 lembar	2 paket podcast 250 eks 2500 lembar 2 kali 1 paket
				Materi teknis Rapergub prosedur perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rekomendasi Kepala DPTR Izin Pemanfaatan Tanah Kalurahan	Persen	100 (70 rekomendasi)	100 (70 rekomendasi)
				Inventarisasi dan Digitalisasi Data Perdes	dokumen	1	1
				Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Lokasi	60	60
				Draft Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa	1 Draft	1	1
				Kajian Status Tanah Enclave dan Pengelolaannya	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Konsolidasi pemberdayaan kalurahan reforma agraria	dokumen	1	1
				Draft Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa	1 Draft	1	1
				Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa			
				Penanganan permasalahan keberatan dan sengketa dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan Pertanahan	Dokumen	1	1
				Koordinasi	%	100	100
				Inventarisasi permasalahan tanah desa	Dokumen	1	1
				Pendampingan penanganan permasalahan pertanahan (Kajian Hukum Tanah AB di DIY dan kajian hukum potensi konflik pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan kalurahan)	Dokumen	1	1
				Dukungan 100 % terhadap 1. Bidang tanah desa yang telah didaftarkan di BPN (5000 bidang); 2. Tersedianya perdes pemanfaatan tanah desa (15,31%); 3. Penerbitan rekomendasi permohonan serat kekancingan yang ditindaklanjuti (100%) 4. Penerbitan rekomendasi dokumen pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten (100%)	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan			
				Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan DIY	unit	5 unit computer PC 3 unit Printer 4 unit UPS / Stabilizer	5 unit computer PC 3 unit Printer 4 unit UPS / Stabilizer

5) *Urusan Lingkungan Hidup*

a) *Kondisi Umum*

Salah satu isu prioritas lingkungan hidup tahun 2022 yaitu penurunan kualitas dan kuantitas air. Masyarakat DIY yang tinggal di daerah bantaran sungai memanfaatkan air sungai dalam berbagai keperluan domestik maupun untuk pertanian. Kualitas air sungai sendiri terpengaruh oleh kegiatan dan aktivitas manusia. Kualitas air sumur yang berada di sekitar sungai juga terpengaruh oleh kualitas air sungai terutama pada musim kemarau.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu pemicu terhadap pencemaran air sungai. Laju pertumbuhan penduduk menyebabkan bertambahnya permukiman di daerah aliran sungai, semakin padat permukiman penduduk di daerah aliran sungai membuat pengendalian kualitas air sungai menjadi lebih sulit. Hal tersebut dikarenakan tidak semua masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai di Yogyakarta telah sadar akan pentingnya menjaga kebersihan sungai. Berdasarkan data dari BPS tahun 2022, rata-rata laju pertumbuhan penduduk di DIY pada tahun 2021 sebesar 1,61% dengan kepadatan penduduk tertinggi ada di daerah Kota Yogyakarta dengan kepadatan 11.579 jiwa/km².

Industri skala rumah tangga yang masih membuang limbah industrinya ke sungai juga memberikan tekanan terhadap kuantitas dan kualitas air sungai sehingga menyebabkan pencemaran terhadap air sungai. Hal ini terjadi dikarenakan tidak ada pemantauan khusus terhadap industri-industri kecil skala rumah tangga terhadap izin dan pengelolaan limbah yang terdapat di masing-masing industri. Selain itu, ditengarai masih banyak pedagang kaki lima yang membuang limbahnya langsung ke saluran drainase yang menimbulkan peningkatan pencemaran air sungai.

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) ini juga menjadi salah satu komponen penyusun dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Ketercapaian IKLH ini juga menjadi indikator kinerja urusan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022. Realisasi kinerja urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut.

Tabel 3.119. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	91,51	100	90,58	90,58	100	90,58

Sumber: DLHK DIY, 2023

Pada tahun 2022, realisasi capaian kinerja urusan lingkungan hidup mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2021. Penurunan ini terjadi sebesar 0,93% dari yang semula 91,51% menjadi 90,58%. Penurunan kinerja ini dipengaruhi oleh penurunan nilai IKLH dimana realisasinya juga tidak tercapai dibandingkan dengan targetnya.

Salah satu komponen IKLH yang harus menjadi perhatian yaitu nilai IKA yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sementara itu, nilai IKU memiliki kecenderungan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk nilai IKTL dari tahun ke tahun menunjukkan tren *V-shaped* dengan angka terendah pada tahun 2020 dan mulai mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Menggambarkan permasalahan dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2022, maupun permasalahan pelaksanaan urusan.

- (a) Belum optimalnya pengelolaan IPAL di TPA Regional Piyungan.
- (b) Salah satu penyebab belum optimalnya penanganan pencemaran air adalah karena belum tersedianya data sumber pencemar.

(2) Solusi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas (**point a**).

- (a) Penggunaan *seeding* bakteri anaerob dalam IPAL/kolam lindi. Dengan adanya sistem bioremediasi ini diharapkan prosesnya dapat lebih cepat, kualitas hasilnya lebih baik dan ramah lingkungan.
- (b) Melakukan kajian sumber pencemar yang selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan untuk meningkatkan nilai indeks kualitas air di DIY.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Alokasi anggaran untuk Urusan Lingkungan Hidup di tahun 2022 adalah sebesar Rp79.733.786.925,00. Secara fisik realisasi kinerjanya mencapai 100%, sedangkan secara keuangan realisasinya sebesar Rp74.608.224.748,00 atau sekitar 93,57% dari total pagu anggaran. Secara lebih detail, rincian realisasi kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.120. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 2. Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3. Mendorong pemanfaatan lingkungan hidup yang harmoni dengan daya dukung dan daya tampungnya; 4. Meningkatkan efektivitas perlindungan sumber daya alam dan fungsi lingkungan; 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan; 6. Meningkatkan efektivitas kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran udara; 7. Meningkatkan efektivitas kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian polusi; 8. Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengendalian perubahan iklim global dan penanggulangan dampak gas rumah kaca; 9. Meningkatkan sinergisitas dan memperjelas pembagian peran para pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran udara ambient. 10. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui Program Pengendalian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
					%	100	0
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100
				Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100
				Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	77.52
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	75.5
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	90.89
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Tersusunnya Ranwal Renstra OPD 2022 - 2027	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;				
			11. Meningkatkan peranserta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;	Tersusunnya Data Statistik LHK 2021	dokumen	1	1
			12. Mendorong pemanfaatan lingkungan hidup yang harmoni dengan daya dukung dan daya tampungnya;	Berita Acara Forum Perangkat Daerah	laporan	1	1
			13. Meningkatkan efektivitas perlindungan sumber daya alam dan fungsi lingkungan;	Tersusunnya ROPK 2022	dokumen	1	1
			14. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;	Tersusunnya Renja OPD 2023 dan Renja Perubahan 2022	dokumen	2	2
			15. Meningkatkan efektivitas kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran air sungai;	Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
			16. Mengembangkan dan meningkatkan sistem hukum lingkungan untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum;	Tersusunnya RKA-P Th 2022 dan DPPA Th 2022	dokumen	2	2
			17. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sampah;	Tersusunnya RKA Th 2023 dan DPA Th 2023	dokumen	2	2
			18. Peningkatan pembinaan bagi kelompok masyarakat peduli lingkungan.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			19. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi lintas perangkat Daerah untuk melaksanakan Program Penambahan Tutupan Vegetasi;	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	dokumen	12	12
			20. Meningkatkan aksesibilitas dengan para pemrakarsa kegiatan untuk fasilitasi lahan atau pengembangan tutupan vegetasi dan konservasi lahan.	Tersusunnya Laporan Tahunan 2021	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			21. Pembaharuan Sistem Tata Kelola Kehutanan	Tersusunnya Dokumen IKLH Tahun 2022	dokumen	1	1
			22. Mempertahankan keberadaan kawasan hutan	Tersusunnya LKjIP 2021	dokumen	1	1
			23. Pemantapan Kawasan Hutan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			24. Perencanaan Kehutanan yang Komprehensif dan berkesinambungan	Tersedianya Belanja Gaji Pegawai	tahun	1	1
			25. Peningkatan produktifitas dan nilai tambah sumber daya hutan dan fungsinya	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
			26. Optimalisasi Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber daya Hutan	Tersedianya Honor pengelola Keuangan	bulan	12	12
			27. Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
			28. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan	Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	dokumen	1	1
			29. Penguatan Kelembagaan dan SDM Kehutanan	Laporan Keuangan Tahunan Audited	dokumen	1	1
			30. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
			31. Peningkatan Kontribusi Kehutanan bagi Keberlanjutan Sektor Perekonomian lainnya	Laporan Keuangan Semester	dokumen	2	2
			32. Konservasi Keanekaragaman Hayati	Laporan Keuangan Bulanan	dokumen	12	12
			33. Peningkatan Manfaat Jasa Ekosistem	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
			34. Peningkatan Peran Hutan dalam Pemulihan Daya Dukung DAS	Tersedianya Honor pengelola Barang	bulan	12	12
			35. Rehabilitasi lahan dan pencegahan bencana alam	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			36. Optimalisasi dan Distribusi Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	12	12
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	jenis	46	46
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Tersedianya peralatan rumah tangga	jenis	25	25
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Terlaksananya penggandaan/ Fotocopy	lembar	128500	127500
				Terlaksananya pengadaan barang cetakan	jenis	13	13
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Tersedianya bahan bacaan 2 SKH	bulan	12	12
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	bulan	12	12
				Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	bulan	12	12
				Tersedianya Makan dan Minum Rapat	bulan	12	12
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	unit	1	1
				Pengadaan GPS mapping	unit	1	1
				Pengadaan PRINTER Officejet	unit	1	1
				Pengadaan Notebook/ Laptop	unit	2	2
				Pengadaan Alat fogging	unit	2	2
				Pengadaan LCD Projector	unit	1	1
				Pengadaan PRINTER Laserjet	unit	1	1
				Pengadaan Termogun	buah	5	5
				Pengadaan Webcam	buah	5	5
				Pengadaan Printer	unit	2	2
				Pengadaan PC/ Komputer	unit	2	2
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Pengadaan Almari Arsip	unit	3	3
				Pengadaan Alat Pendingin/ AC Panasonic	unit	2	2
				Pengadaan Alat Pendingin/ AC LG	unit	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengadaan Pannel Kontrol Pompa Balai Benih	unit	1	1
				Pengadaan Rak Arsip	unit	5	5
				Pengadaan tangga almunium	unit	1	1
				Pengadaan Pompa Air	unit	2	2
				Pengadaan Genset Kantor Induk DLHK DIY	unit	1	1
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Tersedianya Materai	lembar	637	637
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Terlaksananya Pembayaran Tagihan Sambungan Telepon, Tagihan Rekening Air, Tagihan Rekening Listrik	bulan	12	12
				Pengadaan akun virtual meeting	akun	4	4
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Tersedianya retribusi dan/atau pajak	tahun	1	1
				Belanja Jasa Kebersihan	tahun	1	1
				Tersedianya Pengadaan Jasa Keamanan	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	103	103
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Pemeliharaan PABX 28 Port dan Telepon	unit	2	2
				Pemeliharaan Telepon	unit	14	14

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemeliharaan Jaringan Internet Laboratorium Lingkungan DLHK - Kantor Wiyoro	paket	1	1
				Pemeliharaan Sound System dan Wireless Induk DLHK	unit	2	2
				Pemeliharaan Pompa Air	unit	4	4
				Pemeliharaan Pemotong Rumput Tahura	unit	2	2
				Pemeliharaan AC	unit	108	108
				Pemeliharaan Laptop/ Notebook	unit	45	45
				Pemeliharaan Faksimili	unit	1	1
				Pemeliharaan Mesin Ketik	unit	9	9
				Pemeliharaan Jaringan Internet DLHK	paket	2	2
				Pemeliharaan Filling Kabinet	unit	5	5
				Pemeliharaan Jaringan Telepon Laboratorium Lingkungan DLHK - Kantor Wiyoro	paket	1	1
				Pemeliharaan TV LCD	unit	1	1
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	buah	7	7
				Pemeliharaan Komputer/ PC	unit	60	60
				pemeliharaan Jaringan Listrik	paket	1	1
				Pemeliharaan Genset	unit	1	1
				Pemeliharaan Pemotong Rumput Balai Benih	unit	1	1
				Pemeliharaan Gergaji	unit	4	4
				Pemeliharaan PABX 20 Port dan Telepon	unit	1	1
				Pemeliharaan LCD	unit	4	4
				Pemeliharaan CCTV Induk DLHK	unit	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Pemeliharaan KM/WC BBH	paket	1	1
				Pemeliharaan atap/plafon ruang rapat balai Perbenihan Kehutanan	Paket	1	1
				Pemeliharaan Kantor Tahura	paket	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemeliharaan Gedung DLHK (Pembuatan Pintu Pagar Gedung Laboratorium Lingkungan DLHK)	paket	1	1
				Pemeliharaan atap bangunan Ruang Kepala Dinas	Paket	1	1
				Pemeliharaan Ruang Bidang P3KLH	paket	1	1
				Pemeliharaan Septitank Laboratorium Lingkungan DLHK	paket	1	1
				Pemeliharaan KM/WC Bidang RKA	paket	1	1
				Pemeliharaan Saluran Air Laboratorium Lingkungan DLHK	paket	1	1
				Pemeliharaan Rutin Gedung Laboratorium Lingkungan DLHK	paket	1	1
				Pemeliharaan KM/WC Laboratorium Lingkungan DLHK	paket	1	1
				Pemeliharaan Rutin Gedung DLHK	paket	1	1
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
				Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota	%	100	62.5
				Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota	%	100	100
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup			
				Dokumen IKPLHD	dokumen	1	1
				Terlaksananya Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis	bulan	12	12
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
				Jumlah sumber pencemar air sungai (point source) yang ditangani di 10 sungai	usaha/kegiatan	237	240

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source)	lokasi	120	214
				Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 kabupaten/kota	usaha/kegiatan	80	144
				Jumlah sumber pencemar air sungai (point source) yang ditangani di 10 sungai	usaha/kegiatan	237	240
				Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source)	lokasi	120	214
				Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 kabupaten/kota	usaha/kegiatan	80	144
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
				Inventarisasi Sumber Pencemar	paket	1	1
				Kajian Penetapan Kelas Air Sungai di DIY	dokumen	1	1
				Monitoring dan Evaluasi Jakstrada Pengelolaan Sampah	dokumen	1	1
				Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Mandiri	angkatan	15	15
				Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source) terhadap pelaku usaha/kegiatan	usaha/kegiatan	237	237
				Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air dan udara (Air laut, air sungai, air tanah, Udara ambien metode pasif)	dokumen	4	4
				Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di DIY	kab/ kota	5	5
				Pembinaan Pengelolaan Limbah B3	kab/ kota	5	5
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Roadmap Identifikasi Potensi Pengembangan Balai Laboratorium Lingkungan	dokumen	1	1
				Pemeliharaan Peralatan Laboratorium lingkungan	unit	9	9
				Kalibrasi Peralatan Laboratorium Lingkungan	unit	61	61
				Updating Dokumen Laboratorium Terakreditasi	dokumen	4	4
				Pelayanan Jasa Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan 48 Parameter	LHU	207	859
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
				Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (ha)	hektar	175	30
				Persentase Penurunan kerusakan hutan	%	0.1	0.7
				Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (ha)	hektar	175	1162.5
				Persentase Penurunan kerusakan hutan	%	0.1	0.7
				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati			
				Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati DIY	dokumen	1	1
				Rekomendasi Pengelolaan DAS DIY	dokumen	1	1
				Penyusunan Dokumen Rencana Teknis Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY Tahun 2023	dokumen	1	1
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
				Konservasi Lahan Pantai melalui Pemeliharaan Tanaman di Pantai Glagah, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo	ha	10	10
				Pembinaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan	angkatan	6	6

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Konservasi Daerah Tangkapan Air di Giritirto Purwosari, Gunungkidul	ha	9	9
				Penanaman Mangrove di Baros (DID)	ha	0.5	0.5
				Konservasi Daerah Tangkapan Air di Pengasih, Kulon Progo	ha	5	5
				Penanaman Aren	ha	5	5
				Pencegahan, Penanggulangan dan Tindak Lanjut Gangguan Keamanan Hutan	BDH	5	5
				Penhijauan Kawasan Perkotaan (DID)	batang	400	400
				Demplot Tanaman Habitat Kera Ekor Panjang	ha	5	5
				Penanaman Bambu	ha	6	6
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			
				Peningkatan SDM Pengamanan Hutan	angkatan	2	2
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
				Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY	%	56.25	37.5
				Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY	%	56.25	56.25
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			
				Terlaksananya Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	bulan	12	12
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan	kab/kota	5	5

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
				Berita Acara Pengawasan dan Pengendalian Ijin Usaha/ Kegiatan	usaha/ kegiatan	80	85
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH			
				Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Pengaduan Kasus Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan Hidup yang Masuk	bulan	12	12
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
				Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup	Penghargaan	3	10
				Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup	Penghargaan	3	22
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
				Sosialisasi Jogja Hijau	kali	5	4
				Penilaian/ Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Proklamasi)	kab/kota	5	5
				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Proklamasi, Pengelolaan Sampah Mandiri)	kab/kota	5	5
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
				Jumlah sampah yang dikelola di TPA regional	ton/hari	780	693
				Jumlah sampah yang dikelola di TPA regional	ton/hari	780	740
				Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional			
				Kajian Roadmap Pengurangan Sampah di DIY	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pembuatan Rencana Induk TPA Regional Piyungan	dokumen	1	1
				Laporan Pengawasan TPA Regional Piyungan	dokumen	1	1
				Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional			
				Monev Kinerja Pengolaan Sampah dan Penerimaan Retribusi	dokumen	2	2
				Merti TPA	kali	1	1
				Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan Sekitar TPA	lokasi	2	2
				Operasi dan Pemeliharaan Landfill	ha	10	10
				Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA	km	1.2	1.2
				Operasi dan pemeliharaan Mekanikal Elektrik	paket	1	1
				Operasi dan Pemeliharaan Jembatan timbang	unit	1	1
				Hasil Uji Kualitas Udara	jenis	1	1
				Tenaga Kerja Operasional dan Pemeliharaan TPA	orang	35	35
				Operasi dan Pemeliharaan Peralatan TPA	paket	1	1
				Operasi dan pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA	unit	1	1
				Pengadaan Perlengkapan K3	paket	1	1
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			
				Panel Otomatis Genset 100 KvA	unit	1	1
				Dosing Pump	unit	3	3
				Pompa Pengaduk	unit	2	2
				Filter (Grease Trap)	unit	1	1
				Digital water TDS, Temperature, pH meter	unit	1	1
				Flow Meter	unit	2	2

6) *Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*

a) *Kondisi Umum*

Perencanaan dan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan (adminduk) di DIY selalu diharmonisasikan dengan program nasional bidang adminduk yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan agar arah kebijakan nasional tetap sejalan dengan target sasaran pembangunan di daerah. Pada tahun 2022, fokus program kerja urusan adminduk di DIY diarahkan kepada peningkatan cakupan angka perekaman biometrik KTP-el penduduk berstatus wajib KTP dan pemilih pemula, peningkatan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-18 tahun dan peningkatan kepemilikan Kartu identitas Anak (KIA) bagi penduduk usia 0-17 tahun kurang satu hari sesuai dengan target RPJMN Kemendagri. Selain itu juga terdapat kegiatan kerja sama pemanfaatan KIA dengan lembaga swasta penyedia layanan publik, pengimplementasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, peningkatan jumlah lembaga pengguna data kependudukan, dan pembinaan aparatur Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-DIY dalam rangka mendorong percepatan inovasi pelayanan adminduk secara daring.

Upaya meningkatkan cakupan angka perekaman biometrik KTP-el, selama 2022 Pemda DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY berkolaborasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan terpadu jemput bola perekaman biometrik KTP-el dengan menysasar siswa SMA/ sederajat berusia 16 tahun ke atas. Target kegiatan yang spesifik menysasar anak sekolah ini dilaksanakan dalam rangka menjamin hak mereka sebagai pemilih pemula pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pelayanan terpadu perekaman biometrik KTP-el

diselenggarakan di 18 SMA/ sederajat yang ada di kabupaten/kota se-DIY dan telah berhasil merekam data biometrik 2.855 siswa. Sampai akhir tahun 2022, sebanyak 2.883.136 penduduk berstatus wajib KTP (99,71%) telah melakukan perekaman biometrik dari total wajib KTP di DIY sebesar 2.841.337 orang. Adapun jumlah penduduk DIY semester I 2022 mencapai 3.677.522 orang.



Gambar 3.39. Kegiatan pelayanan terpadu perekaman biometrik siswa di SMKN 2 Wonosari

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2023

Cakupan kepemilikan KIA di DIY dalam satu tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Bagi masyarakat yang tidak bersekolah dan disabilitas dilakukan dengan jemput bola. Sampai akhir 2022, jumlah anak pemegang KIA di DIY sebanyak 671.513 jiwa atau 79,12% terhadap total anak usia 0-17 tahun kurang satu hari yang mencapai 848.773 jiwa, naik 9,12% dibandingkan 2021. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran orangtua untuk menguruskan KIA bagi anak-anak mereka semakin tinggi. Hal ini juga didukung adanya berbagai program intervensi pemerintah daerah untuk mendongkrak

kepemilikan KIA seperti layanan jemput bola di sekolah-sekolah, penerbitan KIA bagi bayi lahir bersamaan dengan penerbitan akta kelahirannya, dan kerja sama pemanfaatan KIA berupa pemberian insentif oleh lembaga-lembaga penyedia layanan publik.



Gambar 3.40. Pemberian dokumen kependudukan (KTP-el dan KIA) bagi penyandang disabilitas pada Peluncuran Gerakan Bersama Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2023

Dalam rangka mewujudkan masyarakat inklusif serta mendukung pelayanan non-diskriminatif bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya pelayanan administrasi kependudukan, pada pertengahan tahun 2022 Pemda DIY telah mencanangkan Gerakan Bersama Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas. Tindak lanjut dari pencanangan ini adalah pendataan serta perekaman data penduduk penyandang disabilitas ke dalam database kependudukan untuk selanjutnya diterbitkan dokumen kependudukan berupa KTP-el atau KIA. Dengan adanya gerakan ini diharapkan penduduk penyandang disabilitas tidak lagi menemui keterbatasan dalam mendapatkan layanan publik. Kegiatan ini secara tidak langsung juga meningkatkan perekaman penduduk pemilih pemula Pemilu yang tidak terfasilitasi dalam pelayanan

terpadu di sekolah. Berdasarkan rilis Ditjen Dukcapil Kemendagri, pada semester I 2022 terdapat 15.644 penduduk disabilitas di DIY yang telah tercatat dalam database kependudukan.

Sebagai bentuk inovasi pelayanan, Kementerian Dalam Negeri telah membangun dan menerapkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang salah satu fungsinya sebagai KTP dalam bentuk digital, tersimpan di *smartphone*. Pada tahap awal implementasinya, sebagaimana instruksi Dirjen Dukcapil Kemendagri, Pemda DIY melakukan layanan penerbitan khusus bagi para ASN Pemda DIY dan Pemerintahan Kabupaten/Kota pada bulan Oktober 2022. Hal tersebut sebagai *kick-off* penerbitan IKD untuk masyarakat umum di wilayah DIY. Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY telah memperkenalkan keberadaan IKD melalui berbagai kegiatan. Saat ini IKD sudah dapat dinikmati oleh seluruh penduduk dengan cara mengurus di Kantor Dinas Dukcapil. Penerima IKD adalah penduduk berstatus wajib KTP dan memiliki *smartphone* berbasis android.

Menyongsong Pemilu dan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, Pemda DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melaksanakan Sosialisasi Pemilu dengan tema “Perlindungan Hak Pilih Penduduk”. Mulai pertengahan tahun 2022 rangkaian persiapan Pemilu telah dimulai termasuk di dalamnya penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) oleh Kemendagri kepada KPU. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk senantiasa memperbarui dokumen kependudukan terutama jika telah melakukan peristiwa kependudukan seperti pindah alamat, sebab jumlah penduduk yang akurat digunakan oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU) di antaranya sebagai dasar penghitungan kursi anggota legislatif dan penentuan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sosialisasi dilaksanakan di 15 kapanewon/kemantren dengan melibatkan DPRD DIY serta KPU dan Bawaslu kabupaten/kota. Target sasaran kegiatan ini adalah Pemberdaya Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan perwakilan tokoh masyarakat. Harapannya para peserta sosialisasi dapat menyebarkan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayahnya masing-masing terutama bagi para pemilih pemula Pemilu yang belum melakukan perekaman biometrik KTP-el.

Tabel 3.121. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 Terhadap Target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	Instansi	13	15	15	100	15	100

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2023

di Pemda DIY, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyediakan layanan publik telah mensyaratkan pencantuman NIK karena akan lebih mudah melakukan sinkronisasi dengan data kependudukan. Hingga 2022, Pemda DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY telah memberikan dukungan pemanfaatan dan akses data kependudukan bagi 15 OPD/lembaga di lingkungan Pemda DIY, antara lain:

- (1) Dinas Kesehatan DIY (digunakan untuk verifikasi data penerima bantuan jaminan kesehatan)
- (2) Dinas Sosial DIY (digunakan untuk verifikasi data penerima bansos)
- (3) Biro Bina Mental dan Spiritual
- (4) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY (digunakan dalam integrasi data pemohon)
- (5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY (digunakan dalam aplikasi perizinan HAKI online)
- (6) Rumah Sakit Panti Rapih (terintegrasi dengan layanan pendaftaran dan *database* pasien)
- (7) Rumah Sakit Ibu dan Anak Sadewa (terintegrasi dengan layanan pendaftaran dan *database* pasien)
- (8) Rumah sakit Bahayangkara (terintegrasi dengan layanan pendaftaran dan *database* pasien)
- (9) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga DIY (digunakan dalam penerimaan peserta didik baru secara online dan pemetaan sistem zonasi)
- (10) Dinas Komunikasi dan Informatika DIY (terintegrasi dalam aplikasi jogjapass)
- (11) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DIY (digunakan dalam aplikasi sibakul.jogjaprov.go.id)
- (12) Badan Kepegawaian Daerah DIY (melengkapi data kepegawaian di Simpeg)
- (13) Satpol PP DIY (verifikasi dan validasi data pelaku penggaran Peraturan Daerah DIY, dan Peraturan Kepala Daerah DIY)
- (14) Rumah Sakit Ghrasia (terintegrasi dengan layanan pendaftaran dan *database* pasien)
- (15) Dinas Tenaga Kerja DIY (Verifikasi dan validasi data pelapor permasalahan ketenagakerjaan di Pemda DIY).

Pendayagunaan data kependudukan juga dimanfaatkan setiap tahun untuk verifikasi jangka waktu lamanya domisili peserta seleksi penerimaan anggota Polri di Polda DIY.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Proses permohonan izin kerja sama pemanfaatan data kependudukan cukup memakan waktu.
- (b) Pemberlakuan syarat kepemilikan ISO 27001 tentang Standar Keamanan Informasi oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri kepada OPD yang akan mengajukan permohonan akses data kependudukan.

(2) *Solusi*

- (a) Mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mempercepat proses pemberian izin kerja sama pemanfaatan data kependudukan.
- (b) Melaksanakan sosialisasi tata cara pengurusan ISO 27001 tentang Standar Keamanan Informasi kepada OPD calon pengguna data.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Pada tahun 2022 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp998.143.956,00 yang terdiri dari APBD Rp569.332.000,00 dan SiLPA DAK 2021 Rp428.811.956,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 5 program dan 12 subkegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasikan sebesar Rp812.120.085,00 (81,36%) terdiri dari realisasi APBD Rp479.190.937,00 (84,17%) dan realisasi SiLPA DAK 2021 Rp332.929.148,00 (77,64%) serta realisasi fisik sebesar 100%.

Tabel 3.122. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BIRO TATA PEMERINTAHAN	1. Harmonisasi hubungan antar pemerintah dalam penyelesaian permasalahan perbatasan antar pemerintah daerah 2. Meningkatkan respon terhadap setiap perubahan kebijakan dalam proses tata kelola pemerintahan 3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam setiap tingkatan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa 4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM 5. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan 6. Meningkatkan jumlah intansi/lembaga pengguna data kependudukan untuk kebutuhan verifikasi dan validasi status kependudukan 7. Mendorong kerja sama antarinstansi/lembaga yang berdampak pada percepatan pelayanan serta perbaikan kualitas data kependudukan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Jumlah persentase kepemilikan KTP-EI, akta kelahiran, dan akta kematian dibagi tiga Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Orang Terlantar, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran) Dukungan sebesar 3,08 % terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian) Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan Instansi yang memanfaatkan data kependudukan Dukungan sebesar 3,08 % terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian) PROGRAM PENCATATAN SIPIL Jumlah persentase kepemilikan KTP-EI, akta kelahiran, dan akta kematian dibagi tiga	%	87,97	99,33
					%	100	100
					instansi	2	2
					%	100	100
					%	87,97	99,33

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota			
				KTP-el yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu	KTP	2.000	2.855
				Terselenggaranya Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lintas Kab/ Kota se-DIY	kali	2	2
				KIA yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu	KIA	750	982
				Blanko KIA	keping	10.000	10.000
				Dukungan sebesar 11,2 % terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	%	100	100
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
				Jumlah persentase kepemilikan KTP-El, akta kelahiran, dan akta kematian dibagi tiga	%	87,97	99,33
				Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
				Masyarakat yang memahami Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	orang	300	300
				Dukungan sebesar 13,27 % terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta Kelahiran Anak, Akta Kematian)	%	100	100
				Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			
				Lembaga yang dikoordinasi dan bekerjasama dalam Insentif Anak di DIY	lembaga	5	5
				Dukungan sebesar 13,27 % terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	%	100	100
				Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Pengelolaan Informasi		

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan sebesar 13,27 % terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian) : 100 %	%	100	100
				Masyarakat yang sadar Adminduk	orang	600	650
				Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
				Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Adminduk di Kabupaten/Kota	dokumen	1	1
				Dukungan sebesar 61,94 % terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	%	100	100
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
				Jumlah persentase kepemilikan KTP-El, akta kelahiran, dan akta kematian dibagi tiga	%	87,97	99,33
				Penyediaan Data Kependudukan Provinsi			
				Dukungan sebesar 10,48 % terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	%	100	100
				Konten yang dikembangkan dari sistem informasi kependudukan	konten	2	2
				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain			
				Profil perkembangan kependudukan	dokumen	1	1
				Dukungan sebesar 10,48 % terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	%	100	100
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
				Peningkatan pemahaman kebijakan adminduk bagi masyarakat dan atau petugas adminduk.	Orang	120	120
				Sosialisasi program adminduk melalui media cetak dan elektronik	Jenis	4	4
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
				Peningkatan kapasitas aparatur adminduk di Kabupaten/Kota	Orang	90	90
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Penyelesaian permasalahan adminduk di daerah	Laporan	1	1

7) *Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

a) *Kondisi Umum*

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi sebuah tantangan dan peluang besar bagi pemerintah melaksanakan pembangunan di Desa melalui kebijakan program yang relevan. Mendorong kemandirian masyarakat dan desa dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup menjadi salah satu upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui penguatan lembaga kemasyarakatan dan penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Titik tolak dari konsep pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya serta mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia setempat sebaik mungkin.

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada periode tahun 2017-2022 diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu jumlah rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan.

Tabel 3.123. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rumusan bahan Kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat	Dokumen	4	4	4	100	4	100
2	Lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	Lembaga	4	4	4	100	4	100

Sumber: Biro Bermas Setda DIY, 2023

Target dari indikator sasaran Rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan pada tahun 2022 adalah 4 rumusan kebijakan dan terealisasi 4 Rumusan bahan kebijakan. Berdasarkan capaian tersebut maka persentase capaian pada tahun 2022 adalah 100% antara lain;

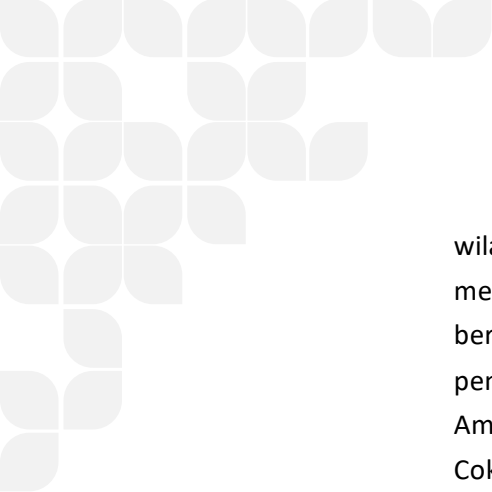
- (1) Peraturan Gubernur DIY Nomor 88 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta Layak Anak Tahun 2023-2027,
- (2) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan Dalam Rangka Proses Usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,
- (3) Surat Edaran Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 463-05155 tentang Hasil Kajian Kenakalan Anak di Jalanan di DIY
- (4) Surat Edaran Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 460-07298 tentang Kesiapan DIY Menuju Provinsi Inklusi.

Sementara itu target dari indikator sasaran Lembaga Kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan pada tahun 2022 adalah 4 (empat) lembaga dengan realisasi empat lembaga yaitu TP-PKK, Posyandu, BUMDes dan LPMD/K.

Berdasarkan realisasi tersebut, maka capaian pada tahun 2022 adalah 100%. Pencapaian indikator kinerja sasaran dilakukan dengan Fasilitasi dan Pendampingan TP PKK DIY, Pembinaan terhadap posyandu, Pembinaan LPMD/K serta Pembinaan Bumdes melalui pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengurus/pengelola Bumdes .

Pada Tahun 2022 telah dilakukan pembinaan dan pelatihan pengelolaan 42 BUMDes di 4 Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pembinaan Posyandu melalui lomba posyandu, Pelatihan LKD, Fasilitasi LPMD/K yang dilakukan melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat baik dibidang fisik maupun non fisik di 15 Lokasi Kabupaten /Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan TMMD melibatkan unsur pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, TNI, dan Masyarakat baik dari segi sumber daya maupun anggaran.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan melalui Kegiatan Global Gotong Royong (G2R) dan Gerakan Paseduluran Segoro Amarto untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembinaan G2R Tetrapeneur DIY Tahun 2022 dilakukan di Kalurahan Donoharjo Ngaglik Sleman, Kalurahan Banaran Playen Gunungkidul, Kalurahan Karangwuni Wates Kulon Progo, Kalurahan Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo, Kalurahan Kalirejo Kokap Kulon progo, serta Kalurahan Sumberejo Tempel Sleman. Kegiatan Segoro Amarto merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat di



wilayah Kota Yogyakarta dengan asas musyawarah untuk merumuskan kebutuhan kegiatan yang akan dilakukan bersama berdasarkan minat dan potensi dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Adapun kegiatan Segoro Amarto telah dilaksanakan di Kelurahan Bener, Cokrodiningratan, Tegalpanggung, Ngampilan, Wirobrajan.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Menurunnya nilai-nilai kegotongroyongan di dalam masyarakat.
- (b) Pengelolaan lembaga kemasyarakatan masih kurang optimal.
- (c) Angka kemiskinan DIY masih cukup tinggi.

(2) *Solusi*

- (a) Menumbuhkan kembali dan memanfaatkan nilai-nilai kegotongroyongan masyarakat dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa serta peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat Desa melalui global gotong royong dan segoro amarto.
- (b) Meningkatkan kapasitas pengelola Lembaga Kemasyarakatan melalui bimbingan teknis.
- (c) Melaksanakan gerakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kerja sama dan sinergitas dengan para pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

c) ***Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022***

Pada Tahun 2022 secara keseluruhan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan melalui program kegiatan dengan alokasi Rp6.588.603.500,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 4 Program 11 kegiatan dan 13 Subkegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp6.462.284.204,00 (98,08%) dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.124. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui KIE dan pendampingan di wilayah prioritas daerah (IPM dan kantong kemiskinan) 2. Percepatan Peningkatan Keberdayaan lembaga masy diprioritaskan pada peningkatan kapasitas pengelola lembaga masyarakat dan Bumdes. 3. Peningkatan cakupan jumlah layanan Bumdes dengan membentuk Bumdes baru dan menyehatkan Bumdes yang telah terbentuk namun kurang aktif. 4. Peningkatan cakupan kerja sama antar Kabupaten/ Kota, Desa/ Kelurahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Desa/kelurahan model gotong royong Desa/kelurahan model gotong royong Pengembangan Kewirausahaan Desa pengembangan 6 desa model gotong royong terwujud % implementasi desa global gotong royong desa Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa Sosialisasi Keistimewaan bagi PKK dan Dharmawanita kali peningkatan kapasitas SDM,penerapan teknologi,dan pendampingan inovasi perdesaan terwujud % Tersusunnya pendataan dan pendayagunaan profil desa /kelurahan dan kelurahan Kota Profil video 6 Kalurahan/Kelurahan istimewa (6 besar lomba pemberdayaan kalurahan DIY 2021) Kalurahan Tersusunnya pendataan dan pendayagunaan profil desa/ kalurahan dan kelurahan Kabupaten	Desa Desa	6 6	6 6

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Profil video 6 Kalurahan/Kelurahan istimewa (6 besar lomba pemberdayaan kalurahan DIY 2021)	Kelurahan	2	2
				Tersusunnya pedoman pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan berdasarkan budaya DIY	Dokumen	1	1
				Terwujudnya pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan	lembaga	1	1
2	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui KIE dan pendampingan di wilayah prioritas daerah (IPM dan kantong kemiskinan) 2. Percepatan Peningkatan Keberdayaan lembaga masy diprioritaskan pada peningkatan kapasitas pengelola lembaga masyarakat dan Bumdes. 3. Peningkatan cakupan jumlah layanan Bumdes dengan membentuk Bumdes baru dan menyehatkan Bumdes yang telah terbentuk namun kurang aktif. 4. Peningkatan cakupan kerja sama antar Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Renja Perubahan 2022	dokumen	1	1
				Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah di tetapkan	%	100	100
				LKJIP	dokumen	1	1
				Renstra	dokumen	1	1
				Renja 2023	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ropk 2022	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
				DPPA	dokumen	1	1
				DPA	dokumen	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				penatausahaan / pengujian verifikasi keuangan skpd	tahun	1	1
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				penatausahaan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku	tahun	1	1
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				makanan dan minuman rapat	tahun	1	1
				koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	tahun	1	1
				jasa komunikasi online/zoom	akun	1	1
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD			
				Pengadaan website skpd	paket	1	1
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Air Conditioner (AC)	unit	1	1
				Notebook	unit	2	2
				Komputer	unit	5	5
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				barang cetakan	jenis	8	8
				Bahan bacaan dan peraturan perundangan	jenis	2	2
				surat masuk	surat	3000	3000
				surat keluar	surat	2000	2000
				Penggandaan	tahun	1	1
				Alat tulis kantor,Kertas-Cover, bahan komputer	jenis	29	29
				komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	5	5
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2	unit	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional roda 4	unit	4	4
				penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional roda 2	unit	2	2
				pemeliharaan kendaraan dinas / operasional roda 4	unit	4	4
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	4	4
				PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			
				Desa/kelurahan model gerakan gotong royong	kelurahan	6	6
				Desa/kelurahan model gerakan gotong royong	kelurahan	6	6
				Jumlah pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Lembaga	4	3
				Jumlah pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Lembaga	4	4
				Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			
				Implementasi gerakan gotong royong Segoro Amarto	kelurahan	6	6
				Monitoring dan evaluasi kebijakan bidang sosial	Laporan	1	1
				Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang sosial	laporan	1	1
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
				Pelaksanaan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	kab/kota	5	5
				Penguatan LKD (LPMD/K, Posyandu, PKK)	Lembaga	3	3
				Bantuan kelembagaan LPMD/K pada lokasi TMMD	Lokasi	15	15
				Bantuan kelembagaan TP-PKK	Lembaga	1	1
				Peningkatan kapasitas pengelola Bumdesa	Bumdesa	28	28
				Pemberdayaan 4 lembaga kemasyarakatan terlaksana	%	100	100
				PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rumusan Bahan Pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	dokumen	4	1
				Rumusan Bahan Pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	dokumen	4	4
				Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			
				Rumusan kebijakan bidang sosial	Dokumen	2	2
				Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang PP-PA	laporan	1	1
				Tersedia rumusan bahan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat	dokumen	4	4
				Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat	laporan	1	1
				Monitoring dan evaluasi kebijakan bidang PP-PA	Laporan	1	1
				Rumusan kebijakan bidang PP-PA, KB-KS dan Pengendalian Penduduk	Dokumen	2	2
				Monitoring dan evaluasi kebijakan bidang KB-KS dan Pengendalian penduduk	laporan	1	1
				Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang KB-KS dan Pengendalian Penduduk	laporan	1	1

8) *Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

a) *Kondisi Umum*

Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang tangguh dan mampu menjadi pilar kehidupan masyarakat yang berkarakter, religius, berbudaya, maju, mandiri dan sejahtera. Pembangunan Keluarga Berencana diarahkan untuk mewujudkan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) guna melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Sasaran pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan dengan indikator umur menikah pertama perempuan. Sasaran kedua adalah meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia dengan indikator Persentase Legalitas Keluarga (Perkawinan dan Kelahiran).

Capaian pada tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.125. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022*			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Umur	25,35	24,40	25,75	105,53	24,4	103,89
2	Persentase legalitas keluarga (Perkawinan dan Kelahiran)	%	105,61	98,00	107,43	109,62	98,00	107,77

Sumber: Kemenag DIY Semester I tahun 2022, 2023 (data diolah DP3AP2)

Indikator Sasaran rata-rata usia perkawinan mempunyai capaian umur 25,57 lebih tinggi dari target umur 24,40. Sehingga target akhir RPJMD pada tahun 2022 tercapai. Berikut ini adalah rincian data rata-rata usia menikah perempuan di DIY tahun 2022 :

Tabel 3.126. Data Rata-Rata Usia Menikah Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Usia Menikah	Jumlah Menikah (n)	Nilai Tengah (F)	F x n	Rata-Rata Usia Nikah (Fxn/Jumlah Menikah)
1	< 19	111	19	2.109	19
2	19-21	645	20	12.900	20
3	21-30	2.485	25,5	63.368	25,5
4	30+	1.192	30	35.760	30
		4.433		114.137	
Rata-Rata Usia Menikah Perempuan				25,75	

Sumber: Kemenag DIY Semester I tahun 2022, 2023 (data diolah DP3AP2)

Faktor yang mendorong keberhasilan capaian indikator tersebut adalah tingginya kesadaran penduduk untuk mempersiapkan keluarga yang tangguh dengan tidak menikah di usia muda, sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan serta sudah adanya koordinasi yang lebih baik pada forum kesehatan reproduksi yang ada di provinsi. Selain itu peluang perempuan untuk mendapatkan akses di ranah publik yang semakin terbuka, serta sudah tersusunnya media advokasi bagi remaja tentang kesehatan reproduksi juga turut berperan. Tugas selanjutnya adalah mempertahankan umur ideal pertama perempuan melahirkan antara umur 21 sampai dengan 30 tahun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas keluarga.

Indikator sasaran Persentase legalitas keluarga (Perkawinan dan Kelahiran) pada tahun 2022 mempunyai capaian 107,43% lebih tinggi dari target 98%. Sehingga target pada akhir periode RPJMD tercapai. Indikator ini di hitung dengan menjumlahkan persentase legalitas perkawinan ditambah persentase legalitas kelahiran dibagi 2. Jumlah kepemilikan

legalitas perkawinan adalah jumlah penduduk yang memiliki akte perkawinan dihitung dari jumlah KK menikah dan jumlah KK Cerai mati. Jumlah kepemilikan legalitas kelahiran adalah Jumlah penduduk usia bawah 5 tahun menurut kepemilikan Akta Kelahiran dibagi jumlah seluruh Penduduk Usia Bawah Lima Tahun x 100 %. Data semester I tahun 2022 yang diperoleh dari Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sebagai berikut :

- (a) Jumlah KK : 1.269.857;
- (b) Jumlah Penduduk yang memiliki Akte Perkawinan : 1.462.381;
- (c) Persentase Legalitas Perkawinan $1.462.381/1.269.857 \times 100 \% = 115,16\%$;
- (d) Jumlah seluruh Penduduk Usia Bawah 5 tahun : 218.109;
- (e) Jumlah Penduduk Usia Bawah 5 tahun menurut kepemilikan Akta Kelahiran 217.446;
- (f) Persentase legalitas kelahiran $217.446/218.109 \times 100 \% = 99,70\%$;
- (g) Persentase legalitas perkawinan ditambah persentase legalitas kelahiran dibagi 2 adalah : $(115,16 \% + 99,70 \%) : 2 = 214,86 \% : 2 = 107,43\%$.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran didukung melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pernikahan secara sah sesuai peraturan perundangan dan peningkatan pelayanan bagi bayi baru lahir untuk mendapatkan akta kelahiran sekaligus kartu identitas anak, serta upaya serius untuk menyelesaikan kasus kasus administrasi kependudukan.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

Menggambarkan permasalahan dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2022, maupun permasalahan pelaksanaan urusan.

- (a) Terjadinya kejahatan jalanan yang dilakukan oleh penduduk usia anak dengan dilatari oleh kondisi keluarga yang tidak dapat menjalankan fungsi keluarga dengan baik.
- (b) Masih adanya kasus administrasi kependudukan karena pernikahan siri dan anak yang lahir dengan asal usul yang kurang jelas.

(2) *Solusi*

- (a) Penguatan ketahanan keluarga melalui pembinaan kesetaraan gender dalam keluarga, pemantapan lembaga penyuluh pernikahan, dan penguatan jejaring Ketahanan Keluarga lintas secara lintas sektor.
- (b) Peningkatan peran serta Satgas PPA, dan Peksos dalam penyelesaian kasus administrasi kependudukan.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2022 dilaksanakan melalui 4 Program, 6 kegiatan dan 11 Subkegiatan. Anggaran yang tersedia sebesar Rp1.250.832,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.206.590.928,00 (96,46%), serta pencapaian fisik sebesar 100%. Rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.127. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan /Indikator	Satuan	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEREMPUAN, ANAK DAN PENDUDUK	PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Rata-rata jumlah anak per keluarga	Rasio	1.17	1.11
				Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk				
				Sub kegiatan Penyerasian Kenijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
				Koordinasi Pengendalian Penduduk	Kali	3	3	
				Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi GDPK				
				Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk yang terlaksana	Kali	2	2	
				Sosialisasi Juknis Kependudukan	Kali	1	1	
				Penayangan Media Animasi	Kali	24	24	
				Presentasi tentang kependudukan				
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA				
			Hanya ada satu keluarga	Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan lokal				
				Sub kegiatan Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui Mitra Kerja				
				Sosialisasi Kespro dimasyarakat	Angkatan	26	26	
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
				Raso kekerasan dalam keluarga	Rasio	0.0013	0.001	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA				
			Pembentukan sistem konseling keluarga yang holistik dan Pengembangan dan penguatan jejaring dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
				Sub Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
				Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera	Desa	5	5	

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan /Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera	Desa	5	5
				Subkegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana			
				Evaluasi pendewasaan Usia Perkawinan	Dokumen	1	1
				Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pendirian Pik R	Pelaksanaan PIK-R Kelompok	3	3
				Pembinaan PIK R	Kelompok	3	3
				Fasilitasi FP2KRR	Forum	1	1
				Sub Kegiatan Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi PIK - R, Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaj dan Sarana Prasarana lainnya yang dibutuhkan			
				Advokasi/KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Paket	1	1
			Integratif sesuai dengan rancangan Grand Design Ketahanan Keluarga	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
				Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			
				Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan anak kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			
				Advokasi Pendidikan Ketahanan Keluarga	Kali	2	2
				Koordinasi dan sinkronisasi ketahanan keluarga di DIY	Kali	1	1
				Pemantapan lembaga penyuluh pernikahan	Lembaga	2	2
				Pembinaan ketahanan keluarga	Kali	1	1
				Implementasi ketahanan keluarga	Kali	1	1
				Koordinasi penyusunan data pilah keluarga	Kali	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan /Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kab/kota			
				Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kab/kota			
				Subkegiatan Pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi KG dan Perlindungan Anak kewenangan provinsi			
				Sosialisasi ketahanan keluarga	Kali	32	32
				Seminar ketahanan keluarga	Paket	1	1
				TOT Ketahanan keluarga sejahtera	Angkatan	1	1
				KIE dan sosialisasi ketahanan keluarga	Kali	1	1

9) *Urusan Perhubungan*

a) *Kondisi Umum*

Penyelenggaraan layanan transportasi yang prima, khususnya di DIY tidak dapat terpisahkan dari kesatuan sistem jaringan transportasi yang terpadu dalam satu kesatuan Urusan Perhubungan. Berdasarkan Perda DIY Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2019 – 2039 sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara.

Urusan Perhubungan di DIY pada saat ini berkonsentrasi pada pengembangan sistem jaringan transportasi darat guna menghubungkan antar pusat kegiatan primer dan sekunder serta menghubungkan antar pusat kegiatan (baik primer maupun sekunder) dengan kota-kota di sekitar wilayah DIY. Pengembangan sistem jaringan transportasi darat tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem jaringan jalan, sistem lalu lintas dan angkutan jalan serta sistem jaringan kereta api.

Guna mendukung pengembangan sistem jaringan transportasi darat tersebut, maka pada periode perencanaan tahun 2017 hingga tahun 2022 arah kebijakan Urusan Perhubungan yang dilakukan meliputi peningkatan kinerja penyediaan layanan angkutan umum serta tingkat pelayanan jalan dengan target dari 43,67% di tahun 2017 menjadi 49,79% di tahun 2022.

Pada tahun 2022, target dan realisasi Kinerja Urusan Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.128. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan	%	50,17	49,79	52,24	104,92	49,79	104,92

Sumber: Dishub DIY, 2023

Pada tahun 2022 capaian indikator Kinerja penyediaan layanan angkutan umum dan tingkat pelayanan jalan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 49,79% dengan capaian sebesar 52,24%. Sehingga persentase capaian tahun 2022 terhadap target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 104,92%. Capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 tersebut merupakan kontribusi dari kinerja penyediaan layanan angkutan umum sebesar 81,50% serta tingkat pelayanan jalan sebesar 23,34%.

- (1) Parameter yang digunakan dalam perhitungan penyediaan layanan angkutan umum adalah :
 - (a) Persentase cakupan wilayah angkutan umum perkotaan dan capaian SPM sampai dengan tahun 2022 sebesar 81,50% diperoleh dari indikator:
 - Cakupan wilayah angkutan perkotaan
Cakupan layanan angkutan umum perkotaan sejak tahun 2020 - 2022 telah melayani 25 kecamatan di kawasan Perkotaan Yogyakarta dan pada tahun 2022 Pemda DIY menambah rute layanan dengan trayek Yogyakarta-Palbang sehingga secara keseluruhan melayani 26 kecamatan atau melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 104%.

- Kualitas standar SPM untuk angkutan umum

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, serta PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Dalam peraturan tersebut terdapat 6 sub indikator penilaian, yaitu Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan, Keterjangkauan, Kesetaraan, dan Keteraturan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan pengembangan trayek angkutan perkotaan, nilai SPM Angkutan Perkotaan Trans Jogja sebesar 94,03% jauh lebih tinggi dibandingkan SPM Angkutan Perkotaan Regular sebesar 25% sehingga rata-rata nilai SPM angkutan perkotaan adalah 59,43% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada akhir periode sebesar 52,5%.


- (b) Mempertahankan kecepatan lalulintas di jalan provinsi dan perkotaan pada kawasan prioritas

- Dalam mempertahankan kecepatan lalu lintas rata-rata pada jalan kolektor primer (40 km/jam) di jalan provinsi, dengan nilai 30%. Hasil capaian pada tahun 2022 sebesar 23,33%. Hal ini tercapai karena adanya pengaturan waktu siklus pada simpang yang berada di jalan provinsi melalui ATCS, Pengawasan *Mobile* terhadap gangguan hambatan simpang pada ruas jalan

provinsi (Mlati, Seyegan, Godean dan Moyudan) dan Penertiban terhadap ODOL (*Over Dimension Over Loading*).

- Mempertahankan kecepatan lalu lintas rata-rata jalan perkotaan sebesar 20 km/jam di kawasan prioritas (Terban, Seturan, Kranggan, Godean), dengan nilai 16,67%. Hasil capaian pada tahun 2022 menghasilkan nilai 16,67% dari target nilai 16,67%. Hal ini tercapai karena adanya kegiatan pengawasan dan penegakan hukum lalulintas rutin dilakukan pada 4 kawasan strategis perkotaan tersebut.
- (2) Parameter yang digunakan dalam penghitungan kinerja tingkat pelayanan jalan (*level of service*) yaitu kinerja ruas jalan di perkotaan serta kinerja ruas jalan provinsi. Pengkategorian jalan provinsi jika ditinjau dari aspek hierarki jalan dengan sistem jaringan jalan menurut wewenang pembinaannya, maka kategori jalan yang termasuk ke dalam jalan provinsi adalah sebagai berikut:
- (a) Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan Ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota,
 - (b) Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar Ibukota Kabupaten/Kota, serta
 - (c) Jalan lain yang mempunyai kepentingan strategis terhadap kepentingan provinsi.

Penilaian kinerja ruas jalan perkotaan berada pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang telah ditentukan. Kawasan tersebut berada di Kawasan Kranggan, Terban, Seturan dan Godean. Ruas jalan pada keempat kawasan tersebut dikategorikan sebagai jalan lokal primer yang mempunyai kepentingan strategis terhadap kepentingan provinsi. Ruas



jalan di kawasan tersebut didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 meter. Guna memenuhi capaian target pada kawasan tersebut maka dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa pemasangan rambu, penerapan jalan searah serta kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas.

Sedangkan pada ruas jalan kolektor primer yang berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, ruas jalan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 meter. Terdapat 97 (sembilan puluh tujuh) ruas jalan yang merupakan ruas jalan provinsi, yaitu 15 ruas jalan berlokasi di Kabupaten Sleman, 21 ruas jalan berlokasi di Kabupaten Bantul, 38 Ruas jalan berlokasi di Kabupaten Gunungkidul serta 23 Ruas jalan berlokasi di Kabupaten Kulon Progo.

Dari hasil studi evaluasi kinerja ruas jalan dan simpang di DIY tahun 2022, diperoleh nilai rata-rata kecepatan lalu lintas di kawasan perkotaan adalah 27,5 km/jam, sedangkan kecepatan lalu lintas di ruas jalan provinsi adalah 41,4 km/jam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut dapat tercapai karena kecepatan rata-rata di jalan kolektor primer (jalan provinsi) di atas atau sama dengan 40 km/jam.

b) *Permasalahan dan Solusi*


(1) *Permasalahan*

Menggambarkan permasalahan dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2022, maupun permasalahan pelaksanaan urusan.

- (a) Minat masyarakat untuk menggunakan Angkutan Umum masih minim.
- (b) Kualitas SPM Angkutan Umum belum optimal, salah satu contoh yaitu masih tingginya *Headway* di beberapa trayek Trans Jogja;
- (c) Banyaknya akses-akses jalan dan parkir di pinggir jalan yang menyebabkan hambatan dan kemacetan.

(2) *Solusi*

- (a) Meningkatkan kualitas layanan yang meliputi Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan, Keterjangkauan, Kesetaraan, dan Keteraturan pada operasional angkutan umum perkotaan Trans Jogja. Selain itu perluasan sosialisasi tidak hanya dikalangan pelajar tetapi juga masyarakat umum.
- (b) Melakukan evaluasi terkait tingginya *Headway* serta kemungkinan penambahan armada pelayanan maupun rekayasa lalu-lintas bila hal tersebut disebabkan karena kemacetan;
- (c) Upaya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dengan pemasangan *water barrier* (penghalang) atau *traffic cone* (kerucut lalu lintas) sehingga dapat meminimalisasi konflik lalu lintas (*crossing*) dan mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas. Hal ini telah dilakukan di beberapa ruas jalan yang terhubung dengan jalan-jalan akses (simpang). Selanjutnya, Upaya Pengendalian dan Pengawasan, dengan cara melakukan patroli rutin di ruas-ruas jalan yang memiliki hambatan samping tinggi (seperti parkir), serta melakukan penertiban terhadap kendaraan-kendaraan yang parkir tidak



pada tempatnya (seperti pada badan atau bahu jalan).

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Pelaksanaan Urusan Perhubungan pada tahun 2022 dialokasikan ke dalam 5 program dan 49 subkegiatan melalui DPPA Tahun 2022 dengan belanja sebesar Rp123.773.493.768,00. Adapun realisasi anggaran dari pagu tersebut sebesar 93,38% atau Rp115.577.531.387,90 dengan pencapaian fisik 100%.

Tabel 3.129. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PERHUBUNGAN	1. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan 2. Penyelenggaraan sosialisasi keselamatan lalu lintas 3. Penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum 4. Peningkatan kinerja angkutan umum 5. Peningkatan tertib perizinan angkutan 6. Penyediaan dan peningkatan simpang bersinyal 7. Peningkatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kajian tentang Pengelolaan dan Bentuk Kerja sama Lahan UPN Ketandan Video Promosi Andong Jogja sebagai Angkutan Istimewa Dialog Transportasi Daerah Istimewa Yogyakarta Kajian Pendataan, Pendaftaran Jenis, Jumlah, dan Penetapan Wilayah Operasi Transportasi Tradisional Penataan Lalu Lintas di Kawasan Harritage City : Operasional Petugas Jogo Margo Prototype Becak Listrik Terpeliharanya Pelican Crossing dan terpasangnya zebra cross pada Jalan Malioboro sejumlah 3 unit dan jalan Margo utomo sejumlah 2 unit Kajian Pengurangan Karbon di DIY	% % % dokumen Video Kali dokumen Orang Unit Lokasi Dokumen	21.67 21.67 21.67 1 1 1 1 72 4 5 1	0 27.78 27.78 1 1 4 5 1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan			
				APILL ATCS S3 Srandakan	simpang	1	1
				APILL ATCS S4 Brosot	simpang	1	1
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede			
				Pengadaan dan pemasangan Warning Light unit Tenaga Surya		2	2
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	1. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			2. Penyelenggaraan sosialisasi keselamatan lalu lintas	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100
			3. Penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	81.89
			4. Peningkatan kinerja angkutan umum	Persentase penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100
			5. Peningkatan tertib perizinan angkutan	Persentase penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	72.97
			6. Penyediaan dan peningkatan simpang bersinyal	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	62.74
			7. Peningkatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100
				Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perparkiran	penumpang per hari	4700	5042
				Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir	SRP	830	860
				Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perparkiran	penumpang per hari	4700	5042
				Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	%	100	97.01
				kendaraan yang terlayani pada tempat khusus parkir	SRP	830	860
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Tersedianya Publikasi kepada masyarakat tahun tentang Persoalan Umum Transportasi dan Lalu Lintas di DIY		1	1
				Tersedianya ROPK tahun 2022	dokumen	1	1
				tersedianya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2022	dokumen	1	1
				Tersedianya dokumen rencana kerja (RENJA) 2023	dokumen	1	1
				Publikasi kepada masyarakat tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di DIY	Paket	1	1
				Rancangan Awal Rencana Strategis (Ranwal RENSTRA) Dinas Perhubungan	dokumen	1	1
				Dokumen RKBMD 2022	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
				Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 2022	Dokumen	1	3
				Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2023	Dokumen	1	1
				Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2023	Dokumen	1	1
				Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) 2022	Dokumen	1	3
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Bahan Penyusunan LKPJ dan LPPD urusan Perhubungan 2021	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	dokumen	1	1
				Tersusunnya LKJIP tahun 2021	Dokumen	1	1
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	tahun	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Tersedia jasa pengelola administrasi keuangan	10 bulan orang	12	12
				Tersedianya Jasa Pengelola BMD 2 Orang	bulan	12	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Tersusunnya Laporan Keuangan tahunan	dokumen	1	1
				Laporan Keuangan Audited	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				Tersusunnya laporan keuangan semesteran	dokumen	2	2
				Tersusunnya laporan keuangan bulanan	dokumen	12	12
				Tersusunnya laporan Keuangan Triwulanan	dokumen	4	4
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Laporan Aset dan Laporan Persediaan tahunan	Dokumen	1	1
				Laporan Aset dan Laporan Persediaan Semester	Dokumen	1	1
				Laporan Aset dan Laporan Persediaan Triwulan	Dokumen	1	1
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (induk)	jenis	7	7
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Tersedianya bahan komputer	jenis	3	3
				Tersedianya bahan kertas dan Cover	jenis	2	2
				Tersedianya ATK	jenis	25	25
				Tersedianya bahan material (induk)	jenis	4	4
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Tersedianya peralatan rumah tangga (Induk)	jenis	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Tersedianya barang cetakan (Induk)	jenis	10	10
				Tersedianya barang penggandaan (Induk)	jenis	6	6
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan (induk)	jenis	2	2
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Terlaksananya korrdinasi dan Konsultasi daerah dan dalam daerah (induk)	op	134	133
				Terlaksananya Koordinasi (Induk)	os	3000	2934
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				kendaraan roda 4	unit	1	1
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Tersedianya Laptop	unit	1	1
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Pengadaan AC	unit	1	1
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Tersedianya peranko, materai dan benda (Induk)	unit	699	699
				terlaksananya pengiriman surat (Induk)	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Induk)	bulan	12	12
				Tersedianya langganan teleconverence	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Peralatan kantor	jenis	1	1
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Terlaksananya kebersihan kantor m2 (Induk)	Dishub 30.624 bulan	12	12
				Tersedianya Jasa Keamanan kantor/tempat kerja (12 orang)	bulan	12	12

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya jasa penjagaan pintu perlintasan KA 12 bulan (8 Orang)	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				genset	unit	2	2
				Kendaraan roda dua (Induk)	unit	7	7
				Terpeliharanya dan terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional (Induk)	bulan	12	12
				kendaraan roda empat (Induk)	unit	15	15
				Pemeliharaan Mebel			
				Terpeliharanya meja dan Kursi	jenis	2	2
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya	jenis	7	7
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				jasa pemeliharaan kantor induk	Tahun	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	jenis	6	6
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
				Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	%	100	201
				Peningkatan Tertib Perijinan Angkutan Tidak dalam Trayek	%	100	109
				Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	rasio	0.9	1.79
				Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	%	82.41	84.76
				Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	rasio	0.9	1.79
				Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek	%	82.41	84.76
				Presentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum dalam trayek	%	82.41	84.76
				Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	67	85

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	67	84
				Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	rasio	0.9	1.79
				Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	rasio	0.9	2.52
				Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	rasio	0.9	2.52
				Peningkatan Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	%	80	73.33
				Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	67	85
				Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	rasio	0.9	2.52
				Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	67	84
				Peningkatan Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	%	80	53.35
				Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	rasio	0.9	2.52
				Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	67	84
				Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	67	84
				Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	rasio	0.9	1.79
				Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	rasio	0.9	2.52
				Penurunan Rasio Jumlah Kecelakaan	rasio	0.9	1.79
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			
				Studi Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan Provinsi	dokumen	1	1
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			
				APJ Tenaga Listrik	unit	223	223
				APJ Tenaga Surya	unit	12	12
				Warning Light TS	unit	10	10
				Cermin Cembung	unit	20	20
				RPPJ	unit	10	10
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			
				Pemeliharaan Halte 113 unit	tahun	1	1
				Jasa Kebersihan Halte Trans Jogja	tahun	1	1
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			
				Persentase ketersediaan suku cadang APJ surya	%	20	20
				Persentase ketersediaan suku cadang APILL	%	20	20

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase ketersediaan suku cadang APJ listrik	%	5	5
				Ketersediaan Teknisi Perbaikan Perlengkapan Jalan APILL dan APJ	bulan	12	12
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi			
				Terlaksananya pengawasan ketertiban berlalulintas	Bulan	10	10
				Ketersediaan data kinerja ruas jalan dan simpang di DIY	Dokumen	1	1
				Tersusunnya Studi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Simpang Gamping Yogyakarta	Dokumen	1	1
				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
				Pemeliharaan APILL ATCS	lokasi	5	5
				Pengadaan dan Pemasangan Video Vehicle Detection	lokasi	1	1
				Inventarisasi dan identifikasi kinerja APILL ATCS	dokumen	1	1
				Jumlah Ketersediaan Operator ATCS	orang	16	16
				Pemeliharaan VMS	lokasi	2	2
				Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			
				Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan DIY tingkat SMA (20 peserta (pembekalan dan penjurian))	kali	2	2
				Sosialisasi Keselamatan LLAJ	Kali	5	5
				Kampanye keselamatan lalu lintas	Peserta	1150	1150
				Safety Driving for millennial untuk SMA	Peserta	150	150
				Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan DIY tingkat SD (20 peserta (pembekalan dan penjurian))	kali	2	2
				Sosialisasi Rencana Penerapan Contra Flow di Jalan Pasar Kembang	Kali	3	3

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan DIY tingkat SMP (20 peserta (pembekalan dan penjurian))	kali	2	2
				Terselenggaranya pemantauan ketertiban lalu lintas di Kawasan Strategis Perkotaan (Terban, Kranggan, Seturan, Demak Ijo)	Kawasan	4	4
				Sosialisasi Pengamanan Aset Perlengkapan Jalan di DIY	Kali	4	4
				Pembuatan dan Penayangan ILM Keselamatan LLAJ	Paket	1	1
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi			
				Terselenggaranya Harhubnas 2022	kali	1	1
				Terselenggaranya pemantauan Angkutan pada hari Liburan dan hari-hari besar (lebaran dan nataru)		28	28
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi			
				Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		12	12
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin			
				Layanan Persetujuan Teknis analisa dampak Lalu lintas lintas	tahun	1	1
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			
				Jumlah kendaraan angkutan barang yang diperiksa	kendaraan	5000	5350
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			
				Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Yang Terperiksa	kendaraan	1600	1677
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi			
				Terselenggaraanya Pemilihan Abdiyasa Tingkat DIY dan Nasional	orang	15	15

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
				Hasil Biaya Operasional Kendaraan Trans Jogja Operasional 2023	Dokumen	1	1
				Subsidi Penyelenggaraan Trans Jogja 95 armada	tahun	1	1
				Hasil appraisal Bus Trans Jogja Operasional 2023	dokumen	1	1
				Sosialisasi Angkutan Umum	Kali	6	6
				Sosialisasi Angkutan Umum	kali	15	15
				Review Rencana Induk Transportasi	dokumen	1	1
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi			
				Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan Bis Trans Jogja yang Beroperasi	bulan	12	12
				Tersedianya Data Penumpang Transjogja	laporan	12	12
				Tersedianya dokumen Penerapatn Tarif Taxi Reguler	Dokumen	1	1
				Tertib Perizinan Angkutan Umum DIY	dokumen	1	1
				Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan CCTV Transjogja	bulan	12	12
				Studi Kajian Operasional Transportasi Kawasan Pariwisata DIY	Dokumen	1	1
				Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			
				Tersedianya Dokumen Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP)	Dokumen	1	1
				Tersedianya Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan	dokumen	1	1
				PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			
				Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	%	70	75
				Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian	%	70	75

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian			
				Tersusunnya Kajian Pengaruh Operasional Kereta Listrik Terhadap Penumpang Angkutan Jalan	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perkeretaapian di DIY	dokumen	1	1
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS PERHUBUNGAN	1. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan 2. Penyelenggaraan sosialisasi keselamatan lalu lintas 3. Penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum 4. Peningkatan kinerja angkutan umum 5. Peningkatan tertib perizinan angkutan 6. Penyediaan dan peningkatan simpang bersinyal 7. Peningkatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
				Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	%	7.77	7.77
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya			
				Kajian Pembangunan Halte Trans Jogja Bernuansa Budaya	Dokumen	1	1

10) *Urusan Komunikasi dan Informatika*

a) *Kondisi Umum*

Peran Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sebagai *supporting* dalam setiap penyelesaian pekerjaan menjadi kebutuhan wajib bagi setiap organisasi pada proses bisnisnya dalam mencapai tujuan akhir. Keadaan seperti ini juga terjadi pada organisasi pemerintah, dimana peran TIK sangat besar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan. TIK akan banyak memberikan peluang dan nilai tambah yang dapat diperoleh khususnya untuk peningkatan mutu proses kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini terjadi transformasi aktivitas yang dahulu dilakukan secara manual beralih ke digital. Seiring dengan hal tersebut perlu menjadi perhatian berkaitan dengan keamanan data dan informasi.

Penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang perlu disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik dalam pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu yang dilakukan Badan Publik sehingga peran Badan Publik Pemerintah Daerah diatur berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik terkait. Regulasi ini mengamanatkan Badan Publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan. Mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan baik secara konvensional maupun dengan melibatkan teknologi informasi untuk memperluas sebarannya.

Pemda DIY melalui Dinas Komunikasi dan Informatika DIY sesuai amanat Pergub DIY Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemda DIY mempunyai kewajiban untuk mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik di lingkup Pemda DIY. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran Teknologi Informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya, maka dimanfaatkan beberapa kanal media sosial yang dikelola sebagai saluran informasi, diantaranya: *WhatsApp*, Instagram (@kominfodiy), *Twitter* (@kominfodiy), *Youtube* (Kominfo DIY), dan *Facebook fanspage* (Kominfo DIY). Selain itu publik juga dapat mengakses portal ppid.jogjaprovo.go.id dan menyampaikan aspirasinya berupa keluhan atau masukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui aplikasi E-Lapor DIY. E-Lapor DIY juga telah diintegrasikan dengan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan *Whistle Blowing System* (WBS). Tahun 2022 dilakukan integrasi WBS pada aplikasi E-Lapor DIY dengan sistem WBS milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga dapat memungkinkan langsung terjadi pertukaran data secara otomatis pada kedua aplikasi tersebut agar lebih mudah dalam pemantauan dan tindak lanjut.

E-LAPOR DIY

DAFTAR ADUAN TENTANG KAMI WBS

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Formulir WBS Pantau Aduan WBS

Isian yang bertanda * wajib diisi.

Data Diri Pengadu

- Anda dapat menggunakan nama samaran sebagai isian nama.
- ** Isikan email dan/atau nomor telepon yang dapat dihubungi.
- Kami menjamin kerahasiaan data diri pengadu.
- Anda dapat memberi centang pada Kirim sebagai Anonim jika Anda memilih untuk tidak memberikan data diri Anda.

Kirim sebagai Anonim

Nama * Email ** No. Telepon **

APTIKA KOMINFO aptika.kominfo.diy@gmail.com contoh: 08233445566

Data Aduan

- Isi data Aduan selengkap mungkin dan sejujur-benarnya supaya Aduan dapat segera ditindaklanjuti.
- Fokus kami lebih kepada data Aduan yang Anda berikan, bukan data pribadi yang Anda cantumkan di atas.
- Anda dapat memasukkan lebih dari satu nama.

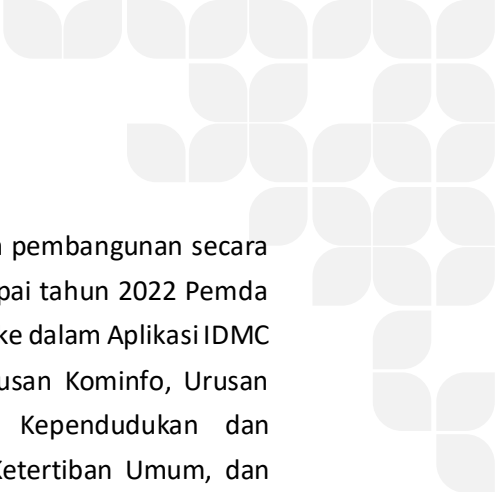
Nama yang Diadukan *

John Doe, selaku Kepala Bidang tertentu

Wilayah *


Gambar 3.41. Integrasi WBS E-Lapor DIY dengan sistem WBS KPK
 Sumber: Diskominfo DIY, 2023

Pemda DIY juga mengelola layanan informasi berbasis *mobile* yakni Jogja Istimewa, yang di dalamnya berisi informasi tentang Jogja Budaya, Jogja Wisata, Jogja Layanan Publik, Jogja Belajar, Jogja Kuliner, Jogja Info, Jogja Transportasi, Jogja Event, Jogja Galeri, Jogja 360, *Jogja Doeloe Augmented Reality (AR)*, dan Jogja Streaming. Selain itu layanan aplikasi 'Jogja Istimewa' juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi secara *real time* di berbagai obyek wisata dengan dibangun kamera pengawas, yang juga dapat diakses melalui mam.jogjaprov.go.id. Sebagai bentuk peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi pengguna 'Jogja Istimewa Apps' dapat diakses melalui telepon pintar (*smart phone*). Pada aplikasi ini terdapat fitur pembayaran tiket elektronik (*E-ticket*) pada Museum Sonobudoyo. Pemda DIY sudah mempunyai berbagai macam aplikasi/sistem informasi pengelolaan data sebagai sarana dalam proses pengambilan kebijakan. Saat ini aplikasi-aplikasi tersebut dalam proses integrasi agar memudahkan dalam penyajian datanya. Pemda DIY pada tahun 2017 mengembangkan informasi pembangunan terintegrasi melalui *Integrated Development Management Center (IDMC)* (idmc.jogjaprov.go.id) untuk membantu



pimpinan dalam mengambil kebijakan pembangunan secara cepat berbasis data yang akurat. Sampai tahun 2022 Pemda DIY telah mengintegrasikan 15 urusan ke dalam Aplikasi IDMC (idmc.jogjaprov.go.id), antara lain Urusan Kominfo, Urusan Perhubungan, Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Urusan tata ruang mengintegrasikan spasial Rencana Tata Ruang Wilayah, Urusan Pertanahan mengintegrasikan luasan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa se-DIY, Urusan Sosial, Urusan Kesehatan, Urusan Pangan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan serta Urusan Pariwisata.

Sesuai amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemda DIY telah menerapkan SPBE dengan mengeluarkan reguasi Pergub nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan beberapa regulasi yang menjadi acuan penerapannya, seperti Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan TIK, Pergub DIY Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Pergub DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Kelola TIK, Pergub DIY Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah *Jogja Smart Province* Tahun 2019-2023. Regulasi tersebut menjadi pijakan dasar dalam melaksanakan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan layanan kepada publik maupun kepada internal pemerintah daerah secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan. Upaya peningkatan tingkat kematangan masing-masing indikator penilaian SPBE terus dilakukan oleh Pemda DIY. Hal tersebut dapat dilihat dengan hasil penilaian evaluasi eksternal oleh KemenPANRB yang



mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 Pemda DIY mendapatkan nilai 3,33, tahun 2019 mendapatkan nilai 3,43 dan tahun 2021 menempatkan Pemda DIY pada peringkat 2 level Pemerintahan Provinsi dengan nilai 3,49 atau berpredikat Baik. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2022 mendapatkan nilai 3,02. Hasil dari evaluasi SPBE dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional. Tahun 2022 telah disusun Pergub No 67 Tahun 2022 tentang SPBE, dokumen Arsitektur SPBE, dan dokumen Peta Rencana SPBE yang dapat meningkatkan level kematangan SPBE Pemda DIY.

Selain itu, akselerasi pemanfaatan TIK di dalam penyelenggaraan pemerintahan didukung dengan implementasi penandatanganan dokumen secara digital atau Tanda Tangan Elektronik (TTE). Percepatan implementasi tanda tangan elektronik dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemda DIY memanfaatkan TTE agar lebih mudah dan menghemat waktu. Hingga akhir tahun 2022 sudah ada 321 orang pejabat di lingkungan Pemda DIY yang menggunakan Sertifikat Elektronik.

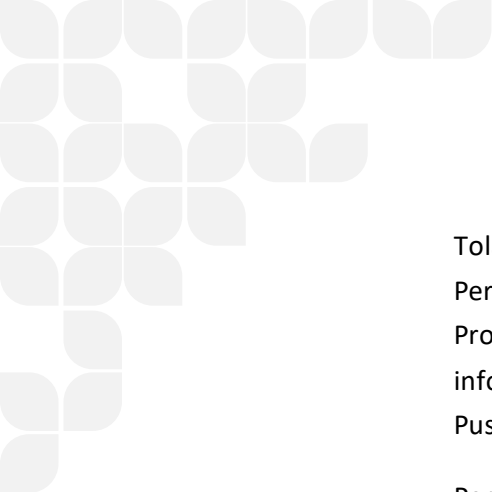
di samping itu, Pemda DIY melakukan pendampingan terhadap aplikasi kenaikan pangkat dan *paperless office* untuk dapat terintegrasi dengan tanda tangan elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Pemanfaatan TIK untuk akselerator pembangunan akan terwujud apabila infrastruktur TIK sebagai lalu lintas data tersedia dengan baik. Untuk lebih memudahkan dalam komunikasi berjalan dengan baik dan lancar difasilitasi dengan aplikasi server video konferensi dan 15 *user* aplikasi *client* video konferensi yang dapat digunakan secara bersamaan. Selain itu untuk lebih memperluas akses masyarakat terhadap informasi melalui penggunaan jaringan internet, sampai tahun 2022 telah membangun 279 titik jaringan. Untuk mendukung pendidikan di masa pandemi, seluruh sekolah SMA/SMK Negeri se-DIY telah terkoneksi dengan jaringan yang dimiliki oleh Pemda DIY. Selain itu, untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi melalui penggunaan jaringan internet, telah disediakan 270 titik WiFi gratis diantaranya di kawasan Malioboro sentra industri, kelompok UMKM, pasar, kampung/desa wisata dan tempat budaya sehingga diharapkan nantinya fasilitas tersebut untuk mempermudah akses informasi dalam melakukan digital marketing sehingga juga dapat meningkatkan penjualan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Berikut ini dapat disajikan tabel capaian Urusan Komunikasi dan Informasi.

Tabel 3.130. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Provinsi	Peringkat	10	4	10	40	4	40

Sumber: Diskominfo DIY, 2023



Tolak ukur kinerja urusan Komunikasi dan Informatika yaitu: Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Provinsi dengan meta indikator peringkat keterbukaan informasi badan publik yang dikeluarkan Komisi Informasi Pusat.

Peringkat keterbukaan informasi bagi Badan Publik adalah suatu tools yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat untuk mengetahui sejauh mana Badan Publik melakukan pengelolaan informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mekanisme pemeringkatan ini dilakukan Komisi Informasi semenjak tahun 2012, saat itu metode yang dipergunakan adalah peringkat keterbukaan pada setiap Badan Publik tanpa ada pengkategorian secara khusus.

Berdasarkan SK Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 03/KEP/Ketua-KIP/III/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Tahun 2018 Informasi Pusat, tahun 2018 monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi bagi Badan Publik tidak lagi berdasarkan metode peringkat, melainkan mengklasifikasikan (*clustering*) menjadi 5 (lima) *cluster*, yaitu: *informatif*, menuju *informatif*, cukup *informatif*, kurang *informatif* dan tidak *informatif*.

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 09/KEP/KIP/XII/2022 bahwa penilaian monev Keterbukaan informasi Badan Publik PPID Pemda DIY berhasil mempertahankan predikat informatif dan berada pada urutan nomor 10 level provinsi dengan skor nilai 97,44. Pada tahun 2022 terdapat inovasi yang mendukung pelayanan PPID Pemda DIY, yaitu adanya *widget* di website PPID yang mempermudah disabilitas dalam mengakses informasi. Kinerja Dinas Kominfo tahun 2022 tidak mencapai target

peringkat 4 akan tetapi mengalami kenaikan skor nilai yang signifikan. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun 2021 yang memiliki skor nilai 91,23, naik sebesar 6,21.

Berdasarkan nilai skor hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat Pemda DIY tidak dapat mencapai target, karena adanya perubahan indikator, tolok ukur dan penilaian keterbukaan informasi badan publik.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Masyarakat belum sepenuhnya sadar tentang hak dan kewajiban sebagai pengguna informasi dan layanan publik, sehingga informasi yang disediakan dan layanan yang diselenggarakan tidak dipergunakan secara optimal
- (b) PPID Pembantu di DIY belum semuanya masuk pada klaster informatif

(2) *Solusi*

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas (**point a**).

- (a) Meningkatkan peran PPID badan publik dalam diseminasi informasi publik serta melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- (b) Pendampingan kepada PPID pembantu terkait dengan Keterbukaan Informasi Badan Publik

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Pada tahun 2022 Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan alokasi Rp35.227.685.684,00. Anggaran bersumber dari APBD sebesar Rp14.143.108.971,00 untuk membiayai Urusan Komunikasi dan Informatika dengan 3 program, 9 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Anggaran bersumber pada dana keistimewaan sebesar Rp21.084.576.713, untuk membiayai 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp34.728.737.426,00 atau 98,58%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp498.948.258,00 atau 1,42% antara lain dari sisa pengadaan barang dan jasa, efisiensi belanja perjalanan dinas dan efisiensi honor narasumber. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.131. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Pemberdayaan dan pengembangan: (1) PPID disetiap badan publik; (2) Komunitas masyarakat penggiat Teknologi Informasi 2. Pembuatan dan pengembangan Sistem Informasi Eksekutif (SIE) 3. Pengembangan dan optimalisasi jaringan pemerintah daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku Renstra Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku ROPK Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku Renja Perubahan Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku Renja Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku Perjanjian Kinerja Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku DPA-OPD Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku RKA-OPD Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku DPPA-OPD Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku RKAP-OPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen LKJIP (Nilai AKIP "A"/80)	Persen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen nilai	100 1 1 1 1 1 1 1 1 80	100 1 1 1 1 1 1 1 80

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Konsep/Bahan LKPJ	dokumen	1	1
				Konsep/Bahan LPPD	dokumen	1	1
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	tahun	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	tahun	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Laporan Keuangan sesuai dengan penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				Laporan Keuangan Triwulanan	dokumen	4	4
				Laporan Keuangan bulanan	dokumen	12	12
				Laporan Prognosis	dokumen	1	1
				Laporan Keuangan Semester	dokumen	2	2
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	5	5
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	22	22
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Tersedianya peralatan rumah tangga Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	13	13
				Tersedianya peralatan rumah tangga bendera	jenis	1	1
				Tersedianya peralatan rumah tangga Peralatan dan perlengkapan pencegahan Covid-1	jenis	4	4
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Barang cetakan	jenis	8	8
				Dokumen hasil penggandaan	lembar	32600	32600
				Dokumen hasil penjiilidan	bendel	72	72
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Tersedianya makan minum rapat	tahun	1	1
				Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi	tahun	1	1
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis	1	1
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jenis	1	1
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Bukti pembayaran Jasa surat menyurat	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Bukti pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Gedung kantor seluas 51.882m2 yang terpelihara kebersihannya	bulan	12	12
				Keamanan kantor yang terjaga dengan baik	bulan	12	12
				Mobilitas operasional perkantoran berjalan dengan baik	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 (dua)	unit	8	8
				Kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) yang terpelihara	unit	8	8
				Kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua) yang terpelihara	unit	8	8

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 (empat)	unit	8	8
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	jenis	9	9
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
				Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani	Persen	80	92.67
				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			
				Keluhan masyarakat yang direspon	keluhan	200	200
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			
				Konten paket tayangan Pemda DIY	konten	336	336
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
				Konten media sosial/videotron	konten	10	10
				Literasi Diseminasi Melawan Hoax	kali	24	24
				Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			
				Prosentase capaian kinerja KPID DIY	persen	100	100
				Aduan masyarakat terkait konten siaran yang tertangani	aduan	40	40
				Lembaga penyiaran yang patuh ketentuan perundangan	lembaga penyiaran	15	15
				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			
				Masyarakat di tingkat basis yang memilki relwan Keterbukaan Informasi	kelurahan	6	6
				Badan publik yang patuh terhadap ketentuan UU No.14 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Badan Publik	50	50
				Sengketa publik yang tertangani	sengketa	6	10

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
				Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkup Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK	Persen	90.5	98.9
				Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK	Persen	62.5	62.5
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			
				Jaringan Wireless dan VPN yang Terkelola	titik	90	90
				NOC dan Jaringan Intranet Kompleks Kepatihan yang Terkelola	titik	14	14
				Jaringan Fiber Optik yang Terkelola	titik	165	165
				Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi			
				Rekomendasi Pengembangan E-Government yang dihasilkan dari Forum Komunikasi se-DIY	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik			
				Modul aplikasi yang terintegrasi dalam IDMC	modul	3	3
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			
				Aplikasi layanan publik yang terkelola	aplikasi	3	3

11) *Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*

a) *Kondisi Umum*

Pasca Pandemi Covid-19 aktivitas koperasi dan UKM di DIY berangsur membaik. Terdapat segi positif pada masa PPKM beberapa waktu lalu, salah satunya peningkatan jumlah koperasi yang melakukan transformasi digital seperti Daftar Anggota berbasis Elektronik, Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilakukan secara *online*. Hal ini mendorong Pemda DIY melakukan pembinaan dan pendampingan menuju koperasi modern melalui 3 pilar, yaitu pilar kelembagaan, pilar usaha dan pilar keuangan. Selain itu juga adanya beberapa koperasi yang didorong untuk perluasan usaha dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi.

Pemda DIY pada tahun 2022 sudah melakukan pemetaan data koperasi sehingga terdapat koperasi yang mampu didorong menjadi koperasi modern, adapun bagi koperasi yang belum siap menjadi koperasi modern dilakukan pembinaan dan pendampingan melalui 3 pilar di atas. Selain itu juga memberikan dukungan fasilitas pendirian koperasi sebanyak 10 koperasi dan fasilitas perubahan anggaran dasar sebanyak 10 koperasi dengan tujuan mampu meningkatkan omzet koperasi untuk kesejahteraan anggota koperasi.

Perkembangan omzet koperasi dapat dilihat pada tabel keragaman Koperasi berikut:

Tabel 3.132. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Koperasi Aktif	1.926	1.722	1.758	1.717	1.698
2	Koperasi Tidak Aktif	63	196	180	271	310
3	Modal Sendiri (RpJuta)	1.425.918	1.625.568	1.595.511	1.630.287	1.587.752
4	Modal Luar (RpJuta)	2.262.263	2.512.343	2.188.554	2.372.549	3.132.602
5	Volume Usaha (RpJuta)	4.394.362	4.325.218	4.141.871	4.272.359	4.404.185
6	Koperasi Primer	1963	1.890	1.728	1.950	1.972
7	Koperasi Sekunder	26	28	30	28	36

Sumber: Online Data Sistem, Kementerian Koperasi dan UMKM RI per 31 Desember 2022, 2023

Pada tahun 2021 jumlah koperasi aktif sebanyak 1.717 koperasi, atau mengalami penurunan sebesar 1,11% menjadi 1.698 koperasi di tahun 2022. Penurunan tersebut dikarenakan adanya beberapa koperasi yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan karena masih mengalami masa transisi pemulihan pasca pandemi Covid-19. Modal Sendiri Koperasi mengalami penurunan karena pada koperasi simpan pinjam banyak anggota yang mengambil simpanannya untuk memenuhi kebutuhannya pada masa pandemi Covid-19 karena banyak usaha anggota yang tidak beroperasi.

Untuk Omzet Koperasi secara keseluruhan mengalami kenaikan yang disebabkan adanya partisipasi dari koperasi sektor riil yang sudah mulai melakukan penjualan produknya secara *online* melalui *marketplace* SiBakul yang didukung dengan fasilitasi bebas ongkos kirim.

Upaya pembinaan UMKM melalui kelompok (sentra) merupakan upaya yang efektif dan efisien. Keterlibatan banyak pelaku usaha dalam satu kelompok akan saling menguatkan aspek-aspek yang dimiliki oleh masing-masing pelaku UMKM. Dengan pembinaan berbasis sentra ini akan meningkatkan jumlah UMKM secara signifikan, seperti data pada tabel berikut:

Tabel 3.133. Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2018-2022

No	Skala Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Usaha Mikro	141.991	143.385	188.033	311.540	324.745
2	Usaha Kecil	64.896	65.533	58.980	16.064	16.069
3	Usaha Menengah	39.196	39.581	30.665	2.110	2.110
	Jumlah	246.083	248.499	277.678	329.719	342.924

Sumber: Diskop dan UKM DIY, 2023

Peningkatan jumlah UMKM ini didukung oleh kesadaran UMKM untuk mendaftarkan diri secara mandiri di aplikasi SiBakul Jogja. Banyak iklan baik media cetak maupun media sosial yang menyebarkan informasi keberadaan SiBakul Jogja dengan berbagai manfaatnya. Peningkatan jumlah usaha mikro dan penurunan usaha kecil, menengah, dan besar disebabkan PP Nomor 7 tahun 2021 pasal 35 ayat (3) mengenai kriteria modal usaha UMKM, sehingga terjadi penyesuaian skala usaha berdasarkan modal yang dimiliki.

Target indikator sasaran Omset Koperasi tahun 2022 sebesar 4.308.794 Juta Rupiah. Capaian tahun 2022 adalah 4.404.185 Juta Rupiah atau 102,21% dari target akhir RPJMD. Capaian ini didukung adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi, sehingga koperasi dapat beroperasi secara normal, dan partisipasi anggota meningkat terutama di sektor riil. Transformasi digital koperasi secara perlahan mulai dilakukan, salah satunya dengan digitalisasi transaksi yang memudahkan anggota dalam mengakses layanan Koperasi Simpan Pinjam maupun transaksi Koperasi Konsumen. Selain itu kapasitas pengelolaan koperasi didukung oleh mudahnya akses pembiayaan dari berbagai lembaga.

Target capaian indikator sasaran Omset UKM tahun 2022 sebesar 11.347 Milyar Rupiah. Capaian tahun 2022 sebesar 11.700 Milyar Rupiah atau 103,11% dari target akhir RPJMD. Capaian ini didukung oleh membaiknya kondisi ekonomi di wilayah DIY yang terlihat dari peningkatan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara sehingga berdampak terhadap kenaikan permintaan jasa maupun pembelian produk UMKM DIY.

Berbagai fasilitasi diberikan kepada Koperasi dan UKM DIY seperti pelatihan, bimtek, *workshop*, pameran, akses pembiayaan, kurasi, *markethub*, fasilitasi *free* ongkir, fasilitasi pemasaran di Jendela SiBakul, Galeri Pasar Kotagede YIA, SMESCO, dan lain-lain.

Target indikator kontribusi wirausaha baru terhadap UKM sasaran tahun 2022 sebanyak 0,4% dengan capaian tahun 2022 sebesar 0,47% atau 117,50% dari target akhir RPJMD. Hal ini disebabkan penumbuhan desa *preneur* yang bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan berbasis potensi ekonomi dan desa budaya, serta semakin banyaknya wirausaha baru dari tenaga kerja yang mengalami putus hubungan kerja dan membuka usaha baru dengan pendampingan melalui kegiatan penumbuhan wirausaha baru. Selain itu pembinaan lintas sektor juga dilakukan antara lain dengan pembinaan lulusan SMK untuk menjadi wirausaha baru.

Berikut ini Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2022 untuk sasaran dinas Koperasi dan UKM:

Tabel 3.134. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Nilai omset koperasi tahun n	Rp Juta	4.012 .619	4.308 .794	4.404 .185	102,21	4.308 .794	102,21
2	Nilai omset UKM tahun n	Rp Milyar	11.117	11.347	11.700	103,11	11.347	103,11
3	Kontribusi jumlah WUB terhadap jumlah UKM	%	0,40	0,40	0,47	117,50	0,40	117,50

Sumber: Diskop dan UKM DIY, 2023


Pemda DIY memberikan fasilitasi sertifikasi PIRT dan halal dengan tujuan agar produk UMKM terjaga mutu dan keamanannya sehingga bisa mendapat kepercayaan konsumen dengan demikian dapat meningkatkan nilai jual produk dan dapat beredar secara luas.

Selain itu, selama masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 ini diberikan stimulan untuk dapat memasarkan produknya, melalui pemberian bantuan bebas ongkos kirim. di tahun 2022, dengan fasilitasi ongkos kirim sebesar Rp2.200.000.000,00 mampu menggerakkan omset UMKM sebesar Rp16.325.753.377,00. UMKM juga diberikan dukungan promosi melalui media *campaign* dan *marketplace* pada fitur *Markethub* Sibakul Jogja. Hal ini mendorong Wirausaha Baru untuk mendaftar ke sibakul serta mengikuti kampanye *markethub* agar mendapatkan dukungan kemudahan pemasaran produk. Wirausaha baru yang telah terdaftar pada aplikasi Sibakul Jogja diberikan pelatihan berjenjang yang diarahkan menuju transaksi bisnis digital serta diberikan kesempatan untuk mengikuti pameran *virtual* sebagai adaptasi terhadap kebiasaan baru.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Saat ini pelaku KUKM masih dalam kondisi pemulihan pasca pandemi, ada yang berhasil namun ada juga yang masih tertinggal karena masyarakat sedang dihadapkan dengan isu resesi global, sehingga penghematan konsumsi lebih ditekan dan dialihkan ke investasi sebagai tindakan preventif.
- (b) Inisiasi wirausaha baru sudah baik namun terkendala permodalan usaha karena *business proposal* yang kurang terukur atau tidak memiliki agunan.
- (c) Masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kesadaran dalam mengurus legalitas, standarisasi, maupun sertifikasi usaha.
- (d) Koperasi simpan pinjam mengalami penurunan rasio likuiditas yang disebabkan oleh banyaknya anggota koperasi yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran.
- (e) Regenerasi dan restrukturisasi pengurus koperasi sulit dilaksanakan karena daya tarik generasi muda untuk mengelola koperasi masih rendah. Banyaknya aspek penilaian koperasi yang belum dipahami oleh SDM koperasi, menyebabkan apa yang telah dilaksanakan koperasi tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menghambat proses penilaian koperasi.

- 
- (f) Transformasi digital selalu dikaitkan dengan teknologi, namun yang paling utama dibenahi adalah mindset pelaku untuk mau beradaptasi, mau berubah, mau berinovasi untuk menyelaraskan dengan kondisi pasar.

(2) Solusi

- (a) Percepatan pemulihan koperasi dan UMKM dilaksanakan dengan kolaborasi antar instansi/lembaga baik dalam pembinaan maupun pendampingan Koperasi dan UMKM. Dengan memperkuat skema pembinaan enam aspek yaitu sumber daya manusia, produksi, pemasaran, kelembagaan, keuangan, dan pemasaran online (digitalisasi) melalui program pembinaan dan pendampingan.
- (b) Mengadakan sosialisasi kewirausahaan, pelatihan pengembangan bisnis, pendampingan usaha baru.
- (c) Memberikan fasilitasi pengurusan legalitas, standarisasi, sertifikasi UMKM untuk memperluas pasar, seperti pemberian sertifikat halal, MD dan PIRT.
- (d) Memberikan fasilitasi akses pembiayaan terhadap pelaku KUMKM sehingga diharapkan usahanya berjalan Kembali dengan lancar sehingga dapat Kembali mengangsur pinjamannya.
- (e) Memberikan sosialisasi tentang perkoperasian terhadap generasi muda melalui kegiatan-kegiatan yang diminati.

(f) Pengembangan aplikasi Sibakul Jogja sebagai aplikasi tata kelola pembinaan UMKM melalui semua aspek pembinaan dan semua fasilitas yang diberikan pada koperasi dan UMKM. Serta melakukan pengawasan pemanfaatan platform marketplace agar pelaku KUMKM tidak terjebak dalam kejahatan *cyber*.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Untuk Urusan Koperasi dan UKM pada tahun 2022 memiliki alokasi anggaran Reguler Rp27.089.149.304,00 dan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Rp93.847.240.102,00 dengan total anggaran Rp120.936.389.406,00. Alokasi anggaran tersebut terbagi dalam 8 Program, 16 Kegiatan dan 33 sub kegiatan, dengan realisasi sampai dengan akhir bulan Desember 2022 Rp117.935.217.722,00 atau sebesar 97,52% dari total pagu, dengan realisasi fisik 99,96%. Ketidaktercapaian fisik terdapat pada sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha disebabkan pelayanan dan aspirasi gerakan Dekopin belum dapat dilaksanakan karena belum ada pengesahan Anggaran Dasar Presiden terkait Dekopin.

Tabel 3.135. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN UMUM	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1. Peningkatan kapasitas kinerja dan daya saing Koperasi dan UMKM perlu dioptimalkan 2. Mengembangkan kemitraan pelaku KUKM dengan perbankan, BUMN dan usaha swasta lainnya. 3. Pengembangan Enterprenurship pelaku UMKM dilakukan melalui diklat, pendampingan dan fasilitasi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan ketimpangan wilayah.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Program 01-06 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Publikasi media cetak Renja Perubahan 2022 Renstra 2022-2027 Renja 2023 ROPK Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD RKA-Perubahan Tahun 2022 RKA Tahun 2023 DPA Tahun 2023 DPPA Tahun 2022 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Konsep/Bahan LPPD Konsep/Bahan LKPJ Dokumen LKJip dengan nilai AKIP "82" (skor)	%	100	100
						20	20
					Kali	1	1
					Dokumen	1	1
					Dokumen	1	1
					Dokumen	1	1
					Dokumen	1	1
					Dokumen	1	1
					Dokumen	1	1
					Dokumen	1	1
					Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				Terbayarkan gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	Tahun	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)	Dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD			
				Laporan Keuangan semester 1	Dokumen	2	2
				Laporan Keuangan triwulan	Dokumen	4	4
				Laporan Keuangan bulanan	Dokumen	12	12
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tahun	1	1
				Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan komponen Instalasi Listrik	Jenis	6	6
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Alat Tulis Kantor	Jenis	35	35
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Bahan Kantor Lainnya	Jenis	4	4
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Penggandaan	Lembar	53508	53508
				Tersedianya Bahan Cetak	Jenis	10	10
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan			
				Surat kabar	Jenis	2	2
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi	Tahun	1	1
				Tersedianya makanan dan minuman rapat	OS	2500	2500
				Terkelolanya arsip dinas	Jenis	2	2
				Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada OPD			
				Terkelolanya website OPD	Tahun	1	1
				Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya			
				Penyediaan sarana dan prasarana Layanan Mitra SiBakul (DID)	Jenis	33	33

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Klinik Koperasi (DID 2)	Jenis	4	4
				Tersedianya Mic Meja Wearless	Unit	20	20
				Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Tenant dan Pendukung Promosi Produk (DID)	Unit	30	30
				Penyediaan Sarana Prasarana Layanan PLUT (DID 2)	Jenis	7	7
				Penyediaan Sarana Prasaana Layanan Pemasaran Produk UMKM (DID 2)	Jenis	4	4
				Klinik Koperasi (DID)	Unit Klinik Koperasi	1	1
				Pojok Literasi Digital UMKM (DID)	Unit Literasi Digital	1	1
				Penyediaan Sarana Pameran UMKM (DID)	Unit	70	70
				Penyediaan Sarana Prasaana Layanan Tenant dan Pendukung Promosi Produk (DID 2)	Jenis	5	5
				Penyediaan Peralatan Layanan Kesehatan Tenant dan Konsumen (DID)	Jenis	9	9
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pembayaran tagihan rekening listrik	Tahun	1	1
				Pembayaran langganan virtual meeting	Tahun	1	1
				Pembayaran tagihan rekening telepon	Tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Penyediaan Restribusi sampah	Tahun	1	1
				Penyedia Jasa Kebersihan Perkantoran	Tahun	1	1
				Jasa Keamanan Kantor	Tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Terbayarnya pajak kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis	1	1
				Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (roda empat =4 unit, roda dua = 8 unit)	Jenis	2	2

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terbayarnya Pajak kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (roda empat =4 unit, roda dua = 8 unit)	Jenis	2	2
				Pemeliharaan Mebel			
				Perawatan Sofa Pimpinan	Buah	20	20
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			
				Terpeliharanya Telephon dan Faximile	Paket	1	1
				Terpeliharanya Laptop	Unit	15	15
				Terpeliharanya Komputer	Unit	20	20
				Terpeliharanya Printer	Unit	20	20
				Terpeliharanya LCD Proyektor	Unit	8	8
				Terpeliharanya Mesin Ketik Manual	Unit	8	8
				Terpeliharanya Jaringan Internet	Kali	30	30
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya			
				Pemeliharaan Genset	Tahun	1	1
				Terpeliharanya Atap Gedung dengan Baik	Paket	1	1
				Pemeliharaan Lift	Kali	2	2
				Terpeliharanya dinding Gedung dengan Baik	Paket	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Perawatan Pompa Air	Buah	2	2
				Pemeliharaan Sarana Pameran (DID)	Unit	30	30
				Perawatan AC	Unit	25	25
				Fumigasi	Paket	1	1
				Perawatan Alat Pemadam	Unit	10	10
2	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1. Peningkatan kapasitas kinerja dan daya saing Koperasi dan UMKM perlu dioptimalkan	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEERIKSAAN KOPERASI			
				Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat			
				Fasilitas Perubahan Anggaran Dasar Koperasi	Koperasi	10	10
				Ekspose Pembinaan Koperasi	Kali	2	2
				Jumlah Koperasi yang naik peringkat	Tahun	0	0
				Jumlah Koperasi berprestasi	Koperasi	12	12
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
				Mengukur tingkat kesehatan Koperasi			
				Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	Koperasi	95	95
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
3				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			
				Modernisasi koperasi melalui digitalisasi sistem manajemen koperasi	Koperasi	30	30
				Diklat Studi Kelayakan Kasir	Orang	30	30
				Sertifikasi Costumer Service (DID)	Sertifikat	30	30
4				Diklat Pemantapan Kelembagaan Koperasi	Orang	60	30
				Sertifikasi Manajemen Pengelolaan Koperasi (DID)	Sertifikat	30	30
				Diklat Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi	Orang	30	30
				Diklat Manajemen Keuangan dan Akuntansi	Orang	30	30
				Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Orang	747	747
				Diklat Pelayanan Prima	Orang	60	60
				Jumlah Koperasi Sektor Riil yang mengikuti pelatihan dalam penyusunan bisnis plan	Koperasi	30	30
				Diklat Sertifikasi Juru Tagih	Orang	60	60
				Sertifikasi Uji Kompetensi Digital Marketing (DID)	Sertifikat	60	60

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah bisnis plan koperasi yang didampingi dalam penyusunannya	Koperasi	30	30
				Diklat Digitalisasi Koperasi Berbasis Mobile	Orang	30	30
				Diklat Pengendalian Intern	Orang	60	60
				Diklat Penyusunan Laporan Keuangan	Orang	30	30
				Diklat Digitalisasi Sistem Layanan Kelembagaan	Orang	30	30
				Diklat Pengelolaan Akses Pembiayaan Koperasi	Orang	30	30
				Diklat Digitalisasi Manajemen Keuangan Koperasi	Orang	30	30
				Diklat Sertifikasi Juru Survey	Orang	30	30
				Diklat Manajemen Risiko	Orang	30	30
				Pembekalan bagi Pendamping Diklat	Orang	27	27
				Diklat Akuntansi Koperasi	Orang	60	60
				Sertifikasi Kompetensi Pengurus Koperasi (DID)	Sertifikat	30	30
				Sertifikasi Kompetensi Pengawas Koperasi (DID)	Sertifikat	30	30
				Diklat Sertifikasi Kasir	Orang	30	30

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sertifikasi Kompetensi Manajer Koperasi (DID)	Sertifikat	30	30
				Diklat Penyusunan SOP/SOM/RK-RAPBK	Orang	60	60
				Diklat Peningkatan Kapasitas SDM bagi Pendamping Diklat	Orang	27	27
				Sertifikasi Fasilitator bag pendamping KUMKM (DID)	Sertifikat	30	30
				Dukungan sebesar 10% (1.008 juta rupiah) terhadap peningkatan nilai omzet koperasi riil dari tahun 2020 ke 2021 (10.080 juta rupiah) semula 2.046.177 juta rupiah menjadi 2.056.257 juta rupiah	%	100	100
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM			
				Diklat Analisis SWOT	Orang	60	60
				Diklat Analisis Keuangan Bagi UKM dalam Mendapatkan Akses Pembiayaan dan Investor	Orang	60	60
				Diklat Pemasaran Eskpor Melalui Media Online	Orang	60	60

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pelatihan Peningkatan Kapasitas Produksi	Orang	60	60
				Pelatihan Perpajakan Bagi UMKM	Orang	30	30
				Pelatihan Literasi Keuangan	Orang	60	60
				Diklat Digitalisasi Manajemen Keuangan	Orang	60	60
				Diklat Pemasaran Online	Orang	60	60
				Diklat dan Uji Kompetensi Digital Marketing	Orang	60	60
				Diklat BMC (Bisnis Mode Canvas)	Orang	60	60
				Pelatihan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Baru	Orang	30	30
				Diklat Pengenalan Bisnis Ekspor (Potensi Internal dan pasar ekspor)	Orang	60	60
				Diklat Business Plan	Orang	60	60
				Pelatihan pengelolaan branding produk	Orang	30	30
				Diklat dan Uji Kompetensi Jasa dan Ekspor	Orang	60	60
				Pelatihan Onboarding	Orang	30	30
				Pelatihan Pembuatan Website Usaha	Orang	60	60

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemasaran	Orang	60	60
				Diklat dan Uji Kompetensi Kewirausahaan	Orang	60	60
				Diklat Analisis Laporan Keuangan dalam Pemasaran	Orang	60	60
				Diklat Manajemen Ekspor	Orang	60	60
				Pelatihan Desain Alat Pemasaran	Orang	60	60
				Diklat Analisa Laporan Keuangan Bagi UMKM	Orang	60	60
				Sertifikasi Pendamping UMKM (DID)	Sertifikat	60	60
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			
				Sosialisasi Perkoperasian	Akt	61	61
				Pengembangan Sistem Informasi Klinik Koperasi	Aplikasi	1	1
				Pendampingan Revitalisasi Koperasi Sektor Rill (DID)	Koperasi	4	4
				Talkshow perkoperasian	Kali	3	3

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kontrak Pembiayaan yang dihasilkan dari kemitraan koperasi dan lembaga pembiayaan	Koperasi	35	35
				Jumlah media publikasi perkoperasian	Media	4	4
				Pelayanan Dekopin terhadap fungsi dan aspirasi gerakan koperasi	Tahun	1	0
			Pengembangan SiBakul UKM yang meliputi : Data profil usaha dan kelastering kondisi usaha, akses MarketHUB dan Galeri Pasar Kota Gede YIA, Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan dan Konsultasi online	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			
				Talkshow Kewirausahaan	Kali	3	3
				Sosialisasi Kewirausahaan	Akt	16	16
				Pendampingan Bisnis Bagi Tenant (DID)	Orang	60	60
				Literasi Pembiayaan bagi Tenant (DID)	Orang	60	60
				Kontrak Pembiayaan yang dihasilkan dari kemitraan UKM dan Lembaga Pembiayaan	Kontrak	90	90

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
5				Branding Produk UMKM Mitra Sibakul Jogja (DID)	Paket	1	1
				Pendampingan Manajemen Bisnis Sibakul Jogja Bagi Pelaku UMKM (DID)	Jenis	60	60
				Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan bagi WUB	Akt	12	12
				Pameran Potensi Produk Unggulan Wirausaha (DID)	Kali	2	2
				Pelatihan Digital Marketing bagi WUB	Akt	11	11
				Pembuatan Media Promosi Teras Malioboro (DID)	Jenis	3	3
				Promosi Produk Unggulan Wirausaha (DID)	Event	15	15
				Manajemen Pengelolaan Berusaha Bagi UMKM (DID)	Orang	20	20
				Festival Oleh-oleh Khas Jogja	Event	3	3
				Sosialisasi Akses Pembiayaan bagi KUMKM	Akt	10	10
				Terlaksananya Pengembangan Sistem Aplikasi tatakelola KUKM Terpadu (Sibakul Jogja)	Aplikasi	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
6				Mentoring bagi Peningkatan Kapasitas UMKM (DID)	Orang	60	60
				Festival Fashion Millenial (DID)	Event	1	1
				Literasi Perpajakan bagi Pelaku UMKM Mitra Binaan Sibakul Jogja (DID)	Orang	60	60
				Peningkatan Literasi Keuangan bagi Pelaku UMKM Mitra Binaan Sibakul Jogja (DID)	Orang	60	60
				Kajian Tingkat Keberhasilan Wirausaha Pemula	Dokumen	1	1
				Jumlah Wirausaha yang dilayani dalam Konsultasi Bisnis	UKM	600	600
				Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas (DID)	Orang	30	30
				Festival UMKM Urban Sport Community (DID 2)	Event	1	1
				Promosi Produk Unggulan Wirausaha (DID 2)	Event	2	2
				Festival Teras Malioboro Jelang Akhir Tahun (DID 2)	Event	1	1
Pengiriman Komoditas Bahan Produksi Bagi UMKM (DID)	Pengiriman	10000	10000				

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pameran UMKM SiBakul Sport Festival (DID)	Event	1	1
				Pameran Produk UMKM Kreatif (DID 2)	Event	2	2
				Sibakul Bisnis Camp 2022 (DID)	Orang	30	30
			1. Pengembangan sistem aplikasi tata kelola KUKM terpadu (Sibakul Jogja)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			2. Subsidi ongkos kirim penjualan produk UKM melalui marketplace	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			
			3. Pengembangan Enterprenurship pelaku UMKM dilakukan melalui diklat, pendampingan dan fasilitasi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan ketimpangan wilayah.	Pameran Ekonomi Sirkular (DID)	Event	1	1
				Sertifikasi Halal (DID)	Produk	300	300
				Promosi dan pemasaran UKM SiBakul (DID)	Lokasi	3	3
				Pelatihan Pemasaran UMKM	Akt	16	16
				Jumlah Kontrak kerja sama yang dihasilkan dari kemitraan antara UKM dengan retail/toko modern/hotel/usaha menengah dan besar	Kontrak	4	4
				SiBakul Local Festival (DID)	Lokasi	2	2
				Peningkatan Kualitas Produk Kuliner Tenant (DID)	Orang	60	60
				Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Bagi UKM	UKM	30	30
				Sosialisasi Sertifikasi Halal	Akt	16	16

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Halal Fest SiBakul (DID)	Event	1	1
				Kajian Inovasi Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM di DIY	Dokumen	1	1
				Pendampingan Digitalisasi Pemasaran Produk KUMKM (DID)	KUMKM	90	90
				Jumlah UKM yang meningkat pengetahuannya mengenai merek dan branding produk	UKM	150	150
				Pelatihan Penguatan Kualitas Produk bagi UKM	Akt	1	1
				Pengujian Kandungan Gizi Produk UMKM (DID)	Produk	60	60
				Bintek Sertifikasi Halal bagi UKM	UKM	550	550
				Talkshow UKM	Kali	2	2
				Pelatihan Peningkatan Pemasaran Melalui Foto Produk	Akt	1	1
				PROGRAM PENYELENGGARAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
				Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia			
				Pengamanan dan pemeliharaan (listrik) ex hotel Mutiara	Paket	1	1
				Pengembangan kawasan pusat UMKM ex Indra	Lokasi	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8			
2				Pengadaan lahan untuk pengembangan dan penataan Tenant Teras Malioboro	Lokasi	1	1			
				Appraisal Pengembangan Teras Malioboro 1	Dokumen	1	1			
				Pengelolaan dan pemeliharaan tempat relokasi PKL di eks Indra	Lokasi	1	1			
				DED Pengembangan Teras Malioboro 1	Dokumen	1	1			
				Appraisal Pengembangan dan penataan tenant Teras Malioboro	Dokumen	1	1			
				Pengembangan Kewirausahaan Desa						
				BKK Desa Mandiri Budaya	Desa	5	5			
				Fasilitasi Ongkos Kirim	Kiriman	55000	55000			
				Masterplan Desa Mandiri Budaya	Dokumen	2	2			
				Masterplan Rintisan Desa Mandiri	Dokumen	5	5			
				Gelaran Produk UMKM SIBakul dan Gebyar Hari UKM	Kali	1	1			
				Peningkatan Kapasitas UMKM di Kawasan Perkotaan (Tahap Penumbuhan)	Kalurahan	3	3			
				Sertifikasi Produk MD	UKM	45	45			
				Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Desa Preneur	Kalurahan	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bimtek dan Fasilitasi Sertifikat PIRT	Angkatan	60	60
				Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	Aktivitas	2	2
				Pelatihan dan Pendampingan Digital Campaign bagi UKM Produk Tradisional SiBakul (Produk Tradisional)	UKM	30	30
				Peningkatan Pemahaman Perkoperasian melalui Gerebeg Koperasi	Kegiatan	0	0
				Tayangan Talkshow di TV Swasta Nasional	Kali	1	1
				Buletin SiBakul	Edisi	2	2
				Peningkatan Kapasitas UMKM di Desa Budaya (Tahap Pengembangan)	Desa	2	2
				BKK ke Desa Rintisan Mandiri Budaya	Desa	10	10
				Inkubator Bisnis	WUB	10	10
				Sarasehan KUMKM	Angkatan	60	60
				Fasilitasi Pembuatan Video Unggulan	Kali	3	3

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Peningkatan Kapasitas UMKM di Desa Mandiri Budaya (Tahap Penumbuhan)	Desa	12	12
				Virtual Exhibition Istimewa; Pameran Digital Produk Sibakul Khas Jogja (Produk Terpilih)	Produk Terpilih	50	50
				Pameran Gerai Produk UMKM DIY	%	5	5
				Peningkatan Pemahaman Perkoperasian melalui Gebyar Koperasi	Kegiatan	1	1
				Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk UMKM	Lokasi	2	2
				Fasilitasi Pendirian Koperasi	Koperasi	10	10
				Pameran Produk UMKM di destinasi wisata	Event	8	8
				Peningkatan Kapasitas Kuliner Teras Malioboro 1	Angkatan	8	8
				Peningkatan Kapasitas UMKM di Desa Bdaya (Tahap Maju)	Desa	10	10

12) *Urusan Penanaman Modal*

a) *Kondisi Umum*

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan dibidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor. Tiga faktor utama dalam iklim investasi diantaranya mencakup:

- (1) Kondisi ekonomi makro-termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik.
- (2) Kepemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektivitas peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil.
- (3) Infrastruktur- mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.

Investasi menjadi kunci dalam upaya penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan. Salah satu peran investasi dapat mendorong perekonomian di daerah. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk mengurangi kemiskinan, maka salah satu strategi melalui peningkatan realisasi investasi baik melalui Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka menarik para investor, diperlukan perbaikan lingkungan bisnis, produktivitas tenaga kerja, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik dan institusi. Guna menarik investasi ke daerah, DIY mempunyai kewajiban untuk menggali segala potensi dan mempertemukan antara keinginan investor dan keinginan daerah.

Pada tahun 2022 Kinerja investasi di DIY menunjukkan capaian yang positif. Pertumbuhan nilai realisasi investasi di DIY mencapai 3,9 triliun rupiah meningkat 12 persen dari tahun 2021 dengan komposisi PMDN sebesar 2,3 triliun rupiah dan PMA sebesar 1,6 triliun rupiah. Pertumbuhan realisasi investasi tersebut utamanya didorong oleh masih berlangsungnya Proyek Strategis Nasional (PSN) penunjang bandara, yakni pembangunan tol Jogja-Solo maupun Jogja-Bawen, dan pembangunan proyek-proyek multiyear, seperti pembangunan jembatan dan jalan pada Jalan Jalur Lintas Selatan, serta peningkatan investasi non bangunan pada tahun 2022. Investasi sektor usaha Informasi dan komunikasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi 5G, di sektor industri manufaktur, dan proyek-proyek kecil lainnya.

Investasi di DIY dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan yang fluktuatif seperti terlihat dalam tabel berikut ini. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami lonjakan yang tinggi dengan adanya pembangunan Bandara YIA di Kulon Progo yaitu sebesar 7,2 triliun rupiah dan 6,5 triliun rupiah. Selanjutnya pada tahun 2020 dan 2021 tercatat nilai realisasi investasi di DIY di angka 2,823 triliun rupiah hal ini disebabkan investasi dari kegiatan pendorong utama pertumbuhan realisasi investasi yaitu pembangunan bandara hanya merealisasikan untuk belanja modal lanjutan

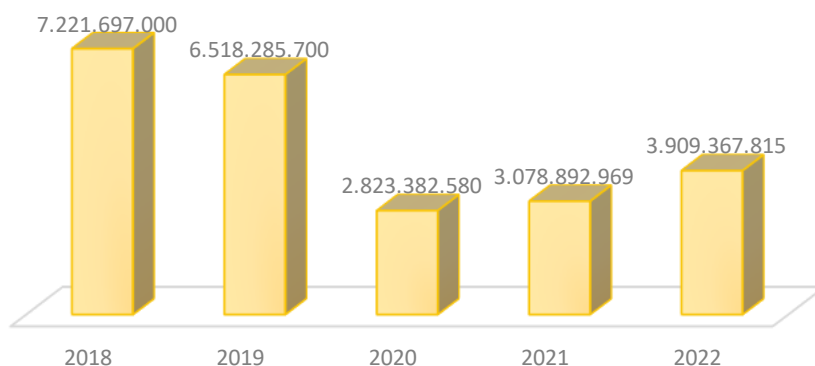
(*supporting infrastructure*) yang nilainya tidak sebesar belanja awal dan pengaruh kondisi pandemi Covid 19. Tahun 2021 Pertumbuhan realisasi investasi kembali mengalami kenaikan yang dengan realisasi sebesar 3,0 triliun rupiah atau 10,46%. Realisasi Investasi ini tentu berdampak pada peningkatan perekonomian di DIY

Tabel 3.136. Perkembangan Investasi di DIY 2018 – 2022

Tahun	Investasi PMDN (Rp000)	Investasi PMA (Rp000)	Total Investasi (Rp000)	Tambahan Investasi (Rp000)	Pertumbuhan Investasi
s.d 2018	10.949.163.293	9.126.508.081	20.075.671.374	7.221.697.000	56,18 %
s.d 2019	17.248.001.993	9.345.955.081	26.593.957.074	6.518.285.700	32,47 %
s.d 2020	19.931.377.693	9.485.961.961	29.417.339.654	2.823.382.580	10,62%
s.d 2021	22.692.647.593	9.803.584.510	32.496.232.103	3.078.892.969	10,46 %
s.d 2022	24.967.647.193	11.437.953.245	36.405.600.439	3.909.367.815	12,0%

Sumber: DPPM DIY, 2023

Pergerakan pertumbuhan investasi DIY selama kurun waktu 2018 – 2022 terlihat pada grafik pertumbuhan realisasi investasi berikut.



Gambar 3.42. Grafik Pertumbuhan Realisasi Investasi DIY Tahun 2018 – 2022

Sumber: DPPM DIY, 2023

Perekonomian DIY selama 2022 tumbuh sebesar 5,15% (c-to-c). Semua lapangan usaha tumbuh positif, dan yang tertinggi dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 18,26%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor luar negeri sebesar 8,33%. Sedangkan Perekonomian DIY pada triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,53%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PMTB yang tumbuh sebesar 7,03%.


Persebaran Investasi DIY

Realisasi investasi di Kabupaten dan Kota mencerminkan pola penanaman modal di DIY. Berdasarkan realisasi masing-masing wilayah, sebaran investasi di DIY di tahun 2018 dan 2019 dengan adanya pembangunan bandara baru YIA di Kabupaten Kulon Progo membawa perubahan pada peta sebaran investasi di DIY. Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 2022 ini menduduki urutan pertama dalam jumlah akumulasi investasi disusul Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul harus ditingkatkan menyusul wilayah lainnya dengan melihat potensi investasi yang ada di masing-masing wilayah.

Tabel 3.137. Perkembangan Investasi (PMA + PMDN) Kabupaten/Kota di DIY 2018 - 2022 (dalam rupiah)

Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab.Bantul	149.052.000 .000	130.879.300 .000	57.500.940 .000	112.673.164 .558	422.920.234 .908
Kab.Gunung- kidul	15.004.740 .000	78.408.200 .000	31.904.860 .000	290.612.425 .936	272.013.023 .431
Kab.Kulon Progo	4.578.561.380 .000	4.868.884.400 .000	1.866.540.980 .000	506.615.067 .362	609.773.375 .210
Kab.Sleman	1.517.233.260 .000	902.392.800 .000	624.203.480 .000	1.920.518.963 .401	1.271.960.088 .066
Kota Yogyakarta	961.845.620 .000	537.721.000 .000	243.232.320 .000	248.473.347 .912	1.332.701.093 .441

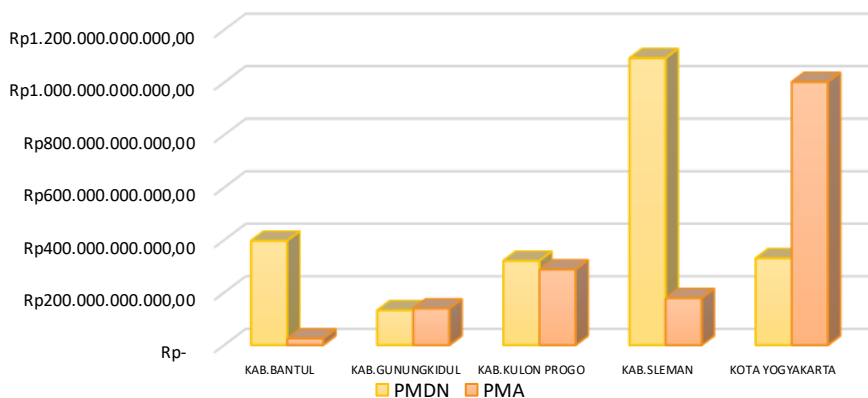
Sumber: DPPM DIY, 2023



Pada Tahun 2022, PMDN tertinggi kembali dicapai oleh Kabupaten Sleman, dengan angka 1.092.765 juta rupiah disusul oleh Kabupaten Bantul dengan angka 397.605 juta rupiah dan Kota Yogyakarta sebesar 330.673 juta rupiah. Sementara angka yang diperoleh Kabupaten Kulon Progo sebesar 321.437 juta rupiah dapat dikatakan semakin menurun, diakibatkan proyek strategis nasional seperti bandara sudah tinggal berfokus pada fasilitas pendukung. Disisi lain PMDN terbawah ditempati oleh Kabupaten Gunung Kidul dengan angka 132.516 juta rupiah. Tentu angka ini menjadi refleksi bagi Pemda DIY, bahwa ketimpangan dalam ruang lingkup investasi perlu ditelaah lebih lanjut terkait penyebab dan solusinya.

Pada tahun 2022, Kota Yogyakarta memperoleh angka tertinggi realisasi investasi PMA sebesar 1.002.027 juta rupiah, Kota Yogyakarta memperoleh nilai realisasi investasi yang cukup tinggi, hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta merupakan jantung pemerintahan dan perekonomian di DIY. Ditambah dengan aksesibilitas mudah, Kota Yogyakarta terhitung pada triwulan IV lalu, menarik investor di bidang telekomunikasi, untuk membangun infrastruktur 5G senilai ± 1.000.000 juta rupiah. Disusul Kabupaten Kulonprogo dengan angka 288.335 juta rupiah, Pencatatan realisasi PMA yang baik didukung oleh perkembangan area sekitaran bandara YIA dimana perkembangan area tersebut dapat menjadi pemantik realisasi Investasi PMA khususnya pada sektor Transpotasi, Gudang dan Telekomunikasi dan Pariwisata. Selanjutnya, Kabupaten Sleman dengan angka realisasi investasi sebesar 179.194 juta rupiah akibat adanya rencana Proyek Strategis Nasional seperti pembangunan Tol Jogja-Solo, Tol Jogja-Bawen, juga dikarenakan pengembangan salah satu mal terbesar yang ada di DIY. Sedangkan dari segi total realisasi investasi selama dua tahun terakhir, Kabupaten

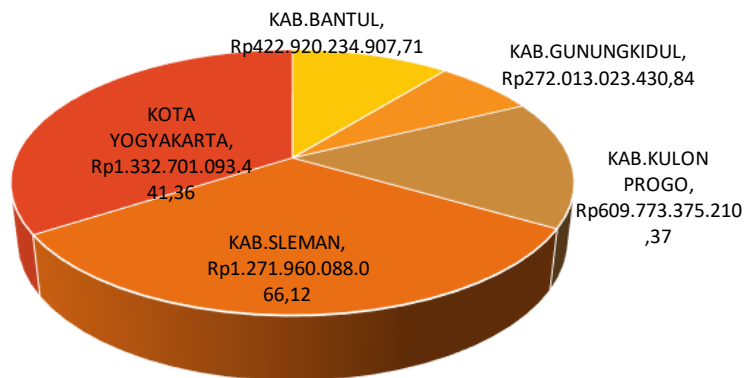
Sleman memperoleh nilai cukup baik. Gunungkidul mengalami perkembangan realisasi Investasi PMA yang cukup baik di tahun 2022, Kabupaten Gunungkidul mencatatkan realisasi sebesar 139.496 juta rupiah. Perkembangan tersebut didukung oleh pencatatan realisasi di sektor industri pengolahan khususnya industri tekstil. Kabupaten Bantul mencatatkan realisasi Investasi PMA paling rendah pada tahun 2022 sebesar 25.314 juta rupiah. Apabila diteliti lebih lanjut, catatan realisasi yang rendah bukan disebabkan oleh kecilnya populasi PMA yang berada di Bantul, melainkan proyek – proyek PMA yang berada di Kabupaten Bantul adalah proyek eksiting yang telah lama berdiri sehingga memang lazim jika tidak terjadi penambahan realisasi yang besar. Diharapkan adanya pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan diharapkan dapat mendorong peningkatan realisasi investasi di Kabupaten bagian selatan. Kabupaten Bantul khususnya diharapkan akan mendapatkan perkembangan yang baik mengikuti perkembangan Kulon Progo dan Gunungkidul.



Gambar 3.43. Grafik Realisasi Investasi Tahun 2022 (Tambah Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp)

Sumber: DPPM DIY, 2023

Persentase sebaran realisasi investasi tahun 2022 di masing-masing Kabupaten/Kota juga dapat dilihat dari *piechart* di bawah ini. Untuk tahun 2022 Kabupaten Kota Yogyakarta menguasai 34% realisasi investasi di DIY diikuti Kabupaten Sleman 32%, Kabupaten Kulon Progo 16%, Kabupaten Bantul 11% dan Kabupaten Gunung Kidul 7%.



Gambar 3.44. Sebaran Presentase Realisasi Investasi Tahun 2022 (Tambahannya Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota
 Sumber: DPPM DIY, 2023

Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2021-2022

Indikator kinerja urusan penanaman modal direpresentasikan melalui realisasi nilai PMTB dalam PDRB DIY, kenaikan PMTB berbanding lurus dengan investasi di sektor riil yang merupakan pencatatan investasi yang berkaitan dengan barang modal dan aset tetap dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Tabel 3.138. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2022 terhadap Target Akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai PMTB dalam PDRB DIY	Juta rupiah	49.021.449	44.798.028	53.972.182	120,48	44.798.028	120,48
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,54	86	87,84	102,14	86	102,14

Sumber: DPPM DIY, 2023

Pada tahun 2022 Nilai PMTB dalam PDRB DIY menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 53.972.182 juta rupiah. Nilai PMTB tersebut sudah melampaui target tahun 2022 sekaligus tahun akhir RPJMD sebesar 44.798.028 juta rupiah atau 120,47%. Seiring dengan membaiknya situasi pasca pandemi covid 19 mendorong pergerakan perekonomian di DIY terlihat dari realisasi nilai PMTB di tahun 2022.

Komitmen memberikan pelayanan perizinan yang berkualitas dan kemudahan berusaha turut berkontribusi dalam meningkatnya realisasi investasi di DIY. Melalui proses perizinan yang memberikan kemudahan akses investasi kepada calon investor yang akan berinvestasi yaitu berupa penyederhanaan layanan perizinan sesuai kewenangan daerah provinsi, serta penyediaan informasi terhadap potensi investasi. Perbaikan yang berkelanjutan pada berbagai unsur diantaranya Penataan sistem melalui digitalisasi proses perizinan yang terintegrasi dengan aplikasi OSS RBA, Si Cantik Cloud, mekanisme dan prosedur pelayanan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas SDM, monitoring evaluasi pelaksanaan PTSP sehingga dapat menjaga konsistensi dalam memberikan pelayanan prima. Capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 87,84 mencerminkan upaya

dan komitmen memberikan pelayanan perijinan dan penanaman modal yang terbaik.

b) Permasalahan dan Solusi


(1) Permasalahan

- (a) Pelaku usaha masih terasa terbebani mahal biaya untuk pengurusan persyaratan dasar yang prosesnya melibatkan jasa konsultan pada saat penyusunan dokumen (SLF, AMDAL). Hal ini dikarenakan belum ada *ceiling price* dan penentuan dasar tarif jasa konsultansi.
- (b) Belum tersedianya dokumen RDTR di seluruh kabupaten kota di DIY sebagai basis OSS RBA memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang menyimpan potensi masalah cukup besar untuk terjadinya tumpang tindih keruangan yang pada beberapa kasus berpotensi merugikan pelaku usaha.
- (c) Kurangnya pendampingan dalam pemilihan KBLI kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha sering salah dalam pemilihan KBLI dengan aktivitas bisnis yang sesungguhnya. Serta masih ditemukannya kendala teknis terkait dengan sinkronisasi antara system di OSS dengan system lain yang ada di Kementerian Teknis diantaranya terkait PB UMKU dan aplikasi SIINAS.
- (d) Terkait dengan kebutuhan utilitas, masih terdapat masalah diantaranya adalah terjadi *flicker* atau tegangan listrik yang volatile dari PLN. Pelaku usaha sudah melakukan aduan ke PLN namun belum ada tindak lanjut dari PLN. Selain itu adanya kenaikan tarif di PDAM Kota dirasa cukup memberatkan pelaku usaha.

- (e) Masih terdapat indikasi adanya penambang liar yang tidak berizin yang memicu kerusakan lingkungan sehingga harus terus diawasi dan ditertibkan.
- (f) Kendala pelaporan LKPM yang bersifat teknis dan tata cara pelaporan LKPM dan timeline pelaporan serta informasi apa saja yang harus pelaku usaha laporkan.
- (g) Ketimpangan antar wilayah yang cukup tinggi di DIY terutama di dua kabupaten yaitu Gunungkidul dan Kulon Progo.
- (h) Ketersediaan lahan untuk berinvestasi terbatas serta sulitnya menemukan luasan lahan minimal dan berada dalam satu hamparan, harga lahan mentah yang relatif sudah mahal, kendala status tanah dimana hamparan lahan yang luas seringkali berbenturan dengan tanah kas desa, dimana izin pengelolaannya dirasa terlalu panjang bagi investor.
- (i) Belum optimalnya utilisasi KI dan KPI di DIY dimana perlu adanya evaluasi dan strategi baru dalam pengembangan KI/KPI agar tingkat utilisasi kawasan dapat naik secara signifikan.

(2) Solusi

- (a) Dalam Rakornas Investasi BKPM RI / Kementerian Investasi Tahun 2022 isu ini telah disampaikan dari DPMPSTP seluruh Indonesia terkait dengan permasalahan belum terstandarnya *ceiling price* dari penyedia jasa, agar mendapatkan perhatian sehingga tidak kontraproduktif dengan jargon perizinan yang mudah dan murah.
- (b) Advokasi permasalahan-permasalahan di sistem OSS khususnya yang berkaitan dengan dokumen



RDTR kepada Kementerian Investasi dan instansi terkait baik pusat dan daerah baik yang sifatnya kendala sistem (teknis) sampai dengan kendala regulasi yang masih harus disinkronkan dengan seluruh *stakeholder*/Kementerian teknis sehingga *single submission* ini dapat benar-benar terwujud.

- (c) Penyusunan IPRO yang lebih berfokus pada sektor primer dan industri-industri yang memiliki kapasitas serapan tenaga kerja yang tinggi di dua kabupaten tersebut dan karakteristik berfokus kepada sektor-sektor primer yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, menaikkan pendapatan dan akhirnya dapat menjadi *proxy* dalam upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- (d) Melakukan advokasi dengan pihak terkait berkenaan dengan adanya gangguan tegangan listrik serta kenaikan tarif di PDAM Kota sehingga mencapai solusi yang memberikan keuntungan semua pihak.
- (e) Menata regulasi terkait dengan izin tambang dan diharapkan dapat membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam sektor ini.
- (f) Konsultasi LKPM, Bimtek LKPM dan inspeksi ke lapangan kepada pelaku usaha untuk memastikan semua pelaku usaha yang wajib LKPM menjalankan kewajibannya secara baik dan benar.
- (g) Strategi penumbuhan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul dengan mempertimbangkan potensi ekonomi lokal dan mengeksplorasi potensi baru. Faktor Pendorong yang diupayakan DPMPTSP DIY untuk mengatasi ketimpangan Penyebaran investasi di atas adalah dengan melakukan koordinasi dan


sinkronisasi regulasi pusat dan daerah dengan membuat Peraturan Gubernur sebagai dasar Pelayanan Perizinan dan melakukan pemantapan infrastruktur secara sinergis dengan kabupaten/kota serta Pemerintah Pusat dalam penyiapan infrastruktur.

- (h) Kerja bersama diantara seluruh *stakeholder* di DIY yang berkaitan dengan Penanaman Modal untuk melakukan konsolidasi potensi yang merupakan kunci efektivitas promosi investasi di DIY. Dengan bekerja bersama menentukan area potensi dan peluang dengan fokus di masing-masing wilayah, koordinasi untuk menyelesaikan ketidakmerataan investasi yang masih menjadi kendala mindset investasi, prosedur pengajuan proposal, prosedur pengambilan keputusan, pola koordinasi promosi, dan harmonisasi regulasi.
- (i) Diskusi bersama terkait strategi pengembangan KI/KPI dari *stakeholder* yang terkait.

c) *Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022*

Urusan penanaman modal pada tahun 2022 didukung melalui 5 program *core business* yang terdiri dari 5 kegiatan dan 8 sub kegiatan. Program tersebut adalah Program Pengembangan Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal. Serta Program Penunjang kesekretariatan terdiri dari 7 kegiatan dan 27 subkegiatan.

Total pagu anggaran belanja sebesar Rp13.197.420.295,00 dan menjadi Rp13.618.565.258,00 setelah adanya perubahan anggaran, bertambah sebesar Rp421.144.963,00. Adapun



realisasi kinerja keuangan sebesar Rp13.068.850.067,00 atau 95,96% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program urusan penanaman modal (Program Pengembangan Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal) yaitu sebesar Rp2.466.328.170,00. Sedangkan realisasi untuk program penunjang sebesar Rp8.688.647.515,60.

Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.139. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PENANAMAN MODAL	DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL	1. Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN tahun n	Juta rupiah	1.090.274	3.909.367
			2. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal (Aftercare Investor)	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN tahun n Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi Kajian Pengembangan Potensi Investasi DIY	Juta rupiah kajian	1.090.274 2	3.909.367 2
			3. Meningkatkan daya tarik penanaman modal dengan Pemberian insentif dan fasilitasi investasi	Forum Pemetaan	kali	1	1
			4. Menciptakan regulasi dan upaya lain dalam kerangka pengembangan iklim investasi dan peningkatan level Ease of Doing Business untuk mengantisipasi perubahan yang ada (terkait era Revolusi Industri 4.0).	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Nilai Rencana Investasi tahun n Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Nilai Rencana Investasi tahun n Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Bahan Promosi Investasi : 1 jenis dari 1 jenis Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Bunga Rampai Kerja sama Luar Negeri Forum jejaring promosi dan informasi investasi DIY Rekomendasi Hasil Evaluasi Kerja sama Luar Negeri Forum Kemitraan UMKM dengan investor dan dunia usaha Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi	Juta rupiah Juta rupiah Jenis dokumen kali Rekomendasi kali dokumen	1.790.824 1.790.824 1 1 2 1 1 1	67.187.936 67.187.936 1 1 2 1 1 1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	Pendampingan Pelaksanaan Kerja sama Luar Negeri	Mitra	2	2
				Video Promosi	video	1	1
			6. Mempercepat penyelesaian pengaduan perizinan dan kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat	Publikasi Media Cetak Hospitality	Kali terbit mitra	20 2	20 2
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
				Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	persen	100	99,12
				Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
			7. pengembangan investasi yang berbasis pada karakteristik wilayah	Presentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	persen	100	99,12
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
				Terlayannya Permohonan Perizinan dan Konsultasi/Pendampingan Bidang Perekonomian dan Infrastruktur	bulan	12	12
				Terlayannya Permohonan Perizinan dan Konsultasi/Pendampingan Bidang Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Rakyat	bulan	12	12
				Terselenggaranya Forum Komunikasi PTSP	kali	2	2
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan dokumen			
				Sosialisasi Perijinan Berusaha untuk Pelaku Usaha	Angkatan	17	17
				Terselesaikannya Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	pengaduan	5	24
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	86	87,84
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN tahun n	Juta rupiah	1.090.274	3.909.367
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
				Pertumbuhan nilai realisasi investasi PMA & PMDN tahun n	Juta rupiah	1090274	3.909.367
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku usaha	400	400
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan usaha	36	39
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
				Waktu Penyelesaian Izin Usaha	hari	1	2
				Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			
				Waktu Penyelesaian Izin Usaha	hari	1	2
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
				Dokumen SOP Izin dan non izin Video	dokumen	1	1
				Pengembangan aplikasi KSWP	Aplikasi	1	1
				Peningkatan Manajemen Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	A-	A-
				Bimtek OSS	Kali	1	1

13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a) Kondisi Umum

Pembangunan kepemudaan meliputi pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, serta pelaksanaan kegiatan guna mengatasi perilaku negatif pemuda. Salah satu upaya Pemda DIY memaksimalkan peran pemuda, dengan memberikan dukungan bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan pemuda, khususnya yang mengacu pada pengentasan kemiskinan dan pembentukan karakter pemuda. Tahun 2022 Pemda DIY kembali menggelar kejuaraan olahraga pelajar serta mengirimkan kontingen untuk bertanding pada tingkat regional.

Tabel 3.140. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	%	11,58	11,8	11,86	100,51	11,80	100,51
2	Prestasi Cabang Olahraga	Peringkat	N/A	Peringkat 8 POPNAS	N/A	N/A	Peringkat 8 POPNAS	N/A

Sumber: *Disdikpora DIY, 2023*

Capaian indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan telah mencapai target tahun 2022 sekaligus target akhir RPJMD. Dukungan Pemda DIY terhadap capaian indikator ini diwujudkan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan seleksi kepeloporan pemuda serta pengembangan kewirausahaan melalui berbagai pelatihan dan pemberian bantuan modal kepada kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan.

Indikator Prestasi cabang olahraga ditargetkan pencapaian prestasi pada POPNAS yaitu peringkat ke-8. Pada tahun 2022, kompetisi yang diselenggarakan adalah POPWIL dan kontingen DIY berhasil meraih peringkat ke-4 dengan perolehan 7 medali emas, 9 medali perak, dan 9 medali perunggu. Dengan demikian maka tidak ada capaian kinerja untuk indikator Prestasi cabang olahraga di tahun 2022.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Persentase pemuda wirausaha masih cukup rendah.
- (b) Kurang maksimalnya prestasi olahraga pelajar DIY.

(2) *Solusi*

- (a) Dukungan Pemda DIY terhadap peningkatan wirausaha pemuda dimulai dengan penyelenggaraan pendidikan kepemudaan seperti penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, baik yang bersifat pembinaan karakter, pengembangan keterampilan pemuda, maupun pengembangan kewirausahaan. Dengan adanya pendidikan kepemudaan ini diharapkan dapat membentuk karakter pemuda yang tangguh, inovatif, dan mandiri. Pendidikan kepemudaan khususnya pengembangan kewirausahaan kemudian didukung dengan bantuan pemberian modal peralatan yang diberikan kepada kelompok wirausaha pemuda, terutama di daerah kantong kemiskinan, yang diharapkan dapat mendorong inisiatif pemuda dalam mengembangkan usahanya.

(b) Upaya peningkatan olahraga prestasi bagi pelajar diawali dengan pembibitan calon atlet. Pemda DIY telah memberikan dukungan kepada penyelenggaraan kelas khusus olahraga pada 9 SMA di DIY serta penyelenggaraan pusat pembinaan dan pelatihan atlet. Disamping itu dilaksanakan pula Pembinaan Atlet Berbakat guna menjangkau potensi atlet pelajar. Pembibitan akan dilanjutkan dengan uji coba tanding dan pelatihan intensif guna mengasah kemampuan atlet pelajar. Dalam pelatihan para atlet juga akan diberikan materi mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan suplemen atlet serta pentingnya pembinaan psikologis atlet untuk membentuk mental juara dalam kompetisi. Diharapkan melalui rangkaian kegiatan ini dapat tercapai peningkatan prestasi atlet pelajar DIY di ajang regional, nasional, maupun internasional.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Alokasi anggaran untuk Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022 adalah sebesar Rp42.344.258.500,00. Anggaran tersebut dibagi dalam 4 program, 11 kegiatan, dan 26 subkegiatan. Realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp38.984.957.339,00 (92,07%), dengan capaian fisik sebesar 99,41%. Deviasi fisik disebabkan terkendalanya hibah untuk KNPI DIY karena belum adanya kepastian hukum terhadap status organisasi KNPI DIY yang mengalami dualisme kepengurusan. Sedangkan, deviasi keuangan berasal dari efisiensi anggaran belanja rutin, kegiatan pelatihan kewirausahaan, seleksi dan pembinaan paskibraka, pembinaan atlet berbakat, penyelenggaraan POPDA, dan pengiriman kontingen untuk mengikuti Pra-POPNAS.

Tabel 3.141. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA	- Penyediaan sarana olahraga publik bagi masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			- Penyediaan sarana olahraga yang memenuhi standar pelayanan internasional sehingga memudahkan pemanfaatan dan penggunaan pada saat kompetensi olahraga	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100
			- Penyediaan akses public atas sarana olahraga bagi masyarakat untuk meningkatkan pola hidup sehat gemar olahraga	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100
			- Penyediaan sarana umum seperti toilet, shower dan mushola yang dapat digunakan baik oleh atlet yang bertanding maupun berlatih, dan masyarakat sebagai pengguna umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100
			- Pembentukan kelompok pemuda sebagai model akan terwujudnya kemandirian dan kewirausahaan yang dilakukan mulai dari pelatihan, pendampingan dan bantuan usaha namun dengan tetap dilakukan evaluasi terkait trial dan error selama pelaksanaan sehingga dapat dijadikan model bagi kelompok pemuda lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100
			- Pendampingan terhadap sentra pemuda yang sudah pernah mendapatkan pelatihan sehingga didapatkan tolak ukur dan evaluasi atas capaian yang sudah dicapai baik berupa keberhasilan maupun kegagalan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
			- Membuka kesempatan kerja sama dengan dunia industry kreatif dan pariwisata dengan membentuk jaringan kerja antara sentra pemuda dengan berdasar spesifikasi/kekhurusan produk	Dukungan terhadap capaian % persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		6	6

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Peningkatan kegiatan kepemudaan seperti karang taruna, pramuka, tonti dan PMI	Honor Pengelola keuangan	orang	9	9
			- Pengiriman pemuda/ pemudi melalui program pertukaran pemuda baik antar daerah di Indonesia maupun ke Negara lain	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
			- Penyelenggaraan kegiatan yang mampu meningkatkan kreatifitas dan peran serta pemuda dalam menjaga keamanan, kebersamaan dan kesatuan melalui kegiatan lintas agama	Dukungan terhadap capaian % persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		0.02	0.02
				Honor Pengelola Barang	orang	2	2
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Alat/Bahan Komponen jenis Listrik/penerangan bangunan		13	13
				Dukungan terhadap capaian % persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		0.68	0.68
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Perlengkapan dan sarana kearsipan jenis		6	6
				Dukungan terhadap capaian % persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		0.68	0.68
				Alat Tulis Kantor jenis		47	47
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				peralatan kebersihan dan bahan pembersih jenis		23	23
				Dukungan terhadap capaian % persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		0.68	0.68
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				penggandaan	lembar	25000	25000
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0.68	0.68
				Barang cetakan	jenis	8	8
				jilid	eksemplar	250	250
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0.68	0.68
				langganan surat kabar/majalah	bulan	12	12
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	0.68	0.68
				Konsultasi dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah	tahun	1	1
				makan minum rapat	orang/kali	1187	1187
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai RKBMD	jenis	10	10
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	8.16	8.16
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	8.16	8.16
				Pekerjaan Talut Buper Babarsari	m2	1192	1192
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				materai	buah	43	43
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	11.4	11.4
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	11.4	11.4
				Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan kawat/faksimil/internet	tahun	1	1
				Jasa Pengolahan Sampah	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	11.4	11.4
				jasa keamanan	tahun	1	1
				jasa kebersihan	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Pajak kendaraan dinas roda 4	unit	4	4
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	2.79	2.79
				KIR kendaraan	unit	2	2
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 3	unit	4	4
				Pajak kendaraan dinas roda 3	unit	4	4
				Pajak kendaraan dinas roda 2	unit	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4	unit	4	4
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2	unit	6	6
				Bahan Bakar Kendaraan	liter	2199	2199
				Pemeliharaan Mebel			
				Pemeliharaan Mebeleur kantor sesuai RKPBMĐ	jenis	2	2
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	2.79	2.79
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor sesuai RKPBMĐ	jenis	21	21
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	279	279
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Pemeliharaan Gedung dan Aset	unit	9	9
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	2.79	2.79
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	tahun	1	1
				Pemeliharaan Instalasi Listrik	tahun	1	1
				Dukungan terhadap capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	2.79	2.79

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemeliharaan Jaringan Telepon	tahun	1	1
				Pemeliharaan Instalasi Air Kotor	tahun	1	1
				Pemeliharaan Jaringan Internet/Komputer	tahun	1	1
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
				Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	Persen	30	30.07
				Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	Persen	30	30.07
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi			
				Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	%	12	6
				Seleksi dan Pengiriman Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)	orang	4	2
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi			
				Pelatihan Keterampilan Kantong Kemiskinan	kelompok	15	15
				Pelatihan Keterampilan Pemasaran Online	kelompok	126	126
				Sentra Kewirausahaan Pemuda	kelompok	6	6
				Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan pemuda	%	12	12

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan			
				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera			
				Dukungan terhadap capaian % peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan		12	12
				Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	siswa	80	80
				Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			
				Dukungan terhadap capaian % peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan		12	12
				Pemuda Kader Anti Narkoba DIY	orang	550	550
				Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi			
				Hibah Kelembagaan (KNPI DIY)	lembaga	1	0
				Dukungan terhadap capaian % peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan		1	0
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
				Jumlah medali dalam kompetisi POPWIL	Medali	7	25
				Jumlah medali dalam kompetisi POPWIL	Medali	7	25
				Jumlah medali dalam kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS	Medali	13	NA

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah medali dalam kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS	Medali	13	NA
				Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi			
				POPWIL	cabor	8	8
				PEPARPEDA	cabor	3	3
				PAB	atlet	260	260
				POPDA	cabor	29	29
				Dukungan terhadap capaian jumlah medali dalam kompetensi POPWIL, POPNAS dan PEPARNAS	%	19	19
				Pengembangan Organisasi Keolahragaan			
				Dukungan terhadap capaian jumlah medali dalam kompetensi POPWIL, POPNAS dan PEPARNAS	%	37	37
				Hibah Kelembagaan (KONI DIY)	tahun	1	1
				Hibah Kelembagaan (KORMI DIY)	tahun	1	1
				Hibah Kelembagaan (NPC DIY)	tahun	1	1
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
				Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	Persen	30	30,07
				Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan	Persen	30	30,07
				Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi			
				Hibah Kelembagaan (Kwarda)	lembaga	1	1
				Dukungan terhadap capaian persentase keterlaksanaan kegiatan kepramukaan dalam 1 tahun kerja	%	2	2



No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				Gaji dan tunjangan	tahun	1	1
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Komponen Listrik/penerangan bangunan	jenis	11	11
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Perlengkapan kantor sesuai dengan RKBMD	jenis	5	5
				Alat Tulis Kantor	jenis	47	47
				Perlengkapan untuk sarana kearsipan	jenis	8	8
				Peralatan kantor sesuai dengan RKBMD	jenis	3	3
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	23	23
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Jilid	buah	250	250
				Penggandaan	lembar	46000	46000
				Barang cetakan	jenis	8	0
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Langganan surat kabar/majalah	tahun	1	1
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Penyediaan rapat-rapat koordinasi	tahun	1	1
				Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan kawat/faksimil/internet	tahun	1	1
				Jasa pengolahan sampah	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Jasa keamanan	tahun	1	1
				Honor pengelola barang	orang	2	2
				Honor Pengelola Keuangan	orang	9	9
				Jasa kebersihan	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Pajak Kendaraan	unit	9	9
				BBM	tahun	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemeliharaan kendaraan Dinas	tahun	1	1
				KIR	unit	2	2
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Pemeliharaan gedung kantor	tahun	1	1
				Pemeliharaan prasarana Kepemudaan dan Olahraga	unit	8	8
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Pemeliharaan jaringan Pos dan telemonikasi	tahun	1	1
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	tahun	1	1
				Pemeliharaan Alat-alat berat	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Perangko, meterai dan benda pos lainnya	jenis	1	1
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi			
			Meningkatkan kualitas pemuda dengan membangun sikap mandiri secara sosial dan ekonomi dengan mampu berwirausaha, dan menciptakan lapangan kerja	Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP)	SKP	6	6
				Sosialisasi Pemuda	kali	22	22
				Pelatihan kewirausahaan Pemuda kantong kemiskinan	kelompok	20	20
				Pelatihan Keterampilan / Kewirausahaan Pemuda	Kelompok	59	59
			Meningkatkan karakter pemuda melalui pendidikan kebangsaan, kemandirian, berbudaya dan cinta tanah air	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera			
				Seleksi dan Pelatihan Paskibraka DIY dan Nasional	siswa	80	80
				Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi			
				Bantuan Kelembagaan Organisasi Pemuda	lembaga	2	1
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
				Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi			
			Meningkatkan kualitas dan prestasi atlet dengan mengikutsertakan dalam kompetensi olahraga yang berskala nasional dan internasional	Pembinaan Atlet Berbakat (PAB)	orang	250	250
				Pemberian Penghargaan Prestasi Gubernur	Kegiatan	1	1
				Pengembangan Organisasi Keolahragaan			
				Bantuan Kelembagaan Organisasi Olahraga	lembaga	2	2

14) *Urusan Statistik*

a) *Kondisi Umum*

Berdasarkan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY), Pergub DIY Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pergub DIY Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta, program dan kegiatan Urusan Statistik di Pemda DIY dilaksanakan oleh Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah (BPPSD) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Bappeda DIY .

Dalam penyelenggaraan urusan statistik, telah terbit Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang ditindaklanjuti dengan Pergub DIY Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah DIY. Dalam penyelenggaraan Satu Data, data yang dihasilkan oleh produsen data harus berdasarkan empat prinsip yaitu memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi statistik tersebut Pemda DIY telah memiliki *tool* dalam pengelolaan data berupa Portal Satu Data Pembangunan Daerah DIY merupakan portal resmi data terbuka tingkat daerah yang dapat diakses melalui Aplikasi Dataku untuk data statistik

dapat diakses pada alamat <http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/>. dan Aplikasi Geoportal untuk data spasial dapat diakses pada alamat <http://geoportal.jogjaprovo.go.id/>.

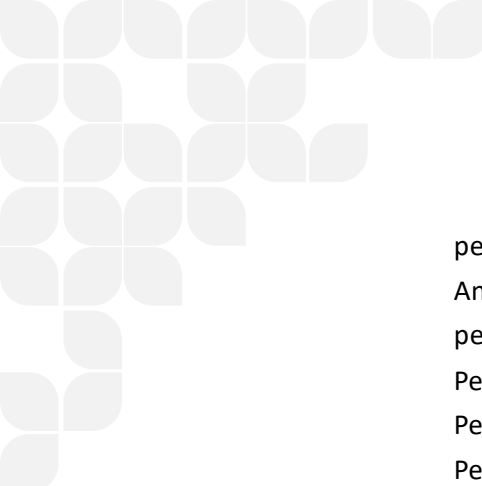
Kinerja Urusan Statistik Tahun 2022 diukur dengan dua indikator yaitu: 1) Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah; dan 2) Tingkat Kepuasan Pelanggan. Target dan realisasi kinerja Urusan Statistik secara rinci disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.142. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Statistik Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam Perencanaan Pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat Kepuasan pelanggan	%	84,77	72	85,50	118,75	72	118,75

Sumber: Bappeda DIY, 2023

Realisasi kinerja urusan statistik pada persentase ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan pada tahun 2022 telah sesuai target sebesar 100% (4.522 elemen data bisa terisi seluruhnya) pada Aplikasi Dataku. Realisasi kinerja pada tingkat kepuasan pelanggan tahun 2022 dengan target sebesar 72 telah tercapai sebesar 85,50%. Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD adalah 100% untuk indikator persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah, dan 118,75% untuk indikator tingkat kepuasan pelanggan. Beberapa analisis yang telah disusun yaitu: 1) Dokumen Analisis ICOR Sektorial DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan,



pengendalian dan evaluasi pembangunan; 2) Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; 3) Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian; 4) Penyediaan Data Statistik Geospasial Perencanaan dan Pengendalian; 5) serta Dokumen Proyeksi Data.

Pelaksanaan survei tingkat kepuasan pelanggan mengacu Pergub DIY Nomor 32 Tahun 2019. Indikator penilaian kepuasan masyarakat terdiri dari sembilan unsur yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana prasarana, penanganan pengaduan, serta saran dan masukan.


Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada tiga layanan yang berkaitan dengan data dan statistik meliputi: 1) layanan data dan informasi spasial dan non spasial *online* berupa Sistem Informasi Pengelolaan Data Pembangunan Daerah (Pengumpulan dan penyajian data statistik pada aplikasi Jogja Dataku) serta Sistem Informasi Geospasial (Pengumpulan dan Penyajian data geospasial pada aplikasi Geoportal); 2) layanan data dan informasi spasial dan nonspasial *offline* berupa penerbitan buku-buku analisis antara lain Analisis ICOR DIY, Analisis Makro Ekonomi, Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian, Penyediaan Data Geospasial Perencanaan dan Pengendalian, Fasilitasi Satu Data Indonesia berupa Bimtek Proyeksi Data dan Dokumen Proyeksi Data, serta 3) layanan pengaduan.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terkait layanan data dan statistik sebesar 85,50 termasuk dalam kategori kinerja Baik. Unit Layanan diperoleh nilai per unsur pelayanan berkisar 79,98 sampai 94,49. Nilai Kepuasan pelanggan yang capaiannya tertinggi terdapat pada unsur Biaya/Tarif dengan nilai 94,49 dengan kategori A peringkat 1. Sedangkan nilai kepuasan pelanggan yang capaiannya rendah adalah unsur sarana prasarana dengan nilai 79,98 (kategori Baik dengan peringkat 9), karena Nilai unsur pelayanan sarana prasarana belum optimal dengan keterbatasan sarana prasarana yang belum tersedia seperti: laboratorium pemetaan untuk pengelolaan data geospasial berupa *software* dan *hardware*, dan fasilitas untuk difabel.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Tata kelola penyelenggaraan data statistik belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Dari 4 prinsip Satu Data Indonesia (SDI), 3 prinsip sudah terpenuhi yaitu standar dan kode referensi (kewenangan Pusat) serta interoperabilitas (kewenangan daerah). Sedangkan Metadata belum dapat dipenuhi seluruhnya, karena belum semua produsen data dapat menyusun metadata, terutama untuk tambahan data baru yang diusulkan oleh OPD.
- (b) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial:
 - a. Kurangnya SDM yang kompeten dibidang Geospasial dan belum tersedia formasi personil yang membidangi ketugasan pengelolaan data informasi geospasial (jabatan fungsional tertentu surveyor pemetaan



atau jabatan fungsional umum); b. Rendahnya literasi geospasial terutama tentang kualitas dan standarisasi data geospasial; c. Pengelolaan data/informasi geospasial belum memiliki fasilitas berupa sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan JIGD.

(2) Solusi

- (a) Penyesuaian tata kelola penyelenggaraan data pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat, utamanya terkait prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, khususnya metadata, dengan menyelenggarakan bimtek penyusunan metadata bagi produsen data;
- (b) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial : a. Memaksimalkan pemanfaatan SDM yang ada dan berkemampuan di bidang data spasial, menyelenggarakan bimtek Geospasial dan mengupayakan tersedianya formasi personil yang membidangi pengelolaan data informasi geospasial (jabatan fungsional tertentu surveyor pemetaan atau jabatan fungsional umum); b. Penyediaan buku, dokumen, atau aturan yang mendukung peningkatan literasi dalam hal pengelolaan data geospasial dan standarisasi data; c. Penyesuaian tata kelola penyelenggaraan data geospasial sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), dengan mengupayakan penyediaan sarana prasarana yang memadai.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Pada tahun 2022 Urusan Statistik dilaksanakan melalui 2 program, 5 kegiatan dan 18 sub kegiatan. Alokasi anggaran tersebut sebesar Rp619.355.590,00 dapat direalisasikan sebanyak Rp588.566.548,00 atau 95,03%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Berikut rincian capaian program dan sub kegiatan Urusan Statistik.

Tabel 3.143. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Statistik Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN UMUM	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH	<p>1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik Ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (jogjaplan) dan Monev (Sungguh) serta office management, maupun ketersediaan informasi untuk publik melalui web Bappeda.</p> <p>2. Penguatan fasilitas terhadap aktivitas perencanaan dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan.</p> <p>3. Meningkatkan kerja sama dengan akademisi sebagai tenaga ahli/konsultan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan monev pembangunan.</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.</p> <p>5. Meningkatkan Kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan serta mempertajam perumusan indikator pembangunan.</p> <p>6. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis monev serta kontrol terhadap capaian indikator.</p> <p>7. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan forum CSR dalam mendukung pembiayaan pembangunan.</p> <p>8. Membangun link antar sistem yang ada di internal Bappeda DIY dan dengan sistem informasi diluar Bappeda DIY yang terkait.</p>	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</p> <p>Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>Terlaksananya Pengelolaan Keuangan</p> <p>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD</p> <p>Terlaksananya Pengelolaan Gaji</p> <p>Dukungan terhadap persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD</p> <p>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD</p> <p>Terlaksananya Penatausahaan BMD sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku</p> <p>Dukungan terhadap Presentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p>	<p>bulan</p> <p>bulan</p> <p>persen</p> <p>bulan</p> <p>persen</p> <p>jenis</p>	<p>12</p> <p>12</p> <p>100</p> <p>12</p> <p>100</p> <p>6</p>	<p>12</p> <p>12</p> <p>100</p> <p>12</p> <p>100</p> <p>6</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			9. Menjamin infrastruktur jaringan dan kompute berjalan optimal dan termaintain secara berkelanjutan.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	jenis	55	55
			10. Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengankabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik/program strategis bersama yang konsisten dan terukur.	Penyediaan Kertas dan Cover	jenis	4	4
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			11. Meningkatkan sistem aplikasi yang dimiliki mampu menampilkan informasi secara akurat guna memperkuat proses perencanaan berbasis bukti dan data.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jenis	12	12
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian			
			12. Pengembangan sistem aplikasi yang dimiliki (Jogjaplan, Monev Sengguh, Sintal, JogjaDataku, dll) sesuai dengan kebutuhan.	Penyediaan barang Cetak	jenis	4	4
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
			13. Menyempurnakan mekanisme forum Trilateral desk dengankabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik/program strategis bersama yang konsisten dan terukur.	Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan: - Surat Kabar	jenis	2	2
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	bulan	12	12
				Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas OPD: - Penataan Arsip	bulan	12	12
				Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	bulan	12	12
				Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	bulan	12	12
				Dukungan terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Printer	unit	1	1
				Dukungan terhadap persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Benda Pos: -Surat Masuk	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Benda Pos: - Surat Keluar	Bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Benda Pos: - Materai	Buah	100	100
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Benda Pos: - Jasa Pengiriman	kali		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Pembayaran Tagihan Rekening Telepon	bulan	12	12
				Langganan Akun Teleconference	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor:- Pembersihan kantor UPT BAPPEDA DIY	bulan	12	12
				Dukungan terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional:- Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	unit	1	1
				Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara: Kendaraan Dinas Roda 4	unit	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Jaringan Komputer	unit	1	1
				Komputer PC	unit	8	8
				Printer	unit	5	5
				Notebook	unit	3	3
				Kamera	unit	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Pemeliharaan Gedung BPPSD	unit	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Pemeliharaan AC Split	unit	4	4
				Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran	unit	2	2
				Dukungan Terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	100	100
				PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH			
				Presentase Pemenuhan Kebutuhan data dan Analisis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	persen	100	100
				Tingkat Kepuasan Pelanggan	persen	72	85,50
				Dokumen Analisis ICOR Sektoral DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembanguan	dokumen	1	1
				Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembanguan	dokumen	1	1
				Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian	dokumen	1	1
				Penyediaan Data Statistik Geospasial Perencanaan dan Pengendalian	dokumen	1	1
				Update Aplikasi Jogja Dataku	aplikasi	1	1
2	STATISTIK	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH					

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengumpulan dan Penyajian Data Statistik	paket	1	1
				Pengumpulan dan Penyajian Data Geospasial	paket	1	1
				Fasilitasi Satu Data Indonesia: Dokumen Proyeksi Data	dokumen	1	1
				Dukungan 100 % terhadap persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan sebesar 100% dan tingkat kepuasan pelanggan sebesar 72%	%	100	100

15) *Urusan Persandian*

a) *Kondisi Umum*

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sistem pemerintahan juga mengalami transformasi digital. Beralihnya tata kelola pemerintah menuju era digital, berpotensi menimbulkan ancaman keamanan. Karenanya, perlu dilakukan upaya pengamanan data dan informasi yang dikelola Pemda DIY baik yang berbentuk fisik maupun elektronik.

Keamanan informasi dan persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas informasi atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di berbagai aspek mulai dari administrasi kepegawaian, administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgeting*), layanan publik dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, peretasan, dan berbagai ancaman siber lainnya. Hal ini tentu saja perlu dimitigasi dengan baik.

Untuk itu, Pemda DIY telah melakukan berbagai aktivitas pengamanan informasi dan persandian diantaranya: a. penyusunan berbagai kebijakan dan prosedur terkait keamanan informasi; b. melaksanakan kegiatan pengamanan persandian dan keamanan informasi seperti pengamanan sinyal pada event strategis pimpinan, kunjungan pejabat tinggi, sterilisasi ruang kerja dan ruang rapat pimpinan di Pemda DIY dan Kabupaten/Kota, dan pengamanan komunikasi VIP (Gubernur dan Wakil Gubernur); c.

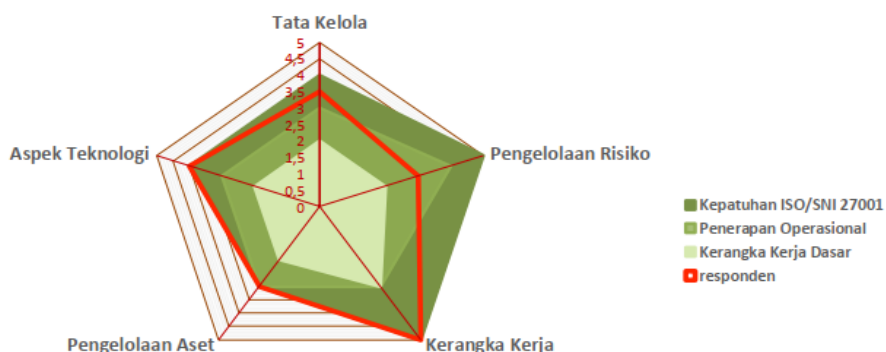
melakukan *assessment* kerentanan aplikasi yang dikelola Pemda DIY; d. melakukan monitoring dan respon terhadap insiden siber; dan e. melakukan pengamanan logic maupun fisik pada pusat data yang dikelola Pemda DIY; dan f. melakukan *assessment* indeks keamanan informasi dan tingkat kematangan keamanan siber serta evaluasi pelaksanaan kegiatan persandian berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hasil *assessment* keamanan informasi dan persandian oleh BSSN tahun 2018-2022 didapatkan penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.144. Nilai *assessment* keamanan informasi dan persandian oleh BSSN tahun 2018-2022

No	Tahun	Nilai <i>Assesment</i>
1.	2018	Indeks Kemanan Informasi dengan <i>score</i> 547 dari maksimum <i>score</i> 645
2.	2019	Penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden sebesar 2,18 pada Level Kematangan Tingkat III (<i>Establishing</i>) dari V
3.	2020	Penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden sebesar 4,39 pada Level Kematangan Tingkat IV (<i>Managed</i>) dari V
4.	2021	626 (Baik) dari maksimum <i>score</i> 645 Kategori Sistem Elektronik Strategis Penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden sebesar 4,4 pada level Kematangan tingkat IV (<i>Managed</i>) dari V
5.	2022	627 (Baik) dari maksimum <i>score</i> 645 Kategori Sistem Elektronik Strategis Penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden sebesar 4.52 masuk kategori dikelola optimal

Sumber: BSSN, 2023



Gambar 3.45. Penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI)


Sumber: Diskominfo DIY, 2023

Untuk meningkatkan kemampuan personil di bidang keamanan informasi dan persandian, dilaksanakan pelatihan *awareness* keamanan informasi, dan persiapan pengamanan infrastruktur vital melalui pelatihan *born to defense* yang diselenggarakan oleh BSSN.

Dalam melaksanakan kegiatan pengamanan persandian dan keamanan informasi seperti pengamanan sinyal pada *event* strategis pimpinan, kunjungan pejabat tinggi, sterilisasi ruang kerja dan ruang rapat pimpinan di Pemda DIY dan Kabupaten/Kota, dan pengamanan komunikasi VIP (Gubernur dan Wakil Gubernur), Bidang Keamanan Informasi dan Persandian difasilitasi peralatan-peralatan persandian yang mayoritas merupakan barang pinjam pakai dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Urusan Persandian di Pemda DIY dilaksanakan melalui program Persandian untuk Pengamanan Informasi yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan. Secara umum pelaksanaan Urusan Persandian di Pemda DIY pada Tahun 2022 sebagai berikut:

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Komunikasi Pemda DIY
 - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, dengan target tercapainya sertifikasi ISO 27001 untuk infrastruktur *Data Center* dan layanan persandian. Dalam upaya penerapan sistem manajemen keamanan informasi dan perbaikan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, Pemda DIY telah menetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan Peraturan Gubernur DIY



Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi. Peraturan ini mewajibkan seluruh aplikasi yang dikelola Pemda DIY, diletakkan di data center Pemda DIY yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, *Data Center* Pemda DIY dikelola sesuai standar ISO 27001:2013 dan telah tersertifikasi. Selain itu dilakukan *assesment* indeks keamanan informasi, tingkat kematangan keamanan siber dan evaluasi pelaksanaan kegiatan persandian oleh BSSN.


Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan target 1 laporan insiden keamanan informasi dan 1 laporan hasil *penetration testing*. Untuk melakukan pemantauan, penanganan dan pelaporan insiden, dibentuk Tim JOGJAPROVCSIRT berdasarkan SK Gubernur Nomor 274/TIM/2021 tentang Pembentukan Jogjaprov Computer Security Incident Response Team Tahun 2022 yang melibatkan unsur Dinas Kominfo Kab/Kota di wilayah DIY, Polda DIY, Korem 072/Pamungkas, dan Kejati DIY. Setiap insiden siber yang terjadi dicatat dan ditindaklanjuti untuk kemudian dilakukan pelaporan. Untuk mendukung kegiatan tersebut, dibangun ruang SOC (*Security Operation Center*) yang menjadi pusat pemantauan insiden di Pemda DIY. Sepanjang tahun 2022 tercatat terjadi 61 insiden yang mengakibatkan terganggunya kerahasiaan, integritas dan ketersediaan satu atau

beberapa sistem yang diletakkan di *Data Center* Pemda DIY. Untuk meningkatkan keamanan aplikasi dilakukan pengujian keamanan sistem informasi (*Penetration Testing*) pada 10 aplikasi yang digunakan oleh OPD di Pemda DIY untuk mengetahui celah kerawannya. Aplikasi yang dilakukan pengujian adalah aplikasi yang melakukan pengelolaan data pribadi sebagaimana yang disebutkan dalam Undang Undang Perlindungan Data Pribadi.

Penetration testing atau biasa disebut *pentest* adalah proses peretasan sistem setelah diberikan izin oleh pemilik sistem untuk mengevaluasi tingkat keamanan sistem dari *exploit*, *zero-day vulnerability* dan berbagai komponen kerentanan sistem lainnya.

Untuk aplikasi yang tidak dilakukan *penetration testing*, Pemda DIY berupaya melakukan perlindungan informasi dengan menerapkan *Secure System Development Life Cycle*, penggunaan *SSL*, pengecekan kerentanan sistem menggunakan *Vulnerability Assessment Tools* dan pemisahan ekosistem *production* dan *development* di *Data Center* Pemda DIY.

- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
Dengan indikator pertama adalah *Email* Pemerintah Daerah yang terpelihara. Pemanfaatan *email* ini akan dijadikan sebagai identitas bagi setiap ASN di Pemda DIY yang melekat pada masing-masing individu ASN di Pemda DIY. Saat ini seluruh ASN Pemda DIY telah difasilitasi *email* jogjaprov.go.id untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan.



Akun email ini juga menjadi dasar pengembangan *Single Sign On* untuk aplikasi internal Pemda DIY. Sedangkan indikator kegiatan kedua adalah: Ketersediaan akses Datacenter SLA dengan Menyediakan akses layanan Data Center Pemda DIY dengan melakukan perawatan dan pengelolaan *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) Pemda DIY serta menjamin kerahasiaan, integritas, akuntabilitas dan ketersediaan informasi yang ada dalam DC dan DRC Pemda DIY, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan *Service Level Agreement* (SLA) terhadap Layanan *Data Center* Pemda DIY sebesar 99,5 % dalam 1 Tahun.

(2) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Antar Perangkat Daerah Provinsi Dengan Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi. Adapun indikator kegiatannya sebagai berikut:

- Jaringan telepon PABX yang terpelihara: adalah kegiatan untuk Pengelolaan telepon berbasis PABX untuk instansi di lingkungan Pemda DIY sebagai salah satu jaring komunikasi sandi internal Pemda DIY yang tersebar di 37 perangkat daerah dan titik terkoneksi sejumlah 600 ekstensi baik berupa Operator *Console*, Telepon Digital maupun analog.
- Jumlah Layanan Pemda yang sudah menggunakan tanda tangan digital merupakan kegiatan untuk melakukan penerbitan sertifikat elektronik bagi pejabat di lingkungan Pemda DIY dan keperluan integrasi sistem elektronik. Dalam hal kebijakan teknis, Dinas Komunikasi dan Informatika menginisiasi disusunnya Pergub DIY Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat

Elektronik di lingkungan Pemda DIY. Sampai tahun 2022, telah diterbitkan 321 sertifikat elektronik untuk ASN khususnya pejabat di lingkungan Pemda DIY. Hingga saat ini, terdapat 4 (empat) aplikasi yang telah terintegrasi dengan tanda tangan elektronik dari BsrE yaitu Aplus Kinangkat, Sadewa, Sisminkada, SimRS Ghrasia. Rekomendasi Forum Komunikasi Sandi Daerah (Forkomsanda) merupakan kegiatan rutin berupa pertemuan bagi pengelola persandian di lingkungan Pemda DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY, unsur TNI POLRI dan penggiat keamanan informasi.

- Ruang Kerja yang teramankan merupakan kegiatan *Counter Surveillance* (Kontra Penginderaan) ruang kerja dan ruang rapat pimpinan daerah serta Kepala Perangkat Daerah di wilayah Pemda DIY dalam rangka meminimalisir adanya kebocoran informasi dari ruang kerja atau ruang rapat pimpinan. Pada tahun 2022 dilakukan kontra penginderaan untuk 46 ruang kerja maupun ruang rapat pimpinan di wilayah DIY. Selain itu terdapat 5 (lima) kegiatan strategis yang diamankan dengan pengamanan sinyal.
- Upgrade dan relokasi PABX merupakan kegiatan untuk meningkatkan layanan telekomunikasi berbasis PABX di Pemda DIY. Kondisi saat ini, tidak memungkinkan untuk penambahan jaringan baru karena terbatasnya lisensi sistem sehingga diperlukan upgrade sistem dan lisensi supaya dapat memberikan pemenuhan kebutuhan penambahan jaringan baru dan fitur-fitur yang memberikan kenyamanan pengguna serta kemudahan dalam pengelolaannya.



Gambar 3.46. Upgrade dan Relokasi PABX
Sumber: Diskominfo DIY, 2023

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Masih kurangnya kemampuan personil dalam penguasaan teknologi dan informasi dalam penanganan insiden keamanan informasi.
- (b) Kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan siber.
- (c) Keterbatasan sarana prasarana yang digunakan untuk operasional kegiatan pengamanan informasi dan persandian.

(2) Solusi

- (a) Peningkatan kualitas dan kompetensi personil melalui pengiriman pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara maupun dengan pelatihan internal.
- (b) Memberikan sosialisasi tentang pentingnya keamanan siber yang berkaitan dengan perlindungan dan privasi data terutama data pribadi di dunia maya.

(c) Optimalisasi perangkat yang ada dan memaksimalkan penggunaan aplikasi yang bersifat *open source*.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Pada tahun 2022 Urusan Persandian memiliki 1 program, 2 kegiatan dan 4 subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp1.089.240.000,00. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp1.082.273.824,00 atau 99,36%, dengan capaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.145. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Persandian Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Pemberdayaan dan pengembangan: (1) PPID disetiap badan publik; (2) Komunitas masyarakat penggiat Teknologi Informasi 2. Pembuatan dan pengembangan Sistem Informasi Eksekutif (SIE) 3. Pengembangan dan optimalisasi jaringan pemerintah daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase Kecepatan Informasi Sandi Kepada Pimpinan dan Informasi Persuratan di Lingkungan Pemda DIY Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi Sertifikat ISO 27001 Datacenter Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Laporan Insiden Keamanan Informasi Laporan Pengujian Keamanan Informasi (Penetration Testing untuk 10 Aplikasi) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Email Pemerintah daerah yang terpelihara Ketersediaan akses data center (SLA) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi Jaringan telepon PABX yang terpelihara Jumlah layanan Pemda yang sudah menggunakan tanda tangan digital Ruang kerja pimpinan yang teramankan Upgrade dan Relokasi PABX Rekomendasi Forkomsanda	Persen sertifikat dokumen dokumen titik aplikasi ruangan paket dokumen	100 1 1 1 1 1 362 600 2 22 1 1	100 1 1 1 1 362 600 2 22 1 1

16) *Urusan Kebudayaan*

a) *Kondisi Umum*

Visi DIY dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 - 2025 yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Budaya disebut khusus dalam visi tersebut, sehingga Urusan Kebudayaan menjadi unsur strategis untuk pencapaian visi tersebut. Selanjutnya, Urusan Kebudayaan juga ditekankan dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengamanatkan bahwa urusan kebudayaan menjadi bagian dari keistimewaan DIY.

Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan urusan kebudayaan DIY dihitung melalui empat indikator capaian sasaran yaitu : 1) Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan. 2) Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya, dan museum. 3) Peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya. dan 4) Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY.

Tabel 3.146. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
1	Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan	buah	763	768	827	107,68	768	107,68
2	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	%	6,94	7,4	7,75	104,73	7,4	104,73
3	Peningkatan penyelenggaraan even	%	10,36	12,79	13,14	102,74	12,79	102,74

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Realisasi	% Realisasi		
	budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya							
4	Peningkatan kinerja pengembangan seni budaya DIY	%	5,18	4,75	5,53	116,42	4,75	116,42

Sumber: Disbud DIY, 2023

(1) *Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan*

Capaian pada Indikator Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan diperoleh melalui 3 sub kegiatan, yaitu: (1) Sub kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya; (2) Sub kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya; dan (3) Sub kegiatan Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia.

Capaian Kinerja indikator sasaran Pengelolaan dan Pelestarian Budaya Benda didapatkan dari berbagai sub Kegiatan antara lain Inventarisasi Dokumentasi, Pemberian Legalitas Warisan Budaya dan Cagar Budaya (WBCB), Penelitian WBCB, Rehabilitasi dan Revitalisasi WBCB, serta Perawatan WBCB. Pengelolaan dan pelestarian budaya benda difokuskan pada situs, bangunan dan Kawasan cagar budaya level provinsi dan yang mendukung pengusulan Yogyakarta sebagai Warisan Dunia.

Capaian indikator jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan pada tahun 2022 secara keseluruhan mencapai 827 Buah dari target sebesar 768 buah benda budaya atau tercapai sebesar 107,68%.

Capaian tersebut terdiri dari situs 14 buah, Benda Cagar Budaya 240 buah, Bangunan Cagar Budaya 572 buah dan Kawasan Cagar Budaya sebanyak 1 buah.

Tabel 3.147. Budaya Benda yang Dikelola dan Dilestarikan pada Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Struktur	0
2	Situs	14
3	Benda Cagar Budaya	240
4	Bangunan Cagar Budaya	572
5	Kawasan cagar budaya	1
Jumlah		827

Sumber: Disbud DIY, 2023




Gambar 3.47. Dokumentasi kegiatan yang mendukung Capaian Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan Tahun 2022

Sumber: Disbud DIY, 2023

(2) Meningkatnya Kinerja Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya dan Museum

Capaian Indikator Meningkatnya Kinerja Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya dan Museum dilaksanakan melalui sub kegiatan antara lain: 1) Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan; 2) Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra; dan 3) Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman.



Pelaksanaan aktivitas pada subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan adalah kajian sejarah, kompetisi kesejarahan, lawatan sejarah, pembinaan komunitas sejarah, peringatan peristiwa bersejarah, serta publikasi dan promosi sejarah lokal.

Pada subkegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra aktivitas yang dilaksanakan antara lain even kesusastraan seperti Konggres Kebudayaan Jawa, Temu Karya Sastra, Macapat, Pagelaran Sastra, dan Hari Aksara Internasional dan Lawatan Sastra. Selain itu juga terdapat aktivitas Pengembangan Ketoprak Kekinian, serta beragam Kompetisi Bahasa dan Sastra seperti Sayembara Penulisan Serat, Sengkalan, Alih Aksara Maca Cerkak, Maca Geguritan, Macapat, Sesorah, Pranatacara, *Stand Up Comedy* basa Jawa, dan Dongeng. Dalam sub kegiatan yang sama juga masih terdapat aktivitas Pawiyatan Bahasa dan Sastra Jawa, Pengembangan Sandiwara Radio Bahasa Jawa, serta Kajian Serat Sastra Gendhing dan Serat Ajisaka.

Sedangkan pada subkegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman terdapat pelaksanaan aktivitas Wajib Kunjung Museum, Lomba Cerdas Cermat Museum, Pameran Museum, Festival Museum Yogyakarta, Pengelolaan dan Pengembangan Museum Sejarah Purbakala Pleret, Pengelolaan dan Pengembangan Museum Kotagede, Fasilitasi Museum, Registrasi Koleksi Museum. Safari Permuseuman, serta Pelatihan SDM Permuseuman. Peningkatan Kinerja Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya dan Permuseuman diperoleh dari

kontribusi berbagai aktivitas dalam subkegiatan tersebut.

Tabel 3.148. Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya, dan Museum pada Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Even Sejarah	8
2	Peristiwa Sejarah	5
3	komunitas sejarah	4
4	Even Bahasa	19
5	Naskah Kuno	2
6	Registrasi Museum	5
7	Even Museum	9
8	Peristiwa Sejarah	10
9	Tokoh Sejarah	5
Jumlah		67

Sumber: Disbud DIY, 2023



Gambar 3.48. Dokumentasi kegiatan yang mendukung Capaian Meningkatkan Kinerja Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya dan Museum
Sumber: Disbud DIY, 2023

(3) *Peningkatan Penyelenggaraan Event Budaya Tingkat Provinsi, Nasional, Internasional di Taman Budaya*

Capaian terhadap Indikator Peningkatan Penyelenggaraan *Event* Budaya Tingkat Provinsi, Nasional, Internasional di Taman Budaya pada tahun 2022 sebesar 13,14% dari target 12,79% dengan persentase capaian sebesar 102,74%. Capaian

tersebut terdiri dari 1 *event* skala internasional, 16 *event* skala nasional, dan 16 *event* skala provinsi. Capaian pelaksanaan even tersebut merupakan even budaya yang diselenggarakan baik oleh UPTD Taman Budaya maupun pihak swasta. Taman Budaya sebagai venue memiliki kelebihan diantaranya lokasi yang strategis dan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan even.

Tabel 3.149. Penyelenggaraan *Event* Taman Budaya DIY pada Tahun 2022

No	Klasifikasi <i>Event</i>	Jumlah <i>Event</i>
1	Internasional	1
2	Nasional	16
3	Provinsi	16
Jumlah		33

Sumber: *Disbud DIY, 2023*



Gambar 3.49. Dokumentasi kegiatan yang mendukung Capaian Penyelenggaraan *Event* Taman Budaya DIY pada Tahun 2022

Sumber: *Disbud DIY, 2023*

(4) Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY

Peningkatan kinerja Pengembangan seni di DIY pada tahun 2022 tercapai sebesar 5,53% dari target sebesar 4,75% dengan persentase capaian sebesar 116%. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan Sub Kegiatan yang memiliki aktivitas berupa pelestarian

Upacara Adat, Upacara Tradisi, pemberdayaan Organisasi Seni Rupa, Organisasi Seni Pertunjukan, Organisasi Perfilman, Lembaga Budaya, Lembaga Pendidikan Budaya, dan Organisasi Kepercayaan melalui berbagai Kegiatan yang ada.

Upaya Peningkatan pencapaian kinerja pengembangan seni budaya diimplementasikan melalui pemerataan akses masyarakat terhadap Kegiatan Adat Tradisi dan seni. Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana budaya Seni yang ada pada masyarakat, dengan tujuan agar ekosistem kebudayaan di DIY tetap hidup dan Berkembang.

Tabel 3.150. Pengembangan Kinerja Seni di DIY pada Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Upacara Adat	76
2	Tradisi	25
3	Organisasi seni pertunjukan	225
4	Organisasi perfilman	4
5	lembaga budaya	13
6	Organisasi kepercayaan	34
JUMLAH		377

Sumber: Disbud DIY, 2023



Gambar 3.50. Dokumentasi kegiatan yang mendukung Capaian Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY

Sumber: Disbud DIY, 2023



b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Kurangnya apresiasi masyarakat, khususnya generasi muda terhadap kebudayaan daerah, termasuk mulai lunturnya nilai-nilai budaya daerah di kalangan generasi muda.
- (b) Luasnya cakupan urusan kebudayaan baik dari aspek obyek kebudayaan maupun pengampu urusan kebudayaan baik sektoral maupun kewilayahan yang menyebabkan belum semua obyek kebudayaan mendapatkan intervensi melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pengampu urusan kebudayaan.
- (c) Ekosistem budaya yang belum sepenuhnya pulih dari adanya pandemi Covid-19 sehingga aktivitas kebudayaan belum maksimal.

(2) Solusi

- (a) Melaksanakan inovasi dan meningkatkan publikasi dalam proses pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan dengan menyesuaikan dunia generasi muda.
- (b) Penetapan skala prioritas dalam proses perencanaan dan penganggaran urusan kebudayaan dan pendelegasian pelaksanaan urusan kebudayaan dengan pengampu urusan kebudayaan di DIY (Sektoral) maupun kabupaten/kota (kewilayahan).
- (c) Pelaksanaan even-even unggulan yang berskala regional dan nasional dan festival- berjenjang untuk menggerakkan ekosistem budaya di DIY.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Urusan Kebudayaan pada tahun 2022 dilaksanakan melalui 2 program dan 55 sub kegiatan terdiri dari belanja APBD dan dana keistimewaan urusan kebudayaan dengan nilai pagu total sebesar Rp328.455.276.761,00 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp316.277.501.526,00. Dengan demikian, persentase capaian anggaran tahun 2022 sebesar 96,29% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

Tabel 3.151. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2022

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar get	Reali sasi		
2	3	4	5	6	7	8		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN	1. Menumbuh kembangkan kesadaran multi <i>stakeholder</i> pembangunan budaya benda dan tak benda. 2. Memperkuat lembaga pelestari budaya dan mengembangkan budaya di Kawasan Cagar Budaya, Saujana Budaya, Desa dan Kelurahan Budaya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja, Renja Perubahan dan Renstra	dokumen	3	3	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD	Forum OPD	kegiatan	0	0	
			Dokumen Perencanaan RKA-DPA. RKAP-DPPA	Dokumen Perencanaan RKA-DPA. RKAP-DPPA	kegiatan	1	1	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	dokumen	1	1	
			Rekomendasi pelaksanaan kegiatan OPD	Rekomendasi pelaksanaan kegiatan OPD	persen	100	100	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji tahun	1	1	

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar get	Realisasi
2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
			Honorarium Pengelola Keuangan	bulan	12	12
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
			2. Pengelolaan Keuangan sesuai Peraturan	tahun	1	1
			1. Honorarium Pengelola Gaji	bulan	12	12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
			Laporan Keuangan Tahunan	dokumen	1	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
			Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	tahun	1	1
			Laporan Semesteran dan Prognosis	dokumen	1	1
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
			Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah	Bulan	12	12

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar get	Realisasi
2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Penyediaan Alat Jenis Listrik dan Elektronik Bangunan		25	25
			Dukungan terhadap persentase pemenuhan pebayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Tabung	19	19
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis	46	46
			Penyediaan Bahan Komputer	Jenis	9	9
			Penyediaan Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	Jenis	22	22
			Penyediaan Kertas dan Cover	Jenis	7	7
			Dukungan terhadap persentase pemenuhan pebayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar get	Realisasi
2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Barang Cetak	Jenis	13	13
			Penggandaan	Lembar	25000	25000
			Penjilidan	buku	10	10
			Dukungan terhadap persentase pemenuhan pebayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
			Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	Tahun	1	1
			Konsumsi Rapat	orang	3600	3600
			Dukungan terhadap persentase pemenuhan pebayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Materai	Lembar	600	600
			Dukungan terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar get	Realisasi
2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Tagihan Listrik	Bulan	12	12
			Tagihan Telepon	Bulan	12	12
			Dukungan terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Penyediaan Surat Kabar Lokal, Regional dan Nasional	Eksemplar	48	48
			Penyediaan Kebersihan	Jasa Bulan	12	12
			Penyediaan Keamanan	Jasa Bulan	12	12
			Retribusi Sampah	Bulan	12	12
			Dukungan terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			BBM dan Pelumas Kendaraan Roda 2, 3 dan 4	Unit	13	13

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar get	Realisasi
2	3	4	5	6	7	8
			Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2, 3 dan 4	Unit	13	13
			Pembayaran Pajak STNK Kendaraan Roda 2, 3, 4 dan 6	Unit	17	17
			Pembayaran KIR Kendaraan Roda 4 dan 6	Unit	5	5
			Service Kendaraan Roda 2, 3 dan 4	Unit	13	13
			Dukungan terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
			Pemeliharaan CCTV	Unit	6	6
			Pemeliharaan AC Split	Unit	35	35
			Pemeliharaan AC Cassete/Standing	Unit	3	3
			Pemeliharaan Printer	Unit	10	10
			Pemeliharaan Genset	Unit	5	5
			Pemeliharaan Laptop	Unit	5	5
			Pemeliharaan Mikrophone	Unit	4	4
			Pemeliharaan Pesawat Telepon	Unit	6	6
			Pemeliharaan LCD Proyektor	Unit	2	2

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar get	Realisasi
2	3	4	5	6	7	8
			Pemeliharaan Kulkas	Unit	1	1
			Pemeliharaan Jaringan LAN	Unit	5	5
			Pemeliharaan Komputer	Unit	25	25
			Pemeliharaan Pesawat Fax	Unit	1	1
			Pemeliharaan Monitor	Unit	5	5
			Dukungan terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			Pemeliharaan Gedung dan Halaman	Kompleks	3	3
			Dukungan terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan			
			Kajian Sejarah Lokal DIY	Dokumen	6	6

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar get	Realisasi	
2	3	4	5	6	7	8	
			Kompetisi Kesejarahan	event	2	2	
			Lawatan Sejarah	Even	5	5	
			Pembinaan Komunitas Sejarah	Komunitas	5	5	
			Peringatan Peristiwa Bersejarah	event	6	6	
			Publikasi dan Promosi Sejarah Lokal	Even	5	5	
			BKK Desa Kesejarahan berlokasi di Kalurahan Pleret	kalurahan	1	1	
			Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra				
			Event Kesusastraan (Muhibah Budaya (2), KBJ (1) , KKJ (1), Temu Karya Sastra (1), Macapat (1), Pagelaran Sastra (5), Hari Aksara Internasional (1)	Kali	11	11	
			Pengembangan Kethoprak Kekinian	Naskah	8	8	
			Kompetisi Bahasa dan Sastra (Sayembara Kompeti Penulisan Serat (1), Sengkalan (1) Alih Aksara (1), Maca Cerkak (1), Maca Geguritan (1), Macapat (1), Sesorah	Jenis	10	10	

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar get	Reali sasi
2	3	4	5	6	7	8
			(1), Pranatacara (1), Stand Up Comedy basa Jawa (1), Dongeng (1))			
			Pawiyatan Bahasa dan Sastra Jawa	Angkataan	5	5
			Pengembangan Sandiwara Radio Bahasa Jawa	Naskah	8	8
			Promosi dan Publikasi Bahasa Sastra (Antologi Geguritan (1), Antologi Cerkak (1), Antologi Esai (1), Sempulur (2), carakita (2), leaflet Aksara Jawa (8), Stiker Keyboard Aksara Jawa (1))	Cetak	16	16
			Aplikasi Digital Bahasa dan Sastra (konverter (1), OCR (1))	Aplikasi	2	2
			Revitalisasi Sastra Lisan (Dongeng (1), Manuskrip (1))	Buku	2	2
			Sosialisasi Perda Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa Kampung Aksara	Kali	90	90
			Kampung Aksara	Desa	12	12

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar get	Realisasi
2	3	4	5	6	7	8
			Panduan Aksara Jawa (Pergub Tata Tulis Aksara Jawa, Panduan Transliterasi Jawa-Latin)	Buku	2	2
			Kajian Serat Sastra Gendhing, Serat Ajisaka, Nama Jawa	Kajian	3	3
			Saka Widya Budaya Bakti	Kali	1	1
			Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman			
			Wajib Kunjung Museum	Peserta	7704	7704
			Lomba Cerdas Cermat Museum	Even	1	1
			Pameran Museum	Even	4	4
			Kajian Permuseuman	Dokumen	7	7
			Pengembangan Aplikasi Museum	Aplikasi	0	0
			Festival Museum Yogyakarta	Event	2	2
			Pengelolaan dan Pengembangan Museum Sejarah Purbakala Pleret	Museum	1	1
			Pengelolaan dan Pengembangan Museum Kotagede	Museum	1	1
			Pembelian Lahan Tahap IV	Kawasan	1	1

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar get	Realisasi
2	3	4	5	6	7	8
			Pengembangan Museum Sejarah Purbakala Pleret			
			Rapat Kerja Permuseuman	Kali	1	1
			Registrasi Koleksi Museum	Museum	5	5
			Fasilitasi Museum	Museum	38	38
			Safari Permuseuman	Kali	6	6
			Pelatihan SDM Permuseuman	Event	1	1
			Jumpa Sahabat Museum	Even	5	5
			Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya			
			Inventarisasi dan Dokumentasi WBCB	WBCB	50	50
			Pemberian Legalitas WBCB	Dokumen	120	150
			Penelitian WBCB	Dokumen	7	7
			Pengelolaan WBCB	Badan Pengelola	1	1
			Publikasi Pelestarian WBCB	Dokumen	2	2
			Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya			
			Rehabilitasi WBCB	Bangunan	1	1

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar get	Realisasi
2	3	4	5	6	7	8
			Perawatan WBCB	Banguna n	11	11
			Revitalisasi Situs dan Kawasan WBCB	Situs dan Kawasa n	4	4
			Pengawasan dan Pengendalian WBCB	Dokume n	1	1
			BKK Rekonstruksi Bangunan Mataram Islam di Kawasan Cagar Budaya Kalurahan Jagalan	kaluraha n	1	1
			Akuisisi Lahan	Bidang	1	1
			Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia			
			Perencanaan Yogyakarta Warisan Dunia	Dokume n	8	8
			Penyiapan Yogyakarta sebagai Nominasi Warisan Budaya Dunia	Even	12	12
			Publikasi dan Promosi Nominasi Warisan Budaya Dunia (Media Sosial dan Media Cetak / Elektronik)	Kali	198	198
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya			
			Sarpras Perkantoran	jenis	20	20
			Pemeliharaan	jenis	7	7

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar get	Realisasi
2	3	4	5	6	7	8
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya			
			Gamelan besi	set	64	64
			Pakaian seni	Set	4	4
			Alat Seni	Set	4	4
			Gamelan Perunggu	set	3	3
			Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan			
			Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen	1	1
			Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan			
			Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan Urusan Kebudayaan TW I, II, III dan IV	Dokumen	4	4
			Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya			
			Pentas MSO	event	1	1
			Penguatan Organisasi	Lembaga	15	15
			Kemitraan	Kali	3	3
			Jogjakarta Orchestra	Even	1	1
			Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya			
			Pendampingan Desa Budaya	Bulan	12	12
			Pendampingan			
			Peningkatan SDM	Kali	3	3

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar get	Realisasi	
2	3	4	5	6	7	8	
			Sarpras Desa Budaya (Gamelan Perunggu)	set	14	14	
			Gelar Potensi Desa Budaya	Kali	8	8	
			Pentas Desa Budaya Selasa Wage	Kali	7	7	
			Pentas Desa Budaya di Bandara	Desa	76	76	
			Fasilitasi Upacara Adat Desa Budaya	Fasilitasi	76	76	
			BKK Desa Mandiri Budaya	Desa	5	5	
			Balai Budaya	Balai	5	5	
			BKK ke Desa Rintisan Mandiri Budaya	Desa Rintisan Mandir	18	18	
			Master Plan Desa Mandiri Budaya	Dokumen	2	2	
			Masterplan Rintisan DMB	Dokumen	8	8	
			Pentas Desa Budaya di Bandara Soekarno-Hatta	Desa	2	2	
			Muhibah Budaya	Kali	1	1	
			Kepyakan Hibah Sarana dan Prasarana	Kali	1	1	
			Pembinaan Lembaga Penggiat Seni				
			ARTJOG	event	1	1	
			Aubade	event	1	1	
			Bioskop Jum`at	Kali	10	10	
			GBN	event	1	1	

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar get	Reali sasi	
2	3	4	5	6	7	8	
			Gelar Seni Budaya Yogyakarta (Anjungan TMI)	event	1	1	
			Lomba Lukis DIY Kyoto	Even	1	1	
			Matra Award	Even	1	1	
			Moekti	SLB	4	4	
			Muhibah Budaya	event	2	2	
			Pelaksanaan JAFF, FFD, FFPJ	event	3	3	
			Pembuatan Film	film	6	6	
			Pemutaran Film di Desa/Kelurahan	kali	20	20	
			Pesta Boneka	event	1	1	
			Workshop, Lomba dan Pameran Komik	event	3	3	
			Workshop Pengembangan Perfilman	event	8	8	
			Workshop Seni	Kali	30	30	
			FGD Film	event	6	6	
			Pemutaran Film di Malioboro	kali	6	6	
			Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				
			Misi Kebudayaan dalam rangka diplomasi	destinas i negara	1	1	
			Penghargaan Seniman dan Budayawan				
			Jumlah Penerima Penghargaan sebanyak 6 kategori yakni Pelestari dan	orang	25	25	

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar get	Realisasi
2	3	4	5	6	7	8
			atau Pelaku Seni, Pelestari dan/atau Pelaku Adat Tradisi, Pelestari dan/atau Pelaku Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Budayawan (Pemikir, Pemerhati, Pengamat, Analis Sosial Budaya), Kreator (Pelopor dan/atau Pencipta Karya), Maestro Budaya,			
			Gelar Karya penerima penghargaan seniman dan budayawan	Even	1	1
			Penerima Penghargaan (apresiasi seni dan budaya anak)	orang	10	10
			Festival Kebudayaan Yogyakarta			
			Lomba	event	1	1
			Pameran	event	1	1
			Pergelaran Seni	event	1	1
			Talkshow	event	1	1
			Gelar Budaya Yogyakarta			
			Gelar Budaya Catur-sagatra	Event	1	1
			Festival Berjenjang DIY (Langencarita,	Event	4	4

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar get	Realisasi
2	3	4	5	6	7	8
			Sendratari, Kethoprak, Teater)			
			Pekan Budaya Diffabel	Event	1	1
			Pembinaan Tari	Event	1	1
			Publikasi Seni dan Budaya Daerah			
			Mangayubagya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	event	1	1
			Sensus Data Budaya	dokumen	0	0
			Publikasi melalui Pentas Ketoprak	Budaya kali	44	44
			Publikasi Dialog Budaya	melalui kali	37	37
			Publikasi Pengembangan Budaya	melalui kali	35	35
			Pengembangan aplikasi website Budaya	akun website	1	1
			Live streaming Agenda Budaya	kali	30	30
			Pentas Budaya	event	2	2
			Publikasi media cetak	Kali	75	75
			Iklan masyarakat	layanan kali	24	24
			Muhibah Budaya	kali	1	1
			Pengelolaan Sosial	Media Bulan	12	12
			Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi			

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar get	Realisasi	
2	3	4	5	6	7	8	
			Adat Suran di Kepatihan	event	1	1	
			Sarasehan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	event	1	1	
			Festival Upacara Adat	Even	1	1	
			Lomba Permainan Tradisional	event	1	1	
			Promosi Adat dan Tradisi	lokasi	3	3	
			Gelar Lomba Panatacara, Rias Pengantin Gaya Yogyakarta	event	2	2	
			Fasilitasi Puncak Ritual Kepercayaan, Adat dan Tradisi	kali	21	21	
			Cetak Buku Penghayat	Buku	1	1	
			Buletin Penghayat	Edisi	2	2	
			Gelar Upacara Tradisi Daur Hidup	kali	2	2	
			Peningkatan SDM Penghayat ke Luar Daerah	Kali	2	2	
			Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				
			Pentas wayang klasik di Sasono Hinggil YK	Kali	12	12	
			Pentas representasi pembinaan pedalangan	Kali	13	13	

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar get	Realisasi
2	3	4	5	6	7	8
			Pentas pengembangan pedalangan	Kali	12	12
			Muhibah Budaya ke luar DIY	Kali	1	1
			Wayang Wong Gagrak YK	kali	5	5
			Omah Wayang	kali	30	30
			Sarasehan Pedalangan	Kali	4	4
			Seleksi dalang anak dan remaja tingkat DIY dan pengiriman tingkat nasiona	kali	2	2
			Sosialisasi Tata Nilai	Even	1	5
			Pelatihan Tata Nilai	Kab/kot a	5	5
			Pencatatan, inventarisasi, dan penetapan	Dokume n	1	1
			Perayaan WBTB di DIY	Even	1	1
			Perayaan WBTB di Jakarta	even	1	1
			JHf	Even	1	1
			Perayaan Hari Wayang Dunia	Even	1	1
			Pemeliharaan dan Pengembangan Wayang dan Keris	Dokume n	1	1
			Penguatan Dewan Kebudayaan	Tahun	1	1

Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tar get	Realisasi
2	3	4	5	6	7	8
			BKK WBTB	Kalurahan	1	1
			Selendang Sutera			
			Seminar Budaya	Kali	8	8
			Pekan budaya selendang sutra	Even	3	3
			Penyelenggaraan Even Penggiat Seni			
			Pentas Seni dan Budaya	Kelompok	201	201
			Pembinaan Sanggar	sanggar	60	60
			Pementasan Daerah	Musisi kali	1	1
			Penguatan Lembaga Pelestari Budaya			
			Dukungan pelestarian budaya di Kraton dan PA	tahun	1	1
			Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi			
			Dukungan Labuhan	Prosesi event	2	2
			Penerimaan Gunung Garebeg	event	3	3
			Festival Bregodo	event	2	2
			Mubeng Beteng	kali	1	1
			Dukungan Pelestari Warisan Budaya	Pembantu Lembaga Orang	72	72

17) *Urusan Perpustakaan*

a) *Kondisi Umum*

Dasar penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007. Perpustakaan sebagai sebuah sistem pengelolaan dokumentasi dan rekaman atas berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan manusia, memiliki andil dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pemda DIY melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY mengampu Urusan Perpustakaan memiliki sasaran strategis Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan. Indikator ini diukur dengan indikator Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan.


Tabel 3.152. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian 2022 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Prosentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan	Persen	26,25	27	28,66	106,15	27	106,15

Sumber: DPAD DIY, 2023

Pada tahun 2022, target indikator Persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan ditetapkan sebesar 27% dengan realisasi sebesar 28,66% atau 995.492 pemustaka yang mengakses layanan perpustakaan.

Statistik data pengunjung merupakan jumlah pengunjung perpustakaan selama tahun 2022 baik kunjungan fisik maupun virtual. Kunjungan fisik berasal dari:

- 
- (1) Kunjungan dari Layanan Perpustakaan Menetap
 - (a) Kunjungan di unit Grhatama Pustaka (GTP)
 - (b) Kunjungan di unit Jogja Library Center (JLC)
 - (c) Kunjungan di unit Rumah Belajar Modern (RBM).

 - (2) Kunjungan dari Layanan Perpustakaan Ekstensi
 - (a) Kunjungan dari Layanan Pojok Baca.
 - (b) Kunjungan dari Layanan Perpustakaan Keliling.
 - (c) Layanan Paket Buku dan *Delivery Order* (Pemustaka Istimewa)

Data Kunjungan virtual berasal dari *website* DPAD DIY, *website* Balai Layanan Perpustakaan, *website* Jogja Library for All, *website* *Center of Excellence* (COE), aplikasi iJogja, dan jangkauan media sosial.

Untuk mencapai target sasaran peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan, Pemda DIY melalui DPAD DIY melakukan integrasi keanggotaan perpustakaan “Pemustaka Istimewa” bagi seluruh ASN Pemda DIY, melalui integrasi aplikasi si Yokca dengan Sistem Informasi Kepegawaian DIY. Melalui integrasi ini, setiap ASN Pemda DIY dapat otomatis menjadi anggota perpustakaan daerah dan dapat menggunakan layanan yang tersedia di perpustakaan. Hasil dari integrasi ini membuat jumlah anggota baru perpustakaan meningkat cukup pesat dari target hanya 6.000 anggota baru pada tahun 2022, terealisasi sebesar 11.477 anggota baru. Jumlah ini juga meningkat cukup tajam jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun lalu yakni sebesar 8.033 anggota baru pada tahun 2021 atau terdapat peningkatan sebesar 42,87% jumlah anggota baru.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Masih kurang optimalnya kunjungan fisik pengunjung di bidang perpustakaan. Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, jumlah ideal kunjungan ke perpustakaan umum tiap hari adalah 2% dari jumlah penduduk di suatu wilayah. Dari data website Dataku DIY jumlah kunjungan ke perpustakaan pada tahun 2022 sebanyak 2.223.606 orang dengan jumlah yang harus dilayani 3.265.200 orang. Jika dikonversi secara harian maka jumlah kunjungan ke perpustakaan setiap hari rata-rata 0,18% masih lebih rendah dari kondisi ideal yang diharapkan.
- (b) Menurut hasil penelitian UNESCO, indeks minat baca masyarakat di Indonesia baru mencapai 0,001 (artinya setiap 1000 penduduk hanya ada satu orang yang berminat membaca). Berdasarkan World Bank dan *International Association for the Evaluation of Education Achievement*, skor membaca Indonesia terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Untuk tingkat DIY, indeks minat baca DIY berada di atas rata-rata nasional, tetapi masih terhitung rendah yaitu hanya mencapai 0,049 atau dari setiap 1000 penduduk DIY hanya 49 yang berminat membaca. Padahal banyak negara yang membuktikan keberhasilan pelestarian peradaban bangsanya adalah melalui pembangunan perpustakaan dan tradisi membaca yang kuat. Guna meningkatkan literasi masyarakat, diperlukan upaya yang lebih gencar dalam memasyarakatkan gemar membaca.

(2) Solusi

- (a) Mengupayakan pengembangan layanan perpustakaan secara digital. Pada bidang perpustakaan dengan mengembangkan aplikasi si Yokca yang mendukung layanan buku fisik dan iJogja yang mendukung layanan buku digital. Upaya untuk mensosialisasikan aplikasi-aplikasi ini juga telah dilakukan diantaranya sosialisasi melalui media sosial.
- (b) Upaya untuk mengatasi masih rendahnya literasi masyarakat dilakukan melalui penunjukan Bunda Literasi periode 2022-2026. Penguatan Bunda Literasi ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kegemaran membaca di masyarakat.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Pada tahun 2022 Urusan Perpustakaan mengampu 1 program penunjang, 3 program urusan perpustakaan, 14 kegiatan, dan 41 subkegiatan yang didanai oleh APBD. Sedangkan, yang didanai oleh Dana Keistimewaan (Danais) yaitu 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, serta satu sub kegiatan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi anggaran tersebut sebesar Rp42.946.086.983,00, dan realisasi keuangan sebesar Rp41.479.462.443,00 atau dengan capaian persentase 96,94%, serta realisasi fisik mencapai 100%, seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.153. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Subkegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			
			2. Pengembangan Teknologi Informasi di Bidang Layanan Perpustakaan	Workshop Akreditasi Perpustakaan Update aplikasi akreditasi perpustakaan Workshop otomasi perpustakaan Akreditasi perpustakaan	angkatan paket Angkatan perpustakaan	5 1 2 15	5 1 2 15
				Subkegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi Bimtek perpustakaan khusus	angkatan	2	2
				Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Bimtek Tenaga Perpustakaan	angkatan	2	2
				Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan Deposit Instalasi Server	paket	1	1
				Subkegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Pengolahan Bahan Pustaka Pengadaan e-book Pengadaan Bahan Pustaka Tercetak	eksemplar judul eksemplar	10000 5000 3500	10000 5000 3500
				Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Subkegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Bedah buku Forum perpustakaan Workshop Karya tulis	kali kali kali	129 3 2	129 3 2
				Subkegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Lomba minat baca	kali	2	2
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi			
				Subkegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam			
				Pemantauan SS KCKR	Penerbit	100	100
				Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah			
				Subkegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah			
				Penerbitan katalog induk daerah	terbitan	1	1
				Subkegiatan Penerbitan Bibliografi Daerah			
				Penyusunan Bibliografi Daerah	terbitan	4	4
				Penyusunan Accession List	terbitan	1	1
				Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi			
				Subkegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			
				Perbaikan cover surat kabar	bendel	360	360
				Perawatan Bahan Pustaka Koleksi Langka DPAD	eksemplar	45000	45000
				Perbaikan Buku Rusak	eksemplar	500	500
				Fumigasi Layanan DPAD	M3	2400	2400
				Penjilidan Surat Kabar	bendel	400	400
				Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			
				Alih Bahasa Asing-Indonesia	lembar	1200	1200
				Alih Bahasa Jawa- Indonesia	lembar	1200	1200
				Alih Tulisan JAwa-Latin	lembar	1200	1200
				Alih Media	lembar	20000	20000
				Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
				Subkegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			
				Penelusuran dan abstraksi budaya timur kabupaten		1	1

18) Urusan Kearsipan

a) Kondisi Umum

Sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemda DIY berupaya melaksanakan Urusan Kearsipan dengan sasaran strategis Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi dengan indikator Peningkatan arsip yang dimanfaatkan.

Tabel 3.154. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Peningkatan arsip yang dimanfaatkan	Berkas	7.589	7.500	8.965	119,53	7.500	119,53

Sumber: DPAD DIY, 2023

Jumlah arsip yang dimanfaatkan pada tahun 2022 tercapai sebanyak 8.965 berkas atau sebesar 119,53% dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 7.500 berkas. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebanyak 1.376 berkas.

Faktor pendorong ketercapaian kinerja adalah pemanfaatan arsip secara digital. Pemda DIY melalui DPAD DIY memiliki setidaknya tiga kanal yang bisa diakses masyarakat untuk dapat memanfaatkan arsip digital diantaranya adalah melalui Media Akses (arsip digital yang dilayangkan secara offline dengan datang langsung ke ruang layanan kearsipan DPAD DIY), website Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) yang dapat diakses melalui <http://dpad.jogjaprov.go.id/siks/> dan website Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang dapat diakses melalui <https://arsip.jogjaprov.go.id>.

Kesadaran masyarakat/lembaga yang mulai tumbuh dalam menyerahkan arsip melalui DPAD DIY selaku LKD Provinsi mendukung target kinerja tahun 2022 dapat dicapai dengan baik.

Tabel 3.155. Jumlah Pemanfaatan Arsip Tahun 2022

Statistik jumlah pemanfaatan arsip	Jumlah
a. Jumlah pemanfaatan arsip DPAD DIY	1.124
b. Jumlah pemanfaatan arsip Kraton	19
c. Jumlah pemanfaatan arsip Puro Pakualaman	50
d. Jumlah pemanfaatan arsip Digital (Media Akses)	352
e. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	1.178
f. Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS)	6.242
JUMLAH	8.965

Sumber: DPAD DIY, 2023

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

Kunjungan secara fisik layanan arsip masih belum optimal. Hingga akhir tahun 2022, jumlah kunjungan fisik di DPAD DIY tercatat hanya mencapai 1.385 pengguna.

(2) Solusi

Pada bidang kearsipan, upaya mengatasi minimnya kunjungan fisik dilakukan melalui pengembangan layanan digital seperti Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Sosialisasi kearsipan melalui pameran arsip dan layanan diorama kearsipan juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting arsip. Selain itu kegiatan sosialisasi dan inovasi layanan perlu dikembangkan agar pengunjung dapat terus bertambah di tahun-tahun mendatang melalui pelaksanaan arsip menyapa maupun wisata sadar arsip.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Pada tahun 2022 Urusan Kearsipan dilaksanakan melalui 1 program, 3 kegiatan, dan 5 subkegiatan yang didanai oleh APBD. Sedangkan, yang didanai oleh Dana Keistimewaan (Danais), yaitu 1 program, 1 kegiatan dan 1 subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.182.132.000,00. Secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp4.086.095.915,00 atau dengan persentase 97,70% dan realisasi fisik mencapai 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan subkegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.156. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan 2. Kemudahan Akses layanan untuk mendapatkan informasi khasanah Arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Subkegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Bimtek BUMD dan Perusahaan Swasta 1 kelas Bimtek Kearsipan SMA/SMK Negeri 4 kelas Pengembangan Aplikasi Pengawasan Kearsipan LKD Kabupaten/Kota Sosialisasi Aplikasi Pengawasan Kearsipan Pembinaan Kearsipan LKD Kabupaten/Kota Pembinaan Kearsipan OPD-UPTD Pemda DIY Penyusunan/review Pergub Kode Klasifikasi Arsip Pengelolaan Arsip Inaktif Pendampingan penyusutan arsip LKD Penilaian dan Penyusutan Arsip Penyusunan Daftar Inventaris Arsip Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi Subkegiatan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Akusisi Arsip ORSOS Perawatan Arsip Mandiri Verifikasi data arsip statis Pengolahan Arsip Statis Alih Media Arsip Tekstual Penyusunan Inventaris Arsip Pemeliharaan arsip ke ANRI Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Peserta Peserta Paket Kali Kabupaten/Kota Instansi Draft Berkas Kabupaten/Kota Berkas Daftar Orsos Lembar Boks Berkas Data Buku Lembar	35 140 1 1 5 86 1 5000 5 20000 1 10 500 450 3000 20000 1 1200	35 140 1 1 5 86 1 5000 5 20000 1 10 500 450 3000 20000 1 1200

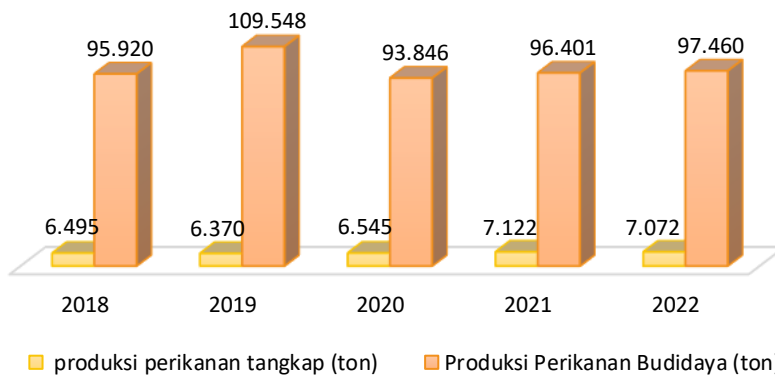
No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengembangan layanan kearsipan berbasis teknologi informasi	Kegiatan	1	1
				Pemasyarakatan arsip melalui publikasi	Kegiatan	1	1
				Entri data SIKS dan JIKN	Berkas	9000	9000
				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi			
				Wisata sadar arsip	Kali	5	5
				Pemilihan duta arsip	Kali	1	1
				Layanan arsip statis	Orang	750	750

2. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

1) Kondisi Umum

Produksi perikanan budidaya meningkat 8,65% dari tahun 2021 sebesar 96.401 ton menjadi sebesar 97.460 ton di tahun 2022. Sedangkan produksi perikanan tangkap menurun 0,01% dari tahun 2021 sebesar 7.122 ton menjadi sebesar 7.072 ton di tahun 2022. Produksi perikanan budidaya masih mendominasi total produksi perikanan di DIY yaitu sebesar 93% sedangkan produksi perikanan tangkap sebesar 7%.



Gambar 3.51. Produksi Perikanan di DIY Tahun 2018-2022

Sumber: Dislautkan DIY, 2023

Berdasarkan data, produksi perikanan dari tahun 2018 sampai dengan 2022 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, total produksi perikanan di DIY sebesar 104.532 ton yang terdiri dari produksi perikanan budidaya sebesar 97.460 ton dan produksi perikanan tangkap sebesar 7.072 ton. Produksi perikanan di DIY mengalami kenaikan sebesar 0,97% atau 1.009 ton dibandingkan tahun 2021. Produksi perikanan tangkap di DIY masih rendah disebabkan lokasi yang dapat didarati oleh kapal besar hanya berada di PPP Sadeng sehingga perlu adanya

peningkatan sarana prasarana pelabuhan. Selain itu, jumlah nelayan di DIY pertumbuhannya masih rendah sehingga perlu adanya pelatihan dan kaderisasi nelayan. Selain itu sarana prasarana seperti alat tangkap dan kapal perikanan perlu ditingkatkan untuk mendukung produksi perikanan tangkap yang ada di selatan DIY.

Tabel 3.157. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai sub sektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK)	juta rupiah	345 .870	331 .897	367 .870	110,84	331 .897	110,84
2	Peningkatan status kawasan konservasi	%	80	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi DIY dan Dislautkan DIY, 2023

Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) mampu mencapai target 110,84% karena pertumbuhan ekonomi pasca terdampak Covid-19 pada tahun 2022 ini semakin membaik. Upaya untuk meningkatkan produksi perikanan pada perikanan budidaya terus dilakukan dengan menekan biaya produksi salah satunya dengan substitusi pakan melalui program pakan mandiri, mengoptimalkan peran UPTD untuk menghasilkan benih dan calon induk serta induk unggul yang dapat dipergunakan oleh masyarakat, penerapan teknik budidaya perikanan yang tepat dalam meminimalisir dampak pergantian musim (pancaroba), pengendalian terhadap hama penyakit ikan pada lingkungan pembudidayaan ikan, serta pendampingan perijinan usaha perikanan bagi pembudidaya ikan. Pada perikanan tangkap telah dilakukan peningkatan kapasitas SDM perikanan tangkap melalui bimtek, pelatihan dan magang nelayan, serta penambahan sarana prasarana perikanan tangkap.

Sasaran peningkatan status kawasan konservasi telah tercapai 100% dengan terbitnya SK Menteri Kelautan dan Perikanan 17 Tahun 2022 Tanggal 18 Maret 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pantai Selatan Bantul DIY. Selanjutnya, untuk menegaskan deliniasi batasan kawasan konservasi telah dilakukan pembangunan Tugu Batas.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

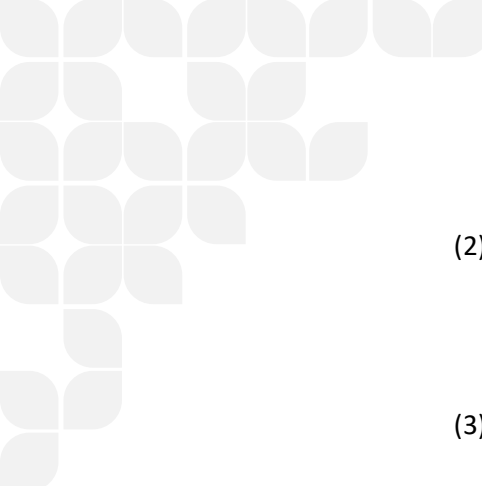
Menggambarkan permasalahan dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2022, maupun permasalahan pelaksanaan urusan.

- (1) Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta belum operasional disebabkan masih ada sedimentasi sehingga menutup alur pelayaran.
- (2) Harga pakan ikan terus naik tetapi harga produksi ikan budidaya tidak naik secara signifikan sehingga mengurangi keuntungan bagi para pembudidaya ikan.
- (3) Penurunan kualitas benih dan calon induk ikan nila yang dihasilkan oleh Balai Benih Ikan (BBI) akan menurunkan produktivitas budidaya perikanan di DIY.

b) *Solusi*

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas (**point a**).

- (1) Operasionalisasi Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam melalui Kajian Pengembangan Kawasan Aerotropolis YIA.

- 
- (2) Pengembangan pakan mandiri dan teknologi budidaya intensif sehingga dapat menekan kebutuhan pakan dan meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan.
 - (3) Pengembangan *broodstock* (pemuliaan) induk ikan nila unggulan melalui rekayasa peningkatan kualitas benih dan induk di BPTPB Cangkringan.

3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran Rp149.418.425.684,00 yang terdiri dari anggaran reguler sebesar Rp32.842.744.894,00 dan Dana Keistimewaan sebesar Rp116.575.680.790,00. Dana Keistimewaan melalui urusan Kebudayaan dan urusan tata ruang terdiri dari 2 program, 2 kegiatan, 2 subkegiatan dan Murni/Reguler terdiri dari 6 program, 17 kegiatan, 43 subkegiatan. Realisasi anggaran terealisasi Rp147.430.970.547,00 atau 98,67% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp1.987.455.137,00 atau 1,33% yang bersumber dari sisa pengadaan barang dan jasa lewat *e-purchasing* (mbiz dan e-katalog), efisiensi belanja perjalanan dinas dan efisiensi honor narasumber.

Tabel 3.158. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	<p>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat kelautan dan perikanan, meningkatkan manajemen kelembagaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta penerapan IPTEK, Meningkatkan kualitas produk hasil pengolahan kelautan dan perikanan, mengembangkan sistem pengolahan dan pemasaran yang modern, Menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan</p> <p>2. Peningkatan produksi perikanan budidaya, tangkap dan olahan yang berdampak bagi peningkatan pendapatan masyarakat</p> <p>3. Meningkatkan kualitas hasil budidaya, tangkap dan produk.</p> <p>4. Mengembangkan sistem pemasaran yang modern</p> <p>5. Pendampingan dan pengawalan kelompok</p>	<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</p> <p>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten</p> <p>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten</p> <p>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan</p> <p>Tugu Batas Kawasan Konservasi</p>	<p>Persen</p> <p>Persen</p> <p>kawasan</p>	<p>46.11</p> <p>46.11</p> <p>1</p>	<p>46.11</p> <p>46.11</p> <p>1</p>

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat kelautan dan perikanan, meningkatkan manajemen kelembagaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta penerapan IPTEK, Meningkatkan kualitas produk hasil pengolahan kelautan dan perikanan, mengembangkan sistem pengolahan dan pemasaran yang modern , Menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
			2. Peningkatan produksi perikanan budidaya, tangkap dan olahan yang berdampak bagi peningkatan pendapatan masyarakat	Persentase peningkatan Budaya tak benda yang dilestarikan	Persen	20	20
			3. Meningkatkan kualitas hasil budidaya, tangkap dan produk.	Persentase peningkatan Budaya tak benda yang dilestarikan	Persen	20	20
			4. Mengembangkan sistem pemasaran yang modern	Pengembangan Budaya Bahari			
			5. Pendampingan dan pengawalan kelompok	Broodstock Pengkayaan Varietas Ikan Lokal	jenis	4	4
				Pameran Produk Kelautan dan Perikanan	kegiatan	1	1
				Bimtek Produksi Usaha Garam Rakyat Sistem Tunnel	orang	30	30

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyusunan dokumen perencanaan fasilitas penunjang PPP Gesing	Dokumen	1	1
				Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	aktivitas	1	1
				Perencanaan/Kajian aksesibilitas alternatif menuju PPI Gesing	Dokumen	1	1
				Jumlah KUB yang Mengalami Peningkatan Pendapatan	kelompok	2	2
				Jumlah Calon Nelayan Baru	orang	5	5
				Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan Kenelayanan	orang	30	30
				Pembangunan Pasar Tradisional Ikan Cangkringan	kawasan	1	1
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Kapal Perikanan	Dokumen	1	1
				Kajian model manajemen pengelolaan kapal perikanan berbasis budaya	Dokumen	1	1
				Budidaya Ikan Hias (Aquascape)	angkatan	32	32
				Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember (Budidamber)	angkatan	36	36
				Kajian Rencana Pengelolaan Pelabuhan Gesing bagi Perkuatan Ekonomi Masyarakat DIY	dokumen	1	1
				Pelatihan Diversifikasi Olahan Produk Perikanan	angkatan	2	2
				Produksi Kelompok Nelayan yang Dibina	ton	24	24

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Sosialisasi Pengkayaan Sumber daya Ikan Lokal	angkatan	60	60	
				Pembuatan Video/Film MENTAL NELAYAN INDONESIA	video	3	3	
				Desa Maritim (BKK)	desa	7	7	
				Video Edukasi Alih Teknologi Ikan (Keistimewaan Pengelolaan Ikan Khas Lokalitas Yogyakarta dengan Teknologi)	series	3	3	
				Kajian Implementasi Pranata Mangsa dalam Upaya Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	dokumen	1	1	
				Festival Penyus Pesisir : Konservasi Ecotourism Budaya di Kalurahan Pesisir	event	1	1	
				DED Pengembangan Kawasan PPP Sadeng	Dokumen	1	1	
				Pembangunan PPI Gesing	kawasan	1	1	
				Review DED zona Inti PPI Gesing	Dokumen	1	1	
				Lomba Perahu Nelayan	kegiatan	1	1	
				Gita Laut (Gerakan Cinta Laut)	orang	1000	1000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat kelautan dan perikanan, meningkatkan manajemen kelembagaan, meningkatkan sarana dan prasarana serta penerapan IPTEK, Meningkatkan kualitas produk hasil pengolahan kelautan dan perikanan,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			mengembangkan sistem pengolahan dan pemasaran yang modern , Menjaga dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan				
			2. Peningkatan produksi perikanan budidaya, tangkap dan olahan yang berdampak bagi peningkatan pendapatan masyarakat	Terwujud nya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Persen	100	100
			3. Meningkatkan kualitas hasil budidaya, tangkap dan produk.	Terwujud nya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Persen	100	100
			4. Mengembangkan sistem pemasaran yang modern	Terwujud nya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Persen	100	100
			5. Pendampingan dan pengawalan kelompok	Terwujud nya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Persen	100	100
				Terwujud nya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Persen	100	100
				Terwujud nya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Persen	100	100
				Terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Persen	100	100
				Terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Persen	100	100
				Terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Persen	100	100
				Terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Persen	100	100
				Terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Persen	100	100
				Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Persen	99	100
				Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Persen	99	100
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Tersusunnya dokumen renja 2022	Dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen renja perubahan 2022	Dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen renstra 2022	Dokumen	1	1
				Tersusunnya ROPK 2022	Dokumen	1	1
				Tersusunnya data produksi perikanan dan kelautan	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
				Tersusunnya dokumen DPPA Tahun 2022	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen RKA Perubahan Tahun 2022	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen RKA Tahun 2023	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen DPA Tahun 2023	dokumen	1	1
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Tersusunnya dokumen LKJIP yang capaian kinerjanya sesuai dokumen perencanaan (RPJMD, renstra, IKU) paling lambat akhir Februari 2022	dokumen	1	1
				Tersusunnya konsep/bahan LKPJ	dokumen	1	1
				Tersusunnya konsep/bahan LPPD	dokumen	1	1
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	tahun	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	tahun	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna	dokumen	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Informasi (laporan keuangan tahunan)			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				Laporan Keuangan semesteran	dokumen	2	2
				Laporan Keuangan bulanan	dokumen	12	12
				Laporan Keuangan triwulanan	dokumen	4	4
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku		1	1
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				alat listrik dan elektronik	jenis	9	9
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Alat Tulis Kantor	jenis	42	42
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	19	19
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
				Pengisian dan pemeliharaan APAR		1	1
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Penjilidan	Eksemplar	120	120
				Barang cetakan	Jenis	10	10
				Penggandaan	lembar	60000	60000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Surat kabar	jenis	2	2
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Tersedianya makanan dan minuman rapat		1	1
				Terkelolanya arsip dinas	tahun	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi	tahun	1	1
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD			
				Terkelolanya website OPD	tahun	1	1
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Kereta sampah	unit	1	1
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				surat keluar	tahun	1	1
				surat masuk	tahun	1	1
				pengiriman dokumen	tahun	1	1
				materai	jenis	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Pembayaran tagihan rekening listrik	tahun	1	1
				Pembayaran langganan virtual meeting	tahun	1	1
				Pembayaran tagihan rekening telepon	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Pembayaran keamanan kantor	tahun	1	1
				Pembayaran jasa kebersihan	tahun	1	1
				Pembayaran jasa retribusi sampah	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	1	1
				Terbayarnya pajak kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Terbayarnya Pajak kendaraan unit		35	35
				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	35	35
				Terbayarnya Biaya Perizinan (KIR) kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	35	35
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Pemeliharaan jaringan internet	tahun	1	1
				Pemeliharaan sound sistem	unit	3	3
				Pemeliharaan printer	unit	10	10
				Pemeliharaan komputer	unit	10	10
				Pemeliharaan laptop	unit	10	10
				Pemeliharaan proyektor	unit	4	4
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Pemeliharaan talang induk	RAB	1	1
				Pemeliharaan plafon dinas	RAB	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Pemeliharaan AC	unit	30	30
				Pemeliharaan genset	unit	1	1
				Pemeliharaan CCTV	tahun	1	1
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan	unit	1	1
				PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Persen	14	28
				Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Persen	14	28
				Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			
				Pembinaan penggiat konservasi	kali	2	2
				Publikasi Media Cetak	Terbit	5	5
				Populasi sumber daya kelautan dan perikanan bertambah	ekor	633346	633346
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
				Produksi Perikanan Tangkap	Ton	7063	7071
				Produksi Perikanan Tangkap	Ton	7063	7071
				Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan/Tempat Pelelangan Ikan	Milyar Rupiah	36.73	82.63
				Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan/Tempat Pelelangan Ikan	Milyar Rupiah	36.73	82.63
				Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
				Jumlah dokumen kerja sama kemitraan perikanan tangkap	dokumen	1	1
				Jumlah kapal perikanan yang dilengkapi dengan dokumen perizinan	kapal	8	15
				Publikasi Media Cetak	Terbit	5	5
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah kapal yang memiliki Buku Kapal Perikanan	kapal	1	10
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
				Produksi Perikanan Budidaya	Ton	89700	97460.21
				Produksi Perikanan Budidaya	Ton	89700	97460.21
				Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	Persen	90	90
				Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	Persen	90	90
				Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
				Produksi perikanan budidaya yang dibina (ikan hias)	ekor	89856	90316
				Publikasi Media Cetak	Terbit	5	5
				Produksi perikanan budidaya yang dibina (nila)	ton	12.86	12.96
				Produksi perikanan budidaya yang dibina (gurami)	ton	2.59	2.6
				Produksi perikanan budidaya yang dibina (lele)	ton	23.51	23.92
				Jumlah perjanjian kerja sama pelaku usaha perikanan budidaya	dokumen	2	2
				Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
				Kajian penyusunan data base potensi lahan perikanan budidaya di wilayah pesisir DIY	dokumen	1	1
				Jumlah sertifikat MPM	sertifikat	5	27

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah unit budidaya/kelompok yang direkomendasikan untuk sertifikasi CBIB	unit	10	20
				Video Edukasi Budidaya dan pengembangbiakan ikan air tawar	buah	5	5
				Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang direkomendasikan untuk sertifikasi CPIB	UPR	2	3
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
				Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Persen	10	10
				Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Persen	10	10
				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Laut			
				Jumlah Pengawasan Terpadu di kali Laut		2	5
				Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			
				Pokmaswas aktif di DIY	kelompok	50	50
				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya			
				Jumlah Pengawasan Terpadu di kali Perairan Umum Daratan		10	10
				Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Pengawasan Mutu Produk Perikanan	kali	20	20
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
				Tingkat konsumsi ikan masyarakat	Kg/kapita/Tahun	26.05	34.74
				Tingkat konsumsi ikan masyarakat	Kg/kapita/Tahun	26.05	34.74
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
				Jumlah orang yang memiliki kemampuan mengolah ikan yang berkualitas	orang	1650	1650
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			
				Penyediaan sarana dan prasarana pengujian produk perikanan (DID)	Jenis	4	4
				Prosentase hasil uji laboratorium produk perikanan	%	78	83.43
				Produksi perikanan olahan dari kelompok pengolah	ton	7.2	24
				Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing			
				jumlah masyarakat yang memahami manfaat makan ikan	orang	3060	3060
				Publikasi Media Cetak	Terbit	5	5
				Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
				Pameran Produk Kelautan dan Perikanan (DID)	kali	8	8

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah dokumen perjanjian kerja sama	dokumen	2	2

b. Urusan Pariwisata

1) Kondisi Umum

Tahun 2022 bagi sektor pariwisata DIY merupakan masa yang cukup penting di dalam pemulihan kepariwisataan pasca Covid-19. di sepanjang tahun 2022 terdapat beberapa faktor pendorong yang mampu meningkatkan aktivitas pariwisata. Beberapa faktor pendorongnya antara lain: pelonggaran mobilitas masyarakat, dibukanya penerbangan langsung dari luar negeri dan aksesibilitas masyarakat yang didukung oleh jalan tol Trans Jawa. Keberagaman daya tarik wisata (destinasi dan *event* wisata) serta didukung dengan ketersediaan amenities pariwisata di DIY yang cukup memadai, mampu menarik wisatawan untuk dapat berkunjung ke DIY pada tahun 2022.

Tabel 3.159. Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kab/Kota di DIY Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota	Hotel Bintang		Hotel Non Bintang		Jumlah Total	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Kulon Progo	1	1	35	36	36	36
Bantul	3	3	344	303	347	347
Gunungkidul	2	2	159	143	161	161
Sleman	65	62	587	551	652	652
Yogyakarta	101	100	536	495	637	637
Jumlah	172	168	1.661	1.528	1.833	1.695

Sumber: Direktori Hotel dan Akomodasi Lainnya DIY 2022, BPS Provinsi DIY, 2023

Perkembangan sektor pariwisata yang mulai membaik juga berpengaruh kepada sektor perekonomian masyarakat DIY lainnya. Hal ini disebabkan karena pariwisata merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian DIY. Wisatawan yang berkunjung ke DIY tidak hanya berperan sebagai wisatawan saja, namun juga berperan sebagai konsumen bagi produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat DIY. Pada tahun 2022 Pemda DIY telah mengupayakan agar kegiatan pariwisata DIY dapat segera pulih dan juga dapat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di DIY. Kekuatan pariwisata DIY tidak hanya terletak pada peran pemerintah saja, namun dukungan *stakeholder* lain seperti

pelaku industri pariwisata, akademisi, pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif, penyelenggara *event* swasta, dan masyarakat DIY.

Perkembangan perekonomian dari sektor pariwisata ditandai dengan kontribusi PDRB DIY. Perekonomian DIY pada tahun 2022 sesuai dengan rilis BPS Provinsi DIY telah tumbuh 5,15%. Perekonomian DIY triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 tumbuh sebesar 5,53% (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 15,85%.

Indikator kinerja urusan pariwisata di Pemda DIY dibagi menjadi dua sasaran yaitu, nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY dan meningkatnya jumlah belanja wisatawan. Kedua indikator tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di DIY. Berikut ini capaian kinerja urusan pariwisata di tahun 2022.

Tabel 3.160. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Sasaran	Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY		Juta rupiah	9.131 .091	11.737 .538	10.252 .887	87,35	11.737 .538	87,35
2	Meningkatnya jumlah belanja wisatawan		rupiah	2.206 .566	8.830 .595	5.936 .071	67,22	8.830 .595	67,22

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi DIY & Dispar DIY, 2023 (data diolah)

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

Menggambarkan permasalahan dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2022, maupun permasalahan pelaksanaan urusan.

- (1) Masih rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara.
- (2) Rendahnya lama tinggal wisatawan & belanja wisatawan/*spending money*.

b) Solusi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas (**point a**).

- (1) Pada tahun 2022 Pemda DIY telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, diantaranya: (1) Melaksanakan promosi ke luar negeri dan ikut serta dalam ajang Indonesia Frankfurt Festival (2) Melakukan promosi dengan maskapai Air Asia, dengan rute Malaysia-DIY, (3) Menggunakan media digital seperti media social, buzzer, sponsored content dan website untuk menyebarkan informasi pariwisata di dalam dan luar negeri, (4) Memfasilitasi usaha jasa biro perjalanan sebagai seller paket wisata untuk berpartisipasi dalam kegiatan *Jogja International Travel Mart* tahun 2022 dan mengundang seller dari luar negeri, dengan demikian diharapkan paket-paket wisata DIY dapat diminati oleh agen/biro perjalanan wisata dari luar negeri, (5) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penambahan rute penerbangan langsung yang berasal dari luar negeri.
- (2) Berbagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan lama tinggal wisatawan dan belanja wisatawan antara lain:
 - a) Peningkatan kualitas untuk memperbaiki mutu produk dan memberikan pelayanan prima,
 - Meningkatkan kualitas Usaha Jasa Pariwisata (UJP) dengan cara bimbingan dan pengawasan serta Bimtek kepada enam jenis UJP di DIY.

- Meningkatkan kualitas SDM Pariwisata dengan cara melaksanakan pelatihan dan sertifikasi kepada pekerja pariwisata, seperti pemandu wisata, pekerja SPA, pengelola destinasi dan desa wisata, pekerja hotel, pekerja restoran, kafe dan rumah makan.
- b) Meningkatkan atraksi pariwisata dengan melakukan berbagai jenis *event* kepariwisataan seperti *event* olahraga, pertunjukkan musik dan seni, *Jogja Air Show*, Pekan Budaya Tionghoa, dan lain-lain.

3) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Pada tahun 2022 Urusan Pariwisata dilaksanakan melalui 5 Program dan 15 kegiatan, serta terdiri dari 40 Sub kegiatan dengan total anggaran Rp39.336.350.770,00. Alokasi anggaran Belanja Operasi sebesar Rp39.102.157.770,00 dan Belanja Modal sebesar Rp234.193.000,00 dengan rincian sumber dana dari APBD sebesar Rp20.700.571.020,00 dan sumber Dana Keistimewaan sebesar Rp18.635.779.750,00. Secara keseluruhan Realisasi Keuangan 2022 sebesar Rp37.886.286.085,00 (96,31%), yang terdiri dari Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp37.668.849.086,00 (96,33%) dan realisasi belanja modal sebesar Rp217.436.999,00 (92,85%). Realisasi fisik tahun 2022 adalah 99,86% dikarenakan terdapat kegiatan terhambat di dalam pelaksanaannya.

Tabel 3.161. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS PARIWISATA	<p>1. Dalam Pengembangan daya tarik pariwisata meliputi: 1. Diversifikasi dan kreatifitas produk wisata lokal 2. Pengembangan daya tarik wisata malam 3. Meningkatkan kualitas produk wisata agar bertaraf internasional</p> <p>3. dalam pengembangan amenitas meliputi: 1. Peningkatan standar layanan fasilitas pendukung wisata di destinasi wisata 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas amenitas di destinasi wisata 3. Koordinasi dengan Stakeholder terkait Pengembangan tourism hub sebagai simpul kontrol dan distribusi pergerakan kunjungan wisata</p> <p>4. Pengembangan Pasar dan Promosi Pariwisata DIY meliputi: 1. Melakukan analisis pengembangan pasar pariwisata yang mendukung pembangunan pariwisata DIY 2. Intensifikasi promosi pariwisata secara online (melalui media digital) dan offline (melalui pameran, pembuatan bahan promosi dll) 3. Pengembangan konten promosi wisata tematik DIY 4. Pelaksanaan promosi pariwisata</p>	<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN KEBUDAYAAN</p> <p>Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia</p> <p>DED Calon Kantor Dinas dokumen Jl.Hos Cokroaminoto</p>		1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			dalam dan luar negeri 5. Pengembangan pengembangan travel pattern dan paket wisata serta manajemen atraksi daya tarik wisata yang kompetitif 6. Pengelolaan pelaksanaan pelayanan informasi pariwisata				
			5. Pengembangan Citra Pariwisata (brand development tourism): 1. Penguatan dan Pengembangan citra branding destinasi wisata DIY 2. Brand awareness/campaign di media digital dan non digital untuk promosi destinasi wisata DIY	Pengelolaan Eks Hotel Mutiara 2	Tahun	1	1
			6. Standarisasi Usaha Pariwisata meliputi: 1. Penyusunan standar usaha penyelenggaraan usaha jasa pariwisata 2. Standarisasi usaha pariwisata dalam mendukung daya saing produk dan destinasi wisata DIY. 3. pelaksanaan bimbingan teknis standar internasional usaha pariwisata 4. Pembinaan usaha berbasis potensi lokal pendukung wisata	Pengelolaan Gedung Jl. Hos Cokroaminoto 221	tahun	1	1
			7. Penguatan organisasi kepariwisataan dan SDM Pariwisata meliputi: 1. Penguatan Organisasi Kepariwisata dan SDM Pariwisata dalam mendukung tata kelola kepariwisataan yang bedaya saing dan berkelanjutan 2. Penguatan Koordinasi, integrasi	Kajian Penilaian Aset eks Hotel Mutiara 2	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			dan sinergi antar pemangku kepentingan (lintas sektor dan lintas wilayah). 3. Sertifikasi SDM bidang Pariwisata				
				Dukungan 100% terhadap penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	persen	100	100
				Perbaikan Interior dan Eksterior Gedung TIC Malioboro	tahun	1	1
				Pengembangan Atraksi Wisata Budaya			
				Event Skala Lokal:Atraksi wisata budaya di kawasan strategis 72 kali,Atraksi Wisata budaya Prajurit Puro PA 8 kali,Pentas Kesenian di TIC Malioboro Stasiun Bandara 290 kali,Bergodo Jogo Malioboro 56 kali,Atraksi Kesenian 180 kali, Lomba Burung Derkuku Piala PA,Lomba Burung Derkuku Piala HB,Lomba Burung Perkutut Piala PA,Lomba Burung Perkutut Piala HB,Lomba Burung Berkicau Piala PA,Lomba Burung Berkicau Piala HB,Lomba Jemparingan Piala PA,Lomba Jemparingan Piala HB,Sound of Destination,Lomba Pacuan Kuda Piala HB	event	15	15
				Music Video Plesiran Jogja	Music Video	5	5
				Pembinaan dan Pendampingan Dimas Diajeng (1 kali dan 3 lokasi)	tahun	1	1
				Indonesia Frankfurt Festival (IFF)	event	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				BKK Desa Mandiri Budaya	desa	5	5
				Masterplan Desa Mandiri Budaya	dokumen	2	2
				Masterplan Purwobinangun, Pakem, Sleman	dokumen	1	1
				Asean Tourism Forum (ATF)	event	1	1
				Dukungan 100% terhadap penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	persen	100	100
				BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya	desa	11	11
				Masterplan Rintisan Desa Mandiri Budaya	dokumen	1	1
				Mangayubagya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	event	0	0
				Event Skala Nasional : Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta, Jogja Fashion Carnival, Tourism Photograph Hunting, Yogyakarta Symphony Orkestra, Jogja Tourism Day, Simfoni Keroncong Pelesir, Jogja Grand Fondo, Keroncong Kotagede, Ngayogjazz	event	9	9
				Management event	kegiatan	7	7
				Feasibility Study Hutan Keistimewaan Wana Boga Gunungkidul	dokumen	1	1
				Event Skala Internasional : Jogja International Travel Mart	event	1	1
				Bakti Saka Pariwisata	kali	2	2
				Peningkatan Lembaga Wisata Budaya			
				Penyusunan Materi Uji	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah kemitraan yang dilakukan antara desa wisata dengan Stakeholder Terkait	kemitraan	5	5
				Pengelolaan Visitingjogj	tahun	1	1
				Pelatihan Pemandu Keistimewaan untuk pelaku pariwisata	orang	75	75
				Refreshment Pemandu Wisata	orang	120	120
				Dukungan 100% terhadap penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	persen	100	100
				Peningkatan SDM Saka Pariwisata (4 angkatan @35 orang)	orang	140	140
				Storytelling Destinasi Wisata	paket	1	1
				Sertifikasi Pemandu Khusus Desa Wisata (Lokal)	orang	30	30
				Penguatan Kelembagaan Pariwisata	dokumen klasifikasi	1	1
				Sosialisasi CHSE Desa Wisata	lokasi	60	60
				Pelatihan dan Sertifikasi SPA	orang	30	30
				Pendampingan SDM dan Lembaga Wisata Budaya di Calon Desa Mandiri Budaya 2022 (Tahap Pengembangan)	orang	150	150
				Promosi Pariwisata melalui media elektronik	kali	83	83
				Publikasi di Airlines	paket	1	1
				Jumlah pokdarwis dan desa/kampung wisata yang meningkat kapasitasnya melalui Lomba desa/kampung wisata,	pokdarwis	25	25

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				pokdarwis dan homestay pada tahun 2022			
				Pendataan SDM Desa/Kampung Wisata dan Kelembagaan Pokdarwis dan Desa/Kampung Wisata	paket	1	1
				Sertifikasi Pemandu Khusus Obyek Wisata (Lokal)	orang	40	40
				Pelatihan SDM dan Lembaga Wisata Budaya di calon Desa Mandiri Budaya 2022	orang	150	150
				Pengelolaan Media Sosial / Penambahan jumlah follower media sosial dinas pariwisata (instagram, facebook, twitter, youtube channel)	Followers	22000	45479
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	1. Dalam Pengembangan daya tarik pariwisata meliputi: 1. Diversifikasi dan kreatifitas produk wisata lokal 2. Pengembangan daya tarik wisata malam 3. Meningkatkan kualitas produk wisata agar bertaraf internasional 2. dalam pengembangan aksesibilitas: 1. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung akses pariwisata di destinasi wisata 2. Koordinasi dengan stakeholder terkait Peningkatan konektivitas akses yang handal ke lokasi-lokasi daya tarik wisata unggulan DIY. 3. dalam pengembangan amenitas meliputi: 1. Peningkatan standar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Rancangan Awal Renstra Dispar	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			layanan fasilitas pendukung wisata di destinasi wisata 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas amenities di destinasi wisata 3. Koordinasi dengan Stakeholder terkait Pengembangan tourism hub sebagai simpul kontrol dan distribusi pergerakan kunjungan wisata				
			4. Pengembangan Pasar dan Promosi Pariwisata DIY meliputi: 1. Melakukan analisis pengembangan pasar pariwisata yang mendukung pembangunan pariwisata DIY 2. Intensifikasi promosi pariwisata secara online (melalui media digital) dan offline (melalui pameran, pembuatan bahan promosi dll) 3. Pengembangan konten promosi wisata tematik DIY 4. Pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri 5. Pengembangan pengembangan travel pattern dan paket wisata serta manajemen atraksi daya tarik wisata yang kompetitif 6. Pengelolaan pelaksanaan pelayanan informasi pariwisata	Renja Dispar 2023	dokumen	1	1
			5. Pengembangan Citra Pariwisata (brand development tourism): 1. Penguatan dan Pengembangan citra branding destinasi wisata DIY 2. Brand awareness/campaign di	Renja Perubahan Dispar 2022	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			media digital dan non digital untuk promosi destinasi wisata DIY				
			6. Standarisasi Usaha Pariwisata meliputi: 1. Penyusunan standar usaha penyelenggaraan usaha jasa pariwisata 2. Standarisasi usaha pariwisata dalam mendukung daya saing produk dan destinasi wisata DIY. 3. pelaksanaan bimbingan teknis standar internasional usaha pariwisata 4. Pembinaan usaha berbasis potensi lokal pendukung wisata	ROPK Dispar	dokumen	1	1
			7. Penguatan organisasi kepariwisataan dan SDM Pariwisata meliputi: 1. Penguatan Organisasi Kepariwisata dan SDM Pariwisata dalam mendukung tata kelola kepariwisataan yang bedaya saing dan berkelanjutan 2. Penguatan Koordinasi, integrasi dan sinergi antar pemangku kepentingan (lintas sektor dan lintas wilayah). 3. Sertifikasi SDM bidang Pariwisata	Dukungan 20% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
				RKA-Perubahan Tahun 2022	dokumen	1	1
				RKA Tahun 2023	dokumen	1	1
				DPA Tahun 2023	dokumen	1	1
				DPPA Tahun 2022	dokumen	1	1
				Dukungan 20% terhadap tercapainya kinerja Program	persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Dokumen LKJip dengan nilai AKIP 82 A	dokumen	1	1
				Dukungan 20% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Konsep/Bahan LKPJ	dokumen	1	1
				Realisasi penggunaan anggaran dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	%	100	100
				Konsep/Bahan LPPD	dokumen	1	1
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				Terbayarkannya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	tahun	1	1
				Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	tahun	1	1
				Terbayarkannya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	tahun	1	1
				Terbayarkannya gaji dan tunjangan Tenaga Bantu	tahun	1	1
				Dukungan 15% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	tahun	1	1
				Dukungan 15% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Diokumen Perencanaan Anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi (laporan keuangan Tahunan)	dokumen	1	1
				Dukungan 15% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				Laporan Keuangan Triwulanan	dokumen	4	4
				Laporan Keuangan Semester	dokumen	2	2
				Dukungan 15% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Laporan Keuangan bulanan	dokumen	12	12
				Pengamanan Barang Milik Daerah OPD			
				Terbayarnya PBB kantor Jl HOS Cokroaminoto, 221 Yogyakarta	tahun	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan 5% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	tahun	1	1
				Dukungan 5% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Dukungan 15% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Stop kontak	buah	14	14
				MCB	buah	8	8
				Fitting Lampu	buah	20	20
				Lampu Pijar	buah	39	39
				kabel	roll	2	2
				Klem	buah	9	9
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Dukungan 15% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Tersediannya Alat Tulis Kantor	jenis	33	33
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Engkrak	buah	12	12
				Alat pel lantai	buah	9	9

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tisu basah	buah	16	16
				Dukungan 15% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Kain pel	buah	11	11
				Sapu	buah	12	12
				Tisu toilet	buah	9	9
				Keset	buah	10	10
				Sulak	buah	12	12
				Sikat	buah	8	8
				Tisu kering	buah	10	10
				Tempat sampah	buah	11	11
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Penggandaan	lembar	51000	51000
				Barang cetakan	unit/buku	9	9
				Dukungan 15% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Langganan surat kabar dan majalah	jenis	4	4
				Dukungan 15% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam Jawa terlaksanakan dengan baik	tahun	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata luar Jawa terlaksanakan dengan baik	tahun	1	1
				Makan dan minuman rapat tersedia sesuai kebutuhan	orang	4000	4000
				Dukungan 15% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Koordinasi dan konsultasi Dinas Pariwisata dalam daerah terlaksanakan dengan baik	tahun	1	1
				Forum Konsultasi Publik	kegiatan	1	1
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada OPD			
				Penyusutan arsip	arsip	10000	10000
				Pengelolaan arsip dinamis OPD	tahun	1	1
				Dukungan 15% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD			
				Terlaksananya Pengembangan Sistem Pengendali Pelaksanaan Kegiatan (SIPP-K)	paket	1	1
				Dukungan 15% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Terkelolanya website OPD	tahun	1	1
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan 15% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Penyediaan sarana prasarana layanan informasi kepariwisataan (Lensa Kamera) - DID	unit	2	2
				PC	unit	1	1
				Penyediaan sarana prasarana layanan informasi kepariwisataan (Handphone) -DID	unit	3	3
				Peralatan IT dan Media Telekonferensi	jenis	10	10
				AC	unit	1	1
				notebook/laptop	unit	2	2
				printer	unit	3	3
				Penyediaan sarana prasarana layanan informasi kepariwisataan (PC) - DID	unit	6	6
				scanner	unit	1	1
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Dukungan 15% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				surat keluar	tahun	1	1
				Trophy	set	24	24
				surat masuk	tahun	1	1
				pengiriman dokumen	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Pembayaran langganan virtual meeting	tahun	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan 15% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Pembayaran tagihan rekening telepon	tahun	1	1
				Pembayaran tagihan rekening listrik	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Dukungan 15% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Pembayaran keamanan kantor	tahun	1	1
				Pembayaran jasa kebersihan	tahun	1	1
				Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Jl. HOS Cokroaminoto, 221 Yogyakarta	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Dukungan 15% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	1	1
				Terbayarnya pajak kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan 15% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Terbayarnya Biaya Perizinan (KIR) kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	1	1
				Terbayarnya Pajak kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	11	11
				Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	11	11
				Pemeliharaan Mebel			
				Dukungan 15% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Mebeleur terpelihara	jenis	3	3
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Komputer	unit	30	30
				Mesin Ketik	unit	3	3
				Pompa Air	unit	2	2
				Kamera	unit	3	3
				Laptop	unit	20	20
				LCD Proyektor	unit	5	5
				Printer	unit	0	0
				Alat Pemadam Kebakaran	paket	1	1
				CCTV	unit	14	14
				AC	unit	30	30
				Dukungan 15% terhadap tercapainya kinerja Program	persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
				Mesin Generator (Genset)	unit	0	0
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Jaringan komputer	tahun	1	1
				Dukungan 15% terhadap tercapainya kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	persen	100	100
				Jaringan Telepon	tahun	1	1
				Gedung kantor	unit	1	1
				Jaringan listrik	tahun	1	1
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
				LOS wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	hari	2.45	1.91
				Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi	Usaha Jasa Pariwisata (UJP)	250	275
				Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi			
				Jumlah Event Youngyakarta Fest - DID	event	1	1
				Jumlah Event Atraksi Kesenian yang Terlaksana -DID	event	8	8
				Dukungan 30 % terhadap tercapainya kinerja Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	persen	100	100
				Jumlah event Abinaya Reksa Bawana Fest - DID	event	1	1
				Pameran Ekonomi Kreatif Sub Sektor Film dan Fotografi - DID	event	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Lokasi Event Bakti Pariwisata - DID	lokasi	2	2
				Terlaksananya Jogja Forum Festival -DID	event	1	1
				Jumlah Event Jogja Upcoming Festival DID	event	1	1
				Jumlah event pariwisata internasional Jogja Air Show	event	1	1
				Kajian strategi pengembangan kepariwisataan pendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur	dokumen	1	1
				Sosialisasi Pranatan Anyar	kali	4	4
				Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
				Penyusunan Rencana Induk Kawasan Pariwisata Daerah	dokumen	1	1
				Kajian Daya Dukung Lingkungan Terhadap Pariwisata DIY	dokumen	1	1
				Penyusunan Rencana Detil Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	dokumen	1	1
				Kajian pembangunan pariwisata berbasis kekayaan alam dan biodiversitas	dokumen	1	1
				Dukungan 35 % terhadap tercapainya kinerja Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	persen	100	100
				Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata			
				Jumlah UJP yang diawasi pada tahun 2022	UJP	6	6

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah UJP yang meningkat kemampuannya setelah mengikuti Bimbingan Teknis	UJP	6	6
				Dukungan 35% terhadap tercapainya kinerja Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	persen	100	100
				Expose hasil pengawasan UJP	kali	4	4
				Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata			
				Bimtek dan sertifikasi usaha jasa pariwisata Halal	UJP	60	60
				Kajian Potensi daya dukung bandara YIA terhadap pengembangan kepariwisataan DIY	dokumen	1	1
				Dukungan 35% terhadap tercapainya kinerja Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	persen	100	100
				Kemitraan usaha pariwisata hotel dengan UMKM	MoU	10	10
				Industri dan Usaha Pariwisata yang terstandarisasi	UJP	3	3
				Sosialisasi Pranatan Anyar	Kali	4	4
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
				jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun n	orang	8377099	6345069
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
				Kajian Pola Perjalanan Pariwisata di DIY	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kajian Citraloka Kalurahan Wisata di Kota Yogyakarta	dokumen	1	1
				Dukungan 100 % terhadap tercapainya kinerja Program Pemasaran Pariwisata	persen	100	100
				Publikasi Media Cetak	kali terbit	10	10
				Jumlah wisatawan yang menggunakan jasa Pelayanan Informasi Wisata di 4 lokasi (TIS di Bandara YIA dan Stasiun KA Yogyakarta, TIC di Malioboro dan Bali)	orang wisatawan	1000	7242
				Pembuatan Konten Promosi Multimedia (Media cetak, media elektronik/digital, media sosial) di TIC (DAK)	paket	1	1
				Jumlah 7 jenis bahan promosi pariwisata (Baliho, X-banner, Peta wisata, Booklet, Brosur kuliner, Buku informasi Pariwisata, Flashdisk Pariwisata) yang didistribusikan dan menjadi acuan kunjungan wisatawan	eksemplar	8711	8676
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			
				Jumlah ulasan destinasi wisata dalam Familiarization dari jurnalis, asosiasi pariwisata luar negeri dan media	ulasan	30	25
				Dukungan 100 % terhadap tercapainya kinerja Program Pemasaran Pariwisata	persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri			
				Publikasi TV Karya Ekonomi Kreatif DIY	kali	9	9
				Updating Aplikasi Big Data Industri Pariwisata -DID	aplikasi	1	1
				Video promosi dan Profiling wisata Ekspedisi DIY	video	6	6
				Dokumen Statistik Pariwisata	dokumen	1	1
				Analisa Belanja Wisatawan	paket	1	1
				Publikasi TV	kali	1	1
				Kajian strategi pemasaran pariwisata diy	dokumen	1	1
				Sosialisasi Pranatan Anyar	kali	4	4
				Penyusunan Profil Ekonomi Kreatif DIY	paket	1	1
				Dukungan 100 % terhadap tercapainya kinerja Program Pemasaran Pariwisata	persen	100	100
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			
				Keikutsertaan pada Event anggota EATOF	event	1	1
				Jumlah kontrak kerja sama dengan negara anggota EATOF yang dihasilkan dari event EATOF (luran Keanggotaan EATOF)	kontrak kerja sama	1	1
				Dukungan 100 % terhadap tercapainya kinerja Program Pemasaran Pariwisata	persen	100	100
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARWISATA DAN EKONOMI KREATIF			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata	persen	23.04	2113.72
				Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			
				Sosialisasi Sadar Wisata	angkatan	41	41
				Pelatihan bahasa Inggris di destinasi wisata	angkatan	4	4
				Pelatihan Pemandu wisata di desa wisata	angkatan	8	8
				Kajian sustainable tourism development dalam Pengembangan kepariwisataan di DIY	dokumen	1	1
				Dukungan 100 % terhadap tercapainya kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	persen	100	100
				Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			
				Dukungan 100 % terhadap tercapainya kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	persen	100	100
				Sosialisasi Pranatan Anyar	kali	4	4
				Jumlah Forum Komunikasi Lintas Sektor	kali	4	4
				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			
				Sertifikasi Layanan Pelanggan (Front Office)-DID	sertifikat	50	50
				Sertifikasi Food Beverage Service - DID	sertifikat	50	50

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sertifikasi Food Production (cookery) -DID	sertifikat	40	40
				Sertifikasi Waitress -DID	sertifikat	40	39
				Sertifikasi House Keeping-DID	sertifikat	50	50
				Dukungan 100 % terhadap tercapainya kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	persen	100	100
				Sertifikasi Pendampingan dan penghubung VIP, VVIP-DID	sertifikat	50	50
				Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu Khusus Cycling/Sepeda/Gowes	orang	30	30
				Sertifikasi Administrasi & Keuangan (Acoounting) -DID	sertifikat	40	39
				Sertifikasi Cook -DID	sertifikat	40	38
				Sertifikasi Pemandu Umum	orang	50	50
				Pelatihan dan Sertifikasi Barista	orang	35	35
				Sertifikasi Receptionist - DID	sertifikat	40	40

c. Urusan Pertanian

1) Kondisi Umum

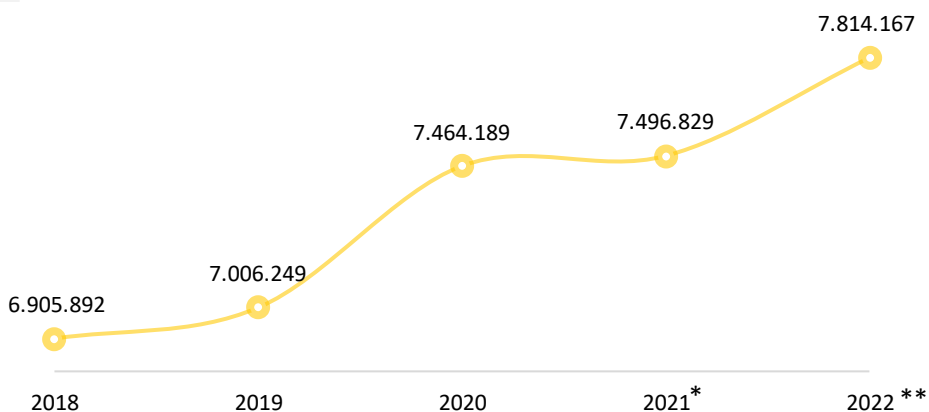
Angka PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan berdasarkan harga konstan (dalam juta rupiah) tercapai sebesar 7.814.167 atau 106,64% dari target tahun 2022. Dibandingkan tahun 2021, capaian nilai sub sektor pertanian yang terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun 2022 meningkat sebesar 4,23% atau sebesar 317.338 juta rupiah. Hal ini disebabkan adanya peningkatan PDRB sub sektor tanaman pangan 7,85%, hortikultura meningkat 0,86%, perkebunan meningkat 13,85%, dan peternakan meningkat sebesar 1,37%. Peningkatan PDRB di 4 subsektor tersebut didukung adanya program bantuan berupa sarana dan prasarana dan pendampingan intensif bagi petani. Peningkatan produksi pertanian dilakukan melalui peningkatan produktivitas, adanya dukungan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), perbenihan tanaman pertanian, perbibitan ternak, pengembangan SDM pertanian, dan pencegahan serta pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang baik di wilayah DIY.

Tabel 3.162. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021*	2022**			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 Terhadap target akhir RPJMD 2022(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB tahun (Sumber BPS)	Juta Rupiah	7.496 .829*	7.327 .757	7.814 .167**	106,64	7.327 .757	106,64

Ket.: *) Angka Sementara; **) Angka sangat sementara

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023



Gambar 3.52. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahunan (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

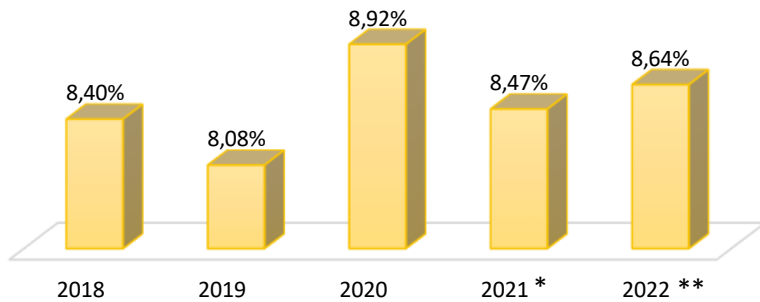
Tabel 3.163. PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahunan Berdasarkan Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah) series 2018-2022**

No	Komoditas	PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahunan Berdasarkan Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1.	Pertanian	6.905.892	7.006.249	7.464.189	7.496.829	7.814.167
a.	Tanaman Pangan	2.950.946	2.940.429	3.233.401	3.073.421	3.314.770
b.	Tanaman Hortikultura	2.021.184	2.084.243	2.209.320	2.304.182	2.323.933
c.	Tanaman Perkebunan	218.349	232.059	251.243	218.252	248.491
d.	Peternakan	1.715.413	1.749.517	1.770.224	1.900.975	1.926.974
PDRB DIY		98.024.014	104.485.459	101.683.520	107.308.555	112.898.323

Ket.: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang PDRB yang cukup besar meskipun perannya semakin menurun dikarenakan pertumbuhan sektor non pertanian yang relatif cepat dan tinggi. Namun kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan menjadi 8,47% pada tahun 2021 dan meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 8,62%. Menurunnya kontribusi sektor pertanian menunjukkan adanya transformasi perekonomian daerah dan nasional, yang awalnya didominasi oleh hasil produk primer pertanian bergeser ke sektor lainnya.



Gambar 3.53. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2018–2022**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

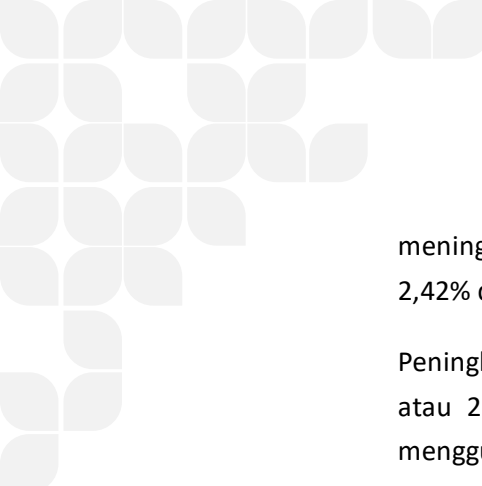
Tabel 3.164. Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2021-2022

No	Komoditas	Produksi (ton)	
		2021	2022**
1	Padi	875.041	881.199
2	Jagung	358.022	317.612
3	Kedelai	8.675	6.903
4	Kacang Tanah	78.845	69.511
5	Kacang Hijau	508	488
6	Ubi Kayu	882.073	1.049.156
7	Ubi Jalar	2.171	3.251
8	Sorghum	22	0

Ket.: **) Angka sementara

Sumber: DPKP DIY, 2023

Sesuai tabel di atas produksi tanaman pangan tahun 2022 sebesar 2.328.120 ton, mengalami kenaikan sebesar 122.763 ton (5,57%) dari tahun 2021 sebesar 2.205.357. Komoditas yang mengalami kenaikan meliputi padi, ubi kayu, ubi jalar. Peningkatan produksi padi karena didukung curah hujan optimal dan dukungan pemerintah dalam pengembangan kawasan padi. Dukungan pengembangan kawasan padi berupa program IP400/OPIP (Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman), penyediaan benih unggul bersertifikat, penyediaan sarana prasarana serta pengendalian OPT danantisipasi dampak perubahan iklim. Upaya tersebut dapat



meningkatkan luas panen padi total sebesar 3.555 hektar atau 2,42% dibandingkan tahun 2021.

Peningkatan produksi ubi kayu sebesar 42,25 kuintal/hektar atau 22,23% dibanding tahun 2021 disebabkan pemupukan menggunakan pupuk organik dan pupuk NPK serta curah hujan optimal yang mendukung kondisi pertanaman ubi kayu. Produksi ubi jalar naik karena adanya peningkatan luas panen dan produktivitas masing-masing sebesar 62 hektar atau 47,67% dan 2,33 kuintal/hektar atau 1,4%, hal ini disebabkan minat petani meningkat untuk budidaya seiring dengan tingginya permintaan pasar untuk dijadikan produk olahan.

Adapun komoditas yang mengalami penurunan meliputi jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan sorghum. Penurunan produksi jagung sebesar 4,84 kuintal/hektar atau 9,06% disebabkan tidak sempurnanya pembungaan dan pengisian biji pada tongkol jagung yang dipengaruhi kondisi iklim serta adanya peralihan ke komoditas padi untuk program IP400/OPIP (Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman). Kondisi ini menyebabkan luas panen jagung berkurang 1.645 hektar atau turun sebesar 2,45% dari tahun 2021. Produksi kedelai sebesar 1.772 ton atau turun 20,43% dibanding tahun 2021 karena puso di beberapa lokasi yang disebabkan curah hujan cukup tinggi sehingga tidak sesuai dengan kondisi optimal pertanaman kedelai. Akibatnya luas panen berkurang 787 hektar atau 12,74% dan produktivitas turun 1,24 kuintal/hektar atau 8,83%. Penurunan produksi kacang tanah dan kacang hijau disebabkan peralihan ke komoditas padi untuk program IP400/OPIP (Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman) yang menyebabkan luas panen kacang tanah berkurang 8.745 hektar atau turun sebesar 13,60% dan rendahnya minat petani untuk budidaya kacang hijau dikarenakan ketersediaan benih

unggul yang berlabel terbatas serta petani beralih ke komoditas lain yang mempunyai nilai jual lebih tinggi.

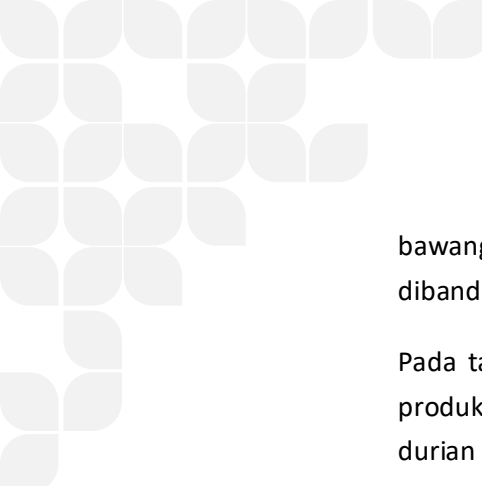
Tabel 3.165. Produksi Hortikultura di DIY Tahun 2021-2022

No	Komoditas	Satuan	Produksi	
			2021	2022*
1	Cabai besar	Ton	38.378	35.384
2	Cabai rawit	Ton	15.933	15.198
3	Bawang merah	Ton	29.809	21.911
4	Mangga	Ton	33.456	28.953
5	Durian	Ton	9.258	9.593
6	Pisang	Ton	68.257	80.733
7	Salak	Ton	57.296	51.832
8	Pepaya	Ton	14.653	16.887
9	Semangka	Ton	5.184	8.298
10	Melon	Ton	14.550	7.001
11.	Jahe	Ton	5.121	4.970
12.	Kunyit	Ton	3.374	3.288

Ket.: *) Angka sementara

Sumber: DPKP DIY, 2023

Produksi hortikultura di DIY tahun 2022 sebesar 410.274 ton, mengalami penurunan sebesar 13.772 ton (-3,25%) dibandingkan tahun 2021 sebesar 424.046 ton. Berdasarkan tabel di atas, komoditas sayuran strategis seperti cabai besar, cabai rawit dan bawang merah mengalami penurunan. Penurunan produksi cabai besar sebesar 7,8%, cabai rawit 4,62%, dan bawang merah 26,49%. Pada tahun 2022 komoditas bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit yang juga masuk dalam kelompok komoditas pangan utama mengalami penurunan produksi disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sehingga menyebabkan gagal panen. Selain itu penurunan produksi bawang merah juga disebabkan tingginya harga benih. Produksi cabai besar mencapai angka 35.384 ton atau turun 7,8% dibandingkan tahun 2021 sebesar 38.378 ton. Produksi cabai rawit sebesar 15.198 ton mengalami penurunan 4,62% dibandingkan tahun 2021 sebesar 15.933 ton. Komoditas



bawang merah mencapai 21.911 ton atau turun 26,49% dibandingkan produksi tahun 2021 sebesar 29.809 ton.

Pada tahun 2022, komoditas buah yang mengalami kenaikan produksi adalah durian, pisang, pepaya dan semangka. Produksi durian meningkat 3,62%, pisang 18,28%, pepaya 15,25% dan semangka 60,09%. Peningkatan produksi pepaya dan semangka disebabkan bertambahnya luas panen karena banyak petani yang menanam komoditas tersebut. Komoditas durian dan pisang produksinya meningkat karena adanya dukungan dari program pemerintah baik berupa bantuan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Komoditas buah yang mengalami penurunan adalah mangga sebesar 13,46%, salak 9,54% dan melon 51,88%. Penurunan produksi salak disebabkan karena harga salak yang cenderung rendah sehingga petani beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan dan usia tanaman salak sebagian besar sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Demikian juga penurunan produksi melon karena curah hujan yang tinggi yang menyebabkan lahan terendam banjir sehingga petani mengalami gagal panen.

Pada tahun 2022, komoditas unggulan biofarmaka yaitu jahe dan kunyit produksinya mengalami penurunan. Produksi jahe turun 2,95% sedangkan kunyit turun 2,57%. Penurunan produksi biofarmaka ini dikarenakan curah hujan yang tinggi, selain itu disebabkan pula oleh harga jual yang rendah sehingga petani beralih ke komoditas lain yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi.

Populasi peternakan pada tahun 2022 di DIY sebanyak 16.831.703 ekor atau 625.021 Animal Unit (AU). Jumlah populasi menurun jika dibandingkan dengan populasi tahun 2021 sebanyak 16.364.399 ekor atau 630.326 AU, sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3.166. Populasi Ternak di DIY Tahun 2021-2022

No	Komoditas	Populasi Ternak			
		2021 (ekor)	2021 (AU)	2022* (ekor)	2022 (AU)
1	Sapi Potong	323.308	245.714	303.191	230.425
2	Sapi Perah	3.500	2.660	3.371	2.562
3	Kuda	1.757	1.212	1.632	1.126
4	Kerbau	471	429	418	380
5	Babi	9.299	1.860	9.096	1.819
6	Kambing	417.386	45.912	428.157	47.097
7	Domba	144.617	18.800	140.164	18.221
8	Ayam buras	3.463.921	69.278	3.506.066	70.121
9	Ayam Ras Petelur	4.712.467	94.249	4.835.021	96.700
10	Ayam Ras Pedaging	6.841.974	136.839	7.156.738	143.135
11	Itik	445.699	13.371	447.849	13.435
	TOTAL	16.364.399	630.326	16.831.703	625.021

Ket.: *) Angka sementara

Sumber: DPKP DIY, 2023

Populasi sapi potong mengalami penurunan 20.117 ekor atau sebesar 6,22%. Penurunan ini disebabkan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah DIY yang menyerang ternak sapi sebanyak 13.641 ekor, dan menyebabkan kematian 558 ekor, serta potong bersyarat 491 ekor. Selain itu, penurunan juga disebabkan pemenuhan kebutuhan pemotongan ternak sapi potong untuk hewan kurban sebagian besar berasal dari wilayah DIY, karena adanya pembatasan lalu lintas ternak antar wilayah.

Selain itu, komoditas strategis peternakan lainnya yang mengalami penurunan populasi pada tahun 2022 yaitu sapi perah, kerbau, babi dan domba. Penurunan populasi sapi perah, kerbau, domba dan babi disebabkan karena ternak tersebut merupakan hewan rentan Penyakit Mulut dan Kuku yang sedang mewabah. Jumlah ternak yang terserang PMK perkomoditas masing-masing yaitu kambing sebanyak 202 ekor, domba sebanyak 670 ekor, dan kerbau sebanyak 23 ekor. Namun demikian untuk komoditas ternak kambing pada tahun 2022 justru mengalami peningkatan meskipun terjadi wabah PMK.

di sisi lain terdapat komoditas strategis peternakan lainnya yang mengalami peningkatan populasi pada tahun 2022 yaitu ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik. Populasi ayam buras mengalami peningkatan sebesar 1,21%, ayam ras petelur sebesar 2,6%, ayam ras pedaging 4,6% dan itik sebesar 0,48%. Peningkatan populasi dipengaruhi adanya potensi pasar yang cukup besar.

Tabel 3.167. Produksi Komoditas Perkebunan DIY Tahun 2021-2022**

No	Komoditas	Produksi (Ton)			Wujud Produksi
		2021	2022**	% Pertumbuhan	
1	Kelapa	50.488,34	50.243,61	-0,49	kopra
2	Tebu	8.336,28	8.240,12	-1,15	gula hablur
3	Kakao	1.759,70	1.850,39	5,15	biji kering
4	Cengkeh	725,80	759,13	4,59	bunga kering
5	Tembakau Rakyat	707,16	779,63	10,2	daun kering
6	Kopi	525,77	538,07	2,34	biji kering
7	Jambu Mete	474,08	476,80	0,57	biji kering
8	Teh	227,13	239,14	5,29	daun kering

Ket.: **) Angka Sangat Sementara

Sumber: DPKP DIY, 2023

Komoditas unggulan perkebunan yang mengalami peningkatan produksi adalah kakao (5,15%), cengkeh (4,59%), tembakau rakyat (10,2%), kopi (2,34%), jambu mete (0,54%) dan teh (5,29%). Meningkatnya produksi pada beberapa komoditas perkebunan antara lain disebabkan jaminan harga, kepastian pasar, penambahan luas areal tanam, penggunaan bibit/benih bervariasi unggul, rehabilitasi, pemeliharaan, pemberdayaan petani, fasilitasi bibit/benih unggul, penanganan pascapanen, dan penguatan kelembagaan.

Sedangkan Komoditas perkebunan yang mengalami penurunan produksi adalah kelapa (0,49%) dan tebu (1,15%), yang disebabkan tingginya curah hujan sehingga serangan OPT meluas di wilayah DIY. Curah hujan tinggi saat musim panen tebu juga berdampak pada penurunan rendemen saat penggilingan tebu yang menyebabkan gula hablurnya menurun.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

Menggambarkan permasalahan dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2022, maupun permasalahan pelaksanaan urusan.

- (1) Perubahan iklim menyebabkan kemarau basah yang berdampak pada pertanian.
- (2) Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di DIY sejak awal Mei 2022 masih perlu mendapatkan penanganan yang serius.
- (3) Belum optimalnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian.


b) *Solusi*

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas (**point a**).

- (1) Meningkatkan kapasitas petani dalam rangka mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim misalnya dengan Sekolah Lapangan (SL).
- (2) Melaksanakan pencegahan dan penanganan PHMS secara berkelanjutan, untuk PMK dengan terus melaksanakan peningkatan biosekuriti, vaksinasi, penandaan dan pendataan ternak.
- (3) Meningkatkan komitmen dan kolaborasi lintas sektor dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian agar kepentingan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan upaya menjaga LP2B.

3) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Urusan Pertanian pada tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran Rp43.074.734.908,00 yang terdiri dari anggaran reguler sebesar Rp42.215.030.908,00 dan Dana Keistimewaan sebesar Rp859.704.000,00. Dana Keistimewaan melalui urusan tata ruang terdiri dari 1 program, 1 kegiatan, dan 1 subkegiatan



dan murni/reguler terdiri dari 5 program, 11 kegiatan, 19 subkegiatan. Realisasi anggaran terealisasi Rp39.572.760484,00 atau 91,87% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp3.501.974.424,00 atau 8,85% yang bersumber dari sisa pengadaan barang dan jasa lewat *e-purchasing* (*mbiz* dan *e-katalog*), efisiensi belanja perjalanan dinas dan efisiensi honor narasumber. Rincian capaian kinerja program dan subkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.168. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1. Peningkatan produksi tanaman dan populasi ternak yang berdampak bagi peningkatan pendapatan petani. 2. Peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan 3. Pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana) 4. Pengembangan kawasan yang berdampak terhadap pendapatan petani. 5. Menumbuhkan sentra-sentra pembibitan ternak lokal Pendampingan dan pengawalan kelompok 6. Pendampingan dan pengawalan kelompok. 7. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh, pemantapan kelembagaan penyuluhan, dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan 8. Pemantapan ketersediaan dan kewaspadaan pangan melalui koordinasi lintas sektor	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi Produksi tanaman pangan Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi Produksi perkebunan Populasi peternakan Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	% Ton % Ton Animal Unit Hektar	91 2313500 98 69288 628870 900	97,58 2327701,89 100 64072.01 625021 903,49

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			9. Peningkatan cadangan pangan daerah (masyarakat dan pemerintah)	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	2	2
			10. Peningkatan diversifikasi/penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal	Laporan hasil Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)	dokumen	3	3
			11. Penanganan keamanan pangan, pengawasan pangan beredar, dan sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan	Pengembangan pengolahan pupuk organik	kelompok	17	17
			12. Pengembangan distribusi pangan yang merata dan terjangkau, stabilitas harga pangan strategis, dan pemantauan distribusi, harga, akses pangan.	Sarana pertanian yang dapat dipenuhi	unit/kelompok	164	163
				Sosialisasi Penggunaan Pupuk	lokasi	16	16
				Uji coba kartu tani untuk penyaluran pupuk bersubsidi	lokasi	3	3
			13. Penurunan jumlah Desa Rawan Pangan	Memberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
			14. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pusat Perbenihan	Penambahan populasi ayam buras/ayam lokal (58 kelompok)	ekor	29000	28500
			15. Peningkatan aksesibilitas pangan masyarakat	Penambahan populasi itik (23 kelompok)	ekor	4600	4400
			16. Pemenuhan kecukupan pangan masyarakat	Penambahan populasi ternak domba (61 kelompok)	ekor	671	671
				Penambahan populasi ternak kambing bligon (85 kelompok)	ekor	935	924
				Penambahan populasi ternak kambing perah (41 kelompok)	ekor	451	451
				Penambahan populasi ternak sapi potong (112 kelompok)	ekor	672	666
				Publikasi media cetak	kali	1	1
				Tersedianya pakan ternak komplit ruminansia	kelompok	4	4

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih			
				Luas areal yang mengajukan sertifikasi untuk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	ha	250	390,55
				Peralatan dan mesin untuk mendukung pelayanan pengujian mutu benih	jenis	2	2
				Publikasi media cetak	kali	1	1
				Sarana Front Desk pelayanan sertifikasi dan pengawasan Benih	jenis	3	3
				Sarana laboratorium pengujian mutu benih	jenis	3	3
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura			
				Pengadaan sarana penyediaan kultur jaringan anggrek	jenis	5	5
				Pengadaan sarana prosesing benih Hortikultura	jenis	2	2
				Produksi benih anggur	batang	50	50
				Produksi benih cabai	kg	36	36,9
				Produksi benih jamur edibel	Botol	4000	4115
				Produksi benih krisan	batang	25000	26250
				Produksi benih stroberi	batang	5000	5000
				Produksi benih tanaman buah	batang	3460	3460
				Produksi benih tanaman hias	batang	1740	1940
				Produksi benih tomat	kg	35	35
				Rekomendasi produsen dan pengedar benih hortikultura	rekomendasi	6	9
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan			
				Operasional Jogja Benih	tahun	1	1
				Pengadaan sarana prosesing benih Tanaman Pangan	jenis	4	4
				Produksi Benih Jagung	kg	2550	2550
				Produksi Benih Kedelai	kg	1400	1410
				Produksi Benih Padi	kg	40500	49655
				Publikasi media cetak	kali	1	1
				Rekomendasi produsen dan pengedar benih Tanaman Pangan	rekomendasi	10	11
				Sarana Pengendalian OPT Burung pada pertanaman benih padi di unit Berbah	Jenis	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan			
				Penyediaan entres kakao, benih kakao dan benih kelapa	jenis	3	3
				Produksi Benih Kakao	batang	2000	2000
				Produksi Benih Kelapa	batang	1000	1000
				Rekomendasi Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Perkebunan	rekomendasi	1	1
				Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
				Pengolahan Lahan Hijauan Makanan Ternak	paket	1	1
				Produksi bibit ternak (ekor) bersertifikat SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	ekor	40	49
				Produksi HMT rata-rata pertahun untuk ternak di UPTD BPPTDK	kg/tahun	800000	928600
				Publikasi media cetak	kali	1	1
				Rehabilitasi Saluran Air	paket	1	1
				Sarana Pengembangan Sapi Perah	jenis	10	10
				Sarana Produksi Bibit Sapi Perah	unit	1	1
				Semen beku (dosis) yang sesuai dengan SNI	dosis	20000	41709
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
				Produksi hortikultura	Ton	402749	387820
				Produksi tanaman pangan	Ton	2313500	2327701,89
				Produksi perkebunan	Ton	69288	64072.01
				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			
				Bimtek Pasca Panen/Pengolahan Hasil Hortikultura	lokasi	16	16
				Bimtek Pasca Panen/Pengolahan Perkebunan	angkatan	2	2
				Bimtek Pengolahan Hasil Perkebunan	lokasi	16	16
				Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	dokumen	3	3

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kajian Desa Mandiri Benih Berbasis Budaya Lokal	paket	1	1
				Kajian Optimalisasi Usaha Perkebunan Tembakau di DIY	dokumen	1	1
				Kajian Penyusunan Insentif dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	dokumen	1	1
				Kajian Potensi pengembangan agrowisata berbasis hortikultura di DIY	dokumen	1	1
				Kebijakan Mendorong Akses Petani Terhadap Pasar Komoditas Pertanian di DIY	dokumen	1	1
				Luas lahan hortikultura yang produktivitasnya meningkat	ha	104	103
				Luas lahan yang produktivitasnya meningkat (luas areal ubi kayu 21 ha)	ha	21	21
				Penerapan sistem pertanian organik (komoditas padi)	kelompok	1	1
				Pengembangan Kelapa Genjah Kopyor	kelompok	6	6
				Publikasi Media Cetak	kali	7	7
				Registrasi Kebun (komoditas salak pondoh)	sertifikat	400	400
				Rehabilitasi tanaman teh	kelompok	1	1
				Sosialisasi pembangunan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan)	lokasi	16	16
				Temu Kemitraan Perkebunan (Komoditas Teh)	angkatan	1	1
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani			
				Bimtek Pengelolaan Lahan dan Air untuk Perkebunan	sub sektor	0	0
				Kajian inventarisasi dan revitalisasi jaringan irigasi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bantul	dokumen	1	1
				Sarana prasarana irigasi untuk hortikultura	sub sektor	0	0
				Sarana prasarana rehab jaringan irigasi tersier	unit	26	26
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
				Populasi peternakan	Animal Unit	628870	625021
				Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi	%	98	100
				Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			
				Fasilitasi obat hewan dan vaksin	botol	850	850

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan			
				Publikasi media cetak	kali	1	1
				Sarana pelayanan rekomendasi keluar masuk ternak dan produk hewan	jenis	0	0
				Terjaminnya daging hewan qurban yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH)	kabupaten/kota	5	5
				Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi			
				Pengamanan hewan ternak melalui Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT)	lokasi	7	7
				Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)			
				Jumlah sertifikat yang dihasilkan pada pelaksanaan audit NKV terhadap unit usaha produk asal hewan yang telah memenuhi persyaratan	unit usaha	1	1
				Meningkatnya kompetensi pengelola hewan qurban	orang	25	25
				Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
				Hasil uji penyakit hewan	sampel	7500	7500
				Hasil Uji sampel produk asal hewan	sampel	300	300
				Publikasi media cetak	kali	1	1
				Sarana laboratorium pengujian kesehatan hewan ternak dan kesehatan masyarakat veteriner	jenis	11	11
				Sarana laboratorium pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)	jenis	18	18
				Terpeliharanya Status Akreditasi Laboratorium	ruang lingkup	4	4
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
				Persentase pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI	%	95	97,455
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
				Berfungsinya laboratorium Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Tumbuhan (LPHPT)	sub sektor	0	0
				Berfungsinya Laboratorium Pengujian Mutu Produk Pertanian (LPMPP)	tahun	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dokumen data, informasi peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) sebagai dasar rekomendasi	kecamatan	67	67
				Laporan pengawasan peredaran penggunaan pestisida di tingkat petani	dokumen	1	1
				Publikasi media cetak	kali	2	2
				Rekomendasi tingkat residu pada produk	rekomendasi	40	55
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
				Tingkat pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian	Nilai/Skor	76	76
				Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN			
				Pelatihan Agribisnis Hortikultura	angkatan	1	1
				Pelatihan Agribisnis Perkebunan	angkatan	1	1
				Pelatihan Agribisnis Tanaman Pangan	angkatan	1	1
				Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan	angkatan	1	1
				Publikasi Media Cetak	kali	1	1
				Temu Tugas Penyuluh	kali	1	1
				Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			
				Kajian Kelembagaan JAP	dokumen	1	1
				Operasional Jogja Agro Park	tahun	1	1
				Pembangunan/Rehab Fisik JAP	paket	1	1
				Programa Penyuluhan	dokumen	1	1
				Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani			
				Data Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok	dokumen	1	1
				Forum Komunikasi Petani Milenial	kab/kota	5	5
				Penghargaan Bidang Pertanian	kategori	5	5
				Publikasi dan Informasi	kali	1	1
				Publikasi media cetak	kali	1	1
				Video Edukasi Budidaya Pertanian dan Peternakan Milenial	paket	5	5



d. **Urusan Kehutanan**

1) *Kondisi Umum*

Wilayah DIY masih terdapat 71 desa penyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Kegiatan kehutanan secara rutin telah menanggung hajat hidup masyarakat sebanyak ± 94.932 KK. Masyarakat tersebut tergabung dalam 168 kelompok tani hutan (KTH), dengan rincian 45 KTH perhutanan sosial, dan 123 KTH pesanggem. Fakta kondisi sosial di sekitar hutan DIY tersebut merupakan kantong-kantong kemiskinan. Dengan demikian maka pembangunan kehutanan tidak bisa dilepaskan dari pembangunan masyarakat sekitar hutan.

Sebagai salah satu upaya tersebut, melalui pola kerja sama tumpangsari. Kerja sama ini dilakukan dengan pesanggem (petani hutan) dengan memberikan izin pemanfaatan pengelolaan lahan bawah tegakan tanaman kayu putih untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian secara tumpang sari dengan tegakan kayu putih. Terdapat lahan seluas 4.508,8 ha yang dikerjasamakan dan berhasil menyerap kurang lebih 6.655 orang tenaga kerja. Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan, pada tahun 2022 dari kegiatan tumpangsari dapat menghasilkan Rp22.178.674.761,00. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa usaha kehutanan juga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan dokumen RPJMD 2017-2022, indikator lain yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan kehutanan yaitu nilai PDRB sub sektor kehutanan. Realisasi kinerja urusan kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.169. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	juta	1.004.249,7	764.545	1.115.771,8*	145,94	764.545	145,94

Ket.: *) Angka proyeksi

Sumber: DLHK DIY, 2023

Angka realisasi yang ada merupakan angka proyeksi sehingga masih bersifat sangat sementara (belum dirilis secara resmi oleh BPS). Angka realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka realisasi tahun 2022 mencapai 145,94 % dari target. Beberapa usaha kehutanan yang menjadi penyusun nilai PDRB sebagai berikut :

Tabel 3.170. Angka Produksi Kehutanan 2022

No	Uraian	Volume
1.	Produksi kayu bulat (m³)	94.229,56
a.	Kayu Bulat Hutan Negara	2.070,67
b.	Kayu Bulat Hutan Rakyat	92.158,89
2.	Produksi kayu olahan (m³)	11.236,45
a.	Kayu Gergajian/ <i>Swan Timber</i> (m ³)	2.827,58
b.	Kayu lapis/ <i>plywood</i> (m ³)	1.452,37
c.	<i>Veneer</i> (m ³)	1.747,41
d.	<i>Barecore</i> (m ³)	3.198,78
e.	<i>Blockboard</i> (m ³)	2.010,31
3.	Produksi hasil hutan non kayu	
a.	Minyak kayu putih (liter)	40.160,00
b.	Bambu (batang)	13.510.000,00
4.	Jasa Lingkungan (Rp)	2.004.334.125
a.	Pengelolaan Hutan Mangunan	1.997.224.125
b.	Pengelolaan Hutan Produksi Ngingrong Mulo	7.110.000

Sumber: DLHK DIY, 2023

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

Menggambarkan permasalahan dalam mewujudkan **target kinerja** Tahun 2022, maupun permasalahan pelaksanaan urusan.

- (1) Masih belum optimalnya penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari luar kawasan.
- (2) Produk dari hasil hutan, khususnya hasil hutan bukan kayu masih belum dapat dipasarkan secara optimal.

b) *Solusi*

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas (**point a**).

- (1) Pengembangan Sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SIPUHH) yang berbasis web. Sistem ini digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan, meliputi perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.
- (2) Penyelenggaraan *Virtual Exhibition* berbasis web untuk memfasilitasi pemasaran produk-produk olahan kelompok tani hutan.

3) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Alokasi anggaran Urusan Kehutanan tahun 2022 sebesar Rp11.891.131.041,00. Secara fisik, pelaksanaan kegiatan telah tercapai 100%, sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar Rp10.582.444.050,64,00 atau dengan persentase capaian 88,99%. Capaian kinerja program kegiatan secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.171. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 2. Meningkatkan peranserta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3. Mendorong pemanfaatan lingkungan hidup yang harmoni dengan daya dukung dan daya tampungnya; 4. Meningkatkan efektivitas perlindungan sumber daya alam dan fungsi lingkungan; 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan; 6. Meningkatkan efektivitas kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran udara; 7. Meningkatkan efektivitas kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian polusi; 8. Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengendalian perubahan iklim global dan penanggulangan dampak gas rumah kaca; 9. Meningkatkan sinergisitas dan memperjelas pembagian peran para pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran udara ambient. 10. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 11. Meningkatkan peranserta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
				Persentase kawasan hutan tertata	%	92.32	93.7
				Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	%	2	2
				Persentase kawasan hutan tertata	%	92.32	93.7
				Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam	Batang	350000	350000
				Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	%	2	2
				Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	Rasio	86.66	86.68
				Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	Rasio	86.66	86.68
				Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam	Batang	350000	350000
				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi			
				Bimbingan Teknis Penatausahaan Hasil Hutan Kayu	orang	60	60

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			12. Mendorong pemanfaatan lingkungan hidup yang harmoni dengan daya dukung dan daya tampungnya;	Monitoring dan evaluasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu di Kawasan Hutan Produksi	laporan	1	1
			13. Meningkatkan efektivitas perlindungan sumber daya alam dan fungsi lingkungan;	Monitoring dan evaluasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Kawasan Hutan Produksi	laporan	1	1
			14. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan			
			15. Meningkatkan efektivitas kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran air sungai;	Pemantauan Batas Kawasan Hutan di BDH Karangmojo (153 km)	dokumen	1	1
			16. Mengembangkan dan meningkatkan sistem hukum lingkungan untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum;	Monitoring Evaluasi Pemanfaatan Hutan di BDH Paliyan	dokumen	1	1
			17. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sampah;	Penyelesaian Permasalahan Tenurial	bulan	12	12
			18. Peningkatan pembinaan bagi kelompok masyarakat peduli lingkungan.	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan di BDH Kulonprogo-Bantul	Km	27	27
			19. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi lintas perangkat Daerah untuk melaksanakan Program Penambahan Tutupan Vegetasi;	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya			
			20. Meningkatkan aksesibilitas dengan para pemrakarsa kegiatan untuk fasilitasi lahan atau pengembangan tutupan vegetasi dan konservasi lahan.	Inventarisasi Potensi HHBK	dokumen	1	1
			21. Pembaharuan Sistem Tata Kelola Kehutanan	Pengawasan pengolahan HHBK	laporan	1	1
			22. Mempertahankan keberadaan kawasan hutan	Bimtek Pengelolaan usaha pemanfaatan hutan (DID)	Lokasi	6	6
			23. Pemantapan Kawasan Hutan	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			24. Perencanaan Kehutanan yang Komprehensif dan Berkesinambungan	Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu	laporan	1	1	
			25. Peningkatan produktifitas dan nilai tambah sumber daya hutan dan fungsinya	Penyusunan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri dengan Kapasitas Produksi	dokumen	1	1	
			26. Optimalisasi Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber daya Hutan	Bimbingan Teknis Sertifikasi Legalitas Kayu	orang	30	30	
			27. Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan	Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	IPHHK	28	30	
			28. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan	Pengembangan Aplikasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Rakyat	aplikasi	1	1	
			29. Penguatan Kelembagaan dan SDM Kehutanan	Sertifikasi Sumber Benih				
			30. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan	Pemeliharaan Sumber Benih Unggul Kayu Putih	unit	1	1	
			31. Peningkatan Kontribusi Kehutanan bagi Keberlanjutan Sektor Perekonomian lainnya	Penilaian Kelayakan Calon Sumber Benih Tanaman Kehutanan	lokasi	4	4	
			32. Konservasi Keanekaragaman Hayati	Sertifikasi Mutu Bibit				
			33. Peningkatan Manfaat Jasa Ekosistem	Penilaian Kelayakan Bibit/ Benih yang sesuai dengan Standar Mutu	batang	350000	359475	
			34. Peningkatan Peran Hutan dalam Pemulihan Daya Dukung DAS	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit				
			35. Rehabilitasi lahan dan pencegahan bencana alam	Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan	batang	350000	350000	
			36. Optimalisasi dan Distribusi Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Pembinaan dan Pengaawalan Pengada/ Pengedar Benih dan/ atau Bibit Tanaman Kehutanan	orang	20	20	
				Pengawasan Peredaran Benih/ Bibit Tanaman Kehutanan	batang	4	4	
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Benih Tanaman Kehutanan	lokasi	4	2	
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				persentase hutan konservasi terkelola	%	77.09	68.81
				persentase hutan konservasi terkelola	%	77.09	81.96
				Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA			
				Pengamanan kawasan	bulan	12	12
				Pembersihan lahan bawah tegakan	ha	2	2
				Pembuatan sekat bakar	ha	2	2
				Pemeliharaan tegakan rawan bencana	pohon	10	10
				Penandaan Batas Kawasan Blok Tradisional melalui Penanaman Vegetasi (DID)	ha	1.1	1.1
				Penyelamatan anakan alam	batang	1000	1000
				Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi			
				Pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura	kali	7	7
				Laporan RKL RPL Tahura	dokumen	2	2
				Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi	bulan	12	12
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
				Persentase kawasan hutan tertata	%	92.32	93.7
				Persentase kawasan hutan tertata	%	92.32	93.7
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan			
				Programa Penyuluhan Kehutanan	dokumen	1	1
				Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			
				Sarana dan Prasarana Alat Ekonomi Produktif (DAK)	Kelompok	5	5
				Peningkatan Kelas KTH	KTH	4	4
				Pembinaan dan Pendampingan KTH	KTH	45	45

e. **Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

1) *Kondisi Umum*

Fokus pelaksanaan kewenangan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Pemda DIY yang meliputi sub urusan mineral dan batubara, air tanah dan geologi, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilaksanakan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja pada RPJMD 2017 – 2022 yaitu berfokus pada pelayanan kepada masyarakat meliputi pengaturan, pembinaan, penataan perizinan, pengawasan dan pengendalian.

Adapun sasaran utama RPJMD 2017-2022 dalam pelaksanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di DIY adalah :

- a) Meningkatkan Rumah Tangga Berakses Listrik; dan
- b) Meningkatkan Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang.

Dalam mendukung pemenuhan sasaran tersebut, khususnya sub urusan Mineral dan Batubara pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2022 telah menyusun dan menetapkan beberapa regulasi yaitu :

- a) Peraturan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
- b) Peraturan Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Logam Jenis Tertentu dan Batuan;

Luasan wilayah pertambangan DIY sebagai dasar penerbitan perizinan perusahaan pertambangan mengalami perubahan dari sebelumnya 50.027 hektar sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3672 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali hektar menjadi 42.944 hektar sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan wilayah pertambangan telah mempertimbangkan dan mengakomodir perubahan peruntukan dan kepentingan masing-masing Kabupaten di DIY.

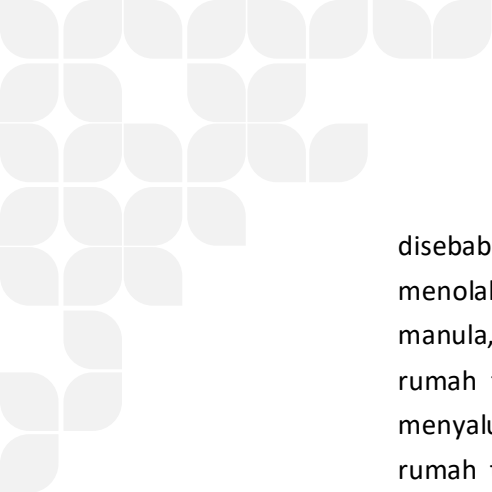
Adapun indikator yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 dan capaian pada tahun 2022, dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran di atas disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.172. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022) (%)	Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Persentase Rumah Tangga berakses listrik	%	99,99	100	99,99	99,99	99,99	99,99
2	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	izin	93	115	115	100	115	100

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023

Capaian indikator Persentase Rumah Tangga berakses listrik sampai dengan tahun 2022 sebesar 99,99% (data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM dan PLN). Sedangkan target sesuai RPJMD pada akhir tahun 2022 sebesar 100% atau masih terdapat selisih 0,01% antara realisasi dan target. Apabila melihat kondisi di lapangan, rumah tangga yang belum memiliki akses listrik cenderung lebih sedikit. Jika pun ada, hal tersebut



disebabkan masih adanya sebagian kecil rumah tangga yang menolak akses listrik karena kondisi tertentu, seperti ODGJ, manula, penganut kepercayaan tertentu, selain itu masih banyak rumah tangga miskin yang telah berakses listrik namun masih menyalur atau belum ber-KWH meter sendiri sebanyak 7.151 rumah tangga (data yang dari seluruh kapanewon se-DIY yang masuk sampai dengan bulan Desember 2022).

Upaya yang dilakukan Pemda DIY dalam rangka pencapaian indikator tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan kepada rumah tangga miskin berupa pemasangan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga. Selain itu, upaya percepatan pemenuhan akses listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan di DIY yang didukung oleh PT PLN (Persero) melalui program CSR, Kementerian ESDM (APBN) melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), dan swadaya masyarakat.

Capaian indikator Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang pada tahun 2022 sebesar 115 izin atau sudah sesuai target tahun 2022 maupun target akhir RPJMD. Upaya yang dilakukan terhadap ketercapaian indikator tersebut dicapai melalui pembinaan, pemberian rekomendasi teknis, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin perusahaan air tanah dan pertambangan. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan izin air tanah dan pertambangan dikelola secara baik dan benar dengan tetap menjaga konservasi sumber daya mineral dan lingkungan. Selanjutnya, pemberian rekomendasi teknis izin air tanah, dilakukan sesuai dengan arahan zona konservasi air tanah. Sedangkan pemberian rekomendasi teknis izin pertambangan dilakukan sesuai dengan kawasan peruntukkan pertambangan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan pertambangan.


Sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh izin yang terdiri

dari 125 izin usaha pertambangan (74 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan 51 Izin Usaha Pertambangan (IUP)) dan 315 izin air tanah. Berdasarkan upaya tersebut telah terverifikasi sejumlah 40 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dan 75 izin air tanah yang memiliki kinerja baik dan benar. Sehingga capaian kesesuaian izin air tanah dan pertambangan sebesar 115 izin atau 100% dari target tahun 2022.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

- (1) Porsi penggunaan air tanah cenderung lebih besar daripada air permukaan, belum sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- (2) Masa transisi pendelegasian kewenangan pemberian perizinan berusaha di Bidang Pertambangan berdampak pada penyimpangan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan maraknya kegiatan penambangan tanpa izin.
- (3) Terdapat SK Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat oleh BKPM RI yang memerlukan klarifikasi dengan Satgas BKPM untuk dapat memulihkan perizinan.
- (4) Pasca terbitnya Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara masih terdapat SOP yang melibatkan Pemerintah Pusat sehingga proses perizinan belum sederhana dan akses Pemda terhadap sistem OSS belum optimal.
- (5) Masih banyaknya rumah tangga di DIY yang menyalur listrik dan belum sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

- 
- (6) Masih terdapat rumah yang berkelompok (gerumbul) dalam suatu dusun yang jaraknya > 60 meter dari tiang listrik terdekat.
 - (7) Masih terdapat perbedaan data kondisi di lapangan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terkait penerima subsidi listrik.
 - (8) Masih adanya kelompok masyarakat yang tidak memerlukan adanya listrik.

b) *Solusi*

- (1) Melaksanakan sosialisasi kepada semua pelaku usaha pengguna air tanah untuk mengutamakan penggunaan air permukaan serta fasilitasi review Kajian Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dan penyusunan *Road Map* tahapan pengusulan HAB untuk mendukung HAB yang berkeadilan dan konservatif.
- (2) Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian kegiatan pertambangan yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yaitu aparat penegak hukum, pemberi rekomendasi, penerbit izin, unsur pengawas, penegak Perda untuk melaksanakan pengawasan terintegrasi multi sektor dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik.
- (3) Menginformasikan kepada Pemegang IUP dan IPR yang dicabut serta membantu proses klarifikasi ke Satgas BKPM dalam rangka pemulihan IUP dan IPR.
- (4) Menyusun SOP dan standar pelayanan yang sederhana dan tidak terbentur sektoral dan mendorong pemerintah pusat untuk memberikan akses terhadap perizinan.
- (5) Pembangunan instalasi listrik dan sambungan rumah yang sesuai ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (6) Koordinasi dan penyampaian usulan perluasan jaringan listrik perdesaan kepada Kementerian ESDM dan PT PLN.
- (7) Melakukan *updating* data, sosialisasi dan optimalisasi aplikasi pelaporan data subsidi listrik dimulai dari tingkat kecamatan.
- (8) Perlu adanya pendekatan pada kelompok masyarakat akan manfaat listrik akan membawa dampak kehidupan yang lebih baik.



3) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Pada tahun 2022 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan melalui 4 program, 6 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan alokasi Rp5.279.126.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.744.949.727,00 atau 70,94% dan pencapaian fisik sebesar 97,78%.

Tabel 3.173. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ENERGI DAN SUMBER MINERAL	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1. Peningkatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya di perdesaan dan daerah terpencil/terisolir dengan didukung pemanfaatan energi baru terbarukan serta konservasi energi 2. Melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap izin perusahaan air tanah dan pertimbangan terhadap rencana tata ruang	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangaa Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitasnya dalam Daerah Provinsi Rekomendasi teknis Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kab dan 1 Kota Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Dukungan pengelolaan perizinan ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan melalui Penatausahaan Izin Operasi untuk mendukung Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan Pengelolaan Aplikasi E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan BP3ESDM DIY Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul Pengawasan dan pengendalian Energi Baru Terbarukan Wilayah Bantul dan Kulon Progo Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan Wilayah Bantul dan Kulon Progo	RT Izin SR Laporan Laporan % aplikasi laporan laporan laporan laporan laporan	13848 75 1569 1 1 100 1 1 1 1 1 1	13907 75 882 1 1 100 1 1 1 1 1 1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN			
				Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	Unit	92	62
				Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi			
				Penyusunan Evaluasi Pemanfaatan EBT di DIY	dokumen	1	1
				Pembinaan, Evaluasi dan Rekomendasi Pelaksanaan Konservasi Energi dan Energi Baru Terbarukan	paket	1	1
				PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN			
				Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	dusun	79	112
				Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	%	20	20
				Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	Izin	75	75
				Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			
				Dukungan data fluktuasi air tanah melalui penetapan zona konservasi air tanah pada CAT untuk mendukung pengendalian Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer <20%	%	100	100
				Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah	Laporan	1	1
				Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Air Tanah di 4 Kabupaten dan 1 Kota	Laporan	1	1
				Pembinaan Pelaksanaan Penggunaan Air Tanah	Laporan	1	1
				Perbaikan/ Pemeliharaan AWLR dan sumur pantau air tanah dalam	Paket	1	1
				Review Kajian Nilai Perolehan Air Tanah	Dokumen	1	1
				Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalan, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah			
				Dukungan pengelolaan perizinan air tanah melalui Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah untuk	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				mendukung Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan			
				Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA Wilayah Bantul dan Kulon Progo	Laporan	1	1
				Pendataan dan Pencatatan volume air tanah untuk Penghitungan NPA Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul	Laporan	1	1
				Pemantauan, Pengendalian dan evaluasi Pengelolaan Air Tanah Wilayah Bantul dan Kulon Progo	Laporan	1	1
				Pemantauan, Pengendalian dan evaluasi Pengelolaan Air Tanah Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul	Laporan	1	1
				PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
				Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	%	7,8	7,84
				Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	Izin	40	40
				Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			
				Dukungan sebesar 100 % terhadap Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral pada 7,8 % perusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	%	100	100
				Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan	Laporan	1	1
				Penyusunan Revisi Peraturan Gubernur terkait Pengelolaan Pertambangan	Draft	3	3
				Penyusunan Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di DIY	Dokumen	1	1
				Rekomendasi Teknis/Persetujuan Izin Usaha Pertambangan	Laporan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pembinaan Pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	Laporan	1	1
				Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			
				Dukungan pengelolaan perizinan pertambangan melalui Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat untuk mendukung Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	%	100	100
				Identifikasi Penambangan Tanpa Izin Wilayah Sleman	Dokumen	1	1
				Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo	Laporan	1	1
				Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman dan Gunungkidul	Laporan	1	1
				Pemantauan, Pengendalian dan evaluasi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul dan Kulon Progo	Laporan	1	1
				Pemantauan, Pengendalian dan evaluasi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman dan Gunungkidul	Laporan	1	1
				Laporan Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan	laporan	1	1

f. Urusan Perdagangan

1) Kondisi Umum

Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan sebesar 4,82% di tahun 2022 karena didukung pertumbuhan ekspor DIY. Nilai ekspor DIY di tahun 2022 sebesar US\$ 566,42 Juta atau meningkat sebesar 4,90% dibanding tahun 2021. Komoditas utama ekspor DIY adalah pakaian jadi tekstil, furnitur dan perabotan, sarung tangan kulit, produk tekstil lainnya, dan benang. Adapun negara-negara tujuan ekspor utama DIY adalah Amerika Serikat, Korea Selatan, Australia, Jepang, dan Jerman. Tabel berikut adalah perkembangan ekspor DIY dalam lima tahun terakhir.

Tabel 3.174. Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Volume (Juta kg)	53,57	64,17	103,51	132,51	185,24
Nilai (Juta US \$)	338,02	370,22	417,12	539,96	566,42
Komoditas	88	94	104	75	48
Negara	114	113	111	110	108
Eksportir	360	400	373	330	329

Sumber: Disperindag DIY, 2023

Terkait dengan kinerja Urusan Perdagangan pada tahun 2022, berikut target dan realisasi kinerja Urusan Perdagangan:

Tabel 3.175. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY tahun n (atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	8.379 .070	9.873 .321	8.783 .026	88,96	9.873 .321	88,96

Sumber: Disperindag DIY, 2023

Jika dilihat dari pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, kinerja sektor ini di tahun 2022 mengalami peningkatan. Namun, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, kinerja sektor ini hanya tercapai sebesar 88,96%. Dampak pandemi yang belum sepenuhnya pulih, kelangkaan dan mahalanya logistik, serta

terjadinya resesi di negara-negara tujuan ekspor DIY seperti Amerika dan Eropa berdampak pada terkendalanya ekspor DIY ke negara-negara tersebut.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

- (1) Peningkatan barang beredar yang merupakan dampak perdagangan bebas dan berkembangnya perdagangan online belum dimbangi dengan pemenuhan standarisasi produk secara optimal. Selain itu, kesadaran pelaku perdagangan tentang tertib niaga dan kesadaran konsumen mengenai hak-haknya masih kurang.
- (2) Tingkat inflasi barang pokok penting yang cukup tinggi di akhir tahun 2022.
- (3) Masih sedikitnya pelaku usaha DIY yang memasarkan produknya melalui *e-purchasing*.

b) *Solusi*

- (1) Peningkatan pemantauan dan pengawasan barang beredar melalui sinergitas lintas sektor, serta peningkatan kesadaran produsen, konsumen dan masyarakat umum tentang pentingnya tertib niaga dan perlindungan konsumen serta optimalisasi peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- (2) Menjamin ketersediaan stok komoditas pokok penting serta kepastian harga yang tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi yang di tetapkan. Penyediaan data harga terkini dan informasi stok barang pokok penting sebagai pendukung *early warning system* Serta penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Murah.
- (3) Mendorong pelaku usaha DIY untuk dapat memasarkan produknya melalui *e-purchasing*.

3) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Urusan Perdagangan dilaksanakan melalui 5 program dan 8 sub kegiatan pada tahun 2022 dengan pencapaian realisasi fisik sebesar 100%. Pagu anggaran yang digunakan sebesar Rp9.689.274.800,00 dengan realisasi sebesar Rp6.328.466.589,00 atau 65,31%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.176. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penggunaan produk lokal, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran 2. Peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga 3. Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor 4. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif 	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
				Nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun n	Juta US\$	327.48	529.94
				Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA			
				Jumlah SKA yang diterbitkan	SKA	17000	16087
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
				jumlah barang jasa yang tidak sesuai standar dibagi jumlah barang dan jasa yang diawasi (x 100%)	%	5.46	1.94
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			
				Rekomendasi ketersediaan harga dan stock barang di pasar (Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Tepung Terigu, Daging, Telur Ayam, Cabai Merah, Cabai Rawit, Bawang Merah, Bawang Putih, Susu, Garam, Kacang, Indo Mie, Ikan, Ketela Pohon, Jagung, Tomat, Kol)	Rekomendasi	5	6

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
				Bantuan Distribusi Komoditas Lainnya	Ton	126	126
				Operasi Pasar Komoditi Lainnya	Ton	250	250
				Komunikasi Efektif Pengendalian Inflasi Daerah - DID	Kali	1	1
				Operasi Pasar Beras	Ton	125	125
				Pasar Murah	Ton	400	400
				Operasi Pasar Komoditas Lainnya (Gula, minyak, telur, daging, bawang)	Ton	8	8
				Operasi Pasar - DID	Kali	12	12
				Operasi Pasar Beras	Ton	20	20
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
				Nilai ekspor perdagangan luar negeri tahun n	Juta US\$	327.48	529.94
				Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan			
				Jumlah kontrak kerja sama dengan buyers yang dihasilkan melalui Temu Bisnis (3 angkatan x 25 peserta)	Kontrak kerja sama	6	0
				Pameran Kriya Indonesia - DID	IKM	16	16
				Festival Produk Industri Kreatif DIY - DID	IKM	75	75
				Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor			
				Talkshow TV	Paket	8	8
				Jumlah peserta Pelatihan dan Pendampingan Tatacara Pembuatan Dokumen Ekspor yang meningkat kapasitasnya	orang	30	30
				Operasional Pokja KADIN	Tahun	1	1
				Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Bisnis Ekspor yang meningkat kemampuannya	orang	60	60
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
				jumlah barang jasa yang tidak sesuai standar dibagi jumlah barang dan jasa yang diawasi (x 100%)	%	5.46	1.94

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen			
				Jumlah pelapor sengketa konsumen yang dilakayani	Pelapor	45	49
				Talkshow TV	Paket	4	4
				Sosialisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (16 Akt @ 50 Orang)	Orang	800	800
				Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen			
				Sosialisasi Standarisasi Produk (16 Akt @ 50 Orang)	Orang	800	800
				Sosialisasi Pemberdayaan Konsumen (16 Akt @ 50 Orang)	Orang	800	800
				Jumlah barang beredar, barang berbahaya dan jasa serta tertib niaga yang diawasi	Barang	400	458
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
				Jumlah omzet usaha pelaku perdagangan yang dibina	Milyar Rupiah	2.5	2.352
				Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi			
				1. Jumlah peserta bimtek pelaku usaha sektor perdagangan bagi kelompok/sentra IKM yang meningkat kemampuannya	Orang	200	200
				2. Jumlah peserta bimtek pemasaran online yang meningkat kemampuannya	Orang	120	120
				3. Jumlah peserta Pelatihan Manajemen Toko Kelontong yang meningkat pengetahuannya	Kelompok	11	11
				5. Pameran Invesda Expo - DID	IKM	20	20
				4. Jumlah peserta Pelatihan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Sektor Industri dan Perdagangan yang meningkat pengetahuannya	Kelompok	11	11

g. Urusan Perindustrian

1) Kondisi Umum

Pada tahun 2022 industri pengolahan merupakan kontributor terbesar pada PDRB DIY, yang kontribusinya mencapai 11,93%. PDRB Industri Pengolahan di tahun ini sebesar 12,89 Triliyun Rupiah dan laju pertumbuhannya sebesar 1,76% dibandingkan dengan PRB sektor yang sama di tahun 2021 yang sebesar 12,67 Triliyun Rupiah. Industri Makanan dan Minuman, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, serta Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik merupakan tiga kontributor terbesar pada PDRB sektor Industri Pengolahan.

Tabel 3.177. Perkembangan PDRB Industri Pengolahan 2018 – 2022

Sub Sektor	2018 (Rp Juta)	2019 (Rp Juta)	2020 (Rp Juta)	2021 (Rp Juta)	2022 *) (Rp Juta)
Industri Makanan dan Minuman	6.954.983	7.508.502	7.163.559	6.966.042	7.088.645
Industri Pengolahan Tembaka u	514.937	523.805	567.979	631.429	642.542
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.348.911	1.439.853	1.372.243	1.494.396	1.520.698
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	307.907	305.131	251.674	256.988	261.511
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	209.432	209.621	198.958	187.174	190.468
Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	287.372	307.556	296.475	283.779	288.773
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	154.826	157.738	174.644	175.133	178.216
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	253.462	256.768	249.831	268.043	272.761
Industri Barang Galian bukan Logam	373.124	369.065	318.837	332.928	338.788
Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik	770.481	785.492	792.350	806.191	820.379
Industri Mesin dan Perlengkapan	476.243	471.570	417.446	411.897	419.147
Industri Alat Angkutan	2.703	2.771	2.787	2.428	2.471
Industri Furnitur	545.915	566.496	542.972	584.491	594.778
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	286.561	296.360	274.361	269.437	274.179
Jumlah	12.486.855	13.200.727	12.624.114	12.670.357	12.893.355

Ket.: *) Angka Proyeksi

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Kinerja sektor ini mencapai 90,70%, jika dibandingkan dengan target tahun 2022. Kurangnya permintaan produk industri DIY dari pasar domestik maupun global juga berdampak pada produktivitas pelaku usaha sektor ini. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. Selain itu resesi global menyebabkan berkurangnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor utama. Bahan baku industri tertentu masih

tergantung pasokan dari negara lain, sehingga peningkatan harga bahan baku akibat peningkatan biaya logistik mengakibatkan terganggunya produktivitas sektor industri pengolahan.

Tabel 3.178. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2022				Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
		Capai-an 2021	Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY tahun (Atas dasar harga konstan)	Juta Rupiah	12.670 .357	14.215 .611	12.893 .390	90,70	14.215 .611	90,70

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023 (data diolah)

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Bahan baku industri tertentu masih tergantung pasokan dari negara lain sehingga adanya kenaikan harga bahan baku akibat peningkatan biaya logistik, peningkatan harga komoditas dunia, terganggunya pasokan gandum akibat perang Ukraina-Rusia mengakibatkan terganggunya produktivitas sektor industri pengolahan.
- (2) Kurangnya permintaan produk industri DIY dari pasar domestik maupun global juga berdampak pada produktivitas pelaku usaha sektor ini. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca pandemi, selain itu resesi di negara tujuan ekspor utama DIY menyebabkan berkurangnya permintaan dari negara-negara tersebut.
- (3) Sektor industri kecil menengah masih terkendala kapasitas SDM khususnya dalam penggunaan teknologi informasi, standarisasi produk, inovasi produk dan kemampuan akses pasar yang masih harus ditingkatkan.

b) Solusi

- (1) Pemenuhan bahan baku industri dilakukan dengan mendorong penyediaan dan penggunaan bahan baku dalam negeri serta peningkatan kemitraan dengan penyedia bahan di luar DIY, seperti Jawa Timur, Kalimantan, dan daerah lainnya.
- (2) Mendorong ekspor ke negara tujuan baru dan peningkatan pemasaran domestik melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- (3) Peningkatan pembinaan IKM baik terkait dengan peningkatan kapasitas, pemanfaatan teknologi, inovasi produk, strategi pemasaran, serta standarisasi dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing.

3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Urusan Perindustrian dilaksanakan melalui empat Program utama yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan realisasi fisik sebesar 99,78%. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp39.817.283.116,00 dan terealisasi sebesar Rp37.460.405.147,00 atau 94,08%.

Tabel 3.179. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha 2. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kuantitas maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (Green Sektor) 3. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif 4. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk industri 5. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA KEBUDAYAAN			
				Dukungan terhadap tercapainya kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	%	100	99.8
				Pengembangan Industri Kreatif			
				9. Festival makanan warisan budaya tak benda (WBTB)	IKM	200	200
				1. Fasilitasi produksi (Sertifikasi Halal dan Pelatihan) IKM Biofarmaka (jamu, aromaterapi, spa)	IKM	140	140
				6. Edukasi dan Advokasi HKI (Sosialisasi, Bimtek, Publikasi TV)	Angkatan	69	69
				12. Fasilitasi SNI IKM Garam	Paket	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				8. Pelatihan Produksi Produk Khas Jogja (Pengolahan Pangan, (makanan, Minuman, buah lokal), Kerajinan Alas Kaki, Kerajinan Perak, Kerajinan Tenun, Mebel Kayu, Pande Besi)	Angkatan	21	21
				2. Festival Batik Jogja (Pameran, Seminar Fashion show, Lomba Design Fashion Batik)	IKM	379	379
				14. Fasilitasi Video Profile untuk Kelompok IKM Jamu Tradisional	IKM	7	7
				13. Video Promosi Grafis Produk Inovasi untuk IKM Jogja Istimewa	Video	10	10
				3. Jogja Fashion Week	IKM	100	100
				7. Pameran Dalam Negeri (Pameran Kraton, Pameran Dekranas, Pameran Jakarta Fair, Pameran Tetap dan Pameran Crafina)	Pameran	4	4
				19. Review Design Perencanaan Revitalisasi Gedung Pelayanan Kemasan	Dokumen	1	1
				4. Produksi Gamelan Pelog (Produksi Gamelan dan Pemindahan Molding dan Kelengkapannya dari YPTI ke BPTTG)	Perangkat	2	0.9
				16. Roadmap Industri Pengembangan Ulat Sutra Istimewa (Pemakan Daun Singkong) di Kawasan Gunungkidul, DIY	Dokumen	1	1
				5. Pameran Orientasi Ekspor (Seni Kriya, Pameran JIFFINA, Pameran Inacraft,TEI)	Pameran	4	4
				10. Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	Aktivitas	1	1
				11. Sertifikasi MD IKM Olahan Pangan	IKM	20	20

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				17. Festival Indonesia Frankfurt 2022	Pameran	1	1
				21. Softlaunching Workshop Gamelan	Kegiatan	1	1
				15. Virtual Exhibition Produk Tradisional IKM Siap Ekspor	Kegiatan	1	1
				22. Workshop HKI untuk UKM	Angkatan	3	3
				20. Pekerjaan Pembangunan Kelengkapan Gedung Produksi Workshop Gamelan	Paket	1	1
				18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Work shop gamelan	Jenis	47	47
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TATA RUANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			
				Persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang	Persen	100	100
				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis			
				Prototype Becak Listrik	unit	5	5
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha 2. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kuantitas maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (Green Sektor) 3. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk industri 5. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				2. Renja Disperindag 2023	Dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. Renstra Disperindag	Dokumen	1	1
				4. ROPK	Dokumen	1	1
				3. Renja Perubahan Disperindag	Dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
				2. DPA Tahun 2023	Dokumen	1	1
				4. DPPA Tahun 2022	Dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen penganggaran sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. RKA Tahun 2023	Dokumen	1	1
				3. RKA-Perubahan Tahun 2022	Dokumen	1	1
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Tersusunnya laporan evaluasi kinerja:	Dokumen	1	1
				1. Dokumen LKJip dengan nilai AKIP	Dokumen	1	1
				2. Konsep/Bahan LKPJ	Dokumen	1	1
				3. Konsep/Bahan LPPD	Dokumen	1	1
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				1. Tersedianya gaji ASN	Orang	86	86
				3. Tersedianya Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Tahun	1	1
				2. Tersedianya gaji Tenaga Bantu Daerah	Orang	40	40

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				4. Tersedianya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Tahun	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	orang	17	17
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)	Dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				Tersedianya Laporan Keuangan Triwulanan	Dokumen	4	4
				Tersedianya Laporan Keuangan bulanan	Dokumen	12	12
				Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen	2	2
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				4. Pengurus Barang pembantu (BPPPKI)/aset	Orang	1	1
				1. Pengurus Barang pengguna (Induk)/aset	Orang	2	2
				2. Pengurus Barang pembantu (Induk)/pakai habis	Orang	1	1
				3. Pengurus Barang pengguna (BPPPKI)/aset	Orang	1	1
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	13	13

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	61	61
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis	27	27
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
				Pengisian Tabung APAR	Tabung	12	12
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Tersedianya barang cetakan	Jenis	16	16
				Tersedianya Penggandaan	Lembar	130000	130000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Langganan Surat Kabar	Tahun	1	1
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				1. Tersedianya Makan dan Minuman Rapat	OS	5000	4838
				2. Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Bulan	12	12
				3. Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Bulan	12	12
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD			
				Terkelolanya website OPD	Tahun	1	1
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Konsultasi dan Pendaftaran HKI bagi IKM DIY- DID	Unit	4	4
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Penyediaan Informasi Bagi Pelaku Usaha Sektor Industri dan Perdagangan secara Online - DID	Unit	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya: 1. AC	Unit	7	7
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Pemasaran Online bagi IKM melalui aplikasi Jogjaplaza - DID	Unit	2	2
				2. Filling Kabinet	Unit	2	2
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal bagi IKM Ekspor DIY - DID	Unit	1	1
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan BPSK - DID	Unit	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: 1. Pembayaran langganan virtual meeting	Tahun	1	1
				3. Pembayaran tagihan rekening telepon	Tahun	1	1
				2. Pembayaran tagihan rekening listrik	Tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				2. Pembayaran jasa kebersihan	Tahun	1	1
				3. Pembayaran jasa retribusi sampah	Tahun	1	1
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor: 1. Pembayaran keamanan kantor	Tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				2. Terbayarnya pajak kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				1. Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 4	Unit	8	8
				4. Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 2	Unit	6	6
				2. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 2	Unit	6	6
				3. Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 4	Unit	8	8
				Pemeliharaan Mebel			
				Mebeleur terpelihara	Jenis	3	3
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				3. Pemeliharaan mesin ketik	Unit	18	18
				2. Pemeliharaan Laptop/notebook	Unit	12	12
				7. Pemeliharaan Sound System	Unit	4	4
				8. Pencucian gorden	Unit	134	134
				6. Pemeliharaan CCTV	Unit	10	10
				5. Pemeliharaan LCD proyektor	Unit	6	6
				4. Pemeliharaan Faximile	Unit	2	2
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya: 1. Pemeliharaan komputer PC	Unit	41	41
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				4. Pengecatan Gedung	Unit	1	1
				2. Pemeliharaan atap dan plafon	Unit	1	1
				5. Rehabilitasi Gedung Kantor Layanan Konsultasi dan Pendaftaran HKI bagi IKM DIY - DID	Paket	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. Pemeliharaan Kamar mandi dan WC	Unit	3	3
				6. Pemeliharaan Atap Bengkel dan Penyimpanan Oksigen - DID	Unit	1	1
				3. Pemeliharaan pintu/ jendela	Unit	11	11
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya:	Unit	1	1
				1. Jaringan listrik			
				5. Filling kabinet	Unit	8	8
				4. AC	Unit	40	40
				2. Jaringan internet dan IT	Unit	1	1
				3. Genzet	Unit	1	1
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan	orang/bulan	5	5
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	tahun	1	1
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	3	3
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	37	37

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis	8	8
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
				Pengisian Tabung APAR	tabung	3	3
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Tersedianya Penggandaan	lembar	32.000	31.960
				Tersedianya barang cetakan	Jenis	4	4
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Langganan surat kabar dan majalah	Tahun	1	1
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Perjalanan dinas dalam daerah	tahun	1	1
				Makan dan minum sidang	Orang kali	200	200
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Penyediaan sarana dan prasarana unit perbengkelan	unit	19	19
				Tersedianya mesin gerinda tangan	set	1	1
				Tersedianya tabung las argon	set	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Pembayaran tagihan rekening listrik	tahun	1	1
				Pembayaran tagihan rekening telepon	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Pembayaran jasa retribusi sampah	tahun	1	1
				Pembayaran keamanan kantor	tahun	1	1
				Pembayaran jasa kebersihan	tahun	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Terbayarnya pajak kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	4	4
				Terbayarnya Biaya Perizinan (KIR) kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	2	2
				Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	4	4
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Terpeliharanya Laptop	unit	5	5
				Terpeliharanya Komputer	unit	4	4
				Terpeliharanya Mesin Ketik Manual	unit	2	2
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Terpeliharanya AC	unit	12	11
				Terlaksananya Belanja Modal Pintu Bengkel	unit	1	1
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			1. Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha	Jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan	ATG	30	137
			2. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kuantitas maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (Green Sektor)	Jumlah HAKI yang terdaftar	unit	180	451
				Nilai Produksi IKM	Juta Rupiah	13.097.145	12.575.194

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif 4. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk industri 5. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM				
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			
				Fasilitasi Merek Individu - DID	IKM	20	20
				Jumlah pelaku usaha sektor industri dan perdaganganyang mendapat sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (450 Merk, 1 Merk Internasional)	HKI	451	451
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
				7. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Kulit yang meningkat keterampilannya	Kelompok	2	2
				5. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Kayu yang meningkat keterampilannya	Kelompok	2	2
				8. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Logam yang meningkat keterampilannya	Kelompok	2	2
				11. Sosialisasi RPI (16 Akt @ 25 Orang)	Orang	400	400
				4. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM IT yang meningkat keterampilannya	Kelompok	1	1
				6. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Kerajinan yang meningkat keterampilannya	Kelompok	4	4

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				12. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1
				2. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Bambu yang meningkatkan keterampilannya	Kelompok	2	2
				9. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Pangan yang meningkatkan keterampilannya	Kelompok	19	19
				3. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Biofarmaka yang meningkatkan keterampilannya	Kelompok	2	2
				13. Talkshow TV	Paket	4	4
				14. Pameran Jogja Invite - DID	IKM	20	20
				1. Operasional Dekranas	Tahun	1	1
				10. Jumlah IKM peserta Pelatihan IKM Sandang yang meningkatkan keterampilannya	Kelompok	9	9
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
				Jumlah Pelayanan jasa bengkel alat produksi	layanan	11000	16092
				Jumlah Pelayanan Teknologi Produk Kulit	layanan	60	60
				Pemindahan Mesin Kemasan	kegiatan	1	1
				Jumlah pelayanan Teknologi Kemasan	layanan	1308000	1432000
				Jumlah peserta Sosialisasi TTG pada IKM yang meningkat pengetahuannya (26 akt x 25 orang)	orang	650	650
				Pendampingan Kemasan di Sentra IKM	kali	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jenis Pelayanan Teknologi Perak dan Logam	layanan	80	2399
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan BPTTG	unit	6	6
				Jumlah ATG yang diterapkan di sentra	ATG	6	6
				Jumlah Prototype Alat Tepat Guna yang dihasilkan	ATG	4	4
			1. Penciptaan wira usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitasi usaha 2. Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kuantitas maupun kualitas serta pengembangan industri yang berwawasan lingkungan (Green Sektor) 3. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk kreatif 4. Pengembangan aspek SDM, produksi, desain, dan pemasaran produk industri 5. Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Nilai Produksi IKM	Juta Rupiah	676440	649482
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi			
				Sosialisasi SIINAS	Orang	300	400
				Publikasi Media Cetak	Kali	20	20

h. Urusan Ketrasmigrasian

1) Kondisi Umum

DIY merupakan daerah pengirim transmigran. Tabel berikut menggambarkan jumlah pemberangkatan transmigran ke luar Pulau Jawa selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.180. Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah (KK)
1	2018	36
2	2019	50
3	2020	0
4	2021	10
5	2022	30

Sumber: *Disnakertrans DIY, 2023*

Alokasi penempatan transmigrasi menjadi kewenangan pemerintah pusat dan hal ini dapat dilihat dari pengiriman transmigrasi selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Tahun 2020 tidak ada pengiriman transmigrasi yang dikarenakan pemerintah pusat menghentikan sementara penempatan transmigrasi dampak dari pandemi *COVID-19*. Dibuka kembali pada tahun 2021 dengan memberangkatkan 10 KK, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi 30 KK. Dengan demikian selama tahun 2018 – 2022 sebanyak 126 KK transmigran telah diberangkatkan ke luar pulau jawa.

Sesuai amanat RPJMD Tahun 2017-2022, Urusan Ketrasmigrasian mendukung sasaran Terwujudnya kesempatan kerja dengan Strategi perluasan kesempatan kerja yang dilakukan melalui peningkatan kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi. Dengan mendorong terlaksananya 2 strategi tersebut, mampu mewujudkan indikator Jumlah kesempatan kerja pada tahun 2022 sebesar

2.241.131 orang dari target 2.149.001 atau dengan persentase capaian 104,29%. Jumlah kesempatan kerja menggambarkan jumlah penduduk yang bekerja, sehingga pada tahun 2022 sebanyak 2.241.131 orang penduduk DIY masuk dalam katagori bekerja. Semakin banyak penduduk yang bekerja berkorelasi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu peningkatan kesejahteraan juga dapat dilihat dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja dari 48,15 juta rupiah/tenaga kerja tahun 2021 meningkat menjadi 50,38 Juta Rupiah / Tenaga kerja

Tabel 3.181. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Jumlah kesempatan kerja	orang	2.228 .523	2.149 .001	2.241 .131	104,29	2.149 .001	104,29

Sumber: *Disnakertrans DIY, 2023*

Jumlah pencari kerja yang dapat mengisi lowongan pekerjaan dan pekerja yang sudah ada (eksisting) mencerminkan jumlah kesempatan kerja. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS pada Agustus 2022, jumlah kesempatan kerja sebanyak 2.241.131 orang. Apabila dibandingkan dengan target 2.149.001 orang maka capaian realisasi sebesar 104,29%. Capaian ini didorong dengan mulai pulihnya pariwisata di DIY, berdampak pada pertumbuhan kesempatan kerja sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja. Namun demikian kondisi ini belum mampu menurunkan TPT seperti kondisi sebelum pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan pertumbuhan kesempatan kerja belum bisa mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja, sehingga terdapat angkatan kerja yang tidak bisa diberdayakan atau menjadi pengangguran. di sisi lain jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja adalah komponen untuk

menentukan TPT. Pada tahun 2022, jumlah pengangguran sebanyak 94.945 orang dan Angkatan Kerja sebanyak 2.336.076. Kondisi ini hanya mampu menurunkan TPT sebesar 0,5% dari tahun 2021 menjadi 4,06% di tahun 2022.

Strategi peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dilakukan dengan penyiapan calon transmigran melalui pelatihan yang disesuaikan dengan potensi kawasan transmigrasi. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tujuan menjadi penting dilakukan agar kesejahteraan transmigran dapat diwujudkan.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

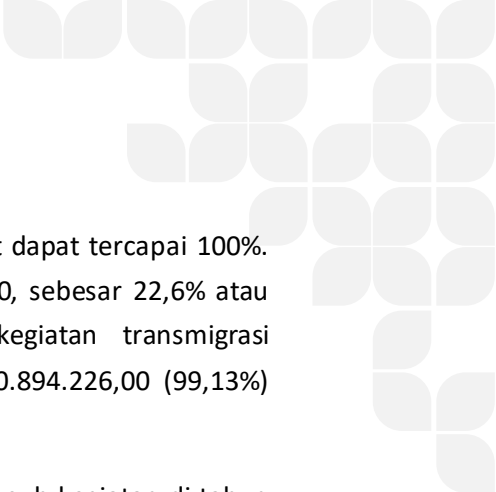
Alokasi penempatan transmigran yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat terbatas walaupun sebenarnya animo masyarakat untuk melakukan transmigrasi cukup tinggi.

b) *Solusi*

Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tujuan terkait dengan penyiapan pengiriman transmigran.

3) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Sesuai RPJMD 2017–2022 urusan ketransmigrasian masuk dalam Program Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi. Mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 maka urusan ketransmigrasian dilaksanakan melalui Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Bersama dengan Program Penempatan Tenaga Kerja mendukung indikator sasaran Jumlah Kesempatan Kerja. Alokasi anggaran 2 program dan 8 sub kegiatan sebesar Rp1.833.810.400,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.791.336.557,00 (97,68%). Deviasi keuangan disebabkan adanya efisiensi anggaran dan sisa pengadaan barang/jasa.



Sedangkan realisasi fisik program tersebut dapat tercapai 100%. Dari anggaran sebesar Rp1.833.810.400,00, sebesar 22,6% atau Rp414.498.000,00 dialokasikan untuk kegiatan transmigrasi dengan realisasi keuangan sebesar Rp410.894.226,00 (99,13%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Berikut tabel rincian capaian program dan sub kegiatan di tahun 2022.

Tabel 3.182. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. Terwujudnya Kesempatan Kerja	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			2. Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigrasi	orang	11040	11718
			3. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigrasi	orang	11040	11718
				Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			
				Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, dan penempatan transmigran	persen	100	100
				Penyelenggaraan Transmigrasi	KK	30	30

3. Penunjang Urusan

a. Perencanaan Pembangunan

1) Kondisi Umum

Sasaran Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY 2017-2022 adalah “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas”, yang diukur dengan indikator kinerja sasaran “Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah”. Target dan realisasi kinerja sasaran disajikan pada table berikut:

Tabel 3.183. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	%	80	85,5	86,42	101,08	85,50	101,08

Sumber: Bappeda DIY, 2023

Pada tahun 2022, capaian kinerja sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas sebesar 101,08%. Capaian kinerja sasaran tersebut dihitung dari jumlah indikator sasaran perangkat daerah yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran RPJMD kali 100%. Indikator sasaran Perangkat Daerah dalam RPJMD sebanyak 81 indikator, indikator sasaran yang tercapai targetnya sebanyak 70 indikator sasaran, sedangkan yang tidak tercapai 11 indikator sasaran atau terealisasi sebesar 86,42%, dari target yang ditetapkan 85,5%.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Pandemi Covid-19 pada tahun 2022 masih berdampak terhadap pembangunan di DIY, sehingga terdapat beberapa indikator di OPD yang tidak tercapai kinerjanya.
- (2) Ketercapaian kinerja Bappeda dipengaruhi oleh capaian kinerja Perangkat Daerah.

b) Solusi

- (1) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi perencanaan pembangunan, serta pendampingan perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota secara berkelanjutan.
- (2) Untuk periode selanjutnya merubah cara perhitungan indikator/meta indikator kinerja Bappeda DIY.

3) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Pada tahun 2022, Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan dengan sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, dilaksanakan melalui 4 Program (termasuk Program Dana Keistimewaan), 14 kegiatan dan 47 sub kegiatan. Alokasi anggaran yang untuk melaksanakan 4 Program tersebut sebesar Rp27.627.483.882,00 dengan realisasi sebesar Rp26.151.325.252,00 atau 94,65%, dengan kinerja fisik tercapai 100%.

Rincian capaian kinerja program dan sub kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.184. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKRETARIAT DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik Ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (jogjaplan) dan Monev (Sungguh) serta office management, maupun ketersediaan informasi untuk publik melalui media web Bappeda.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY			
			Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas perencana dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan.				
			Meningkatkan kerja sama dengan akademisi sebagai tenaga ahli/konsultan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan monev pembangunan.				
			Meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.				
			Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan serta mempertajam perumusan indikator pembangunan				
			Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis monev serta kontrol terhadap capaian indikator.				
			Meningkatkan intensitas koordinasi dengan forum CSR dalam mendukung pembiayaan pembangunan.				
			Membangun link antar sistem informasi yang ada di internal BAPPEDA DIY dan dengan sistem informasi di luar BAPPEDA DIY yang terkait.				
			Menjamin infrastruktur jaringan dan komputer berjalan optimal dan termaintain secara berkelanjutan				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatkan sistem aplikasi yang dimiliki mampu menampilkan informasi secara akurat guna memperkuat proses perencanaan berbasis bukti dan data	Terselesainya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tepat pada waktunya	persen	100	100
			Pengembangan sistem aplikasi yang dimiliki (Jogjaplan, Monev Sengguh, SINTAL, JOGJA DATAKU, dll) sesuai dengan kebutuhan.	Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY			
			Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik / program strategis bersama yang konsisten dan terukur.	Fasilitasi Penyiapan Visi dan Misi Gubernur DIY Tahun 2022-2027	dokumen	1	1
				Dukungan 8% terhadap persentase terselesainya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tepat waktu	%	100	100
2	PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik Ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (jogjaplan) dan Monev (Sengguh) serta office management, maupun ketersediaan informasi untuk publik melalui media web Bappeda.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas perencana dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan.	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	persen	100	100
			Meningkatkan kerja sama dengan akademisi sebagai tenaga ahli/konsultan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan monev pembangunan.	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100
			Meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persen	100	100
			Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan serta mempertajam perumusan indikator pembangunan,				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis monev serta kontrol terhadap capaian indikator.				
			Meningkatkan intensitas koordinasi dengan forum CSR dalam mendukung pembiayaan pembangunan.				
			Membangun link antar sistem informasi yang ada di internal BAPPEDA DIY dan dengan sistem informasi di luar BAPPEDA DIY yang terkait.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			Menjamin infrastruktur jaringan dan komputer berjalan optimal dan termaintain secara berkelanjutan	3. Renja Perangkat Daerah Perubahan 2022	dokumen	1	1
			Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik / program strategis bersama yang konsisten dan terukur	4. Renstra Perangkat Daerah 2023-2026	dokumen	1	1
			Meningkatkan sistem aplikasi yang dimiliki mampu menampilkan informasi secara akurat guna memperkuat proses perencanaan berbasis bukti dan data	2. Renja Perangkat Daerah 2023	dokumen	1	1
			Pengembangan sistem aplikasi yang dimiliki (Jogjaplan, Monev Sengguh, SINTAL, JOGJA DATAKU, dll) sesuai dengan kebutuhan.	Dukungan Terhadap Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
			Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik / program strategis bersama yang konsisten dan terukur.	1. Forum Perangkat Daerah	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
				4. RKA-P 2022	dokumen	1	1
				Dukungan Terhadap Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				2. DPA-P 2022	dokumen	1	1
				3. RKA 2023	dokumen	1	1
				1. DPA 2023	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BAPPEDA bulanan	dokumen	12	12
				Bahan LKJ dan LKPJ Perangkat Daerah Tahun 2021	dokumen	2	2
				ROPK Perangkat Daerah 2022	dokumen	1	1
				Dokumen Laporan Monev Bappeda Tahunan	dokumen	1	1
				Dukungan Terhadap Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Dokumen Laporan Timbal Balik Triwulan I-IV	dokumen	4	4
				ROPK Perangkat Daerah Perubahan 2022	dokumen	1	1
				LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2021	dokumen	1	1
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				Dukungan Terhadap Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda DIY	bulan	12	12
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
				Terlaksananya pengelolaan keuangan Bappeda DIY	bulan	12	12
				Dukungan Terhadap Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Dukungan Terhadap Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Terlaksananya pengelolaan gaji Bappeda DIY	bulan	12	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Dukungan Terhadap Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Laporan Keuangan Tahunan Gabungan Audited	dokumen	1	1
				Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				2. Laporan Keuangan Semester	dokumen	2	2
				1. Laporan Keuangan bulanan	dokumen	12	12
				Dukungan Terhadap Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Dukungan terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perkantoran			
				Terlaksananya Penata Usahaan Barang Milik Daerah dengan baik	bulan	12	12
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
				Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : 2. Penilaian Angka Kredit JFP	kali	2	2
				Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : 1. Workshop/Rapat Kerja	kali	1	1
				Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : 3. Penerbitan Jurnal	kali	1	1
				Dukungan terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	7	7
				Dukungan terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Dukungan terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100
				1. Kertas dan Cover	jenis	4	4
				2. Alat Tulis Kantor	jenis	45	45
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Dukungan terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100
				Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	jenis	18	18
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				1. Barang Cetak	jenis	11	11
				2. Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya	lembar	87101	47692
				Dukungan terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Surat Kabar	jenis	4	4
				Dukungan terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas OPD: - Penataan Arsip	bulan	12	12
				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	bulan	12	12
				Tersedianya makan dan minuman rapat	bulan	12	12
				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah	bulan	12	12
				Dukungan terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD			
				Pengembangan sistem informasi internal	aplikasi	1	1
				Dukungan terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100
				Pengadaan Mebel			
				Rak Arsip	unit	5	5

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Dukungan terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100
				Printer	buah	1	1
				Mic Wireless	buah	2	2
				Televisi	buah	1	1
				Speaker Aktif	buah	4	4
				Webcam	buah	2	2
				Scanner	buah	1	1
				Camera Video Conference	unit	2	2
				Screen Projector	buah	2	2
				Switch	buah	9	9
				LCD Projector	buah	2	2
				Access Point	buah	3	3
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Penata Usahaan Surat Masuk	bulan	12	12
				Pengiriman surat/dokumen lainnya	kali	52	30
				Benda Pos/Materai	buah	470	470
				Penatausahaan Surat Keluar	bulan	12	12
				Dukungan terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Dukungan terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100
				Langganan akun teleconference	bulan	12	12
				Langganan Telepon	bulan	12	12

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Sewa tanaman hias	bulan	12	12
				Dukungan terhadap Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi	100	100
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Dukungan terhadap Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi	100	100
				1. Jasa Tenaga Kebersihan	bulan	12	12
				2. Jasa Tenaga Keamanan	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan	unit	1	1
				Dukungan terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana	100	100
				Bukti Pembayaran Pajak/ Kendaraan Dinas Jabatan	unit	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Dukungan terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana	100	100
				Terpeliharanya Kendaraan Dinas operasional/lapangan roda 4 (empat)	unit	10	10
				Bukti Pembayaran Pajak/ Kendaraan Dinas Operasional/lapangan roda 4 (empat)	unit	10	10
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100
				Pemeliharaan Generator Set	unit	1	1
				Pemeliharaan Mebel			
				Pemeliharaan Filling cabinet	buah	10	10
				Dukungan terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100
				Pemeliharaan Almari	buah	10	10
				Pemeliharaan Meja kursi tamu	set	1	1
				Pemeliharaan kursi	unit	27	27
				Pemeliharaan meja	unit	25	25
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Dukungan terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100
				Pemeliharaan LCD proyektor	unit	3	3
				Pemeliharaan Printer	unit	10	10
				Pemeliharaan Komputer PC	unit	30	30
				Pemeliharaan Jaringan komputer/internet	paket	1	1
				Pemeliharaan Faksimile	unit	2	2
				Pemeliharaan Komputer note book	unit	10	10
				Pemeliharaan Sound system	unit	4	4
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Dukungan terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100
				Gedung Kantor Terpelihara	unit	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100
				Pemeliharaan CCTV	unit/tahun	1	1
				Pemeliharaan AC split	unit	39	39
				Pemeliharaan AC floor standing	unit	4	4
				Pemeliharaan Tabung pemadam kebakaran	unit	6	6
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Dukungan thd Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	unit	1	1
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
				Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku	persen	100	99.43
				Persentase perencanaan yang berkualitas	persen	100	100
				Persentase evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku	persen	100	100
				Persentase capaian kegiatan OPD	persen	92	98.67
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			
				Dukungan 100% terhadap persentase perencanaan yang tepat waktu	%	100	100
				Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2023 yang berisi mengenai	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah			
				Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2024 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah	dokumen	1	1
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi			
				Dukungan 100% terhadap persentase perencanaan yang tepat waktu	%	100	100
				Dokumen RKPD 2023 sbg dasar penyusunan KUA PPAS	Dokumen	1	1
				Dokumen RKPDP 2022 sebagai dasar penyusunan KUPA PPASP	Dokumen	1	1
				Dokumen naskah akademik RPJMD	Dokumen	1	1
				Fasilitasi penyusunan Renja	Dokumen	1	1
				Dokumen Naskah Akademik Perubahan Perda No 5 Tahun 2005	dokumen	1	1
				Pengembangan Jogjaplan	Aplikasi	1	1
				Dokumen Rancangan Awal RPJMD DIY tahun 2022-2027	Dokumen	1	1
				Fasilitasi penyusunan Renstra	Dokumen	1	1
				Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah	Dokumen	1	1
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi			
				Dukungan 100% thd Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Sesuai Regulasi Yang Berlaku	%	100	100
				Laporan Kinerja APBN (dekon/TP) triwulan IV/2021 dan Triwulan I-III/2022	dokumen	4	4
				Penyerahan DIPA APBN Tahun 2023	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dokumen Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2022	dokumen	1	1
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
				Dukungan 100% thd Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Sesuai Regulasi Yang Berlaku	%	100	100
				Dokumen LKPJ AMJ DIY Tahun 2017-2022	dokumen	1	1
				Laporan evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan	dokumen	1	1
				Laporan evaluasi Hasil Renstra OPD DIY Tahun 2021	dokumen	1	1
				Updating Sengguh Tahun 2022	aplikasi	1	1
				Dokumen LKPJ DIY Tahun 2021	dokumen	1	1
				Laporan evaluasi Hasil RKPD DIY Semester II/ 2021 dan Semester I/2022	dokumen	2	2
				Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/ Tahun 2021 dan TW I-III 2022	dokumen	4	4
				Laporan evaluasi hasil RPJMD DIY Tahun 2021	dokumen	1	1
				Laporan evaluasi Hasil Program Pemda Tahun 2021	dokumen	1	1
				Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kab/Kota Tahun 2022	dokumen	1	1
				Laporan evaluasi Hasil Renja OPD DIY Semester II/Tahun 2021 dan Semester I/2022	dokumen	2	2
				Evaluasi SAKIP Pemda DIY	kegiatan	2	2
				Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan 100% thd Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Sesuai Regulasi Yang Berlaku	%	100	100
				Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kab/Kota Semester II/2021 dan Semester I/2022	dokumen	2	2
				Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun 2021	dokumen	1	1
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
				Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Pemerintahan	persen	93.24	95.52
				Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sosial Budaya	persen	93.67	82.5
				Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Perekonomian	persen	91.3	78.26
				Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sarana Prasarana	persen	88.57	80.25
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
				Dukungan 100% terhadap Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan 93,24%	%	100	100
				Dokumen bahan perencanaan Tahun 2024 Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik	dokumen	1	1
				Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022	dokumen	1	1
				Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Subbidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022			
				Dokumen bahan perencanaan Tahun 2024 Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum	dokumen	1	1
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
				Dukungan 100% terhadap Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan 93,24%	%	100	100
				Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2021	dokumen	1	1
				Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2022	dokumen	1	1
				Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik Tahun 2022	dokumen	1	1
				Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik Tahun 2021	dokumen	1	1
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
				Dukungan 100% terhadap Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya 93,67%	%	100	100
					dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dokumen bahan perencanaan tahun 2024 Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM			
				Dokumen Rencana Sinkronisasi Program/Kegiatan CSR/TSLP dan Pemda	dokumen	1	1
				Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022	dokumen	1	1
				Dokumen bahan perencanaan tahun 2024 Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat	dokumen	1	1
				Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022	dokumen	1	1
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
				Dukungan 100% terhadap Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya 93,67%	%	100	100
				Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM tahun 2022	dokumen	1	1
				Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2022	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dokumen Monev TPB DIY	dokumen	1	1
				Dokumen evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY	dokumen	1	1
				Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2021	dokumen	1	1
				Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM tahun 2021	dokumen	1	1
				Dokumen evaluasi CSR/TSLP	dokumen	1	1
				Pengembangan aplikasi sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan	aplikasi	1	1
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
				Dukungan 100% terhadap Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian 91,30%	%	100	100
				Dokumen bahan perencanaan Tahun 2024 Bidang Perekonomian Subbidang Pertanian dan Kelautan	dokumen	1	1
				Dokumen bahan perencanaan Tahun 2024 Bidang Perekonomian Subbidang Dunia Usaha	dokumen	1	1
				Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Subbidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022	dokumen	1	1
				Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Subbidang Pertanian dan Kelautan	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
				Dukungan 100% terhadap Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian 91,30%	%	100	100
				Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2021	dokumen	1	1
				Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2022	dokumen	1	1
				Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2021	dokumen	1	1
				Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi Tahun 2021	dokumen	1	1
				Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2022	dokumen	1	1
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
				Dukungan 50% terhadap Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sarana Prasarana 88,57%	%	100	100
				Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dokumen bahan perencanaan 2024 Bidang Sarana Prasarana Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM	dokumen	1	1
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
				Dukungan 50% terhadap Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sarana Prasarana 88,57%	%	100	100
				Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2021.	dokumen	1	1
				Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2022	dokumen	1	1
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)			
				Dukungan 50% terhadap Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sarana Prasarana 88,57%	%	100	100
				Dokumen bahan perencanaan 2024 Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	dokumen	1	1
				Dokumen KLHS RPJMD DIY Tahun 2022-2027	dokumen	1	1
				Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang,	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
				Dukungan 50% terhadap Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sarana Prasarana 88,57%	%	100	100
				Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Subbidang Pertanahan, Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022	dokumen	1	1
				Dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2021	dokumen	1	1
				Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021	dokumen	1	1

b. Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan

1) Kondisi Umum

Pelaksanaan Urusan Keistimewaan DIY dalam rangka mencapai tujuan Keistimewaan DIY diimplementasikan dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan Urusan Keistimewaan DIY tahun 2022 yang direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan dan dikendalikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan perencanaan pembangunan daerah urusan keistimewaan yang disusun dengan sasaran terukur, dan berorientasi hasil diharapkan dapat memenuhi tujuan Keistimewaan sesuai UU Nomor 13 Tahun 2012. Dalam penyusunan program/ kegiatan, perencanaan pembangunan daerah urusan keistimewaan mematuhi ketentuan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Peraturan Gubernur No. 85 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan. Secara komprehensif, penyusunan kebijakan urusan keistimewaan, perencanaan, dan pengendalian urusan keistimewaan serta pengkoordinasian administrasi urusan keistimewaan dilaksanakan oleh Paniradya Kaistimewan. Penugasan tersebut telah diatur dalam Perdais Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 51 Tahun 2018. Dalam melaksanakan tugasnya Paniradaya Kaistimewan memiliki sasaran strategis sebagai berikut,

- (a) Meningkatnya Kualitas Implementasi Urusan Keistimewaan yang diukur dengan indikator Rerata presentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan.
- (b) Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja yang diukur dengan indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Kepada Parampara Praja.

- (c) Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang diukur dengan indikator Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien.

Berikut disampaikan capaian kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan di DIY Tahun 2022 sebagai berikut,

Tabel 3.185. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program Urusan Keistimewaan	%	97,23	98,20	98,11	99,91	98,2	99,91
2	Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja	%	87	78	87,67	112,40	78	112,40
3	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	94,80	83	94,30	113,61	83	113,61

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2023

- (a) *Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan*

Sasaran kinerja program-program Urusan Keistimewaan “Meningkatnya kualitas implementasi Urusan Keistimewaan” terealisasi sebesar 98,11% atau dengan capaian 99,91% dari target yang ditetapkan sebesar 98,20% pada akhir tahun 2022. Data diolah dari capaian kinerja fisik dan capaian keuangan program-program urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh PA/KPA danais. Hasil penghitungan total capaian kinerja diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.186. Pengukuran Capaian Fisik dan Keuangan Dana Keistimewaan Tahun 2022

No	Urusan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Tahap III/Akhir (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	Tata Cara	7.139.034.200,00	6.247.465.071,00	87,51	99,32
2	Kelembagaan	41.581.229.524,00	39.685.153.084,00	95,44	100,00
3	Kebudayaan	946.505.643.864,00	916.396.285.254,58	96,82	99,96
4	Pertanahan	27.023.359.881,00	24.448.850.806,00	90,47	96,98
5	Tata Ruang	297.750.732.531,00	285.946.555.008,00	96,04	99,46
	TOTAL	1.320.000.000.000,00	1.272.724.309.223,58	96,42	99,79
		Rerata		98,11	

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2023

Pada tahun 2022, rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program Urusan Keistimewaan sebesar 98,11% (atau sebesar 99,91% dari target yang telah ditetapkan sebesar 98,20%). Angka capaian diperoleh dari rerata realisasi keuangan program Keistimewaan Urusan Tata Cara, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang sebesar 96,42% dan realisasi fisik program Keistimewaan Urusan Tata Cara, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang sebesar 99,79%.

Realisasi fisik Urusan Kelembagaan merupakan realisasi tertinggi yaitu mencapai 100%, sedangkan realisasi fisik terendah berasal dari Urusan Pertanahan yaitu sebesar 96,98%. Realisasi fisik Urusan Pertanahan menjadi yang terendah karena terdapat bidang-bidang yang tidak lolos validasi di Kantor Pertanahan sehingga diperlukan pengukuran ulang atau pencarian alternatif bidang untuk pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa. Selain itu, terdapat berkas pendaftaran tanah Kasultanan yang siap, namun tidak dapat terfasilitasi pada pendaftaran di loket karena telah mendekati akhir tahun. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya target pada pelaksanaan pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa, pendaftaran tanah desa, pendaftaran tanah kasultanan dan kadipaten, dan pengukuran tanah desa. Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan fisik ini tentunya berdampak pada

pencapaian realisasi keuangan yang tidak maksimal dan Sisa Lebih Pagu Anggaran (SiLPA) yang relatif besar.

Secara umum, realisasi fisik pada masing-masing urusan mencapai lebih dari 95%. Realisasi fisik Urusan Kelembagaan merupakan realisasi tertinggi yaitu mencapai 100%, sedangkan realisasi fisik terendah berasal dari Urusan Pertanahan yaitu sebesar 96,98%. Realisasi fisik Urusan Pertanahan menjadi yang terendah karena (1) terdapat bidang-bidang tanah di Kabupaten Bantul yang tidak lolos validasi oleh Kantor Pertanahan. Sehingga diperlukan pengukuran ulang atau pencarian alternatif bidang untuk pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa; dan (2) terdapat berkas pendaftaran tanah Kasultanan yang sudah lengkap tidak dapat terfasilitasi pada pendaftaran di loket karena telah mendekati akhir tahun. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya target pada pelaksanaan pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa, pendaftaran tanah desa, pendaftaran tanah kasultanan dan kadipaten, dan pengukuran tanah desa pada wilayah Kabupaten Bantul. Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan fisik ini tentunya berdampak pada pencapaian realisasi keuangan yang tidak maksimal dan Sisa Lebih Pagu Anggaran (SiLPA) yang relatif besar.

Sedangkan deviasi keuangan pada Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur (Tata Cara) tergolong besar disebabkan karena pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait pemberhentian, penetapan dan pengesahan serta pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidak banyak dilaksanakan secara luring karena pelaksanaan kegiatan berjalan baik dan lancar sehingga

terdapat efisiensi anggaran yang cukup besar pada anggaran bersangkutan.

(b) *Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja*

Capaian kinerja sasaran “*Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja*” pada tahun 2022 tercapai sebesar 87,66% atau 112,38% dari target sebesar 78%. Indikator pengukuran pencapaian kinerja Pemda DIY dalam memfasilitasi Parampara Praja antara lain: 1) Kepuasan dukungan tim asistensi, yaitu penyediaan data-data pendukung dan analisis yang nantinya digunakan sebagai masukan bagi anggota Parampara Praja dalam menyusun rekomendasi kepada Gubernur; 2) Kepuasan dukungan Sekretariat, yaitu dukungan Paniradya Kaistimewan DIY kepada anggota Parampara Praja dalam hal penjadwalan kegiatan, hubungan dengan para pemangku kepentingan, penyediaan materi-materi referensi, hingga memfasilitasi dan mengakomodasi perjalanan dinas bagi Parampara Praja; 3) Kepuasan sarana prasarana, yaitu dukungan Paniradya Kaistimewan DIY dalam fasilitasi sarana prasarana seperti komputer dan kendaraan; 4) Kepercayaan terhadap pelayanan Paniradya, yaitu persepsi kepercayaan anggota Parampara Praja terhadap pelayanan yang diberikan Paniradya Kaistimewan DIY dan kemampuan menjaga kerahasiaan.

Hasil penghitungan sub indikator di atas diperoleh melalui:

Tabel 3.187. Pengukuran Capaian Sasaran

Sub Indikator	Hasil Penilaian	Rata-Rata Nilai
a. Kepuasan dukungan Tim Asistensi	87,00%	87,67%
b. Kepuasan terhadap dukungan Sekretariat	91,66%	
c. Kepuasan sarana prasarana	84,00%	
d. Kepercayaan terhadap pelayanan	88,00%	

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2023

Data di atas diperoleh dari hasil kuesioner internal yang dibagikan Paniradya Kaistimewan DIY kepada anggota Parampara Praja. Kuesioner dilakukan di Triwulan IV sehingga anggota Parampara Praja dapat menilai kinerja kesekretariatan dari Triwulan I hingga IV.

(c) *Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien*

Kinerja sasaran terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah diukur dengan indikator persentase kelembagaan yang efektif dan efisien. 3 (tiga) sub indikator yang digunakan untuk pengukuran evaluasi kelembagaan, antara lain 1) Hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang dapat dilihat dari 2 aspek yaitu Evaluasi struktur, tugas, dan fungsi perangkat daerah dan Evaluasi analisis jabatan; 2) Hasil evaluasi pelaksanaan Budaya Pemerintahan Satriya pada 37 OPD untuk mengetahui intensitas penerapan dan dampak penerapannya dalam berbagai aspek, baik aspek fisik maupun non fisik; 3) Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada 37 OPD dilaksanakan untuk menilai intensitas pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan.

Capaian kinerja sasaran Persentase Kelembagaan yang Efektif dan Efisien pada tahun 2022 sebesar 94,30% dari target 83% atau 113,61% dari target yang ditetapkan. Rincian penghitungan capaian dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.188. Pengukuran Capaian Sasaran

No	Indikator	Nilai
1	Persentase kelembagaan perangkat daerah pelaksana keistimewaan yang proporsional	100%
2	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	82,90%
3	Persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	100%
	RERATA	94,30%

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2023

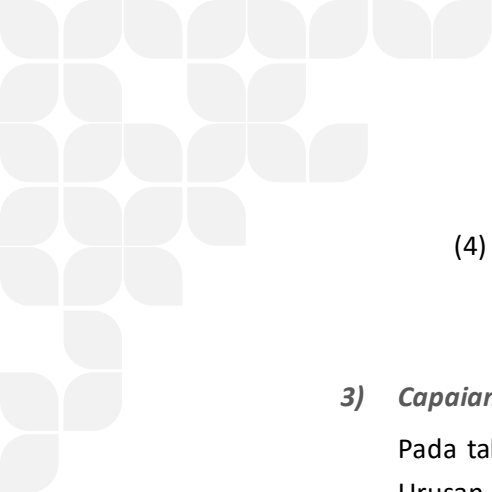
2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

- (1) Penjadwalan waktu untuk pertemuan secara offline antara Paniradya Kaistimewan dan Parampara Praja sulit dilaksanakan karena padatnya agenda Parampara Praja Tata Kala Waktu pelaksanaan keistimewaan dan kompleksitas permasalahan perencanaan keistimewaan.
- (2) Dinamika Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pengusulan Dana Keistimewaan DIY.
- (3) Rentang kendali perencanaan keistimewaan semakin panjang karena semakin bertambahnya pemangku kepentingan urusan keistimewaan hingga level desa/kalurahan.
- (4) Indikator kinerja sasaran pada sasaran "Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah" merupakan sasaran yang melekat pada Biro Organisasi Setda DIY sehingga capaian sasaran tidak dapat diukur langsung oleh Paniradya Kaistimewan.

b) *Solusi*

- (1) Peningkatan koordinasi dengan Parampara Praja sehingga perencanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
- (2) Menjalin koordinasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan urusan keistimewaan sehingga pengusulan dana keistimewaan dapat berjalan dengan baik.
- (3) Optimalisasi pemanfaatan IT dan teknologi dalam perencanaan dan pengendalian keistimewaan seperti penggunaan Aplikasi Pangripta dan Kenes sehingga jangkauan pengendalian, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan dana keistimewaan dapat berjalan dengan baik.

- 
- (4) Mengusulkan indikator baru untuk periode perencanaan selanjutnya yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan di Paniradya Kaistimewan.

3) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Pada tahun 2022 Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp27.420.562.280,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 2 Program, 13 kegiatan, dan 29 subkegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat terealisasi sebesar Rp26.763.967.805,00 atau 97,61%, dengan pencapaian fisik mencapai 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.189. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKRETARIAT DAERAH	PANIRADYA KAISTIMEWAN	1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	persen	100	100
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persen	100	100
				PK	dokumen	1	1
			2. Penyusunan kebijakan umum urusan keistimewaan	Renstra	dokumen	1	1
				Renja	dokumen	1	1
			3. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerja sama pihak ketiga	Renja Perubahan	dokumen	1	1
				ROPK	dokumen	1	1
			4. Pengoordinasian perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD	persen	100	100
				DPA-OPD 2023	dokumen	1	1
				RKAP-OPD 2022	dokumen	1	1
				RKA-OPD 2023	dokumen	1	1
				DPPA-OPD 2022	dokumen	1	1
			5. Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	100
				Konsep/Bahan LKPJ	dokumen	1	1
				Dokumen LKJIP Nilai A	dokumen	1	1
				Konsep/Bahan LPPD	dokumen	1	1
			6. Peningkatan Hubungan Dengan Semua Stakeholder	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persen	100	100
				Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	tahun	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	persen	100	100
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	tahun	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	persen	100	100
				Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD	persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Laporan Keuangan bulanan	dokumen	12	12
				Laporan Keuangan Semester	dokumen	2	2
				Laporan Keuangan Triwulanan	dokumen	4	4
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD	persen	100	100
				Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	tahun	1	1
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persen	100	100
				Kabel FO	buah	4	4
				Batu baterai AAA	pack	10	10
				Steker	buah	10	10
				Lampu LED	buah	10	10
				Isolasi listrik	buah	10	10
				Batu baterai AA	pack	10	10
				Kabel PVC	set	5	5
				Kabel roll	roll	4	4
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persen	100	100
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	22	22
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persen	100	100
				Sabun mandi cair	buah	12	12
				Shampoo mobil	buah	12	12
				Pembersih lantai	buah	12	12
				Handsoap cair	buah	36	36
				Sabun antiseptic	buah	12	12
				Sanitizer lantai	liter	40	40
				Pembersih porselin/close	buah	11	11
				Handsanitizer	galon	5	5
				Pewangi closet	buah	12	12
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persen	100	100
				Penggandaan	lembar	15.685	15.685

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Barang Cetak	jenis	8	8
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persen	100	100
				Tersedianya surat kabar dan majalah	jenis	4	4
				Tersedianya buku/referensi peraturan perundangan	jenis	4	4
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	persen	100	100
				Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi	tahun	1	1
				Tersedianya makanan dan minuman rapat	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persen	100	100
				Bukti Pembayaran Jasa Komunikasi	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persen	100	100
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan	unit	1	1
				Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBM	unit	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persen	100	100
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	15	15
				Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai RKPBM	unit	15	15
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persen	100	100
				Printer	unit	12	12
				Komputer	unit	12	12
				Notebook	unit	12	12
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
				Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang berkualitas	persen	95	100
				Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas	persen	95	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan Pertanahaan dan Tata Ruang yang berkualitas	persen	95	100
				Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	100
				Persentase pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan urusan keistimewaan	persen	75	100
				Indeks kepuasan layanan kepada Paramparapraja	skor	78	100
				Persentase Efektivitas Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	persen	96	96
				Sarana dan prasarana keistimewaan Urusan Kelembagaan sesuai kebutuhan	persen	100	100
				Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	persen	100	100
				Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Tahun 2022	Dokumen	2	2
				Roadmap Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan tahun 2022-2027	Dokumen	1	1
				Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Tahun 2024	Dokumen	1	1
				Kajian Tindak Lanjut Kelembagaan Asli Daerah	Dokumen	1	1
				Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Tahun 2023	Dokumen	2	2
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	persen	100	100
				Hasil monev tahapan pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara tahun 2022	Dokumen	4	4
				Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	persen	100	100
				Rencana perubahan program dan kegiatan keistimewaan tahap 1 urusan kebudayaan tahun 2022	dokumen	0	0
				Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2022	dokumen	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rencana perubahan program dan kegiatan keistimewaan tahap 2 urusan kebudayaan tahun 2022	dokumen	0	0
				Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2024	dokumen	1	1
				Rencana program dan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan tahun 2023	dokumen	2	2
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	persen	100	100
				Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan urusan Kebudayaan Tahun 2022	Dokumen	4	4
				Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	persen	100	100
				Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2022	Dokumen	2	2
				Dokumen Kajian Perencanaan Urusan Pertanahan	Dokumen	1	1
				Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2023	Dokumen	2	2
				Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tahun 2024	Dokumen	1	1
				Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2022	Dokumen	2	2
				Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2023	Dokumen	2	2
				Film Terkait Perencanaan Urusan Pertanahan	Film	3	3
				Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang tahun 2024	Dokumen	1	1
				Dokumen Kajian Perencanaan Urusan Tata Ruang	dokumen	1	1
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	persen	100	100
				Film Terkait Pengendalian Urusan Pertanahan	Film	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Hasil monev tahapan pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan urusan pertanahan Tahun 2022	Dokumen	4	4
				Film Terkait Pengendalian Urusan Tata Ruang	Film	2	2
				Hasil monev tahapan pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan urusan tata ruang Tahun 2022	Dokumen	4	4
				Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	persen	100	100
				Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2024	dokumen	1	1
				Kajian Perencanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan 2022-2027	dokumen	1	1
				Kajian Dampak Dana Keistimewaan terhadap Isu Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah	dokumen	1	1
				Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata dan Kebudayaan di DIY	Dokumen	1	1
				Kajian Petunjuk Teknis Perencanaan Keistimewaan	Dokumen	1	1
				Film Pengenalan Aplikasi Perencanaan (Pangripta)	Film	1	1
				Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2023	dokumen	2	2
				Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2022	dokumen	2	2
				Pengembangan Aplikasi Perencanaan Keistimewaan	Dokumen	1	1
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	persen	100	100
				Film pengenalan Aplikasi Pengendalian Dana Keistimewaan	Film	1	1
				Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan tahun 2022	Dokumen	4	4
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	persen	100	100
				Jalur disabilitas	paket	1	1
				Buku Bacaan	paket	1	1
				Alat Pendingin	paket	2	2
				Patung Untuk Dasawarsa Kaistimewan	set	1	1
				Komputer	paket	1	1
				Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	paket	1	1
				Alat studio	paket	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Video Mapping Dasawarsa Kaistimewan	paket	1	1
				Rehab Bangunan Gedung	paket	1	1
				Alat Rumah Tangga Lainnya (karpas, <i>aquascape</i>)	paket	1	1
				Mesin Penghancur Kertas	unit	5	5
				Alat Kantor Lainnya (perlengkapan atribut/lambang negara dan provinsi)	paket	1	1
				Tablet	unit	6	6
				Belanja Perlengkapan Ruang Laktasi	paket	1	1
				Masterplan Kantor Paniradya Kaistimewan	paket	1	1
				Alat Filtrasi Udara dan Pengharum Ruang (kebersihan)	paket	1	1
				CCTV	paket	1	1
				Layanan Higen Calmic	paket	1	1
				Peralatan Rumah Tangga dan Alat Dapur	paket	1	1
				ALat Pemadam Kebakaran	buah	5	5
				Video 3D Billboard	paket	1	1
				Alat Studio Lainnya (videotron, TV, speaker dinding/plafond)	paket	1	1
				Papan Nama OPD	paket	1	1
				Personal Komputer pendukung GIS (<i>Geographical Information System</i>)	paket	1	1
				Mesin Hitung Uang	unit	1	1
				Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	persen	100	100
				Bahan Rekomendasi kepada Parampara Praja	dokumen	24	24
				Fasilitasi Parampara Praja	bulan	12	12
				Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	persen	100	100
				Konten informasi keistimewaan DIY yang terpublikasi kepada masyarakat	media	5	5
				Peringatan 10 Tahun Keistimewaan DIY	Paket	1	1
				Laporan hasil forum desentralisasi asimetris tahun 2022	laporan	1	1
				Buku infografis pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan tahun 2021	eksemplar	35	35

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Peringatan Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	Paket	1	1
				Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Lembaga Pelaksana Keistimewaan	dokumen	1	1

c. Administrasi Keuangan Daerah

1) Kondisi Umum

Pelaksanaan urusan penunjang administrasi keuangan daerah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY sebagaimana disebut dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Ketentuan pada Perdais tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

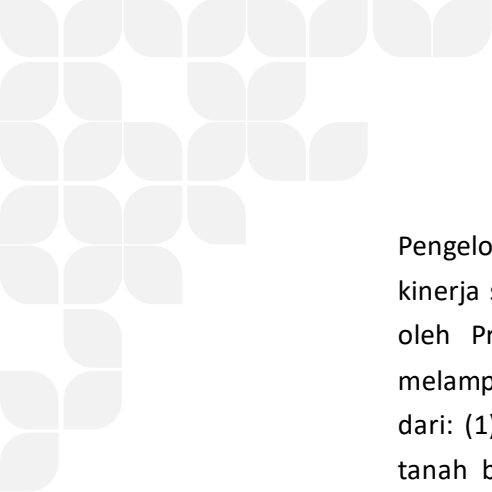
Dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagaimana Tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2022, maka diperlukan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dihasilkan pada urusan penunjang administrasi keuangan daerah. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis pada urusan penunjang Administrasi Keuangan Daerah beserta target dan capaian realisasinya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.190. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	%	100	100	100	100	100	
2	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	Rupiah	5.239.098.025	6.967.568.518	15.486.233.611	222,26	6.967.568.518	222,26

Sumber : BPKA DIY, 2023

Indikator kinerja sasaran Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan tercapai sesuai target, dengan didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program



Pengelolaan Pendapatan Daerah. Demikian juga pada indikator kinerja sasaran Optimalisasi aset-aset Pemda DIY yang didukung oleh Program Pengelolaan Barang Milik Daerah juga telah melampaui target. Realisasi optimalisasi aset Pemda DIY berasal dari: (1) Retribusi rumah dinas Rp103.150.510,00; (2) Retribusi tanah bangunan Rp336.973.976,00; (3) Sewa tanah bangunan Rp12.359.514.500,00; (4) Kontribusi PT Yogya Indah Sejahtera Rp833.000.000,00; dan (5) Hasil penjualan aset yang tidak dipisahkan Rp1.853.594.625,00. Upaya untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan BMD: 1) Penilaian sesuai harga pasar untuk BMD; 2) Melakukan kajian *High Best Use* untuk BMD yang belum termanfaatkan; 3) Melakukan kajian Master Plan untuk BMD yang potensial untuk pemanfaatan Kerja sama (KSP); 4) Melakukan pembersihan dan perawatan rutin untuk BMD yang belum termanfaatkan; serta 5) Koordinasi dengan OPD untuk pemanfaatan BMD.

Beberapa Faktor yang mendorong ketercapaian pada urusan penunjang administrasi keuangan daerah adalah: 1) Penyesuaian regulasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 2) Upaya intensifikasi dalam pemungutan dan penagihan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah; 3) Kolaborasi yang sinergis dengan para pemangku kepentingan lintas sektor; serta 4) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

Menggambarkan permasalahan dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2022, maupun permasalahan pelaksanaan urusan.

- (1) Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
- (2) Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tergali secara optimal.
- (3) Pemanfaatan layanan digital untuk transaksi pendapatan belum optimal.
- (4) Sistem manajemen Barang Milik Daerah (BMD) belum berjalan secara efektif sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah.

b) Solusi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas (**poin a**).

- (1) Penyesuaian regulasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan meningkatkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lintas sector guna mengantisipasi dinamika kebijakan/peraturan.
- (2) Optimalisasi PAD melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, yaitu penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, menambah kanal – kanal pembayaran digital pada layanan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta optimalisasi sistem pembayaran pendapatan daerah melalui *electronic commerce (e-commerce)*;
- (3) Sosialisasi dan edukasi dalam Pemanfaatan teknologi informasi baik dalam transaksi pendapatan maupun dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
- (4) Menyusun kerangka kebijakan yang komprehensif terkait pengelolaan BMD sehingga diharapkan pengelolaan BMD dapat lebih efektif sehingga pemanfaatan BMD lebih optimal.



3) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Pada Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah pada tahun 2022 didukung oleh anggaran sebesar Rp1.500.550.634.235,00, dengan realisasi sebesar Rp1.414.595.231.421,63 (94,27%) untuk melaksanakan 4 (empat) program, 14 kegiatan dan 65 subkegiatan. Sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Target dan realisasi anggaran maupun fisik disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.191. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerja sama pihak ketiga 3. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi 4. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat 5. Ketepatan waktu dan keakuratan pengelolaan keuangan daerah 6. Peningkatan peran optimalisasi barang milik daerah sebagai salah satu kontributor peningkatan PAD 7. Penyusunan SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah supaya tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur serta monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan RAPBD Ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RPAPBD Keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah Ketepatan Waktu penyampaian dan Kelengkapan Laporan Keuangan sesuai SAP (tepat waktu 60%, lengkap 40%, tidak tepat waktu 30%, tidak lengkap 20%) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	% % % %	100 100 100 100 100	100 100 100 100
				KUA PPAS Tahun 2023	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
				KUPA PPASP Tahun 2022	dokumen	1	1
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-OPD			
				Verifikasi RKA OPD sebagai acuan penyusunan RAPBD tahun 2023	OPD	30	30
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-OPD			
				Verifikasi RKAP OPD sebagai acuan penyusunan RPAPBD tahun 2022	OPD	30	30
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- OPD			
				SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPPA OPD Tahun N yang telah disahkan	Dokumen SPD	120	120
				SPD PA/KPA diterbitkan dalam 3 hari kerja sesuai dengan DPA OPD paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai	Dokumen SPD	120	120
				DPPA Dana Keistimewaan	Kali	2	2
				DPA OPD disahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD Tahun N+1 ditetapkan sesuai dengan Perda APBD Tahun N+1	Dokumen DPA	30	30
				DPPA OPD disahkan paling lambat 15 hari kerja setelah perubahan APBD tahun N ditetapkan sesuai dengan Perda Perubahan APBD Tahun N	Dokumen DPPA	30	30
				Pergub Penjabaran APBD Tahun 2023 ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku	dokumen	1	1
				Perda APBD Tahun 2023 ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku	dokumen	1	1
				Rapergub Standar Belanja	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
				Perda Perubahan APBD tahun 2022 yang ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA PPASP dan peraturan perundangan yang berlaku	dokumen	1	1
				Pergub Penjabaran Perubahan APBD tahun 2022 yang ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober tahun 2022 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA PPASP dan peraturan perundangan yang berlaku	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			
				Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara dan KPA BOS	Keputusan Gubernur	2	2
				Rapergub Pemberian Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Kesejahteraan berupa Tunjangan Perumahan, Belanja Rumah Tangga, Tunjangan Transportasi dan Uang Pembelian Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD	Rapergub	1	1
				Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PMK dan Permendagri)	Peraturan Gubernur	1	1
				Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Hibah Bansos	Keputusan Gubernur	6	6
				Keputusan Gubernur tentang Penetapan KPA Dana Dekonsentrasi (sesuai jumlah DIPA)	Keputusan Gubernur	17	17

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara dan KPA/KPB APBD	Keputusan Gubernur	2	2
				Appraisal Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD DIY	dokumen	1	1
				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			
				Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda dan Raperkada tentang APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023	Keputusan Gubernur	5	5
				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			
				Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda dan Raperkada tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022	Keputusan Gubernur	5	5
				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
				Hasil evaluasi paling lambat 15 hari kerja setelah Raperda dan Raperkada tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 diterima secara lengkap	Keputusan Gubernur	5	5
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY Tahun 2021 disusun paling lambat Februari dan Agustus 2022	dokumen	2	2
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
				Berita Acara Rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	Dokumen	4	4
				Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN dan KPP	Dokumen	2	2
				Berita Acara Rekonsiliasi dengan PT Taspen	Dokumen	4	4
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			
				Dokumen SPP/SPM diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	Dokumen	8.000	15.294
				Berita Acara Verifikasi BKK Dana Keistimewaan Untuk Kabupaten/Kota	Dokumen	18	15
				Penerbitan SP2D seluruh PA dan KPA Pemda DIY	Dokumen	8.000	15.294
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			
				Laporan pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis OPD Tahun 2022 selesai bulan Juli tahun 2022	dokumen	1	1
				Konsolidasi Laporan Keuangan OPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
				Laporan Keuangan Audited 2021	dokumen	1	1
				Laporan Keuangan Unaudited (bulan Februari 2022)	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			
				Rapergub Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021 disampaikan paling lambat bulan Juni tahun 2022 sesuai dengan Perda APBD	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021 disampaikan paling lambat bulan Juni tahun 2022 sesuai dengan Perda APBD	dokumen	1	1
				Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			
				Laporan tindak lanjut dilaksanakan 60 hari setelah LHP BPK diterima	dokumen	1	1
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			
				Laporan pengembalian kerugian daerah yang disetorkan ke kas daerah	dokumen	1	1
				Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			
				Sistem informasi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	sistem	1	1
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi			
				Sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam pelaporan dan pertanggungjawaban	orang	150	150
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi			
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kelompok sasaran Pengelola Keuangan BLUD	BLUD	8	8
				Analisis Investasi Pemerintah Daerah			
				Deviden BUMD tahun buku 2022	rupiah	113.479.525.584	113.479.525.584
				Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan BUKP tahun buku n-1	Keputusan Gubernur	1	1
				Nilai NPL BUKP	persen	20	20
				Hasil Audit KAP terkait Transformasi Kelembagaan BUKP	Dokumen	1	1
				Kajian Transformasi Kelembagaan BUKP	dokumen	1	1
				Seleksi Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi BUMD	BUMD	3	3

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Keputusan Kepala BPKA tentang Pengesahan RKAT BUKP tahun buku 2021 berdasarkan SE Pedoman Penyusunan RKAT n+1 selambat-lambatnya akhir November	Keputusan	1	1
				Deviden BUKP tahun 2022	rupiah	3.975.033.928	3.975.033.928
				Keputusan Gubernur tentang Pembagian Laba Bersih BUKP tahun n-1	Keputusan Gubernur	1	1
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
				Bantuan keuangan ke kabupaten/kota dan ke kalurahan	tahun	1	1
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
				Belanja tidak terduga	tahun	1	1
				Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi			
				Bagi hasil Provinsi ke Kabupaten/Kota	tahun	1	1
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
				Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikelola sesuai prosedur	%	100	100
				Jumlah potensi barang Milik Daerah yang didayagunakan	%	85,71	87,21
				Penyusunan Standar Harga			
				Rapergub SHBJ	dokumen	1	1
				Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			
				Rencana kebutuhan barang milik daerah menjadi pedoman penyusunan RKA	dokumen	1	1
				Penatausahaan Barang Milik Daerah			
				Laporan Semesteran Barang Milik Daerah bulan Juli dan bulan Maret	Laporan	2	2
				Pengamanan Barang Milik Daerah			
				polish asuransi BMD	polis	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bangunan gedung kantor yang siap dioperasionalkan	unit	2	2
				tanah BMD yang disertifikasi	bidang	7	7
				Tanah BMD yang diukur ulang	bidang tanah BMD	10	10
Penilaian Barang Milik Daerah							
				Laporan Penilaian Aset Hasil Kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam rangka Pemanfaatan	dokumen	1	1
				Laporan kelayakan bisnis Malioboro Mall	dokumen	1	1
				Laporan kelayakan bangunan dan fasilitas malioboro mal	dokumen	1	1
				Laporan Penilaian Nilai Wajar Aset Hasil Kerja sama dengan pihak ketiga	dokumen	1	1
				Laporan penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan BMD	dokumen	1	1
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah							
				Penjualan dan penghapusan bangunan gedung kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur	unit bangunan gedung	3	3
				Penjualan dan penghapusan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur	jenis peralatan	5	5
				Penjualan dan penghapusan kendaraan dinas sesuai dengan Keputusan Gubernur	unit kendaraan	10	10
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
				Persentase Kontribusi Pendapatan Pajak, Retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan , PAD Lain yang Sah Terhadap pendapatan	%	60,06	60,75

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kenaikan Pajak daerah KPPD DIY di Kota Yogyakarta	Rp	37.158.446.429	22.131.973.400
				Kenaikan Pajak daerah KPPD DIY di Kabupaten Bantul	Rp	38.506.977.121	41.513.614.010
				Kenaikan Pajak daerah KPPD Kabupaten Gunungkidul	Rp	12.381.553.650	13.201.792.100
				Kenaikan Pajak Daerah KPPD DIY di Kabupaten Sleman	Rp	78.538.848.031	69.719.336.100
				Kenaikan Pajak Daerah KPPD DIY di Kabupaten Kulonprogo	Rp	12.537.252.508	11.807.796.966
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			
				Laporan dana transfer	dokumen	7	7
				Pendapatan daerah	rupiah	5.364.614.634.680	5.364.614.634.680
				Pendapatan hibah	rupiah	7.576.500.000	7.576.500.000
				Pendapatan transfer	rupiah	3.311.199.782.490	3.311.199.782.490
				Pendapatan asli daerah	rupiah	2.045.838.352.190	2.045.838.352.190
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.			
				Pajak daerah	rupiah	1.831.695.736.270	1.831.695.736.270
				Retribusi daerah	rupiah	33.049.773.075	33.049.773.075
				Lain-lain PAD yang sah	rupiah	76.203.059.336	76.203.059.336
				Pendapatan asli daerah	rupiah	2.045.838.	2.045.838.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
						352.190	352.190
				Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	rupiah	104.889.783.509	104.889.783.509
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			
				Sosialisasi Pergub NJKB	kegiatan	1	1
				Sosialisasi Pajak Daerah	kegiatan	2	2
				Publikasi Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah	bulan	12	12
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	100
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	100
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	100
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	100
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku berupa Renja Perangkat Daerah 2023	Dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku berupa RENSTRA	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku berupa Renja Perubahan Perangkat Daerah 2022	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku berupa DPPA 2022	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku berupa RKA 2023	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku berupa DPA 2023	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku berupa RKA Perubahan 2022	dokumen	1	1
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Tersusunnya laporan evaluasi kinerja berupa konsep/Bahan LKPJ dan LPPD	dokumen	1	1
				Tersusunnya laporan evaluasi kinerja berupa laporan monitoring dan evaluasi bulanan	dokumen	12	12
				Tersusunnya laporan evaluasi kinerja laporan berupa monev timbal balik triwulanan	dokumen	4	4
				Tersusunnya laporan evaluasi kinerja berupa LKJIP	dokumen	1	1
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN BPKA DIY	tahun	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	dan tahun	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				Laporan keuangan triw ulanan	dokumen	4	4
				Laporan keuangan bulanan	dokumen	12	12
				Laporan keuangan semesteran dan prognosis	dokumen	2	2
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	tahun	1	1
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya lampu	jenis	3	3
				Tersedianya baterai	jenis	6	6
				Tersedianya accu	jenis	1	1
				Tersedianya test pen	jenis	2	2
				Tersedianya kabel	jenis	2	2
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Pengisian tabung pemadam kebakaran	jenis	3	3
				Tersedianya alat tulis kantor	jenis	20	20
				Tersedianya bahan komputer	jenis	5	5
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Tersedianya peralatan rumah tangga	jenis	20	20
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Penggandaan	lembar	563.352	317.174
				Barang Cetakan	jenis	6	6
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Tersedianya surat kabar/majalah/tabloid	jenis	2	2
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Tersedianya makanan dan minuman rapat	tahun	1	1
				Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi	tahun	1	1
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada OPD			
				Terpeliharanya arsip dinamis BPKA DIY	tahun	1	1
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD			
				Updating website OPD	website	1	1
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Tersedianya peralatan kantor berupa komputer PC	unit	9	9
				Tersedianya peralatan kantor berupa AC	unit	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya peralatan kantor berupa Termometer	buah	6	6
				Tersedianya peralatan kantor berupa projector	unit	4	4
				Tersedianya peralatan kantor berupa drone	unit	1	1
				Tersedianya peralatan kantor berupa UPS	unit	8	8
				Tersedianya peralatan kantor berupa laptop/notebook	unit	6	6
				Tersedianya peralatan kantor berupa printer	unit	5	5
				Tersedianya peralatan kantor berupa scanner	unit	3	3
				Tersedianya peralatan kantor berupa televisi	buah	1	1
				Tersedianya peralatan kantor berupa camera conference	unit	8	8
				Tersedianya peralatan kantor berupa humidifier	Unit	3	3
				Tersedianya peralatan kantor berupa pemotong kertas	unit	1	1
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Bukti Pengiriman dokumen	tahun	1	1
				Materai	lembar	1.801	1.801
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Bukti pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Bukti Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Kebersihan kantor terjaga dengan baik	bulan	12	12
				Keamanan Kantor yang Terjaga dengan Baik	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	unit	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	16	16
				Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai RKPBM	unit	16	16
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Terpeliharanya komputer	tahun	1	1
				Terpeliharanya laptop	tahun	1	1
				Terpeliharanya jaringan internet	paket	1	1
				Terpeliharanya printer	tahun	1	1
				Terpeliharanya AC	tahun	1	1
				Terpeliharanya LCD proyektor	tahun	1	1
				Terpeliharanya CCTV	tahun	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Terpeliharanya bangunan gedung kantor	unit	2	2
				Terpeliharanya depo arsip kantor	unit	1	1
				Terpeliharanya gudang kantor	unit	2	2

d. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1) Kepegawaian

a) Kondisi Umum


Reformasi birokrasi bidang aparatur negara menempati ruang yang sangat strategis. Hal ini sejalan dengan perkembangan era industri 4.0 dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi dan sistem informasi. Perkembangan dunia yang terus berubah dan sangat dinamis membuat ASN kini harus tanggap merespon tuntutan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Langkah-langkah dalam menghadapi tantangan tersebut diantaranya dengan meningkatkan pengetahuan, skill, dan wawasan aparatur.

Pemda DIY melalui BKD DIY menyelenggarakan manajemen ASN dengan menerapkan sistem merit. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mendefinisikan sistem merit sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Manfaat dari penerapan sistem merit bagi ASN yaitu ASN dapat mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhannya, melindungi ASN dari politisasi kebijakan yang bertentangan dengan sistem merit, meningkatkan motivasi ASN, dan ASN memiliki jalur karir yang jelas. Manfaat penerapan sistem merit bagi organisasi yaitu dapat merekrut ASN yang profesional dan berintegritas, serta menempatkan sesuai dengan kompetensinya sehingga target organisasi mudah tercapai, mempermudah PPK dalam pengisian jabatan, dan Dapat mempertahankan ASN yang berkompeten dan berkinerja dengan kompensasi dan penghasilan yang layak.

Penerapan sistem merit di Pemda DIY dimulai sejak Tahun 2017 dan mendapatkan penghargaan dari KASN sebagai perintis dalam pengembangan sistem merit level Provinsi. Pada Tahun 2018, Pemda DIY memperoleh kategori baik dengan skor tertinggi 319 diantara 6 Provinsi lainnya dalam implementasi Sistem Merit. Pada Tahun 2019 terdapat perubahan jumlah aspek dan bobot penilaian dan mendapatkan kategori baik dengan nilai 313,5. Tahun 2020 mendapatkan kategori sangat baik dengan nilai 342 dan berada pada peringkat ke 2 kategori Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2022, Pemda DIY berhasil mempertahankan kategori sangat baik kategori IV dengan nilai 349. Berdasarkan hal tersebut maka Pemda DIY telah dengan sangat baik dalam pengelolaan Manajemen ASN secara professional, efisien serta efektif. Pengelolaan Manajemen ASN dengan Sistem Merit dinilai dari delapan aspek yaitu perencanaan kebutuhan; pengadaan; pengembangan karier; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; serta sistem informasi.

(1) *Perencanaan Kebutuhan*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengamanatkan bahwa status pegawai yang bekerja di pemerintah adalah PNS dan PPPK, maka tidak ada lagi pegawai selain jenis tersebut. Kebijakan tersebut memerlukan tindak lanjut yang komprehensif supaya pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Kementerian PANRB kemudian mengeluarkan surat nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah



Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan untuk diadakan pemetaan tenaga non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan penghapusan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK. Surat ini ditindaklanjuti dengan Surat Kementerian PANRB nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 hal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan amanat tersebut, Pemda DIY telah selesai melaksanakan pendataan kepada 3.183 orang Tenaga Bantu Pemda DIY pada Tahun 2022.

(2) *Pengadaan*

Surat Menteri PANRB Nomor B/1161/M.SM.01.00/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Perihal Pengadaan ASN Tahun 2022 menyatakan bahwa pengadaan ASN pada Tahun 2022 hanya untuk PPPK. Berdasarkan pernyataan tersebut maka pada Tahun 2022 seleksi CPNS Tahun 2022 ditiadakan. Pemda DIY mendapatkan alokasi formasi ASN yaitu dari formasi PPPK sejumlah 617 formasi terdiri dari tenaga guru sejumlah 547 formasi tenaga kesehatan sejumlah 30 formasi dan tenaga teknis sejumlah 40 formasi. Proses seleksi pada tahun 2022 belum sampai pada tahap pengangkatan dan akan dilanjutkan pada tahun 2023. Badan Kepegawaian Daerah DIY bersama dengan BKN melaksanakan proses seleksi untuk PPPK tenaga teknis, sedangkan PPPK Guru proses rekrutmen dan seleksi dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta PPPK tenaga medis dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.

Pada Tahun 2022 Pemda DIY menyelenggarakan seleksi Tenaga Bantu Pengganti Tenaga Bantu yang Diterima CPNS Tahun 2022 dan dihasilkan sebanyak 63 orang


Tenaga Bantu serta pengangkatan kembali Tenaga Bantu sebanyak 3.368 orang.

(3) Pengembangan Karier

Setiap Pegawai Negeri Sipil memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pengembangan kompetensi. Hal ini sebagaimana amanat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.

Pengembangan kompetensi merupakan upaya yang dilakukan pada tingkat instansi maupun nasional untuk memenuhi kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. Langkah awal pengembangan kompetensi ini yaitu dengan penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi (RPK) yang berdasarkan pada kualifikasi jabatan, standar kompetensi serta rekomendasi dari hasil pemetaan pegawai.

Pada Tahun 2022, Pemda DIY telah menyelenggarakan pengembangan kompetensi PNS diantaranya, memberikan beasiswa ijin belajar S1 kepada 110 pegawai, ijin belajar mandiri kepada 137 orang, beasiswa tugas belajar dan ijin belajar S2 kepada 61 orang, dan beasiswa ijin belajar S3 kepada 13 orang. Selain itu, Pemda DIY juga memberikan fasilitas pelatihan teknis



dan fungsional kepada 1.148 orang, pelatihan PKN kepada 6 orang, pelatihan PKP kepada 40 orang, dan pelatihan PKA kepada 20 orang.

Selain pengembangan kompetensi PNS, Pemda DIY juga memperhatikan pengembangan kompetensi Tenaga Bantu Pemda DIY. Pengembangan kompetensi untuk tenaga bantu di lingkungan Pemda DIY sebagaimana diatur dalam Pergub DIY Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu pasal 45 bahwa Tenaga Bantu dapat diberikan kesempatan untuk melaksanakan pengembangan kompetensi berupa mengikuti bimbingan teknis/*workshop*/seminar/rapat yang bersifat teknis operasional.

(4) Mutasi dan Promosi

Mutasi merupakan salah satu bentuk pengembangan pegawai. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri. Tujuan dari mutasi ini adalah untuk dapat menempatkan pegawai yang tepat pada tempat yang tepat (*the right man on the right place*) baik dengan mutasi horizontal maupun vertikal (promosi).

Pada Tahun 2022, Pemda DIY telah melaksanakan mutasi rotasi jabatan kepada sebanyak 2.552 orang dan melaksanakan mutasi masuk Pemda DIY kepada sebanyak 36 orang. Pemda DIY juga telah melaksanakan Pengangkatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi,


Administrator, dan Pengawas kepada sebanyak 165 orang selama Tahun 2022.

(5) Manajemen Kinerja

Sesuai dengan amanat dari PermenpanRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, pengelolaan kinerja PNS di lingkungan Pemda DIY menggunakan instrumen pendukung capaian kinerja yaitu aplikasi *si-informan.jogjaprovo.go.id* yang merupakan aplikasi untuk mengisi Dialog Kinerja Individu (DIARINDU) dan Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Kinerja PNS). Dialog Kinerja Individu (DIARINDU) adalah dialog kinerja antara pimpinan dengan pejabat dan pegawai dibawahnya secara efektif dan berkala sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Kinerja PNS) adalah **rencana** kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

(6) Penggajian, Penghargaan dan Disiplin

Pemda DIY mendorong seluruh pegawai untuk berprestasi dan selalu berinovasi. Sebagai tindak lanjut terhadap hal tersebut Pemda DIY menerbitkan Pergub Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara. Penghargaan diberikan oleh Pemda DIY kepada ASN berprestasi, pengabdian, purnabakti, dan PPNS. Beberapa bentuk penghargaan yang diberikan antara lain: piagam, magang, pertukaran PNS, pendidikan dan pelatihan, serta kaji banding ke luar daerah/luar negeri. Pada Tahun 2022, Pemda DIY telah menyerahkan penghargaan pengabdian Satya Lancana Karya Satya kepada 491 pegawai.



Disiplin pegawai juga menjadi perhatian Pemda DIY. Pemda DIY menerapkan sanksi atau hukuman bagi pegawai yang melakukan pelanggaran hukum atau disiplin, baik ringan, sedang maupun berat sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada bulan September Tahun 2022, Pemda DIY menetapkan Pergub Nomor 62 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemda DIY. Pergub ini berisikan tentang kewajiban, larangan, disiplin jam kerja, hukuman kerja, serta izin perkawinan dan perceraian bagi PPPK di lingkungan Pemda DIY. Pada Tahun 2022, Pemda DIY telah menyelesaikan 15 kasus pelanggaran disiplin PNS.

(7) *Perlindungan dan Pelayanan*

Pemda DIY berupaya untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh ASN Pemda DIY diantaranya adalah dengan penyelenggaraan konseling baik konseling pribadi maupun konseling secara berkelompok. Kemudahan dalam konseling menjadi perhatian Pemda DIY sehingga pada Tahun 2021 Pemda DIY mengembangkan E-Konseling “eLing Kaesthi” yang merupakan inovasi layanan konseling. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses Pegawai Negeri Sipil Pemda DIY untuk memperoleh bantuan dan dukungan saat sedang menghadapi permasalahan terkait karir, personal dan keluarga. Layanan ini diharapkan menjadi kompas yang dapat membantu memberi arah pijakan PNS agar terus bergerak menuju kebaikan perilaku yang maju (*progressive behavior*). Hal inilah yang nantinya berguna untuk mengoptimalkan kinerja serta mendorong produktivitas PNS. Pada Tahun 2022, Pemda DIY telah menyelenggarakan konseling pribadi kepada

sebanyak 36 pegawai dan konseling kelompok kepada sebanyak 20 orang.

Perlindungan dan kesejahteraan bagi Tenaga Bantu yang sudah mengabdikan kepada Pemda DIY juga tidak kalah penting. Sesuai Pasal 25 dan Pasal 26 Pergub DIY Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu, bahwa jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kerja diberikan kepada Tenaga Bantu sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. Jaminan Hari Tua Tenaga Bantu selanjutnya diatur dalam Pergub DIY Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai. Sesuai dengan pasal 18 Pergub tersebut bahwa Tenaga Bantu memperoleh TPP yang dialokasikan dalam rekening Tabungan Sutera Emas Bank BPD DIY sebagai Jaminan Hari Tua.

(8) Sistem Informasi

Pemda DIY melalui BKD DIY mulai mengembangkan inovasi sistem informasi layanan kepegawaian ASN Memayu pada Tahun 2021. Hal ini merupakan upaya meningkatkan dan mendukung sistem percepatan berbasis elektronik. Perkembangan dan kebutuhan yang semakin banyak mengakibatkan banyak perubahan dan regulasi dalam proses administrasi yang diharapkan dapat lebih efisien, efektif dan akurat dalam pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. ASN Memayu merupakan aplikasi yang telah dibentuk sebagai hasil rebranding system informasi kepegawaian (SIMPEG) di lingkungan Pemda DIY. Rebranding merupakan upaya yang dilakukan sebagai perbaharuan dari SIMPEG yang diharap dapat mempermudah proses administrasi kepegawaian. ASN Memayu merupakan rumah dari berbagai aplikasi-aplikasi yang telah dibentuk

oleh Pemda DIY. Hal tersebut dapat lebih mempermudah pegawai dalam mengakses ataupun mengelola manajemen kepegawaian mulai dari: perencanaan pegawai, presensi, penilaian kinerja, pengelolaan jabatan fungsional, usulan kenaikan pangkat, pengembangan kompetensi, dan usulan pensiun.

Tabel 3.192. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sub Urusan Kepegawaian Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase kualitas manajemen SDM aparatur	%	90,95	85,00	88,89	104,58	85,00	104,58

Sumber: BKD DIY, 2023

Persentase kualitas manajemen SDM aparatur merupakan tolak ukur dari keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas manajemen aparatur secara efektif dan efisien dalam pelayanan publik secara profesional. Indikator ini diukur dengan meta indikator jumlah formasi jabatan yang terisi dibagi jumlah kebutuhan dibagi jumlah pegawai dikali 100% ditambah jumlah pemenuhan kriteria dalam analisis jabatan oleh kompetensi individu dibagi jumlah formasi yang sudah terisi dikali seratus persen dibagi dua.

Berdasarkan tabel di atas, persentase kualitas manajemen SDM aparatur Tahun 2022 lebih rendah dari Tahun 2021. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh ditiadakannya proses seleksi CPNS pada Tahun 2022 karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, pada akhir periode RPJMD 2017-2022 dapat melampaui target yaitu sebesar 104,58%.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Alokasi dan distribusi ASN secara kuantitas dan kualitas masih belum seimbang dan merata.
- (b) Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi ASN.
- (c) Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN.
- (d) Masih adanya mismatch penempatan PNS dalam jabatan.
- (e) Dinamika Perubahan Regulasi Kepegawaian yang sangat cepat.
- (f) Integritas dan Kinerja ASN dinilai belum optimal oleh masyarakat.

(2) *Solusi*

- (a) Melaksanakan redistribusi ASN dengan memperhatikan kualifikasi jabatan dan ketersediaan SDM.
- (b) Memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pengembangan kompetensi ASN yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.
- (c) Meningkatkan kesempatan bagi ASN dalam upaya pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang disediakan.
- (d) Rotasi dan mutasi PNS Pemda DIY secara periodik dan pengembangan kompetensi PNS bentuk pendidikan untuk penyesuaian penempatan PNS dalam jabatan.
- (e) Responsif/adaptif terhadap perubahan regulasi kepegawaian yang sangat cepat, menyusun regulasi daerah sebagai tindak lanjut dari dinamika perubahan regulasi kepegawaian pusat jika diperlukan.

(f) Penguatan budaya pemerintahan SATRIYA bagi ASN Pemda DIY.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Pada tahun 2022 Penunjang Urusan Sub Urusan Kepegawaian dilaksanakan melalui kegiatan dengan alokasi Rp31.713.477.434,00. Pengalokasian anggaran tersebut ada dalam 3 program, 13 kegiatan, dan 44 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp29.578.822.680,00 atau 93,27%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.193. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Kepegawaian Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	SEKRETARIAT DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1. Mengembangkan sistem <i>talent pool</i> untuk menuju merit system pengelolaan kepegawaian 2. Mengembangkan potensi aparatur agar lebih kompetensi dan memiliki daya bersaing 3. Perencanaan pegawai 4. Perbaikan sistem rekrutmen pegawai 5. Rightsizing 6. Pelaksanaan sistem seleksi terbuka 7. Profesionalisme PNS 8. Penguatan jabatan fungsional 9. Mewujudkan layanan kepegawaian secara less paper 10. Penerapan manajemen kinerja 11. Meningkatkan mutu layanan dengan pelayanan kepegawaian terpadu berdasarkan data kepegawaian yang terintegrasi dan berbasis kompetensi	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						
				Dukungan 100% terhadap capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	%	100	100			
				Dukungan 100% terhadap capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	%	100	100			
				Implementasi Budaya Pemerintahan DIY						
				User Interface aplikasi SIMPEG	paket	1	1			
				Update data kepegawaian	Perangkat Daerah	37	37			
				Validasi dokumen kepegawaian elektronik	Perangkat Daerah	37	37			
				Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur						
				Internalisasi pegawai baru yang memahami Keistimewaan DIY	orang	60	60			
				Evaluasi pasca diklat internalisasi keistimewaan Pegawai 1 tahun sebelum Batas Usia Pensiun yang terbekali Keistimewaan DIY	dokumen orang	1 330	1 330			
				2	KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1. Mengembangkan sistem talent pool untuk menuju merit system pengelolaan kepegawaian 2. Mengembangkan potensi aparatur agar lebih kompetensi dan memiliki daya bersaing 3. Perencanaan pegawai 4. Perbaikan sistem rekrutmen pegawai 5. Rightsizing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100							
Terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100							
Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			6. Pelaksanaan sistem seleksi terbuka	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
			7. Profesionalisme PNS				
			8. Penguatan jabatan fungsional	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
			9. Mewujudkan layanan kepegawaian secara less paper				
			10. Penerapan manajemen kinerja	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
			11. Meningkatkan mutu layanan dengan pelayanan kepegawaian terpadu berdasarkan data kepegawaian yang terintegrasi dan berbasis kompetensi				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: PK	Dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : Renstra	Dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renja	Dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renja Perubahan	Dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: ROPK	Dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: RKA-OPD	Dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: RKAP-OPD	Dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: DPPA-OPD	Dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: DPA-OPD	Dokumen	1	1
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Konsep/ Bahan LPPD	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Konsep/ Bahan LKPJ	Dokumen	1	1
				Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Dokumen LKJIP (nilai AKIP A)	Dokumen	1	1
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	Tahun	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)	Dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				Laporan Keuangan bulanan	Dokumen	12	12
				Laporan Keuangan Semester	Dokumen	2	2
				Laporan Keuangan Triwulanan	Dokumen	4	4
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tahun	1	1
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	jenis	24	24
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	jenis	7	7
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Tersedianya peralatan rumah tangga	jenis	19	19
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah lembar hasil penggandaan	Lembar	57897	57002
				Jumlah dokumen yang tercetak	jenis	17	17
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Tersedianya surat kabar/majalah	jenis	4	4
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Tersedianya makanan dan minuman rapat	Bulan	12	12
				Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi	Bulan	12	12
				Musyawaharah Daerah DPD KORPRI DIY	Kegiatan	1	1
				Dewan Pengurus Daerah KORPRI DIY yang dikukuhkan	Kegiatan	1	1
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jenis	2	2
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Arsip dinamis OPD yang dikelola	Bidang	6	6
				Bukti Pembayaran Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Bukti Pembayaran Perijinan Frekwensi Radio	Tahun	1	1
				Bukti Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Gedung kantor yang terpelihara kebersihannya	Bulan	12	12
				Keamanan Kantor yang Terjaga dengan Baik	Bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBM	Unit	1	1
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan	Bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai RKPBM	Unit	11	11
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	12
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jenis	12	12
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	2	2
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	1	1
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
				Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	%	85	86,77
				Persentase Pegawai sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting)	%	85	86,77
				Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	%	92.2	93.3
				Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian Terintegrasi, Valid, dan Update	%	92.2	93.3
				Persentase pemenuhan kompetensi pegawai	%	85	91
				Persentase pemenuhan kompetensi pegawai	%	85	91
				Persentase SK kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%	93	97.69
				Persentase SK kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%	93	97.69

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	nilai	80	88.71
				Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	nilai	80	88.71
				Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai	%	85	91
				Persentase kompetensi individu yang terpetakan	%	49.76	54.26
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			
				Proyeksi Kebutuhan Pegawai	Dokumen	1	1
				Formasi Pegawai Tahunan	Dokumen	1	1
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			
				Pegawai Rekrutmen Sesuai Formasi	Orang	3500	3943
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			
				Jumlah Pegawai Pensiun Akurat dan Tepat Waktu	Orang	700	704
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
				Aplikasi Layanan Kepegawaian	Aplikasi	4	4
				Laporan Data Monev Kepegawaian Pemda DIY/Kab/Kota	Dokumen	12	12
				Terlaksananya Pelatihan Teknis Aplikasi Kepegawaian	Pelatihan	2	2
				Mesin Presensi yang terpelihara	Mesin	150	150
				Pengelolaan Data Kepegawaian			
				Sertifikasi Layanan Mutu	Sertifikat	1	1
				Jumlah Pegawai yang Paham Dokumentasi Elektronik	Orang	240	240
				Terlaksananya Alih Media Kepegawaian Ke Arsip Elektronik	Paket	1	1
				Aplikasi Arsip dan Buku Tamu yang terpelihara dan dikembangkan	Aplikasi	2	1
				Kartu Identitas (Karis/Karsu dan Karpeg)	Kartu	300	521

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tata Kelola Dokumen Kepegawaian Perorangan dan Kolektif	SK	350	402
				Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Dokumen	1	1
				Pengelolaan Mutasi ASN			
				SK Mutasi dan Rotasi Jabatan Administrasi dan Fungsional	PNS	225	2552
				SK Pengangkatan Aparatur (mutasi) PNS	SK	40	36
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			
				Jumlah PNS yang Naik Pangkat Akurat dan Tepat Waktu	Orang	800	1386
				Pengelolaan Promosi ASN			
				SK Pengangkatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator (esl III) , Pengawas (esl IV dan V) dan Kepala Sekolah	SK	95	165
				Pengelolaan Assessment Center			
				Aparatur yang mengikuti bimbingan konseling pribadi	Orang	20	36
				Aparatur yang mengikuti bimbingan konseling Kelompok	Orang	20	20
				Kabupaten/Kota DIY yang terkoordinir dalam kerja sama pengukuran	Kabupaten/Kota	5	5
				Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi luar DIY	Orang	135	135
				Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi dalam DIY	Orang	600	600
				Hasil pengembangan kemitraan	Dokumen	8	17
				Kesesuaian kompetensi SDM dalam jabatan profil potensi dalam DIY	Orang	65	53
				SDM Assessor dan Non Assessor yang berkompeten dengan diklat, pelatihan dan bimtek selama 1 tahun	Orang	16	34

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	85.6
				Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			
				Ijin Dinas Luar Negeri	Surat	5	24
				Laporan Rencana Pengembangan Kompetensi (AKD)	Dokumen	1	1
				ASN Peserta Ujian Dinas	orang	394	387
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			
				ASN yang mendapat Beasiswa Ijin Belajar S1	Orang	98	110
				Ijin Belajar Mandiri	Orang	50	137
				ASN yang mendapat Beasiswa Tugas Belajar dan Ijin Belajar S2	Orang	51	61
				ASN yang mendapat Beasiswa Ijin Belajar S3	Orang	2	13
				Tunjangan buku dan sarpras Ikatan Dinas D4/S1	Orang	96	74
				Koordinasi dan Kerja sama Pelaksanaan Diklat			
				ASN yang mengikuti Diklat T/F	Orang	370	1148
				ASN yang mengikuti Pelatihan PKN	Orang	6	6
				ASN yang mengikuti PKP	Orang	40	40
				ASN yang mengikuti PKA	Orang	20	20
				Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN			
				ASN yang paham akan proses Uji/Sertifikasi Kompetensi	Orang	30	30
				ASN yang terfasilitasi Uji/Sertifikasi Kompetensi	Orang	30	73
				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			
				SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional	PNS	115	564
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
				Jumlah ASN yang Paham tentang Penilaian TPP	PNS	215	215
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai			
				Pengiriman Kontingen MTQ DIY	Cabang	4	4
				ASN yang mengikuti Sosialisasi BP Tapera	Orang	87	87
				ASN yang mengikuti sosialisasi penghargaan bagi Pegawai Beprestasi	Orang	87	87

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai			
				ASN yang Terfasilitasi JKK/JKM	Orang	5	0
				Pegawai yang Menerima Satya Lancana Karyasatya	Orang	450	491
				Pembinaan Disiplin ASN			
				Penetapan hukum pegawai dan pejabat negara	Surat	125	495
				PNS yang paham pengisian LHKPN	Orang	125	125
				PNS yang Paham Teknis Pelaksanaan Peraturan Kepegawain	Orang	40	40
				PNS yang paham tentang peraturan kepegawaian	Orang	40	40
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			
				Terselesaikannya kasus pelanggaran disiplin PNS	Kasus	14	15

2) *Pendidikan dan Pelatihan*

a) *Kondisi Umum*

Dinamika kebijakan penyederhanaan birokrasi menuntut peningkatan kinerja dan kompetensi Aparatur Sipil Negara secara signifikan. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja yang lebih *agile* (lincah) dan dinamis yang didukung dengan pengelolaan kinerja aparatur sipil negara yang optimal. Sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Negara telah mengamanatkan pentingnya Pengembangan Kompetensi ASN. Pengembangan kompetensi ini salah satunya melalui pelatihan. Hal paling utama dalam pelatihan adalah output program pengembangan kompetensi mampu menghasilkan perubahan sikap dan perilaku, selain peningkatan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN, agar menjadi ASN yang profesional dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan ketentuan Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diubah terakhir dengan Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2022 dan Pergub DIY Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas dalam urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan fungsi antara lain perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan

kompetensi dalam bentuk pelatihan, pengembangan kompetensi melalui pelatihan teknis, fungsional, manajerial dan sosiokultural bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemda DIY pada tahun anggaran 2022, melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebanyak 40 angkatan yang terdiri dari Diklat Penjenjangan (Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 17 angkatan, Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II sebanyak 1 angkatan, Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 2 angkatan, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 4 angkatan) dan Diklat Teknis sebanyak 10 angkatan dan Diklat Fungsional sebanyak 6 angkatan. Target dan realisasi kinerja urusan pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.194. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai Akreditasi Badan Diklat	Skor/angka	91	93	93	100	93	100

Sumber: Bandiklat DIY, 2023

Berdasarkan Surat Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6826/K.1/PDP.09 Tanggal 16 November 2022, ketercapaian skor akreditasi Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sebesar 93 dari target skor 93 atau capaian 100%. Capaian nilai akreditasi pada tahun 2022 meningkat dari skor sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 91. Persentase capaian dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah sebesar 100% dari target skor 93 pada tahun 2022.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

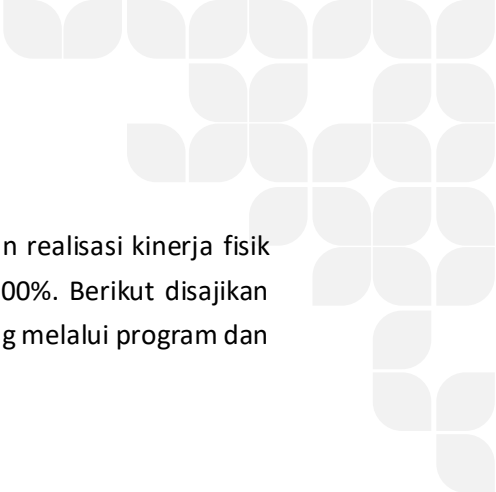
Pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan secara berjenjang. Tujuan penjenjangan selain untuk meningkatkan pengetahuan dan promosi jabatan juga punya tujuan lain yaitu para ASN mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan yang selalu berkembang.

(2) Solusi

Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY telah melaksanakan pelatihan berjenjang dan pengembangan kompetensi SDM tenaga kediklatan.

c) Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022

Jumlah anggaran guna pelaksanaan urusan penunjang Pendidikan dan Pelatihan melalui dana APBD tahun 2022 berjumlah Rp29.468.038.717,00 yang terdiri dari belanja operasi sejumlah Rp28.467.472.117,00 dan belanja modal sejumlah Rp1.000.566.600,00. Jumlah program yang didanai melalui APBD yang dilaksanakan meliputi 3 program, 11 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Capaian kinerja anggaran belanja untuk tahun 2022 sejumlah 84,99%. Dari total anggaran sejumlah Rp29.468.038.717,00 terserap Rp25.046.328.319,00. Rendahnya serapan anggaran tersebut dipengaruhi adanya kebijakan baru sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan jo Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 terkait adanya metode pelatihan dari klasikal menjadi *blended learning* sehingga



terdapat efisiensi anggaran. Sedangkan realisasi kinerja fisik kegiatan untuk tahun 2022 sebesar 100%. Berikut disajikan tabel jumlah anggaran belanja langsung melalui program dan kegiatan tahun 2022.

Tabel 3.195. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKRETARIAT DAERAH	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas 2. Penyusunan kurikulum diklat dan pelaksanaan penelitian kediklatan 3. Mengembangkan jejaring kediklatan antar daerah/lembaga	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
				Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	Persen	95	100
				Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	Persen	95	100
				Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur			
				Review Kurikulum Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan	dokumen	1	1
				Jumlah peserta Diklat tata naskah bahasa jawa	orang	30	30
				Jumlah peserta diklat ideologi, wawasan kebangsaan dan keistimewaan (IWAK)	orang	60	60
				Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Diklat Internalisasi Keistimewaan	dokumen	1	1
				Review Kurikulum Internalisasi Keistimewaan	dokumen	1	1
				Jumlah ASN Pemda DIY mengikuti Internalisasi Keistimewaan	orang	120	120
				Jumlah peserta yang mengikuti TOT Internalisasi Keistimewaan	orang	60	60
2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			2. Penyusunan kurikulum diklat dan pelaksanaan penelitian kediklatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100
			3. Mengembangkan jejaring kediklatan antar daerah/lembaga	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Persen	100	100
				Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100	100
				Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100	100
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: ROPK Tahun Anggaran 2022	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renja 2023	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Review Renstra 2017-2022	dokumen laporan	1	1
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: PK Tahun Anggaran 2022	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renja Perubahan 2022	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : DPPA-OPD Tahun Anggaran 2022	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : RKA-OPD Tahun Anggaran 2023	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : RKAP-OPD Perubahan Tahun Anggaran 2022	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : DPA Tahun Anggaran 2023	dokumen	1	1
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Dokumen LKjIP Tahun 2021	Nilai A AKIP (80)	1	1
				Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Konsep/Bahan LPPD Tahun 2021	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Konsep/Bahan LKPJ Tahun 2021	Dokumen	1	1
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	tahun	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Laporan keuangan akhir tahun sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	dokumen laporan	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran OPD			
				Laporan Keuangan Semester	dokumen	2	2
				Laporan Keuangan bulanan	dokumen laporan	12	12
				Laporan Keuangan Triwulanan	dokumen	4	4
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	tahun	1	1
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
				Terfasilitasinya penilaian AK bagi JFT Widyaiswara	Tahun	1	1
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
				Kompetensi JFT widyaiswara dan fungsional umum yang meningkat	Tahun	1	1
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	jenis	19	19
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	jenis	29	29
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Tersedianya peralatan rumah tangga	jenis	19	19

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Jumlah lembar hasil penggandaan	lembar	67816	67564
				Jumlah dokumen yang tercetak	jenis	10	10
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi	Bulan	12	12
				Tersedianya makanan dan minuman rapat	Bulan	12	12
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD			
				Terpeliharanya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada OPD	Tahun	1	1
				Pengadaan Mebel			
				Tersedianya Mebeluer sesuai RKBMD	buah	41	41
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Peralatan kantor sesuai RKBMD	jenis	22	22
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Bukti Pembayaran Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Bukti Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Kebersihan Kantor yang Terjaga dengan Baik	bulan	12	12
				Keamanan Kantor yang Terjaga dengan Baik	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKPBMMD	unit	6	6
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2 dan roda 4	unit	13	13
				Bukti Pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas/operasional Roda 4	unit	1	1
				Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara sesuai RKPBMMD	unit	7	7
				Pemeliharaan Mebel			
				Terpeliharanya Mebeleur sesuai RKPBMMD	Jenis	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya : gedung kantor		1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan jenis bangunan lainnya		12	12
3	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			2. Penyusunan kurikulum diklat dan pelaksanaan penelitian kediklatan	Presentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	Persen	20	99.35
			3. Mengembangkan jejaring kediklatan antar daerah/lembaga	Presentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	Persen	20	99.38
				Presentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerja sama	Persen	90	100
				Presentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerja sama	Persen	90	102.76
				Presentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	Persen	20	75.45
				Presentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan	Persen	20	74.89
				Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	skor	82	82.42
				Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat	skor	82	82.42
				Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
				Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan (Kurikulum dan Modul)	kurikulum/modul	3	3

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
				Diklat Pengelolaan Barang sebanyak 30 orang	angkatan	1	1
				Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah sebanyak 90 orang	angkatan	3	3
				Diklat Administrasi Perkantoran sebanyak 60 orang	angkatan	2	2
				Diklat Pengkaderan Jabatan Administrator sebanyak 30 orang	angkatan	1	1
				Diklat Administrasi Kepegawain sebanyak 30 orang	angkatan	1	1
				Diklat Penyuluh Anti Korupsi sebanyak 40 orang	angkatan	1	1
				Diklat Kearsipan sebanyak 30 orang	angkatan	1	1
				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional			
				Sertifikat Akreditasi	sertifikat	1	1
				Laporan Penjaminan Mutu Pelatihan	dokumen	1	1
				Laporan Evaluasi Pasca Pelatihan	dokumen	5	5
				Laporan Audit Eksternal ISO 9001:2015	dokumen	1	1
				Sertifikat ISO 9001:2015	sertifikat	1	1
				Hasil Kajian	dokumen	1	1
				Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar			
				Bahan Pustaka yang terpelihara	buku	12730	12730
				Aplikasi SIM Perpustakaan yang dikembangkan	paket	1	1
				Buletin Diklat	edisi	4	4
				Pelaksanaan Kerja sama Antar Lembaga			
				Mentor Yang Memahami Peran dan Tugas Dalam Memberikan Pendampingan Peserta Diklat Kepemimpinan/Latsar	angkatan	6	6
				Hasil Rapat Kerja Monitoring Diklat Kemitraan Tk. Regional	rekomendasi	1	1
				Hasil Kesepakatan Diklat Kemitraan	berita acara	6	6
				Laporan Monitoring Diklat Kemitraan	laporan	1	1
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 681 orang	angkatan	17	17
				Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 80 orang	angkatan	2	2
				Diklat Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 180 orang	angkatan	6	6
				Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 160 orang	angkatan	4	4
				Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II sebanyak 60 orang	angkatan	1	1


e. Sekretariat Daerah

1) Tata Pemerintahan

a) Kondisi Umum

Berdasarkan amanat Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 15 UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2021 telah disampaikan kepada Presiden melalui Kemendagri dengan Surat Gubernur DIY Nomor 120/3889 Tanggal 21 Maret 2022 Perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021. Selain itu juga telah disusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) DIY Tahun 2021 dan telah dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak maupun media *online*. Berkaitan dengan hal tersebut juga telah disampaikan Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Surat Gubernur DIY kepada 13 Kepala OPD pengampu urusan di Pemda DIY yang memperoleh skor sangat rendah agar segera melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk peningkatan kinerja urusan pemerintahan yang diampunya.

Menindaklanjuti PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan terbitnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 yang mencabut Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM maupun Peraturan Teknis SPM dari Kementerian Teknis/Sektoral, Pemda DIY juga telah melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi,



pendampingan, dan pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta Bidang Sosial. Laporan SPM Tahun 2021 telah disampaikan kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah dengan Surat Gubernur DIY Nomor 120/00889 Tanggal 17 Maret 2022 Perihal Penyampaian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021. Pada Tahun 2022 Pemda DIY juga telah melaksanakan pendataan SPM, melaksanakan pelaporan SPM melalui Aplikasi SPM Bangda secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Pergub Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal DIY Tahun 2023-2027.

Koordinasi, monitoring dan evaluasi juga dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah khususnya terkait tindak lanjut pengalihan Sarana dan Prasarana serta Dokumen yang berkaitan dengan kewenangan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang telah difasilitasi penyelesaiannya yaitu: 1) Proses Pengalihan Aset Jalan dari DIY kepada Kementerian PUPR RI; 2) Proses Pengalihan Aset Jalan dari DIY kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul; 3) Pengalihan Aset Bangunan Kolam Renang dan Taman di SMA N 1 Samigaluh; 4) Permasalahan Aset TMP Kusuma Bangsa Bantul; 5) Permasalahan Pengalihan P3D Urusan Kelautan dan Perikanan; serta 6) Data Pengalihan P3D Pelabuhan Pengumpan Regional.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemda DIY telah menerbitkan 1 (satu) Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengalihan Aset, 2 (dua) Berita Acara Verifikasi Aset dan 5 (lima) rekomendasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat. Diharapkan dengan terselesaikannya permasalahan terkait pengalihan aset yang berkaitan dengan kewenangan dapat terwujud tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana Pemda DIY dan peningkatan/optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemda DIY.

Selanjutnya Pada tahun 2022, di DIY terdapat dua kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya, yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo serta Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Masa Jabatan 2017-2022 berakhir pada tanggal 22 Mei 2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016, untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023, maka diangkat Penjabat Kepala Daerah sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat di Kulon Progo dan Yogyakarta. Penjabat Bupati Kulon Progo (Drs. Tri Saktiyana, M.Si.) dan Penjabat Walikota Yogyakarta (Sumadi, S.H., M.H.) dilantik pada 22 Mei 2022 berdasar pada:

- (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-1176 Tahun 2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-1177 Tahun 2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada pasal 164 ayat (1), Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibukota Provinsi. Menindaklanjuti UU tersebut, Pemda DIY melaksanakan agenda Pelantikan Penjabat Bupati Kulon Progo dan Penjabat Walikota Yogyakarta oleh Gubernur yang dilaksanakan di Bangsal Kepatihan Yogyakarta pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022.




Gambar 3.54. Pelantikan Penjabat Bupati Kulon Progo dan Penjabat Walikota Yogyakarta pada 22 Mei 2022
Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2023

Pada tahun 2022 juga ada aktivitas fasilitasi atas Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk anggota legislatif. Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pada pasal 140 ayat (3), dan pasal 144 ayat (4) disebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan peresmian pemberhentian dan penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi setelah mendapat usulan dari Pimpinan DPRD. Pada tahun 2022 Pemda DIY telah memfasilitasi usulan PAW Anggota DPRD DIY atas nama Drs. Sudarto dari PDI-Perjuangan karena meninggal dunia, melalui Surat Gubernur DIY Nomor 177/15485 tanggal 6 September 2022 perihal Permohonan Peresmian dan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD DIY. PAW Anggota DPRD DIY tersebut telah diresmikan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.34-5788 tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD DIY (Drs. Sudarto) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.34-5789 tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD DIY (Reda Refitra Safitrianto).

Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (4) dan 195 ayat (7) UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD paling lama 14 hari sejak usul pemberhentian dan pengangkatan pengganti anggota DPRD antarwaktu kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemda DIY telah meresmikan PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota antara lain:

- (1) Anggota DPRD Kota Yogyakarta atas nama Augustunur, S.H., S.I.P dari Partai Golongan Karya (meninggal dunia) sebagai pengganti Nur Anita Owiwanti Putri MG. S.P. diresmikan pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktunya melalui Keputusan Gubernur



DIY Nomor 237/KEP/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Yogyakarta.

- (2) Anggota DPRD Kabupaten Bantul dari Partai PDI-Perjuangan atas nama Timbul Harjana (meninggal dunia) diresmikan pemberhentiannya melalui Keputusan Gubernur Nomor 370/KEP/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- (3) Sebagai pengganti antarwaktu Timbul Harjana yaitu atas nama Purwana diresmikan pengangkatannya sebagai pengganti antarwaktu melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 371/KEP/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Selanjutnya, berdasar ketentuan Pasal 434 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu salah satu peran yang dilaksanakan pemerintah daerah yaitu melaksanakan sosialisasi terkait regulasi dan seluk-beluk Pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, tahun 2022 Pemda DIY mulai mensosialisasikan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang sudah berjalan dengan sasaran para Lurah, Pamong, Tokoh Masyarakat, serta anggota lembaga kemasyarakatan di tingkat kalurahan/kelurahan.

Dalam rangka mendukung upaya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa, dilaksanakan kegiatan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pemerintahan kalurahan terkait beberapa hal, yakni: peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kalurahan dalam penyusunan dokumen administrasi perencanaan responsif,

pembinaan aparatur kecamatan sebagai pembina teknis pemerintahan desa serta, koordinasi progress penerapan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan di DIY dan pemantauan dana desa. di samping itu Pemda DIY juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan pada kelembagaan dan urusan kebudayaan.

Tabel 3.196. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	%	121,5	100	388,23	388,23	100	388,23

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2023

Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan memiliki indikator kinerja sasaran “Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan”. Dengan formulasi perhitungan jumlah dinamika penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan tahun berjalan dibagi jumlah dinamika penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, dan kerja sama yang sudah teridentifikasi dikali 100%.

Realisasi yang cukup besar disebabkan adanya respon dan fasilitasi berbagai bentuk kerja sama baik pemerintah maupun swasta.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Pendataan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dilaksanakan belum dapat menghasilkan data yang valid dan lengkap khususnya terkait dengan data *By Name By Address* (BNBA) seperti yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 karena data kependudukan untuk kepentingan SPM tidak dapat diakses dengan alasan keamanan data informasi administrasi kependudukan.
- (b) Sulitnya mencari kesepakatan dengan kabupaten di Jawa Tengah yang berbatasan dengan DIY tentang garis batas wilayah.
- (c) Pembangunan Pilar Batas Antara yang akan dibangun di garis batas daerah perbatasan DIY-Jateng belum diatur dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017.
- (d) Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sehingga belum bisa diketahui efektivitas kerja sama yang dilaksanakan.

(2) Solusi

- (a) Meningkatkan koordinasi, Pemda DIY telah bersurat secara resmi kepada Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan Pemda Dalam Penerapan SPM di Daerah) dengan Surat Nomor 120/18454 Tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Permasalahan Pendataan SPM.

- (b) DIY sudah mempersiapkan segala kelengkapan untuk dapat mencapai kesepakatan dengan Jawa Tengah.
- (c) Perlu ada kejelasan aturan dari Pemerintah Pusat.
- (d) Pemerintah daerah melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sehingga kerja sama yang dilakukan akan memberikan kemanfaatan.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Tata Pemerintahan yaitu sebesar Rp2.908.222.000,00 dan pada tahapan perubahan anggaran bertambah menjadi Rp7.832.914.756,00 atau bertambah sebesar Rp4.924.692.756,00. Penambahan anggaran yang cukup besar tersebut karena mempersiapkan Pemilu Serentak 2024 dan mendukung visi misi pada sisi birokrasi kalurahan. Pengalokasian anggaran tersebut ada pada 10 program dengan 21 kegiatan dan 40 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp6.495.558.248,00 (82,93%), dengan pencapaian fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp1.337.356.5058,00 atau 17,07% antara lain dari sisa pengadaan barang dan jasa, efisiensi belanja perjalanan dinas, dan efisiensi honor narasumber.

Tabel 3.197. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Tata Pemerintahan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	BIRO TATA PEMERINTAHAN	1. Harmonisasi hubungan antar pemerintah dalam penyelesaian permasalahan perbatasan antar pemerintah daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
				Usulan Revisi Permendagri Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jateng pada segmen perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang	dok(srt gub&lam pta)	1	1
				Dokumentasi video hasil kegiatan penatausahaan	Video	2	2
			2. Meningkatkan respon terhadap setiap perubahan kebijakan dalam proses tata kelola pemerintahan	Usulan Revisi Permendagri Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jateng pada segmen perbatasan Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Wonogiri	dok(srt gub&lam pta)	1	1
				Usulan Revisi Permendagri Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jateng pada segmen perbatasan Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sukoharjo	dok(srt gub&lam pta)	1	1
				Draft Rapergub Pengkoordinasian dan Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta	Dokumen Rapergub	1	1
				Pengembangan Sistem Informasi Database Administrasi Kewilayahan	aplikasi	1	1
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanian			
				Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa: - Laptop	Unit	1	1
				Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa: - Printer	Unit	1	1
				Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa: - Software arc gis	Unit	1	1
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	BIRO TATA PEMERINTAHAN	Meningkatkan respon terhadap setiap perubahan kebijakan dalam proses tata kelola pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	dokumen	2	2

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan			
				Papan Penanda Keistimewaan	kalurahan	301	301
				Kajian bangunan standar balai padukuhan	dokumen	1	1
				Pemasangan Qr code	kalurahan	90	90
				Kajian bangunan standar kantor kalurahan	dokumen	1	1
3	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO TATA PEMERINTAHAN	Meningkatkan respon terhadap setiap perubahan kebijakan dalam proses tata kelola pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Tersusunnya Renja Perubahan Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022	dokumen	1	1
				Tersusunnya PK Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022	dokumen	1	1
				Tersusunnya Renstra Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022-2027	dokumen	1	1
				Tersusunnya Renja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023	dokumen	1	1
				Tersusunnya ROPK Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
				Tersusunnya DPA Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023	dokumen	1	1
				Tersusunnya RKAP Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022	dokumen	1	1
				Tersusunnya DPPA-OPD Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022	dokumen	1	6
				Tersusunnya RKA Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023	dokumen	1	1
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Konsep/Bahan LPPD	dokumen	1	1
				Dokumen LKj IP	poin	80	86
				Konsep/Bahan LKPJ	dokumen	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Biro Tata Pemerintahan	tahun	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				Laporan Keuangan Semester	laporan	2	2
				Laporan Prognosis	laporan	1	1
				Laporan Keuangan Bulanan	laporan	12	12
				Laporan Keuangan Triwulanan	laporan	4	4
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	tahun	1	1
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
				Sosialisasi program adminduk melalui media cetak dan elektronik	Jenis	4	4
				Peningkatan pemahaman kebijakan adminduk bagi masyarakat dan atau petugas adminduk	Orang	120	120
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
				Peningkatan kapasitas aparatur adminduk di Kabupaten/Kota	Orang	90	90
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	jenis	8	8
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Tabung Pemadam Kebakaran	tabung	11	11
				Alat Tulis Kantor	jenis	13	13
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	jenis	15	15
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Jumlah lembar hasil cetak dan penggandaan	lembar	50000	107120
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Penyelesaian permasalahan adminduk di daerah	Laporan	1	1
				Terseleenggaranya konsultasi dan koordinasi	bulan	12	12
				Tersedianya makanan dan minuman rapat	bulan	12	12
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terpeliharanya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Biro Tata Pemerintahan	tahun	1	1
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	jenis	1	1
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Jasa Surat-menyurat	jenis	3	3
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan	unit	12	12
				Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBM	unit	12	12
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Terpeliharanya Peralatan dan mesin kantor.	bulan	12	12
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Laibnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum			
				Laporan hasil Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024	Laporan	1	1
				Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD pergantian antar waktu	usulan SK	3	4
				Pengusulan dan Pelantikan Penjabat Kepala Daerah (Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta)	dokumen	1	1
				Fasilitasi Penataan Wilayah			
				Sosialisasi Perda No 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan	kapanewon	18	18
				Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY	dokumen	1	1
				Pilar batas daerah antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo yang terpasang	pilar	27	27

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Laporan Penyelesaian Pembangunan di wilayah perbatasan	laporan	1	1
				Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah	dokumen	1	1
				Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan			
				Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	dokumen	1	1
				Laporan Penyelesaian Permasalahan Urusan Pemerintahan	dokumen	1	1
				Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM	dokumen	1	1
				Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan			
				Laporan Hasil Pemantauan Pengelolaan Dana Desa di DIY	laporan	1	1
				Laporan Desa yang terdampingi dalam penyusunan dokumen administrasi perencanaan responsif	laporan	1	1
				Laporan Kecamatan dengan aparatur yang terbina sebagai pembina teknis pemerintah desa (PTPD)	laporan	1	1
				Laporan Hasil Sosialisasi Penguatan Kapasitas SDM Penyelenggara Pemerintahan Kapanewon dan Kemantren dalam Tahapan Pemilu	Laporan	1	1
				Fasilitasi Kerja sama antar Pemerintah			
				Kesepakatan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU	SKB	2	2
				Naskah Perjanjian Kerja sama Dalam Negeri	Naskah Perjanjian	5	5
			Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam setiap tingkatan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
				Pelaksanaan Kelembagaan Asli			
				Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kalurahan dan Kapanewon/Kemantren	laporan	1	1
				Rancangan Rencana Strategis Reformasi Birokrasi Terbatas Kalurahan	dokumen	1	1
				Kajian Monitoring Pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/ Sub Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sosialisasi kelembagaan asli daerah	kali	60	60
				Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	aplikasi	1	1
				Kajian Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	dokumen	1	1
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA CARA	BIRO TATA PEMERINTAHAN Setda DIY	Meningkatkan respon terhadap setiap perubahan kebijakan dalam proses tata kelola pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY			
				Laporan pemberhentian, penetapan dan pengesahan serta pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	dokumen	1	1

2) *Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum*

a) *Kondisi Umum*

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut, Pemerintah Daerah melaksanakan pembentukan produk hukum daerah, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain.

Pemda DIY dalam mendukung pembangunan daerah diwujudkan melalui kontribusi dalam pencapaian visi “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. Kontribusi tersebut tercermin salah satu tujuan yaitu “Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah” dengan sasaran kinerja “Meningkatnya kualitas pelayanan bantuan hukum. Dimana dalam mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Pemda DIY berdasarkan Pergub DIY Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang peraturan perundang-undangan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota untuk meningkatkan persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Target dan realiasi kinerja Penunjang Urusan Fasilitas Perundang-undangan dan Hukum pada Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.198. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perundang-undangan dan Hukum Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan Informasi produk hukum yang baik	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2023

Pada kegiatan Fasilitas Peraturan Perundang-undangan terdapat pelaksanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Istimewa, Rancangan Peraturan Gubernur, Rancangan Keputusan Gubernur, dan Rancangan Instruksi Gubernur. Peraturan perundang-undangan dan produk hukum tersebut dibentuk secara implementatif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan

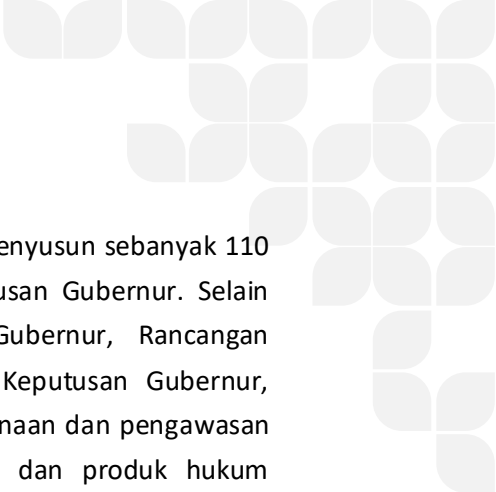
umum, serta mendukung percepatan reformasi birokrasi perlu pengaturan tahapan proses penyusunan produk hukum sesuai urutan masuk dan skala prioritas perencanaan hukum.

Berdasarkan Keputusan DPRD DIY Nomor 68/K/DPRD/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 terdapat 10 (sepuluh) rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Prioritas Tahun 2022 yang menjadi target pembahasan diluar rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Kumulatif Terbuka Tahun 2022.

Tabel 3.199. Kegiatan pembahasan Raperda menjadi Perda oleh Pemda DIY pada Tahun 2022

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
Pembahasan Raperda	10 Rancangan Peraturan Daerah	Raperda tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Raperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Raperdais tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Raperda tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Raperda tentang Kesehatan Jiwa Raperda tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Raperda tentang Pengarusutamaan Gender Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan	Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan belum ditetapkan pasca telah terbitnya hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri RI

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2023



Pada tahun 2022, Pemda DIY telah menyusun sebanyak 110 Peraturan Gubernur dan 288 Keputusan Gubernur. Selain menyusun Rancangan Peraturan Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan Keputusan Gubernur, Pemda DIY juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap rancangan produk hukum dan produk hukum Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan memberikan konsultasi, fasilitasi dan evaluasi pada produk hukum Kabupaten/Kota. Pada tahun 2022, target kinerja yang ditetapkan untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebanyak 55 produk hukum dengan capaian realisasi 100%.

Dalam rangka tindaklanjut kewenangan penyebarluasan informasi serta produk hukum daerah, Pemda DIY melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Produk Hukum dan Digitalisasi Produk Hukum sebagai berikut: 1) Pelaksanaan sosialisasi Perda Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten dan Perda DIY No 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di lima kabupaten/kota se-DIY. 2) Mengunggah 352 produk hukum ke dalam website JDIH berupa 13 Peraturan Daerah, 110 Peraturan Gubernur, dan 414 Keputusan Gubernur dan 3) Penyampaian Lembaran Daerah dan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 2.800 buku ke Kabupaten/Kota sampai ke tingkat Pedukuhan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemda DIY tidak luput dari konsekuensi adanya keberatan dari masyarakat yang memungkinkan diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Negeri. Demikian juga tidak menutup kemungkinan Pemda

DIY menjadi penggugat apabila kepentingannya telah dirugikan pihak lain. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 65 menyebutkan bahwa Gubernur mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut diatur dalam Pergub DIY No. 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro Hukum Setda DIY mempunyai fungsi salah satunya penyiapan bantuan hukum dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum dan memberikan pelayanan hukum bagi aparatur.

Pemda DIY melaksanakan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Hukum dengan realisasi penyelesaian permasalahan hukum litigasi sebanyak 4 (empat) kasus sebagai berikut:

Tabel 3.200. Rekapitulasi Jumlah Penyelesaian Perkara Pemda DIY TA 2022


	Tk. I	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
Perdata	3	-	-	1
Tata Usaha Negara	-	-	-	-

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2023

- (1) Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Register Perkara Nomor 250/Pdt.G/2022/PN Smn antara Emy Rahmawati Hapriyani sebagai Penggugat melawan Pemerintah RI Cq. Menteri dalam Negeri Cq. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Bupati Sleman Cq. Panewu Depok Cq. Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman sebagai Tergugat, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Turut Tergugat I, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Turut Tergugat II.

Objek gugatan tanah tegal Persil 57/d.II seluas kurang lebih 4000 m², dan tanah tegal Persil 58/d.II seluas kurang lebih 3620 m², letter C No.576 Kalurahan Caturtunggal. Gugatan ini kemudian dicabut oleh Penggugat.

- (2) Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Register Perkara Nomor 757 PK/Pdt/2022 antara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat melawan Sulcha Prihasti, SE. MM sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat. Perkara ini telah diputus pada tahun 2022. Terhadap putusan Peninjauan Kembali tersebut, PT. BPD DIY mengajukan permohonan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya. Gubernur dahulu Turut Tergugat telah menyampaikan kontra memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- (3) Perkara Perdata dengan Register Perkara Nomor 215/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 26 Agustus 2022 antara Ponirah sebagai Penggugat dan RS Jiwa Grhasia sebagai Tergugat. Objek gugatan adalah hak untuk mengakses informasi dari bekas pasien bernama Alm. Lasiman Budi Utomo. Gugatan ini kemudian dicabut oleh Penggugat.
- (4) Perkara Perdata Gugatan Keberatan Ganti Kerugian Tanah dengan Register Perkara Nomor: 255/Pdt.G/2022/PN. Smn antara Rakhmat Ajito sebagai Pemohon melawan Negara atau Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat II, KJPP Toto Suharto dan



Rekan (TnR) *Business & Property Valuer* cq Cabang Semarang sebagai Tergugat III, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Turut Termohon. Objek gugatan adalah penetapan *appraisal* atas tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri/tertanam di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik: SHM No. 2655/Desa Bokoharjo. Perkara ini telah diputus pada 14 November 2022.

- (5) Selain itu dilakukan pula fasilitasi terhadap kasus tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal, yaitu terkait Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tingkat banding dengan Register Perkara Nomor 12/PDT/2022/PT YYK yang diajukan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Pemerintah Kabupaten Sleman Cq. Panewu/Kepala Wilayah Kapanewon Depok Cq. Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pembanding dahulu Tergugat III melawan Gunadi, dkk sebagai Terbanding dahulu Penggugat. Perkara ini telah putus di tingkat banding pada tanggal 22 Februari 2022.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan aksi hak asasi manusia sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang tercermin melalui penyampaian laporan capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) kepada Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) setiap 4 (empat) bulan sekali. Telah pula dilaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait maupun Kantor Wilayah


Kementerian Hukum dan HAM dalam penyusunan laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Selain itu juga dilakukan pembinaan Kabupaten/Kota Peduli HAM sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021, dalam hal terdapat 60% (enam puluh persen) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang memperoleh penghargaan, Menteri dapat memberikan penghargaan kepada gubernur sebagai pembina kabupaten/kota peduli HAM. Pada acara Puncak Peringatan Hari HAM ke-74, Gubernur DIY memperoleh penghargaan sebagai Pembina Daerah Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Penghargaan diberikan atas upaya Gubernur membina dan membangun seluruh kabupaten/kota di DIY dalam meraih predikat kabupaten/kota Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2022.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

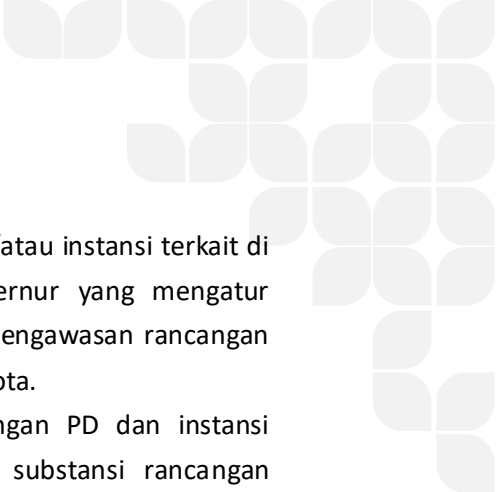
- (a) Penyampaian permohonan fasilitasi rancangan perda oleh Pemerintah Kabupaten/Kota masih belum sesuai tata kala waktu yang ditentukan dalam program pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota.
- (b) Belum optimalnya masukan dalam rangka fasilitasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.

- 
- (c) Substansi materi rancangan produk hukum daerah yang disampaikan oleh PD terkait belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum didukung dengan hasil kajian teknis.
 - (d) Penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi di luar wilayah DIY belum terakomodasi sehingga sulit untuk menghadiri persidangan di luar wilayah DIY.
 - (e) Ketercapaian penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi dipengaruhi oleh kondisi eksternal.
 - (f) Keterbatasan dalam mengakses data dan bahan dalam proses penyelesaian permasalahan hukum.
 - (g) Belum semua personil mendapatkan pengembangan kompetensi dalam penyelesaian permasalahan secara litigasi dan nonlitigasi.
 - (h) Penyampaian data dukung pelaporan oleh perangkat daerah terkait masih belum memenuhi standar format pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).
 - (i) Tata Kelola Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih sektoral.
 - (j) Belum optimalnya penerapan keamanan penyelenggaraan Teknologi Informasi dan komunikasi.

(2) Solusi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas (**point a**).

- (a) Menyampaikan surat klarifikasi kepada kabupaten/kota terkait tata kala waktu penyampaian permohonan fasilitasi rancangan peraturan daerah.

- 
- (b) Mengatur pelibatan PD dan/atau instansi terkait di DIY dalam Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan rancangan produk hukum kabupaten/kota.
 - (c) Optimalisasi koordinasi dengan PD dan instansi terkait dalam penyusunan substansi rancangan produk hukum daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (d) Optimalisasi koordinasi dan sinergi dengan para pihak yang terkait dalam proses penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi.
 - (e) Optimalisasi penyelesaian permasalahan hukum dengan meminimalisir pengaruh eksternal.
 - (f) Optimalisasi koordinasi dengan pihak yang memiliki data dan bahan yang diperlukan dalam proses penyelesaian masalah hukum.
 - (g) Personil yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan secara litigasi dan nonlitigasi, secara mandiri mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.
 - (h) Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam pemenuhan standar pelaporan laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).
 - (i) Mendorong keterpaduan penyelenggaraan tata kelola pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - (j) Optimalisasi penerapan keamanan penyelenggaraan Teknologi Informasi secara berkala dan terstruktur.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Pelaksanaan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum pada tahun 2022 dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.207.750.482,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 4 program, 11 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp6.115.435.385,00 atau 98,51%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.201. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Fasilitas Perundang-undangan dan Hukum Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KELEMBAGAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KEISTIMEWAAN)	BIRO HUKUM	<p>1. Menyelaraskan program legislasi daerah peraturan daerah dan program legislasi daerah peraturan gubernur dengan arah pembangunan daerah melalui penguatan pada aspek pembinaan hukum daerah dalam fungsi perencanaan hukum dan evaluasi keberlakuan produk hukum daerah</p> <p>2. Menerapkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum daerah</p> <p>3. Melaksanakan harmonisasi produk hukum daerah secara tepat waktu dengan memanfaatkan teknologi informasi</p> <p>4. Memanfaatkan analisis kebijakan dalam perumusan dan penyusunan produk hukum daerah</p> <p>5. Mengikutsertakan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dalam diklat penyusunan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kompetensi</p> <p>6. Mengikutsertakan pejabat fungsional analisis kebijakan dalam diklat analisis kebijakan guna meningkatkan kompetensi</p> <p>7. Peningkatan dan efektivitas pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin</p> <p>8. Menggunakan teknologi informasi dalam layanan informasi produk hukum</p> <p>9. Peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat melalui rencana aksi nasional hak asasi manusia</p>	<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</p> <p>Indikator Kinerja: Persentase kewenangan, substansi materi, dan legal drafting produk hukum kabupaten/kota yang telah sesuai dengan pedoman penyusunan produk hukum Daerah</p> <p>KEGIATAN PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN URUSAN KEISTIMEWAAN</p> <p>SUBKEGIATAN PENGAWASAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA TINDAKLANJUT PELAKSANAAN KEWENANGAN KEISTIMEWAAN</p> <p>Kajian Rancangan Produk Hukum Kabupaten/kota terkait tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>Rekomendasi terhadap hasil monitoring dan evaluasi produk hukum tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan DIY</p> <p>Kajian Rancangan Produk Hukum Daerah Terkait Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>Sasaran : Meningkatnya jumlah desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatan tanah desa</p> <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</p> <p>Indikator Kinerja : Presentase desa yang sudah mempunyai perdes pemanfaatantandah des</p> <p>KEGIATAN PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN</p>	<p>Persen</p> <p>Kajian</p> <p>Rekomendasi</p> <p>Rancangan Produk Hukum</p> <p>Persen</p>	<p>100</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>16</p> <p>100</p>	<p>100</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>16</p> <p>100</p>

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				SUBKEGIATAN PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA PERTANAHAN TANAH KASULTANAN, TANAH KADIPATEN, DAN TANAH DESA			
				Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Pertanahan, Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa (Litigasi)	Putusan	1	1
				Dokumentasi Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa (Litigasi)	Video	1	1
				SUBKEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN URUSAN PERTANAHAN			
				Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan	Printer Komputer Laptop	2 2 1	2 2 1
				Sasaran: Meningkatkan kualitas rancangan produk hukum daerah			
				PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			
				Indikator Kinerja: Persentase rancangan produk hukum yang berkualitas	Persen	100	100
				KEGIATAN PENYUSUNAN PERUNDANG - UNDANGAN			
				SUBKEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN			
				Rancangan Peraturan Gubernur	Rancangan	30	30
				Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan	6	6
				SUBKEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN			
				Rancangan Keputusan Gubernur	Rancangan	70	70
				SUBKEGIATAN FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA			
				Nomor Register	Nomor Register	30	30
				Rancangan Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi	Keputusan Gubernur	5	5
				Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Rancangan Produk	55	55
3	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO HUKUM					

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rekomendasi Hasil Konsultasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten / Kota	Rancangan	40	40
				SUBKEGIATAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN NASKAH HUKUM LAINNYA			
				Buku informasi peraturan perundang-undangan	Buku	2800	1100
				Buku lembaran daerah dan berita daerah	Buku	2800	1100
				Produk hukum yang diunggah (upload) ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Produk Hukum	260	260
				Laporan Pembinaan JDIH	Laporan	1	1
				Produk Hukum yang disosialisasikan	Laporan	1	1
				KEGIATAN BANTUAN HUKUM			
				SUBKEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH NON LITIGASI DAN HAM			
				Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Laporan	1	1
				Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD	Keputusan Gubernur	3	3
				Keputusan Gubernur tentang Izin pemanfaatan Tanah Desa	Keputusan Gubernur	50	50
				Laporan Hasil Penyelesaian Penanganan Kasus Perdata, Tata Usaha Negara, dan Pendampingan Hukum 2022	Laporan	1	1
				Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja LO DIY	Laporan	1	1
				Rekomendasi penanganan pengaduan tata kelola usaha beretika dan perbaikan pelayanan publik	Rekomendasi	100	100
				SUBKEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH			
				Putusan permasalahan hukum litigasi	Putusan	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
3	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO HUKUM		Sasaran : Meningkatkan kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			
				SUBKEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH			
				Renstra	Dokumen	1	1
				Renja		1	1
				Renja Perubahan		1	1
				ROPK		1	1
				PK		1	1
				RKT		1	1
				SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-OPD			
				RKA-OPD	Dokumen	1	1
				RKAP-OPD		1	1
				DPA-OPD		1	1
				DPPA-OPD		1	1
				SUBKEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			
				LKjIP	Dokumen	1	1
				LKPJ		1	1
				LPPD		1	1
				KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
				SUBKEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN OPD			
				Terlaksananya administrasi keuangan/penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	Tahun	1	1
				SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN OPD			
				Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)			
				SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN OPD			
				Laporan Keuangan bulanan	Dokumen	12	12
				Laporan Keuangan Triwulanan		4	4
				Laporan Keuangan Semester		2	2
				KEGIATAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH			
				SUBKEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA OPD			
				Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai Tahun dengan ketentuan yang berlaku		1	1
				KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR			
				CFL (Lampu)	Buah	60	60
				Kabel Roll		2	2
				Batu Batere A3		60	60
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR			
				Alat Tulis Kantor	Jenis	45	45
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA			
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jenis	9	9
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN			
				Arsip Dokumen Hukum	Dokumen Hukum	2	2
				Barang Cetak	Jenis	12	12
				Penggandaan	Lembar	25000	25000
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
				Surat Kabar dan Majalah	Jenis	2	2
				Buku/referensi peraturan perundang-undangan	Buku	40	40

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				SUBKEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI OPD			
				Tersedianya makanan dan minuman rapat	Tahun	1	1
				Terselenggaranya konsultasi dan koordinas		1	1
				KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
				SUBKEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA			
				Notebook	Unit	1	1
				Printer	Unit	1	1
				Scanner	Buah	1	1
				Camera Conference	Unit	1	1
				Televisi	Buah	1	1
				SUBKEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA			
				AC	Unit	1	1
				KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT			
				Bukti Pembayaran Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12
				Bukti Pembelian Buku Cek	Buku	3	3
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK			
				Bukti Pembayaran Langganan 1 Akun Zoom Meeting (teleconference) yang akan dibayarkan tepat waktu	Bulan	12	12
				KEGIATAN PEMELIRAHAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR			
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	Unit	1	1
				Kendaraan dinas Jabatan roda 4 (empat) yang dipelihara sesuai RKBMD		1	1
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	Unit	1	1
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2		1	1
				SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN			
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	Unit	3	3
				Bukti Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2		2	2
				Kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) yang dipelihara sesuai RKBMD		3	3
				Kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua) yang dipelihara sesuai RKBMD		2	2
				SUBKEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA			
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jenis	7	7
				SUBKEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA			
				Fumigasi Ruang Perpustakaan 360 m2	Kali	2	2
				Renovasi Ruang Rapat dan Front Office	Paket	1	1

3) *Fasilitasi Perekonomian dan SDA*

a) *Kondisi Umum*

Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi. Terdapat banyak faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, beberapa diantaranya adalah: iklim investasi yang baik, kondisi kepariwisataan serta ekonomi kreatif yang mampu menjadi daya dorong dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Adanya faktor ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah maupun menciptakan kesempatan kerja yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Penurunan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan perlu intervensi pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong sektor perbankan untuk menyalurkan pembiayaan pada sektor padat karya.

Permasalahan pengelolaan sumber daya alam menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada masa kini dan masa yang akan datang. Di lain pihak sumber daya alam tersebut telah banyak mengalami kerusakan-kerusakan, terutama berkaitan dengan cara eksploitasinya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi.

Untuk mengukur kinerja urusan Fasilitasi Perekonomian dan SDA digunakan indikator Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun $n+1$.

Tabel 3.202. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perekonomian dan SDA Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

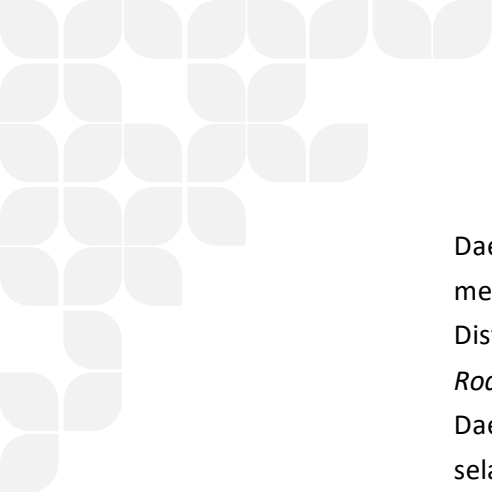
Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	%	105,26	100	100	100	100	100

Sumber: Biro Adm. Perekonomian dan SDA Setda DIY, 2023

Capaian kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perekonomian dan SDA tahun 2022, terealisasi sebesar 100% dari target. Angka tersebut diperoleh dari lima dokumen kebijakan yang ditindaklanjuti. Lima dokumen tersebut yaitu Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah, Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah, Rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi daerah, Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, dan Rekomendasi *Green Economic*.

Sebagai fasilitasi perekonomian dan SDA, salah satu upaya terkait pengendalian inflasi dilakukan melalui inisiasi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). TPID DIY selalu berupaya berinovasi dalam kegiatan pengendalian inflasi daerah. Hal ini terbukti dengan dicapainya penghargaan berupa Nominasi TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Jawa-Bali yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Tahun 2022.

Dalam rangka menciptakan strategi pencapaian laju inflasi yang sesuai dengan sasaran, TPID DIY telah menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah

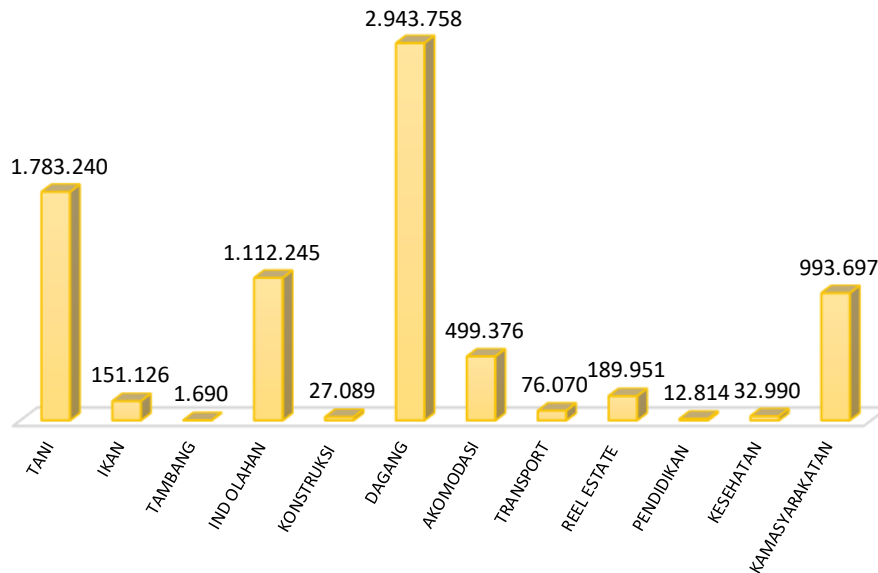


Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2024 yang juga mengacu pada prinsip 4K (Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga dan Komunikasi Efektif). *Roadmap* tersebut merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah maupun instansi terkait dalam mengendalikan inflasi selama 3 tahun.

Optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) DIY dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah dilakukan melalui sinergi program kerja yang lebih luas melibatkan lintas Perangkat Daerah dan lintas sektor di luar dan dalam lingkup Pemerintah Daerah DIY. Beberapa program kerja TPAKD Tahun 2022 antara lain 1) *Business Matching* Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Digital di Pesisir Pantai Selatan Gunungkidul yaitu frekuensi kegiatan temu kemitraan, pemanfaatan QRIS, dan penyaluran KUR, 2) Pembiayaan Melawan Rentenir melalui Kredit Pembangunan Ekonomi Daerah (Kredit PEDE) yaitu realisasi penyaluran kredit PEDE, 3) Pemeliharaan *Website* KURjogja yaitu kegiatan pemeliharaan, evaluasi, dan sosialisasi website, 4) Pengembangan Kampung Digital Pantai Glagah yaitu pembukaan dan pemanfaatan QRIS, 5) Lingkup Sekolah Berbudaya Menabung & Wirausaha (Lilah Dana & Usaha) di Sekolah pada Wilayah Kesejahteraan Rendah yaitu sosialisasi produk/layanan keuangan dan upaya perlindungan konsumen, dan 6) Penguatan Kapasitas Kelembagaan yaitu kegiatan pendampingan, sosialisasi, dan temu kemitraan.

Peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM juga dioptimalkan melalui pelaksanaan program KUR yang ditindaklanjuti dengan pengembangan website KUR Jogja (kurjogja.id) untuk mempercepat proses pengajuan KUR dan meningkatkan digitalisasi akses keuangan oleh TPAKD DIY yang telah dihibahkan oleh OJK DIY kepada Pemerintah

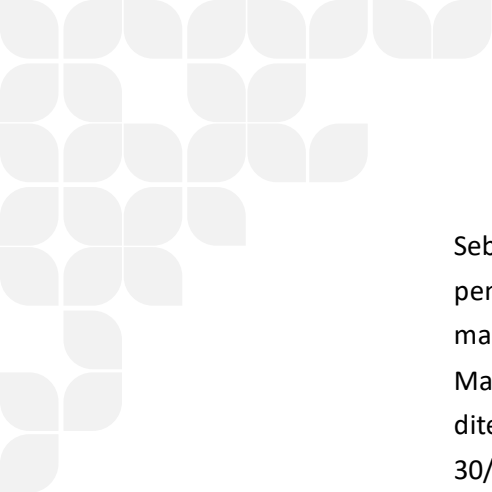
Daerah DIY pada awal tahun 2022. Tim TPAKD pada tahun 2022 menerima penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas prestasi berupa Finalis Wilayah Terbaik dalam Implementasi KEJAR tingkat Provinsi.



Gambar 3.55. Plafon Penyaluran KUR di DIY Tahun 2022
 Sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), 2023

Penyaluran KUR di DIY pada tahun 2022 masih didominasi oleh sektor perdagangan sebesar Rp2.943.758.054.012,00 dan sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp1.783.240.132.605,00 sebagai sektor yang mampu bertahan dan berkembang pada masa pandemi Covid-19.

Program Prioritas telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 353/KEP/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan yang terdiri dari Program Pembangunan Infrastruktur Prioritas, Program Penataan/ Pengembangan Kawasan Prioritas, dan Program Strategis Lainnya yang Diprioritaskan



Sebagai pedoman sekaligus dasar pelaksanaan penilaian dan pemeringkatan Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya tahun 2022, maka Tim Penilaian dan Monitoring Evaluasi Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya menyusun kriteria penilaian yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 30/SEKDA/VI/2022 tentang Penetapan Kriteria Penilaian Sebagai Dasar Pemberian Perangkat Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Penyusunan kriteria dimaksudkan agar pemeringkatan sebagai salah satu pertimbangan penetapan Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Pada tahun 2022, Pemerintah Daerah DIY berhasil menetapkan 7 (tujuh) Desa/Kalurahan sebagai Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang telah dimuat dalam Keputusan Gubernur Nomor 234/KEP/2022 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022, sehingga total Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang telah ditetapkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Desa/Kalurahan.

Salah satu kebijakan perlindungan sumber daya perekonomian yang telah disusun adalah *roadmap* pengembangan usaha garam rakyat. Pada tahun 2022, usaha garam di pesisir DIY khususnya Pantai Sepanjang sudah memperoleh Sertifikasi SNI Garam Konsumsi untuk mendukung pengembangan usaha garam di pesisir DIY dalam hal penguatan produk dan pengembangan pasar produk garam

Kebijakan perlindungan sumber daya perekonomian yang telah disusun lainnya adalah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, budaya, sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum yang perlu menerapkan konsep ramah lingkungan, rendah karbon dan non polutan. Hal tersebut merupakan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi bahkan sampai ke level desa. Pertumbuhan ekonomi berbasis

desa tetap perlu mempertimbangkan keserasian antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam lingkungan.

Kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam lainnya yaitu analisis moneter yang digunakan dalam penyusunan neraca sumber daya alam misalnya terkait sumber daya air memiliki perhitungan biaya.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*


Menggambarkan permasalahan dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2022, maupun permasalahan pelaksanaan urusan.

- (a) Adanya perbedaan metode pemantauan dan lokus pemantauan harga dan pasokan antar kabupaten/kota.
- (b) Belum optimalnya sistem pemantauan harga dan pasokan.
- (c) Belum meratanya jaringan internet di wilayah DIY sehingga sulit untuk mengimplementasikan program digitalisasi layanan keuangan.
- (d) Belum optimalnya pemahaman beberapa pihak terkait kebijakan seperti program Desa/Kalurahan Mandiri Budaya untuk peningkatan kesejahteraan, perbaikan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

(2) *Solusi*

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas (**point a**).

- (a) Melakukan koordinasi antar Kabupaten/Kota guna menyeragamkan mekanisme pemantauan (waktu dan objek pantauan).

- 
- (b) Pengembangan sistem digitalisasi pemantauan harga dan pasokan sehingga data yang diperoleh lebih terjaga validitas dan kecepatan penyajian datanya.
 - (c) Melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak terkait lebih intensif serta mendorong pemanfaatan dan optimalisasi teknologi informasi di tingkat desa.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Pada tahun 2022 Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Perekonomian dan SDA dilaksanakan dengan alokasi Rp2.830.446.750,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 3 program dan 10 kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp2.689.676.075,00 atau 95,03%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	1	1
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: ATK	Jenis	21	21
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis	16	16
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Penggandaan	Lembar	80000	80000
				Barang Cetak	Jenis	2	2
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Langganan Surat Kabar	Jenis	4	4
				Langganan Majalah	Jenis	1	1
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi	tahun	1	1
				Tersedianya makanan dan minuman rapat	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Tersedianya jasa surat menyurat: Pengiriman dokumen	tahun	1	1
				Tersedianya jasa surat menyurat: Surat keluar	tahun	1	1
				Tersedianya jasa surat menyurat: Surat masuk	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Pembayaran langganan virtual meeting	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1
				Terbayarnya pajak kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan roda empat	Unit	3	3
				Terbayarnya Pajak kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan roda empat	Unit	3	3
				Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan roda dua	Unit	2	2

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terbayarnya Pajak kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan roda dua	Unit	2	2
				Pemeliharaan Mebel			
				Mebeleur Terperlihara	Jenis	2	2
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jenis	8	8
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jenis	1	1
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
				Rumusan kebijakan perlindungan sumber daya perekonomian yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	%	30	30
				Rumusan kebijakan perlindungan sumber daya perekonomian yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	%	30	30
				Rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	%	40	40
				Rumusan kebijakan stabilitas perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	%	40	40
				Rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	%	30	30
				Rumusan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan	%	30	30
				Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			
				Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif DIY	dokumen	1	1
				Kajian dampak Pasca pandemi Covid-19 terhadap roadmap baru pemberdayaan UKM dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	dokumen	1	1
				Rekomendasi Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan	dokumen	1	1
				Rekomendasi Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah	dokumen	1	1
				Kajian Review Kebijakan Strategis Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata DIY Tahun 2019-2025	dokumen	1	1
				Evaluasi Penyelenggaraan RIPPARDA DIY	dokumen	1	1
				Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			
				Kajian Perekonomian Rumah Tangga di Kawasan Perkotaan	dokumen	1	1
				Kajian Grand Design dan Roadmap Pembentukan Pusat Grosir Pangan	dokumen	1	1
				Kajian rantai pasok produk peternakan dan perikanan	dokumen	1	1
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			
				Monev pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai tembakau	rekomendasi	1	1
				Rekomendasi Ekonomi Hijau	dokumen	1	1
				Kajian Valuasi Jasa Lingkungan Sektor Pendukung Ekonomi Hijau	dokumen	1	1
				Rekomendasi Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	dokumen	1	1
				Kajian Penyusunan PDRB Hijau di DIY	dokumen	1	1
				Kajian Neraca Sumber Daya Alam DIY	dokumen	1	1
				Kajian Desa Mandiri Hijau	dokumen	1	1
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			
				Kajian potensi pendapatan daerah dari sektor Bisnis Online/Komunikasi	dokumen	1	0.2
				Rekomendasi Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah	dokumen	1	0.04
				Rekomendasi kebijakan KUR	dokumen	1	0.04

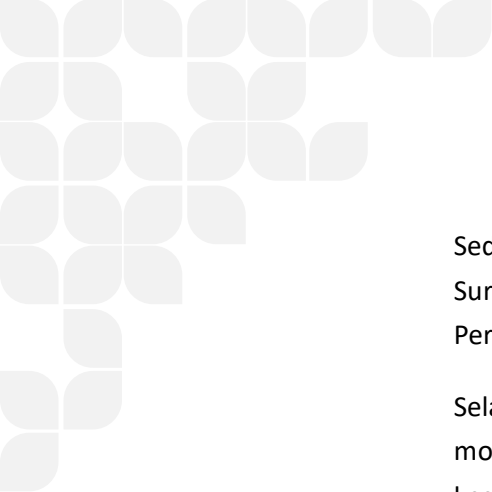
4) *Fasilitasi Kesra*

a) *Kondisi Umum*

Pemda DIY melakukan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pada aspek kesehatan, sumber daya manusia, bina mental dan fasilitasi kehidupan beragama dalam rangka menunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat di DIY.

Terkait pembinaan mental spiritual, di tahun 2022 telah dihasilkan beberapa produk kebijakan di antaranya, Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 451 /SE/74606/2022 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1443 H Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemda DIY. Kemudian, seiring dengan pulihnya kondisi pasca pandemi Covid-19, pelaksanaan ibadah haji mulai diselenggarakan kembali sehingga diterbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Daerah dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 84/TIM/2022 tentang Pembentukan Petugas Haji Daerah. Selanjutnya, sebagai salah satu upaya memberikan dukungan sarana spiritual seperti pesantren, disahkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Terkait pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pada aspek kesehatan, pada tahun 2022, telah dilakukan pemantauan terkait kasus tuberkulosis dimana terdapat 4.651 temuan kasus tuberkulosis di DIY. Temuan kasus tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pemda DIY menindaklanjuti kasus tersebut dengan penerbitan Keputusan Gubernur DIY Nomor 55/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Istimewa Yogyakarta.



Sedangkan untuk menekan kasus malaria di DIY, telah disusun Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 443/16967 tentang Percepatan Eliminasi dan Pemeliharaan Malaria.

Selanjutnya masih berkaitan dengan pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pada aspek kesehatan, untuk menekan angka pertumbuhan penduduk, telah disusun Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 11/SE/VII/2022 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan di Wilayah DIY.

Pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan aspek sumber daya manusia, khususnya bidang pendidikan telah dihasilkan produk kebijakan berupa Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Kebijakan tersebut menjadi landasan bagi upaya penanganan komprehensif permasalahan siswa dengan kondisi rentan, yang tidak hanya terbatas pada pendidikan disabilitas saja.

Keberhasilan pencapaian target program dan kegiatan tidak hanya dalam bentuk produk kebijakan yang diterbitkan, tetapi juga dalam wujud fasilitasi terkait kehidupan beragama dan Posbindu Satriya. Fasilitasi kehidupan beragama meliputi kegiatan pembinaan mental untuk pemeluk lima agama, pelayanan jamaah haji, penyelenggaraan festival keagamaan, juga fasilitas peribadatan dan lembaga keagamaan. Fasilitas Posbindu Satriya dilakukan dalam bentuk pemberian layanan kesehatan melalui deteksi dini penyakit tidak menular.

Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Kesra dari tahun 2021-2022 secara umum dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.204. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Kesra Tahun 2021-2022 serta capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	%	97,5	100	130	130	100	130

Sumber: Biro Bintal Setda DIY, 2023

di akhir periode RPJMD, tahun 2022, capaian indikator persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual sebesar 130% atau 130% dari target 100%. Capaian tersebut meningkat 32.5% dibanding tahun 2021 dan terealisasi 130% dibandingkan dengan target akhir RPJMD. Kebijakan yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

- (1) SE Gubernur DIY Nomor 451 /SE/74606/2022 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1443 H Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (2) SK Gubernur DIY Nomor 84/TIM/2022 tentang Pembentukan Petugas Haji Daerah;
- (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren
- (4) Peraturan Gubernur DIY Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Daerah
- (5) SK Gub DIY nomor 55/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkolosis Daerah istimewa Yogyakarta;
- (6) SE Gubernur DIY Nomor 11/SE/VII/2022 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan di Wilayah DIY;
- (7) SE Gubernur DIY Nomor 443/16967 tentang Percepatan Eliminasi dan Pemeliharaan Malaria;

(8) Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

Harapannya, pelaksanaan tugas dan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis mampu menghasilkan kebijakan yang tepat dalam upaya mendukung terwujudnya peningkatan derajat sumber daya manusia di DIY.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- (a) Terjadi miskomunikasi antara penerima hibah dan mitra pengusul sehingga terdapat penerima hibah yang tidak mengumpulkan berkas sebagai syarat pencairan.
- (b) Pemahaman terkait regulasi yang belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan baik.

(2) *Solusi*

- (a) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder dan pihak terkait untuk mengurangi miskomunikasi.
- (b) Mengikuti perkembangan terkini terkait regulasi yang berlaku sehingga dapat dilakukan tindakan penyesuaian (*adjustment*) jika terjadi perubahan sewaktu-waktu.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022*

Pada tahun 2022, Fasilitasi Kesra dilaksanakan melalui 2 program dan 17 kegiatan. Dari alokasi anggaran sebesar Rp46.051.820.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp39.884.434.526,00. Sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 99,96%. Deviasi terjadi karena 6 calon penerima hibah rumah ibadah tidak melakukan pemberkasan. di luar itu, target fisik sebagian besar kegiatan berhasil dicapai.

Tabel 3.205. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Kesra Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	1. Meningkatkan persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 2. Meningkatkan persentase kelompok masyarakat dan lembaga keagamaan yang terlayani	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Renja, Renja Perubahan, ROPK	dokumen	1	1
				Renstra	dokumen	1	1
				DPA, DPPA	dokumen	1	1
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan skor A (LKjIP, LKPJ, LPPD)	dokumen	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Kinerja Pengelola Keuangan 9 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	tahun	1	1
				Kinerja KPA dan PPTK 5 orang dalam 1 tahun sesuai peraturang perundangan yang berlaku	tahun	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Dokumen Laporan keuangan akhir tahun	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				Dokumen Laporan prognosis Semester II	dokumen	1	1
				Dokumen Laporan bulanan	dokumen	12	12
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kinerja Pengelola Barang 2 orang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	tahun	1	1
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Pembelian peralatan listrik dan elektronika	jenis	8	8
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Alat/Bahan untuk kegiatan kantor	jenis	40	40
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Barang cetakan	jenis	4	4
				Penggandaan	lembar	50000	50000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Pembelian buku referensi/Peraturan Perundangundangan	jenis	6	6
				Pembayaran langganan surat kabar dan majalah	tahun	1	1
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Konsultasi dan Koordinasi Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY terlaksana dengan baik	tahun	1	1
				Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	tahun	1	1
				Pengadaan Mebel			
				Pengadaan Lemari Perpustakaan	unit	1	1
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin	jenis	8	8
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Surat masuk	buah	5000	5067
				materai	buah	500	500
				Surat keluar	buah	2160	2304
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	6	6
				Kendaraan dinas/operasional sesuai RKPBMMD terpelihara	unit	6	6
				Pemeliharaan Mebel			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sewa tanaman hias	tahun	1	1
				Pemeliharaan mebel	jenis	2	2
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Perlengkapan gedung kantor sesuai RKPBMd terpelihara	jenis	7	7
				PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			
				Bahan rumusan kebijakan bina mental dan sarana keagamaan yang ditindaklanjuti	dokumen	2	4
				Rumusan bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti	dokumen	2	3
				Rumusan bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan kesehatan yang ditindaklanjuti	dokumen	2	4
				Terlayannya lembaga keagamaan 5 agama	layanan	4	4
				Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual			
				Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kehidupan beragama	dokumen	1	1
				Pengiriman Kontingen ke PESPARANI Nasional	kategori	11	11
				Pengiriman Kontingen ke Pesparawi Nasional	kategori	12	12
				Penyelenggaraan MTQ tk. Daerah	golongan	44	44
				Fasilitasi Hibah Rumah Ibadah	rumah ibadah	903	897
				Pengiriman Kafilah ke MTQ Tk. Nasional	golongan	44	44
				Penyelenggaraan Pesparawi Nasional di DIY	kali	1	1
				Pembinaan mental spiritual	kali	38	38
				SK tim Petugas Haji Daerah	dokumen	1	1
				Peringatan hari besar keagamaan	kali	8	8
				Fasilitasi Hibah Lembaga/organisasi Keagamaan	lembaga/organisasi	8	8
				Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			
				Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Kearsipan internal Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Laporan Hasil Pemantauan dan evaluasi BLUD SMK	dokumen	1	1
				Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan			
				Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan RAD GERMAS	dokumen	1	1
				Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penganggaran Dalam Rangka Penanganan Covid 19	dokumen	1	1
				Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan HIV AIDS	dokumen	1	1
				Pelayanan Posbindu SATRIYA	dokumen	1	1
				Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD Stunting	dokumen	1	1
				Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Jaminan Kesehatan	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Terciptanya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya terkait Sumbu Filosofi DIY	dokumen	1	1
				Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan SDM Kebudayaan	dokumen	1	1
				Laporan hasil Koordinasi dan sinkronasi Pengembangan sentra kewirausahaan di kalangan pemuda DIY	dokumen	1	1

5) *Kelembagaan dan Tata Laksana*


a) *Kondisi Umum*

Urusan kelembagaan merupakan sinergi dari berbagai program/kegiatan urusan keistimewaan bidang kelembagaan yang dilaksanakan oleh Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Implementasi program/kegiatan tersebut secara intensif dilakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapannya sehingga pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 terkait kebijakan kelembagaan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Penyusunan Perdais DIY tentang Perubahan Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- (2) Penyusunan Pergub tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Penyusunan Proses Bisnis Pemerintah Daerah;
- (4) Penyusunan Evaluasi Lembaga Non Struktural.

Pada tahun 2022 dilakukan penataan kelembagaan dengan melaksanakan *review* terhadap Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY dan Pergub DIY tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam rangka evaluasi penajaman tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk meminimalisir terjadinya potensi duplikasi tugas fungsi serta menyesuaikan kebijakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah.

Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perda Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY memuat tentang:

- 
- (1) Penyesuaian Nomenklatur Dinas Perizinan dan Penanaman Modal menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - (2) Kelembagaan Paniradya Kaistimewan;
 - (3) Kelembagaan Rumah Sakit Daerah sebagai tindak lanjut PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

di samping itu dalam rangka menindaklanjuti PermenPAN dan RB RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, dilakukan Evaluasi Kelembagaan dengan mengubah struktur organisasi Perangkat Daerah menyesuaikan kebijakan penyederhanaan birokrasi serta sinkronisasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru. Pada Tahun 2022 dilakukan penyesuaian terhadap 30 Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Selaras dengan adanya penataan kelembagaan dan penyederhanaan birokrasi pada tahun 2022, telah dilaksanakan penyusunan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penataan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemda DIY. Kebijakan dimaksud adalah kebijakan yang terkait dengan (1) Uraian Tugas Jabatan, (2) Monitoring Analisis Jabatan Pemerintah Daerah DIY dan Kabupaten/Kota, (3) Kualifikasi Jabatan, (4) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, (5) Pengembangan Sistem Informasi Analisis Jabatan.

di samping pemantapan pelaksanaan kelembagaan asli, penguatan keistimewaan DIY juga dilakukan pada upaya pembinaan aparatur Pemda DIY dan Pemerintah

Kabupaten/Kota yang sebagaimana nilai dasar Budaya Pemerintahan SATRIYA. Sebaai tindak lanjut core value ASN BerAKHLAK dan employer branding “Bangga Melayani Bangsa”, Pemda DIY telah merumuskan harmonisasi nilai Budaya Pemerintahan SATRIYA dan *core value* ASN BerAKHLAK dalam Pergub DIY No 19 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan. Berdasarkan Pergub tersebut, nilai SATRIYA telah diharmonisasi dengan *core value* BerAKHLAK sehingga menjadi rumusan sebagai berikut:

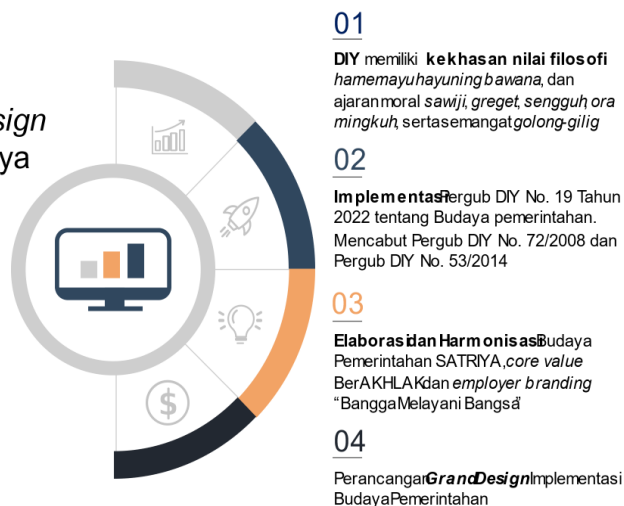
Tabel 3.206. Budaya Pemerintahan SATRIYA dengan *Core Value* BerAKHLAK

No	Nilai SATRIYA	Nilai Dasar BerAKHLAK	Kode Etik
1	Selaras	Harmonis	<ul style="list-style-type: none"> • Taat pada nilai-nilai ajaran agama. • Menjaga keharmonisan hubungan dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
2	Akal Budi Luhur Jatidiri	Loyal Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga integritas dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan sesuai ketentuan perundangan. • Menjaga etika dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan.
3	Teladan Keteladanan	Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan keteladanan pemikiran, perkataan, dan perbuatan dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan masyarakat. • Bertanggung jawab penuh terhadap amanat yang diberikan.
4	Rela Melayani	Berorientasi Pelayanan Kolaboratif	<ul style="list-style-type: none"> • Responsif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat dan/atau pengguna layanan. • Responsif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat dan/atau pengguna layanan.
5	Inovatif	Adaptif Kolaboratif	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi pendorong perubahan/pembaha ruan ke arah yang lebih baik. • Adaptif dan antusias terhadap perubahan ke arah yang lebih baik.
6	Yakin dan Percaya Diri	Adaptif Kompeten	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemandirian dan ulet dalam menjalankan tugas dan kewajiban. • Memiliki optimisme dan percaya diri dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
7	Ahli Profesional	Kompeten	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompetensi diri secara berkelanjutan. • Memiliki komitmen untuk menjalankan tugas dan kerja dengan kualitas terbaik.

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2023

Urgensi *Grand Design* Implementasi Budaya Pemerintahan

"...Budaya Pemerintahan Satriya, core value BerAKHLAK dan employer branding "Bangga Melayani Bangsa" adalah mendasar Aparatur Sipil Negara yang menjadi fundamental perubahan berlandaskan Pancasila dalam rangka mencapai misi Indonesia Maju (secara luas) dan Pemda DIY (secara sempit). Pada tahun 2022, Ketiga konsep ini perlu dikelola secara sistematis dan terukur dalam bentuk dokumen perencanaan atau dalam *grand design* Implementasi Budaya Pemerintahan. Gambaran terkait perumusan Grand Design Implementasi Budaya Pemerintahan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.56. Grand Design Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya
Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2023

Pelaksanaan Budaya Pemerintahan Satriya dan *core value* BerAKHLAK kedepan akan dilaksanakan menggunakan konsep *Dominat Culture* dan *Subculture* yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- (1) *Dominat Culture* merupakan *core value* yang dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintahan secara mutlak yaitu *core value* BerAKHLAK. *Core value* BerAKHLAK sebagai *Dominat Culture* juga merupakan

nilai utama yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Pemda DIY, dimana tahapan pelaksanaannya akan dileburkan dalam pelaksanaan SATRIYA yang telah terimplementasi hingga Pemerintah kabupaten/Kota.

- (2) *Subculture* merupakan kulture yang lebih khusus dikembangkan oleh Pemerintah Daerah DIY yang digali berdasarkan kearifan lokal yaitu Nilai SATRIYA. Nilai SATRIYA sebagai *Subculture* juga merupakan *strong culture* DIY yang telah dipahami oleh Pemerintah dan masyarakat DIY.

Budaya Pemerintahan SATRIYA merupakan bentuk komitmen Pemda DIY dalam mencapai keberhasilan transformasi birokrasi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal DIY yaitu *hamemayu hayuning bawana* dan ajaran moral *sawiji, greget, sengguh ora mingkuh* dan dengan semangat *golong gilig*. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, setiap tahunnya dilakukan monev baik di Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota untuk mengetahui intensitas penerapan budaya SATRIYA. Indikator yang digunakan antara Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain sebagai berikut :

- (1) Tingkat pemahaman pegawai tentang Budaya pemerintahan SATRIYA;
- (2) Tingkat pemahaman pegawai tentang rencana aksi;
- (3) Intensitas peran agen perubahan;
- (4) Intensitas peran kelompok Budaya Pemerintahan;
- (5) Intensitas sosialisasi/internalisasi/pembinaan oleh pimpinan;
- (6) Tingkat partisipasi pegawai dalam pelaksanaan rencana aksi;
- (7) Intensitas upaya monitoring dan evaluasi implementasi.

Selain indikator tersebut di atas, Pemda DIY juga melakukan evaluasi atas dampak dari penerapan Budaya Pemerintahan

terhadap perbaikan tata kelola Pemerintahan. Dampak yang diukur antara lain:

- (1) Dampak implementasi terhadap lingkungan fisik instansi sesuai tema Budaya SATRIYA Tahun 2022 *Green Office*, misalnya kebersihan, kerapian, keindahan, kenyamanan, kesehatan lingkungan kerja;
- (2) Dampak implementasi terhadap lingkungan sosial sesuai tema Budaya SATRIYA Tahun 2022 (ASN Peduli Masyarakat);
- (3) Dampak implementasi terhadap perbaikan tata Kelola pemerintahan yang dilihat dari:
 - (a) Akuntabilitas: kedisiplinan (jam kerja, hari kerja, pakaian dinas, ketentuan kedinasan lainnya),
 - (b) Kualitas pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 sesuai Tema Budaya SATRIYA Tahun 2022 ASN Bersih Melayani: integritas pelayanan, inovasi pada masa pandemi, efisiensi anggaran pada masa pandemi, efisiensi cara kerja pada masa pandemi, Indeks Kepuasan Masyarakat.

Berkaitan dengan harmonisasi nilai SATRIYA dan *core value* BerAKHLAK, Pemda DIY juga melaksanakan evaluasi atas Intensitas pemahaman *core value* BerAKHLAK dilihat dari:

- (1) Intensitas sosialisasi *core value* BerAKHLAK.
- (2) Tingkat pemahaman pegawai tentang *core value* BerAKHLAK.

Tabel 3.207. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

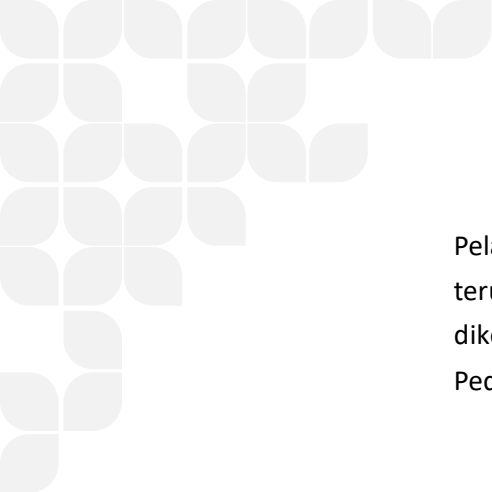
No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	%	81,5	83	83	100	83	100

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau	unit	95	31	95	306,45	31	306,45

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2023

Capaian indikator kinerja Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien pada tahun 2022 terealisasi sebesar 83% dari target 83% atau dengan persentase capaian sebesar 100%. Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator tersebut yakni ketersediaan dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat yang memberikan cukup keleluasaan kepada Pemda DIY untuk menata kelembagaan Perangkat Daerah sebagai salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan.

Capaian indikator kinerja Jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau juga melampaui target, dari target 31 unit tercapai sebanyak 95 unit atau dengan persentase capaian sebesar 306,45%. Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu: (1) Peran aktif penyelenggara pelayanan untuk memenuhi indikator kepatuhan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (2) Dilaksanakannya pendampingan pemenuhan indikator kepatuhan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan monitoring secara intensif; serta (3) Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus dioptimalkan antara lain dengan selalu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap peraturan gubernur yang menjadi tindak lanjut Peraturan Daerah Pelayanan Publik, yaitu Pergub DIY Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan serta Pergub DIY Nomor 68 Tahun 2016 yang telah diubah menjadi Pergub DIY Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman



Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat. Selain itu juga terus didorong gerakan “*One Agency One Innovation*” dengan dikeluarkannya Pergub DIY Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

Dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah sebagai institusi pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang gesit (*agile governance*) melalui penguatan kelembagaan istimewa, maka Pemda DIY mempunyai beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Belum optimalnya penyusunan kelembagaan Pemda DIY yang Istimewa dengan memperhatikan bentuk dan susunan Pemerintahan Asli. Hal tersebut terjadi karena belum optimalnya sinkronisasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Pemda DIY yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
 - (a) Perbedaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Pemda DIY khususnya terkait dengan urusan Keistimewaan DIY.
 - (b) Ukuran Organisasi yang belum seimbang dengan beban urusan pemerintahan yang dilaksanakan.
 - (c) Masih adanya tumpang tindih tupoksi antar OPD.
 - (d) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang belum optimal.
 - (e) Budaya SATRIYA dan *core value* ASN BerAKHLAK yang dibangun saat ini belum optimal dan membudaya sampai tingkat Kabupaten/Kota.

- (f) Inovasi pelayanan publik serta kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan publik belum optimal untuk memperluas akses pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

(2) Solusi

- (a) Adanya peraturan perundangan yang mengatur mengenai urusan keistimewaan DIY.
- (b) Penyusunan analis jabatan dan analis beban kerja sehingga dapat dipetakan beban urusan yang diampu pada tiap-tiap OPD.
- (c) Sosialisasi guna meningkatkan pemahaman tentang penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- (d) Adanya upaya percepatan implementasi Reformasi Birokrasi.
- (e) Upaya sosialisasi dan perkuatan implementasi Budaya SATRIYA dan *core value* ASN BerAKHLAK sampai ke Kab/kota.
- (f) Adanya upaya melembagakan inovasi pelayanan publik serta kelengkapan sarana prasarana pelayanan publik.

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Pada tahun 2022 pelaksanaan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kelembagaan dan Tata Laksana dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.341.794.000,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 3 program dan 30 sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp3.912.066.207,00 atau 90,10%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%.

Tabel 3.208. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Kelembagaan dan Tata Laksana Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN UMUM	BIRO ORGANISASI	1. Melaksanakan perumusan kebijakan kelembagaan dan tatalaksana pemerintah daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			2. Melaksanakan perumusan kebijakan evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja jabatan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	100
				Persentase sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	100
				Persentase penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	100
			3. Meningkatkan implementasi budaya pemerintahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			4. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Renja Perubahan Biro Organisasi Tahun 2022	Dokumen	1	1
			5. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi pelayanan publik	Tersusunnya Renstra Biro Organisasi Tahun 2022-2027	Dokumen	1	1
			6. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi standarisasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Tersusunnya ROPK Biro Organisasi Tahun 2022	Dokumen	1	1
				Tersusunnya PK Biro Organisasi Tahun 2022	Dokumen	1	1
				Tersusunnya Renja Biro Organisasi Tahun 2023	Dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
				Tersusunnya RKAP Biro Organisasi Tahun 2022	Dokumen	1	1
				Tersusunnya RAK Biro Organisasi Tahun 2023	Dokumen	1	1
				Tersusunnya DPA Biro Organisasi Tahun 2023	Dokumen	1	1
				Tersusunnya DPPA-OPD Biro Organisasi Tahun 2022	Dokumen	1	1
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Konsep/Bahan LPPD	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dokumen LkjIP	Poin	80	80
				Konsep/Bahan LKPJ	Dokumen	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Biro Organisasi	Tahun	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi (laporan keuangan tahunan)	Dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				Laporan Keuangan Bulanan	Laporan	12	12
				Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	2	2
				Laporan Prognosis	Laporan	1	1
				Laporan Keuangan Triwulanan	Laporan	4	4
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tahun	1	1
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	5	5
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	32	32
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis	14	14
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Dokumen hasil penggandaan	Lembar	22800	22620
				Barang Cetakan	Jenis	6	6
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Tersedianya Surat Kabar Harian	Bulan	12	12
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Tersedianya makanan dan minuman rapat	Bulan	12	12
				Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi	Bulan	12	12

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD			
				Terkelolanya website OPD	Bulan	12	12
				Pengadaan Mebel			
				Tersedianya mebeluer sesuai RKBMD	Jenis	2	2
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Bukti pembayaran jasa surat menyurat	Bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Bukti Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Bukti Pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKBMD	Unit	1	1
				Bukti Pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan	Unit	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	7	7
				Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai RKBMD	Unit	7	7
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Terpeliharanya saana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jenis	8	8
2	KELEMBAGAAN DAERAH BIRO ISTEMEWA YOGYAKARTA ORGANISASI (KEISTIMEWAAN)		1. Melaksanakan perumusan kebijakan kelembagaan dan tatalaksana pemerintah daerah	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Melaksanakan perumusan kebijakan evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja jabatan	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang proporsional	%	88	88
			3. Meningkatkan implementasi budaya pemerintahan	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah			
			4. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Evaluasi Lembaga Non Struktural	Dokumen	1	1
			5. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi pelayanan publik	Proses Bisnis Kelembagaan Pemda DIY	Dokumen	1	1
			6. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi standarisasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Regulasi Kelembagaan Perangkat Daerah dan UPT	Pergub	30	30
				Draft Raperdais Kelembagaan Pemda DIY	Dokumen	1	1
				Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kabupaten/ Kota			
				Monev Kelembagaan Kabupaten/Kota Pelaksana Urusan Keistimewaan	Laporan	5	5
				Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Rekomendasi	5	5
				Perumusan kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan			
				Dokumen Uraian Tugas Jabatan	Dokumen	1	1
				Monitoring Analisis Jabatan Pemerintah Daerah DIY dan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1
				Dokumen Kualifikasi Jabatan	Dokumen	1	1
				Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Dokumen	1	1
				Pengembangan Sistem Informasi Analisis Jabatan	Aplikasi	1	1
				Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan			
				Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan kelembagaan tahun 2022	dokumen	1	1
				Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Tahun 2024	dokumen	1	1
				Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Tahun 2023	dokumen	1	1
				PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN			
				Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	%	79	82.9

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Implementasi Budaya Pemerintahan DIY			
				Upgrade Aplikasi Budaya SATRIYA	Aplikasi	1	1
				Grand Design Implementasi Budaya Pemerintahan	Dokumen	1	1
				Agen Perubahan yang meningkat kapasitasnya	Agen	215	215
				Pemenang kompetisi Kelompok Budaya Pemerintahan	Kelompok	10	10
				Dokumen RB Tematik Pengentasan Kemiskinan	Dokumen	1	1
				Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan	Dokumen	1	1
3	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO ORGANISASI	1. Melaksanakan perumusan kebijakan kelembagaan dan tatalaksana pemerintah daerah	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI			
				Jumlah Instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau	Inovasi	1	1
			2. Melaksanakan perumusan kebijakan evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja jabatan	Persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik. Catatan : indikator baik adalah minimal melaksanakan 5 area perubahan reformasi birokrasi	%	80	80
			3. Meningkatkan implementasi budaya pemerintahan	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			
			4. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pengembangan Aplikasi Co Reform Space	Aplikasi	1	1
			5. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi pelayanan publik	Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi (8 area perubahan) pada 37 OPD	Laporan	1	1
			6. Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi standarisasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			
				Dokumen LKJIP dan PK	Dokumen	37	37
				Berita Acara serah terima LKJIP dan PK	BA	1	1
				Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan			
				Rancangan Pergub Penggunaan Logo di Lingkungan Pemda DIY	Rapergub	1	1
				Monev SOP Internal Perangkat Daerah	Laporan	1	1
				Penyusunan SOP Internal SMK	Draft Kepala SMK	SK 49	49
				Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik			
				Rekomendasi Monev Kepatuhan Standar Pelayanan	Dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan KemenPAN & RB RI	inovasi	10	15
				Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang dibina (sesuai Pergub Nomor 44 Tahun 2016 ttg Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi	Inovasi	15	15
				Rekomendasi hasil Monev Survei Kepuasan Masyarakat	Dokumen	1	1

6) *Fasilitasi Administrasi Pembangunan*

a) *Kondisi Umum*

Pemda DIY telah melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa. Melalui Sasaran Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Bidang Infrastruktur Daerah dan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah dengan indikator kinerja yaitu Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti.

Tabel 3.209. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2022 serta capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti	%	100,96	80	84,38	105,47	80	105,47

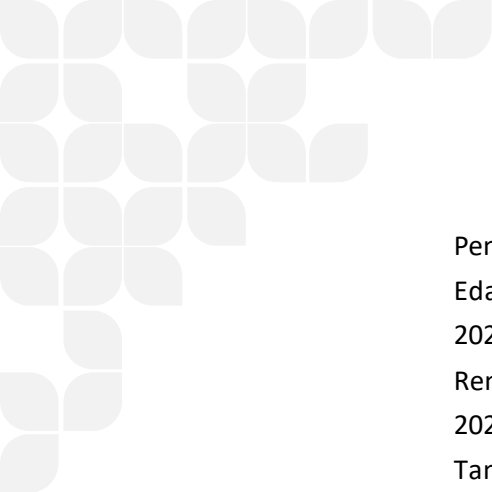
Sumber: Biro PIWP2 Setda DIY, 2023

Capaian terhadap indikator tersebut pada tahun 2022 mencapai 84,38% dari target yang ditetapkan sebesar 80% atau dengan persentase capaian sebesar 105,47%. Angka tersebut diperoleh dari 32 rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi 27 kebijakan.

Dari rumusan-rumusan kebijakan tersebut, telah ditindaklanjuti menjadi 27 dokumen kebijakan pada tahun 2018-2022, yaitu: 1) Surat Keputusan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2026 K/40/MEM/2018 tentang Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi DIY; 2) Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 367/KEP/2018 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah di Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Tahun 2017-2022; 3) SE Gubernur DIY Nomor 691/6927/SE/IV/2020 tentang Penerbitan Perizinan Air Tanah (NPA) Paska Diundangkannya UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; 4) Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 546/ 16990 / SE/ XXII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Upaya Pelestarian, Pengelolaan dan Pengembangan Penyangga Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta; 5) Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 490 / 17558 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 6) Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 650/17560/ SE/XXII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan; 7) Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/17658 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; 8) Surat Edaran Gubernur Nomor 18430/SE/XXII/2020 tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19 di DIY; 9) Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/18977/SE/XXII/2020 tentang Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur; 10) Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 490/11628 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi Nawasis dalam Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi Tahun 2020-2024 di DIY; 11) Surat

Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 490/14413 tahun 2020 tentang Pelibatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (Pokja AMPL) atau Sebutan Lainnya Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta; 12) Pergub DIY Nomor 50 Tahun 2020 tentang Dewan Penelitian dan Pengembangan; 13) Ingub Nomor 39/INSTR/2021 tgl 15 Des 2021 tentang Pelaksanaan Proyek Program Prioritas Pembangunan DIY Dengan Skema Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha; 14) Surat Edaran Nomor Nomor 119/24892 DIY Sekda DIY tentang Intensifikasi Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur (Program Pengembangan/Penataan Kawasan Prioritas); 15) Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 490/24370 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Bidang Infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta; 16) SE Gubernur Nomor 490/24797 tentang Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kemitraan Multipihak Dengan Pemangku Kepentingan Non Pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta; 17) SE Gubernur Nomor 12/01394 tanggal 1 Juni 2021 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi di DIY; 18) Surat Edaran Gubernur Nomor 553/19094 tentang Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Kawasan *Hinterland* Yogyakarta International Airport (YIA); 19) Surat Edaran Gubernur Nomor 616/24374 tentang Penguatan Konservasi Air Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta; 20) Surat Edaran Gubernur Nomor 12/24733 tanggal 28 Desember 2021 tentang Peningkatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah Istimewa Yogyakarta; 21) Ingub DIY Nomor 32/INSTR/2022 tentang Kebijakan



Pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan; 22) Surat Edaran Gubernur Nomor 620/20804 tanggal 20 Desember 2022 tentang Arah Pengembangan Infrastruktur pada Rencana Jalan Tol di DIY; 23) Pergub DIY Nomor 71 Tahun 2022 tanggal 17 November 2022 Tentang Pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) di Daerah Istimewa Yogyakarta; 24) SE Gubernur Nomor 16/SE/XII/2022 Tentang Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta; 25) Ingub DIY Nomor 21/INSTR/2022 tentang Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY; 26) Ingub DIY Nomor 25/INSTR/2022 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Dana Alternatif untuk Pembiayaan Pembangunan Daerah. dan 2) Ingub DIY Nomor 31/INSTR/2022 tentang Penegakan Kebijakan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

Terdapat kendala dalam implementasi kebijakan karena membutuhkan komitmen dan konsistensi OPD terkait dalam pelaksanaan Kebijakan yang telah dikeluarkan.

(2) *Solusi*

Memantau pengaplikasian kebijakan melalui format monitoring dan evaluasi terkait kebijakan yang telah dihasilkan dalam upaya memperoleh timbal balik terhadap kebijakan tersebut serta peningkatan kualitas kebijakan yang dihasilkan melalui *reward* dan *punishment*, *MOU* serta nota kesepakatan.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Pada tahun 2022 Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Administrasi Pembangunan dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp2.099.825.300,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 5 Program, 15 Kegiatan dan 28 Sub kegiatan. Secara keseluruhan belanja langsung terealisasi sebesar Rp2.033.416.635,00 atau 96,84%, dengan pencapaian fisik sebesar 100%.

Indikator kinerja Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi di bidang infrastruktur daerah dan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti, merupakan hasil dari pelaksanaan program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut.


(1) *Program Kebijakan Administrasi Pembangunan*

Program Kebijakan Administrasi Pembangunan mengampu 2 Kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

(2) *Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa*

Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, mengampu tiga kegiatan yaitu: Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; serta Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik.

Melalui Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, sebanyak 305 paket pengadaan OPD Pemda DIY yang dilimpahkan ke BLP telah diselesaikan dengan baik melalui mekanisme tender, seleksi, maupun pengadaan



barang jasa yang dikecualikan. Selain itu, terdapat penayangan 29 etalase komoditas katalog elektronik lokal sebagai upaya implementasi strategi pengadaan. Pada tahun 2022 juga telah dilakukan sosialisasi serta pendampingan kepada OPD Pemda DIY untuk dapat melakukan transaksi pada Toko Daring melalui kanal BeLa Pengadaan. BeLa Pengadaan merupakan bentuk pengembangan proses bisnis pengadaan barang/jasa berbasis elektronik yang adaptif serta akuntabel, sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan dan pendayagunaan produksi dalam negeri dengan mendorong Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) untuk *Go Digital*.

Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan melalui pembinaan pelaku pengadaan (PA/ KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan Pelaku Usaha/Penyedia), serta dilakukan pembinaan atau monitoring evaluasi terhadap capaian Kematangan UKPBJ Kabupaten/Kota di DIY. Pembinaan pelaku pengadaan dilaksanakan melalui sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa, Rapat Koordinasi, serta Layanan Konsultasi dan Advokasi.

Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dilaksanakan melalui pelayanan kepada pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Jenis layanan pada kegiatan ini antara lain pendaftaran akun pelaku pengadaan, pelayanan keluhan penggunaan sistem, tata cara penggunaan sistem, dan lain-lain.

Rincian capaian kinerja program dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.210. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Administrasi Pembangunan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	1. Peningkatan kualitas kebijakan pembangunan infrastruktur daerah, pembangunan berkelanjutan dan pembiayaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 3. Peningkatan kualitas kelembagaan pengadaan barang dan jasa menuju Center of Excellence.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan			
				Monitoring dan Evaluasi Implementasi dokumen Kebijakan Infrastruktur Daerah : Kajian Monev Pengembangan Kawasan pada Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS)		1	1
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	1. Peningkatan kualitas kebijakan pembangunan infrastruktur daerah, pembangunan berkelanjutan dan pembiayaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 2. Peningkatan penggunaan aplikasi informasi digital yang tepat guna dalam mendukung perumusan kebijakan. 3. Peningkatan kualitas kelembagaan pengadaan barang dan jasa menuju Center of Excellence.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia			
				Operasionalisasi BP Geopark DIY	dokumen	1	1
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Situs Warisan Geologi DIY	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tentang Geopark	dokumen	1	1
				Usulan Penetapan Taman Bumi (Geopark Nasional) DIY	dokumen Dossier	1	1
				Verifikasi Warisan Geologi (Geoheritage) DIY Nominatif KCAG	dokumen	1	1
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya			
				Belanja Modal Pengadaan Peralatan Operasional Sekretariat Forum Warisan Geologi DIY	Jenis	4	4
				Belanja Modal Operasional Pendukung	Unit	10	10
3	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	1. Peningkatan kualitas kebijakan pembangunan infrastruktur daerah, pembangunan berkelanjutan dan pembiayaan pembnagunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 2. Peningkatan penggunaan aplikasi informasi digital yang tepat guna dalam mendukung perumusan kebijakan. 3. Peningkatan kualitas kelembagaan pengadaan barang dan jasa menuju Center of Excellence.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Tersusunnya Rancangan Awal Renstra 2023-2028	dokumen	1	1
				Tersusunnya Renja Perubahan Th 2022	dokumen	1	1
				Tersusunnya Renja Biro PIWP2 Th 2023	dokumen	1	1
				Tersusunnya ROPK	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
				Tersusunnya RKA Tahun 2023	dokumen	1	1
				Tersusunnya DPA Perubahan Tahun 2022	dokumen	1	1
				Tersusunnya DPA Tahun 2023	dokumen	1	1
				Tersusunnya RKA-P Tahun 2022	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Biro PIWP2	laporan	1	1
				Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Tahun 2021	laporan	1	1
				Tersusunnya LKJIP Tahun 2021	laporan	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Terlaksananya pembayaran pengelolaan keuangan	bulan	12	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	laporan	1	1
				Tersedianya Laporan keuangan tahunan audited	laporan	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				Tersedianya Laporan Keuangan Semester	laporan	2	2
				Tersedianya Laporan Keuangan Triwulan	laporan	4	4
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan	bulan	12	12
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	tahun	1	1
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	5	5
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	27	27
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	jenis	14	14
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Terlaksananya Penggandaan/Fotokopi	lembar	35608	35608

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Barang Cetak	jenis	10	10
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dalam Jawa terlaksana dengan baik	tahun	1	1
				Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Luar Jawa terlaksana dengan baik	tahun	1	1
				Tersedianya makan dan minuman rapat	os	1450	1450
				Tersedianya Layanan Langganan Web Conference/Virtual Meeting (2 akun)	tahun	1	1
				Konsultasi dan Koordinasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dalam daerah terlaksana dengan baik	tahun	1	1
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD			
				Update Website Biro	aplikasi	1	1
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor : Proyektor	Unit	1	1
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor : AC	unit	1	1
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Terlaksananya pembelian materai	lembar	500	500
				terlaksananya Pengelolaan Surat Masuk	tahun	1	1
				Terlaksananya Pengelolaan Surat Keluar	tahun	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Terpeliharanya Kendaraan dinas jabatan (roda empat)	unit	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional roda dua	unit	2	2
				Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional roda empat	unit	4	4
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Terpeliharanya peralatan gedung kantor	jenis	12	12
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	jenis	3	3
				PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
				Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan	%	100	59.48
				Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan	%	100	100
				Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			
				Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa untuk 4 jenis pengadaan barang/jasa (konstruksi, konsultasi, barang, dan jasa lainnya)	laporan	4	4
				Terseleenggaranya pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa (jasa kebersihan dan jasa keamanan)	tahun	1	1
				Terseleenggaranya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa terhadap 4 jenis pengadaan	persen	100	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				barang/jasa (konstruksi, konsultasi, barang, dan jasa lainnya)			
				Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik			
				Terlaksananya pelayanan pengadaan secara elektronik : 1. Layanan ke penyedia 2. Layanan ke OPD	bulan	12	12
				Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			
				Terlaksananya konsultasi dan advokasi pengadaan barang dan jasa	rekap	12	12
				ISO 9001 1 Dokumen (menyesuaikan hasil pendampingan ISO 9001 pada 2021)	dokumen	1	1
				Terlaksananya peningkatan pemahaman terkait sistem/regulasi PBJ	persen	100	100
				Peningkatan kapasitas SDM pokja pengadaan	orang	17	17
				PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
				Persentase rumusan bahan kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang ditindaklanjuti	%	70	0
				Persentase rumusan bahan kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang ditindaklanjuti	%	70	75
				Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti	%	80	0
				Persentase rumusan bahan kebijakan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti	%	80	86.67
				Persentase rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti	%	80	0

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti	%	80	111.11
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah			
				Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	dokumen	1	1
				Dokumen Laporan Fasilitasi KPBU	dokumen	1	1
				Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			
				Dokumen Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah : Kajian kesiapan infrastruktur transportasi mengantisipasi Rencana Jalan Tol di DIY	dokumen	1	1
				Naskah Akademik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY Tahun 2023-2027	dokumen	1	1
				Kajian Pengembangan Sumber Dana Alternatif untuk Pembiayaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah	dokumen	1	1

7) *Fasilitasi Umum, Kehumasan dan Protokol*

a) *Kondisi Umum*

Pemda DIY melaksanakan fungsi fasilitasi umum, kehumasan dan protokol di lingkup Sekretariat Daerah DIY melalui Biro Umum, Humas dan Protokol. Fasilitasi umum, kehumasan dan protokol dalam hal ini berupa pelayanan kepada pimpinan dalam melaksanakan pertemuan/rapat/upacara maupun penerimaan kunjungan tamu-tamu yang berkunjung ke Pemda DIY. Selama tahun 2022, Pemda DIY telah menerima 123 kali kunjungan tamu yang terdiri dari kunjungan Presiden/Wakil Presiden sebanyak 5 kali, kunjungan Menteri (Kementerian)/DPR RI/DPD RI sebanyak 39 kali, kunjungan Kepala Daerah/DPRD Provinsi/Instansi Daerah lain sebanyak 45 kali, kunjungan Tamu Luar Negeri sebanyak 18 kali, dan kunjungan Universitas/Perguruan Tinggi/Tamu Lain-lain sebanyak 16 kali.

Fasilitasi dalam penerimaan kunjungan tamu berupa fasilitasi persuratan, fasilitasi keprotokolan, fasilitasi kerumahtanggaan dan fasilitasi kehumasan. Fasilitasi persuratan berupa pengelolaan surat-surat untuk pimpinan baik itu surat masuk maupun surat keluar. Fasilitasi keprotokolan berupa penyusunan acara/upacara dan pengaturan protokoler acara yang dihadiri oleh pimpinan. Fasilitasi kerumahtanggaan berupa penyiapan tempat acara, penyiapan dan penyajian jamuan. Sementara untuk fasilitasi kehumasan berupa peliputan dan publikasi acara/kegiatan pimpinan maupun *event-event* yang diselenggarakan oleh OPD teknis yang dihadiri oleh pimpinan.

Pada tahun 2022, kinerja penunjang urusan sekretariat daerah fasilitasi umum, kehumasan dan protokol terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Berikut tabel target dan realisasi kinerja tahun 2021-2022 serta capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD (2022).

Tabel 3.211. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Umum, Kehumasan dan Protokol Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Tar-get	Reali-sasi	% Reali-sasi		
1	Nilai rerata pimpinan dan tamu terhadap layanan keprotokolan, kerumahtanggaan, dan persandian serta persuratan	%	93,50	88	93,28	106,00	88	106,00
2	Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi Pemerintah Daerah	Skor indeks	88,83	88	88,46	100,52	88	100,52

Sumber: Biro UHP Setda DIY, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator Nilai rerata pimpinan dan tamu terhadap layanan keprotokolan, kerumahtanggaan, dan persandian serta persuratan untuk tahun 2022 ditetapkan sebesar 88% dan terealisasi sebesar 93,28%, mengalami penurunan 0,22% dibandingkan capaian tahun 2021. Pada tahun 2022 target indikator Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 88 dan terealisasi 88,46, capaian tersebut mengalami penurunan 0,37 dibandingkan tahun 2021.

Faktor-faktor yang mendorong tercapainya indikator sasaran pada tahun 2022 diantaranya adalah koordinasi yang baik dengan OPD teknis terkait persiapan dan pelaksanaan acara/upacara yang dihadiri unsur pimpinan, evaluasi pasca acara/upacara, pengelolaan media sosial sebagai sarana

publikasi informasi pemerintah daerah yang mudah diakses, informatif dan menarik.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Masih adanya *hoax* atau opini tidak benar yang berkembang di masyarakat.
- (b) Intensitas kunjungan tamu Pemda dan beberapa acara berlangsung dalam waktu bersamaan sedangkan SDM dan sarpras terbatas.

(2) Solusi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas (**point a**).

- (a) Melakukan koordinasi lintas sektor dengan OPD teknis yang membidangi untuk penyelesaian permasalahan *hoax*. Salah satunya adalah dengan memberi informasi yang terpercaya untuk membendung penyebaran *hoax* di tengah masyarakat.
- (b) Peningkatan koordinasi pra acara dan penguatan pelaksanaan SOP penerimaan kunjungan tamu sehingga dapat mengoptimalkan SDM dan Sarpras yang terbatas untuk fasilitasi acara-acara

c) Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Pada tahun 2022, Pelaksanaan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Umum, Kehumasan dan Protokol mengampu 4 program dengan 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Total pagu anggaran yang bersumber dari pendanaan APBD sebesar Rp23.661.968.288,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp20.411.954.505,00 atau 86,26%. Sementara itu, untuk realisasi fisik tercapai sesuai target 96,20%.

Tabel 3.212. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Administrasi Umum, Kehumasan dan Protokol Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis DED Pengembangan Rumah Genset Vertikal garden	paket paket	1 1	1 1
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Dinding Pagar Kepatihan Danurejan yang diperbaiki Bunga artificial kecil Prado Emas Gedhong Wilis yang diperbaiki Pemeliharaan kantong Bale Woro Sound system ruang nDalem Ageng Bunga artificial sedang Bunga artificial besar	m2 set m2 paket paket set set	600 8 15,11 1 1 4 1	600 8 15,11 1 1 4 1
3	SEKRETARIAT DAERAH	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	1. Penguatan fungsi dan fasilitasi layanan kerumahtanggaan yang profesional 2. Penguatan fungsi dan fasilitasi layanan keprotokolan yang profesional 3. Penguatan fungsi dan fasilitasi layanan kehumasan yang profesional	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Skor dari indeks kepuasan pelayanan kerumahtanggan terhadap pimpinan dan tamu Skor dari indeks kepuasan pelayanan protokol terhadap pimpinan dan tamu Peningkatan jumlah pengakses informasi Pemda Terwujud nya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD Terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Skor Skor pengunjung % %	85 85 309.975 100 100	90,065 90,14 349.485 100 95,4

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. Renstra	dokumen	1	1
				2. Renja	dokumen	1	1
				3. Renja Perubahan	dokumen	1	1
				4. ROPK	dokumen	1	1
				5. PK	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
				Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. RKA OPD	dokumen	1	1
				2. RKAP OPD	dokumen	1	1
				3. DPA OPD	dokumen	1	1
				4. DPPA OPD	dokumen	1	1
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: 1. Dokumen LKJIP	dokumen	1	1
				2. Konsep/Bahan LKPJ	dokumen	1	1
				3. Konsep/Bahan LPPD	dokumen	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	dan tahun	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				2. Laporan keuangan triwulanan	dokumen	4	4
				1. Laporan keuangan bulanan	dokumen	12	12
				3. Laporan keuangan semesteran	dokumen	2	2
				4. Laporan keuangan prognosis	dokumen	1	1
				Pengamanan Barang Milik Daerah OPD			
				Teramankannya Barang Milik Daerah	tahun	1	1
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	tahun	1	1
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor: 1. Baterai	jenis	4	4
				2. Lampu	jenis	20	20
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				1. Alat tulis kantor	jenis	63	63
				2. Materai	buah	500	500
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
				Tersedianya peralatan rumah tangga: 1.	jenis	27	27
				Perlengkapan penyajian jamuan			
				2. Pengisian tabung gas 12kg	kali	50	50
				3. Pengisian tabung pemadam kebakaran	tabung	28	28
				4. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	19	19
				5. Perlengkapan genose	jenis	2	2
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				1. Cetak kalender	jenis	1	1
				2. Cetakan umum	jenis	19	19
				3. Penggandaan	lembar	82.488	82.488
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
				Tersedianya surat kabar dan majalah	jenis	3	3
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				1. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi	tahun	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				2. Tersedianya makanan dan minuman rapat	tahun	1	1
				3. Terselenggaranya Pelayanan kehumasan di dalam daerah dan luar daerah	tahun	1	1
				4. Terselenggaranya Pelayanan keprotokolan di dalam daerah dan luar daerah	tahun	1	1
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada OPD			
				1. Update aplikasi	aplikasi	1	1
				2. Terpeliharanya arsip inaktif	tahun	1	1
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				1. Tersedianya peralatan dan mesin lainnya: 1. Komputer	unit	4	4
				2. Printer	unit	4	4
				3. Manual forklift	unit	2	2
				4. Sound mixer	unit	1	1
				5. Kulkas	unit	1	1
				6. Kursi Kerja	unit	1	1
				7. Dispenser	buah	1	1
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya: 1. AC	unit	8	8
				2. Tangga multifungsi	unit	1	1
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Bukti pembayaran jasa surat menyurat	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				1. Bukti pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12
				2. Bukti pembayaran langganan rapat daring berbayar	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Bukti pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				1. Keamanan kantor terjaga dengan baik	tahun	1	1

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				2. Kebersihan kantor terjaga dengan baik	tahun	1	1
				3. Kebutuhan mobilitas pimpinan terlayani dengan baik	tahun	1	1
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				1. Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau jabatan sesuai RKPBMMD	unit	12	12
				2. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan	dokumen	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai RKPBMMD	unit	69	69
				2. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan	dokumen	60	60
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya: 1. Meubel	tahun	1	1
				2. Alat Musik	tahun	1	1
				3. Genset	tahun	1	1
				4. Jetpump	tahun	1	1
				5. Lift	tahun	1	1
				6. Aquarium air laut dan air tawar	tahun	1	1
				7. Sound system	tahun	1	1
				8. Gordyn	paket	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. Gedung bersejarah	tahun	1	1
				2. Gedung tempat kerja	tahun	1	1
				3. Pagar Kepatihan	m2	3.266	3.266
				4. Rumah jabatan	tahun	1	1
				5. Taman Komplek Kepatihan	bulan	12	12

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				6. Conblock Komplek Kepatihan	tahun	1	1
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Terpeliharanya sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya 1. Instalasi air limbah/kotor	tahun	1	1
				2. instalasi air minum/bersih	tahun	1	1
				3. Jaringan listrik	tahun	1	1
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
				Tersedianya dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	tahun	1	1
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			
				1. Himpunan sambutan gubernur	eksemplar	100	100
				2. Laporan kegiatan FGD Penulisan Pidato bagi OPD dan mitra	laporan	1	1
				3. Laporan supervisi penyusunan sambutan	bulan	12	12
				Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan			
				1. Laporan Analisis Media Online dan Media Sosial	laporan	12	12
				2. Konten Video dan Konten Grafis	kali	8	8
				3. Laporan kegiatan FGD Penyusunan Narasi Tunggal	laporan	11	11
				4. Pemberitaan Kegiatan Pimpinan Daerah di 4 kanal berita	bulan	12	12
				5. Buku kerja	eksemplar	636	636
				6. Pemeliharaan baliho	titik	3	3
				7. Laporan kegiatan FGD Kehumasan	laporan	1	1
				Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			
				1. Pelaksanaan upacara bendera tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	upacara	12	12
				2. Pelaksanaan upacara bukan upacara bendera / acara lainnya tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	kali	60	60
				Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Sub Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				1. Pelayanan kerumahtanggaan kepada Pimpinan: Gubernur, Wagub, Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten Sekda	bulan	12	12
				2. Pelayanan kerumahtanggaan penerimaan tamu Pemda	bulan	12	12
				Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			
				1. Pelayanan Keprotokolan Kepada Pimpinan: Gubernur, Wagub, Sekda, Staf Ahli Gub, Asisten Sekda	bulan	12	12
				2. Pelayanan Keprotokolan Penerimaan Tamu Pemda DIY	bulan	12	12
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau unit kendaraan dinas jabatan yang disediakan		1	0
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau unit lapangan yang disediakan		1	1
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY			
				Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY			
				1. Upacara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	kali	1	1
				3. Open House Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	kali	1	1
				2. Ramah Tamah Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	kali	2	2
				Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY			
				Informasi penyelenggaraan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang tersebarluaskan melalui media	jenis media	5	5

8) *Fasilitasi Pemerintahan*

a) *Kondisi Umum*

Pengelolaan penginapan Griya Jogja dan Wisma Jogja di Jakarta serta pelayanan kendaraan tamu dilaksanakan dalam rangka fasilitasi pemerintahan oleh Pemda DIY di Jakarta. Kondisi pasang surut pandemi Covid-19 di Tahun 2022 menuntut pengelolaan penginapan Griya Jogja dan Wisma Jogja beradaptasi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah. Penerapan protokol kesehatan dalam pelayanan penginapan dan kendaraan dipantau dengan ketat. Hal tersebut dapat terealisasi dengan dukungan sarana prasarana seperti disinfektan, *hand sanitizer*, dan sabun cuci tangan.

Pada tahun 2022 dilaksanakan *mangayubagya* pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Pemda DIY memfasilitasi kendaraan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur beserta keluarga serta kendaraan untuk anggota DPRD dan semua OPD yang hadir di Jakarta. Selain itu Pemda DIY juga memfasilitasi keprotokolan, bantuan peliputan, dan koordinasi dengan Sekretariat Presiden terkait persiapan acara pelantikan.

Kerja sama lintas sektor yang dilembagakan Pemda DIY semakin meningkat pada tahun 2022. Pelaksanaan even seni budaya dilakukan oleh Pemda DIY dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak. Mitra Kerja sama dalam event seni budaya antara lain: PT. Angkasa Pura II, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Mall Ciputra Cibubur, PT. Adiwastra Mitra Kinarya, Ikatan Keluarga Gunung Kidul, Badan Koordinasi Paguyuban Keluarga Kulon Progo, Paguyuban Warga Kota Yogyakarta, Paguyuban Keluarga Bantul, Warga Bantul Manunggal, Paguyuban Sleman Manunggal Sembada, Kulon Progo di Jakarta, dan Paguyuban Warga Jogja Istimewa.

Tabel 3.213. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitas Pemerintahan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan kualitas layanan Kantor Perwakilan Daerah	%	92,31	90	93,73	104,14	90	104,14

Sumber: Banhubda DIY, 2023

Pada pelaksanaan Fasilitas Pemerintahan, Indikator kinerja sasaran “Peningkatan kualitas layanan kantor perwakilan daerah” diukur dari responden yang mendapatkan pelayanan penginapan dan kendaraan dinas selama tahun 2022. Capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 93,73% mencapai target yang ditetapkan yaitu 90%. Capaian tahun 2022 lebih tinggi dari capaian tahun 2021 sebesar 92,31%. Ketercapaian indikator tersebut didukung oleh beberapa faktor yaitu: dukungan tambahan personil baik CPNS maupun tenaga bantu dalam pelaksanaan layanan dan fasilitas pemerintahan, terus berjalannya *upgrade* kamar Griya Jogja, dan tersedianya sarpras pendukung penerapan protokol kesehatan di masa pandemic Covid-19

Target indikator kinerja sasaran sesuai target akhir RPJMD di tahun 2022 sebesar 90% dapat terealisasi melebihi target tersebut yaitu 103,43%. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya dukungan jejaring lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan membuat kegiatan yang berjalan memiliki nilai tambah. Selain itu adanya tenaga CPNS yang baru masuk untuk melengkapi kekurangan personil turut membantu pencapaian target kinerja Banhubda Tahun 2022.

b) Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Status level PPKM di DKI Jakarta berganti-ganti sehingga perlu untuk selalu memperbarui informasi terkait aturan PPKM, hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang, serta menyesuaikan kegiatan dengan aturan, baik terkait SDM, sarana prasarana, maupun mobilitas
- (b) Revitalisasi dan konsep baru Taman Mini Indonesia Indah yang *zero emission* dan *eco friendly* sehingga memerlukan beberapa penyesuaian terkait kegiatan yang diadakan di TMII
- (c) Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa Jabatan 2022 – 2027 di masa pandemi Covid-19 sehingga memerlukan beberapa teknis penyesuaian kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.

(2) Solusi

- (a) Penerapan protokol kesehatan pada pelayanan penginapan dan pelayanan kendaraan dengan menyediakan sarpras pendukung dan SDM yang tereduksi.
- (b) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah DKI, PT. Taman Wisata Candi selaku BUMN pengelola TMII yang baru, Forkapps, serta pihak terkait lainnya pada pelaksanaan promosi potensi dan seni budaya baik di TMII maupun di Jabodetabek.
- (c) Berkoordinasi dengan intens dengan Sekretariat Presiden dalam rangka pelaksanaan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada masa pandemi Covid-19.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Pada tahun 2022 Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Pemerintahan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.486.856.663,00. Pengalokasian anggaran tersebut dibagi dalam 3 program, 10 kegiatan dan 25 subkegiatan. Secara keseluruhan belanja dapat direalisasi sebanyak Rp11.203.978.560,00 atau 97,54%, dengan realisasi fisik sebesar 100%. Selanjutnya rincian capaian kinerja program dan subkegiatan tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.214. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Fasilitasi Pemerintahan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan Budaya tak benda yang dilestarikan	%	30,86	30,86
			2. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerja sama pihak ketiga	Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Mendukung Pencapaian Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	%	100	100
				Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	1. Belanja Modal Alta Kantor	Jenis	2	2
					2. Pemeliharaan Gedung Adat Griya Jogja	Jenis	1	1
					3. Belanja Pemeliharaan Gedung Adat	Jenis	1	1
					4. Belanja Modal Komputer	jenis	2	2
				Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Dukungan kegiatan Gelar Seni Budaya Daerah terhadap program Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Seni sebesar 89,22%	%	100	100
				Subkegiatan Gelar Seni Budaya Daerah	Campursari	Event	7	7
					Diklat Karawitan	Event	11	11
					Diklat Karawitan Masyarakat Ikatan Gunung Kidul	Event	9	9
					Diklat Karawitan Paguyuban Warga Jogja	Event	8	8
					Diklat Karawitan Bakor PKP	Event	8	8
					Diklat Ketoprak	Event	11	11
					Diklat Tari	Event	11	11
					Diklat Tari Sanggar Surya Kirana	Event	8	8
					Ekspresi Seni Tradisi Joget Mataram	Event	2	2
					Ekspresi Seni Tradisi live Karawitan	Event	3	3
					Ekspresi Seni Tradisi Malam Sukrokaasih	Event	10	10
					Evaluasi Belajar Diklat	Event	0	0
					Ketoprak	Event	2	2

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Ketoprak Luar TMII	Event	1	1	
					Lomba Tari Jabodetabek	Event	2	2	
					Dagelan Angkringan	Event	1	1	
					Pementasan Tari Luar TMII	Event	1	1	
					Pementasan Tari Dalam TMII	Event	1	1	
					Pawai Budaya Tradisi	Event	1	1	
					Pawai Budaya Kibar	Event	1	1	
					Pameran Diaspora	Event	2	2	
					Organ Tunggal Plus	Event	4	4	
					Pesona Budaya Nusantara	Event	1	1	
					Mangayu Bagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Event	2	2	
					Operet Anak	Event	1	1	
					Kuliner Nusantara	Event	1	1	
					Pentas Diklat Karawitan Hari Jadi Gunung Kidul	Event	1	1	
					Gelar Citra Budaya	Event	1	1	
					Gelar Seni Budaya Yogyakarta	Event	1	1	
					Gelar Potensi Budaya	Event	1	1	
					Upacara Bergada Prajurit Kraton Yogyakarta	Event	6	6	
					Wayang Kulit Dalang Senior	Event	5	5	
					Workshop karawitan Internasional	Event	1	1	
2	URUSAN UMUM	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah	PROGRAM URUSAN DAERAH PROVINSI	PENUNJANG PEMERINTAHAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Penatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	100

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerja sama pihak ketiga	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan 0,96 % terhadap persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100
				SUBKEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: Renstra Renja Renja Perubahan ROPK PK RKT	Dokumen	1	1
					RKA-OPD	Dokumen	1	1
					RKAP-OPD	Dokumen	1	1
					DPA-OPD	Dokumen	1	1
					DPPA-OPD	Dokumen	1	1
				SUBKEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD	RKA-OPD RKAP-OPD DPA-OPD DPPA-OPD	dokumen	1	1
				SUBKEGIATAN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja: Dokumen LKjIP Konsep/Bahan LKPJ Konsep/Bahan LPPD	Nilai LKjIP "A" dokumen dokumen	1 1 1	1 1 1
				KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan 0,42 % terhadap persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100
				SUBKEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	tahun	1	1
				SUBKEGIATAN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	tahun	1	1
				SUBKEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)			
				SUBKEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD	Dokumen laporan bulanan Laporan Keuangan Triwulan Laporan Keuangan Semester Laporan Prognosis	dokumen dokumen dokumen dokumen	12 4 2 1	12 4 2 1
				KEGIATAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dukungan 98,62 % terhadap persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100
				SUBKEGIATAN Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	tahun	1	1
				KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan 98,62 % terhadap persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100
				SUBKEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen peralatan listrik dan penerangan kantor	jenis	3	3
				SUBKEGIATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor Alat-alat/perlegkapan kantor Bukti pembayaran pengisian tabung gas pemadam kebakaran	jenis jenis kali tabung	21 1 4 10	21 1 4 10
				SUBKEGIATAN Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan Materi yang digandakan	jenis lembar	2 32.000	2 32.000
				SUBKEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat kabar	jenis	2	2
				SUBKEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi Tersedianya makanan dan minuman rapat	tahun tahun	1 1	1 1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan 18,01 % terhadap persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100
				SUBKEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukti Pengiriman	bulan	12	12
				SUBKEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bukti pembayaran internet 2 jaringan	bulan	12	12
					Bukti pembayaran listrik 14.038 kwh	bulan	12	12
					Bukti pembayaran telepon 5 saluran	bulan	12	12
				SUBKEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bukti pembayaran retribusi kebersihan kantor	bulan	12	12
					Gedung kantor seluas 7.292,5 m2 yang terpelihara kebersihannya	bulan	12	12
				KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan 7,40 % terhadap persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100
				SUBKEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bukti Pembayaran KIR kendaraan dinas operasional yang tepat waktu	unit	1	1
					Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 2 yang tepat waktu	unit	2	2
					Bukti pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda 4 yang tepat waktu	unit	9	9
					Kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara sesuai RKPBMMD	unit	2	2
					Kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dipelihara sesuai RKPBMMD	unit	9	9
				SUBKEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				SUBKEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya : AC	unit	20	20
3	SEKRETARIAT DAERAH	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	1. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerja sama pihak ketiga	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG KEGIATAN Pelaksanaan Pelayanan Penghubung SUBKEGIATAN Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat SUBKEGIATAN Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat SUBKEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung SUBKEGIATAN Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	1. Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah 2. Peningkatan Kualitas Layanan Promosi Potensi dan Seni Budaya Dukungan 100 % terhadap persentase pemenuhan layanan penghubung Indeks tamu yang memberikan apresiasi positif terhadap pelayanan Kesepakatan Bersama dengan masyarakat DIY di Jakarta Kesepakatan bersama dengan Banhubda se Indonesia Indeks ketertarikan sampel audience promosi seni dan budaya daerah terhadap DIY Indeks kepuasan mitra yang terfasilitasi promosi melalui Pekan Raya Indonesia dan Pameran Diaspora	angka indeks angka indeks % angka indeks kesepakatan kesepakatan angka indeks angka indeks	88 88,5 100 88 1 1 89 88	89,78 91 100 89,78 1 1 89,5 92,50

f. **Pengawasan**

1) *Kondisi Umum*

Sebagai acuan pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022 telah diterbitkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 416/KEP/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2022 (PKPT 2022). Selain Pengawasan yang telah direncanakan obyek pemeriksaannya, PKPT 2022 juga mengakomodasi pengawasan *mandatory* maupun respon atas isu sosial yang berkembang maupun aduan masyarakat.

Capaian kinerja pengawasan tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah, diukur dengan indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang terdiri dari hasil pengawasan dari BPK RI Perwakilan DIY, Inspektorat Jenderal Kemendagri RI dan pengawasan internal oleh Inspektorat DIY. Dalam mencapai sasaran tersebut didukung melalui beberapa kegiatan yang dikelompokkan ke dalam kegiatan audit, Evaluasi, Reviu, monev serta pendampingan dan asistensi.

Adapun obyek pemeriksaan baik di Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota selama tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

a) *Pemeriksaan BPK RI Perwakilan DIY*

Pada Tahun 2022, BPK RI Perwakilan DIY menerbitkan 2 (dua) laporan hasil pemeriksaan yang diterima oleh Pemda DIY. Adapun LHP yang terbit yaitu:

- (a) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 9B/LHP/XVIII.YOG/04/2022;
- (b) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 Pada Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9B/LHP/XVIII.YOG/04/2022;

Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemda DIY telah menindaklanjuti secara keseluruhan rekomendasi yang diberikan. Berdasarkan rekap dari Inspektorat, sampai dengan Semester II Tahun 2022 ditampilkan dalam rincian penyelesaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.215. Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK RI Tahun 2022 sampai dengan Semester II Tahun 2022 pada Pemda DIY

Uraian	Jumlah	Nilai Keuangan (Rp)	Keterangan
LHP Terbit	57		
Temuan	580	87.555.655.058	
Rekomendasi	1171	82.052.196.504	
Tindak Lanjut			
Sesuai	1111	69.495.251.183	94,87%
Belum Sesuai	50	12.556.945.321	4,27%
Belum Tindak Lanjut	9	0	0,77%
Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan Sah	1	87.934.363	0,09%

Sumber : Inspektorat DIY, 2023 (data diolah)

Sampai dengan 31 Desember 2022 belum ada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I/Semester II tahun 2022 yang diterbitkan BPK RI. Risalah terakhir yang diterbitkan BPK RI adalah Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021, sehingga masih belum ada data capaian terbaru di 2022 berdasar BPK RI.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dapat disampaikan sebagai berikut: 1) Faktor eksternal berupa proses berjenjang validasi dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan di internal BPK RI dari Tim Pembahas sampai dengan anggota BPK Pusat masih menjadi kendala sehingga menyebabkan perubahan status penyelesaian tindak lanjut membutuhkan waktu cukup lama; 2) Temuan dan rekomendasi yang berupa kebijakan/peraturan membutuhkan waktu penyusunan dan melibatkan pihak eksternal sehingga tindak lanjut harus menunggu hasil

kebijakan/peraturan tersebut; 3) Terdapat Rekomendasi berupa penyelesaian kerugian yang terkait dengan penyedia barang/jasa dan/atau non ASN, proses penagihannya mengalami kendala.

b) Pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri)

Sampai dengan 31 Desember 2022 Itjen Kemendagri belum menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan di tahun 2022. Untuk tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri di tahun-tahun sebelumnya telah selesai ditindak lanjuti (100%).

Secara teknis penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri tidak mengalami kendala. Penyampaian dokumen tindak lanjut bisa dilakukan setiap saat melalui aplikasi SIWASIAT.

c) Pemeriksaan Inspektorat DIY

Sepanjang tahun 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan operasional dan kinerja sebanyak 122 pemeriksaan. Pemeriksaan reguler dilaksanakan pada obyek pemeriksaan (obrik) di lingkungan Pemda DIY meliputi OPD, UPTD, SMAN/SMKN, BUMD dan Kalurahan. Sementara pada Pemda Kabupaten/Kota se-DIY dilaksanakan Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagai Bentuk pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Daerah di Kabupaten/ Kota. Adapun rincian hasil pemeriksaan operasional reguler dan tindaklanjutnya sebagai berikut :

Tabel 3.216. Risalah Hasil Pemeriksaan Inspektorat DIY

Uraian	Jumlah	Nilai Keuangan (Rp)	Keterangan
LHP Terbit	122		
Temuan	359	871.216.577	
Rekomendasi	944	822.351.391	
Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan			

Uraian	Jumlah	Nilai Keuangan (Rp)	Keterangan
Sesuai	914	663.708.121	96,82%
Dalam Proses Tindak Lanjut	2	32.758.344	0,21%
Belum Tindak Lanjut	28	125.884.926	2,97%

Sumber: *simhp.jogjapro.go.id*, 2023 (data diolah)

Selain pemeriksaan operasional reguler pada tahun 2022 Inspektorat DIY telah melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya meliputi: 1) Audit Ketaatan berupa *Probitiy Audit*; 2) Tata Kelola Manajemen Resiko dan Kepatuhan berupa Pendampingan Manajemen Resiko; 3) Audit Investigasi meliputi laporan atas aduan, pengembangan temuan hasil pemeriksaan, dsb; 4) Rekomendasi peneanaan sanksi daftar hitam; 5) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu meliputi: (Reviu DAK; Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; Evaluasi meliputi SAKIP, Dana Desa, LPPD; Pemantauan/Monitoring meliputi Penanganan atas Covid-19, Pengadaan PPPK, Promosi/Rotasi ASN, *Whistle Blowing System (WBS)*/Benturan Kepentingan dan Gratifikasi); 6) Pendampingan/Asistensi meliputi Pendampingan LK dan *Cash Opname* dan *Stock Opname*; serta 7) Pengawasan lainnya yang merupakan *mandatory* dari peraturan yang berlaku.

Hasil perhitungan sub indikator di atas diperoleh capaian sebagai berikut:

Tabel 3.217. Pengukuran Capaian Sasaran

Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut	Persentase Capaian
a) Rekomendasi BPK RI : 1171	= 1111	95,85%
b) Rekomendasi Itjen Kemendagri: 0	= 0	
c) Rekomendasi Inspektorat DIY : 944	= 914	

Sumber : *Inspektorat DIY*, 2023 (data diolah)

Kinerja Sasaran Penunjang Urusan Pengawasan pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.218. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Sasaran	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi*		
Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	94,35	90	95,85	106,50	90	106,50

Sumber: Inspektorat DIY, 2023

Pada indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tahun 2022 tercapai 95,85% dengan persentase realisasi terhadap target sebesar 106,50%. Realisasi kinerja sasaran mengalami kenaikan sebesar 1,5% dibandingkan capaian tahun 2021 yang sebesar 94,35%, selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD kondisi tahun 2022 telah melebihi target.

Selain dari pelaksanaan audit, Evaluasi, Reviu maupun money, yang merupakan implementasi dari fungsi *quality assurance*, ketercapaian kinerja didukung oleh berjalannya fungsi *consulting* dan peran Inspektorat DIY sebagai mitra bagi Perangkat Daerah maupun *stakeholder* lainnya dengan membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka melalui diskusi dan *sharing* dengan semangat pendampingan kepada OPD untuk mengawal tujuan pembangunan Pemda DIY; komitmen dan integritas personil Inspektorat DIY untuk mau dan mampu meningkatkan kinerja dan kemampuan sesuai dengan regulasi terkini; serta koordinasi intensif dengan *stakeholder* baik internal maupun eksternal Pemda DIY dalam melaksanakan ketugasan dan pencapaian tujuan kinerja Inspektorat maupun Pemda DIY.


2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

- (1) Tambahan ketugasan *mandatory* pusat yang harus dikawal khususnya oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di antaranya pengawalan Tingkat Kandungan Dalam Negeri, Percepatan Penyerapan Anggaran, serta ketugasan lain yang terkait pemulihan ekonomi sebagai efek pandemi Covid-19 membawa konsekuensi terjadinya ketugasan harus dilaksanakan secara paralel/bertumpuk dengan ketugasan pengawasan yang sudah direncanakan sebelumnya karena keterbatasan sumber daya, sementara APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah.
- (2) Pemeriksaan oleh Kementerian Teknis/Lembaga pada Pemda DIY belum sepenuhnya dapat dikoordinasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI secara optimal, sehingga masih terjadi pemeriksaan berulang pada beberapa perangkat daerah dan masih ada tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Kementerian Teknis/lembaga tidak terpantau oleh Inspektorat DIY.
- (3) Regulasi untuk pembentukan struktur Inspektur Pembantu Khusus yang menangani investigasi belum dapat direalisasikan karena membawa konsekuensi pada kebutuhan penambahan SDM yang tidak dapat serta-merta dipenuhi.

b) *Solusi*

- (1) Komunikasi lebih intensif terhadap *stakeholder* terkait (Itjen Kemendagri, Itjen Kementerian Teknis, BPKP, Inspektorat Kabupaten/Kota) dalam rangka konsolidasi dan penyusunan perencanaan pengawasan kedepannya. Kerja sama lintas sektor dalam penyelesaian beberapa



aspek pemantauan dengan OPD lain sehingga mempercepat pelaksanaan tugas. Selain itu diupayakan peningkatan kualitas SDM dengan mengikutsertakan unsur dalam pendidikan, pelatihan, atau sertifikasi keahlian yang terakreditasi oleh badan akreditasi terkait peningkatan kapasitas SDM Inspektorat DIY.

- (2) Pembinaan dan pengawalan pada Perangkat Daerah untuk membangun sistem pengendalian internal yang lebih baik dengan mengedepankan analisis manajemen resiko dan faktor risiko pada masing-masing Perangkat Daerah sehingga diharapkan Perangkat Daerah mampu melakukan *self diagnostic assessment* untuk mengantisipasi risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program/ kegiatan.
- (3) Memasukkan ketugasan fungsi investigasi yang diamanatkan dalam regulasi ke dalam struktur Inspektur Pembantu yang telah ada sehingga fungsi tersebut tetap dapat terlaksana tanpa menambah struktur organisasi baru.

3) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Anggaran Penunjang Urusan Pengawasan pada tahun 2022 sebesar Rp6.469.788.250,00 yang terdiri dari 3 program dan 39 subkegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp6.124.075.991,00 atau 94,66%, serta realisasi fisik sebesar 100% sesuai target.

Tabel 3.219. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pengawasan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT	1. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Intern	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100	100
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
				Renja Perubahan	dokumen	1	1
				Perjanjian Kinerja	dokumen	1	1
				Renstra	dokumen	1	1
				Renja	dokumen	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD			
				Tersusunnya dokumen DPA tahun n + 1	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen DPA Perubahan tahun n	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen RKA perubahan tahun n	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen RKA tahun n + 1	dokumen	1	1
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK	%	100	100
				Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dg Nilai	dokumen	1	1
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	tahun	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	tahun	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD			
				Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi (laporan keuangan tahunan)	laporan	1	1
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD			
				Laporan keuangan triwulanan	dokumen	4	4
				Laporan keuangan semesteran	dokumen	1	1
				Laporan Keuangan bulanan	dokumen	12	12
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	tahun	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
				Terfasilitasinya penilaian Angka Kredit bagi JFT dalam 2 periode	tahun	1	1
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
				Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek	Angkatan	6	6
				Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya terkait JFT	orang	20	20
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor	jenis	6	6
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Penyediaan perlengkapan penatausahaan arsip	jenis	14	14
				Alat Tulis Kantor	jenis	11	11
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Barang cetakan	jenis	6	6
				Jumlah materi yang digandakan	lembar	71.360	71.360
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi	tahun	1	1
				Tersediannya makanan dan minuman rapat	tahun	1	1
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD			
				Blueprint pengembangan aplikasi pengawasan yang terintegrasi	dokumen	1	1
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Kendaraan dinas jabatan	unit	1	1
				Pengadaan Mebel			
				Meubelair	jenis	11	11
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya: 1. Komputer	unit	6	6
				2. Lemari Es	unit	2	2
				3. Televisi	unit	2	2
				4. Vertical blind	m2	343	343
				5. Trolley (Arsip)	unit	1	1
				6. Tabung Pemadam	unit	10	10
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan kantor lainnya : <i>Instalasi system hydrant</i>	%	100	100
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
				Pembelian materai	buah	340	340
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Bukti pembayaran rekening telepon, rekening listrik, rekening air	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				1. Pembayaran jasa keamanan kantor	bulan	12	12
				4. Pembayaran retribusi sampah	bulan	12	12
				3. Pembayaran jasa pelayanan driver	bulan	12	12
				2. Pembayaran jasa kebersihan kantor	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				1. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 2	unit	4	4
				2. Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4	unit	13	13
				4. Kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara	unit	13	13
				3. Kendaran dinas/operasional roda 2 yang dipelihara	unit	4	4
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : 1. Komputer	unit	23	23
				2. Laptop	unit	20	20
				3. Mesin fotocopy	unit	1	1
				4. AC	unit	23	23
				5. LCD	unit	3	3
				6. Genset	unit	1	1
				7. Lift	unit	1	1
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			
				Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah	LHP	16	16
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			
				1. Laporan cash opname dan stock opname OPD	Laporan	37	37
				2. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah	LHP	137	137

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Reviu Laporan Kinerja			
				1. Laporan Evaluasi Kinerja OPD	LHE	37	37
				2. Laporan Evaluasi LKjIP Pemerintah Daerah DIY	Laporan	1	1
				3. Laporan Hasil Pendampingan dan Penyusunan Manajemen Resiko OPD	Laporan	37	37
				4. Laporan Reviu Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah DIY	Laporan	1	1
				5. Laporan Reviu Dokumen Perencanaan OPD DIY sebelum tanggal persetujuan RAPBD Tahun 2023	Laporan	37	37
				Reviu Laporan Keuangan			
				1. Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Laporan	37	37
				2. Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda DIY	Laporan	1	1
				Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota			
				1. Laporan EKPPD Kabupaten/Kota	Laporan	5	5
				2. Laporan Hasil Pemeriksaan Umum/Teknis Pemerintah Kab/Kota	LHP	16	16
				Kerja sama Pengawasan Internal			
				1. Laporan Telaah Sejawat antar Inspektorat Provinsi	Laporan	1	1
				2. Laporan Telaah Sejawat Inspektorat Kab/Kota	Laporan	1	1
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
				Laporan hasil monitoring dan tindak lanjut temuan	Laporan	2	2
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			
				Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	LHP	4	4
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			
				Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	LHP	102	102
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			
				1. Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT tahun 2023	SK	1	1
				2. Laporan Gelar Pengawasan Daerah	Laporan	1	1
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			
				Laporan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan	Laporan	2	2
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			
				Laporan pendampingan dan asistensi	Laporan	4	4

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
				Laporan hasil pelaksanaan PMPRB DIY tahun 2021	Laporan	1	1
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
				1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	1	1
				2. Laporan Hasil Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah	Laporan	1	1
				3. Laporan Tindakan lanjut perjanjian APIP dan APH	Laporan	1	1
				4. Laporan triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Saberpungli tepat waktu	Laporan	4	4

g. Penelitian dan Pengembangan

1) Kondisi Umum

Penunjang Urusan Kelitbangan di Pemda DIY dilaksanakan melalui Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPPSD Bappeda DIY). BPPSD merupakan Unit Pengelola Teknis (UPT) yang dibentuk berdasarkan ketentuan Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pergub DIY Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Pergub DIY Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam pelaksanaan penunjang urusan kelitbangan, dilaksanakan beberapa ketugasan antara lain: penelitian, pengembangan, dan statistik sektoral untuk meningkatkan persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dan persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah. Kinerja urusan litbang direpresentasikan dengan Program Penelitian dan Pengembangan dengan indikator program Persentase hasil kelit-bangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah.

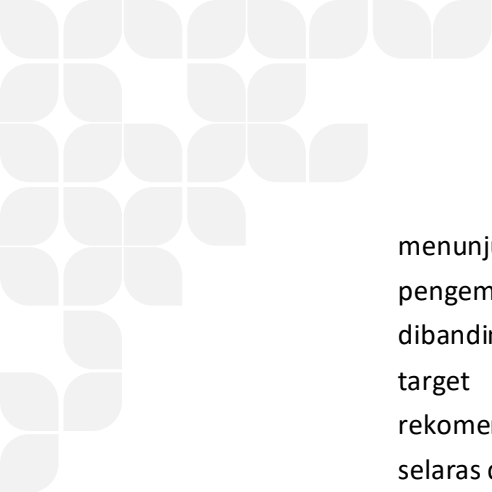
Tabel 3.220. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah	%	94,03	100	100	100	100	100

Sumber: BPPSD DIY, 2023

Capaian kinerja program Penelitian dan Pembangunan Daerah dihitung melalui indikator persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah. Perhitungan indikator ini berdasarkan jumlah rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan terpilih yang dijadikan sebagai bahan rumusan perencanaan dibagi jumlah total rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di DIY dikalikan 100%. Pada tahun 2022 terdapat 73 rekomendasi terpilih dari keseluruhan sejumlah 73 rekomendasi yang relevan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD DIY 2017-2022. Dari 73 rekomendasi terpilih tersebut terdiri dari urusan perencanaan sejumlah 17, perumahan rakyat dan permukiman sejumlah 6, pekerjaan umum dan penataan ruang sejumlah 7, ketenagakerjaan sejumlah 4, penanaman modal sejumlah 12, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sejumlah 9, lingkungan hidup sejumlah 7, kesehatan sejumlah 1, pemberdayaan masyarakat dan desa sejumlah 1, kebudayaan sejumlah 4, koperasi usaha kecil dan menengah sejumlah 5.

Sebagai upaya agar hasil kelitbangan selaras dengan dokumen perencanaan, maka penyusunan rencana kegiatan kelitbangan perlu memedomani Rencana Induk Kelitbangan (RIK) yang telah disusun. Selain itu perlu dilakukan koordinasi terus-menerus dengan para pemangku kepentingan sejak dari penyusunan perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Tabel di atas



menunjukkan bahwa capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan mengalami peningkatan sebesar 5,97% dibandingkan capaian tahun 2021, serta sudah sesuai dengan target RPJMD yakni sebesar 100%. Hal ini berarti bahwa rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan sudah semakin selaras dengan perencanaan pembangunan daerah.

2) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Kebutuhan hasil kelitbang sangat luas dan kompleks, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
- (2) Jumlah dan bidang kepakaran SDM fungsional peneliti di Pemda DIY masih sangat terbatas untuk dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan.
- (3) Penelitian yang dilakukan OPD Pemda DIY semakin terbatas sehingga rekomendasi yang dihasilkan terbatas.

b) Solusi

- (1) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lebih banyak entitas kelitbang di DIY melalui jejaring penelitian dan pengembangan, salah satunya melalui koordinasi rutin setiap triwulan untuk bersinergi dalam rangka menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di DIY.
- (2) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan fungsional selain peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian secara bersama-sama.
- (3) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD di lingkup Pemda DIY untuk mengoptimalkan rekomendasi yang dihasilkan agar dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan.

3) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Pada tahun 2022 Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp217.181.000,00 yang terdiri dari dua kegiatan, yaitu Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, serta Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Secara keseluruhan realisasi fisik mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 93,93%.

Tabel 3.221. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022

No 1	Urusan Pemerintahan 2	OPD 3	Kebijakan 4	Uraian Program/ Kegiatan/ Indikator 5	Satuan 6	Target 7	Realisasi 8
3	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH	Penguatan fasilitasasi terhadap aktivitas perencana dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Dukungan 50 % terhadap Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah 100% Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Inovasi dan Teknologi Dukungan 50 % terhadap Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah 100% Rekomendasi hasil penelitian Tahun 2022 Inventarisasi Hasil Penelitian Tahun 2022 Laporan Monitoring Evaluasi Kelitbangan 2022 Rumusan Bahan Kebijakan Kelitbangan Publikasi prosiding ilmiah	Persen % dokumen % dokumen dokumen dokumen dokumen	100 100 2 100 1 1 1 1 1	100 100 2 100 1 1 1 1 1

h. Sekretaris Dewan

1) Kondisi Umum

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD DIY diatur terakhir dengan Perdas DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pergub DIY Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedudukan Sekretariat DPRD DIY diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Pergub DIY Nomor 132 Tahun 2021, sebagai berikut:

- a) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- b) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

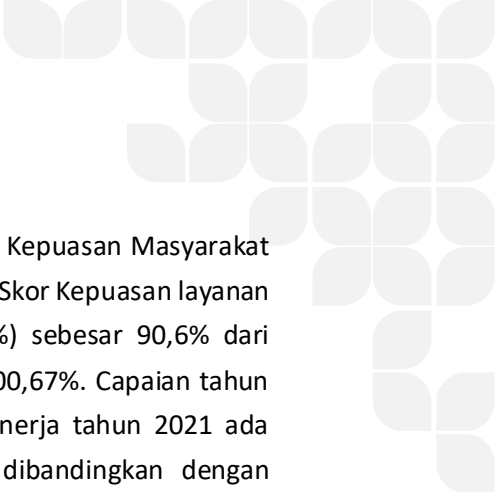
Pada tahun 2022 Sekretariat DPRD DIY melaksanakan tugas rutin setiap lima tahun sekali yaitu memfasilitasi Penetapan dan pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur DIY untuk masa jabatan 2022-2027 sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY. Tahun 2022 pula ada salah satu anggota DPRD DIY yang meninggal maka Sekretariat DPRD DIY bertugas menyelenggarakan administrasi Pergantian Antar Waktu sesuai sisa masa jabatan yang ditinggalkan. Selain kedua tugas tersebut Sekretariat DPRD DIY juga melaksanakan tugas-tugas lain rutin setiap tahun yang sudah diatur dalam peraturan perundangan yang ada.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Sekretariat DPRD DIY telah disusun dokumen Rencana Strategis sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang menjabarkan tentang isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan

Tabel 3.222. Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Sekretaris Dewan Tahun 2021-2022 serta Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (2022)

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%); dan Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%)	%	101,03	90,00	90,6	100,67	90,00	100,67
2	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	136,74	96,50	128,44	133,10	96,50	133,10

Sumber: Setwan DIY, 2023



Sasaran ke-1 dengan indikator Skor Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%) dan Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%) sebesar 90,6% dari target 90% pada tahun 2022, terealisasi 100,67%. Capaian tahun 2022 ini dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 ada penurunan sebesar -0,36% namun jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 melebihi target 0,67%. Penurunan dibandingkan tahun 2021 terjadi dikarenakan salah satunya adanya pelayanan ke DPRD dan masyarakat kurang optimal antara lain: perjalanan dinas luar negeri yang tidak sesuai dengan yang ditargetkan, pelayanan tamu/audiensi kurang optimal karena datang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sehingga keduanya mempengaruhi hasil survey yang dibagikan.

Adapun untuk Sasaran ke-2 dengan indikator Kinerja Persentase Agenda DPRD yang selesai dengan fasilitasi Sekretariat DPRD sesuai program kerja DPRD” pada tahun 2022 terealisasi sebesar 128,44 dari target 96,5. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 133,10%. ini dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 136,74 ada penurunan sebesar 3,64 % namun jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 melebihi target 31,94%. Penurunan dari tahun lalu dikarenakan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan ditahun lalu tidak dilaksanakan pada tahun 2022 misalnya perubahan Pimpinan dan Anggota Kelengkapan DPRD di setengah periode masa jabatan dan pembahasan perda yang tidak sampai pada persetujuan bersama dikarenakan masih perlu fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri.

2) *Permasalahan dan Solusi*

a) *Permasalahan*

- (1) Kegiatan Kunjungan ke Luar Negeri tidak mencapai dari target dikarenakan penyesuaian perijinan dari Kementerian Dalam Negeri yakni Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 099/4296/SJ tertanggal 25 Juli 2022 perihal: Himbauan Penanggulangan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri.
- (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Negeri terkait hasil evaluasi Raperda Perubahan APBD DIY TA 2022 baru diterima Pemerintah DIY satu bulan sejak disampaikan ke kemendagri merupakan salah penyebab tertundanya pelaksanaan kegiatan di triwulan IV Tahun anggaran 2022
- (3) Kegiatan pelaksanaan *Medical Check Up* (MCU) bagi anggota DPRD DIY ada 9 (sembilan) orang Anggota DPRD DIY tidak menggunakan fasilitasi *General Check Up* tanpa ada konfirmasi sejak awal.

b) *Solusi*

- (1) Penjadwalan/perencanaan kegiatan kunjungan luar negeri akan dilaksanakan di awal tahun dan akan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan.
- (2) Penjadwalan/perencanaan kegiatan-kegiatan anggaran menyesuaikan tata kala yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pendataan/inventarisasi Anggota DPRD yang melaksanakan *General Check Up* pada tahap sebelum pelaksanaan.

c) *Capaian Program dan Sub Kegiatan Tahun 2022*

Pada tahun 2022 Sekretariat DPRD DIY melaksanakan 3 Program dan 18 kegiatan yang terinci kedalam 53 sub kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp138.178.307.336,00 dan realisasi sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp113.445.035.659,00 atau 82,10%.

Perbandingan target anggaran dengan realisasi anggaran tahun 2022 terdapat deviasi sebesar 17,9%. Hal ini disebabkan karena adanya masih ada beberapa anggaran yang tidak terserap dikarenakan sisa pengadaan, efisiensi anggaran dan beberapa kegiatan yang tidak optimal pelaksanaan antara lain pada perjalanan dinas.

Berikut disampaikan rincian capaian kinerja program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah.

Tabel 3.223. Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Sekretaris Dewan Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	1.Melaksanakan validasi inventarisasi aset, SDM dan Sarana Prasarana	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY			
				Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan	%	100%	100%
			2.Melaksanakan Standar akuntansi Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan ASB (SBK-SBU) dan SHBJ dengan mengembangkan kajian perencanaan, Monitoring dan evaluasi.	Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY			
			3.Meningkatkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan DPRD dan <i>Stakeholder</i> .	Keputusan DPRD tentang Tata Tertib Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	keputusan DPRD	1	1
			4. Semua Fasilitasi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD harus berdasarkan SOP atau Juklak dan Juknis.	Sosialisasi Tahapan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	kali	55	51
			5. Melaksanakan Fasilitasi Produk Hukum, Pengembangan kebijakan dan kajian kebijakan serta peningkatan mutu dan kualitas tenaga ahli/narasumber/kelompok pakar.	Rekomendasi LKPJ AMJ Periode 2017-2022	Rekomendasi	1	1
			6. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan rapat, pembuatan risalah dan mendokumentasi hasil kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD.	Keputusan DPRD tentang Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	keputusan DPRD	1	1
			7. Meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan Infrastruktur data base dengan meningkatkan peran serta admin dalam layanan informasi melalui IT.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
				Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100%	100%

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	%	100%	100%
			8. Pengembangan Fungsi kepastakaan, dengan memaksimalkan asset yang ada.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			9. Menyelenggarakan dan mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai.	Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan kaidah yang berlaku	dokumen	1	1
				DPA-OPD	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen Renstra sesuai dengan kaidah yang berlaku	dokumen	1	1
				RKA-OPD	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen ROPK sesuai dengan kaidah yang berlaku	dokumen	1	1
				RKAP-OPD	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen Renja (Perubahan) sesuai dengan kaidah yang berlaku	dokumen	1	1
				Tersusunnya dokumen Renja (Murni) sesuai dengan kaidah yang berlaku	dokumen	1	1
				DPPA-OPD	dokumen	1	1
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
				Tersusunnya Konsep/Bahan LPPD	dokumen	1	1
				Tersusunnya Dokumen LKJIP	Nilai AKIP (A)	80	83.99
				Tersusunnya Konsep/Bahan LKPJ	dokumen	1	1
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
				Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	tahun	1	1
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD			
				Laporan keuangan akhir tahun sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				bagi pengguna informasi (Laporan Keuangan Tahunan)			
				Laporan Keuangan Semester	dokumen	2	2
				Laporan Keuangan bulanan	dokumen	12	12
				Laporan Keuangan Triwulanan	dokumen	4	4
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD			
				Terlaksananya penatausahaan BMD tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku		1	1
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
				Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor :	buah	14	14
				Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : MCB ukuran 1 Phasa 16A			
				Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor :	buah	100	100
				Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : Lampu TL			
				Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor :	buah	14	14
				Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : Steker dengan arde			
				Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor :	buah	75	75
				Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : Lampu LED Pijar			
				Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor :	buah	4	4
				Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : Lampu par			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor :	unit	5	5
				Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : Kabel Roll			
				Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : Kabel NYA 2,5mm merah	roll	3	3
				Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor :	buah	14	14
				Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : Stop kontak			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
				Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	27	27
				Tersedianya bendera	lembar	8	8
				Tersedianya Bahan kelengkapan penanggulangan covid	jenis	9	9
				Tersedianya set teko dan cangkir	set	57	0
				tersedianya tabung pemadam kebakaran	unit	22	22
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
				Barang cetakan	jenis	14	14
				Jumlah materi yang digandakan	lembar	104.952	104.952
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD			
				Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi	tahun	1	1
				Tersedianya makanan dan minuman rapat	tahun	1	1
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Kendaraan dinas operasional sesuai RKBMD	unit	2	2
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Tersedianya original lensa	unit	0	0
				Tersedianya TV LED	unit	3	3

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Stabilizer	unit	3	3
				Tersedianya kamera microless	buah	0	0
				Tersedianya Handy Cam	unit	0	0
				Tersedianya Mixer Audio	Unit	1	1
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Dokumen DED pembangunan gedung baru DPRD DIY	dokumen	1	1
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya : berupa AC	unit	6	6
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Bukti pembayaran SMS gateway untuk nomor telephone yang dibayarkan tepat waktu	1 bulan	12	12
				Bukti pembayaran rekening listrik 2 sat sambungan 375 Kwh (197.500 VA & 147.000 VA) yang dibayarkan tepat waktu	bulan	12	12
				Bukti pembayaran rekening air 1 sat sambungan sebanyak 300m3 yang dibayarkan tepat waktu	bulan	12	12
				Bukti pembayaran langganan 9 akun zoom meeting (teleconference) yang dibayarkan tepat waktu	bulan	12	12
				Bukti pembayaran rekening telepon sebanyak 6 sambungan yang dibayarkan tepat waktu	bulan	12	12
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Bukti pembayaran retribusi sampah perkotaan yang dibayarkan tepat waktu	bulan	12	12
				kerja sama POLRI untuk pengamanan obyek vital lingkungan DPRD DIY	bulan	12	12

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Arsip Kantor terkelola dengan baik	-	0	0
				Keamanan kantor terjaga dengan baik	bulan	12	12
				Gedung kantor seluas 333.470 m2 yang terpelihara kebersihannya	bulan	12	12
				Jumlah dokumen yang terkirim tepat waktu	paket	12	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				Terpeliharanya kendaraan dinas Jabatan sesuai RKPBM	unit	5	5
				Bukti pembayaran pajak/STNK/ KIR kendaraan dinas Jabatan	unit	5	5
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai RKPBM.	unit	28	28
				Bukti pembayaran pajak/STNK/KIR kendaraan dinas operasional	unit	28	28
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : AC Central	unit	11	11
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : Mesin Foto Copy	unit	2	2
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : Laptop	unit	36	36
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : Genset	unit	1	1
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : Jaringan Internet	titik	150	150
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : Kulkas	unit	21	21

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : Faximile	unit	1	1
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya :Sound System	unit	11	11
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : Printer	unit	39	39
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : Komputer	unit	55	55
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya :AC Split	unit	45	45
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : Sumur Pompa Dalam	unit	0	0
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya :LCD Proyektor	unit	8	8
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : Pompa Air	unit	4	4
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya : AC Cassete	unit	16	16
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya :Kamera	unit	5	5
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
				Gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBM	unit	3	3
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			
				terbayarnya gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	tahun	1	1
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			
				Penyediaan pakaian pakaian bercirikan daerah sesuai PP 18/2017 bagi pimpinan dan anggota DPRD	stel	55	55
				Penyediaan pakaian dinas dan atribut sesuai PP 18/2017 bagi pimpinan dan anggota DPRD	stel	250	250

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			
				Layanan jasa kesehatan di kantor DPRD DIY	bulan	12	12
				Bukti pembayaran GCU pimpinan dan anggota DPRD	orang	55	46
				Fasilitasi Fraksi DPRD			
				Tersusunnya Dokumen Pendapat Akhir Fraksi	PA	84	91
				Tersusunnya Dokumen Pemandangan Umum Fraksi	PU	84	84
				Tersusunnya Rekomendasi Fraksi	Rekomendasi	112	126
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
				Tersedianya makanan dan minuman rapat	tahun	1	1
				laporan hasil konsultasi DPRD ke pemerintah pusat	kali	2	2
				Terselenggaranya Rapat Paripurna DPRD DIY	kali	7	7
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
				Persentase produk hukum daerah dan DPRD yang diselesaikan tepat waktu	%	98%	116,88%
				Persentase Bahan Acara yang selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRDDIY sesuai dengan program kerja DPRD DIY	%	96,5%	140%
				persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik dan keprotokleran	%	90%	90,6%
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			
				Keputusan DPRD tentang Propemperda	keputusan	2	2
				Rekomendasi Kelayakan Raperda untuk dibahas sesuai dengan Propemperda	rekomendasi	10	10
				Pembahasan Rancangan Perda			
				Dokumen Pra Pembahasan RPJMD	dokumen	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rancangan produk hukum yang dibahas	Bahan Acara	17	17
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			
				tersedianya bahan bacaan untuk mendukung tugas fungsi DPRD	tahun	1	1
				Kajian Kebijakan untuk penguatan fungsi dewan di Alat kelengkapan dewan	kajian	7	7
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik			
				draft Rakepwan/ raperwan dan rakepim	draft	154	180
				Draft Raperda/ Raperda Inisiatif DPRD DIY dan Naskah Akademiknya	draft raperda dan NA	4	4
				Pembahasan KUA dan PPAS			
				Nota kesepakatan bersama KUA - PPAS 2023	Bahan Acara	1	1
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
				Nota kesepakatan bersama KUPA & PPASP 2022	Bahan Acara	1	1
				Pembahasan APBD			
				Persetujuan bersama Raperda APBD 2023	Bahan Acara	1	1
				Pembahasan Perubahan APBD			
				Persetujuan bersama Raperda APBD Perubahan TA 2022	Bahan Acara	1	1
				Pembahasan Laporan Semester			
				Laporan pembahasan komisi dengan mitra kerja	rekomendasi	1	1
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			
				Persetujuan bersama Raperda Pertanggung jawaban Pelaks. APBD 2021	Bahan Acara	1	1
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			
				Laporan Triwulan hasil pengawasan komisi	dokumen	4	4
				Bahan pengawasan produk hukum daerah	kajian	1	1

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			
				Laporan Triwulan hasil pengawasan komisi	dokumen	4	4
				Bahan pengawasan produk hukum daerah	Kajian	1	1
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			
				Bahan pengawasan produk hukum daerah	Kajian	1	1
				Laporan Triwulan hasil pengawasan komisi	dokumen	4	4
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			
				Laporan Triwulan hasil pengawasan komisi	dokumen	4	4
				Bahan pengawasan produk hukum daerah	Kajian	1	1
				Bimbingan Teknis DPRD			
				Bimbingan Teknis yang diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD	kali	3	3
				Bimbingan Teknis dalam Daerah / Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	kali	3	3
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan			
				Peraturan perundangan sebagai dasar penyusunan produk hukum daerah yang disosialisasikan	produk hukum pusat	1	1
				Layanan Data PPID	jenis	3	3
				Perda yang disosialisasikan	perda	12	12
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			
				laporan hasil kerja Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang dibutuhkan AKD	Laporan	18	18
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			
				laporan hasil kerja Tenaga Ahli Fraksi	laporan	84	84
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			

No	Urusan Pemerintahan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
				Publikasi kinerja DPRD pada 10 jenis media	share content	3.000	5100
				Audiensi/Dengar pendapat DPRD dengan masyarakat	laporan	22	66
				Kemitraan Wartawan	kegiatan	4	4
				Sarasehan dan Gathering	laporan	4	1
				Penyusunan Program Kerja DPRD			
				Program Kerja DPRD dan Perubahannya	dokumen	2	2
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			
				Keputusan DPRD tentang Pokok- Pokok Pikiran DPRD	dokumen	1	1
				Pelaksanaan Reses			
				Penyelenggaraan Reses	Laporan	3	3
				Pengawasan Kode Etik DPRD			
				Laporan dan rekomendasi tindakan lanjut hasil kerja Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD	Laporan	3	3
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			
				Pelayanan keprotokolan kepada pimpinan DPRD	bulan	12	12
				Laporan dan rencana tindak lanjut hasil kunker ke LN	laporan	21	6
				Seminar kaukus parlemen perempuan	laporan	10	11
				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			
				Laporan kinerja dan hasil kerja DPRD	dokumen	1	1
				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			
				Laporan dan rekomendasi kegiatan pimpinan	laporan	12	12
				Tingkat kepuasan tamu DPRD yang terlayani	%	70	90,6

F. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Pada tahun 2022, Pemda DIY mengambil beberapa kebijakan strategis sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan di DIY.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Percepatan penanggulangan Tuberkulosis	SK Gub DIY Nomor 55/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan penanggulangan Tuberkulosis	Mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis di wilayah DIY.
2	Kendali mutu dan kendali biaya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional	SK Gub DIY Nomor 127/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Klinis Jaminan Kesehatan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin kendali mutu dan kendali biaya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. b. Memberikan kepastian penyelesaian permasalahan klinis yang terjadi sehingga dapat memberikan pertimbangan klinis (<i>Clinical advisory</i>) agar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan.
	Keberlanjutan Pencapaian Status Eliminasi Malaria pada tingkat Kabupaten/Kota di wilayah DIY.	SK Gub DIY Nomor 89/TIM/2022 tentang Penetapan Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria.	Mempertahankan pencapaian eliminasi Malaria di DIY.
3	Pelaksanaan Kegiatan Sinau Pancasila	Perda DIY Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Pergub DIY Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan pancasila dan Wawasan Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan semangat nasionalisme, nilai Pancasila, dan cinta tanah air di kalangan ASN dan masyarakat DIY; b. Mewujudkan pengaturan keistimewaan DIY yang berbasis kearifan lokal; c. Serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan masyarakat DIY agar memiliki pemahaman dan kesadaran menjadi warga negara yang berpegang teguh pada Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai pandangan hidup pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. b. Mengembangkan daya kritis, daya nalar, dan kepedulian masyarakat terhadap isu lokal maupun nasional terkait dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
4	Pelaksanaan pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik di DIY	Pergub DIY Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial antar masyarakat untuk mewujudkan stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			b. Mengidentifikasi rencana aksi untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial masyarakat. Rencana aksi ini juga disertai dengan ukuran keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan ketahanan wilayah diberbagai aspek kehidupan.
5	Peningkatan Peran dan Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan	Pergub DIY Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	<p>a. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan Ormas;</p> <p>b. Memperkuat kehadiran Ormas sebagai wadah aspirasi masyarakat;</p> <p>c. Mewujudkan Ormas yang mampu melestarikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa; - norma, nilai, moral, etika, dan budaya; - sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan - kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, <p>d. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;</p> <p>e. Mewujudkan tujuan pembangunan DIY; dan</p> <p>f. Meningkatkan kinerja serta menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.</p>
6	Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah DIY Tahun 2022-2024	Pergub DIY Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah DIY Tahun 2022-2024	Peta Jalan (Road Map) ini merupakan pedoman bagi baik Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian inflasi DIY selama tiga (3) tahun
7	Pengendalian Pengguna LPG 3 KG	SE Nomor 510/6629 tanggal 28 April 2022 Tentang Pengendalian Pengguna LPG 3 KG	Dalam rangka pengendalian penggunaan LPG 3 Kg, maka konsumen LPG antara lain restoran, hotel, usaha binatu, usaha batik, usaha peternakan, usaha pertanian (di luar ketentuan Pepres no. 38 tahun 2019 dan yang belum dikonversi), usaha tani tembakau dan usaha jasa las dilarang menggunakan LPG 3 Kg yang merupakan LPG bersubsidi
8	Pengendalian Inflasi Daerah	SE Nomor 500/16964 tanggal 30 September 2022 Tentang Pengendalian Inflasi Daerah	<p>Dalam rangka pengendalian inflasi diminta kepada Bupati/Walikota, OPD Pemda DIY, dan BUMD di lingkungan Pemda DIY untuk:</p> <p>a. Memprioritaskan pengendalian inflasi dengan bersinergi bersama seluruh stakeholder;</p> <p>b. Melakukan komunikasi publik yang baik terkait inflasi;</p> <p>c. Mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang D diselesaikan
			<ul style="list-style-type: none"> d. Mengoptimalkan satgas pangan; e. Melaksanakan 'Gerakan Penghematan Energi'; f. Melaksanakan 'Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen'; dan g. 7. Mempercepat Kerja sama Antar Daerah (KAD);
	Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022	KepGub DIY Nomor: 234/KEP/2022, tanggal 15 Agustus 2022 Tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2022	Penetapan daftar Desa/Kelurahan Mandiri Budaya sebagai tindak lanjut atas target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022.
	Kolaborasi dan Sinergi <i>Pentahelix</i> dalam Optimalisasi Pengembangan Potensi Lokal Sebagai Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi Inklusif di DIY	Penerbitan InGub Nomor 27/INSTR/ 2022, 10 November 2022 Tentang Kolaborasi dan Sinergi <i>Pentahelix</i> dalam Optimalisasi Pengembangan Potensi Lokal Sebagai Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi Inklusif di DIY	Dalam rangka Optimalisasi Pengembangan Potensi Lokal guna mendorong upaya percepatan pemulihan ekonomi inklusif di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
	Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah DIY	Pergub DIY Nomor 47 Tahun 2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah DIY	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan efisiensi dan objektivitas pengumpulan Data UMKM yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY dan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/ Kota b. Mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan UMKM c. Meningkatkan kualitas dan kemampuan UMKM dalam upaya memberi manfaat yang lebih besar untuk mewujudkan masyarakat sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi
	Pengelolaan Tenaga Bantu	Pergub DIY Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Tenaga Bantu	<p>Perubahan atas PerGub DIY No. 106 Tahun 2020 diantaranya terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Usulan Tenaga Bantu b. Seleksi Tenaga Bantu c. Masa Kerja Tenaga Bantu d. Evaluasi Tenaga Bantu e. Tabungan Masa Kerja Tenaga Bantu
	Pendataan Tenaga Bantu 2022	SE Gub DIY Nomor 814/05401 Tanggal 19 September 2022 tentang Pendataan Tenaga Bantu 2022	Tindaklanjut Surat MenPANRB Nomor B/16511/M.SM.01.00/2022 tanggal 12 Juli 2022 hal Pendataan Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Siaran Pers BKN Nomor 018/RILIS/BKN/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022
	Pengelolaan Tenaga Bantu	SE Gub DIY Nomor 814/7792 Tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu Tahun 2023	Pedoman pemberian gaji bagi Tenaga Bantu di Lingkungan Pemda DIY Tahun 2023

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Penghargaan Bagi ASN	Pergub DIY Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara	Peningkatan motivasi dan produktivitas ASN
	Penilaian Kompetensi, Tes Psikologi, dan Konseling Pribadi	Pergub DIY Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi, Tes Psikologi, dan Konseling Pribadi	Acuan/Standar penyelenggaraan penilaian kompetensi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi, pengangkatan dalam jabatan administrasi, dan jabatan fungsional, serta penyusunan profil Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan manajemen karir melalui penilaian kompetensi dengan menggunakan Assessment Center atau metode lain yang dilakukan oleh Assessor
	Manajemen Talenta PNS	PerGub DIY Nomor 50 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil	Pedoman terhadap pelaksanaan manajemen talenta PNS.
	Disiplin PPPK	PerGub DIY Nomor 62 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY	Pedoman bagi pejabat dan PPPK yang berkepentingan dalam melaksanakan Disiplin PPPK
	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai	PerGub DIY Nomor 121 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PerGub Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	Pedoman pemberian TPP bagi Pegawai di Lingkungan Pemda DIY Tahun 2023
	Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di DIY	KepGub DIY Nomor 359/KEP/2022 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di DIY	a. Menindaklanjuti Surat Menteri dalam Negeri Nomor 360/7235/SJ tanggal 1 November 2022 perihal Kesiapsiagaan menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi; b. Memperhatikan Siaran Pers Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Klimatologi Kelas IV sleman tanggal 6 September 2022 perihal Prakiraan Musim Hujan 2022/2023 DIY, tanggal 25 November 2022 perihal Perkembangan Iklim Tahun 2022 DIY.
	Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah di DIY	KepGub DIY Nomor 199/KEP/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah di DIY	Bahwa Penyakit Mulut dan Kuku telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat.
	Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di DIY	KepGub DIY Nomor 219/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di DIY.	Guna kesinambungan penanganan dan mengantisipasi serta mengurangi dampak yang diakibatkan Penyakit Mulut dan Kuku di DIY.
	Penetapan Perpanjangan Kedua Status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di DIY	KepGub DIY Nomor 250/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di DIY.	Guna kesinambungan penanganan dan mengantisipasi serta mengurangi dampak yang diakibatkan Penyakit Mulut dan Kuku di DIY.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang D diselesaikan
	Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di DIY	KepGub DIY Nomor 275/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di DIY.	Guna kesinambungan penanganan dan mengantisipasi serta mengurangi dampak yang diakibatkan Penyakit Mulut dan Kuku di DIY.
	Penetapan Perpanjangan Keempat Status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di DIY	KepGub DIY Nomor 311/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Keempat Status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di DIY.	Guna kesinambungan penanganan dan mengantisipasi serta mengurangi dampak yang diakibatkan Penyakit Mulut dan Kuku di DIY.
	Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Satu Status Tanggap darurat bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY.	KepGub DIY Nomor 29/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Satu Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY	Guna kesinambungan penanganan dan untuk mengantisipasi serta mengurangi dampak yang diakibatkan oleh Covid-19.
	Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Dua Status Tanggap darurat bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY.	KepGub DIY Nomor 55/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Dua Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY	Guna kesinambungan penanganan dan untuk mengantisipasi serta mengurangi dampak yang diakibatkan oleh Covid-19.
	Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Tiga Status Tanggap darurat bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY.	KepGub DIY Nomor 76/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Tiga Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY	Guna kesinambungan penanganan dan untuk mengantisipasi serta mengurangi dampak yang diakibatkan oleh Covid-19.
	Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Empat Status Tanggap darurat bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY.	KepGub DIY Nomor 105/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Empat Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY	Guna kesinambungan penanganan dan untuk mengantisipasi serta mengurangi dampak yang diakibatkan oleh Covid-19.
	Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Lima Status Tanggap darurat bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY.	KepGub DIY Nomor 128/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Tujuh Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY	Guna kesinambungan penanganan dan untuk mengantisipasi serta mengurangi dampak yang diakibatkan oleh Covid-19.
	Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Enam Status Tanggap darurat bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY.	KepGub DIY Nomor 197/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Enam Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY.	Guna kesinambungan penanganan dan untuk mengantisipasi serta mengurangi dampak yang diakibatkan oleh Covid-19.
	Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Tujuh Status Tanggap darurat bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY.	KepGub DIY Nomor 220/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Tujuh Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY	Guna kesinambungan penanganan dan untuk mengantisipasi serta mengurangi dampak yang diakibatkan oleh Covid-19.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang D diselesaikan
	Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Delapan Status Tanggap darurat bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY.	KepGub DIY Nomor 249/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Delapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY	Guna kesinambungan penanganan dan untuk mengantisipasi serta mengurangi dampak yang diakibatkan oleh Covid-19.
	Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Sembilan Status Tanggap darurat bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY.	KepGub DIY Nomor 274/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Puluh Sembilan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY	Guna kesinambungan penanganan dan untuk mengantisipasi serta mengurangi dampak yang diakibatkan oleh Covid-19.
	Penetapan Perpanjangan ketiga Puluh Status Tanggap darurat bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY.	KepGub DIY Nomor 310/KEP/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Puluh Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DIY.	Guna kesinambungan penanganan dan untuk mengantisipasi serta mengurangi dampak yang diakibatkan oleh Covid-19.
	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam	Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung optimalisasi usaha; b. Menambah dan mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia; c. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; d. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas; e. Memperkuat sistem kelembagaan dalam mengelola sumber daya perikanan dan kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; f. Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; g. Memberikan bantuan keamanan dan keselamatan, serta bantuan hukum.
	Standar Harga Barang dan Jasa Daerah Tahun Anggaran 2022	Pergub DIY Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pergub DIY No 51 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum	Standar Harga Satuan disusun dan ditetapkan dengan Perkada, untuk menjamin bahwa penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah memenuhi kaidah dan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
	Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022	Pergub DIY Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022	Membantu wajib pajak yang menunggak PKB dan BBNKB dan Mengurangi jumlah tunggakan PKB dan BBNKB

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang D diselesaikan
	Keringanan Tarif Retribusi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY	SK Gub Nomor 118/KEP/2022 Tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Retribusi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY Tahun 2022	Membantu wajib retribusi karena pandemi covid dengan Memberikan keringanan bagi wajib retribusi
	Keringanan Tarif Retribusi pada Badan Penghubung Daerah DIY	SK Gub Nomor 35/KEP/2022 Tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Penyewaan Bangunan Milik Daerah Pada Badan Penghubung Daerah DIY Tahun Anggaran 2022	Membantu wajib retribusi karena pandemi covid dengan Memberikan keringanan bagi wajib retribusi
	Keringanan Tarif Retribusi pada BPKA DIY	SK Gub Nomor 349/KEP/2022 Tentang Pemberian Pengurangan Retribusi pada Badan Pengelolaan Keuangan DIY Tahun Anggaran 2022	Membantu wajib retribusi karena pandemi covid dengan Memberikan keringanan bagi wajib retribusi
	Penyesuaian Penghitungan Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Pergub DIY Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB	Menyesuaikan Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk kendaraan yang tahun pembuatannya di bawah Tahun berjalan
	Penetapan status SMK N 5 Yogyakarta sebagai BLUD	Pergub DIY Nomor 136/KEP/2022 tanggal 10 Juni 2022.	Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
	Audit KAP terkait Transformasi Kelembagaan BUKP	Perda DIY Nomor 1 Tahun 1989 tentang BUKP.	Meningkatkan pengendalian internal dan praktik serta prosedur keuangan dan administratif lainnya.
	Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pergub DIY Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan RKBMD supaya sesuai dg tata kala yg ditentukan dan dapat dilaksanakan sesuai dg ketentuan peraturan perundangan serta dapat dijadikan dasar menyusun rka.
	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022	Pergub DIY Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan atas Pergub DIY Nomor 124 tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022	Penyesuaian Anggaran atas dasar: a. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022; b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan; c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022; d. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			<p>tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022;</p> <p>e. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/18/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus COVID-19 Varian <i>Omicron</i> (B.1.1.529).</p>
	<p>Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 Perubahan kedua.</p>	<p>Pergub DIY Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan atas Pergub DIY Nomor 124 tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022</p>	<p>Penyesuaian anggaran terhadap:</p> <p>a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;</p> <p>b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;</p> <p>c. Berita Acara Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pemda DIY Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 Februari 2022;</p> <p>d. Berita Acara Pembahasan Pemetaan DAK Non Fisik Jenis Kesehatan Tahun 2022 tanggal 15 November Tahun 2021</p> <p>e. Instruksi Gub DIY Nomor 11/INSTR/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 <i>Corona Virus Disease</i> 2019 di DIY;</p> <p>f. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Nomor 658/11425 tentang Permintaan Anggaran Penataan Zona B TPA Regional Piyungan.</p>
	<p>Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 Perubahan ketiga.</p>	<p>Pergub DIY Nomor 16 tahun 2022 tentang Perubahan atas Pergub DIY Nomor 124 tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022</p>	<p>Penyesuaian anggaran atas terbitnya</p> <p>a. Berita Acara Penilaian Perubahan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2022 tanggal 25 dan 26 April 2022 pada Urusan/Kewenangan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gub dan Wakil Gub, Urusan/ Kewenangan Kelembagaan, Urusan/ Kewenangan Kebudayaan, Urusan/ Kewenangan Pertanahan, dan Urusan/ Kewenangan Tata Ruang serta dapat dilaksanakannya optimalisasi anggaran Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2022;</p> <p>b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 165/P/2022 tentang</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			Besaran Alokasi dan SALINAN Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2022; c. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 Perubahan keempat	Pergub DIY Nomor 30 tahun 2022 tentang Perubahan atas Pergub DIY Nomor 124 tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022	Penyesuaian anggaran terhadap anggaran gaji dan tunjangan Tahun Anggaran 2022.
	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Pergub DIY Nomor 64 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Penyesuaian Penjabaran APBD atas Peraturan Daerah DIY Nomor 9 tahun 20212 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
	Perubahan atas Pergub DIY No 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Pergub DIY Nomor 65 tahun 2022 tentang Perubahan atas Pergub DIY Nomor 64 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Penyesuaian Anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Insentif Daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021.
	Perubahan Kedua atas Pergub DIY No 64 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Pergub DIY Nomor 74 tahun 2022 tentang Perubahan atas Pergub DIY Nomor 64 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Penyesuaian Anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Insentif Daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022.
	Perubahan Ketiga atas Pergub DIY No 64 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Pergub DIY Nomor 75 tahun 2022 tentang Perubahan atas Pergub DIY Nomor 64 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, serta pergeseran atas uraian dari sub rincian objek atas persetujuan Pengguna Anggaran.
	Perubahan Keempat atas Pergub DIY No 64 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Pergub DIY Nomor 84 tahun 2022 tentang Perubahan atas Pergub DIY Nomor 64 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Penyesuaian Anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari hasil pajak rokok dan sesuai surat persetujuan Pergeseran Anggaran Perubahan TA 2022 pada Badan Kepegawaian Daerah DIY.
	Pedoman Standar Belanja Tahun Anggaran 2023	Pergub DIY Nomor 28 tahun 2022 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2023	Pedoman batasan belanja bagi perangkat daerah dalam menentukan komponen belanja untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang D diselesaikan
	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023	Pergub DIY Nomor 86 tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023	Pedoman Bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023
	Penerapan Corporate University untuk pengembangan kompetensi ASN	Pergub DIY Nomor 6 Tahun 2022 tentang <i>Corporate University</i> Pemerintah Daerah DIY Pasal 1 Ayat (8) <i>Corporate University</i> yang selanjutnya disebut <i>Corpu</i> merupakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi terintegrasi sebagai sistem, entitas dan strategi pengembangan kompetensi sumber daya manusia Aparatur yang mengedepankan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap perilaku.	<p>a. Penerapan sistem merit salah satu tujuannya adalah menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas serta mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>b. Memenuhi hak dan kesempatan ASN dalam mengembangkan kompetensi melalui pelatihan klasikal dan pelatihan non klasikal berbasis smart learning.</p>
	Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Daerah	Pergub DIY Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Daerah	Mendukung keberhasilan dan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji daerah melalui pemilihan Calon Petugas Haji Daerah DIY
	Pembentukan Tim Petugas Haji Daerah	SK Gub DIY Nomor 84/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Petugas Haji Daerah;	Mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan umum, kesehatan, dan bimbingan ibadah bagi jamaah haji asal DIY
	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif untuk peserta didik berkebutuhan khusus	Pergub Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Mengoptimalkan pemenuhan hak layanan pendidikan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus di DIY guna meminimalkan kesenjangan kapasitas dan kualitas antar satuan pendidikan
	Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis DIY	SK Gub DIY Nomor 55/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis DIY;	Sebagai upaya penanggulangan tuberkulosis yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang dikhawatirkan berdampak pada kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi
	Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan di Wilayah DIY;	SE Gub DIY Nomor 11/SE/VII/2022 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan di Wilayah DIY;	Sebagai upaya pengendalian penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan
	Percepatan Eliminasi dan Pemeliharaan Malaria;	SE Gub DIY Nomor 443/16967 tahun 2022 tentang Percepatan Eliminasi dan Pemeliharaan Malaria;	Sebagai upaya eliminasi malaria lingkup provinsi dan menjamin keberlangsungan eliminasi malaria
	Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Pelindungan anak	Pergub DIY Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Pelindungan anak Dalam Rangka Mewujudkan DIY layak anak Tahun 2023-2027.	<p>a. Arahkan strategi dan program dalam mewujudkan Daerah Layak Anak;</p> <p>b. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam mewujudkan Daerah Layak Anak;</p> <p>c. Memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan Daerah Layak Anak.</p>
	Pedoman Penanganan Kenakalan anak di Jalanan	SE Sekda DIY Nomor 463/05155 tentang Hasil Kajian Kenakalan Anak di Jalanan di DIY	a. Mengetahui latar belakang permasalahan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang D diselesaikan
			<ul style="list-style-type: none"> b. Mencari solusi untuk mengatasi maraknya kenakalan anak dijalan c. Rekomendasi umum dan khusus untuk ditindaklanjuti instansi/ lembaga terkait
	Kesiapan DIY menuju provinsi inklusi	SE Sekda DIY Nomor 460/07298 Tentang Kesiapan DIY menuju propinsi inklusi	<ul style="list-style-type: none"> a. Persiapan DIY menuju propinsi inklusi b. Rekomendasi umum dan rekomendasi khusus pada bidang kebencanaan, perubahan iklim, pariwisata, seni budaya, komunikasi, informasi dan politik serta Roadmap kesiapan DIY menuju propinsi inklusi Tahun 2023.
	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan PEMDA DIY	Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian Nomenklatur Dinas Perizinan dan Penanaman Modal menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. Kelembagaan Paniradya Kaistimewan c. Kelembagaan Rumah Sakit Daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
	Pedoman Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergub DIY Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPT pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 2. Pergub DIY Nomor 90 – No 118 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD. 	<p>Beberapa perubahan yang diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penambahan fungsi terkait pembinaan reformasi birokrasi, penyiapan proses bisnis, dan pengembangan teknologi dan informasi yang terintegrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). b. Penambahan fungsi sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional sesuai bidangnya. c. Sinkronisasi tugas dan fungsi sesuai substansi pada masing-masing unit kerja. d. Penyesuaian Tata Kerja pasca penyederhanaan birokrasi.
	Kebijakan Pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JLLS)	1. Perda DIY Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2017-2022;	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat terpetakannya titik rawan amblesan/ longsor/goa/luweng bawah tanah disepanjang JLLS sebagai antisipasi/mitigasi bencana pada JLLS khususnya di wilayah Gunung Kidul;

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2019 - 2039; 3. Perda DIY Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup; 4. Perda DIY Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan bencana. 5. Ingub DIY Nomor 32/INSTR/2022 tentang Kebijakan Pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JLLS) 	<ol style="list-style-type: none"> b. Adanya kajian jalan alternartif di titik rawan amblesan/longsor/goa/luweng bawah tanah di sepanjang JLLS sebagai antisipasi/mitigasi bencana pada JLLS khususnya wilayah Gunung Kidul.
	<p>Arah Pengembangan Infrastruktur pada Rencana Jalan Tol di DIY</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana tata ruang Wilayah DIY Tahun 2019 – 2039 2. Kajian Kesiapan Infrastruktur Transportasi Mengantisipasi Rencana Jalan Tol di DIY 3. SE Gub Nomor 620/20804 tanggal 20 Desember 2022 tentang Arah Pengembangan Infrastruktur pada Rencana Jalan Tol di DIY 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan tata ruang yang mengatur pemanfaatan ruang pada exit toll, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi kesesuaian perkembangan ruang, kegiatan ekonomi dan perkembangan transportasi 2. Pengaturan dan pengendalian melalui Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kawasan exit toll, khususnya exit toll Banyurejo. 3. Pembangunan fun park di kawasan exit toll sebagai simpul transportasi sekaligus ekonomi baru, khususnya untuk mengakomodasi pemasaran produk ekonomi lokal. b. Pengembangan aspek sosial ekonomi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ekonomi lokal melalui program optimalisasi potensi ekonomi kreatif, optimalisasi potensi kawasan wisata, penyediaan ruang pameran/display produk UMKM, dan peningkatan usaha kerja sama antar desa (supradesa). 2. Peningkatan SDM dan Kelembagaan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha dan produk UMKM, peningkatan peran POKDARWIS, peningkatan kerja sama antar desa dalam pengelolaan kawasan wisata dan usaha ekonomi kreatif, dan penerapan model kemitraan. c. Pengembangan infrastruktur transportasi secara teknis, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan jembatan didekat <i>exit toll</i> Gamping dan Purwomartani 2. Koordinasi simpang antara Simpang exit toll Gamping dengan simpang Pasar Hewan Ambar ketawang.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelebaran geometri jalan menjadi minimal 9 meter dan kelas jalan II, pada ruas jalan Mandung ;Simpang Mandung (selatan)-Simpang terminal Wates; Simpang Mandung (Utara)-Simpang Ngelo (Sentolo); Simpang Ngeplang (Sentolo); Simpang Ngeplang-Simpang Lapangan Tembak; Simpang Exit Banyurejo–Simpang pasar Kemusuh; Simpang <i>exit toll</i> Banyurejo-Simpang Tempel. 4. Pelebaran geometri jalan menjadi 4/2 D dan kelas Jalan II pada: Simpang pasar Stan Tajem-Simpang Besi (Jalan Kaliurang); Ruas jalan Prambanan-Piyungan; dan sepanjang selokan Mataram dari Jl. Magelang-Ringroad Timur. 5. Pelebaran geometri jalan menjadi 6/2 D dan Kelas Jalan I pada Ruas Jalan dari Simpang Maguwo-Simpang Pasar Prambanan dan Ruas Jalan dari Simpang Gamping-Simpang YIA. 6. Penerapan Sistem Satu Arah pada ruas jalan utama dari Ringroad Utara sampai Selokan mataran. 7. Penyediaan fasilitas angkutan umum dan sepeda di rest area dan fun park; memfungsikan rest area sebagai simpul angkutan umum dengan menyediakan ruang tunggu/tempat naik-turun penumpang angkutan umum dan menyediakan akses/jalur sepeda di rest area.
	Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) di DIY	Pergub DIY Nomor 71 Tahun 2022 tanggal 17 November 2022 Tentang Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) di DIY	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) ditujukan untuk pengelolaan Warisan Geologi (Geoheritage) secara bijak dengan memperhatikan nilai keunikan geologi dan kelestariannya, mengupayakan pelestarian Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity), serta pengelolaan Keragaman Geologi (Geodiversity), melalui kegiatan yang terencana, dengan memadukan pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat setempat ke dalam proses pembangunan yang berkelanjutan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan kesinambungan hidup generasi masa kini dan generasi masa depan b. Untuk mengoptimalkan pengelolaan Taman Bumi (Geopark) di DIY serta untuk menjaga kesinambungan tahapan pengembangan Taman Bumi (Geopark) sebagaimana ketentuan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang D diselesaikan
			<p>Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), perlu dilakukan pembaharuan substansi Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Situs Warisan Geologi.</p>
	<p>Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di DIY</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergub DIY Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022. 2. SE Gub Nomor 16/SE/XII/2022 Tentang Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di DIY 	<ol style="list-style-type: none"> a. Masih terdapat beberapa indikator/target TPB dalam RAD TPB DIY belum tercapai/tidak ada data capaian. b. Bertujuan untuk mendorong Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Pemda DIY untuk melakukan upaya percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di wilayah Kabupaten/Kota maupun DIY, sesuai dengan wewenang dan tugas fungsi masing-masing. c. Mengidentifikasi dan memobilisasi potensi pemangku kepentingan nonpemerintah sebagai mitra strategis untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. d. Perangkat Daerah Pemda DIY agar mengupayakan ketersediaan data terkait pencapaian masing-masing target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan melaporkan perkembangan pencapaiannya kepada Gubernur.
	<p>Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2. Pergub DIY Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Isimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana telah diubah dengan Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pergub DIY Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Isimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 3. Ingub DIY Nomor 21/INSTR/2022 tentang Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY 	<p>Untuk melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di lingkungan Perangkat Daerah Secara Sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah baik secara mandiri maupun Kawasan.</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang D diselesaikan
	Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Dana Alternatif untuk Pembiayaan Pembangunan Daerah	Ingub DIY Nomor 25/INSTR/2022 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Dana Alternatif untuk Pembiayaan Pembangunan Daerah	Bertujuan menginstruksikan kepada OPD dan Kabupaten/Kota agar mengoptimalkan pemanfaatan sumber dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan.
	Mekanisme untuk menilai dampak rencana dan pelaksanaan pembangunan terhadap warisan budaya	Pergub DIY Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Analisis Dampak Pada Warisan Budaya	<p>a. Untuk mewujudkan tuntutan agar warisan budaya tetap lestari dan berperan dalam pembangunan, maka diperlukan suatu mekanisme untuk menilai dampak rencana dan pelaksanaan pembangunan terhadap warisan budaya. <i>Heritage Impact Assessment</i> (Analisis Dampak terhadap Warisan Budaya adalah jawaban atas kebutuhan untuk menilai dampak pembangunan atas kelestarian warisan budaya.</p> <p>b. Sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah DIY di dalam menjaga keistimewaan pada Kawasan cagar budaya diperlukan upaya semua pihak untuk melakukan pengendalian terhadap perkembangan pembangunan baru dan pelestarian cagar budaya melalui proses perizinan, pengawasan dan pemberian sanksi administrasi agar terjaga karakter dan citra keistimewaan DIY melalui terlestarikannya tata ruang dan suasana yang menunjukkan nilai-nilai budaya lokal pada penampilan kotanya, sebagai bentuk pengendalian perlu adanya Analisis Dampak Pada Warisan Budaya.</p> <p>c. Analisis Dampak Pada Warisan Budaya merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan antara pelestarian Cagar Budaya dan pembangunan yang berkelanjutan di DIY.</p>
	Penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik	Perda DIY Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Sebagai landasan hukum dan pedoman pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemda DIY
	Pemutakhiran Data Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY	Pergub DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	<p>Upaya penataan dan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang bertujuan untuk:</p> <p>a. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien dan akuntabel</p> <p>b. Sumber daya pusat data milik Pemda DIY dapat digunakan dengan efektif dan efisien</p>
	Pelaksanaan Rekomendasi Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan	Pergub DIY Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah DIY	Upaya dalam Rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE bertujuan untuk:

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang D diselesaikan
	Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun Anggaran 2024 Pemda DIY		<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE dalam tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik d lingkungan Pemerintah Daerah; b. Menjaga performa dan keberlangsungan layanan pusat daya; dan c. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya pusat data.
	Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Preneur	Pergub DIY Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Preneur	<ul style="list-style-type: none"> a. Sebagai pedoman permasalahan Desa Preneur di wilayah DIY; b. Meningkatkan jumlah Wirausaha Baru berbasis potensi Kalurahan; c. Menurunkan angka kemiskinan di wilayah pedesaan; d. Menurunkan ketimpangan wilayah; e. Penentuan lokasi Desa preneur, keterlibatan OPD Kab/Kota dalam pelaksanaan Desa Preneur.
	Pembentukan Tim Jogja Inkubator DIY	Kepgub DIY Nomor 58/TIM/2022 Tanggal 24 Maret 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 54/TIM/2022 Tentang Pembentukan Tim Jogja Inkubator DIY Tahun Anggaran 2022	Membantu memberikan program kepada wirausaha pemula atau <i>startup</i> , yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis.
	Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah DIY (Kebijakan Biro Perekonomian)	Pergub DIY Nomor 47 Tahun 2022 Tanggal 29 Agustus 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah DIY	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyinkronkan Data UMKM di seluruh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY dan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten IKota b. Mewujudkan Data UMKM yang berkualitas, lengkap, akurat, terkini dan representatif serta mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan c. Mewujudkan basis Data UMKM dengan Satu Data yang terpadu melalui sistem pendataan yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi.
	Pemanfaatan Bagian – Bagian Jalan Provinsi khususnya pada penanaman dan penebangan pohon serta pembuatan jalan masuk.	Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang penggunaan dan pemanfaatan bagian - bagian jalan provinsi	Tata cara penanaman pohon, Penebangan Pohon, dan pembuatan jalan masuk pada bagian – bagian jalan provinsi.
	Pemberian, pembinaan, dan pengawasan Perizinan Berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian	Pergub Nomor 39 Tahun 2022 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan	Sebagai landasan hukum dan pedoman pengelolaan pertambangan di DIY yang terdiri dari pemberian sertifikat standar, pemberian izin berusaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan baik yang dilimpahkan dari pemerintah pusat maupun permohonan baru, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara		izin, pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan, penetapan harga patokan penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan serta pemberian rekomendasi/persetujuan terkait pelaksanaan izin.
	Penanganan Kasus Kekerasan pada perempuan dan anak melalui UPT Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY	Pegub DIY Nomor2 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak secara komprehensif
	Penanganan Kenakalan Remaja melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) PRIMA	KepGub DIY Nomor 75/TIM/2022 Tentang Pembentukan Tim Pusat Pembelajaran Keluarga Prima DIY Periode 2022-2027	Mewujudkan keluarga Tangguh guna mewujudkan keluarga yang baik bagi tumbuh kembang remaja, memenuhi hak anak dan melindungi dari kekerasan
	Pemberian insentif bagi guru dan tenaga kependidikan	1. Kepgub DIY Nomor 8/KEP/2022 tanggal 10 Januari 2022 Tentang Penetapan Penerima Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2022 2. Kepgub DIY Nomor 246/KEP/2022 Tentang Perubahan Atas Kepgub DIY Nomor 8/KEP/2022 Tentang Penetapan Penerima Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 Agustus 2022	a. Penyaluran insentif kepada guru dan tenaga kependidikan yayasan di SMA, SMK, dan SLB Swasta b. Penyaluran insentif kepada guru pendamping khusus di sekolah inklusif
	Implementasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Perda DIY Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022 Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Pengintegrasian Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kurikulum pembelajaran sebagai salah satu suplemen pembelajaran yang dapat diterapkan di semua mata pelajaran
	Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, dan/Atau Bakat Istimewa	Perda DIY Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, dan/Atau Bakat Istimewa	Pedoman bagi Pemerintah Daerah DIY dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan pendidikan khusus a. Pengaturan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah b. Pengaturan peran serta komite sekolah c. Pengaturan peran serta orangtua d. Pengaturan peran serta dunia usaha dan industri e. Pengaturan peran serta masyarakat f. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas g. Pelaksanaan pendidikan khusus
	Penyaluran Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan	1. Kepgub DIY Nomor 93/KEP/2022 tanggal 14 April 2022 Tentang Penerima Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan DIY Tahun 2022 Tahap I	Penyaluran bantuan penyelesaian administrasi di sekolah bagi para lulusan SMA dan SMK di DIY sehingga dapat mengambil ijazah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		2. Kepgub DIY Nomor 307/KEP/2022 tanggal 26 Oktober 2022 Tentang Penerima Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan DIY Tahap 2 Tahun 2022	
	Penyaluran beasiswa pendidikan	1. Pergub DIY Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa tanggal 21 April 2022 2. Pergub DIY Nomor 68 Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 Tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa	Penyaluran beasiswa pendidikan yang meliputi persyaratan penerima dan mekanisme penyaluran beasiswa
	Penyaluran beasiswa Kartu Cerdas	1. Kepgub DIY Nomor 116/KEP/2022 Tentang Penerima Beasiswa Kartu Cerdas Tahap I DIY Tahun 2022 tanggal 11 Mei 2022 2. Kepgub DIY Nomor 296/KEP/2022 tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Penerima Beasiswa Kartu Cerdas Tahap 2 DIY Tahun 2022	Penetapan penerima Beasiswa Kartu Cerdas SMA dan SMK Tahap 1 dan 2
	Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang pendidikan menengah dan khusus	Pergub DIY Nomor 17 Tahun 2022 tanggal 12 Mei 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa	a. Persyaratan sebagai calon peserta didik baru b. Penetapan jumlah rombongan belajar c. Alur penyelenggaraan PPDB d. Penerimaan peserta didik pindahan
	Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SLB Swasta	Kepgub DIY Nomor 137/KEP/2022 tanggal 10 Juni 2022 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Berupa Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Sekolah Luar Biasa Swasta DIY Tahun 2022	Penetapan penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SLB Swasta di DIY
	Penyaluran Beasiswa Asrama	Kepgub DIY Nomor 138/KEP/2022 tanggal 10 Juni 2022 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Penyediaan Biaya Peserta Didik Pendidikan Khusus Berupa Beasiswa Untuk Biaya Asrama Sekolah Luar Biasa Negeri DIY Tahun 2022	Penetapan penerima beasiswa asrama bagi siswa SLB yang tinggal di asrama di DIY
	Penyaluran Beasiswa Inklusi	Kepgub DIY Nomor 139/KEP/2022 tanggal 10 Juni 2022 Tentang Penetapan Siswa Berkebutuhan Khusus Penerima Bantuan Penyediaan Biaya Peserta Didik Pendidikan Khusus Berupa Beasiswa Inklusi Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi DIY Tahun Anggaran 2022	Penetapan penerima beasiswa inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah inklusif jenjang pendidikan dasar dan menengah di DIY

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Penyaluran Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus	Kepgub DIY Nomor 295/KEP/2022 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus DIYTahun Anggaran 2022 tanggal 17 Oktober 2022	Penetapan penerima beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus bagi siswa SLB di DIY yang berasal dari keluarga kurang mampu
	Rerouting Angkutan Perkotaan	Pergub DIY Nomor 89 Tahun 2022 tentang Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pedoman jaringan trayek dalam pelaksanaan angkutan perkotaan di Yogyakarta. 2. Menambahkan trayek angkutan perkotaan yang menghubungkan perkotaan Bantul dengan Kawasan sumbu filosofis sebagai upaya mendorong visi misi Gubernur dalam pengembangan sisi selatan Yogyakarta.
	Penetapan Tarif Rp 60,00 untuk pelajar	Kepgub DIY Nomor 360/KEP/2022 tentang Tarif Angkutan Bus Perkotaan Trans Jogja, Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pedoman kepada operator angkutan dalam penentuan tarif layanan yang akan dibebankan kepada masyarakat. 2. Memberikan kepastian kepada pengguna angkutan umum terhadap tarif yang dibebankan oleh operator.
	Pengendalian Malioboro sebagai Kawasan semi pedestrian	SE Gub DIY Nomor 551/4671 tanggal 31 Maret 2022 tentang Larangan Operasional Kendaraan tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya.	Memberikan rasa aman kepada pejalan kaki di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya mengingat penggunaan kendaraan tertentu menggunakan Penggerak Motor Listrik pada jam-jam diterapkannya Malioboro sebagai Kawasan semi pedestrian dirasa membahayakan pejalan kaki.
	Becak Kayuh dengan tenaga Penguat	Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong, di tahun 2022 telah dilaksanakan pengadaan prototype Becak Pedal Listrik, kajian pendataan, pendaftaran jenis jumlah dan penetapan wilayah operasi transportasi tradiional serta dilakukan dialog transportasi DIY.	Dengan adanya becak pedal listrik maka pertumbuhan becak motor di kawasan sumbu filosofi yang merupakan angkutan ilegal dapat dikurangi sehingga pelestarian becak kayuh sebagai moda transportasi tradisional dapat dipertahankan.
	Rencana Pembangunan Industri DIY Tahun 2019-2039	Perda DIY Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri DIY Tahun 2019-2039.	Sebagai landasan hukum dan pedoman pembangunan sektor perindustrian di DIY .
	Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan	Pergub DIY Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan	Sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan
	Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DIY	Kepgub DIY Nomor 66/TIM/2022 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DIY	Guna meningkatkan mutu pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha, maka perlu dibentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Pergub DIY Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.	Sebagai prosedur pelaksanaan pengawasan perizinan berbasis resiko supaya selaras dengan regulasi yang berlaku
	Pengelolaan Perpustakaan Digital	Pergub DIY Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Perpustakaan Digital	<ul style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan, menyimpan, dan mengorganisasi informasi dan Bahan Perpustakaan dalam format digital; b. mengelola informasi digital sebagai bahan rujukan dan penelitian; b. memberikan layanan kepada Pemustaka dalam memperluas wawasan dan pengetahuan; c. aksesibilitas belajar sepanjang hayat dengan media teknologi; dan d. sarana promosi dan mengembangkan minat baca di kalangan pengguna internet.
	Pengembangan Koleksi Perpustakaan	Pergub DIY Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Koleksi Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pengolahan Koleksi dalam pelayanan Perpustakaan di Daerah agar lebih berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan; b. menjamin ketersediaan Koleksi pada saat dibutuhkan dalam pelayanan Perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan; b. meningkatkan eksistensi Perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, serta pelestarian budaya daerah, dan tempat berkreasi; c. meningkatkan mutu dan keanekaragaman Koleksi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan Pemustaka/Masyarakat; d. meningkatkan keanekaragaman jenis Koleksi; dan e. mendukung pelestarian budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran Masyarakat sepanjang hayat.
	Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat	Nomor 0459 / KHPP / Bakdamulud.X / EHE.1956.2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat; b. Mewujudkan berlangsungnya pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, pelestarian budaya dan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang D diselesaikan
			rekreasi sesuai dengan karakteristik nilai-nilai budaya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat; c. Melaksanakan pemberdayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat secara luas; d. d. Menyediakan koleksi bahan perpustakaan yang mampu meningkatkan kegiatan kreatif, imajinatif, inspiratif dan menyenangkan bagi masyarakat.
	Fasilitasi Penyelenggaraan Kearsipan Kasultanan dan Kadipaten	Pergub DIY Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Kearsipan Kasultanan dan Kadipaten	Mendukung terwujudnya pelaksanaan tata kearsipan di Kasultanan dan Kadipaten secara tertib yang menjaminketersediaan informasi secara cepat, tepat, dan lengkap.
	Penetapan Delineasi Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kepgub DIY Nomor 10/Kep/2022 tentang Penetapan Delineasi Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa DIY No 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, perlu untuk menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Delineasi Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
	Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di DIY	Kepgub DIY Nomor 69/Kep/2022 tanggal 17 Maret 2022	Rencana Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta
	Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di DIY	Kepgub DIY Nomor 200/Kep/2022 tanggal 5 Juli 2022	Rencana Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen
	Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Prambanan-Lemahbang Segmen A di Kalurahan Bokoharjo dan Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman	Kepgub DIY Nomor 211/Kep/2022 tanggal 13 Juli 2022	Rencana Pembangunan Ruas Jalan Prambanan-Lemahbang Segmen A di Kalurahan Bokoharjo dan Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman
	Penetapan Lokasi Pembangunan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Piyungan Kabupaten Bantul	Kepgub DIY Nomor 243/Kep/2022 tanggal 29 Agustus 2022	Rencana Lokasi Pembangunan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Piyungan Kabupaten Bantul
	Penetapan Lokasi Pembangunan Pengembangan Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan DIY di	Kepgub DIY Nomor 392/KEP/2022 Tanggal 27 Desember 2022	Rencana Pembangunan Pengembangan Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan DIY di Kalurahan Palbapang, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Kalurahan Palbapang, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul		
	Perubahan Atas Keputusan Gubernur DIY No 385/KEP/2020 tentang penetapan lokasi pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen di DIY	Kepgub DIY Nomor 405/KEP/2022 Tanggal 29 Desember 2022	Rencana Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen
	Himbauan Penggunaan Pupuk Berimbang dan Pemanfaatan Pupuk Organik Sebagai Antisipasi Semakin Menurunnya Produktifitas pertanian	SE Gub Nomor 7/SE/IV/2022 tentang Himbauan Penggunaan Pupuk Berimbang dan Pemanfaatan Pupuk Organik Sebagai Antisipasi Semakin Menurunnya Produktifitas pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong pemupukan berimbang dalam kegiatan budidaya tanaman khususnya di lahan sawah. b. Meningkatkan penggunaan pupuk organik dan meminimalisir penggunaan pupuk kimia c. Megoptimalkan aktivitas produksi pupuk organik melalui pengembangan dan pemanfaatan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang sudah ada. d. Memanfaatkan limbah pertanian sebagai bahan baku produksi pupuk organik e. Memanfaatkan limbah peternakan sebagai pupuk organik baik dalam bentuk padat maupun cair. f. Mendorong setiap rumah tangga memproses limbah organik menjadi pupuk organik dalam rangka menuju Jogja bersih, sehat dan <i>go organik</i>.
	Peningkatan Kewaspadaan Terhadap penyakit mulut dan kuku (PMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta	SE Gub Nomor 8/SE/V/2022 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap penyakit mulut dan kuku (PMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta	Dalam rangka kewaspadaan terhadap ancaman masuk dan menyebarnya Penyakit Mulut dan Kuku di wilayah DIY perlu dilakukan mitigasi risiko dan tindakan pencegahan dan pengendalian PMK
	Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Kurban Dalam Situasi Wabah penyakit mulut dan kuku di Daerah Istimewa Yogyakarta	SE Gub Nomor 10/SE/VI/2022 Tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Kurban Dalam Situasi Wabah penyakit mulut dan kuku di Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pemantauan ketersediaan hewan kurban serta menghimbau masyarakat agar penyediaan hewan kurban dari dalam wilayah DIY telah dilengkapi dengan sertifikat veteriner dan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) b. Menetapkan atau menentukan tempat penjualan hewan kurban serta tempat pemotongan hewan kurban c. Melaksanakan pemantauan tata pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan kurban dalam situasi wabah PMK. d. Melakukan sosialisasi pelaksanaan kurban, pemotongan hewan kurban serta penanganan daging kurban dalam situasi wabah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang D diselesaikan
			<p>PMK kepada masyarakat, panitia kurban, pemuka agama, tokoh masyarakat melalui media cetak, elektronik serta media lainnya.</p> <p>e. Melakukan pengawasan pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK pada tempat penampungan, tempat penjualan hewan kurban dan tempat pemotongan hewan kurban, serta proses pendistribusian daging hewan kurban.</p>
	Penetapan Status Siaga Darurat penyakit mulut dan kuku di Daerah Istimewa Yogyakarta	Kepgub DIY Nomor 198/KEP/2022 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat penyakit mulut dan kuku di Daerah Istimewa Yogyakarta	<p>a. menetapkan Status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tanggal 1 Juli 2022- 31 Juli 2022</p> <p>b. Status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi</p>
	Kesejahteraan Lanjut Usia	Perda DIY Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	<p>a. Dalam rangka memberikan arah dan pedoman bagi semua pihak di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia, yang menjadi payung hukum bersama.</p> <p>b. Menjadi Dasar Penyusunan Pergub terkait Forum Komunikasi Lembaga Kelanjutusiaan, Grha Lansia, dan pelayanan Sosial Lanjut Usia.</p>
	Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maka Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dilakukan menjadi Raperda Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, saat ini masih dalam tahapan evaluasi dari Kemendagri	<p>a. Dalam rangka memberikan arah dan pedoman bagi semua pihak di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan perlindungan, pemenuhan hak disabilitas yang menjadi payung hukum bersama.</p> <p>b. mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;</p> <p>c. menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan pemajuan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas; mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;</p> <p>d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan</p> <p>e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas untuk</p>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya.
	Integrasi data dan Validasi data.	Pergub DIY Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Validasi Unggul Berbasis Digital dengan Rumah Data Sejahtera Masyarakat Jogja	Mengupayakan integrasi berbagai data-data kesejahteraan sosial dari berbagai sumber yang potensial dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatannya untuk memetakan sasaran dan menentukan prioritas intervensi. Sehingga dapat diperoleh data yang akurat untuk intervensi yang lebih tepat sasaran dan tepat manfaat.
	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1. Pergub DIY Nomor 52 tahun 2022 tentang Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau . 2. Penetapan Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos DBH CHT yang di tetapkan dengan SK Gubernur Nomor 326/KEP/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.	Dalam rangka memberikan pedoman dalam pencairan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
	Penyelenggaraan Pelindungan Anak	Peraturan Daerah DIY Nomor 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak direviu pada tahun 2021	a. mewujudkan pemenuhan hak dan kedudukan Anak; b. memberikan jaminan bagi Anak agar terpenuhi hak dan kedudukannya; c. memperkuat peran Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelindungan anak; dan d. meningkatkan kapasitas orang tua, keluarga, dan masyarakat.
	Penanganan pada Anak Berhadapan Hukum	Pergub DIY Nomor 16 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial.	Dalam rangka memberikan dasar bagi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) untuk melakukan penanganan pada Anak Berhadapan Hukum BPRSR merupakan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditunjuk dan ditetapkan dengan peraturan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.
	Pembentukan forum kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan	Kepgub DIY Nomor 86/KEP/2022 tentang Pembentukan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pemda DIY	a. Meminimalisir ketidakpatuhan pemberi kerja dalam jaminan sosial (pendaftaran peserta, penyampaian data yang lengkap dan benar serta pembayaran iuran) melalui program kerja bersama yang mengutamakan pada sosialisasi dan edukasi tentang jaminan sosial sesuai dengan kewenangan masing-masing pemangku kepentingan (anggota Forum kepatuhan);

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang D diselesaikan
			b. Apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan program kerja kepatuhan.
	Penetapan Upah Minimum Provinsi	Kepgub DIY Nomor 338/KEP/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> a. UMP akan dipergunakan oleh Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk ditetapkan Upah Minimum Kabupaten yang bersangkutan; b. Memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang bertujuan agar upah pekerja/buruh tidak dibayar terlalu rendah akibat ketidakseimbangan pasar kerja; c. SK Gubernur ini ditetapkan pada tahun 2022 dan berlaku untuk tahun 2023.
	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota	Kepgub DIY Nomor 353/KEP/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang bertujuan agar upah pekerja/buruh tidak dibayar terlalu rendah akibat ketidakseimbangan pasar kerja; b. Sebagai jaring pengaman agar tidak ada nilai upah yang lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan; c. SK Gubernur ini ditetapkan pada tahun 2022 dan berlaku untuk tahun 2023.
	Pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.	SE Gubernur DIY Nomor 5/SE/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan	Memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh memperoleh hak THR sesuai dengan ketentuan baik besaran THR dan waktu pemberian THR.
	Perencanaan Pengawasan Lingkup DIY tahun 2023	Kepgub DIY Nomor 401/KEP/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan lingkup DIY Tahun Anggaran 2023 b. Pelaksanaan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota.
	Penertiban Tanah Kasultanan, Tanah kadipaten dan Tanah Desa.	Pergub Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa	Penertiban pemanfaatan tanah kas desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta yang tidak memiliki ijin Gubernur.
	Penanganan Kejahatan Jalanan / Klithih	Perda Nomor 2 Th 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Mengantisipasi makin maraknya kejahatan jalanan / klithih, dengan melaksanakan patroli terpadu dan serentak antara Satpol PP DIY dengan Satpol PP Kab / Kota, Polda DIY, Polres Kab / Kota, Jagawarga dan Satlinmas Kalurahan / Kelurahan.
	Penertiban Tambang Ilegal	1. Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penertiban aktivitas tambang ilegal / tidak memiliki ijin.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		2. Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan.	
	Pengaturan penugasan urusan keistimewaan	Pergub DIY Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan.	Penyesuaian penugasan empat (4) Urusan Keistimewaan melingkupi Urusan Kelembagaan, Urusan Pertanahan, Urusan Tata Ruang dan Urusan Kebudayaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dengan regulasi terkait urusan masing-masing. Hal ini dilakukan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan dalam rangka mewujudkan tujuan Keistimewaan. Peraturan Gubernur ini mencabut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan.
	Pemulihan ekonomi imbas pandemi Covid-19	KepGub DIY Nomor 35/KEP/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Retribusi Penyewaan Bangunan Milik Daerah Pada Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesulitan UMKM dalam pembayaran sewa <i>cafeteria</i> dan <i>art shop</i> di Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta Taman Mini Indonesia Indah imbas pandemi Covid-19 b. Pemda tetap menerima PAD dari sewa <i>cafeteria</i> dan <i>art shop</i> meski besarnya 50%. c. Anjungan DIY TMII tetap memiliki fasilitas <i>cafeteria</i> dan <i>art shop</i>

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2021

1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Dalam Perubahan APBD

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2022 diharapkan mencapai target sebagaimana target pada RPJMD Tahun 2017-2022.	<p>Upaya Pemda DIY dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada RPJMD dilakukan dengan Strategi pembangunan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan Ekonomi dengan cara mendorong operasionalisasi dan peningkatan investasi dengan memantapkan pasokan energi dan mengoptimalkan paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal sesuai dengan potensi/tema pengembangan kawasan serta meningkatkan upaya pemulihan ekonomi nasional menanggapi pandemik Covid-19. 2. Transformasi Ekonomi dengan cara peningkatan produktivitas UMKM melalui pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, kemudahan akses pemasaran, dan peningkatan kualitas SDM serta pemenuhan tenaga kerja yang terampil melalui peningkatan kualitas pendidikan kejuruan dan kualitas BLK untuk kebutuhan industrialisasi berteknologi tinggi, ekonomi kreatif, jasa pariwisata, dan produk berorientasi ekspor. 3. Meningkatkan konektivitas antar kawasan pengembangan, kota-kota utama, dan pusat pelayanan untuk meningkatkan jangkauan layanan dan distribusi 4. Pemerataan Wilayah dengan cara mengurangi kesenjangan antara wilayah melalui upaya pengembangan agroindustri dan ekowisata sebagai sektor unggulan serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian ketahanan sosial ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan di perdesaan dan mengurangi kesenjangan pendapatan di perkotaan. 	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi, Pengurangan Kesenjangan ekonomi antar wilayah, Pengentasan kemiskinan.
2.	Dukungan Kebijakan untuk bidang sektor ekonomi yang tumbuh negatif pada tahun 2021 harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY agar semua sektor lapangan usaha tumbuh positif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2021 sektor-sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan negatif adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor Industri pengolahan. Tindak Lanjut yang Dilakukan Pemda DIY untuk meningkatkan pertumbuhan sektor tersebut adalah dengan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di DIY sehingga dapat meningkatkan tingkat hunian kamar, serta memperpanjang lama tinggal wisatawan di DIY dengan meningkatkan jumlah atraksi di DTW. 2. Penerapan CHSE di setiap hotel dan restoran di DIY sebagai standar protokol kesehatan untuk mencegah penularan penyebaran Covid-19. 	Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan dan tingkat hunian kamar akibat adanya pandemi Covid-19, menurunnya ekspor akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mendorong peningkatan ekspor produk unggulan DIY. 4. Pada tahun 2022 Perekonomian DIY sudah kembali membaik yang ditunjukkan dengan tidak ada sektor yang mengalami pertumbuhan negatif semua lapangan usaha tumbuh positif bahkan tiga di antaranya mencapai pertumbuhan dua digit. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 18,26%, disusul jasa lainnya sebesar 15,04% dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,40%. 5. Membaiknya situasi dan kondisi dari pandemi berpengaruh positif terhadap animo wisatawan untuk berkunjung ke DIY. Tidak hanya jumlah kunjungan yang melonjak signifikan, tetapi juga lama tinggal. Tingkat pemesanan atau reservasi hotel melebihi prediksi, bahkan tertinggi sejak masa pandemi. Selain itu, tingkat belanja per wisatawan meningkat. 	
3.	Adanya proyek Jalan Tol Jogja -Bawen , Jogja – Solo agar Pemerintah Daerah DIY memastikan proyek tersebut membawa pertumbuhan ekonomi positif DIY dengan melibatkan tenaga kerja dan sumber bahan bangunan mengambil dari Warga DIY.	Pembangunan Jalan Tol Yogya – Bawen, Yogya Solo mempunyai dampak positif ekonomi terkait tenaga kerja dan pengambilan sumber bahan bangunan saat tahap konstruksi. Hal ini sesuai dengan paparan penyedia jasa konstruksi proyek jalan Tol di Dinas Perhubungan terkait Traffic management dan jalur mobilisasi dari lokasi quarry (di Kabupaten Bantul, Sleman dan Kulon progo) ke lokasi proyek. Pelibatan tenaga kerja lokal juga dilakukan baik dari pihak JTT (tahap perencanaan dan pengawasan konstruksi) maupun dari pihak kontraktor (pelaksanaan konstruksi).	Pelibatan tenaga kerja lokal dan sumber bahan bangunan dari wilayah setempat.
4.	Pertumbuhan ekonomi kabupaten yang di bawah pertumbuhan ekonomi DIY yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul agar dilakukan dukungan kebijakan agar mendekati pertumbuhan ekonomi DIY.	Mengarahkan pembangunan wilayah kepada tiga kabupaten tersebut dengan melakukan pemerataan investasi, pengembangan infrastruktur untuk mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. seperti penyelesaian pembangunan JJLS, pembangunan jembatan kretak 2, pembangunan Pelabuhan Perikanan Gesing, pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata di wilayah selatan Kabupaten Gunungkidul, perbukitan Menoreh di Kulon Progo dengan program Bedah Menoreh, optimalisasi pengelolaan Jogja Agro Park (JAP) di Kulon Progo, Penumbuhan Desa wisata di Kawasan Mangunan Bantul.	Pemerataan pembangunan, investasi dan pertumbuhan ekonomi.

2. Pengelolaan Pendapatan Daerah

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Target persentase Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkan pada tahun 2022 sebesar diatas 35%.	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah pada APBD DIY Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 38% sehingga sudah di atas 35%.	Memperbesar kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada pendapatan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal Pemda DIY.
2.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah DIY harus disesuaikan dengan target RPJMD pada tahun 2022.	Target Pendapatan Pemda DIY pada APBD DIY Tahun Anggaran 2022 telah melampaui target yang dicantumkan pada RPJMD DIY. Diharapkan pelaksanaan kinerja pendapatan tersebut mencapai target APBD DIY Tahun Anggaran 2022, sehingga realisasi pendapatan daerah melebihi target RPJMD DIY pada tahun 2022.	Realisasi Pendapatan Pemda DIY harus disesuaikan dengan target RPJMD pada tahun 2022 agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
3.	Target Pendapatan Tahun 2022 dan tahun setelahnya dengan memasang di atas Realisasi PAD tahun sebelumnya.	Target Pendapatan Asli Daerah pada APBD DIY Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.045.838.352.190,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.900.882.265.389,46 maka target tahun 2022 berada 9% lebih tinggi dibanding target tahun 2021.	Peningkatan kapasitas Fiskal Pemda DIY dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
4.	Mendorong Pemerintah Daerah DIY untuk menggali sumber-sumber pendapatan dengan memaksimalkan potensi yang ada yang selama ini belum digarap secara optimal. Langkah yang bisa ditempuh antara lain bagian-bagian jalan yang selama ini belum memiliki dasar hukum untuk pengenaan pajak/retribusi/sewa.	Terkait pemanfaatan Ruang Milik Jalan yang merupakan kewenangan Pemda DIY, saat ini sedang proses penyusunan dasar hukum pemanfaatan.	Peningkatan optimalisasi barang milik daerah.

3. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Target pendapatan BUMD agar lebih besar dari capaian tahun 2021.	Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan, menjaga kualitas produk yang dihasilkan, dan/atau melakukan inovasi usaha antara lain digitalisasi pelayanan, diversifikasi usaha dan meningkatkan promosi usaha.	Target pendapatan deviden BUMD berasal dari pembagian laba BUMD. Untuk dapat meningkatkan laba maka diperlukan upaya untuk meningkatkan pelayanan, menjaga kualitas produk yang dihasilkan, dan/atau melakukan inovasi usaha.
2.	BUMD yang pendapatan dibawah capaian tahun 2020 diharapkan bisa memetakan penyebab turunnya laba pada tahun 2021 dan mengantisipasi turunnya laba pada tahun 2022.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka mengantisipasi penurunan laba pada Bank BPD DIY antara lain pengembangan digital banking, baik melalui pengembangan produk dan layanan baru maupun penyempurnaan terhadap produk-produk digital yang telah ada, yaitu Laku Pandai, Mobile Banking, Cash Management System, Pengembangan Digitalisasi Transaksi dan Integrasi Sistem Keuangan Pemerintah Daerah, dan Kerja sama Perluasan Issuer dan/atau Acquiring ATM. 2. Upaya PT AMI untuk meningkatkan unit pariwisata antara lain dengan menyelenggarakan program atau even untuk menarik jumlah pengunjung. Pada Unit transportasi, PT AMI akan menambah jumlah bis operasi sesuai kondisi sebelum adanya pandemi serta program promosi untuk menarik minat calon pengguna transportasi publik. 	Deviden dari BUMD yang diterima Pemda DIY pada tahun anggaran 2020 merupakan hasil dari laba BUMD tahun 2019 sebelum terjadi pandemi Covid-19. Sedangkan pendapatan Deviden dari BUMD yang diterima Pemda DIY pada tahun anggaran 2021 merupakan hasil laba BUMD pada tahun 2020 yang menurun karena terjadi pandemi Covid-19. Penurunan kinerja atau laba BPD pada tahun 2020 disebabkan menurunnya permintaan kredit/pembiayaan akibat perlambatan ekonomi, adanya kebijakan relaksasi kredit dari OJK dan kebijakan penyaluran dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penurunan kinerja atau laba PT AMI pada tahun 2020 khususnya pada unit pariwisata yang disebabkan jumlah kunjungan wisatawan ke objek yang dikelola menurun karena kebijakan PPKM. Pada unit transportasi menurun karena pengurangan jumlah bis yang beroperasi sebagai akibat dari penurunan tingkat penggunaan jasa transportasi.
3.	Untuk Perusahaan PT Tirta Tama agar memberikan perencanaan yang kinerja BUMD yang bisa menghasilkan keuntungan bagi Pemerintah Daerah dan menghindari kerugian karena sesuai Naskah Akademik Penyusunan Perda Pendirian PT Tirta Tama bisa memberikan gambaran yang positif	<p>Dalam rangka peningkatan penyerapan/penjualan produksi air curah maka Perumda Air Bersih Tirtatama DIY menindak lanjuti dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kualitas air curah sesuai dengan Permenkes. 	Dalam rangka menghasilkan keuntungan sekaligus menghindari kerugian maka manajemen Perumda Air Bersih Tirtatama DIY mengupayakan peningkatan penyerapan/penjualan produksi air curah Perumda Air Bersih Tirtatama DIY pada

sehingga Perda Pendirian tersebut disetujui oleh DPRD DIY.	2. Meningkatkan kualitas pelayanan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY pada PDAM Kota Yogyakarta, PDAM Kabupaten Bantul dan PDAM Kabupaten Sleman.	PDAM Kota Yogyakarta, PDAM Kabupaten Bantul dan PDAM Kabupaten Sleman.
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

4. Hasil Penyelenggaraan Urusan Menjadi Kewenangan Daerah

a. Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang D diselesaikan
1.	Indeks Pembangunan Manusia terealisasi 80,22%, sementara target dalam RPJMD sebesar 81,40%.	<ol style="list-style-type: none"> Perkembangan IPM DIY menunjukkan perkembangan yang semakin membaik yang tercermin dari nilai indikator setiap dimensi yang semakin meningkat dan secara nasional berada di peringkat 2 meskipun belum memenuhi target di tahun 2022. Pada aspek kesehatan, beberapa upaya terkait penyediaan layanan yang sesuai standar dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. Pada aspek pendidikan, upaya yang dilakukan terkait peningkatan mutu dan aksesibilitas sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) 	<ul style="list-style-type: none"> Belum meratanya layanan pendidikan yang berkualitas. Mutu pendidikan yang belum optimal. Adanya disparitas tingkat pendidikan penduduk antarKabupaten/ Kota. Tingkat pendidikan tenaga kerja masih cukup rendah. Tingginya Prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Tingginya kasus beberapa Penyakit Menular, Distribusi. Tenaga Kesehatan kurang Merata. Prevalensi Balita Stunting di DIY masih Cukup Tinggi dan Angka Kematian Ibu masih belum bisa ditekan. Adanya ancaman wabah dan KLB. Masyarakat DIY belum sepenuhnya memiliki jaminan kesehatan.
2.	Indeks Gini menunjukkan stagnasi setelah intervensi kebijakan selama tahun 2021 lalu. Capaian indeks Gini sebesar 0,436 memang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2020, namun penurunannya hanya sebesar 0,001. Capaian kinerja di tahun 2021 ini masih sangat jauh dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 0,3705, dan juga target moderat dalam RKPD DIY Tahun 2021.	Mengarahkan intervensi program/kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, terutama di tiga kabupaten di wilayah selatan DIY, melalui peningkatan produktivitas pertanian dan industri pengolahan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, penumbuhan wirausaha baru, dan optimalisasi pemanfaatan potensi di daerah rawan pangan.	Pemerataan pembangunan, investasi dan pertumbuhan ekonomi.

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
3.	<p>Persentase Angka Kemiskinan DIY juga menunjukkan capaian positif berdasarkan target moderat RPKD Tahun 2021, namun masih sangat jauh dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 8,07%.</p>	<p>Jika melihat time release antara target dan realisasi RPJMD 2017 - 2022, persentase kemiskinan dari tahun ketahun angkanya mendekati target. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 persentase kemiskinan mengalami pelonjakan satu digit. Sehingga selama 2 tahun lebih pembangunan di DIY lebih difokuskan dalam urusan kesehatan. Sekarang ini pandemi Covid-19 dirasakan mulai melandai, pembangunan lebih difokuskan pada pemulihan ekonomi masyarakat DIY, dimana pemulihan ini tidak hanya menasar orang miskin, akan tetapi semua warga dan sektor yang terdampak.</p>	<p>Kemiskinan di DIY tetap menjadi isu utama dalam prioritas pembangunan dengan cara perbaikan DTKS, penentuan kantong kemiskinan dalam skala mikro sesuai potensi dan masalah dan pembuatan dokumen RPKD yang berfungsi dalam dokumen penanggulangan kemiskinan 5 tahunan. Selain itu koordinasi antara lintas sektor dan OPD, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan pihak swasta dapat bergerak membantu menurunkan angka kemiskinan di DIY.</p>
4.	<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) capaian kinerjanya pada tahun 2021 justru lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020. Indikator IKA dan IKTL kembali tidak memenuhi target seperti halnya yang terjadi pada tahun 2020.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="740 568 1242 1009">1. Upaya pengendalian pencemaran air sungai yang telah dilakukan Pemda DIY yaitu; upaya pembinaan, pengawasan lingkungan dan koordinasi dengan instansi terkait di DIY dan Kabupaten/Kota. Pembinaan dilakukan terhadap usaha/kegiatan dalam pengelolaan air limbah. Sedangkan pengawasan dilakukan terhadap ketaatan usaha/kegiatan dalam pengelolaan air limbah berdasarkan peraturan, dan sanksi akan diberlakukan jika terdapat pelanggaran. Koordinasi dengan instansi dan lembaga di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dilakukan agar upaya pengendalian pencemaran air sungai dapat dilakukan secara terpadu. Sedangkan upaya pencegahan juga dilakukan melalui pemberian rekomendasi terhadap ijin lingkungan yang akan diberikan terhadap usaha/kegiatan. <li data-bbox="740 1009 1242 1160">2. Upaya yang dilakukan Pemda DIY dalam pengendalian pencemaran udara di antara lain; melalui Pembinaan, pengawasan dan pencegahan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap usaha/kegiatan industri. Adanya insentif pemberian penghargaan memberikan motivasi pada pelaku 	<p>Upaya pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran air dan udara dapat mencegah dan mengendalikan tingkat cemaran air dan udara. Koordinasi lintas sektor terkait diharapkan dapat memadukan program/kegiatan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kewenangan masing-masing, sehingga permasalahan lingkungan dapat teratasi. Kurangnya lahan tutupan vegetasi sedikit demi sedikit dapat ditingkatkan.</p>

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		<p>usaha/kegiatan, dan sebaliknya disinsentif berupa sanksi akan memberikan efek jera. Upaya pencegahan dilakukan melalui penerbitan rekomendasi persetujuan lingkungan usaha/kegiatan, yang diharapkan dapat membatasi munculnya usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Selain upaya penanggulangan pencemaran udara dari sumber emisi, adanya ruang terbuka hijau (RTH) yang mencukupi sangat penting dalam purifikasi udara di daerah perkotaan. Untuk meningkatkan tutupan vegetasi dilakukan penanaman setiap tahun pada lahan kritis, kawasan hutan, hutan rakyat dan peningkatan kebun bibit desa (KBD).</p>	
5.	<p>Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang terfasilitasi untuk dikelola dan dimanfaatkan capaian kinerjanya telah melebihi target RKPd 2021, tetapi masih dibawah target RPJMD. Pencapaian yang belum optimal ini tentu akan sangat mempengaruhi pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten maupun Tanah Desa untuk kegiatan-kegiatan produktif yang menopang peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2022 ini telah dilakukan proses review Pergub Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa; 2. Telah ditetapkannya Permen ATR/ BPN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di DIY; 3. Berkoordinasi dengan DPTR Kab./ Kota dan juga Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dalam proses penyelesaian pendaftaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten maupun Tanah Desa. 	<p>Legalisasi terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.</p>

b. Kinerja Urusan Pemerintahan

1) Urusan Wajib

a) Urusan Terkait Pelayanan Dasar

(1) Urusan Pendidikan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Urusan kebudayaanPermasalahan yang Diselesaikan
1.	Keberadaan lembaga nonformal seperti PKBM dan SKB di DIY telah banyak membantu penduduk yang mengalami kendala dalam mengikuti pendidikan formal untuk tetap memperoleh pendidikan melalui jalur nonformal. PKBM dan SKB sebagai lembaga pendidikan kesetaraan tidak hanya fokus untuk memberikan pendidikan bagi penduduk yang putus sekolah, namun juga memberikan alternatif pembelajaran yang berbeda bagi penduduk usia sekolah yang tidak menempuh jalur pendidikan formal.	Memperoleh pendidikan yang bermutu merupakan hak setiap warga negara sesuai ketentuan Undang-Undang. Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat (1), disebutkan bahwa Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Menurut ketentuan tersebut, pendidikan nonformal dapat menggantikan warga negara yang tidak dapat menerima pendidikan formal karena kondisi tertentu. Oleh karena itu, hak atas pendidikan tetap dapat diwujudkan walaupun tidak melalui pendidikan formal. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga Pemda DIY di tahun 2022 hanya menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY terkait pendataan partisipasi pendidikan nonformal karena partisipasi peserta didik pendidikan nonformal mendukung capaian Angka Partisipasi Pendidikan di DIY.	Melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY terkait pendataan partisipasi pendidikan nonformal, maka partisipasi peserta didik pendidikan nonformal bisa terdata dengan baik dengan tujuan akhir memperoleh capaian Angka Partisipasi Pendidikan di DIY.
2.	Pemberian insentif bagi PTK baik itu GTT/PTT/GTY/PTY, perlu ditingkatkan nominalnya sebagai wujud penghargaan kepada mereka yang telah berperan dalam penyelenggaraan Pendidikan	Sebagai bentuk kesinambungan dari penyaluran insentif pada tahun 2021, pada tahun 2022 dianggarkan pemberian insentif kepada 1.160 pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari GTY dan PTY SMA dan SMK Swasta, GTY dan PTY SLB, serta guru inklusi sebesar	Penyaluran insentif bagi GTY PTY SMA/SMK Swasta dan GTY PTY SLB serta guru inklusif diharapkan dapat menjadi suatu bentuk apresiasi atas kerja keras dan peran serta aktif para pendidik dan tenaga

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Urusan kebudayaanPermasalahan yang Diselesaikan
	di DIY sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.	Rp7.506.000.000,00. Pemberian insentif tetap berpedoman kepada persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.	kependidikan di sekolah swasta serta sekolah inklusi dalam mendukung pembelajaran yang berkualitas.
3.	Ketersediaan tenaga pendidik di DIY tentunya perlu didukung oleh kompetensi yang memadai. Sesuai ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kualifikasi akademik ini menjadi salah satu persyaratan minimum dalam pemenuhan standar mutu pendidik pada satuan pendidikan. Sepanjang tahun 2021, Pemda DIY tentunya tetap mendukung pemenuhan standar kualifikasi pendidik melalui pemberian akses bagi para guru yang akan menempuh studi lanjut.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="735 389 1232 851">1. Pemenuhan kompetensi pendidik merupakan syarat mutlak bagi pencapaian standar mutu pendidik yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Guna mendukung pemenuhan kompetensi ini Pemda DIY di tahun 2022 tetap memberikan kemudahan akses bagi para guru yang akan melaksanakan studi lanjut maupun yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan dukungan pembiayaan dari Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Sesuai instruksi dari Ditjen GTK, di tahun 2022 Pemerintah Daerah Provinsi diminta untuk mengkoordinasikan kesiapan peserta PPG. Seiring dengan penetapan persyaratan kualifikasi pendidikan minimum bagi para calon pendidik, peningkatan kompetensi melalui Pendidikan Profesi Guru juga menjadi salah satu tolok ukur kualitas pendidik yang akan meningkatkan mutu satuan pendidikan. <li data-bbox="735 851 1232 1153">2. Untuk tahun anggaran 2022, dukungan Pemda DIY terhadap peningkatan kompetensi pendidik direncanakan melalui kegiatan penyediaan biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG) jenjang pendidikan menengah dan khusus dengan target jumlah guru yang dapat mengikuti pendidikan profesi tersebut sebanyak 100 guru. Alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp500.000.000,00. Diharapkan melalui pendidikan profesi ini para guru bisa meningkatkan kompetensi sekaligus mendapatkan pengakuan atas kualifikasi yang dimiliki. 	Pemberian ijin bagi para guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimum untuk melakukan studi lanjut diharapkan dapat mendorong pemenuhan Standar Tenaga Kependidikan dalam Standar Nasional Pendidikan yang akan berdampak pada pemenuhan kualitas satuan pendidikan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Urusan kebudayaanPermasalahan yang Diselesaikan
4.	<p>Pemberian beasiswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu perlu terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, agar tidak terjadi putus sekolah dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi mereka. Termasuk bagi mereka yang menempuh Pendidikan di perguruan tinggi, pemberian beasiswa tetap dipertahankan. Hal ini untuk memberi kesempatan mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat lulus menjadi sarjana.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai bentuk keberlanjutan dukungan terhadap pemenuhan biaya pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu di tahun 2021, pada tahun 2022 telah dianggarkan pemberian beasiswa Kartu Cerdas untuk 15.000 siswa SMA dan SMK di DIY dengan total anggaran sebesar Rp22.500.000.000,00. Dengan adanya bantuan pembiayaan ini, diharapkan para siswa jenjang pendidikan menengah yang berlatar belakang dari keluarga kurang mampu dapat menuntaskan pendidikannya. 2. Selain Kartu Cerdas, pada tahun 2022 juga telah dianggarkan Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan sebagai bentuk bantuan bagi siswa yang ijazahnya masih ditahan di sekolah swasta karena belum mampu memenuhi biaya pendidikan di sekolah. Target sasaran siswa penerima Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan pada tahun 2022 sebanyak 250 siswa SMA dan SMK di DIY dengan alokasi anggaran Rp1.000.000.000,00. 3. Sama halnya dengan tahun 2021, pembiayaan di jenjang pendidikan tinggi pada tahun 2022 untuk calon mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu masih diarahkan pada pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah). KIP-Kuliah adalah salah satu upaya yang dilakukan Kemendikbud untuk membantu para lulusan pendidikan menengah berprestasi namun memiliki keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Informasi lebih lengkap mengenai bantuan pembiayaan di jenjang pendidikan tinggi bisa diperoleh melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi DIY yang membawahi Perguruan Tinggi di DIY. 	<p>Pemberian beasiswa diharapkan dapat mendukung penuntasan pembelajaran hingga jenjang pendidikan menengah khususnya bagi para siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu sehingga tidak ada lagi anak putus sekolah karena kendala ekonomi keluarga.</p>

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Urusan kebudayaanPermasalahan yang Diselesaikan
5.	<p>Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan tahapan regulasi yang sulit untuk dicermati dan dipelajari oleh masyarakat pada umumnya karena terjadi perubahan hal prinsip pada setiap tahun ajaran. Pemaknaan pungutan yang dilakukan sekolah juga masih menjadi permasalahan yang masih terulang di beberapa sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya pencermatan dengan seksama sekolah-sekolah yang menggunakan label/nama internasional dalam hal pelaksanaan pembelajaran, etika dan pembiayaan pendidikan agar tidak terjadi ketimpangan dan kesenjangan pendidikan khususnya di sekolah swasta antara yang peserta didik mampu dan yang tidak mampu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu mengacu kepada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2022, regulasi PPDB mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dengan demikian, penyelenggaraan PPDB DIY tahun 2022 akan berpedoman kepada Permendikbud tersebut dan Peraturan Gubernur DIY mengenai PPDB tahun 2022. 2. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 3. Dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan; c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 4. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan pasal 11 menyebutkan bahwa Pengelola satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang dikelolanya: 	<p>Dengan adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan diharapkan rangkaian proses PPDB dapat dilalui dengan mudah bagi para calon peserta didik baru.</p>

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Urusan kebudayaanPermasalahan yang Diselesaikan
		<ul style="list-style-type: none"> a. membebaskan atau meringankan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak/kurang mampu; b. dapat menarik pungutan biaya satuan pendidikan kepada peserta didik atau orang tua/wali peserta didik; c. dapat menerima bantuan dana pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan d. dapat menerima sumbangan dana pendidikan dari orang tua/wali peserta didik, masyarakat atau pihak lain secara sukarela dan tidak mengikat. <p>5. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah di atas, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, terlepas dari kebijakan pengelolaan sekolah oleh yayasan, wajib mengikuti ketentuan untuk membebaskan atau memberikan keringanan biaya pendidikan kepada peserta didik yang kurang/tidak mampu. Terkait dengan penggunaan label internasional dalam pelaksanaan pembelajaran, etika dan pembiayaan pendidikan oleh satuan pendidikan, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya tantangan eksternal yang dihadapi satuan pendidikan antara lain kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Penggunaan label internasional ini diharapkan selaras dengan upaya satuan pendidikan menghadapi berbagai tantangan global sekaligus menjaga komitmen pemberian layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi sosial ekonomi.</p>	

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Urusan kebudayaanPermasalahan yang Diselesaikan
6.	<p>Pemerintah Daerah DIY perlu untuk melakukan terobosan-terobosan dalam proses pembelajaran seiring dengan persoalan yang menyertai akibat pembelajaran jarak jauh/online. Learning loss harus mampu diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang progresif menjelang akhir masa tahun ajaran 2021/2022. Pemda DIY sekaligus perlu untuk merancang persiapan-persiapan yang matang dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka baik di tahun 2022 ini maupun pada tahun-tahun mendatang.</p>	<p>Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, guna pemulihan keteringgalan pembelajaran (learning loss) yang terjadi dalam kondisi khusus, satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Penerapan kurikulum ini mengacu kepada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Dengan mengacu kepada Permendikbudristek ini, satuan-satuan pendidikan di DIY telah mempersiapkan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat di sekolah. Metode pembelajaran juga telah diubah menjadi metode luring guna mendukung pemulihan proses pembelajaran di sekolah.</p>	<p>Diharapkan melalui penyelenggaraan pembelajaran tatap muka kembali di sekolah, para siswa dapat didorong untuk mengejar keteringgalan pembelajaran dan memenuhi kompetensi personal yang seharusnya dicapai.</p>
7.	<p>Mendorong Pemda DIY melalui Dinas Pendidikan DIY untuk berpikir dan bertindak lebih sungguh-sungguh dalam kebijakan pengurangan tindak kekerasan remaja yang dilakukan oleh siswa sekolah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat kelompok-kelompok siswa yang eksis melalui peer group-nya, sebagai organisasi yang dekat dengan tindak kekerasan. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya harus dijadikan pijakan internalisasi nilai-nilai budaya adiluhung Yogyakarta yang jauh dari perilaku kekerasan dan konflik sosial. Perlunya identifikasi siswa dengan persoalan sosial dan perilaku yang menyimpang, guna meminimalisir keberadaan organisasi ekstra sekolah sebagai wahana reproduksi kekerasan.</p>	<p>Pemda DIY dengan berdasar kepada penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2011 telah berupaya mendorong satuan-satuan pendidikan menengah untuk mengimplementasikan dan menguatkan pendidikan karakter di sekolah. salah satu bentuknya yaitu melalui penguatan karakter oleh teman sebaya. Teman sebaya pada usia remaja memiliki peran sangat penting dalam mempengaruhi pembentukan karakter siswa. Dengan adanya penguatan pendidikan karakter dari teman sebaya, diharapkan siswa dapat memiliki lingkungan pergaulan yang positif sesuai ajaran budaya Yogyakarta. Penguatan pendidikan karakter diharapkan juga dapat ditanamkan mulai dari keluarga sehingga keterlibatan keluarga dalam pembentukan karakter siswa sangat diperlukan guna mencegah siswa dari berbagai perbuatan merugikan. Disamping itu, kontrol dari sekolah yang juga diperlukan untuk memastikan siswa terlibat dalam berbagai kegiatan positif setelah jam pelajaran usai. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler sebagai bentuk</p>	<p>Melalui pengimplementasian pendidikan karakter, kontrol dari sekolah, dan pembekalan keluarga, diharapkan kasus-kasus kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah tidak akan terulang kembali di Yogyakarta.</p>

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Urusan kebudayaanPermasalahan yang Diselesaikan
		pengembangan minat dan bakat siswa diharapkan dapat menjadi penyaluran energi siswa sekaligus mengasah kreativitas mereka.	

(2) Urusan Kesehatan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Perlu dukungan yang nyata dan serius untuk menemukan dan mengobati penyakit menular terutama TB untuk mencapai tujuan zero TB ditahun 2030. Adanya pandemi COVID-19 di tahun 2021 dan hingga sekarang tercatat di bulan Maret 2022 masih status level 3, harus memberi pelajaran berharga pada kita bahwa penyakit menular seperti TB dan HIV AIDS perlu ditangani secara serius agar tidak terjadi penularan.	Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TB di DIY dengan SK Gubernur DIY Nomor 55/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis DIY, yang melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah di DIY dan Organisasi Masyarakat yang peduli TB, diharapkan mampu menggerakkan sosialisasi dan skrining TB secara masif di seluruh DIY.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi TB secara luas ke masyarakat. ▪ Skrining TB secara mandiri oleh masyarakat ▪ Pemeriksaan diagnosis TB oleh Fasyankes ▪ Pengobatan TB oleh Fasyankes ▪ Pendampingan pengobatan TB oleh Komunitas
2.	Berbagai upaya untuk menekan prevalensi penyakit tidak menular terus digalakkan. Data menunjukkan bahwa prevalensi penyakit tidak menular cenderung naik, di antaranya penyakit Kanker, Stroke, Ginjal Kronis, Diabetes Melitus, Jantung, dan Hipertensi. Kampanye hidup sehat seperti Germas perlu terus menerus dilakukan guna membangun pola hidup masyarakat. Modal penting telah dimiliki yaitu selama pandemi Covid-19 masyarakat secara massif didorong untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan. Hal yang positif dan perlu terus dipertahankan bukan hanya sesaat ketika terjadi pandemi semata.	Pelaksanaan Kampanye Germas dilakukan terintegrasi dengan sosialisasi vaksinasi serta terus menggalakkan Posbindu di tingkat masyarakat(Kalurahan).	Sosialisasi dan kampanye Germas.
3.	Berkaitan dengan masih adanya kasus positif Pandemi Covid-19, tetap dilaksanakan pembatasan aktivitas/kegiatan sampai dengan skala mikro, penegakan hukum dan protokol kesehatan, sosialisasi kepada masyarakat, pelibatan intensif stakeholder untuk terlibat dan intensifikasi koordinasi Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas	Upaya sosialisasi dan kampanye penerapan protokol kesehatan dilakukan terintegrasi dengan sosialisasi Germas dan vaksinasi dengan tetap menjalankan upaya testing, tracing dan monitoring penemuan kasus.	Sosialisasi dan kampanye penerapan protokol Kesehatan.

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
	Kabupaten/Kota untuk mencegah kolapsnya sistem Kesehatan di DIY serta penguatan bagi Gugus Tugas Penanganan Covid-19 ditingkat Kampung/Dusun/RW untuk mendukung PPKM Mikro.		
4.	Pasca <i>recovery</i> pandemi Covid-19, langkah Pemerintah Provinsi DIY untuk segera melakukan tindakan-tindakan pemulihan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sektor pariwisata digalakkan serta sektor-sektor lainnya untuk menuju ke new normal.	Pada tahun 2022 Pemda DIY melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan agar dapat meningkatkan dan memulihkan aktivitas sektor pariwisata di DIY. Sejak awal tahun 2022 dilaksanakan kegiatan seperti event wisata, promosi melalui media social dan media digital lainnya, sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku pariwisata serta masyarakat, dan pembinaan dan pengawasan hingga sertifikasi kepada usaha jasa pariwisata di DIY. Beberapa kegiatan yang terus dilakukan secara konsisten di tahun 2022 berfokus kepada pertumbuhan perekonomian terutama di masyarakat. Pendampingan kepada masyarakat di tingkat pedesaan juga dilakukan melalui pendampingan dan peningkatan kapasitas kepada pengelola-pengelola desa wisata di DIY, agar kualitas pelayanan dan produk di desa wisata senantiasa dapat meningkat & dapat menarik lebih banyak wisatawan yang datang ke wilayah pedesaan DIY untuk membelanjakan uangnya di wilayah pedesaan. Pada tahun 2022 capain kunjungan wisatawan yang menggunakan akomodasi sudah melampaui capaian di tahun 2019, hal tersebut menandakan pemulihan sector pariwisata sedang berproses sesuai dengan kondisi di masa sebelum pandemi Covid-19	Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, dengan pemulihan kunjungan wisatawan ke DIY yang sudah melampaui tahun 2019
5.	Perlunya kerja-kerja terukur untuk meningkatkan tingkat kebugaran masyarakat DIY dengan basis tingkat kesehatan yang juga meningkat. Nalar berpikir yang harus terus dibangun bahwa dengan tingkat kesehatan dan kebugaran yang semakin membaik, maka bukan saja akan menekan biaya kesehatan untuk pengobatan/kuratif, namun kebugaran harus didudukkan sebagai faktor penting peningkatan produktivitas.	Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas Posbindu terus dilakukan untuk melakukan skrining kesehatan masyarakat. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengendalian Penyakit Tidak Menular (SIPTM) Kemenkes, per 31 Mei 2022 DIY memiliki 1200 Posbindu yang tersebar di 439 kalurahan dengan jumlah kalurahan yang berposbindu sebanyak 410 (93,39%). Tes kebugaran telah dilaksanakan dengan melibatkan semua OPD di DIY.	Peningkatan kualitas an kuantitas Posbindu di DIY.

(3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(a) Sub Urusan Pekerjaan Umum

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Pemda DIY perlu lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sehingga alokasi anggaran dapat terserap secara maksimal yang harapannya dapat berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat.	Indikator Kinerja Kunci dari Urusan Perencanaan Pembangunan yaitu Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan pada tahun 2021 menunjukkan ketercapaian mencapai 85%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk ke depannya, kinerja akan kami tingkatkan sesuai dengan target pada RPJMD 2017-2022 dan RKPD 2022 yaitu 85,5%.	Perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas utamanya dalam hal ketepatan alokasi anggaran untuk pengoptimalan serapan, output, serta outcome.
2.	Pada indikator Jumlah Penduduk berakses terhadap Sanitasi didalamnya terdapat kegiatan Penanganan Limbah Terpusat, Penanganan Limbah berbasis masyarakat, pengelolaan sampah dan drainase yang perlu dirumuskan kebijakan Pemda DIY yang komprehensif dan bekerjasama/berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing sehingga dapat menyelesaikan masalah secara lebih terstruktur, sistematis dan massif.	<ol style="list-style-type: none"> Adanya peningkatan kapasitas IPAL Sewon yang bisa menampung air limbah domestik setara dengan 75.000 SR. Diperlukan penyusunan Review Masterplan Air Limbah Kawasan Perkotaan Yogyakarta untuk mengetahui potensi pengembangan wilayah pelayanan SPALD-T Sewon. 	Hasil penyusunan Review Masterplan Air Limbah Kawasan Perkotaan Yogyakarta akan didapatkan potensi pengembangan wilayah pelayanan SPALD-T Sewon.
3.	Penanganan Sampah hendaknya diselesaikan sejak dari Hulu yaitu membangun kesadaran masyarakat untuk dapat mengelola sampah secara mandiri melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terutama dalam Pembinaan Bank Sampah dan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri dan penyediaan TPS 3R di Kabupaten/kota.	<ol style="list-style-type: none"> Pemda DIY sudah melakukan pembinaan pengelolaan sampah dari hulu dalam bentuk pembinaan pengelolaan sampah mandiri, dengan sasaran terdiri dari Bank Sampah, TPS3R, dan masyarakat dari 5 kabupaten/kota bersama dengan Anggota Komisi C DPRD DIY dan melibatkan DLH Kabupaten/kota serta JPSM kabupaten/kota. Pembinaan tersebut sebanyak 15 angkatan pada tahun 2022. Berkenaan dengan penyediaan TPS3R, sesuai dengan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, kewenangan penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah berada di Kabupaten/Kota. Provinsi hanya memiliki kewenangan pengembangan sistem dan 	Tingginya timbulan sampah

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		<p>pengelolaan persampahan regional dan penanganan sampah di TPA/TPST Regional.</p>	
4.	<p>Pemerintah DIY perlu melakukan update terhadap Peta Drainase dan mendorong instansi terkait melalui Forum Kartamantul untuk merumuskan sistem monitoring drainase dengan sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi sehingga mempermudah pengawasan.</p>	<p>TA 2022 Pemda DIY telah menganggarkan Roadmap Drainase di DIY, untuk merencanakan kebijakan drainase yang lebih baik berdasarkan data yang sudah ada. Selain itu, berdasarkan Permen PU 12 tahun 2014, terkait drainase perkotaan, perlu dilakukan lagi update review masterplan Drainase Perkotaan di setiap kab/kota, yang terakhir dilaksanakan BBWS SO tahun 2016. Selain itu, pembangunan saluran drainase yang telah dilaksanakan perlu diinventarisasi agar bisa dilakukan operasi dan pemeliharaan</p>	<p>Drainase Perkotaan. Telah tersusun Roadmap Drainase DIY yang bertujuan untuk mengetahui pembangian kewenangan penangan drainase di DIY.</p>
5.	<p>Pemerintah DIY perlu mempublikasikan secara lebih luas dan massif tentang sistem pemeliharaan jalan yang menerapkan sistem respon cepat (fast respon) sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan. Selain itu Pemerintah DIY perlu mengintegrasikan sistem pengaduan melalui aplikasi Whatsapp Dinas PUPESDM, aplikasi e-Lapor, SP4N Lapor dan Website agar lebih memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dan memonitor perkembangan tindaklanjut dari laporan/aduan masyarakat.</p>	<p>Saat ini telah ada sistem aduan melalui e-lapor dan nomor Whatsapp pengaduan dinas yang langsung dapat diteruskan pada pengampu pemeliharaan jalan. Tata cara dan nomor aduan tersebut telah sering pula disampaikan pada rapat-rapat maupun sosialisasi dan konsultasi publik yang melibatkan masyarakat luas.</p>	<p>Informasi terkait kerusakan jalan akan lebih cepat tersampaikan ke bagian pemeliharaan jalan, sehingga dapat segera untuk ditindaklanjuti dengan perbaikan. Dan pengguna jalan juga akan mendapatkan informasi untuk berhati-hati apabila melintasi jalan yang rusak tersebut</p>
6.	<p>Pemerintah DIY perlu memprioritaskan Pembangunan infrastruktur Jalan yang bertujuan untuk mengurai kemacetan lalu lintas serta mendorong potensi perekonomian warga terutama pada jalur akses ke destinasi pariwisata.</p>	<p>Dalam pengusulan anggaran untuk kegiatan peningkatan ataupun pembangunan jalan, telah dikoordinasikan secara lebih intensif dengan OPD lain yang terlibat, dengan lebih memprioritaskan pembangunan dan peningkatan dalam mendukung jalur akses ke destinasi pariwisata dan peningkatan perekonomian. Dalam hal ini untuk paket pekerjaan yang diusulkan didanai dengan DAK, sudah dipetakan dan ditujukan dalam mendukung jalur akses ke destinasi pariwisata.</p>	<p>Akan memudahkan pelaku perjalanan dalam menjangkau tempat wisata, sehingga PAD juga akan meningkat dan perekonomian warga sekitar akan lebih baik lagi. Selain itu juga akan mengurai kemacetan, misalnya saja jalan Wonosari yang nantinya pelaku perjalanan dapat memilih menggunakan akses Prambanan-Gading, yangmana di sekitar ruas jalan tersebut juga banyak tempat wisata yang dapat dikembangkan, dan juga kondisi ruas jalan Wonosari akan tetap dalam kondisi mantap karena beban lalu lintas yang dapat berkurang.</p>

(b) Sub Urusan Penataan Ruang

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Pemerintah DIY perlu segera menerbitkan aturan teknis atau pedoman tentang pelaksanaan arsitektur bangunan bercirikan Keistimewaan DIY agar dapat mengimplementasikan amanat UU No. 13 tahun 2012 secara lebih luas dan tidak hanya bertumpu pada tata ruang sumbu filosofis.	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan pendampingan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara di DIY dimulai pada perencanaan teknis untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah no.1 tahun 2017 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEKTUR BANGUNAN BERCIRI KHAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA serta PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PANDUAN ARSITEKTUR BANGUNAN BARU BERNUANSA BUDAYA DAERAH.2. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan peraturan tersebut.	Implementasi arsitektur bangunan berciri khas DIY dapat dilaksanakan.
2.	Pemda DIY perlu meningkatkan konsistensi implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah melalui pembinaan, sosialisasi, diseminasi, pengawasan dan penegakan hukum dari peraturan tentang tata ruang termasuk penataan ruang pada ruang strategis keistimewaan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pada tahun ini DPTR DIY melaksanakan 26 sosialisasi yang terdiri dari 12 sosialisasi kepada siswa SMA di satuan ruang strategis (SRS) dan 14 sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat kalurahan di 14 Kapanewon.2. Pada tahun 2022 ini di triwulan III, DPTR DIY merencanakan kegiatan Lomba Desa Tertib Pertanahan dan Tata Ruang di empat kabupaten di DIY.	Mengetahui implementasi rencana tata ruang dari masyarakat melalui diskusi dan tanya jawab pada sosialisasi. Meningkatkan kompetensi aparatur Pemerintah Kalurahan dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

(4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Perlu konsolidasi data Rumah Tidak Layak Huni bersama dengan kementerian PUPR dan Pemerintah Kabupaten/kota agar penyelesaian penanganan kawasan Kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi DIY benar-benar telah selesai tertangani.	Pemda DIY telah membuat sistem informasi online berbasis web sebagai konsolidasi data terpadu rumah tidak layak huni (RTLH) antara Pemda DIY, Kabupaten / Kota se-DIY, dan Satker Perumahan Kementerian PUPR di DIY.	Banyaknya data dan dokumen penanganan RTLH yang harus disaring, diverifikasi, dan divalidasi merupakan kendala utama dalam upaya penanganan RTLH, terlebih dengan kondisi penerima bantuan yang dinamis dan cepat berubah. Penanganan juga berpotensi mengalami tumpang tindih antara Pemda

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
2.	Perlu dilakukan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman sebagai pendorong sektor pariwisata dengan merealisasikan regulasi arsitektur bangunan bercirikan Keistimewaan DIY serta konsep-konsep perumahan dan pemukiman lainnya yang dapat memenuhi aspek budaya dan pariwisata. Salah satunya dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan para pelaku jasa konstruksi perumahan	Pemda DIY melaksanakan Bantuan Khusus Keuangan (BKK) dana keistimewaan (Danais) kepada Kalurahan untuk pembangunan baru Rumah Layak Huni (RLH) dengan konsep arsitektur khas Jawa Yogyakarta. Telah dibuat desain rumah layak huni (RLH) berbasis arsitektur khas Yogyakarta beserta Dokumen Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai panduan bagi para stakeholder untuk melaksanakan dan mengawasi program ini.	DIY, Pemerintah Kabupaten / Kota, dan Pemerintah Pusat Perkembangan sosial dan budaya masyarakat DIY menyebabkan terjadinya pergeseran pola pikir di mana rumah dengan ciri khas arsitektur Yogyakarta dianggap sebagai simbol kemiskinan, kuno, dan / atau ketertinggalan. Sebagai Daerah Istimewa, sudah sepatutnya pemerintah daerah bersama masyarakat DIY berperan aktif melestarikan rumah – rumah dengan arsitektur tradisional yang mencirikan budaya khas Jawa Yogyakarta.

(5) *Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Penertiban reklame, penambangan liar, peredaran miras dan kejahatan jalanan anak merupakan masalah yang setiap tahun muncul dan tidak terselesaikan secara tuntas oleh karena itu perlu adanya perubahan metode penyelesaian masalah tersebut.	Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap PETI (Penambangan Tanpa Izin) melalui kegiatan berupa sosialisasi dan penertiban bersama dengan stakeholder terkait.	Penambangan liar dapat dikendalikan.
2.	Peningkatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi untuk menertibkan dan mengantisipasi permasalahan tersebut diatas secara terukur dan berkesinambungan.	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan peningkatan operasi non yustisi dan yustisi terhadap gelandangan dan pengemis, serta kepada masyarakat yang memberi berdasarkan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Mengintensifkan operasi terpadu pemberantasan rokok ilegal bersama Kantor Bea Cukai serta sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya cukai rokok sebagai pendapatan negara. 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan kenyamanan bagi pengguna jalan, menciptakan keindahan kota dan bagi gelandangan / pengemis yang terjaring diberikan edukasi di camp assesment. Mencegah peredaran rokok ilegal sekaligus meningkatkan pendapatan negara melalui cukai rokok legal.

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
3.	Adanya catatan yang memudahkan evaluasi setiap tahapan dalam mendukung penyelesaian masalah diatas.	<p>Tindak Lanjut yang Dilakukan terkait dengan catatan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penertiban Reklame 2. Aksi kejahatan jalanan anak 3. Penambangan liar daerah aliran sungai 4. Peredaran miras 5. Gelandangan dan pengemis di persimpangan jalan 6. Peredaran rokok ilegal 7. Protokol kesehatan <p>Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas penegakan Perda / Perkada serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, serta menyajikan data laporan pelaksanaan operasi setiap bulan. Penajaman terhadap evaluasi rutin yang selama ini sudah dilakukan, selanjutnya menjadi bagian dari pengendalian internal pada instansi terkait serta pemberian catatan dan rekomendasi pada raport triwulanan yang harus ditindaklanjuti pada tahap berikutnya.</p>	Keterbukaan informasi dan akurasi data.
4.	Mendorong gerakan budaya tertib di masyarakat yang melibatkan Pemkot/Pemkab setempat melalui penguatan program kegiatan yang ada di masyarakat.	<p>DIY telah mengundang Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Perda tersebut mengamanatkan dasa (10) tertib, yakni tertib jalan, tertib sungai, tertib kawasan pantai, tertib kelautan, tertib lingkungan, tertib sumber daya mineral, tertib kehutanan, tertib perizinan, tertib pendidikan, dan tertib tata ruang. Implementasi dasa tertib tersebut dilaksanakan secara kolaboratif bersama Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan unsur masyarakat dalam keswadayaan, di Kota Yogya, gerakan budaya tertib dilaksanakan dalam "branding" Kampung Panca Tertib. Sementara itu, gerakan budaya tertib ini juga menjadi salah satu pilar dari aktivitas Kelompok Jaga Warga telah ada di semua Kalurahan dan Kelurahan se-DIY. Gerakan budaya tertib ini juga dilaksanakan dalam keselarasan dengan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) yang fasilitasnya juga sudah dilakukan oleh Pemda.</p>	Mendorong masyarakat untuk membiasakan budaya tertib dan patuh hukum serta proaktif dalam menjaga serta menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya masing - masing.

(6) Urusan Sosial

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	<p>Segera selesaikan masalah pendataan jumlah orang miskin, sehingga pemerintah baik provinsi maupun kabupaten dan desa mempunyai data yang sama. Sehingga tidak timbul masalah setiap kali ada peristiwa penting pemerintahan. Validasi data keluarga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).</p>	<p>Pada akhir Tahun 2021 Pemda DIY membuat sebuah sistem yaitu Manunggal raharja (Manajemen Validasi Unggul Berbasis Digital dengan Rumah Data Sejahtera Masyarakat Jogja) ini merupakan strategi peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan Sosial. Melalui Manunggal Raharja dapat dilakukan :pemeringkatan kemiskinan daerah, memetakan data penerima bantuan sosial, memetakan indikasi data bermasalah. Dengan pemeringkatan kemiskinan melalui model Proxy Mean Test bersama BPS Provinsi DIY diharapkan dapat memberikan gambaran lebih riil kondisi kemiskinan di DIY.</p>	<p>Masalah data kemiskinan dapat lebih riil dilihat melalui pemeringkatan kemiskinan. Permasalah data penerima bantuan sosial lebih valid.</p>
2.	<p>Perlunya monitoring kondisi penerima PKH sampai dengan saat sekarang, baik pada saat program berjalan maupun sesudahnya. Kepastian data tahun 2021 baik untuk penerima PKH dan penerima bantuan pangan non tunai, menjadi sangat penting untuk intervensi kebijakan daerah lainnya agar tepat sasaran.</p>	<p>Pada tahun 2021, data yang digunakan untuk data PKH menggunakan data dari E PKH yang sebelumnya sudah di verval oleh pendamping PKH terlebih dahulu. Namun di tahun 2022 saat ini data PKH menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimana bantuan diterimakan terlebih dahulu kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru setelahnya di lakukan verlval oleh pendamping PKH. Proses Verval data PKH dan BPNT juga dilakukan dengan menggunakan sistem Manunggal Raharja.</p>	<p>Monitoring kondisi penerima PKH sampai dengan saat sekarang, baik pada saat program berjalan maupun sesudahnya. Kepastian data tahun 2021 baik untuk penerima PKH dan penerima bantuan pangan non tunai.</p>
3.	<p>DPRD mendorong kepada Pemerintah Daerah DIY untuk menangani maraknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang banyak mengemis dan mengamen di perempatan jalan, baik di wilayah Kota Yogyakarta maupun Kabupaten.</p>	<p>Pemda DIY turut mensosialisasikan Perda No 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam setiap kegiatan yang dilakukan melalui penyuluhan sosial. Selain itu Pemda DIY terus melakukan Penjangkauan gepeng termasuk di dalamnya dilakukan sidang pidana ringan bagi pemberi maupun gepeng sendiri. Selanjutnya dengan PoldaDIY melakukan kerja sama untuk penanganan gepeng yang ada di jalan.</p>	<p>Gelandangan dan pengemis populasinya berkurang di wilayah DIY.</p>

b) Urusan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

(1) Urusan Tenaga Kerja

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	DPRD DIY mendorong agar jumlah TPT terus dapat diturunkan dengan meningkatkan berbagai upaya memberi akses kepada Angkatan kerja yang ada baik dalam bentuk pelatihan, bursa tenaga kerja maupun usaha-usaha lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja melalui kegiatan padat karya, Pembekalan Angkatan Kerja Khusus, MTU. 2. Perluasan kesempatan kerja didalam hubungan kerja melalui kegiatan informasi lowongan kerja, kios 3 in 1 dan pembuatan Sistem Aplikasi E-Makarti. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angkatan kerja dapat bekerja secara mandiri/berwirausaha. ▪ Angkatan kerja khususnya pencari kerja dapat bekerja di sektor formal.
2.	Berdasarkan data Angkatan kerja yang masih berstatus penganggur diperoleh data bahwa tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY pada Agustus 2020 sebesar 4,57%, mengalami peningkatan 1,39 % poin dibanding TPT Agustus 2019 (3,18%). Penduduk bekerja DIY sebanyak 2.126.000 orang, berkurang 48.000 orang dari Agustus 2019. Dengan profil demikian, potensi Angkatan kerja DIY semestinya punya kualitas yang bisa bersaing dengan daerah lainnya. Adanya pendapat yang mengatakan bahwa Angkatan kerja DIY tidak berminat untuk kerja diluar DIY perlu cek kebenarannya. Jika benar demikian perlu dicarikan jalan keluarnya, mengingat bahwa kesempatan kerja di DIY terbatas.	Sosialisasi pembangunan karakter bagi angkatan kerja.	Pencari kerja memiliki motivasi dan daya juang yang lebih baik.
3.	Pengembangan jejaring kerja sama pengiriman tenaga kerja produktif dan terlatih dari DIY keluar negeri perlu untuk terus dilakukan. Hal ini menuntut diselenggarakannya pelatihan-pelatihan untuk melahirkan tenaga kerja terlatih sebagaimana kualifikasi kebutuhan di luar negeri, dengan roadmap yang jelas.	Koordinasi dengan Kemenaker RI dan Disnakertrans Bantul dalam pemetaan kejuruan unggulan di UPTP Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bantul.	Pencari kerja DIY dapat mengikuti pelatihan dengan kejuruan yang sesuai dengan potensi DIY dan kualifikasi yang dibutuhkan di pasar global.

(2) *Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Meskipun Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pencapaian target, antara lain: belum terbangunnya sistem pencegahan yang komprehensif, baik di keluarga, sekolah/ Lembaga Pendidikan, maupun masyarakat; perkembangan teknologi informasi yang pesat; serta adanya pandemi Covid-19.	<p>Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 54 disebutkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Atas dasar Undang-Undang inilah Pemda DIY mencanangkan Sekolah Ramah Anak bagi beberapa sekolah di DIY yang dianggap mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan, Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Beberapa implementasi penerapan konsep Sekolah Ramah Anak ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi dan menjamin keselamatan anak termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus dari gangguan fisik, psikososial dan risiko bencana; 2. Menjamin kesehatan termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus selama berada di sekolah/madrasah; 3. Mengembangkan budaya sekolah/madrasah yang peduli lingkungan dan mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa termasuk dalam situasi darurat; 4. Membuka kesempatan belajar bagi setiap anak termasuk yang memerlukan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus; 5. Menerapkan kurikulum yang sesuai dengan usia, kemampuan dan cara belajar termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus; 	Dengan penerapan Sekolah Ramah Anak diharapkan tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap anak, baik secara verbal maupun fisik.

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		<p>6. Melibatkan peran serta keluarga, masyarakat sekitar dan pihak pihak lainnya dalam pengelolaan pendidikan</p> <p>7. Dari implementasi konsep Sekolah Ramah Anak ini diharapkan tidak ada lagi kekerasan terhadap anak dan anak-anak diberikan kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran dengan aman dan nyaman.</p>	
2.	<p>Perlunya upaya yang lebih progresif guna peningkatan kepemilikan legalitas keluarga sebagai usaha mewujudkan ketahanan keluarga. Hal ini karena tahun 2021 meski mencapai sebagaimana target, namun kualitas dan kuantitas menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.</p>	<p>Edukasi berkaitan dengan ketahanan keluarga akan kami tingkatkan dengan menekankan pentingnya legalitas keluarga. Selain itu, untuk tindak lanjut Pergub DIY 106 Tahun 2021 akan dibentuk Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga, fitur-fitur untuk e-learning serta layanan konsultasi dan konseling, serta pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)</p>	<p>Upaya meningkatkan kepemilikan legalitas keluarga.</p>
3.	<p>Mendorong kepada Pemerintah Daerah DIY untuk lebih serius dan terukur dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Keluarga sebagai lingkungan sosial terkecil, memiliki peran sentral dalam penanaman nilai-nilai adiluhung kepada generasi penerus. Salah satu peran penting ketahanan keluarga saat ini antara lain untuk membentengi dari berbagai pengaruh negatif di kalangan remaja berupa maraknya kekerasan remaja/kejahatan di jalan. Demikian pula keluarga memiliki tanggungjawab yang besar untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.</p>	<p>Selain ketentuan terkait ketahanan keluarga, bahwa orang tua wajib mencegah terjadinya pernikahan di usia anak seperti juga diamanatkan dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam rangka meningkatkan pemahaman orang tua akan dampak negatif pernikahan di usia anak, dengan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja, sosialisasi pendewasaan usia perkawinan bagi komunitas remaja, orang tua, tokoh masyarakat, agama di desa/kalurahan, serta di lingkungan sekolah; mengoptimalkan komunikasi informasi dan edukasi melalui ILM, medsos, dan publikasi lainnya. Berkaitan dengan fasilitas forum penyelenggara kesehatan reproduksi remaja, akan dilaksanakan penguatan forum dengan mengaktifkan kelompok kerja dan mengoptimalkan koordinasi antar anggota forum; Pembentukan PUSPAGA di Provinsi.</p>	<p>Puspaga Provinsi belum terbentuk; Upaya pencegahan pernikahan pada usia anak dan peningkatan pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja.</p>

(3) Urusan Pangan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Menjadikan ketahanan pangan bagi masyarakat DIY sebagai prioritas program urusan pangan.	Memantapkan dan mendorong ketersediaan pangan, distribusi pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan Aman (B2SA), keamanan pangan.	Skor pola pangan harapan (PPH) mengalami peningkatan dan merupakan skor tertinggi nasional.
2.	Terwujudnya ketahanan pangan perlu didorong melalui ketersediaan pangan, distribusi pangan, pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan Aman (B2SA) melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, promosi, kampanye yang berkesinambungan dengan target dan sasaran yang jelas dan terukur agar memberikan dampak yang jelas terhadap tercapainya target persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk pangan di akhir RPJMD 2022.	Telah dilaksanakan penganekaragaman pangan lokal berupa pengurangan penggunaan tepung gandum dan terigu dengan tepung pangan lokal (mocaf, cassava, pisang, garut, sukun dll) dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap salah satu jenis pangan dan pelaksanaan edukasi B2SA untuk mengurangi kasus stunting, gizi buruk dan gizi lebih	Meningkatkan keseimbangan konsumsi energi telah menuju ideal sebesar 2.000 kkal/kap/hari.
3.	Mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan baik di kawasan perkotaan yang berlahan sempit maupun pedesaan untuk pemenuhan gizi keluarga. Dengan pemanfaatan lahan pekarangan tentunya dapat mengurangi pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan sehingga kesejahteraan rumah tangga akan pangan semakin meningkat. Kegiatan ini harus dilakukan dengan target dan sasaran yang jelas, terukur serta berkesinambungan agar memberikan dampak yang jelas sehingga pencapaian persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk pangan di akhir RPJMD 2022 dapat tercapai.	Tidak lanjut melalui kegiatan pekarangan pangan lestari, lumbung mataraman.	Tersedianya kebutuhan pangan dan gizi berupa sumber karbohidrat, protein dan mineral sesuai dengan kearifan lokal.
4.	Meningkatkan penganekaragaman cadangan pangan yang tidak hanya pada gabah kering maupun giling.	Menambah jumlah dan jenis komoditas cadangan pangan yang ada di masyarakat sesuai dengan potensi lokal daerah menyesuaikan dengan pertambahan jumlah penduduk.	Peningkatan jumlah (volume stok) dan jenis cadangan pangan.
5.	Mengoptimalkan regulasi dalam tata kelola distribusi pangan di DIY untuk menjaga kestabilan pangan di DIY.	Melaksanakan stabilisasi pasokan dan harga pangan salah satunya melalui pengembangan usaha pangan masyarakat dan Pasar Mitra Tani (PMT).	Menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen.
6.	Memprioritaskan wilayah waspada dan rentan rawan pangan sebagai prioritas program pengentasan wilayah kerentanan pangan khususnya yang ada di wilayah Kota Yogyakarta mengingat Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang sangat aksesibel.	Koordinasi lintas sektor dalam rangka intervensi untuk penanganan daerah rentan rawan pangan. Serta melakukan Pendampingan dan Pembinaan di daerah waspada dan rentan rawan pangan.	Mempertahankan daerah yang aman agar tidak menjadi rentan pangan, dan mengentaskan daerah rentan pangan menjadi aman

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
7.	Mengoptimalkan sinergitas dan kolaborasi antar stakeholder baik di tingkat DIY, Kabupaten/kota, kemantren/kapanewon, kelurahan/kalurahan dalam membangun ketahanan pangan di DIY.	Melakukan koordinasi, komunikasi, sinergi dengan stakeholder untuk memantapkan ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi, keamanan pangan.	Meningkatkan ketersediaan energi dan mencapai keseimbangan konsumsi energi menuju ideal sebesar 2.000 kkal/kap/hari. Jumlah desa rawan pangan pada 2021 sudah sesuai target, dan program/kegiatan serta kerja sama lintas sektor masih terus dilaksanakan.
8.	Optimalisasi pemanfaatan dana keistimewaan dalam pengentasan kemiskinan khususnya dalam urusan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat DIY.	Tindak lanjut melalui kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya, sub kegiatan lumbung mataraman.	Tersedia dan terjangkau pangan di tingkat keluarga/masyarakat serta mengurangi belanja kebutuhan makan.

(4) *Urusan Lingkungan Hidup*

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Pemerintah DIY perlu meningkatkan langkah pengurangan pencemaran air sungai melalui kegiatan pengelolaan air limbah yang diintegrasikan dengan langkah pembinaan masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga.	<p>Pemda DIY telah melakukan upaya dalam pengurangan pencemaran air sungai melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Tahun 2022, telah mencermati dan mengidentifikasi beberapa penyebab yang menjadi potensi menurunnya kualitas air sungai antara lain : masih terdapatnya masyarakat di bantaran sungai yang membuang limbah domestik langsung ke sungai berdasarkan hasil pembinaan sumber pencemar terhadap pengelola IPAL Komunal terdapat potensi pengelolaan IPAL Komunal yang belum optimal sehingga berpotensi menjadi sumber pencemar. belum terkelolanya air limbah (UMKM) yang tersalur ke drainase yang kemudian mengalir ke sungai berdasarkan hasil uji outlet IPAL Komunal yang dilaksanakan DLH Sleman dan DLH Kulonprogo, sebagian besar hasil uji tidak memenuhi baku mutu air limbah domestic. 2. Dari hasil evaluasi di tahun 2022, pada Tahun 2023 Pemda DIY berupaya melakukan langkah untuk mengurangi pencemaran air sungai melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat yaitu : 	

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		<p>Melaksanakan pembinaan kepada pengelola dan pengguna IPAL Kumunal (100 IPAL) serta pengambilan contoh uji outlet IPAL di 40 lokasi</p> <p>Melaksanakan Gerakan Bersih Sungai dengan melibatkan masyarakat di 10 lokasi</p> <p>Melaksanakan pembinaan terhadap lokasi/titik pantau yang teridentifikasi cemar berat di 10 lokasi</p>	
2.	<p>Pemerintah DIY perlu menyusun dan strategi penanganan sampah secara komprehensif serta berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten/Kota dan instansi terkait untuk menyelesaikan sampah sejak dari hulu yaitu membangun kesadaran masyarakat untuk dapat mengelola sampah secara mandiri melalui prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota terutama dalam pembinaan bank sampah dan kelompok pengelola sampah mandiri dan penyediaan TPS 3R di Kabupaten/Kota serta memperbaiki sistem pengelolaan sampah regional di TPST Piyungan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda DIY sudah melakukan pembinaan pengelolaan sampah dari hulu dalam bentuk pembinaan pengelolaan sampah mandiri, dengan sasaran terdiri dari Bank Sampah, TPS3R, dan masyarakat dari 5 kabupaten/kota bersama dengan Anggota Komisi C DPRD DIY dan melibatkan DLH Kabupaten/kota serta JPSM kabupaten/kota. Pembinaan tersebut sebanyak 15 angkatan pada tahun 2022. 2. Berkenaan dengan penyediaan TPS3R, sesuai dengan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, kewenangan penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah berada di Kabupaten/Kota. Provinsi hanya memiliki kewenangan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dan penanganan sampah di TPA/TPST Regional. 	
3.	<p>Pemda DIY perlu meningkatkan program pembangunan ruang terbuka hijau di perkotaan dan mempertahankan hutan rakyat yang merupakan tutupan lahan dengan penggunaan lahan terbesar dibandingkan penggunaan lahan lainnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pembangunan ruang terbuka hijau merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, sesuai dengan Surat Edaran Direktur jenderal pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung KLHK No. Se.1/PDASHL/KTA/DAS.1/3/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang pembagian kewenangan hutan kota, yang ditindaklanjuti dengan Sekda DIY Nomor : 525/6709 tanggal 21 April 2020 perihal Penyelenggaraan Hutan Kota, bahwa berdasarkan fakta di lapangan hutan kota yang ada di DIY status lahannya merupakan aset Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dalam penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. 2. Untuk mempertahankan tutupan lahan berupa hutan rakyat Pemda DIY berupaya melakukan rehabilitasi lahan dengan melakukan penanaman vegetasi. Selain itu, Pemda DIY bekerjasama dengan instansi pusat, yaitu BPDAS SOP dalam penyediaan bibit tanaman Rehabilitasi hutan da lahan (RHL) dan kebun bibit rakyat (KBR). 	

(5) *Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Meningkatkan capaian program kegiatan dan kemitraan yang telah dilakukan serta pastikan kemandirian data digital kependudukan tersebut. (Biro Tata Pemerintahan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka mendorong tertib adminduk, khususnya peningkatan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan akta kelahiran bagi penduduk berstatus anak, Pemda DIY terus membangun kerja sama dengan lembaga swasta untuk memberikan insentif produk bagi para anak pemegang KIA di DIY. Hingga akhir 2022, Pemda DIY telah melibatkan 17 lembaga swasta untuk program pemberian insentif bagi anak pemegang KIA di DIY dan ke depan jumlah keterlibatan swasta dalam program ini diupayakan terus bertambah. 2. Dalam mengelola data kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri telah memiliki Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang digunakan untuk pelayanan adminduk oleh seluruh Dinas Dukcapil secara terbatas via jaringan privat. Untuk optimalisasi pemanfaatan data kependudukan bagi perencanaan pembangunan pemerintah daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik, Kemendagri memberikan akses terhadap data kependudukan bagi seluruh instansi/lembaga tingkat pusat maupun daerah dengan berpedoman pada Permendagri 102/2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Hingga akhir 2022, telah ada 15 instansi/lembaga pengguna di DIY. 3. Menindaklanjuti Gerakan Bersama Pelayanan Adminduk bagi Penyandang Disabilitas yang diluncurkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri di Jakarta tanggal 14 Maret 2022 dalam rangka pendataan, perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan (biodata, KTP-el dan KIA) di DIY telah dilakukan Gerakan Bersama Pelayanan Adminduk bagi Penyandang Disabilitas pada tanggal 3 Juni 2022 dengan melibatkan peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Sekolah Luar Biasa, dan yayasan disabilitas serta Organisasi Kemasyarakatan/LSM/Yayasan. Disamping itu Dinas Dukcapil Kab/Kota juga melakukan jemput bola perekaman bagi ODGJ (termasuk disabilitas) dan penghuni panti/yayasan yang belum memiliki NIK atau belum melakukan perekaman KTP-el. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong semakin banyaknya keterlibatan lembaga swasta penyedia layanan publik yang bekerja sama dengan Pemda DIY untuk memberikan insentif bagi anak pemegang KIA di DIY dalam upaya pencapaian 100% kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk berstatus anak. ▪ Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan bagi OPD di lingkungan Pemda DIY dan lembaga pengguna lain untuk percepatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. Terhadap aspek keamanan data, upaya yang telah dilakukan adalah mewajibkan OPD dan lembaga pengguna data lain untuk menggunakan jaringan tertutup/privat yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo DIY. ▪ Kegiatan jemput bola pendaftaran dan perekaman biometrik bagi penyandang disabilitas yang dilakukan secara bertahap dapat meningkatkan cakupan dokumen kependudukan bagi masyarakat penyandang disabilitas maupun penduduk rentan sehingga dapat memudahkan mereka untuk mendapatkan pelayanan publik.

(6) *Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Membangun kesamaan pandang antar stakeholder desa agar kemiskinan menjadi prioritas yang harus ditangani desa. Untuk itu dapat dilakukan dengan bekerja sama Perusahaan Swasta atau Perguruan Tinggi.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama desa. Kewenangan fasilitasi kerja sama desa ada di Camat. Biro Tata Pemerintahan memfasilitasi kerja sama sesuai kewenangan Provinsi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Kewenangan yang difasilitasi kerja sama pemda DIY dengan Perguruan Tinggi maupun pihak ketiga non investasi.	Fasilitasi yang telah dilaksanakan adalah perjanjian Pemda DIY dengan PT. Sincore Indonesian tentang Peningkatan Kapasitas BUMKAl di DIY, dengan Ruang lingkup peningkatan kapasitas BUMKAl pada aspek kelembagaan, model bisnis, tata kelola manajemen, akuntabilitas dan pengawasan
2.	Membuat RPJMDes dan RPJPDes dalam aksi penanggulangan kemiskinan dan menjadikan BUMDes sebagai sarana untuk meningkatkan Kesejahteraan warga.	BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa ditingkatkan peran dan manajemennya dalam rangka mendukung pengembangan BUMDes menjadi lembaga yang mengelola dan mengembangkan potensi lokal menjadi destinasi yang mampu meningkatkan perkonomian dan kesejahteraan desa. Pengelolaan BUMDes menggandeng Pemerintah Desa untuk ikut aktif di dalamnya, sehingga andil Pemerintah Desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan lembaga BUMDes serta meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi lokal yang dapat diberdayakan.	Pengelola BUMDES dapat meningkatkan kapasitasnya sehingga pengelolaan BUMDES dapat lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga.
3.	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan melalui Global Gotong Royong (G2R) dan Gerakan Paseduluran Segoro Amarto untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	G2R dan Paseduluran Segoro Amarto merupakan gerakan ekonomi kerakyatan yang digali dari potensi lokal. Basis sumber daya berasal dari lokal dan tenaga penggerak lokal, sehingga Manfaat ekonomis akan dinikmati oleh masyarakat sekitar. potensi yang tergalikan akan dikembangkan dengan inovasi dan kreativitas mereka, sehingga menjadi unit usaha yang mampu menopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.	Potensi lokal desa dapat lebih diberdayakan sehingga manfaat ekonomi dapat dinikmati masyarakat setempat.

(7) *Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Kami melihat adanya kendala yang dihadapi dalam mencapai target adalah masih adanya perkawinan yang tidak dilaporkan dan dicatatkan serta kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD). Upaya itu adalah untuk mendorong tercapainya target	Peningkatan kapasitas Kader Bina Keluarga Sejahtera yang terdiri dari Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lnesia tetap akan kami lanjutkan dengan memberikan bekal secara khusus mengenai pentingnya	Upaya pencegahan pernikahan pada usia anak dan peningkatan pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja.

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
	<p>dilakukan melalui Pembinaan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta menerbitkan Perda DIY Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga serta Pergub Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.</p>	<p>pelaporan dan pencatatan perkawinan serta edukasi kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD). Upaya lain melalui Pembinaan KLA dilakukan dengan mendorong untuk mengoptimalkan kegiatan Promosi Informasi Kesehatan Remaja untuk pencegahan KTD di sekolah/madrasah dan di Kalurahan/Kelurahan. di samping itu juga dengan mengoptimalkan UPT Kabupaten/Kota sebagai lembaga konsultasi dan pemberi pertimbangan bagi Pengadilan Agama untuk mengeluarkan dispensasi nikah dan peningkatan kemampuan Gugus Tugas Kalurahan/Kelurahan Layak Anak.</p>	
2.	<p>Lebih menggalakkan serta mensosialisasikan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Kesehatan Reproduksi Remaja di DIY. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama bagi perempuan diantaranya melalui sosial pendidikan kesehatan reproduksi remaja, sosialisasi program pengendalian penduduk, dan fasilitasi forum penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja.</p>	<p>Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi remaja akan dilaksanakan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan bagi komunitas remaja, orang tua, tokoh masyarakat, agama di desa/kalurahan, serta di lingkungan sekolah. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman terkait pengendalian penduduk, telah disusun juknis pengendalian penduduk dan disosialisasikan ke OPD terkait. berkaitan dengan fasilitas forum penyelenggara kesehatan reproduksi remaja, akan dilaksanakan penguatan forum dengan mengaktifkan kelompok kerja dan mengoptimalkan koordinasi antar anggota forum.</p>	<p>Upaya pencegahan pernikahan pada usia anak dan peningkatan pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja.</p>
3.	<p>Melakukan percepatan pembuatan dan pelaksanaan Pergub atas mandat Perda No. 7/2018 tentang Pembangunan Ketahanan keluarga, yaitu : tentang Fungsi keluarga, Indeks ketahanan Keluarga, Rencana strategis Pembangunan Keluarga, Konselor Ketahanan Keluarga dan Pergub tentang Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga.</p>	<p>Sudah terbit Pergub DIY No. 106 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga</p>	<p>Bersama-sama dengan Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat telah menerbitkan Pergub DIY No. 106 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.</p>
4.	<p>Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, belum diungkapkan secara detail peranan kehadiran peraturan tersebut dalam pencegahan pernikahan usia dini, kehamilan yang tidak</p>	<p>Edukasi kepada masyarakat tentang pra dan paska menikah</p>	<p>Upaya memberikan pemahaman pentingnya persiapan Pra dan Paska menikah.</p>

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
	direncanakan, dan perilaku kekerasan dikalangan remaja. Dalam LKPJ Gubernur Tahun 2021 hanya memberikan penjelasan tentang upaya peningkatan kepemilikan legalitas keluarga sebagai usaha mewujudkan ketahanan keluarga. Dan kegiatan inipun mesti sudah mencapai sebagaimana target tahun 2021, namun belum tetap maksimal dibandingkan dengan tahun sebelumnya.		

(8) Urusan Perhubungan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Pemerintah DIY perlu melakukan inovasi terkait aspek budaya transportasi masyarakat sehingga dapat beralih ke transportasi publik dalam mobilitas keseharian dan mobilitas ke tempat-tempat wisata di DIY. Kolaborasi dengan para pelaku wisata khususnya yang juga menyediakan paket wisata sekaligus jasa transportasinya sangat diperlukan agar tercipta kondisi pariwisata yang lebih menarik dan nyaman.	Saat ini angkutan perkotaan Trans Jogja telah melayani 10 tujuan wisata, 56 lokasi pendidikan, 26 kawasan bisnis serta lokasi-lokasi lainnya. Selain itu, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan publik, Pemda DIY telah melakukan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan optimasi penyediaan layanan angkutan umum perkotaan pada tahun 2022 melalui: a. penerapan re-routing angkutan umum perkotaan; b. sosialisasi kepada pelajar untuk menggunakan angkutan umum; c. pemberlakuan tarif pelajar Rp 60,- Layanan menuju tempat wisata telah disediakan Angkutan KSPN oleh Damri Melalui Program Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) sebanyak 11 unit armada KSPN Yogyakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai upaya menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dalam mobilitas sehari-hari maupun aktifitas ke tempat wisata, sehingga diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Layanan menuju tempat wisata telah disediakan Angkutan KSPN oleh Damri Melalui Program Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) sebanyak 11 unit armada KSPN Yogyakarta.
2.	Pemerintah DIY perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan mengingat kenaikan volume kendaraan pribadi semakin meningkat.	Dalam mendukung sistem dan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan dan hemat energi, Pemda DIY telah melakukan hal-hal sebagai berikut:	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pedoman dalam pembuatan spesifikasi becak kayu bertenaga alternatif; dan Mengurangi keberadaan becak ilegal;

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang D diselesaikan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2022 telah dilakukan kajian dan pembuatan prototype becak kayuh dengan tenaga alternatif. 2. Pada tahun 2023 akan dilakukan pengadaan becak kayuh dengan tenaga alternatif dan penyediaan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum). 	
3.	Untuk mengurangi kemacetan di pusat Kota Yogyakarta terutama pada saat waktu kunjungan wisata yang padat, maka perlu dipertimbangkan untuk menyediakan lahan parkir kendaraan pariwisata di luar wilayah Kota Yogyakarta dengan menyediakan transportasi umum ke setiap destinasi wisata di Kota Yogyakarta dari setiap lahan parkir pariwisata tersebut.	<p>Pada saat ini telah tersedia park and ride Bandara Adisutjipto dengan luas 3,3 ha, yang mengintegrasikan moda transportasi udara, transportasi rel dan transportasi darat.</p> <p>Pada tahun 2022 telah dilakukan studi penyusunan Grand desain dan DED Park And Ride Bandara Adisutjipto, yang diharapkan dapat mengakomodir penyediaan lahan parkir untuk kendaraan pariwisata.</p>	Untuk mengurangi kemacetan di perkotaan maka disediakan lahan parkir bagi kendaraan ataupun bus pariwisata (Bandara Adi Sutjipto).

(9) Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang D diselesaikan
1.	Program <i>Jogja Smart Province</i> hendaknya dapat menyatukan/mengintegrasikan semua aplikasi yang ada di DIY yang dikelola oleh OPD.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan <i>datawarehouse dan executive information system</i> yang mengintegrasikan seluruh informasi 2. Penyusunan arsitektur TIK Pemda DIY. 3. Pengembangan aplikasi peladen untuk mengintensifkan monitoring rekomendasi TIK dan penggunaan <i>datacenter</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi data yang disajikan dalam bentuk visual diharapkan dapat memberikan data dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan Panduan integrasi pemda DIY peningkatan tatakelola TIK
2.	di setiap Kabupaten/kota telah dikembangkan smart city, sekarang bagaimana cara mengintegrasikan berbagai layanan digital kabupaten kota dalam satu sentuhan di Pemda DIY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan sebagai yang berfungsi sebagai <i>Government Service Bus</i> antar kabupaten / kota. 2. Memaksimalkan Forum Komunikasi Diskominfo se-DIY sebagai media komunikasi Pemda DIY dengan Kab/Kota. 	Menyediakan hub pertukaran data yang dapat dimanfaatkan kabupaten/kota

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
3.	Pengembangan dan penambahan jaringan penguatan sinyal telekomunikasi agar di DIY tidak ada zona blank	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan jaringan intranet Pemda DIY di 267 titik unit kerja. 2. Pembangunan wifi publik dan tempat wisatawan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan jaringan pada intansi Pemda DIY termasuk SMA/SMK ▪ Penyediaan wifi publik
4.	Perlu dibentuk tim/unit kerja yang memantau dan menindaklanjuti setiap opini dan hoax yang beredar dimasyarakat agar segera ada jawaban/solusi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan koordinasi dengan Admin Plat Merah (pengelola akun media sosial OPD Pemda DIY) dan Pegiat anti HOAX seperti MAFINDO MASDJO, PAIJO, GENPI, Netizen Jogja, KBJ dan Guyub OPD Pemda DIY. 2. Memaksimalkan Forum Sosialisasi Bijak Bermedia sosial dan Diseminasi Kanten Positif sebagai media pembelajaran kepada masyarakat tentang penggunaan internet yang sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan koordinasi dengan Admin Plat Merah dapat dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> - Mengklarifikasi berbagai berita hoax yang bermunculan dengan membuat konten untuk menanggapi berita yang simpang siur - Menyajikan informasi yang jelas dan memiliki dasar fakta yang benar ▪ Melaksanakan Forum Desiminasi konten Positif untuk meliterasi masyarakat tentang internet sehat

(10) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Peningkatkan program pembinaan dan pendampingan aspek kelembagaan, usaha koperasi, keuangan, permodalan dan manajemen koperasi.	Beberapa hal yang sudah dilakukan dalam rangka untuk mendorong aspek kelembagaan, usaha koperasi, keuangan, permodalan dan manajemen koperas Pendidikan dan Pelatihan yang terkonsep melalui standarisasi kurikulum dalam sibakul, seperti Bimtek Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kopetensi SDM Koperasi, Diklat Digitalisasi Manajemen Keuangan Koperasi, Diklat Digitalisasi Sistem Layanan Kelembagaan, Diklat Manajemen Keuangan dan Akuntansi, Diklat Pemantapan Kelembagaan Koperasi , Diklat Pengelolaan Akses Pembiayaan Koperasi, Diklat Penyusunan Laporan Keuangan, Modernisasi koperasi melalui digitalisasi sistem manajemen koperasi	Peningkatkan program pembinaan dan pendampingan aspek kelembagaan, usaha koperasi, keuangan, permodalan dan manajemen koperasi.
2.	Peningkatan Akses pembiayaan koperasi melalui Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Bukan Bank (LKBB).	Melaksanakan Diklat, Sosialisasi dan Bimtek Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi, dan selanjutnya dilakukan pendampingan bagi	Kesulitan untuk memenuhi persyaratan akses pembiayaan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		koperasi yang potensial akses pembiayaan agar terealisasi kontrak pembiayaan dengan LKB/LKBB.	sehingga perlu ada pendampingan.
3.	Fasilitasi hibah melalui pasar komunitas seperti tahun 2021 harus ditambah jumlahnya.	Pelaksanaan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.	Berkaitan dengan rantai pasok/dengan adanya hibah harapan kita, pelaku usah dapat menghidupkan kembali usahanya pasca pandemi.
4.	Pemberian modal hibah pada koperasi perlu ditingkatkan.	Pelaksanaan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.	Berkaitan dengan modal koperasi.
5.	Agar Pemerintah Daerah melakukan kajian pendirian untuk Lembaga seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) di Kementrian, lembaga tersebut Koperasi dan UKM untuk tingkat DIY dengan melibatkan Pemerintah kabupaten dan kota di DIY.	Selama ini pembiyaan melalui dana bergulir telah dilakukan sampai dengan tahun 2018. Setelah itu dilakukan moratorium untuk dilakukan evaluasi terkait dengan sistem dan prosedur penyaluran dana bergulir termasuk juga dari sisi kelembagaan.	

(11) Usaha Kecil Menengah di DIY

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Fasilitasi permodalan UMKM melalui program pemerintah pusat LPDB.	Pemda DIY turut mensosialisasikan adanya Lembaga Keuangan LPDB untuk menjadi alternatif bagi koperasi mendapatkan akses permodalan, dengan mengundang LPDB sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi, Bimtek dan lain lain.	Akses pembiayaan UKM lebih mudah karena banyak sumber pembiayaan yang dapat di akses
2.	Peningkatan fasilitasi; sertifikasi PIRT dan halal, subsidi kemudahan ongkos kirim atau free-ongkir dalam program Sibakul <i>Markethub</i> ditingkatkan.	Pelaksanaan Bimtek dan Fasilitasi Halal, Bimtek dan Fasilitasi P-IRT sudah dilaksanakan mulai tahun 2020 dan sampai dengan saat ini. Tahun 2023 direncanakan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan tersebut. Sudah ada peningkatan free ongkir dari tahun 2021 sebesar Rp1.700.000.000 Untuk tahun 2022 sebesar Rp2.200.000.000 (mengalami peningkatan).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kendala terkait kesiapan Peserta / UMKM dalam mengikuti Fasilitasi Halal maupun P-IRT, solusinya dengan memperbanyak pendampingan UKM terkait legalitas produk sehingga UKM lebih siap dalam memperoleh fasilitasi halal maupun P-IRT. ▪ Fasilitasi Ongkir terdapat beberapa UKM yang menyalahi ketentuan dalam pengiriman barang

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang D diselesaikan
			sesuai Juknis yang ditentukan sehingga dilakukan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif terhadap fasilitas free ongkir.
3.	Pembinaan UMKM yang telah berhasil ekspor keluar negeri agar bisa mempertahankan usahanya (banyak yang berhenti ekspor).	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM melalui sertifikasi personil di bidang ekspor melalui serangkaian pelatihan dan diakhiri dgn uji kompetensi personil pelatihan.	Dengan adanya personil yg kompeten persoalan SDM dalam ekspor/import dapat diatasi.

(12) Urusan Penanaman Modal

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang D diselesaikan
1.	Peningkatan jumlah penanaman modal PMA dan PMDN agar terus ditingkatkan dengan meningkatkan daya tarik investasi di DIY.	Telah dilakukan penyusunan kajian bisnis yang memuat proyek investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor potensial selama tahun 2021 dan tahun 2022.	Ketersediaan IPRO (Investment Project Ready to Offer) yang kemudian dipromosikan baik melalui channel promosi dalam dan luar negeri diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi DIY dan memperkaya pilihan investor untuk berinvestasi di DIY.
2.	Pembangunan Tol Jogja-Solo dan Jogja-bandara NYIA- Cilacap diharapkan meningkatkan investasi di DIY yang membawa dampak kesejahteraan masyarakat di DIY dengan akses tenaga kerja, bahan material dari DIY bisa terserap dengan maksimal dalam proyek tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> Untuk jangka panjang dilakukan Penyusunan kajian <i>Investment Project ready to offer</i> di kawasan Kulon Progo dan sekitarnya sudah dilaksanakan oleh BKPM RI yang proses penyusunannya selalu kami dampingi. Prospektus investasi ini adalah penyusunan IPRO Plumbon Cargo Village yang ada di Kawasan Aerotropolis Kulon Progo. Ketersediaan tol dan jalur logistik akan semakin baik apabila diikuti dengan pembangunan cargo hub yang mampu mendukung aktivitas logistik, barang dan jasa sehingga memunculkan efek pengganda yang lebih besar. Bappeda DIY dan DPPM DIY telah mengajukan bantuan kajian pengembangan aerotropolis YIA kepada JICA. Hal ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dokumen perencanaan dalam hal pengembangan logistic hub yang didalamnya terdiri dari YIA, jalan Tol Yogya YIA-Solo-Cilacap. Penguatan keberadaan YIA dan aerotropolis sebagai strategic logistic hub di Jawa Selatan sangat penting untuk dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan IPRO (<i>Investment Project Ready to Offer</i>) yang kemudian dipromosikan baik melalui channel promosi dalam dan luar negeri diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi DIY dan memperkaya pilihan investor untuk berinvestasi di DIY khususnya kawasan aerotropolis YIA dan sekitarnya. Ketersediaan dokumen perencanaan terkait pengembangan aerotropolis akan membantu Pemda DIY dalam mengembangkan kawasan tersebut supaya pembangunannya tidak sporadis dan berorientasi pada pengembangan kawasan yang lebih luas.

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		<p>agar jalur logistik di Jawa Selatan tidak timpang dengan jalur logistik di Jawa Utara.</p> <p>3. Sedangkan untuk jangka pendek, diberikan kemudahan perijinan berusaha terutama bagi pengusaha lokal, baik di bidang konstruksi maupun perdagangan untuk mensuplai kebutuhan proyek-proyek nasional di DIY, sehingga pengusaha lokal mendapatkan kue dari proyek tersebut.</p>	
3.	Iklim penanaman modal yang semua kabupaten dan kota di DIY memiliki nilai investasi yang merata dan semua memiliki daya tarik untuk masuknya investor perlu dilakukan kebijakan Pemerintah untuk mendukung iklim investasi yang positif di DIY.	DPPM DIY selalu melibatkan kabupaten Kota dalam penyusunan project investasi yang siap ditawarkan sehingga semua usulan project prioritas yang menjadi agenda kabko akan diakomodasi oleh DIY. Pada tahun 2021 DPPM DIY telah membuat kajian IPRO khusus untuk Kabupaten Gunungkidul dan mendapat apresiasi yang baik dari PemKab GK secara kualitas isi dan penyampaian.	Ketersediaan IPRO (Investment Project Ready to Offer) yang kemudian dipromosikan baik melalui channel promosi dalam dan luar negeri diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi DIY dan memperkaya pilihan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul.

(13) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Target kinerja beserta capaian Pemda DIY Urusan Pemuda dan Olahraga, pada tahun 2021 capaian indikator persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu 11,58% dari target 11,50%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 terdapat peningkatan 1,56%. Capaian tahun 2021 ini masih terdapat selisih 0,22% dibanding target akhir RPJMD. Tercapainya target indikator persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan didukung oleh penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kepemudaan, antara lain pengembangan kewirausahaan dan seleksi Paskibraka. Sasaran kegiatan pengembangan kewirausahaan terutama ditujukan untuk pemuda pada wilayah kantong kemiskinan di Kapanewon Kokap dan	1. Pada tahun 2022, Pemda DIY memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Pemasaran Online untuk 126 kelompok wirausaha, Pelatihan kewirausahaan untuk pemuda di wilayah kantong kemiskinan sebanyak 15 kelompok pemuda, Sosialisasi Kepemudaan untuk 6 kelompok pemuda, lomba Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) dengan target pembinaan pemenang untuk 6 kelompok wirausaha, Seleksi dan Pelatihan Paskibraka dengan target peserta 80 siswa, serta Pemuda Kader Anti Narkoba DIY untuk 550 orang. Adapun alokasi anggaran seluruh kegiatan kepemudaan di tahun 2022 untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp4.494.254.500. Terkait dengan kegiatan kepemudaan dalam mempromosikan objek wisata dan hasil industri di	Adanya kegiatan-kegiatan kepemudaan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan positif dan menghindarkan pemuda dari berbagai aktivitas negatif maupun tindakan yang mengarah kepada kriminalitas. Khusus untuk pengembangan kewirausahaan, kegiatan diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup pemuda dan masyarakat pada umumnya di daerah kantong-lantong kemiskinan sekaligus mengoptimalkan potensi wilayah yang ada.

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
	Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Harapan kami kegiatan kepemudaan dapat membantu para pemuda mempromosikan objek wisata dan hasil industri di daerahnya.	dalamnya, telah dilakukan pelatihan kepada kelompok pemuda mengenai pengembangan bisnis, dengan narasumber praktisi dan akademisi. Selain itu diberikan bantuan berupa modal usaha dalam bentuk barang. Sehingga diharapkan kelompok pemuda tersebut dapat mengembangkan bisnisnya.	
2.	Belum maksimalnya pelaksanaan pelatihan kewirausahaan maupun workshop kepemudaan yang melibatkan banyak peserta dan praktik intensif di lapangan. Akibatnya, kegiatan lebih banyak dilaksanakan dalam forum alumni kegiatan tahun sebelumnya secara daring maupun tatap muka yang sangat terbatas.	Pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal, disebabkan karena pandemi Covid-19 yang belum berakhir pada tahun 2021. Sehingga banyak penyelenggaraan kegiatan kepemudaan yang dilakukan secara daring maupun tatap muka terbatas. Sedangkan untuk kegiatan kepemudaan yang banyak membutuhkan praktik lapangan akan dibagi dalam beberapa sesi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sesuai dengan Inmendagri Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, seluruh wilayah DIY berstatus Level 1 yang artinya kegiatan publik dapat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga pelaksanaan pelatihan pun sudah mulai dapat dilaksanakan secara massal dengan mempertimbangkan lokasi dan menerapkan protokol kesehatan ketat	Dengan adanya penurunan level PPKM di DIY yang artinya memungkinkan penyelenggaraan kegiatan bersifat massal, pelatihan kewirausahaan diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal ditambah dengan praktik langsung di lapangan sehingga peserta bisa mendapatkan hasil pelatihan yang optimal
3.	KONI dimohon memperhatikan kesejahteraan atlet dan pelatih. Imbas prestasi pada PON XX Tahun 2021 di Papua kemarin yang tidak memenuhi target yang ditetapkan. Antara lain dengan menaikkan bonus dan pekerjaan bagi atlet dan pelatih yang berprestasi. Sudah banyak atlet dan pelatih DIY yang pindah daerah karena tawaran bonus yang lebih besar dan menjanjikan pekerjaan tetap.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="797 833 1326 1061">1. Kesejahteraan atlet dan pelatih merupakan salah satu faktor yang diutamakan dalam pengelolaan anggaran KONI yang berasal dari hibah Gubernur DIY. Pada tahun 2021, KONI menganggarkan insentif atlet dan insentif pelatih yang mengikuti Puslatda dalam rangka persiapan PON XX di Papua. di samping itu, KONI masih menganggarkan uang saku bagi para atlet yang akan mengikuti Puslatnas maupun kejuaraan di level nasional dan internasional. <li data-bbox="797 1065 1326 1156">2. Pemda DIY juga turut mengupayakan adanya pemberian penghargaan prestasi bagi para atlet dan pelatih apabila berhasil meraih kejuaraan pada berbagai kejuaraan multievent baik di tingkat daerah, nasional, maupun 	Kesejahteraan atlet dan pelatih di DIY diharapkan dapat didukung melalui penyaluran hibah Gubernur kepada KONI DIY, terutama pemberian penghargaan kepada atlet dan pelatih yang telah mewakili DIY dan berprestasi baik di ajang regional, nasional, maupun internasional

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		internasional. Pada akhir tahun 2021 Pemda DIY telah memberikan penghargaan kepada para atlet yang berprestasi di ajang PON XX dan Peparnas XVI beserta pelatihnya dengan total alokasi sebesar Rp15.780.000.000,00	
4.	Hibah kepada KNPI DIY tahun 2021 tidak disalurkan karena belum adanya kepastian hukum terhadap status organisasi KNPI DIY yang mengalami dualisme kepengurusan. Demi kesinambungan kegiatan pemuda yang tergabung KNPI, seperti diketahui belum lama KNPI sudah melakukan kongres penyatuan dualisme kepengurusan. Perlunya langkah kooperatif Pemda DIY untuk mengkomunikasikan dengan KNPI agar tidak terjadi perpecahan dan segera tersalurkan hibah untuk pembinaan kepemudaan di DIY.	Pemda DIY telah berupaya melakukan koordinasi dengan para pengurus KNPI DIY agar kepengurusan KNPI DIY dapat segera dibentuk dan hibah untuk operasional KNPI DIY dapat segera disalurkan	Koordinasi Pemda DIY dengan pengurus KNPI DIY diharapkan dapat mendorong KNPI untuk segera menyelesaikan permasalahan internal dan membentuk kepengurusan baru
5.	Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan di daerah dalam sebuah desain olahraga daerah. Secara spesifik olahraga masyarakat mendapatkan pengaturan yang memadai setara dengan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi. Oleh karena itu, perlu didorong pengembangan olahraga masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, serta dalam upaya untuk menguatkan interaksi sosial antar warga yang kondusif guna memperkuat ketahanan nasional.	Sesuai dengan kewenangan terkait olahraga masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan terkait pengelolaan olahraga masyarakat sehingga Pemda DIY turut mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui penyediaan beberapa fasilitas olahraga yang dikelola oleh Pemda DIY.	Dengan penyediaan fasilitas dan pemeliharaan fasilitas olahraga, masyarakat diharapkan lebih terlibat aktif dalam melakukan olahraga rutin guna peningkatan kualitas kesehatan pribadi
6.	Meminta kepada Pemerintah Daerah DIY untuk membangun fasilitas-fasilitas publik sebagai ruang ekspresi dan kreativitas pemuda diseluruh DIY. Fasilitas publik ini harus bersifat komprehensif dan paripurna dalam memenuhi kebutuhan pemuda.	Pemda DIY telah menyediakan fasilitas-fasilitas publik guna menunjang ekspresi dan kreativitas pemuda. Beberapa fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan oleh pemuda antara lain Pondok Pemuda Ambarbinangun, Youth Center, dan Bumi Perkemahan Babarsari	Dengan adanya penyediaan beberapa fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kegiatan pemuda, diharapkan para pemuda semakin termotivasi untuk membuat banyak kegiatan positif guna mengembangkan kreativitas dan bakat mereka

(14) Urusan Statistik

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Mendorong Pemerintah Daerah DIY khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk terus mengembangkan kapasitas BPPSD dalam menghasilkan dan mengelola data pembangunan.	BPPSD bukan penghasil data, namun sebagai walidata SDI DIY (Satu data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan DIY) mengkoordinir produsen data dan walidata pendukung yang ada di OPD teknis dalam penyelenggaraan SDI. Inventarisasi data diselenggarakan dengan mekanisme penyusunan daftar data sesuai kebutuhan perencanaan beserta metadatanya. Validasi data dilaksanakan dengan mekanisme desk produsen data dan walidata pendukung. Desk dilaksanakan 3 bulan sekali, 4kali dalam setahun.	Kapasitas BPPSD dalam mengelola data pembangunan daerah dapat terus dikembangkan dengan cara sebagai berikut : a. Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dalam mengelola data pembangunan daerah, berupa penerimaan ASN dengan formasi yang dibutuhkan dan pembukaan program magang untuk mahasiswa dari program studi yang berhubungan dengan pengelolaan data pembangunan daerah. b. Peningkatan wawasan dan kompetensi SDM tentang pengelolaan data pembangunan daerah, berupa penyelenggaraan pelatihan teknis pengelolaan data pembangunan daerah dan pelaksanaan studi banding dengan mengikutsertakan SDM di BPPSD sebagai peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berhubungan dengan pengelolaan data pembangunan daerah, seperti Diklat Statistik Sektoral yang diselenggarakan oleh BPS RI. c. Up date Aplikasi DATAKU sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan data yang diolah yang senakin berkembang dan semakin banyak.
2.	Mendorong BPPSD DIY untuk membangun jejaring dengan semua pemangku kepentingan dalam menyusun data yang valid dan terkonsolidasi sebagai acuan pembuatan kebijakan di DIY.	Dalam menyusun data yang valid dan terkonsolidasi sebagai acuan pembuatan kebijakan di DIY, telah dibangun Jejaring dengan pemangku kepentingan yang diantaranya diwujudkan dalam bentuk tim forum satu data DIY meliputi OPD Sektoral, dan instansi vertikal yang ada di DIY dan Kabupaten/Kota. Tim forum satu data ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 34/ KEP/2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan anggota di antaranya adalah sebagai berikut : a. BPS Provinsi DIY, sebagai pembina data statistik sekaligus walidata pendukung dan produsen data statistik tingkat provinsi.	Telah dibangun jejaring dalam bentuk Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja 5 Tahun dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku pembina data spasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) Universitas Gadjah Mada (UGM), yang merupakan kepanjangan tangan dari Badan Informasi Geospasial sebagai pembina data geospasial tingkat provinsi.

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Instansi Vertikal di DIY, seperti BPS Provinsi DIY, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama DIY, Kanwil Badan Pertanahan Nasional DIY, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY, Kanwil Bank Indonesia DIY, Otoritas Jasa Keuangan DIY, Kepolisian Daerah DIY, Stasiun Klimatologi DIY, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V DIY, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, BPJS Kesehatan Provinsi DIY, BBWS Serayu Opak, sebagai walidata pendukung dan produsen data tingkat provinsi. c. Dan OPD di DIY sebagai walidata pendukung dan produsen data tingkat provinsi. 	
3.	BPPSD perlu untuk secara pro-aktif memberikan laporan dari perkembangan data yang ada lebih sering dari sebelumnya (<i>currently data</i>).	<p>Secara pro-aktif, telah memberikan laporan dari perkembangan data yang ada lebih sering dari sebelumnya. Hal ini dapat dilaksanakan dengan memberikan laporan baik secara online melalui aplikasi Jogja Dataku maupun offline tentang perkembangan data berdasarkan hasil desk keterisian data, baik statistik maupun geospasial, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perkembangan data dan aktualitas data terpantau melalui mekanisme desk walidata pendukung dan produsen data yang dilaksanakan 3 bulan sekali. Selain itu ada hal lain yang juga mempengaruhi aktualitas data yaitu sifat data (bulanan, triwulanan, smesteran, tahunan). Sebuah data yang bersifat tahunan tentu saja tidak bisa dipaksakan untuk bisa diperbarui 3 bulan sekali. Jalan keluarnya digunakan status data angka sementara dan angka sangat sementara. b. Perkembangan data statistik dapat dilaporkan secara berkala di akhir triwulan, yaitu pada awal bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Laporan tersebut berdasarkan Berita Acara desk keterisian data di Aplikasi Jogja Dataku. b. Sedangkan perkembangan data geospasial dapat dilaporkan secara berkala di akhir semester, yaitu pada awal bulan Januari dan Juli. Laporan tersebut berdasarkan 	Laporan keterisian/ perkembangan data selalu diupdate triwulanan melalui desk updating data

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		hasil desk identifikasi data geospasial oleh produsen data di setiap OPD sumber data, yang dituangkan dalam Berita Acara.	

(15) Urusan Persandian

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Peningkatan SDM persandian	Telah dikirimkan personil untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Pusdiklat BSSN seperti sertifikasi EC-Council Certified Incident Handler (ECIH), sertifikasi EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH), pelatihan Kamsiber Pimpinan, Computer Security Computer User (CSCU) dan pelatihan pengelolaan SOC, dan cyber security drill test sektor pemerintah.	Meningkatkan kemampuan personil dalam penguasaan teknologi dan informasi dalam penanganan insiden keamanan informasi.

(16) Urusan Kebudayaan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Pemda DIY hendaknya berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan DIY untuk memasukkan materi kebudayaan dalam kurikulum pendidikan di DIY, agar keterpaduan spirit keistimewaan itu betul-betul nyata dan menyatu, sejak usia dini hingga lansia, sejak PAUD hingga Perguruan Tinggi. Selain itu agar output kebudayaan dengan spirit keistimewaan dapat terlihat pada insan milenial melalui pendidikan.	Implementasi materi kebudayaan dalam kurikulum di DIY harus melibatkan para pendidik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan. Pemda DIY menyelenggarakan Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Berbasis Budaya yaitu workshop bagi para pendidik mulai dari jenjang PAUD hingga jenjang menengah dengan menghadirkan narasumber dari Taman Siswa, Pokja PAUD, dan MGMP Bahasa Jawa. Pada jenjang pendidikan tinggi, Pemda DIY mendukung implementasi kebudayaan dalam kurikulum pembelajaran melalui penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta yang mengkhususkan pada pengembangan kompetensi akademik berbasis budaya. Guna mendukung implementasi materi kebudayaan dalam kurikulum DIY, Pemda DIY juga memfasilitasi penyelenggaraan Workshop Pendidikan Khas Kejojjaan	Melalui kegiatan implementasi diharapkan para pelajar dan masyarakat pada umumnya dapat memahami konsep keistimewaan Yogyakarta dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran sehari-hari
2.	Memaksimalkan sosialisasi kebudayaan melalui <i>social media</i> dengan kolaborasi bersama Dinas Pendidikan	Pemda DIY melalui portal Jogja Belajar Budaya (JB Budaya) yang dapat diakses pada laman jbbudaya.jogjabelajar.org	Diharapkan sosialisasi kebudayaan melalui media sosial kepada para peserta didik dapat menarik

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
	untuk sosialisasi kepada peserta didik (siswa dan mahasiswa).	mencoba untuk menampilkan berbagai informasi terkait keragaman budaya di Yogyakarta, antara lain mengenai sejarah, upacara adat, cerita rakyat, unggah-ungguh, wayang, arsitektur bangunan, tembang macapat, permainan tradisional, busana kejawen, tari tradisional, makanan tradisional, serta desa budaya. Portal ini dapat dijadikan sumber belajar oleh para siswa maupun masyarakat secara umum. Selain itu, Pemda DIY juga mengupayakan kolaborasi melalui fitur instagram terkait kegiatan-kegiatan pendidikan budaya.	minat para peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai budaya Yogyakarta mengingat peserta didik pada masa kini begitu dekat dengan sosial media. Sosial media juga dapat didesain secara maksimal sehingga para peserta didik tertarik untuk mengakses sosial media tersebut
3.	Merencanakan dan melaksanakan sosialisasi kebudayaan DIY dengan media virtual, seperti halnya Perencanaan Virtual Museum.	Pemda DIY mencoba untuk memasukkan pendidikan budaya dalam edukasi berbentuk film pendek untuk memperkenalkan budaya Yogyakarta secara kreatif. Melalui film pendek ini diharapkan masyarakat mendapatkan edukasi sekaligus hiburan yang sarat dengan nilai pendidikan	Diharapkan pembuatan film pendek budaya dapat membantu sosialisasi kebudayaan Yogyakarta
4.	Perlunya Pemda DIY untuk mengukur secara khusus kemajuan budaya DIY setelah diberlakukannya UU Keistimewaan. Sejauh manakah pengelolaan dan pemanfaatan Dana Keistimewaan memberikan pengaruh positif dalam pemajuan budaya masyarakat yang sesuai dengan kondisi kekinian, tanpa harus kehilangan jatidiri. Jika dilihat dengan maraknya berbagai kekerasan dan konflik yang muncul, maka masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Pemda DIY.	Pengukuran kemajuan budaya DIY dalam bidang pendidikan dilakukan melalui Evaluasi Pendidikan Berbasis Budaya. Sesuai Perda DIY Nomor 5 Tahun 2011, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di DIY dilaksanakan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya. Evaluasi dilakukan dengan penilaian terhadap implementasi pendidikan berbasis budaya di lingkungan satuan pendidikan di DIY, salah satunya dengan penerapan pendidikan karakter berbasis budaya	Diharapkan melalui evaluasi ini kemajuan budaya DIY dalam dunia pendidikan dapat diukur dan hasilnya dapat menjadi acuan bagi perbaikan implementasi budaya Yogyakarta
5.	Sektor pendidikan, perlu perhatian khusus terkait sistem pembelajaran tatap muka di level 3 Pandemi Covid-19 di DIY yang terdampak pembatasan sosial.	Sistem pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran jarak jauh dan metode bauran menjadi pilihan ketika penerapan PPKM Level 3 di DIY. Seiring dengan membaiknya situasi pandemi di Indonesia, sesuai dengan Inmendagri Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, seluruh wilayah DIY berstatus Level 1 yang artinya kegiatan publik dapat dilaksanakan dengan menerapkan	Diharapkan penurunan Level PPKM di DIY menjadi level 1 dapat mengembalikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka seperti semula

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		protokol kesehatan yang ketat sehingga pelaksanaan pembelajaran pun dapat diterapkan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.	

(17) Urusan Perpustakaan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Pada tahun 2021 terdapat 892.446 pemustaka yang mengakses layanan perpustakaan. Sedangkan, jumlah penduduk usia potensial DIY (usia 5-65 tahun) menurut proyeksi BPS pada tahun 2021 sebesar 3.399.700. Sehingga Persentase kenaikan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 26,25% atau terealisasi 100,96%. Capaian tersebut jika dibandingkan target akhir RPJMD 2017-2022 sebesar 27%, maka pada tahun 2021 telah tercapai 97,22%. Ini patut kita apresiasi dan dipertahankan untuk tahun mendatang.	Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong realisasi tersebut adalah melaksanakan Layanan Perpustakaan Menetap di unit Grhatama Pustaka (GTP), di unit Jogja Library Center (JLC), di unit Rumah Belajar Modern (RBM). Serta Layanan Perpustakaan Ekstensi berupa Layanan Pojok Baca, Layanan Perpustakaan Keliling, Layanan <i>Delivery Order</i> (Pemustaka Istimewa).	Mendorong peningkatan jumlah pemustaka yang mengakses layanan perpustakaan
2.	Peningkatan drastis kunjungan pemustaka secara virtual sebanyak 892.446 orang selama tahun 2021, bisa menjadi titik tolak yang sangat bagus untuk pengembangan akses kemudahan kepada masyarakat dalam memanfaatkan layanan Perpustakaan DIY. Oleh karena itu, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah perlu didorong untuk terus melakukan inovasi pelayanan.	Meningkatkan layanan Perpustakaan virtual berupa website DPAD DIY, website Jogja Library for All, Website Center of Excellence (COE), dan aplikasi iJogja.	Layanan perpustakaan virtual dilayankan dengan baik.
3.	Pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah perlu untuk terus dilakukan antara lain dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan bacaan yang lebih aplikatif dengan era kekinian.	DPAD DIY <i>me-launching</i> aplikasi Si Yokca yang merupakan akronim dari Aplikasi "Ayok Membaca!". SiYokca juga merupakan ajakan kepada masyarakat untuk selalu membaca. Aplikasi ini memberi kemudahan masyarakat dalam mengakses bahan bacaan. Selain itu juga dilakukan pengadaan bahan bacaan berupa buku fisik dan juga <i>e-book</i> .	Menyediakan kebutuhan bacaan yang lebih sesuai dengan era kekinian.

(18) Urusan Kearsipan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Dalam LKPJ Tahun 2021 ini, Gubernur penyelenggaraan kearsipan perlu untuk mengkaitkan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Penyelenggaraan kearsipan di DIY dijalankan bukan hanya merujuk langsung Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan namun juga sekaligus melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kearsipan.	Menerapkan dan mengaplikasikan penyelenggaraan kearsipan dengan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2018.	Pelaksanaan Perda DIY Nomor 5 tahun 2018.
2.	Proses pengawasan kearsipan sebagai salah satu pendukung dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan juga penguatan tata laksana pengukuran kinerja kearsipan masih memiliki banyak kendala terutama di saat pandemi Covid-19 dimana masih diperlukan kunjungan dan assessment ke masing-masing OPD.	Pengembangan aplikasi pengawasan kearsipan, Kinarya. Pengembangan aplikasi ini merupakan upaya memudahkan proses pembinaan kearsipan di 86 OPD dan UPTD pemda DIY. Aplikasi ini dapat diakses pada https://kinarya.jogjaprovo.go.id/ .	Mempermudah proses pengawasan kearsipan.
3.	Peningkatan kualifikasi dan kapasitas pengelola arsip, baik di tingkatan Dinas Perpustakaan maupun Instansi-Instansi yang masih mengelola arsip.	Melakukan pembinaan dan pelatihan untuk sumber daya manusia di bidang kearsipan melalui Bimtek.	Peningkatan kapasitas pengelola arsip.

(19) Urusan Pembinaan Mental Spiritual

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Sektor pendidikan, perlu perhatian khusus terkait sistem pembelajaran tatap muka di level 3 Pandemi Covid-19 di DIY yang terdampak pembatasan sosial.	Sistem pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran jarak jauh dan metode bauran menjadi pilihan ketika penerapan PPKM Level 3 di DIY. Seiring dengan membaiknya situasi pandemi di Indonesia, sesuai dengan Inmendagri Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, seluruh wilayah DIY berstatus Level 1 yang artinya kegiatan publik dapat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga pelaksanaan pembelajaran pun dapat diterapkan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.	Diharapkan penurunan Level PPKM di DIY menjadi level 1 dapat mengembalikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka seperti semula.
2.	Pemda DIY melalui Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY diharap menginisiasi Kajian Pengembangan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Bencana. Kajian ini	Pelaksanaan Kajian Pengembangan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Bencana yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2021	1. Pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi Informasi bermanfaat sebagai sarana pembelajaran yang mampu menyesuaikan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
	dimaksudkan untuk menyediakan peta berbagai kebutuhan terkait, baik kebijakan maupun teknis-operasional, masalah, inovasi dan peluang sebagai bahan rekomendasi kebijakan pengembangan .	tentang Pedoman Pendidikan Aman Bencana Pada Satuan Pendidikan	keadaan pada saat terjadi bencana alam maupun non alam. 2. Adanya Pergub tersebut, satuan pendidikan maupun OPD mempunyai pedoman dalam rangka perlindungan dan keselamatan dari risiko bencana berupa kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan sesuai ketugasan dan tanggungjawabnya.

2) *Urusan Pemerintah Pilihan*

a) *Urusan Kelautan dan Perikanan*

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Meningkatkan budaya bahari masyarakat di DIY yang ada untuk mengoptimalkan potensi alam yang ada dengan peningkatan kapasitas SDM nelayan, pemanfaatan teknologi tangkapan ikan, insentif bagi nelayan.	Melalui anggaran Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung produksi perikanan tangkap antara lain: a. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Gesing yang dimulai tahun 2020 dengan penyusunan Masterplan. Selanjutnya pada tahun 2021 dilakukan proses pembebasan lahan serta penyusunan DED dan Amdal. Pada tahun 2022 dilaksanakan proses pembangunan konstruksi meliputi Kolam Dermaga, Seawall, Gedung TPI, MCK Umum, Power House, musholla, Gudang Pengepakan Ikan, Pos Jaga, Bangunan Sampah, dan Tempat parkir. b. Pelatihan kenelayan berupa magang nelayan perahu motor tempel untuk menjaring calon-calon nelayan baru sehingga mampu meningkatkan jumlah nelayan yang ada di DIY. Selain itu juga ada magang nelayan sekoci yang diharapkan mampu menaikkan kelas nelayan di DIY dalam menangkap ikan. Selain itu juga telah dilaksanakan pelatihan	Optimalisasi potensi alam yang ada dengan peningkatan kapasitas SDM nelayan, pemanfaatan teknologi tangkapan ikan, insentif bagi nelayan.

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		<p>keterampilan nelayan lainnya seperti Basic Safety Training, Perbengkelan mesin kapal, Cara penanganan ikan diatas kapal, dan perijinan perikanan tangkap.</p> <p>c. Hibah sarana prasarana penangkapan ikan yang ditujukan untuk kelompok nelayan berupa alat tangkap seperti jaring yang bertujuan untuk membantu nelayan dalam meningkatkan produksi perikanan tangkap.</p> <p>b. d. Lomba produktivitas nelayan dilakukan untuk memberikan apresiasi terhadap nelayan yang mendapatkan hasil tangkapan tertinggi dan diberikan hadiah berupa mesin kapal dan alat tangkap.</p>	
2.	Mengoptimalkan program-program kelautan dan perikanan yang berkesinambungan, tepat sasaran dan terukur sehingga memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan PDRB sektor perikanan di DIY.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam mendukung peningkatan PDRB subsektor perikanan di DIY ditopang dari produksi tangkap dan budidaya telah dilakukan berbagai macam intervensi. Pada bidang perikanan budidaya dilakukan pelatihan budidaya ikan berbagai komoditas seperti ikan lele, ikan nila, dan ikan hias, pelatihan pakan mandiri, pelatihan CPIB dan CBIB serta hama penyakit ikan. Selain itu diberikan bantuan hibah perikanan budidaya untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya di DIY. 2. Dalam bidang perikanan tangkap dilakukan pembinaan KUB nelayan, pelatihan kenelayanan dan bantuan hibah alat tangkap untuk mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap. 	Optimalisasi program kegiatan yang tepat sasaran dan terukur untuk meningkatkan PDRB sektor kelautan dan perikanan
3.	Optimalisasi untuk memberikan fasilitasi secara optimal bagi pembudidaya ikan untuk dapat membuat pakan sendiri dari bahan baku lokal yang murah dan terjangkau, pelatihan, pemasaran dan akses pasar serta bibit ikan yang berkualitas baik, diupayakan agar dapat dilakukan di wilayah DIY.	Pelatihan Pakan mandiri telah dilaksanakan dan memfasilitasi praktek di kelompok yang telah melaksanakan program pakan mandiri. Selain itu akses untuk informasi bahan baku dan formulasi pakan mandiri telah disampaikan. Selain itu fasilitasi untuk pembudidaya ikan berupa pelatihan budidaya ikan, pelatihan pakan mandiri, pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), dan pelatihan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), sarasehan kemitraan budidaya perikanan yang mempertemukan pelaku usaha, perbankan, dan pemasar. BPTPB Cangkringan telah mengupayakan penyiapan benih unggul, calon induk dan induk	Penyediaan pakan mandiri, pelatihan, pemasaran, dan akses pasar serta bibit ikan berkualitas

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		unggul untuk pembudidaya DIY utamanya ikan nila, lele, mas, tawes, dan udang galah.	
4.	Melakukan re-design Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto agar bisa segera dimanfaatkan sehingga tidak menjadi proyek mangkrak, mengingat banyak permasalahan terkait dengan konstruksi Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adi Karto. Perlunya dibuat tata kala (tenggat waktu) terkait keberlangsungan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto sehingga jelas target yang akan dicapai dengan proses pembangunan Pelabuhan Adikarto tersebut. Optimalisasi pembangunan Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Gesing perlu segera diwujudkan untuk mendorong peningkatan produksi perikanan di DIY.	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto saat ini sedang sudah menjadi prioritas pusat melalui koordinasi Kemenkomarves karena harus menyusun Kajian penyelesaiannya. Saat ini sedang dilakukan kajian kawasan Aerotropolis Bandara Yogyakarta Internasional Airport kerja sama Pemda DIY dengan JICA. Sebagai alternatif pendaratan ikan di DIY, sedang dibangun Pelabuhan Perikanan Gesing melalui pendanaan Dana Keistimewaan urusan kebudayaan mulai tahun 2020 sampai dengan saat ini. Harapannya pada akhir tahun 2023 , Pelabuhan Perikanan Gesing dapat dioperasikan untuk menampung kapal nelayan DIY.	Optimalisasi pembangunan Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Gesing perlu segera diwujudkan untuk mendorong peningkatan produksi perikanan di DIY.
5.	Melakukan optimalisasi penggunaan Dana Keistimewaan untuk urusan perikanan dan kelautan untuk mewujudkan visi Gubernur DIY pada RPJMD 2017-2022 dalam menyongsong abad Samudera Hindia. Peningkatan SDM dan kapasitas nelayan, baik dari sisi kapasitas diri maupun peralatan.	Dalam rangka mendukung visi Gubernur DIY “ menyongsong abad samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja, telah dianggarkan dais urusan kebudayaan untuk kegiatan pengembangan budaya bahari yang meliputi pengembangan kawasan Selatan melalui BKK Desa Maritim, hibah alat tangkap dan kapal sekoci, pembangunan pelabuhan Gesing, peningkatan SDM nelayan melalui bimtek dan magang, serta pelestarian konservasi penyu dan mangrove disepanjang pesisir DIY. Selain itu, dais urusan tata ruang untuk mewujudkan penetapan zonasi pesisir dan pengelolaannya.	Peningkatan SMD dan kapasitas nelayan Penyediaan sarpras nelayan

b) Urusan Pariwisata

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Mengembalikan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara seperti pada tahun 2019.	<p>Tahun 2022 menjadi tahun pemulihan pasar wisatawan, setelah Pandemi Covid-19 selama lebih dari dua tahun berimbas buruk pada pariwisata nasional. Mengembalikan jumlah wisatawan seperti kondisi tahun 2019, dirasa akan sangat berat, apalagi untuk mengembalikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Upaya pemulihan pariwisata membutuhkan waktu, namun pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan DIY diupayakan untuk segera bangkit. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mulai menggerakkan event kepariwisataan, baik event pariwisata lokal maupun nasional. Berkolaborasi dengan komunitas dan penggiat event dalam penyelenggaraannya. Diikuti dengan peningkatan kualitas amenities pariwisata sebagai daya dukung kesiapan destinasi wisata dalam menerima kunjungan wisatawan. Akhir April dan pertengahan Juni telah dibuka 2 penerbangan internasional menuju Kuala Lumpur dan Singapura, mulai dibukanya penerbangan internasional diharapkan dapat menjadi daya ungkit kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dimulai dari Asia Tenggara. 2. Kesiapan industri pariwisata DIY yang berstandar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability), termasuk di dalamnya destinasi wisata DIY sudah menyiapkan diri dengan Pranatan Anyar Plesiran Jogja. 3. Penguatan promosi dilaksanakan baik secara offline maupun online. 4. Penerapan strategi pasar yang lebih segmented dan targeted. saat ini ada pegeseran paradigma tren pariwisata dari mass tourism ke arah pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Adanya kajian pola perjalanan wisata yang disusun saat ini 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sesuai arahan dari Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif RI, agar dapat menjaga dan meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara, maka Dinas Pariwisata se-DIY bersama dengan instansi terkait berupaya dalam meningkatkan kualitas amenities dan atraksi pariwisata di DIY, sehingga kunjungan wisatawan nusantara di tahun 2022 telah mencapai 6.427.035 wisatawan & telah melampaui kunjungan wisatawan nusantara di tahun 2019 yang mencapai 6.116.354 wisatawan. Peningkatan sebesar 5.08% di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2019. ▪ Kondisi kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2022 (47.080 wisatawan) masih jauh dari capain di tahun 2019 (433.027 wisatawan). Cukup sulit untuk memulihkan kunjungan wisatawan mancanegara ke DIY karena banyak factor eksternal yang sangat berpengaruh. Kondisi perang Russia-Ukraina selama tahun 2022 telah mengakibatkan banyak kenaikan harga kebutuhan pokok dunia, diantaranya harga pangan dan harga minyak mentah di tingkat global. Kondisi tersebut mengakibatkan dan sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan mancanegara, sehingga perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara ke DIY belum dapat pulih seperti di tahun 2019 di masa sebelum pandemi COVID-19. Harga avtur atau bahan bakar pesawat khususnya di beberapa negara seperti Eropa dan Amerika Serikat meningkat dan mempengaruhi harga tiket pesawat sehingga mempengaruhi kunjungan wisatawan mancanegara di DIY.

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		<p>diharapkan menghasilkan paket wisata yang dapat dijadikan acuan industri pariwisata yang lebih segmented dan targeted. Menyusun paket wisata dengan target wisnus kategori milenial dan menengah ke atas. Produk yang ditawarkan untuk kalangan ini I bersifat eksklusif atau privat, berbasis alam, kesehatan tubuh. Saat ini Fokus untuk sasaran target pasar utama tahun 2022 masih menyasar wisatawan nusantara sebagai penggerak sektor pariwisata DIY.</p>	
2.	Mengembalikan citra wisata DIY yang aman dan nyaman	<p>1. Mengembalikan kepercayaan wisatawan terhadap DIY sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman (dalam masa pemulihan pasca pandemi) dengan kesiapan industri pariwisata yang berstandar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability). Dispar DIY juga melaksanakan kegiatan sosialisasi:</p> <p>a). Sosialisasi Sadar Wisata. Melalui kegiatan Sosialisasi Sadar Wisata diharapkan dapat mendorong kelompok sadar wisata agar semakin meningkatkan kualitas, peran dan kapasitasnya dalam pengembangan dan pengelolaan kepariwistaan yang lebih inovatif, kreatif dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan. Serta mengembangkan dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sapta pesona yang dapat berdampak kepada perkembangan pariwisata, pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.</p> <p>b). Sosialisasi CHSE Desa Wisata. Melalui kegiatan Sosialisasi CHSE Desa Wisata diharapkan dapat mendorong pengelola Desa Wisata agar menerapkan protokol CHSE untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.</p>	<p>Dispar DIY sudah berusaha mengembalikan citra wisata DIY dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan kegiatan sosialisasi sadar wisata dan CHSE ▪ Penyiapan SDM pariwisata dengan melaksanakan pelatihan dan sertifikasi

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		2. Penyiapan SDM pariwisata yang berdaya saing global dengan pendampingan, pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan pelayanan prima kepada wisatawan. Dilakukan dengan pendanaan APBD, Danais maupun APBN, dengan target sasaran SDM pelaku wisata di 5 Kabupaten/Kota.	
3.	Memberikan dukungan kebijakan untuk tempat wisata yang baru dibangun kelompok masyarakat dan desa wisata dengan indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar	1. Melaksanakan Kemitraan antara Desa/Kampung Wisata dengan Perguruan Tinggi. Desa/Kampung Wisata yang dipilih dalam kegiatan kemitraan ini adalah 5 besar pemenang Lomba Desa/Kampung Wisata Tingkat DIY Tahun 2022. Sementara Perguruan Tinggi yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah perguruan tinggi yang sudah memiliki MoU dengan Pemda DIY. a).UGM dengan Desa Wisata Karangasem b).UGM dengan Desa Wisata Kajii c).UNY dengan Desa Wisata Widrosari d).USD dengan Desa Wisata Purwosari e).STIE Pariwisata API dengan Desa Ekowisata Pancoh bentuk kemitraan yang akan dilaksanakan antara lain berupa: a.penataan kelembagaan; b.peningkatan kemampuan sumber daya manusia; c.pengembangan produk; dan d.penguatan aspek pemasaran. e.Penguatan Kerja sama CSR dengan BUMN/BUMD, maupun swasta di DIY. Kerja sama dengan BI dalam pembuatan Aplikasi Visiting Jogja; SOP Pranatan Anyar Plesiran Jogja, BI men-support untuk cetak buku; BI juga membantu dalam pengelolaan cokelat dan glamp camp di Nglanggeran; membantu promosi kopi Menoreh melalui event kopi di Ambarrukmo Plaza. 2. Kerja sama dengan BPD DIY: QRIS (Pembayaran non-tunai di Destinasi Wisata), Metode baru pembayaran	Memberikan dukungan kepada masyarakat dengan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan kegiatan kemitraan antara desa wisata dengan Perguruan Tinggi ▪ Bekerjasama dengan BUMN/BUMD/Swasta untuk fasilitasi CSR di desa wisata ▪ Melaksanakan pelatihan, pendampingan, pembinaan pada SDM di desa wisata/pokdarwis ▪ Melaksanakan pelatihan, pendampingan, pembinaan pada SDM di desa wisata/pokdarwis ▪ event budaya lokal yang harapannya memunculkan industri kreatif

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		<p>tiket masuk destinasi wisata secara non tunai/cashless; Memberikan bantuan fasilitasi perlengkapan dan peralatan kopi Natadamar di Mangunan.</p> <p>3. Mengoptimalkan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai mitra kerja pemerintah dalam rangka mengembangkan sebuah destinasi wisata dengan tetap mengutamakan sustainable tourism. Konsep Community Based Tourism (CBT) dalam pengembangan pariwisata telah dilakukan oleh Pemda DIY dengan melakukan berbagai program kegiatan pendukung, seperti fasilitasi sarana prasarannya. Melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi sadar wisata dan CHSE</p> <p>4. Melakukan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaannya secara terarah dan terukur. Untuk memberikan pelatihan dasar, peningkatan keterampilan dan pengujian kompetensi (sertifikasi) dalam hal skill and knowledge.</p> <p>5. Mengembangkan potensi budaya lokal menjadi daya tarik wisata sehingga mendorong kehadiran wisatawan ke destinasi tersebut, secara tidak langsung akan memunculkan potensi industri kreatif di kawasan tersebut dan akan meningkatkan perputaran ekonomi bagi masyarakat sekitar, dilakukan dengan pelaksanaan event budaya lokal.</p>	
4.	Promosi wisata dan peningkatan fasilitas agar wisatawan menambah waktu tinggal di DIY harus ditingkatkan	<p>1. Penguatan promosi dilaksanakan baik secara offline maupun online. Tahun 2022 ini Dinas pariwisata beserta perwakilan dari BPPD DIY, ASITA DIY dan PHRI DIY akan melaksanakan promosi pariwisata ke Frankfurt. Masing-masing stakeholder akan bertemu dengan buyer dari Eropa, khususnya Jerman sehingga diharapkanHarapan dari penyelenggaraan kegiatan</p>	<p>Giati melakukan promosi pariwisata melalui media sosial. Melaksanakan promosi pariwisata di luar negeri. Penyelenggaraan atraksi kesenian di destinasi wisata.</p>

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		<p>tersebut, buyer (perusahaan tour travel) Jerman akan membawa wisatawan Jerman ke DIY.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="633 309 1142 358">2. Menggiatkan pertunjukan seni dan atraksi wisata malam hari. <li data-bbox="633 358 1142 407">3. Memasukkan Agenda Atraksi di DIY ke dalam Calender of Even Nasional. 	
5.	Pemanfatan Bandara YIA bagi dunia pariwisata di DIY	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="633 418 1142 593">1. Adanya Tourist Information Center (TIC) di terminal kedatangan YIA yang merupakan pusat informasi pariwisata DIY, sebagai referensi bagi wisatawan yang berkunjung ke DIY dalam memutuskan aktivitas mereka selama di DIY. Hal ini terutama ditujukan kepada wisatawan yang berkunjung secara mandiri (individual guess), tidak melalui travel agent. <li data-bbox="633 593 1142 670">2. Adanya atraksi wisata budaya di bandara YIA (pentas cokekan), khususnya untuk weekend sebagai daya tarik wisata budaya DIY. <li data-bbox="633 670 1142 719">3. Dilaksanakan Kajian Potensi Daya Dukung Bandara YIA Terhadap Pengembangan Kepariwisata DIY. <li data-bbox="633 719 1142 824">4. Menyiapkan SDM lokal khususnya masyarakat Kulonprogo dan DIY pada umumnya, agar mampu bersaing menjadi tenaga kerja industri pariwisata khususnya di kawasan bandara YIA. <li data-bbox="633 824 1142 957">5. Mengingat locus bandara berada di perbatasan DIY-Jateng, maka destinasi wisata perlu disiapkan agar menjadi pilihan utama wisatawan yang datang melalui bandara YIA ini, mengingat Jawa Tengah menjadi pesaing. 	<p>Pemda DIY dalam hal ini Dinas Pariwisata DIY telah melakukan beberapa upaya dalam rangka Pemanfatan Bandara YIA bagi dunia pariwisata di DIY seperti: fasilitas TIC di bandara YIA, pagelaran atraksi wisata budaya (pentas cokekan)</p> <p>Potensi pemanfaatan Bandara YIA untuk pengembangan kepariwisataan DIY belum teridentifikasi</p> <p>Penyiapan SDM pariwisata di Kabupaten Kulonprogo</p>
6.	Data wisatawan luar negeri agar dirinci berasal dari negara mana saja	Dinas Pariwisata DIY sudah melakukan pendataan mengenai wisatawan yang berkunjung berdasarkan negaranya (buku statistik kepariwisataan DIY), saat ini sedang dalam penyusunan buku statistik kepariwisataan 2021, data wisatawan mancanegara berdasarkan kenegaraan sudah termasuk di dalamnya.	Data wisatawan mancanegara berdasarkan kenegaraan sudah dimasukkan dalam buku Statistik Kepariwisataan DIY
7.	Jumlah kunjungan wisatawan perkabupaten kota yang masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="633 1118 1142 1164">1. Melaksanakan fasilitasi pelatihan dan sertifikasi SDM di desa wisata untuk meningkatkan pemahaman dan 	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang masih rendah di Kabupaten/kota dilakukan dengan promosi yg

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang D diselesaikan
	<p>perlu didorong dan difasilitasi agar jumlah kunjungan wisatawan yang masih rendah memiliki kreatifitas dalam mengelola obyek wisata sehingga menarik untuk di kunjungi wisatawan</p>	<p>kemampuan masyarakat sebagai tuan rumah untuk menyambut wisatawan dengan lebih baik, dan untuk mendorong tumbuhnya kreatifitas masyarakat dalam mengelola destinasi wisatanya. Selain itu juga melaksanakan kegiatan sosialisasi sadar wisata dan CHSE. Melalui kegiatan Sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong kelompok sadar wisata agar semakin meningkatkan kualitas, peran dan kapasitasnya dalam pengembangan dan pengelolaan kepariwistaan yang lebih inovatif, kreatif dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan. Serta mengembangkan dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sapta pesona yang dapat berdampak kepada perkembangan parwisata, pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat. CHSE akan memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan promosi pariwisata baik secara online maupun offline (mengaktifkan media sosial dan website resmi Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota dalam meng-update konten tentang jadwal event dan destinasi wisata). 3. Dinas Pariwisata DIY selalu berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kab/Kota dan stakeholder terkait (BPPD, GIPI, ASITA, PHRI, HPI) untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang ada di Kab/Kota agar kunjungan wisatawan lebih merata ke semua Kab/Kota. 4. Pembuatan kajian/masterplan terkait dengan destinasi wisata yang ada. 	<p>dilaksanakan oleh Pemda DIY maupun Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota.</p> <p>Untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan dilaksanakan kegiatan pelatihan pada SDM di destinasi wisata dan desa wisata</p> <p>Penyusunan kajian/masterplan diharapkan ditemukan potensi dan masalah yang saat ini masih dimiliki oleh sebuah kawasan destinasi wisata, pengembangan destinasi wisatanya, pengembangan daya tarik wisatanya dan rekomendasi perencanaan kawasan wisata untuk meningkatkan kualitasnya dengan tetap memperhatikan aspek pembangunan pariwisata berkelanjutan.</p>

c) Urusan Pertanian

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Perlunya peningkatan kesejahteraan petani di DIY dengan optimalisasi pelaksanaan Perda DIY No. 11/2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan program-program yang berkesinambungan, terukur dan jelas target dan sasaran, sehingga petani DIY sejahtera.	Tindak lanjut melalui program : - Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan, pengawasan keamanan pangan, penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan, penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, penyuluhan pertanian	Peningkatan jumlah (volume stok) cadangan pangan, menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen, mempertahankan daerah yang aman agar tidak menjadi rentan pangan, menyediakan kebutuhan pangan dan gizi berupa sumber karbohidrat, protein dan mineral; menjaga mutu dan keamanan pangan; peningkatan populasi ternak; peningkatan produksi, produktivitas ternak/tanaman pangan, hortikultura, perkebunan; pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI,
2.	Perlunya insentif generasi muda yang masuk dalam sektor pertanian, sehingga anak-anak muda akan tertarik bekerja di sektor pertanian. Program-program pemberdayaan petani milenial perlu dirancang dengan memperhatikan target dan sasaran yang jelas dan dilakukan secara berkesinambungan dengan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder lain.	Adanya kegiatan penumbuhan dan pengembangan petani milenial dan pembentukan forum Komunikasi Petani milenial yang dapat mewadahi aspirasi petani milenial DIY sehingga dapat memberikan motivasi bagi calon petani milenial. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan petani milenial berkesinambungan	Terlaksananya program-program pemberdayaan petani milenial yang menjadi motivasi, dan mengembangkan kemampuan petani milenial
3.	Perlunya optimalisasi dan sinergi antar pemerintah DIY dengan Kabupaten terkait dengan Pelaksanaan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan dalam mengurangi laju alih fungsi lahan di DIY.	Bersama dengan Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul telah melaksanakan kegiatan update LBS dan LP2B.	Diperoleh data update LBS dan SK Bupati untuk Luasan LP2B. Diharapkan Kabupaten segera menyusun Perda LP2B Kabupaten
4.	Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten perlu menyusun peta usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam menindaklanjuti usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga sesuai dengan peraturan tata ruang.	Peta LP2B dalam perda RTRW DIY belum detail karena pendetilan akan dilakukan oleh kabupaten bersamaan dengan penyusunan RDTR kabupaten
5.	Pemda DIY lebih mendorong pelatihan, fasilitasi petani untuk melakukan inovasi pada nilai tambah produk olahan hasil pertanian.	Melaksanakan bimbingan teknis pengolahan hasil pertanian	Nilai tambah hasil pertanian belum maksimal
6.	Pemda DIY mendorong dan memfasilitasi peningkatan pengembangan populasi ternak dari	1. Memberikan fasilitasi berupa ternak (indukan maupun pejantan) untuk meningkatkan pembibitan ternak;	peningkatan populasi ternak; peningkatan produksi dan produktivitas ternak pengembangan usaha ternak

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
	hulu ke hilir untuk mencukupi kebutuhan masyarakat DIY.	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan akseptor IB melalui kegiatan optimalisasi reproduksi; Meningkatkan kualitas pakan ternak melalui pelatihan / fasilitasi pengembangan pakan komplit Kemudahan akses KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan AUTS (Asuransi Usaha Ternak Sapi / Kerbau) 	perlindungan usaha peternak sapi maupun kerbau jika mengalami kerugian akibat sakit atau mati
7.	Perlunya diatur tata kelola dan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani baik di tingkat regulator, fasilitator maupun petani agar penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat petani menjadi efektif, efisien, merata baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi penggunaan kartu tani, Pengawasan pupuk dan pestisida melalui tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Penetapan SK Gubernur Alokasi Pupuk Bersubsidi 	Implementasi penggunaan kartu tani oleh petanin meningkat, Penyimpangan distribusi maupun pupuk yang beredar dapat diminimalisir Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk masing jenis pupuk dan kabupaten/kota dapat tersedia
8.	Pengembangan pupuk organik sebagai alternatif penyediaan pupuk bagi petani yang lebih efektif dan efisien.	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi penggunaan pupuk organik pada kelompok tani menghadirkan narasumber dari perguruan tinggi. Fasilitasi pupuk organik. 	Bahan organik yang semula hanya limbah tidak bermanfaat, setelah diolah pupuk organik menjadi bermanfaat untuk kesuburan tanaman; mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sintetis, dan juga sumber pendapatan tambahan bagi petani. Perbaiki kondisi tanah utamanya kadar bahan organik
9.	Optimalisasi pemanfaatan Dana Keistimewaan dalam urusan pertanian, pengelolaan dan layanan irigasi.	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait, berkenaan dengan Optimalisasi pemanfaatan Dana Keistimewaan dalam urusan pertanian, pengelolaan dan layanan irigasi.	Berkolaborasi dalam pengawalan pengelolaan layanan irigasi

d) Urusan Kehutanan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Naiknya PDRB sektor kehutanan yang menghasilkan produk primer kayu yang dihasilkan tentunya perlu disegera dilakukan penanaman pohon kembali (reforestasi).	Melaksanakan penanaman kembali seluas ± 30 ha di Petak 58 RPH Candi, BDH Karangmojo, Balai KPH Yogyakarta dengan jenis tanaman produktif yaitu Nangka dan Petai.	Lahan bekas <i>land clearing</i> jati yang terbuka dilakukan reforestasi dengan pengganti jenis tanaman Nangka sebagai lanjutan tanaman Nangka yang dikembangkan sebelumnya.
2.	Membangun dan memperluas area konservasi hutan.	Konservasi hutan telah dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan. RHL dilakukan dengan penanaman vegetasi di kawasan	Berkurangnya lahan kritis

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		hutan negara, hutan rakyat, sekitar mata air dan kawasan mangrove.	
3.	Pendampingan kepada kelompok pengelola hutan rakyat dalam terus melakukan pelebagaan hutan rakyat, selalu mempunyai perpektif untuk menjaga lingkungan, mendorong kelompok hutan rakyat untuk terus menjalin sinergi sehingga saling mendorong melakukan sertifikasi penatausahaan hasil hutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan pendampingan dan sosialisasi kepada kelompok tani hutan tentang teknis penanaman, pembibitan, pemeliharaan dan pemasaran hasil hutan, serta kelembagaan Kelompok tani hutan.. 2. Pemda DIY telah mengidentifikasi potensi hasil hutan di Kelompok Tani Hutan (KTH) dan memfasilitasi KTH untuk berpartisipasi dalam pameran virtual produk olahan hasil hutan. Tujuan dari pameran virtual tersebut adalah meningkatkan pemasaran produk hasil hutan dari KTH. 3. Berkenaan dengan penatausahaan hasil hutan, Pemda DIY telah mengembangkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Hutan Rakyat. SIPUHH Hutan Rakyat merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk mencatat dan melaporkan produk hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat, sehingga terjalin sinergisitas antara hutan rakyat dengan pelaku usaha kehutana n. 	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hutan rakyat dan sertifikasi hasil hutan
4.	Rehabilitasi lahan kritis perlu menjadi prioritas penanganan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.	Perencanaan penanaman kayu putih baru seluas 60 ha dan RHL hutan lindung 20 ha pada Tahun 2022 dengan melibatkan masyarakat Kelompok Tani Hutan	Rehabilitasi lahan kritis dan lahan dengan pertumbuhan/volume tegakan kurang dari normal.
5.	Mengoptimalkan produksi hasil hutan non kayu, seperti minyak kayu putih (Rekomendasi 5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan mesin proses pengolah daun kayu putih. 2. Pemeliharaan jalan produksi pada kawasan kayu putih. 3. Penyederhanaan administrasi produksi daun 	Optimalisasi produksi daun kayu putih untuk mendapatkan produksi minyak kayu putih yang optimal
6.	Pemanfaatan dana keistimewaan untuk kesejahteraan masyarakat kehutanan di DIY.	Dalam anggaran tahun 2022 Tahura Bunder melaksanakan perubahan blok, dan mewadahi kebutuhan masyarakat ke dalam blok tradisional. Blok tradisional tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lokasi untuk menanam rumput pakan ternak, tetapi tidak diperbolehkan menanam tanaman semusim.	Kurangnya kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan

e) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Pemerintah DIY perlu konsisten dalam pelaksanaan strategi konservasi energi (penghematan energi) mengingat bahwa DIY merupakan daerah yang tidak mempunyai sumber daya energi konvensional sekaligus tidak mempunyai sumber daya EBT yang signifikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan konservasi energi yang diterapkan oleh Pemda DIY sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2017-2022 yaitu melalui Program Bangunan/Gedung Pemerintah, Komersial dan Industri Yang Telah Diaudit Energi. Audit Energi merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan terhadap penggunaan/konsumsi energi dari suatu gedung, agar dapat diketahui efektifitas dan efisiensinya. Sampai dengan akhir tahun 2021 telah dilakukan audit energi sebanyak 62 gedung milik pemerintah dan swasta. Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dapat digunakan oleh pengelola gedung dalam upaya meningkatkan konservasi energi. 2. Dalam mendukung Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang RUED DIY 2020-2050, dilakukan skenario konservasi energi dilakukan melalui upaya program-program dan sosialisasi manajemen energi, penghematan penggunaan bahan bakar, retrofitting (penggantian peralatan) yang kurang hemat energi menjadi peralatan yang hemat energi di semua sektor, serta transisi dari penggunaan peralatan berbasis bahan bakar, misalnya peralatan memasak berbasis LPG menjadi yang berbasis listrik seperti microwave dan kompor listrik, serta kendaraan bermotor berbahan bakar BBM menjadi bermotor listrik. 	Permasalahan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Audit energi adalah bahwa selama 2 tahun terakhir kegiatan ini tidak dilaksanakan, hal tersebut merupakan imbas dari pandemi Covid-19 yang belum usai (prioritas pembangunan pada pemulihan kondisi ekonomi).
2.	Perlu Optimalisasi terhadap Bauran Energi Baru Terbarukan yang memiliki potensi besar di DIY untuk menopang kebutuhan energi pada masa depan dimana pasokan dari energi fosil pasti terbatas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda DIY terus mendukung dan berupaya optimal dalam mendukung transisi energi sebagaimana gencar disosialisasikan Pemerintah Pusat. Dengan keterbatasan potensi EBT yang dimiliki, Pemda DIY berusaha mengoptimalkan pembangkit-pembangkit EBT yang dimiliki, selain sebagai sumber energi maupun sebagai sarana edukasi berbasis EBT. 2. Tahun 2022 ini terus dilakukan upaya pemeliharaan dan operasionalisasi pembangkit EBT yang ada seperti PLTH, PLTMH, dan PLTS. Pada tahun ini DIY juga akan mendapatkan bantuan PLTS Rooftop sebesar 2 x 25 kWp dari Kementerian 	Permasalahan yang ada terkait pengembangan EBT adalah terbatasnya potensi yang dimiliki, belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur kewenangan EBT di daerah, keekonomian EBT yang belum dapat bersaing dengan energi fosil.

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
3.	Pemerintah DIY perlu terus melakukan pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap pemilik izin usaha pertambangan agar melaksanakan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>ESDM. Selain itu telah dilakukan sosialisasi pemanfaatan EBT khususnya PLTS Rooftop kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pembinaan dan penegakan hukum perijinan pertambangan dilakukan persiapan pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara. 2. Sedangkan untuk pelaksanaan pengawasan perijinan pertambangan dilakukan langkah-langkah sbb: 1. Penyusunan Peraturan Gubernur DIY tentang Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara 2. Membentuk SK Gubernur tim pengawasan terintegrasi lintas sektor 3. Melaksanakan pengawasan pada kegiatan usaha pertambangan yang berizin dan tidak berizin bersama tim pengawasan terintegrasi lintas sektor 	<p>SE Menteri ESDM tentang Pedoman Pelaksanaan Perpres Nomor 55/2022 belum turun. Menyiapkan regulasi terkait pelaksanaan Perpres Nomor 55/2022 :</p> <p>Pergub Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan.</p> <p>Pergub Pembinaan dan Pengawasan usaha Pertambangan Mineral dan Batuan.</p> <p>Revisi Pergub Nomor 116/2021 ttg Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.</p> <p>Adanya pengusaha pertambangan yang tidak berizin. Penyelesaiannya sebagai berikut: - Apabila lokasi penambangan tidak dalam WP (wilayah pertambangan) diberi surat himbauan untuk berhenti. - Apabila lokasi penambangan berada di dalam WP (wilayah pertambangan) dihimbau agar mengurus perizinan. Apabila izin belum terbit, penambangan dihentikan hingga izin terbit.</p> <p>Adanya pengusaha pertambangan yang berizin tetapi tidak melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik. Tim lintas sektor menghimbau kepada pemegang izin untuk melaksanakan tata kelola perusahaan pertambangan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

f) *Urusan Perdagangan*

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Perlunya usaha Peningkatan Kualitas manajemen pelaku perdagangan di DIY	Peningkatan Kualitas manajemen pelaku perdagangan di DIY perlu dilakukan. Selama tahun 2022, Disperindag DIY akan melaksanakan berbagai pelatihan dalam rangka peningkatan Kualitas manajemen pelaku perdagangan di DIY. Pelatihan tersebut diantaranya: 1. Bimtek pelaku usaha sektor perdagangan bagi kelompok/sentra IKM dengan jumlah peserta sebanyak 200 Orang. 2. Bimtek pemasaran online dengan jumlah peserta sebanyak 120 Orang. 3. Pelatihan Manajemen Toko Kelontong dengan jumlah peserta sebanyak 11 Kelompok 4. Pelatihan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Perdagangan jumlah peserta sebanyak 11 Kelompok	Kualitas manajemen pelaku perdagangan di DIY masih perlu ditingkatkan
2.	Memanfaatkan peluang perdagangan melalui akses Bandara Internasional NYIA	Memanfaatkan peluang perdagangan melalui akses Bandara Internasional NYIA adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekspor DIY. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemda DIY suntuik mendorong IKM DIY agar memanfaatkan peluang perdagangan melalui akses bandara Internasional NYIA diantaranya dilakukan dengan menyediakn gerai UMKM di area bandara tersebut.	Pemanfaatan peluang perdagangan melalui akses Bandara Internasional NYIA belum optimal
3.	Peningkatan jumlah volume ekspor penjualan, komoditas, dan tujuan negara pembeli	Peningkatan jumlah volume ekspor penjualan, komoditas, dan tujuan negara pembeli perlu dilakukan dalam rangka terus meningkatkan realisasi ekspor DIY. Hal ini dilakukan Pemda DIY melalui fasilitasi keikutsertaan UKM potensial ekspor DIY ke dalam berbagai event pameran bersekala ekspor baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun luar negeri (Seni Kriya, Pameran JIFFINA, Pameran IFEX, Pameran Inacraft,TEI dan Festival Indonesia Frankfurt 2022)	Jumlah volume ekspor penjualan, komoditas, dan tujuan negara pembeli masih perlu ditingkatkan
4.	Perlu dukungan sarana perdagangan online di DIY berupa sarana pusat media industri online.	Pasar perdagangan online saat ini kian berkembang pesat. Sarana perdagangan online di DIY berupa sarana pusat media industri online sangat diperlukan. Pemda DIY melalui Disperindag DIY telah berupaya menyediakan hal tersebut. Sebagai media pemasaran Pemda DIY telah membangun portal e-commerce Jogjaplaza yang beralamatkan di https://jogjaplaza.jogjaprovo.go.id , Pameran Virtual untuk IKM DIY dan Virtual Exhibition Produk Tradisional IKM "Siap Ekspor". Dalam rangka memfasilitasi layananan pengaduan konsumen telah dibangun aplikasi Sistem Informasi Konsumen Cerdas (SIKONCER). Sementara itu untuk layanan konsultasi bisnis secara online Pemda DIY telah memiliki aplikasi Jogja Business Service Centre (JBSC). Sedangkan layanan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha secara online dilakukan dengan aplikasi JogjaKI.	Dukungan sarana perdagangan online di DIY berupa sarana pusat media industri online masih perlu ditingkatkan
5.	Pembinaan pelaku ekspor yang mengalami penurunan usaha	Selama pandemi Covid-19 pelaku usaha mengalami penurunan usahanya. Demikian juga pelaku usaha ekspor DIY. Pemda DIY akan melakukan berbagai pembinaan kepada pelaku usaha ekspor tersebut agar usahanya kembali meningkat. Pembinaan yang akan dilakukan diantaranya adalah penyelenggaraan pelatihan ekspor, fasilitasi pemasaran melalui pameran dan temu bisnis, serta fasilitasi penerbitan Surat Keterangan Asal untuk mendapatkan preferensi.	Pembinaan pelaku ekspor yang mengalami penurunan usaha perlu ditingkatkan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
6.	Peningkatan jumlah penjualan antar daerah lain dengan penjualan produk DIY harus diseimbangkan	Peningkatan jumlah penjualan antar daerah lain dengan penjualan produk DIY harus diseimbangkan. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan penjualan produk DIY ke daerah lain. Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penjualan produk DIY ke daerah lain melalui fasilitasi keikutsertaan IKM DIY ke dalam berbagai even pameran. Pameran tersebut diantaranya Pameran Kraton, Pameran Dekranas, Pameran Jakarta Fair, Pameran Tetap dan Pameran Crafina, serta Pameran Pesta Rakyat.	Jumlah penjualan antar daerah lain dengan penjualan produk DIY masih perlu ditingkatkan

g) Urusan Perindustrian

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Pemulihan dampak Covid-19 pada dunia industri pengolahan dan IKM di DIY	Selama pandemi Covid-19 pelaku usaha industri mengalami penurunan usahanya. Selama 2022, Pemda DIY akan melakukan berbagai pembinaan kepada pelaku usaha ekspor tersebut agar usahanya kembali meningkat. Pembinaan yang akan dilakukan diantaranya adalah penyelenggaraan pelatihan, fasilitasi pemasaran, peningkatan pemanfaatan teknologi melalui bantuan hibah atau pinjam pakai mesin dan peralatan serta peningkatan perlindungan HKI.	Pemulihan dampak Covid-19 pada dunia industri pengolahan dan IKM di DIY perlu ditingkatkan
2.	Program pembinaan bagi pelaku IKM harus ditingkatkan	Pemda DIY selalu berupaya meningkatkan program pembinaan bagi pelaku IKM. Pembinaan kepada pelaku usaha di DIY dilaksanakan melalui 9 program dengan 38 sub kegiatan di tahun 2021. Sementara itu, pembinaan kepada pelaku usaha di DIY di tahun 2022 akan dilaksanakan melalui 10 program dengan 39 sub kegiatan.	Program pembinaan bagi pelaku IKM harus ditingkatkan
3.	Peningkatan dan pendampingan manajemen IKM	Peningkatan Kualitas manajemen pelaku IKM di DIY perlu dilakukan. Selama tahun 2022, Disperindag DIY akan melaksanakan berbagai pelatihan dalam rangka peningkatan Kualitas manajemen pelaku IKM di DIY. Pelatihan tersebut diantaranya: Bimtek manajemen pelaku usaha bagi kelompok/sentra IKM, Bimtek pemasaran online, serta Pelatihan Pemasaran bagi Pelaku Usaha IKM.	Perlunya peningkatan dan pendampingan manajemen IKM
4.	Fasilitasi Pemda DIY untuk menumbuhkan kerja sama IKM dengan industri besar.	Kerja sama Pelaku Usaha IKM dengan Industri Besar diperlukan untuk mendukung peningkatan usaha IKM. Pada tahun 2022, Pemda DIY berupaya mewujudkan hal ini melalui event Temu Bisnis/Temu Kemitraan.	Fasilitasi Pemda DIY untuk menumbuhkan kerja sama IKM dengan industri besar harus ditingkatkan
5.	Bahan baku industri pengolahan DIY bergantung dari bahan dari luar DIY, perlu usaha dan fasilitasi Pemerintah Daerah DIY dalam penyediaan bahan baku industri ini.	Sebagian pelaku usaha industri pengolahan DIY, bahan bakunya masih tergantung dari bahan dari luar DIY. Untuk mengantisipasi hal ini, Pemda DIY melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan mendorong adanya kerja sama lintas sektor dalam penyediaan bahan baku lokal.	Bahan baku industri pengolahan DIY masih bergantung bahan dari luar DIY, perlu usaha dan fasilitasi Pemerintah

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
			Daerah DIY dalam penyediaan bahan baku industri ini
6.	Pertumbuhan industri pengolahan di kabupaten dan kota perlu mendapatkan program kebijakan yang seimbang dari Pemerintah Daerah DIY.	Pertumbuhan industri pengolahan di kabupaten dan kota perlu mendapatkan program kebijakan yang seimbang dari Pemerintah Daerah DIY. Secara umum, pembinaan dilakukan oleh Pemda DIY kepada pelaku industri pengolahan di 5 Kabupaten/kota. Namun demikian, untuk program pengentasan kemiskinan dilakukan di Kabupaten yang terdapat kantong-kantong kemiskinan.	Pertumbuhan industri pengolahan di kabupaten dan kota perlu mendapatkan program kebijakan yang seimbang dari Pemerintah Daerah DIY
7.	Peningkatan penggunaan Kawasan Industri yang sudah dimiliki Pemerintah Daerah DIY dan kabupaten/kota.	Kawasan Industri yang sudah dimiliki Pemerintah Daerah DIY dan kabupaten/kota perlu dioptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung peningkatan kinerja sektor industri. Telah didorong dan dilakukan kerja sama lintas sektor untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan industri tersebut.	Penggunaan Kawasan Industri yang sudah dimiliki Pemerintah Daerah DIY dan kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan

h) Urusan Ketransmigrasian

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Melakukan pendataan dan kerja sama dengan Kasultanan dan Paku Alaman untuk tanah-tanah sepanjang pantai selatan yang masuk kategori tanah SG dan PAG. Kerja sama yang dibangun guna pemanfaatan tanah SG dan PAG untuk melaksanakan program transmigrasi lokal ke daerah pantai selatan Gunung Kidul dengan pembekalan diklat transmigrasi yang telah disiapkan. Transmigrasi lokal dapat dikembangkan sebagai salah satu pilihan peningkatan kesejahteraan masyarakat guna menekan angka kemiskinan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi ke Kemendagri 2. Koordinasi Kemendes PDT dan Trans RI 3. Koordinasi dengan Dinas Pertanahan, Biro Tata Pemerintahan dan Biro Hukum 4. Koordinasi dengan Kasultanan dan Paku Alaman 	<p>Mendapatkan kepastian kewenangan provisi daerah asal terkait penyelenggaraan Transmigrasi Lokal.</p> <p>Penyamaan persepsi pelaksanaan Transmigrasi Lokal sesuai regulasi.</p> <p>Menyepakati langkah-langkah yang akan diambil dalam pendataan berdasarkan hasil konsultasi dengan kemendagri dan Kemendes, PDT dan trans.</p> <p>Penjajagan kerja sama pelaksanaan Transmigrasi Lokal.</p>
2.	Transmigran yang siap kerja dan terlatih dengan bekal keterampilan yang tertunda karena dampak Covid-19 kami berharap mendapatkan jalan keluarnya dengan tambahan pembekalan keterampilan sehingga mampu bergeser bekerja di sektor informal. Sedangkan pelaksanaan strategi peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dapat berkolaborasi dengan menyesuaikan kebijakan Pemerintah Pusat, dimana pada tahun 2020 tidak melakukan pengiriman transmigrasi.	Calon transmigran yang gagal berangkat di tahun 2020 diprioritaskan untuk berangkat di tahun 2022 .	Calon transmigran tahun 2020 tetap bisa ditempatkan ke daerah tujuan.

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
3.	Mendorong Pemda DIY melalui program transmigrasi di tahun 2022 sudah siap melaksanakan transmigrasi diluar Jawa tentunya dengan pendekatan pengurangan segala risiko yang dihadapi dalam situasi Pandemi saat ini.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) 2. Pelatihan kompetensi bagi calon transmigran 3. Tahun 2022 melakukan penempatan transmigran sebanyak 51 KK 4. Melakukan cek lokasi sebelum penempatan 	<p>Hak dan Kewajiban antara daerah asal dan daerah pengirim disepakati bersama dalam KSAD sebagai bentuk perlindungan transmigran.</p> <p>Calon transmigran yang diberangkatkan memiliki keterampilan dalam menggarap dan memanfaatkan Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya.</p> <p>Calon transmigran yang memenuhi persyaratan dapat diberangkatkan ke daerah/lokasi tujuan.</p> <p>Memastikan lokasi transmigran siap ditempati dengan status clear and clean</p>

3) Penunjang Urusan

a) Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Arah pembangunan nasional dan di DIY sekarang bergeser ke satuan wilayah terkecil yaitu Desa melalui Anggaran Dana Desa serta Bantuan Keuangan Khusus. Hal ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sampai dengan tingkat Kalurahan/Kelurahan dan bahkan sampai tingkat Dusun/Kampung/RW/RT.	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sudah diwadahi mulai sejak dari Kalurahan/Kelurahan melalui forum Musrenbang Kalurahan/Kelurahan. Komponen-komponen masyarakat ikut dilibatkan di dalam proses penyusunan program prioritas Kalurahan/Kelurahan yang dituangkan dalam RKP Kalurahan/Kelurahan dan selanjutnya akan diusulkan secara berjenjang ke tingkat Kapanewon/Kemantren, Kabupaten/Kota, dan provinsi sesuai dengan kewenangannya. Skema keterlibatan masyarakat tersebut juga digunakan dalam proses penyusunan usulan pendanaan program kegiatan yang nantinya akan didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus.	
2.	Perlunya peningkatan kemampuan perencanaan pembangunan secara partisipatif bagi pemangku kepentingan di tingkat basis yaitu Dusun/Kampung/RW/RT agar dapat secara optimal mampu membaca peta permasalahan rakyat yang sesungguhnya sehingga program pembangunan yang diusulkan/direncanakan sesuai dengan	Berbagai Peraturan Gubernur telah dibuat untuk mengatur terkait proses Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan seperti Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor	

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
	kebutuhan masyarakat dan masih dalam koridor RPJMD dan RPJPD DIY.	37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan, dan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan.	

b) *Urusan Kepegawaian Daerah*

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Perlu meningkatkan kualitas SDM tenaga teknis, pemberian jaminan kesehatan dan Jamkesos (kecelakaan kerja, Kematian, Tuijangan Hari Tua, Pensiun) hal ini sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kompetensi untuk tenaga bantu di lingkungan Pemerintah Daerah DIY berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu pasal 45 bahwa Tenaga Bantu dapat diberikan kesempatan untuk melaksanakan pengembangan kompetensi berupa mengikuti bimbingan teknis/workshop/seminar/rapat yang bersifat teknis operasional. 2. Sesuai Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Gubernur DIY Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu, bahwa jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kerja diberikan kepada Tenaga Bantu sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. Jaminan Hari Tua Tenaga Bantu selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai. Sesuai dengan pasal 18 Pergub tersebut bahwa Tenaga Bantu memperoleh TPP sebesar Rp 500.000 yang dialokasikan dalam rekening Tabungan Sutura Emas Bank BPD DIY sebagai Jaminan Hari Tua. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya Kompetensi Tenaga Teknis (Tenaga Bantu) di Lingkungan Pemda DIY. ▪ Kurangnya Kesejahteraan Tenaga Teknis (Tenaga Bantu) di Lingkungan Pemda DIY

c) *Urusan Pendidikan dan Pelatihan*

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan secara berjenjang. Tujuan penjenjangan selain untuk meningkatkan pengetahuan dan promosi jabatan juga	1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan bahwa Badan Pendidikan dan	Pemda DIY telah melaksanakan pelatihan berjenjang dan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
	punya tujuan lain yaitu para ASN mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan yang selalu berkembang.	<p>Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas dalam urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan fungsi antara lain perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, pengembangan kompetensi melalui pelatihan teknis, fungsional, manajerial dan sosiokultural bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).</p> <p>2. Pemda DIY telah melaksanakan pelatihan dasar dan pelatihan kepemimpinan secara berjenjang mulai dari Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II.</p> <p>3. Terkait dengan pengembangan kapasitas SDM tenaga kediklatan, untuk mengakomodir perkembangan yang ada Pemda DIY telah mengirimkan untuk mengikuti Diklat <i>Training Officer Course</i> (TOC) dan Diklat <i>Management of Training</i> (MoT) yang diselenggarakan oleh LAN RI dengan metode <i>Massive Online Open Courses</i> (MOOC).</p> <p>4. Dari sisi tenaga pengajar Pemda DIY juga mengirimkan Widyaiswara untuk mengikuti Workshop Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II.</p>	pengembangan kompetensi SDM tenaga kediklatan.

4) Capaian Kinerja Urusan Tugas Pembantuan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Mendorong Pemerintah Daerah DIY untuk melakukan komunikasi secara mendalam dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian-Kementerian agar mendapat alokasi Tugas Pembantuan yang cukup signifikan sesuai dengan kemampuan aparatur Pemda untuk melaksanakan.	Alokasi Dana Tugas Pembantuan merupakan dana yang bersifat top down sesuai arahan alokasi dari Pusat. Telah dilaksanakan evaluasi dan pengendalian terkait pelaksanaan Tugas Pembantuan baik melalui monitoring lapangan maupun pemantauan melalui pelaporan di aplikasi Sengguh. Pelaporan di aplikasi sengguh di lakukan verifikasi tiap triwulan dan menjadi materi dalam Rapot Triwulanan/Rakordal	Alokasi Dana Tugas Pembantuan
2.	Melakukan komunikasi dan koordinasi sejak awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan program, agar Tugas Pembantuan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Pencanaan target dari	Pelaksanaan Tugas Pembantuan di pantau setiap triwulan melalui desk APBN (Dekon/TP). Telah dilaksanakan evaluasi dan pengendalian terkait pelaksanaan Tugas Pembantuan melalui kunjungan langsung pemantauan di lapangan serta melalui pelaporan di aplikasi sengguh	Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan sesuai dengan agenda pembangunan yang ada di DIY, serta diharapkan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
	program yang diberikan Kementerian sebisa mungkin sesuai dengan agenda DIY.		memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat

5) Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY

a) Urusan Kelembagaan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Meningkatkan intensitas koordinasi dengan lembaga di tingkat kabupaten agar capaian maksimal dan juga monitoring secara berkala. Selaras dengan mandat Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 bahwa Pemda DIY bertugas melakukan monitoring pelaksanaan urusan keistimewaan.	Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan yang diampu OPD DIY, OPD Kab/Kota dan Kalurahan ke Kabupaten/Kota maupun ke Kalurahan yang dilakukan setiap minggunya serta dilengkapi dengan optimalisasi penggunaan aplikasi KENES dalam pemantauan dan evaluasi tiap bulannya.	monitoring yang berkaitan dengan realisasi atau serapan, sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan, guna melengkapi kelengkapan pencairan pertahapan.
2.	Perlu mensinergikan dan mengintegrasikan platform digital Pemda DIY dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota agar tidak menimbulkan potensi kebingungan di masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program/rencana aksi Jogja Smart province fase 1 (satu) ditetapkan untuk tahun 2019-2023. Oleh karena itu, pada tahun 2023 dilaksanakan penyusunan Masterplan Jogja Smart Province fase 2 (dua) dengan value yang baru yaitu <i>Human Centered Ecosystem</i> yang mengembangkan konsep harmonisasi TI dan manusia, reformasi tata kelola berbasis kalurahan, implementasi <i>advanced Technology</i>, dan <i>collaborative Government</i>. 2. Dalam proses penyusunannya, akan dilaksanakan kolaborasi antara program Smart province Pemda DIY dengan program Smart City/Smart Regency milik Kabupaten/Kota di wilayah DIY, serta dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 	Melalui penguatan kolaborasi dengan Kabupaten/kota diharapkan dapat mempermudah urusan pelayanan publik, peningkatan infrastruktur TIK, dan meningkatkan inovasi TIK.

b) Urusan Kebudayaan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Pemda DIY hendaknya meningkatkan kolaborasi dengan seluruh Kalurahan di DIY untuk menjadi ujung tombak dalam rangka menerjemahkan kebijakan perlindungan,	Pemda DIY telah melaksanakan kolaborasi dengan pemerintah kalurahan dalam rangka pemeligeriaa dan pengembangan kebudayaann melalui pelaksanaan desa/kalurahan budaya, desa/kalurahan mandiri budaya dan pemberian BKK kalurahan	Partisipasi masyarakat khususnya di level kalurahan dalam pemeligeriaa dan pengembangan kebudayaan meningkat

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
	pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.		
2.	Pemerataan pelibatan kalurahan di DIY untuk mensukseskan agenda Kebudayaan	Melalui pembinaan desa budaya secara langsung dan tidak langsung telah pemeratakan agenda budaya. Hal ini mengingat dalam prosesnya, untuk ditetapkan menjadi desa/kalurahan budaya harus melalui tahapan dari rintisan desa bbudaya. Rintisan desa budaya menjadi kewenangan kabupaten/kota untuk pembinaan dan penetapannya. Rintisan desa budaya serta desa budaya semuanya merupakan kalurahan yang mempunyai aktifitas yang berkaitan dengan kebudayaan, termasuk agenda-agenda budaya. Hal ini masih ditambah dengan desa/kalurahan yang menerima BKK Kalurahan dari jalur kebudayaan.	Jumlah Kalurahan yang melaksanakan agenda kebudayaan dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan semakin meningkat dan merata semua kabupaten/kota
3.	Mengawal Kalurahan/Desa untuk menjadi Desa Mandiri Budaya dan atau Desa dengan predikat yang lain.	Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas SDM dan penguatan lembaga kemasyarakatan/lembaga ekonomi Kalurahan dan Tenaga Pendamping Kalurahan melalui pendampingan dan pelatihan.	Penguatan SDM, tugas, fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi kalurahan/desa dalam mewujudkan Desa Mandiri Budaya dan atau desa dengan predikat lainnya
4.	Memaksimalkan taman budaya untuk mensosialisasikan kebudayaan DIY.	Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan dan penganggaran urusan kebudayaan, melalui rapat koordinasi berkala yang dihadiri oleh instansi stakeholder urusan kebudayaan baik dari DIY maupun kabupaten/kota, termasuk dinas kebudayaan kabupaten kota. Forum rakor dimanfaatkan untuk memberikan arahan-arahan terkait program prioritas, diantaranya optimalisasi peran taman budaya DIY maupun kabupaten kota.	Memastikan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Taman Budaya merupakan kegiatan yang mendukung upaya pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di DIY, sejak tahapan perencanaan dan penganggaran.

c) Urusan Pertanahan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Selaras amanat UU Nomor 13 Tahun 2012, maka Pemda DIY haruslah melakukan penataan tentang Pertanahan—Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten— di DIY guna memberikan sumbangsih maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat DIY.	Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten telah disusun beberapa regulasi yang menjadi acuan, antara lain : 1. Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; 2. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;	Persoalan yang diselesaikan terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		3. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa; 4. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	
2.	Memaksimalkan sosialisasi tentang Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten agar Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang belum dimanfaatkan dapat digunakan oleh masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan.	Secara rutin setiap tahun melalui fasilitasi Dana Keistimewaan telah dilakukan sosialisasi terkait dengan Perdais Nomor 1 Tahun 2017 dan melibatkan juga dari pihak legislatif dalam proses sosialisasi di 5 kab/ kota	Penyebarluasan informasi terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan kadipaten sesuai dengan Perdais Nomor 1 Tahun 2017
3.	Maksimalisasi pemanfaatan lahan (tanah dan bangunan) yang dimiliki oleh Pemda DIY.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi Aset/BMD Idle; 2. Melakukan Kajian <i>High Best Use</i> (HBU) untuk pemanfaatan BMD tanah bangunan 3. Reviu Penilaian BMD tanah bangunan untuk memperoleh nilai sewa yang sesuai harga pasar wajar. 4. Sertifikasi tanah untuk kepastian hukum terhadap BMD Pemda DIY yang akan dimanfaatkan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penertiban aset-aset yang dikuasai oleh Pihak Lain tanpa izin ▪ Sertifikasi tanah Pemda DIY sebagai bentuk legalisasi kepemilikan
4.	Membuat skema pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.	Skema Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten telah diatur secara detail melalui Perdais Nomor 1 Tahun 2017 dan Pergub Nomor 33 dan 34 Tahun 2017 serta Pergub Nomor 49 Tahun 2018	Kejelasan dalam Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

d) d. Urusan Tata Ruang

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Pemda DIY dalam melakukan Urusan tata ruang, sedapat mungkin memberikan tatanan baru, dimana ruang yang ada itu dapat memberikan ruang ekspresi bagi nilai-nilai Keistimewaan Yogyakarta. Agar identitas Keistimewaan Yogyakarta benar-benar terbaca oleh masyarakat DIY maupun dari luar DIY. Selain itu penting dilakukan pengendalian dalam hal pemanfaatan tata ruang di DIY.	Proses integrasi dan penetapan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Tata Ruang 18 SRS	Sebagai arahan pemanfaatan ruang pada 18 SRS

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
2.	Penyelenggaraan penataan ruang hendaknya bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Memperhatikan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, serta memperhatikan Ruang Terbuka Hijau.	Memastikan ketercukupan 30% ruang terbuka hijau (RTH) pada dokumen rencana tata ruang kabupaten/kota	Ketersediaan dokumen rencana tata ruang yang mengalokasikan peruntukan ruang terbuka hijau sebesar 30%.

5. Program Strategis DIY

a. Penanggulangan Kemiskinan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Melakukan olah data dan Validasi data keluarga miskin beserta kedalamnya agar diperoleh gambaran nyata tentang potensi, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki masing-masing.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data masyarakat miskin melalui DTKS telah kami perdalam dengan mensejajarkan data lain seperti data IDM, IPM, RTLH, dan masalah sosial lainnya seperti stunting, data rawan bencana, intervensi program kegiatan masing-masing Kapanewon dan hasilnya telah dibuatkan dalam surat edaran Wakil Gubernur selaku Ketua TKPKD DIY. 2. Selanjutnya memanfaatkan aplikasi Manunggal Raharja yang harapannya dapat mengidentifikasi masyarakat miskin sesuai dengan desilnya termasuk kemiskinan ekstrem. 	Hasil Surat Edaran (SE) nomor 401/01/61 perihal penyampaian 15 lokus penanggulangan kemiskinan tanggal 5 Januari 2022
2.	Data yang berisi tentang potensi, kelemahan, peluang dan ancaman akan menjadi acuan intervensi program yang akan diberikan dalam upaya pengentasan kemiskinan.	Hasil Surat Edaran (SE) nomor 401/01/61 perihal penyampaian 15 lokus penanggulangan kemiskinan digunakan untuk intervensi oleh berbagai pihak baik OPD, NGO, Perguruan Tinggi, BUMN/D atau swasta untuk dapat kerja bersama dalam penanggulangan kemiskinan di DIY.	Hasil Surat Edaran (SE) nomor 401/01/61 perihal penyampaian 15 lokus penanggulangan kemiskinan tanggal 5 Januari 2022 tersebut menjadi data dasar pemetaan intervensi program yang dilakukan oleh OPD dan CSR dalam penanggulangan kemiskinan
3.	Penanganan kemiskinan harus terukur dan berkelanjutan serta merupakan kerja bareng antar instansi di DIY maupun dengan Kabupaten/Kota yang saling sinergi satu sama lain dalam satu visi dan misi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan kemiskinan di DIY telah menjadi prioritas pembangunan baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota hal ini telah tertuang dalam IKU Gubernur tentang penanggulangan kemiskinan. 2. Melembagakan penanggulangan kemiskinan secara lintas sektor maupun lintas aktor, baik antar OPD di Pemda DIY maupun dengan Kabupaten/Kota. 	Dokumen penanggulangan kemiskinan sedang dikerjakan sesuai dengan pedoman TNP2K dengan berkordinasi Kabupaten/Kota. Hal ini nantinya muncul sasaran prioritas hingga tingkat mikro sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh pemda DIY. Hal ini sedang dalam proses perencanaan, sinkronisasi data dan koordinasi. Akhir tahun dokumen RPKD selesai.

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
4.	Dalam Penanganan kemiskinan kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Swasta dan Komunitas (organisasi kemasyarakatan) merupakan salah satu kuncinya oleh karena itu hendaknya dibangun jejaring dan kemitraan.	Surat Edaran (SE) nomor 401/01/61 perihal penyampaian 15 lokus penanggulangan kemiskinan bukan hanya digunakan oleh internal pemda DIY namun juga pihak Swasta ataupun Komunitas.	Hal ini dibuktikan dengan kerja sama antara Perguruan Tinggi, Pemda DIY, Pemda Kabupaten/Kota, Bazda, ACT dan Dompot Dhuafa melaksanakan kegiatan di beberapa lokus kapanewon untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan masalah dan potensinya di lokus wilayahnya.
5.	Guna memberikan kepastian hukum apa dan siapa mengerjakan apa, bagaimana pelaksanaannya maka harus dibentuk SOP dan tata kelola penanganan kemiskinan dalam sebuah PERDA tentang Rencana Induk Penangan Kemiskinan DIY.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program kemiskinan masih tersebar dan belum tertata dengan baik. Per tahun 2021 mulai dari OPD di Pemda DIY dan Kabupaten/Kota dalam tahap pemetaan program kegiatan hingga sub kegiatan program penanggulangan kemiskinan. Pemetaan ini melalui kegiatan Desk Triwulan. 2. Saat ini sedang disusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang diselaraskan dengan RPJMD. Selain itu, telah disusun Pergub DIY No 120 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanggulangan Kemiskinan sebagai panduan dalam penanggulangan kemiskinan di DIY. 	Terdapat 63 program dengan 119 kegiatan dengan total anggaran 271 M. Pada saat ini masih dalam tagging tematik kemiskinan dengan aplikasi Sengguh. Hal ini nantinya dapat selanjutnya dibuat SOP ketika sudah terpetakan dengan jelas OPD pengampu program penanggulangan kemiskinan di DIY.

b. Penanganan Covid-19

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Percepatan pelaksanaan vaksinasi khususnya dosis kedua yang masih tersisa ditambah dengan dosis ketiga (booster) yang tingkat capaiannya di DIY masih belum menggembirakan. Vaksin booster merupakan instrumen penting jika kita akan melakukan pemulihan ekonomi secara total.	<p>Tingginya kasus dan kematian dampak pandemic covid-19 dapat ditekan dengan beberapa cara diantaranya sebagaimana diamanahkan dalam Permenkes RI No 10 tahun 2020 yaitu dengan vaksinasi. Pemda DIY telah berupaya untuk terus meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19, dengan diterbitkannya SE Gubernur DIY No. 42/SE/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Percepatan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tahun 2022 cakupan vaksinasi dosis primer (dosis 1 dan 2) di DIY mencapai 104,16%, beberapa upaya yang dilakukan di DIY antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan Vaksinasi booster Dinas Kesehatan DIY melakukan percepatan pemberian dosis ke 3 atau booster 1 untuk remaja dengan bekerja sama dengan sektor 	Cakupan vaksinasi dosis ketiga (booster) sesuai target Pemerintah.

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		<p>pemerintah (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) selaku pemangku kepentingan urusan pendidikan menengah atas di DIY dan dengan Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) selaku sektor non pemerintah sebagai pelaksana vaksinasi. Kerja sama yang dilakukan dengan sektor pemerintah juga dilakukan dengan Dinas Sosial dengan pemberlakuan regulasi bagi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Gunung Kidul wajib sudah mendapatkan vaksin booster 1. Selain melakukan percepatan pemberian booster 1, Dinas Kesehatan DIY juga melakukan upaya percepatan dosis ke 4 atau booster 2 untuk tenaga kesehatan dan masyarakat lanjut usia (lansia).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyediaan Logistik Vaksin Salah satu upaya yang dilakukan dalam penyediaan logistik vaksin adalah meningkatkan koordinasi penyediaan dan distribusi, realokasi antar fasyankes dan kabupaten/kota serta meningkatkan pemantauan kualitas 3. Intensifikasi Komunikasi informasi Intensifikasi komunikasi informasi dilakukan dengan perluasan jejaring forum sosialisasi, kolaborasi perluasan informasi melalui media sosial seperti instagram maupun non media sosial seperti media cetak dan baliho, serta melakukan kolaborasi antihoax dan hotline. 	
2.	Pemerintah Daerah DIY perlu untuk melakukan pendataan terhadap anak-anak yang menjadi yatim, piatu atau bahkan yatim piatu sebagai akibat orangtua meninggal karena pandemi. Diperlukan kebijakan afirmatif untuk jaminan pendidikan bagi anak korban pandemi, serta jaminan anak untuk mendapatkan pola asuh yang baik, bisa dari keluarga terdekat, panti asuhan/panti sosial atau orangtua angkat.	Pemda DIY telah mengupayakan pendataan bagi para peserta didik yang terdampak pandemi hingga kehilangan orangtuanya dan ditindaklanjuti dengan pemberian beasiswa untuk mencegah anak-anak tersebut putus sekolah akibat berkurang/hilangnya dukungan biaya dari orangtua	Diharapkan pemberian beasiswa dapat mendukung ketuntasan pembelajaran bagi anak-anak yang terdampak pandemi
3.	Pemulihan ekonomi harus menjadi prioritas utama Pemerintah DIY pada tahun 2022 dan tahun-tahun mendatang agar masyarakat kembali mendapatkan penghasilan dan pekerjaan yang layak.	Pemulihan ekonomi dilakukan melalui pengembangan ekonomi lokal seperti dengan memberikan pelatihan/pendampingan bagi pelaku usaha, fasilitasi sertifikasi, fasilitasi promosi produk, pemberian stimulus ongkos kirim, aktivasi kembali event dan daya tarik wisata, perluasan kesempatan kerja baik pada sektor formal maupun informal dan lainnya	Pemulihan perekonomian

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
4.	Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Virus Covid-19 perlu untuk dijadikan landasan pembuatan kebijakan dan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi.	Penerapan Surat edaran Menparekrif RI no SE/4/M-K/2021 untuk Melakukan penerapan CHSE sebagai standarisasi kelayakan hotel di masa pandemi guna mengurangi penyebaran penularan Covid-19	Pengurangan penularan Covid-19

c. Kekerasan Remaja/Kejahatan di Jalan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Memberikan dukungan dan dorongan kepada Aparat Penegak Hukum untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Termasuk dalam hal ini menggalakkan operasi pemantauan kondisi di lapangan secara gabungan antara Satpol PP dengan kepolisian.	Melaksanakan patroli dalam rangka pengawasan kejahatan jalanan/klithih antara Satpol PP DIY dan Polda DIY, serta Satpol PP Kab / Kota dengan Polres Kab / Kota.	Meminimalisir terjadinya kejahatan jalanan / klithih
2.	Membubarkan kelompok-kelompok remaja/siswa yang tidak sejalan dengan dunia pendidikan (geng dan/atau organisasi yang sejenis). Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya harus dijadikan pijakan internalisasi nilai-nilai budaya adiluhung Yogyakarta yang jauh dari perilaku kekerasan dan konflik sosial.	Pendidikan karakter berbasis budaya sebagaimana diamanatkan oleh Perda DIY Nomor 5 tahun 2011 diterapkan melalui forum koordinasi pengurus OSIS di sekolah, dengan harapan teman sebaya dapat menjadi salah satu kontrol bagi peserta didik untuk selektif dalam memilih pergaulan. Selain itu forum wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dibantu dengan peran guru Bimbingan dan Konseling juga diperkuat untuk pengawasan terhadap peserta didik	Diharapkan pendidikan karakter dapat menghindarkan siswa untuk terlibat lagi dalam berbagai perilaku negatif, khususnya kekerasan dan kejahatan jalanan
3.	Meminimalisir potensi tindak kekerasan remaja sejak dari hulu dengan menguatkan peran dan fungsi keluarga khususnya peningkatan ketahanan keluarga. Jika kita cermati hasil dari peyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum, maka kita jumpai bahwa kejahatan di jalan/kekerasan anak dan remaja hampir seluruhnya dilatarbelakangi oleh tidak berfungsinya keluarga sebagaimana mestinya. Oleh karena itu keberadaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dijadikan pijakan dalam kebijakan pembangunan ketahanan keluarga di DIY.	Penyediaan layanan telekonseling (TESAGA) bagi anak dan keluarga dalam menghadapi permasalahan	anak dan keluarga dengan permasalahan psikologi, pengasuhan, pernikahan, tumbuh kembang, dll
4.	Meminta kepada Pemerintah Daerah DIY untuk membangun fasilitas-fasilitas publik sebagai ruang ekspresi dan kreativitas remaja	Fasilitas publik yang difungsikan sebagai ruang ekspresi dan kreativitas para siswa dapat diawali dari pemanfaatan	Diharapkan ketersediaan ruang-ruang publik di sekolah dapat

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
	diseluruh DIY. Fasilitas publik ini harus bersifat komprehensif dan paripurna dalam memenuhi kebutuhan remaja.	sarana serta kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler selain mengasah minat siswa juga dapat menjadi ajang kreatifitas dan penyaluran energi positif siswa.	mendorong siswa untuk meningkatkan kreativitas dan menginspirasi siswa untuk menciptakan inovasi sesuai minat dan bakatnya.

d. Jogja Smart Province

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Pemda DIY perlu mensinergikan program <i>Smart Province</i> dengan program serupa yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota Se-DIY. Belum maksimalnya proses sinkronisasi dan banyaknya <i>platform</i> digital yang beredar dimasyarakat dapat menimbulkan potensi kebingungan sehingga mengarah ke apatisisme. Teknologi informasi seharusnya justru mempermudah urusan pelayanan publik dan bukan sebaliknya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program/rencana aksi Jogja Smart province fase 1 (satu) ditetapkan untuk tahun 2019-2023. Oleh karena itu, pada tahun 2023 dilaksanakan penyusunan Masterplan Jogja Smart Province fase 2 (dua) dengan value yang baru yaitu <i>Human Centered Ecosystem</i> yang mengembangkan konsep harmonisasi TI dan manusia, reformasi tata kelola berbasis kalurahan, implementasi <i>advanced Technology</i>, dan <i>collaborative Government</i>. 2. Dalam proses penyusunannya, akan dilaksanakan kolaborasi antara program Smart province Pemda DIY dengan program Smart City/Smart Regency milik Kabupaten/Kota di wilayah DIY, serta dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 	Melalui penguatan kolaborasi dengan Kabupaten/kota diharapkan dapat mempermudah urusan pelayanan publik, peningkatan infrastruktur TIK, dan meningkatkan inovasi TIK.
2.	Pemda DIY perlu melakukan penyesuaian terhadap <i>masterplan</i> JSP sehingga kontekstual dengan isu terkini.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penyusunan Masterplan JSP tahun 2019-2023 berdasarkan isu strategis yang dihadapi DIY, kemudian berangkat dari isu strategis tersebut diturunkan menjadi arah kebijakan, rumusan strategis serta solusi indikatif yang akan dilaksanakan. kemudian setelah fase 1 (satu) selesai, dilakukan evaluasi. 2. Pada penyusunan Masterplan Jogja Smart Province fase 2 (dua) ini disusun dengan memperhatikan Visi-Misi Gubernur tahun 2023-2027, hasil evaluasi pelaksanaan JSP fase 1 (satu), RPJMD DIY 2023-2027 	Memecahkan permasalahan isu strategis atau kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta karena dampaknya signifikan dan bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemda DIY di masa yang akan datang.

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		serta beragam isu strategis yang dihadapi oleh DIY saat ini. 3. Dengan JSP yang mewarnai RPJMD DIY 2023 – 2027 akan dapat meningkatkan pemanfaatan TI untuk pembangunan di DIY. TIK dapat mendorong pengembangan smart governance dan smart community. Seluruh tata kelola pemerintahan baik dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai Desa harus melakukan transformasi TI dan dapat mengoptimalkan perkembangan TI untuk tata kelola yang lebih efektif dan efisien.	
3.	Perlu dilakukan <i>assesment</i> akses masyarakat terhadap <i>platform digital</i> yang merupakan bagian pelayanan publik dari <i>Jogja Smart Province</i> agar dapat memperluas kemanfaatan.	Assesmen kemanfaatan dan penggunaan platform digital untuk pelayanan publik akan dilaksanakan.	Kendala keterbatasan jangkauan akses serta tingkat literasi digital masyarakat akan semakin ditingkatkan melalui berbagai program dalam Smart province.
4.	Dunia <i>startup</i> di DIY memiliki potensi yang tinggi untuk dapat ditingkatkan sebagai pendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di era <i>digital</i> ini.	Meningkatkan potensi SDM sebagai inovator startup di DIY yang berperan untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.	Mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

e. Reformasi Birokrasi

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Capaian penilaian Indeks Reformasi Birokrasi di DIY dengan kategori “A” seharusnya mencerminkan pula dengan capaian hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat. Pembangunan yang dijalankan oleh aparatur birokrasi dengan dukungan masyarakat, logikanya mampu untuk menyelesaikan problem-problem yang dihadapi masyarakat serta meningkatkan kesejahterannya. Namun LKPJ Gubernur menunjukkan masih ada anomali dari penyelenggaraan pemerintahan di DIY. Penataan birokrasi jauh melesat ke depan,	Pemda DIY berusaha semaksimal mungkin melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN. Memastikan kinerja OPD telah sesuai dengan output dan outcome yang di rencanakan, serta mendukung ketercapaian IKU Gubernur, Sasaran dan Program Pemda. Namun demikian indikator-indikator yang ada khususnya pada sasaran dan program pemda umumnya memerlukan dukungan dari berbagai sektor mengingat keterbatasan dukungan APBD (bersifat multi dimensional). Melalui implementasi RB dan Sakip, Pemda DIY berusaha melakukan	Perbaikan tata Kelola pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat.

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
	sementara kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan menyisakan banyak persoalan.	perbaiki tata kelola pemerintahan secara terus menerus yang diharapkan dapat membawa perbaikan pelaksanaan pembangunan dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.	
2.	Perlunya untuk membangun komitmen kuat di Pemerintah Daerah DIY, bahwa pelaksanaan pembangunan sebagaimana perencanaan dalam APBD diukur pula dengan dampak dan manfaat yang akan dirasakan masyarakat. Pada satu sisi, prestasi dalam penataan birokrasi perlu untuk terus dipertahankan, sisi lain pengukuran keberhasilan capaian pembangunan perlu pengembangan dengan dimasukkannya instrumen audit sosial yang memetakan manfaat dan dampak dari pembangunan yang dilakukan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda DIY melakukan pengukuran kinerja OPD dengan menggunakan <i>balance score card</i> dan mengevaluasi dampak dan manfaat pelaksanaan program dan sub kegiatan di rasakan oleh masyarakat. Saat ini Pemda DIY mendorong dan telah mengembangkan model kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan di DIY. Dalam skema ini terdapat keterlibatan unsur-unsur di luar Pemda dalam rangka ketercapaian indikator tertentu. 2. Selain upaya tersebut telah pula dilakukan kajian evaluasi mikro yang mencoba melihat keterkaitan antara subkegiatan, program dan sasaran, sehingga diharapkan memberikan masukan terhadap desain pelaksanaan pembangunan. 	Pembangunan dapat memberi dampak sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

f. Pelabuhan Tanjung Adikarta

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Perlunya <i>road map</i> dan tata kala yang jelas terkait pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta apabila akan dilanjutkan sebagai pengungkit sektor perikanan dan kelautan.	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta saat ini menjadi prioritas pusat melalui koordinasi Kemenkomarves karena harus menyusun Kajian terintegrasi penyelesaian pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta. Saat ini sedang dilakukan kajian kawasan Aerotropolis Bandara Yogyakarta Internasional Airport kerja sama Pemda DIY dengan JICA. <i>Roadmap</i> dan tatakala akan masuk dalam kajian tersebut.	<i>road map</i> dan tata kala pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta
2.	Apabila pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta tidak <i>feasible</i> untuk dilanjutkan pembangunannya perlu dilakukan alternatif alih pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Adikarta untuk kepentingan yang lain, seperti kepentingan pariwisata, sehingga tidak berlarut-larut karena anggaran yang dikeluarkan sudah sangat banyak.	Dalam Dokumen perencanaan RPJMD 2017-2022 dan dalam RKPD 2022 Pembangunan PPP TJ Adikarta masih menjadi Proyek Strategis Daerah dengan pemanfaatan utamanya adalah sebagai pelabuhan perikanan. Namun demikian, berdasarkan kajian yang dilakukan pada tahun 2016, terkait dengan pengembangan kawasan, PP Tanjung Adikarta dapat juga dikembangkan selaras dengan pengembangan pariwisata di zona pendukungnya.	Penyelesaian Pembangunan PPP Tj Adikarta

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
3.	Akselerasi implementasi pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto oleh pemerintah pusat melalui APBN.	Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto selalu diangkat dalam forum Musrenbang maupun Ratekan dan menjadi program prioritas, tetapi karena keterbatasan anggaran sehingga belum bisa dialokasikan baik itu DAK, TP KKP maupun dari kementerian yang lainnya.	Penyelesaian pembangunan pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto

g. Jogja Argo Park

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Percepatan pemenuhan kebutuhan untuk SDM Pendamping Teknis Inkubator Agribisnis dan Pendamping Teknis Inkubator Edukasi Agrowisata.	Sudah terlaksananya perekrutan dan penetapan 2 orang pendamping teknis yaitu Pendamping Teknis Inkubator Agribisnis dan Pendamping Teknis Inkubator Edukasi Agrowisata.	Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendamping teknis untuk pengelolaan JAP .
2.	Sebagai percontohan dan pusat edukasi pertanian modern, JAP harus mampu untuk terus menginspirasi dan mendorong anak-anak muda terjun dalam dunia pertanian dengan berprofesi sebagai petani muda/petani milenial. Gerakan ini harus ditumbuhkan dengan kebijakan yang terukur guna mengatasi penurunan jumlah petani di DIY.	Penataan dan pengelolaan JAP serta terdapat percontohan penyiraman menggunakan <i>smart farming</i> di <i>greenhouse</i> JAP.	Diterapkannya pertanian modern yaitu penyiraman menggunakan <i>smart farming</i> .

h. Yogyakarta International Airport

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Fasilitas UMKM DIY bisa memiliki outlet dikawasan bandara dengan biaya terjangkau pelaku UMKM. Pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM yang sudah tergabung dalam Pasar Kotagede (PKG) YIA terus dilakukan baik melalui pelatihan – pelatihan, perbaikan desain kemasan, Fasilitas Halal, Fasilitas Ijin Edar, Fasilitas Merk, Pemasaran Produk secara online, dsb. Melakukan sinergi lintas sektor maupun lintas kewenangan dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan dalam rangka untuk pengenalan Galeri Pasar Kotagede YIA kepada	Untuk tahun 2022 UKM tidak dikenakan sewa hanya titip jual akan dilakukan <i>appraisal</i> utk menentukan konsinyasi yang tepat sebagai pengganti sewa produk UKM. Melalui sistem kurasi produk utk masuk Galeri YIA sekaligus dilakukan pembinaan terhadap kemasan, legalitas dan izin edar produk. Produk yang belum memenuhi persyaratan diarahkan untuk mengikuti fasilitas kemasan, legalitas, izin edar dari pemerintah. Membuat katalog produk UKM yang ada di Galeri PKG YIA. Dengan adanya katalog produk YIA ini membuka	Dengan adanya kurasi utk masuk ke Galeri PKG YIA daya saing produk UMKM meningkat karena bagi yang tidak lolos kurasi diminta untuk perbaikan produk baik dari segi kemasan, legalitas dan izin eddar. Dengan adanya katalog produk membuka peluang kemitraan dengan maskapai penerbangan.

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
	pengunjung sekaligus penumpang maskapai serta diupayakan menjalin kemitraan dengan maskapai penerbangan	peluang kerja sama. Pelaksanaan pentas kebudayaan di area PKG.	
2.	Kurang efektifnya Perpindahan antar moda (moda Kereta ke Bus) Pada saat ini mobilisasi menuju Bandara <i>Yogyakarta International Airport</i> dapat menggunakan Jalur darat dan Rel, untuk jalur darat sudah tersedia Angkutan Kota dalam Provinsi, untuk jalur rel saat ini masih menggunakan jalur eksisting dengan pemberhentian terakhir di Stasiun Wojo kemudian dilanjutkan dengan <i>shuttle</i> menggunakan Damri. Adanya perpindahan antar moda ini berdampak pada tingginya biaya dan waktu perjalanan karena belum adanya integrasi dokumen dalam hal ini adalah <i>ticketing</i> , sehingga mobilisasi menggunakan kereta api masih kurang efektif dan efisien .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2021 telah beroperasi KA Bandara dengan rute Stasiun Yogyakarta - Stasiun Wates - Stasiun Bandara YIA dan sebaliknya dengan waktu tempuh kurang lebih 40 Menit. 2. Untuk moda transportasi berbasis jalan menuju Bandara YIA telah tersedia: <ol style="list-style-type: none"> a. Terminal Condong Catur – YIA; b. Sleman City Hall –YIA; c. Bandara Adi Sutjipto – YIA; d. Titik Nol Km – YIA; e. Terminal Palbapang – YIA. 	<p>Untuk memberikan kemudahan pengguna jasa angkutan udara dari dan menuju Bandara YIA yang menggunakan angkutan umum penumpang AKDP dan Kereta Api</p> <p>Untuk memberikan kemudahan pengguna jasa angkutan udara.</p>
3.	Mobilisasi ke Bandara <i>Yogyakarta International Airport</i> menggunakan moda Kereta Api dapat terselesaikan bila trase Kereta Api Ke Stasiun <u>Bandara selesai</u> dibangun, hal ini akan menghilangkan proses perpindahan dari Kereta ke <i>Shuttle</i> sehingga dapat memangkas waktu perjalanan. integrasi dokumen antarmoda dari kereta api ke bandara berupa integrasi tiket akan memudahkan para pelaku perjalanan yang menggunakan pesawat, kegiatan <i>check in boarding pass</i> dapat dilakukan stasiun kereta keberangkatan sehingga aktivitas <i>check in</i> penumpang pesawat tidak perlu dilakukan di area terminal keberangkatan Bandara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2021 telah beroperasi KA Bandara dengan rute Stasiun Yogyakarta - Stasiun Wates - Stasiun Bandara YIA dan sebaliknya dengan waktu tempuh kurang lebih 40 Menit. 2. Untuk tiket dan <i>boarding pass</i> akan dilakukan koordinasi lebih intens dengan pihak-pihak terkait. 	<p>Untuk memberikan kemudahan pengguna jasa angkutan udara dengan menggunakan KA Bandara</p>
4.	Perlunya ditinjau ulang dan terarah Masterplan Aerotropolis yang sudah disusun pada tahun 2019 harus di-review ulang untuk menyesuaikan dengan akses menuju tol Yogyakarta- Kulon Progo serta rencana akses jalan menuju Bedah Menoreh. Pada tahun 2019 telah dilakukan pembangunan terminal VIP YIA Tahap I berupa pondasi dan kolom struktur yang akan dilanjutkan bangunan di atasnya pada tahap II dan tahap III. Pada kolom struktur tersebut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda DIY mohon bantuan kepada JICA untuk melakukan studi dan kajian terhadap konsep kawasan aerotropolis agar kawasan sekitar YIA menjadi kawasan yang berkembang optimal namun tidak mengabaikan isu sosial. 2. Pemda DIY masih mempertimbangkan prioritas penyelesaian pembangunan fisik konstruksi terminal VIP bandara YIA, mengingat banyaknya hal yang harus 	<p>Ketidaksesuaian MP aerotropolis terhadap akses menuju tol dapat terselesaikan. Serta terlaksananya kajian dan studi pengembangan aerotropolis dan kawasan sekitar bandara YIA.</p> <p>Terselesaikannya fisik konstruksi pembangunan terminal VIP bandara</p>

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
	terdapat besi tulangan terbuka yang rawan` korosi mengingat lokasi site berada di tepi pantai, kiranya proses pembangunan terminal VIP YIA ini dapat segera terealisasi.	ditinjau Kembali terkait pemenuhan readiness criteria, misal MP bandara YIA dan AMDAL	YIA, sebagai sarana pendukung untuk tamu tamu VIP yang mendarat di Bandara YIA.

i. Penataan Kawasan Sumbu Filosofi

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Pengusulan Yogyakarta sebagai Warisan Budaya harus memiliki target waktu yang jelas dan terukur sampai kapan status tersebut akan didapatkan dari UNESCO. Jangan sampai pemrosesan ini seperti mengalir begitu saja tanpa target waktu yang jelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda DIY sudah mengajukan ke <i>World Heritage City</i> UNESCO dengan berkoordinasi dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Perekonomian RI. Dari hasil pengajuan tersebut telah disetujui dan diterima oleh UNESCO dalam tahapan Tentative List World Heritage City pada 14 Maret 2017 dengan Judul Historical City Centre of Yogyakarta, dengan tema Yogyakarta City Of Philosophy. 2. Tim penilai dari UNESCO, organisasi PBB yang membidangi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan pekan ini telah menyambangi Yogyakarta. Tim ini datang pada 23 Agustus 2022, untuk menilai fakta di lapangan atas usulan kawasan sumbu filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Dunia <i>The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks</i>. 	Berdasarkan hasil evaluasi judul yang diajukan menjadi <i>The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks</i> . Pelaksanaan penilaian pengusulan Yogyakarta sebagai Warisan Budaya yang dilaksanakan oleh UNESCO telah selesai dilaksanakan dan sedang menunggu hasil kajian dan evaluasi yang sedang dikerjakan oleh pihak UNESCO.
2.	Penataan Kawasan Sumbu Filosofi dalam seluruh dimensinya, diharapkan bukan sebatas untuk mempercantik wajah dan penampilan kota saja, namun juga bisa memberikan makna penting bagi warga masyarakat Yogyakarta. Manfaat ini bukan hanya persoalan kesejahteraan semata-mata, namun lebih dari itu, Penataan Kawasan Sumbu Filosofi menghadirkan rasa cinta warga kepada budaya adiluhung yang semakin kuat mengakar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penataan kawasan Sumbu Filosofi yang telah dimulai dari tahun 2018 - 2022. 2. Penyelenggaraan event-event budaya dan pariwisata di sepanjang Kawasan sumbu filosofi, dalam rangka menguatkan dan menghadirkan rasa cinta warga kepada budaya adiluhung yang ada di DIY. 	Terintegrasinya PKL yang berada di Kawasan Sumbu Filosofi (Jalan Malioboro) dengan merelokasinya ke 2 tempat yaitu Pusat UMKM Teras Malioboro 1 dan 2. Tertata dan terpeliharanya Kawasan Sumbu Filosofi melalui kegiatan-kegiatan pemeliharaan yang dilakukan, baik secara fisik maupun non fisik

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
			<p>melalui keberadaan Jogomargo dan Jogoboro.</p> <p>Tersosialisasikannya kebudayaan adiluhung Yogyakarta beserta internalisasi pemaknaan Kawasan Sumbu Filosofi melalui atraksi-atraksi kesenian dan pariwisata yang telah dilakukan.</p>

j. Pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pemabngunan JJLS menurut pencermatan DPRD DIY sejak beberapa waktu yang lalu masih menyisakan permasalahan, baik pemetaan lahan yang akan digunakan maupun penerbitan sertifikat atas lahan tersebut. Pemda DIY perlu untuk terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyusunan peta lahan JJLS maupun percepatan penerbitan setifikat.	Pembentukan tim pensertifikatan tanah di masing-masing kabupaten yang terkena pembangunan JJLS, pembentukan tim tersebut terealisasi dengan diterbitkannya Surat Keputusan dari Gubernur.	pemrosesan tahapan-tahapan pensertifikatan tanah hak milik pemda diy maupun pengurangan luas milik warga hingga terbit sertifikat tanah.
2.	Pemda DIY perlu untuk berkoordinasi dengan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul guna konsolidasi dalam pengembangan tataruang wilayah sebagai akibat pembangunan JJLS. Saat sekarang ini telah banyak berkembang fasilitas pendukung dan pergerakan ekonomi masyarakat disepanjang JJLS. Jika tidak dilakukan penataan ruang sejak dini, maka sangat dimungkinkan kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang tidak sesuai dengan standarisasi pemanfaatan daerah milik jalan.	<ol style="list-style-type: none"> Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY pada tahun 2021 telah menyelesaikan juga dokumen terkait dengan Strategi Pengembangan Wilayah di kawasan sekitar pantai selatan Kulon Progo, Bantul maupun Gunungkidul. Sehingga dalam proses penataan ruang dikawasan tersebut sudah mengacu pada kesesuaian pemanfaatan ruang yang ada; Biro Pengembangan Insfrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan melalui Dana Keistimewaan Tahun 2022 telah melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan infrastruktur daerah dengan Kajian Monev Pengembangan Kawasan pada JJLS. Diharapkan adanya kajian ini dapat memberikan rekomendasi dalam perencanaan pembangunan di sekitar kawasan JJLS. 	Adanya dokumen acuan dalam pengembangan penataan ruang di sekitar kawasan JJLS.

k. Pembangunan Taman Budaya Se-DIY

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Pemda DIY hendaknya membangun sistem penyiaran kegiatan Taman Budaya se-DIY. Khususnya Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo yang sudah beroperasi. Terutama dengan pemanfaatan TIK.	Kegiatan dan aktifitas yang dilaksanakan di Taman Budaya yang sudah beroperasi, dalam hal ini Taman Budaya Yogyakarta, Taman Budaya Gunungkidul dan Taman Budaya Kulonprogo telah dipublikasikan melalui kanal youtube. Adapun kanal youtube dimaksud adalah : https://www.youtube.com/@tamanbudayayogyakarta2558 https://www.youtube.com/@tamanbudayagunungkidul7285 https://www.youtube.com/@dinaskebudayaankulonprogo2043	Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Taman Budaya dapat terpublikasikan secara lebih luas ke masyarakat.
2.	Pemda DIY hendaknya memperhatikan kajian terkait lokasi dan juga luas lahan yang tersedia mengingat sulitnya pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Taman Budaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam proses pembangunan taman budaya secara lokasi hendaknya juga memperhatikan terkait dengan tata ruang dan status tanah. Kesesuaian terhadap tata ruang sebagaimana mengacu pada RTRW Provinsi maupun Kabupaten. 2. Sementara apabila lokasi tersebut perlu adanya pembebasan yang bukan dari Tanah Kasultanan, tanah Kadipaten maupun tanah Desa maka mengacu pada Permen ATR BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 3. Namun, apabila lahan tersebut berada diatas Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten maupun Tanah Desa maka dalam proses pemanfaatan lahan tersebut mengacu kepada Perdas Nomor 1 Tahun 2017 dan Pergub Nomor 33 dan 34 Tahun 2017 serta Pergub Nomor 49 Tahun 2018. 	Proses dalam pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan taman budaya
3.	Pemanfaatan Taman Budaya sebagai identitas dan pusat aktivitas kebudayaan tentunya tidak dapat terlaksana tanpa peran serta masyarakat, untuk itu Pemda DIY perlu melakukan pelibatan peran masyarakat, sekolah-sekolah baik selaku pengunjung maupun pengisi aktivitas kebudayaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan peranserta masyarakat baik sebagai pengisi aktifitas kebudayaan dilaksanakan melalui berbagai aktifitas kegiatan berupa pentas kesenian, gelar seni, festival dn lain-lain. Contoh di Taman Budaya Kulonprogo melaksanakan : Art For Children Kulon Progo, Kulon Progo Manekawarna, Pentas Band, Pentas Kethoprak, Pentas Sendratari dan Pentas Seni Tradisi. Taman Budaya Gunungkidul melaksanakan: Gelar Seni Kolosal, Pemeliharaan dan Pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul, Pentas Seni di Taman Budaya Gunungkidul, Pentas Seni Untuk Anak. Taman Budaya Yogyakarta : Pasar Kangen, Pameran Senurupa Nandur Srawung, Art For Children, Musik Malam, Gelar Seni Sepanjang Tahun. 2. Sedangkan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat termasuk kalangan pelajar dan milenial, terhadap aktifitas seni dan budaya yang dilaksanakan di Taman Budaya, maka publikasi kegiatan dilaksanakan melalui media sosial diantaranya instagram. 	Peranserta semua pihak baik masyarakat umum, komunitas budaya, pelajar dan kaum milenial semakin tinggi. Demikian juga apresiasi terhadap aktifitas kesenian dan kebudayaan yang dilaksanakan di taman budaya.

I. Pembangunan Rumah Sakit Bertaraf Internasional RSUD Wates

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Kebijakan RSUD Wates sebagai Rumah Sakit tipe B dengan kebijakan rujukan BPJS menyebabkan turunnya jumlah pelayanan dan menurunnya penghasilan RSUD Wates, kebijakan tersebut harus dicarikan solusi agar RSUD Wates bisa optimal melayani masyarakat Kulon Progo dengan dibangunnya RSUD Wates bertaraf Internasional pemanfaatan Gedung, Kamar Ruang Inap harus bisa optimal.	Mendorong RSUD Wates untuk melakukan inovasi pelayanan dan penguatan strategi manajemen untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan mengoptimalkan pendapatan.	Strategi manajemen RS dan inovasi pelayanan
2.	Peningkatkan sarana dan prasarana RSUD Wates harus ditingkatkan.	Sarana dan Prasaran ditingkatkan melalui Anggaran yang bersumber dari APBN (DAK), APBD dan sumber lainnya	Peningkatan sarana dan prasarana RS
3.	Pelatihan SDM dan kerja sama dengan RS diatasnya seperti RS Sardjito harus dioptimalkan.	Upaya untuk meningkatkan kulaitas SDM RSUD Wates telah dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan RSUP Dr. Sardjito dalam bentuk <i>Sister Hospital</i> . Selain itu, RSUD Wates sebagai jejaring <i>Academic Health System (AHS)</i> sehingga selalu <i>update</i> dalam perkembangan ilmu pengetahuan.	Peningkatan pendidikan dan pengembangan SDM
4.	Peningkatkan gaji karyawan kontrak di RSUD Wates yang belum setara Upah Minimal Provinsi harus dikawal dan di- <i>monitoring</i> Pemerintah Daerah DIY dan dicarikan solusi Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.	Penggajian tenaga honorer BLUD sesuai dengan SBU (Standar Belanja Umum) daerah	Gaji tenaga Honorer
5.	Perlu dilakukan simulasi penanganan kondisi darurat dari Bandara Yogyakarta Internasional dengan RSUD Wates.	Mendorong RSUD Wates bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Kulon Progo (PSC KulonProgo Emergency System) dan Kantor Pelabuhan Kesehatan untuk melaksanakan simulasi kondisi kedaruratan di YIA	Simulasi Kondisi Kedaruratan di YIA

m. Revitalisasi TPA Piyungan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Penanganan sampah harus ditangani secara lebih serius dan komprehensif mulai dari Hulu hingga hilir. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang penanganan sampah hendaknya lebih terstruktur, sistematis dan massif dengan melibatkan secara koordinatif Pemerintah Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.	DLHK DIY sudah melakukan pembinaan pengelolaan sampah dari hulu dalam bentuk pembinaan pengelolaan sampah mandiri, dengan sasaran terdiri dari Bank Sampah, TPS3R, dan masyarakat dari 5 kabupaten/kota bersama dengan Anggota Komisi C DPRD DIY dan melibatkan DLH Kabupaten/kota serta JPSM kabupaten/kota. Pembinaan tersebut sebanyak 15 angkatan pada tahun 2022.	Mengurangi timbulan sampah dari sumber

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
2.	Penanganan sampah di TPA Regional Piyungan harus dikembalikan kepada prinsip awal yaitu sebagai Tempat Pemrosesan Akhir dengan menggunakan teknologi mutakhir sehingga tidak lagi menggunakan sistem <i>controlled landfill</i> .	Dalam mewujudkan pengelolaan sampah dengan menggunakan teknologi mutakhir tersebut Pemerintah bermaksud menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Saat ini proses persiapan KPBU dalam tahap penyusunan Kajian Akhir (FBC)	Meningkatkan kapasitas TPA
3.	Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah dengan menggunakan teknologi mutakhir tersebut Pemerintah bermaksud menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang sampai dengan saat ini masih dalam proses Final Bussines Case (FBC). Untuk itu, DPRD DIY memberikan batas waktu kepada Pemerintah DIY agar dapat segera menyelesaikan proses KPBU untuk pengelolaan sampah di TPA Regional Piyungan sampai dengan tahun 2024 agar dapat segera beroperasi mengelola sampah dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan.	Pemda DIY selaku PJKP selalu berkoordinasi dengan Bappenas, Kementerian Keuangan selaku fasilitator dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia selaku penjamin finansial dalam pelaksanaan KPBU berupaya melakukan percepatan setiap prosesnya yang berharap KPBU bisa dilaksanakan dalam waktu yang lebih cepat. Penyusunan dokumen sampai dengan proses lelang membutuhkan waktu yang cukup panjang, serta tahap konstruksi diperkirakan membutuhkan waktu 1,5 tahun. Sehingga menurut timeline yang sudah disusun, skema KPBU paling cepat dilaksanakan pada tahun 2026	Mempercepat proses KPBU
4.	Pemerintah DIY mendorong Pemerintah Kabupaten/kota untuk membangun sarana Tempat Pembuangan Sampah 3R (<i>Reduce, Reuse dan Recycle</i>) di setiap kabupaten/kota guna mengurangi volume sampah yang akan masuk di TPA Regional Piyungan.	Berkenaan dengan penyediaan TPS3R, sesuai dengan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, kewenangan penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah berada di Kabupaten/Kota. Provinsi hanya memiliki kewenangan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dan penangangan sampah di TPA/TPST Regional.	Mengurangi timbulan sampah dari sumber
5.	Pemerintah DIY berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat yang peduli terhadap permasalahan sampah dengan membentuk Bank Sampah atau Kelompok Pengelola Sampah Mandiri untuk membangun budaya masyarakat peduli sampah.	DLHK DIY sudah melakukan pembinaan pengelolaan sampah dari hulu dalam bentuk pembinaan pengelolaan sampah mandiri, dengan sasaran terdiri dari Bank Sampah, TPS3R, dan masyarakat dari 5 kabupaten/kota bersama dengan Anggota Komisi C DPRD DIY dan melibatkan DLH Kabupaten/kota serta JPSM kabupaten/kota. Pembinaan tersebut sebanyak 15 angkatan pada tahun 2022.	Mengurangi timbulan sampah dari sumber
6.	Pemerintah DIY perlu menyelenggarakan sosialisasi secara lebih massif mengenai pengelolaan sampah untuk membangun budaya masyarakat yang lebih peduli terhadap permasalahan sampah. Hal ini penting untuk	DLHK DIY sudah melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah dari hulu dalam bentuk pembinaan pengelolaan sampah mandiri, dengan sasaran terdiri dari Bank	Mengurangi timbulan sampah dari sumber

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
	menyelesaikan penanganan sampah dari sumbernya (hulu) yaitu sampah rumah tangga.	Sampah, TPS3R, dan masyarakat dari 5 kabupaten/kota bersama dengan Anggota Komisi C DPRD DIY dan melibatkan DLH Kabupaten/kota serta JPSM kabupaten/kota. Pembinaan tersebut sebanyak 15 angkatan pada tahun 2022.	

6. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

a. Kerja Sama Antar Daerah

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1	Peningkatan kerja sama dalam membangun jaringan pariwisata, jaringan transportasi yang menyatu dengan Provinsi Jateng dalam optimalisasi Bandara YIA.	Telah tersedianya layanan angkutan umum yang dilayani oleh armada DAMRI yang menghubungkan DIY dengan Jateng dengan Rute : Bandara YIA – Borobudur Bandara YIA – Kebumen Bandara YIA – Purworejo Stasiun Tugu – Magelang UC Hotel UGM - Candi Borobudur Hotel Limaran – Borobudur	Memberikan Kemudahan untuk melakukan mobilitas antar destinasi Wisata yang berada di Jateng dan DIY

b. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Peningkatan koordinasi masalah keamanan, ketertiban, dan ketentraman hendaknya dilakukan setiap tahun dan pencapaian kesepakatan agenda program dan kegiatan, khususnya beberapa tindakan untuk pencegahan dini terhadap aktivitas yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	Melaksanakan koordinasi dengan beberapa OPD dan instansi vertikal melalui beberapa tim yang telah dibentuk, antara lain Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS), Pemantauan Orang Asing (POA), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Selain itu, telah dilaksanakan upaya penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan melalui kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DIY yang	Masih lemahnya koordinasi terkait urusan keamanan, ketertiban, dan ketentraman antara Pemerintah Daerah DIY dengan instansi vertikal terkait.

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		dilaksanakan secara rutin minimal 3 kali dalam satu tahun, dengan topik dan isu kritical yang terjadi di wilayah DIY, termasuk topik kewaspadaan dini.	

c. Pembinaan Batas Daerah

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	<p>Tata batas kesepakatan antar daerah penting diupayakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam melakukan tata batas daerah, khususnya untuk pemerintahan desa yang berbatasan dan kepentingan penduduknya. Pemerintah daerah perlu mempertegas batas daerah dan mengimplementasikannya pada peta geospasial desa untuk kepentingan pemerintah desa yang berbatasan.</p>	<p>Berdasarkan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan batas Desa (Tim PPBD) tingkat Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur dan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Desa di wilayah Provinsi. Sedangkan untuk pelaksanaan teknis penetapan dan penegasan batas desa dilaksanakan oleh Tim PPBD Kabupaten/Kota. Seluruh Kabupaten/Kota di DIY telah melaksanakan kegiatan penegasan batas Kalurahan/Kelurahan dan masih berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kab. Kulon Progo sudah melaksanakan penegasan batas Kalurahan pada 19 Kalurahan; Kab. Bantul sudah melaksanakan pemasangan pilar batas Kalurahan di 12 Kalurahan; Kab. Gunungkidul sudah melaksanakan penegasan batas Kalurahan pada 33 Kalurahan; Kab. Sleman sudah melaksanakan penegasan batas Kalurahan pada 47 Kalurahan; dan Kota Yogyakarta sudah melaksanakan penegasan batas Kelurahan pada 13 Kelurahan. <p>Pembinaan dan pengawasan sebagaimana tugas Tim Penegasan dan Penetapan Batas Desa Provinsi dilaksanakan dengan cara pemberian pedoman umum, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan dan supervisi. Pada tahun 2023 akan</p>	<p>Dalam rangka percepatan penegasan dan penetapan Kalurahan/kelurahan di DIY, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan batas desa. Upaya yang dilakukan antara lain fasilitasi berupa pendanaan kegiatan batas desa di Kabupaten/Kota melalui dana keistimewaan.</p>

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
		dilaksanakan Sosialisasi dan Asistensi Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan/kelurahan dengan peserta Tim PPBD Kabupaten/Kota dan perwakilan Kalurahan/Kelurahan.	

d. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Membuat Bank Data SDM Pelaksanaan dan relawan bencana se DIY dan mengklasifikasikannya agar memudahkan pembinaan lebih lanjut.	Pembuatan sistem aplikasi kebencanaan telah di rencanakan.	Terlaksanannya koordinasi secara baik dengan Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Kota
2.	Peningkatan kapasitas SDM petugas penanggulangan bencana dan relawan penanggulangan bencana.	Peningkatan kapasitas petugasan penanggulangan bencana dan relawan penanggulangan bencana telah dilaksanakan setiap tahun melalui berbagai kegiatan sosialisasi, Pelatihan, drill, simulasi dan gladi, selain itu dilakukan pembentukan pengembangan SPAB dan Kaltana.	Sosialisasi pelatihan, drill, simulasi dan gladi SPAB dan Kaltana.
3.	Konsolidasi dan sinergi organisasi relawan penanggulanagn bencana	Penguatan kelembagaan organisasi relawan penanggulangan bencana yang dibentuk kabupaten/Kota dalam Kalurahan/Kelurahan tanggap bencana dan Kapanewon/ Kemantren mengkonsolidasikan dan mensinergikan melalui: 1.Rakornis dan sosialisasi peningkatan kapasitas FPRB Kab/Kota, FPRB Kal/Kel. 2. Latihan gabungan	1.Rakornis dan sosialisasi peningkatan kapasitas FPRB Kab/Kota, FPRB Kal/Kel. 2. Latihan gabungan
4.	SOP Kebencanaan dan Gladi Lapang	1.Yang telah disusun adalah rencana kontijensi untuk anacaman bencana Gunung Merapi, Gempa Bumi, dan Banjir. 2. Gladi lapang untuk petugas penanggulangan bencana dan relawan penanggulangan bencana akan dilaksanakan setelah masa pandemi berakhir.	1.Penyusunan Rencana Kontijensi untuk ancaman bencana Gunung Merapi, Gempa Bumi, dan Banjir. 2. Gladi lapang untuk petugas penanggulangan bencana dan relawan penanggulangan bencana akan dilaksanakan setelah masa pandemi berakhir.
5.	Fasilitasi Pemkot/Pemkab dalam peningkatan SDM maupun operasional organisasi relawan penanggulangan bencana	Peningkatan SDM maupun operasional organisasi Pemkot/Pemkab dalam memfasilitasi relawan penanggulangan bencana melalui	1. pelatihan dan sosialisasi 2. Bantuan peralatan bagi relawan penanggulangan bencana

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
6.	Pentingnya pendidikan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat	<p>1. Pelatihan-pelatihan dan Sosialisasi-sosialisasi</p> <p>2. Bantuan peralatan bagi relawan penanggulangan bencana</p> <p>Pendidikan kesiapsiagaan masyarakat melalui Destana/Kaltana dan SPAB bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) DIY/Kabupaten/Kota dan diakhiri dengan gladi lapang yang juga melibatkan potensi yang ada di masyarakat PMI.</p> <p>Dalam Kegiatan SPAB PMI juga dilibatkan dalam pembekalan dengan materi penanganan kegawatdaruratan (PPGD)</p>	<p>1. Destana/Kaltana</p> <p>2. SPAB PMI</p>
7.	BPBD sebagai organisasi tunggal baik pra bencana, saat bencana dan pasca bencana	<p>1. BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melaksanakan melalui mekanisme koordinasi pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana, Pada awal keadaan darurat BPBD memiliki fungsi komando untuk mengendalikan operasi awal kedaruratan.</p> <p>2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan lembaga/instansi terkait</p> <p>3. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana dan menyusun Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang melibatkan multi pihak.</p>	<p>1. BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melaksanakan melalui mekanisme koordinasi pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana, Pada awal keadaan darurat BPBD memiliki fungsi komando untuk mengendalikan operasi awal kedaruratan.</p> <p>2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan lembaga/instansi terkait.</p> <p>3. Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana dan menyusun Rencana Aksi Pengurangan Bencana yang melibatkan multi pihak. Namun, untuk RPB dan Renaksi PB belum disusun untuk semua jenis ancaman bencana.</p>

e. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan mencegah dan mengurangi peredaran gelap napza dalam bentuk konkrit di lapangan, missal fasilitasi kelompok masyarakat yang peduli dan komitmen pada upaya tersebut	Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah peredaran gelap narkoba di wilayah DIY.	Masih tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY.
2.	Membumikan Pancasila melalui gerakan dan suri tauladan.	Telah dilaksanakan kegiatan Sinau Pancasila untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat.	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di kalangan masyarakat DIY.

f. Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya Yang Dilaksanakan Oleh Daerah

1) Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) DIY

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Belum optimalnya pelaksanaan rekomendasi dalam LKPJ 2020 sehingga ke depan perlu penajaman kegiatan yang mampu mengatasi pertumbuhan ODHA di kalangan difabel dan orang dengan gangguan jiwa. (BIDANG SOSBUD) (Dinas Sosial) (KPAD)	Menyusun Strategi RAD HIV AIDS 2021-2026 dimana dalam dokumen tersebut telah dipetakan peran dari masing-masing OPD di Pemda DIY.	Pemda DIY juga Menyusun Raperda penyelenggaraan Kesehatan Jiwa dan Raperda terkait pelaksanaan penanggulangan HIV AIDS dimana sebelumnya juga telah berlaku Pergub nomor 37 tahun 2012 tentang pelaksanaan penanggulangan HIV AIDS
2.	Munculnya tantangan peningkatan kasus ODHA pada difabel, Orang dengan gangguan jiwa, ibu rumah tangga perlu disikapi dengan bijak dan langkah taktis oleh KPID DIY agar mampu menekan laju pertumbuhan ODHA di DIY oleh karena itu perlu program peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan partisipasi warga/kelompok masyarakat. (BIDANG SOSBUD) (Dinas Sosial) (KPAD)	Melakukan upaya-upaya promotif preventif terutama edukasi terkait kesehatan reproduksi menjadi penting dalam pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dengan melibatkan semua pihak lintas sektor lintas aktor.	Pemda DIY sudah menyusun Perda Ketahanan Keluarga dan Perda perlindungan anak sebagai dasar regulasi terkait keluarga dan anak di DIY, Menyusun Raperda penyelenggaraan Kesehatan Jiwa dan Raperda terkait pelaksanaan penanggulangan HIV AIDS dimana sebelumnya juga telah berlaku Pergub nomor 37 tahun 2012 tentang pelaksanaan penanggulangan HIV AIDS, juga dengan dukungan lintas sector baik dari pemerintahan maupun Non pemerintahan

2) PMI DIY

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Menjadikan PMI sebagai lokomotif dalam pendidikan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat melalui program kerja sama antara OPD dengan PMI	Mendorong PMI untuk menjadi lokomotif dalam pendidikan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat	PMI sebagai motor penggerak pendidikan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat
2.	Memperkuat kemitraan PMI dengan Pemerintah DIY melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Pendidikan khususnya dalam pengembangan Palang Merah Remaja (PMR) sebagai upaya membangun jiwa kerelawanan dikalangan siswa.	Dinas Kesehatan mendorong PMI untuk meningkatkan pengembangan PMR untuk membangun jiwa kerelawanan.	Peningkatan peran PMI dalam pengembangan PMR.
3.	Konsep Mitigasi Bencana Berbasis masyarakat yang terukur yang dimiliki oleh PMI seyogyanya menjadi acuan dalam pendidikan kebencanaan berbasis	Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan, strategi Pendidikan Aman	Melalui penelarasan penyelenggaraan pendidikan aman bencana pada satuan-satuan pendidikan, diharapkan layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang terdampak bencana maupun dalam kondisi khusus dapat terus berlangsung, termasuk

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
	sekolah maupun masyarakat guna membangun masyarakat tangguh dan tanggap bencana.	Bencana pada Satuan Pendidikan meliputi: a. penyusunan dan sinkronisasi kebijakan; b. pelibatan dan peningkatan partisipasi publik; dan c. penyelarasan penyelenggaraan pendidikan aman bencana pada Satuan Pendidikan dengan peran dan fungsi masing-masing institusi terkait.	memaksimalkan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran

3) Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) DIY

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
	Pemda DIY melalui TP-PKK hendaknya memaksimalkan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di DIY guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan harapan dapat mementaskan kemiskinan.	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui KEP Prima dilakukan di tingkat kalurahan / kelurahan dengan melibatkan peran aktif PKK	Kemiskinan yang disebabkan oleh perempuan kelompok rentan (eks PMI, penyintas kekerasan, perempuan kepala keluarga, keluarga dengan anggota keluarga ODGJ ODHA, ABH, dll)
	Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga diharapkan juga dapat menanggulangi angka kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak – anak/ remaja.	Penanggulangan kenakalan anak - anak / remaja di lakukan dengan pembinaan ketahanan keluarga melalui sosialisasi di Kalurahan / Kelurahan	Keluarga dengan pengasuhan yang kurang baik menjadi pemicu kenakalan anak - anak / remaja

4) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Meningkatkan pengawasan program siaran lokal dengan melibatkan masyarakat agar proaktif dalam menyampaikan aduan dan keberatan terhadap isi siaran	Melaksanakan sosialisasi persuasif tentang penyadaran masyarakat sebagai pengawas isi siaran lokal melalui berbagai saluran media. Selain itu juga mengajak agar masyarakat memanfaatkan saluran aduan Hotline KPID DIY (0274) 371444 maupun melalui aplikasi e-Lapor DIY da SP4N Lapor.	Mengurangi banyaknya konten siaran yang cenderung mengabaikan norma dan kearifan lokal serta nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila.
2.	Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat menjadi pengawas isi siaran Televisi dan Radio	Melaksanakan sosialisasi berupa forum/podcast maupun ILM baik di radio dan televisi tentang pentingnya pengawasan isi siaran, agar masyarakat mendapatkan konten informasi yang layak, benar, berimbang serta dilandasi etika dan moral.	Masyarakat menjadi lebih sadar akan perannya dalam pengawasan isi siaran, sehingga konten informasi yang hadir di tengah masyarakat lebih sehat dan mendidik.

5) Komisi Informasi DIY

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Mendorong regulasi tentang keterbukaan informasi publik agar KID DIY dapat membentuk PPIID hingga Desa/ Kelurahan.	Menyelenggarakan sosialisasi basis (sosbas) keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik di level pemerintahan paling bawah dan kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar tercipta keseimbangan antara hak masyarakat dan kewajiban badan publik dalam keterbukaan informasi publik di level basis. Selain itu juga mendorong masing-masing desa/kalurahan agar menerbitkan peraturan kalurahan (perkal) sebagai landasan pelaksanaan pelayanan informasi publik dan pembentukan PPIID di tingkat desa/kalurahan.	Meningkatkan pelayanan informasi publik yang dilakukan desa/kalurahan, sehingga masyarakat memperoleh hak-haknya dalam mengakses informasi yang ada di level pemerintahan paling bawah.
2.	Mendorong Jogja Smart Province terintegrasi dengan Smart Kabupaten/ Kota hingga ke Desa/ Kelurahan—Program IDMC—guna memberikan hak informasi kepada masyarakat.	Dalam proses penyusunan Masterplan JSP fase 2 (dua) akan dilaksanakan kolaborasi antara program Smart province Pemda DIY dengan program Smart City/Smart Regency milik Kabupaten/Kota di wilayah DIY, serta dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.	Semangat yang diusung pada fase 2 (dua) ini adalah kolaborasi sehingga diharapkan dapat mewujudkan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan publik berbasis digital.

6) Trans Jogja

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Perlunya edukasi ke masyarakat pentingnya naik transportasi umum (gerakan masyarakat cinta bus).	<ol style="list-style-type: none"> Bersama dengan Kementerian Perhubungan telah dilakukan Sosialisasi Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum (GNKAU) dengan tujuan untuk mengajak kembali masyarakat umum menggunakan angkutan umum. Pemda DIY telah melakukan sosialisasi angkutan umum kepada masyarakat dan sosialisasi kampanye keselamatan kepada siswa SD, SLTP dan SLTA. 	untuk menumbuhkan minat anak sekolah dan masyarakat menggunakan angkutan umum di wilayah DIY
2.	Mengembangkan rute yang mengintegrasikan antar jalur menuju fasilitas pendidikan (sekolah), rumah sakit, pasar dan fasilitas publik lainnya guna memudahkan akses yang efektif (waktu) dan efisien (biaya).	Telah dilakukan penempatan halte-halte Trans Jogja di lokasi pendidikan sebanyak 56 lokasi, kawasan bisnis dan perdagangan sebanyak 26 lokasi, rumah sakit dan tujuan wisata sebanyak 10 lokasi.	untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses angkutan umum
3.	Adanya regulasi terkait siswa sekolah yang belum berusia 17 tahun untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sendiri dan wajib menggunakan layanan transportasi umum.	Telah terdapat regulasi pembatasan larangan anak di bawah usia 17 tahun tertuang dalam Pasal 281 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sosialisasi kampanye keselamatan kepada siswa SD, SLTP dan SLTA	untuk memberikan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor terhadap masyarakat khususnya pelajar dalam memahami regulasi melalui kegiatan sosialisasi tentang keselamatan

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
			LLAJ dan memberikan alternatif transportasi yang aman yaitu angkutan umum
4.	Dengan semakin rumitnya transportasi di DIY dan guna meningkatkan layanan transportasi maka diperlukan Badan Usaha milik Pemerintah Daerah yang khusus bergerak dibidang transportasi dan perlu adanya kajian yang komprehensif agar layanan umum menjadi lebih efektif dan efisien.	Saat ini pemda DIY melalui PT. Anindya Mitra Internasional (AMI) selaku BUMD DIY berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem <i>Buy The Service</i> diberi ketugasan untuk mengelola angkutan umum perkotaan DIY. Pemda DIY terus melakukan optimalisasi peran PT AMI selaku operator angkutan perkotaan melalui koordinasi, pengendalian, dan pengawasan baik dari sisi organisasi pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan layanan Trans Jogja.	Penyelenggaraan layanan angkutan umum yang lebih efektif dan efisien.
5.	5. Mendorong Pemerintah Daerah untuk terus melakukan pengawasan terhadap operator (PT AMI), agar terjadi peningkatan kualitas layanan Trans Jogja. Peningkatan pelayanan yang harus dilakukan antara lain waktu tunggu penumpang yang semakin pendek, jangkauan rute yang semakin luas, serta kenyamanan armada.	Telah dibuat Standar Prosedur Operasional dan Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan layanan Trans Jogja sebagai pengendali dalam pengawasan pelaksanaan operasional Trans Jogja.	Penyelenggaraan layanan angkutan umum yang lebih efektif dan efisien
6.	Mengingatkan kepada operator PT AMI untuk terus menerus melakukan pembinaan kepada kru, khususnya driver, agar menjadi contoh/teladan dalam tertib budaya berlalulintas.	Pengawasan dilakukan setiap tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan dengan cara memantau dan melakukan evaluasi pencapaian SPM yang antara lain terkait dengan Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan dalam mengoperasikan angkutan perkotaan.	Tercapainya peningkatan kualitas layanan angkutan umum perkotaan yang mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan.

7) Lembaga Ombudsman Daerah (LOD)

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Menurunnya jumlah pelapor menjadi indikator bahwa LO DIY harus bekerja keras mendapat perhatian masyarakat agar masyarakat DIY yakin mendapatkan kualitas pelayanan publik yang baik. Untuk itu Pemda DIY hendaknya mendorong LOD untuk meningkatkan kinerjanya, agar LO DIY mampu mengoptimalkan	1. Menurunnya jumlah pelapor menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah telah sesuai dengan norma dan ketentuan peraturan perundang - undangan.	Menurunnya jumlah laporan pengaduan melalui layanan pengaduan LO DIY.

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
	capaian kerja yang lebih baik sehingga pelayanan publik yang berkualitas adalah benar-benar menjadi hak warga Negara.	2. Dalam rangka mengoptimalkan layanan, LO DIY telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan informasi terkait tugas, fungsi dan kewenangannya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan layanan penyelesaian pengaduan LO DIY dapat diakses oleh masyarakat luas.	

8) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Kolaborasi dengan sekolah atau perguruan tinggi yang memiliki kelas olahraga dalam rangka meningkatkan pembinaan atlet.	Kelas Khusus Olahraga telah diselenggarakan oleh delapan SMA Negeri di DIY yang tersebar di lima kabupaten/kota. Kelas Khusus ini diharapkan dapat turut meningkatkan kualitas pembinaan bagi para siswa yang memiliki bakat istimewa di bidang olahraga.	Kolaborasi dengan sekolah atau pelibatan sekolah untuk membina para calon atlet berbakat diharapkan dapat memperluas jangkauan pembinaan atlet muda di DIY dan kelak akan menghasilkan banyak atlet berbakat dari DIY
2.	Maksimalisasi rekrutmen atlet dan pembinaan atlet sejak dini.	Pembinaan atlet sejak dini sudah dirintis melalui kegiatan Pembinaan Atlet Berbakat yang banyak diikuti anak-anak di jenjang pendidikan dasar hingga menengah.	Rekrutmen dan pembinaan atlet sejak dini diharapkan mampu memunculkan bibit-bibit atlet unggul di DIY yang kelak akan mewakili DIY untuk berkompetisi pada ajang olahraga baik regional, nasional, maupun internasional dan diharapkan mampu memberikan prestasi terbaik mereka

9) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Pemda DIY harus dapat mendukung peningkatan peran dan fungsi Kwarda Pramuka DIY dengan memberikan pelatihan dan pembinaan terkait pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota.	Pemda DIY pada tahun 2021 telah menyalurkan hibah Gubernur kepada KWARDA DIY sebesar Rp1.000.000.000,00 dan dilanjutkan dengan Rp1.000.000.000,00 pada tahun 2022. Penyaluran hibah ini digunakan oleh Kwarda untuk peningkatan kapasitas anggota maupun pengurus melalui berbagai pelatihan dan kegiatan kepramukaan.	Penyaluran hibah Gubernur diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM anggota Kwarda melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan dan kegiatan kepramukaan

10) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	KPUD harus terus memperbaharui DPT secara berkala, karena selalu bermasalah setiap pelaksanaan Pemilu. Karena setiap momen pemilihan pasti terjadi peningkatan DPT dari pemilih pemula.	Melakukan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan melalui pembentukan Tim Pendidikan Politik yang melibatkan KPUD	Ketidaksesuaian antara rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPUD dengan jumlah pemilih yang ada di lapangan sehingga menimbulkan permasalahan pada saat penyelenggaraan pemilu.
2.	KPUD harus selalu menjalin komunikasi dan koordinasi secara berkala dengan partai politik. Tidak hanya dilakukan saat menjelang atau pasca Pemilu	Telah dilaksanakan kegiatan koordinasi melalui Tim verifikasi bantuan parpol dengan turut serta melibatkan KPUD dalam melaksanakan pendampingan hibah parpol	Masih lemahnya komunikasi dan koordinasi antara penyelenggara pemilu (KPUD dan Bawaslu DIY) dengan partai politik.
3.	Sosialisasi dan pelatihan tentang penyelenggara pemilu, khususnya untuk pemilih pemula	Telah dilaksanakan sosialisasi pendidikan politik bagi pemula	Masih rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi pemilih pemula dalam penyelenggaraan pemilu.

11) Badan Pengawas Pemilihan Umum DIY

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Untuk mengurangi pelanggaran di setiap agenda pemilu hendaknya Bawaslu bersama KPU turut memberikan pendidikan politik, khususnya bagi warga DIY terutama terkait bidang pengawasan	Telah dilaksanakan penguatan koordinasi dengan Bawaslu dan KPU melalui pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik. Dalam hal ini, Badan Kesbangpol melibatkan KPUD dan Bawaslu sebagai narasumber Sosialisasi	Masih terdapat pelanggaran dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam penyelenggaraan pemilu
2.	Memberikan edukasi dan pelatihan di bidang pengawasan kepada pemilih pemula	Telah dilaksanakan kegiatan edukasi dan pelatihan di bidang pengawasan kepada pemilih pemula melalui pemberian materi pengawasan dan role play pengawasan di kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik.	Masih rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi pemilih pemula dalam penyelenggaraan pemilu.

H. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Hasil Pemeriksaan BPK RI

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Pengelolaan Investasi Jangka Panjang pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Belum Memadai	Terhadap temuan terkait Pengelolaan Investasi Jangka Panjang pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Belum Memadai, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut: a).Penyesuaian terhadap PPAP BUKP Tahun Buku 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 985/02344/BAKD tentang Penyesuaian dan Alokasi Pembebanan Penyesuaian PPAP BUKP Tahun Buku 2021 dan ditindaklanjuti dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74/KEP/2022 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan BUKP DIY Tahun Buku 2021 dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 193/KEP/2022 tentang Pembagian Laba Bersih BUKP DIY Tahun Buku 2021; b). Terkait penagihan dana bergulir pada BUKP yang telah jatuh tempo, Pemda DIY telah melakukan penagihan dan BUKP telah mengembalikan dana bergulir yang telah jatuh tempo. Terkait denda keterlambatan pengembalian dana bergulir, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengeluarkan surat Pemberian Izin Penundaan Pembayaran Dana Bergulir dan Pembebasan Denda Dana Bergulir yang ditujukan kepada BUKP Kemantren Mergangsan, BUKP Kemantren Mantrijeron, BUKP Kemantren Jetis, dan BUKP Kapanewon Sanden.	Terhadap temuan terkait Pengelolaan Investasi Jangka Panjang pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Belum Memadai, permasalahan yang diselesaikan adalah: a).Penentuan Pembagian Laba pada BUKP belum mempertimbangkan kondisi keuangan yang sebenarnya. b).Penyelesaian Dana Bergulir pada Empat BUKP Terlambat dan Belum Dikenakan Denda.
2.	Belanja Hibah Barang pada Dinas Kebudayaan dan Hibah Uang pada Dinas Pariwisata Belum Sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hibah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Revisi Petunjuk Teknis Hibah Barang pada Dinas Kebudayaan, yang disesuaikan dengan regulasi tentang hibah. 2. Melaksanakan monev pelaksanaan hibah barang di Dinas Kebudayaan berupa pelaporan secara periodik dari bidang teknis pelaksanaan kegiatan hibah barang kepada kepala dinas. 	Pemberian Hibah mengacu petunjuk teknis, serta dilakukan monitoring secara berkala
3.	Pembebasan Tanah Untuk Jalan Segmen Garongan-Cogot Belum Didukung Penyediaan Dana Secara Memadai.	Pada tahun 2022 Pemda DIY telah menyelesaikan 50% pembebasan tanah untuk jalan Segmen Garongan-Cogot. Tindak lanjut penyelesaian selanjutnya menyesuaikan kebijakan Kementerian PUPR	Pembebasan tanah sesuai dengan perencanaan dan kajian

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
4.	Pelaksanaan belanja Modal pada beberapa kontrak tidak sesuai ketentuan	Atas pelaksanaan kontrak Belanja Modal yang tidak sesuai ketentuan ditindaklanjuti dengan beberapa proses penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku	Pelaksanaan kontrak Belanja Modal yang tidak sesuai ketentuan.
5.	Pengelolaan Piutang Pajak, Retribusi dan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belum Memadai.	Menyusun Peraturan Gubernur DIY nomor 49 tahun 2022 tentang tata cara penagihan piutang pajak daeran dan Peraturan Gubernur DIY nomor 48 tahun 2022 tentang Penghapusan piutang Pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan. Menyusun Peraturan Gubernur DIY tentang Tata cara Pelaksanaan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya mengatur tentang tatacara penghapusan piutang retribusi daerah dan Lain-lain PAD.	Lebih terkelolanya piutang pajak, retribusi dan piutang lain pendapatan asli daerah
6.	Pengelolaan Persediaan Obat Pada Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Belum Memadai.	Berkaitan dengan pengelolaan persediaan Obat yang belum memadai pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan, maka telah dilakukan penelusuran ulang dan ditemukan fakta bahwa tidak ada barang yang hilang dan jumlahnya telah sesuai. Adanya perbedaan pencatatan barang pada kartu stok dengan mutasi barang disebabkan ada barang yang belum tercatat pada kartu stok dan ada barang yang tercatat dua kali pada kartu stok. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan perbaikan pencatatan stok obat sesuai dengan data yang sebenarnya.	Pengelolaan Persediaan obat terkait perbedaan pencatatan kartu stok dengan mutasi barang.
7.	Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Tertib.	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan Inventarisasi barang Milik Daerah secara bertahap sebagai amanat Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah; Mengembangkan aplikasi barang milik daerah yang lebih terintegrasi dan mudah digunakan; Melakukan koordinasi dengan Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu secara lebih intensif. 	Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi tertib

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang Diselesaikan
1.	Menindaklanjuti rekomendasi yang sudah diberikan oleh BPK RI sebagaimana tertuang dalam Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, huruf a sampai dengan huruf q. DPRD DIY mendorong agar tindak lanjut penyelesaian hasil temuan pemeriksaan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.	Mendorong upaya tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait upaya tindak lanjut hasil temuan	Penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan BPK RI pada huruf a sd huruf q
2.	Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI terhadap Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Pada Pemda DIY Tahun Anggaran 2021. Hal ini mengingat upaya penanggulangan kemiskinan merupakan Program prioritas dan strategis di DIY.	<p>Dari 3 temuan pemeriksaan oleh BPK untuk 8 OPD (Bappeda, Dispar, DKP, Diskop UMK, Disperidag, DPU ESDM, Disdikpora dan Disnakertrans) dan TKPKD telah ditindak lanjuti sesuai dengan timeline yang telah dikirimkan kepada BPK pada tanggal 07 April 2022. Sampai saat ini dokumen tindak lanjut temuan atas pemeriksaan BPK telah masuk di Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) dan dalam proses verifikasi oleh BPK Pusat.</p> <p>Melakukan monitoring dan evaluasi program nangkis kab/kota serta OPD secara berkala</p>	Penyusunan SOP atau pedoman penanggulangan kemiskinan yang didalamnya memuat tentang mekanisme penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring serta identifikasi risiko dan mitigasi risiko pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
3.	Menyampaikan kepada DPRD DIY desain rencana tindaklanjut yang disusun untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan beberapa temuan tersebut.	<p>Tindaklanjut atas temuan hasil Pemeriksaan oleh BPK RI secara normatif akan dilakukan tindaklanjut sesuai regulasi berlaku dan dilakukan secara koordinatif bersama OPD di Lingkungan PEMDA DIY.</p> <p>Dikaitkan dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2021 maka berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan BPK diterima.</p> <p>Sedangkan secara teknis, tindaklanjut atas hasil pemeriksaan dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No12. Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (terutama Pasal 27- Pasal 28). Hal tersebut termasuk ketugasan APIP yang wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut</p>	Urusan Pengawasan - Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021

No.	Catatan/Rekomendasi Dewan	Tindak Lanjut yang Dilakukan	Permasalahan yang D diselesaikan
		hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	
4	Terhadap temuan kelemahan pengelolaan barang milik daerah, DPRD DIY meminta kepada Gubernur untuk memerintahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah lebih bersungguh-sungguh dan cermat dalam pengelolaan barang milik daerah. Hal ini untuk menghindarkan terhadap apa yang pernah terjadi pada tahun pertama Laporan Keuangan Pemda DIY meraih opini WTP, dimana BPK RI memberikan opini WTP tersebut dengan paragraf penjelasan yang meminta Pemda DIY untuk mengelola aset dan barang milik daerah secara cermat dan sungguh-sungguh.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Inventarisasi barang Milik Daerah secara bertahap sebagai amanat Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah 2. Mengembangkan aplikasi barang milik daerah yang lebih terintegrasi dan mudah digunakan 3. Melakukan koordinasi dengan Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu secara lebih intensif. 	Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi tertib



Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Pengalokasian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk menjamin tersedianya sebagian anggaran Kementerian/Lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diamanatkan bahwa penganggaran program dan kegiatan yang melalui mekanisme Tugas Pembantuan harus memperhatikan kemampuan keuangan Negara, keseimbangan pendanaan di daerah serta kebutuhan pembangunan daerah.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di daerah serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemda DIY pada Tahun 2022 dengan total alokasi sebesar Rp75.158.835.000,00 berhasil direalisasikan sebesar Rp68.280.809.289,00 atau mencapai sebesar 90,84%, dengan realisasi capaian kinerja fisik sebesar 100%. Pelaksanaan Tugas Pembantuan selama Tahun 2022 secara detail akan disampaikan pada Sub Bab OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pembantuan, secara umum adalah:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 12 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri.
12. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Pemda DIY selama tahun 2022, menerima beberapa Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui 2 (dua) Kementerian, yaitu:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kementerian Pertanian.

Uraian selengkapnya akan dijelaskan pada sub bab berikut.

D. OPD YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Anggaran Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY melalui 5 (lima) Satuan Kerja (Satker) yang terdiri dari:

Tabel 4.1. Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2022

No	Kementerian/ Lembaga	No. DIPA	Satuan Kerja	Pagu Anggaran
1	Kementerian Pertanian	SP DIPA-018.03.4.049087/2022	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	9.395.083.000
2	Kementerian Pertanian	SP DIPA-018.04.4.049088/2022	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	3.404.560.000
3	Kementerian Pertanian	SP DIPA-018.05.4.049089/2022	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DIY	1,963,289,000

No	Kementerian/ Lembaga	No. DIPA	Satuan Kerja	Pagu Anggaran
4	Kementerian Pertanian	SP DIPA-018.06.4.049090/2022	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	27,297,815,000
5	Kementerian Pertanian	SP DIPA-018.08.4.049094/2022	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	7.699.752.000

Sumber : DPKP DIY, 2023

Adapun rincian pelaksanaan pada masing-masing satuan kerja adalah sebagai berikut.

a. Satker Tanaman Pangan (049087)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.884.015.000	1.821.578.425	96,69	100
Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1.884.150.000	1.821.578.425	96,69	100
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	7.015.680.000	6.987.022.267	99,59	100
Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	5.451.680.000	5.443.795.300	99,86	100
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	354.000.000	333.614.400	94,24	100
Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	1.210.000.000	1.209.612.567	99,97	100
Program Dukungan Manajemen	495.388.000	487.481.578	98,40	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	495.388.000	487.481.578	98,40	100

Sumber : DPKP DIY, 2023

b. Satker Hortikultura (049088)

Kegiatan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.971.560.000	1.936.024.222	98,20	100
Kegiatan: Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1.971.560.000	1.936.024.222	98,20	100
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.233.000.000	1.208.761.975	97,66	100
Kegiatan:Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	350.800.000	342.585.175	97,66	100
Kegiatan:Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	882.200.000	866.176.800	98,18	100

Kegiatan/Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Dukungan Manajemen	200.000.000	195.455.300	97,73	100
Kegiatan: Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	200.000.000	195.455.300	97,73	100

Sumber: DPKP DIY, 2023

c. Satker Perkebunan (049089)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.798.626.000	1.786.320.354	99,32	100
Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan	767.725.000	766.205.718	99,80	100
Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	795.955.000	786.483.097	98,81	100
Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	234.946.000	233.631.539	99,44	100
Program Dukungan Manajemen	164.663.000	164.325.862	99,80	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	164.663.000	164.325.862	99,80	100

Sumber: DPKP DIY, 2023

d. Satker Peternakan dan Kesehatan Hewan (049090)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	491.200.000	478.822.745	97,48	100
Kegiatan Pengembangan Pengelohan dan Pemasaran Hasil Ternak	491.200.000	478.822.745	97,48	100
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	26.302.475.000	19.671.954.659	74,79	100
Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak	137.450.000	125.678.700	91,44	100
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	16.932.178.000	11.185.921.729	66,06	100
Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	8.362.477.000	7.503.229.780	89,72	100
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	870.370.000	857.124.450	98,48	100

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Dukungan Manajemen	504.140.000	499.673.600	99,11	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	504.140.000	499.673.600	99,11	100

Sumber: DPKP DIY, 2023

e. Satker Sarana dan Sarana Pertanian (049094)

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	7.047.212.000	7.031.461.800	99,78	100
Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	5.489.000.000	5.488.828.250	100	100
Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	90.000.000	85.799.550	95,33	100
Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	1.454.195.000	1.442.817.000	99,22	100
Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	14.017.000	14.017.000	100	100
Program Dukungan Manajemen	652.540.000	788.617.280	98,20	100
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	652.540.000	645.208.465	98,88	100

Sumber: DPKP DIY, 2023

f. Permasalahan dan Solusi

1) Pemasalahan

- a) Adanya *refocusing* dan rasionalisasi anggaran saat kegiatan sudah dilaksanakan.
- b) Adanya syarat dan ketentuan dari pusat bahwa bantuan pemerintah (banpem) harus menggunakan *polygon* yang diinput melalui *e-reporting* Kementerian Pertanian (Kementan), tetapi sejak bulan April 2022 terjadi gangguan pada *server* Kementan akibat serangan *hacker* yang menyebabkan Penyuluh di kecamatan tidak dapat

menambah *polygon* di aplikasi *e-reporting* untuk banpem tahun 2022.

- c) Petani DIY kurang berminat untuk melaksanakan kegiatan pengembangan padi biofortifikasi.
- d) Ketidaksesuaian sasaran pengalokasian anggaran oleh Pusat dengan usulan daerah. Alokasi anggaran Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat untuk Kawasan Obat yang diberikan oleh Pusat adalah untuk intensifikasi Lidah Buaya, sedangkan yang diusulkan oleh DIY adalah untuk komoditas Jahe atau Kencur.
- e) Perubahan Petunjuk Teknis (Juknis) saat kegiatan sudah berlangsung menyebabkan serapan anggaran tidak optimal
- f) Adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak sapi berdampak terjadinya perubahan penganggaran dan prioritas dalam pelaksanaan kegiatan

2) *Solusi*

- a) Pelaksanaan kegiatan selanjutnya menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan target baru yang ditetapkan.
- b) Pengecekan dan verifikasi usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) dilakukan secara manual dari data excel yang telah dipublikasikan melalui *e-reporting* sejak bulan April 2022
- c) Melakukan koordinasi dengan tim Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo untuk penambahan Luas Tambah Tanam (LTT) dan penyesuaian kebijakan Pemda untuk kegiatan pengembangan padi biofortifikasi dalam rangka pencegahan *stunting*.
- d) Meminta kejelasan sasaran kegiatan dari Pusat sehingga saat perencanaan sudah diketahui komoditas yang akan dikembangkan dan daerah dapat mengusulkan sesuai potensi dan kebutuhan yang ada di wilayahnya.

- e) Berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian RI berkaitan dengan penyusunan dan penetapan Juknis sebelum pelaksanaan kegiatan serta tidak melakukan perubahan Juknis di tengah jalan.
- f) Konsultasi dan koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian maupun *stakeholder* lainnya mengenai kebijakan, program, dan penganggaran untuk penanganan PMK sehingga kebutuhan DIY yang belum teranggarkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat diakomodir oleh Pusat, ada sinkronisasi langkah-langkah penanganan PMK dan pembagian tugas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harapannya PMK dapat segera ditanggulangi dan apabila ditemukan kendala/permasalahan dapat segera diantisipasi dan diselesaikan.

2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY

Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY pada tahun 2022 terdapat 2 (Dua) anggaran yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air dan Drainase dan oleh Bidang Bina Marga. Anggaran yang berada di Bidang Sumber Daya Air dan Drainase dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (OPD TP-OP) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas PUP ESDM DIY) dengan kode Satker 049136. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, di wilayah administratif Pemerintah Daerah DIY terdapat dua Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang luas arealnya lebih dari 3.000 ha yang di Tugas Pembantuan-kan, yaitu Jaringan Irigasi Van der Wicjk (luas 5.159 ha) dan Jaringan Irigasi Kalibawang (7.152 ha).

Tugas pembantuan bidang Bina Marga TA 2022 meliputi kegiatan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 51,66 km, pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 1.301,6 m, pemeliharaan berkala jembatan sepanjang 601,9 m melalui Perjanjian Kinerja TA. 2022 untuk OPD Dinas PUP dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas pembantuan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Bina Marga.

a. Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PUP-ESDM DIY

Tabel 4.2. Pagu Anggaran Tugas Pembantuan di Dinas PUPESDM DIY Tahun 2022

No	Direktorat Jenderal	Pagu Anggaran
1	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	6.381.416.000,00
2	Direktorat Jenderal Bina Marga	19.016.920.000,00
JUMLAH		25.398.336.000,00

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2022

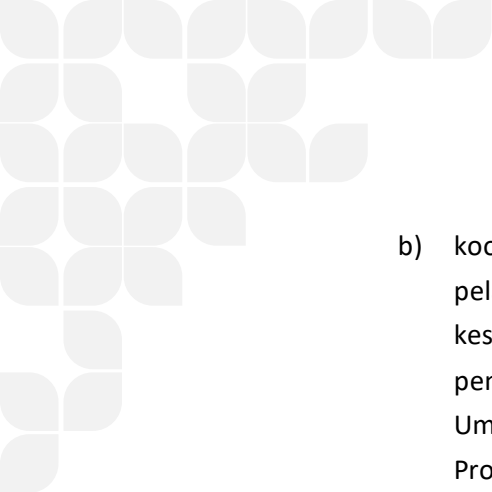
Program dan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, dilakukan melalui Bidang Sumber Daya Air dan Drainase dan Bidang Bina Marga meliputi:

- a. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, meliputi:
 - 1) Operasi Rutin.
 - a) Operasi Jaringan Irigasi Van Der Wicjk seluas 5.152 ha.
 - b) Operasi Jaringan Irigasi Kalibawang seluas 7.159 ha.
 - 2) Pemeliharaan Berkala.
 - a) Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Van Der Wicjk sepanjang 0,16 Km.
 - b) Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Kalibawang sepanjang 0,20 Km.

- 3) Pemeliharaan Rutin.
 - a) Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi Van Der Wicjk sepanjang 45,41 Km.
 - b) Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi Kalibawang sepanjang 176,25 Km.
- 4) Penyusunan.
 - a) Penyusunan Pelaporan Sistem manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Jaringan Irigasi Van Der Wicjk di wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul 1 Laporan.
 - b) Penyusunan Pelaporan Sistem manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Jaringan Irigasi Kalibawang di wilayah Kabupaten Kulonprogo 1 laporan.
- 5) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.
 - a) Administrasi Kegiatan yaitu untuk Operasional kegiatan administrasi perkantoran seperti pembelian alat tulis kantor (ATK), bahan komputer, surat menyurat, jilid dan fotocopi, makan minum rapat, perjalanan dinas, dan pembuatan pelaporan maupun pertanggungjawaban keuangan.
 - b) Sistem Pelaporan Secara Elektronik (*E-Monitoring*) yaitu kegiatan pelaporan progres fisik dan keuangan secara elektronik yang diinput sebulan 2 (dua) kali melalui aplikasi berbasis *web* yang terintegrasi dengan aplikasi *e-proc* dari LKPP sebagai monitoring dan evaluasi (monev) oleh Kementerian PUPR.
- 6) Operasional Satker.

Operasional Satker yaitu kegiatan untuk pembelian belanja bahan, perjalanan dinas dalam daerah, serta honorarium Pejabat Perbendaharaan internal satker. Bidang Bina Marga, meliputi:

 - a) Penyelenggaraan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh kegiatan dilingkungan OPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) Daerah Istimewa Yogyakarta;



b) koordinasi keterpaduan terhadap kesiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagai suatu kesatuan gerak dan langkah untuk mencapai sasaran pembangunan fisik dan fungsional OPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

b. Bidang Bina Marga, meliputi:

- 1) Penyelenggaraan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh kegiatan dilingkungan OPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) koordinasi keterpaduan terhadap kesiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagai suatu kesatuan gerak dan langkah untuk mencapai sasaran pembangunan fisik dan fungsional OPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

b. Pengelolaan Sumber Daya Air

Tujuan Program Ketahanan Sumber Daya Air melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air serta penanggulangan darurat akibat bencana adalah untuk mengoperasikan, menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi, perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan, sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen melalui kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air adalah melaksanakan tata kelola internal melalui administrasi umum dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.



Gambar 4.1. Operasi Jaringan Irigasi



Gambar 4.2. Perbaikan Jaringan Irigasi di Kalurahan Sukoreno



Gambar 4.3. Pemeliharaan Berkala DI Van Der Wijk

Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Bina OP Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp6.381.416.000,00 dengan perincian untuk Kegiatan Operasi Rutin Rp2.945.590.000,00 terealisasi Rp2.945.590.000,00 atau 100% untuk Pemeliharaan Berkala sebesar Rp1.017.882.000,- terealisasi sebesar Rp1.015.742.500,00 atau 99,79%

untuk Pemeliharaan Rutin Rp1.767.489.000,00 terealisasi Rp1.767.078.640,00 atau 99,98% untuk Penyusunan Rp29.040.000,00 terealisasi sebesar Rp29.040.000,00 atau 100% dan untuk Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp621.415.000,00 yang terealisasi sebesar Rp600.239.850,00 atau 96,59% sehingga total keseluruhan realisasi anggaran di Satker Dinas PUP ESDM DIY pada tahun 2022 adalah sebesar Rp6.357.690.990,00 atau 99,63% yang kesemua anggaran dikegiatan tersebut dialokasikan pada DIPA APBN (Rupiah Murni) Satuan Kerja Dinas PUP-ESDM DIY Tahun Anggaran 2022, sedangkan perincian realisasi pada masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3. Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2022

NO	Program/Kegiatan/Paket	Sasaran	PAGU TOTAL *)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK
				Rp *)	%	%
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY (049136)		6.381.416 .000	6.357.690 .990	99,63	100
	(033.06.FC) Program Ketahanan Sumber Daya Air		5.760.001 .000	5.757.451 .140	99,96	100
	(5300) Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA dan Penanggulangan Darurat akibat Bencana		5.760.001 .000	5.757.451 .140	99,96	100
1	Operasi Rutin Jaringan Irigasi Van Der Wicjk	5.159 ha	1.071.313 .000	1.071.313 .000	100	100
2	Operasi Rutin Jaringan Irigasi Kalibawang	7.152 ha	1.874.277 .000	1.874.277 .000	100	100
3	Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Van Der Wicjk	0,16 Km	174.353 .000	174.283 .000	99,96	100
4	Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Kalibawang	0,20 Km	843.529 .000	841.459 .500	99,75	100
5	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Van Der Wicjk	45,41 Km	1.009.715 .000	1.009.650 .640	99,99	100
6	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kalibawang	176,25 Km	757.774 .000	757.428 .000	99,95	100
7	Penyusunan Pelaporan OP Irigasi Van Der Wicjk	1 Lap	15.420 .000	15.420 .000	100	100
8	Penyusunan Pelaporan OP Irigasi Kalibawang	1 Lap	13.620 .000	13.620 .000	100	100
	(033.06.WA) Program Dukungan Manajemen		621.415 .000	600.239 .850	96,59	100
	<i>(2421) Dukungan Manejemen Ditjen Sumber Daya Air</i>		621.415 .000	600.239 .850	96,59	100

NO	Program/Kegiatan/Paket	Sasaran	PAGU TOTAL *)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK
				Rp *)	%	%
9	Administrasi Kegiatan	12 Bln	375.383 .000	369.507 .850	98,43	100
10	Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring)	28 Lap	11.072 .000	11.072 .000	100	100
11	Operasional Satker	12 Bln	234.960 .000	219.660 .000	93,49	100

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023

c. Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan

Tabel 4.4. Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Minor Jalan di DIY Tahun 2022

Ruas Penanganan Pemeliharaan Rutin Kondisi			
No.	Ruas	Panjang	
1	Jalan Arteri Selatan (Yogyakarta)	0,9	Km
2	Jalan Pemuda (Bantul)	0,5	Km
3	Jalan Kol. Sugiyono (Bantul)	0,5	Km
TOTAL		1,90	Km

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023 (data diolah)

Tabel 4.5. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2022

Ruas Penanganan Pemeliharaan Rutin			
No.	Ruas	Panjang	
	PPK TP 01 Provinsi DIY		
1	Jalan Arteri Selatan (Yogyakarta)	9,2	Km
2	Jalan Yogyakarta-Bts Kota Bantul	5,0	Km
3	Jalan Pemuda (Bantul)	0,1	Km
4	Jalan Brigjen Katamso (Bantul)	0,64	Km
5	Jalan P. Senopati (Bantul)	0,34	Km
6	Jalan Bantul-Sp. Weden (Bantul)	1,29	Km
7	Jalan Sp. Weden-Bakulan	1,28	Km
8	Jalan Bakulan-Kretek	8,84	Km
9	Jalan Kretek - Parangtritis	3,8	Km
TOTAL		277	Km

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023 (data diolah)

Tabel 4.6. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kondisi di DIY Tahun 2022

Ruas Penanganan Pemeliharaan Rutin Kondisi			
No.	Ruas	Panjang	
1	Jalan Arteri Selatan (Yogyakarta)	4,6	Km
2	Jalan Yogyakarta-Bts Kota Bantul	1,3	Km
3	Jalan Kretek - Parangtritis	0,97	Km
TOTAL		111	Km

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023 (data diolah)

Tabel 4.7. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Penanganan Penunjang di DIY Tahun 2022

Ruas Penanganan Penunjang/Holding			
No.	Ruas	Panjang	
1	Jalan Arteri Selatan (Yogyakarta)	4,48	Km
2	Jalan Yogyakarta-Bts Kota Bantul	1,68	Km
3	Jalan Pemuda (Bantul)	1,34	Km
4	Jalan Brigjen Katamso (Bantul)	1,1	Km
5	Jalan P. Senopati (Bantul)	0,8	Km
6	Jalan Bantul-Sp. Weden (Bantul)	3,1	Km
7	Jalan Sp. Weden-Bakulan	0,2	Km
8	Jalan Bakulan-Kretek	0,1	Km
9	Jalan Kretek - Parangtritis	1,5	Km
TOTAL		179	Km

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023 (data diolah)

Tabel 4.8. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Pemeliharaan Berkala Jembatan di DIY Tahun 2022

NO.	NAMA JEMBATAN	PANJANG		PENANGANAN
1	FO Janti	455,5	m	Pemel Rutin
2	FO Janti	455,5	m	Pemel Rutin
3	Tekik	6,7	m	Pemel Rutin
4	Code	32,3	m	Pemel Rutin
5	Winongo A	31,6	m	Pemel Rutin
6	Bedog	45,2	m	Pemel Rutin
7	Bakulan	21,5	m	Pemel Rutin
8	Kretek	246,4	m	Pemel Rutin
9	Bolong	6,9	m	Pemel Rutin
10	Winongo	31	m	Pemel Berkala
11	Fo Janti	502,5	m	Pemel Berkala
12	Gajah Wong	45,9	m	Pemel Berkala
13	Widuri	25,5	m	Pemel Berkala
JUMLAH		1.903,5	m	

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023 (data diolah)

Tabel 4.9. Target dan Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Jalan di DIY TA 2022

No	Kegiatan/Paket	Pagu DIPA (Rp 000,-)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp 000,-)	(%)	
1	Rehabilitasi Minor Jalan	6.348.708	6.346.263	99,96	100
2	Pemeliharaan Rutin Jalan	8.416.788	8.416.468	100	100
A	Pemeliharaan Rutin	2.404.013	2.404.013	100	100
B	Pemeliharaan Rutin Kondisi	1.037.556	1.037.556	100	100
C	Penunjang / Holding	4.758.095	4.758.094	100	100
D	Pembersihan Saluran Drainase	217.124	216.805	99,85	100
3	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.198.564	1.198.556	100	100

No	Kegiatan/Paket	Pagu DIPA (Rp 000,-)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp 000,-)	(%)	
4	Rehabilitasi Jembatan	2.353.674	2.353.673	100	100
JUMLAH		18.534.858	18.531.767	100	100

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023 (data diolah)

Tabel 4.10. Target dan Realisasi Kegiatan Padat Karya di DIY TA 2022

No	Kegiatan/Paket	Pagu DIPA (Rp 000,-)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp 000,-)	(%)	
1	Pembersihan Saluran Drainase Ruas Jalan Yogyakarta-Wonosari-Duwet	217.124	216.805	99,85	100
JUMLAH		217.124	216.805	99,85	100

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023 (data diolah)

Tabel 4.11. Cakupan Perjanjian Kinerja TP Kegiatan Penyelenggaraan Jalan TA 2022

Uraian	Target			Realisasi			Tingkat Capaian (%)
	Jalan		Jembatan (M)	Jalan		Jembatan (M)	
	Efektif (KM)	Fungsional (KM)		Efektif (KM)	Fungsional (KM)		
Cakupan TP	-	51,66	1.903,5	-	51,66	1.903,5	100,00

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023 (data diolah)

Pada tahun 2022 ini wajib dilakukan pengukuran kinerja dengan indikator yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematis dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing Instansi Pemerintah. Proses pengukuran kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam proses pengukuran kinerja dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Pengukuran indikator kinerja di Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.12. Pengukuran Kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pelayanan Jalan Nasional	Indikator Kinerja Output			
		Rehabilitasi Minor	1,9 km	1,9 km	100
		Pemeliharaan Rutin Jalan	51,66 km	51,66 km	100
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.301,6 m	1.301,6 m	100
		Rehabilitasi Jembatan	601,9 m	601,9 m	100

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023 (data diolah)

Satker yang diampu Bidang Bina Marga Dinas PUP & ESDM DIY mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp 19.016.920.000,00 dan kegiatan padat karya sebesar Rp 217.124.000,00. Berdasarkan laporan data SAI realisasi keuangan secara total sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 19.008.727.000,00 dengan jumlah sisa anggaran sebesar Rp 8.193.000,00 dan rata-rata persentase realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 100%. Realisasi kegiatan padat karya adalah sebesar Rp 216.805.000,00 dengan jumlah sisa anggaran sebesar Rp 319.000,00 dan rata-rata persentase realisasi anggaran padat karya tahun 2022 sebesar 99,85 %. Secara keseluruhan penerapan sistem akuntabilitas kinerja tugas pembantuan penyelenggaraan bidang jalan pada tahun 2022 telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.



Gambar 4.4. Pelaksanaan Pekerjaan Ruas Yogyakarta-Bts Kota Bantul

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023



Gambar 4.5. Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Bedog
 Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023



Gambar 4.6. Pelaksanaan Pekerjaan Ruas Arteri Selatan (Yogyakarta)
 Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

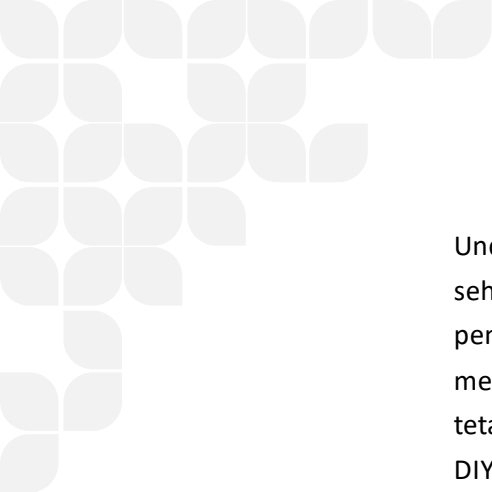


Gambar 4.7. Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Minor Ruas Jalan Arteri Selatan (Yogyakarta)
 Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2023

d. Permasalahan dan Solusi.

1) Permasalahan:

- a) Masih adanya konflik kepentingan pemakai air, antara petanian dan petani padi terutama di Jaringan Irigasi Van der Wijck, sehingga mengakibatkan alokasi air ke lahan sawah terganggu;
- b) Masih kurangnya penertiban pada pelanggaran pemanfaatan sempadan saluran, serta bangunan liar diatas saluran;
- c) Masih ada jalan yang mengalami perubahan status dari jalan provinsi ke jalan nasional belum diserahkan sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan permasalahan dalam pemeliharannya. Ada aset jalan yang seharusnya sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian PUPR) tetapi belum diserahkan/ masih tercatat menjadi aset Pemda DIY.

2) Solusi:

- a) Perlu pelatihan para petugas Operasi dan Pemeliharaan secara berkesinambungan, selain untuk penyegaran ketugasan, juga sebagai bahan evaluasi hasil kerja;
- b) Melaksanakan penertiban pada pelanggaran pemanfaatan sarana prasarana sumber daya air yang belum berijin ke BBWS Serayu Opak selaku pemegang kewenangan.
- c) Perlu kami sampaikan bahwa Penetapan status ruas Jalan Nasional didasarkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 248/Kpts/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) dan kewenangan Jalan Provinsi didasarkan pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 118/KEP/2016 Tanggal 26 Mei 2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi. Untuk Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan perlu segera dilaksanakan serah terima aset jalan dari Pemda DIY kepada Kementerian PUPR RI khususnya aset jalan yang mengalami perubahan status dari jalan provinsi ke jalan nasional.



Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY

Terdapat 5 kewenangan Keistimewaan DIY sebagaimana termuat di dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yaitu, Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. Tujuan pengaturan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut beraras pada tujuan keistimewaan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yakni: (1) Mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (2) Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; (3) Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) Menciptakan pemerintahan yang baik; dan (5) Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa

A. URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR. URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. Kondisi Umum

Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY merupakan kewenangan keistimewaan dalam melaksanakan proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY seperti yang telah diamanatkan pada UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Ketentuan proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

ditindaklanjuti dengan Perdais DIY Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diampu oleh 4 OPD dari lingkungan Pemda DIY. Pelaksanaan urusan diampu dalam 1 Program, 1 kegiatan, dan 4 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp7.139.034.200,00. Persentase realisasi fisik sampai dengan tahap akhir pada urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sebesar 99,32% terhadap target tahun 2022. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan tahap Akhir sebesar Rp6.247.465.071,00 (setara 87,51% terhadap target satu tahun).

Tabel 5.1. Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Tata Cara Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	
	Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	7.139.034.200	6.247.465.071	87,51	99,32
	Pemda DIY	7.139.034.200	6.247.465.071	87,51	99,32
1	Biro Tata Pemerintahan	399.160.000	236.637.536	59,28	100,00
2	Biro Umum. Hubungan Masyarakat dan Protokol	3.358.301.000	3.174.049.562	94,51	100,00
3	Sekretariat DPRD	2.679.743.000	2.147.899.773	80,15	98,18
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	701.830.200	688.878.200	98,15	100,00

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2023

Kinerja Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. 1 kali Upacara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, 2 kali Ramah Tamah Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, 1 kali *Open House* Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY;
- b. Informasi penyelenggaraan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang tersebarluaskan melalui 5 media;

- c. 1 Keputusan DPRD tentang Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, 1 Keputusan DPRD tentang Tata Tertib Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, 1 Rekomendasi LKPJ AMJ Periode 2017-2022, 52 kali Sosialisasi Tahapan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. 1 kali Fasilitasi Penyiapan Visi dan Misi Gubernur DIY Tahun 2022-2027;
- e. 1 Laporan pemberhentian, penetapan dan pengesahan serta pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur.



Gambar 5.1. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Realisasi keuangan pada Urusan Tata Cara merupakan yang terendah diantara kelima Urusan Keistimewaan karena realisasi keuangan pada kegiatan tersebut hanya sebesar 59,28%. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait pemberhentian, penetapan dan pengesahan serta pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidak banyak dilaksanakan secara luring karena pelaksanaan kegiatan berjalan baik dan lancar sehingga terdapat efisiensi anggaran yang cukup besar pada anggaran bersangkutan.
- 2) Sosialisasi Tahapan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD DIY tercapai 51 kali dari target 55 kali.

b. Solusi

- 1) Mengawal mitra Perangkat Daerah yang mampu program/kegiatan/sub kegiatan Urusan Keistimewaan Urusan Tata Cara untuk melakukan peningkatan kualitas perencanaan anggaran agar dapat meminimalisasi sisa anggaran (SilPA).
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan yang memperhatikan tata kala pelaksanaan kegiatan agar persiapan dan koordinasi kegiatan terjalin lebih baik antar pihak terkait sehingga implementasi kegiatan lebih optimal

B. URUSAN KELEMBAGAAN

1. Kondisi Umum

Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY merupakan Kewenangan keistimewaan dalam melaksanakan pengorganisasian yang diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat yang berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Dalam perspektif keistimewaan ini, kelembagaan di DIY dibentuk didasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat, yaitu dengan cara memperkuat relasi antara provinsi dengan kabupaten/kota yang tidak hanya sekedar struktur di provinsi tetapi juga pola hubungannya dengan kabupaten/kota sehingga koordinasi dan integrasi bisa berjalan optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Bentuk kelembagaan DIY ini bisa menjadi keunggulan komparatif DIY dibanding daerah otonomi lain. dan agar dapat menyentuh langsung pelayanannya ke masyarakat/rakyat, kemudian diberikan penugasan urusan keistimewaan DIY kepada Kabupaten/Kota sampai Kalurahan/Kelurahan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah, kecamatan maupun desa, dengan mendasarkan

Pergub DIY Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Urusan kelembagaan diampu oleh 31 OPD dari lingkungan Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta 64 Kapanewon. Pelaksanaan urusan diampu dalam 1 Program, 9 kegiatan, dan 39 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp41.581.229.524,00. Persentase realisasi fisik sampai dengan tahap akhir pada urusan kelembagaan sebesar 100% terhadap target satu tahun. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan tahap Akhir sebesar Rp39.685.153.084,00 (setara 95,44% terhadap target satu tahun).

Tabel 5.2. Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Kelembagaan Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	
Kelembagaan Pemerintah Daerah		41.581.229.524	39.685.153.084	95,44	100,00
	Kota Yogyakarta	212.786.250	195.623.689	91,93	100,00
1	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	124.064.000	107.192.689	86,40	100,00
2	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta	88.722.250	88.431.000	99,67	100,00
Kabupaten Bantul		4.142.999.000	4.008.605.496	96,76	100,00
1	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	390.000.000	382.672.800	98,12	100,00
2	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	554.390.000	553.868.046	99,91	100,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	137.496.500	83.988.650	61,08	100,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	536.250.000	532.100.000	99,23	100,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1.176.354.500	1.107.520.500	94,15	100,00
6	Bagian Tata Pemerintahan Setda Bantul	223.540.000	223.540.000	100,00	100,00
7	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	354.868.000	354.845.500	99,99	100,00
8	Kapanewon Banguntapan	45.300.000	45.300.000	100,00	100,00

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	
9	Kapanewon Bantul	45.300 .000	45.300 .000	100,00	100,00
10	Kapanewon Imogiri	45.300 .000	45.300 .000	100,00	100,00
11	Kapanewon Jetis	45.300 .000	45.300 .000	100,00	100,00
12	Kapanewon Kasihan	45.300 .000	45.300 .000	100,00	100,00
13	Kapanewon Pleret	45.300 .000	45.300 .000	100,00	100,00
14	Kapanewon Sedayu	45.300 .000	45.300 .000	100,00	100,00
15	Kapanewon Sewon	45.300 .000	45.300 .000	100,00	100,00
16	Kapanewon Bambanglipuro	45.300 .000	45.300 .000	100,00	100,00
17	Kapanewon Dlingo	45.300 .000	45.300 .000	100,00	100,00
18	Kapanewon Kretek	45.300 .000	45.270 .000	99,93	100,00
19	Kapanewon Pajangan	45.300 .000	45.300 .000	100,00	100,00
20	Kapanewon Pandak	45.300 .000	45.300 .000	100,00	100,00
21	Kapanewon Piyungan	45.300 .000	45.300 .000	100,00	100,00
22	Kapanewon Pundong	45.300 .000	45.300 .000	100,00	100,00
23	Kapanewon Sanden	45.300 .000	45.300 .000	100,00	100,00
24	Kapanewon Srandakan	45.300 .000	45.300 .000	100,00	100,00
	Kabupaten Kulon Progo	3.438.368 .500	3.202.274 .033	93,13	100,00
1	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo	985.066 .000	949.375 .383	96,38	100,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo	1.386.730 .500	1.330.208 .400	95,92	100,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulonprogo	325.069 .000	313.829 .900	96,54	100,00
4	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Kulonprogo	226.292 .000	116.110 .000	51,31	100,00
5	Inspektorat Daerah Kabupaten Kulonprogo	112.980 .000	97.728 .800	86,50	100,00
6	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulonprogo	202.231 .000	196.219 .000	97,03	100,00

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	
7	Kapanewon Galur	14.964 .400	14.767 .250	98,68	100,00
8	Kapanewon Temon	19.807 .000	19.660 .500	99,26	100,00
9	Kapanewon Wates	39.405 .300	39.405 .300	100,00	100,00
10	Kapanewon Panjatan	14.000 .000	13.983 .500	99,88	100,00
11	Kapanewon Lendah	15.639 .100	15.467 .600	98,90	100,00
12	Kapanewon Sentolo	9.745 .000	9.735 .000	99,90	100,00
13	Kapanewon Pengasih	14.159 .000	14.050 .500	99,23	100,00
14	Kapanewon Kokap	14.071 .200	13.750 .400	97,72	100,00
15	Kapanewon Girimulyo	11.209 .000	10.982 .500	97,98	100,00
16	Kapanewon Nanggulan	14.000 .000	14.000 .000	100,00	100,00
17	Kapanewon Samigaluh	20.000 .000	20.000 .000	100,00	100,00
18	Kapanewon Kalibawang	13.000 .000	13.000 .000	100,00	100,00
	Kabupaten Gunungkidul	2.602.953 .600	2.523.924 .574	96,96	100,00
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul	616.331 .000	564.407 .000	91,58	100,00
2	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gunungkidul	311.675 .000	305.435 .500	98,00	100,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul	215.633 .100	213.575 .100	99,05	100,00
4	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul	249.396 .000	240.302 .259	96,35	100,00
5	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul	702.439 .000	694.726 .715	98,90	100,00
6	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten Gunungkidul	40.019 .500	38.022 .500	95,01	100,00
7	Kapanewon Wonosari	25.970 .000	25.970 .000	100,00	100,00
8	Kapanewon Nglipar	25.970 .000	25.970 .000	100,00	100,00
9	Kapanewon Playen	25.970 .000	25.970 .000	100,00	100,00
10	Kapanewon Patuk	25.970 .000	25.970 .000	100,00	100,00

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	
11	Kapanewon Paliyan	25.970 .000	25.970 .000	100,00	100,00
12	Kapanewon Semanu	25.970 .000	25.970 .000	100,00	100,00
13	Kapanewon Karang Mojo	25.970 .000	25.970 .000	100,00	100,00
14	Kapanewon Gedangsari	25.970 .000	25.970 .000	100,00	100,00
15	Kapanewon Tepus	25.970 .000	25.970 .000	100,00	100,00
16	Kapanewon Ponjong	25.970 .000	25.965 .500	99,98	100,00
17	Kapanewon Rongkop	25.970 .000	25.970 .000	100,00	100,00
18	Kapanewon Semin	25.970 .000	25.970 .000	100,00	100,00
19	Kapanewon Ngawen	25.970 .000	25.970 .000	100,00	100,00
20	Kapanewon Saptosari	25.970 .000	25.970 .000	100,00	100,00
21	Kapanewon Girisubo	25.970 .000	25.970 .000	100,00	100,00
22	Kapanewon Tanjungsari	25.970 .000	25.970 .000	100,00	100,00
23	Kapanewon Purwosari	25.970 .000	25.970 .000	100,00	100,00
24	Kapanewon Panggang	25.970 .000	25.970 .000	100,00	100,00
	Kabupaten Sleman	1.795.195 .700	1.728.733 .587	96,30	100,00
1	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman	366.588 .000	354.778 .050	96,78	100,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Sleman	112.380 .700	104.448 .195	92,94	100,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman	404.259 .000	401.327 .572	99,27	100,00
4	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman	425.708 .000	402.680 .570	94,59	100,00
5	Kapanewon Gamping	28.500 .000	27.100 .000	95,09	100,00
6	Kapanewon Godean	28.600 .000	28.600 .000	100,00	100,00
7	Kapanewon Moyudan	28.100 .000	28.100 .000	100,00	100,00
8	Kapanewon Minggir	28.500 .000	27.100 .000	95,09	100,00
9	Kapanewon Seyegan	28.500 .000	27.100 .000	95,09	100,00

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	
10	Kapanewon Mlati	26.500 .000	25.100 .000	94,72	100,00
11	Kapanewon Depok	28.160 .000	25.510 .000	90,59	100,00
12	Kapanewon Berbah	28.500 .000	28.100 .000	98,60	100,00
13	Kapanewon Prambanan	30.000 .000	28.600 .000	95,33	100,00
14	Kapanewon Kalasan	28.500 .000	26.898 .200	94,38	100,00
15	Kapanewon Ngemplak	28.500 .000	27.100 .000	95,09	100,00
16	Kapanewon Ngaglik	30.000 .000	28.544 .500	95,15	100,00
17	Kapanewon Sleman	28.500 .000	28.100 .000	98,60	100,00
18	Kapanewon Tempel	30.000 .000	28.440 .000	94,80	100,00
19	Kapanewon Turi	28.400 .000	27.000 .000	95,07	100,00
20	Kapanewon Pakem	28.500 .000	27.100 .000	95,09	100,00
21	Kapanewon Cangkringan	28.500 .000	27.006 .500	94,76	100,00
	Pemda DIY	29.388.926 .474	28.025.991 .705	95,36	100,00
1	Biro Tata Pemerintahan	1.853.478 .000	1.688.446 .442	91,10	100,00
2	Biro Hukum	846.250 .000	835.406 .779	98,72	100,00
3	Biro Organisasi	3.162.212 .000	2.873.181 .947	90,86	100,00
4	Badan Kepegawaian Daerah	1.082.710 .000	1.054.648 .200	97,41	100,00
5	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.980.245 .000	1.699.935 .136	85,84	100,00
6	Paniradya Kaistimewan	20.464.031 .474	19.874.373 .201	97,12	100,00

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2023

Kinerja urusan kelembagaan, antara lain:

- a) Penataan kelembagaan pemerintah asli di DIY pada 392 kalurahan/ 46 kelurahan, 14 kemantren/ 64 kapanewon, DIY/4 kabupaten/ 1 kota serta sosialisasi kelembagaan asli daerah DIY;

- b) Implementasi budaya pemerintahan SATRIYA di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo.
- c) Penyebarluasan informasi keistimewaan yang tersebarluaskan melalui 5 media baik cetak maupun elektronik);
- d) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan
- e) Penyusunan peraturan tindak lanjut keistimewaan yang dituangkan melalui Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati atau Peraturan Kalurahan;
- f) Pelaksanaan Diklat dan Internalisasi Keistimewaan bagi Trainer, Pegawai Eselon III, Pegawai Eselon IV, Pegawai Baru dan Pegawai memasuki Batas Usia Pensiun di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo



Gambar 5.2. Sosialisasi Kelembagaan Asli
Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2023

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

- 1) Besarnya deviasi keuangan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Kulon Progo karena penganggaran honorarium tim pelaksana kegiatan bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2021 tentang

Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 sehingga tidak dilakukan pencairan.

- 2) Besarnya deviasi keuangan BPKPAD Kabupaten Bantul karena kegiatan Urusan Keistimewaan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan non Urusan Keistimewaan yang didanai dengan anggaran reguler sehingga terdapat efisiensi anggaran dana keistimewaan yang cukup besar.

b. Solusi:

- 1) Mengawal Perangkat Daerah yang mampu program/kegiatan/sub kegiatan Urusan Keistimewaan Urusan Kelembagaan untuk melakukan peningkatan kualitas perencanaan anggaran agar dapat meminimalisasi sisa anggaran (SiIPA).

C. URUSAN KEBUDAYAAN

1. Kondisi Umum

Dalam urusan keistimewaan, bidang kebudayaan dimaknai secara luas sebagai payung dalam percepatan pencapaian visi DIY jangka panjang yaitu sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Kebudayaan meliputi hal fisik dan non fisik atau tangible dan intangible. Sebagaimana yang sudah diamanahkan dalam Perdas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan yang bertujuan untuk menguatkan karakter dan jati diri masyarakat; mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya DIY dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah; mengembangkan kebudayaan DIY untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya DIY di tengah peradaban dunia; mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengingat urgensi Undang Undang Keistimewaan sendiri lebih banyak diberikan penjelasan dari aspek kebudayaan dan juga alasan peran kesejarahan DIY. Dalam hal

keistimewaan, kebudayaan DIY seringkali disederhanakan bahwa rohnya ada di Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Bahkan, kebudayaan harus dimasukkan dalam konteks pembangunan kesejahteraan secara menyeluruh mulai dari aktivitas ekonomi, pangan, dan penguatan praktik dari nilai-nilai filosofis.

Sebagaimana amanat Undang Undang Keistimewaan bahwa kewenangan kebudayaan merupakan kewenangan yang diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar di masyarakat DIY.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Urusan kebudayaan menjadi urusan yang dominan dari segi jumlah program/kegiatan pada tahun 2022. Urusan kebudayaan terdiri dari 1 program, 10 kegiatan, dan 49 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp946.505.643.864,00. Adapun pengampu urusan Kebudayaan sebanyak 61 OPD dari lingkungan Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta 64 Kapanewon dan 3 Kemantren serta 301 Kalurahan. Persentase realisasi fisik sampai dengan tahap akhir mencapai 99,96% terhadap target satu tahun. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan tahap akhir sebesar Rp916.397.785.254,58 atau sebesar 96,82%.

Tabel 5.3. Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Kebudayaan TA 2022

No	Uraian	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	
	KEBUDAYAAN	946,505,643,864	916,397,785,254.58	96.82	99.96
	Kota Yogyakarta	34,618,248,279	33,819,808,016	97.69	100.00
1	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	17,086,992,818	16,397,597,570	95.97	100.00
2	Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta	16,481,255,461	16,372,210,446	99.34	100.00
3	Kemantren Kotagede	525,000,000	525,000,000	100.00	100.00
4	Kemantren Gedong Tengen	350,000,000	350,000,000	100.00	100.00
5	Kemantren Tegalrejo	175,000,000	175,000,000	100.00	100.00
	KABUPATEN BANTUL	20,143,302,000	19,338,815,699	96.01	99.86
1	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	15,063,510,000	14,428,012,684	95.78	100.00

No	Uraian	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	
2	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	773,115,000	670,461,000	86.72	100.00
3	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul	471,000,000	458,296,950	97.30	100.00
4	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	980,000,000	977,419,850	99.74	100.00
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	580,000,000	579,549,830	99.92	100.00
6	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	688,727,000	670,932,600	97.42	96.00
7	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	561,550,000	554,666,750	98.77	100.00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	502,650,000	477,885,000	95.07	100.00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	235,000,000	233,841,035	99.51	100.00
10	Kapanewon Banguntapan	19,250,000	19,250,000	100.00	100.00
11	Kapanewon Bantul	16,000,000	16,000,000	100.00	100.00
12	Kapanewon Imogiri	23,000,000	23,000,000	100.00	100.00
13	Kapanewon Jetis	19,000,000	19,000,000	100.00	100.00
14	Kapanewon Kasihan	16,250,000	16,250,000	100.00	100.00
15	Kapanewon Pleret	15,250,000	15,250,000	100.00	100.00
16	Kapanewon Sedayu	16,500,000	16,500,000	100.00	100.00
17	Kapanewon Sewon	18,750,000	18,750,000	100.00	100.00
18	Kapanewon Bambanglipuro	13,750,000	13,750,000	100.00	100.00
19	Kapanewon Dlingo	18,500,000	18,500,000	100.00	100.00
20	Kapanewon Kretek	16,500,000	16,500,000	100.00	100.00
21	Kapanewon Pajangan	16,250,000	16,250,000	100.00	100.00
22	Kapanewon Pandak	15,250,000	15,250,000	100.00	100.00
23	Kapanewon Piyungan	17,500,000	17,500,000	100.00	100.00
24	Kapanewon Pundong	14,750,000	14,750,000	100.00	100.00
25	Kapanewon Sanden	18,500,000	18,500,000	100.00	100.00
26	Kapanewon Srandakan	12,750,000	12,750,000	100.00	100.00
	Kabupaten Kulon Progo	53,537,121,889	51,088,239,503	95.43	100.00
1	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulonprogo	2,424,434,291	2,349,621,165	96.91	100.00
2	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo	21,789,752,998	21,201,728,321	97.30	100.00
3	Dinas Pariwisata Kabupaten Kulonprogo	26,137,808,000	24,559,851,518	93.96	100.00
4	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulonprogo	517,558,600	439,197,500	84.86	100.00

No	Uraian	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulonprogo	123,921,000	121,208,318	97.81	100.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulonprogo	387,934,000	367,934,000	94.84	100.00
7	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo	459,117,000	459,062,040	99.99	100.00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kulonprogo	350,000,000	313,610,610	89.60	100.00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo	1,061,096,000	992,745,781	93.56	100.00
10	Kapanewon Galur	23,250,000	23,213,000	99.84	100.00
11	Kapanewon Temon	32,500,000	31,983,000	98.41	100.00
12	Kapanewon Wates	18,000,000	18,000,000	100.00	100.00
13	Kapanewon Panjatan	31,500,000	31,403,000	99.69	100.00
14	Kapanewon Lendah	19,500,000	19,459,000	99.79	100.00
15	Kapanewon Sentolo	26,000,000	25,920,000	99.69	100.00
16	Kapanewon Pengasih	24,000,000	22,681,500	94.51	100.00
17	Kapanewon Kokap	19,250,000	19,211,750	99.80	100.00
18	Kapanewon Girimulyo	17,250,000	17,159,000	99.47	100.00
19	Kapanewon Nanggulan	19,250,000	19,250,000	100.00	100.00
20	Kapanewon Samigaluh	31,000,000	31,000,000	100.00	100.00
21	Kapanewon Kalibawang	24,000,000	24,000,000	100.00	100.00
	Kabupaten Gunungkidul	22,874,962,340	22,326,302,961	97.60	100.00
1	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul	429,808,950	429,808,950	100.00	100.00
2	Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul	350,000,000	350,000,000	100.00	100.00
3	Dinas Perindustrian, Koperasi, Ukm dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul	150,000,000	149,858,000	99.91	100.00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul	150,000,000	147,990,000	98.66	100.00
5	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul	497,778,640	497,373,940	99.92	100.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul	971,290,000	956,370,000	98.46	100.00
7	Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul	250,000,000	250,000,000	100.00	100.00
8	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul	17,828,834,750	17,297,652,071	97.02	100.00
9	Kapanewon Wonosari	133,750,000	133,750,000	100.00	100.00
10	Kapanewon Nglipar	117,750,000	117,750,000	100.00	100.00
11	Kapanewon Playen	132,750,000	132,750,000	100.00	100.00
12	Kapanewon Patuk	124,500,000	124,500,000	100.00	100.00
13	Kapanewon Paliyan	117,000,000	117,000,000	100.00	100.00

No	Uraian	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi
			Rp	%	Fisik
14	Kapanewon Semanu	130,000,000	130,000,000	100.00	100.00
15	Kapanewon Karang Mojo	131,500,000	131,500,000	100.00	100.00
16	Kapanewon Gedangsari	121,250,000	121,250,000	100.00	100.00
17	Kapanewon Tepus	124,250,000	124,250,000	100.00	100.00
18	Kapanewon Ponjong	136,250,000	136,250,000	100.00	100.00
19	Kapanewon Rongkop	130,000,000	130,000,000	100.00	100.00
20	Kapanewon Semin	135,000,000	135,000,000	100.00	100.00
21	Kapanewon Ngawen	120,500,000	120,500,000	100.00	100.00
22	Kapanewon Saptosari	119,500,000	119,500,000	100.00	100.00
23	Kapanewon Girisubo	125,500,000	125,500,000	100.00	100.00
24	Kapanewon Tanjungsari	121,250,000	121,250,000	100.00	100.00
25	Kapanewon Purwosari	111,500,000	111,500,000	100.00	100.00
26	Kapanewon Panggal	115,000,000	115,000,000	100.00	100.00
	Kabupaten Sleman	18,604,900,669	18,285,442,139.44	98.28	100.00
1	Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	13,357,590,469	13,127,376,971	98.28	100.00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman	2,954,461,200	2,903,104,500	98.26	100.00
3	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	1,000,000,000	997,784,590.44	99.78	100.00
4	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman	395,415,000	382,006,778	96.61	100.00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman	468,120,000	445,881,000	95.25	100.00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman	66,314,000	66,314,000	100.00	100.00
	Kapanewon Gamping	18,250,000	18,250,000	100.00	100.00
	Kapanewon Godean	23,750,000	23,750,000	100.00	100.00
	Kapanewon Moyudan	19,250,000	19,244,400	99.97	100.00
	Kapanewon Minggir	20,500,000	20,500,000	100.00	100.00
	Kapanewon Seyegan	20,250,000	20,250,000	100.00	100.00
	Kapanewon Mlati	22,000,000	22,000,000	100.00	100.00
	Kapanewon Depok	17,000,000	17,000,000	100.00	100.00
	Kapanewon Berbah	17,500,000	17,500,000	100.00	100.00
	Kapanewon Prambanan	21,000,000	21,000,000	100.00	100.00
	Kapanewon Kalasan	23,000,000	23,000,000	100.00	100.00
	Kapanewon Ngemplak	24,000,000	24,000,000	100.00	100.00
	Kapanewon Ngaglik	25,750,000	25,750,000	100.00	100.00
	Kapanewon Sleman	24,250,000	24,250,000	100.00	100.00
	Kapanewon Tempel	29,500,000	29,500,000	100.00	100.00
	Kapanewon Turi	16,500,000	16,500,000	100.00	100.00
	Kapanewon Pakem	18,750,000	18,729,900	99.89	100.00
	Kapanewon Cangkringan	21,750,000	21,750,000	100.00	100.00
	Pemda DIY	699,228,014,687	674,598,591,886	96.48	99.96

No	Uraian	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	38,943,638,400	37,004,623,605	95.02	99.68
2	Dinas Kesehatan	532,366,000	508,639,953	95.54	100.00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	5,578,362,000	5,513,970,610	98.85	100.00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	12,048,826,391	11,737,739,622	97.42	100.00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	971,968,800	692,632,000	71.26	100.00
6	Dinas Sosial	6,184,871,500	5,554,958,110	89.82	100.00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	3,916,697,500	3,768,866,845	96.23	100.00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3,303,424,750	3,047,055,372	92.24	100.00
9	Dinas Perhubungan	98,000,000	97,733,280	99.73	100.00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	21,084,576,713	21,000,513,368	99.60	100.00
11	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	93,847,240,102	91,503,660,796	97.50	100.00
12	Dinas Kebudayaan	302,789,217,025	289,588,791,950	95.64	100.00
13	Museum Negeri Sonobudoyo	13,574,821,067	13,171,185,704	97.03	100.00
14	Taman Budaya Yogyakarta	15,677,465,000	15,546,758,352.95	99.17	100.00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5,771,902,011	5,481,426,474	94.97	100.00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	116,450,680,790	116,152,552,222	99.74	100.00
17	Dinas Pariwisata	18,635,779,750	17,799,327,487	95.51	100.00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4,894,144,200	4,266,622,110	87.18	100.00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17,067,629,500	15,478,358,183	90.69	99.10
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6,372,225,000	6,321,121,493	99.20	100.00
21	Biro Tata Pemerintahan	1,790,492,800	1,396,515,831	78.00	100.00
22	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	163,658,750	159,408,750	97.40	100.00
23	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	747,000,000	723,649,717	96.87	100.00
24	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	580,265,838	565,559,437	97.47	100.00
25	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	848,108,000	805,488,076	94.97	100.00
26	Badan Penghubung Daerah	4,117,563,800	3,703,024,338	89.93	100.00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,237,089,000	3,008,408,200	92.94	100.00
	BKK Kalurahan	97,499,094,000	96,940,585,050	99.43	100.00

No	Uraian	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	
1	BKK Kalurahan - Desa Balai Budaya	6,880,800,000	6,879,148,614	99.98	100.00
2	BKK Kalurahan - Desa Mandiri Budaya	19,400,000,000	19,264,227,619	99.30	100.00
3	BKK Kalurahan - Arsitektur	5,940,000,000	5,913,548,163	99.55	100.00
4	BKK Kalurahan - Desa Bahari	4,740,294,000	4,543,605,729	95.85	100.00
5	BKK Kalurahan - Desa Budaya	8,750,000,000	8,656,244,646	98.93	100.00
6	BKK Kalurahan - Desa Mandiri Pangan	1,500,000,000	1,498,951,000	99.93	100.00
7	BKK Kalurahan - Desa Prima	1,250,000,000	1,249,027,410.19	99.92	100.00
8	BKK Kalurahan - Desa Preneur	4,000,000,000	3,987,418,500	99.69	100.00
9	BKK Kalurahan - Desa Wisata	7,000,000,000	6,994,068,644	99.92	100.00
10	BKK Kalurahan - Padat Karya	19,075,000,000	19,001,072,765	99.61	100.00
11	BKK Kalurahan - Papan Penanda Keistimewaan	18,963,000,000	18,953,271,960	99.95	100.00

Sumber : Paniradya Kaistimewan, 2022

Kegiatan pada urusan kebudayaan, antara lain: Pembangunan PPI Gesing 1 kawasan, Pembangunan Pasar Tradisional Ikan Cangkring 1 kawasan, Pengadaan lahan untuk Pengembangan dan Penataan Tenant Teras Malioboro 1 lokasi, Pembelian Lahan Tahap IV Pengembangan Museum Sejarah Purbakala Pleret 1 kawasan, Perawatan Warisan Budaya Cagar Budaya (WBCB) untuk 11 bangunan, Revitalisasi Situs dan Kawasan WBCB di 4 situs dan kawasan, Penetapan Cagar Budaya sebanyak 20 rekomendasi, Alih Media Arsip Puro Pakualaman sebanyak 10.122 lembar, Alih media naskah kuno Kadipaten sebanyak 6.023 lembar, Perawatan bahan pustaka Kadipaten Pakualaman dan Koleksi DPAD DIY sebanyak 382.085 eksemplar, Dukungan pelestarian budaya di Kraton dan PA: 1 tahun, Rehab Museum Sonobudoyo unit II di 1 kawasan, Fasilitasi Museum bagi 38 Museum dan Wajib Kunjung Museum dengan jumlah peserta sebanyak 7.704 orang.

Pada tahun 2022 telah terlaksana *event* seni budaya bertaraf internasional sebanyak 2 kali dan Nasional 9 *event*, Pentas Seni dan Budaya bagi 207 kelompok, Fasilitasi Pentas Kelompok Seni sebanyak 175 kali, Gelar Potensi Desa Wisata sebanyak 22 kali, Gelar Potensi Rintisan Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh di 47 kalurahan. Selain itu, terdapat 625 kelompok jaga warga dibentuk pada tahun 2022. Terbentuk pula kader pembauran budaya di DIY sebanyak 70 orang, Sinau Pancasila terlaksana bagi 142 kelompok.

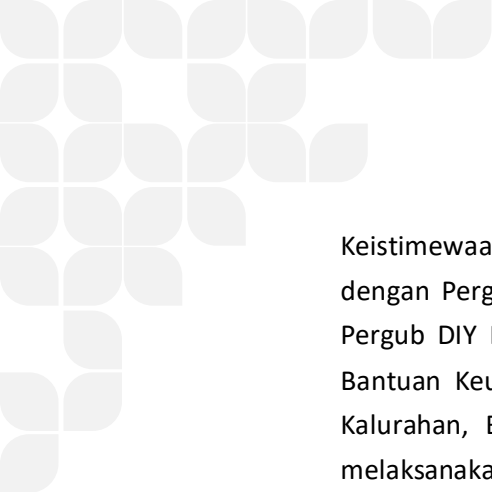
di sektor pendidikan, Kartu Cerdas diberikan bagi 15.000 siswa, Beasiswa inklusi jenjang SD, SMP, SMA/SMK bagi 704 siswa, Penyelenggaraan operasional Akademi Komunitas Seni dan budaya untuk 3 prodi, Lomba Lukis Kyoto-DIY yang diikuti 300 peserta serta Pagelaran Apresiasi Budaya Melalui Wayang Kulit kepada Siswa sebanyak 13 kali.

Untuk menggerakkan ekonomi di DIY, dais digunakan untuk fasilitasi ongkos kirim sebanyak 55.000 kiriman, Pemberdayaan KUBE Lestari Budaya bagi 15 kelompok KUBE, Pelatihan dan Pendampingan Digital Campaign bagi UKM Produk Tradisional Sibakul bagi 30 UKM, Peningkatan kapasitas UMKM di Desa Mandiri Budaya (Tahap Penumbuhan) di 12 desa, Peningkatan kapasitas UMKM di Desa Budaya (Tahap Pengembangan) di 24 desa, Peningkatan kapasitas UMKM di Desa Budaya (Tahap Maju) di 10 desa, Fasilitasi Pendirian Koperasi bagi 10 koperasi, Fasilitasi produksi (Sertifikasi Halal, Ijin Edar dan Pelatihan) IKM Biofarmaka (jamu, aromaterapi, spa) bagi 140 IKM, Festival makanan warisan budaya tak benda (WBTB) bagi 200 IKM, Pengembangan Kawasan pusat UMKM di 1 lokasi Ex Indra, Pembangunan Lumbung Pangan Tradisional sebanyak 2 unit, Bimtek Produksi Usaha Garam Rakyat Sistem Tunnel bagi 30 orang, Gita Laut (Gerakan Cinta Laut) yang melibatkan 1.000 orang, Budidaya tanaman hortikultura di lahan surjan untuk 4 kelompok, Pengembangan pertanian di lahan sempit perkotaan untuk 5 kelompok.

Beberapa hal lain yang menjadi keluaran pada urusan kebudayaan di tahun 2022 ini antara lain pengadaan Sarana operasional Satlinmas Rescue Istimewa sebanyak 13 jenis, terbangunnya Posko SRI di Pantai Baru sebanyak 1 unit, Peningkatan Saluran Irigasi Tersier di 58 lokasi, Jaringan intranet Pemda DIY di 19 lokasi, Langganan *bandwidth* Pemda DIY sebanyak 791 titik, Pelatihan dan Pendampingan Management Digital Marketing untuk lokasi WiFi Pemberdayaan Masyarakat di 34 lokasi dan Pemeliharaan jaringan internet desa di 67 desa di Kulonprogo.

a. **BKK Kalurahan**

Dalam rangka melaksanakan amanat Pergub DIY Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana



Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan, yang diperbaharui dengan Pergub DIY Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub DIY Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan, BKK kepada kalurahan diberikan dengan tujuan untuk melaksanakan Program Strategis Gubernur didasarkan pada potensi dan kebutuhan masing-masing Kalurahan. Bentuk BKK yang disalurkan adalah sebagai berikut:

1) *BKK Arsitektur/WBTB Yogyakarta*

Alokasi Dana Keistimewaan untuk BKK desa Arsitektur Gaya Yogyakarta diberikan kepada 7 Kalurahan yaitu Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, Kalurahan Gedangrejo Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Jerukwudel Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Kebonharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Sri Martani Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul, Kalurahan Kemiri Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. BKK WBTB/Arsitektur masuk dalam tolok ukur kinerja 3 sub kegiatan yaitu 2 sub kegiatan yang diampu oleh Dinas Kebudayaan DIY Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya serta Pengembangan dan Implementasi nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat dan 1 sub kegiatan yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY. Berikut dokumentasi BKK Arsitektur/WBTB TA 2022:



Gambar 5.3. Gerbang Pleret Kalurahan Pleret, Pleret, Bantul
Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2023



Gambar 5.4. Pembangunan Rumah Layak Huni Arsitektur Khas Yogyakarta Kalurahan Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo
Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2023

2) **BKK Desa Budaya**

Alokasi Dana Keistimewaan untuk Desa Budaya diberikan kepada 16 kalurahan dengan rincian Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, Kalurahan Beji Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Bugel Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Semin Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman, Kalurahan Sukoreno Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Sendangmulyo Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman, Kalurahan Dlingo Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, Kalurahan Kalirego

Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul, Kalurahan Kemadang Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. BKK Desa Budaya masuk ke dalam tolok ukur kinerja sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya yang diampu oleh Dinas Kebudayaan DIY.



Gambar 5.5. Pelatihan Membuat Kalurahan Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul
Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2023

3) BKK Desa Mandiri Pangan

Alokasi Dana Keistimewaan untuk Desa Mandiri Pangan diberikan kepada 2 (dua) kalurahan yaitu Kalurahan Bendung Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul dan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo. BKK Desa Mandiri Pangan masuk dalam tolok ukur kinerja sub kegiatan Pengembangan Lumbung Mataram yang diampu oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.



Gambar 5.6. Pembangunan RMU dan Lumbung Tradisional Kalurahan Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo
Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2023

4) **BKK Balai Budaya**

Alokasi Dana Keistimewaan berupa pembangunan Balai Budaya kepada 5 Kalurahan yaitu Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Pandowoharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman, Kalurahan Bejiharjo Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Giripurwo Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. BKK Balai Budaya masuk dalam tolok ukur kinerja sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya yang diampu oleh Dinas Kebudayaan DIY.



Gambar 5.7. Pembangunan Balai Budaya Kalurahan Putat, Patuk, Gunungkidul
Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2023

5) **BKK Papan Penanda Keistimewaan**

Alokasi Dana Keistimewaan untuk Papan Nama Keistimewaan diberikan kepada 301 kalurahan dengan rincian 65 kalurahan di Kabupaten Kulon Progo, 55 kalurahan di Kabupaten Bantul, 116 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul, dan 65 kalurahan di Kabupaten Sleman. BKK Papan Nama Keistimewaan masuk dalam tolok ukur kinerja Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana Publikasi dan penanda Keistimewaan yang diampu oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.



Gambar 5.8. Papan Penanda Keistimewaan Kalurahan Donokerto, Turi, Sleman
Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2023

6) **BKK Desa Prima**

Alokasi Dana Keistimewaan untuk Desa Prima diberikan kepada 5 kalurahan dengan rincian Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul, Kalurahan Banyurejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman, Kalurahan Giripurwo Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, Kalurahan Bleberan Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul. BKK Desa Prima masuk kedalam tolok ukur kinerja sub kegiatan Pengembangan Ekonomi Perempuan yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.



Gambar 5.9. Kegiatan BKK Desa Prima (Pelatihan Kelompok Ekonomi Perempuan Kalurahan Banyurejo, Tempel, Sleman)
Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2023

7) BKK Desa Maritim/Bahari

Alokasi Dana Keistimewaan untuk Desa Bahari diberikan kepada 7 kalurahan dengan rincian Kalurahan Kemadang Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Tileng Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul, Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dan Kalurahan Ngestirejo Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. BKK Desa Maritim/Bahari masuk dalam tolok ukur kinerja sub kegiatan Pengembangan Budaya Bahari yang diampu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.



Gambar 5.10. Kegiatan BKK Desa Maritim/Bahari (Budidaya Kepiting (Crab House) Kalurahan Tirtohargo, Kretek, Bantul)
Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2023

8) **BKK Padat Karya Jogja Istimewa**

Alokasi Dana Keistimewaan untuk Kegiatan Padat Karya Istimewa diberikan kepada 104 kalurahan. Padat Karya Istimewa masuk dalam tolok ukur kinerja Sub-Kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. BKK Padat Karya Jogja Istimewa masuk dalam tolok ukur kinerja sub kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.



Gambar 5.11. Kegiatan BKK Padat Karya Jogja Istimewa (Pelaksanaan Pekerjaan Padat Karya Kalurahan Sabdodadi, Bantul, Bantul)

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2023

9) **BKK Desa Mandiri Budaya**

Alokasi Dana Keistimewaan untuk Pengembangan Desa Mandiri Budaya diberikan untuk 18 Kalurahan dengan rincian Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman, Kalurahan Pagerharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Jatimulyo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Bangunkerti Kapanewon Turi Kabupaten Sleman, Kalurahan Margodadi Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman, Kalurahan Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, Kalurahan Pandowoharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman, Kalurahan Banjarharjo

Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Jerukwudel Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Tanjungharjo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Giring Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul, dan Kalurahan Glagah Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo. Pengembangan Desa Mandiri Budaya masuk dalam tolok ukur kinerja sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya yang diampu 4 Organisasi Perangkat Daerah DIY yaitu Dinas Kebudayaan DIY ; Dinas Pariwisata DIY ; Dinas Koperasi DIY dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DIY.



Gambar 5.12. Kegiatan BKK Desa Mandiri Budaya Pembangunan Taman Bermain Anak Kalurahan Tanjungharjo, Nanggulan, Kulon Progo
Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2023

10) **BKK Desa Preneur**

Alokasi Dana Keistimewaan untuk Desa Preneur diberikan kepada 10 kalurahan dengan rincian Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Tamanmartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman, Kalurahan Sidoarum Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Canden Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul, Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan

Kabupaten Bantul, Kalurahan Kemiri Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul. BKK Desa Preneur masuk ke dalam tolok ukur kinerja sub kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Desa yang diampu oleh Dinas Koperasi DIY. Berikut dokumentasi kegiatan BKK Desa Preneur TA 2022:



Gambar 5.13. Kegiatan BKK Desa Preneur (Kerajinan Tangan Cover Pot Bunga Kalurahan Kemiri, Tanjungsari, Gunungkidul)
Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2023

11) BKK Desa Wisata

Alokasi Dana Keistimewaan untuk Desa Wisata diberikan kepada 11 kalurahan dengan rincian Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman, Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman, Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, Kalurahan Mulo Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Gayamharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman, Kalurahan Ngestirejo Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman. BKK Desa Wisata

masuk ke dalam tolok ukur kinerja sub kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya. Berikut dokumentasi kegiatan BKK Desa Wisata TA 2022 :



Gambar 5.14. Kegiatan BKK Desa Wisata (Desa Wisata Ngestirejo)
Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2023

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

- 1) Pemberian beasiswa inklusi dan asrama tidak tercapai sesuai target karena berdasarkan hasil validasi penerima beasiswa, bagi beasiswa inklusi dari target 90 siswa didapatkan hanya ada 84 siswa yang memenuhi syarat; dan bagi beasiswa asrama dari target 90 siswa terealisasi 89 siswa karena 1 (satu) siswa tidak lagi tinggal di asrama;
- 2) Pembuatan gamelan berbahan logam belum dapat dilaksanakan karena adanya faktor eksternal dari penyedia yang tidak memenuhi kewajiban

b. Solusi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan perlu memperhatikan penjadwalan dan perencanaan kebutuhan OPD Pengampu sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat kegiatan untuk melaksanakan rencana antisipasi

D. URUSAN PERTANAHAN

1. Kondisi Umum

Urusan Pertanahan sebagai salah satu penanda Keistimewaan DIY diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kewenangan pertanahan atas kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon yang menjadi hak milik Kasultanan dan Kadipaten, sebagai badan hukum yang diakui Undang-Undang. Urusan pertanahan merupakan urusan yang krusial untuk diselesaikan sebagai jaminan kepastian hukum kepada masyarakat.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Urusan Pertanahan terdiri dari 1 program, 3 kegiatan, dan 9 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp27.023.359.881,00. Urusan Pertanahan diampu oleh 12 OPD dari lingkungan Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Persentase realisasi fisik urusan pertanahan sampai dengan tahap akhir telah mencapai 96,98% terhadap target satu tahun. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan tahap akhir sebesar Rp24.448.850.806,00 atau sebesar 90,47%.

Tabel 5.4. Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Pertanahan Tahun Anggaran

No	Uraian	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	
PERTANAHAN		27.023.359.881.00	24.448.850.806.00	90,47	96,98
KOTA YOGYAKARTA		1.408.780.000.00	1.338.570.480,00	95,02	97,48
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	1.408.780.000.00	1,338,570,480,00	95,02	97,48
KABUPATEN BANTUL		5.767.883.000.00	4.473.355.750,00	77,56	88,31
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	5.241.633.000.00	3,951,452,100,00	75,39	87,14
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul	526.250.000.00	521,903,650,00	99,17	100
KABUPATEN KULON PROGO		3.071.831.000.00	2.604.926.148,00	84,80	100
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	2.665.599.000.00	2,221,643,308,00	83,34	100
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kulon Progo	406.232.000.00	383,282,840,00	94,35	100
KABUPATEN GUNUNGKIDUL		5.014.385.000.00	4.884.199.720,00	97,40	99,27

No	Uraian	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	4.525.245.000,00	4,406,222,320,00	97,37	99,19
2	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Gunungkidul	489.140.000,00	477,977,400,00	97,72	100,00
	KABUPATEN SLEMAN	2.813.796.096,00	2,681,584,302,00	95,30	97,80
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	2.813.796.096,00	2,681,584,302,00	95,30	97,80
	PEMDA DIY	8.655.612.785,00	8,175,142,406,00	94,45	99,91
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	7.378.140.785,00	7,094,175,199,00	96,15	99,90
2	Biro Hukum Setda DIY	452.472.000,00	441,286,650,00	97,53	100
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	285.000.000,00	269,732,927,00	94,64	100
4	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	540.000.000,00	369,947,630,00	68,51	100
	BKK KALURAHAN - URUSAN PERTANAHAN	291.072.000,00	291,072,000,00	100,00	100

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2023

Kegiatan pada urusan pertanahan, antara lain: Tanah SG PAG yang terdaftar sebanyak 175 bidang; Rekomendasi Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah D sebanyak 5.950 sertifikat; Data spasial Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah bersertifikat sebanyak 2.000 bidang; Pembuatan patok tanah desa sebanyak 20.800 patok; Pemasangan patok tanah desa sebanyak 12.175 bidang; Penegasan batas desa sebanyak 28 desa; Dokumen Identifikasi Keputusan Kepala Daerah DIY tentang Pemberian Hak Atas Tanah sebanyak 500 keputusan; Rekomendasi Kepala DPTR tentang Pemanfaatan Tanah Desa; dan Rekomendasi kepala DPTR tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

a. **BKK Pertanahan**

Alokasi Dana Keistimewaan untuk Urusan Pertanahan diberikan kepada 3 kalurahan yaitu Kalurahan Sriharjo, Kalurahan Sidoharjo dan Kalurahan Caturharjo. BKK Pertanahan masuk dalam tolok ukur kinerja Sub-kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang diampu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.



Gambar 5.15. Kegiatan BKK Pertanahan (Pemasangan Patok Batas Bidang)
Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2023

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

- 1) Terdapat bidang-bidang yang tidak lolos validasi di Kantor Pertanahan sehingga diperlukan pengukuran ulang atau pencarian alternatif bidang untuk pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa;
- 2) Beberapa berkas pendaftaran tanah Kasultanan tidak dapat terfasilitasi di loket pendaftaran karena waktu telah mendekati akhir tahun;

b. Solusi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan yang belum tercapai di tahun anggaran 2022 menjadi prioritas penyelesaian di tahun anggaran 2023;
- 2) Meningkatkan sinergitas antar *stakeholders* penatausahaan pertanahan sehingga kegiatan yang direncanakan dapat selesai sesuai tata kelola waktu.

E. URUSAN TATA RUANG

1. Kondisi Umum

Pemerintah Daerah DIY berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, melakukan pembinaan kepada Pemerintah kabupaten/kota dan Masyarakat. Pembinaan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.

Berdasarkan Perda DIY No.5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang adalah mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk mendorong implementasi pengembangan kawasan, seperti rencana pembangunan fasilitas pada kawasan strategis provinsi maupun pada kawasan-kawasan yang sesuai dengan kebijakan keistimewaan, yang akan dilakukan revitalisasi dalam rangka memperkuat karakter wilayah (kawasan cagar budaya dan kawasan pendukungnya) serta satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten.

Kebijakan penyelenggaraan urusan tata ruang sesuai Perdas Nomor 2 Tahun 2017 adalah untuk mengembangkan Struktur Ruang dan Pola Ruang pada Satuan Ruang Tanah Kasultanan, Satuan Ruang Tanah Kadipaten dan Satuan Ruang lainnya terintegrasi dalam Tata Ruang DIY, menuju harmoni Ruang untuk seluruh Wilayah. Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendorong/koordinasi sampai tingkat kabupaten/kota untuk melegalkan perangkat pengendalian seperti Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) dan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang daerah, insentif dan disinsentif serta inovasi implementasi pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Urusan tata ruang terdiri dari 1 program, 4 kegiatan, dan 13 sub kegiatan yang dibiayai dengan pagu sebesar Rp297.750.732.531,00. Urusan Tata Ruang diampu oleh 21 OPD dari lingkungan Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Persentase realisasi fisik urusan tata ruang sampai dengan tahap akhir mencapai 99,46% terhadap target satu tahun. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan tahap akhir sebesar Rp285.946.555.008,00.

Tabel 5.5. Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Urusan Tata Ruang TA 2022

No	Uraian	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	
Tata Ruang		297.750.732.531	285.946.555.008	96,04	99,46
Kota Yogyakarta		14.650.850.000.00	14,208,856,408,00	96,98	100,00
1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	14.460.850.000	14,018,856,408	96,94	100,00
2	Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	190.000.000	190,000,000	100,00	100,00
Kabupaten Bantul		406.646.650.00	406,646,650,00	100,00	100,00
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	308.551.500	308,551,500	100,00	100,00
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	98.095.150	98,095,150	100,00	100,00
Kabupaten Kulon Progo		2.572.796.375.00	2,505,949,649,00	97,40	100,00
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulonprogo	500.000.000	497,511,414	99,50	100,00
2	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulonprogo	2.072.796.375	2,008,438,235	96,90	100,00
Kabupaten Gunungkidul		9.932.662.350.00	9,922,858,702,00	99,90	100,00
1	Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul	3.796.742.000	3,793,147,000	99,91	100,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul	567.000.000	565,987,562	99,82	100,00
3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul	3.250.757.600	3,250,735,600	100,00	100,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	268.117.750	268,117,750	100,00	100,00
5	Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul	2.050.045.000	2,044,870,790	99,75	100,00
Kabupaten Sleman		84.430.125.630	79,748,707,630	94,46	98,38
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	84.430.125.630	79,748,707,630	94,46	98,38
Pemda DIY		185.757.651.526	179,153,535,969	96,44	99,87

No	Uraian	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	
1	Balai Latihan Pendidikan Teknik	190.000.000	182,217,250	95,90	100,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral	170.623.365.061	164,724,632,967	96,54	99,86
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	7.249.316.500	6,993,109,427	96,47	100,00
4	Dinas Perhubungan	6.213.932.565	6,067,085,608	97,64	100,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	125.000.000	122,567,285	98,05	100,00
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	859.704.000	569,150,372	66,20	100,00
7	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	218.220.000	217,286,000	99,57	100,00
8	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	133.160.800	133,131,800	99,98	100,00
9	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	144.952.600	144,355,260	99,59	100,00

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2023

Kegiatan pada urusan tata ruang, antara lain: Pembebasan Tanah JLS Segmen Garongan-Congot dengan luas sebesar 5.722m²; Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen IV dengan total panjang jalan 3,40 Km; Pengadaan lahan ruas jalan Prambanan-Lemahbang segmen B dengan luas sebesar 142.940m²; Pembebasan Tanah JLS untuk Segmen Kretek-Girijati dengan luas sebesar 5.455m²; Pemeliharaan insidentil Pedestrian dilaksanakan di 3 kawasan yaitu Perbaikan *Bollard* dan Jaringan Elektrikal Jl.Ahmad Dahlan sisi selatan, Pemeliharaan Insidentil Pedestrian (Pemeliharaan Terraso Jl.Sudirman) dan Pekerjaan pemeliharaan insidentil pedestrian jalan perwakilan. Pengadaan lahan penambahan Area Parkir Gunung Api Purba Nglanggeran dengan luas sebesar 2.008m²; Fasilitas Sarana Prasarana Pengolahan kakao dilaksanakan pada 1 unit UPH dan peralatan; Rehabilitasi Tanaman kakao di Desa Nglanggeran dilakukan pada 4 kelompok tani; Dilaksanakan Bantuan Pembuatan Kandang Koloni Kambing PE Unggulan; Bantuan Pengembangan Peternakan untuk mendukung kawasan Tonogoro; Pengembangan Kambing PE Unggulan di Perbukitan Menoreh dan Pengolah Hijauan Pakan Ternak; Dilaksanakan Pengembangan Olahan Durian; Bantuan Peralatan Budidaya dan Bantuan Sarana Produksi; Penyediaan air bersih dari air tanah dalam pada Kabupaten

Gunungkidul terdapat 7 titik, Kabupaten Kulon Progo pada 5 titik dan Kabupaten Bantul pada 4 titik; RTH Pintu Gerbang SRS Karst Gunungsewu yang telah terbangun terdapat 18 jenis; Dilaksanakan Pekerjaan Pedestrian Jalan Senopati Kota Yogyakarta dengan luas 3000m²; Pembuatan *Prototype* Becak Listrik sebanyak 4 Jenis.



Gambar 5.16. Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen IV: 3,4 km

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023



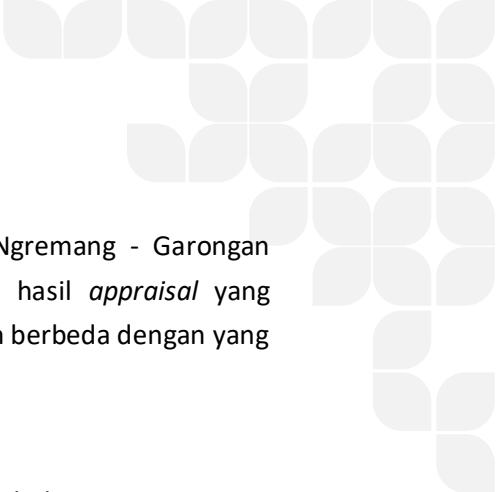
Gambar 5.17. Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Tawang - Ngalang Segmen IV: 3,4 km

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

- 1) Proses Pengadaan Tanah JJLS untuk Segmen Simpang Bundaran Planjan tidak mencapai target karena Tanah Kas Desa dapat digunakan untuk pembangunan Simpang Bundaran Planjan tanpa harus dengan pelepasan hak (penggunaan tanah dapat digunakan dengan memberikan Hak Pakai).

- 
- 2) Pembebasan Tanah JJLS untuk Segmen Ngremang - Garongan terealisasi tidak mencapai target karena hasil *appraisal* yang dilaksanakan oleh Kantor BPN luasan tanah berbeda dengan yang telah direncanakan.

b. Solusi:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dalam hal penentuan target dengan melakukan inventarisasi Tanah Kas Desa yang berada di jalur JJLS untuk mengetahui bidang tanah yang memerlukan pelepasan hak dan bidang tanah yang cukup menggunakan Hak Pakai.
- 2) Melaksanakan perencanaan lebih matang dengan mempertimbangkan kendala dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diantisipasi adanya kendala dan permasalahan yang berpotensi terjadi maupun terulang di tahun anggaran berikutnya.

Program Strategis

A. PENANGANAN COVID-19

1. Latar Belakang

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga adanya pandemi Covid-19 di DIY. Upaya untuk menghadapi dan beradaptasi dengan pandemi Covid-19 dilakukan dalam berbagai bentuk. Pemda DIY sebagai institusi yang bertanggungjawab melakukan pelayanan publik telah mengupayakan beberapa kebijakan yang bertujuan menangani pandemi Covid-19. Salah satunya telah diterbitkan Surat InGub DIY Nomor 1/Instr/2022 tentang Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjadi dasar penanganan Pandemi Covid-19 di wilayah DIY yang masih berlangsung hingga saat ini. Selain dalam bentuk instruksi, upaya untuk membangun kesadaran dan solidaritas masyarakat juga dilakukan melalui *Sapa Aruh* yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono XI. Dalam *Sapa Aruh* ini Gubernur DIY mengajak dan menghimbau masyarakat untuk bergotong royong dan mengedepankan kembali kearifan lokal, seperti *guyub-rukun*, *grapyak-semanak*, *sumedulur*, *legawa*, ikhlas dan mandiri dalam melaksanakan prokes 5M, dalam membangun solidaritas untuk menangani pandemi. Kearifan lokal yang telah ada di masyarakat sebagaimana disampaikan dalam *Sapa Aruh* merupakan modal sosial penting dalam upaya penanganan pandemi.

Pada tingkat operasional, penanganan bencana Covid-19 di DIY dilakukan dengan menyusun Rencana Operasi Terpadu Penanganan Covid-19 di DIY Tahun 2022 serta ditetapkannya KepGub DIY No. 32/KEP/2021 tentang Perubahan atas KepGub DIY Nomor 3/Kep/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya Kepgub tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Kebijakan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19. Kebijakan ini telah dilakukan

melalui perpanjangan status tanggap darurat sebanyak dua belas (12) kali perpanjangan, dari Bulan Januari 2022 (perpanjangan ke 19) hingga bulan Desember 2022 (perpanjangan ke 31).

Penanganan selama masa tanggap darurat yaitu mulai Januari 2022 sampai dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2022 dengan melakukan Pelayanan yang dilakukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 di DIY meliputi, 1) Percepatan vaksinasi Covid-19; 2) Layanan *Hotline*, 3) Layanan Isoter 4) Layanan Permohonan rekomendasi kegiatan; dan 5) Pos Kesehatan.

Hingga tanggal 31 Desember 2022 atau 31 bulan berlangsungnya pandemi Covid-19 DIY, dari data tercatat sudah ada 226.365 jiwa terkonfirmasi positif Covid-19. Total kasus sembuh telah mencapai 219.272 kasus, dengan persentase kesembuhan mencapai 96,87%. Jumlah kasus kematian mencapai 5.972 kasus. Selama perjalanan penyebaran virus Covid-19 di DIY, puncak tertinggi kasus terkonfirmasi Covid-19 terjadi pada pertengahan Bulan Juni 2021 hingga Bulan Juli 2021. Data menunjukkan jika rekor penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 terjadi pada bulan Maret 2022 mencapai 2.731 kasus.

Sebagai upaya untuk menangani kondisi tersebut, Pemda DIY mulai menerapkan kebijakan yang ketat dalam membatasi berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat melalui Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah PPKM Darurat. Sesuai dengan instruksi dari Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa PPKM Darurat diberlakukan untuk wilayah seluruh Pulau Jawa - Bali. Penerapan kebijakan PPKM Darurat memang didasarkan pada data nasional, khususnya tentang sebaran kasus jumlah kematian di wilayah Jawa - Bali yang masih terus mengalami peningkatan. Kebijakan PPKM diatur lebih lanjut dalam InGub DIY Nomor 1/Instr/2022 tentang Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama PPKM Darurat, pembatasan aktivitas masyarakat dilakukan lebih longgar dibandingkan dengan tahun 2021, baik mobilitas perjalanan antar kota dan provinsi maupun kegiatan di berbagai sektor non esensial dengan telah

memberlakukan 100% *Work From Office*, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara *hybrid*, gabungan antara daring/*online* dan luring/*offline*.

2. Upaya Penanganan Covid-19

Satgas Covid-19 DIY melalui Posduk DIY telah melayani masyarakat melalui lima aspek utama, yaitu 1) Layanan *Hotline* Covid-19; 2) Penanganan Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang terkonfirmasi positif Covid-19; 3) Layanan Permohonan rekomendasi kegiatan; 4) Pemberian Bantuan Sosial bagi Masyarakat terdampak pandemi Covid-19; dan 5) Pos Kesehatan. Kinerja posduk adalah sebagai berikut:

a. Layanan *Hotline*

Hotline atau disebut dengan *call center* Covid-19 merupakan salah satu media yang digunakan untuk memberikan informasi maupun situasi dan kondisi yang berkaitan dengan Covid-19 di DIY. Berdasarkan jumlah panggilan *hotline* Covid-19 selama tahun 2022 terdapat 39 penelpon dan menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2021. Jumlah pengguna *hotline* yang paling banyak terjadi di bulan Februari 2022 kemudian mengalami penurunan di bulan Maret, Dari bulan September sampai dengan Desember 2022 sudah tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan layanan *hotline* ini untuk penanganan Covid-19.

b. Penanganan Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang terkonfirmasi positif Covid-19

Dengan dibukanya penerbangan Internasional melalui Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) pada bulan April 2022, dilakukan *screening* terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dari beberapa maskapai penerbangan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Sampai dengan bulan Agustus 2022, telah dilakukan pengriman ke isolter terhadap 14 PPLN yang terkonfirmasi positif dengan jumlah paling banyak terjadi di bulan Juni yang mencapai 10 kasus positif.

c. **Layanan Permohonan rekomendasi kegiatan**

Dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat maka ditetapkan InGub Nomor 1/Instr/2022 tentang Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menindaklanjuti instruksi Gubernur tersebut, maka pada setiap kegiatan yang mendatangkan keramaian atau kerumunan masyarakat perlu adanya rekomendasi dari OPD terkait. Pada tahun 2022, telah di keluarkan 355 surat rekomendasi terhadap usulan permohonan rekomendasi.

d. **Pemberian Bantuan Sosial bagi Masyarakat terdampak pandemi Covid-19**

Pada tahun 2022, telah diberikan bantuan sosial berupa sembako kepada 33.000 masyarakat penerima manfaat. Kegiatan ini dalam rangka pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Penerima bansos ini tersebar di seluruh 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

e. **Pos Kesehatan**

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memerlukan dukungan dari pelayanan kesehatan untuk dapat memberikan bahan rujukan oleh *safety officer* dalam menugaskan personil, khususnya saat dilapangan. Untuk memastikan kesiapan personil dalam melaksanakan tugas di lapangan, pemeriksaan kesehatan dilakukan setiap hari disertai pemberian suplemen dan vitamin. Posko kesehatan akan melaporkan hasil pemeriksaan berkala dan merekomendasikan apabila diperlukan tindakan lebih lanjut. Layanan yang disediakan oleh Pos Kesehatan antara lain:

1) **Pemeriksaan Swab Antigen**

Tes Swab Antigen menjadi prioritas untuk dilakukan bagi para petugas dalam rangka menjamin keamanan bagi masyarakat yang dilayani. Pemeriksaan ini menjadi bahan rujukan oleh *safety officer* untuk mengambil langkah lebih lanjut apabila terdapat

personil yang terpapar virus Covid-19 dan harus melaksanakan karantina.

2) Rujukan dan Karantina

- a) Rujukan Kesehatan diberikan dari pos kesehatan ke fasilitas kesehatan lebih lanjut (Puskesmas/Rumah Sakit) apabila membutuhkan penanganan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan hematologi dan foto *rontgen thorax*. Dalam hal ini rumah sakit yang ditunjuk adalah RS Dr. Soetarto Yogyakarta.
- b) Karantina dilakukan khusus bagi personil yang terindikasi sesuai dengan protokol Covid-19. Tempat karantina yang dipakai berada di Hotel Mutiara, jalan Maliobro, sedangkan untuk petugas dan relawan yang terpapar Virus Covid-19 melakukan karantina di rumah masing-masing.

3) Pemeriksaan Gula Darah, Kolesterol, dan Asam Urat

Pemeriksaan medis berupa tes darah untuk mengukur kadar gula (glukosa) dan jumlah total zat lemak (kolesterol dan trigliserida) dalam darah dilakukan berkala setiap sebulan sekali.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Kasus positif Covid-19 masih ada karena masih kurangnya kesadaran untuk menaati protokol Kesehatan di sebagian lapisan masyarakat.
- 2) Mulai banyaknya kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penularan Covid-19 melalui keramaian dan kerumunan masyarakat.

b. Solusi

- 1) Koordinasi dan Pengawasan secara intensif Satuan Tugas terhadap implementasi InGub DIY Nomor 1/Instr/2022 tentang Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta dan selalu melakukan sosialisasi

serta penegakan peraturan dan penerapan proses serta penguatan media publikasi dan peran media sosial.

- 2) Penyiapan Hotel Mutiara sebagai *shelter* isolasi, munculnya gerakan-gerakan solidaritas masyarakat untuk membantu pemenuhan kebutuhan pasien terkonfirmasi positif. Selain itu masih terus digalakkan kampanye penerapan proses guna meningkatkan kesadaran masyarakat.

4. Dinamika Kebijakan Penyelenggara Vaksinasi

Dinamisasi terjadi dalam penentuan penyelenggara vaksinasi. Dalam ketentuan awal penyelenggaraan vaksinasi ditetapkan untuk dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama puskesmas dan rumah sakit pemerintah. Seiring dengan kebijakan percepatan vaksinasi, kedua jenis faskes tersebut ternyata mengalami kendala untuk dapat memacu pencapaian vaksinasi sehingga dibutuhkan strategi lain yaitu dengan dibukanya pos pelayanan vaksinasi baik dalam skala kecil maupun besar.

Penetapan penyelenggara didasarkan beberapa kriteria yang selanjutnya berkembang menyesuaikan kondisi khususnya dikaitkan dengan upaya percepatan. Tenaga pelaksana vaksinasi pada awal pelaksanaan adalah mereka yang berlatar belakang pendidikan kesehatan (bidan, perawat,

dokter) yang telah mendapatkan pelatihan vaksinasi oleh Kemenkes. Tenagatenaga tersebut diusulkan untuk dilatih oleh Dinkes Kab/Kota, TNI, Polri berasal dari puskesmas, klinik pemerintah atau rumah sakit pemerintah

B. JOGJA SMART PROVINCE

1. Latar Belakang

Jogja Smart Province (JSP) merupakan inisiatif yang dibangun berdasarkan konsep *Digital Government Services* (DGS). DGS fokus pada tata kelola pemerintah yang baik melalui implementasi teknologi. Berbeda dengan DGS, JSP selain untuk memperbaiki tata kelola yang baik dengan implementasi teknologi, juga mendorong kreativitas di setiap elemen

(masyarakat, pemerintah, pelaku bisnis, media dan akademisi) untuk melakukan inovasi. JSP didukung dengan data yang terintegrasi baik Internal Pemda DIY maupun data dari Kab/Kota. Konsep *Smart Province* diposisikan sebagai akselerator bagi arah, strategi, dan program-program pembangunan yang telah ditetapkan di RPJMD DIY 2017-2022.

Tuntutan pengembangan JSP adalah masyarakat Yogyakarta yang semakin modern dan mapan, memiliki segudang ekspektasi, seperti lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang nyaman, adanya area publik yang memadai, semakin mudah untuk *traveling, shopping experience*, dan sebagainya. Solusi untuk memenuhi ekspektasi dan meminimalisir dampak dari urbanisasi itu adalah dengan menghadirkan konsep *Smart Province*.

2. **Progres sampai dengan Akhir Tahun 2022**

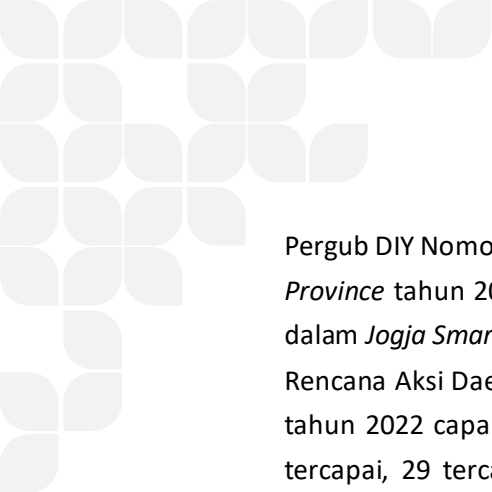
Pengembangan JSP mulai dilakukan tahun 2017 diawali dengan inisiatif penyusunan konsep *Jogja Smart Province*, yang dituangkan dalam Dokumen *Masterplan* JSP yang dilengkapi dengan *roadmap* pengembangan selama lima tahun (2018-2023). Pada tahun 2018, sebagai *pilot project* pengembangan JSP, ditetapkan wilayah sumbu filosofi untuk menjadi fokus pengembangan dengan disusun *Blueprint Smart Area Sumbu Filosofi*. Rintisan pengembangan JSP telah dilakukan pembuatan aplikasi Jogja Istimewa yang memuat berbagai informasi terkait Jogja, kemudian dibuat *command center Integrated Development Management Center* (IDMC). di dalam aplikasi Jogja Istimewa terdapat informasi video *surveillance* yang mengintegrasikan ATCS (*Area Traffic Control System*) Dishub DIY, CCTV Diskominfo DIY dan CCTV UPT Malioboro.

Tahun 2018 dilakukan penyusunan *masterplan* JSP yang terdiri dari dua buku yaitu buku *masterplan* dan buku *Roadmap* JSP. Dilakukan sosialisasi ke OPD pemda DIY dan Kabupaten /Kota di DIY serta penyusunan cetak biru *Smart Area Sumbu Filosofi* untuk membantu implementasi lima dimensi JSP di Sumbu Filosofi.

Pada tahun 2019 ditetapkan Pergub No. 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi JSP untuk mengawal pengembangan JSP. Pengembangan JSP juga didukung melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja sama (PKS) antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kab/Kota se DIY tentang Pengembangan *Smart City/Smart Regency*. Implementasi TIK dalam Rencana Aksi *Jogja Smart Province* di DIY termasuk didalamnya pengembangan sumbu Filosofi adalah: Penyediaan WIFI dan CCTV, Penyediaan Videotron, Penyediaan Peralatan Studio Jogja Istimewa TV dan Ruang *Command Center* IDMC, Penyusunan 4 Dokumen Blueprint *Jogja Smart Province*. Pengembangan Kawasan Smart Area Sumbu Filosofi dengan implementasi *E-ticketing* tempat wisata Museum Sonobudoyo, Pengembangan aplikasi layanan publik Jogja Istimewa, kanal pembayaran *online* dan layanan kedaruratan *Panic Button*. Selain itu untuk mendukung proses transformasi Digital ke masyarakat dilaksanakan Pelatihan dan Pendampingan Management Digital Marketing untuk Lokasi WIFI Pemberdayaan Masyarakat, Pengadaan infrastruktur internet di Kulon Progo dan Penyusunan *Electronic Government Interoperability Framework* (E-GIF) untuk panduan integrasi Pemda DIY.

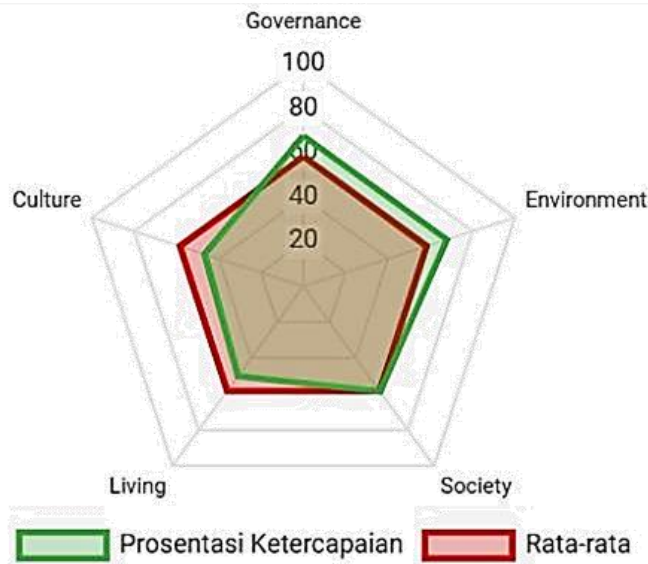
Tahun 2020 dilaksanakan pembangunan *Jogja Center* yang terletak di Gedung Pracimosono Kepatihan. *Jogja Center* ini merupakan rintisan untuk mewujudkan pembangunan dan pengelolaan *Big Data*, sehingga terwujud kebijakan pimpinan yang berbasis data atau *evidence base policy*.

Pada tahun 2021 pembangunan *Jogja Center* sebagai rintisan mewujudkan pembangunan dan pengelolaan *big data* terus dikembangkan. Pada tahun 2022 dilakukan pengembangan *Jogja Center* dengan berbagai domain analitik yaitu domain analitik pariwisata, mobilitas, ekonomi, kesehatan, sosial, budaya dan pendidikan, pengembangan dan pembangunan infrastruktur jaringan Pemda DIY dalam mengurangi *blankspot* internet di SAR Pantai Sadeng, SAR Pantai Wediombo, dan Penyusunan SOP pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis.



Pergub DIY Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah *Jogja Smart Province* tahun 2019-2023 terdapat 368 solusi indikatif yang harus dicapai dalam *Jogja Smart Province*. Dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah *Jogja Smart Province* didapatkan hasil bahwa sampai tahun 2022 capaian solusi indikatif dalam *Jogja Smart Province* yaitu 305 tercapai, 29 tercapai sebagian, 14 diganti, 10 dibatalkan, dan 10 belum tercapai. Terdapat beberapa rencana aksi yang dibatalkan dikarenakan perubahan kewenangan yang dimiliki OPD saat ini sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Pencapaian tertinggi rencana aksi *Jogja Smart Province* di Provinsi DIY ada pada dimensi *Smart Governance*. Hal ini dikarenakan solusi indikatif yang ada pada dimensi *smart governance* memiliki irisan dengan *mandatory* indikator dari Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang setiap tahunnya dievaluasi oleh Kemenpan-RB sehingga memacu Pemda DIY untuk mengimplementasikan solusi indikatif tersebut. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Pemda DIY dalam mengendalikan pelayanan, birokrasi dan kebijakan sudah terlaksana dengan baik. Inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu juga telah terlihat manfaatnya dalam mendukung penyelesaian isu-isu strategis pada *Jogja Smart Province*. Pencapaian terendah pada dimensi *Smart Living* disebabkan adanya beberapa solusi indikatif yang belum tercapai. Dimensi *Smart Culture* adalah dimensi yang unik untuk dikembangkan lebih dalam karena akan menjadi ciri khas dari *Jogja Smart Province*. Langkah Pemda DIY dalam meningkatkan ketercapaian solusi indikatif tersebut antara lain melalui sinergi dan pemberdayaan para seniman dalam mengenalkan dan melestarikan kebudayaan serta keistimewaan yang dimiliki oleh DIY dan meminimalkan konflik kebudayaan dan mengapresiasi para seniman.



Gambar 6.1. Pencapaian Dimensi *Jogja Smart Province*
 Sumber: Diskominfo DIY, 2023

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Implementasi rencana aksi *Jogja Smart Province* memiliki beberapa permasalahan antara lain:

- 1) Isu strategis di wilayah DIY terus bergerak secara dinamis sehingga terdapat beberapa kondisi yang sudah tidak relevan maupun muncul kondisi-kondisi baru yang belum terakomodir.
- 2) Terdapat beberapa perubahan ketugasan dan wewenang OPD karena perubahan regulasi.

b. Solusi

- 1) Dilakukan peninjauan kembali masterplan JSP yang disesuaikan dengan kondisi/isu terkini.
- 2) Dilakukan penyesuaian kembali renaksi atau program strategis dan kegiatan di setiap OPD terkait pelaksanaan JSP dengan RPJMD periode 2022-2027.

C. REFORMASI BIROKRASI

1. Latar Belakang

Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu tujuan prioritas RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sejalan dengan amanat Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Sampai dengan akhir RPJMD capaian tata kelola pemerintahan yang baik ditargetkan mencapai Indeks Reformasi Birokrasi A (Memuaskan). Indeks Reformasi Birokrasi A mencerminkan birokrasi yang semakin memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja bersih dan bebas dari KKN, akuntabel, serta profesional melayani. Oleh karena itu, pada seluruh perangkat daerah dilakukan penguatan delapan area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Progres sampai dengan Akhir Tahun 2022

Berdasarkan Publikasi Kementerian PAN dan RB RI Nomor B/718/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022, Indeks Reformasi Birokrasi Pemda DIY berada pada kategori dan Predikat A dengan nilai 81,62. Kategori Indeks Reformasi Birokrasi Pemda DIY tahun 2022 dengan predikat A sekaligus telah memenuhi target akhir RPJMD. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemda DIY telah berupaya untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan adanya peningkatan nilai pada komponen pengungkit.

Tabel 6.1. Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pada Tahun 2021-2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2021	Nilai 2022
I	Komponen Pengungkit			
1	Pemenuhan	20,00	17,56	18,22
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	7,77	7,27
3	Reform	30,00	22,36	22,79
	Total Komponen Hasil	60,00	47,69	48,28
II	Komponen Hasil			

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2021	Nilai 2022
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	9,32	9,38
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,47	8,43
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,18	8,57
4	Kinerja Organisasi	10,00	7,61	6,96
Total Komponen Hasil		40,00	33,58	33,34
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	81,27	81,62

Sumber: Kemenpan-RB, 2023

Terdapat 10 unsur yang dinilai sebagai hasil antara dari capaian Indeks RB di atas. Berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2022, hasil indeks antara dari masing-masing instansi *leading sector* adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Birokrasi Tahun 2022

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	Sistem Merit	0-400	342,00 (Sangat Baik)	349 (Sangat Baik)	Komisi Aparatur Sipil Negara
2	ASN Profesional	0-100	69,06 (Rendah)	52,09 (Sangat Rendah)	Badan Kepegawaian Negara
3	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	3,49 (Baik)	3,02 (Baik)	Kementerian PANRB
4	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	80,64	78,90	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
5	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,58	4,61	Kementerian PANRB
6	Kapabilitas APIP	0-5	3 (Integrated)	3 (Integrated)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7	Maturitas SPIP	0-5	3 (Terdefinisi)	3 (Terdefinisi)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	97,05 (Zona Hijau)	91,15 (Zona Hijau)	Ombudsman RI
9	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	93,91 (Sangat Memuaskan)	96,16 (Sangat Memuaskan)	Arsip Nasional Republik Indonesia
10	Kualitas Reformasi Hukum	0-100	-	34,60	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sumber: Kemenpan-RB, 2023

Hasil antara area perubahan pada Pemda DIY tahun 2022 terdapat 3 hasil antara yang mendapatkan skor meningkat, yaitu Sistem Merit, Kualitas Pengelolaan Kearsipan, dan Kualitas Pelayanan Publik. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan Pemda DIY berkaitan dengan sistem merit, pelayanan publik, dan kearsipan menunjukkan hasil yang baik. Namun demikian, terdapat pula Hasil Antara Pengukuran yang justru menurun skornya, yaitu ASN profesional, sistem pemerintah berbasis elektronik, kualitas pengelolaan barang dan jasa (PBJ), serta Keepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar untuk penilaian tahun berikutnya kita dapat menaikkan skor hasil antara tersebut. Sedangkan untuk hasil antara Kapasitas APIP dan Maturitas SPIP skornya tetap seperti tahun 2021. Sebagai tambahan terdapat tambahan hasil antara yang di nilai tahun 2022, yaitu Kualitas Reformasi Hukum dengan skor yang masih rendah.

Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Pemda DIY memperoleh nilai yang baik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Birokrasi Tahun 2021-2022

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	90,05 (Predikat AA)	91,09 (Predikat AA)	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	84,73	84,30	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	81,80	85,68	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100	86,92	84,00	SPI Internal oleh KPK

Sumber: Kemenpan-RB, 2023

Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait Komponen Hasil pada tahun 2022 Pemda DIY dari 5 komponen hasil terdapat 3 komponen yang capaian tahun 2022 lebih rendah daripada capaian tahun 2021, yaitu Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) dan Survei Internal Organisasi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Pemda DIY untuk dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta survei internal organisasi. Diharapkan dengan komitmen dan perbaikan terus menerus akan dapat memperbaiki capaian komponen hasil di masa yang akan datang.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemda DIY Tahun 2022 diatur menggunakan Pergub DIY Nomor 94 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021–2024. Kebijakan implementasi Reformasi Birokrasi merupakan kebijakan yang bersifat adaptif, kolaboratif, sistemik dan partisipatif sebagaimana tercermin dalam *Road Map*. Beberapa agenda tahun 2022 antara lain penyederhanaan birokrasi, implementasi budaya SATRIYA dengan *core value* ASN berAKHLAK, penyederhanaan regulasi/kebijakan, percepatan transformasi digital, serta pengembangan *Corporate University*.

Terdapat 8 area Perubahan Reformasi Birokrasi Pemda DIY dengan capaian:

Tabel 6.4. Capaian 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi DIY

No	Area Perubahan	Capaian
1	Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Harmonisasi nilai SATRIYA dengan <i>core values</i> ASN BerAKHLAK ▪ Monev RB melalui <i>co-reformspace</i> ▪ Forum Agen Perubahan ▪ Pengukuran Dampak Budaya SATRIYA terhadap Tata Kelola ▪ Integrasi Agen Perubahan Budaya Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
2	Deregulasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan Peraturan Perundangan ▪ Rebuild “biro hukum” to be advocacy body ▪ Harmonisasi Peraturan ▪ Sistem Informasi Produk Hukum ▪ Tindak lanjut UU Cipta kerja

No	Area Perubahan	Capaian
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan kelembagaan berdasar Performance Based Organization ▪ Penyederhanaan birokrasi pada 246 jabatan, 13 Es III dan 233 Es IV ▪ Analisa beban kerja semua OPD dan Analisa kompetensi jabatan ▪ Sistem Kerja Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan
4	Penataan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Digitalisasi tata kelola pemerintahan (Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Pelaporan)-JogjaPlan, sengguh, si-informan, simpeg/ASN memayu, eprima, jogja centre ▪ Digitalisasi pelayanan publik- EPosti, Jogja Library For All (Jolifa), Jogja Belajar Class, siBAKUL Jogja, e-LAPOR, IDMC ▪ ASB berbasis program/ Proses Bisnis ▪ Jogja Smart Province, Tanda Tangan Elektronik ▪ SOP internal OPD ▪ PBJ berbasis e-procurement
5	Penataan Sistem SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi Assessment Center ▪ Penilaian ASN melalui <i>talent pool</i>. ▪ BKN Awards Tahun 2017, 2019 s.d. 2022 ▪ KASN Award Tahun 2018, 2021 ▪ Coorporate University ▪ Apresiasi ketepatan waktu <i>input</i> Anjab, ABK, Aplikasi SIMONA (Kemendagri) ▪ Penilaian Penerapan <i>Merit System</i> 2018 (Baik), 2020 (Sangat Baik), 2022 (Sangat Baik) (sementara) ▪ Penilaian kinerja diturunkan s.d. individu (Pergub 112/2021) ▪ ASN MEMAYU ▪ Si-Informan (penyesuaian Permenpan 6/2022) ▪ SIMASTER (Sistem Manajemen <i>Assesment Center</i>)
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian kinerja dari Lintas SEKTOR dan inovasi ▪ <i>Refocusing</i> Program kegiatan ▪ Perencanaan berbasis kinerja ▪ e-budgeting ▪ Penganggaran berbasis kinerja (Jogjaplan, Sengguh) ▪ e-evaluasi ▪ DATA-KU ▪ <i>Decision Support System</i> (DSS) ▪ Evaluasi level mikro ▪ Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2023-2027
7	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 % Wajib Laporan LHKPN ▪ Kapabilitas APIP level 3 ▪ Maturitas SPIP 3,510 ▪ EWASDA ▪ Peringkat I Level Pemda Indeks Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku dari KASN

No	Area Perubahan	Capaian
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penghargaan Peringkat I Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kemendagri ▪ Penghargaan Peringkat I Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Gubernur DIY dari Itjen Kemendagri
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TOP 99 dan TOP 45 Kompetisi Inovasi pelayanan Publik 2022 ▪ Kepuasan Masyarakat ▪ Forum Konsultasi Publik ▪ SIPP

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2023

Pada tahun 2022 Kementerian PAN dan RB RI menetapkan jenis *core* layanan teknis dan kuota pengusulan unit kerja yang diusulkan dalam pengusulan WBK/WBBM melalui Surat Deputi Bidang reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Penagwasan Kemen PAN dan RB RI Nomor B/14/PW.00/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Tambahan Pengusulan Unit/satuan kerja menuju WBK/WBBM Tahun 2022. Berdasarkan Surat Deputi Bidang reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Penagwasan Kemen PAN dan RB tersebut, Pemerintah Daerah mendapatkan kuota 4 (empat) unit kerja pada jenis layanan kesehatan, Pendidikan, perijinan dan pajak daerah. Pemerintah Daerah DIY berdasarkan surat Sekretaris Daerah DIY atas nama Gubernur DIY Nomor 356/10671 tanggal 22 Juni 2022 tentang pangajuan Unit Kerja berpredikat menuju WBK/WBBM mengusulkan 4 (empat) unit kerja sebagai berikut.

Tabel 6.5. Usulan Unit Kerja Pelayanan Predikat WBK/WBBM Tahun 2022

No	Unit Kerja	Predikat	Jenis <i>core</i> layanan
1	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman	WBBM	Pajak Daerah
2	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan DIY	WBBM	Kesehatan
3	Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan DIY	WBBM	Kesehatan
4	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	WBK	Pendidikan

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri PAN dan RB RI Nomor 1034 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), unit kerja usulan Pemerintah Daerah DIY belum berhasil meraih predikat WBK/WBBM Tahun

2022. Sehingga, sampai dengan Tahun 2022 perkembangan unit kerja pelayanan yang telah meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah sebagai berikut:

Tabel 6.6. Unit Kerja Pelayanan Predikat WBK/WBBM

No	Unit Kerja	Predikat	Tahun
1	Balai laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan DIY	WBK dan WBBM	2016 dan 2021
2	RS paru Respira Dinas Kesehatan DIY	WBK	2017
3	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan DIY	WBK	2020
4	Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan DIY	WBK	2020
5	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman	WBK	2020
6	Badan Kepegawain Daerah DIY	WBK	2021
7	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota Yogyakarta	WBK	2021
8	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo	WBK	2021
9	Balai Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY	WBK	2021

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2022

Pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilakukan secara bertahap, terukur, lintas sektor melibatkan peran aktif OPD *leading sector* area perubahan secara berkelanjutan. Meskipun dalam situasi pandemi, upaya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemda DIY terhadap 37 OPD tetap intensif dilakukan. Upaya yang dilakukan antara lain pendampingan penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi, pendampingan pengusulan Unit Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta layanan konsultasi dan pendampingan reformasi birokrasi. Pada akhir tahun 2022 telah dilaksanakan evaluasi capaian Indeks Reformasi Birokrasi OPD dengan metode sebagai berikut:

- a. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (bobot 20%) merujuk pada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- b. Evaluasi Aspek Reform Perangkat Daerah (bobot 80%) diperoleh melalui pendalaman aspek-aspek perubahan yang sudah dilakukan.

Tabel 6.7. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	AA	>90-100	Istimewa			
2.	A	>80-90	Sangat Baik	20	22	35
3.	BB	>70-80	Baik	13	15	2
4.	B	>60-70	Cukup Baik	4		
5.	CC	>50-60	Cukup			
6.	C	>30-50	Buruk			
7.	D	0-30	Sangat Buruk			
Total				37	37	37

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2023

Hasil evaluasi Tahun 2022 menunjukkan terdapat 35 Perangkat Daerah berkategori A (Sangat Baik), dan 2 Perangkat Daerah berkategori BB (Baik).

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah sebagai institusi pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang gesit (*agile governance*) melalui penguatan kelembagaan istimewa Pemda DIY, permasalahan yang dihadapi Pemda DIY dalam Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi antara lain:

a. Permasalahan

- 1) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memerlukan perbaikan berkelanjutan untuk merespon Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi.
- 2) Peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja yang strategis sedemikian rupa sehingga seluruh unit kerja di Lingkungan Pemda DIY berkomitmen untuk membangun Zona Integritas.
- 3) Peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi bukan sekedar pada perbaikan tata kelola pemerintahan, namun dapat memberikan kontribusi pada hasil pembangunan.

b. Solusi:

- 1) Pelembagaan Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi dalam Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja.

- 2) Meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas melalui upaya pembinaan unit layanan dan perumusan metodologi Survei mandiri.
- 3) Mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik (Tematik Pengentasan kemiskinan, Tematik Investasi, Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Tematik Prioritas Presiden) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

D. PELABUHAN TANJUNG ADIKARTA

1. Latar Belakang

Tahun 2022 merupakan akhir dari RPJMD DIY tahun 2017 sampai dengan 2022. Dengan tema “Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” diharapkan dapat mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera. Salah satu pelabuhan perikanan yang ada yaitu Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta diharapkan dapat melayani nelayan DIY utamanya di kabupaten Kulon Progo dan Bantul. Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta mulai dibangun tahun 2006 yang diawali dengan kajian studi kelayakan pelabuhan tahun 2001 kemudian Masterplan, DED dan AMDAL di tahun 2002-2005.



Gambar 6.2. Tampak Atas Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta
Sumber: Dislautkan DIY, 2022

2. Progres sampai dengan Akhir Tahun 2022

Fasilitas fisik yang sudah dibangun sampai dengan tahun 2022 meliputi:

- a. Fasilitas darat (fasilitas fungsional dan penunjang) seperti kantor pelabuhan, kantor syahbandar, bengkel, gedung pelelangan ikan, gedung serbaguna, gedung ikan segar, masjid, depot perbekalan, doking kapal, pagar keliling, jalan lingkungan, pos jaga, dan perumahan karyawan.
- b. Fasilitas pokok untuk lantai pelabuhan dan dinding kolam.

Alternatif penyelesaian pembangunan pelabuhan perikanan Tanjung Adikarta melalui dana APBN dan KPBU atau Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha. Namun hingga saat ini belum ada progres dikarenakan belum selesainya penyatuan aset milik Kementerian PUPR RI. Saat ini sedang dilakukan kajian terkait kawasan Aerotropolis Bandara YIA.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Saat ini Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta belum beroperasi dikarenakan terjadinya sedimentasi baik di alur pelayaran maupun di kolam pelabuhan.

b. Solusi

Sedang dilakukan kajian kawasan Aerotropolis kerja sama Pemda DIY dengan JICA, dimana Tanjung Adikarto menjadi salah satu menjadi objek kajian.

E. JOGJA AGRO PARK

1. Latar Belakang

Pembangunan *Jogja Agro Park* (JAP) merupakan program prioritas Gubernur DIY, berdasarkan SK Gub Nomor 353/KEP/2021 tentang Perubahan Atas KepGub DIY Nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan. Pengembangan JAP diharapkan dapat mengurangi alih fungsi lahan dengan membantu petani mengoptimalkan lahan pertaniannya melalui kegiatan pertanian terpadu mulai dari teknologi pembibitan, peternakan, pertanian, sarana pengairan, pengolahan pasca panen, dan pemasaran hasilnya. Kegiatan tersebut dipadukan dengan wisata minat khusus, kegiatan inkubator agribisnis dan program desa mandiri, sehingga dapat meningkatkan kualitas petani dan kelembagaan pertanian, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan meningkatkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.

Pengembangan JAP oleh Pemda DIY merupakan langkah strategis yang sangat relevan dengan dinamika dan peluang pembangunan sektor pertanian masa depan di DIY. Desain dan implementasi pengembangan terintegrasi JAP sangat potensial untuk mengintegrasikan aspek hulu (produksi bahan mentah), industri pengolahan, perdagangan produk, dan pengembangan kelembagaan ekonomi dengan mitra strategis serta dapat dikombinasikan dengan jasa-jasa termasuk wisata berbasis sektor pertanian. Hal yang juga sangat penting adalah potensi JAP sebagai pusat edukasi masyarakat dan pusat pembelajaran inovasi dan tata kelola pertanian bagi pihak terkait di DIY maupun pihak lain di luar DIY.

Konsep pengembangan JAP antara lain:

- a. Unit pembelajaran (inkubator) agribisnis
- b. Tempat pelatihan pertanian
- c. Percontohan *integrated and healthy farming*, dan fasilitas *corporate farming*
- d. Alternatif wahana wisata berbasis Pertanian
- e. Tempat MICE (*Meeting Incentive Convention Exhibition*)

2. Progress Sampai dengan Tahun 2022

Operasional JAP dibiayai dengan APBD DIY Tahun Anggaran 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp3.144.797.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan pakan dan obat ternak, belanja listrik dan air, bimtek pengelolaan JAP, pembelian sarana pertanian, rehab/pembangunan fisik JAP, Kajian Kelembagaan JAP, rapat koordinasi dan pembinaan pegawai di JAP.

Tahun 2022 dilakukan Kajian Kelembagaan *Jogja Agro Park* dengan maksud dan tujuan untuk mengkaji secara menyeluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan pendirian sebuah lembaga yang akan mengelola *Jogja Agro Park* secara profesional, efektif, dan efisien. Hasil Kajian Kelembagaan menunjukkan bahwa *Jogja Agro Park* memenuhi kriteria untuk menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi JAP sampai dengan saat ini yakni

- 1) Belum menjadi lembaga struktural yang professional.
- 2) Belum terpenuhinya sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan sesuai dengan desain yang direncanakan.

b. Solusi

Solusi yang perlu dilakukan antara lain:

- 1) Menindaklanjuti hasil dari Kajian Kelembagaan *Jogja Agro Park* tahun 2022 untuk membentuk UPTD.
- 2) Usulan penganggaran baik APBD maupun APBN guna memenuhi sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan disain yang direncanakan.

F. BANDARA YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT

1. Latar Belakang

Bandar Udara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) dibangun di Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, DIY. Bandar udara ini menggantikan Bandar Udara Internasional Adisutjipto yang sudah tidak mampu lagi menampung kapasitas penumpang dan pesawat. Bandar udara ini berdiri di tanah seluas 600 ha dan menelan biaya 9 triliun rupiah. Bandara ini memiliki terminal seluas 210.000 m² dengan kapasitas 20 juta penumpang per tahun. Selain itu, bandar udara tersebut memiliki hanggar seluas 371.125 m² dengan kapasitas mampu menampung 28 unit pesawat. Bandara ini juga dapat menampung pesawat berbadan lebar, seperti B777, B747, A380 sehingga berperan cukup signifikan dalam mewujudkan konektivitas udara serta mendorong pertumbuhan wilayah DIY serta Pulau Jawa bagian selatan

Bandar Udara YIA pada 28 Agustus 2020 diresmikan oleh Presiden RI dan beroperasi penuh pada tanggal 29 Maret 2020. Seluruh penerbangan domestik dan internasional di Bandara Adisucipto Yogyakarta dipindahkan ke Bandara YIA. Perpindahan operasional penerbangan ini diiringi dengan dukungan aksesibilitas, seperti kesiapan moda transportasi penumpang masuk dan keluar Bandara YIA.

2. Progres sampai dengan Tahun 2022

Beberapa kewenangan yang diampui oleh Pemda DIY dalam mendukung pembangunan YIA diantaranya adalah penyusunan master plan kawasan pendukung bandara (aerotropolis), pembangunan infrastruktur pendukung (akses jalan, aksesibilitas bandara berbasis darat (angkutan jalan), aksesibilitas berbasis rel kereta api, pembangunan *VVIP Room* dan pembangunan SPAM Regional Kamijoro.

Berikut ini adalah progres sampai dengan tahun 2022:


a. **Aerotropolis**

Pembangunan bandara tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan penerbangan, namun juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih luas dan berpengaruh pada perkembangan wilayah di sekitarnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, konsep Aerotropolis sangat sesuai diterapkan di Bandara YIA. di dalam konsep ini, sudah direncanakan dengan memperhatikan aspek seperti sosial-ekonomi, integrasi spasial, urban desain, kebijakan pemerintah, dan manajemen operasional.

Dukungan aksesibilitas menjadi hal yang sangat penting karena saat ini Bandara YIA melayani tidak hanya penerbangan domestik akan tetapi juga melayani penerbangan skala internasional. Bentuk dari dukungan tersebut yaitu dengan adanya rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta-Kulon Progo yang teritegrasi dengan ruas tol Trans Jawa. Jalan tol Yogyakarta-Kulon Progo ini nantinya akan terhubung langsung dengan Bandara YIA dengan simpang susun yang berada di sebelah utara jalan nasional Yogyakarta-Purworejo.



Gambar 6.3. Rencana Trase Jalan Tol Pada Kawasan Sekitar Bandara YIA
Sumber: DPUP-ESDM DIY



Pada tahun 2022, Pemda DIY telah menjalin kerja sama dengan *Japan International Cooperation Agency (JICA)* terkait dengan rencana pembangunan Aerotropolis di Bandar Udara YIA. Adapun bentuk kerja samanya adalah penandatanganan MoU Layanan Konsultasi Teknis Pembangunan Aerotropolis di kawasan Yogyakarta *International Airport*.

Kerja sama dengan JICA ini akan mewujudkan desain pengembangan dan penyusunan master plan pengembangan Aerotropolis DIY. *Master plan* harus disusun agar pembangunan terarah sesuai dengan harapan awal dibangunnya YIA. Hal ini dilakukan agar tidak bersifat parsial, sehingga penting untuk dibangun konsep menyeluruh dalam bentuk Aerotropolis.

b. Akses Jalan

Aksesibilitas Bandara YIA dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada Tahun 2021 telah dilakukan peningkatan ruas jalan Brosot-Toyan sepanjang 2 km. Sedang pada Tahun 2022 penanganan pada Feeder (jalan penghubung) dari jalan provinsi menuju jalan Nasional aksesibilitas Bandara YIA antara lain rehabilitasi jalan Sentolo-Pengasih dan jalan Nagung - Cicikan di Kab. Kulon Progo, dan Jalan Klamong - Tempel sepanjang 1 km di Kab. Sleman.

c. Layanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Menuju Bandara

Pada tahun 2022, Bandara YIA melayani penumpang sebanyak 2.948.888 orang. Jumlah tersebut meningkat 1.549.235 orang dibanding penumpang tahun 2021 sebanyak 1.408.653 orang. Selain itu bandara YIA tercatat melayani penerbangan dan kargo dengan data sebagai berikut:

Tabel 6.8. Data Perbandingan Lalu Lintas Penerbangan Bandara YIA Tahun 2021 - 2022

Penumpang (pax)			Penerbangan (pswt)			Kargo (kg)		
2021	2022	(%)	2021	2022	(%)	2021	2022	(%)
1.408.653	2.948.888	109,34	11.736	21.076	79,58	7.291.814	8.181.938	12,21

Sumber: Dishub DIY, 2023

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas di Bandara YIA, saat ini telah didukung dengan berbagai macam moda baik moda berbasis jalan dan moda berbasis rel. Moda berbasis jalan dilayani oleh Damri dengan rute yang berada di area DIY sebagai berikut:

- 1) Terminal Condong catur-YIA
- 2) Sleman City Hall-YIA
- 3) Bandara Adi Sucipto-YIA
- 4) Titik Nol Kilometer-YIA
- 5) Terminal Palbapang - YIA

Lima rute layanan di atas merupakan layanan angkutan menuju Bandara YIA dengan Jadwal keberangkatan pukul 04.00 - 15.00 WIB dengan tarif Rp20.000,00. Layanan angkutan menuju Bandara YIA tidak hanya dari wilayah Kabupaten kota yang berada DIY namun juga terdapat layanan dari Jawa Tengah dengan rute sebagai berikut :

- 1) Purworejo-Bandara YIA
- 2) Borobudur-Bandara YIA

Sedangkan untuk moda berbasis rel dilayani oleh Kereta Api Bandara dengan rute Stasiun Yogyakarta-Stasiun Wates-Bandara YIA. Layanan Kereta Api Bandara menuju Bandara YIA dengan Jadwal keberangkatan pukul 04.02 WIB sampai 18.00 WIB dengan tarif Rp20.000,00.

d. **Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan**

Peningkatan jumlah penumpang harian yang dilayani Bandara YIA telah memberikan kontribusi peningkatan arus lalu lintas kendaraan bermotor di sekitar Bandara YIA. Berdasarkan data IRSMS Ditlantas Polda DIY, pada tahun 2020-2021, kejadian kecelakaan di sekitar

Bandara YIA yang paling banyak terjadi di ruas Jalan Karangnongko (perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah) - Toyan sebesar 5,25 kejadian/km pada Tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar 3,53 kejadian/km.

Dalam rangka mengantisipasi potensi kecelakaan lalu lintas akibat peningkatan jumlah lalu lintas kendaraan bermotor di sekitar Bandara YIA, beberapa usaha yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas melalui *Area Traffic Control System (ATCS)* dan *Intelligent Transportation System (ITS)* untuk mengurangi kemacetan dan tundaan kendaraan di simpang bersinyal pada jalan akses Bandara YIA, antara lain pada Simpang Brosot.
- 2) Melakukan sosialisasi keselamatan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas bersama instansi terkait di sekitar Bandara YIA.

e. VVIP Room

Salah satu standar nasional fasilitas Bandar udara YIA adalah terminal *VVIP*. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat transit bagi para tamu *VVIP* dan *VIP*. Rencana pengembangannya *VVIP* tersebut sudah tercantum pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1164 Tahun 2013 Tanggal 11 November 2013.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pembangunan *VIP* YIA tahap I berupa pembangunan struktur bawah (pondasi). Kemudian pada tahun 2022 dilakukan pengukuran ulang lahan Gedung Terminal *VIP* YIA antara Pemda DIY dengan Pihak Angkasa Pura II untuk mengetahui batas-batas lahan dan luasan terbaru setelah pembaharuan pembangunan infrastruktur Bandara YIA oleh Angkasa Pura II.

f. SPAM Regional Kamijoro

SPAM Regional Kamijoro (KAPET Kulon Progo dan Pajangan) adalah proyek KPBU sistem penyediaan air minum yang akan melayani Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. Ruang lingkup yang

dikerjasamakan dengan Badan Usaha yaitu Pembangunan IPA 475 lpd, *reservoir* dan jaringan transmisi serta sistem distribusi. Kapasitas produksi sebesar 475 lpd yang dialokasikan untuk Kabupaten Kulon Progo sebesar 286 lpd, dan Kabupaten Bantul sebesar 189 lpd.

Dalam progressnya Pemda DIY telah menyelesaikan pelaksanaan pengadaan lahan untuk SPAM Regional Kamijoro. Sehingga terdapat 7 lahan yang sudah siap digunakan untuk SPAM Regional Kamijoro yang terdiri dari 1 lokasi untuk IPA, 2 lokasi untuk *reservoir* di Kabupaten Kulon Progo, 2 lokasi untuk *reservoir* di Kabupaten Bantul, 1 lokasi untuk rumah *booster* di Kabupaten Bantul, dan 1 lokasi untuk jalur pipa distribusi di Kabupaten Kulon Progo.

Pembangunan Intake 500 lpd dan Jaringan Transmisi tahap I oleh BBWSO, Pembebasan Lahan dan AMDAL oleh Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, Fasilitas PDF dari Kementerian Keuangan pada Penyusunan FBC dan Tahap Transaksi yang didampingi oleh PT. SMI dan Penjaminan oleh PT. PII.

Untuk saat ini Bandara YIA sudah dilayani oleh PDAM Kab. Kulon Progo dengan sistem yang ada di IPA Sapon sebesar 14 liter/detik. Sedangkan kebutuhan air Bandara YIA saat penumpang mencapai *ultimate* adalah sebesar 60 liter/detik.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Belum adanya kesepakatan tarif air curah pada masing-masing PDAM baik Kabupaten Kulon Progo maupun Kabupaten Bantul.
- 2) Adanya perubahan ukuran lahan dari terminal *VIP Room* Bandara YIA serta belum terselesaikannya pembangunan konstruksi terminal *VIP Room* Bandara YIA sehingga tidak dapat digunakan secara fungsional.

- 3) Masih perlunya peningkatan struktur jalan provinsi yang merupakan aksesibilitas Bandara YIA yaitu Ruas Jalan Brosot-Toyan.

b. Solusi

- 1) Pemda DIY mengajukan *addendum* waktu dan penambahan ruang lingkup kajian di hilir serta *business plan* untuk kedua PDAM *offtaker* kepada Kementerian Keuangan sebagai penyedia fasilitas penyiapan proyek dan pelaksanaan transaksi Proyek KPBU SPAM Regional Kamijoro dan terus melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Pemerintah Kabupaten serta *stakeholder* lainnya untuk penyelesaian permasalahan tersebut.
- 2) Perlu dilakukan *Review DED* Pembangunan *VIP Room* Bandara YIA dengan menyesuaikan ukuran lahan terbaru. Serta perlu penyelesaian Bangunan Terminal *VIP Room* Bandara YIA berupa pekerjaan struktur atas, arsitektural, mekanikal elektrikal, interior dan lansekap.
- 3) Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Brosot - Toyan sepanjang 3 Km.

G. PENATAAN KAWASAN SUMBU FILOSOFI

1. Latar Belakang

Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah sebuah sumbu imajiner berupa garis lurus ditarik dari Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, dan Tugu Pal Putih (Tugu Golong-gilig). Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah simbol dari keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya (Hablum minallah), manusia dengan manusia (Hablum minannas), dan manusia dengan alam. Dalam kaitannya dengan alam, hal ini termasuk hubungan manusia dengan lima elemen pembentuk alam sekitar yaitu api (dahana) dari Gunung Merapi, tanah (bantala) dari bumi Ngayogyakarta, air (tirta) dari Laut Selatan, angin (maruta), dan angkasa (ether).

Demikian juga tiga unsur yang menjadikan kehidupan (fisik, tenaga dan jiwa) telah tercakup di dalam filosofis sumbu imajiner tersebut. Sri Sultan Hamengku Buwana yang menyandang gelar Sayidin Panatagama Kalifatullah konsep filosofi sumbu imajiner yang Hinduistis ini kemudian mengubahnya menjadi konsep filosofi Islam Jawa “Hamêmayu Hayuning Bawana”, dan “Manunggaling Kawula lan Gusti”. Oleh karenanya penataan sumbu filosofi sangat diperlukan, mengingat bahwa tujuan utama penobatan Sumbu Filosofis tidak hanya untuk menjadikannya sebagai daya tarik wisata budaya tetapi untuk tujuan pelestarian warisan budaya itu sendiri. Dalam rangka penataan sumbu filosofi, Dinas PUPESDM DIY melakukan Perencanaan Jogja Planning Gallery, Pengelolaan Toilet Titik Nol, Pemeliharaan Berkala Pedestrian Malioboro, Pengadaan tanah Akses Penghubung Tempat Parkiran Beskalan - Teras Malioboro 1.

2. Progres Sampai Dengan Tahun 2022

Penataan Kawasan Sumbu Filosofis, sampai dengan tahun 2022 disampaikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Jogja *Planning Gallery*

Jogja Planning Gallery merupakan bangunan yang akan dibangun di Jalan Malioboro 54-56 Yogyakarta. Ketentuan bangunan yang ada di Kawasan Sumbu Filosofis perlu mewujudkan citra karakter kawasan sebagai bagian dari Sumbu Imajiner berupa garis lurus yang mencerminkan Sangkan Paraning Dumadi. Bangunan ini direncanakan sebagai wadah *miniature gallery* perencanaan DIY, rencana penataan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten, sejarah perkembangan Yogyakarta sebagai kota budaya, kawasan cagar budaya, dan memperhatikan kondisi bentang alam dan budaya di Yogyakarta. Selain itu *Jogja Planning Gallery* diharapkan menjadi wadah ruang pameran bagi pelaku seni serta sebagai tempat wisata edukasi dan promosi budaya.

Pada tahun 2022, perencanaan teknis *Jogja Planning Gallery* dimulai dengan melaksanakan Sayembara Pra Desain *Jogja Planning Gallery*. Sayembara ini bertujuan untuk memperoleh ide/gagasan dari para profesional di bidang Arsitek dalam merencanakan bangunan. Menggagas tema Transformasi JOGJA dari Kota bersejarah menjadi Kota Budaya Berkelanjutan dengan menterjemahkan konsep *gallery* yang nantinya berisi informasi JOGJA masa lalu, masa kini dan masa depan. Jumlah peserta yang mendaftar yaitu 118 (seratus delapan belas) tim, selanjutnya yang menyerahkan hasil karya sejumlah 65 (enam puluh lima) tim. Dimana dari sayembara ini dihasilkan 3 (tiga) Pemenang dari hasil karya terbaik pilihan Dewan Juri.

Menindaklanjuti hasil Sayembara dilaksanakan Harmonisasi Karya Sayembara *Jogja Planning Gallery*, yang bertujuan menkolaborasi hasil karya pemenang menjadi suatu karya yang lengkap dan memiliki citra kawasan/*landmark* dengan ide yang kreatif. Pada pekerjaan ini dikoordinasi oleh Pemenang Pertama, yang memiliki judul karya "***Dhasar Mangsa Ngarsa***" yang artinya membangun masa depan berdasarkan nilai luhur dengan konsep *Ing Mbangun Majeng Tuladha* (dalam membangun memperhatikan kontes), *Unggah-Ungguhing Laku* (menghargai prinsip yang ada) dan *Lestaring Alam* (melestarikan lingkungan/alam).

b. Pengelolaan Toilet Titik Nol

Seiring dengan banyaknya jumlah pengunjung di kawasan Malioboro, maka sarana prasarana umum perlu dipenuhi salah satunya penyediaan toilet umum. Toilet Titik Nol terletak di Jalan Senopati, yang berada di kawasan Taman Parkir Senopati. Pemda DIY melakukan pembangunan toilet bawah tanah ini pada tahun 2017 dengan tema mengusung konsep modern, yang terlihat dari desain fasad di area *entrance* dengan menggunakan material baja dan kaca. Fasilitas toilet yang disediakan berjumlah 12 (dua belas) kubikal toilet untuk wanita, 7 (tujuh) kubikal toilet untuk pria dan 10 (sepuluh) urinoir untuk pria, 1 (satu) ruang toilet untuk difabel dan 1 (satu) ruang laktasi. Untuk

menunjang pengelolaan Toilet Titik Nol disediakan jasa kebersihan dengan jumlah tenaga kerja 10 (sepuluh) orang. Pada tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY mencatatkan jumlah pengunjung Toilet Titik Nol 252.683 (dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tiga) orang, dengan rata-rata setiap harinya yaitu 692 (enam ratus sembilan puluh dua) orang/hari.

c. Pemeliharaan Berkala Pedestrian Malioboro

Pemeliharaan Malioboro merupakan agenda rutin dalam Penataan kawasan Malioboro sebagai fasilitas sarana prasarana umum yang dimanfaatkan oleh masyarakat DIY dan wisatawan sebagai ruang terbuka yang berada di Sumbu Filosofis. Pada tahun 2022, dilakukan pemindahan pedagang yang berjualan di sepanjang pertokoan Malioboro menuju ke Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Fasade muka bangunan pertokoan menjadi terlihat jelas dan lantai teraso yang selama ini tertutup lapak pedagang menjadi tampak. Untuk itu fokus pemeliharaan Pedestrian Malioboro pada tahun ini adalah pemolesan lantai teraso yang berada pada titik depan DPRD DIY, depan ex. Hotel Mutiara dan depan Kepatihan DIY.

d. Pengadaan Tanah Akses Penghubung Tempat Parkiran Beskalan - Teras Malioboro 1

Dalam rangka peningkatan kapasitas jumlah penjual di Teras Malioboro 1 sebagai tempat wisata Belanja dan Kuliner yang tersedia di kawasan Sumbu Filosofi diperlukan pengadaan tanah. Adapun untuk akses penghubung tempat parkir Beskalan dan Teras Malioboro ini bertujuan memberikan akses sirkulasi yang memudahkan pengunjung masuk/keluar dari sisi utara yang berbatasan langsung dengan Taman Parkir Beskalan / sisi Pertokoan Ramai. Pengadaan tanah ini berlokasi di Beskalan RT 006/ RW 002 Kelurahan Ngupasan Kemantren Gondoman, Kota Yogyakarta dengan luas total 973 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga) m² dengan jumlah yang sertifikat yang diserahkan ada 7 (tujuh) bidang.

e. **Penataan dan Pengendalian Lalu Lintas di Kawasan Semi Pedestrian Malioboro**

Dalam rangka Pemantauan Penerapan Semi Pedestrian Malioboro serta mendukung usulan sumbu filosofi sebagai *world heritage*, telah dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mewujudkan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan di Kawasan Sumbu Filosofi. Kegiatan yang dilakukan meliputi: pengawasan ketertiban lalu lintas, pemasangan rambu dan alat, pelestarian moda tradisional serta pelestarian lingkungan.

1) **Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas**

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilakukan pada Kawasan sumbu filosofi adalah sebagai berikut:

a) **Sosialisasi Rencana *contra flow***

Hal ini merupakan tindak lanjut evaluasi kinerja trans Jogja TA 2022 dan merupakan langkah awal dalam rangka memperoleh masukan dan saran terkait rencana akan diberlakukannya *contra flow* untuk Trans Jogja pada ruas jalan Pasar Kembang.

b) **Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan**

Pada tahun 2022 telah diadakan pemeliharaan terhadap 5 pelican crossing di sepanjang jalan Margo Utomo (2 titik) dan Jl. Malioboro (3 titik). Dalam rangka memenuhi persyaratan teknis maka pada titik lokasi terpasangnya *pelican crossing* telah dilengkapi dengan *zebra cross*.

c) **Pengawasan Lalu Lintas**

Pengawasan lalu lintas di Kawasan Sumbu Filosofi yang mencakup ruas jalan : Tugu Jogja (Tugu Pal Putih)-Malioboro-Kraton-Panggung Krapyak, bertujuan untuk menjaga ketertiban berlalu lintas dalam rangka mewujudkan kelancaran lalu lintas terutama di Kawasan Malioboro, sebagai tempat tujuan utama wisatawan. Penertiban lalu lintas terhadap pengguna jalan dilakukan oleh 72 personil


petugas Jogo Margo dan dilaksanakan secara persuasif. Sepanjang tahun 2022 masih banyak ditemukan pelanggaran dengan hasil sebagai berikut : jumlah pelanggar sebanyak 1.295 kendaraan, dengan jenis pelanggaran berupa pelanggaran parkir (511 kendaraan), pelanggaran rambu dan marka (759 kendaraan) serta *contra flow* (25 kendaraan).

Menindaklanjuti SE Gub DIY Nomor 551/4671 tanggal 31 Maret 2022 tentang Larangan Operasional Kendaraan tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya petugas Jogo Margo bersama Satpol PP DIY melakukan penertiban terhadap pengguna skuter listrik, *hoverboard*, *electric unicycle*, dan otoped listrik. Hasil penertiban ditemukan masih banyak pelanggaran dengan diberi tindakan peneguran dan pembinaan kepada 2 operator (penyewa) kendaraan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, maka penertiban dilakukan bersama-sama dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Satpol PP Kota Yogyakarta serta Satpol PP DIY. Hasil operasi bersama tersebut masih ditemukan banyak pelanggaran yaitu 23 kendaraan yang menggunakan penggerak motor listrik disita sebagai barang bukti dan selanjutnya dilakukan pembinaan.

2) *Pelestarian Moda Angkutan Tradisional*

Sebagai upaya pelestarian moda tradisional pada tahun 2022 telah dilakukan pendataan terhadap becak kayuh, yang menghasilkan data sebanyak 115 becak kayuh yang beroperasi di sepanjang sumbu filosofi. Selanjutnya untuk meringankan beban mengayuh maka becak kayuh ini akan dilengkapi dengan tenaga penguat. Pada akhir tahun 2022 sebanyak 14 jenis *prototype* becak kayuh



bertenaga penguat telah diproduksi oleh Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan dan Olah Raga DIY (Balai Latihan Pendidikan Teknik/BLPT) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY (Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna/BPTTG).

Sedangkan sebagai upaya pelestarian terhadap andong pada tahun 2022 telah diproduksi sarana publikasi berupa video promosi andong sebagai angkutan istimewa

3) *Penyediaan Lahan Parkir*

Untuk memenuhi kebutuhan lahan parkir pada kawasan sumbu filosofi pada tahun 2022 telah disepakati pengelolaan lahan parkir eks UPN Ketandan untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY dengan sistem sewa. Hal ini didasarkan pada hasil kajian Pengelolaan dan Bentuk Kerja sama Lahan UPN Ketandan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan DIY

4) *Pengukuran Emisi Gas Buang Sektor Transportasi*

Untuk mengetahui jumlah gas karbon yang ada di wilayah DIY, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda dua sebanyak 968 unit, kendaraan roda empat berbahan bakar bensin sebanyak 214 unit dan kendaraan roda 4 berbahan bakar solar sebanyak 27 unit. Berdasarkan analisis terhadap data hasil pengambilan sampel maka diperoleh kesimpulan bahwa hasil konversi pertahun untuk beban emisi yang dihasilkan oleh sektor transportasi adalah sebesar adalah 2.214.901 ton CO₂eq per tahun.

Berdasarkan analisis untuk parameter CO₂ dihasilkan paling banyak oleh kendaraan roda dua (91.113.671 ton CO₂eq per tahun) kemudian diikuti oleh kendaraan roda empat (705.999 ton CO₂ eq per tahun) dan truk sedang (193.041 ton CO₂eq per tahun). Sedangkan untuk NOX dan SO₂ paling banyak dihasilkan oleh kendaraan roda empat. Faktor emisi NOX dan SO₂ yang dihasilkan

kendaraan roda dua menunjukkan nilai paling rendah di antara seluruh jenis kendaraan yang ada. Akan tetapi karena jumlah kendaraan roda dua yang sangat besar (78% dari populasi kendaraan yang ada), kendaraan roda dua menghasilkan emisi (NOX dan SO₂) paling banyak.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pada kawasan sumbu filosofi, khususnya di Jalan Margo Utomo seperti Pembangunan *Jogja Planning Gallery*, Relokasi Gedung DPRD DIY ke Jalan Kenari dan Rencana Pembangunan Teras Malioboro, yang waktu pelaksanaannya perlu dikoordinasikan kembali.

b. Solusi

Penyusunan tata kala waktu rencana pembangunan *Jogja Planning Gallery*, Relokasi Gedung DPRD DIY ke Jalan Kenari dan Rencana Pembangunan Teras Malioboro.

H. PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN

1. Latar Belakang

DIY merupakan provinsi dengan perkembangan ekonomi yang cukup pesat, yang juga dikenal sebagai kota wisata dan kota pelajar berbasis kebudayaan. Seiring berkembangnya kunjungan wisata terutama di daerah selatan atau pesisir selatan mendorong Pemda DIY membangun Kawasan selatan. Salah satunya melalui pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan atau yang sering di singkat dengan JJLS. JJLS diharapkan menjadi pintu masuk DIY yang dahulu di utara atau di Kabupaten Sleman, sekarang diubah menjadi di selatan. JJLS melewati 3 (tiga) kabupaten di DIY: Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo.



Gambar 6.4. Peta JLS di Pulau Jawa
 Sumber: DPUPESDM DIY, 2022

Untuk mewujudkan pengembangan wilayah selatan Yogyakarta khususnya pembangunan jalan baru JLS telah disepakati antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal pembagian tanggung jawab, wewenang dan yang menjadi kewajiban masing-masing pemerintah diatur sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah baik kabupaten setempat maupun DIY sesuai kemampuan keuangan daerah tiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk pembebasan tanah, tanam tumbuh/ Karangkitri maupun bangunan baik itu tanah hak milik, *Sultan Ground* dan lain-lain.
- b. Pemerintah Pusat dalam hal ini lewat Kementerian Pekerjaan Umum berkewajiban membangun fisik konstruksi jalan berikut bangunan pelengkap pada lokasi yang tanahnya telah dibebaskan oleh Pemda DIY.

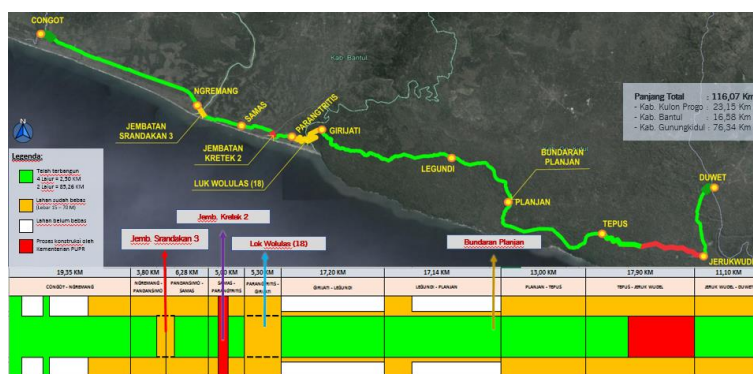
Jaringan jalan sebagai sarana prasarana transportasi memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung terciptanya aksesibilitas arus manusia, barang dan jasa secara meluas di seluruh wilayah. Program pemerintah pusat dalam mengembangkan jaringan jalan khususnya untuk mengimbangi kepadatan lalu lintas di Pantura, memerlukan percepatan pembangunan jalan di wilayah selatan. Hal ini penting untuk menunjang tata ruang khususnya untuk wilayah yang belum tersambung dan daerah terisolir di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DIY. Oleh karena itu, pengembangan sarana prasarana jalan di

wilayah DIY yang meliputi di antaranya: Gunungkidul (76,34 km), Bantul (16,58 km) dan Kulon Progo (23,15 km) yang dalam hal ini dikenal dengan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

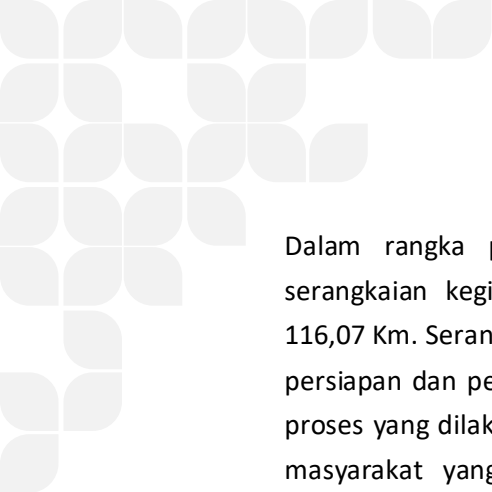
Trase jalan JJLS DIY dimulai dari ujung barat Congot (Kabupaten Kulon Progo) yang berbatasan dengan kabupaten Purworejo (Jawa Tengah) dan berakhir di ujung timur di Desa Duwet (Kabupaten Gunungkidul) yang berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Rute JJLS di Kabupaten Kulon Progo meliputi Congot-Ngrengang-Jembatan Srandakan 3 sepanjang 23,15 km. Adapun rute JJLS di Kabupaten Bantul melalui Pandansimo-Samas - Parangtritis-Girijati sepanjang 16,58 km. Sedangkan rute JJLS di Kabupaten Gunungkidul rute yang dilalui adalah ruas jalan Girijati-Tlogowarak-Klompok-Legundi-Planjan-Tepus-Jerukwudel-Baran-Duwet 76,34 km.

2. Progress Sampai dengan Tahun 2022

Pembangunan JJLS di DIY dilakukan secara bertahap berupa pembebasan lahan dan pelaksanaan konstruksi. Pada tahap sebelumnya telah dilakukan pembebasan lahan kurang lebih selebar 25 - 35 m untuk rencana pembangunan jalan 4 lajur, sebagai tahap pertama telah dibangun jalan dengan tipe jalan 2 (dua) lajur dengan lebar 7 - 7,5 m. Sampai dengan akhir tahun tahun 2022, lahan yang sudah dibebaskan untuk kebutuhan 2 lajur sudah bebas 100% (116,07 Km) dan untuk kebutuhan 4 lajur sudah bebas 68,39% (79,38 Km).



Gambar 6.5. Progres Pembangunan JJLS pada Sepanjang Wilayah Selatan DIY
Sumber: DPUPESDM DIY, 2022



Dalam rangka pembangunan JJLS, Pemda DIY telah melaksanakan serangkaian kegiatan demi terwujudnya pembangunan JJLS sepanjang 116,07 Km. Serangkaian kegiatan tersebut dimulai dari tahap perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah. Dalam tahap perencanaan, proses yang dilaksanakan antara lain sosialisasi kepada instansi terkait dan masyarakat yang terdampak, serta melaksanakan pemberkasan, dan menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah. Selanjutnya dalam tahapan persiapan, proses yang dilaksanakan antara lain penetapan tim persiapan, sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak, konsultasi publik, dan penerbitan IPL oleh Gubernur. Setelah tahapan persiapan, tahapan selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, proses yang dilakukan antara lain penetapan tim pelaksana pengadaan tanah, inventarisasi dan identifikasi, pengumuman daftar nominatif dan peta bidang, dilaksanakan verifikasi dan perbaikan daftar nominatif dan peta bidang, pelaksanaan penilaian harga tanah (appraisal), musyawarah bentuk ganti kerugian, pelepasan hak atas tanah, dan pembayaran ganti kerugian. Hingga pada akhirnya, dilaksanakan proses pensertifikatan yang akan diserahkan kepada warga yang terdampak jika tanahnya sebagian terkena, dan menjadi aset pemerintah daerah jika tanah yang terkena adalah seluruhnya. Semua tahapan pembebasan lahan menggunakan dana keistimewaan. Karena kegiatan tersebut merupakan kewenangan tata ruang untuk Satuan Ruang Strategis keistimewaan. Pada anggaran 2022, telah dialokasikan dana untuk kegiatan sebagai berikut:

a. **Pembebasan Lahan untuk Segmen Garongan - Congot (Lanjutan; 8,89 km)**

Ruas Jalan Segmen Garongan - Congot telah tersambung. Pada Segmen Garongan-Congot terdapat jalan eksisting yang mendukung penyambungan segmen tersebut. Meskipun sudah tersambung, ruas jalan tersebut belum memenuhi syarat untuk kebutuhan lebar desain 4 lajur. Sehingga perlu dilakukan pembebasan lahan pada sisi luar jalan eksisting. Sampai dengan akhir tahun 2022, telah terselesaikan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk Segmen Garongan - Congot yang terlaksana seluas 58.512 m².

b. Pembebasan Lahan untuk Segmen Ngremang-Garongan

Pembebasan lahan untuk Segmen Ngremang-Garongan telah selesai dilaksanakan pada Tahun 2021. Namun demikian, terdapat satu bidang yang masih sengketa yaitu di desa Bugel. Hal itu menjadi prioritas penyelesaian di Tahun 2022. Total luas pembebasan tanah pada segmen tersebut seluas 156 m².

c. Pembebasan Lahan Tambahan untuk Segmen Kretek - Girijati

Pembebasan Lahan Tambahan untuk Segmen Kretek-Girijati seluas 5.455 m² untuk tanah milik warga dan pembayaran ganti kerugian karangkitri di atas Tanah Tutupan. Untuk tanah tutupan akan diselesaikan secara khusus dengan proses konsolidasi tanah. Pembebasan lahan tersebut dilaksanakan untuk mempersiapkan pembangunan jalan Kretek-Girijati pada Tahun 2023 yang membutuhkan lahan tambahan berdasarkan *readiness criteria*.

d. Pembebasan Lahan untuk Simpang Bundaran Planjan

Pembebasan lahan untuk Simpang Bundaran Planjan merupakan bagian dari rencana pembangunan jalan Segmen Legundi-Planjan sepanjang 17,14 Km. Pembebasan ini merupakan tindak lanjut tahapan IPL yang telah dilaksanakan di Tahun 2021. Lahan yang dibebaskan di Simpang Bundaran yaitu sepanjang 700 meter. Pembebasan dilaksanakan di dua Kalurahan yaitu Kalurahan Kemadang dan Kalurahan Planjan. Lahan yang dibebaskan seluas 10.780 m² untuk tanah milik warga dan pembayaran bangunan dan karangkitri di atas Tanah Kas Desa. Status Tanah Kas Desa merupakan Tanah Sultan (*Sultan Ground*). Dari hasil kesepakatan dengan pihak Kraton, tanah kas desa tersebut tidak dilaksanakan pelepasan haknya tetapi diberikan hak pakai untuk pembangunan JLS.

Selain 4 kegiatan tersebut di atas, Pemda DIY melalui Dana Keistimewaan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan pembebasan lahan dan pembangunan JJLS yaitu :

- 1) Proses Pensertifikatan Tanah JJLS di Gunungkidul.
- 2) Proses Pensertifikatan Tanah JJLS di Bantul.
- 3) Proses Pensertifikatan Tanah JJLS di Kulon Progo.

Tabel 6.9. Progress Pembebasan Lahan JJLS pada Sepanjang Wilayah Selatan DIY

No.	Ruas	Pan-jang (Km)	Pembebasan Lahan				Konstruksi		Keterangan
			2 lajur		4 lajur		2 lajur (Km)	4 lajur (Km)	
			Bebas (Km)	Belum Bebas (Km)	Bebas (Km)	Belum Bebas (Km)			
I	Kab. Kulon progo	23,15	23,15	-	16,10	7,05	23,15	2,00	
1	Congot - Ngremang	19,35	19,35	-	12,30	7,05	19,35	2,00	Pembebasan Segmen Congot - Garongan (2021-2022)
2	Ngremang - Pandansimo	3,80	3,80	-	3,80	-	3,80	-	
II	KAB. BANTUL	16,58	16,58	-	16,58	-	9,58	2,60	
3	Pandansimo - Samas	6,28	6,28	-	6,28	-	4,58	-	
4	Samas - Parangtritis	5,00	5,00	-	5,00	-	5,00	2,60	
5	Parangtritis - Girijati	5,30	5,30	-	5,30	-	-	-	
III	Kab. Gunungkidul	76,34	76,34	-	46,70	29,64	64,59	0,50	
6	Girijati - Legundi	17,20	17,20	-	-	17,20	17,20	-	
7	Legundi - Planjan	17,14	17,14	-	4,70	12,44	17,14	-	
8	Planjan - Tepus	13,00	13,00	-	13,00	-	13,00	-	
9	Tepus - Jerukwudel	17,90	17,90	-	17,90	-	6,15	-	Fase konstruksi 2 lajur:10,92 Km (MYC)
10	Jerukwudel - Duwet	11,10	11,10	-	11,10	-	11,10	0,50	
	PANJANG TOTAL	116,07	116,07	-	79,38	36,69	97,32	5,10	
	Persentase Terhadap panjang total	100,00%	100,00%	0,00%	68,39%	31,61%	83,85%	4,39%	

Sumber: DPUPESDM DIY, 2023

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Kendala proses pensertifikatan tanah JJLS pada pembebasan lahan diantaranya: (a) belum tersedianya peta pembebasan tanah sebagai salah satu syarat pensertifikatan dan terjadi pada pembebasan lahan di kurun waktu 2005 - 2013; dan (b) lamanya waktu yang dibutuhkan dan panjangnya birokrasi untuk proses

pensertifikatan menyebabkan masih banyak pembebasan tanah yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya belum terselesaikan proses pensertifikatannya dan menumpuk sampai dengan saat ini.

- 2) Pembangunan JJLS yang luas dan dengan panjang total kurang lebih 116 Km membutuhkan lahan yang sangat besar dan luas. Sehingga pembangunan konstruksinya memerlukan perencanaan yang detail dengan tahapan yang berkesinambungan. Kondisi tersebut mengakibatkan tuntutan akan kebutuhan anggaran yang besar dan terjadwal tiap tahun.

b. Solusi

- 1) Pemda DIY berkoordinasi dengan pihak - pihak terkait baik itu BPN, Kantor Pertanahan ataupun Dispertaru Kabupaten untuk menyediakan Peta Pembebasan Tanah yang komprehensif dan valid untuk mendukung proses sertifikasi tanah JJLS.
- 2) Meningkatkan koordinasi, sinergi dan harmonisasi lintas sektor Pemda DIY (Dinas PUP - ESDM DIY, Paniradya, BPKA, Dispertaru, dll) dengan BPN/Kantor Pertanahan yang berwenang untuk penerbitan sertifikat untuk penyelesaian permasalahan sertifikasi tanah, khususnya sertifikasi tanah JJLS. Untuk percepatan penyelesaian konstruksi jalan JJLS dengan 4 lajur, diperlukan program perencanaan dan penganggaran yang berkelanjutan tiap tahun. Hal itu perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan dan percepatan fisik konstruksi.

I. PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA SE DIY

1. Latar Belakang

Pembangunan Taman Budaya merupakan upaya Pemda DIY bersama Kabupaten/Kota untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan dengan menyediakan sarana dan prasarana ruang ekspresi budaya di seluruh Kabupaten/Kota di DIY. Ruang ekspresi budaya sebagai upaya

pemajuan kebudayaan secara berjenjang telah diupayakan untuk disediakan berjenjang dari tingkat kalurahan berupa Balai Budaya yang diinisiasi menjadi Desa Budaya dan Desa Mandiri Budaya sampai dengan Taman Budaya di masing-masing Kabupaten/Kota. Taman Budaya berfungsi sebagai tempat pertemuan dan berkumpul pelaku budaya untuk melakukan pertukaran informasi, berdiskusi, dan mempresentasikan karya dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Sampai dengan tahun 2022, terdapat dua Taman Budaya Kabupaten/Kota yang telah selesai dibangun dan telah berfungsi yaitu Taman Budaya Kulon Progo dan Taman Budaya Gunungkidul. Kedua Taman Budaya tersebut telah beroperasi sesuai tugas dan fungsinya dengan terbentuknya Lembaga pengelola berupa Unit Pelaksana Teknis. Adapun pada Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman telah menyiapkan lahan dan menunggu proses pembangunan fisiknya.

Taman Budaya Gunungkidul dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya Gunungkidul berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul. Adapun Taman Budaya Kulon Progo dikelola oleh Lembaga Pengelola Taman Budaya yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya.



Taman Budaya Gunungkidul

Taman Budaya Kulon Progo

Gambar 6.6. Taman Budaya Gunungkidul dan Taman Budaya Kulon Progo

Sumber: Disbud DIY, 2023

2. Progres sampai dengan Tahun 2022

Progres pembangunan taman budaya di wilayah kabupaten/kota se-DIY adalah sebagai berikut:

a. Taman Budaya Yogyakarta

Tabel 6.10. Pembangunan Taman Budaya Yogyakarta

No.	Lokasi	Tahun	Uraian
1.	Taman Budaya Yogyakarta	2017	Telah dilakukan pengadaaan tanah seluas 20.000.20 m ² berlokasi di Eks STIE Kerja Sama Jalan Parangtritis km 3,5 Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Direncanakan akan dibangun gedung kesenian bertaraf internasional.
		2018	Dianggarkan penyusunan Masterplan kawasan eks STIE Kerja Sama oleh PU DIY
		2019	<i>Masterplan</i> kawasan Eks STIE Kerja sama telah dipaparkan kepada bapak Gubernur dan terdapat beberapa koreksi terkait dengan <i>content</i> yang ada di dalam bangunan tersebut.
		2020	Pelaksanaan FGD Rencana PPK Yogyakarta, dengan tujuan menjaring aspirasi dan inventarisasi kebutuhan pada Pusat Pengembangan Kebudayaan sehingga konten/isinya sesuai dengan harapan dan jamannya. Melibatkan beberapa Seniman, Akademisi, dan stakeholder terkait lainnya serta melibatkan beberapa narasumber teknis. FGD dilaksanakan 5 kali dengan tema pembahasan bidang seni rupa, bidang film, bidang seni peran, bidang seni tari dan bidang seni musik.
		2021	Pelaksanaan Kajian Materi Teknis Pusat Pengembangan Kebudayaan (PPK) Yogyakarta. Penyusunan dokumen materi teknis perencanaan PPK yang memuat konsep, arahan, pedoman dari aspek-aspek strategis yang akan menjadi acuan perencanaan dan pembangunan PPK. Materi tersebut akan diserahkan kepada Dinas PUP-ESDM DIY untuk dilakukan <i>review</i> dan pelaksanaan tahapan selanjutnya dalam pembuatan Master Plan serta DED PPK
		2022	Hasil <i>Review</i> Masterplan Penataan Kawasan untuk Pusat Pengembangan Kebudayaan Yogyakarta telah dipaparkan kepada Bapak Gubernur DIY. Direncanakan pada tahun 2023 akan dilaksanakan Sayembara Desain PPK DIY

Sumber: Disbud DIY, 2023

b. Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo

Tabel 6.11. Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo

No.	Lokasi	Tahun	Uraian
1.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo	2014	Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo dimulai tahun 2014 di bawah KPA Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dengan anggaran Rp3.701.107.000,00 dan telah mewujudkan Konstruksi Bangunan Pondasi Gedung <i>Concert Hall</i>
		2015	Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo Tahap II Tahun 2015 di bawah KPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo telah meneruskan Konstruksi Bangunan Gedung <i>Concert Hall</i> beserta arsitektur dan mekanikalnya
		2016	Tahap III Tahun 2016 Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo di bawah KPA Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo telah mengadakan sarana dan prasarana untuk gedung <i>Concert Hall</i> seperti <i>sound system</i> , kursi, dan AC (masing-masing 1 paket)
		2017	Tahap IV Tahun 2017 Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo di bawah KPA Dinas Pekerjaan Umum Kulon Progo dengan output pekerjaan joglo seluas 3.650 m ² , pagar 825 m ² , kafetaria 70 m ² , tempat ibadah 100 m ² , landscape 42.560 m ² , dan mekanikal 1 paket.
		2018	Pada tahap V atau tahap akhir Taman Budaya Kulon Progo di bawah KPA Dinas Pekerjaan Umum Kulon Progo dengan <i>output amphitheater</i> , ruang pameran, serta kelengkapan seluruh bangunan dan komplek Taman Budaya Kulon Progo seperti <i>sound system</i> , <i>lighting</i> , AC, serta genzet.
		2019	Taman Budaya Kulon Progo telah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan untuk kegiatan seni budaya di Kabupaten Kulon Progo Khususnya serta DIY pada Umumnya
		2020	Taman Budaya Kulon Progo sudah operasional dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan Kulon Progo
		2021	Pembentukan Lembaga Pengelola Taman Budaya Kulon Progo berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya
		2022	Selama tahun 2022 telah terlaksana kegiatan Pemeliharaan Taman Budaya selama 12 bulan, Pentas Seni Tradisi sebanyak 32 kali pementasan, Pentas Band sebanyak 7 kali pementasan, Pentas Sendratari sebanyak 5 kali pementasan, Pentas Kethoprak sebanyak 5 kali pementasan, Pentas Kolaborasi Musik Etnik dan Modern sebanyak 1 kali pementasan, Pelatihan AFM sebanyak 36 kali, Pentas Apresiasi Art For Millenials sebanyak 1 kali, Pameran Lukisan <i>Art For Millenials</i> sebanyak 1 kali event,

No.	Lokasi	Tahun	Uraian
			Kulon Progo Manekawarna sebanyak 1 kali event, Pemeliharaan Taman Budaya, Pemeliharaan Gedung Kesenian dan Pengadaan Peredam Suara (lanjutan)

Sumber: Disbud DIY, 2023



Gambar 6.7. Event Kulon Progo Manekawarna

Sumber: Disbud DIY, 2023

c. Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul

Tabel 6.12. Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul

No.	Lokasi	Tahun	Uraian
1.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul	2017	Pada tahun 2017 di bawah KPA Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul telah dilakukan pengadaan lahan seluas 28.132 m ² di Dusun Logandeng, Playen, Gunungkidul dengan biaya anggaran Rp13.642.874.000,00. Pada lahan ini akan dibangun Taman Budaya Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun yang sama disusun Masterplan dan DED Taman Budaya Gunungkidul.
		2018	Pada tahap I dilakukan persiapan lahan dan pembangunan pondasi dan kolom <i>amphitheater</i> .
		2019	Pembangunan taman budaya Gunungkidul dilakukan dengan kontrak multi years sampai dengan 2021. Sampai dengan 2019 bagian bangunan yang dibangun adalah <i>Concert hall</i>
		2020	Penyelesaian pembangunan Taman Budaya
		2021	Taman Budaya Gunungkidul yang dibangun secara <i>multiyears</i> , tahun 2021 ini memasuki tahun ke-3, dimana realisasi hasil pekerjaan fisik konstruksi secara keseluruhan nilai kontrak 100%. Untuk mengelola Taman Budaya Gunungkidul telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya Gunungkidul berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul.

No.	Lokasi	Tahun	Uraian
			Pembentukan UPT Taman Budaya Gunungkidul dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (4c) Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul merupakan unsur pelaksana teknis pada Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pengembangan, pemasaran, dan kerja sama seni budaya daerah
		2022	Pada Tahun Anggaran 2022 UPT Taman Budaya Gunungkidul melaksanakan kegiatan : a. Gelar Seni Kolosal. b. Pemeliharaan dan Pengelolaan Taman Budaya Gunungkidul. c. Pentas Seni di Taman Budaya Gunungkidul. d. Pentas Seni untuk Anak. e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya.

Sumber: Disbud DIY, 2023



Gambar 6.8. Leong Barongsai Naga Jati, Semanu

Sumber: Disbud DIY, 2023

d. Taman Budaya Kabupaten Sleman

Tabel 6.13. Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Sleman

No.	Lokasi	Tahun	Uraian
1.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Sleman	2018	Pada tahun 2018 di bawah KPA Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman telah dilakukan kajian kelayakan Taman Budaya dan dilanjutkan dengan kajian Lalu Lintas dan Appraisal Pengadaan Lahan.
		2019	Pada tahun 2019 dilakukan appraisal terhadap tanah yang ditawarkan oleh masyarakat selanjutnya penawaran harga kepada pemilik lahan yang akan menjadi Taman Budaya di

No.	Lokasi	Tahun	Uraian
			Sleman, dari kurang lebih 20 bidang tanah, 18 menerima harga sesuai dengan Apraisal dan 2 bidang menolak, pengadaan tanah tidak dapat dilanjutkan karena dua bidang yang menolak berada memotong bidang yang menerima dengan bidang yang bersentuhan dengan jalan.
		2020	Penilaian harga tanah (appraisal) Pengadaan Lahan
		2021	a. Pembebasan lahan tahun 2021 seluas 2.395 m ² dengan anggaran Rp 4.454.700.000,-, b. Sayembara Desain Taman Budaya Sleman oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman) c. Penyusunan Detail Engineering Desain (DED) oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman)
		2022	Pasca pelaksanaan Pembebasan lahan seluas 2.395 m ² , Sayembara Desain Taman Budaya Sleman dan Penyusunan Detail Engineering Desain (DED) pada tahun 2021, maka pada tahun 2022 dilanjutkan dengan penataan lahan seluas 12.000 m ² dan akan dilanjutkan proses penataan lahan pada tahun 2023. Lahan di lokasi pembangunan Taman Budaya Sleman sudah dimanfaatkan untuk menggelar Kegiatan Refleksi Jogja Masa Depan dan Festival Bregada pada tanggal 14 Oktober 2022-16 Oktober 2022



Gambar 6.9. Penataan Lahan Taman Budaya Sleman Tahun 2022
Sumber: Disbud DIY, 2023

e. Taman Budaya Kabupaten Bantul

Tabel 6.14. Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Bantul

No.	Lokasi	Tahun	Uraian
1.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Bantul	2016-2019	Menyiapkan tanah yang menjadi taman budaya bantul, ada beberapa lokasi yang menjadi calon lokasi yakni di taman Gabusan dan lahan di Kecamatan Sewon. Namun kedua lokasi tersebut gagal diperoleh karena masalah perizinan dan tidak ada kesepakatan harga.

No.	Lokasi	Tahun	Uraian
		2020	di tahun 2020 Dinas Kebudayaan kabupaten Bantul terkait dengan Taman Budaya membuat <i>feasibility study</i> lokasi lahan yang akan digunakan sebagai Taman Budaya Bantul, selain itu untuk pengadaan lahan yang akan dilakukan di tahun 2021 juga dilakukan appraisal tanah di yang berlokasi kecamatan Pajangan.
		2021	<p>a. Sosialisasi pembebasan lahan Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021 bertempat di Balai Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan dengan mengundang 19 pemilik tanah yang terdampak pembangunan Taman Budaya Bantul.</p> <p>b. Pemberkasan ukur ulang Pengukuran ulang wajib dilaksanakan sebagai dasar pembayaran atas tanah yang akan dibebaskan. Proses pengumpulan berkas para pemilik tanah diberi batas waktu sampai akhir bulan Maret 2021. Setelah berkas terkumpul kemudian dikirimkan ke BPN Bantul untuk dilaksanakan proses ukur ulang.</p> <p>c. Ukur ulang. Proses ukur ulang dilaksanakan oleh BPN Bantul untuk memastikan kesesuaian ukuran tanah yang tertera di sertifikat dengan kondisi riil di lokasi. Proses pengukuran ulang disaksikan oleh unsur Dinas Kebudayaan, unsur pemerintah Kalurahan Sendangsari dan pemilik tanah. Dari hasil ukur ulang luasan total berubah dari 49.090 m2 menjadi 49.105 m2.</p> <p>d. Appraisal ulang harga tanah berdasar hasil ukur BPN Karena terdapat perbedaan luasan lahan antara yang tertera di sertifikat dengan hasil ukur ulang BPN maka perlu dilakukan penyesuaian harga tanah perbidangnya. Dalam hal ini penyesuaian harga dilakukan oleh konsultan appraisal yang melakukan appraisal tanah sebelumnya. Hasil appraisal ulang harga tanah total berubah dari Rp 25.587.000.000, menjadi Rp 25.615.000.000,00.</p> <p>e. Sosialisasi hasil ukur ulang dan appraisal ulang Setelah mendapatkan hasil ukur ulang dari BPN dan hasil appraisal ulang maka pada tanggal 21 Juli 2021 kembali dilakukan sosialisasi kepada 19 pemilik tanah.</p> <p>f. Pemberkasan proses pembayaran Setelah semua pemilik tanah dapat menerima hasil ukur ulang dan perubahan harga perbidangnya maka pada tanggal 28 Juli 2021 dilakukan pertemuan kembali untuk melengkapi berkas-berkas dan persyaratan pembayaran.</p> <p>g. Pembayaran pembebasan tanah</p>

No.	Lokasi	Tahun	Uraian
			<p>Pembayaran dilaksanakan setelah proses pengukuran ulang dan penyesuaian harga tanah per bidang disetujui oleh pemilik tanah. Proses transfer ke rekening kepada 19 pemilik dilaksanakan pada tanggal 29-30 Juli 2021 dan 3 Agustus 2021 dengan total pembayaran sebesar Rp 25.615.000.000,00</p> <p>h. Proses pensertifikatan tanah</p> <p>Sampai dengan akhir Desember 2021 sedang dilaksanakan proses peralihan hak atas tanah di BPN Bantul dari pemilik lama ke Pemerintah Kabupaten Bantul.</p>
		2022	<p>Pengadaan Tanah</p> <p>a. Pemrosesan Turun Waris sebidang tanah SHM No. 06246 an. Pemilik Ny. Asmowiyono yang terletak di Kunden Sendangsari Pajangan kepada GIYONO L 489 M2 SHM No. 09057 (anak) dan WALIDAH (anak) L 312 M2 SHM No. 09056 tanggal 20 Desember 2022;</p> <p>b. Pembayaran sebidang tanah a.n. Pemilik WALIDAH (anak) L 312 M2 SHM No. 09056 WALIDAH (anak) L 312 M2 SHM No. 09056 sebagai tanah Pengganti Tanah Kalurahan Sendangsari yang berada di tengah lokasi Taman Budaya Bantul;</p> <p>c. Pelepasan Hak Atas Tanah oleh WALIDAH kepada Pemerintah Kabupaten Bantul Tanggal 28 Desember 2022 di BPN Kabupaten Bantul;</p> <p>d. Koordinasi Persiapan Lintas OPD dan BPN serta Kalurahan Sendangsari perihal Proses Saling Melepaskan Hak antara Pemerintah Kabupaten Bantul yang diwakili Dinas Kebudayaan dengan Pemerintah Kalurahan Sendangsari;</p> <p>e. Penghapusan Hak, Pengajuan Ukur Luas Total 19 Bidang seluas 49.105 M2, dan Pendaftaran Hak Pakai (Sertifikat Baru atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul) Tanah Calon Lokasi Taman Budaya.</p> <p>Pengajuan AMDAL</p> <p>a. Penyusunan Dokumen</p> <p>b. Pengajuan AMDAL Pembangunan Taman Budaya Bantul sebagai tindak lanjut dan pemenuhan persyaratan setelah Studi Kelayakan dan DED dilaksanakan serta pembebasan tanah. Tahun 2022 telah selesai Dokumen AMDAL yang disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi (PT Karunia Sejahtera Konsultan), selesai tanggal 26 Desember 2022.</p> <p>c. Pendaftaran Pengujian AMDAL ke DLHK DIY</p>

Sumber: Disbud DIY, 2023

f. Taman Budaya Kota Yogyakarta

Tabel 6.15. Taman Budaya Kota Yogyakarta

No.	Lokasi	Tahun	Uraian
1.	Pembangunan Taman Budaya Kota Yogyakarta	2021	<ol style="list-style-type: none">Reviu DED Pengembangan Aquatic Science Park Taman Pintar dengan Pembangunan Taman Budaya di Kawasan Embung GiwanganAddendum AMDAL Pengembangan Aquatic Science Park Taman Pintar dengan Pembangunan Taman Budaya di Kawasan Embung Giwangan
		2022	<p>UPT Pengelolaan Taman Budaya-Dinas kebudayaan (Kundha kabudayaan) Kota Yogyakarta menyusun DED Pembangunan Panggung Terbuka guna memenuhi kebutuhan aktivitas kegiatan Seni dan Budaya. Untuk menyempurnakan DED Panggung Terbuka agar dapat dipergunakan secara maksimal, maka DPUPKP Kota Yogyakarta melakukan Reviu Pembangunan Panggung Terbuka. Reviu dilakukan oleh DPUPKP Kota Yogyakarta karena untuk Pembangunan Taman Budaya Embung Giwangan mulai tahun 2023 dilimpahkan ke DPUPKP Kota Yogyakarta. Meskipun Taman Budaya Kota Yogyakarta belum mulai dibangun, lokasi pembangunan sudah dapat dimanfaatkan untuk even atau kegiatan seni dan budaya diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none">Jogging, Senam, Yoga oleh masyarakat sekitar Embung GiwanganPenggunaan Rapat oleh masyarakat Kota YogyakartaCeremonial Puncak Acara YOGOWES-Dinas Pariwisata YogyakartaYogyakarta American JeepPenanaman Pohon dalam rangka Karya Bhakti TNIPentas Jatilan RKB Giwangan UmbulharjoFestival Jogja Kota 2022

Sumber: Disbud DIY, 2023

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Pembangunan Taman Budaya harus melalui tahapan-tahapan sesuai dengan regulasi, salah satunya penyusunan Dokumen AMDAL, khususnya untuk Taman Budaya Kota Yogyakarta dan Taman Budaya Kabupaten Bantul.
- Terdapat kendala penerapan tarif retribusi yang belum memiliki dasar peraturan daerah tentang retribusi atas layanan Taman Budaya sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa penarikan retribusi daerah harus dituangkan dalam peraturan daerah.

b. Solusi

1. Kelengkapan persyaratan Dokumen AMDAL akan disiapkan seoptimal mungkin agar proses penyelesaiannya dapat berjalan lancar, agar tahapan Dokumen Amdal tidak menyebabkan mundurnya tahapan konstruksi fisik pembangunan Taman Budaya.
2. Mengusulkan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pemanfaatan taman budaya.

J. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT RSUD WATES DAN RSUD SAPTOSARI

1. RSUD Wates

Pengembangan dan pembangunan RSUD Wates bertujuan untuk menjadi fasilitas penunjang Bandara Yogyakarta International [Airport \(YIA\)](#). RSUD Wates yang dibangun dengan dukungan Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Tahun 2018-2020, dirancang menjadi rumah sakit pendidikan dan pusat rujukan yang unggul menuju pelayanan berstandar internasional. Beberapa fasilitas pendukung yang telah dibangun antara lain fasilitas Gedung Medik Terpadu, Gedung Rawat Inap, Asrama dan Apartemen untuk tempat magang dan pelatihan bagi tenaga medis.

Pembangunan RSUD Wates telah berdampak secara signifikan pada peningkatan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai penunjang keberadaan Bandara Yogyakarta *International Airport* (YIA). Tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rumah sakit mengalami peningkatan di masa pandemi. Indikator-indikator tersebut dilihat dari capaian BOR (*Bed Occupation Rate*) atau angka keterisian tempat tidur RSUD Wates yang pada tahun 2021 sebesar 27,15% meningkat

menjadi 28,96%. LOS (*Average Length of Stay*) atau angka rata-rata lamanya pasien dirawat dari 3,6 hari pada tahun 2021 meningkat menjadi 3,57 hari. Data kunjungan pasien pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan pasien rawat jalan tahun 2021 sebanyak 73.052 meningkat menjadi 83.738. Jumlah kunjungan pasien rawat inap tahun 2022 mencapai 8.213, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan 6.189 kunjungan pasien.

2. RSUD Saptosari

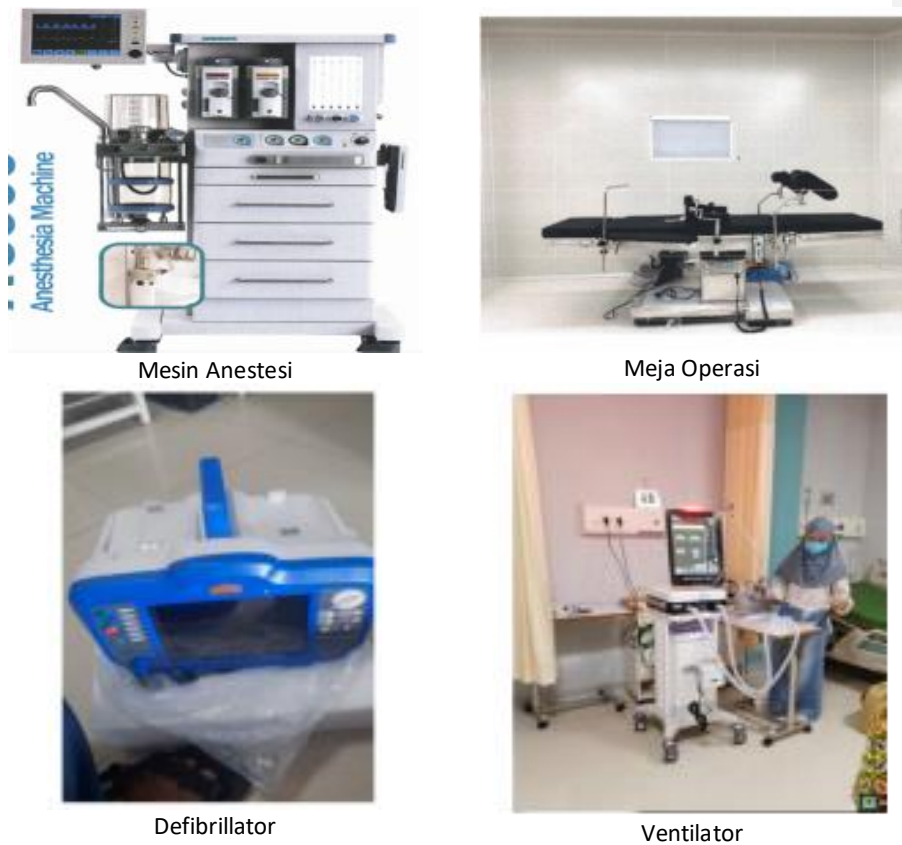
RSUD Saptosari, Kabupaten Gunungkidul mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemda DIY sebesar Rp27.427,517.771,00 dalam rangka mendukung pengembangan wilayah selatan DIY. Bantuan tersebut telah terealisasi Rp26.349.192.953,00 atau mencapai 96,07%. Pemanfaatan BKK Pemda DIY RSUD Saptosari untuk pengadaan sejumlah alat medis yang diperlukan dalam menunjang pelayanan. Pada tahap pertama dengan nilai pengadaan Rp18.060.000.000,00, digunakan untuk pembelian alat medis berupa: *CT-Scan, Electro Surgical Unit, Emergency Trolley, Instrument Trolley* Untuk Peralatan Bedah, Penyempurnaan Ruang Operasi 2 Maternal Covid-19, Meja Operasi, Lampu Operasi, Mesin Anestesi, *Suction Pump*, dan Vidio Laringoskop. Tahap kedua, senilai Rp9.367.517.771,00 dimanfaatkan untuk pembelian: *Lowterm, Washer, Ventilator, Pasien Monitor, PACS (Picture Archiving and Communication System), Defibrillator, Small Fragment Instrument Set, Wire Instrument Set, Bor Orthopedi, dan General Instrument Set.*



CT-Scan



Penyempurnaan Ruang Operasi 2
Maternal Covid-19



Gambar 6.10. Alat Medis RSUD Saptosari
 Sumber: Dinkes DIY, 2023

Berikut adalah kondisi sebelum dan sesudah RSUD Saptosari menerima BKK dari Pemda DIY dalam pemenuhan alat medis dan kelengkapan fasilitas untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Tabel 6.16. Kondisi Pelayanan RSUD Saptosari

No	Nama Alat	Kondisi sebelum	Kondisi Sesudah
1	CT Scan	Hanya mampu mengambil gambar belum bisa menangani rujukan pasien syaraf	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu melayani rujukan pasien syaraf, • Meningkatkan mutu layanan pasien syaraf, • Efisiensi penangana pasien syaraf, • Meningkatkan klaim BPJS pasien syaraf
2	<ul style="list-style-type: none"> • Electro Surgical Unit, • Emergensi Trolley, 	Ruang operasi 2 belum bisa digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang operasi 2 sudah jadi dan siap digunakan

No	Nama Alat	Kondisi sebelum	Kondisi Sesudah
	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumen Trolley Untuk perlatan bedah, • Penyempurnaan Ruang Operasi 2 <i>Maternal Covid</i> • Lampu Operasi • Meja Operasi • Mesin anastesi • Suction Pump • Vidio Laingoskop 		<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi antrian pasien pelayanan operasi, • Meningkatkan kualitas pelayanan operasi dalam mengurangi risiko infeksi pasien
3	Lowterm	CSSD belum mampu mensterilkan alat Kesehatan yang rusak apabila menggunakan sterilisator suhu tinggi	Mengurangi risiko infeksi pada alat Kesehatan yang hanya bisa dilakukan sterilisasi dengan sterilisator suhu rendah
4	Washer	Pencucian alat dilakukan secara manual	<ul style="list-style-type: none"> • Pencucian dilakukan menggunakan mesin secara otomatis, • Mempercepat proses, • Mengurangi risiko petugas atas infeksi dan kecelakaan kerja
5	Ventilator	Ruang ICU belum dilengkapi Ventilator	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang ICU sudah dilengkapi Ventilator, • Melengkapi persyaratan regulasi RS Type D harus mengoperasikan ICU dengan bed ventilator
6	Pasien Monitor	Ruang ICU,NICU dan bangsal belum dilengkapi Pasien Monitor	Ruang ICU,NICU dan bangsal sudah dilengkapi Pasien Monitor
7	PACS	Belum mampu mengirimkan hasil foto <i>X-ray</i> dengan metode komputerisasi	Mampu mengirimkan hasil foto <i>X-ray</i> dengan metode komputerisasi secara real time dengan kualitas gambar lebih bagus
8	Defibrilator	IGD, ICU dan ruang operasi belum dilengkapi	<ul style="list-style-type: none"> • IGD, ICU dan ruang operasi sudah dilengkapi, • Melengkapi persyaratan untuk penanganan pasien gagal jantung akut
9	<ul style="list-style-type: none"> • Large Fragment Instrument Set • Small Fragment Instrument Set • Wire Instrument Set 	Dokter bedah tidak bisa melakukan tindakan operasi tulang pada pasien kecelakaan	Dokter bedah dapat melakukan tindakan operasi tulang sesuai dengan kewenangannya

No	Nama Alat	Kondisi sebelum	Kondisi Sesudah
	<ul style="list-style-type: none"> Bor Orthopedi General Instrument Set		
10	Paramount Bed Pc Cart	Ruang IGD dan rawat jalan belum dilengkapi <i>Paramount Bed Pc Cart</i>	Ruang IGD dan rawat jalan sudah dilengkapi <i>Paramount Bed Pc Cart</i> , sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pengisian elektronik rekam medis
11	Bubble CPAP	Ruang NICCU belum dilengkapi <i>Bubble CPAP</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ruang NICCU sudah dilengkapi <i>Bubble CPAP</i>, Mampu menangani pasien neonatus dengan gangguan pernafasan ringan
12	Ventilator Transport	Ruang UGD belum dilengkapi <i>Ventilator Transport</i>	Ruang UGD sudah dilengkapi <i>Ventilator Transport</i> , sehingga bisa mempertahankan kondisi pasien tetap stabil ketika akan dilakukan pemindahan dan rujukan

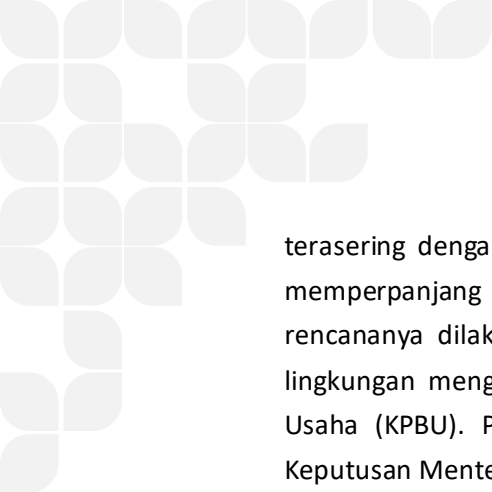
Sumber: Dinkes DIY, 2023

K. REVITALISASI TPA PIYUNGAN

1. Latar Belakang

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan pada tahun 2022 menerima 740 ton per hari. Dengan penerapan sistem lahan urug dan masih minimnya teknologi pengolahan sampah yang digunakan, hal ini membuat TPA Regional Piyungan sudah mengalami *overload* sehingga berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kurang optimalnya layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah. Untuk mengatasi hal tersebut, saat ini telah didirikan TPA transisi yang dibangun pada tahun 2022 dengan luas 2 ha untuk menerima sampah dari wilayah Kartamantul. Namun, daya tampung TPA transisi tersebut diproyeksikan hanya dapat digunakan hingga tahun 2023. Setelahnya, lahan transisi akan ditutup dan tidak akan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan TPA Regional Piyungan, dilakukan dengan solusi jangka panjang dan jangka pendek. Dalam rencana jangka pendek dilakukan optimalisasi kapasitas TPA Regional Piyungan dengan melakukan penataan sel sampah di Zona A dan Zona B yang dibuat



terasering dengan elevasi Zona A 140 mdpl dan Zona B 124 mdpl guna memperpanjang usia pakai TPA. Sedangkan rencana jangka panjang rencananya dilakukan dengan penggunaan teknologi tinggi yang ramah lingkungan menggunakan sistem Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pengembangan TPA Regional Piyungan tersebut sesuai Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Kep.107/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Daftar Rencana Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2022 (Kep. Bappenas 107/2022).

2. Progress Sampai dengan Tahun 2022

Sampai dengan tahun 2022, progres pengelolaan sampah di TPA Piyungan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Terealisasi penataan sampah menggunakan model terasering pada Penataan sampah pada Zona A (Januari s.d Juli 2022) s.d ketinggian 140 mdpl. Pada perjalanannya terjadi penurunan akibat dekomposisi sampah sehingga saat ini ketinggian menjadi 136 mdpl. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY, Ditjen Ciptakarya, Kementerian PUPR dengan menggunakan sumber anggaran APBN.
- b. Terealisasi penataan sampah menggunakan model terasering pada zona B ketinggian 108-124 mdpl.
- c. Terealisasi penataan lahan baru untuk penampungan sampah ke zona transisi I yang diperkirakan dapat menampung sampah selama 4 bulan (November 2022 s.d Februari 2023).
- d. Dalam penganggaran 2023, rencananya akan dilakukan penataan zona B, konstruksi zona transisi, dan pembebasan lahan zona transisi III.



Gambar 6.11. Kondisi TPA pada akhir tahun 2022
Sumber: DLHK DIY, 2023

a. **Rencana jangka pendek** dalam rangka optimalisasi TPA Regional Piyungan adalah sebagai berikut :

- 1) Memaksimalkan penggunaan zona transisi I dengan kapasitas/ daya tampung 174.136 m^3 (± 5 bulan) dan melakukan penataan sampah dengan menggunakan alat berat dan penambahan sirtu/ tanah urug.
- 2) Setelah zona transisi I penuh, pembuangan sampah kembali ke zona A dan B atas kemudian dilakukan penataan.
- 3) Pemda DIY telah menyiapkan lahan penampungan sampah pada zona transisi II seluas 0,9 ha yang akan dikerjakan pada tahun 2023 dengan kapasitas 124.746 m^3 (± 4 bulan)



Gambar 6.12. Penampungan sampah di zona transisi
Sumber: DLHK DIY, 2022

b. Rencana jangka panjang

Penggunaan teknologi tinggi dengan mekanisme KPBU merupakan rencana jangka panjang dalam pengelolaan TPA Piyungan. Proses tahapan dalam KPBU yaitu *Planning, Preparation, Transaction, Construction, dan Operation*. Proses akuisisi lahan untuk TPAS Regional Piyungan juga telah dimulai. Dokumen *Outline Business Case (OBC)* Proyek pun telah disusun oleh *the World Bank* dan disetujui oleh Penanggungjawab Proyek Kerja sama (PJPK). Selanjutnya, Kementerian Keuangan telah menyediakan fasilitas dan dukungan, yaitu fasilitas penyiapan proyek/ *Project Development Facility (PDF)* melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk tahap persiapan. Fasilitas PDF terdiri dari penyusunan kajian prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU hingga mencapai pembiayaan dari lembaga pembiayaan (*financial close*). Proses KPBU untuk TPA Regional Piyungan telah memasuki tahapan penyusunan kajian *Final Bussines Case (FBC)*. Tahapan selanjutnya adalah *market sounding* yang rencananya akan dilakukan pada bulan Februari 2023.

3. Permasalahan dan Solusi

a. **Permasalahan**

- 1) Keterbatasan alat terutama *excavator* mengakibatkan penataan sampah menjadi terhambat.
- 2) Masih terdapat armada angkutan yang tidak memenuhi ketentuan teknis dan tidak tertib.
- 3) Drainase sering penuh akibat banyaknya sampah yang terbawa angin dan hujan deras.
- 4) Masih banyaknya sapi dan pemulung di area sampah.
- 5) Pengelolaan lindi di TPA masih belum optimal karena debit lindi *overload* (menampung lindi dari zona A, B dan transisi). Masih ada kebocoran lindi pada zona A dan zona B.

b. Solusi

- 1) Penambahan alat berat berupa pengadaan *excavator* yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 1 unit.
- 2) Melakukan operasi gabungan untuk penertiban armada sampah sehingga meminimalisir armada yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis
- 3) Pembersihan saluran drainase secara rutin.
- 4) Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melepas sapi di TPA.
- 5) Melakukan upaya penanganan lindi melalui proses kimia (penambahan bahan kimia PAC, Kaporit); proses biologis (penambahan bakteri *aerob* dan *anaerob*, *ecoenzym*, nutrisi); dan mekanis (*aerator*, *mixer*). Pembuatan saluran pipa sementara untuk menangkap bocoran air lindi yang masuk ke drainase.



Gambar 6.13. Zona A, B, dan Zona Transisi
Sumber: DLHK DIY, 2023



Gambar 6.14. Pelaksanaan Operasi Gabungan
Sumber: DLHK DIY, 2023



Gambar 6.15. Upaya Penanganan Lindi (pencampuran bahan kimia)

Sumber: DLHK DIY, 2023

L. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Latar Belakang

Isu kemiskinan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Salah satu strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan, peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan dan kemitraan. Penanggulangan kemiskinan perlu sinergi program dan lokasi sasaran bersama agar lebih terarah dalam penyelesaiannya. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di provinsi dan kabupaten/kota. Keanggotaan TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penguatan struktur kelembagaan penanggulangan kemiskinan ini diharapkan bisa mengakselerasi turunnya angka kemiskinan di DIY.

Tingginya angka kemiskinan di DIY per September 2022 (11,49%) menjadi persentase angka kemiskinan tertinggi se-Pulau Jawa. Hal ini menjadikan kemiskinan salah satu isu strategis yang harus ditangani serius di DIY.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor sebagaimana tertuang pada IKU Pemda dalam RPJMD DIY 2017-2022.

Persentase kemiskinan di DIY mengalami kenaikan dari Maret 2022 (11,34%) ke September 2022 (11,49%) sebesar 0,15%. Disamping itu, BPS mencatat persentase penduduk miskin ekstrem di DIY sebesar 2,63% di Tahun 2021, dan menurun menjadi 2,41% di Tahun 2022. Kondisi ini memerlukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan berkelanjutan yang tertuang sebagai program-program strategis penanggulangan kemiskinan yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Pembinaan basis data sasaran program penanggulangan kemiskinan juga harus dilakukan update berkala dan terkosolidasi dengan data kependudukan agar didapatkan data yang valid. Pelaksanaan program-program strategis ini diharapkan efektif dan berdampak langsung sehingga bisa menekan tingginya tingkat kemiskinan DIY dan juga mendukung target 0% kemiskinan ekstrem di Tahun 2024 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

2. Progres Sampai Dengan Tahun 2022

a. Ulasan kegiatan penanggulangan kemiskinan di DIY

Upaya penanggulangan kemiskinan di DIY mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah. Selain itu, diterbitkan juga Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Dari beberapa regulasi tersebut diterjemahkan ke dalam Perda DIY Nomor 11 tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Pergub DIY Nomor 139 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah

Desa/Musyawahar Kelurahan dalam rangka Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kepmenko PMK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Wilayah Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2022-2024, Kepmenko PMK Nomor 30 Tahun 2022 tentang Sumber dan Jenis Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2022-2024 dan Kepmenko PMK Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

TKPKD DIY menyepakati bersama upaya sinergis lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan di DIY. Upaya sinergi lintas sektor diwujudkan di lingkup Pemda DIY maupun dengan pihak-pihak di luar Pemda DIY untuk mengarah kepada 15 lokus kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan. 15 Lokus kapanewon prioritas tersebut diantaranya: Sentolo, Saptosari, Kokap, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ponjong, Pengasih, Tempel, Seyegan, Tepus, Karangmojo, Prambanan, Samigaluh, dan Imogiri. Penetapan 15 Lokus Kapanewon sasaran lintas sektor yang bersama-sama menjadi sasaran OPD di DIY, Kabupaten/Kota, CSR maupun lembaga lainnya yang sudah di sampaikan melalui Surat Edaran Wakil Gubernur Nomor 401/0161 tanggal 5 Januari 2022 tentang penyampaian 15 Lokus Kapanewon Penanggulangan Kemiskinan.

Tabel 6.17. Rincian Realisasi Program/Kegiatan Yang Dilakukan OPD DIY Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022

No	Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran/Pagu	Realisasi	Realisasi (%)	Deviasi
1	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY	1	1	1	172.014.000	171.764.000	99,85	0,15
2	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1	1	1	11.668.000	11.108.000	95,20	4,80
3	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	3	4	5	5.851.727.500	5.752.479.576	98,30	1,70
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	1	1	1	1.393.254.000	1.266.401.523	90,90	9,10

No	Nama OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran/ Pagu	Realisasi	Realisasi (%)	Deviasi
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	3	3	3	7.957.465 .400	7.804.955 .642	98,08	1,92
6	Dinas Pariwisata DIY	3	3	4	5.913.306 .000	5.815.688 .416	98,35	1,65
7	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	1	1	1	4.814.260 .000	4.714.587 .171	97,93	2,07
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY	2	2	2	57.076.273 .000	50.530.595 .027	88,53	11,47
9	Balai Pemuda dan Olah Raga DIY	1	1	1	2.497.000 .000	2.316.070 .130	92,75	7,25
10	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	1	1	1	503.595 .000	493.178 .500	97,93	2,07
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	1	1	1	560.495 .000	536.302 .500	95,68	4,32
12	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita DIY	1	1	2	1.146.249 .000	1.138.630 .337	99,34	0,66
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	1	1	2	665.250 .000	652.875 .000	98,14	1,86
14	Balai Rehabilitasi Sosial Binda Karya Laras DIY	1	1	21	5.396.487 .563	4.527.661 .160	83,90	16,10
15	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY	1	1	7	2.249.382 .500	1.720.664 .267	76,49	23,51
16	Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak DIY	1	1	11	2.523.528 .500	2.109.811 .295	83,61	16,39
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	1	1	1	25.211.652 .182	23.585.710 .483	93,55	6,45
18	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	2	2	2	2.490.714 .000	2.251.445 .825	90,39	9,61
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	3	3	3	114.329.520 .000	102.933.030 .843	90,03	9,97
20	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	1	1	1	44.439.517 .000	38.564.045 .728	86,78	13,22
21	Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial DIY	1	1	1	43.240.714 .965	28.880.718 .789	66,79	33,21
22	Dinas Kesehatan DIY	1	1	1	1.525.000 .000	1.164.000 .000	76,33	23,67
23	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan DIY	3	4	5	35.213.581 .264	32.583.951 .286	92,53	7,47
24	Dinas perindustrian Perdagangan DIY	2	2	2	21.183.998 .300	19.249.362 .298	90,87	9,13
25	Dinas Sosial DIY	5	9	35	24.676.147 .750	21.431.956 .069	86,85	13,15
	JUMLAH	42	48	115	411.042.800 .924	360.206.993 .865	87,63	12,37

Sumber: TKPKD DIY, 2023

Tabel 6.18. Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan di DIY Tahun 2022

Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Anggaran APBN	Anggaran APBD	Sumber Lain	Jumlah OPD
8	9	11	Rp -	Rp 207.656.534.960	Rp -	6
6	9	66	Rp -	Rp 22.215.681.100	Rp -	5
23	25	30	Rp 5.716.655.000	Rp 29.882.701.500	Rp 3.949.385.800	14
5	5	9	Rp -	Rp 13.978.230.000	Rp -	4
42	48	116	Rp 5.716.655.000	Rp 273.733.147.560	Rp 3.949.385.800	25

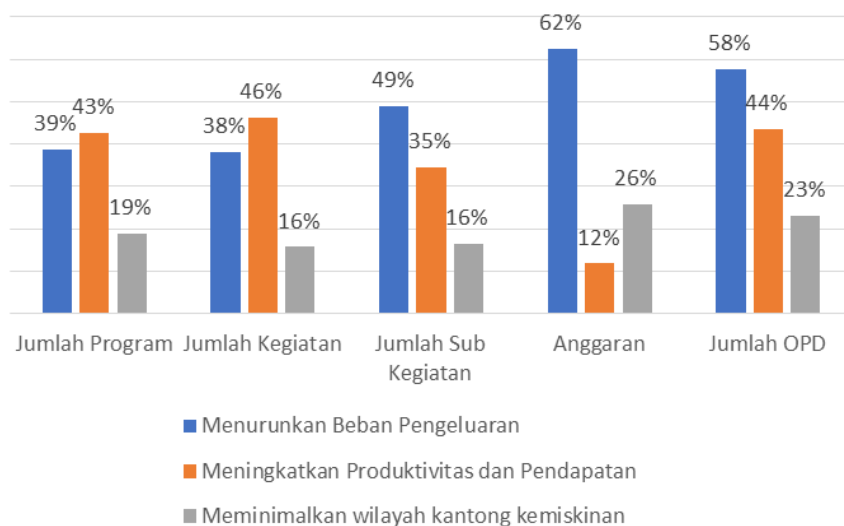
Sumber: TKPKD DIY, 2023

Tahun 2022 penanganan kemiskinan ekstrem bukan hanya di 5 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi Indonesia, namun diperluas pada 212 Kabupaten/Kota dalam 25 Provinsi termasuk di DIY. Mendasar pada Surat Kepmenko PMK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Wilayah Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2022-2024, DIY mendapatkan 4 prioritas penanganan kemiskinan ekstrem yang berada di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Berikut dukungan program/kegiatan yang dilakukan 4 Kabupaten prioritas dalam penanggulangan kemiskinan:

Tabel 6.19. Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di 4 Kabupaten Prioritas DIY dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

BANTUL										
Kelompok Tujuan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Anggaran		Jumlah OPD	
1. Menurunkan Beban Pengeluaran	27	56%	45	57%	152	71%	398,973,280,497	92%	9	56%
2. Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan	20	42%	33	42%	60	28%	31,140,477,603	7%	8	50%
3. Meminimalkan Kantong Kemiskinan	1	2%	1	1%	2	1%	4,101,816,699	1%	1	6%
Jumlah	48	100%	79	100%	214	100%	434,215,574,799	100%	16	
KULON PROGO										
Kelompok Program	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Anggaran		Jumlah OPD	
A. Menurunkan Beban Pengeluaran	2	5%	3	6%	3	4%	34,104,882,400.00	15%	2	20%
B. Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan	19	43%	26	49%	32	39%	27,964,610,101.00	12%	8	80%
C. Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	23	52%	24	45%	47	57%	166,101,047,690.00	73%	10	100%
Jumlah	44	100%	53	100%	82	100%	228,170,540,191.00	100%	10	
GUNUNGGKIDUL										
Tujuan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Anggaran		Jumlah OPD	
Menurunkan beban pengeluaran	30	57%	31	46%	45	51%	65,336,759,612	78%	28	90%
Meningkatkan produktivitas dan pendapatan	22	42%	35	51%	41	47%	17,167,698,800	20%	9	29%
Meminimalkan Wil Kantong Kemiskinan	1	2%	2	3%	2	2%	1,783,674,000	2%	1	3%
Jumlah	53	100%	68	100%	88	100%	84,288,132,412	100%	31	
SLEMAN										
Tujuan Program	Jumlah Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran		Jumlah OPD	
Menurunkan Beban Pengeluaran	11	31%	13	31%	27	34%	71,025,602,358	43%	6	50%
Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan	16	44%	18	43%	27	34%	31,580,008,980	19%	9	80%
Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan	9	25%	11	26%	25	32%	62,489,907,411	38%	6	50%
Jumlah	36	100%	42	100%	79	100%	165,095,518,749	100%	21	

Sumber: TKPKD DIY, 2022

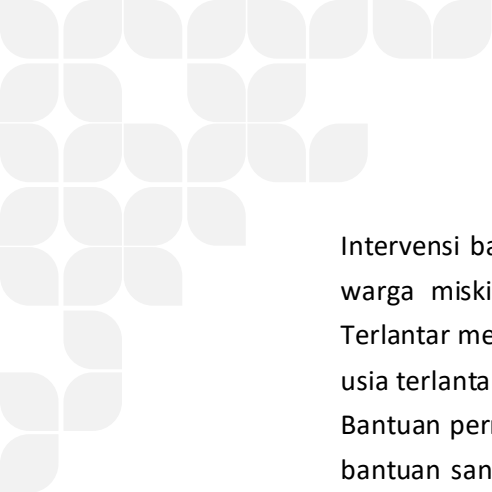


Gambar 6.16. Grafik Persentase Tujuan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di DIY

Sumber: TKPKD DIY, 2022

Program pemberian bantuan makanan untuk warga miskin sudah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini untuk meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, sebagai berikut:

- 1) Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk uang tunai dari pemerintah pusat yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat melalui PT POS Indonesia yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang yang telah ditunjuk sebagai Agen atau E-Warong. Bantuan sebesar Rp200.000,00 per bulan untuk pembelian bahan pokok (beras) dan protein meliputi protein hewani (telur, daging segar atau ikan segar) dan protein nabati (tahu, tempe).
- 2) Pembentukan Tim Koordinator BPNT Tingkat Provinsi yang ditetapkan melalui SK Gubernur yang beranggotakan Sekda DIY (ketua), Asisten Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat (Wakil Ketua), Dinsos DIY dan Biro Bermas Setda DIY (sekretaris), dilengkapi dengan Pokja dan Staf Sekretariat.



Intervensi bantuan lainnya yaitu pemenuhan kebutuhan dasar untuk warga miskin pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar meliputi: (1) Bantuan permakanaan dan sandang untuk lanjut usia terlantar (LUT) sebanyak 100 orang, diberikan untuk enam bulan. Bantuan permakanaan sebesar Rp299.000,00 per bulan per orang dan bantuan sandang sebesar Rp250.000,00 per orang; dan (2) Fasilitas *Home Care*, yakni berupa bantuan makanan dan kebutuhan dasar kepada LUT sebanyak 700 orang selama enam bulan dengan nilai bantuan Rp117.000,00 per bulan per-orang. Sedangkan untuk Jaminan Sosial diberikan Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) sebesar Rp200.000,00 per bulan per-orang selama 6 bulan untuk 1.000 orang Lanjut Usia Terlantar tidak potensial.

Selain program BPNT Program nasional lainnya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), syarat KPM penerima bantuan harus memenuhi beberapa komponen diantaranya :

- 1) Kriteria komponen kesehatan meliputi: 1) Ibu hamil/menyusui; dan 2) Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun (anak usia dini).
- 2) Kriteria komponen pendidikan meliputi: 1) Anak Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat; 2) Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat; 3) Anak Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) atau sederajat; dan 4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- 3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi: 1) Lanjut usia mulai dari 60 tahun dalam keluarga PKH; 2) Penyandang disabilitas berat dalam keluarga PKH.

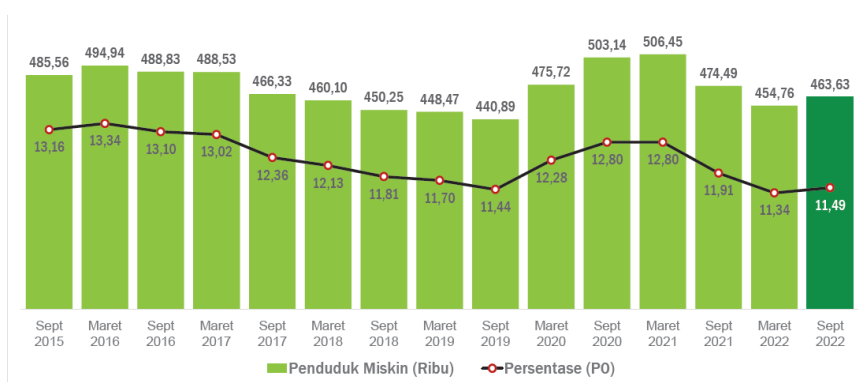
Besaran bantuan yang diterima oleh KPM tergantung jumlah komponen yang dimilikinya namun perhitungan penerimaan bansos PKH dibatasi maksimal sejumlah 4 (empat) orang dalam satu keluarga. Bantuan sosial diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar permakanaan, kesehatan dan pendidikan.

Intervensi lain yaitu pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar di Rumah Perlindungan Sosial sebanyak 13 anak dan fasilitas Asrama termasuk pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk penyandang disabilitas yang mengakses pendidikan di Sekolah Luar Biasa sebanyak 50 penyandang disabilitas melalui anggaran program di Bidang Rehabilitasi Sosial.

Bantuan Sosial yang diberikan kepada anak bermasalah sosial meliputi anak terlantar, anak balita terlantar, Anak dengan Kedisabilitan, Anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 670 anak dengan bantuan sebesar Rp2.000.000,00 per anak untuk satu tahun dengan total Anggaran melalui Bantuan Sosial sebesar Rp1.340.000.000,00.

b. Capaian Angka Kemiskinan pada tahun 2022

Secara umum, pada periode September 2015-September 2022, tingkat kemiskinan di DIY menunjukkan kecenderungan yang menurun, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Namun demikian, terdapat beberapa fluktuasi jumlah maupun persentase penduduk miskin. Pada Maret 2020, September 2020, dan Maret 2021 terjadi peningkatan jumlah maupun persentase penduduk miskin yang diantaranya disebabkan wabah Covid-19. Pada bulan September 2021 dan Maret 2022 terjadi tren penurunan jumlah maupun persentase penduduk miskin. Namun, pada September 2022 jumlah maupun persentase penduduk miskin kembali mengalami kenaikan. Perkembangan jumlah maupun persentase penduduk miskin September 2015 sampai dengan September 2022 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 6.17. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2015–September 2022

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Jumlah penduduk miskin di DIY pada September 2015 mencapai 485,56 ribu orang. Sampai dengan September 2019, jumlah penduduk miskin telah berkurang sebanyak 44,67 ribu orang. Namun dengan adanya wabah Covid-19, jumlah penduduk miskin meningkat kembali menjadi 475,72 ribu orang pada Maret 2020. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin kembali meningkat sampai dengan Maret 2021. Penduduk miskin pada periode ini tercatat sebanyak 506,45 ribu orang. Pada September 2022, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan jika dibandingkan Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 adalah sebanyak 463,63 ribu orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2022, terjadi kenaikan penduduk miskin sebanyak 8,9 ribu orang.

Jumlah penduduk miskin secara absolut di DIY paling banyak terdapat di daerah perkotaan. Berdasarkan hasil Susenas September 2022, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan DIY tercatat sebanyak 321,07 ribu orang. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan yang banyaknya 142,57 ribu orang. Sementara itu, secara persentase, penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Pada September 2022, persentase penduduk miskin di perdesaan tercatat sebanyak 14,00%. Dengan demikian, secara rata-rata terdapat sekitar 14 penduduk miskin

diantara 100 orang penduduk yang ada di perdesaan. Sementara itu, pada waktu yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan adalah sebesar 10,64%.

Selama periode September 2021-September 2022, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan perdesaan menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada periode tersebut, jumlah penduduk miskin di perkotaan DIY turun sebanyak 10,6 ribu orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 0,2 ribu orang. Dengan demikian, dalam setahun terakhir, jumlah penduduk miskin DIY berkurang sebanyak 10,8 ribu orang. Pada periode yang sama, persentase penduduk miskin perkotaan turun sebanyak 0,56% poin. Adapun persentase penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 0,01 persen poin. Dalam setahun terakhir persentase kemiskinan DIY turun sebanyak 0,42% poin.

Tabel 6.20. Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2022

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan		
September 2021	331,71	11,20
Maret 2022	315,46	10,56
September 2022	321,07	10,64
Perdesaan		
September 2021	142,78	13,99
Maret 2022	139,30	13,65
September 2022	142,57	14,00
Total		
September 2021	474,49	11,91
Maret 2022	454,76	11,34
September 2022	463,63	11,49

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran

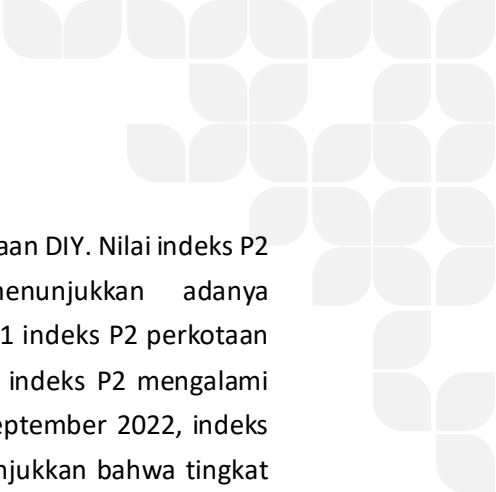
mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir nilai indeks P1 DIY terlihat mengalami penurunan. Pada September 2021, indeks P1 tercatat sebesar 2,062. Kemudian, pada Maret 2022, indeks P1 mengalami penurunan menjadi 2,014. Pada September 2022, indeks P1 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 1,526. Penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin mulai bergerak mendekati garis kemiskinan.

Apabila dibandingkan antara wilayah perdesaan dan perkotaan, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan menunjukkan kecenderungan menurun. Namun demikian, nilai indeks P1 di perdesaan lebih besar daripada perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di perdesaan lebih buruk daripada di perkotaan. Sejalan dengan indeks P1 yang mulai memperlihatkan kecenderungan menurun, indeks P2 juga menunjukkan adanya kecenderungan menurun pada rentang waktu yang sama. Pada September 2021 indeks P2 tercatat sebesar 0,532. Satu semester kemudian, pada Maret 2022, indeks P2 mengalami penurunan menjadi 0,508. Selanjutnya pada September 2022, nilai indeks P2 kembali turun menjadi 0,282. Penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang.

Tabel 6.21. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di DIY Periode September 2021 s.d. September 2022

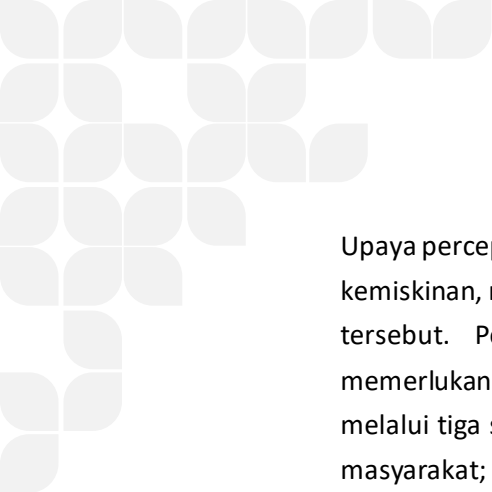
Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)			
September 2021	2,046	2,108	2,062
Maret 2022	1,933	2,253	2,014
September 2022	1,384	1,948	1,526
Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)			
September 2021	0,560	0,451	0,532
Maret 2022	0,484	0,579	0,508
September 2022	0,249	0,382	0,282

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023



Kondisi yang sama juga terjadi di wilayah perkotaan DIY. Nilai indeks P2 perkotaan selama setahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Pada September 2021 indeks P2 perkotaan sebesar 0,560. Satu semester berikutnya, nilai indeks P2 mengalami penurunan menjadi 0,484. Selanjutnya pada September 2022, indeks P2 kembali turun menjadi 0,249. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antara penduduk miskin di perkotaan semakin berkurang. di perdesaan DIY, indeks P2 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan yang menurun. Pada September 2021, indeks P2 perdesaan sebesar 0,451. Satu semester berikutnya nilai indeks P2 naik menjadi 0,579. Selanjutnya pada September 2022, indeks P2 turun kembali menjadi 0,382. Walaupun mengalami kenaikan pada Maret 2022, namun pada satu semester berikutnya indeks keparahan kemiskinan kembali menurun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antara penduduk miskin di perdesaan cenderung semakin berkurang.

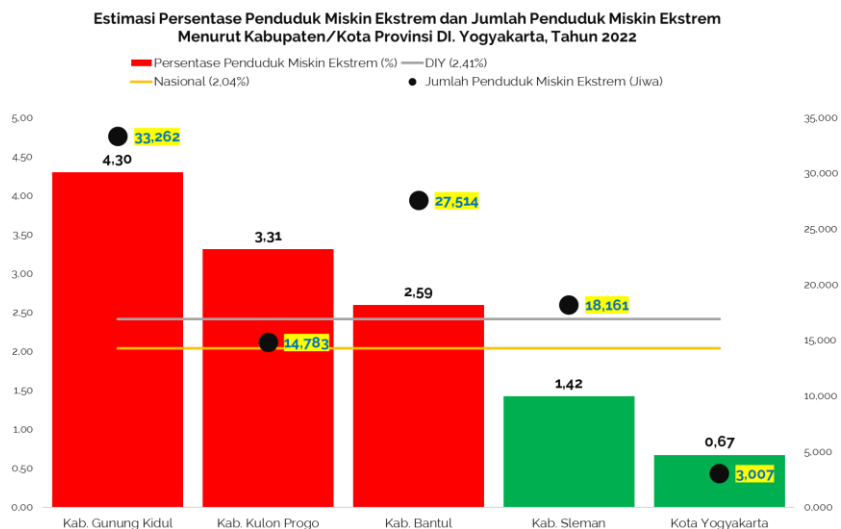
Presiden RI memberikan instruksi dan menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024. Target ini lebih cepat dari amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk pada tahun 2030. Untuk mewujudkan target pertahun penurunan angka kemiskinan ekstrem di DIY, maka perlu ada kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan melalui upaya khusus berupa *multiple interventions*. Upaya tersebut dilakukan dengan dua pendekatan utama yaitu: pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan.



Upaya percepatan dilakukan di wilayah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan, mengingat kemiskinan ekstrem banyak terdapat di wilayah tersebut. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) memerlukan upaya terpadu dan sinergi di tingkat pusat dan daerah, melalui tiga strategi utama PPKE: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Untuk mendorong keterpaduan dan sinergi program dan anggaran lintas pemerintahan dalam pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, telah ditentukan wilayah prioritas yang secara bertahap diperluas hingga mencakup seluruh Kabupaten/Kota pada tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022. Berdasarkan Diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diinstruksikan salah satunya untuk menetapkan pedoman umum pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam rangka mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia 0% pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Serta telah ditetapkannya Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul dan Sleman sebagai lokus kemiskinan ekstrem tahun 2022-2023. Maka dari itu, sesuai dengan pilar 1 (satu) komitmen pemerintah dalam upaya mewujudkan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2024 agar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Hal ini menjadi perhatian khusus DIY dan diterjemahkan melalui Surat Edaran Wakil Gubernur DIY Nomor 401/17506 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di DIY yang disampaikan

kepada seluruh OPD DIY, Kabupaten/Kota dan lembaga-lembaga lainnya.



Gambar 6.18. Estimasi Kemiskinan Ekstrem Provinsi DIY, Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2022

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Tabel 6.22. Estimasi Kemiskinan Ekstrem Provinsi DIY, Menurut Kabupaten/Kota, 2021-2022

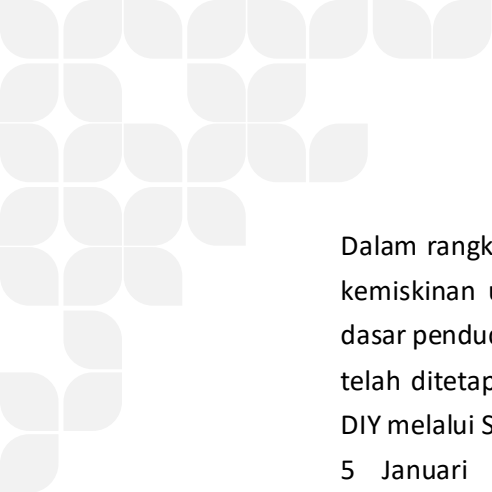
Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (persen)		Estimasi Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribu jiwa)	
		2021	2022	2021	2022
34	DI. Yogyakarta	2,63	2,41	103,909	96,727
3401	Kulon Progo	3,44	3,31	15,184	14,783
3402	Bantul	2,65	2,59	27,731	27,514
3403	Gunung Kidul	5,13	4,30	39,242	33,262
3404	Sleman	1,54	1,42	19,411	18,161
3471	Kota Yogyakarta	0,53	0,67	2,341	3,007

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Tabel 6.23. Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem, Miskin dan Rentan Miskin (Desil 1 –4) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Keluarga					Individu				
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah
1.	Kulon Progo	24.467	16.347	16.429	14.404	71.647	90.020	55.115	52.600	44.199	241.934
2.	Bantul	40.659	29.629	30.576	29.658	130.522	154.221	101.899	100.696	94.652	451.468
3.	Gunungkidul	40.784	31.487	29.689	29.246	131.206	156.646	107.679	91.874	86.709	442.908
4.	Sleman	29.426	35.217	34.994	29.019	128.656	114.771	124.627	120.713	95.805	455.916
5.	Kota Yogyakarta	8.850	8.443	6.418	5.476	29.187	35.342	29.694	22.036	18.225	105.297
		144.186	121.123	118.106	107.803	491.218	551.000	419.014	387.919	339.590	1.697.523

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2023



Dalam rangka perencanaan pembangunan terutama penanggulangan kemiskinan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin yang bersinergi dan berkolaborasi lintas sektor, telah ditetapkan 15 lokus kapanewon penanggulangan kemiskinan di DIY melalui Surat Edaran Wakil Gubernur DIY Nomor 401/0161 tanggal 5 Januari 2022 tentang Penyampaian 15 Lokus Kapanewon Penanggulangan Kemiskinan. Sebagai daerah yang mempunyai frase Keistimewaan, maka kolaborasi antara Kampung, Kampus, Kantor dan Kraton yang di dukung oleh Korporasi akan bisa mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD tahun 2022– 2027. Berkaitan dengan penyelarasan program kegiatan penanggulangan kemiskinan tersebut, kami mengharapkan OPD DIY dan Kabupaten/Kota serta lembaga lainnya untuk menjadikan salah satu pertimbangan dalam menyusun perencanaan program kegiatan terutama penanggulangan kemiskinan. Secara ringkas jumlah OPD yang mendukung penanggulangan kemiskinan ada 25 OPD dengan 42 program, 48 kegiatan, 115 sub kegiatan dan total anggaran/pagu Rp367.241.590.959,00 dengan realisasi sampai dengan TW IV Tahun 2022 sebesar 90,07% atau Rp330.789.972.576,00. Berikut rincian realisasi program/kegiatan yang dilakukan OPD DIY dalam penanggulangan kemiskinan:

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penanggulangan kemiskinan di DIY:

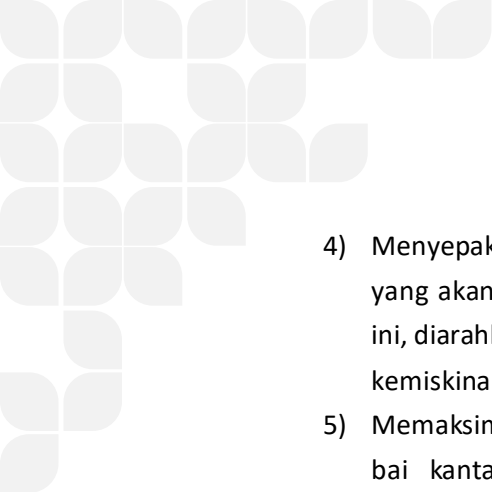
- 1) Belum adanya satu kesepahaman terkait konsep penanggulangan kemiskinan terutama yang tertuang dalam Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota.

- 2) Belum optimalnya kelembagaan TKPKD DIY dalam menjalankan peran dan tugasnya, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor antara OPD DIY, kabupaten/Kota, lembaga dan perusahaan CSR di DIY dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di DIY.
- 3) Belum optimalnya peran CSR dalam pemberdayaan masyarakat dan mengungkit ekonomi masyarakat miskin maupun rentan.
- 4) Masa transisi data penanggulangan kemiskinan yang diawali dengan tidak adanya indikator kesejahteraan pada DTKS Tahun 2022 sehingga identifikasi kebutuhan sasaran bagi masyarakat miskin sulit dipetakan.
- 5) Belum optimalnya kerja sama lintas sektor lingkup OPD DIY, Kabupaten/Kota, Forum CSR dan lembaga lain dalam mendukung sasaran lokus 15 kapanewon penanggulangan kemiskinan.

b. Solusi

Penanggulangan kemiskinan kedepan, diperlukan beberapa upaya percepatan yang pasti diantaranya :

- 1) Diperlukan koordinasi yang intensif antara tim TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dalam merumuskan upaya bersama penanggulangan kemiskinan di DIY.
- 2) Mengoptimalkan peran dan tugas TKPKD dalam penanggulangan kemiskinan dengan cara penguatan kelembagaan TKPKD DIY dengan mengoptimalkan sistematisa kerja sesuai dengan yang tertuang dalam Permendagri 53 Tahun 2020 dan lebih intensif dalam berkoordinasi dan diharmonisasikan dengan TKPKD Kabupaten/Kota serta mengintensifkan koordinasi dengan forum CSR agar mendorong peran CSR lebih besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- 3) Dibutuhkan koordinasi yang intensif terhadap perusahaan-perusahaan yang berada didalam forum CSR DIY tentang dukungan terhadap penanggulangan kemiskinan yang didukung dengan adanya apresiasi terhadap hasil kerja tersebut oleh TKPKD DIY.

- 
- 4) Menyepakati data sasaran program penanggulangan kemiskinan yang akan diintervensi bersama. Pada saat masa transisi data saat ini, diarahkan untuk menyoasar 15 lokus kapanewon penanggulangan kemiskinan agar lebih terarah.
 - 5) Memaksimalkan kekuatan TKPKD DIY dalam supervisi dan koordinasi bai kantar lingkup OPD Pemda DIY maupun dengan TKPKD Kabupaten/Kota sehingga tidak terjadi sasaran yang tumpang tindih.



Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah

A. KERJA SAMA ANTAR DAERAH

1. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Pusat

a. Sinergi Dengan Pemerintah Pusat

Pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan sinergi dengan Pemerintah Pusat berupa Nota Kesepakatan sebanyak 6 naskah kerja sama yang meliputi 6 bidang yaitu bidang pendidikan, keuangan, komunikasi & informatika, kesehatan, lingkungan hidup dan budaya dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 7.1. Sinergi Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Pusat Tahun 2022

No	Uraian	No /Tanggal	Jangka Waktu
1	Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah DIY dengan UPN Veteran Yogyakarta tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah	119/8456/2022, tanggal 24-05-2022	5 tahun
2	Nota Kesepakatan Antara Kementerian Keuangan RI Dengan PEMDA DIY Tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	119/11076/2022, tanggal 28-06-2022	5 tahun
3	Nota Kesepakatan Antara KPU DIY dan Pemda DIY tentang Sinergi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 di DIY	119/14591/2022, tanggal 19-08-2022	5 tahun
4	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY, RSUP Dr. Sadjito, RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten dan UGM tentang Pengembangan Kegiatan Sistem Kesehatan Akademik (AHS) UGM	119/15020/2022, tanggal 29-08-2022	5 tahun
5	Nota Kesepakatan Antara Badan Informasi Geospasial dan Pemda DIY tentang Penyelenggaraan, dan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial di DIY	119/15301/2022, tanggal 01-09-2022	5 tahun
6	Nota Kesepakatan antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek dan Pemda DIY tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	119/16377/2022, tanggal 26-09-2022	5 tahun

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2023

Adapun tindak lanjut dari Nota Kesepakatan yang telah disepakati telah diterbitkan naskah rencana kerja sebanyak 14 naskah yang meliputi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Program Studi Magister Manajemen Bagi Peserta Program Ijin Belajar dengan Bantuan APBD DIY, Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penyelenggaraan, dan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial, pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah bidang pangan, Asesmen Bakat, Minat, Softskills, dan Kepribadian dalam Layanan Bimbingan Jabatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Perempuan Serta Pengendalian Penduduk, Penyelenggaraan Search and Rescue Perairan Umum, Peningkatan Kapasitas Pelaku KUMKM, Pengembangan Akademik, dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu di Lingkungan Pemda DIY, Pengelolaan Hasil Pekerjaan Peningkatan Kapasitas TPA Regional Piyungan, Pendampingan Desa Wisata, Sewa Lahan/Tanah dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 7.2. Daftar Rencana Kerja Tindak Lanjut Nota Kesepakatan Pemda DIY Dengan Pemerintah Pusat Tahun 2022

No	Uraian	Nomor	Tanggal Ditetapkan	Jangka Waktu
1	Rencana Kerja Antara Pemda DIY dengan UPN Veteran Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Program Studi Magister Manajemen Bagi Peserta Program Ijin Belajar dengan Bantuan APBD DIY di UPN Veteran Yogyakarta	119/10798/2022	23/06/2022	5 tahun
2	Perjanjian Kerja sama Antara KPK RI dan Pemprov DIY Tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	119/01926/2022	30/06/2022	5 tahun
3	Rencana Kerja Antara Pemda DIY dan Fakultas Teknik UGM tentang Penyelenggaraan, dan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial di DIY	119/02937/2022	28/09/2022	5 tahun
4	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan UGM (FTP) tentang pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah bidang pangan tentang riset dan pengembangan produk makanan pangan olahan kaleng	119/17503/2022	10-10-2022	5 tahun
5	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Fakultas Psikologi UGM tentang Asesmen Bakat, Minat,	119/03242/2022	20/10/2022	5 tahun

No	Uraian	Nomor	Tanggal Ditetapkan	Jangka Waktu
	Softskills, dan Kepribadian dalam Layanan Bimbingan Jabatan pada Disnakertrans DIY			
6	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan UGM tentang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Perempuan Serta Pengendalian Penduduk di DIY	119/03471/2022	07/11/2022	5 tahun
7	Rencana Kerja antara Polda DIY dan Pemda DIY tentang Penyelenggaraan Search and Rescue Perairan Umum	119/03866/2022	01/12/2022	5 tahun
8	Rencana Kerja Antara Pemda DIY dengan Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Peningkatan Kapasitas Pelaku KUMKM, Pengembangan Akademik, dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	119/03926/2022	06/12/2022	5 tahun
9	Rencana Kerja antara UNY dan Pemda DIY tentang Sinergi Dalam Peningkatan Kapasitas Pelaku KUMKM dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di DIY	119/03927/2022	06/12/2022	5 tahun
10	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Polda DIY tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu di Lingkungan Pemda DIY	119/04183/2022	22/12/2022	5 tahun
11	Berita Acara Kesepakatan Bersama Pengelolaan Hasil Pekerjaan Peningkatan Kapasitas TPA Regional Piyungan	119/04199/2022	26/12/2022	5 tahun
12	Rencana Kerja UNY dan Pemda DIY tentang Pendampingan Desa Wisata	119/09683/2022	26/12/2022	5 tahun
13	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan UPN Veteran Yogyakarta tentang Sewa Lahan/Tanah untuk Area Parkir Penunjang Pengembangan Kawasan Malioboro	551/7316/2022	26/12/2022	5 tahun
14	Rencana Kerja Sekolah Vokasi UGM dan Pemda DIY tentang Pendampingan Desa Wisata	119/09733/2022	27/12/2022	5 tahun

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2023

2. Kerja Sama Antar-Daerah

a. Daerah yang Melakukan Kerja Sama

Kerja sama antar daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 yaitu 5 Kesepakatan Bersama dan 10 Perjanjian Kerja Sama. Kesepakatan Bersama tersebut yaitu antara Gubernur DIY dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Provinsi Jawa Bawa Barat, Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi sebagai berikut :

Tabel 7.3. Kerja sama Pemda DIY dengan Daerah Lain Tahun 2022

No	Uraian	Nomor Naskah Kerja Sama	Tgl Ditetapkan	Jangka Waktu
1	Perjanjian Kerja sama Pemda Kab/Kota se-DIY dengan Pemda DIY (Pol PP) tentang Tindak lanjut Penanganan Pengaduan dan Keluhan Masyarakat	119/00541/2022	15/02/2022	3 tahun
2	Kesepakatan Bersama Antara Pemda DIY dan Pemda Kabupaten Purworejo Jateng tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	119/2839/2022	02/03/2022	5 tahun
3	Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY dengan Pemkot Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta	119/8027/2022	19/05/2022	5 tahun
4	Kesepakatan Bersama Antara Pemprov Sumatera Selatan dengan Pemda DIY tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan	119/8459/2022	24/05/2022	5 tahun
5	Perubahan Kedua (Adendum Kedua) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemda DIY dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Kedua PKS Nomor 119/03010 dan Nomor 0195/8811/2020 tgl. 23 November 2020 tentang Pemanfaatan Galeri KUKM Pasar Kotagede di YIA	119/02116/2022	18/07/2022	4 bulan
6	Kesepakatan Bersama antara PEMDA DIY dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	119/15315/2022	01/09/2022	5 tahun
7	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemda DIY dengan Pemkab Purworejo tentang Replika dan Adopsi Sistem Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah Pemda DIY di Kab. Purworejo	119/15461/2022	06/09/2022	5 tahun
8	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tentang Kerja Sama Andon Penangkapan Ikan	119/02719/2022	12/09/2022	5 tahun
9	Kesepakatan Bersama Antara Pemprov Jawa Timur dan Pemda DIY tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	119/17111/2022	03/10/2022	5 tahun
10	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY, Pemkab Kulon Progo, Bantul, Sleman, Gunungkidul tentang Pengelolaan Satuan Perlindungan Masyarakat <i>Rescue Istimewa</i>	119/03180/2022	17/10/2022	3 tahun
11	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY, Pemkab Bantul, Sleman dan Pemkot Yogyakarta tentang	119/17977/2022	19/10/2022	3 tahun

No	Uraian	Nomor Naskah Kerja Sama	Tgl Ditetapkan	Jangka Waktu
	Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional di Wil. Kab. Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta			
12	Kesepakatan Bersama antara Pemprov Sulawesi Tenggara dan Pemda DIY tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	119/18442/2022	29/10/2022	5 tahun
13	Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Jawa Tengah (pol pp jawa tengah) dengan Pemda DIY tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah di Wilayah Perbatasan	119/03597/2022	14/11/2022	5 tahun
14	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemda Provinsi Jawa Tengah tentang Pembangunan Kepariwisataaan	556/3988/2022	26/11/2022	5 tahun
15	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemda Provinsi Jawa Barat dengan Pemda DIY tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil	119/03925/2022	06/12/2022	5 tahun

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2023

b. Bidang Kerja sama

Bidang-bidang yang dikerjasamakan oleh Pemda DIY pada tahun 2022 yaitu :

- 1) Pembangunan Daerah;
- 2) Transmigrasi;
- 3) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- 4) Koperasi dan UKM;
- 5) Perdagangan;
- 6) Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
- 7) Kelautan dan Perikanan;
- 8) Lingkungan Hidup;
- 9) Pariwisata.

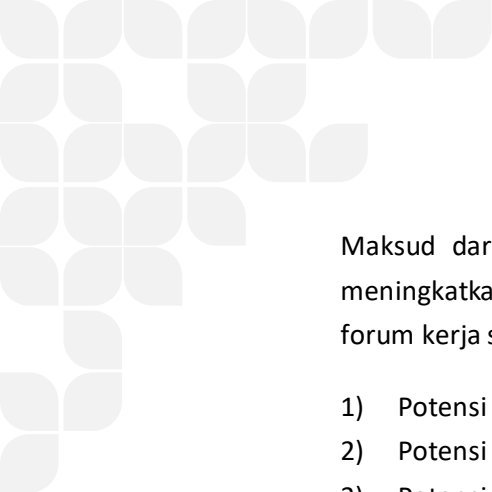
c. **Mitra Praja Utama (MPU)**

Mitra Praja Utama berawal dari pembentukan forum silaturahmi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam wadah “Dwi Praja” yang dibentuk pada tahun 1988, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama melalui kemitraan. Pada tahun 1990 Provinsi Jawa Tengah bergabung sebagai anggota sehingga namanya berubah menjadi “Tri Praja”.

Forum ini kemudian berkembang menjadi jalinan kerja sama 6 provinsi se-Jawa dan Bali dan bernama “Sad Praja Utama”. Sad Praja berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari kata sad yang berarti enam, praja berarti pemerintahan, utama yang utama atau peringkat satu. Sad Praja Utama merupakan forum kerja sama enam Pemerintah Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali untuk menangani masalah-masalah pembangunan di provinsi se-Jawa dan Bali.

Dalam Rapat Kerja Sad Praja Utama IX yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 April 2000 telah ditetapkan bahwa Provinsi Lampung secara resmi diterima menjadi anggota baru Sad Praja Utama, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Gubernur se-Jawa, Bali dan Lampung Nomor 01/SK/MPU/2001 tanggal 13 Oktober 2001. Sejalan dengan penambahan anggota baru, maka nomenklatur Sad Praja Utama berubah menjadi Mitra Praja Utama, yang sekaligus memberikan peluang kepada provinsi lain untuk masuk menjadi anggota Mitra Praja Utama (MPU).

Provinsi lain yang kemudian menjadi anggota Mitra Praja Utama adalah Provinsi Banten, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, sehingga saat ini anggota Mitra Praja Utama seluruhnya berjumlah 10 provinsi.



Maksud dari forum kerja sama Mitra Praja Utama adalah untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antar Daerah, dan tujuan dari forum kerja sama Mitra Praja Utama adalah untuk mensinergikan :

- 1) Potensi sumber daya alam unggulan antar Daerah;
- 2) Potensi dan peluang ekonomis antar Daerah;
- 3) Potensi sumber daya manusia non alami;
- 4) Penelitian, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara optimal potensi antar Daerah; dan
- 5) Pemecahan berbagai masalah yang dianggap penting antar Daerah.

Rata-rata persentase pelaksanaan program kerja sama OPD/OPD FKD MPU pada tahun 2022 sebesar 51% dari perencanaan, selebihnya mengalami kendala akibat pengaruh Covid-19. Sejak pandemi Covid-19 melanda sampai dengan saat ini, banyak program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya mengalami penundaan bahkan dibatalkan. Semua provinsi melakukan *refocusing* anggaran dan semua kegiatan diarahkan untuk menanggulangi pandemi ini. Imbasnya juga terjadi pada pelaksanaan program kerja sama yang telah disepakati oleh OPD/OPD di lingkungan FKD MPU. Dengan latar belakang tersebut, disepakati bahwa kegiatan FKDMPU tahun 2022 difokuskan untuk menyusun rencana aksi yang merupakan implementasi dari Perjanjian Kerja Sama OPD Provinsi anggota MPU. Adapun kegiatan penyusunan rencana aksi masing-masing perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani antara lain:

- 1) Rapat penyusunan rencana aksi Penanganan Kesehatan Kasus Covid-19 tanggal 23 Juni 2022;
- 2) Rapat tentang penyusunan rencana aksi PKS Penanganan Bersama Warga Binaan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tanggal 01 September 2022.

Sedangkan Kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia (APPSI) di 2022 adalah Rapat Pra Rakernas APPSI 2023. Rapat Pra Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI diselenggarakan pada tanggal 26-27 Oktober 2022, bertempat di Hotel Novotel, Jalan Brigjen Ery Suparjan Nomor 2 Balikpapan, Kalimantan Timur, dihadiri oleh 30 Pemda Provinsi seluruh Indonesia. Rapat diawali dengan serah terima jabatan Ketua Umum APPSI masa jabatan 2019-2022 kepada Ketua Umum APPSI masa jabatan 2023-2025 dan pembahasan program kerja APPSI yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Selain itu terdapat program kerja tahun 2022 yang tertunda pelaksanaannya dan akan dilaksanakan di tahun 2023 yaitu Seminar tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemulihan Ekonomi Lokal pasca Berakhirnya Relaksasi Kebijakan Ekonomi Nasional.

Adapun program kerja baru dari APPSI yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu:

- 1) Seminar tentang RUU Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Polemik Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan dan Perkebunan;
- 2) Seminar tentang Netralitas ASN menjelang Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024;
- 3) Seminar tentang Tantangan Kepemimpinan dan Etika Pemerintahan Pasca Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024;
- 4) Workshop Kerja sama Antar Daerah Dalam Rangka Kemandirian Pangan;
- 5) Seminar Akhir Tahun Membahas Masalah-Masalah Strategis Nasional (Topiknya akan ditentukan kemudian).

3. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

a. Pihak Ketiga/Badan/Swasta yang telah bekerjasama

Pada tahun 2022 Pemda DIY telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/swasta sebanyak 7 Kesepakatan Bersama dan 8 Perjanjian Kerja Sama dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 7.4. Rincian Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama

No	Uraian	Nomor Naskah Kerja Sama	Tgl Ditetapkan	Jangka Waktu
1	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dan PT. Global Digital Niaga (Blibli.com) tentang Pengembangan Bisnis Pelaku Usaha Kecil dan Menengah DIY melalui Penjualan <i>Online</i> / Sistem Dalam Jaringan (Daring)	519/01248/2022	02/02/2022	3 tahun
2	Kesepakatan Bersama Antara Pemda DIY dengan Tribun Network tentang Peningkatan Nilai -nilai Keistimewaan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital Activity	119/1591/2022	03/02/2022	5 tahun
3	Perjanjian antara Pemda DIY dengan PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia tentang Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pelaksanaan Transaksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Piyungan	119/2806/2022	01/03/2022	30 bulan
4	Kesepakatan Bersama Antara Pemda DIY dengan UTY tentang Kerja sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Daerah di DIY	119/3952/2022	22/03/2022	5 tahun
5	Perjanjian Kerja sama Antara Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan Pemda DIY tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Bagi Dosen dan Mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	119/01276/2022	22/04/2022	3 tahun
6	Perjanjian Kerja sama Antara PEMDA DIY Dengan PT Ekonomi Sirkular Indonesia Tentang Manajemen Produk Makanan Berlebih Pada Usaha Jasa Pariwisata dan Kuliner di DIY	119/03972/2022	02/06/2022	5 tahun
7	Kesepakatan Bersama Antara PEMDA DIY dan PT Industri Kereta Api (Persero) Tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pengoperasian Bus Listrik Trans Jogja	119/10462/2022	20/06/2022	5 tahun
8	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemda DIY dengan UTY tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di Badan Kesbangpol DIY	119/02720/2022	12/09/2022	5 tahun
9	Kesepakatan Bersama Antara Perum Bulog Kanwil Yogyakarta dan Pemda DIY tentang Pengelolaan Pangan yang Terintegrasi di Wilayah DIY	119/02852/2022	22/09/2022	5 tahun
10	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemda DIY dengan UGM dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DIY tentang Kerja Sama Pengembangan Kapasitas SDM, Teknologi, dan Manajemen Bisnis KUMKM	119/03209/2022	19/10/2022	5 tahun
11	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan PT Bank Mandiri tentang Pemanfaatan Jasa Perbankan	119/18274/2022	25/10/2022	5 tahun

No	Uraian	Nomor Naskah Kerja Sama	Tgl Ditetapkan	Jangka Waktu
	Dalam Mendukung Penyelenggaraan Layanan Publik dan Perekonomian Daerah di DIY			
12	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan STIE Pariwisata API Yogyakarta tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan SDM di DIY	119/04123/2022	17/12/2022	5 tahun
13	Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY dengan Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta tentang Pendampingan Desa Wisata	119/09684/2022	26/12/2022	5 tahun
14	Perjanjian Kerja Sama antara STIE Pariwisata API dengan Pemda DIY tentang Pendampingan Desa Wisata	119/09681/2022	26/12/2022	5 tahun
15	Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Sanata Dharma dengan Pemda DIY tentang Pendampingan Desa Wisata	119/09682/2022	26/12/2022	5 tahun

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2023

b. Bidang Kerja Sama

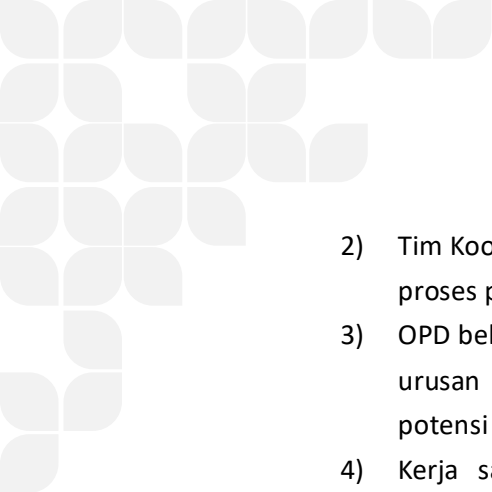
Pada tahun 2022 Pemda DIY melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sejumlah 15 naskah kerja sama. Adapun bidang yang dikerjasamakan yaitu:

- 1) Pendidikan Pelatihan, Penelitian dan Pengkajian dan Pengembangan SDM;
- 2) Perekonomian;
- 3) Tehnologi dan Informasi;
- 4) Pembangunan Daerah;
- 5) Komunikasi dan Informatika;
- 6) Perdagangan;
- 7) Pariwisata;
- 8) Pangan;
- 9) Perhubungan.

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sehingga belum bisa diketahui efektivitas kerja sama yang dilaksanakan.

- 
- 2) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) kurang pro aktif dalam proses penyusunan kerja sama daerah.
 - 3) OPD belum sepenuhnya paham urgensi identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.
 - 4) Kerja sama belum semuanya terintegrasi kedalam dokumen perencanaan.
 - 5) Sering kali kerja sama berhenti hanya sebatas penandatanganan kesepakatan bersama ataupun hanya sampai perjanjian kerja sama namun tanpa adanya tindak lanjut.

b. Solusi

- 1) Pemda melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga kerja sama yang dilakukan akan memberikan kemanfaatan.
- 2) TKKSD bertindak secara pro aktif selaku koordinator dan diharapkan mampu melaksanakan program kerja yang telah disusun dalam upaya peningkatan efektivitas kerja sama daerah.
- 3) Mendorong OPD segera melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.
- 4) Melakukan integrasi ke dalam dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan kerja sama berjalan dengan baik.
- 5) Diperlukan komitmen yang tinggi dari setiap stakeholder terkait rencana membangun kerja sama antar daerah. Hal ini sangat penting karena sering kali kerja sama berhenti hanya sebatas penandatanganan kesepakatan bersama ataupun hanya sampai perjanjian kerja sama namun tanpa adanya tindak lanjut.

B. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

DIY dikenal sebagai daerah tujuan wisata pariwisata dengan keragaman destinasi yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk datang ke wilayah DIY guna berwisata. Untuk itu, Pemda DIY harus memiliki kesiapan dalam menyambut wisatawan yang datang. Hal-hal yang perlu disiapkan, antara lain kesiapan jalur dan moda transportasi, baik jalur darat, laut dan udara; ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok, bahan bakar minyak, LPG, dan stok uang tunai guna menghadapi lonjakan permintaan akibat masuknya wisatawan ke DIY.

Beranjak dari hal tersebut, guna mewujudkan situasi kondusif wilayah DIY menjelang hari besar keagamaan dan libur nasional, Pemda DIY melaksanakan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 26 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Forkopimda dibentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan guna menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun struktur Forkopimda DIY diketuai oleh Gubernur DIY dan beranggotakan unsur pimpinan DPRD DIY, TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelijen Negara Daerah, serta Pengadilan Tinggi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimda DIY difasilitasi melalui program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial serta subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.

Pada tahun anggaran 2022, kegiatan yang telah dikoordinasikan dalam rapat koordinasi Forkopimda antara lain:

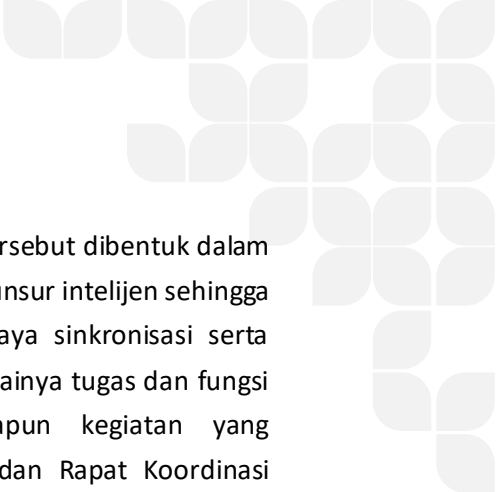
- a. Menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan ibadah Idul Fitri 1443 Hijriah dan Natal Tahun 2022.
- b. Antisipasi gangguan keamanan di DIY jelang Idul Fitri 1443 Hijriah, serta Natal dan Tahun Baru Tahun 2022/2023.
- c. Menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan, serta kelancaran mobilitas warga yang datang dan keluar DIY saat libur Idul Fitri 1443 Hijriah, serta Natal dan Tahun Baru Tahun 2022/2023.
- d. Menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok, bahan bakar minyak, LPG, dan stok uang tunai selama perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, serta Natal dan Tahun Baru Tahun 2022/2023.
- e. Kesiapan objek wisata dalam mengelola wisatawan yang masuk saat libur Idul Fitri 1443 Hijriah, serta Natal dan Tahun Baru Tahun 2022/2023.

Hasil Rapat Koordinasi Forkompimda DIY selama tahun 2022 diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Dalam menghadapi hari raya keagamaan, Pemda DIY berkoordinasi melalui PPID terkait ketersediaan bahan pokok. DIY memiliki persediaan yang cukup sehingga tidak ada alasan untuk terjadi gejala masalah harga seperti minyak goreng dan sebagainya.
- b. Pada saat puncak liburan terjadi kepadatan arus lalu lintas, untuk dilakukan rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas.
- c. Stabilisasi pasokan BBM, LPG dan Sembako.
- d. Antisipasi kerawanan Kamtibmas.

2. Komite Intelijen Daerah (Kominda)

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia dengan karakteristik masyarakat yang majemuk merupakan suatu tantangan dalam menciptakan stabilitas dan situasi kondusif wilayah DIY. Guna menindaklanjuti permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya deteksi dini dan cegah dini potensi kerawanan oleh jaringan intelijen yang diwadahi



dalam Komite Intelijen Daerah (Kominda). Forum tersebut dibentuk dalam rangka meningkatkan optimalisasi koordinasi antar unsur intelijen sehingga proses harmonisasi hubungan fungsional dan upaya sinkronisasi serta sinergi penyelenggara intelijen dalam rangka tercapainya tugas dan fungsi intelijen dapat terlaksana dengan baik. Adapun kegiatan yang dikoordinasikan yaitu Rapat Kerja Kominda DIY dan Rapat Koordinasi Kominda DIY yang menghasilkan kesepakatan berupa: (a) Pertukaran informasi intelijen; (b) Harmonisasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan dan produk intelijen; (c) Perumusan kegiatan dan/atau operasi intelijen bersama; (d) Rekomendasi tindakan yang akan dilakukan dan masukan kebijakan kepada Gubernur selaku Kepala Daerah tingkat Provinsi. Tindak lanjut hasil koordinasi bahwa semua informasi dan fakta menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh masing-masing penyelenggara intelijen sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Dari hasil koordinasi Kominda selama tahun 2022, telah dirumuskan kesepakatan bahwa semua informasi dan fakta yang di dapat di lapangan menjadi dasar analisa bagi langkah tindak lanjut baik oleh masing-masing penyelenggara intelijen sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi ataupun secara bersama dalam rangka deteksi dini dan cegah dini potensi kerawanan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan deteksi dini dan cegah dini potensi kerawanan dilaksanakan melalui kegiatan penyelidikan terhadap potensi kerawanan, pengamanan melalui kegiatan operasi, serta penggalangan terhadap pihak-pihak tertentu guna meredam potensi kerawanan dan menciptakan kondisi atau opini tertentu.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Forkopimda

1) Permasalahan

Perlunya penguatan fungsi koordinasi antar unsur forkopimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di daerah, mengingat masih belum rutinnya penyelenggaraan rapat koordinasi Forkopimda

2) Solusi

Dalam mengoptimalkan peran Forkopimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di daerah dapat direkomendasikan agar:

- a) Unsur Forkopimda memfungsikan kembali kembali pusat pengendalian krisis (Pusdalsis) di daerah agar meningkatkan konektivitas antar Pusdalsis Pusat dan Daerah agar dapat dilakukan langkah cepat, preventif dan pengambilan kebijakan yang tepat baik Gubernur, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).
- b) Unsur Forkopimda untuk dapat mengoptimalkan fasilitasi rapat koordinasi setiap bulan agar diperoleh informasi akurat dari setiap lini, serta mengoptimalkan sistem pelaporan yang ada dalam mendukung pengambilan keputusan cepat dan tepat.

b. Kominda

1) Permasalahan

- a) Masih kurangnya kesepahaman, kesolidan dan koordinasi antar unsur Kominda.
- b) Belum optimalnya koordinasi, kecepatan penyampaian informasi terkini, serta sinergi antar anggota Kominda terkait perkembangan situasi terkini di daerah.

2) *Solusi*

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat direkomendasikan:

- a) Pemerintah Daerah DIY telah berupaya meningkatkan kesepahaman, kesolidan, serta koordinasi antar unsur Kominda, baik dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun aparat TNI/Polri melalui berbagai forum koordinasi agar dapat dihasilkan informasi intelijen yang akurat. Kominda perlu dilihat sebagai komunitas strategis yang berperan penting sebagai penyampai informasi terdepan dalam upaya deteksi dini dan cegah dini potensi konflik di daerah, sehingga perlu adanya perhatian khusus terkait fasilitasi dan kemudahan koordinasinya.
- b) Mengoptimalkan peran Kominda di antara para pemangku kepentingan di daerah sebagai komunitas strategis yang berperan penting sebagai penyampai informasi terdepan untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini potensi konflik di daerah dengan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam upaya cegah dini dan deteksi dini potensi konflik sosial di wilayah DIY.

C. PEMBINAAN BATAS DAERAH

1. Gambaran Umum

Wilayah DIY berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, batas daerah kedua provinsi telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, dengan lampiran Peta Batas Wilayah pada skala 1: 100.000.

Peta Batas Wilayah dengan skala 1: 100.000 menimbulkan permasalahan karena skala yang terlalu besar sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Selain itu untuk menindaklanjuti kebijakan Satu Peta Indonesia yang tertuang dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2016 *jo.* Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Pemda DIY bersama Tim Penegasan Batas Provinsi dan Kabupaten sejak Tahun 2019 telah dan sedang melakukan pendetailan garis batas daerah DIY dengan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya hasil pendetailan garis batas tersebut menjadi bahan kebijakan penyusunan revisi Permendagri Batas Daerah. Adapun progres revisi permendagri sebagai berikut:

Tabel 7.5. Progres Pembahasan dan Penelaahan Segmen Batas Wilayah DIY dan Jateng

No	Segmen Batas		Keterangan
	DIY	Jateng	
1.	Kab. Kulon Progo	Kab. Purworejo	Proses pembahasan dan penelaah di Kemendagri
2.	Kab. Sleman	Kab. Klaten	Proses pembahasan dan penelaah di Kemendagri
3.	Kab. Gunungkidul	Kab. Klaten	Proses pembahasan dan penelaah di Kemendagri
4.	Kab. Gunungkidul	Kab. Sukoharjo	Usulan revisi telah disampaikan ke Kemendagri pada November 2022
5.	Kab. Gunungkidul	Kab. Wonogiri	Proses pembahasan di daerah
6.	Kab. Kulon Progo	Kab. Magelang	Proses pembahasan di daerah
7.	Kab. Sleman	Kab. Magelang	Proses pembahasan di daerah

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2023

Selain batas luar dengan Provinsi Jawa Tengah, batas antar kabupaten/kota di DIY juga sudah ditetapkan dengan Permendagri. Berikut adalah data lengkap tentang batas daerah di DIY:

Tabel 7.6. Segmen Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di DIY

No	Segmen Batas Daerah		Panjang Lintasan (Km)	Penetapan dalam Permendagri tentang Batas Daerah	Lampiran Permendagri tentang Batas Daerah
1.	Bantul	Kulon Progo	±28,18	Permendagri 70/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 25.000
2.	Gunungkidul	Bantul	±51,70	Permendagri 71/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 40.000

No	Segmen Batas Daerah		Panjang Lintasan (Km)	Penetapan dalam Permendagri tentang Batas Daerah	Lampiran Permendagri tentang Batas Daerah
3.	Kota Yogyakarta	Sleman	±9,46	Permendagri 72/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 5.000
4.	Gunungkidul	Sleman	±6,50	Permendagri 4/2009	Peta Batas Daerah skala 1: 10.000
5.	Kulon Progo	Sleman	±19,36	Permendagri 61/2009	Peta Batas Daerah skala 1: 18.000
6.	Kota Yogyakarta	Bantul	±18,74	Permendagri 15/2012	Peta Batas Daerah skala 1: 10.000
7.	Bantul	Sleman	±41,15	Permendagri 83/2013	Peta Batas Daerah skala 1: 25.000

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2023

2. Program dan Kegiatan Pembinaan Batas Wilayah

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan di wilayah perbatasan, berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah DIY selama kurun waktu tahun 2022:

- a. Revisi dan pendetailan garis batas daerah DIY dengan Provinsi Jawa Tengah.
- b. Penyusunan Buku Database Pilar Batas Daerah untuk pengelolaan tanda batas wilayah.
- c. Sosialisasi Perda DIY Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY.
- d. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan.
- e. Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan.
- f. Penyusunan Buku dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY.
- g. Pemasangan pilar perapatan batas DIY-Jateng pada segmen batas Kab. Kulon Progo-Kab. Purworejo.
- h. Pengembangan Sistem Informasi Database Administrasi Kewilayahan.
- i. Kegiatan Penataan Wilayah Perbatasan.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Terkait penetapan batas antar kabupaten/kota di DIY yang mendasarkan pada lampiran Permendagri dengan skala peta yang berbeda-beda menyebabkan pada area tertentu terutama di wilayah strategis dan berpotensi ekonomi ditemukan permasalahan batas daerah yang berdasarkan garis pada peta tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

b. Solusi

Dilakukan proses pendetailan garis batas Kabupaten/Kota dengan skala yang lebih besar. Merujuk Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah disebutkan bahwa “Pada kondisi tertentu (misalnya titik-titik yang dianggap berpotensi perbedaan pendapat terhadap batas) disyaratkan untuk dibuatkan peta situasi dan digambarkan dengan skala 1 : 1.000”. Selain itu pendetailan garis batas tersebut juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, dimana disebutkan bahwa salah satu rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta adalah penyediaan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 5.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

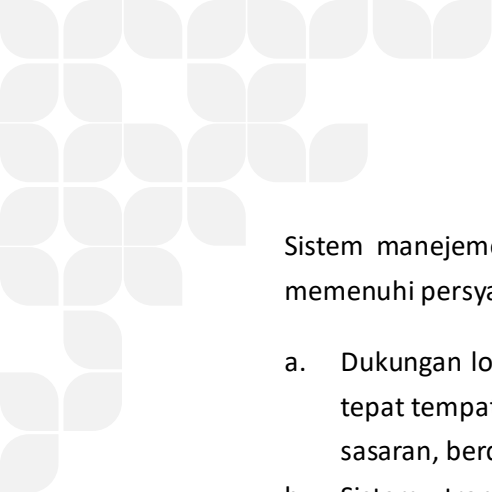
1. Gambaran Umum

Secara geografis DIY terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan pantai yang memiliki potensi dan ancaman bencana yang tinggi. UU Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Kompleksitas kondisi wilayah dan faktor manusia membuat DIY rawan bencana. Hal ini dapat dilihat dari sejarah kejadian bencana di DIY maupun kajian risiko bencana saat ini. Potensi ancaman bencana ini menimbulkan risiko bencana seperti korban jiwa, kerugian material yang besar, terhambatnya pertumbuhan pembangunan dan memburuknya kondisi ekonomi.

Paradigma penanganan bencana berubah dari responsif menjadi preventif, tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi risiko bencana. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kegiatan PRB dapat dilakukan secara fisik/struktural maupun non fisik secara terpadu dan berkelanjutan. Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemda DIY dalam rangka pengurangan resiko bencana adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sesuai Peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Program SPAB tahun 2022 dengan target 55 SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) yang terdiri dari SMA/SMK Negeri dan swastaterdiri dari 35 Lanjutan Tahun 2021 ditambah 20 Rintisan tahun 2022 sudah dilaunching secara bersamaan pada awal bulan November 2022.
- b. Pembentukan Desa Tangguh Bencana sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Program Desa/Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu program utama BNPB yang mulai dilaksanakan pada tahun 2012 dan terus dikembangkan sampai saat ini. Pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan pembentukan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana di 25 (lima) kalurahan/kelurahan yang tersebar di semua kabupaten/kota di DIY.
- c. Menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Kajian Risiko Bencana yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemda DIY dan para pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana.



Sistem manajemen logistik dan peralatan merupakan suatu sistem yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas dan standard pelayanan.
- b. Sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreatifitas di lapangan, baik melalui darat, laut, sungai, danau maupun udara.
- c. Distribusi logistik dan peralatan memerlukan cara-cara penyampaian yang khusus karena keterbatasan transportasi, penyebaran kejadian, keterisolasian ketika terjadi bencana.
- d. Inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggung jawaban logistik dan peralatan kepada yang terkena bencana memerlukan sistem manajemen khusus.

Sedangkan untuk standarisasi peralatan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan aktivitas penanggulangan bencana baik pada tahap mitigasi, siaga darurat, tanggap darurat maupun masa pemulihan diperlukan peralatan- peralatan yang memadai dan sesuai dengan kejadian bencananya merujuk pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana. Khususnya pada saat tanggap darurat kebutuhan peralatan yang tepat jumlah dan spesifikasinya dan dapat tersedia dengan cepat untuk melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi menjadisangat penting, agar tujuan penanggulangan bencana untuk penyelamatan dan mengurangi penderitaan korban bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2009 terdapat 28 jenis peralatan PB yang harus dimiliki oleh setiap daerah sebagai standar minimal dalam melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan untuk masing masing jenis bencana ditambah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan dan fungsinya. Sesuai fungsinya peralatan penanggulangan bencana dikategorikan menjadi 5 jenis yakni:1) Alat angkut transportasi dan mobilisasi; 2) Alat berat dan alat pendukung; 3) Alat perlindungan, shelter dan tenda; 4) Alat komunikasi dan elektronik; serta 5) Alat perlindungan diri dan medis. Secara bertahap

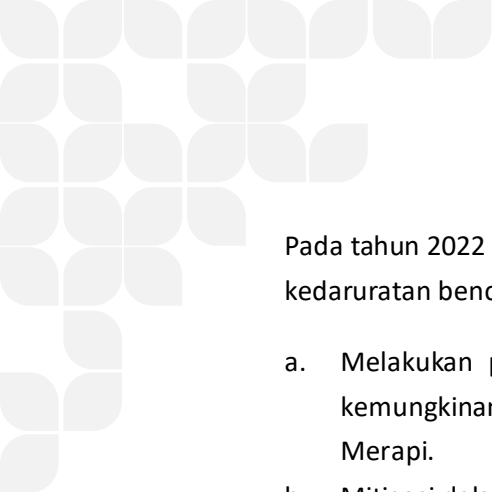
Pemda DIY berupaya memenuhi kebutuhan penyediaan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal untuk penanganan ancaman bencana di DIY.

Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terdiri atas beberapa aktivitas yang mencakup pengelolaan peralatan penanggulangan bencana meliputi dukungan operasional dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan serta koordinasi dengan mitra dalam rangka pemenuhan kebutuhan.

Tabel 7.7. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana Tahun 2022

No	Kegiatan	Lokasi	Bentuk Kegiatan	Penerima Manfaat
1.	Alat Keselamatan Penanggulangan Bencana	Kota Yogyakarta Sleman Bantul	Tersedianya alat keselamatan penanggulangan bencana yang memadai bagi parapenerima manfaat	1. KTB Patehan 2. PCNU Sleman 3. AMPI Sleman 4. Destana Donokerto 5. FPRB Sriharjo 6. FPRB Canden 7. Yayasan Semesta Utama
2.	PenyediaanAlat TangguhBencana	Kota Yogyakarta Sleman Bantul	Tersedianya alat tangguh bencana yang memadai bagi para penerima manfaat	1. KTB Jogoyudan 2. RSC Sukodono 3. DestanaPurwomartani 4. Gejawan Community 5. Komunitas Freekom 6. FPRB Tirtomulyo
3.	Peralatan dan kendaraan operasional penanggulangan bencana siap pakai	DIY	Perawatan dan pemeliharaan kendaraan penanggulangan bencana sehingga siap pakai kapan saja. (Truck 11 unit, mobil 13 unit, motor 10 unit, alat berat 5 unit)	Petugas BPBD DIY, Masyarakat
4.	Peralatan penanggulangan bencana sesuai rencana kebutuhan	DIY	Pengadaan peralatan penanggulangan bencana berupa peralatan komunikasi, peralatan penyelamatan dan peralatan pendukung lainnya	BPBD DIY, Masyarakat
5.	Radio komunikasi dalam penanggulangan bencana yang dikelola	DIY	Perawatan dan pemeliharaan alat komunikasi yang dimiliki oleh BPBD DIY	BPBD DIY

Sumber: BPBD DIY, 2023



Pada tahun 2022 Pemda DIY melaksanakan beberapa kegiatan penanganan kedaruratan bencana terdiri dari :

- a. Melakukan pencegahan dan antisipasi terkait risiko bencana yang kemungkinan terjadi selama tahun 2022 seperti pada aktivitas Gunung Merapi.
- b. Mitigasi dalam menghadapi cuaca dan iklim ekstrim.
- c. Melakukan tindak lanjut status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di kabupaten, serta mempercepat vaksinasi dan pengobatan terhadap hewan sakit terdampak PMK.
- d. Melakukan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada saat musim hujan/puncak musim hujan Tahun 2022/2023 di DIY.

Terkait dengan pemulihan pasca bencana, Pemda DIY melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada lima sektor yang rusak akibat bencana yang terjadi sebelumnya. Hal itu diukur dengan perhitungan Indeks Pemulihan Pasca Bencana (*Disaster Recovery Index*).

Disaster Recovery Index (DRI) memegang peranan penting dalam membantu perumusan kebijakan-kebijakan pemulihan kondisi pasca bencana, mengevaluasi efektivitas program rencana aksi pemulihan kondisi pasca bencana, membantu perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi dan mempermudah upaya komunikasi dengan masyarakat tentang keadaan atau perkembangan upaya pemulihan kehidupan pasca bencana.

Kajian DRI pada Tahun 2022 merupakan kajian tahun terakhir akibat bencana hidrometeorologi Badai Tropis Siklon Cempaka tahun 2017. Adapun nilai DRI masing-masing Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: Kabupaten Sleman dengan nilai rata-rata dari kelima sektor sebesar 114%, Kabupaten Bantul 143%, Kabupaten Kulon Progo 140%, Kabupaten Gunungkidul 144%, dan Kota Yogyakarta sebesar 128%.

Berdasarkan nilai DRI pada masing-masing kabupaten dan kotamadya diperoleh nilai DRI DIY pada tahun 2022 yaitu sebesar 136%. Capaian tersebut naik sebesar 14,56% dari capaian tahun 2021 dengan capaian 121,44%. Capaian DRI sebesar 136% tersebut merupakan tingkatan tertinggi berdasarkan standar klasifikasi perhitungan tingkat DRI suatu daerah.

Tabel 7.8. Rentang Nilai dan Klasifikasi Tingkat DRI

Nilai DRI	Klasifikasi Tingkat DRI
< 44 %	Tingkat DRI Rendah
44 -90 %	Tingkat DRI Sedang
>90 %	Tingkat DRI Tinggi

Sumber:BPBD DIY, 2023

2. Potensi Bencana

Upaya pengurangan resiko bencana menjadi sangat relevan untuk dilakukan mengingat DIY memiliki 12 jenis potensi bencana yang sudah teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya. Potensi bencana tersebut adalah Banjir, Epidemii dan Wabah Penyakit, Gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, tsunami, kekeringan, letusan gunung api, angin kencang, tanah longsor, kebakaran, kegagalan teknologi dan bencana sosial.

a. Banjir

Potensi Banjir dapat disebabkan oleh faktor alam maupun perilaku manusia. Faktor alam yang berkontribusi adalah curah hujan yang tinggi dan daya serap tanah yang rendah, yang menyebabkan tanah longsor yang sangat kuat. Beberapa faktor yang disebabkan oleh perilaku manusia antara lain: (1) membuang sampah sembarangan yang menyebabkan selokan dan sungai menjadi dangkal dan terhambat alirannya; (2) semakin rendahnya daya serap tanah terhadap air karena tanah tertutup oleh aspal jalan raya dan bangunan; dan (3) penebangan pohon yang tidak menerapkan sistem reboisasi. Selama tahun 2022 terdapat 70 kejadian banjir di wilayah DIY.

b. Epidemi dan Wabah Penyakit

Bencana epidemi dan wabah penyakit merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh merebaknya penyakit menular yang berjangkit pada suatu daerah dan waktu tertentu, salah satu pandemi yang sedang terjadi saat ini adalah adanya wabah Covid-19.

c. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Bencana gelombang ekstrim abrasi terjadi satu kali dengan mengakibatkan 59 rumah rusak ringan di Bantul pada tahun 2007 dan untuk skala yang ringan terjadi beberapa kali. Selama tahun 2022 tidak ada kejadian gelombang ekstrim di DIY.

d. Gempa Bumi

Hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa gempa bumi yang terjadi di DIY disebabkan adanya gerakan sesar aktif yang kemudian disebut dengan Sesar Kali Opak. Selama tahun 2022 terdapat 771 kejadian Gempa di wilayah DIY.

e. Tsunami

Catatan kejadian tsunami sebelumnya di wilayah pesisir selatan Jawa berkisar antara 3 hingga 10 meter. Kondisi hutan mangrove saat ini sebagai pertahanan alami terhadap tsunami, khususnya di sepanjang pantai wilayah Bantul sudah tidak ada lagi. Cagar alam yang ada saat ini terdiri dari gumuk pasir, laguna dangkalan dengan perlindungan yang sangat terbatas, terutama yang hanya melindungi kawasan/pemukiman di sisi lain. Pesisir Kabupaten Kulon Progo terbuka sehingga risiko terkena tsunami cukup tinggi. Sudah ada upaya membuat zona hijau secara vegetatif, *green belt* yaitu menanam cemara di pinggir pantai yang jaraknya 200 meter dari bibir pantai. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul dengan pesatnya perkembangan wisata pantai, harus waspada menghadapi kemungkinan tsunami.

f. **Kegagalan Teknologi**

Potensi gagal teknologi di DIY selain berupa kecelakaan transportasi juga potensi kegagalan teknologi reaktor nuklir. Salah satu reaktor nuklir yang ada di DIY dinamakan sebagai Reaktor Kartini, yang dimiliki oleh Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). Selama tahun 2022, tidak ada potensi kegagalan teknologi.

g. **Kekeringan**

Umumnya Kabupaten Gunungkidul sering mengalami kekeringan. Penyebabnya adalah curah hujan yang rendah, tanah karst yang tidak dapat menampung dan menyimpan air. Satu-satunya sumber air yang tersedia adalah sungai bawah tanah yang umum di daerah tersebut. Kekeringan di kabupaten lainnya lebih disebabkan ketidakmampuan permukaan tanah untuk menyerap air hujan, yang disebabkan oleh hilangnya vegetasi yang ditutupi dengan penutup lapisan kedap air di permukaan tanah dan memperburuk pengambilan air bawah tanah yang berlebihan dan tidak terkendali.

h. **Letusan Gunung Api**

Gunung Merapi yang aliran laharnya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sleman merupakan salah satu gunung teraktif di dunia karena periodesitas letusannya relative pendek yaitu 3-7 tahun. Bahkan setiap harinya gunung ini menunjukkan aktivitasnya yaitu guguran kubah lava. Merapi juga merupakan pertemuan persilangan dua buah sesar transversal yang membentangi wilayah tengah Jawa Tengah dan DIY. Selama tahun 2022 terdapat kejadian letusan gunung api sebanyak 6 kali yang terjadi di wilayah DIY.

i. **Cuaca ekstrim**

Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika, bencana alam cuaca ekstrim berupa angin kencang beberapa kali terjadi di DIY. Hal ini disebabkan oleh adanya siklon tropis maupun sering terjadi pada saat pergantian musim. Pada tahun 2022 terdapat kejadian Angin kencang sebanyak 147 kali dan kejadian pohon tumbang sebanyak 1.054 kali.

j. Tanah Longsor

Bencana tanah longsor di wilayah DIY terjadi pada beberapa titik rawan dengan kondisi tanah curam yang biasanya berada pada dinding sungai dan di sepanjang kawasan pegunungan menoreh yang memiliki potensi Tanah Longsor yang sangat tinggi ketika musim penghujan. Selain itu, bencana tanah longsor juga terjadi di kabupaten lain yang memiliki lereng dengan kontur ekstrem dan karena adanya potensi curah hujan yang tinggi. Selama tahun 2022 terdapat 707 kejadian tanah longsor di wilayah DIY yang dihimpun oleh Pusdalops BPBD DIY.

k. Kebakaran Gedung dan Permukiman

Perumahan padat di Kota Yogyakarta memiliki potensi tinggi untuk terjadinya kebakaran gedung dan permukiman. Kebakaran gedung dan permukiman adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia. Berdasarkan data dari Pusdalops BPBD DIY selama tahun 2022 terdapat 114 kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah DIY.

l. Konflik Sosial

DIY sebagai miniatur Indonesia merasakan dampak adanya kemajuan dan heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari agama, etnis/suku, budaya, bahasa, dan adat kebiasaan. Dengan karakteristik masyarakat yang sangat majemuk tersebut DIY menyimpan potensi munculnya berbagai konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan sebagian masyarakat dan lain-lain. Konflik sosial ini sering terjadi di kawasan yang mahasiswa yang mendiami suatu wilayah tertentu DIY dan menjadi salah satu prioritas penanganan bencana di DIY.

3. Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2018-2022

Selama tahun 2018 - 2022 tren kejadian/bencana mengalami peningkatan tajam, dimana pada periode tersebut 4 (empat) kejadian terbanyak adalah kebakaran, bencana tanah longsor, angin kencang/puting beliung, dan gempa. Pada tahun 2022 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kejadian

tertinggi di wilayah DIY sebanyak 1.779 kejadian. Selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020 jumlah kejadian bencana lebih banyak dari 2021, tercatat di tahun 2019 sebanyak 1.620 kejadian dan tahun 2020 tercatat 1.279 kejadian, sementara di tahun 2021 sebanyak 1079 kejadian, dan pada tahun 2018 sebanyak 910 kejadian.

Tabel 7.9. Data Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2018 - 2022


Nama Kejadian	2018	2019	2020	2021	2022
Angin Kencang	147	168	167	156	165
Tanah longsor	216	506	475	351	617
Banjir	12	12	15	16	70
Kekeringan	1	1	1	0	0
Gempa	124	122	135	245	729
Gunung Api	12	4	9	2	1
Pandemi			1	1	2
Kebakaran	270	542	255	187	106
Gelombang Pasang	1	2	1	0	1
Laka (Sungai, Laut, Darat)	39	107	33	8	26
Pohon Tumbang	88	156	187	113	62
Jumlah	910	1620	1279	1079	1779

Sumber: Pusdalops BPBD DIY, 2023

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) membutuhkan strategi untuk mempercepat capaian kinerja mengingat kesenjangan antara capaian program dengan jumlah sekolah yang ada.
- 2) Perlunya peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana (Destana) dalam rangka pengurangan risiko bencana.
- 3) Banyaknya kawasan rawan bencana di DIY yang membutuhkan sistem peringatan dini bencana.
- 4) Belum semua ancaman bencana telah disusun rencana kontijensinya.
- 5) Belum optimalnya pengelolaan pengurangan risiko bencana pada kawasan strategis keistimewaan di DIY.

- 
- 6) Belum tersedianya informasi lahan untuk relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana.
 - 7) Belum tersedianya Sistem Data dan informasi manajemen kebencanaan yang terintegrasi/terpadu.
 - 8) Masih kurangnya kapasitas dan pengelolaan SDM Penanggulangan Bencana (Aparat dan masyarakat serta relawan).
 - 9) Sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana belum semua memenuhi standar.
 - 10) Logistik bencana belum memenuhi kebutuhan Penanggulangan Bencana sesuai standar.
 - 11) Perlu sinergi penanganan kedaruratan kebencanaan di kawasan perbatasan.
 - 12) Belum adanya peta kawasan rawan kebakaran dan rencana induk sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan.

b. Solusi

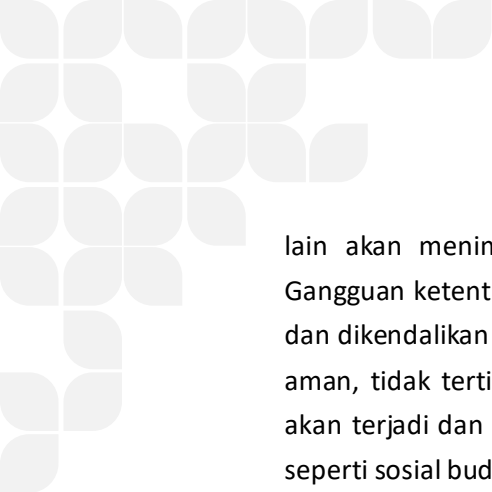
- 1) Dibuat *roadmap* pembentukan dan pengembangan SPAB serta memastikan implementasinya dengan melibatkan seluruh *stakeholder*.
- 2) Mengembangkan kapasitas Desa Tangguh Bencana yang telah dibentuk sebelumnya.
- 3) Pengelolaan Sistem Peringatan Dini yang komprehensif baik yang dimiliki instansi, lembaga maupun masyarakat, serta pemetaan kebutuhan sistem peringatan dini bencana.
- 4) Melengkapi rencana kontijensi sesuai dengan ancaman bencana di DIY.
- 5) Meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan strategis keistimewaan dari potensi bencana.

- 6) Mendorong warga dan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY untuk menyediakan lahan relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana.
- 7) Menyediakan Sistem Data dan Informasi manajemen kebencanaan yang terintegrasi.
- 8) Melakukan peningkatan kapasitas dan pengelolaan SDM Penanggulangan Bencana (Aparat dan masyarakat serta relawan).
- 9) Memastikan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana memenuhi standar.
- 10) Memastikan logistik bencana memenuhi kebutuhan PB dan sesuai standar.
- 11) Melakukan pelatihan dan latihan penanganan kedaruratan kebencanaan di kawasan perbatasan.
- 12) Membuat Pemetaan Kawasan rawan kebakaran dan rencana induk sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan.
- 13) Memenuhi SDM dan sarana prasarana penanganan bahaya kebakaran dan penyelamatan.

E. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gambaran Umum

DIY merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kemajemukan masyarakat yang tinggi di Indonesia, bahkan DIY disebut sebagai miniatur Indonesia. Hal tersebut dikarenakan DIY dikenal dengan berbagai julukan seperti kota pelajar, kota wisata dan kota budaya sehingga membuat banyak masyarakat dari berbagai daerah tertarik untuk migrasi ke Yogyakarta baik untuk menempuh Pendidikan, bekerja ataupun bermukim yang membuat DIY semakin majemuk. Kemajemukan di Yogyakarta ini rentan melahirkan konflik yang berujung pada kerusuhan sosial dengan kata



lain akan menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Gangguan ketentraman dan ketertiban umum tersebut harus diminimalisir dan dikendalikan dengan baik, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tentram maka pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi dan investasi akan sulit berkembang, selain itu aspek lainnya seperti sosial budaya dan politik juga akan terancam.

Menciptakan suasana kondusif menjadi modal utama bagi DIY dalam melaksanakan pembangunan. Untuk menciptakan suasana kondusif, maka pelaksanaan kehidupan masyarakat harus sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan serta peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, agar ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dapat terwujud.

Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah DIY, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, Pemda DIY melalui Satpol PP DIY melakukan tindakan penertiban yustisial maupun non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan penegakan 42 Perda dan 2 Perkada dalam bentuk operasi yustisi dan non-yustisi.

Tindakan penertiban non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan. Operasi yustisi adalah rangkaian tindakan hukum guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana.

Upaya menjaga keamanan dan ketenteraman dimulai dari lini terbawah di tingkatan masyarakat, yakni wilayah Desa/Kalurahan. Upaya ini tidak terlepas dari peran serta anggota Satlinmas dan Kelompok Jagawarga yang

ada di DIY. Kelompok Jaga Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kalurahan/Kelurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat padukuhan/Rukun Warga/Kampung, yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat. Rincian keberadaan anggota Satlinmas dan Kelompok Jaga Warga di wilayah DIY adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah desa/kalurahan yg telah memiliki Satlinmas aktif : 392, dari total keseluruhan jumlah desa/kalurahan se-DIY yakni 392 desa/kalurahan;
- b. Jumlah anggota Satlinmas di Wilayah DIY, yakni sebanyak 27.334 orang dengan rincian sebagai berikut : Kota Yogyakarta : 3.734 orang; Gunungkidul : 5.865 orang; Kulon Progo : 3.987 orang; Bantul : 6.575 orang dan Sleman : 7.173 orang
- c. Jumlah desa/kalurahan yg telah memiliki Jagawarga aktif : 223, dari total keseluruhan jumlah desa/kalurahan se-DIY yakni 392 desa/kalurahan;
- d. Jumlah kelompok Jaga Warga di Wilayah DIY, yakni sebanyak 2.708 kelompok dari total padukuhan se-DIY yakni 4.677 padukuhan.

Dari data yang telah disajikan diatas, terlihat bahwa seluruh Desa/Kalurahan di DIY telah memiliki anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan 56,8% Kalurahan di DIY telah terbentuk kelompok Jaga Warga. Ditargetkan pada akhir tahun 2024 seluruh dusun di wilayah DIY telah terbentuk kelompok Jaga Warga.

2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Berbagai permasalahan dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, antara lain:

- 1) Aksi klithih atau kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang mengancam keselamatan masyarakat masih marak terjadi dan semakin meningkat setiap tahun. Data Polda DIY

menyebutkan bahwa jumlah kasus klithih/kejahatan jalanan yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 30 kasus, tahun 2021 sebanyak 39 kasus dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 60 kasus.

- 2) Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/atau tanpa berijin.
- 3) Pelanggaran Perda dan Perkada yang makin marak dilakukan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke DIY, sebagai contoh masih banyaknya wisatawan yang melanggar SE Gubernur DIY Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya. Contoh lainnya adalah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh pelaku usaha di wilayah DIY berupa pemasangan spanduk/reklame tanpa berijin dan melintang diatas jalan sehingga membahayakan pengguna jalan.
- 4) Kondisi DIY sebagai destinasi wisata dan kota ramah wisata menyebabkan banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang suka memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan atau pengemis seperti manusia silver dan pengamen akustik di setiap perempatan lampu merah di wilayah DIY.
- 5) Maraknya aktivitas penambangan liar di sungai, pesisir pantai, bukit, dan gunung/lereng gunung yang dilakukan tanpa berijin dan merusak lingkungan.

b. Solusi

Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, maka Satpol PP DIY berupaya melakukan beberapa strategi, yakni :

- 1) Guna mengantisipasi dan menanggulangi aksi klithih atau kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, Pemda DIY melalui Satpol PP melakukan patroli rutin Bersama dengan Polda DIY, Satpol PP Kabupaten/Kota dan Polres Kabupaten/Kota, serta melibatkan Satlinmas dan kelompok Jaga

Warga. Patroli ini dilakukan setiap hari Jumat hingga Senin, pada jam 23.30 WIB sampai 05.00 WIB. Selain patroli, Pemda DIY juga melaksanakan kegiatan edukasi berupa kunjungan ke sekolah-sekolah di wilayah DIY untuk melakukan sosialisasi/pembinaan kepada siswa sekolah dan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bawaan siswa serta kendaraan yang digunakan siswa.

- 2) Melakukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa, bersama-sama dengan OPD terkait.
- 3) Guna mengatasi pelanggaran Perda dan Perkada yang makin marak, dilakukan berbagai operasi penertiban, baik yustisi maupun non yustisi. Selain operasi terhadap pelanggaran Perda dan Perkada, dilakukan juga sosialisasi kepada masyarakat tentang pelanggaran Perda/Perkada, baik melalui metode konvensional maupun melalui media sosial serta pembuatan film pendek. Kegiatan patroli juga giat dilakukan, serta ditambah adanya layanan aduan masyarakat yang selalu direspon untuk ditindaklanjuti.
- 4) Penertiban terhadap anak jalanan, gelandangan atau pengemis seperti manusia silver dan pengamen akustik. Bagi mereka yang terjaring operasi diserahkan kepada Dinas Sosialisasi DIY untuk dilakukan pembinaan/rehabilitasi di *Camp Assesment*. Selain itu, dilakukan pula sosialisasi dan penindakan kepada pihak yang memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan atau pengemis.
- 5) Melakukan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan secara non yustisial terhadap penambang liar yang terjaring melalui operasi penertiban perijinan. Maraknya aktivitas penambangan liar di sungai, pesisir pantai, bukit, dan gunung/lereng gunung yang dilakukan tanpa berijin dan merusak lingkungan.

F. TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH

1. Lembaga Ombudsman DAERAH DAERAH Istimewa Yogyakarta (LOD DIY)

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, Pemda DIY telah melakukan upaya dan memenuhi indikator demokratisasi dengan membentuk lembaga daerah dengan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahannya yaitu melalui LOD DIY. Fungsi pengawasan ini dilakukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik baik oleh aparatur pemerintahan daerah maupun badan usaha yang menjalankan kegiatan pelayanannya di DIY. LOD DIY sebagai Lembaga Daerah Non Struktural berdasarkan Pergub DIY Nomor 72 Tahun 2022.

Pembentukan LOD DIY sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, *“Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*. Sebagai daerah otonom yang memerintah, mengatur, dan mengurus diri sendiri, pemerintahan daerah berhak membuat peraturan tingkat daerah sebagai peraturan perundang-undangan tingkat daerah.

LOD DIY diharapkan melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan badan usaha, pada bidang pelayanan publik. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, LOD DIY bertugas untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat atas adanya dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintahan atau dugaan pelanggaran oleh badan usaha. Namun demikian, LOD DIY juga melaksanakan upaya preventif dengan melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan berbagai lembaga, baik aparatur pemerintah maupun badan usaha.

Keanggotaan LOD DIY masa jabatan tahun 2021-2024 ditetapkan melalui SK Gub DIY Nomor 14/Kep/2021 tentang Penetapan Anggota LOD DIY Masa Jabatan Tahun 2021- 2024. LOD DIY berjumlah 7 (tujuh) orang yang bersifat

kolektif kolegial. Adapun pengangkatan anggota LOD DIY ditetapkan dari hasil seleksi calon anggota LOD DIY yang memenuhi persyaratan dan proses seleksi oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Gubernur DIY.

Untuk mendukung optimalisasi kinerja, LOD DIY dilengkapi dengan beberapa bidang yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana tertuang dalam dasar hukumnya. Bidang-bidang tersebut adalah Bidang Pelayanan Laporan, Bidang Sosialisasi, Kerja sama dan Penguatan Jaringan, Bidang Pengembangan Kelembagaan serta Bidang Monitoring dan Evaluasi. Bidang pelayanan laporan merupakan bidang yang berfungsi untuk menerima konsultasi serta mengelola aduan dari masyarakat, baik aduan secara langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan aduan meliputi pengadministrasian, klarifikasi, koordinasi, investigasi, mediasi, konsultasi ahli, dan penerbitan rekomendasi. Bidang Pengembangan Kelembagaan yakni melakukan penelitian maupun pengembangan, baik pengembangan yang menyangkut kelembagaan maupun pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi LOD DIY dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan serta penyelenggaraan usaha swasta. Bidang sosialisasi, kerja sama dan penguatan jaringan merupakan bidang yang melakukan sosialisasi, kerja sama, dan penguatan jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mencegah mal-administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyimpangan tata kelola usaha swasta. Bidang monitoring dan evaluasi merupakan bidang yang melakukan monitoring dan evaluasi internal maupun eksternal terhadap tugas, pokok dan fungsi LOD DIY dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih serta penyelenggaraan usaha swasta yang beretika berkelanjutan.

Pada tahun 2022 LOD DIY telah menerbitkan 109 produk akhir yang terdiri dari 105 rekomendasi dan 4 laporan penyelesaian kasus. Selama tahun 2022, LOD DIY telah menerima 270 konsultasi aduan dari masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan dan praktik badan usaha. Jumlah penerimaan aduan dan konsultasi di LOD DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.10. Tabel penerimaan dan konsultasi di LOD DIY.

Produk Akhir LOD DIY			
No	Nama Bidang	Aduan	Konsultasi
1	Aparatur Pemerintahan	38	111
2	Instansi Swasta	67	146
3	Lainnya		13
Total		105	270

Sumber: LOD DIY, 2023

Komposisi konsultasi yang diterima oleh LOD DIY apabila diklasifikasikan berdasarkan 3 sektor tertinggi yaitu sektor keuangan sebanyak 64 konsultasi (23,7%), sektor pendidikan sebanyak 47 konsultasi (17,41 %) dan sektor jasa sebanyak 40 konsultasi (14,81 %). Sektor keuangan didominasi persoalan pembiayaan oleh lembaga keuangan yang belum dapat memenuhi hak nasabahnya, sektor pendidikan didominasi oleh persoalan pendanaan pendidikan dan penahanan ijazah sedangkan sektor jasa didominasi persoalan ketidaksesuaian informasi biro pelatihan kerja dalam memberikan pelayanan jasa terhadap peserta pelatihan.

Jumlah konsultasi berdasarkan wilayah dapat diklasifikasikan sebagai berikut, sebanyak 109 laporan (40,37%) dari Kota Yogyakarta, 85 laporan (31,48%) dari Kabupaten Sleman, 50 laporan (18,52%) dari Kabupaten Bantul, 7 laporan (2,59%) dari Kabupaten Kulon Progo, 4 laporan (1,46%) dari Kabupaten Gunungkidul dan sebanyak 15 laporan (5,56%) dari wilayah luar DIY.

Konsultasi yang diterima oleh LOD DIY yang kemudian dapat ditindaklanjuti sebagai aduan sebanyak 105 aduan. Apabila diklasifikasikan berdasarkan 3 sektor tertinggi yaitu sektor jasa sebanyak 28 aduan (26,67%), sektor pendidikan sebanyak 19 aduan (18,1%) dan sektor kesejahteraan sebanyak 13 aduan (12,38%). Aduan pada sektor jasa didominasi oleh ketidaksesuaian badan usaha pelatihan kerja dalam memberikan pelayanan jasa terhadap peserta pelatihan, sektor pendidikan didominasi oleh persoalan pendanaan pendidikan dan penahanan ijazah sedangkan sektor kesejahteraan didominasi oleh pekerja yang mengalami kendala dalam melakukan pencairan jaminan hari tua.

Sementara itu, komposisi aduan berdasarkan wilayah adalah sebanyak 40 aduan (38,1%) dari Kota Yogyakarta, 34 aduan (32,38%) dari Kabupaten Sleman, 30 aduan (28,57%) dari Kabupaten Bantul, 1 aduan (0,05%) dari Kabupaten Kulon Progo dan 0 aduan dari wilayah Kabupaten Gunungkidul.

a. Permasalahan dan Solusi pelayanan publik pada bidang pemerintahan dan badan usaha di DIY:

1) Jasa

a) Permasalahan

Prosedur asuransi yang belum disepakati pihak konsumen namun telah dilakukan pemotongan secara otomatis pada rekening konsumen untuk pembayaran; Iklan oleh Lembaga Pelatihan Kerja yang tidak sesuai dengan izin sehingga banyak masyarakat yang dirugikan; Warga sekitar meragukan kelayakan bangunan tower atas keselamatan warga; Keberadaan tower monopole tidak berizin namun sudah melakukan operasional; Adanya perubahan kebijakan layanan PLN yang belum diketahui oleh konsumen.

b) Solusi

Sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut, telah dilakukan kajian, observasi, klarifikasi, mediasi serta berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memberikan alternatif penyelesaian masalah.

2) Pendidikan

a) Permasalahan

Indikasi penyelewengan dana BOS oleh kepala sekolah; Transparansi informasi oleh sekolah atas kebijakan yang diterima oleh peserta didik; Penahanan ijazah oleh pihak sekolah karena kekurangan pembayaran; Transparansi penarikan sumbangan yang dilakukan sekolah; Transparansi proses ASPD dan tata kelola komite; Kesalahan dalam penginputan nilai rapor; Penambahan nilai prestasi pada PPBD.

b) Solusi

Dalam upaya penyelesaiannya dilakukan koordinasi dengan sekolah, OPD dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pencermatan dan merumuskan kebijakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3) Kesejahteraan

a) Permasalahan

Pencairan klaim Jaminan Hari Tua; Ketidaksesuain site plan Teras II Malioboro dengan realisasi pembagian lapak untuk pedagang; Intervensi dari pihak kelurahan kepada masyarakat penerima bantuan untuk membeli paket di kalurahan.

b) Solusi

Dalam upaya penyelesaiannya dilakukan investigasi, koordinasi dengan OPD terkait serta mengundang para pihak untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan kemudian dilakukan mediasi serta mendorong OPD terkait untuk Menyusun kebijakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

4) Keuangan

a) Permasalahan

Pelunasan kredit; pencairan dana nasabah; asuransi kendaraan kredit; Transparansi prosedur penagihan kredit.

b) Solusi

Dalam upaya penyelesaiannya dilakukan dengan mengundang para pihak untuk klarifikasi hingga mediasi dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada para pihak sebagai edukasi dan saran perbaikan untuk tata kelola pada masa mendatang.

5) *Ketenagakerjaan*

a) *Permasalahan*

Mantan karyawan tidak dapat menonaktifkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan karena premi belum dibayarkan oleh perusahaan; Pencairan komisi kepada tenaga kerja oleh perusahaan; Mekanisme denda dengan nominal tidak lazim yang diberikan kepada tenaga kerja karena mengundurkan diri; Kekurangan pembayaran pesangon kepada tenaga kerja yang mengundurkan diri; Klaim manfaat jaminan kecelakaan kerja yang tidak diberikan karena tidak sesuai dengan mekanisme.

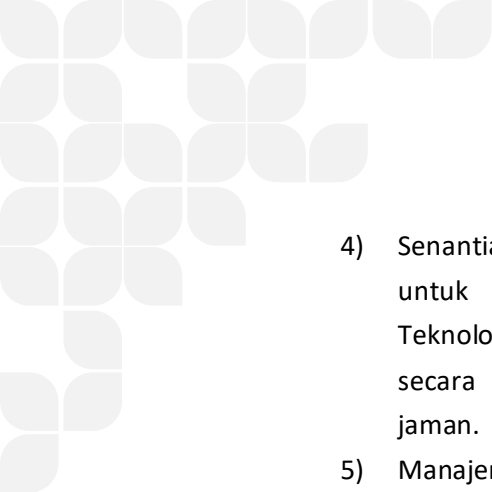
b) *Solusi*

Melakukan tindak lanjut berupa klarifikasi, koordinasi dan mediasi kepada pihak-pihak terkait untuk diambil alternatif penyelesaian masalah. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk melakukan pencermatan terhadap permasalahan sehingga dapat diberikan solusi terbaik.

b. **Rekomendasi**

Berkenaan dengan permasalahan dan solusi tersebut telah direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pentingnya dilakukan sosialisasi dan edukasi lebih intensif kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mencermati produk-produk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh suatu institusi terutama bidang badan usaha swasta.
- 2) Perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif oleh institusi yang berkepentingan kepada masyarakat terhadap diterbitkannya kebijakan baru atau perubahan kebijakan sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi pelayanan maupun penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri.
- 3) Pembenahan dan pengembangan manajemen pelayanan publik yang inklusif terhadap semua warga negara tanpa terkecuali sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*).

- 
- 4) Senantiasa mendorong birokrasi penyelenggaraan layanan publik untuk mengoptimalkan dan mengakselerasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi kebijakan secara berkelanjutan untuk merespon dinamika perubahan jaman.
 - 5) Manajemen pelayanan publik perlu konsisten dan terus menerus membuka ruang partisipasi warga dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga perumusan kebijakan semakin inklusif dan tepat sasaran.
 - 6) Mendorong penyelenggaraan dan pengelolaan layanan publik untuk selalu melibatkan kemitraan dengan pendekatan manajemen kolaboratif multi pihak yang meliputi akademisi, semua golongan masyarakat, sektor swasta, media dan segenap komponen pemerintah itu sendiri.

2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

a. Narasi Umum

Olahraga memiliki peran penting dalam pembangunan karakter bangsa sebagai salah satu identitas bangsa dan kebanggaan nasional. Komite Nasional Indonesia Daerah istimewa Yogyakarta (KONI DIY) sebagai pengelola sistem olahraga di tingkat provinsi memiliki tugas untuk membantu pembuatan kebijakan daerah dalam pengembangan olahraga prestasi, mengkoordinir induk organisasi cabang olahraga, serta mempersiapkan peserta dalam keikutsertaan kompetisi di tingkat nasional dan internasional.

Pada tahun 2022, kegiatan utama KONI DIY adalah penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) XVI pada tanggal 1-9 September 2022 dengan Kabupaten Sleman sebagai tuan rumah penyelenggara. PORDA XVI mempertandingkan 45 cabang olahraga dan Kabupaten Sleman keluar sebagai juara umum dengan perolehan 164 medali emas, 159 medali perak, dan 155 medali perunggu. Selain penyelenggaraan PORDA XVI, KONI DIY juga memberikan bantuan pengiriman atlet dan *official* tim pada kejuaraan tingkat nasional maupun internasional serta

bantuan penyelenggaraan kejuaran/kompetisi kepada 58 Pengurus Daerah Cabang Olahraga di DIY. Sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan KONI DIY, Pemda DIY pada tahun 2022 memberikan hibah yang bersumber dari APBD sebesar Rp11.000.000.000,00 dan seluruhnya telah disalurkan.

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam pengembangan olahraga prestasi daerah, KONI DIY masih menghadapi beberapa kendala antara lain:

- 1) Pada beberapa cabang olahraga sarana prasarana pelatihan masih terbatas dan KONI DIY belum dapat menyediakan secara mandiri.
- 2) Perlunya peningkatan kapasitas atlet terutama untuk pembentukan mental juara atlet.

Beberapa upaya KONI DIY untuk mengatasi kendala-kendala yang ada antara lain yaitu:

- 1) Berkoordinasi dengan Pengurus Daerah Cabang Olahraga maupun pihak-pihak yang mampu memberikan dukungan sarana prasana pelatihan, agar penyediaan sarana prasarana dapat terpenuhi selama waktu pelatihan. Koordinasi yang telah dilakukan antara lain dengan TNI AU untuk peminjaman pesawat dalam pelatihan olahraga terjun payung, Brimob untuk peminjaman lapangan tembak dalam pelatihan cabang olahraga menembak. KONI DIY juga berupaya menyediakan prasarana pelatihan biliar melalui fasilitasi penyewaan tempat latihan.
- 2) KONI DIY berupaya untuk melakukan intensifikasi pelatihan atlet dan salah satunya dengan memberikan materi terkait kesehatan psikologis atlet. KONI DIY juga telah memfasilitasi workshop kesehatan psikologis dan manajemen olahraga bagi para pelatih untuk mendukung pembinaan mental atlet oleh para pelatih di lapangan.

3. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY

a. Narasi Umum

Sesuai dengan visi Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu “Terwujudnya Pramuka Istimewa Sebagai Generasi Unggul”, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta (Kwarda DIY) berupaya untuk mewujudkan anggota Gerakan Pramuka yang berkarakter, mewujudkan organisasi yang modern, serta meningkatkan citra umum kepramukaan dan pengakuan peran Gerakan Pramuka. Guna mencapai tujuan tersebut, Kwarda DIY menempuh beberapa strategi seperti penyelenggaraan pembinaan Pramuka Istimewa termasuk penyusunan pedoman sertifikasi tenaga pendidik kepramukaan, penyusunan pedoman program peserta didik dengan menitikberatkan pada pengembangan nilai kepribadian luhur dan jiwa kewirausahaan, pembinaan Satuan Karya Pramuka agar dapat membuka lapangan pekerjaan, pengembangan basis data kompetensi para anggota Gerakan Pramuka, serta pemeliharaan aset-aset Kwarda DIY agar dapat dipergunakan secara maksimal. Strategi-strategi ini diharapkan dapat menjadi kunci bagi pembentukan kaum muda yang inovatif dan mampu memberikan perubahan positif terhadap pembangunan bangsa.

Pada tahun 2022 Kwarda DIY telah memulai kembali sejumlah kegiatan sesuai perencanaan awal yang sempat tertunda akibat pembatasan di masa pandemi Covid-19. Beberapa kegiatan utama tersebut antara lain peningkatan kapasitas pengelola basis data keanggotaan, pengiriman peserta dalam berbagai kegiatan tingkat nasional (Jambore, Perkemahan Antar Satuan Karya, Perkemahan Bela Negara, Perkemahan Bakti Saka Bhayangkara), bimbingan teknis pembinaan Pramuka Istimewa, pembentukan Kampung Pramuka, serta peringatan Hari Pramuka ke-61.

Dukungan Pemda DIY terhadap penyelenggaraan kegiatan Kwarda DIY pada tahun 2022 diwujudkan melalui hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 yang bersumber dari APBD dan telah disalurkan seluruhnya.

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, Kwarda DIY masih menghadapi beberapa permasalahan seperti:

- a) Pedoman kepramukaan belum terdokumentasikan dengan baik, terutama dalam bentuk buku pedoman
- b) Walaupun Kwarda DIY memiliki cukup banyak anggota dewasa dengan dedikasi tinggi, kualitas dan kompetensi para anggota dewasa masih kurang dalam mengimplementasikan materi pendidikan dan pelatihan

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kwarda DIY dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a) Upaya penyusunan pedoman kepramukaan telah dimulai oleh Kwarda DIY melalui Pencermatan dan Penyusunan Syarat Kecakapan Umum (SKU) serta pelatihan penulisan Buku Pramuka yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pembelajaran peserta didik. Terkait dengan konten penulisan Buku Pramuka, para peserta penyusunan didorong untuk aktif mencari bahan pembelajaran yang menarik dan inovatif guna memperkaya materi yang diberikan dalam pembelajaran.
- b) Melakukan peningkatan kompetensi anggota dewasa melalui Bimbingan Teknis Percepatan Pramuka Garuda dan Pramuka Istimewa. Salah satu unsur dalam bimbingan teknis ini adalah pelatihan penyusunan kurikulum pramuka bagi peserta didik. Dengan demikian diharapkan sebagai partisipan penyusun, anggota dewasa memiliki pemahaman yang mendalam terkait materi yang akan diajarkan dan implementasinya oleh peserta didik. Selain melalui bimbingan teknis, penyelenggaraan Pitaran

Pelatih dan Karang Pamitran juga dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas anggota dewasa. Pitaran Pelatih adalah koordinasi dan diskusi kelompok para pembina pramuka terutama untuk melakukan inovasi dalam metode penyelenggaraan kursus agar lebih menarik dan mudah dipahami para peserta didik sedangkan dalam Karang Pamitran diskusi lebih difokuskan pada peningkatan kualitas manajemen kepengurusan Gerakan Pramuka.

4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

a. Narasi Umum

Dalam perspektif administrasi, pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri serta memiliki wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. di tingkat Provinsi DIY, kegiatan Pemilihan Umum secara hierarkis dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY). Dalam hal penguatan koordinasi di bidang politik dan kepemiluan, KPU DIY bekerja sama dengan Pemda DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan koordinasi dan konsolidasi guna meningkatkan tingkat demokrasi dan partisipasi politik masyarakat.

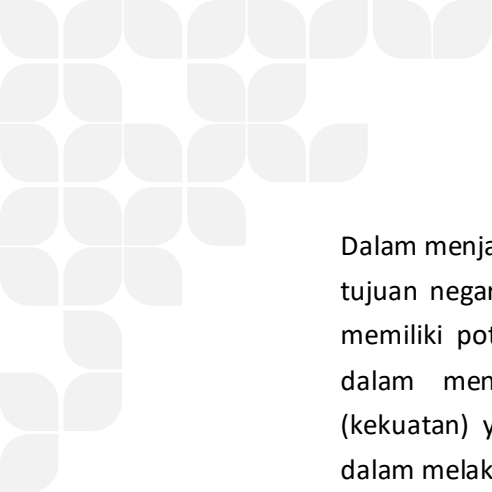
Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, Pemda DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki ketugasan untuk menyelenggarakan pemantauan perkembangan politik di daerah guna mendukung terwujudnya kondusivitas wilayah DIY. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, Pemda DIY bersama KPU DIY tergabung ke dalam tim pokja pendidikan politik dan tim pokja pemantauan perkembangan politik di daerah. Melalui tim tersebut, diharapkan dapat terjalin pola koordinasi yang mampu memberikan kemudahan dalam mendapatkan data-data situasi dan kondisi politik terkini di wilayah, khususnya terkait pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang telah dimulai di tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tahapan pemilu telah dimulai sejak 14 Juni 2022, yakni dengan penyusunan perencanaan program dan anggaran Pemilu. Beranjak dari kegiatan tersebut, tahapan Pemilu pun telah dimulai dan baru akan berakhir pada bulan Oktober 2024. Adapun tahapan pemilu 2024 yang telah terlaksana sampai dengan tahun 2022, antara lain:

- 1) Pendaftaran Partai Politik pada tanggal 1-7 Agustus 2022
- 2) Penetapan Partai Politik pada tanggal 14 Desember 2022

Berdasarkan Berita Acara Nomor 310/PL.01.1 BA/05/2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, KPU telah menetapkan 17 partai politik peserta Pemilu Serentak 2024, antara lain:

- 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
- 4) Partai Golongan Karya (Golkar)
- 5) Partai NasDem
- 6) Partai Buruh
- 7) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
- 8) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- 9) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
- 10) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- 11) Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
- 12) Partai Amanat Nasional (PAN)
- 13) Partai Bulan Bintang (PBB)
- 14) Partai Demokrat
- 15) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- 16) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- 17) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)



Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama fungsi pencapaian tujuan negara atau pemerintahan yakni kedaulatan rakyat, KPU DIY memiliki potensi dan kelemahan dalam menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU DIY dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, antara lain:

- 1) KPU DIY sebagai bagian dari KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- 2) KPU DIY memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- 3) KPU DIY sebagai penyelenggara pemilu semakin terpercaya.
- 4) Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.
- 5) Dukungan infrastruktur dan TI KPU DIY yang semakin baik.
- 6) Kerja sama KPU DIY dengan organisasi/lembaga lain semakin baik.
- 7) Proses seleksi anggota KPU DIY yang transparan dan akuntabel.
- 8) Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan pemilu yang baik.
- 9) Kepemimpinan KPU DIY bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi KPU DIY dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, antara lain:

- 1) Anggaran yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana belum mencukupi sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi belum dapat berjalan optimal.
- 2) Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.
- 3) Belum semua warga negara yang memenuhi syarat tercatat dalam daftar pemilih.

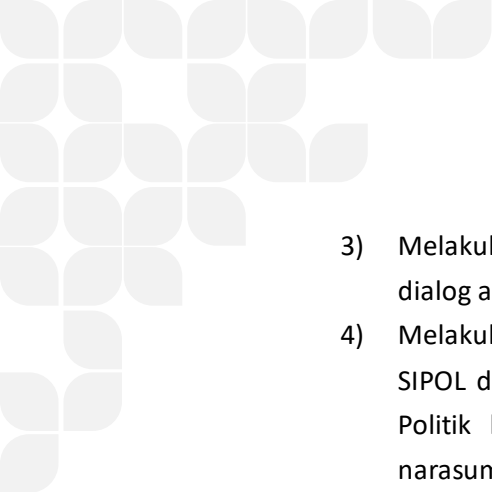
b. Permasalahan dan Solusi

Dalam implementasinya, banyak ditemui permasalahan yang terjadi di lapangan dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi KPUD, antara lain:

- 1) Masih adanya kekurangan dalam menyajikan informasi publik.
- 2) Evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik untuk perbaikan Pemilu 2024 masih belum terlaksana secara optimal.
- 3) Minimnya sarana pengendalian dan sarana koordinasi bagi KPU se-DIY.
- 4) Pengelolaan data Partai Politik yang mutakhir akan dilaksanakan secara berkelanjutan melalui Aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) yang berfungsi sebagai sarana pemutakhiran data Partai Politik, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu. Namun demikian, kegiatan pemutakhiran data Partai Politik di tingkat KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY masih terbatas melalui pemutakhiran data yang bersifat manual dengan mengirimkan data yang berbentuk *hardcopy* ke KPU DIY.
- 5) Masih adanya permasalahan terkait dengan potensi konflik di masyarakat, masih kurangnya kesadaran politik di masyarakat khususnya pemilih pemula serta masih minimnya partisipasi perempuan dalam keterwakilan di dewan.

Atas permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas (poin a), diberikan solusi penyelesaian masalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan Evaluasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik KPU DIY secara berkala.
- 2) Melakukan percepatan regulasi. Dalam hal ini, KPUD dapat berkoordinasi dengan Bawaslu DIY dan Badan Kesbangpol DIY melalui forum-forum yang ada guna menyamakan persepsi dan mengantisipasi berbagai persoalan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 
- 3) Melakukan intensifikasi rapat-rapat koordinasi maupun forum dialog antar KPU se-DIY.
 - 4) Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pemanfaatan aplikasi SIPOL dan menyelenggarakan Bimtek Pemutakhiran Data Partai Politik kepada Kabupaten/Kota se DIY dengan mengundang narasumber dari KPU RI.
 - 5) Bekerja sama dengan Pemda DIY melalui Badan Kesbangpol dalam mengoptimalkan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula, agar terbentuk warga DIY yang mandiri dan kritis, mendorong masyarakat yang sadar politik, serta meminimalkan berbagai konflik di tengah masyarakat.

5. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

a. Narasi Umum

Keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diatur berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan undang-undang tersebut kewenangan utama dari Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan kode etik.

Bawaslu DIY dibentuk pada tanggal 21 September tahun 2021 bersamaan dengan pelantikan anggota Bawaslu DIY sesuai SK Bawaslu RI Nomor SK: 580-KEP Tahun 2012. Bawaslu DIY memiliki dua tujuan utama, yaitu:

- 1) Terwujudnya pengawasan pemilu yang berkualitas dan bermartabat; dan
- 2) Terlaksananya penegakan hukum pemilu dalam kaitan kebijakan Pembangunan Nasional.

Kedua tujuan utama tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu:

- 1) Perencanaan dan pendanaan ;
- 2) Pemantauan ;
- 3) Evaluasi; dan
- 4) Koordinasi.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Bawaslu DIY, secara umum situasi politik di DIY sepanjang tahun 2022 cenderung kondusif dan terkendali. Terdapat beberapa catatan yang perlu diantisipasi menjelang Pemilu 2024, di antaranya potensi konflik internal partai politik, konflik antar partai politik (baik parpol lama maupun parpol baru), serta konflik horizontal antar simpatisan partai politik. Beberapa potensi konflik tersebut perlu menjadi perhatian bersama unsur-unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemantauan perkembangan politik di daerah, di antaranya Korem, Polda, BINDA, KPU, Bawaslu, Satpol PP, Biro Tata Pemerintahan, dan Kejaksaan Tinggi.

Berdasarkan KepGub DIY Nomor 471/KEP/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendidikan Politik, Pemda DIY bekerja sama dengan Bawaslu DIY telah membentuk tim pokja pendidikan politik. Tim pokja ini bertugas untuk memberikan masukan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan politik, melakukan kerja sama dan koordinasi dengan penyelenggara pendidikan politik, terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan politik, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan politik.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan di 5 kabupaten/kota, Bawaslu juga berperan secara aktif menjadi narasumber kegiatan. Hal ini untuk memastikan tidak ada tumpang tindih penerima manfaat dalam kegiatan pendidikan politik. Bawaslu bekerja sama dengan KPUD berperan dalam mengawal dan

memastikan materi-materi yang disampaikan narasumber dalam forum diskusi pendidikan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2022 dalam rangka pencegahan, penindakan dan pengawasan pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan persiapan Pemilihan Umum tahun 2024 di DIY, antara lain rapat koordinasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat disabilitas, rapat koordinasi sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dengan *stakeholder*, rapat persiapan pengawasan verifikasi faktual kepengurusan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota partai politik calon peserta pemilu 2024, serta forum dengan PTUN Yogyakarta dalam rangka penyamaan persepsi terkait regulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu Tahun 2024.

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam implementasinya, banyak ditemui permasalahan yang terjadi di lapangan dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu, yaitu:

- 1) Masih banyak identitas masyarakat yang disalahgunakan dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
- 2) Terbatasnya akses Bawaslu terhadap data SIPOL yang berpengaruh pada akuntabilitas penggunaan SIPOL yang digunakan untuk merekapitulasi data hasil verifikasi faktual.
- 3) Adanya temuan, laporan, dan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan verifikasi faktual.

Atas permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, diberikan solusi penyelesaian masalah sebagai berikut:

- 1) Secara aktif melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan KPUD untuk rekonsiliasi data pada aplikasi SIPOL. Bawaslu telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPUD untuk memperbaiki database aplikasi SIPOL.

- 2) Berkoordinasi dengan KPUD untuk mengoptimalkan peran Bawaslu dalam proses pengawasan dan verifikasi faktual.
- 3) Bawaslu telah menyampaikan seluruh hasil temuan dan saran perbaikan dalam pelaksanaan verifikasi faktual kepada KPUD.

6. **Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)**

a. **Narasi Umum**

Penanggulangan HIV di Indonesia pada pelaksanaannya memerlukan upaya yang serius, komprehensif, dan berkelanjutan dari tingkat pusat hingga ke tingkat kabupaten/kota. Pemerintah membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) berdasarkan Perpres Nomor 124 Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Tugas KPA berfokus pada pencegahan penularan HIV yang dilakukan secara berjenjang pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Program penanggulangan dengan mekanisme yang terkoordinasi diharapkan dapat membendung penyebaran virus HIV dan mencegah timbulnya infeksi baru. Komisi Penanggulangan AIDS DIY (KPAD) melaksanakan program penanggulangan HIV melibatkan lintas sektor, diantaranya; dengan OPD terkait, LSM, Layanan bagi ODHA (Orang dengan HIV dan AIDS) serta kelompok dukungam sebaya ODHA.

Melalui dukungan dana APBD tahun 2022 dan dengan berakhirnya Renstra penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2015-2020 perlu dibangun sinergitas program baik dari semua sektor, LSM, Swasta, dan Masyarakat, juga ODHA di Provinsi DIY. Hal ini agar upaya penanggulangan dapat berjalan dengan terpadu dan efektif.

Pemda DIY memberikan dana hibah kepada KPA DIY pada tahun 2022 mendapatkan hibah sebesar Rp500.000.000,00 untuk pelaksanaan operasional selama 1 tahun dengan realisasi keuangan Rp414.526.651,00 tercapai sebesar 82,9%. Hibah disalurkan melalui Dinas Kesehatan DIY.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan:

- a) Keterlibatan OPD masih belum optimal dalam Upaya Penanggulangan HIV.
- b) Perkembangan ODHA dengan kasus lain, yaitu Difabel, dan ODGJ.
- c) Pelatihan TOT/Fasilitator perlu tindak lanjut dengan evaluasi pasca Pelatihan.

2) Solusi:

- a) Mendorong semua OPD terlibat aktif dalam Upaya Penanggulangan HIV, melalui koordinasi lintas sektor.
- b) Pengembangan dan Integrasi isu HIV, HIV dengan Difabel, HIV dengan ODGJ serta pelibatan stakeholder dalam upaya penanggulangan HIV pada disabilitas diantaranya pengembangan media bagi disabilitas.
- c) Perencanaan pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan sehingga TOT/Fasilitator mampu memecahkan permasalahan di lapangan dengan baik.

7. Palang Merah Indonesia (PMI)

a. Narasi Umum

Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan organisasi sosial kemanusiaan terbesar di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan PP Nomor 7 Tahun 2019, PMI berperan sebagai *auxiliary role to government* yang berfungsi membantu pemerintah dibidang kemanusiaan. Dalam rangka hal tersebut, PMI berkoordinasi dengan Pemerintah, khususnya sektor-sektor yang terkait dengan kegiatan PMI.

PMI DIY pada masa pandemi fokus melaksanakan upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dan krisis kesehatan lainnya di wilayah DIY maupun wilayah lain terdampak bencana. Hal tersebut

sesuai mandat Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah untuk mengembangkan diri menjadi lembaga mandiri dan netral dengan memperluas program kemanusiaan yang lebih luas, diantaranya berperan aktif mendukung pemerintah dalam percepatan vaksinasi Covid-19.

PMI DIY dalam menjalankan program dan kegiatannya memperoleh sumber dana yang berasal dari Pemda DIY, swasta, dan masyarakat. Pada tahun 2022 Pemda DIY memberikan dana hibah kepada PMI DIY melalui Dinas Kesehatan DIY sebesar Rp500.000.000,00. Anggaran tersebut telah dimanfaatkan untuk operasional kegiatan dan pengadaan sarana prasarana. Realisasi fisik dan keuangan dana hibah kelembagaan untuk PMI DIY tahun 2022 sebesar Rp500.000.000,00.

PMI DIY terus berupaya mengembangkan unit-unit pelayanan teknis yang dimiliki seperti Klinik Pratama PMI DIY dan Pusdiklat PMI DIY dalam rangka menjalankan fungsi sebagai organisasi kemanusiaan yang netral dan mandiri menuju PMI berkarakter, profesional, mandiri, dan dicintai masyarakat.

b. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Pada masa Pandemi Covid-19 program kerja dan kegiatan-kegiatan kediklatan maupun yang melibatkan masyarakat telah dapat dilaksanakan meskipun dengan pembatasan-pembatasan dalam upaya mengurangi risiko penularan Covid-19.

2) Solusi

Pelaksanaan kegiatan dijalankan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah atau mengurangi risiko penularan Covid-19.

8. Kinerja Tim Penggerak PKK

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga. PKK merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Tugas dan PKK diatur dalam Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan PKK. Gerakan PKK dilaksanakan melalui 10 Program Pokok PKK yang berpedoman pada rencana induk Gerakan PKK dan strategi Gerakan PKK.

Dalam kurun waktu tahun 2022 serangkaian kegiatan telah dilaksanakan oleh TP-PKK DIY yang bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Lingkup Pemda DIY antara lain *Launching* Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana, Sosialisasi PKBN, Lomba Simulasi PKBN, Bimbingan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, Bimbingan Pemanfaatan Pekarangan, Sosialisasi menu B2SA, Sosialisasi Gemarikan, Sosialisasi edukasi dan inovasi pengelolaan sampah rumah tangga, Sosialisasi panduan tentang pencegahan dan penanganan stunting, Percontohan Pencegahan dan penanganan stunting di 2 desa di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo.

Kedepannya, diharapkan masing-masing Pokja PKK dapat memunculkan inovasi kegiatan yang membawa manfaat besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat DIY. Kerja sama lintas sektor dengan berbagai OPD Pemda DIY yang telah berlangsung dengan baik pun dapat terus diselenggarakan, khususnya terkait berbagai aktivitas yang menysasar langsung kepada masyarakat.

9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY

Media penyiaran secara umum diharapkan bisa menjadi garda terdepan dalam memberikan berita dan informasi serta hiburan bagi masyarakat. Informasi yang disajikan di tengah masyarakat diharapkan bebas dari hoax dengan selalu memberikan informasi akurat, sehat, dan terpercaya. Hal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar tidak terjadi kebingungan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga agar masyarakat mendapatkan informasi yang layak, benar dan berimbang. Selain itu, Pemerintah juga berperan dalam menghidupkan ruang demokrasi dalam dunia penyiaran yang dilandasi etika dan moral. Pesatnya perkembangan TIK dan kebebasan berekspresi mengakibatkan konten siaran yang cenderung mengabaikan norma dan kearifan lokal serta nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY merupakan lembaga independen negara yang dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPID DIY menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya sebagai Lembaga Negara Independen, yaitu pengaturan, pengawasan, dan pengembangan. Bersama dengan stakeholder penyiaran yang lain, KPID DIY terus berupaya mewujudkan sistem penyiaran sehat, berbudaya, serta memperkuat integritas dan karakter kebangsaan sejalan dengan amanat Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Salah satu upaya KPID DIY ialah melaksanakan sosialisasi sekaligus memberikan literasi media kepada masyarakat dan lembaga penyiaran televisi dan radio terkait penyelenggaraan penyiaran. di samping itu tugas yang dilaksanakan secara rutin KPID DIY, yaitu membantu proses penyelenggaraan penyiaran yang sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku dan melaksanakan pemantauan kepada lembaga penyiaran televisi dan lembaga penyiaran radio terkait konten siaran atau isi siaran.

10. Pemantauan Isi Siaran Televisi dan Radio

Tugas utama KPID DIY sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2002 adalah melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap isi siaran. Tujuan dari kegiatan ini untuk memantau isi siaran televisi dan siaran radio dalam rangka mengetahui sejauh mana lembaga penyiaran mematuhi perintah UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Terkait Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) dalam hal menyajikan isi siaran. Tugas untuk melaksanakan kegiatan pemantauan isi siaran televisi dan siaran radio tidaklah mudah, karena Anggota KPID DIY bukan petugas pemantauan, akan tetapi dilaksanakan oleh tim pemantauan dari Tenaga Bantu Pemda DIY dengan menggunakan alat pemantau khusus yang disupport oleh Pemda DIY.

Sesuai data perkembangan lembaga penyiaran televisi dan radio yang ada di wilayah DIY cukup banyak, maka diperlukan tenaga pemantauan minimal 2 kali jumlah lembaga penyiaran yang ada. KPID DIY mengambil keputusan untuk mengeluarkan teguran kepada lembaga penyiaran yang melanggar UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor 1 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor 2 tentang Standar Program Siaran. Teguran yang telah dikeluarkan oleh KPID DIY kepada Lembaga Penyiaran yang melanggar, seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.11. Data Lembaga Penyiaran yang Menerima Teguran Tahun 2022

No	Lembaga Penyiaran	Jumlah Teguran	
		2021	2022
1	Jogja TV	2	0
2	RCTI Yogya	1	0
3	ADI TV	1	0
4	MNC TV Yogya	0	0
5	Global TV Yogya	1	0
6	Indosiar Yogya	1	0
7	ANTV Yogya	1	0
8	Trans TV Yogya	0	0
9	Metro TV Yogya	1	0
10	SCTV Yogya	1	0
11	TV One Yogya	0	0
12	Trans 7 Yogya	1	0
13	RBTv	0	0

No	Lembaga Penyiaran	Jumlah Teguran	
14	RTV Yogya	1	0
15	NET.TV Yogya	1	0
16	Kresna TV	0	0
17	TVRI Jogja	0	0
18	Radio Swarakota	1	0
Jumlah		13	0

Sumber: KPID DIY, 2023

11. Fasilitas Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK)

Sesuai dengan amanat Pergub DIY Nomor 37 tahun 2017 tentang Fasilitas Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), KPID DIY melakukan pendampingan dalam proses perizinan penyelenggaraan penyiaran LPK melalui mekanisme Evaluasi Dengar Pendapat (EDP). EDP adalah proses identifikasi, klarifikasi dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. LPK adalah Lembaga Penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

Tabel 7.12. Perizinan Lembaga Penyiaran Komunitas di DIY

No	Jenis Lembaga Penyiaran Komunitas	Kondisi (Jumlah) s.d. Tahun 2022	Keterangan
1.	TV Komunitas	1	Sudah melaksanakan siaran (memiliki IPP Tetap)
2.	Radio Komunitas	24	Sudah melaksanakan siaran (memiliki IPP Tetap)

Sumber: KPID DIY, 2023

12. DIY Pasca Analog Switch Off (ASO)

Pasca disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kebijakan pemerintah terkait digitalisasi penyiaran sudah dilaksanakan di DIY. Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, lahirlah Lembaga Penyiaran baru berupa TV Digital. Saat ini, wilayah DIY dan sekitarnya secara

husus serta sejumlah daerah di Indonesia secara umum sudah resmi sepenuhnya beralih ke televisi digital sejak 2 November 2022. Sampai saat ini, di DIY sudah ada 35 televisi digital yang bersiaran meski beberapa diantaranya belum menunjukkan IPP kepada KPID DIY karena proses perijinan tidak lagi melalui wewenang KPID DIY. Dengan semakin banyaknya televisi digital yang bersiaran di wilayah DIY, maka diperlukan peningkatan jumlah sumber daya untuk melakukan pemantauan terhadap konten siaran yang semakin banyak hadir di tengah masyarakat. Pada saat ini, KPID DIY hanya memiliki satu (1) orang tenaga pemantau yang berstatus Tenaga Bantu, sehingga dengan semakin bertambahnya Lembaga Penyiaran Televisi Digital yang ada, maka dibutuhkan tenaga pemantauan yang lebih banyak.

Tabel 7.13. Televisi Digital Yang Muncul di Alat Pemantauan KPID DIY

No	Nama Udara	Nama Lembaga Penyiaran
1.	TVRI Nasional	Lembaga Penyiaran Publik
2.	TVRI Jogja	Lembaga Penyiaran Publik
3.	TVRI Sport	Lembaga Penyiaran Publik
4.	TVRI World	Lembaga Penyiaran Publik
5.	TVRI Jateng	Lembaga Penyiaran Publik
6.	TATV	PT. Televisi Terang Abadi
7.	TATV Jogja (Sangaji TV)	Terang Abadi TV (TATV) Yogyakarta
8.	ADI TV	PT. Arah Dunia Televisi
9.	Nusantara TV	PT. Nusantara Media Mandiri Yogyakarta
10.	Tegar TV	Tegar Televisi Yogyakarta
11.	Inspira TV	Inspira Media Televisi
12.	NET TV	PT. Mitra Televisi Yogyakarta
13.	Trans TV	PT. Trans TV Yogyakarta & Bandung
14.	Trans 7	PT. Trans 7 Yogyakarta & Bandung
15.	SCTV	PT. Surya Citra Nugraha (SCTV Yogyakarta)
16.	Indosiar	PT. Indosiar Lintas Yogya Televisi (Indosiar Yogyakarta)
17.	ANTV	PT. Cakrawala Andalas Televisi Yogyakarta & Ambon
18.	TVONE	PT. Lativi Mediakarya Yogyakarta & Lampung
19.	RCTI	PT. RCTI Dua
20.	MNC TV	PT. TPI Dua
21.	GTV	PT. GTV Dua
22.	iNews	Semesta Matahari Televisi (iNews Yogyakarta)
23.	CNN Indonesia	PT. Detik Tivi Satu
24.	CNBC Indonesia	PT. Trans Berita Bisnisenam
25.	Moji TV	PT. Omni Yogyakarta
26.	Mentari TV	PT. Citaprima Yogya Televisi
27.	RTV	PT. Jogja Citra Nuansa Nusantara Televisi

No	Nama Udara	Nama Lembaga Penyiaran
28.	RBTV (Kompas TV)	PT. Reksa Birama Media
29.	Jogja TV	PT. Yogyakarta Tugu Televisi
30.	Metro TV	PT. Media Televisi Yogyakarta
31.	Magna Channel	PT. Mitra media Digital Satu
32.	BN Channel	PT. Mitra Siaran Digital Satu
33.	E-Channel	-
34.	SportOne	-
35.	TV10	-

Sumber: KPID DIY, 2023

a. **Permasalahan dan Solusi:**

1) **Permasalahan**

- a) KPID DIY saat ini kekurangan personil petugas pemantauan isi siaran, sedangkan jumlah Lembaga Penyiaran Televisi yang bersiaran di DIY akan terus bertambah seiring dengan banyaknya Televisi Digital baru.
- b) Peralatan pemantauan isi siaran yang dimiliki KPID terbatas. Alat pemantau siaran yang ada sekarang merupakan pengadaan pada tahun 2019, sementara alat pemantauan hibah dari KPI Pusat pada 2013 masih dengan teknologi analog dan tidak bisa digunakan untuk memantau televisi digital. Untuk alat pemantau lembaga penyiaran radio swasta KPID DIY hanya memiliki dua alat pemantau untuk sekitar 40 radio siaran swasta.

2) **Solusi:**

- a) Untuk memenuhi kekurangan personil petugas pemantauan isi siaran, KPID DIY saat ini menggunakan tenaga mahasiswa yang melakukan magang/KKL di KPID, namun demikian tetap diperlukan penambahan pegawai khusus yang bertugas sebagai pemantau isi siaran.
- b) Diperlukan penambahan alat pemantau siaran dengan teknologi digital untuk dapat untuk memantau siaran televisi digital. Saat ini sudah dilakukan penambahan set top box secara bertahap untuk menutup kekurangan peralatan

analog yang ada. Meskipun demikian pemantauan masih belum maksimal karena peralatan belum sepenuhnya berteknologi digital.

13. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

a. Narasi Umum

Pemda DIY membentuk Komisi Informasi Daerah (KID) DIY untuk menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya. Pembentukan KID DIY merupakan salah satu amanat UU KIP yang diatur dalam Pasal 59. Anggota KID DIY periode ketiga (2019-2023) ditetapkan dengan KepGub DIY Nomor 274/KEP/2019 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi DIY.

Ketugasan KID DIY adalah untuk memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi oleh Badan Publik di DIY, menyelesaikan sengketa informasi dan mendorong masyarakat untuk dapat memperoleh informasi yang benar dan tepat. Penyelesaian sengketa informasi melalui proses menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

b. Penyelesaian Sengketa Informasi

Penyelesaian Sengketa Informasi merupakan ketugasan yang diemban KID di dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi dan memastikan Badan publik mengumumkan dan menyediakan informasi, serta melayani permintaan informasi dari masyarakat. Pada tahun 2022 menyelesaikan 10 register sengketa informasi yang masuk ke KID DIY. Sengketa informasi yang ditangani berupa objek sengketa informasi, pertanahan dan anggaran. Penyelesaian Sengketa Informasi tersebut menghasilkan 7 putusan ajudikasi dan 3 putusan mediasi.

Tabel 7.14. Sengketa Informasi Tahun 2022

No	Register	Jenis Sengketa	Putusan
1.	001/II/KIDDIY-PS/2022	Pertanahan	Putusan Mediasi
2.	002/II/KIDDIY-PS/2022	Pertanahan	Putusan Mediasi
3.	003/II/KIDDIY-PS/2022	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
4.	004/IV/KIDDIY-PS/2022	Informasi	Putusan Ajudikasi
5.	005/V/KIDDIY-PS/2022	Informasi	Putusan Ajudikasi
6.	006/V/KIDDIY-PS/2022	Informasi	Putusan Mediasi
7.	007/V/KIDDIY-PS/2022	Informasi	Putusan Ajudikasi
8.	008/V/KIDDIY-PS/2022	Informasi	Putusan Ajudikasi
9.	009/VI/KIDDIY-PS/2022	Informasi	Putusan Ajudikasi
10.	010/VII/KIDDIY-PS/2022	Anggaran	Putusan Ajudikasi

Sumber: KPUD DIY, 2023

KID menjadi salah satu target dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) 2018-2022 yaitu persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non-litigasi. Tahun 2022 jumlah sengketa yang register 10 dan dapat diselesaikan semua. Sengketa informasi yang ditangani dengan mayoritas objek sengketa berupa informasi dan pertanahan yang menghasilkan 7 putusan adjudikasi dan 3 putusan mediasi. Sehingga sengketa informasi terselesaikan pada tahun 2022 10 sengketa dari target 10 sengketa atau tercapai sebesar 100%.

c. **Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik**

Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keterbukaan informasi badan publik dengan adanya Forum PPID se DIY untuk mendorong penguatan fungsi PPID, Forum PPID juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik. Forum ini beranggotakan PPID Pemda DIY, PPID Kabupaten/Kota se-DIY dan PPID KID DIY.

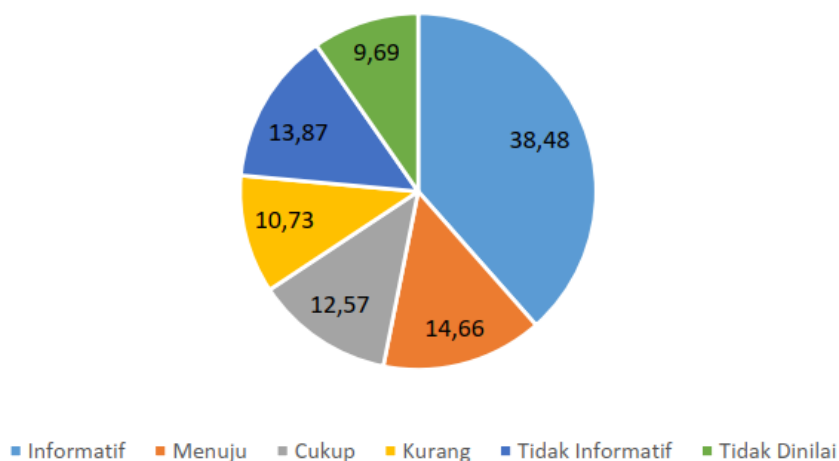
Tahun Anggaran 2022 KID DIY melakukan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi badan publik berkaitan dengan implementasi seluruh kewajiban badan publik seperti yang diamanatkan oleh UU KIP dengan metode yang selalu dikembangkan dan ditingkatkan untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih terukur dan akurat. Monev keterbukaan informasi badan publik di DIY tahun 2022, dimaksudkan untuk melakukan pemeringkatan dan kejuaraan

keterbukaan informasi badan publik. Tahapan monev meliputi: Pembentukan Tim, Sosialisasi kepada Badan Publik, Pengisian SAQ, Uji Website, Uji Akses, dan Visitasi kepada Badan Publik. Komisi Informasi Daerah memfasilitasi Badan Publik dalam Pemeringkatan keterbukaan Badan Publik KIP dengan pengelolaan portal e-monev dengan alamat: <http://monev-kid.jogjaprov.go.id/>. Tabel di bawah merupakan hasil Monev Keterbukaan Badan Publik Tahun 2022.

Tabel 7.15. Klasifikasi Berdasarkan *Cluster* Badan Publik DIY

No	Klaster	Jumlah Badan Publik	Infor-matif	Menuju Infor-matif	Cukup Infor-matif	Kurang Infor-matif	Tidak Infor-matif	Tidak dinilai
1	PEM.KAB/KOTA	5	5	0	0	0	0	0
2	OPD PEMDA DIY	39	7	2	4	12	14	0
3	OPD PEM KAB/KOTA	162	75	36	22	16	13	0
4	KAPANEWON/KEMANTREN	78	42	16	9	5	6	0
5	PARPOL	10	0	1	2	1	1	5
6	LEMBAGA YUDIKATIF	14	1	1	5	1	2	4
7	INSTANSI VERTIKAL	42	3	0	3	3	10	23
8	LEMBAGA NONSTRUKTURAL	15	12	0	1	0	0	2
9	BUMD	17	2	0	2	3	7	3
	JUMLAH	382	147	56	48	41	53	37

Sumber: KPUD DIY, 2023



Gambar 7.1. Persentase Peringkat Tiap Klaster Monev Badan Publik Tahun 2022

Sumber: KPUD DIY, 2023

d. **Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan

- a) Masih banyak Badan Publik di DIY yang belum masuk pada *cluster informatif*.
- b) Masih banyak sengketa informasi yang masuk dikarenakan kurangnya kesadaran keterbukaan informasi.

2) Solusi

- a) Melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk memastikan instrumen indikator keterbukaan informasi dipahami oleh Badan Publik.
- b) Membangun kesadaran dan kerja sama kemitraan Kelembagaan Badan Publik terhadap keterbukaan informasi dengan sosialisasi UU KIP kepada pemangku kepentingan, badan publik, dan kelompok masyarakat.

Penutup

Penyusunan dokumen LKPJ merupakan upaya Pemda DIY menaati ketentuan perundang-undangan untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerja pembangunan daerah kepada publik. LKPJ Tahun 2022 merupakan paparan komprehensif terhadap capaian pembangunan daerah selama tahun 2022 dan kondisi akhir dari capaian kinerja pembangunan jangka menengah RPJMD DIY 2017-2022. Hal tersebut telah disampaikan dalam LKPJ ini melalui substansi bab per bab sebelumnya yang mendeskripsikan capaian dari tujuan, sasaran, program, kegiatan/sub kegiatan dalam menunjang prioritas tahunan maupun visi-misi Kepala Daerah dalam pembangunan jangka menengah beserta hambatan yang diatasi. Capaian kinerja dalam LKPJ Gubernur DIY 2017-2022 tersebut dapat membuktikan keberhasilan atas target perencanaan strategis dan tapak dasar perbaikan perencanaan tahunan 2024 maupun untuk penyusunan RPJMD DIY 2022-2027.

Tema pembangunan dalam RKPDIY Tahun 2022 dan Perubahannya yakni *“Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta”* disusun berdasarkan konteks pandemi Covid-19 sejak awal 2020 sampai dengan paruh tahun 2022. RKPDIY 2022 memiliki 5 prioritas tahunan yang selaras dengan 8 Sasaran RPJMD DIY 2017-2022 yakni: 1) Pemberdayaan SDM yang berkualitas (sehat, berpendidikan, dan mampu secara ekonomi); 2) Peningkatan Infrastruktur layanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Peningkatan sektor-sektor unggulan dan potensial; 4) Mewujudkan Pembangunan yang merata, selaras dan lestari; 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

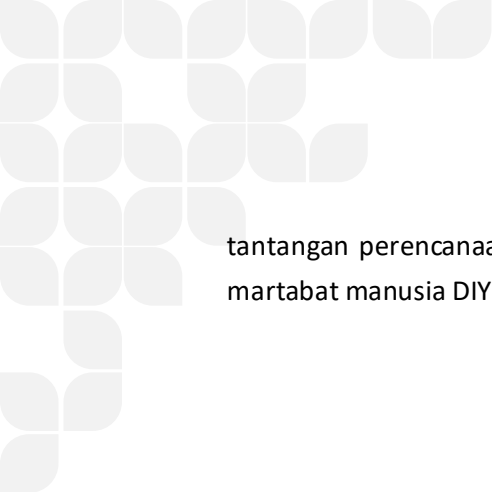
Sampai dengan akhir RPJMD 2017-2022 dari 2 indikator tujuan Pemda yang ada, semua telah mencapai target yaitu Angka *Inclusive Growth Index* (IGI) tercapai 6,24 dari target 6,2. Serta indikator Indeks Reformasi Birokrasi yang tercapai 81,62 dari target 76.

Selanjutnya, terkait dengan indikator kinerja sasaran Pemda atau IKU Pemda terdapat 6 indikator kinerja utama Pemda DIY yang belum memenuhi target RPJMD DIY 2017-2022, yakni a) IPM; b) Indeks Gini; c) Persentase Angka Kemiskinan; d) Pertumbuhan Ekonomi; e) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan f) Indeks Williamson. Namun jika dibandingkan dengan target yang ada di RKPD tahun 2022, terdapat 5 indikator kinerja utama yang tidak tercapai karena jika dibandingkan dengan target di RKPD indikator kinerja Indeks Williamson tercapai.

Kemudian, pada indikator kinerja Program Pemda dari 33 indikator yang ada, terdapat 13 indikator yang belum mencapai target kinerja. Terkait dengan kinerja sasaran urusan pemerintahan umum, dari 86 indikator yang ada, terdapat 10 indikator yang belum mencapai target.

Berdasarkan hasil pembangunan yang telah dikemukakan ada beberapa catatan yang dapat disampaikan. Terkait hasil-hasil pembangunan yang telah terukur baik yang tercapai maupun tidak tercapai, (1) Pemda DIY berkomitmen meningkatkan sinergitas, koordinasi dan kolaboratif dengan kabupaten/kota, berkenaan dengan capaian indikator kinerja yang merupakan hasil agregat kewilayahan; (2) Pemda DIY lebih mempertajam desain perencanaan strategis selanjutnya, dengan meletakkan target capaian sasaran/program sesuai dengan jenjang struktur *cascading*-nya. Dalam rangka menjaga momentum pemulihan sosial ekonomi, program/kegiatan Pemda DIY ke depan dapat menjadi solusi bagi indikator kesejahteraan yang masih menjadi pekerjaan rumah antara lain Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan.

Sebagai penutup, kinerja pembangunan daerah yang sudah tercapai diharapkan dapat menjadi sebuah hasil yang diapresiasi, dan diberikan catatan korektif-solutif terhadap hambatan dan tantangan yang dilalui serta menjadi *lesson learning* untuk perbaikan ke depan. Dalam masa depan yang menantang dan penuh ketidakpastian, mari kembali berintrospeksi untuk bersiap menghadapi perubahan. Seperti kutipan tembang Pupuh IV Gambuh pada Serat Wedhatama "*kudu santosa ing budi teguh, sarta sabar tawakal legaweng ati*" atau harus kuat dalam pikiran teguh serta sabar tawakal tulus dihati untuk menghadapi



tantangan perencanaan strategis mendatang dalam mewujudkan peningkatan martabat manusia DIY yang berkelanjutan.